



**PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA UTARA**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026



**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian,
dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara**



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33);

19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 76);
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia;
8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang memuat visi, misi, program kepala daerah, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program PD, program lintas PD, program kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif, dan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk periode 5 (lima) tahun.

11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 merupakan penjabaran program RPJMD yang memuat Evaluasi Hasil Kinerja Pembangunan Daerah Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 serta kaidah pelaksanaannya.

Pasal 3

- (1) Penetapan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 dimaksud sebagai pedoman dalam:
 - a. penyusunan Renja-PD, KUA dan PPAS, serta APBD Provinsi Tahun Anggaran 2026; dan
 - b. penyusunan RKPD Kabupaten/Kota.
- (2) Penetapan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 mempunyai tujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dengan Provinsi yang berbatasan.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Sistematika RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 meliputi :
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen RKPD;
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Memuat gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan, permasalahan Pembangunan daerah dan isu Strategis Pembangunan;
 - c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
Memuat kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, arah kebijakan ekonomi daerah, serta arah kebijakan keuangan daerah;

- d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Memuat tujuan dan sasaran pembangunan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2026;
- e. BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA
Memuat arahan kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh provinsi, sebagai dasar penyusunan RKPD kabupaten/kota;
- f. BAB VI : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang telah direncanakan dalam RPJMD Provsu Tahun 2025-2029. Rencana program dan kegiatan prioritas mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat serta dukungan program prioritas terhadap indikator kinerja pembangunan;
- g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) yang akan dicapai di tahun 2026;
- h. BAB VIII : PENUTUP
Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026.

- (2) RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 30 September 2025
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
pada tanggal 30 September 2025
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd.

TOGAP SIMANGUNSONG

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025 NOMOR 39

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

APRILLA H. SIREGAR
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19690421 199003 2 003



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR..... viii

BAB I PENDAHULUAN I-1

 1.1. Latar Belakang..... I-1

 1.2. Dasar Hukum I-3

 1.3. Hubungan Antar Dokumen I-5

 1.4. Maksud dan Tujuan..... I-7

 1.5. Sistematika Dokumen RKPD I-7

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH..... II-1

 2.1. Kondisi Umum Daerah II-1

 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi..... II-1

 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-18

 2.1.3 Aspek Daya Saing..... II-44

 2.1.4 Aspek Pelayanan Umum..... II-68

 2.1.5 Standar Pelayanan Minimum II-113

 2.1.6 Emisi Gas Rumah Kaca II-121

 2.2. Evaluasi Hasil Program RKPD Tahun 2024 dan Realisasi
 terhadap Target Akhir RPD Tahun 2023-2026..... II-123

 2.3. Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis Daerah..... II-195

 2.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas
 Dan Sasaran Pembangunan Daerah..... II-195

 2.3.2 Isu Strategis II-205

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.....III-1

 3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH..... III-2

 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah III-3

 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Sumatera Utara III-43

 3.1.3. Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah..... III-54

 3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH III-56

 3.2.1. Kondisi dan Proyeksi Keuangan Daerah III-57

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAHIV-0

 4.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan IV-1

 4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional..... IV-1

 4.1.2 Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Daerah IV-6

 4.2. Prioritas Pembangunan..... IV-135

 4.2.1. Proyek Strategis Nasional IV-135

 4.2.2 Program Prioritas Sumatera Utara IV-137

4.2.3. Penelahaan Pokok Pikiran DPRD Provinsi Sumatera Utara . IV-167

4.2.4. Program Prioritas dan Program Utama OPD..... IV-170

4.2.5. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs IV-203

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA V-1

5.1. Arah Pembangunan Kewilayahan Sumatera Utara..... V-1

5.1.1. Program Direktif Presiden..... V-3

5.1.2. Arah Pengembangan Kewilayahan Berdasarkan Highlight Intervensi..... V-9

5.2. Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan PHTC serta Program Prioritas Provinsi Sumatera Utara V-17

5.3. Keselarasan Pengembangan Wilayah melalui Intervensi Nasional dan provinsi V-63

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH VI-1

6.1 Rencana Program dan Kegiatan yang bersumber dari DanA APBN/APBD/ KPBU/CSR/Hibah/Pinjaman VI-1

6.2 Rencana Program Prioritas Daerah..... VI-2

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VII-1

7.1 Sasaran Indikator Makro Provinsi Sumatera Utara VII-1

7.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) VII-7

7.3 Indikator Kinerja Daerah VII-8

BAB VIII PENUTUP..... VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara	II-2
Tabel 2.2	Wilayah Sungai di Provinsi Sumatera Utara.....	II-5
Tabel 2.3	Cekungan Air Tanah di Provinsi Sumatera Utara	II-5
Tabel 2.4	Sumber Daya Air Permukaan	II-6
Tabel 2.5	Perubahan Penggunaan Lahan Utama Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2016 dan 2022 data terupdate	II-7
Tabel 2.6	Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota menurut Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024	II-16
Tabel 2.7	Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Provinsi Sumatera Utara.....	II-17
Tabel 2.8	Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	II-17
Tabel 2.9	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Lapangan Usaha.....	II-20
Tabel 2.10	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Pengeluaran.....	II-21
Tabel 2.11	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	II-22
Tabel 2.12	Perbandingan Inflasi Sumatera Utara, Nasional dan Wilayah Penghitung Inflasi di Sumatera Utara.....	II-23
Tabel 2.13	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	II-26
Tabel 2.14	Rasio Gini Kabupaten/Kota Sumatera Utara	II-27
Tabel 2.15	Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota Sumatera Utara....	II-30
Tabel 2.16	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.....	II-34
Tabel 2.17	UHH Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara	II-37
Tabel 2.18	IPG Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara	II-40
Tabel 2.19	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.....	II-41
Tabel 2.20	Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.....	II-43
Tabel 2.21	Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara.....	II-46
Tabel 2.22	Harapan Lama Sekolah Menurut Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara.....	II-48
Tabel 2.23	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi Sumatera Utara.....	II-56
Tabel 2.24	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Sumatera Utara	II-56
Tabel 2.25	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/Kota Sumatera Utara	II-59
Tabel 2.26	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Provinsi Sumatera Utara.....	II-62
Tabel 2.27	Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum Sumatera Utara	II-62
Tabel 2.28	Deviden BUMD kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	II-65
Tabel 2.29	Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Sumatera Utara	II-66

Tabel 2.30	Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Sumatera Utara	II-68
Tabel 2.31	Indeks Pelayanan Publik Provinsi Sumatera Utara.....	II-69
Tabel 2.32	Indeks Integritas Provinsi Sumatera Utara.....	II-69
Tabel 2.33	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Utara.....	II-70
Tabel 2.34	Persentase Penegakan Perda Provinsi Sumatera Utara.....	II-71
Tabel 2.35	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Utara	II-72
Tabel 2.36	Indikator Pendidikan Provinsi Sumatera Utara	II-75
Tabel 2.37	Indeks Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	II-76
Tabel 2.38	Prevalensi Stunting Provinsi Sumatera Utara.....	II-77
Tabel 2.39	Perkembangan Penemuan dan Pengobatan TBC Provinsi Sumatera Utara	II-78
Tabel 2.40	Universal Health Coverage Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	II-79
Tabel 2.41	Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem Provinsi Sumatera Utara	II-80
Tabel 2.42	Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Haji Medan	II-81
Tabel 2.43	Indikator Kinerja Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-81
Tabel 2.44	Jenis Permukaan Jalan Baik, Sedang, Dan Rusak di Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara.....	II-82
Tabel 2.45	Panjang jalan Provinsi menurut permukaan di Provinsi Sumatera Utara.....	II-82
Tabel 2.46	Progres RTRW Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara ...	II-84
Tabel 2.47	Kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang dan Pelaksanaan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara.....	II-85
Tabel 2.48	Capaian Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.....	II-86
Tabel 2.49	Capaian Indikator Satpol PP Provinsi Sumatera Utara	II-87
Tabel 2.50	Capaian Indikator Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara	II-87
Tabel 2.51	Daerah Kawasan Narkoba di Provinsi Sumatera Utara	
Tabel 2.52	Kondisi Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Utara.	II-89
Tabel 2.53	Capaian Indikator Sosial Provinsi Sumatera Utara.....	II-88
Tabel 2.54	Capaian Indikator Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara...	II-89
Tabel 2.55	Capaian Indikator Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara	II-90
Tabel 2.56	Capaian Indikator Ketahanan Pangan dan Produksi Peternakan Provinsi Sumatera Utara	II-91
Tabel 2.57	Capaian Indikator Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara.....	II-92
Tabel 2.58	Capaian Indikator Perhubungan Provinsi Sumatera Utara ..	II-92
Tabel 2.59	Capaian Indikator Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara	II-93
Tabel 2.60	Capaian Indikator Koperasi, Usaha Kecil Menengah	II-94
Tabel 2.61	Capaian Indikator Penanaman Modal Provinsi Sumatera Utara.....	II-94
Tabel 2.62	Capaian Kinerja Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara	II-95
Tabel 2.63	Data Statistik Sektor Yang Terintegrasi Provinsi Sumatera Utara	II-96

Tabel 2.64	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Pengamanan Informasi dan Persandian Provinsi Sumatera Utara	II-96
Tabel 2.65	Capaian Indikator Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara....	II-97
Tabel 2.66	Capaian Indikator Perpustakaan Provinsi Sumatera Utara..	II-98
Tabel 2.67	Jumlah Perpustakaan Terakreditasi di Provinsi Sumatera Utara.....	II-98
Tabel 2.68	Capaian Indikator Kearsipan Provinsi Sumatera Utara	II-99
Tabel 2.69	Capaian Indikator Pariwisata Provinsi Sumatera Utara	II-100
Tabel 2.70	Capaian Indikator Perkebunan Provinsi Sumatera Utara ..	II-100
Tabel 2.71	Capaian Indikator Kehutanan Provinsi Sumatera Utara....	II-101
Tabel 2.72	Kondisi Kelistrikan di Provinsi Sumatera Utara	II-102
Tabel 2.73	Capaian Indikator Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara	II-104
Tabel 2.74	Capaian Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara	II-105
Tabel 2.75	Capaian Bidang Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara	II-106
Tabel 2.76	Capaian Indikator Pengelolaan Keuangan Provinsi Sumatera Utara	II-107
Tabel 2.77	Capaian Indikator Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara	II-107
Tabel 2.78	Indikator Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara	II-108
Tabel 2.79	Capaian Indikator Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara	II-108
Tabel 2.80	Capaian Indikator Badan Penghubung Provinsi Sumatera Utara	II-109
Tabel 2.81	Capaian Indikator Pengawasan Provinsi Sumatera Utara..	II-109
Tabel 2.82	Capaian Indikator Sekretariat Dewan Provinsi Sumatera Utara.....	II-111
Tabel 2.83	Capaian Indikator Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.....	II-111
Tabel 2.84	Capaian SPM Pendidikan Provinsi Sumatera Utara	II-115
Tabel 2.85	Capaian SPM Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	II-116
Tabel 2.86	SPM Bidang Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Utara ...	II-117
Tabel 2.87	SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sumatera Utara	II-118
Tabel 2.88	Realisasi SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara ...	II-118
Tabel 2.89	Capaian SPM Sosial Provinsi Sumatera Utara	II-118
Tabel 2.90	Capaian Indikator Kinerja Utama Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 s.d Triwulan IV	II-124
Tabel 2.91	Capaian Indikator IKM dan IKU, IKU dan IKK Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 sampai dengan Triwulan IV	II-128
Tabel 2.92	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah Tahun 2024 Triwulan IV dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sedang, Rendah dan Sangat Rendah	II-152
Tabel 2.93	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2024.....	II-157

Tabel 2.94	Peringkat Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah Tahun 2024 Triwulan IV	II-164
Tabel 2.95	Peringkat Persentase Rata-rata Capaian Realisasi Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2024 Triwulan IV.....	II-166
Tabel 2.96	Capaian Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 sampai dengan triwulan IV..	II-168
Tabel 3.1	Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Provinsi di Pulau Sumatera (Persen).....	III-4
Tabel 3.2	PDRB Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Tahun 2023-2024 Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah).....	III-8
Tabel 3.3	Distribusi PDRB Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Tahun 2023-2024 Menurut Lapangan Usaha (persen)	III-10
Tabel 3.4	Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Sumatera Utara Tahun 2023-2024 Menurut Lapangan Usaha.....	III-13
Tabel 3.5	PDRB Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (miliar rupiah)	III-15
Tabel 3.6	Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Sumatera Utara Menurut Pengeluaran (persen)	III-17
Tabel 3.7	Kinerja Neraca Perdagangan Luar Negeri Sumatera Utara Tahun 2023-2024 (000 US\$)	III-19
Tabel 3.8	Kinerja Nilai FoB (ribu US\$) Ekspor Sumatera Utara Menurut Sektor dan Perubahan (Δ) Bulan Desember 2024, serta Periode Januari – Desember 2023 dan 2024	III-22
Tabel 3.9	Kinerja Nilai CIF (ribu US\$) Impor Menurut Golongan Penggunaan Barang dan Perubahan (Δ) Bulan Desember 2024 serta Periode Januari–Desember 2023 dan 2024.....	III-23
Tabel 3.10	Kondisi Perdagangan Luar Negeri Sumatera Utara dengan Negara Mitra Utama Tahun 2024 (ribu US\$)	III-25
Tabel 3.11	Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Sumatera Utara Agustus 2023–Agustus 2024	III-29
Tabel 3.12	Karakteristik Pengangguran di Sumatera Utara Agustus 2023 - Agustus 2024	III-31
Tabel 3.13	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Sumatera Utara Menurut Daerah, Maret 2024-September 2024	III-36
Tabel 3.14	Perbandingan Capaian Indikator Ekonomi Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.....	III-41
Tabel 3.15	Pertumbuhan Ekonomi Negara-negara Dunia dan Proyeksinya Tahun 2025-2026	III-45
Tabel 3.16	Target Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2025-2026	III-48
Tabel 3.17	Realisasi Indikator Ekonomi Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Dan Targetnya Tahun 2025-2026.....	III-52
Tabel 3.18	Kinerja Dan Proyeksi Pendapatan Daerah pada Struktur Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023-2026	III-59
Tabel 3.19	Kinerja Dan Proyeksi Belanja Daerah pada Struktur Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023-2026	III-65
Tabel 3.20	Kinerja Dan Proyeksi Pembiayaan Daerah pada Struktur Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023-2026	III-70
Tabel 4.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara.....	IV-8
Tabel 4.2	Target Sasaran Indikator Makro Nasional dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026	IV-15

Tabel 4.3	Konsistensi Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun Pelaksanaan 2026 dan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026.....	IV-16
Tabel 4.4	Pencapaian Visi melalui Pencapaian Kinerja Indikator	IV-21
Tabel 4.5	Arah Kebijakan Bidang Urusan Pemerintahan Provinsi.....	IV-47
Tabel 4.6	Outcome Prioritas, Program, dan Subkegiatan dalam mendukung Asta Cita Tahun 2026	IV-55
Tabel 4.7	Keselarasan Kegiatan Prioritas Utama Nasional	IV-77
Tabel 4.8	Proyek Strategis Nasional RKP 2026 di Provinsi Sumatera Utara	IV-135
Tabel 4.9	Rekapitulasi Progress Verifikasi Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	IV-168
Tabel 4.10	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Outcome, Indikator dan Program Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Utara.....	IV-171
Tabel 4.11	Dukungan PD Provinsi Sumatera Utara dalam Pencapaian Target TPB (Berdasarkan RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026).....	IV-205
Tabel 5.1	Arah Pengembangan Kawasan Pertumbuhan.....	V-9
Tabel 5.2	Arah Pengembangan Kawasan Komoditi Unggulan.....	V-11
Tabel 5.3	Arah Pengembangan Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi	V-12
Tabel 5.4	Arah Pengembangan Kawasan Afirmasi	V-14
Tabel 5.5	Arah Pengembangan Kawasan Konservasi/Rawan Bencana	V-14
Tabel 5.6	Arah Pengembangan Provinsi Sumatera Utara Melalui Highligh Intervensi Pemerintah.....	V-15
Tabel 5.7	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan PHTC Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026	V-19
Tabel 5.8	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan Program Prioritas Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026	V-24
Tabel 5.9	Keselarasan Intervensi Pembangunan Kewilayahan	V-64
Tabel 5.10	Dukungan Provinsi Sumatera Utara terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) RPJMN 2025-2029	V-126
Tabel 5.11	Target Makro Peningkatan Pendapatan	V-169
Tabel 5.12	Target Makro Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Kabupaten/Kota Tahun 2026	V-172
Tabel 5.13	Target Makro Peningkatan Daya Saing SDM Kabupaten/ Kota Tahun 2026.....	V-174
Tabel 5.14	Target Makro Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota Tahun 2026.....	V-176
Tabel 6.1	Rencana Pagu Perangkat Daerah Tahun 2026	VI-10
Tabel 6.2	Daftar Tindak Lanjut Dukungan Pemerintah Daerah atas Kebijakan Prioritas Nasional Tahun 2026	VI-14
Tabel 7.1	Target Sasaran Indikator Makro Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026.....	VII-1
Tabel 7.2	Keselarasan Target Sasaran Indikator Makro Nasional dengan Provinsi Sumatera Utara	VII-2
Tabel 7.3	Keselarasan Indikator Utama Pembangunan RKP dengan RKPD Provinsi Sumatera Utara	VII-2
Tabel 7.4	Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026	VII-7
Tabel 7.5	Target Indikator Kinerja Daerah (IKD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026	VII-9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Hubungan Antar Dokumen I-5

Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi II-1

Gambar 2.2 Kawasan Geopark Kaldera Toba..... II-11

Gambar 2.3 Destinasi Super Prioritas Danau Toba..... II-12

Gambar 2.4 Peta Destinasi Pariwisata Daerah Provinsi Sumatera Utara II-13

Gambar 2.5 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Hasil Sensus Penduduk (SP) Provinsi Sumatera Utara II-15

Gambar 2.6 Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 II-15

Gambar 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara II-21

Gambar 2.8 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara II-25

Gambar 2.9 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Sumatera Utara dan Nasional II-26

Gambar 2.10 Rasio Gini Provinsi Sumatera Utara dan Nasional II-28

Gambar 2.12 Angka Pengangguran, Menurut Jenis Kelamin, dan Wilayah Provinsi Sumatera Utara..... II-31

Gambar 2.13 Perbandingan Tingkat Pengangguran Sumatera Utara dan Nasional..... II-31

Gambar 2.13 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Utara dengan Nasional..... II-34

Gambar 2.15 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Utara II-35

Gambar 2.16 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Jenis Kelamin II-35

Gambar 2.17 UHH Sumatera Utara dan Nasiona..... II-37

Gambar 2.18 UHH Laki-Laki dan Perempuan Provinsi Sumatera Utara II-38

Gambar 2.18 Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Sumatera Utara dan Nasional II-40

Gambar 2.19 Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender Sumatera Utara dan Nasional II-42

Gambar 2.20 Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender Sumatera Utara dan Nasional II-44

Gambar 2.21 Indeks Pembangunan Keluarga (ibangga) Sumatera Utara II-46

Gambar 2.23 Rata-Rata Lama Sekolah Sumatera Utara dan Nasional .. II-49

Gambar 2.24 Harapan Lama Sekolah Sumatera Utara dan Nasional II-51

Gambar 2.25 Perbandingan TPAK Provinsi Sumatera Utara II-60

Gambar 2.26 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara II-62

Gambar 2.26 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Sumatera Utara II-65

Gambar 2.27 Jumlah UMKM di Provinsi Sumatera Utara..... II-66

Gambar 2.28 Jumlah Koperasi Aktif di Provinsi Sumatera Utara..... II-67

Gambar 2.29 Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Sumatera Utara II-76

Gambar 3. 1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2023-2024 (y-on-y) (persen)..... III-6

Gambar 3. 2 Kinerja Nilai Neraca Perdagangan Luar Negeri Sumatera Utara Untuk Tahun 2024 (000.000 US\$)..... III-21

Gambar 3. 3 Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Tahun
2023 s/d Tahun 2024 (Milyar Rupiah) III-27

Gambar 3. 4 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status
Pekerjaan dan Kegiatan Formal/ Informal,
Agustus 2023– Agustus 2024..... III-32

Gambar 3. 5 Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi
Sumatera Utara 2022- 2023 III-34

Gambar 3. 6 Perkembangan Kemiskinan Sumatera Utara Maret
2023-September 2024..... III-35

Gambar 3. 7 Perkembangan Gini Ratio Sumatera Utara Maret
2024 – September 2024 III-38

Gambar 3. 8 Tingkat Inflasi Year-on-Year (Y-on-Y) Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2023-2025 (dalam persen)..... III-39

Gambar 4.1 Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2026 IV-2

Gambar 4.2 Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2026..... IV-5

Gambar 5.1 Kawasan Pengembangan Wilayah Sumatera Utara..... V-2





BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Penyusunan perencanaan pembangunan ini merupakan awal dari proses siklus pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; 2) Perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah; 3) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; 4) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; 5) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional; 6) Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan 7) Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*achievable*), memperhatikan ketersediaan sumber daya (*resources availability*) dan memperhatikan fungsi waktu (*times*), yang disingkat SMART.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026, merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan arah kebijakan Tahap I (2025-2029) dari RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 dan arah pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Penyusunan RKPD Tahun 2026 berpedoman pada Visi, Misi, dan program kepala daerah terpilih yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja, dan program yang termuat dalam RPJMD 2025-2029. Selain itu, RKPD Tahun 2026 juga mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.

RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 juga disusun dengan memperhatikan program strategis nasional di Sumatera Utara yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2026 dan mensinergikan program prioritas Sumatera Utara dengan kabupaten/kota serta memanfaatkan keunggulan wilayah. Hal tersebut merupakan wujud



pembangunan kewilayahan yang tematik, holistik, integratif dan berbasis spasial yang dilaksanakan melalui upaya membangun kesepahaman dari perencanaan sampai proses pelaksanaan dengan mekanisme koordinatif antar wilayah, lintas sektor. Pengembangan pola kerjasama antara wilayah menjadi bagian penting dalam mendukung manajemen distribusi sumber daya dalam mengembangkan wilayah di Sumatera Utara.

Penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 dilaksanakan melalui pendekatan :

- a. *Top-down*, yaitu pendekatan dengan memperhatikan Program Prioritas dan kebijakan Pusat di daerah.
- b. *Bottom-up*, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang Desa, Kecamatan dan Kabupaten/Kota. Hasil dari Musrenbang Desa, Kecamatan dan Kabupaten/Kota akan diakomodir dan disampaikan pada Rakortek Renbang, Pra Musrenbang dan Musrenbang Provinsi Sumatera Utara
- c. *Teknokratik*, yaitu pendekatan perencanaan yang mengedepankan pengetahuan, ilmu dan teknologi. berupa saran dan pendapat dari akademisi dan praktisi pembangunan.
- d. *Politik*, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodir pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara.
- e. *Partisipatif*, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodir hak masyarakat yang bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan melalui jalur khusus komunikasi yang gunanya untuk menampung segala aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Penyusunan RKPD Tahun 2026 berorientasi Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS), selain itu penyusunan RKPD Tahun 2026 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, terukur, akuntabel, berorientasi pada hasil (*outcome*), terpadu lintas sektor, inovatif, kreatif, berbasis risiko (*riskbased planning*), dan berbasis pada riset (*research-based planning*), dengan pendekatan *money follow programme* dan *programme follow result*, dan berprinsip pada pembangunan yang berkelanjutan.

Penyusunan dokumen RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2024, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional di daerah yang meliputi kebijakan program strategis nasional, amanat pembangunan global/nasional/regional, regulasi yang berlaku, dan dinamika agenda pembangunan nasional lainnya.

Proses penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 dilaksanakan sesuai ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2026 yang disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan Penyusunan RKPD
- b. Penyusunan Rancangan Awal RKPD
- c. Penyusunan Rancangan RKPD
- d. Pelaksanaan Rakortekrenbang, Pra Musrenbang Zona dan Musrenbang RKPD
- e. Perumusan Rancangan Akhir RKPD
- f. Penetapan RKPD

RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 berkaitan erat dengan dokumen perencanaan lainnya, yaitu Rencana Strategis (Renstra) Perangkat



Daerah, serta Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Dokumen ini menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun program kerja, kegiatan, dan target pembangunan tahunan sesuai arah kebijakan RPJMD yang baru berlaku. RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 selanjutnya menjadi dasar utama dalam penyusunan RAPBD, yang mencerminkan kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran daerah, memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan daerah.

1.2. Dasar Hukum

Selain berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), program strategis nasional, dan pedoman umum penyusunan RKPD, maka penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 juga merujuk pada serangkaian peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);



9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011. Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 5209;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-



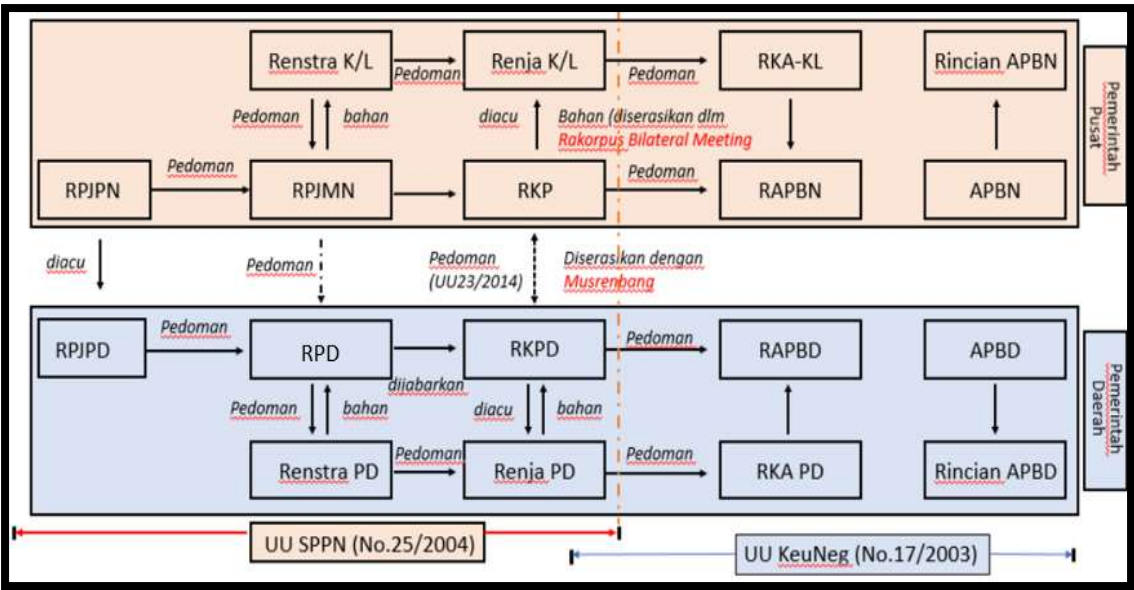
- 2037; (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 33);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah, Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatra Utara Nomor 66;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 76);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 - 2029.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 merupakan sebuah dokumen perencanaan teknis dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dalam rangka menjamin keterkaitan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan yang mana RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 mempunyai hubungan/keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

Rencana Pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 yang disinergikan dengan RPJMN Tahun 2025 - 2029 menjadi dasar penyusunan RKPD Tahun 2026 yang diselaraskan dengan landasan hukum yang menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan pembangunan pusat dan daerah yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana digambarkan pada skema hubungan antar dokumen berikut:

Gambar 1.1 Skema Hubungan Antar Dokumen



Sumber : Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 mempunyai hubungan/keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, sebagaimana yang dijelaskan berikut ini:



- **Hubungan dengan RKP tahun 2026**

RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan konsistensi dengan RKP Tahun 2026 yang meliputi : sasaran, indikator, arah kebijakan, prioritas, program prioritas, program hasil terbaik cepat (PHTC) pembangunan dan target indikator kinerja urusan.

- **Hubungan dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 - 2029**

RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 yang meliputi tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, program prioritas, target indikator kinerja tahun 2026;

- **Hubungan dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026**

RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah yang juga disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen perencanaan strategis perangkat daerah yang digunakan dalam penyempurnaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026. Keselarasan dan konsistensi antara kedua dokumen ini meliputi permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target kinerja dan pagu indikatif tahun 2026.

- **Hubungan dengan KUA PPAS dan R-APBD Tahun 2026**

RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) serta bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Sumatera Utara (R-APBD) Tahun 2026. Keterkaitan antar dokumen ini mencakup penyelarasan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif dalam rancangan KUA PPAS dan R-APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 dengan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif yang terdapat dalam RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026.

- **Hubungan dengan RTRW**

Penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai rencana pola ruang, rencana struktur ruang, dan rencana kawasan strategis Provinsi Sumatera Utara sebagai dasar untuk memantapkan lokasi kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.

- **Hubungan dengan TPB/SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)**

Dalam penyusunan RKPD telah memuat empat pilar pembangunan TPB, yang telah masuk dalam program kegiatan di RKPD.

- **Hubungan dengan SPM**

Dalam penyusunan RKPD telah memuat indikator SPM ke dalam indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pelaksana SPM.

Selain itu RKPD Provinsi Sumatera Utara juga menjadi acuan bagi Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD Kabupaten/Kota dalam penyelarasan program dan kegiatan yang terintegrasi.



1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2026 adalah sebagai pedoman perencanaan dan penganggaran daerah tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029.

Sedangkan tujuan disusunnya Dokumen RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 adalah sebagai:

1. Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026;
2. Menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026;
3. Menjadi acuan penyelarasan prioritas pembangunan provinsi dengan nasional dan antara provinsi dengan kabupaten/kota.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2026, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN	Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen RKPD.
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	Memuat kondisi umum daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan, permasalahan pembangunan daerah dan isu Strategis pembangunan.
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	Memuat kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan; Arah kebijakan ekonomi daerah; serta Arah kebijakan keuangan daerah.
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	Memuat sasaran pembangunan daerah dan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2026.
BAB V	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA	Memuat tentang arahan kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh provinsi, sebagai dasar penyusunan RKPD kabupaten/kota



BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang telah direncanakan dalam RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026. Rencana program dan kegiatan prioritas mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat serta dukungan program prioritas terhadap Indikator kinerja pembangunan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) yang akan dicapai di Tahun 2026.

BAB VIII PENUTUP

Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026.





BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

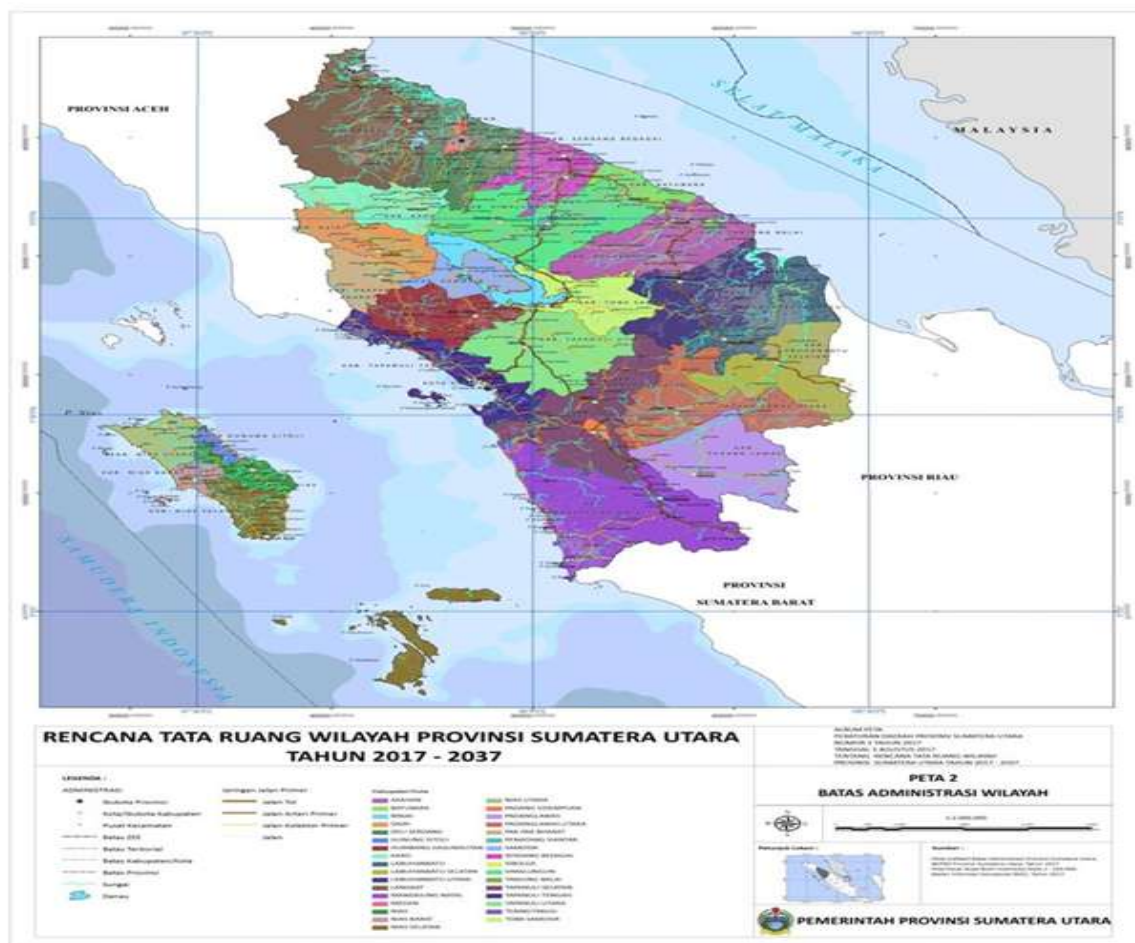
2.1.1.1 Aspek Geografi

1. Luas Wilayah Administrasi

Provinsi Sumatera Utara berada di bagian barat Indonesia, merupakan salah satu Provinsi yang terletak di Pulau Sumatera pada 1° - 4° Lintang Utara dan 98° - 100° Bujur Timur. Berdasarkan karakteristik wilayahnya terdiri dari daerah pantai, dataran rendah dan dataran tinggi serta pegunungan Bukit Barisan yang membujur dari Utara ke Selatan. Provinsi Sumatera Utara berbatasan dengan wilayah lain yaitu:

- Sebelah Utara : Provinsi Aceh
- Sebelah Timur : Selat Malaka
- Sebelah Selatan : Provinsi Riau dan Sumatera Barat
- Sebelah Barat : Samudera Hindia

Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi



Sumber: Perda No. 2 Tahun 2017 tentang RTRW Sumatera Utara Tahun 2017-2023

Provinsi Sumatera Utara berada di jalur pelayaran internasional Selat Malaka yang dekat dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand. Dengan posisi strategis itu, Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi keuntungan geografis menjadi penghubung jalur perdagangan internasional, yang dampaknya



akan menggerakkan perekonomian di wilayah-wilayah lain di pulau Sumatera. Berdasarkan Badan Informasi Geospasial Tahun 2021 dan Revisi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Tahun 2022, total luas wilayah Provinsi Sumatera Utara kurang lebih sebesar 11.131.141,3 Ha(111.311,41 km²) yang terdiri dari luas daratan 7.246.258,89 Ha (65,10%) dan luas lautan sebesar 3.884.882,38 Ha (34,90%). Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2023, secara administratif Provinsi Sumatera Utara terbagi menjadi 33 kabupaten/kota, terdiri dari 25 kabupaten dan 8 kota, 455 Kecamatan, 5.417 Desa dan 693 Kelurahan. Jika dilihat dari luas wilayah daerah menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, luas wilayah daerah terbesar adalah Kabupaten Mandailing Natal dengan wilayah daratan terluas yaitu: 6.449,94 Ha (6.449,94 km²) atau 8,90% dari total wilayah daratan Sumatera Utara diikuti Kabupaten dengan wilayah daratan terluas kedua yaitu: 614.003,51 Ha (6.140,04 km²) atau 8,47% dari total wilayah daratan Sumatera Utara, sedangkan wilayah daratan terkecil adalah Kota Sibolga dengan luas 1.232,09 Ha (12,32 km²) atau sekitar 0,02% dari total luas daratan Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara terbagi menjadi 4 zona wilayah berdasarkan karakteristik geografis kewilayahan, yakni:

- 1. Wilayah Pantai Timur
- 2. Wilayah Pantai Barat
- 3. Wilayah Dataran Tinggi
- 4. Wilayah Kepulauan Nias

Pembagian wilayah berdasarkan karakteristik geografisnya bertujuan untuk memudahkan dalam hal menentukan tema pembangunan pada tiap wilayah yang dikelompokkan. Selanjutnya rincian luas wilayah Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten/Kota	Ibukota	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Luas Wilayah
Nias	Gido	10	170	0	903
Mandailing Natal	Panyabungan	23	377	27	6.547
Tapanuli Selatan	Sipirok	15	211	37	4.201
Tapanuli Tengah	Pandan	20	159	56	2.308
Tapanuli Utara	Tarutung	15	241	11	3.896
Toba	Balige	16	231	13	2.292
Labuhanbatu	Rantau Prapat	9	75	23	2.772
Asahan	Kisaran	25	177	27	3.738
Simalungun	Pamatang Raya	32	386	27	4.601
Dairi	Sidikalang	15	161	8	2.084
Karo	Kabanjahe	17	259	10	2.207
Deli Serdang	Lubuk Pakam	22	380	14	2.581
Langkat	Stabat	23	240	37	6.142
Nias Selatan	Teluk Dalam	35	459	2	2.532
Humbang Hasundutan	Dolok sanggul	10	153	1	2.352
Pakpak Bharat	Salak	8	52	0	1.366
Samosir	Pangururan	9	128	6	1.850
Serdang Bedagai	Sei Rampah	17	237	6	1.950
Batu Bara	Limapuluh	12	141	10	889
Padang Lawas Utara	Gunung Tua	12	386	2	3.914



Kabupaten/Kota	Ibukota	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Luas Wilayah
Padang Lawas	Sibuhuan	12	303	1	3.914
Labuhanbatu Selatan	Kota Pinang	5	52	2	3.080
Labuhanbatu Utara	Aek Kanopan	8	82	8	3.687
Nias Utara	Lotu	11	112	1	1.240
Nias Barat	Lahomi	8	105	0	465
Kota Sibolga	Sibolga	4	0	17	13
Kota Tanjung Balai	Tanjung Balai	6	0	31	60
Kota Pematangsiantar	Pematangsiantar	8	0	53	76
Kota Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	5	0	35	39
Kota Medan	Medan	21	0	151	279
Kota Binjai	Binjai	5	0	37	94
Kota Padangsidimpuan	Padangsidimpuan	6	42	37	159
Kota Gunungsitoli	Gunungsitoli	6	98	3	209
Sumatera Utara	Medan	455	5.417	693	72.438

Sumber : Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025

2. Letak dan Kondisi Geografis

Provinsi Sumatera Utara dengan ibukotanya Kota Medan terletak di bagian Utara Pulau Sumatera, membentang dari Barat ke Timur antara 96° 51’ - 100° 29’ Bujur Timur dan dari Utara ke Selatan antara 0° 50’ - 4° 18’ Lintang Utara. Di sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka, di sebelah Selatan dengan Provinsi Riau dan Sumatera Barat, di sebelah Utara dengan Provinsi Aceh dan di sebelah Barat dengan Samudera Hindia. Berbatasan dengan wilayah laut, Selat Malaka di Timur dan Samudera Hindia di bagian Barat menjadikan Sumatera Utara memiliki dua pantai sekaligus di kedua sisi kiri dan kanan wilayahnya, yang sering disebut Pantai Barat dan Pantai Timur. Provinsi Sumatera Utara termasuk 10 provinsi terluas di Indonesia, dengan daratan sebagian besar berada di daratan Pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di Pulau Nias, Pulau-pulau Batu serta beberapa pulau kecil di perairan bagian Barat maupun di bagian Timur Pulau Sumatera.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025, secara administratif Provinsi Sumatera Utara terbagi menjadi 33 kabupaten/kota, terdiri dari 25 kabupaten dan 8 kota, 455 Kecamatan, 5.417 Desa dan 693 Kelurahan. Jika dilihat dari luas wilayah daerah menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, luas wilayah daerah terbesar adalah Kabupaten Mandailing Natal dengan wilayah daratan terluas yaitu: 654.656,70 Ha (6.546,57 km²) atau 8,90% dari total wilayah daratan Sumatera Utara diikuti Kabupaten Langkat dengan wilayah daratan terluas kedua yaitu: 614.207,20 Ha (6.142,07 km²) atau 8,47% dari total wilayah daratan Sumatera Utara, sedangkan wilayah daratan terkecil adalah Kota Sibolga dengan luas 1.264,50 Ha (12,65 km²) atau sekitar 0,02% dari total luas daratan Provinsi Sumatera Utara.

Provinsi Sumatera Utara berada pada jalur strategis pelayaran internasional Selat Malaka dan berada di persimpangan antara Samudera Hindia dan Laut Cina Selatan. Kedekatan dengan Selat Malaka yang merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, yang mana sekitar 40% perdagangan dunia melewati selat ini setiap tahunnya, memungkinkan Sumatera Utara memiliki pengawasan dan akses langsung ke jalur ini. Selain itu, Sumatera Utara juga menjadi gerbang maritim yang menjadikannya



sebagai pintu masuk bagi kapal-kapal internasional ke Indonesia dari arah barat dan berperan penting dalam rantai logistik global. Provinsi Sumatera Utara yang bertetangga dan cukup dekat dengan negara-negara di Selat Malaka seperti Singapura, Malaysia dan Thailand menjadi titik penting dalam hubungan diplomatik dan ekonomi regional. Pantai barat Sumatera Utara yang menghadap langsung ke Samudera Hindia membuat Sumatera Utara memiliki akses langsung ke Samudera Hindia, hal ini memberi peluang untuk pengembangan pelabuhan dan industri maritim di masa depan.

3. Geologi

Wilayah Provinsi Sumatera Utara dipengaruhi oleh sejarah geologi yang sangat panjang dan kompleks, karena wilayah ini berada di zona pertemuan antara beberapa lempeng tektonik utama dunia, seperti Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik. Hal ini membuat provinsi ini memiliki beragam formasi geologi yang unik, termasuk gunung berapi, lapisan batuan, dan struktur tektonik yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti potensi sumber daya alam, bencana alam, serta kondisi tanah untuk pertanian. Formasi batuan di Provinsi Sumatera Utara terdiri atas:

- Batuan beku hasil pendinginan magma dengan daya dukung batuan tinggi; Batuan beku hasil erupsi gunung api dengan daya dukung cukup tinggi;
- Batuan malihan atau metamorf, dengan daya dukung kuat tidak berlapis;
- Batuan sedimen dari non clastic, dengan daya dukung kecil atau sedang; dan
- Batuan sedimen dengan porositas kecil.

Kondisi batuan hasil aktivitas tektonik tektonik yang terus-menerus terjadi, yang menghasilkan berbagai formasi geologi seperti gunung berapi, batuan vulkanik, sedimen, dan metamorf. Potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan mineral lainnya, menjadikan Sumatera Utara sebagai wilayah yang sangat penting dari segi geologi. Namun, wilayah ini juga menghadapi tantangan besar, seperti ancaman bencana alam yang disebabkan oleh aktivitas tektonik, yang harus dikelola dengan hati-hati untuk mengurangi dampak buruk bagi masyarakat.

4. Hidrologi

Hidrologi Provinsi Sumatera Utara terbagi atas 360 DAS meliputi dari 67 DAS yang masuk dalam pengelolaan BPDAS Wampu Sei Ular, dan 293 DAS yang masuk BPDAS Asahan Barumun. Daerah Aliran Sungai di Sumatera Utara dikelompokkan menjadi dua kelompok prioritas penanganan berdasarkan kondisi daya dukungnya, yaitu: DAS Prioritas (DAS yang dipulihkan daya dukungnya) sebesar 11,67 persen dan DAS Prioritas II (DAS yang dipertahankan daya dukungnya) sebesar 88,33 persen. DAS yang perlu penanganan adalah DAS yang dipulihkan daya dukungnya. Di Provinsi Sumatera Utara, ada 7 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang telah ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Utara untuk penanganannya, yakni: 1. Daerah Aliran Sungai (DAS) Asahan Toba 2. Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru 3. Daerah Aliran Sungai (DAS) Nias 4. Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Gadis 5. Daerah Aliran Sungai (DAS) Wampu 6. Daerah Aliran Sungai (DAS) Deli, dan 7. Daerah Aliran Sungai (DAS) Padang Pengelompokan Wilayah Sungai (WS) di Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 11 (sebelas) WS, yakni:



Tabel 2.2 Wilayah Sungai di Provinsi Sumatera Utara

No	Wilayah Sungai	Jumlah DAS	Debit Andalan M3/DTK	Keterangan
1	Alas – Singkil	8	21.36	Lintas Provinsi
2	Batang Natal – Batang Batahan	40	18.55	Lintas Provinsi
3	Rokan	15		Lintas Provinsi
4	Belawan – Ular – Padang	11	29.23	Strategis Nasional
5	Toba – Asahan	1	1.48	Strategis Nasional
6	Batang Angkola – Batang Gadis	5	5.93	Lintas Kab/Kota
7	Wampu – Besitang	13	1.32	Lintas Kab/Kota
8	Bah Bolon	5	8.76	Lintas Kab/Kota
9	Barumon – Kualuh	3	83.70	Lintas Kab/Kota
10	Nias	43	0.54	Lintas Kab/Kota
11	Sibundong – Batang Toru	16	19.66	Lintas Kab/Kota
12	Lain-lain	200		

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai (WS)

Beberapa sungai utama di Provinsi Sumatera Utara memiliki debit air yang cukup besar seperti Sungai Wampu, Sungai Ular, Sungai Barumon, Sungai Silau, Sungai Asahan, Sungai Bah Bolon, Sungai Belawan, Sungai Padang, Sungai Mola dan Sungai Batang Gadis yang dapat dimanfaatkan untuk sumber air baku irigasi, air bersih dan air minum selain itu juga sebagai sumber pembangkit tenaga listrik (PLTA), sehingga perlu dilakukan upaya konservasi air dengan menjaga tutupan hutan dan pengendalian kegiatan budidaya di Daerah Aliran Sungai. Di samping sungai Provinsi Sumatera Utara juga memiliki danau dengan debit air cukup besar yang berpotensi bagi pengembangan sistem pengairan, penyediaan air baku dan sumber energi baru terbarukan. Selain itu terdapat potensi air tanah berupa Cekungan Air Tanah (CAT) di Provinsi Sumatera Utara yang tersebar yakni:

Tabel 2.3 Cekungan Air Tanah di Provinsi Sumatera Utara

No.	Nama CAT	Luas (ha)	Lokasi
1	Langsa	85.300	Kab. Langkat dan Aceh
2	Medan	1.978.600	Kota Medan, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, Kota Pematangsiantar, Kab. Langkat, Kab. Deli Serdang, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Karo, Kab. Asahan, Kab. Batubara, Kab. Simalungun, Kab. Labuhanbatu, dan Kab. Labuhanbatu Utara.
3	Kutacane	35.100	Kab. Karo dan Aceh
4	Sibulus Salam	363.200	Kab. Tapanuli Tengah dan Aceh
5	Sidikalang	243.800	Kab. Dairi, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Samosir, dan kab. Humbang Hasundutan, Kab. Pakpak Bharat
6	Samosir	64.800	Kab. Samosir
7	Porsea-Prapat	48.300	Kab. Toba Samosir, Simalungun
8	Tarutung	87.500	Kab. Tapanuli Utara, Humbang hasundutan dan Toba Samosir



No.	Nama CAT	Luas (ha)	Lokasi
9	Onolimbu/Gunung Sitoli	4.200	Kota Gunungsitoli, Kab. Nias, dan Kab. Nias Selatan
10	Lahewa	2.000	Kab. Nias Utara
11	Sirombu	1.700	Kab. Nias Utara dan Kab. Nias Barat
12	Kuala Batangtoru	79.500	Kab. Tapanuli Tengah dan Kab. Tapanuli Selatan, Padangsidimpuan
13	Teluk Durian/ Pekanbaru	2.179.900	Kab. Labuhanbatu, kab. Labuhanbatu Selatan, Kab. Padang Lawas, dan Kab. Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan dan Provinsi Riau
14	Banjarampa	21.100	Kab. Mandailing Natal dan Kab. Tapanuli Selatan
15	Panyabungan	24.200	Kab. Mandailing Natal, Tapanuli Selatan
16	Pasaribuhuan	22.500	Kab. Padang Lawas Tapanuli Selatan
17	Padangsidimpuan	24.000	Kota Padangsidimpuan dan Kab. Tapanuli Selatan
18	Natal-Ujunggading	282.500	Kab. Mandailing Natal dan Provinsi Sumatera Barat
19	Lubuk Sikaping	21.700	Kab. Mandailing Natal dan Provinsi Sumatera Barat
	Total	5.569.900	

Sumber: Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang RTRW Provinsi Sumatera Utara 2017-2037

Di Provinsi Sumatera Utara terdapat sumber daya air permukaan berupa rawa, data rawa sebagai air permukaan dan sebagai tutupan lahan diberikan oleh tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4 Sumber Daya Air Permukaan

NO	TUTUPAN LAHAN (RAWA)	LUAS (Ha)
1	Belukar Rawa	31.617
2	Hutan Rawa Sekunder	31.617
3	Rawa	4.548
TOTAL		55.093

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, 2025

Dari luasan tutupan lahan berupa rawa tersebut, mampu mengairi Daerah Irigasi seluas 78.871 Ha dengan jumlah 51 Daerah Irigasi (DI) yang terdiri dari: 6 DI kewenangan Pemerintah, 14 DI kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan 31 DI kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. (Sumber: SK Menteri PUPR Nomor: 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Status Daerah Irigasi).

5. Klimatologi

Provinsi Sumatera Utara termasuk daerah beriklim tropis yang dipengaruhi oleh angin Pasat dan angin Muson. Dikutip dari Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2020 berdasarkan Pengamatan Unsur Iklim di Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat berdasarkan pengamatan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah I Suhu/Temperature minimum sebesar 22,2-23,2,8 derajat celcius sementara suhu maksimum: 34,8-33,2 derajat celcius atau rata-rata sebesar 27,4-26,7, kelembaban/ humidity minimum sebesar 43-53 persen dan kelembaban maksimum 98 persen atau rata-rata sebesar 86.9 persen. Kecepatan angin maksimum

berkisar 13-23 meter per detik, sementara rata-rata tekanan udara berkisar antara 1005,0-1007,1 mb, jumlah curah hujan 208-319 milimeter dengan jumlah hari hujan 12-24 hari dan penyinaran matahari sebesar 2,70-4,51 persen.

6. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Provinsi Sumatera Utara didominasi oleh kegiatan perkebunan seluas 2.946.512 Ha atau sekitar 41 persen dan hutan seluas 2.381.013 Ha atau sekitar 33 persen. Penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian terbesar berada di wilayah Pantai Timur, yaitu meliputi areal seluas 57 persen dari luas areal pertanian Sumatera Utara. Sebagian besar lahan hutan berada di wilayah Pantai Barat, yaitu seluas 69 persen dari luas hutan di Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan pertanian mendominasi wilayah Pantai Timur, sedangkan wilayah Pantai Barat didominasi oleh kegiatan pertanian dan hutan. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan non pertanian, seperti: industri, transportasi dan pertambangan tidak terlalu besar mengubah pemanfaatan ruang yang ada. Sementara itu luas kawasan hutan di wilayah Provinsi Sumatera Utara (Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara) adalah seluas 3.055.795 Ha atau ±42,87% dari luas total daratan wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kawasan Hutan tersebut dengan fungsi Hutan Konservasi seluas ±427.008 Ha; Hutan Lindung seluas ±1.206.881 Ha; Hutan Produksi Terbatas seluas ±641.769 Ha, Hutan Produksi Tetap seluas ±704.452 Ha dan Hutan Produksi Konversi seluas ±75.684 Ha. Penggunaan lahan untuk permukiman masih kurang dari 2% dari luas Provinsi Sumatera Utara. Rincian penggunaan lahan dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5 Perubahan Penggunaan Lahan Utama Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2016 dan 2022 data terupdate

No	Jenis Penggunaan Tanah	Luas Penggunaan Tanah (Ha)			
		2016	%	2022	%
1	Badan Air	152.891,22	2,11	151.106,76	2,09
2	Bandara	1.016,02	0,01	2.522,68	0,03
3	Belukar	596.770,46	8,24	391.961,40	5,41
4	Belukar Rawa	50.696,34	0,70	31.766,03	0,44
5	Hutan Rawa	62.730,77	0,87	18.854,84	0,26
6	Hutan Rimba	1.561.252,24	21,55	1.643.460,09	22,68
7	Hutan Tanaman	145.218,17	2,00	167.633,92	2,31
8	Kebun Campuran	328.163,23	4,53	938.600,09	12,95
9	Ladang	2.226.753,61	30,73	1.351.978,00	18,66
10	Lahan Terbuka	256.980,08	3,55	33.867,62	0,47
11	Mangrove	38.815,11	0,54	37.851,77	0,52
12	Perkebunan	1.411.775,95	19,48	2.018.867,41	27,86
13	Permukiman	81.181,33	1,12	118.542,83	1,64
14	Pertambangan	10,04	0,00	419,67	0,01
15	Rawa	8.102,99	0,11	4.512,96	0,06
16	Sawah	294.311,61	4,06	311.095,25	4,29
17	Tambak	29.538,10	0,41	23.165,94	0,32
Total		7.246.207,27	100	7.246.207,27	100

Sumber: Analisis GIS dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022



Berdasarkan data Rekapitulasi Luas Penutupan Lahan Hutan dan Non Hutan Menurut Provinsi Tahun 2014–2022 (BPS, 2024), perbandingan luas tutupan lahan Hutan dan Non-Hutan di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022 adalah sebesar 27% berbanding 73%. Kondisi tersebut diperoleh dengan peningkatan luas tutupan lahan Hutan sebesar 1,3% yang pada tahun 2014 seluas 25,7%. Berdasarkan data spasial tutupan lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2016–2022 dengan *updating* dan penyesuaian kenampakan Citra Satelit Spot 6 tahun 2022 (LAPAN) diperoleh penggunaan lahan yang paling dominan pada tahun 2016 didominasi oleh penggunaan ladang (lahan kering) sebesar 30,73%, kemudian penggunaan lahan hutan berupa hutan rimba sebesar 21,55% dan penggunaan lahan perkebunan sebesar 19,48%. Sedangkan pada tahun 2022 penggunaan lahan kering (ladang) berkurang sebesar 12,07% sehingga menjadi 18,66%. Sedangkan untuk penggunaan lahan hutan rimba bertambah sebesar 1,13% sehingga menjadi 22,68% dan penggunaan lahan perkebunan bertambah sebesar 8,38% sehingga menjadi 27,86%. Berdasarkan gambaran tersebut, perubahan penggunaan lahan di Provinsi Sumatera Utara dari yang sebelumnya berupa ladang kini dimanfaatkan menjadi perkebunan, kehutanan, dan juga ladang.

Dianugerahi dengan kondisi alam seperti gambaran aspek geografis di atas, menjadikan potensi sumber daya alam Provinsi Sumatera Utara cukup berlimpah, di antaranya komoditas hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, bahan tambang dan mineral, pariwisata, serta industri.

7. Potensi Pengembangan Wilayah

Perwilayahan industri di Provinsi Sumatera Utara dikembangkan melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri (KPI), dan Kawasan Industri (KI) dan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (sentra IKM). Perwilayahan industri ini bersama dengan kawasan strategis provinsi (KSP) berperan sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kawasan Industri (KI) yang telah dicanangkan untuk terus mengembangkan berbagai industri menengah dan besar, baik yang sudah ada maupun yang akan dibangun antara lain:

1. Kawasan Industri Lamhotma di Kota Medan;
2. Kawasan Industri Medan Star di Kabupaten Deli Serdang;
3. Kawasan Industri Medan di Kota Medan;
4. Kawasan Industri Medan di Kabupaten Deli Serdang;
5. Kawasan Industri Tanjung Morawa;
6. Kawasan Industri Percut Sei Tuan di Kabupaten Deli Serdang;
7. Kawasan Industri Smelter Baja di Kota Medan;
8. Kawasan Industri Padang Hilir di Kota Tebing Tinggi;
9. Kawasan Industri Panai Hulu di Kabupaten Labuhanbatu;
10. Kawasan Industri Bagan Asahan di Kabupaten Asahan;
11. Kawasan Industri Kuala Tanjung, di Kabupaten Batu Bara;
12. Kawasan Industri Pematangsiantar di Kota Pematangsiantar;
13. Kawasan Industri Sei Mangke dan Kawasan Industri Simalungun di Kecamatan Tapan Dolok di Kabupaten Simalungun;
14. Kawasan Industri Sei Bamban di Kabupaten Serdang Bedagai;
15. Kawasan Industri Berbasis Kompetensi, Inti Industri Daerah Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai;
16. Kawasan Industri di Sidikalang, Kabupaten Dairi;
17. Kawasan Industri Pangkalan Susu di Kabupaten Langkat;



18. Kawasan Industri Labuhan Angin, di Kabupaten Tapanuli Tengah;
19. Kawasan Industri Kepulauan Nias, di Kabupaten Nias.

8. Potensi Sumber Daya Alam

A. Potensi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Potensi sumber daya alam Provinsi Sumatera Utara cukup berlimpah, di antaranya komoditas hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, bahan tambang dan mineral, pariwisata, serta industri. Komoditas unggulan pertanian tanaman pangan antara lain padi, jagung, dan ubi kayu. Tanaman hortikultura komoditas unggulannya berupa cabai, bawang merah, bawang putih, jeruk, pisang. Komoditas unggulan perkebunan antara lain sawit, karet, kopi, kakao, tembakau dan kelapa. Potensi untuk pengembangan sapi, kerbau, ternak kambing dan domba, unggas seperti ayam buras, ayam pedaging, ayam petelur, dan itik juga cukup besar. Potensi sumber daya ikan (SDI) yang meliputi perikanan tangkap dan budidaya perikanan, baik di perairan laut maupun perairan darat dan perairan umum seperti sungai, danau, tambak juga cukup besar. Pesisir Pantai Barat jenis ikan unggulannya berupa tuna, tongkol, cakalang, kerapu, kakap, kembung, tenggiri, teri dan ikan hias. Budidaya kelautan antara lain berupa teripang, rumput laut serta potensi terumbu karang. Pesisir Pantai Timur SDI-nya mencapai 276.030 ton/tahun dengan jenis ikan unggulan seperti di Pesisir Pantai Barat ditambah dengan ikan baronang, japuh, biji nangka, senangin, teri dan pari.

Potensi sumber daya alam pertanian khususnya tanaman pangan ini membuat indeks ketahanan pangan (IKP) Provinsi Sumatera Utara 75,97 (pada tahun 2023). Angka tersebut meningkat dari tahun 2022 sebesar 71,22. Peningkatan tersebut membuat Provinsi Sumatera Utara pindah dari ketahanan pangan dengan kategori agak tahan ke dalam kelompok provinsi yang memiliki ketahanan pangan paling baik atau sangat tahan (lebih besar dari 74,40). Namun perlu diwaspadai kabupaten yang masuk kategori agak rentan ketahanan pangannya yaitu Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan IKP sebesar 56,18 (pada tahun 2023). Kategori sangat tahan dalam ketahanan pangan ini perlu dipertahankan, untuk itu perlu dijaga agar jangan sampai ketahanan pangan ini menurun seperti yang dialami oleh Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Padanglawas Utara. Pada tahun 2022 IKP kedua kabupaten ini sudah mencapai 87,15 dan 71,74 namun menurun pada tahun 2023 menjadi 86,81 dan 70,40.

Meskipun IKP Provinsi Sumatera Utara sudah kategori sangat tahan, namun prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*) di provinsi ini masih di atas angka nasional. PoU Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023 sebesar 8,60% sementara nasional 8,35%. Hal ini menggambarkan masih ada 8,60% penduduk Sumatera Utara yang mengkonsumsi jumlah makanan yang tidak cukup untuk memenuhi energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat. Pencapaian terbaik Sumatera Utara terkait PoU ini adalah pada tahun 2019 yaitu sebesar 4,84%.

Defisit air pada beberapa wilayah dapat menyebabkan gangguan terhadap ketahanan pangan. Secara umum ketersediaan air di Sumatera Utara melebihi kebutuhan (surplus) namun ketersebarannya tidak selalu bersesuaian dengan ketersebaran kebutuhan, hal inilah yang menyebabkan defisit air pada beberapa wilayah, dan status defisit ini akan mempengaruhi ketahanan pangan. Dari aspek ketersediaan pangan, Sumatera Utara juga masih surplus, hal ini turut ditopang oleh keanekaragaman hayati yang



tinggi di Sumatera Utara. Kondisi kekurangan pangan di beberapa wilayah di Sumatera Utara dapat dipengaruhi oleh jasa lingkungan penyediaan pangan yang memiliki kategori rendah dan sangat rendah yang terdapat pada wilayah barat Sumatera Utara. Kerentanan wilayah yang tinggi terhadap dampak perubahan iklim juga dapat mempengaruhi produksi pangan.

B. Potensi Pertambangan

Potensi yang cukup besar juga terdapat di sektor pertambangan. Potensi ini berupa tambang panas bumi, tambang minyak bumi, tambang batu bara, tambang mineral dan bahan galian air tanah. Potensi panas bumi sebagai energi alternatif tersebar di beberapa tempat antara lain di Gunung Sibayak Kecamatan Tigapanah di Kabupaten Karo; Kecamatan Pahae Jahe Kabupaten Tapanuli Utara; Kecamatan Sipirok di Kabupaten Tapanuli Selatan. Indikasi kandungan minyak di Pangkalan Susu Kabupaten Langkat di Gunungsitoli/Kabupaten Nias. Bahan tambang batubara tersebar di Kabupaten Mandailing Natal, Kota Padangsidimpuan, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Langkat, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Nias, dan Kota Gunungsitoli. Potensi radioaktif di Provinsi Sumatera Utara terdapat di Desa Aekhabil Kecamatan Sibolga Kota Sibolga, yakni berupa Radium (Ra). Bahan tambang mineral logam seperti Antimoni, Arsen, Barit, Bauksit, Belerang, Besi, Bismuth, Kromium, Emas, Perak, Tembaga, Florit, Mangan, Merkuri, Molibdenum, Niobium, Platina, Tellurium, Seng, Timbal, dan Wolfram tersebar di beberapa kabupaten/kota, begitu juga bahan tambang batuan/bukan logam seperti bentonit, batu gamping/batu kapur, zeolit, dolomit, marmer, travertin, diatomea, trass, andesit, granit, felspar, kaolin, batu mulia, batu apung, perlit, kalsit, kuarsa, fosfat, pasir kuarsa, kuarsit, grafit, mika, oker, talk, serpentinit, lempung, pasir dan batu (sirtu), dan pasir laut tersebar di beberapa kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara. Potensi geografi dan sumber daya alam di mengindikasikan bahwa Sumatera Utara memiliki potensi energi terbarukan seperti panas bumi dan potensi *hydro*. Selain itu juga terdapat potensi dari biomassa baik dari limbah pabrik kelapa sawit maupun limbah pabrik tapioka, selain itu terdapat juga potensi dari limbah ternak mengingat Provinsi Sumatera Utara merupakan penghasil ternak potong di Pulau Sumatera. Semua potensi yang ada tersebut menghasilkan energi listrik bagi memenuhi kebutuhan energi di Provinsi Sumatera Utara.

C. Potensi Pariwisata

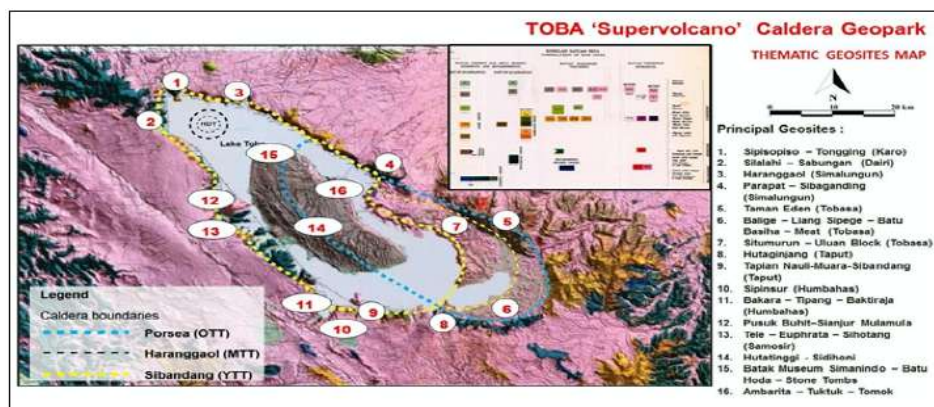
Potensi sumberdaya lainnya di Sumatera Utara adalah berbagai tempat pariwisata yang menarik untuk dikunjungi para wisatawan. Sumatera Utara, dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, memiliki potensi pariwisata yang sangat besar. Terletak di ujung barat Indonesia, provinsi ini menawarkan berbagai destinasi wisata yang memikat, dari pesona alam hingga warisan budaya yang kental. Dengan keberagaman tersebut, Sumatera Utara memiliki potensi untuk berkembang menjadi tujuan pariwisata utama di Indonesia. Pemerintah setempat dan sektor swasta semakin gencar melakukan pengembangan infrastruktur dan promosi untuk menarik lebih banyak wisatawan, baik domestik maupun internasional. Seiring dengan upaya tersebut, Sumatera Utara siap menjadi destinasi wisata yang menarik, yang tak hanya memanjakan mata tetapi juga memperkaya pengalaman budaya dan alam bagi setiap pengunjung.

Jenis wisata di Sumatera Utara antara lain wisata alam, wisata kebudayaan, dan wisata minat khusus. Objek wisata alam menjadi andalan dalam menarik wisatawan, di antaranya, yaitu:



1. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba dan Geopark Kaldera Toba. Kawasan Geopark Kaldera Toba adalah contoh pengembangan kawasan peruntukan pariwisata yang menggabungkan unsur wisata dengan pendidikan, konservasi, dan pemberdayaan masyarakat. Situs geologi yang terdapat di kawasan Geopark Kaldera Toba terdiri dari 16 Geosites (enam belas), situs geologi utama yang dapat menceritakan tema Geopark Kaldera Toba sebagai Supervolcano. Keindahan alam sekitar danau, dengan hamparan air biru yang luas dan pegunungan hijau yang mengelilinginya, menjadikannya sebagai tempat yang ideal untuk wisata alam dan relaksasi. Pulau Samosir, yang terletak di tengah Danau Toba, juga kaya akan kebudayaan Batak yang khas, menawarkan berbagai tradisi, rumah adat, dan upacara lokal yang mempesona wisatawan.

Gambar 2.2 Kawasan Geopark Kaldera Toba

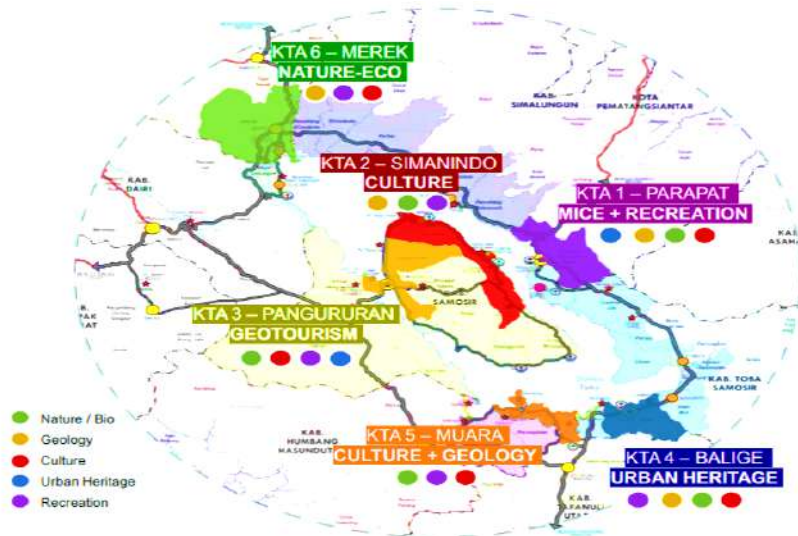


Sumber: <https://calderatobageopark.org/geosite/>

2. Pemandian air panas Pangururan, Pusuk Buhit, Danau Sidihoni, Tomok, Tuktuk, Aek Sipitundai, Kebun Raya Simanindo, Taman Bumi di Kecamatan Sianjur Mula-mula di Kabupaten Samosir;
3. Sumatera Utara juga memiliki berbagai destinasi alam lainnya, seperti Bukit Lawang, yang terkenal dengan konservasi orangutan Sumatera. Wisatawan dapat trekking melalui hutan tropis yang lebat, menjelajahi alam liar, dan melihat langsung orangutan di habitat asli mereka.
4. Provinsi Sumatera Utara juga kaya akan tradisi dan kuliner yang menggoda. Kota Medan, sebagai ibu kota provinsi, adalah pusat kuliner dengan berbagai makanan khas, seperti nasi goreng Medan, durian, dan soto Medan. Kota ini juga memiliki bangunan bersejarah seperti Istana Maimun dan Masjid Raya, yang memperlihatkan kemegahan arsitektur Melayu.
5. Berastagi, air terjun Sipiso-piso, pemandian air panas Rajaberne, Taman Hutan Rakyat Bukit Barisan, Kawasan Wisata Alam di Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, dan lainnya.



Gambar 2.3 Destinasi Super Prioritas Danau Toba



Sumber: Integrated Tourism Master Plan (ITMP) Danau Toba, 2020

Posisi beberapa destinasi KSPN Danau Toba yang digambarkan sebagai Destinasi Super Prioritas Danau Toba dengan *key tourism area* (KTA) tiap destinasi di atas dapat dilihat pada gambar di atas. Sumatera Utara juga memiliki potensi yang cukup besar di sektor ekowisata. Beberapa kawasan ekowisata yang berada di Sumatera Utara antara lain:

1. Kawasan Ekowisata Tangkahan dan Bukit Lawang. Tangkahan terletak di antara dua desa yaitu Namo Sialang dan Sei Serdang yang juga berada di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser yang terletak di Kabupaten Langkat. Selain panorama alam yang dapat dinikmati, di kawasan ekowisata Tangkahan juga terdapat tempat rehabilitasi satwa langka Orangutan Sumatera serta konservasi Gajah. Selain itu terdapat Desa wisata Bukit Lawang, terletak di Kecamatan Bahorok, yang menawarkan berbagai fasilitas bagi pengunjung. Ini termasuk *jungle trekking* di Taman Nasional Gunung Leuser, arung jeram di Sungai Bahorok yang airnya sangat bersih. Selain itu, terdapat *tour* ke gua dan jalur untuk lari dan bersepeda di desa tersebut. Bukit Lawang merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Leuser yang merupakan kawasan konservasi orangutan.
2. Kawasan Ekowisata Karo. Kabupaten Karo yang juga termasuk daerah penyangga Destinasi Super Prioritas Danau Toba, menyimpan banyak potensi wisata. Banyak tujuan wisata dapat dikunjungi di wilayah ini, yaitu wisata Agro Berastagi, Tongging, Gundaling Peak, Danau Lau Kavar, Mata Air Panas alami Lau Sidebuk, dan banyak lainnya.

Beberapa objek wisata budaya juga menarik untuk dikunjungi di antaranya:

1. Istana kerajaan dan rumah kediaman Istana Maimun, Masjid Raya, Masjid Osmani, Kawasan Kesawan, Kediaman Tjong A Fie, Rumah Dinas Walikota dan Gedung Pusat AVROS/BKS PPS, situs bersejarah Kota Cina di Kota Medan;
2. Cagar Budaya Stasiun Kereta Api Binjai;
3. Kawasan situs bersejarah religi Islam di Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Kawasan situs bersejarah Kota Rintang di Kabupaten Deli Serdang;
5. Kawasan situs bersejarah Bawomataluo di Desa Bawomataluo, Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan, dan lainnya.



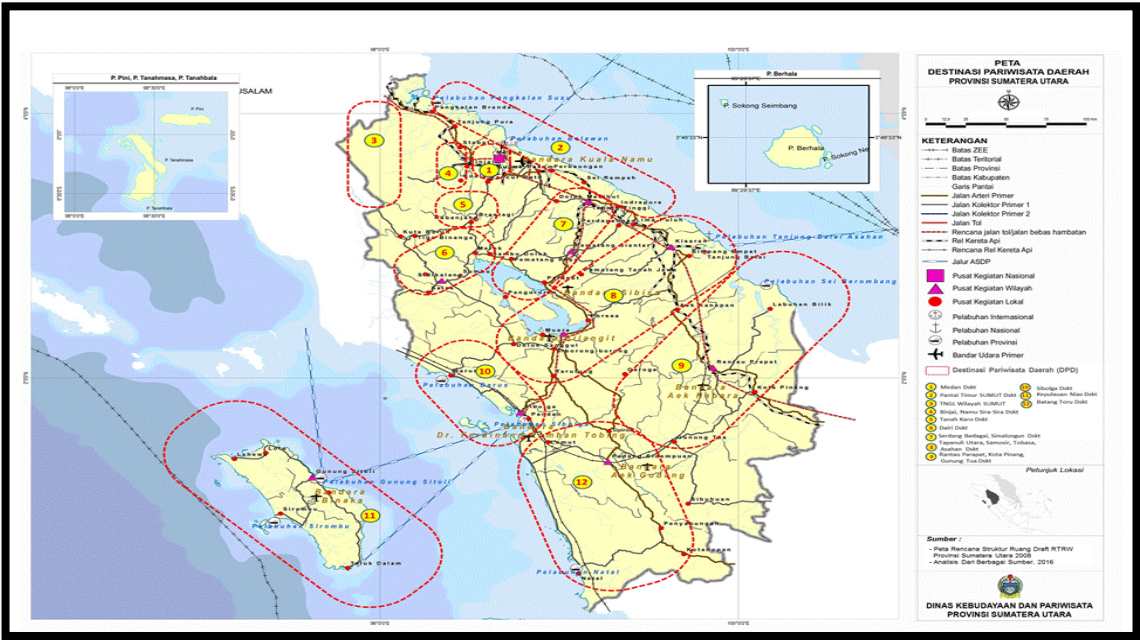
Selain itu juga ada wisata minat khusus antara lain:

1. Museum dan Kebun Binatang di Kota Medan dan Kota Pematangsiantar;
2. Arung Jeram di Sei Asahan - Toba dan Sei Bingei, Sei Wampu di Langkat;
3. Olahraga Air di Sorake, Lagundri, Sigolong Golong, Teluk Dalam, Wisata menyelam di Perairan Pulau-pulau Batu di Nias Selatan, dan lainnya.
4. Petualangan (*Adventure*), Desa wisata Seribu Gua Banuarea terletak di lereng Gunung Pinapan, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Desa ini dikenal dengan keindahan alamnya yang asri dan alami, serta memiliki banyak gua dan air terjun yang menakjubkan. Dengan hampir ribuan gua yang memiliki keindahan tersendiri, Banuarea berpotensi menjadi destinasi wisata.

Secara umum destinasi pariwisata provinsi (DPP) di Provinsi Sumatera Utara terdapat di seluruh kabupaten/kota meliputi:

- a) DPP Medan dan sekitarnya;
- b) DPP Pantai Timur Sumatera Utara;
- c) DPP Kawasan TNGL Wilayah Sumatera Utara;
- d) DPP Binjai, Langkat, Namusira-sira dan sekitarnya;
- e) DPP Tanah Karo dan sekitarnya;
- f) DPP Dairi dan sekitarnya;
- g) DPP Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun dan sekitarnya;
- h) DPP Tapanuli Utara, Samosir, Toba, Humbang Hasundutan, Asahan dan sekitarnya;
- i) DPP Labuhanbatu Utara, Rantauprapat, Kota Pinang, Gunung Tua, dan sekitarnya;
- j) DPP Tapanuli Tengah dan sekitarnya;
- k) DPP Kepulauan Nias; 1. DPP Tapanuli Bagian Selatan dan sekitarnya.

Gambar 2.4 Peta Destinasi Pariwisata Daerah Provinsi Sumatera Utara



Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara, 2025

9. Wilayah Rawan Bencana

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu wilayah di Indonesia



yang mempunyai potensi besar terjadinya bencana alam, seperti bencana gempa bumi dan letusan gunung api. Hal ini disebabkan karena Provinsi Sumatera Utara mempunyai 4 (empat) ruas patahan yang menjadi sumber gempa, yakni patahan Renun, patahan Toru, patahan Angkola dan patahan Barumun. Selain itu, di wilayah Sumatera Utara terdapat beberapa gunung api aktif. Salah satunya adalah Gunung Sinabung yang meletus sejak tahun 2013 dan menyebabkan masyarakat mengungsi hingga saat ini.

Berdasarkan Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, bencana yang paling banyak terjadi di Provinsi Sumatera Utara adalah bencana tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan dan banjir. Dari angka kejadian tersebut, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan daerah yang paling banyak terjadi bencana alam yang mencatatkan 80 dan 50 kejadian, Kabupaten Karo dan Kabupaten Mandailing Natal juga masuk daerah tertinggi yang dilanda bencana alam dengan mencatatkan 48 dan 41 kejadian.

Selanjutnya Kabupaten Langkat dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan masing-masing tercatat mengalami bencana alam sebanyak 31 kejadian, Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Padang Lawas Utara juga masing-masing 29 kejadian, Kabupaten Dairi dan Labuhanbatu 28 kejadian, Kabupaten Samosir 26 kejadian, Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Padang Lawas 22 kejadian, Kota Medan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Asahan masing-masing tercatat 21 kejadian, Kota Pematangsiantar 20 kejadian, Kota Sibolga 17 kejadian, Kota Gunungsitoli dan Kabupaten Tapanuli Utara 15 kejadian, Kabupaten Toba 12 kejadian, Tapanuli Tengah, Kabupaten Serdang Berdagai, Kabupaten Batubara 10 kejadian. Padangsidimpuan 7, Humbang Hasundutan dan Binjai 6, Tebing Tinggi 5, Tanjung Balai 4, Nias Selatan 3, Nias, Nias Utara, Nias Barat 2 kejadian bencana alam. Namun demikian di tahun ini angka ini terus menurun (semakin baik) dari tahun ke tahun.

2.1.1.2 Aspek Demografi

Sumatera Utara merupakan Provinsi keempat dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Menurut hasil proyeksi Sensus Penduduk (SP) 2020, penduduk Tahun 2023 berjumlah 15.386.640 jiwa. Sementara itu hasil sensus penduduk pada tahun 2020 mencapai 14.799.361 jiwa. Rata-rata pertumbuhan penduduk Provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2020 sebesar 1,28 persen per tahun, dan pada tahun 2020-2023 menjadi 1,43 persen per tahun. Pada Tahun 2023 penduduk Sumatera Utara berjumlah 15.386.640 jiwa yang terdiri dari 7.721.314 jiwa penduduk laki-laki dan 7.665.326 jiwa perempuan atau dengan ratio jenis kelamin/sex ratio sebesar 100,73.

Pertumbuhan penduduk ini meningkat terus sejak 1990, namun jika dilihat kembali dapat diketahui bahwa angkanya tidak sebesar periode 1961-1980 sebagaimana ditampilkan dalam gambar di bawah. Namun pertumbuhan yang terus meningkat ini dapat diwaspadai dalam rangka untuk tetap sesuai dengan program/target perencanaan penduduk (keluarga berencana). Sumatera Utara merupakan Provinsi keempat dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Kota Medan merupakan wilayah dengan penduduk terbanyak di Provinsi Sumatera Utara, yakni 16,4% dari total penduduk. Kemudian, Kabupaten Deli Serdang dengan jumlah penduduk dengan proporsi 13,1%, Kabupaten Langkat 7,1%, dan Kabupaten Simalungun 6,6%. Masing-masing kabupaten/kota tersebut adalah kabupaten/kota dengan jumlah penduduk

di atas 1 juta jiwa atau sekitar 6,5% dari total penduduk Sumatera Utara. Kabupaten/kota yang jumlah penduduknya kurang dari 1 persen dari total penduduk Sumatera Utara (atau kurang dari 150 ribu jiwa) adalah Kabupaten Nias, Kabupaten Samosir, Kota Gunungsitoli, Kota Sibolga, Kabupaten Nias Barat, dan Kabupaten Pakpak Bharat.

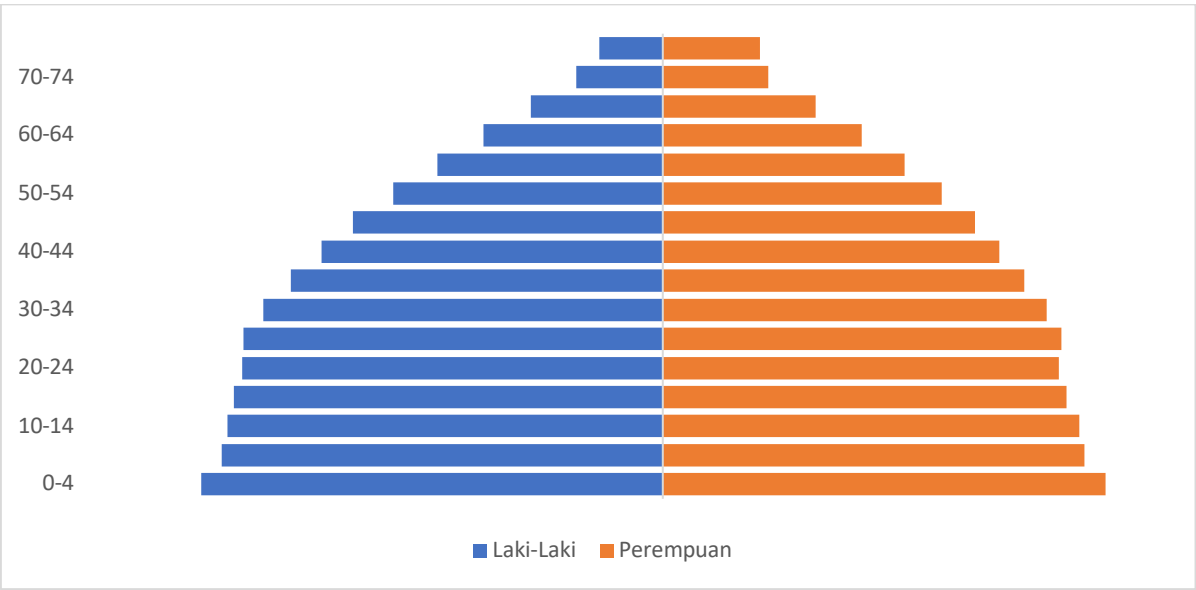
Gambar 2.5 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Hasil Sensus Penduduk (SP) Provinsi Sumatera Utara



Sumber: Hasil Sensus Penduduk 2020 Sumatera Utara, BPS Provinsi Sumatera Utara, 2021

Kabupaten Pakpak Bharat adalah kabupaten yang paling sedikit penduduknya sekitar kurang dari 60 ribu jiwa. Kepadatan penduduk pada tahun 2020 adalah 203 jiwa per km² kemudian pada tahun 2023 meningkat menjadi 212 jiwa per km². Kota-kota otonom seperti Sibolga, Tanjungbalai, Pematangsiantar, Tebing Tinggi, Medan, Binjai, Padangsidimpuan, dan Gunungsitoli adalah daerah dengan kepadatan penduduk di atas 500 jiwa per km². Kota Medan adalah daerah yang paling padat dan bahkan sudah mendekati 9000 jiwa per km², disusul dengan Kota Sibolga dengan kepadatan mendekati 8000 jiwa per km².

Gambar 2.6 Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 (Jiwa)



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Sumatera Utara sedang mengalami masa bonus demografi, dimana penduduk usia produktifnya (15-64 tahun) lebih banyak dibanding non produktif. Piramida penduduk Sumatera Utara di atas menggambarkan tipe ekspansif. Piramida tipe ekspansif dapat dilihat dari pola piramida yang melebar di bagian bawah dan cembung di bagian tengah yang merupakan penduduk usia muda kemudian Sementara di bagian atas yang merupakan penduduk usia tua meruncing. Jumlah penduduk usia 0-4 tahun adalah

yang terbanyak, yakni mencapai 1.417.593 jiwa. Kabupaten/kota yang jumlah penduduknya kurang dari 1 persen dari total penduduk Sumatera Utara (atau kurang dari 150 ribu jiwa) adalah Kabupaten Nias, Kabupaten Samosir, Kota Gunungsitoli, Kota Sibolga, Kabupaten Nias Barat, dan Kabupaten Pakpak Bharat. Kabupaten Pakpak Bharat adalah kabupaten yang paling sedikit penduduknya sekitar kurang dari 60 ribu jiwa.

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota menurut Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

Kabupaten Kota	Penduduk menurut Jenis Kelamin (Jiwa)		
	Perempuan	Laki-Laki	Jumlah
Nias	79.577	76.052	155.629
Mandailing Natal	253.287	252.073	505.360
Tapanuli Selatan	157.066	159.420	316.486
Tapanuli Tengah	195.707	199.203	394.910
Tapanuli Utara	163.148	163.845	326.993
Toba	108.319	108.401	216.720
Labuhanbatu	256.398	264.147	520.545
Asahan	402.582	411.138	813.720
Simalungun	522.307	529.538	1.051.845
Dairi	164.649	165.937	330.586
Karo	214.935	211.536	426.471
Deli Serdang	1.018.951	1.029.529	2.048.480
Langkat	534.008	544.668	1.078.676
Nias Selatan	193.712	196.245	389.957
Humbang Hasundutan	103.236	103.840	207.076
Pakpak Bharat	27.792	28.420	56.212
Samosir	71.487	71.584	143.071
Serdang Bedagai	343.438	348.200	691.638
Batu Bara	217.395	219.965	437.360
Padang Lawas Utara	137.622	142.973	280.595
Padang Lawas	139.811	140.953	280.764
Labuhanbatu Selatan	165.064	171.513	336.577
Labuhanbatu Utara	201.651	207.098	408.749
Nias Utara	79.814	78.862	158.676
Nias Barat	49.893	47.358	97.251
Sibolga	45.645	46.102	91.747
Tanjungbalai	91.715	93.932	185.647
Pematangsiantar	140.048	137.006	277.054
Tebing Tinggi	90.959	90.018	180.977
Medan	1.248.681	1.237.602	2.486.283
Binjai	153.589	153.581	307.170
Padangsidempuan	118.361	121.706	240.067
Gunungsitoli	74.279	70.954	145.233
Sumatera Utara	7.765.126	7.823.399	15.588.525

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Kepadatan penduduk pada tahun 2020 adalah 203 jiwa per km2 kemudian pada tahun 2023 meningkat menjadi 212 jiwa per km2. Kota-kota otonom seperti Sibolga, Tanjungbalai, Pematangsiantar, Tebing Tinggi, Medan, Binjai, Padangsidempuan, dan Gunungsitoli adalah daerah dengan kepadatan penduduk di atas 500 jiwa per km2. Kota Medan adalah daerah

yang paling padat dan bahkan sudah mendekati 9.000 jiwa per km², disusul dengan Kota Sibolga dengan kepadatan mendekati 8.000 jiwa per km².



Tabel 2.7 Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Provinsi Sumatera Utara

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Kepadatan Penduduk	ribu Jiwa	202,78	204,66	208,60	212,34	215,13
Rasio Jenis Kelamin	Persen	100,61	100,67	100,73	100,73	100,75

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Berdasarkan pembagian wilayah di Provinsi Sumatera Utara, wilayah pantai barat menunjukkan kepadatan penduduk yang bervariasi mulai dari rendah hingga sedang dengan kecenderungan rasio jenis kelamin lebih banyak laki-laki, yang mungkin berkaitan dengan aktivitas ekonomi berbasis pesisir. Wilayah pantai timur memiliki kepadatan penduduk yang cenderung tinggi terutama di kota-kota besar seperti Medan dan Binjai, dengan rasio jenis kelamin yang relatif seimbang, mencerminkan struktur urban yang beragam. Di wilayah pegunungan, kepadatan penduduk umumnya rendah hingga sedang dengan rasio gender yang seimbang, menggambarkan kondisi geografis yang menantang dan populasi yang stabil. Sementara itu, di wilayah kepulauan Nias, kepadatan penduduk termasuk sedang dengan rasio jenis kelamin yang cenderung didominasi perempuan, yang bisa dipengaruhi oleh migrasi laki-laki atau faktor sosial budaya setempat.

Tabel 2.8 Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara 2024

Kabupaten/Kota	Kepadatan Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
	jiwa/km ²	persen
Nias	172,46	95,57
Mandailing Natal	77,19	99,52
Tapanuli Selatan	75,34	101,50
Tapanuli Tengah	171,13	101,79
Tapanuli Utara	83,94	100,43
Toba	94,57	100,08
Labuhanbatu	187,76	103,02
Asahan	217,70	102,13
Simalungun	228,59	101,38
Dairi	158,66	100,78
Karo	193,25	98,42
Deli Serdang	793,61	101,04
Langkat	175,68	102,00
Nias Selatan	154,03	101,31
Humbang Hasundutan	88,06	100,59
Pakpak Bharat	41,16	102,26
Samosir	77,33	100,14
Serdang Bedagai	354,84	101,39
Batu Bara	492,44	101,18
Padang Lawas Utara	71,12	103,89
Padang Lawas	71,73	100,82
Labuhanbatu Selatan	109,29	103,91
Labuhanbatu Utara	110,89	102,70
Nias Utara	128,17	98,81



Kabupaten/Kota	Kepadatan Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
	jiwa/km ²	persen
Nias Barat	209,49	94,92
Sibolga	7.998,17	101,00
Tanjungbalai	3.090,41	102,42
Pematangsiantar	3.649,34	97,83
Tebing Tinggi	4.620,30	98,97
Medan	8.902,16	99,11
Binjai	3.275,78	99,99
Padangsidempuan	1.507,03	102,83
Gunungsitoli	695,95	95,52
Sumatera Utara	215,13	100,75

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Sumatera Utara mengalami pertumbuhan penduduk yang signifikan dengan peningkatan jumlah penduduk hingga mencapai 15,6 juta jiwa pada tahun 2024, dengan laju pertumbuhan yang melambat namun tetap positif. Struktur usia penduduk menunjukkan basis yang cukup lebar di kelompok usia muda dan produktif, menandakan masa bonus demografi. Namun, ketimpangan kepadatan penduduk antar kabupaten/kota cukup besar, dengan kota Medan dan Sibolga memiliki kepadatan yang sangat tinggi dibandingkan daerah lain. Rasio jenis kelamin cenderung seimbang, sedikit lebih banyak laki-laki dibanding perempuan.

Untuk perencanaan pembangunan jangka menengah 2025-2029, fokus perlu diarahkan pada pengelolaan urbanisasi dan penyediaan infrastruktur di daerah dengan kepadatan tinggi, peningkatan pelayanan dasar dan fasilitas untuk kelompok usia muda agar potensi demografi dapat dimanfaatkan optimal, serta pengembangan wilayah yang padat penduduk untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan secara merata. Pengembangan wilayah untuk melahirkan pusat-pusat pertumbuhan baru melalui penguatan bioindustri dan sektor pariwisata sangat dibutuhkan, agar konsentrasi penduduk dapat menyebar di beberapa titik wilayah, tidak hanya bertumpu di Kota Medan yang justru semakin membuat efek tertinggal bagi wilayah lainnya. Strategi pembangunan juga harus memperhatikan distribusi gender dan kebutuhan spesifik tiap daerah untuk hasil pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, namun juga menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Kesejahteraan masyarakat di Sumatera Utara dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perekonomian, akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Secara ekonomi, Sumut memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, seperti kelapa sawit, karet, dan hasil pertanian lainnya, yang dapat mendongkrak sektor pertanian dan perkebunan sebagai penyumbang utama perekonomian. Namun, ketergantungan pada sektor primer ini perlu diimbangi dengan pengembangan sektor industri dan jasa untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih beragam. Meski begitu, masih ada ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, dengan daerah-daerah tertentu yang mengalami kesulitan dalam mengakses pasar, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Akses terhadap pendidikan di Sumut juga menjadi salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun



terdapat sejumlah universitas dan sekolah tinggi di kota-kota besar seperti Medan, banyak daerah terpencil yang belum memiliki fasilitas pendidikan yang memadai. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dan potensi pembangunan jangka panjang. Di sektor kesehatan, meskipun beberapa rumah sakit dan fasilitas kesehatan sudah tersedia di kota-kota besar, wilayah-wilayah terpencil sering kali kesulitan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Ini berisiko meningkatkan angka kemiskinan dan menurunkan kualitas hidup masyarakat, terutama di daerah-daerah dengan akses transportasi yang terbatas.

Pembangunan infrastruktur, seperti jalan, listrik, dan konektivitas internet, juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan. Peningkatan infrastruktur di daerah-daerah terisolasi dapat membuka peluang ekonomi dan mempermudah distribusi barang serta layanan sosial lainnya. Namun, salah satu tantangan terbesar adalah ketimpangan sosial-ekonomi yang masih cukup besar di Provinsi Sumut. Beberapa daerah, khususnya yang lebih pedesaan, masih bergumul dengan masalah kemiskinan, kurangnya lapangan pekerjaan, serta rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang fokus pada pemerataan pembangunan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan peningkatan kualitas layanan sosial akan sangat berdampak pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sumut.

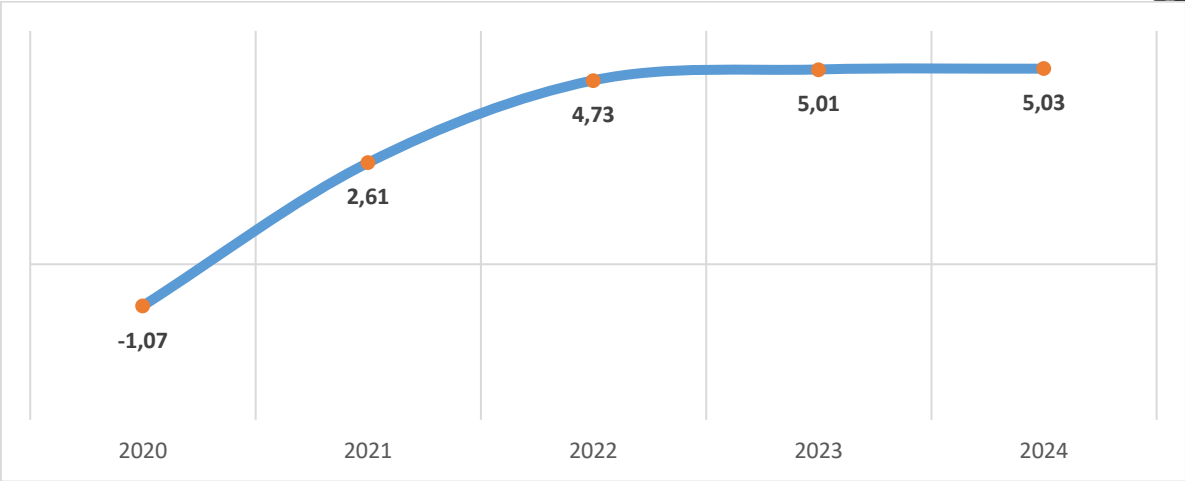
Secara keseluruhan, meskipun Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi besar, untuk mencapai kesejahteraan yang merata, dibutuhkan upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat itu sendiri, dalam mengatasi berbagai tantangan yang ada serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di daerah ini.

2.1.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama yang sangat penting dalam merencanakan arah pembangunan Provinsi Sumatera Utara dalam periode RPJMD 2025-2029. Sebagai tolok ukur keberhasilan ekonomi, indikator ini tidak hanya mencerminkan seberapa cepat perekonomian tumbuh, tetapi juga menggambarkan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam penyusunan RPJMD, laju pertumbuhan ekonomi menjadi fokus utama yang akan mengarahkan kebijakan dan strategi pembangunan di berbagai sektor. Dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, diharapkan Sumatera Utara dapat mencapai pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, serta mampu memperkuat posisi ekonomi daerah di tingkat nasional maupun global.

Perekonomian Sumatera Utara masih didominasi oleh Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang memberikan kontribusi sebesar 24,44 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,79 persen; Industri Pengolahan sebesar 18,36 persen; Konstruksi sebesar 12,99 persen; serta Transportasi dan Pergudangan sebesar 5,01 persen. Seiring dengan proses pemulihan perekonomian nasional, tren pemulihan ekonomi Sumatera Utara terus berlanjut dan semakin menguat di tengah kondisi ketidakpastian global. Pulihnya mobilitas dan daya beli masyarakat yang terjaga menjadi pendorong aktivitas ekonomi. Kondisi ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2024 sebesar 5,03 persen. Berikut perkembangan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara.

Gambar 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Secara agregat, Sumatera Utara menunjukkan pemulihan paling konsisten di antara provinsi-provinsi Sumatera, setelah kontraksi -1,07 % pada 2020 (lebih ringan dibanding Kep. Riau -3,80 % dan Kep. Bangka Belitung -2,29 %, namun sedikit lebih dalam daripada Aceh -0,37 %), laju pertumbuhan Sumut melonjak ke 2,61 % di 2021 dan terus naik menjadi 4,73 % (2022) serta 5,01 % (2023).

Tabel 2.9 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Khutanan dan Perikanan	1,95	3,87	5,03	3,04	3,73
Pertambangan dan Penggalian	-2,31	1,92	2,62	3,53	4,03
Industri Pengolahan	-0,84	1,43	1,98	3,42	4,65
Pengadaan Listrik dan Gas	3,16	4,93	4,81	2,17	2,66
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,79	3,62	2,17	2,87	2,57
Konstruksi	-3,42	2,18	3,03	6,40	6,52
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-1,87	3,62	6,57	5,80	4,44
Transportasi dan Pergudangan	-12,77	-3,63	12,96	13,12	6,33
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-9,62	-0,81	7,26	10,23	11,98
Informasi dan Komunikasi	6,17	6,51	7,60	7,81	7,41
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,29	4,46	3,81	5,50	3,87
Real Estate	1,57	2,50	4,53	3,19	5,41
Jasa Perusahaan	-4,71	-0,14	8,78	6,69	5,12
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,37	2,08	-0,73	1,92	6,08
Jasa Pendidikan	1,52	3,05	5,14	7,38	5,66
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-2,46	0,25	4,83	6,44	5,12
Jasa Lainnya	-3,74	1,43	8,72	9,47	6,54
Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara	-1,07	2,61	4,73	5,01	5,03

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara menunjukkan perbaikan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Setelah mengalami kontraksi di 2020, seperti pada sektor Transportasi dan Pergudangan (-12,77%) dan Akomodasi dan Makan Minum (-9,62%), berbagai sektor mulai pulih. Sektor



Informasi dan Komunikasi mencatat pertumbuhan stabil di atas 6%, sementara sektor Transportasi dan Akomodasi mengalami lonjakan signifikan sejak 2022. Sektor Konstruksi dan Perdagangan juga menunjukkan pemulihan yang kuat, masing-masing tumbuh 6,52% dan 4,44% pada 2024. Dari sisi produksi, tiga sektor Lapangan Usaha yang tumbuh tertinggi adalah sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan-Minum yaitu sebesar 11,98 persen; sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 7,41 persen; dan sektor Jasa Lainnya sebesar 6,54 persen. Lapangan usaha yang memiliki peran penting terhadap perekonomian Sumatera Utara adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh sebesar 3,73 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 4,44 persen; Industri Pengolahan sebesar 4,65 persen; dan Konstruksi sebesar 6,52 persen.

Namun, masih terdapat tantangan dalam mendorong sektor industri olahan agar dapat berperan lebih besar sebagai motor perekonomian Sumatera Utara, khususnya pada segmen bioindustri. Penguatan kerjasama antara wilayah penghasil produk *advanced* dengan wilayah penghasil bahan baku dan produk antara di wilayah sekitarnya berperan besar dalam meningkatkan keterkaitan aktivitas ekonomi satu sama lainnya, yang diharapkan dapat mendistribusikan margin dari proses industrialisasi ini secara lebih merata dan lebih menjangkau lebih banyak pihak. Fokus ini membuka peluang dalam meningkatkan pertumbuhan sektor industri olahan yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan PDRB nya.

Tabel 2.10 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Pengeluaran

Kategori Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	-2,83	2,16	4,55	5,59	5,43
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-4,02	-2,59	5,47	9,27	11,79
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-1,69	3,46	-3,34	3,98	4,01
Pembentukan Modal Tetap Bruto	-1,17	3,46	3,83	4,48	4,95
Perubahan Inventori	-	-7,09	10,11	7,79	-23,78
Ekspor Luar Negeri	-10,3	14,44	11,48	-0,4	11,22
Impor Luar Negeri	-14,85	18,32	11,22	-1,72	12,12
Sumatera Utara	-1,07	2,61	4,73	5,01	5,03

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen PK-LNPRT yang tumbuh sebesar 11,79 persen. Komponen Pengeluaran Konsumsi RT tumbuh sebesar 5,43 persen. Dengan kontribusi yang paling besar, pertumbuhan Konsumsi RT di tahun 2023 dan 2024 yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan PDRBnya menggambarkan daya beli masyarakat yang semakin membaik. Kontribusinya yang paling besar terhadap perekonomian Sumatera Utara menjadikan komponen ini memberikan dampak terbesar atas pencapaian kinerja pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 4,95 persen, angka ini lebih rendah dari capaian pertumbuhan agregatnya. Hal ini menunjukkan masih adanya tantangan dalam meningkatkan iklim usaha dan investasi, terutama dari sisi kepastian hukum dan jaminan keamanan.

Sementara itu Pengeluaran Konsumsi Pemerintah tumbuh stabil dan meningkat hingga sebesar 4,01 persen, menunjukkan komitmen yang kuat dari Provinsi yang berperan dalam menstimulan seluruh aktivitas ekonomi. Kinerja ekspor masih menjadi salah satu motor penggerak ekonomi utama Sumatera Utara. Hal ini juga turut ditopang oleh tetap kuatnya permintaan domestik, khususnya investasi sejalan dengan masih berlangsungnya akselerasi pembangunan berbagai proyek strategis. Sebagian besar sektor utama seperti perdagangan, industri dan transportasi juga mencatatkan akselerasi.

Tabel 2.11 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata
Nias	1,80	2,21	3,06	3,82	3,89	2,96
Mandailing Natal	-0,94	3,20	4,34	4,93	4,83	3,27
Tapanuli Selatan	0,39	3,24	4,78	5,11	5,12	3,73
Tapanuli Tengah	-0,76	2,56	4,18	4,23	4,15	2,87
Tapanuli Utara	1,50	3,54	4,25	4,75	4,77	3,76
Toba	-0,27	2,92	4,24	4,93	4,84	3,33
Labuhanbatu	0,09	3,85	4,80	5,03	5,06	3,77
Asahan	0,21	3,73	4,66	4,87	4,68	3,63
Simalungun	1,01	3,70	4,68	5,07	4,89	3,87
Dairi	-0,94	2,05	4,21	5,04	4,97	3,07
Karo	-0,80	2,25	4,22	5,06	4,22	2,99
Deli Serdang	-1,78	2,23	4,70	5,34	5,36	3,17
Langkat	-0,86	3,08	4,69	4,93	4,98	3,36
Nias Selatan	0,61	2,02	3,08	3,65	3,82	2,64
Humbang Hasundutan	-0,13	2,02	4,21	4,38	4,79	3,05
Pakpak Bharat	-0,18	2,54	4,27	5,10	5,02	3,35
Samosir	-0,59	2,65	4,48	5,03	5,02	3,32
Serdang Bedagai	-0,44	2,87	4,46	5,03	5,01	3,39
Batu Bara	-0,31	2,35	4,07	4,08	4,12	2,86
Padang Lawas Utara	1,14	3,26	4,12	4,92	4,99	3,69
Padang Lawas	1,18	3,83	4,61	5,14	5,02	3,96
Labuhanbatu Selatan	0,80	3,82	4,74	4,94	4,89	3,84
Labuhanbatu Utara	0,27	3,83	4,62	4,76	4,24	3,54
Nias Utara	1,58	2,02	3,03	3,79	3,64	2,81
Nias Barat	1,66	2,26	3,01	3,72	3,89	2,91
Sibolga	-1,36	2,10	4,15	4,20	3,92	2,60
Tanjungbalai	-0,47	2,35	3,94	4,86	4,91	3,12
Pematangsiantar	-1,89	1,25	3,47	4,22	4,61	2,33
Tebing Tinggi	-0,70	2,51	4,01	3,98	3,37	2,63
Medan	-1,98	2,62	4,71	5,04	5,07	3,09
Binjai	-1,83	2,23	4,18	4,75	4,66	2,80
Padangsidempuan	-0,73	2,75	4,77	5,09	5,01	3,38
Gunungsitoli	0,38	2,25	3,11	3,69	3,84	2,65

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025



Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2020–2024, terlihat bahwa secara umum seluruh wilayah mengalami tren pemulihan ekonomi pasca pandemi dengan capaian pertumbuhan yang positif dan cenderung meningkat, selaras dengan arah pertumbuhan ekonomi provinsi. Namun demikian, terdapat disparitas laju pertumbuhan antardaerah yang cukup mencolok. Beberapa wilayah seperti Deli Serdang, Padang Lawas, dan Labuhanbatu menunjukkan kinerja yang konsisten tinggi dengan rata-rata pertumbuhan di atas rata-rata provinsi (3,61%), yang turut menopang pencapaian pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara secara agregat. Sebaliknya, daerah seperti Pematangsiantar, Gunungsitoli, dan Sibolga mencatat rata-rata pertumbuhan terendah, di bawah 2,7%, mengindikasikan perlunya intervensi dan dukungan pembangunan ekonomi yang lebih merata. Meskipun secara umum tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten/kota menunjukkan arah positif dan stabil, upaya penguatan struktur ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkeadilan tetap menjadi prioritas untuk menyeimbangkan kontribusi antarwilayah terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara secara keseluruhan.

2.1.2.2 Laju Inflasi

Laju inflasi di Provinsi Sumatera Utara menjadi salah satu indikator penting dalam menggambarkan kondisi perekonomian daerah tersebut. Inflasi, yang merujuk pada kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam periode tertentu, memiliki dampak signifikan terhadap daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi. Inflasi Year-on-Year (Y-o-Y) di Sumatera Utara pada 2024 menggambarkan tren inflasi yang cenderung stabil meskipun ada fluktuasi bulanan. Inflasi Y-o-Y pada 2024 tercatat sebesar 2,12%, dengan beberapa komponen penyumbang utama seperti Makanan dan Minuman (yang berkontribusi 1,26%), serta Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (yang memberikan andil sebesar 0,37%). Komponen lain seperti pakaian dan alas kaki, serta transportasi, menunjukkan kontribusi yang relatif kecil terhadap inflasi tahunan.

Tabel 2.12 Perbandingan Inflasi Sumatera Utara, Nasional dan Wilayah Penghitung Inflasi di Sumatera Utara

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	1,68	1,87	5,51	2,61	1,57
Sumatera Utara	1,96	1,71	6,12	2,25	2,12
Sibolga	2,42	1,86	6,43	2,80	2,94
Pematangsiantar	2,78	2,12	6,16	2,30	2,86
Medan	1,76	1,70	6,10	2,19	2,12
Padangsidempuan	3,27	1,49	6,40	2,95	2,46
Gunungsitoli	5,32	0,54	5,74	2,35	3,10
Labuhanbatu					3,36
Karo					1,33
Deli Serdang					1,80

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Tingkat inflasi sepanjang tahun juga menunjukkan fluktuasi, dengan puncaknya tercatat pada bulan April (4,26%) dan penurunan signifikan pada bulan Agustus (1,59%). Hal ini mungkin mencerminkan variasi harga



komoditas, terutama makanan, yang lebih volatil sepanjang tahun. Dari segi distribusi, inflasi tertinggi tercatat di Kabupaten Labuhanbatu (3,36%), sementara inflasi terendah tercatat di Kabupaten Karo (1,33%), yang mungkin menunjukkan perbedaan dalam dinamika ekonomi lokal dan harga komoditas di kedua wilayah tersebut.

Pada tahun 2020, inflasi Sumatera Utara tercatat 1,96%, sedikit lebih tinggi dibandingkan nasional yang hanya 1,68%. Pada tahun 2024, inflasi Sumatera Utara yaitu 2,12%, lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional yang tercatat 1,57%. Di tingkat wilayah, beberapa daerah di Sumatera Utara menunjukkan angka inflasi yang jauh lebih tinggi. Misalnya, Gunungsitoli memiliki inflasi yang sangat tinggi pada tahun 2020 (5,32%) yang kemudian menurun pada tahun 2024 menjadi 3,10%. Wilayah lain seperti Labuhanbatu dan Sibolga juga mencatatkan inflasi yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya, pada tahun 2024. Kondisi ini mungkin disebabkan oleh faktor lokal seperti harga komoditas yang fluktuatif, tingkat ketersediaan barang dan jasa yang terbatas, atau perbedaan dalam tingkat permintaan dan penawaran di masing-masing wilayah.

2.1.2.3 Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara dari 2020-2025 terus mengalami penurunan mulai dari 1,357 juta jiwa pada September 2020 menjadi 1,140 juta pada Maret 2025. Garis kemiskinan pada bulan Maret 2025 mencapai Rp 666.546 per Kapita per Bulan. Pada Bulan Maret 2025 angka kemiskinan Sumatera Utara mengalami kenaikan sebesar 0,17 poin yaitu dari 7,19 persen pada September 2024 menjadi 7,36 persen pada Maret 2025 atau bertambah sekitar 29,3 ribu jiwa dari September 2024. Pada periode September 2020 – Maret 2025 tingkat kemiskinan di Sumatera Utara secara linier cenderung menurun meskipun terjadi fluktuasi dalam jumlah maupun persentase penduduk miskin.

Gambar 2.8 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara

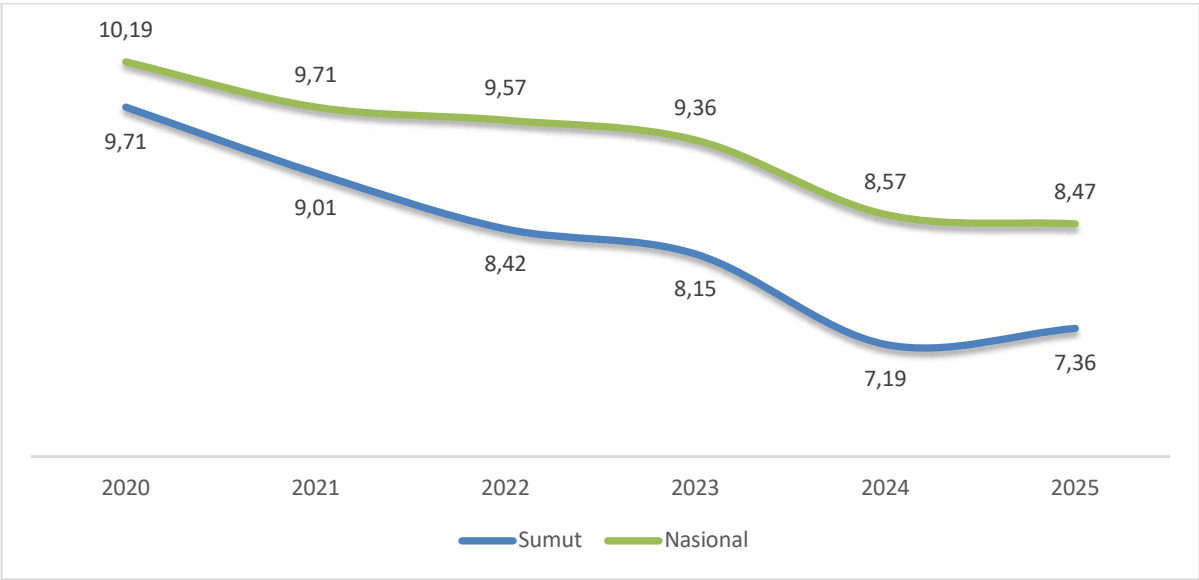


Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Berdasarkan gambar perbandingan tingkat kemiskinan Sumatera Utara dan nasional tahun 2020–2025, terlihat bahwa tingkat kemiskinan di Sumatera Utara secara konsisten berada di bawah rata-rata nasional, meskipun keduanya menunjukkan tren penurunan yang positif. Pada tahun 2020, angka kemiskinan Sumut dan nasional sama-sama berada di 9,71% dan 10,19%, namun hingga tahun 2024 Sumut berhasil menurunkan tingkat kemiskinannya menjadi 7,19% dibanding nasional yang berada di 8,57%.

Pada awal periode 2025, terjadi peningkatan tipis tingkat kemiskinan Sumatera Utara menjadi 7,36% sedangkan secara nasional cenderung menurun menjadi 8,47%. Capaian Sumut yang lebih baik dapat dijelaskan oleh beberapa faktor seperti tingginya kontribusi sektor pertanian dan perkebunan rakyat yang memberikan lapangan kerja luas di pedesaan, efektivitas program perlindungan sosial di tingkat daerah, serta meningkatnya akses terhadap pendidikan dan layanan dasar. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang lebih merata di berbagai wilayah Sumut turut mendukung konektivitas dan akses pasar, yang berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan lebih cepat dibandingkan tingkat nasional.

Gambar 2.9 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Sumatera Utara dan Nasional



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan data perkembangan tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2020–2025, secara umum menunjukkan tren penurunan yang positif dan selaras dengan capaian provinsi, di mana angka kemiskinan berhasil diturunkan dari 9,71 persen pada tahun 2020 menjadi 7,19 persen pada tahun 2024. Namun demikian, disparitas antarwilayah masih menjadi isu utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah. Beberapa kabupaten/kota seperti Nias Utara, Nias Barat, dan Nias Selatan secara konsisten mencatatkan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi, masing-masing mencapai 20,79 persen, 22,47 persen, dan 16,16 persen pada tahun 2025, jauh di atas rata-rata provinsi. Di sisi lain, sejumlah kota seperti Binjai (4,71%), Medan (7,25%), dan Pematangsiantar (6,24%) menunjukkan capaian yang relatif lebih baik dan stabil. Fenomena ini mencerminkan ketimpangan pembangunan dan akses terhadap layanan dasar yang masih belum merata antarwilayah. Oleh karena itu, strategi penanggulangan kemiskinan di Sumatera Utara ke depan perlu diarahkan pada pendekatan berbasis kewilayahan yang lebih responsif terhadap karakteristik lokal, dengan memperkuat program pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan konektivitas dan infrastruktur dasar di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi.



Tabel 2.13 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

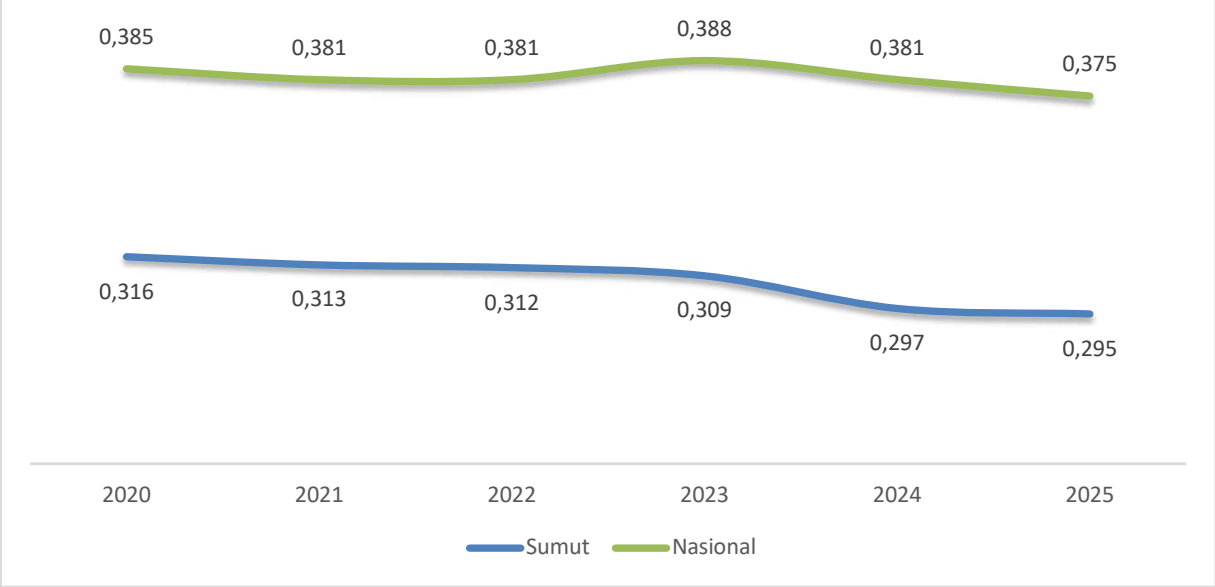
Kabupaten/Kota/Provinsi		2021	2022	2023	2024	Maret 2025
1	Kab. N i a s	16,82	16,00	15,10	14,89	14,51
2	Kab. Mandailing Natal	9,49	8,92	8,86	8,69	7,91
3	Kab. Tapanuli Selatan	8,80	8,07	7,01	6,92	6,16
4	Kab. Tapanuli Tengah	12,67	11,71	11,50	11,8	11,03
5	Kab. Tapanuli Utara	9,72	8,93	8,54	8,21	7,47
6	Kab. Toba	8,99	8,89	8,04	8,07	7,21
7	Kab. Labuhanbatu	8,74	8,26	7,99	7,84	7,37
8	Kab. Asahan	9,35	8,64	8,21	8,12	7,18
9	Kab. Simalungun	8,81	8,26	7,87	7,72	6,91
10	Kab. Dairi	8,31	7,88	7,47	7,1	6,98
11	Kab. K a r o	8,79	8,17	7,98	7,37	6,66
12	Kab. Deli Serdang	4,01	3,62	3,44	3,44	3,11
13	Kab. Langkat	10,12	9,49	9,23	9,04	8,42
14	Kab. Nias Selatan	16,92	16,48	16,39	16,32	16,16
15	Kab. Humbang Hasundutan	9,65	8,86	8,69	8,44	7,8
16	Kab. Pakpak Bharat	9,35	8,66	7,54	6,87	6,4
17	Kab. Samosir	12,68	11,77	11,66	11,63	10,79
18	Kab. Serdang Bedagai	8,30	7,82	7,44	6,97	6,18
19	Kab. Batu Bara	12,38	11,53	11,38	10,94	10,1
20	Kab. Padang Lawas Utara	9,92	8,94	8,79	8,97	8,04
21	Kab. Padang Lawas	8,69	8,05	7,89	7,87	7,32
22	Kab. Labuhanbatu Selatan	8,53	8,09	8,06	7,73	6,8
23	Kab. Labuhanbatu Utara	10,02	9,09	9,08	8,98	8,42
24	Kab. Nias Utara	25,66	23,40	21,79	21,5	20,79
25	Kab. Nias Barat	26,42	24,75	22,81	22,68	22,47
26	Kota Sibolga	12,33	11,47	11,42	11,39	10,28
27	Kota Tanjung Balai	13,40	12,45	12,21	11,97	10,67
28	Kota Pematang Siantar	8,52	7,88	7,24	7,2	6,24
29	Kota Tebing Tinggi	10,30	9,59	9,49	8,79	8,74
30	Kota Medan	8,34	8,07	8,00	7,94	7,25
31	Kota Binjai	5,81	5,10	4,79	4,75	4,71
32	Kota Padangsidimpuan	7,53	6,89	6,85	6,23	5,61
33	Kota Gunungsitoli	16,45	14,81	14,78	14,72	13,85
SUMATERA UTARA		9,01	8,42	8,15	7,99	7,36

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

2.1.2.4 Rasio Gini

Rasio Gini merupakan ukuran tingkat ketimpangan pendapatan penduduk yang banyak digunakan di berbagai negara. Gambar di bawah menunjukkan bahwa tren rasio Gini Sumatera Utara menunjukkan kinerja yang stabil menurun, sedangkan kinerja nasional masih mengalami fluktuasi yang cenderung stagnan di angka 0,381. Jarak antar garis menggambarkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat secara Nasional relatif lebih lebar dibandingkan kondisi di Sumatera Utara.

Gambar 2.10 Rasio Gini Provinsi Sumatera Utara dan Nasional



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Selama periode 2020–2025, Sumatera Utara mencatat penurunan Indeks Gini yang cukup konsisten, dari 0,316 pada tahun 2020 menjadi 0,295 pada tahun 2025. Penurunan ini mencerminkan perbaikan dalam distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat di provinsi tersebut. Sementara itu, tingkat ketimpangan nasional relatif stagnan, dengan kisaran nilai antara 0,381 hingga 0,388 dalam periode yang sama.. Artinya, meskipun secara nasional ketimpangan belum menunjukkan perbaikan signifikan, Sumatera Utara justru berhasil mencatat kemajuan yang lebih progresif dalam aspek pemerataan ekonomi. Penurunan rasio Gini di satu sisi menggambarkan tingkat pemerataan pengeluaran yang lebih baik, namun perlu juga diwaspadai jika penurunan ini dihasilkan dari menurunnya daya beli kelas menengah, dan akibat dari melambatnya peningkatan pendapatan per kapita di beberapa wilayah. Kondisi ini akan menyebabkan relatif stagnannya perbaikan kualitas hidup masyarakat, sehingga perlu upaya yang lebih mendorong peningkatan pendapatan masyarakat yang lebih luas dengan tetap memperhatikan pergerakan indikator ini agar tetap stabil terjaga.

Tabel 2.14 Rasio Gini Kabupaten/Kota Sumatera Utara

Kabupaten Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Nias	0,251	0,245	0,275	0,279	0,247
Mandailing Natal	0,248	0,240	0,244	0,249	0,250
Tapanuli Selatan	0,202	0,256	0,209	0,219	0,206
Tapanuli Tengah	0,335	0,292	0,233	0,241	0,234
Tapanuli Utara	0,287	0,277	0,242	0,262	0,242
Toba	0,290	0,272	0,305	0,295	0,348
Labuhanbatu	0,272	0,256	0,278	0,244	0,251
Asahan	0,261	0,244	0,255	0,260	0,248
Simalungun	0,295	0,264	0,262	0,295	0,257
Dairi	0,271	0,227	0,221	0,241	0,215



Kabupaten Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Karo	0,271	0,233	0,236	0,240	0,214
Deli Serdang	0,312	0,263	0,270	0,295	0,262
Langkat	0,238	0,238	0,260	0,257	0,260
Nias Selatan	0,287	0,241	0,223	0,261	0,247
Humbang Hasundutan	0,246	0,304	0,258	0,256	0,302
Pakpak Bharat	0,248	0,242	0,274	0,251	0,262
Samosir	0,318	0,274	0,298	0,251	0,238
Serdang Bedagai	0,262	0,229	0,240	0,225	0,242
Batu Bara	0,259	0,240	0,243	0,255	0,258
Padang Lawas Utara	0,228	0,255	0,245	0,241	0,223
Padang Lawas	0,265	0,253	0,227	0,225	0,224
Labuhanbatu Selatan	0,194	0,232	0,247	0,231	0,212
Labuhanbatu Utara	0,262	0,243	0,276	0,238	0,239
Nias Utara	0,251	0,236	0,239	0,228	0,234
Nias Barat	0,234	0,224	0,210	0,208	0,219
Sibolga	0,291	0,276	0,346	0,246	0,313
Tanjungbalai	0,272	0,248	0,245	0,238	0,236
Pematangsiantar	0,336	0,308	0,321	0,329	0,297
Tebing Tinggi	0,334	0,344	0,334	0,317	0,335
Medan	0,320	0,402	0,399	0,373	0,356
Binjai	0,324	0,290	0,302	0,318	0,312
Padangsidempuan	0,354	0,310	0,275	0,267	0,296
Gunungsitoli	0,322	0,317	0,303	0,308	0,277

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Beberapa daerah menunjukkan tren penurunan ketimpangan, seperti Labuhanbatu Selatan yang turun dari 0,194 (2020) ke 0,212 (2024), menandakan pemerataan ekonomi yang tidak membaik. Sebaliknya, Toba mencatat lonjakan drastis dari 0,290 ke 0,348, mencerminkan meningkatnya ketimpangan. Kota-kota besar seperti Medan dan Tebing Tinggi secara konsisten mencatat Rasio Gini yang tinggi di atas 0,33, mengindikasikan disparitas pendapatan yang mencolok di kawasan perkotaan. Di sisi lain, beberapa daerah seperti Padang Lawas, Padang Lawas Utara, dan Nias Barat mempertahankan Rasio Gini yang relatif rendah ($<0,23$), menandakan ketimpangan yang lebih kecil meski bukan berarti tingkat kesejahteraan tinggi. Rata-rata provinsi Sumatera Utara sendiri menurun dari 0,316 (2020) menjadi 0,297 (2024), menandakan perbaikan kecil dalam hal distribusi pendapatan secara keseluruhan. Namun, fluktuasi signifikan di tingkat kabupaten/kota menunjukkan bahwa kebijakan pemerataan ekonomi belum sepenuhnya merata dampaknya di seluruh wilayah provinsi.

Penurunan Indeks Gini di Sumatera Utara mencerminkan dampak dari berbagai intervensi sosial ekonomi pemerintah daerah, seperti bantuan sosial berskala luas, program pemberdayaan ekonomi kerakyatan,



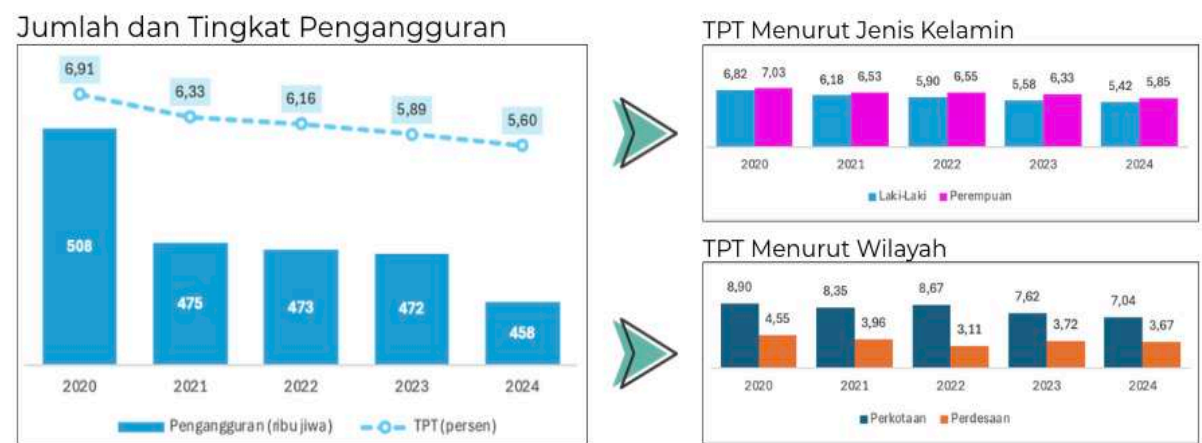
pertumbuhan UMKM, serta penguatan ekonomi perdesaan. Penurunan ini juga mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam periode pemulihan pasca-pandemi cukup inklusif dan mampu menjangkau kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam konteks Sumatera Utara, sektor seperti pertanian, perdagangan mikro, serta jasa informal yang padat tenaga kerja berperan penting dalam menciptakan peluang pendapatan bagi kelompok bawah. Selain itu, jika ditinjau dari perspektif spasial, kebijakan pemerataan pembangunan antarwilayah (kota-des, pusat-daerah) juga turut memengaruhi menurunnya ketimpangan pendapatan.

2.1.2.5 Tingkat pengangguran terbuka (TPT)

Provinsi Sumatera Utara, dengan jumlah penduduk lebih dari 14 juta jiwa, menghadapi tantangan besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang memadai untuk semua angkatan kerja. Penyebab utama tingginya tingkat pengangguran terbuka di provinsi ini seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik struktural maupun konjunktural. Salah satu faktor utama adalah ketidaksesuaian antara jumlah lulusan pendidikan dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Banyak lulusan perguruan tinggi atau pendidikan vokasi yang kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahlian mereka.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Sumatera Utara cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini salah satunya disebabkan karena semakin banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia. Pada tahun 2020 TPT di Sumatera Utara meningkat tajam dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid 19 yang mengakibatkan banyak lapangan pekerjaan tutup. Apabila dibandingkan dengan angka nasional, TPT di Sumatera Utara cenderung selalu lebih tinggi. Jika dilihat, Penduduk yang bekerja pada Agustus 2024 sebanyak 7.723 ribu orang, naik sebanyak 173 ribu orang dari Agustus 2023. Lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 91 ribu orang. persentase penduduk yang bekerja di sektor formal selalu lebih rendah apabila dibandingkan dengan penduduk yang bekerja pada sektor informal maupun penduduk yang bekerja di sektor formal.

Gambar 2.11 Angka Pengangguran, Menurut Jenis Kelamin, dan Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024

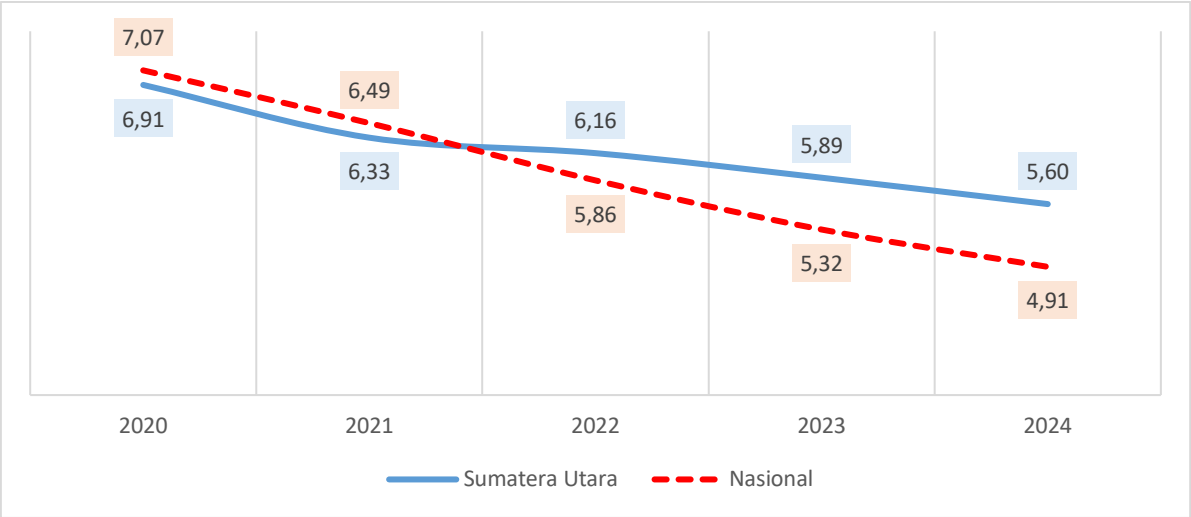


Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025



Pada Agustus 2024 sebanyak 3.294 ribu orang (42,65 persen) bekerja pada kegiatan formal, naik sebesar 1,17 persen poin dibanding Agustus 2023. kemudian, persentase setengah pengangguran pada Agustus 2024 naik sebesar 1,99 persen poin, sementara pekerja paruh waktu turun sebesar 1,09 persen poin dibanding Agustus 2023. Pada umumnya penduduk yang bekerja di sektor formal memiliki upah yang lebih stabil dibanding penduduk yang bekerja di sektor informal.

Gambar 2.12 Perbandingan Tingkat Pengangguran Sumatera Utara dan Nasional



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar perbandingan tingkat pengangguran Sumatera Utara dan nasional dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Sumatera Utara secara umum lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat nasional, meskipun keduanya mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2020, tingkat pengangguran di Sumut berada di 6,91%, sementara nasional lebih tinggi di 7,07%. Namun, hingga 2024, tingkat pengangguran nasional tercatat lebih rendah (4,91%) dibandingkan Sumut yang berada di 5,60%. Penurunan yang lebih lambat di Sumut dapat dijelaskan oleh beberapa faktor, termasuk ketergantungan tinggi terhadap sektor-sektor yang kurang mampu menyerap tenaga kerja terampil, seperti sektor pertanian dan perkebunan yang mayoritas bersifat musiman dan padat karya rendah. Selain itu, rendahnya diversifikasi sektor industri di Sumut turut membatasi penciptaan lapangan kerja yang lebih stabil. Sedangkan di tingkat nasional, sektor industri manufaktur dan jasa yang lebih berkembang di wilayah-wilayah besar seperti Jawa berhasil menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, mempercepat penurunan tingkat pengangguran.

Tabel 2.15 Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota Sumatera Utara

Kabupaten Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Nias	3,49	3,12	2,81	2,31	2,10
Mandailing Natal	6,50	6,12	7,64	7,45	7,22
Tapanuli Selatan	4,42	4,00	3,65	3,49	3,41
Tapanuli Tengah	7,54	7,24	7,97	7,81	7,45
Tapanuli Utara	2,94	1,54	1,07	1,03	1,21



Kabupaten Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Toba	2,50	0,83	1,39	1,30	1,09
Labuhanbatu	6,05	5,66	6,90	5,99	5,90
Asahan	7,24	6,39	6,26	6,12	5,94
Simalungun	4,58	4,17	5,51	5,35	5,17
Dairi	1,75	1,49	0,88	1,23	1,43
Karo	1,83	1,95	2,71	2,63	2,40
Deli Serdang	9,50	9,13	8,79	8,62	8,02
Langkat	7,02	5,12	6,88	6,33	6,08
Nias Selatan	4,15	3,91	3,69	3,48	3,03
Humbang Hasundutan	0,84	1,94	0,42	0,84	0,92
Pakpak Bharat	1,93	1,36	0,26	0,45	0,97
Samosir	1,20	0,70	1,16	1,03	0,89
Serdang Bedagai	5,54	3,93	4,98	4,97	4,88
Batu Bara	6,48	6,62	6,21	5,88	5,75
Padang Lawas Utara	3,11	3,19	4,31	4,42	3,99
Padang Lawas	4,11	4,07	5,90	5,75	5,47
Labuhanbatu Selatan	4,90	4,71	3,15	3,43	3,24
Labuhanbatu Utara	6,82	5,74	3,75	4,84	4,60
Nias Utara	4,54	3,00	2,59	2,57	2,82
Nias Barat	1,71	0,74	0,53	0,80	1,00
Sibolga	8,00	8,72	7,05	6,79	6,52
Tanjungbalai	6,97	6,59	4,62	4,47	4,08
Pematangsiantar	11,50	11,00	9,36	8,62	8,00
Tebing Tinggi	9,98	8,00	6,39	6,24	6,18
Medan	10,74	10,81	8,89	8,67	8,13
Binjai	8,67	7,86	6,36	6,10	5,44
Padangsidempuan	7,45	7,18	7,76	7,57	7,17
Gunungsitoli	5,94	4,80	3,65	3,67	3,30

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Dari tabel diatas, Tingkat Pengangguran Terbuka pada Kabupaten/Kota di tahun 2023 menunjukkan penurunan pada tahun 2024. sebagian besar kabupaten/kota di Sumatera Utara mengalami penurunan TPT selama periode 2020–2024. Penurunan ini mencerminkan proses pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19 dan adanya peningkatan kesempatan kerja, baik formal maupun informal, di berbagai wilayah. Wilayah perkotaan cenderung memiliki tingkat pengangguran terbuka yang lebih tinggi dibandingkan wilayah pedesaan. Kota-kota seperti Pematangsiantar (8,00%), Medan (8,13%), dan Deli Serdang (8,02%) masih mencatat angka TPT di atas rata-rata provinsi tahun 2024. Sebaliknya, beberapa kabupaten seperti Humbang Hasundutan (0,92%), Pakpak Bharat (0,97%), dan Nias Barat (1,00%) mencatat TPT yang sangat rendah.

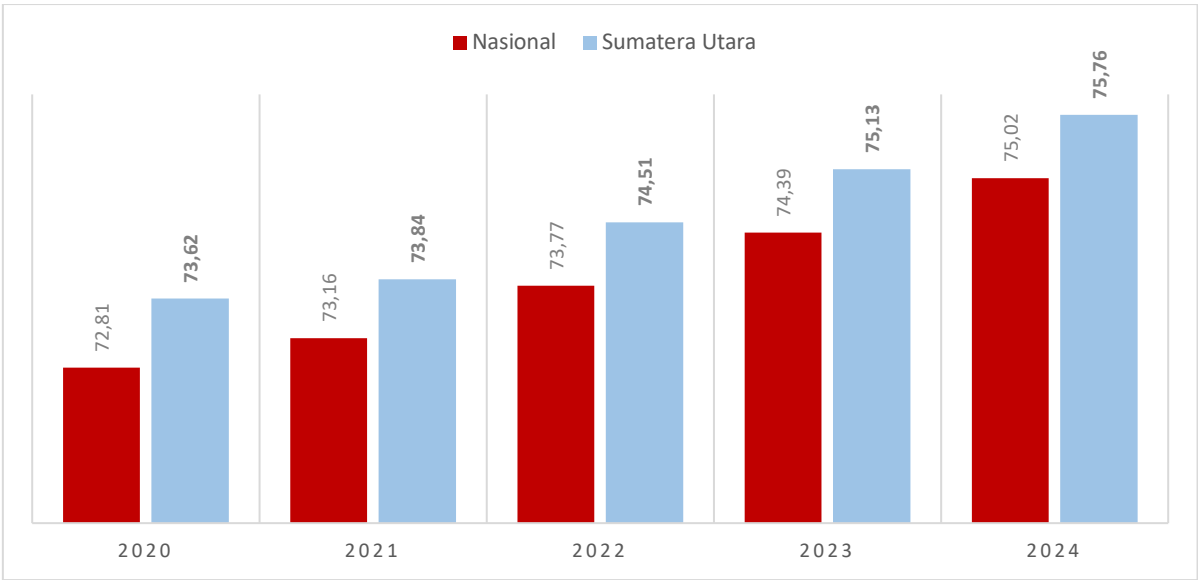


Pemerintah juga terus mendorong peningkatan sektor-sektor yang dapat menyerap tenaga kerja, seperti pariwisata, manufaktur, dan sektor digital. Program-program kewirausahaan dan pelatihan keterampilan teknis juga menjadi langkah penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor yang memiliki keterbatasan dalam menyerap tenaga kerja. Secara keseluruhan, tingkat pengangguran terbuka menurut pendidikan di Sumatera Utara menggambarkan tantangan besar dalam menciptakan kesempatan kerja yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan angkatan kerja. Namun, dengan kebijakan yang tepat, peningkatan keterampilan, serta pengembangan sektor-sektor unggulan yang dapat menyerap tenaga kerja terdidik, diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran dan membuka peluang lebih besar bagi masyarakat. Dengan demikian, meskipun menunjukkan tren perbaikan, Sumatera Utara masih memiliki tantangan dalam menciptakan lapangan kerja yang cukup untuk menurunkan tingkat pengangguran secara lebih kompetitif dibandingkan wilayah lain di Sumatera.

2.1.2.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Utara adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup masyarakat di daerah ini. IPM mencakup tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi. Dengan memantau IPM, dapat terlihat sejauh mana perkembangan sosial dan ekonomi yang terjadi di Sumatera Utara serta tantangan yang harus dihadapi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Gambar 2.13 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Utara dengan Nasional



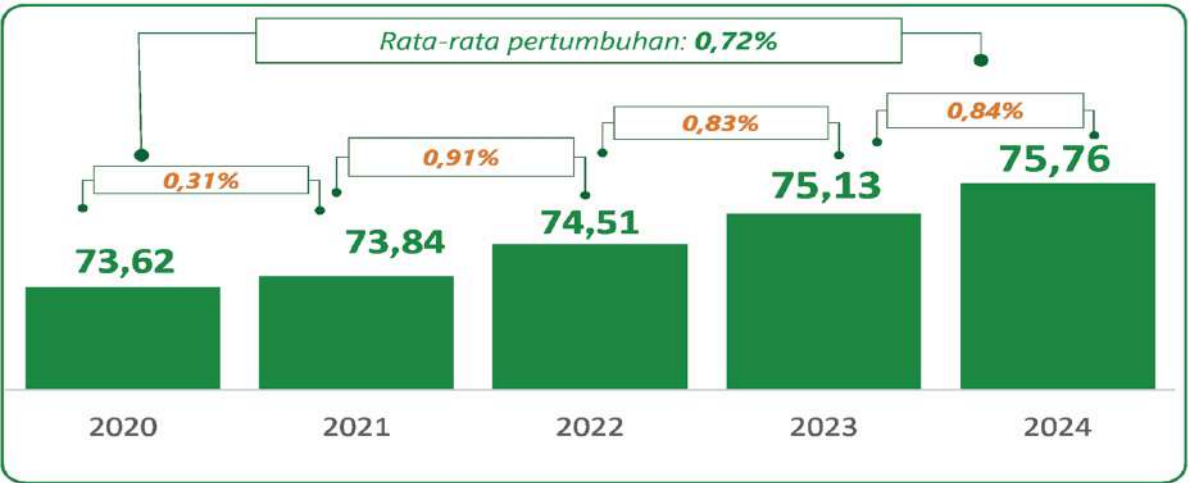
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini mengacu pada konsep Pembangunan Manusia melalui pengukuran keberhasilan pembangunan dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai salah satu indikator pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2020, status pembangunan manusia Sumatera Utara sudah berada di level “tinggi”. Selama 2020-2024, IPM

Sumatera Utara rata-rata meningkat sebesar 0,72 persen per tahun, dari 73,62 pada tahun 2020 menjadi 75,76 pada tahun 2024.

Secara umum terlihat bahwa IPM Provinsi Sumatera Utara terus meningkat dari tahun ke tahun, yang mana pada tahun 2020 IPM tercatat pada angka 73,62 poin dan pada tahun 2024 tercatat pada angka 75,76. Pencapaian tersebut lebih tinggi dari IPM nasional pada tahun 2024 sebesar 75,02. Peningkatan IPM Sumatera Utara 2024 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Pertumbuhan IPM 2024 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama standar hidup layak dan pengetahuan. Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,1 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,48 menjadi 13,49 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,11 tahun, dari 9,82 tahun menjadi 9,93 tahun pada tahun 2024. Sumber data HLS dan RLS menggunakan hasil Susenas Maret dan Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat 411 ribu rupiah (3,72 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Sumber data pengeluaran riil per kapita per tahun menggunakan hasil Susenas Maret.

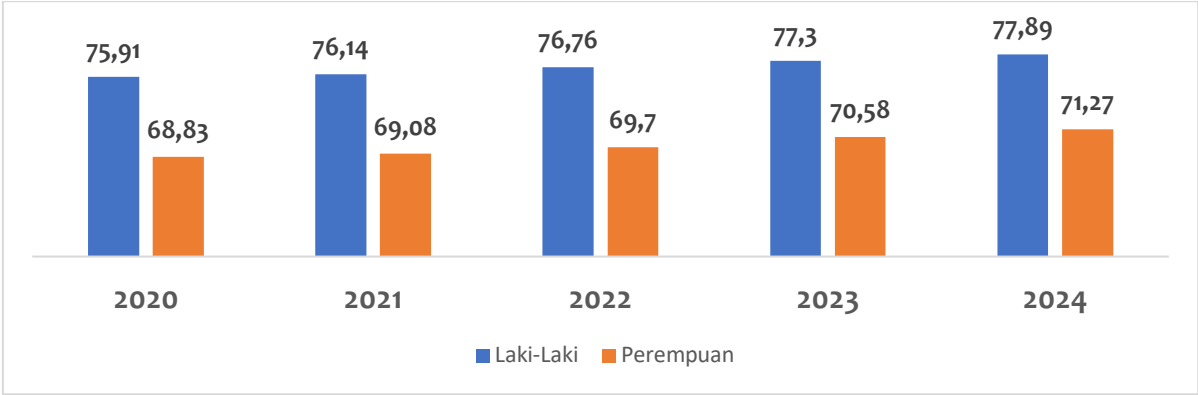
Gambar 2.14 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Utara



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Jika dilihat dari Jenis Kelamin Selama periode 2020 hingga 2024, terjadi peningkatan yang konsisten pada capaian indikator untuk laki-laki dan perempuan, dengan angka laki-laki meningkat dari 75,91 menjadi 77,89, dan perempuan dari 68,83 menjadi 71,27. Meskipun tren perempuan menunjukkan peningkatan yang relatif lebih cepat, kesenjangan gender masih tetap terlihat, dengan selisih capaian antara laki-laki dan perempuan yang hanya sedikit menyempit dari 7,08 poin pada tahun 2020 menjadi 6,62 poin pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan kebijakan afirmatif dan pengarusutamaan gender secara lebih terarah dan berkelanjutan guna mempercepat tercapainya kesetaraan gender dalam pembangunan, sebagaimana grafik dibawah ini:

Gambar 2.15 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Meskipun IPM di Sumatera Utara menunjukkan tren yang positif, tantangan besar masih ada dalam mengatasi ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Infrastruktur yang belum merata, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan berkualitas di daerah terpencil, serta rendahnya pengembangan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja menjadi beberapa tantangan utama yang harus diatasi.

Tabel 2.16 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

KABUPATEN/KOTA	2020	2021	2022	2023	2024
Nias	62,55	63,37	64,30	65,15	66,13
Mandailing Natal	70,89	71,31	72,17	72,65	73,44
Tapanuli Selatan	73,16	73,37	73,96	74,58	75,18
Tapanuli Tengah	71,10	71,48	72,18	72,77	73,34
Tapanuli Utara	75,77	76,06	76,43	76,86	77,48
Toba	76,81	77,03	77,58	77,83	78,44
Labuhanbatu	73,08	73,16	73,96	74,70	75,20
Asahan	72,35	72,55	73,18	73,59	74,17
Simalungun	74,19	74,33	74,68	75,17	75,88
Dairi	73,63	73,89	74,60	75,18	75,88
Karo	75,40	75,81	76,37	76,88	77,49
Deli Serdang	76,11	76,21	76,86	77,16	77,56
Langkat	73,14	73,50	74,03	74,33	74,85
Nias Selatan	62,78	63,24	64,05	64,98	65,87
Humbang Hasundutan	70,70	71,28	72,05	72,49	73,33
Pakpak Bharat	70,30	70,65	71,57	72,30	73,09
Samosir	71,56	71,75	72,57	72,93	73,77
Serdang Bedagai	71,93	72,25	72,89	73,40	74,15
Batu Bara	70,57	70,80	71,75	72,56	73,14
Padang Lawas Utara	71,69	71,96	72,77	73,45	74,16
Padang Lawas	70,08	70,48	71,41	72,16	73,10
Labuhanbatu Selatan	72,86	73,15	73,59	74,23	75,11



KABUPATEN/KOTA	2020	2021	2022	2023	2024
Labuhanbatu Utara	73,47	73,73	74,61	75,45	76,20
Nias Utara	63,17	63,63	64,55	65,44	66,42
Nias Barat	62,58	63,05	63,96	64,68	65,66
Sibolga	75,56	75,87	76,69	77,07	77,52
Tanjungbalai	73,48	73,78	74,73	75,42	75,95
Pematangsiantar	78,75	79,17	79,71	80,46	81,17
Tebing Tinggi	76,40	76,65	77,39	78,17	78,68
Medan	81,31	81,58	82,13	82,61	83,23
Binjai	76,45	76,57	77,50	78,11	78,67
Padangsidempuan	76,93	77,19	77,73	78,10	78,61
Gunungsitoli	70,22	70,51	71,11	71,55	72,30
Sumatera Utara	73,62	73,84	74,51	75,13	75,76

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

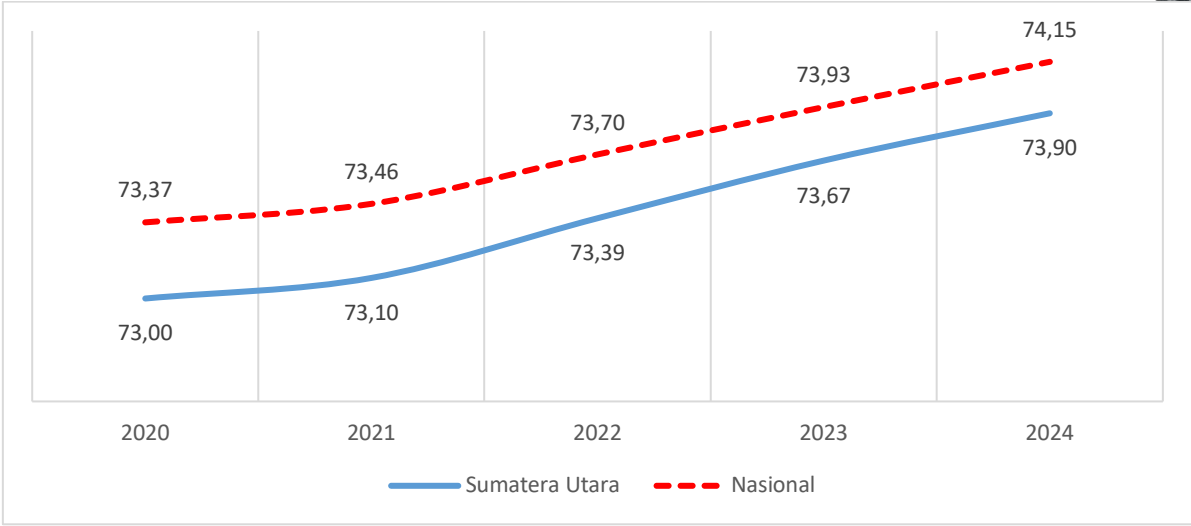
Untuk meningkatkan IPM, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk berkolaborasi dalam menyediakan akses yang lebih baik ke layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan. Pengembangan sektor-sektor unggulan, seperti pariwisata, agribisnis, dan industri kreatif, juga dapat membuka peluang ekonomi baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, perhatian terhadap kualitas pendidikan, kesehatan, serta pemerataan ekonomi, Sumatera Utara dapat terus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia-nya dan memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh masyarakatnya. Peningkatan IPM di tingkat Provinsi juga tercermin pada level Kabupaten/Kota. Jika dilihat pada periode 2020-2023, IPM di seluruh Kabupaten/Kota mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Sumatera Utara mencatat kemajuan yang stabil, masih terdapat gap yang perlu dikejar untuk menyamai provinsi-provinsi dengan IPM lebih tinggi di kawasan Sumatera, khususnya Kepulauan Riau dan Sumatera Barat.

2.1.2.7 Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, UHH Sumatera Utara meningkat sebesar 0,9 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,31 persen per tahun. Pada tahun 2020, UHH Sumatera Utara sebesar 73,00 tahun dan pada tahun 2024 mencapai 73,90 tahun. UHH tahun 2024 meningkat 0,23 tahun (0,38 persen) dibanding tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 (0,27 persen per tahun). Meningkatnya Usia Harapan Hidup menyebabkan meningkatnya penduduk Lanjut Usia (Lansia) sehingga Rasio Ketergantungan semakin meningkat. Selain itu untuk merespons berbagai perubahan yang terjadi perlu penguatan peningkatan layanan Kesehatan Mental. Perbandingan UHH Nasional dan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 2.16 UHH Sumatera Utara dan Nasional

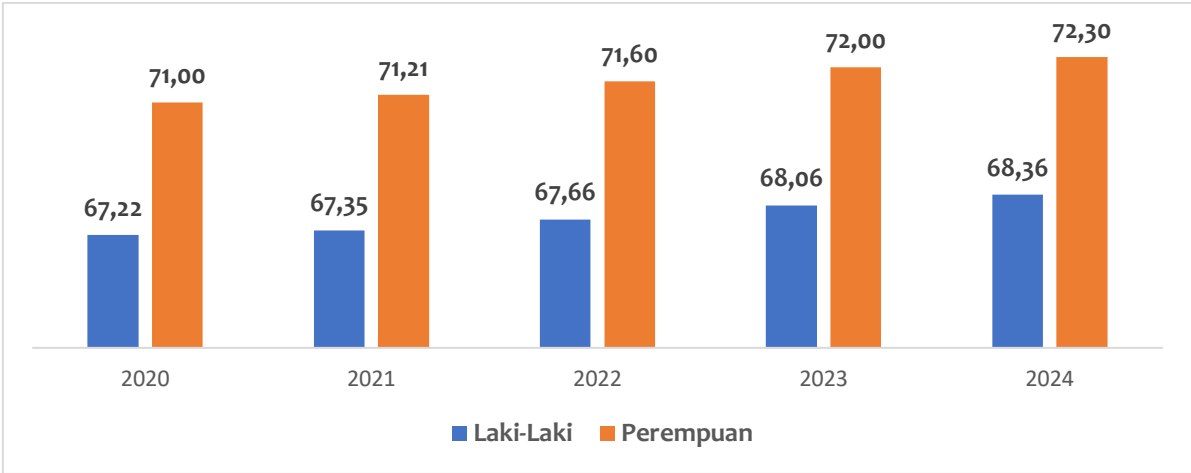


Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (menggunakan hasil Long Form SP2020)

Berdasarkan jenis kelamin Tren Usia Harapan Hidup (UHH) di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan peningkatan yang konsisten pada kedua kelompok jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Peningkatan ini mencerminkan kemajuan pembangunan di bidang kesehatan, terutama dalam hal akses layanan, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hidup sehat, serta intervensi program-program kesehatan masyarakat yang semakin menjangkau kelompok rentan.

UHH laki-laki meningkat dari 67,22 tahun pada tahun 2020 menjadi 68,36 tahun pada tahun 2024, sementara UHH perempuan naik dari 71,00 tahun menjadi 72,30 tahun pada periode yang sama. Meskipun kedua kelompok mengalami perbaikan, UHH perempuan secara konsisten lebih tinggi dari laki-laki setiap tahunnya, dengan selisih yang sedikit melebar dari 3,78 tahun pada 2020 menjadi 3,94 tahun pada 2024. Fenomena ini konsisten dengan kecenderungan nasional maupun global, yang menunjukkan bahwa perempuan cenderung memiliki umur harapan hidup lebih panjang akibat kombinasi faktor biologis, perilaku hidup yang lebih sehat, serta lebih aktif dalam mengakses layanan kesehatan.

Gambar 2.17 UHH Laki-Laki dan Perempuan Provinsi Sumatera Utara



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Selanjutnya data Usia Harapan Hidup (UHH) pada tingkat kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan tren peningkatan yang

positif selama periode 2020 hingga 2024. Rata-rata provinsi meningkat dari 73,00 tahun pada 2020 menjadi 73,90 tahun pada 2024. Beberapa daerah seperti Kota Medan, Pematangsiantar, dan Binjai mencatatkan capaian tertinggi dengan UHH masing-masing mencapai 75,09 tahun, 75,03 tahun, dan 74,45 tahun pada 2024. Sementara itu, beberapa daerah seperti Padang Lawas, Mandailing Natal, dan Nias Selatan berada di kelompok bawah dengan UHH berkisar antara 71,67 hingga 71,88 tahun. Peningkatan usia harapan hidup ini mencerminkan keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial ekonomi yang cukup merata, meskipun masih terdapat kesenjangan antarwilayah.

Tabel 2.17 UHH Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Nias	71,27	71,29	71,52	71,74	71,89
Mandailing Natal	70,95	71,00	71,35	71,72	71,88
Tapanuli Selatan	71,00	71,06	71,35	71,61	71,77
Tapanuli Tengah	71,07	71,16	71,47	71,76	71,96
Tapanuli Utara	73,35	73,48	73,85	74,10	74,36
Toba	73,44	73,64	74,07	74,22	74,54
Labuhanbatu	72,20	72,21	72,55	72,88	73,13
Asahan	72,64	72,74	73,07	73,39	73,65
Simalungun	73,21	73,34	73,70	74,08	74,30
Dairi	73,35	73,53	73,94	74,13	74,38
Karo	73,44	73,64	74,14	74,16	74,39
Deli Serdang	73,13	73,17	73,44	73,65	73,81
Langkat	73,35	73,54	74,02	74,14	74,39
Nias Selatan	70,88	70,98	71,29	71,61	71,77
Humbang Hasundutan	73,31	73,60	73,82	74,07	74,27
Pakpak Bharat	71,46	71,68	72,16	72,61	72,95
Samosir	73,31	73,44	73,8	74,10	74,35
Serdang Bedagai	72,27	72,40	72,76	73,11	73,39
Batu Bara	71,68	71,86	72,29	72,63	72,97
Padang Lawas Utara	71,00	71,04	71,32	71,57	71,74
Padang Lawas	70,98	71,01	71,27	71,52	71,67
Labuhanbatu Selatan	71,76	71,84	72,14	72,46	72,71
Labuhanbatu Utara	73,41	73,50	73,81	74,06	74,23
Nias Utara	71,39	71,50	71,81	72,12	72,30
Nias Barat	71,56	71,65	71,91	72,3	72,55
Sibolga	72,97	73,21	73,75	74,02	74,19
Tanjungbalai	73,08	73,25	73,70	74,01	74,18
Pematangsiantar	73,55	73,77	74,27	74,75	75,03
Tebing Tinggi	73,42	73,49	73,78	74,07	74,29



Kabupaten Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Medan	73,81	73,97	74,32	74,76	75,09
Binjai	73,55	73,62	73,92	74,18	74,45
Padangsidempuan	72,86	72,93	73,23	73,54	73,73
Gunungsitoli	73,22	73,34	73,69	74,03	74,23

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

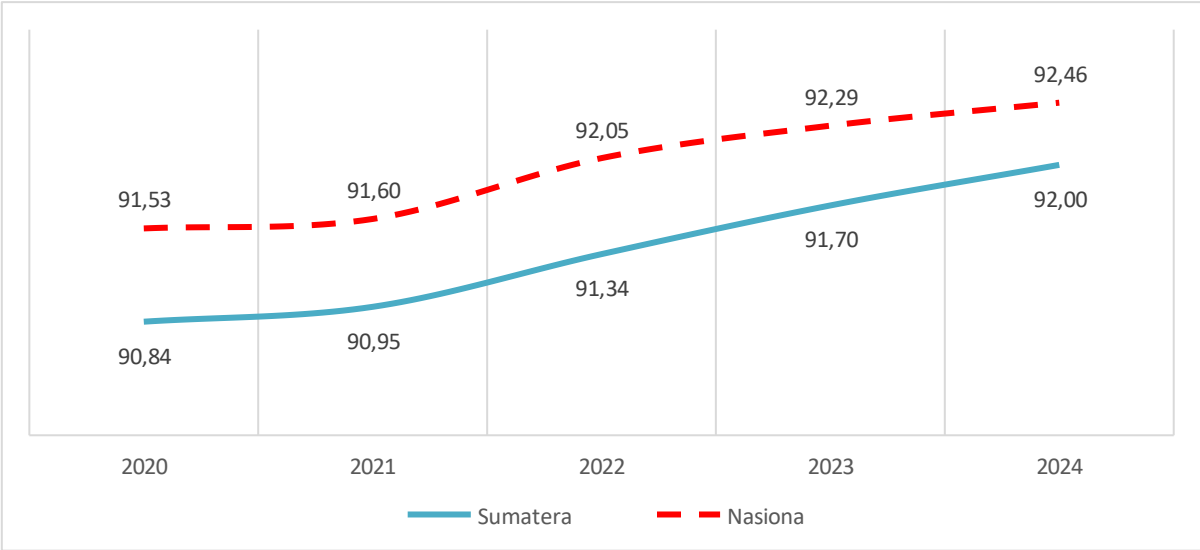
Peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH) di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan tren yang menggembirakan dan mencerminkan perbaikan signifikan dalam aksesibilitas serta kualitas layanan kesehatan, baik dari sisi kuratif maupun preventif. Capaian ini tidak terlepas dari implementasi program strategis seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), revitalisasi dan penguatan layanan Puskesmas, peningkatan cakupan imunisasi, serta penurunan angka kematian ibu dan bayi. Selain itu, peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi layak telah berkontribusi pada penurunan risiko penyakit menular, sementara faktor sosial-ekonomi seperti menurunnya tingkat kemiskinan dan meningkatnya tingkat pendidikan turut mendorong pola hidup sehat dan pemanfaatan layanan kesehatan yang lebih optimal.

Kesadaran masyarakat, terutama di wilayah perkotaan, terhadap pentingnya konsumsi makanan bergizi, aktivitas fisik, dan pemeriksaan kesehatan rutin semakin meningkat seiring dengan kampanye publik yang masif. Namun demikian, disparitas antarwilayah masih menjadi tantangan, ditandai oleh kesenjangan UHH antara kota dan kabupaten, terutama di daerah terpencil dan kepulauan, yang disebabkan oleh keterbatasan fasilitas kesehatan, tenaga medis, infrastruktur dasar, serta prevalensi stunting dan ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan strategis yang mencakup perluasan layanan kesehatan primer di wilayah tertinggal, penguatan program pengendalian penyakit tidak menular, intervensi gizi pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar. Pendekatan holistik berbasis data, integrasi lintas sektor, dan kebijakan yang responsif terhadap tantangan lokal menjadi kunci dalam mewujudkan peningkatan UHH yang merata dan berkelanjutan sebagai cerminan pembangunan manusia yang inklusif dan berkeadilan di Sumatera Utara.

2.1.2.8 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesetaraan gender dalam berbagai dimensi pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, dan partisipasi ekonomi. IPG menghitung sejauh mana perempuan dan laki-laki memiliki akses yang setara terhadap peluang dan sumber daya yang mendukung pembangunan.

Gambar 2.18 Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Sumatera Utara dan Nasional



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Perbandingan Indeks Pembangunan Gender (IPG) antara Sumatera Utara dan Nasional dari tahun 2020 hingga 2024. Dalam periode ini, Sumatera Utara menunjukkan peningkatan yang lebih cepat dibandingkan dengan IPG Nasional. Pada tahun 2020, IPG Sumatera Utara adalah 90,84, sedangkan nasional 91,53, namun Sumatera Utara mulai menunjukkan laju pertumbuhan yang lebih pesat setelah itu. Pada tahun 2024, IPG Sumatera Utara mencapai 92,00, sementara nasional hanya 92,46.

Meskipun keduanya mengalami peningkatan, laju kenaikan IPG Sumatera Utara lebih stabil dan signifikan, menunjukkan bahwa daerah ini mungkin lebih berhasil dalam mengimplementasikan kebijakan atau program yang mendukung kesetaraan gender, meskipun masih ada sedikit perbedaan dengan nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa Sumatera Utara perlu memperkuat upaya untuk mencapai IPG yang lebih tinggi untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih baik dibandingkan dengan rata-rata nasional. Jika dilihat dari Kabupaten/Kota, maka hampir seluruh kabupaten kota capainnya meningkat, sebagaimana terlihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 2.18 IPG Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Nias	90.81	91.25	91.28	91.05	91.22
Mandailing Natal	93.24	93.47	93.42	93.68	93.88
Tapanuli Selatan	90.86	90.74	90.99	90.63	90.75
Tapanuli Tengah	94.85	94.93	94.95	95.23	95.38
Tapanuli Utara	97.98	97.93	98.16	97.75	97.69
Toba	97.96	98.06	98.51	98.32	98.24
Labuhanbatu	90.86	90.88	90.81	90.74	90.85
Asahan	91.51	91.66	91.93	91.91	92.06
Simalungun	93.02	93.05	93.16	93.09	93.41
Dairi	98.02	98.05	98.15	98.44	98.37
Karo	96.19	95.90	96.38	96.36	96.49
Deli Serdang	91.29	91.18	91.61	91.92	92.15
Langkat	89.24	89.02	89.03	88.77	89.05
Nias Selatan	87.58	88.28	89.19	89.68	89.84



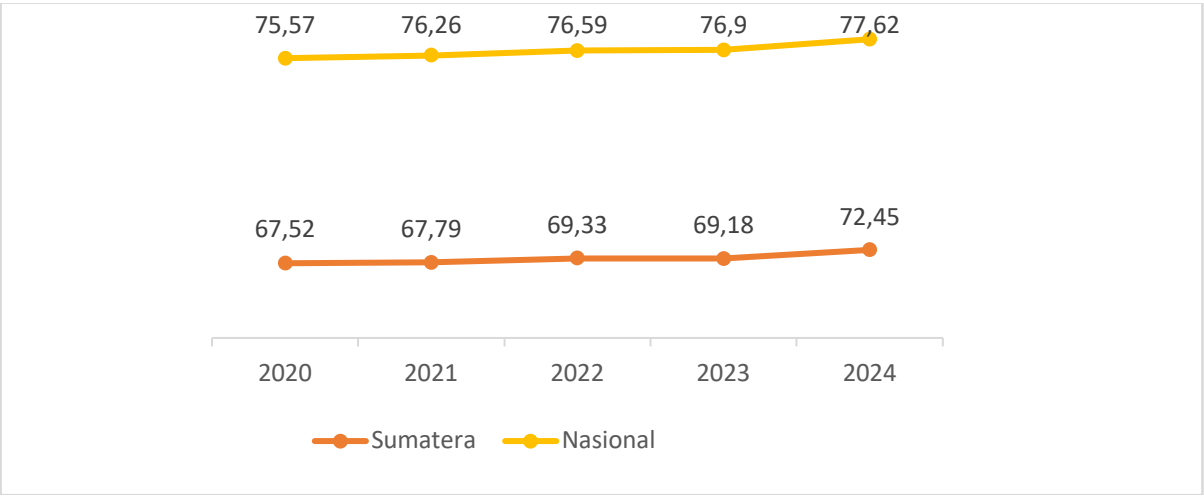
Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Humbang Hasundutan	97.38	97.32	97.65	97.45	97.42
Pakpak Bharat	99.02	98.89	99.25	98.99	99.20
Samosir	96.51	96.59	96.76	96.74	96.93
Serdang Bedagai	88.74	89.00	89.19	88.87	89.07
Batu Bara	83.08	83.22	83.51	83.76	84.06
Padang Lawas Utara	87.92	88.06	88.10	88.26	88.47
Padang Lawas	85.75	85.94	86.24	86.56	86.97
Labuhanbatu Selatan	87.43	87.61	87.98	88.34	88.88
Labuhanbatu Utara	89.80	89.96	90.13	90.43	90.60
Nias Utara	79.37	79.63	80.12	80.51	80.92
Nias Barat	86.67	86.79	87.02	87.33	87.57
Kota Sibolga	97.63	97.89	97.90	98.01	98.00
Kota Tanjung Balai	89.69	90.02	90.28	90.53	90.89
Kota Pematang Siantar	95.65	95.82	95.96	95.94	96.65
Kota Tebing Tinggi	93.53	93.32	93.62	93.64	93.89
Kota Medan	94.00	93.76	93.85	94.13	94.49
Kota Binjai	90.57	90.63	90.64	90.99	91.38
Kota Padangsidimpuan	97.67	97.87	97.92	97.53	97.46
Kota Gunungsitoli	89.31	89.40	89.69	89.92	90.24

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

2.1.2.9 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana perempuan memiliki akses dan kesempatan yang setara dengan laki-laki dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan partisipasi politik. IDG mencakup berbagai indikator yang menggambarkan tingkat pemberdayaan perempuan, termasuk akses terhadap pekerjaan yang layak, posisi kepemimpinan, serta kontrol terhadap sumber daya ekonomi.

Gambar 2.19 Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender Sumatera Utara dan Nasional



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender antara Sumatera Utara dan Nasional dari tahun 2020 hingga 2024. Secara umum, baik Sumatera Utara maupun nasional menunjukkan tren peningkatan yang stabil, namun

Sumatera Utara cenderung mengalami kenaikan yang lebih signifikan. Pada tahun 2020, Indeks Pemberdayaan Gender Sumatera Utara adalah 67,52, sementara nasional lebih tinggi, yaitu 75,57. Meskipun ada kesenjangan di awal periode, Sumatera Utara berhasil mempercepat laju peningkatannya, mencapai 69,18 pada 2023, sedangkan nasional hanya 76,90. Pada 2024, meskipun Sumatera Utara mencapai 72,45, selisih antara kedua angka ini masih tetap signifikan, dengan nasional berada di angka 77,62.

Tabel 2.19 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Nias	62,03	60,33	64,53	61,45	64,57
Mandailing Natal	70,01	71,90	73,56	73,73	66,37
Tapanuli Selatan	69,61	69,25	70,95	71,61	66,10
Tapanuli Tengah	74,05	74,39	74,56	76,81	79,25
Tapanuli Utara	65,84	66,36	63,20	63,82	63,80
Toba	60,07	59,51	60,66	61,53	71,96
Labuhanbatu	71,52	71,96	72,24	70,39	59,07
Asahan	67,48	68,54	68,37	71,05	60,54
Simalungun	61,49	62,40	62,53	62,35	62,42
Dairi	61,14	61,11	62,57	62,34	63,27
Karo	77,75	81,53	82,28	82,74	75,96
Deli Serdang	54,42	55,14	54,72	59,68	54,79
Langkat	66,55	66,04	67,50	67,16	62,24
Nias Selatan	66,70	67,04	69,03	69,45	64,56
Humbang Hasundutan	72,27	72,76	73,12	70,85	74,55
Pakpak Bharat	66,49	66,97	67,11	67,90	61,66
Samosir	78,20	78,75	81,05	80,13	69,98
Serdang Bedagai	65,73	65,49	65,98	67,48	62,85
Batu Bara	63,18	63,16	66,84	66,23	66,24
Padang Lawas Utara	67,99	68,14	68,98	67,41	67,49
Padang Lawas	55,43	57,61	56,37	58,95	54,35
Labuhanbatu Selatan	63,24	64,56	66,45	61,03	61,04
Labuhanbatu Utara	47,27	46,14	48,77	45,52	47,74
Nias Utara	66,93	67,03	62,19	69,40	65,11
Nias Barat	64,55	65,88	66,61	66,95	72,40
Sibolga	73,03	71,84	72,84	75,14	65,89
Tanjungbalai	63,28	63,46	64,80	66,84	72,61
Pematangsiantar	61,58	62,43	62,65	62,96	68,93
Tebing Tinggi	53,58	53,78	54,15	54,63	63,45
Medan	63,89	63,91	64,31	62,35	68,88
Binjai	69,85	68,32	70,65	70,54	68,54
Padangsidempuan	65,72	65,99	66,43	66,85	76,54
Gunungsitoli	66,94	63,28	63,59	64,20	72,62

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

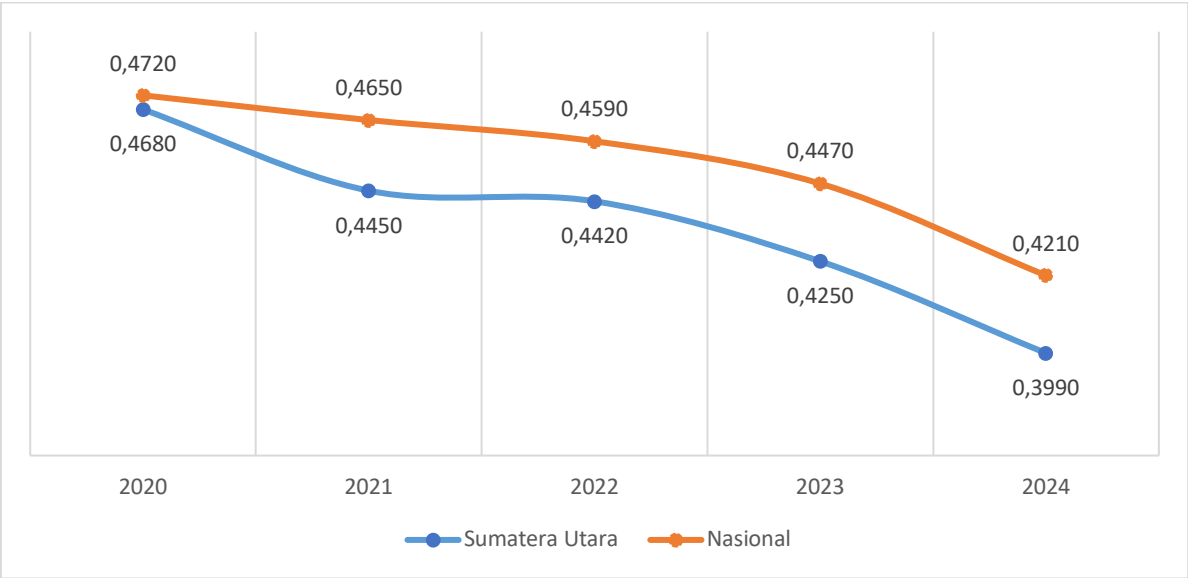


Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Padang Lawas secara konsisten menempati posisi terbawah, dengan angka IDG yang cenderung stagnan dan belum mencapai skor 60 pada beberapa tahun (misalnya Labuhanbatu Utara hanya 47,74 pada 2024 dan Padang Lawas turun ke 54,35). Selain itu, Deli Serdang, Nias Selatan, dan Nias juga menunjukkan angka IDG yang rendah dan tidak stabil dalam rentang lima tahun terakhir, mencerminkan adanya kesenjangan signifikan dalam akses perempuan terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan di wilayah tersebut. Intervensi yang dibutuhkan meliputi penguatan kapasitas perempuan dalam pendidikan, ekonomi, dan kepemimpinan lokal, penyediaan program afirmatif berbasis gender, serta pengembangan layanan publik yang responsif terhadap kebutuhan perempuan. Dukungan lintas sektor dan keberpihakan dalam alokasi anggaran daerah sangat penting untuk memastikan bahwa kesenjangan gender dapat diminimalkan dan pemberdayaan perempuan di daerah-daerah tertinggal ini dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Sumatera Utara mengalami kemajuan dalam pemberdayaan gender, masih ada tantangan untuk mengejar ketertinggalan dibandingkan dengan angka nasional, yang mungkin disebabkan oleh faktor-faktor sosial dan ekonomi yang perlu diatasi lebih lanjut.

2.1.2.10 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana kesenjangan antara pria dan wanita dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan partisipasi politik. IKG memberikan gambaran tentang ketidaksetaraan gender dalam masyarakat, dengan mengukur perbedaan akses dan peluang yang dimiliki oleh kedua gender.

Gambar 2.20 Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender Sumatera Utara dan Nasional



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan data Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tahun 2020 hingga 2024, Provinsi Sumatera Utara menunjukkan tren penurunan ketimpangan gender yang lebih signifikan dibandingkan dengan capaian nasional. IKG Sumatera Utara tercatat menurun dari 0,4680 pada tahun



2020 menjadi 0,3990 pada tahun 2024, atau mengalami penurunan sebesar 0,069 poin. Sementara itu, IKG nasional dalam periode yang sama mengalami penurunan dari 0,4720 menjadi 0,4210, atau sebesar 0,051 poin. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mendorong pengarusutamaan gender, baik melalui peningkatan akses terhadap kesehatan reproduktif, pendidikan, partisipasi politik, maupun pemberdayaan ekonomi perempuan, telah memberikan hasil yang lebih progresif dibandingkan rata-rata nasional. Penurunan IKG tersebut mencerminkan semakin berkurangnya kesenjangan gender antar kelompok masyarakat, yang menjadi indikasi penting dalam perwujudan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Meskipun demikian, upaya konsolidasi dan replikasi kebijakan berbasis data yang terbukti efektif masih diperlukan guna memastikan bahwa penurunan ketimpangan gender berlangsung secara merata di seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 2.20 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Nias	0,5970	0,5900	0,5660	0,5630	0,5550
Mandailing Natal	0,5330	0,5120	0,5240	0,5150	0,5180
Tapanuli Selatan	0,4960	0,5290	0,5070	0,5140	0,5230
Tapanuli Tengah	0,4680	0,3820	0,4350	0,4530	0,4380
Tapanuli Utara	0,4210	0,4380	0,4270	0,2920	0,3350
Toba	0,5200	0,4930	0,5350	0,5050	n/a
Labuhanbatu	0,4670	0,4100	0,4750	0,4270	0,4030
Asahan	0,4100	0,4130	0,4060	0,4470	0,4440
Simalungun	0,5130	0,4720	0,4790	0,4020	0,4350
Dairi	0,4450	0,3950	0,4160	0,3410	0,3190
Karo	0,4080	0,3330	0,3560	0,2910	0,3040
Deli Serdang	0,4060	0,4180	0,4120	0,3250	0,2940
Langkat	0,4070	0,4080	0,4240	0,2310	0,3340
Nias Selatan	0,5760	0,5700	0,5760	0,5650	0,5940
Humbang Hasundutan	0,3830	0,3580	0,3540	0,2910	0,3480
Pakpak Bharat	0,2990	0,2770	0,3420	0,1520	0,3320
Samosir	0,3200	0,2870	0,2650	0,2440	0,1230
Serdang Bedagai	0,4550	0,3320	0,4110	0,4340	0,3800
Batu Bara	0,4900	0,4370	0,4440	0,4460	0,3900
Padang Lawas Utara	0,5590	0,5570	0,5670	0,5550	0,5370
Padang Lawas	0,6270	0,6120	0,5940	0,5850	0,8130
Labuhanbatu Selatan	0,5630	0,5330	0,5140	0,5000	0,5240
Labuhanbatu Utara	0,6010	0,6040	0,5920	0,5610	0,5650
Nias Utara	0,5680	0,5820	0,5820	0,5750	0,5930
Nias Barat	0,5440	0,5300	0,5600	0,5290	0,4990



Kabupaten Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Sibolga	0,2140	0,3630	0,2970	0,2590	0,1460
Tanjungbalai	0,2720	0,1990	0,3740	0,2440	0,3430
Pematangsiantar	0,1690	0,3460	0,4490	0,3170	0,2820
Tebing Tinggi	0,4650	0,3540	0,2700	0,2560	0,1880
Medan	0,3170	0,3190	0,2780	0,2320	0,1600
Binjai	0,1800	0,2680	0,2780	0,1420	0,2990
Padangsidimpuan	0,1930	0,3480	0,2860	0,2600	0,1920
Gunungsitoli	0,4250	0,4190	0,3710	0,4800	0,3680

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Berdasarkan data Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2020–2024, sejumlah daerah menunjukkan capaian yang relatif positif, seperti Kota Tebing Tinggi (0,1880), Kota Pematangsiantar (0,2820), Kota Medan (0,1600), Kota Binjai (0,2990), Kota Padangsidimpuan (0,1920), dan Kota Sibolga (0,1460) yang secara konsisten mencatat nilai IKG rendah pada tahun 2024. Sebaliknya, beberapa daerah yang memerlukan perhatian dan intervensi strategis dari Pemerintah Provinsi adalah Kabupaten Padang Lawas yang mengalami lonjakan IKG drastis menjadi 0,8130 pada tahun 2024, tertinggi di seluruh provinsi, serta Kabupaten Nias Selatan (0,5940), Labuhanbatu Utara (0,5650), dan Nias (0,5550) yang menunjukkan nilai IKG tinggi dan relatif stagnan selama lima tahun terakhir. Nilai-nilai tinggi ini mengindikasikan masih tingginya kesenjangan gender, terutama dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi politik. Oleh karena itu, intervensi terpadu diperlukan dalam bentuk penguatan program pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan daerah, serta perluasan akses terhadap layanan publik dan pelatihan keterampilan produktif bagi perempuan di daerah-daerah dengan IKG tinggi tersebut.

2.1.2.11 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Konteks pembangunan dan peningkatan kualitas SDM tidak bisa terlepas dari pentingnya peran keluarga. Keluarga sebagai institusi sosial memiliki peran sentral dalam pembangunan manusia, pembinaan generasi baru, serta pemenuhan kebutuhan dalam berbagai aspek kehidupan. Pembangunan SDM yang berkualitas dan unggul harus dimulai dari penyiapan keluarga berkualitas sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu berperan penting dalam perekonomian, politik, dan peningkatan kesejahteraan bangsa. Nilai Bangga berkisar antar 0-100 dengan kategori nilai >70 (baik/Tangguh), 40-70 (cukup baik/berkembang) dan <40 (kurang baik/rentan), Jika dilihat dari grafik di bawah ini capaian Indeks Pembangunan Keluarga Sumatera Utara terus mengalami peningkatan, namun capaiannya masih dalam kategori cukup baik/berkembang, begitu juga dengan nasional belum mencapai 70 persen dan capaian Sumatera Utara masih berada di bawah nasional sebagaimana terlihat pada gambar berikut:

2.1.3 Aspek Daya Saing

Daya saing Provinsi Sumatera Utara merupakan faktor kunci yang menentukan keberhasilan daerah ini dalam menghadapi persaingan global



dan nasional, serta dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Daya saing suatu daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, inovasi, iklim investasi, serta kebijakan pemerintah. Secara umum, Sumut memiliki beberapa keunggulan yang dapat meningkatkan daya saingnya. Keberadaan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan, khususnya kelapa sawit, karet, dan komoditas lainnya, menjadikan provinsi ini sebagai salah satu penghasil utama di Indonesia. Namun, meskipun Sumut memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, daya saingnya belum optimal, terutama jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya yang memiliki sektor industri yang lebih berkembang.

Salah satu aspek penting dalam meningkatkan daya saing adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Pendidikan dan keterampilan tenaga kerja di Sumut perlu ditingkatkan agar dapat bersaing di pasar global. Meskipun terdapat beberapa universitas dan lembaga pendidikan yang memiliki reputasi, masih ada ketimpangan dalam akses pendidikan, terutama di daerah pedesaan yang menghambat pengembangan SDM berkualitas. Program pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi pekerja lokal juga perlu diperluas untuk mendukung sektor industri dan teknologi yang sedang berkembang.

Infrastruktur yang baik menjadi aspek lain yang mendukung daya saing. Kota Medan sebagai pusat ekonomi di Sumut sudah memiliki fasilitas transportasi yang cukup baik, namun daerah-daerah lain masih menghadapi kendala infrastruktur, seperti jalan yang rusak atau sulit diakses, keterbatasan jaringan listrik dan air bersih, serta rendahnya konektivitas internet. Peningkatan infrastruktur ini sangat penting agar perekonomian daerah bisa berkembang lebih merata dan dapat menarik lebih banyak investasi. Selain itu, iklim investasi di Sumut juga menjadi faktor penentu daya saing. Untuk menarik investasi, dibutuhkan kebijakan yang mendukung kemudahan berusaha, seperti penyederhanaan perizinan, transparansi dalam administrasi, dan stabilitas politik yang kondusif. Sumut juga memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata, dengan banyak destinasi alam yang indah seperti Danau Toba, namun potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan. Pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan dapat menjadi salah satu pendorong ekonomi sekaligus meningkatkan daya saing daerah.

Inovasi dan riset juga memainkan peran penting dalam meningkatkan daya saing Sumut. Meskipun beberapa sektor seperti pertanian dan perkebunan sudah berkembang, inovasi dalam hal teknologi pertanian, pengolahan hasil bumi, dan produk lokal harus terus didorong agar produk dari Sumut memiliki daya tarik di pasar global. Keterlibatan dunia usaha, lembaga riset, dan pemerintah dalam riset dan pengembangan (R&D) akan memperkuat daya saing produk lokal. Secara keseluruhan, meskipun Provinsi Sumatera Utara memiliki banyak potensi untuk meningkatkan daya saing, beberapa tantangan tetap ada, seperti ketimpangan infrastruktur, kualitas SDM yang belum merata, dan perlunya inovasi yang lebih agresif. Untuk itu, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sangat diperlukan dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing Sumut di kancah nasional maupun global.

2.1.3.1 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat pendidikan suatu wilayah. Indikator ini mencerminkan jumlah tahun pendidikan yang ditempuh oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas, yang secara langsung menggambarkan kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Angka Rata-rata Lama Sekolah pada Kabupaten/Kota di tahun 2023 menunjukkan peningkatan pada tahun 2024, dengan angka ralisasi tertinggi berada pada Kota Pematangsiantar dengan capaian 11,82% dan Daerah terendah yaitu Kabupaten Nias dengan capaian 6,40%.

Peningkatan rata-rata lama sekolah di Sumatera Utara menjadi salah satu indikator positif dalam perjalanan pembangunan daerah, yang tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan daya saing wilayah ini dalam konteks nasional maupun global. Rata-rata lama sekolah di Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar kabupaten dan kota. Kota Pematangsiantar mencatatkan rata-rata lama sekolah tertinggi sebesar 11,82 tahun, diikuti oleh Kota Medan dan Binjai yang juga berada di atas 11 tahun. Sementara itu, daerah-daerah seperti Nias, Nias Selatan, dan Nias Utara mencatatkan rata-rata lama sekolah terendah, yakni sekitar 6,40 hingga 7,26 tahun. Secara umum, daerah perkotaan cenderung memiliki rata-rata lama sekolah lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perdesaan atau kepulauan, mencerminkan ketimpangan akses terhadap pendidikan formal di Sumatera Utara.

Tabel 2.21 Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

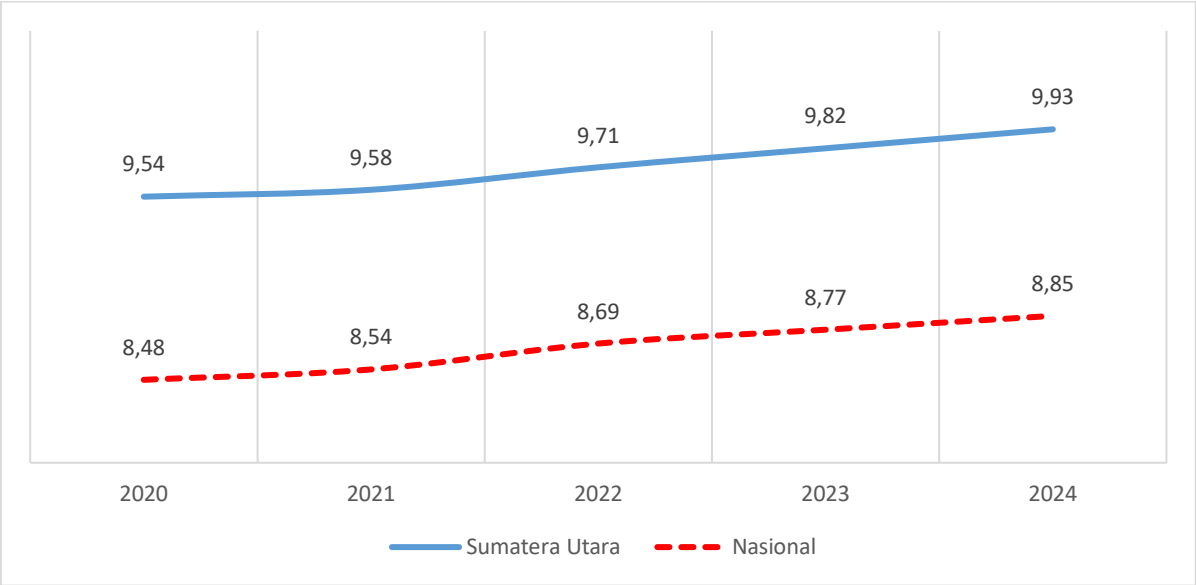
Kabupaten Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Nias	5,36	5,64	5,88	6,14	6,40
Mandailing Natal	8,62	8,63	8,76	8,84	9,11
Tapanuli Selatan	9,28	9,29	9,34	9,51	9,56
Tapanuli Tengah	8,62	8,84	8,86	8,87	8,92
Tapanuli Utara	9,85	9,99	10,00	10,09	10,31
Toba	10,52	10,57	10,58	10,59	10,77
Labuhanbatu	9,24	9,25	9,40	9,49	9,50
Asahan	8,79	8,80	8,82	8,83	8,85
Simalungun	9,60	9,61	9,63	9,72	9,73
Dairi	9,58	9,59	9,72	9,88	9,89
Karo	9,79	10,00	10,02	10,03	10,12
Deli Serdang	10,09	10,10	10,27	10,28	10,29
Langkat	8,65	8,66	8,68	8,73	8,74
Nias Selatan	5,85	6,06	6,23	6,48	6,52
Humbang Hasundutan	9,54	9,71	10,00	10,01	10,13
Pakpak Bharat	9,03	9,14	9,39	9,61	9,73
Samosir	9,43	9,44	9,46	9,47	9,61
Serdang Bedagai	8,54	8,69	8,71	8,85	9,12

Kabupaten Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Batu Bara	8,06	8,07	8,26	8,50	8,51
Padang Lawas Utara	9,37	9,38	9,46	9,55	9,82
Padang Lawas	9,01	9,02	9,31	9,43	9,63
Labuhanbatu Selatan	8,75	8,90	8,92	8,93	9,19
Labuhanbatu Utara	8,40	8,41	8,64	8,87	9,14
Nias Utara	6,58	6,77	6,78	6,85	7,05
Nias Barat	6,49	6,69	6,97	7,07	7,26
Kota Sibolga	10,40	10,41	10,43	10,44	10,45
Kota Tanjung Balai	9,44	9,45	9,55	9,68	9,69
Kota Pematang Siantar	11,16	11,29	11,31	11,58	11,82
Kota Tebing Tinggi	10,31	10,44	10,65	10,86	10,87
Kota Medan	11,39	11,48	11,50	11,62	11,79
Kota Binjai	10,93	10,94	11,18	11,19	11,20
Kota Padangsidimpuan	11,00	11,09	11,11	11,12	11,13
Kota Gunungsitoli	8,61	8,62	8,64	8,65	8,76

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) antara Sumatera Utara dan Nasional pada tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa Sumatera Utara mengalami peningkatan yang lebih signifikan dibandingkan dengan rata-rata nasional. Meskipun kedua skor menunjukkan tren kenaikan, Sumatera Utara menunjukkan peningkatan yang lebih tajam, dengan RLS di Sumatera Utara pada 2024 mencapai 9,93 tahun, sementara nasional hanya 8,85 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara berhasil meningkatkan akses dan kualitas pendidikan lebih cepat daripada rata-rata nasional. Kenaikan RLS nasional yang lebih lambat mengindikasikan adanya tantangan dalam pemerataan pendidikan di tingkat nasional. Peningkatan yang lebih cepat di Sumatera Utara dapat mencerminkan keberhasilan kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan daerah tersebut.

Gambar 2.21 Rata-Rata Lama Sekolah Sumatera Utara dan Nasional



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

2.1.3.2 Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur ekspektasi jumlah tahun pendidikan yang dapat ditempuh oleh anak-anak yang baru lahir, berdasarkan kondisi saat ini. Indikator ini menggambarkan seberapa besar peluang generasi mendatang untuk mendapatkan pendidikan formal yang lebih lama, yang tentunya berhubungan langsung dengan kualitas sumber daya manusia dan potensi pembangunan suatu daerah. Pada tahun 2024, Harapan Lama Sekolah di Sumatera Utara tercatat mencapai 13,55 tahun. Angka ini menggambarkan bahwa anak-anak yang lahir di tahun tersebut diharapkan dapat menempuh pendidikan hingga tingkat menengah atas, bahkan mungkin lebih tinggi lagi, bergantung pada keberlanjutan program pendidikan dan kebijakan yang diterapkan di wilayah tersebut.

Tabel 2.22 Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

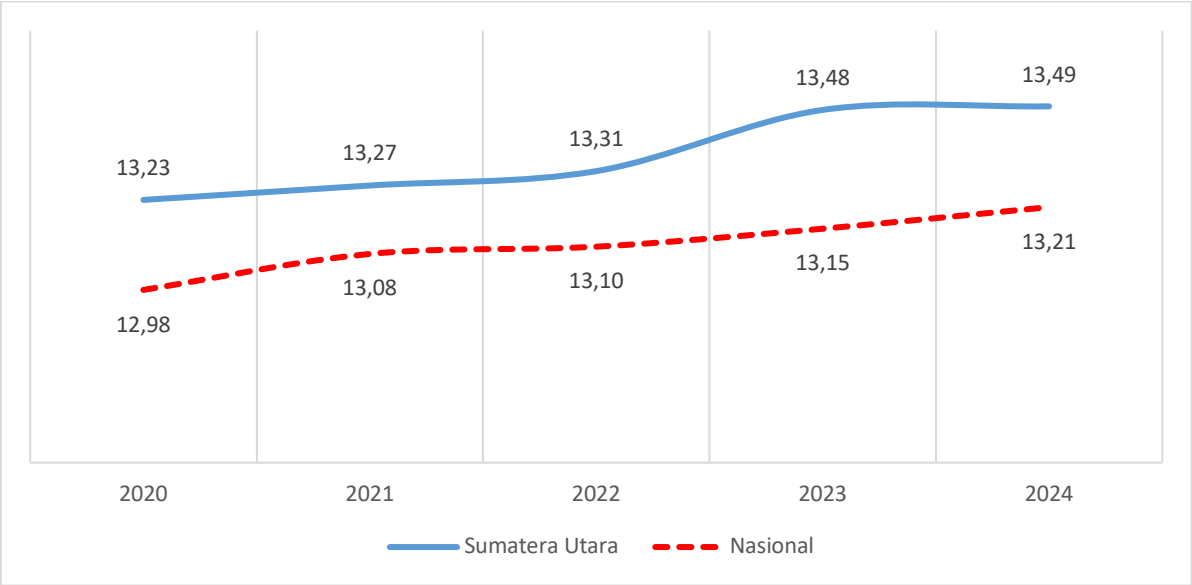
Kabupaten Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Nias	12,57	12,84	13,04	13,30	13,31
Mandailing Natal	13,32	13,61	13,85	13,86	13,87
Tapanuli Selatan	13,24	13,35	13,37	13,58	13,72
Tapanuli Tengah	13,06	13,07	13,24	13,49	13,50
Tapanuli Utara	13,69	13,70	13,72	13,73	13,74
Toba	13,45	13,46	13,58	13,59	13,60
Labuhanbatu	12,73	12,74	12,95	13,25	13,26
Asahan	12,60	12,61	12,63	12,64	12,65
Simalungun	12,78	12,79	12,81	12,82	13,09
Dairi	13,10	13,11	13,24	13,32	13,53
Karo	12,76	12,77	12,95	13,25	13,26
Deli Serdang	13,35	13,36	13,38	13,39	13,40
Langkat	13,05	13,24	13,26	13,27	13,28
Nias Selatan	12,23	12,27	12,48	12,78	12,92
Humbang Hasundutan	13,28	13,29	13,31	13,32	13,46
Pakpak Bharat	13,86	13,87	13,89	13,90	13,91
Samosir	13,47	13,48	13,50	13,51	13,52
Serdang Bedagai	12,60	12,61	12,63	12,64	12,65
Batu Bara	12,63	12,64	12,93	13,11	13,12
Padang Lawas Utara	12,87	13,04	13,23	13,53	13,54
Padang Lawas	13,03	13,27	13,41	13,70	13,87
Labuhanbatu Selatan	13,00	13,01	13,12	13,42	13,53
Labuhanbatu Utara	13,04	13,19	13,29	13,57	13,58
Nias Utara	13,03	13,04	13,06	13,36	13,37
Nias Barat	12,94	12,95	12,97	12,98	12,99
Kota Sibolga	13,16	13,28	13,30	13,42	13,43
Kota Tanjung Balai	12,50	12,62	12,90	13,14	13,15

Kabupaten Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Pematang Siantar	14,45	14,57	14,59	14,60	14,61
Kota Tebing Tinggi	12,72	12,73	12,91	13,12	13,13
Kota Medan	14,74	14,75	14,77	14,78	14,79
Kota Binjai	13,62	13,63	13,87	14,17	14,18
Kota Padangsidempuan	14,54	14,56	14,58	14,59	14,62
Kota Gunungsitoli	13,74	13,75	13,77	13,78	13,79

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Dari Tabel diatas, Angka Harapan Lama Sekolah pada Kabupaten/Kota di tahun 2023 menunjukkan peningkatan pada tahun 2024. dengan angka ralisasi tertinggi berada pada Kota Medan dengan capaian 14,79% dan Daerah terendah yaitu Kabupaten Asahan dan Kabupaten Serdang Bedagai dengan capaian 12,65%. Dengan Harapan Lama Sekolah yang terus meningkat, diharapkan kualitas sumber daya manusia di Sumatera Utara akan semakin membaik, yang pada gilirannya akan mendorong pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kemajuan daerah secara keseluruhan. HLS yang tinggi memberikan harapan besar bagi masa depan Sumatera Utara, di mana generasi mendatang akan lebih terampil, berpendidikan tinggi, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Gambar 2.22 Harapan Lama Sekolah Sumatera Utara dan Nasional



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Harapan Lama Sekolah (HLS) antara Sumatera Utara dan Nasional dari tahun 2020 hingga 2024 memperlihatkan bahwa HLS di Sumatera Utara mengalami peningkatan yang lebih signifikan dibandingkan dengan rata-rata nasional. Pada tahun 2020, HLS di Sumatera Utara sebesar 13,23 tahun, lebih tinggi dibandingkan dengan HLS nasional yang hanya 12,98 tahun. Pada tahun 2024, HLS Sumatera Utara mencapai 13,49 tahun, sementara HLS nasional hanya mencapai 13,21 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara berhasil mempercepat perkembangan pendidikan dengan peningkatan yang lebih pesat dibandingkan dengan tingkat nasional, yang mencerminkan keberhasilan kebijakan pendidikan di daerah tersebut.



Sebaliknya, meskipun HLS nasional terus meningkat, laju kenaikannya lebih lambat, menunjukkan adanya tantangan dalam pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

Pada tahun 2024, kualitas sumber daya manusia (SDM) di Provinsi Sumatera Utara terus menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan. Kualitas SDM yang baik merupakan faktor penting dalam mendorong kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya di provinsi ini. Provinsi Sumatera Utara, dengan jumlah penduduk lebih dari 14 juta jiwa, memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan pendidikan. Tanpa pendidikan, pembangunan manusia hampir tidak mungkin terjadi. Salah satu pengukuran hasil pembangunan manusia untuk daya saing SDM adalah hasil pembelajaran yang diukur dari Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca dan numerasi.

Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek). Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kemendikbud Ristek. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu: (1) Perlu intervensi khusus; (2) Dasar, (3) Cakap, dan (4) Mahir. Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”.

2.1.3.3 Ketersediaan Infrastruktur

a. Tata Ruang dan Pertanahan

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa penataan ruang merupakan sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang dimaksud, maka salah satu aspek penting yang perlu dilakukan adalah pembinaan penataan ruang di samping juga pengaturan pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Salah satu permasalahan dasar dan konflik dalam pemanfaatan ruang saat adalah masih banyaknya tumpang tindih kebijakan, peraturan serta informasi geospasial yang salah satunya disebabkan oleh ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan atau Hak Atas Tanah. Untuk memberikan kemudahan dalam berinvestasi, kepastian hukum, dan perizinan pemanfaatan ruang, perlu disusun peta indikatif tumpang tindih pemanfaatan ruang sebagai acuan dalam penyelesaian ketidaksesuaian batas daerah, tata ruang, dan kawasan hutan agar selaras dengan rencana pembangunan nasional dan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS (*Online Single Submission*) merupakan Peraturan Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. RDTR kabupaten/kota dalam hal ini menjadi dasar penetapan



tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan penerbitan izin lokasi yang sesuai dengan peruntukannya. Penyusunan RDTR sebagai rinci pada Tingkat Kabupaten/Kota saat ini belum terlaksana dengan maksimal. Bahkan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sudah memberikan bantuan teknis (bantek) penyusunan RDTR untuk beberapa kabupaten/kota. Sampai dengan tahun 2023 terdapat 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yang telah terbit Perkada RDTR antara lain: Kabupaten Batubara, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Deli Serdang, Kota Tebing Tinggi, dan Kota Medan.

Dalam hal penggunaan tanah di Sumatera Utara mengalami peningkatan paling signifikan terjadi pada jenis penggunaan tanah Perkebunan dengan peningkatan mencapai 38.955,10 Ha per tahunnya, untuk penggunaan tanah ladang mengalami peningkatan 10.992,98 Ha per tahunnya, dan selanjutnya penggunaan tanah jenis sawah mengalami peningkatan sebesar 2.646,01 Ha per tahun. Dalam penataan ruang informasi status penguasaan tanah sangatlah diperlukan sehingga lahan yang terkena rencana tata ruang dapat menerima keadilan dan perlindungan hukum. Status penguasaan tanah di Provinsi Sumatera Utara dominan tanah sudah terdaftar skala kecil dan tanah yang belum terdaftar yaitu sebesar 50,18 % dari luas lahan keseluruhan.

Ketersediaan, akses, dan keterbukaan pada data dan informasi geospasial saat ini masih menjadi permasalahan utama. Secara fundamental, data dan informasi geospasial dibutuhkan untuk Menyusun perencanaan pengembangan kewilayahan. Ketersediaan data dan informasi geospasial terutama pada data geospasial dasar skala besar, masih belum merata di wilayah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Data Geospasial yang sudah tersedia juga masih sulit diakses karena Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD) Sumatera Utara masih belum sepenuhnya berfungsi sesuai tata kelola yang diharapkan. Selain itu, sampai saat ini Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Utara masih terdiri dari 5 Kabupaten dan 1 Kota yang status Simpul Jaringan Informasi Geospasialnya dalam kategori “berkembang”. Hal tersebut terutama disebabkan oleh rendahnya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang informasi geospasial.

b. Urbanisasi dan Perkotaan

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020), sebaran penduduk Sumatera Utara (Sumut) masih terkonsentrasi di Kota Medan. Meskipun luas geografisnya hanya 0,36% wilayah Sumut, namun Medan dihuni 2,44 juta penduduk atau 16,46% dari total penduduk Sumut sebanyak 14,80 juta jiwa. Terkonsentrasinya penduduk Sumut di Medan disebabkan saat ini masih terus berlangsung urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota. Karena kegiatan ekonomi, ketersediaan fasilitas atau infrastruktur, lebih banyak dan lebih baik di perkotaan. Selain itu, faktor kemiskinan atau ajakan saudara/teman/tetangga, maka seseorang atau kelompok masyarakat menjadi memilih untuk tinggal di kota.

Untuk masyarakat desa yang sudah pindah ke kota karena alasan pendidikan, ketika sudah menyelesaikan pendidikannya kurang tertarik pindah ke desa karena adanya peluang untuk hidup yang lebih baik di kota. Tak heran kota akan semakin padat dan banyak diisi oleh penduduk usia produktif yang relatif siap kerja. Sedangkan di desa kekurangan SDM yang diperlukan. Kondisi ini yang kemudian menyebabkan ketimpangan daerah perkotaan dan perdesaan semakin berlanjut. Untuk Kota Medan,



penduduknya lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki. Dari 2,44 juta penduduk Medan, laki-laki sebanyak 1,223 juta jiwa dan perempuan sebanyak 1,212 juta jiwa.

Merujuk pada hasil SP2020, sebaran penduduk Sumut terbanyak kedua di Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1,93 juta atau 13,05% dari total penduduk Sumut. Terdapat 971.735 penduduk laki-laki dan 959.706 penduduk perempuan. Kemudian Kabupaten Langkat sebanyak 1,03 juta atau 6,96% dari total penduduk Sumut. Terbanyak berikutnya penduduk Simalungun sebanyak 990.246 jiwa (6,69%) dan Asahan sebanyak 769.960 jiwa (5,20%). Sedangkan sebaran terendah di Kabupaten Pakpak Bharat sebanyak 52.351 jiwa, kemudian Sibolga sebanyak 89.584 jiwa dan Nias Barat sebanyak 89.994 jiwa.

c. Pedesaan dan Daerah Afirmasi

Secara umum objek pembangunan pedesaan dan daerah afirmasi hampir sama. Pembangunan tersebut menggunakan DAK (Dana Alokasi Khusus). Secara instrumen DAK tersebut digunakan untuk membantu mendanai Urusan Wajib Pemerintah Daerah yang terkait pelayanan dasar (SPM). Pelayanan Dasar tersebut adalah a) pendidikan (dasar), b) kesehatan (pelayanan dasar dan kefarmasian), c) air minum (SPAM), d) sanitasi (IPAL komunal) dan e) perumahan dan permukiman (PSU). Khusus untuk daerah afirmasi ditambah bidang transportasi (dalam rangka peningkatan akses pelayanan dasar). Daerah afirmasi umumnya memiliki karakteristik yang jauh dari pusat pemerintah dan secara posisi wilayah terluar dari Indonesia berbatasan dengan laut internasional dan Negara lain. Berdasarkan data-data indikator pembangunan, daerah afirmasi umumnya memiliki capaian kinerja yang lebih buruk dibanding wilayah lain, seperti tingkat kemiskinan, pendapatan per kapita, hingga fasilitas infrastruktur. Untuk itu kebijakan keberpihakan khusus diperlukan dalam mempercepat pembangunan untuk mengejar ketertinggalan dari wilayah sekitar yang lebih maju.

Pendidikan adalah unsur penting dalam percepatan pembangunan suatu bangsa. Pendidikan daerah pedesaan di wilayah afirmasi tertinggal dalam sarana dan prasarana, jumlah dan kualitas pengajar dan jarak tempuh yang terlalu jauh untuk bersekolah. Perkembangan teknologi informasi yang sangat erat kaitannya dengan kemajuan pendidikan hampir belum masuk ke sebagian besar wilayah afirmasi. Kondisi kesehatan tidak berbeda jauh dengan pendidikan. Dalam sektor kesehatan, daerah afirmasi memiliki kekurangan dalam sarana dan prasarana kesehatan, jumlah dokter dan ketersediaan dokter spesialis. Kemudian akses ke pusat layanan kesehatan seperti Rumah Sakit untuk ruang rawat inap yang sangat sulit untuk sebagian desa di daerah afirmasi. Akhirnya kita juga menemukan paradoks di mana daerah afirmasi umumnya masih rentan dengan binatang beracun dan berbisa, akan tetapi sering tidak ditemukan serum binatang berbisa di daerah afirmasi.

Sebagai wilayah yang memiliki curah hujan tinggi, cukup ironis kalau ada daerah yang memiliki kekurangan dalam pasokan air bersih. Permasalahan penyediaan air bersih di daerah afirmasi secara umum adalah kekurangan infrastruktur air bersih seperti pompa air, bak penampung dan perpipaan. Dengan pertimbangan daerah afirmasi di Indonesia yang memiliki daya beli air yang relatif rendah dan biaya investasi yang tinggi untuk daerah afirmasi dengan pola pemukiman yang terpencar dan tidak mempertimbangkan pola ruang, maka kebijakan penyediaan air bersih di daerah afirmasi perlu diambil alih oleh pemerintah pusat.



Sampah menjadi isu penting di masa datang. Sampah menurunkan derajat kesehatan dan nilai ekonomi ruang. Sampah menjadi salah satu penyumbang polusi tanah, air dan udara. Untuk daerah afirmasi, penanganan sampah cenderung dibuang ke aliran air atau dibiarkan menumpuk. Di sisi lain, pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran dalam membangun sistem pengelolaan sampah. Itulah sebabnya pemerintah pusat dibutuhkan menggunakan instrumen dana alokasi khusus untuk membangun sistem pengelolaan sampah terpadu di daerah afirmasi.

Rumah tangga di daerah perdesaan khususnya daerah afirmasi masih banyak mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Industri rumah tangga dan rumah makan juga menjadi penyumbang limbah lingkungan. Dalam bidang pengelolaan air limbah dan limbah padat dibutuhkan kebijakan pemerintah pusat untuk membangun instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di daerah afirmasi. Tantangan dalam penyediaan rumah layak huni juga menjadi salah satu perhatian. Lahan yang masih luas memungkinkan pemerintah pusat untuk membangun rumah layak huni dengan anggaran yang lebih minim.

Daerah afirmasi Nias dikelilingi laut. Dengan struktur tanah yang relatif labil, maka pembangunan konektivitas laut sangat layak dilaksanakan. Pembangunan sistem konektivitas laut diharapkan dapat menurunkan biaya logistik dan menurunkan biaya pembangunan dan pemeliharaan transportasi darat. Listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Penyediaan listrik di daerah afirmasi Kepulauan Nias membutuhkan pembangunan infrastruktur kelistrikan. Urusan kelistrikan sampai saat ini masih mengandalkan PLN (Perusahaan Listrik Negara), sebab PLN mengelola penyediaan listrik dari hulu hingga hilir. Daerah Afirmasi Nias sesuai untuk dikembangkan sebagai satu entitas kelistrikan yang dimulai dari penyediaan listrik melalui pembangkit listrik, penyaluran melalui jaringan transmisi dan distribusi, pengelolaan jaringan transmisi melalui gardu induk, pelayanan pelanggan hingga listrik dapat dinikmati di rumah masyarakat.

d. Konektivitas

Jalan kewenangan provinsi sampai dengan tahun 2023 adalah sebesar 3005,65 km. Sementara jalan baik sebesar 56,34% dan sedang 21,79 persen. Sedangkan jalan dalam kondisi rusak ringan sebesar 4,77 persen, dan rusak berat sebesar 17,10 persen. Konektivitas jaringan jalan dihadapkan pada masih rendahnya kapasitas jalan Provinsi dan kecepatan yang masih di bawah kriteria desain yaitu rata – rata hanya 28 Km/Jam, Kualitas jalan terutama jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, masih rendah. Kondisi tersebut turut menyumbang pada tingginya tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas jalan di Sumatera Utara, dimana indeks fatalitas tahun 2022 sebesar 2.46. rendahnya konektivitas masih terjadi pada wilayah Pantai Barat Sumatera Utara dan sebagian wilayah dataran tinggi untuk mendukung aksesibilitas masyarakat.

Konektivitas jaringan transportasi Sumatera Utara dipengaruhi oleh keberadaan simpul transportasi. Untuk simpul transportasi udara, sampai dengan tahun 2024, terdapat 8 bandara yang terdiri dari 1 bandara pengumpul (Bandara Kualanamu) serta 7 bandara pengumpan (Binaka, Sibisa, Dr. Ferdinand L. Tobing, Aek Godang, Raja Sisingamangaraja XII, Lasondre, Abdul Haris Nasution). Bandara Abdul Haris Nasution di Kabupaten Mandailing selesai dibangun di awal tahun 2024 dan saat ini



belum beroperasi.

Angkutan udara khususnya bandara pengumpul dan pengumpan masih rendah pemanfaatannya sebagai akibat terbatasnya penerbangan, akar permasalahannya adalah fluktuasi penumpang dan kargo. Selanjutnya, untuk simpul jaringan perkeretaapian, sampai dengan tahun 2023 terdapat 64 stasiun dan jalur rel sepanjang 577 km/sp terdiri dari 459 km/sp rel aktif (431 km/sp jalur tunggal dan 28 km/sp jalur ganda) dan 118km/sp rel non aktif. Untuk perlintasan sebidang jalur kereta api dengan jalan, terdapat 106 perlintasan sebidang yang dijaga, 341 perlintasan sebidang yang tidak dijaga, dimana 5 diantaranya berada di ruas jalan yang merupakan kewenangan provinsi, dan 51 perlintasan tidak sebidang.

Untuk angkutan Kereta Api masih belum terwujud di wilayah Pantai Barat Sumatera Utara hal ini dikarenakan minimnya kegiatan ekonomi di *hinterland* pantai barat serta potensi perikanan dan perkebunan yang belum berkembang menjadi hilirisasi industri yang bernilai tambah. Pengembangan kereta api eksisting terutama Medan – Labuhanbatu Selatan serta Medan – Langkat (Pangkalan Brandan) memerlukan strategis bisnis terutama pada angkutan barang dari kabupaten/kota ke kota Inti Medan. Sedangkan untuk keselamatan lalu lintas, masih dibutuhkan penanganan untuk perlintasan sebidang jalur kereta api dengan jalan yang belum dijaga.

Untuk pelabuhan sungai dan danau, terdapat 59 dermaga pengumpan di Sumatera Utara. Angkutan danau dan sungai untuk pergerakan orang dan barang terutama di Danau Toba masih sangat minim dengan memenuhi standar keselamatan. Sementara untuk simpul transportasi laut, terdapat 24 pelabuhan sebagai simpul transportasi laut yang terdiri dari 2 pelabuhan utama(Kuala Tanjung, Belawan), 8 pelabuhan pengumpul (Tanjung Balai Asahan/Teluk Nibung, Gunungsitoli, Teluk Leidong, Pangkalan Susu, Pangkalan Brandan, Parlimbungan Ketek, Pulau Telo, Sibolga), 12 pelabuhan pengumpan regional (Bagan Asahan, Tanjung Tiram, Sei Berombang, Tanjung Sarang Elang, Tanjung Pura, Natal/Sikara-kara, Sirombu, Teluk Dalam, Lahewa, Tanjung Beringin, Pantai Cermin) dan 3 pelabuhan lokal (Pangkalan Dodek, Pulau Kampai, Barus). Untuk pelabuhan pengumpan regional yang masih beroperasi saat ini adalah Pelabuhan Tanjung Tiram, Pelabuhan Tanjung Sarang Elang, Pelabuhan Sirombu, Pelabuhan Teluk Dalam, dan Pelabuhan Lahewa. Pelabuhan yang tidak beroperasi saat ini terdapat 2 pelabuhan yang sulit untuk dikembangkan karena adanya sedimentasi yang tinggi yaitu Pelabuhan Bagan Asahan dan Pelabuhan Natal/Sikara-kara.

Konektivitas laut dihadapkan masih rendahnya pemanfaatan Simpul pelabuhan Pengumpan reguler maupun regional sebagai rute pergerakan logistik antara pelabuhan utama dengan pelabuhan pengumpan di sepanjang wilayah pesisir terutama antara pesisir pantai barat dengan pelabuhan utama Belawan. Hal ini dikarenakan masih belum optimalnya infrastruktur pelabuhan Pengumpan reguler maupun regional serta wilayah Pantai barat Sumatera Utara belum menjadi pusat logistik dan belum optimalnya kegiatan ekonomi pada *hinterland* pelabuhan di wilayah pantai barat Sumatera Utara. Pantai timur Sumatera Utara berada Pada jalur ALKI I dan jalur perdagangan internasional tetapi kondisi pelabuhan pengumpan regional tidak dimanfaatkan sebagai jalur logistik yang menjangkau pasar



yang lebih luas. Untuk simpul utama transportasi darat, di Sumatera Utara terdapat 40 terminal yang terdiri dari 6 tipe A, 13 tipe B, dan 21 tipe C. Terminal tipe A, terdiri dari 5 terminal yang beroperasi (Amplas, Pinang Baris, Tanjung Pinggir, Madya Tarutung, Sibolga) dan 1 terminal tidak beroperasi yaitu Terminal Padang Bulan di Kabupaten Labuhanbatu. Sedangkan untuk terminal tipe B, di Sumatera Utara terdapat 13 terminal Tipe B (Sijambi, Kabanjahe, Pasar X/Tanjung Beringin, Bahorok/Bukit Lawang, Lubuk Pakam, Ikan Paus, Sosorsaba Parapat, Perdagangan, Kota Pinang, Gunung Tua, Faekhu, Samosir, dan Labuhanbatu Utara.

e. Ketenagalistrikan

Provinsi Sumatera Utara secara geografis memiliki luas wilayah sebesar 72.981,23 km² yang terdiri atas 33 kabupaten/kota. Wilayah Sumatera Utara berada pada jalur pegunungan Bukit Barisan dan juga berada pada wilayah pesisir. Hal ini mengindikasikan bahwa Sumatera Utara memiliki potensi energi terbarukan seperti panas bumi dan potensi hydro. Selain itu juga terdapat potensi dari biomassa baik dari limbah pabrik kelapa sawit maupun limbah pabrik tapioka, Selain di atas terdapat juga potensi dari limbah ternak mengingat Provinsi Sumatera Utara merupakan penghasil ternak potong di Pulau Sumatera. Semua potensi yang ada tersebut menghasilkan energi listrik bagi memenuhi kebutuhan energi di Provinsi Sumatera Utara.

Pemenuhan kebutuhan energi di wilayah Provinsi Sumatera Utara saat ini belum sepenuhnya merata terutama pada Kepulauan Nias yang masih angka rata-rata rasio elektrifikasi masih di bawah 80% yang mengindikasikan masih terdapat masyarakat yang belum menikmati listrik. Hal yang sama juga terjadi pada wilayah selatan Sumatera Utara yang Sebagian besar masuk wilayah hutan dan pegunungan sehingga harus memiliki izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan yang membutuhkan waktu dan ini juga merupakan permasalahan energi di Sumatera Utara. Sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan pengelolaan energi di Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

1. Terciptanya bauran energi baru terbarukan sebesar 23,98% di tahun 2025 dan 49,91% pada tahun 2050.
2. Tercapainya perluasan jaringan infrastruktur gas bagi pelaku usaha dan rumah tangga.
3. Terpenuhinya penyediaan energi primer sebesar 8,866 ribu TOE pada tahun 2025 dan 18.510 TOE tahun 2050 baik dari sumber setempat maupun dipasok dari luar Provinsi Sumatera Utara.
4. Tercapainya intensitas energi final sebesar 8,49 TOE/milyar rupiah tahun 2025 dan 4,21 TOE/milyar rupiah tahun 2050.
5. Tercapainya rasio elektrifikasi Sumatera Utara sebesar 100% pada tahun 2025.

f. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Daya saing infrastruktur teknologi informasi sebagai upaya percepatan transformasi digital di Provinsi Sumatera Utara dapat terwujud dengan didukung dengan transformasi digital yang adaptif, inklusif, memberdayakan, berdaulat, dan berkelanjutan. Di Sumatera Utara perkembangan teknologi informasi telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk bisnis, pendidikan, dan pemerintahan. Pembangunan



Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi salah satu elemen penting dalam kemajuan suatu daerah, termasuk di Provinsi Sumatera Utara. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan ukuran standar tingkat pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi di suatu wilayah yang dapat dibandingkan antar waktu dan antar wilayah. Selain itu IP-TIK juga mampu mengukur pertumbuhan pembangunan TIK, mengukur GAP digital atau kesenjangan digital antarwilayah serta mengukur potensi pembangunan TIK. Dalam perhitungannya terdapat 11 indikator penyusun IP-TIK yang terbagi menjadi 3 sub indeks yaitu sub indeks akses dan infrastruktur TIK, sub indeks penggunaan TIK, dan sub indeks keahlian TIK. Pembangunan TIK Provinsi Sumatera Utara menunjukkan perkembangan positif dari tahun 2020 dengan nilai indeks IP-TIK sebesar 5,44 poin meningkat dengan nilai menjadi 6,04 poin pada tahun 2023.

Tabel 2.23 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi Sumatera Utara

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	5,44	5,75	5,90	6,04	na

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik digunakan untuk mengukur tingkat kematangan level penerapan SPBE di Provinsi Sumatera Utara hal ini dilakukan untuk membentuk Pemerintahan Digital yang bertujuan menyederhanakan birokrasi, mempercepat layanan, dan mengurangi biaya dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Pemerintahan digital juga didukung dengan regulasi, standar, pedoman serta kebijakan. Pengembangan Arsitektur SPBE juga memperhatikan integrasi dan interoperabilitas sistem informasi pemerintah. Berdasarkan laporan pelaksanaan evaluasi SPBE Tahun 2023 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nilai Indeks SPBE Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan yang sebelumnya pada tahun 2023 dengan nilai indeks sebesar 3,21 menjadi 3,86 pada tahun 2024 yang termasuk ke dalam kategori predikat “Sangat Baik”.

Tabel 2.24 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Sumatera Utara

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,96	2,77	2,81	3,21	3,86

Sumber: Laporan Evaluasi SPBE Kementerian PAN dan RB, 2025

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Sumatera Utara adalah langkah penting dalam menuju pemerintahan yang lebih modern, transparan, efisien, dan responsif. Meskipun ada tantangan terkait infrastruktur dan keterampilan, dengan langkah-langkah strategis dan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, SPBE dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat



pembangunan daerah.

Indeks keterbukaan informasi publik pada tahun 2024 tercatat 82,07 atau naik 2,40 poin dari tahun sebelumnya yaitu 79,67. Sumut menduduki urutan kelima setelah Jabar (85,22), Jatim (83,83), Kaltim (82,25), dan Sulteng (82,16). Ini mencerminkan Provinsi Sumatera utara berkomitmen untuk wujudkan Pemerintahan Daerah yang baik. Terutama dalam transparansi pemerintahan. Kita hal ini merupakan salah satu upaya dalam membuka akses yang mudah bagi publik mendapat informasi.

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) tahun 2024 Sumatera Utara mendapat Penilaian pada pilar:

- 1) 52,12 untuk penilaian Pilar Infrastruktur dan ekosistem;
- 2) 55,06 untuk penilaian Pilar Keterampilan digital;
- 3) 23,59 untuk penilaian Pilar Pemberdayaan;
- 4) 35,34 untuk penilaian Pilar pekerjaan.

g. Sarana dan Prasarana Dasar

Penyediaan Air Minum aman dan Sanitasi layak masih terkendala pada beberapa isu dan tantangan dalam perencanaan pembangunan. Beberapa persoalan yang terkait dengan penyediaan air minum aman dan sanitasi layak adalah cakupan pelayanan air minum masih rendah, Isu teknis operasional, dan Isu non-teknis seperti kurangnya ketersediaan regulasi daerah terkait dengan penyelenggaraan SPAM, Peran regulator berkaitan dengan pelayanan air minum, penyelenggaraan SPAM, dan kinerja operator dalam pengelolaan SPAM di daerah belum optimal, rendahnya keberpihakan Pemerintah Daerah terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran SPAM, terbatasnya pemanfaatan potensi sumber-sumber dana non-publik, Pengelolaan air minum belum sepenuhnya responsif gender, dan Eksploitasi pemanfaatan air tanah yang tidak memenuhi kaidah lingkungan hidup.

Di Sumatera Utara sendiri, akses air minum layak sebesar 89,68%, akses air minum aman 10,93%, akses air minum perpipaan 23,02% dan sambungan rumah sebanyak 829.579 SR. Potensi sumber air baku untuk minum berupa 1 bendungan dengan volume tampung 20,07 juta m³ dengan kapasitas *intake* belum termanfaatkan sebesar 0,015 m³/detik atau sekitar 83,33%. Di Provinsi Sumatera Utara juga terdapat 2 (dua) SPAM Regional yang sudah terbangun yaitu SPAM Regional Mebidangro dengan kapasitas rencana 2.200 liter/detik dan SPAM Seriti (Serdang Bedagai dan kota Tebing Tinggi) dengan total 300 liter/detik. Selain itu, akan direncanakan pembangunan SPAM Regional di Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

1. SPAM Regional Kota Sibolga – Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. SPAM Regional Kota Tanjung Balai – Kabupaten Asahan;
3. SPAM Regional Kawasan Danau Toba;
4. SPAM Regional Kota Pematang Siantar – Kabupaten Simalungun;
5. SPAM Regional Kota Padangsidimpuan – Kabupaten Tapanuli Selatan;
6. SPAM Regional di Kepulauan Nias.

Untuk pemenuhan jumlah kebutuhan air minum, Proyeksi kebutuhan air minum dihitung berdasarkan proyeksi jumlah penduduk yang akan dilayani hingga akhir tahun perencanaan dan standar kebutuhan air minum untuk semua jenis pelanggan. Dasar perhitungan untuk kapasitas SPAM



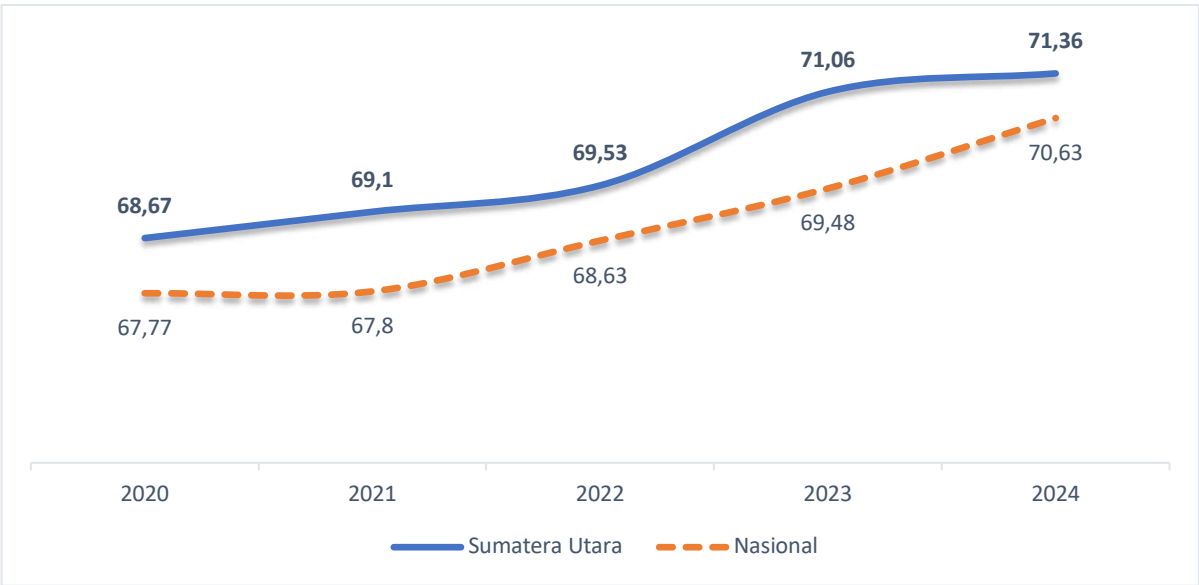
ditentukan oleh Penetapan daerah pelayanan, Proyeksi penduduk, Jumlah penduduk yang dilayani, Perhitungan SR, Penetapan konsumsi air, Kehilangan air, Faktor hari maksimum dan jam puncak, Kapasitas Terpasang, dan Defisit Air. Kapasitas akhir produk air minum ditentukan dari jumlah yang akan dilayani di mana perhitungan kebutuhan air dilaksanakan oleh masing-masing SPAM regional.

Sedangkan Strategi penyediaan air minum yang akan diadopsi adalah memprioritaskan penanganan berdasarkan ketersediaan air baku di mana permintaan (*demand*) mengacu pada dokumen RISPAM kabupaten/kota, sinkronisasi lokus dan kegiatan dengan pengembangan Kawasan permukiman, dan kolaborasi pembangunan dengan menjamin keberfungsian sistem secara utuh (hulu-hilir). Sedangkan strategi pencapaian akses sanitasi layak adalah dengan percepatan penyediaan dan pengoperasian infrastruktur serta peningkatan cakupan layanan sanitasi, penguatan substansi dan penerapan peraturan perundang-undangan, peningkatan kualitas kelembagaan dan tata kelola pengembangan layanan sanitasi berkelanjutan, dan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

2.1.3.4 Tenaga Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase jumlah penduduk yang bekerja atau aktif mencari pekerjaan terhadap total jumlah penduduk usia kerja dalam suatu wilayah.

Gambar 2.23 Perbandingan TPAK Provinsi Sumatera Utara



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2025

TPAK mengukur seberapa besar proporsi penduduk yang berkontribusi secara aktif dalam pasar tenaga kerja. Indikator ini penting untuk memahami dinamika pasar tenaga kerja dan tingkat keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi. Semakin tinggi TPAK, semakin besar proporsi penduduk yang berpartisipasi dalam ekonomi, baik melalui pekerjaan atau pencarian kerja aktif. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat selama periode 2020 hingga 2024. Meskipun pada tahun 2020 kondisi pandemi sempat mempengaruhi dinamika ketenagakerjaan, TPAK tetap mampu bertahan dan mulai

mengalami perbaikan di tahun-tahun berikutnya. Peningkatan ini mencerminkan membaiknya kondisi pasar tenaga kerja dan bertambahnya jumlah penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Secara keseluruhan, tren positif ini mengindikasikan bahwa Sumatera Utara berhasil menjaga tingkat partisipasi angkatan kerjanya di tengah tantangan ekonomi yang dinamis.

Tabel 2.25 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/Kota Sumatera Utara

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Nias	81,16	81,79	84,50	81,68	82,45
Mandailing Natal	65,94	69,79	71,15	63,07	64,42
Tapanuli Selatan	78,54	74,38	74,53	75,64	75,68
Tapanuli Tengah	70,91	75,05	76,51	74,52	75,72
Tapanuli Utara	82,18	82,63	81,07	81,20	83,69
Toba	81,21	80,38	79,04	80,87	82,57
Labuhanbatu	64,91	61,84	63,51	64,84	65,46
Asahan	59,62	63,02	65,68	69,53	67,64
Simalungun	71,83	72,55	69,91	72,15	71,31
Dairi	70,22	85,73	85,01	84,81	83,80
Karo	83,93	84,56	85,11	83,86	84,13
Deli Serdang	67,23	66,78	66,84	67,62	67,57
Langkat	69,92	69,12	71,51	75,87	76,30
Nias Selatan	77,14	72,25	78,54	79,29	78,83
Humbang Hasundutan	87,13	84,17	85,83	86,67	86,52
Pakpak Bharat	88,95	87,70	86,20	85,95	85,43
Samosir	52,17	84,38	83,57	86,89	85,59
Serdang Bedagai	69,82	66,75	67,59	67,65	67,75
Batu Bara	69,10	70,00	73,50	72,94	72,01
Padang Lawas Utara	66,04	76,82	70,33	73,41	73,01
Padang Lawas	76,93	75,23	75,10	78,14	77,52
Labuhanbatu Selatan	60,94	66,38	66,76	73,2	71,92
Labuhanbatu Utara	68,08	65,73	65,31	64,68	64,87
Nias Utara	73,71	74,27	77,75	81,27	79,70
Nias Barat	51,83	82,08	84,63	81,08	81,18
Sibolga	70,38	71,19	65,85	71,18	70,83
Tanjungbalai	65,84	66,57	70,77	69,79	69,57
Pematangsiantar	70,45	68,80	65,27	70,96	71,82
Tebing Tinggi	69,27	67,19	77,26	65,70	66,48
Medan	63,62	62,16	62,23	64,67	66,44
Binjai	65,14	62,77	58,61	62,79	64,22
Padangsidempuan	73,24	68,69	64,41	68,9	68,53
Gunungsitoli	62,82	62,95	66,11	67,77	71,12

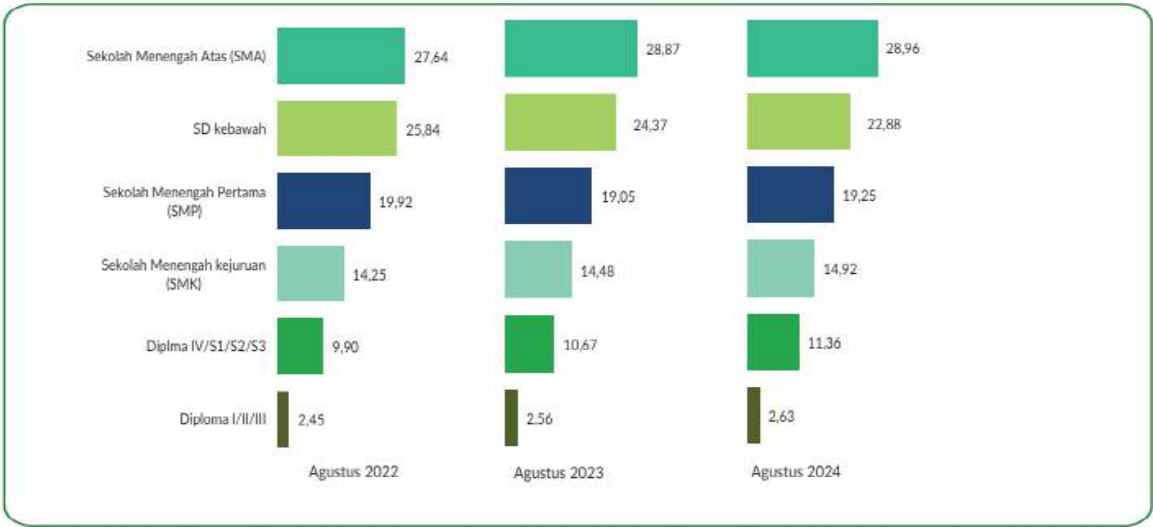
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Berdasarkan data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2020–2024, terlihat bahwa sebagian besar wilayah mengalami fluktuasi dalam tingkat partisipasi

angkatan kerja. Beberapa daerah dengan TPAK yang relatif rendah dan memerlukan intervensi lebih lanjut untuk meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja adalah Kabupaten Samosir (52,17% pada 2020), Kabupaten Nias Barat (51,83% pada 2020), serta Kota Binjai yang memiliki TPAK yang terus menurun pada 2024 (64,22%). TPAK yang rendah di daerah ini mencerminkan rendahnya keterlibatan angkatan kerja dalam kegiatan ekonomi, yang kemungkinan disebabkan oleh faktor-faktor seperti terbatasnya lapangan kerja, kualitas pendidikan yang rendah, serta kurangnya keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, intervensi yang diperlukan mencakup peningkatan pelatihan keterampilan kerja, peningkatan akses pendidikan vokasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan industri lokal, serta pengembangan sektor-sektor ekonomi produktif di wilayah tersebut. Selain itu, perlu adanya dorongan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru melalui investasi di sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi, seperti pariwisata, agribisnis, dan industri kreatif, yang dapat meningkatkan TPAK secara berkelanjutan di daerah-daerah yang membutuhkan perhatian khusus ini.

Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja merupakan besaran kontribusi tenaga kerja dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan ekonomi. Data Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik Sumatera Utara bahwa nilai Produktivitas Tenaga Kerja Sumatera Utara Tahun 2023 tercatat sebesar Rp 79,77 Juta/Tenaga Kerja. Produktivitas Tenaga Kerja Sumatera Utara hingga tahun 2023 masih lebih rendah dibandingkan dengan nilai nasional dengan capaian nilai nasional sebesar Rp 87,96 Juta/Tenaga Kerja.

Gambar 2.24 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Data tingkat produktivitas tenaga kerja di Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan bahwa pekerja dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki produktivitas tertinggi dan cenderung meningkat dari 27,64 pada 2022 menjadi 28,96 pada 2024. Sebaliknya, produktivitas pekerja dengan pendidikan SD kebawah mengalami penurunan dari 25,84 menjadi 22,88 dalam periode yang sama. Kelompok pekerja dengan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menunjukkan fluktuasi yang relatif stabil



dengan sedikit peningkatan pada SMK. Sementara itu, produktivitas tenaga kerja dengan pendidikan Diploma IV/S1/S2/S3 dan Diploma I/II/III juga menunjukkan tren kenaikan yang konsisten meskipun dalam angka yang lebih rendah dibandingkan tingkat pendidikan SMA. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung berkontribusi pada produktivitas kerja yang lebih baik di wilayah tersebut.

2.1.3.5 Daya Saing Daerah

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan PDRB per Kapita

Provinsi Sumatera Utara merupakan Provinsi dengan ekonomi atau produk domestik regional bruto (PDRB) terbesar di Pulau Sumatera. Struktur ekonomi di Pulau Sumatera secara spasial pada tahun 2024 didominasi oleh 3 provinsi besar, yaitu Provinsi Sumatera Utara berkontribusi sebesar 23,55 persen; Provinsi Riau sebesar 22,84 persen; dan Provinsi Sumatera Selatan berkontribusi sebesar 13,63 persen. Sementara kontribusi terendah yaitu Provinsi Bengkulu dengan kontribusi sebesar 2,14 persen. Pada tahun 2024, PDRB per kapita Sumatera Utara tercatat sebesar 73,57 juta rupiah. Nilai tersebut meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 68,57 juta rupiah. Jika kita mengamati besaran PDRB per kapita kabupaten/kota, ada sebanyak 7 (tujuh) kabupaten/kota yang memiliki PDRB per kapita lebih tinggi dibandingkan Sumatera Utara. Kabupaten/kota tersebut mencakup Kota Medan (132,57 juta rupiah) sebagai kota dengan PDRB per kapita tertinggi, dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan (124,52 juta rupiah). Serta lima kabupaten yaitu, Kabupaten Batu Bara (108,19 juta rupiah), Kabupaten Labuhanbatu (97,59 juta rupiah), Kabupaten Labuhanbatu Utara (89,50 juta rupiah), Kota Sibolga (78,49 juta rupiah), dan Kabupaten Deli Serdang (73,93 juta rupiah). Kabupaten Nias Selatan menempati posisi dengan PDRB per kapita terendah yaitu hanya 23,95 juta rupiah.

2. Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB

Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB adalah indikator yang dapat mengindikasikan sejauh mana sektor lapangan usaha industri berkembang dan mempengaruhi perekonomian suatu daerah. Sebagai salah satu sektor terbesar penyumbang PDRB di Provinsi Sumatera Utara, kontribusi Industri Pengolahan diharapkan 20 (dua puluh) tahun ke depan terus meningkat, walaupun kondisi saat ini kontribusi sektor Industri Pengolahan cenderung stagnan bahkan menurun. Tabel yang menunjukkan kontribusi sektor industri pengolahan Sumatera Utara dari tahun 2020 hingga 2024 memberikan gambaran mengenai perkembangan PDRB sektor ini, baik dalam hal kontribusi terhadap ekonomi regional maupun pertumbuhannya. PDRB sektor industri pengolahan (ADHB) mengalami kenaikan signifikan dari Rp 156,50 triliun pada 2020 menjadi Rp 210,61 triliun pada 2024. Kontribusinya terhadap total PDRB juga menunjukkan fluktuasi, dengan kontribusi pada 2020 sebesar 19,29% yang kemudian sedikit menurun menjadi 18,13% pada 2022 dan diperkirakan akan berangsur kembali meningkat menjadi 18,36% pada 2024.



Tabel 2.26 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Provinsi Sumatera Utara

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHB	Triliun Rp	156,50	167,95	182,74	193,74	210,61
PDRB ADHK	Triliun Rp	96,55	97,93	99,87	103,29	108,09
Kontribusi	Persen	19,29	19,53	18,13	18,43	18,36
Pertumbuhan	Persen	-0,84	1,43	1,98	3,42	4,65

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Pertumbuhan sektor ini mengalami kenaikan yang signifikan terutama pada tahun 2023 dan 2024, dengan angka pertumbuhan berturut-turut sebesar 3,42% dan 4,65%. Hal ini menunjukkan adanya pemulihan yang kuat dan peningkatan kinerja sektor industri pengolahan, setelah penurunan yang terjadi pada tahun 2020 (yang tercatat -0,84%). Penurunan pada tahun 2020 kemungkinan disebabkan oleh dampak dari pandemi COVID-19 yang menghantam hampir seluruh sektor ekonomi, namun sejak 2021, sektor ini mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang solid. Pemulihan ini bisa jadi dipengaruhi oleh peningkatan investasi di sektor manufaktur, pengolahan komoditas unggulan seperti kelapa sawit dan karet, serta dorongan kebijakan pemerintah untuk memperkuat sektor industri pengolahan di Sumatera Utara.

3. Kontribusi Sektor Pariwisata

Pariwisata merupakan sektor yang menjanjikan dapat memberikan manfaat pembangunan yang luas dan berkelanjutan bagi masyarakat namun sekaligus sektor yang memiliki VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) yang cukup tinggi, sehingga sedikit saja perubahan global akan berdampak terhadap pariwisata. Seperti yang terjadi pada tahun 2019 yang lalu, akibat melandanya Pandemi Covid-19, merubah paradigma wisatawan dalam berwisata. Provinsi Sumatera Utara dengan kekayaan potensi wisatanya diharapkan dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan akan menjadi salah destinasi wisata global. Hal ini menjadi sebuah tantangan tersendiri melihat kondisi daya saing pariwisata Sumatera Utara yang masih rendah, tercermin dari kontribusi sektor Akomodasi Makan-Minum di mana rerata kontribusinya masih cukup rendah yaitu di bawah 3%.

Tabel 2.27 Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum Sumatera Utara

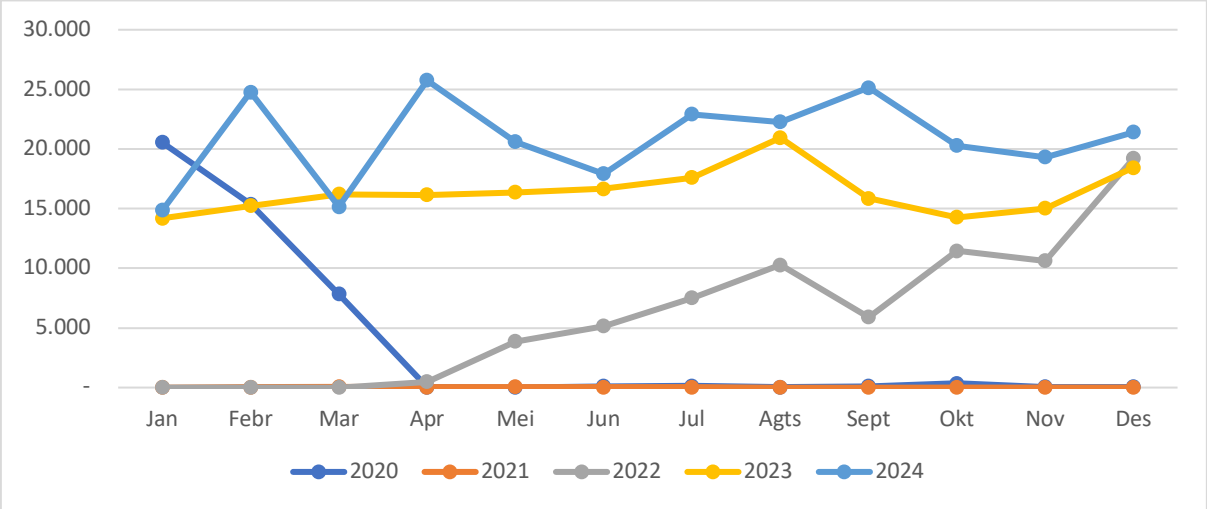
Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHB	Triliun Rp	17,69	17,66	19,51	11,16	15,33
PDRB ADHK	Triliun Rp	11,99	11,89	12,75	14,06	15,74
Kontribusi	Persen	2,18	2,05	2,04	2,11	2,21
Pertumbuhan	Persen	-9,26	-0,81	7,26	10,23	11,98

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Tabel yang menunjukkan kontribusi sektor akomodasi dan makan minum di Sumatera Utara dari tahun 2020 hingga 2024 menggambarkan dampak signifikan dari pandemi COVID-19 terhadap sektor ini, serta proses pemulihannya. Pada tahun 2020, PDRB sektor ini tercatat Rp 17,69 triliun, dengan kontribusi terhadap PDRB Sumatera Utara sebesar 2,18%. Namun, sektor ini mengalami penurunan tajam pada tahun 2020 (-9,26%) akibat pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi yang mempengaruhi sektor pariwisata dan jasa akomodasi, yang terdampak langsung oleh pandemi.

Setelah tahun 2020, sektor ini mulai menunjukkan pemulihan. Pada tahun 2022, kontribusinya meningkat menjadi 2,04% dengan PDRB sektor ini mencapai Rp 19,51 triliun. Pada 2023 dan 2024, sektor ini mengalami pertumbuhan yang lebih stabil, masing-masing sebesar 10,23% dan 11,98%, meskipun kontribusinya terhadap PDRB sedikit menurun menjadi 2,11% dan 2,21%. Hal ini menunjukkan adanya pemulihan sektor yang kuat pada tahun-tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya aktivitas pariwisata dan konsumerisme setelah pelanggaran pembatasan pandemi. Pemulihan ini dapat dikaitkan dengan kembali meningkatnya jumlah wisatawan dan pembukaan sektor ekonomi yang terdampak, seperti restoran, hotel, dan tempat makan.

Gambar 2.25 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Sumatera Utara



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Sedangkan jika dilihat dari jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Sumatera Utara, rerata kunjungan masih di bawah 300.000 wisman. Pada tahun 2024, jumlah wisman yang berkunjung di Sumatera Utara naik 27,13 persen bila dibandingkan pada tahun 2023, yaitu dari 196.961 kunjungan pada tahun 2023 naik menjadi 250.409 kunjungan pada periode 2024.

4. Kontribusi Ekonomi Kreatif (Ekraf)

Ekonomi Kreatif (Ekraf) merupakan salah satu sektor yang diharapkan mampu menjadi kekuatan baru ekonomi nasional yang berkelanjutan dan menekankan pada penambahan nilai barang lewat daya pikir serta kreativitas manusia. Saat ini, ekonomi kreatif menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Kontribusi ekonomi kreatif Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2010-2016, masih berada di bawah capaian Nasional dengan rata-rata kontribusi masih di bawah 5% setiap tahunnya. Hal ini disebabkan masih kurangnya ekosistem industri ekonomi kreatif dan akses permodalan bagi pelaku ekonomi kreatif. Data terkait kontribusi ekonomi kreatif Sumatera Utara dari tahun 2020 hingga saat ini belum tersedia.

Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan tren yang cukup stabil dari tahun 2020 hingga 2022. Pada 2020, jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif tercatat sebanyak 841.703 orang, yang meningkat menjadi 985.308 orang pada 2021, dan mencapai angka

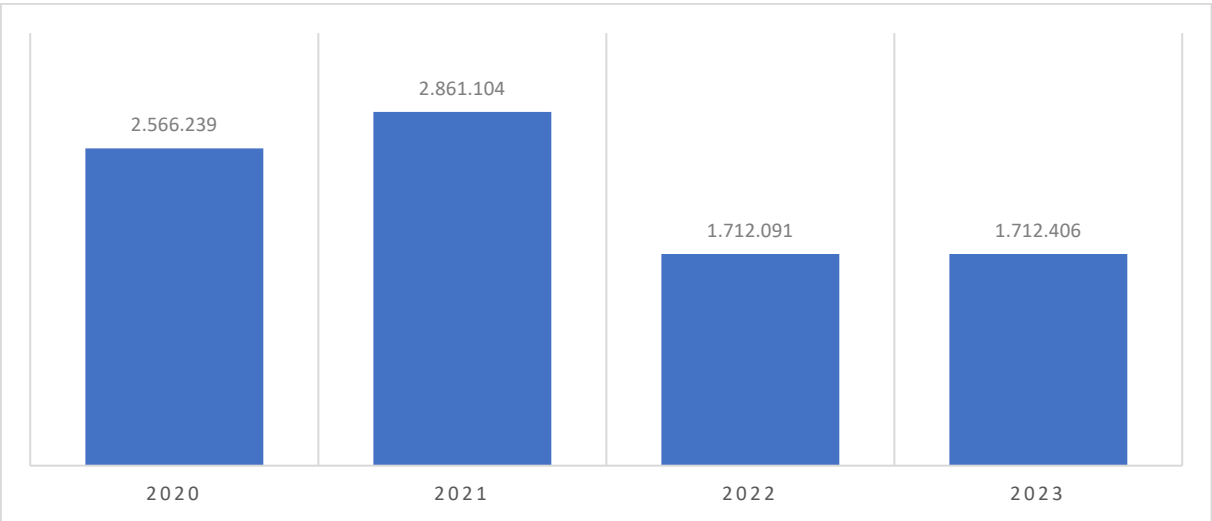


tertinggi sebesar 1.071.702 orang pada 2022, namun data tahun 2023-2024 tidak tersedia. Informasi ini menggambarkan Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi ekonomi kreatif yang cukup besar. Untuk meningkatkan kontribusi dan nilai tambah dari sektor ini diperlukan ekosistem ekonomi kreatif yang layak, namun saat ini di Provinsi Sumatera Utara ekosistem ekonomi kreatif tersebut belum berjalan secara maksimal, maka diperlukan sinergi dan kolaborasi dari berbagai stakeholders untuk mewujudkan ekosistem ekonomi kreatif yang layak.

5. Produktivitas UMKM, Koperasi dan BUMD

Produktivitas menggambarkan tingkat efisiensi dalam menghasilkan output. Tingkat produktivitas yang tinggi menunjukkan bahwa suatu organisasi atau sistem mampu menghasilkan lebih banyak output dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit atau sama. Meningkatnya produktivitas UMKM, Koperasi dan BUMD diharapkan mampu mendorong peningkatan perekonomian suatu daerah. Semakin banyak jumlah UMKM, Koperasi dan BUMD diasumsikan akan meningkatkan produktivitasnya. Pertumbuhan jumlah UMKM dan Koperasi dapat memperlihatkan iklim usaha di suatu daerah cukup meningkat. Jumlah UMKM di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023 sebanyak 1.712.406 unit.

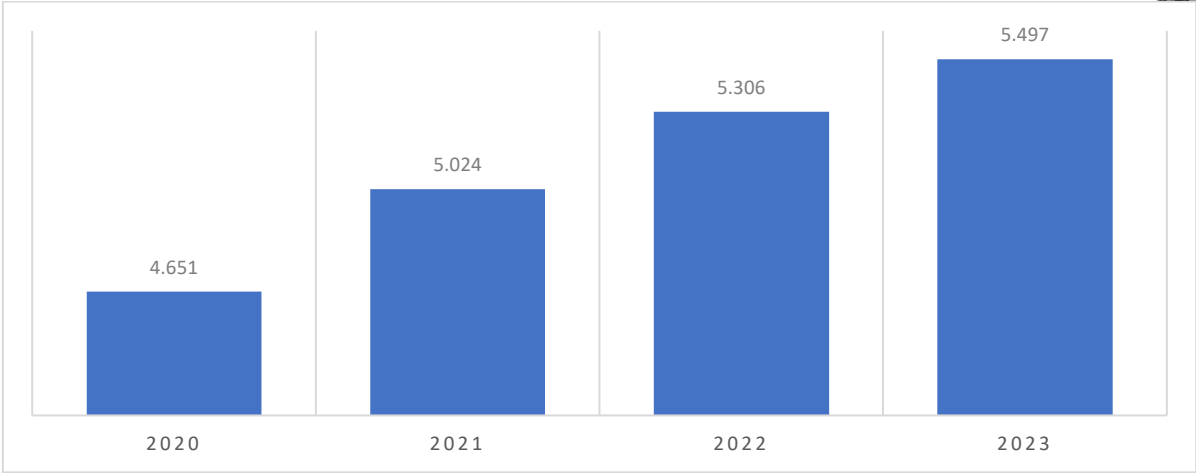
Gambar 2.26 Jumlah UMKM di Provinsi Sumatera Utara



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2024

Sedangkan jumlah koperasi aktif di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023 sebanyak 5.497 koperasi meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 5.306 koperasi. Kondisi ini masih belum optimal untuk mendorong peningkatan ekonomi Provinsi Sumatera Utara, hal ini terlihat dari porsi usaha mikro yang masih cukup besar (68,17%) jika dibandingkan dengan usaha kecil dan menengah.

Gambar 2.27 Jumlah Koperasi Aktif di Provinsi Sumatera Utara



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dikelola Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebanyak 7 BUMD, dimana dari tahun 2020 hingga tahun 2024 yang terus memberikan kontribusi terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara hanya 3 BUMD, sedangkan 2 BUMD tidak memberikan kontribusi terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara dan 2 BUMD lainnya tidak secara konsisten berkontribusi terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 2.28 Deviden BUMD kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

No	BUMD	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1.	PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	188.037.661.330	357.099.174.514	269.964.828.615	265.798.013.692	275.982.152.535
2.	Perumda Tirtanadi	48.461.724.366	26.673.011.899	30.250.000.000	31.500.000.000	35.000.000.000
3.	PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda)	1.118.597.653	568.015.508	983.607.100	2.008.999.195	7.632.901.513
4.	PD. Aneka Industri dan Jasa Provsu	0	0	106.481.456	58.750.920	50.000.000
5.	PT. Perkebunan Sumatera Utara (Perseroda)	0	0	807.553.114	0	0
6.	PT. Dhirga Surya Sumatera Utara	0	0	0	0	0
7.	PT. Jamkrida Sumut (Perseroda)	0	0	0	0	0
Jumlah Total		237.617.983.349	384.340.201.921	302.112.470.285	299.365.763.807	318.665.054.048

Sumber: Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2025

Kontribusi total dari 7 BUMD tersebut terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan trend yang berfluktuasi, dimana pada tahun 2020 berkontribusi sebesar Rp 237 milyar yang kemudian meningkat menjadi Rp 384 milyar pada tahun 2021, kemudian menurun menjadi Rp 302 milyar di tahun 2022 dan kembali turun menjadi Rp 299 milyar pada tahun 2023 sebelum meningkat pada tahun 2024 menjadiRp 318 milyar.

Dalam pengelolaan BUMD, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi aktual dan tantangan yang dihadapi oleh BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah permasalahan mendasar yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan secara terarah dalam periode RPJMD.

6. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Ekonomi hijau adalah sebuah model pembangunan ekonomi yang berfokus kepada investasi, modal, infrastruktur, pekerjaan, dan keterampilan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan lingkungan berkelanjutan. Performa ekonomi hijau harus dilacak sesuai kemajuan terhadap target nasional dan pembangunan global sehingga aspek keberlanjutan ekonomi dapat diukur berdasarkan aksi. Untuk mengukur progres dan capaian transformasi ekonomi menuju Ekonomi Hijau secara *tangible*, representatif, dan akurat maka disusun Indeks Ekonomi Hijau sebagai instrumen pengukuran.

Tabel 2.29 Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Sumatera Utara

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023
Indeks Ekonomi Hijau	Persen	47,57	48,62	60,26	64,86

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024

Data Indeks Ekonomi Hijau Sumatera Utara menunjukkan tren meningkat pada 2020–2023, naik dari 47,57% menjadi 64,86%. Kenaikan besar pada 2022 menandai kemungkinan terjadinya pergeseran struktural seperti percepatan program energi bersih, penguatan pengelolaan limbah dan rehabilitasi lahan, serta mulai berjalannya insentif investasi ramah lingkungan dan praktik ekonomi sirkular di sektor industri dan perkebunan. Pergerakan Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Sumatera Utara bergerak ke arah yang benar, dengan periode akselerasi pada 2022 sebagai titik balik dimana prioritas ke depan adalah menjaga konsistensi kebijakan lintas kabupaten/kota, memperluas insentif fiskal berbasis kinerja hijau, memperkuat kemitraan swasta dengan UMKM, serta meningkatkan kualitas data dan monitoring agar kenaikan indeks ini berkelanjutan dan semakin inklusif.

Indeks Ekonomi Biru adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana Provinsi Sumatera Utara mengembangkan dan menerapkan prinsip ekonomi biru, yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Ekonomi biru mencakup berbagai sektor, seperti perikanan, kelautan, pariwisata pesisir, energi terbarukan berbasis laut, dan pelestarian ekosistem laut. Indeks ini mengukur kinerja suatu wilayah dalam mengelola sumber daya laut, termasuk dalam hal keberlanjutan lingkungan, pengelolaan sampah laut, serta perlindungan terhadap biodiversitas laut. Peningkatan indeks ekonomi biru menunjukkan bahwa suatu wilayah semakin sukses dalam mengoptimalkan potensi kelautan tanpa merusak lingkungan, yang penting untuk mendukung kesejahteraan ekonomi dan keberlanjutan ekosistem laut. Indeks ini menjadi indikator penting dalam menilai kebijakan dan implementasi ekonomi biru di tingkat nasional maupun daerah, serta untuk memastikan bahwa sektor kelautan berkembang dengan cara yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Indeks Ekonomi Biru Sumatera Utara tahun 2023 yang tercatat 45,77 menegaskan bahwa implementasi ekonomi biru masih berada pada fase awal



dengan tantangan utama pada tata kelola pesisir-laut, kualitas dan keterpaduan data, pendanaan biru, adopsi praktik perikanan berkelanjutan oleh UMKM, serta penegakan terhadap pencemaran dan penangkapan destruktif. Angka ini dapat dijadikan baseline untuk merumuskan target tahunan yang terukur, sambil mendorong “quick wins” seperti rehabilitasi mangrove dan perlindungan kawasan pesisir prioritas, pengurangan sampah plastik di aliran sungai-pelabuhan, peningkatan efisiensi rantai dingin perikanan, sertifikasi keberlanjutan, dan pengembangan wisata bahari rendah emisi. Di sisi kelembagaan, diperlukan penguatan koordinasi lintas dinas dan kabupaten/kota, skema pembiayaan inovatif (misal kemitraan publik-swasta dan instrumen keuangan biru), serta sistem monitoring berbasis komunitas dan teknologi untuk mempercepat perbaikan skor. Sinergi dengan agenda ekonomi hijau khususnya pengelolaan limbah, energi bersih untuk pelabuhan, dan tata guna lahan yang akan membantu menaikkan indeks ekonomi biru secara konsisten dan inklusif.

7. Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah

Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi adalah alat ukur penting untuk memahami tingkat fluktuasi harga dan stabilitas pasar suatu komoditas. Koefisien Variasi juga yang digunakan untuk mengukur sebaran harga sebagai ukuran stabilitas harga, baik antar waktu maupun antar wilayah. Semakin tinggi nilai KV, semakin besar variasi harga antar wilayah, yang dapat mengindikasikan ketidakstabilan harga dan potensi kesenjangan ekonomi antar daerah. Dalam konteks Sumatera Utara, nilai KV sebesar 11,26% pada tahun 2024 menunjukkan adanya variasi harga yang signifikan antar wilayah. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perbedaan infrastruktur, aksesibilitas distribusi barang, dan tingkat permintaan serta penawaran yang berbeda di setiap daerah.

Untuk memahami lebih lanjut mengenai variasi harga antar wilayah, berikut adalah beberapa komoditas pangan dengan Koefisien Variasi Harga Pangan Tingkat Konsumen pada tahun 2024:

- Beras Premium KV: 2,25%. Menunjukkan variasi harga yang relatif rendah antar wilayah.
- Beras Medium KV: 2,05%. Menunjukkan variasi harga yang relatif rendah antar wilayah.
- Jagung KV: 17,95%. Menunjukkan variasi harga yang tinggi antar wilayah.
- Kedelai KV: 9,56%. Menunjukkan variasi harga yang cukup tinggi antar wilayah.
- Cabai Merah Keriting KV: 20,55%. Menunjukkan variasi harga yang sangat tinggi antar wilayah

Penting untuk dicatat bahwa nilai KV yang tinggi pada komoditas tertentu, seperti cabai merah keriting, menunjukkan adanya ketidakstabilan harga yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah. Untuk mengurangi variasi harga antar wilayah, diperlukan upaya peningkatan infrastruktur distribusi, penguatan sistem logistik, dan kebijakan yang mendukung pemerataan ekonomi. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta kestabilan harga yang lebih

baik dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara.



2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

Reformasi Birokrasi diarahkan agar hadirnya birokrasi sebagai jembatan terhadap dampak, yang menyasar pada percepatan penyelesaian masalah-masalah utama pembangunan. Semangatnya, regulasi disusun untuk mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan, bukan justru menjadi beban dalam penyelesaian masalah (KemenpanRB RI, 2024). Indeks reformasi birokrasi sebagai alat ukur sejauh mana instansi mampu menerjemahkan visi melalui langkah-langkah strategis tata kelola yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Tabel 2.30 Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Sumatera Utara

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Birokrasi	61,77	-	66,87	75,18	80,87

Sumber: Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, 2025

Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Sumatera Utara menunjukkan tren peningkatan yang signifikan selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, indeks berada di angka 61,77, dan meningkat menjadi 66,87 pada 2022. Kemajuan yang lebih tajam terlihat pada tahun 2023 dengan capaian 75,18, dan terus naik menjadi 80,87 pada tahun 2024. Data tahun 2021 tidak tersedia, namun secara keseluruhan, tren ini mencerminkan adanya perbaikan yang konsisten dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah provinsi.

Peningkatan indeks ini menandakan bahwa berbagai aspek tata kelola pemerintahan seperti manajemen kinerja, pelayanan publik, akuntabilitas, dan efektivitas kelembagaan mengalami perbaikan yang terukur. Capaian 80,87 pada tahun 2024 menunjukkan bahwa Sumatera Utara telah masuk ke dalam kategori “baik” dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Ini dapat diartikan sebagai hasil dari komitmen pimpinan daerah, perbaikan sistem digitalisasi administrasi, serta penguatan akuntabilitas dan transparansi. Ke depan, tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi kualitas birokrasi dan memastikan bahwa perbaikan sistem benar-benar dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, dan responsif.

Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas atau prima merupakan salah satu ciri tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Instansi pemerintah memiliki tugas mendasar untuk memberikan pelayanan prima (*excellent service*) dan harus memastikan bahwa layanan yang diberikan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Dalam rangka menjaga pelayanan publik yang berkualitas dan transparan serta memenuhi harapan masyarakat, diperlukan penilaian terhadap instansi pemerintah tersebut. Berdasarkan PermenPAN RB No.17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian,



lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

Berdasarkan data Indeks Pelayanan Publik Sumatera Utara tahun 2020–2024 yang bersumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, terlihat adanya dinamika kinerja pelayanan publik di daerah ini. Data tahun 2020 tidak tersedia, namun pada tahun 2021 indeks tercatat sebesar 3,80 dan mengalami peningkatan menjadi 4,00 pada tahun 2022. Sayangnya, capaian ini menurun kembali pada tahun 2023 menjadi 3,51 sebelum akhirnya naik lagi menjadi 3,90 di tahun 2024. Fluktuasi ini menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam kualitas pelayanan publik yang diberikan, yang kemungkinan disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan kebijakan, kapasitas sumber daya manusia, atau tantangan operasional lainnya. Meskipun begitu, kenaikan pada tahun 2024 memberi sinyal positif atas upaya perbaikan dan reformasi birokrasi yang terus dilakukan untuk meningkatkan kepuasan dan kualitas layanan bagi masyarakat.

Tabel 2.31 Indeks Pelayanan Publik Provinsi Sumatera Utara

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pelayanan Publik	N/A	3,80	4,00	3,51	3,90

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2025

Indeks Integritas adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu organisasi atau lembaga, baik di tingkat pemerintah maupun sektor swasta, menjalankan prinsip-prinsip integritas dalam operasional dan kebijakannya. Indeks ini mencakup berbagai aspek, seperti transparansi, akuntabilitas, kejujuran, dan kepatuhan terhadap hukum dan etika. Tujuan utama dari Indeks Integritas adalah untuk mengukur sejauh mana sebuah lembaga atau organisasi dapat menjaga dan mempromosikan perilaku yang etis dan profesional, serta mencegah tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam konteks pemerintahan, Indeks Integritas sangat penting karena dapat menunjukkan sejauh mana sektor publik dapat dipercaya oleh masyarakat dalam memberikan layanan, mengelola anggaran, serta membuat keputusan yang adil dan transparan. Peningkatan Indeks Integritas sering kali berkaitan dengan reformasi birokrasi, penegakan hukum yang lebih tegas, serta kebijakan yang mendukung budaya anti-korupsi dan pelayanan publik yang berkualitas. Sebaliknya, Indeks Integritas yang rendah dapat menjadi indikator adanya praktik korupsi, ketidaktransparanan, dan kelemahan dalam sistem pengawasan yang perlu segera ditangani.

Tabel 2.32 Indeks Integritas Nasional/Survei Penilaian Integritas (SPI) Provinsi Sumatera Utara

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Integritas	N/A	58,50	66,20	66,37	58,50

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025

Data di atas menunjukkan Indeks Integritas Nasional/Survei Penilaian Integritas (SPI) Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2020 hingga 2024. Terlihat bahwa pada tahun 2020, indeks integritas tidak tersedia (na). Mulai tahun 2021, indeks integritas mengalami peningkatan dari 58,5 menjadi 66,2 pada tahun 2022, dan mencapai puncak tertinggi pada tahun 2023 yaitu 66,37. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan indeks integritas kembali ke angka 58,5, sama seperti pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan adanya fluktuasi dalam tingkat integritas di Sumatera Utara selama periode tersebut, dengan peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2023 diikuti oleh penurunan yang cukup tajam pada tahun berikutnya. Penurunan ini dapat menjadi sinyal perlunya evaluasi dan upaya lebih lanjut dalam menjaga dan meningkatkan integritas di Provinsi Sumatera Utara.

Opini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) adalah penilaian atau pendapat yang diberikan oleh BPK terhadap laporan keuangan suatu entitas, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun badan publik lainnya. Opini ini mencerminkan sejauh mana laporan keuangan tersebut mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan prinsip-prinsip transparansi serta akuntabilitas. Terdapat beberapa jenis opini BPK, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Opini WTP menunjukkan laporan keuangan yang disusun dengan baik, sementara opini WDP dan TW menunjukkan adanya masalah dalam penyusunan laporan keuangan. Opini TMP berarti BPK tidak dapat memberikan penilaian karena keterbatasan dalam informasi yang tersedia. Opini BPK menjadi alat penting dalam menilai kinerja pengelolaan keuangan negara atau daerah.

Tabel 2.33 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Utara

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BKAD Provinsi Sumatera Utara, 2025

Opini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap laporan keuangan Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan bahwa provinsi ini mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) setiap tahunnya. Opini WTP adalah hasil tertinggi yang diberikan oleh BPK terhadap laporan keuangan yang menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan tidak ada masalah material yang ditemukan.

Pencapaian opini WTP selama lima tahun berturut-turut (2020 hingga



2024) menunjukkan adanya transparansi dan akuntabilitas yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah di Sumatera Utara. Hal ini juga mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih baik, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran dan laporan keuangan di tingkat provinsi. Pencapaian ini tentu akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan dan perencanaan fiskal yang lebih baik di masa mendatang.

Persentase Penegakan Peraturan Daerah (Perda) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana peraturan daerah yang telah disahkan dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat serta aparat pemerintah. Indikator ini mencerminkan efektivitas pemerintah daerah dalam menegakkan aturan yang telah dibuat untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Penegakan perda melibatkan pengawasan, tindakan sanksi bagi pelanggaran, serta edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi peraturan tersebut. Semakin tinggi persentase penegakan perda, semakin baik pelaksanaan dan kepatuhan terhadap hukum daerah, yang mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sebaliknya, persentase yang rendah bisa menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan, penegakan hukum, atau penerimaan masyarakat terhadap peraturan yang ada. Dengan demikian, persentase penegakan perda menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas hukum dan ketertiban di suatu daerah.

Data persentase penegakan Peraturan Daerah (Perda) di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, tingkat penegakan Perda tercatat cukup tinggi yaitu sebesar 90,2%, namun mengalami penurunan menjadi 75,00% pada tahun 2021. Setelah sempat naik kembali menjadi 80,00% di tahun 2022, angkanya kembali turun menjadi 74,00% pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024, capaian ini melonjak tajam hingga mencapai 100,00%, menjadi angka tertinggi selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.34 Persentase Penegakan Perda Provinsi Sumatera Utara

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penegakan Perda	90,2	75,00	80,00	74,00	100,00

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara, 2025

Fluktuasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan Perda tidak berjalan secara stabil dari tahun ke tahun. Penurunan pada tahun 2021 dan 2023 bisa disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan sumber daya manusia aparaturnya penegak perda (seperti Satpol PP), rendahnya koordinasi lintas sektor dalam implementasi regulasi, atau lemahnya pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Perda di lapangan. Selain itu, perubahan prioritas pemerintahan atau terbatasnya anggaran operasional juga dapat berdampak pada menurunnya efektivitas penegakan aturan.

Di sisi lain, lonjakan capaian pada tahun 2024 hingga 100% menunjukkan bahwa pemerintah provinsi telah melakukan perbaikan yang



sangat signifikan dalam pengawasan, pelaporan, dan eksekusi terhadap pelanggaran Perda. Hal ini kemungkinan besar didorong oleh peningkatan kesadaran hukum, penguatan kapasitas aparat Satpol PP, dan mungkin juga didukung oleh sistem pelaporan kinerja elektronik (*e-monitoring*) yang membuat pelaksanaan penegakan lebih terukur dan transparan.

Ke depan, agar capaian ini tetap terjaga secara konsisten, perlu dilakukan penguatan kelembagaan dan peningkatan profesionalisme aparat penegak Perda, baik dari aspek kapasitas hukum maupun etika pelayanan publik. Diperlukan pula peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan Perda serta sosialisasi yang lebih efektif agar kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah meningkat tanpa harus selalu bergantung pada penindakan administratif. Sinergi antar organisasi perangkat daerah dan dukungan politik dari pimpinan daerah juga sangat penting dalam menciptakan tata kelola hukum daerah yang tertib, adil, dan berkelanjutan.

Indeks Demokrasi adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas demokrasi di suatu daerah berdasarkan berbagai indikator yang mencakup aspek politik, kebebasan sipil, partisipasi politik, serta fungsi pemerintahan. Indeks ini memberikan gambaran tentang sejauh mana prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, transparansi, dan akuntabilitas dijalankan dalam suatu sistem pemerintahan. Indeks Demokrasi sering kali dihitung berdasarkan data tentang pemilu yang bebas dan adil, kebebasan pers, tingkat partisipasi politik masyarakat, serta efektivitas lembaga-lembaga demokrasi dalam menjalankan fungsinya. Berdasarkan hasil pengukuran ini, negara atau daerah dapat dikategorikan ke dalam berbagai jenis sistem demokrasi, mulai dari "demokrasi penuh," "demokrasi cacat," hingga "otoriter." Indeks ini sangat penting karena mencerminkan seberapa baik demokrasi berfungsi dalam menjaga kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan sosial, serta dapat menjadi dasar dalam merancang kebijakan untuk meningkatkan kualitas sistem pemerintahan dan partisipasi masyarakat.

Tabel 2.35 Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Utara

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Demokrasi Indonesia	65,13	77,60	79,53	80,34	80,19

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2020 hingga 2023 memperlihatkan tren yang sangat positif, sedangkan tahun 2024 mengalami penurunan. Pada tahun 2020, IDI Sumatera Utara berada di angka 65,13, yang menunjukkan kondisi demokrasi yang cukup baik. Namun, seiring berjalannya waktu, angka ini terus meningkat, mencapai 77,60 pada tahun 2021, 79,53 pada tahun 2022, dan mencapai 80,34 pada tahun 2023 serta penurunan sebesar 80,19 pada tahun 2024. Penurunan IDI ini menunjukkan adanya keterlambatan yang signifikan dalam aspek-aspek demokrasi di Sumatera Utara, seperti partisipasi politik, kebebasan sipil, dan hak asasi manusia. Penurunan tersebut juga mencerminkan menurunnya kesadaran politik masyarakat dan keterlibatan mereka dalam proses demokrasi, baik dalam pemilihan umum

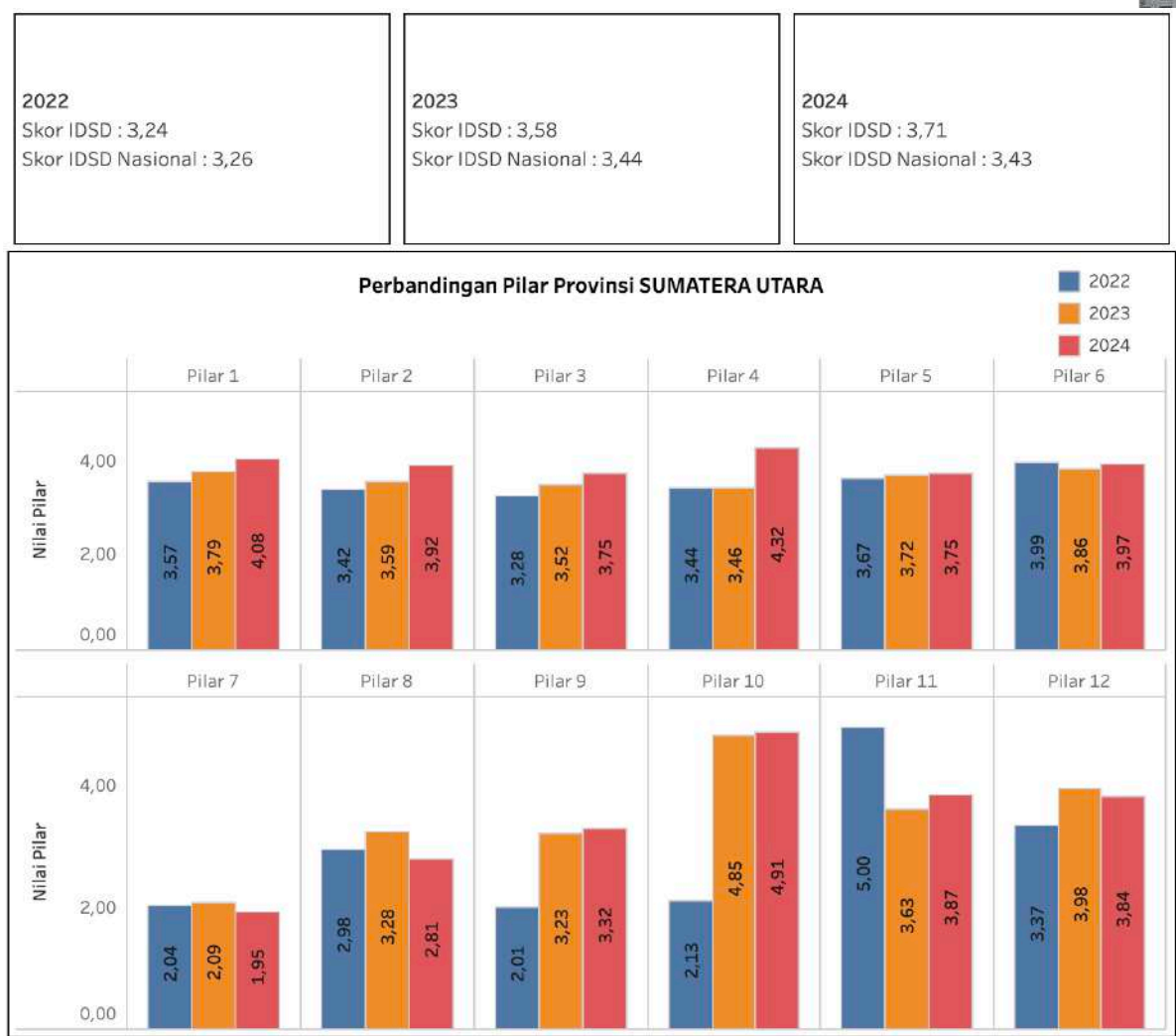


maupun dalam pengambilan keputusan politik di tingkat lokal. Selain itu, penurunan ini bisa dihubungkan dengan adanya ketidakpercayaan masyarakat dalam sistem demokrasi yang belum transparan dan akuntabel di tingkat provinsi.

Indeks Rasa Aman adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keamanan dan kenyamanan yang dirasakan oleh masyarakat di suatu wilayah. Indeks ini mengukur persepsi masyarakat terhadap tingkat ancaman atau bahaya yang ada di sekitarnya, baik yang berkaitan dengan kejahatan, bencana alam, atau faktor lainnya yang memengaruhi rasa aman. Indeks Rasa Aman sering kali diperoleh melalui survei atau polling yang melibatkan masyarakat setempat, di mana mereka diminta untuk menilai sejauh mana mereka merasa aman dalam aktivitas sehari-hari.

Indeks Ketenteraman dan Ketertiban adalah indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu daerah atau masyarakat dapat menciptakan suasana yang aman, tertib, dan damai. Indeks ini mencakup aspek-aspek terkait dengan pengendalian sosial, pengamanan, penegakan hukum, serta stabilitas politik dan sosial. Faktor yang mempengaruhi indeks ini meliputi tingkat kriminalitas, kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi aturan, serta kemampuan aparat penegak hukum dalam menjaga ketertiban umum. Selain itu, indeks ini juga mencerminkan tingkat toleransi sosial, penyelesaian konflik secara damai, dan keberhasilan dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari ketegangan sosial. Semakin tinggi indeks ketenteraman dan ketertiban, semakin besar kemungkinan daerah tersebut untuk memiliki suasana yang kondusif bagi aktivitas sosial dan ekonomi. Sebaliknya, rendahnya indeks ini menunjukkan adanya gangguan dalam stabilitas sosial yang dapat berdampak pada kualitas hidup masyarakat. Indeks ini menjadi indikator penting dalam merancang kebijakan keamanan dan ketertiban di suatu wilayah, serta untuk menilai keberhasilan upaya pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang aman dan damai.

Gambar 2.28 Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Sumatera Utara



Sumber: brin.go.id, 2025

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen yang dirancang untuk mengukur produktivitas suatu daerah yang pada akhirnya merefleksikan kemampuan daerah tersebut dalam bersaing, baik di kancah nasional maupun global. Perbandingan skor IDSD (Indeks Daya Saing Daerah) Sumatera Utara untuk tahun 2022 hingga 2024 menggambarkan progres yang cukup baik dalam peningkatan daya saing provinsi ini. Pada tahun 2022, Sumatera Utara memiliki skor IDSD sebesar 3,24, yang sedikit lebih rendah dibandingkan skor nasional (3,26). Namun, pada tahun 2023, skor IDSD Sumut meningkat signifikan menjadi 3,58, melampaui skor nasional yang berada pada 3,44. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan yang lebih baik dalam beberapa pilar daya saing daerah.

Tahun 2024 menunjukkan sedikit penurunan skor IDSD menjadi 3,71, meskipun masih lebih tinggi dari skor nasional yang tercatat pada 3,43. Grafik pilar-pilar IDSD mengungkapkan pilar-pilar yang menjadi kekuatan dan tantangan bagi Sumatera Utara. Beberapa pilar, seperti Pilar 4 (infrastruktur) dan Pilar 10 (kesehatan), menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan skor mendekati 4,00, sementara pilar lainnya seperti Pilar 7 (kemiskinan) dan Pilar 8 (akses pendidikan) menunjukkan skor yang lebih rendah, menunjukkan area yang perlu diperbaiki lebih lanjut untuk meningkatkan daya saing. Peningkatan di tahun 2023 dan 2024 dapat dikaitkan dengan upaya-upaya penguatan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan yang terus ditingkatkan oleh pemerintah daerah.



2.1.4.1 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Urusan Wajib

1. Pendidikan

Salah satu pengukuran kualitas Pendidikan di Sumatera Utara adalah melalui Indeks Pendidikan. Dimana Indeks Pendidikan sering digunakan sebagai alat untuk memantau kemajuan dan perbandingan antar negara atau wilayah dalam mencapai tujuan pendidikan, serta untuk merancang kebijakan dan intervensi yang tepat untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan. Indeks Pendidikan sering kali mencakup berbagai faktor, seperti:

- 1. Aksesibilitas: Persentase anak-anak usia sekolah yang terdaftar di institusi pendidikan, tingkat partisipasi siswa dari kelompok kelompok rentan, dan jarak fisik antara sekolah dengan rumah siswa.
- 2. Kualitas Pengajaran: Ini mencakup kualifikasi guru, rasio siswa-guru, dukungan pembelajaran, dan pembaruan kurikulum.
- 3. Hasil Akademik: Nilai tes standar, tingkat kelulusan, tingkat kelulusan, dan pencapaian siswa lainnya dalam hal pengetahuan dan keterampilan akademik.
- 4. Kesetaraan: Ini mencakup kesetaraan gender dalam akses dan partisipasi pendidikan, serta kesetaraan dalam hasil pendidikan di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda.
- 5. Efisiensi: Efisiensi sistem pendidikan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia, seperti anggaran pendidikan, fasilitas fisik, dan waktu pengajaran.
- 6. Inklusivitas: Sejauh mana sistem pendidikan mengakomodasi siswa dengan kebutuhan khusus, termasuk siswa dengan disabilitas.

Pada Tahun 2019 sampai Tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar 0,52 poin, Tahun 2020 sampai Tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 0,21 poin, tahun 2021 sampai 2022 meningkat sebesar 0,55 point dan 2022-2023 meningkat sebesar 0,84 point. Kenaikan indeks pendidikan periode 2020-2021 lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan pada periode 2019-2020. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemik covid-19 yang terjadi sehingga aktivitas sangat terganggu. Namun di tahun 2022 sampai tahun 2023 meningkat diposisi tertinggi selama 5 tahun terakhir. Kondisi kinerja perangkat daerah bidang pendidikan di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.36 Indikator Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pendidikan	68,55	68,79	69,34	70,18	70,57
APK SM Sederajat	105.12	106.07	97,23	105	97,43
APM SM Sederajat	73.69	72.53	68,27	71,72	97.68
Persentase Guru SMA/LB berkualifikasi Akademik S1/D4	96.61	96,80	100	100	100
Persentase Guru SMA/SLB bersertifikasi	48.97	49,46	54,30	54,30	N/A



Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pendidikan	68,55	68,79	69,34	70,18	70,57
Persentase Guru SMK berkualifikasi Akademik S1/D4	93.55	94,33	100	100	100
Persentase Guru SMK bersertifikasi	38.72	41,34	45,50	49,77	N/A

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2025

Jika dilihat dari tabel di atas, maka hampir semua capaian Indikator Pendidikan Provinsi Sumatera Utara capaiannya masih belum di rilis oleh Kemendikbud. Penetapan angka realisasi akan dilakukan pada bulan Maret Tahun 2025. namun pada IKU APK SM sederhana dan APM SM Sederajat angka realisasi sudah dipublikasikan.

2. Kesehatan

a. Dinas Kesehatan

Kondisi kesehatan di Provinsi Sumatera Utara diprioritaskan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat, salah satu indikator pendukung adalah Indeks Kesehatan beserta derajat kesehatan lainnya, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.37 Indeks Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

INDIKATOR	REALISASI				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup	2,39	2,28	2.19	3,61	2.77
Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup	62,5	89.18	47.06	72,46	52.56
Angka Kesakitan (Morbiditas)	12,24	8,78	12,98	10,10	10,08

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, 2025

Terkait kondisi kesehatan di Sumatera Utara mengalami beberapa kemajuan sepanjang tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Berikut beberapa poin penting terkait tabel diatas yaitu : Angka Kematian Bayi (AKB): AKB di Sumatera Utara mengalami penurunan dari target 2.05 dengan realisasi 2.77/1000 KH dan Angka Kematian Ibu (AKI) tidak memenuhi realisasi target 52.33 dengan realisasi 52.56/100.000 KH serta Angka Kesakitan (Morbiditas) mengalami penurunan dengan realisasi 10.08 persen. Salah satu penyebab turunnya angka kematian ibu di Sumatera Utara adalah peningkatan akses dan kualitas pelayanan Kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir, namun pada tahun 2023 terjadi lagi peningkatan Angka Kematian Ibu di Provinsi Sumatera Utara penyebab tertinggi kematian Ibu di Sumatera Utara Tahun 2023 adalah Hipertensi, pendarahan, komplikasi non obstetri, infeksi, kehamilan dengan komplikasi abortus dan lain-lain.

Prevalensi stunting merujuk pada persentase anak yang mengalami stunting dalam suatu populasi tertentu, biasanya berdasarkan kelompok usia tertentu seperti balita (0-59 bulan). Stunting diukur dengan perbandingan tinggi badan anak terhadap usia yang lebih rendah dari

standar pertumbuhan yang telah ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Prevalensi stunting digunakan untuk menggambarkan sejauh mana masalah kekurangan gizi kronis mempengaruhi populasi anak di suatu wilayah atau negara. Angka prevalensi yang tinggi menunjukkan bahwa banyak anak dalam suatu populasi yang terhambat pertumbuhannya akibat kekurangan gizi atau faktor lingkungan lainnya, seperti sanitasi yang buruk atau penyakit infeksi. Menurunkan prevalensi stunting menjadi fokus penting dalam upaya kesehatan masyarakat karena stunting dapat berdampak jangka panjang terhadap kemampuan kognitif, kesehatan, serta kualitas hidup anak di masa depan.

Tabel 2.38 Prevalensi Stunting Provinsi Sumatera Utara

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Prevalensi Stunting	Persen	29,20	25,80	21,10	18,90	22,00

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, 2025

Data prevalensi stunting di Provinsi Sumatera Utara pada periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, dengan tren penurunan yang jelas pada awalnya namun kemudian diikuti oleh sedikit kenaikan pada tahun terakhir. Pada tahun 2020, prevalensi stunting berada pada angka 29,20%, kemudian menurun secara konsisten menjadi 25,80% pada 2021, 21,10% pada 2022, dan 18,90% pada 2023. Namun, pada tahun 2024, prevalensi stunting mengalami kenaikan kembali menjadi 22,00%. Meskipun secara keseluruhan terjadi penurunan sebesar 7,2 poin persentase selama lima tahun, kenaikan di tahun terakhir menandakan adanya tantangan yang perlu dicermati lebih dalam.

Penurunan yang terjadi antara 2020 hingga 2023 merupakan hasil dari peningkatan berbagai program intervensi spesifik dan sensitif yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, antara lain pemberian makanan tambahan (PMT), kampanye edukasi gizi, peningkatan cakupan imunisasi, serta intervensi kesehatan ibu dan anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kebijakan seperti pendirian posyandu aktif, peningkatan anggaran desa untuk program gizi, serta pendampingan oleh tim pendamping keluarga (TPK) juga turut berperan dalam percepatan penurunan stunting. Selain itu, perbaikan sanitasi lingkungan, penyediaan air bersih, dan peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan dasar memberikan kontribusi tidak langsung dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Namun, kenaikan kembali prevalensi stunting pada tahun 2024 menjadi 22,00% mengindikasikan bahwa upaya penurunan belum sepenuhnya stabil dan berkelanjutan. Terdapat beberapa kemungkinan penyebab dari kenaikan tersebut. Pertama, bisa jadi terjadi gangguan pada pelaksanaan program intervensi, baik karena keterbatasan anggaran, hambatan logistik, maupun lemahnya koordinasi lintas sektor di tingkat lapangan. Kedua, faktor sosial-ekonomi seperti inflasi harga pangan pokok, krisis global, dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi dapat memengaruhi daya beli masyarakat, terutama keluarga miskin, sehingga berdampak pada asupan gizi anak. Ketiga, kurangnya keberlanjutan edukasi perubahan perilaku masyarakat terkait pola makan dan perawatan anak juga menjadi tantangan tersendiri. Dalam konteks ini, program tidak hanya memerlukan

cakupan luas, tetapi juga pendalaman kualitas layanan dan perubahan perilaku secara konsisten.

Kenaikan angka stunting ini juga menegaskan pentingnya pemantauan dan evaluasi program yang lebih ketat, serta perlunya strategi adaptif terhadap perubahan kondisi lokal dan nasional. Intervensi penanganan stunting harus lebih terintegrasi antara sektor kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, serta perencanaan wilayah. Selain intervensi gizi langsung, perlu pula ditingkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga, peningkatan kualitas pendidikan ibu, serta pendampingan keluarga miskin yang berisiko tinggi memiliki anak stunting. Dengan demikian, meskipun Sumatera Utara telah menunjukkan capaian yang positif dalam menurunkan angka stunting selama periode 2020–2023, tantangan yang muncul pada tahun 2024 menjadi sinyal bahwa penurunan stunting bukan hanya tentang cakupan, tetapi juga tentang keberlanjutan, konsistensi, dan kualitas intervensi yang dilakukan. Strategi ke depan harus difokuskan pada penguatan tata kelola program, peningkatan akuntabilitas lintas sektor, dan penyusunan kebijakan berbasis data yang responsif terhadap kondisi lapangan.

Data perkembangan penemuan dan pengobatan Tuberkulosis (TBC) di Sumatera Utara selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang mencerminkan perbaikan dalam sistem deteksi kasus, namun juga menyoroti tantangan dalam mempertahankan keberhasilan pengobatan. Cakupan penemuan kasus TBC mengalami peningkatan signifikan, dari hanya 36,00% pada tahun 2020 menjadi 71,30% pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa upaya aktif dalam skrining, pelacakan kontak erat, dan pelaporan kasus mulai membuahkan hasil. Perluasan program deteksi dini melalui pemanfaatan teknologi digital, pelibatan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), dan edukasi masyarakat tampaknya menjadi faktor kunci yang mendorong peningkatan penemuan kasus.

Sementara itu, capaian dalam pengobatan TBC justru menunjukkan tren yang sedikit menurun. Pada awalnya, tingkat keberhasilan pengobatan mencapai 90,20% pada 2020 dan relatif stabil hingga 2022. Tetapi, sejak 2023 terjadi penurunan menjadi 85,00%, dan angka ini stagnan pada 2024. Penurunan ini bisa mengindikasikan berbagai permasalahan, seperti kepatuhan pasien terhadap regimen pengobatan jangka panjang, kendala logistik dalam distribusi obat, atau lemahnya pemantauan pengobatan di tingkat komunitas. Selain itu, bertambahnya jumlah kasus yang ditemukan juga dapat memperbesar beban layanan kesehatan, yang jika tidak disertai peningkatan kapasitas sistem, bisa menyebabkan penurunan kualitas pelayanan pengobatan.

Tabel 2.39 Perkembangan Penemuan dan Pengobatan TBC Provinsi Sumatera Utara

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Tuberkulosis (Penemuan)	Persen	36,00	37,00	59,00	60,00	71,30
Tuberkulosis (Pengobatan)	Persen	90,20	90,30	90,00	85,00	85,0

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, 2025

Untuk itu, strategi penguatan sistem pengobatan menjadi sangat krusial. Program manajemen kasus TBC perlu diperkuat dengan pengawasan ketat terhadap pasien, peningkatan dukungan psikososial, serta penguatan pemantauan digital dan pelibatan keluarga atau kader kesehatan. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan, peningkatan penemuan kasus dapat diimbangi dengan keberhasilan pengobatan yang tinggi, sehingga target eliminasi TBC nasional pada 2030 dapat tercapai.

Universal Health Coverage (UHC) atau Cakupan Kesehatan Semesta adalah sebuah konsep dalam sistem kesehatan yang memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang adil terhadap layanan kesehatan yang berkualitas tanpa mengalami kesulitan finansial saat menggunakan. Di Provinsi Sumatera Utara salah satu Program Berobat Gratis (Probis) diwujudkan dalam pencapaian Universal Health Coverage (UHC), yang memastikan bahwa setiap warga yang memiliki KTP Sumatera Utara mendapatkan akses layanan kesehatan gratis melalui kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Pembiayaan pencapaian UHC melalui mekanisme Cost Sharing dengan kabupaten/kota, pada tahun 2025 proporsi cost sharing sebesar 20%-80%, selanjutnya proporsi provinsi naik 2,5% setiap tahunnya sampai 30% pada tahun 2029.

Tabel 2.40 Universal Health Coverage Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

No	Kabupaten/Kota	Cakupan Kepesertaan JKN	
		Jumlah	Persen (%)
1	KAB. NIAS UTARA	153,645	100.00%
2	KAB. NIAS SELATAN	374,354	100.00%
3	KAB. PADANG LAWAS	272,519	100.00%
4	KAB. PAKPAK BHARAT	57,272	99.99%
5	KOTA SIBOLGA	100,041	99.76%
6	KOTA GUNUNGSITOLI	137,833	99.66%
7	KAB. NIAS BARAT	97,005	99.47%
8	KAB. TAPANULI TENGAH	367,423	99.44%
9	KAB. SAMOSIR	148,378	99.00%
10	KOTA PEMATANGSIANTAR	276,904	98.97%
11	KAB. NIAS	146,467	98.97%
12	KOTA MEDAN	2,512,050	98.65%
13	KOTA TANJUNGBALAI	185,342	98.62%
14	KAB. LABUHANBATU SELATAN	333,110	100.00%
15	KAB. SIMALUNGUN	1,003,310	99.90%
16	KAB. KARO	418,178	98.98%
17	KAB. PADANG LAWAS UTARA	270,565	98.90%
18	KAB. BATU BARA	469,547	98.89%
19	KOTA BINJAI	312,072	98.88%
20	KAB. DAIRI	329,295	98.79%
21	KAB. SERDANG BEDAGAI	688,042	98.74%
22	KOTA TEBING TINGGI	180,149	97.87%
23	KOTA PADANGSIDIMPUAN	228,524	98.51%
24	KAB. TAPANULI SELATAN	319,520	98.45%
25	KAB. TOBA	217,044	98.43%
26	KAB. LANGKAT	1,100,529	98.20%
27	KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	206,343	97.78%
28	KAB. TAPANULI UTARA	323,635	97.63%
29	KAB. MANDAILING NATAL	489,359	97.56%
30	KAB. LABUHANBATU	477,824	93.14%
31	KAB. ASAHAN	740,853	92.67%
32	KAB. LABUHANBATU UTARA	360,086	90.18%
33	KAB. DELI SERDANG	1,874,747	90.11%
TOTAL		15,171,965	97.00%

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, 2025



Tingkat kepesertaan JKN di Sumatera Utara rata-rata sudah mencapai 97%, dengan empat kabupaten yang telah mencatatkan angka 100%, seperti Nias Utara, Nias Selatan, Padang Lawas, dan Labuhanbatu Selatan. Meskipun capaian ini menggambarkan kemajuan yang signifikan, ada kabupaten yang masih menunjukkan angka kepesertaan di bawah standar, seperti Deli Serdang (90,11%) dan Labuhanbatu Utara (90,18%). Meskipun secara keseluruhan cakupan UHC (Universal Health Coverage) di Sumatera Utara sudah cukup tinggi, masih terdapat daerah besar yang memerlukan percepatan untuk mencapai target nasional sebesar 98,6%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten/kota dan provinsi perlu mengambil langkah nyata untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam program JKN.

Distribusi dokter spesialis di 41 RSUD se-Sumatera Utara masih sangat tidak merata. Meskipun total jumlah dokter spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD) di wilayah ini mencapai 114 orang, distribusinya sangat timpang. RSUD Dr. Pirngadi Medan memiliki jumlah terbanyak dengan 9 orang spesialis, sementara sejumlah RSUD lainnya, seperti RSUD dr. Husni Thamrin Mandailing Natal, RSUD Lukas Hilisimaetano Nias Selatan, dan RSUD Tafaeri Nias Utara, bahkan tidak memiliki satu pun dokter spesialis Sp.PD. Hal yang sama juga terjadi pada ketersediaan Dokter Spesialis Obstetri & Ginekologi (Sp.OG), yang tercatat sejumlah 89 orang, namun masih ada beberapa RSUD yang belum memiliki tenaga spesialis ini sama sekali. Ketersediaan spesialis lainnya, seperti Radiologi, Patologi Anatomi, dan Rehabilitasi Medik, juga relatif terbatas. Bahkan, hanya ada dua RSUD yang memiliki Spesialis Rehabilitasi Medik.

b. Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Prof. Dr. M. Ildrem Provinsi Sumatera Utara

Selain itu pelayanan kesehatan di Provinsi Sumatera Utara terlihat dari pelayanan dan penanganan masalah kesehatan jiwa pada Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Prof. Dr. M. Ildrem Provinsi Sumatera Utara melalui dua indikator yaitu Pencapaian Persentase BOR (*Bed Occupancy Rate*) Rumah Sakit Jiwa dan Rata-rata LOS (*Length of Stay*) Rumah Sakit Jiwa. Capaian Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.41 Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem Provinsi Sumatera Utara

No	Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024	
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1	Capaian Persentase <i>Bed Occupancy Rate</i> (BOR) Rumah Sakit Jiwa	61	65,24	80	60,65	82	68,63	85	89,00	70	49,05
2	Capaian <i>Average Length Of Stay</i> (ALOS)	95	87,02	62	76,87	52	67,25	42	60,00	40	63,00
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Rumah Sakit Jiwa	-	-	-	-	-	-	-	79,53	80	86,28

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, 2025

Kondisi pelayanan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Prof. Dr. M. Ildrem Provinsi Sumatera Utara telah berkembang, namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam membangun narasi positif pada tentang Rumah Sakit

Jiwa. namun ada juga beberapa kemajuan yang telah dicapai. Upaya berkelanjutan dari berbagai pihak diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan RSJ dan menjamin akses pelayanan bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan, meningkatkan fasilitas RSJ.

c. Rumah Sakit Haji Medan

Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan adalah salah satu Rumah Sakit yang menerapkan PPK BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) sesuai dengan Keputusan Gubernur No. 188.44/365/KPTS/2014 tanggal 13 Mei 2014 tentang Penetapan RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara sebagai BLUD. Jika dilihat dari tingkat keberhasilan pelayanan di Rumah Sakit Umum Haji terkait sarana, mutu dan tingkat efisiensi pelayanan, maka capaiannya belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan. Capaian indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.42 Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Haji Medan

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Bed Occupancy Rate (BOR)	Persen	27	40	62,50	79	77,08
2	Length Of Stay (LOS)	Hari	4	4	5	5	4
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	-	2,28	77	85,20	87,60

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, 2025

3. Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Dari data dapat disimpulkan bahwa indeks infrastruktur memiliki peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2024, dengan berbagai proyek besar yang sedang berlangsung dan sejumlah pencapaian penting dalam sektor konektivitas dan aksesibilitas, irigasi, serta infrastruktur dasar. Namun, ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan serta tantangan dalam pembiayaan dan pengelolaan infrastruktur masih perlu menjadi perhatian utama. Dengan upaya yang lebih terfokus pada pemerataan, inovasi dalam pembiayaan, dan pengelolaan yang berkelanjutan, Sumatera Utara dapat terus meningkatkan indeks infrastrukturnya dan memperkuat perekonomian serta kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Tabel 2.43 Indikator Kinerja Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Infrastruktur	Poin	0.69	0.71	0.74	0,75	0,76
Persentase panjang jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Persen	82,27	82,27	82,27	78,13	72,75
Persentase panjang jembatan Provinsi dalam Kondisi Baik	Persen	84,06	84,06	84,15	83,45	82,97
Nilai Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Pemprovsu	Persen	-	-	-	52,43	54,28



Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Persen	54,19	56,55	57,45	58,62	59,92
Nilai kinerja penyelenggaraan penataan ruang Provinsi	Persen				76,51	62,69
Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Klasifikasi Ahli	persen	-	-	-	15,66	15.66
Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM Regional terhadap seluruh rumah tangga dalam cakupan wilayah pelayanan SPAM Regional	Persen	-	-	-	-	6.343
Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses Pengelolaan air limbah domestik melalui SPALD Regional terhadap seluruh rumah tangga dalam cakupan wilayah pelayanan SPALD Regional	persen	-	-	-	-	50.13

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Utara, 2025

Kondisi Jalan Baik di Sumatera Utara merupakan salah satu indikator penting dalam penilaian infrastruktur transportasi yang ada di provinsi tersebut. Jalan yang baik memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian, mobilitas masyarakat, serta konektivitas antarwilayah. Keberadaan jalan yang memadai sangat berperan dalam mempercepat arus distribusi barang, mempermudah akses ke fasilitas kesehatan, pendidikan, dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Pada umumnya, Sumatera Utara memiliki jaringan jalan yang luas dan beragam, yang meliputi jalan nasional, provinsi, hingga jalan kabupaten/kota. Kondisi jalan baik di Sumatera Utara mengacu pada jalan-jalan yang terpelihara dengan baik, bebas dari kerusakan berat, dan dapat dilalui dengan aman dan nyaman oleh berbagai jenis kendaraan.

Tabel 2.44 Jenis Permukaan Jalan Baik, Sedang, Dan Rusak di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten Kota	Jenis Permukaan Jalan			
	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat
Nias	0,50	6,00	0,40	5,40
Mandailing Natal	94,55	39,80	11,40	27,46
Tapanuli Selatan	48,20	29,27	5,80	29,85
Tapanuli Tengah	39,60	10,80	1,30	4,80
Tapanuli Utara	134,50	37,00	14,00	13,80
Toba	102,38	20,20	5,20	64,90
Labuhanbatu	77,80	29,20	10,20	24,30



Kabupaten Kota	Jenis Permukaan Jalan			
	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat
Asahan	90,28	53,00	20,90	90,38
Simalungun	115,38	51,40	27,80	25,18
Dairi	51,10	9,40	4,00	17,00
Karo	49,50	14,30	4,80	1,20
Deli Serdang	90,67	37,80	8,60	9,80
Langkat	103,50	37,50	8,20	15,40
Nias Selatan	2,00	10,10	4,60	7,00
Humbang Hasundutan	92,35	16,59	23,80	4,40
Pakpak Bharat	38,80	12,45	4,80	1,70
Samosir	20,78	9,00	1,80	42,87
Serdang Bedagai	90,72	52,42	16,40	11,20
Batu Bara	37,60	11,05	3,80	3,20
Padang Lawas Utara	51,90	36,00	4,80	35,80
Padang Lawas	71,12	47,10	6,20	37,00
Labuhanbatu Selatan	-	-	-	-
Labuhanbatu Utara	26,40	2,60	1,40	3,60
Nias Utara	26,10	28,20	17,80	46,50
Nias Barat	4,00	18,60	24,90	36,80
Sibolga	2,40	0,86	0,60	0,20
Tanjungbalai	6,47	2,04	-	0,20
Pematangsiantar	9,16	4,16	-	-
Tebing Tinggi	6,57	0,40	-	-
Medan	28,95	7,40	1,00	0,20
Binjai	6,59	0,06	-	-
Padangsidempuan	7,40	11,00	0,40	13,40
Gunungsitoli	3,70	9,84	8,10	2,60
Sumatera Utara	1.530,97	655,54	243,00	576,14

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Kondisi jalan yang baik di Sumatera Utara merupakan elemen kunci dalam mendukung kemajuan ekonomi, mobilitas masyarakat, serta pembangunan daerah secara keseluruhan. Peningkatan kualitas jalan yang terus menerus dan pemeliharaan yang teratur akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat laju perekonomian, serta menjadikan Sumatera Utara lebih terhubung dengan daerah lain, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Tabel 2.45 Panjang jalan Provinsi menurut permukaan di Provinsi Sumatera Utara



Kabupaten Kota	Jenis Permukaan Jalan				
	Aspal (Hotmix)	Aspal (Lapen)	Beton	Kerikil	Tanah
Nias	12,10	-	0,20	-	-
Mandailing Natal	150,95	-	1,00	2,66	18,60
Tapanuli Selatan	101,32	-	0,40	0,80	10,60
Tapanuli Tengah	56,50	-	-	-	-
Tapanuli Utara	191,50	0,40	-	3,20	4,20
Toba	133,58	-	-	59,10	-
Labuhanbatu	118,90	1,20	0,40	0,20	20,80
Asahan	181,38	-	5,60	-	67,58
Simalungun	216,56	2,60	0,60	-	-
Dairi	72,50	4,80	-	0,60	3,60
Karo	69,80	-	-	-	-
Deli Serdang	146,67	-	0,20	-	-
Langkat	162,90	-	-	0,40	1,30
Nias Selatan	21,10	2,40	0,20	-	-
Humbang Hasundutan	133,94	0,40	-	2,20	0,60
Pakpak Bharat	57,75	-	-	-	-
Samosir	25,58	6,00	3,80	6,40	32,67
Serdang Bedagai	170,54	-	0,20	-	-
Batu Bara	52,65	-	3,00	-	-
Padang Lawas Utara	95,90	15,60	-	14,60	2.40
Padang Lawas	138,42	-	-	18,40	4.60
Labuhanbatu Selatan	-	-	-	-	-
Labuhanbatu Utara	30,60	-	1,40	0,20	1,80
Nias Utara	101,50	0,40	-	5,00	11,70
Nias Barat	43,80	37,90	2,60	-	-
Sibolga	3,40	-	0,66	-	-
Tanjungbalai	8,71	-	-	-	-
Pematangsiantar	12,72	-	0,60	-	-
Tebing Tinggi	6,97	-	-	-	-
Medan	31,85	-	5,50	0,20	-
Binjai	6,65	-	-	-	-
Padangsidimpuan	25,00	-	0,20	7,00	-
Gunungsitoli	24,04	-	0,20	-	-
SUMATERA UTARA	2.605,78	71,70	26,76	120,96	180,45

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Panjang jalan provinsi menurut jenis permukaan di Sumatera Utara menggambarkan kondisi jaringan jalan yang beragam dan terus berkembang. Jalan aspal tetap menjadi yang paling dominan dan mendukung kelancaran transportasi, sementara jalan beton dan tanah/kerikil masih berperan penting di daerah-daerah tertentu. Peningkatan kualitas jalan di provinsi ini akan berkontribusi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi, mobilitas masyarakat, dan pengembangan sektor pariwisata, serta mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah. Pemerintah daerah perlu terus fokus pada pembangunan infrastruktur jalan agar dapat menciptakan konektivitas yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah Sumatera Utara.

Tabel 2.46 Progres RTRW Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

No	Kabupaten/Kota	Nomor Perda	Status Tahun 2024
1	Kabupaten Karo	Perda No. 4 Tahun 2022	-
2	Kota Medan	Perda No. 1 Tahun 2022	-
3	Kabupaten Deli Serdang	Perda No. 1 Tahun 2021	-
4	Kabupaten Serdang Bedagai	Perda No.12 Tahun 2013 yang Telah Diubah Dengan Perda No. 1 Tahun 2021	-
5	Kota Binjai	Perda No. 05 Tahun 2020	-
6	Kabupaten Batubara	Perda No. 11 Tahun 2020	-
7	Kabupaten Humbang Hasundutan	Perda No. 1 Tahun 2018	-
8	Kabupaten Padang Lawas	Perda No. 2 Tahun 2018	Revisi
9	Kota Sibolga	Perda No. 2 Tahun 2018	-
10	Kabupaten Samosir	Perda No. 3 Tahun 2018	Permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Menteri ATR/BPN
11	Kabupaten Tapanuli Utara	Perda No. 3 Tahun 2017	-
12	Kabupaten Tapanuli Selatan	Perda No. 5 Tahun 2017	-
13	Kabupaten Labuhanbatu selatan	Perda No. 4 Tahun 2017	Permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Menteri ATR/BPN
14	Kabupaten Toba	Perda No. 12 Tahun 2017	Revisi
15	Kabupaten Labuhanbatu	Perda No. 3 Tahun 2016	Revisi
16	Kabupaten Mandailing Natal	Perda No. 8 Tahun 2016	Revisi
17	Kabupaten Pakpak Bharat	Perda No. 9 Tahun 2016	Revisi
18	Kabupaten Nias Utara	Perda No. 1 Tahun 2015	Revisi
19	Kabupaten Labuhanbatu Utara	Perda No. 5 Tahun 2015	-
20	Kabupaten Padang Lawas Utara	Perda No. 3 Tahun 2015	Revisi



No	Kabupaten/Kota	Nomor Perda	Status Tahun 2024
21	Kabupaten Nias Selatan	Perda No. 6 Tahun 2014	Revisi
22	Kabupaten Nias	Perda No. 1 Tahun 2014	Revisi
23	Kabupaten Dairi	Perda No. 7 Tahun 2014	Revisi
24	Kota Padangsidempuan	Perda No. 4 Tahun 2014	Revisi
25	Kabupaten Nias Barat	Perda No. 12 Tahun 2014	Revisi
26	Kota Tanjungbalai	Perda No. 2 Tahun 2013	Revisi
27	Kabupaten Tapanuli Tengah	Perda No. 8 Tahun 2013	Permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Menteri ATR/BPN
28	Kabupaten Langkat	Perda No. 9 Tahun 2013	Revisi
29	Kabupaten Asahan	Perda No. 12 Tahun 2013	Revisi
30	Kota Pematangsiantar	Perda No. 1 Tahun 2013	Revisi
31	Kota Gunungsitoli	Perda No. 12 Tahun 2012	Revisi
32	Kota Tebing Tinggi	Perda No. 4 Tahun 2012	Revisi
33	Kabupaten Simalungun	Perda No. 10 Tahun 2012	Revisi

Sumber: Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, 2025

Pada tahun 2022, kinerja penyelenggaraan penataan ruang Provinsi Sumatera Utara berada pada rangking 21 dari 34 Provinsi di Indonesia dengan nilai akhir 75,61 (klasifikasi SEDANG) berdasarkan penilaian dari Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang dari Kementerian ATR/BPN. Hasil tersebut didapatkan dari penilaian kelima aspek penyelenggaraan penataan ruang pada Tabel 2.5, dimana aspek pengendalian pemanfaatan ruang di Provinsi Sumatera nilainya masih 0 (nol) dengan klasifikasi Buruk.

Tabel 2.47 Kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang dan Pelaksanaan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara

No	Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
		Nilai	Ket.	Nilai	Ket.	Nilai	Ket.	Nilai	Ket.	Nilai	Ket.
1	Pengaturan Penataan Ruang	83	Baik	83	Baik	62,92	Sedang	62,92	Sedang	-	Penilaian dilakukan dalam 2 tahun sekali
2	Pembinaan Penataan Ruang	90	Baik	90	Baik	64,81	Sedang	64,81	Sedang	-	
3	Perencanaan Tata Ruang	100	Baik	100	Baik	100	Baik	100	Baik	-	
4	Pemanfaatan Ruang	100	Baik	100	Baik	85,72	Baik	85,72	Baik	-	
5	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	5	Buruk	5	Buruk	0	Buruk	0	Buruk	-	
Nilai Kinerja Pengaturan		75,61	Sedang	75,61	75,61	62,69	Sedang	62,69	Sedang	-	

No	Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
		Nilai	Ket.	Nilai	Ket.	Nilai	Ket.	Nilai	Ket.	Nilai	Ket.
	Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang dan Pelaksanaan Penataan Ruang										

Sumber: Dirjen Pengendalian, Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian ATR/BPN, 2025

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa aspek yang sangat perlu untuk diperhatikan untuk menaikkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang Provinsi Sumatera Utara adalah aspek pengendalian pemanfaatan ruang. Dimana pengendalian pemanfaatan ruang terdiri dari: Pelaksanaan KKPR dan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK, Perwujudan RTR (Rencana Tata Ruang), Penerapan Insentif Disinsentif, Pengenaan Sanksi, dan Penanganan Sengketa.

4. Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Capaian Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.48 Capaian Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Akses Rumah Tangga terhadap hunian yang Layak Huni	97,77	67,44	31,12	70,95	73.47

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator perumahan rakyat dan kawasan permukiman sudah tercapai dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan langkah-langkah strategis yang mencakup peningkatan program subsidi perumahan, pembangunan infrastruktur, serta penyediaan lahan terjangkau, diharapkan akses masyarakat terhadap rumah layak huni dapat meningkat, sehingga kualitas hidup masyarakat di Provinsi Sumatera Utara dapat lebih baik di masa depan.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat

a. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Capaian Indikator Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.49 Capaian Indikator Satpol PP Provinsi Sumatera Utara

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase gangguan trantibun yang dapat diselesaikan	90.25	96.51	100	97	100
Persentase Penegakan PERDA dan PERKADA yang ditegakkan	59	31.25	100	100	100

Sumber : Satpol PP Provinsi Sumatera Utara, 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan Tahun 2024 tercapai dengan realisasi 100% Begitu juga halnya dengan Persentase Penegakan PERDA dan PERKADA yang ditegakkan, pada tahun 2024 capaian kinerja dicapai sebesar 100%. Pencapaian kinerja ini dipengaruhi faktor kesadaran masyarakat yang semakin baik terhadap peraturan dan kebijakan Pemerintah, sehingga ketertiban dan ketenteraman masyarakat meningkat.

b. Kesatuan Bangsa dan Politik

Capaian Indikator Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.50 Capaian Indikator Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Masyarakat yang menerima Pendidikan Politik	Orang	-	250	470	800	800
Jumlah Ormas yang terbina dan Aktif	Ormas	85	74	120	112	112
Jumlah Kawasan Bahaya Narkoba menjadi Kawasan Waspada	Desa	6.5	6.5	6.5	272	271
Laporan Rencana Aksi Penanganan Konflik	Peringkat	10	18	8	8	8
Jumlah Masyarakat yang menerima Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Revolusi Mental	Orang	-	1459	1550	2.160	1800

Sumber : Bakesbangpol Provinsi Sumatera Utara, 2025

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah pelapor pemilih cerdas di tahun 2023 dan tahun 2024 memiliki capaian jumlah yang sama, dapat dilihat juga hampir semua target pada tahun 2024 mencapai target.

Data menunjukkan terdapat total 476 zona rawan narkoba di Sumatera Utara, terdiri dari 23 zona “Bahaya” dan 453 zona “Waspada”. Kabupaten dengan zona bahaya terbanyak adalah Mandailing Natal (6 zona), Deli Serdang (5 zona), dan Medan (3 zona). Oleh karena itu penanggulangan narkoba perlu difokuskan pada daerah dengan jumlah zona bahaya tinggi, serta memperkuat pencegahan di zona waspada.

Tabel 2.51 Daerah Kawasan Narkoba di Provinsi Sumatera Utara

No	Kabupaten/Kota	JUMLAH ZONA	
		BAHAYA	WASPADA
1	ASAHAN	0	2
2	BATUBARA	0	1
3	DELISERDANG	5	54
4	HUMBAHAS	0	24
5	LABUHANBATU UTARA	1	0
6	LANGKAT	0	1
7	MANDAILING NATAL	6	0



No	Kabupaten/Kota	JUMLAH ZONA	
		BAHAYA	WASPADA
8	SAMOSIR	0	20
9	SERDANGBEDAGAI	1	29
10	SIMALUNGUN	2	76
11	TAPANULI SELATAN	0	4
12	TAPANULI UTARA	0	93
13	TOBA	2	84
14	BINJAI	0	2
15	MEDAN	3	17
16	PADANGSIDIMPUAN	0	2
17	PEMATANG SIANTAR	3	34
18	SIBOLGA	0	1
19	TANJUNGBALAI	0	4
20	TEBING TINGGI	0	5
TOTAL		23	453

Sumber Data : Sumatera Utara dalam Angka Tahun 2025

c. Penanggulangan Bencana

Provinsi Sumatera Utara terletak di bagian utara Pulau Sumatera yang memiliki ibu kota provinsi di Kota Medan. Secara geografis, wilayahnya terbagi menjadi 3 kelompok kawasan yaitu, pantai barat, dataran tinggi dan pantai timur. Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) Tahun 2022, bencana yang paling banyak terjadi di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2021 adalah bencana puting beliung, banjir, dan kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan hasil pengukuran indeks risiko bencana Indonesia (IRBI) 2022 Provinsi Sumatera Utara memiliki kelas risiko sedang dengan nilai 142,51 Ancaman bencana di Provinsi Sumatera Utara adalah Gempa bumi, tsunami, gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, serta kebakaran hutan dan lahan. Capaian Indikator Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.52 Kondisi Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Utara

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Resiko Bencana	145.18	143.83	142.51	140.73	139.84

Sumber : BPBD Provinsi Sumatera Utara, 2025

Dari Tabel diatas, Indeks Risiko Bencana mengalami penurunan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. hal ini menunjukkan bahwa kesiapan Provinsi Sumatera Utara dalam mengantisipasi dan mitigasi dalam menghadapi Bencana yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara.

6. Sosial

Pembangunan kesejahteraan merupakan salah satu tujuan utama dalam pembangunan daerah, termasuk di Provinsi Sumatera Utara. Pencapaian kesejahteraan tidak hanya terfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, akses terhadap pekerjaan yang layak, dan pemerataan

pembangunan. Pada tahun 2024, Sumatera Utara terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui berbagai program dan kebijakan yang mengutamakan keberlanjutan dan inklusivitas, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan.

Dari tabel berikut dapat dilihat bahwa Penyandang Disabilitas yang ada di dalam panti semuanya mendapatkan pelayanan. Bentuk pelayanan yang diberikan kepada kelompok masyarakat dimaksud adalah melalui sistem “panti” dan “luar panti”. Sistem panti memberikan pelayanan kepada para penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam suatu lokasi unit pelayanan teknis dan dalam jangka waktu yang relatif lama. Sistem luar panti memberikan pelayanan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial di lokasi tempat tinggal mereka dan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Capaian Indikator Sosial Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.53 Capaian Indikator Sosial Provinsi Sumatera Utara

No.	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase PSKS yang dikelola oleh Penyelenggara Sosial	Persen	-	-	-	5759	1233
2	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis dan PMKS lainnya yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dalam Panti	persen	2345/ 100%	1997/ 100%	1997/ 100%	2025/ 100%	3640/ 100%
3	Persentase Keluarga Miskin yang menerima Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Korban Bencana yang mendapatkan Pelayanan Kebutuhan Dasar	persen	1468/ 0,11%	15072/ 1,13%	104694/ 7,84%	1344869 / 0,37%	132700
4	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial tingkat provinsi yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar.	persen	-	-	-	-	1356

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, 2025

2.1.4.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi suatu daerah, termasuk di Provinsi Sumatera Utara. Kualitas, keterampilan, serta jumlah tenaga kerja yang tersedia menjadi penentu utama dalam mendukung pertumbuhan sektor-sektor ekonomi seperti pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata. Provinsi Sumatera Utara, dengan potensi sumber daya alam yang melimpah dan keragaman sektor ekonomi, menghadapi tantangan dan peluang dalam mengoptimalkan tenaga

kerjanya agar dapat berkontribusi maksimal terhadap kemajuan daerah. Capaian Indikator Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.54 Capaian Indikator Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara

No.	Indikator	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	4.46	0.28	0.047	0.03	0.004
2	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0.05	16.58	10.12	60.25	61.98
3	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	0.42	7.94	7.85	11.55	12.27
4	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang undangan bidang ketenagakerjaan	64.18	50.10	81.34	67.54	12.27
5	Persentase kabupaten/ kota yang menyusun rencana tenaga kerja	93.94	84.85	93.33	36.36	39.39
6	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	-	79 SP / lokasi	-	79	27.12

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa hanya IKU Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang mencapai target dan 5 IKU lainnya realisasi masih belum memenuhi target.



2. Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana

Perkembangan capaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.55 Capaian Indikator Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara

No	Indikator	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender) (%) di tingkat provinsi	98	98	94	19	54,7
2	Rasio kekerasan terhadap Perempuan (/ 100.000)	5	5	9	12	10.76
3	Rasio kekerasan terhadap Anak (/ 10.000)	12	12	19	29	2.5
4	Persentase Perangkat Daerah berkontribusi mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (Menuju) (%)	-	N/A	70%	38	67
5	Total Fertility Rate (TFR)	3.04	3.04	2.6	2.39	2.39

Sumber : Dinas P3AKB Provinsi Sumatera Utara, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Indikator Pemberdayaan dan Perlindungan Anak pada tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan dan penurunan realisasi pada tahun 2023 dan 2024.

3. Pangan

Pola pangan yang sehat dan bergizi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pembangunan di Provinsi Sumatera Utara. Dalam konteks ini, pola pangan mengacu pada kebiasaan, pilihan, dan keberagaman makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pola pangan yang baik harus mencakup keberagaman konsumsi pangan yang dapat memenuhi kebutuhan gizi secara seimbang, serta mempertimbangkan ketersediaan pangan lokal yang berkelanjutan. Berikut capaian indikator ketahanan pangan dan produksi peternakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.56 Capaian Indikator Ketahanan Pangan dan Produksi Peternakan Provinsi Sumatera Utara

No	Indikator	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	83,77	85	87.2	90.9	89,16
Jumlah Produksi Tanaman Pangan						
1	Padi (ton GKG)				4,049,438	3,595,081.00
2	Jagung (ton pipilan kering)				1,898,955	1,763,646.00
3	Kedelai (ton)				15,693	9,070.00



No	Indikator	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Produktivitas Tanaman Pangan						
1	Padi (ton/Ha)				5.32	5.33
2	Jagung(ton/Ha)				6.23	6.24
3	Kedelai (ton/ha)				1.59	1.38
Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura						
1	Bawang Merah (ton)				65,526	35,062.00
2	Cabe (ton)				205,960	179,190.00
3	Sayur-sayuran (ton)				1,232,583	1,114,354.00
4	Buah - buahan (ton)				1.547.654	77,377.00
Produktivitas Tanaman Hortikultura						
1	Bawang Merah (ton)				8.28	9.84
2	Cabe (ton)				10.36	13.71

Sumber : Dinas TPH dan Ketapang Provinsi Sumatera Utara, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat pada tahun 2024 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) telah mencapai target, hal ini membuktikan bahwa Provinsi Sumatera Utara terus berupaya dalam meningkatkan pangan di Provinsi Sumatera Utara. Serta Produksi tanaman terus meningkat dari tahun 2023 sampai tahun 2024.

4. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Capaian Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.57 Capaian Indikator Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	88.89	85.32	84.75	86.18	89.87
Persentase Penerbitan KIA dalam Pelayanan Admin duk	-	30%	25	38.5	50.9
Persentase Jumlah OPD Provsu dan Lembaga pengguna yang menandatangani kerja sama pemanfaatan data kependudukan skala Provinsi untuk Pelayanan Publik dalam rangka pembangunan desa dan penataan kota berbasis NIK	32%	65.30	85.71	100	91
Jumlah Desa Tertinggal	-	-	-	1071	873
Jumlah Desa Berkembang	-	-	-	3132	2904
Jumlah Desa Mandiri	-	-	-	72	168
Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Maju	-	-	-	28	9
Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Berkembang	-	-	-	253	74
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) yang Aktif	-	-	-	58	17.49

Sumber : Dinas Pemdes dan dukcapil Provinsi Sumatera Utara, 2025

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian berada di bawah target provinsi Sumatera utara yang telah ditetapkan, dari seluruh IKU masih ada beberapa yang belum tercapai dan namun terkait dengan catatan sipil seluruh IKU tercapai 100%.

5. Perhubungan

Untuk mengukur ketercapaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap perhubungan yang menjadi kewenangan provinsi dapat dilihat dari ketercapaian beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 2.58 Capaian Indikator Perhubungan Provinsi Sumatera Utara

No	Indikator	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Jalan	39.32	39.92	60.63	70,24	71.00
2	Rasio Konektivitas Provinsi	-	-	-	-	0.604
3	Persentase Konektivitas Simpul Angkutan jalan	-	-	-	30,77	38,46
4	On Time Performance Layanan Transportasi	-	-	-	-	83.52

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, 2025

Dari data di atas dapat dilihat bahwa realisasi tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami tren positif, hal ini disebabkan karena maksimalnya perencanaan masing-masing sektor perhubungan dan integrasi pelayanan antar Moda, serta maksimalnya pembangunan infrastruktur yang dapat mengakomodir kebutuhan pergerakan orang dan barang yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah serta belum tersedianya perencanaan kebutuhan Fasilitas keselamatan jalan.

6. Komunikasi Dan Informatika

Sektor Komunikasi dan Informatika mempunyai peranan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mendukung pencapaian *clean goverment* dan *good goverment* melalui *e-goverment*. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi diberi tugas untuk melaksanakan 2 (dua) sub urusan, yaitu Informasi dan Komunikasi Publik dan Aplikasi Informatika, Capaian Indikator komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.59 Capaian Indikator Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara

No.	Indikator	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional	-	-	-	-	80
2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan meta data sektoral sesuai standar	-	-	-	-	92



No.	Indikator	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
3	Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	-	-	-	-	2
4	Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber	-	-	-	-	10

Sumber: Diskominfo Provinsi Sumatera Utara, 2025

7. Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Capaian Indikator usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.60 Capaian Indikator Koperasi, Usaha Kecil Menengah

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	-	-	-	8,34	33.07
Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	-	-	-	4.92	5.74
Persentase Koperasi Berkualitas	-	-	-	-	0.64
Persentase Jumlah UMKM yang didukung Pemasarannya	-	-	-	0.04	21.82
Pertumbuhan Wirausaha	-	-	-	0.01	0.06
Jumlah Usaha Kecil yang Menyelesaikan Sertifikasi (HaKI, Halal, Ijin Edar Produk dan lain dan lain)	-	-	-	328	-

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, 2025

Dari data di atas dapat dilihat bahwa Capaian Koperasi Sumatera Utara mengalami peningkatan dan IKU nya mengalami peningkatan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024.

8. Penanaman Modal Dan Perizinan

Penanaman modal merupakan salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di suatu daerah. Di Provinsi Sumatera Utara, penanaman modal baik dari investor domestik maupun asing memainkan peran krusial dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan infrastruktur, dan mendukung pengembangan sektor-sektor strategis seperti industri, pertanian, dan pariwisata. Dalam konteks ini, sistem perizinan yang efektif dan efisien menjadi salah satu faktor kunci yang mendukung kelancaran investasi dan pembangunan di daerah tersebut. Capaian Indikator Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Sumatera Utara

dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.61 Capaian Indikator Penanaman Modal Provinsi Sumatera Utara

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Investor PMDN	Investor	4.220	4.186	9.146	9,175	26,962
Investor PMA	Investor	1.465	690	1.613	1,650	4,183
Nilai Investasi PMDN	Rp Triliun	18,18	18,48	22,78	22,85	22.45
Nilai Investasi PMA	Rp Triliun	14,03	8,47	18,88	19	21.26
Jumlah Tenaga Kerja Indonesia PMDN	Orang	25.880	22.568	25.682	30.000	34,375
Jumlah Tenaga Kerja Indonesia PMA	Orang	5.297	6.118	6.702	67,50	12,001
Jumlah Izin yang terbit (dokumen izin)	Dokumen	2694	1.511	1.565	1,484	2,468

Sumber: DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara, 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator penanaman modal Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

9. Kepemudaan Dan Keolahragaan

Tujuan pembangunan kepemudaan adalah menjadikan pemuda yang berkarakter dan berdaya saing. Untuk membentuk karakter dan kompetensi/daya saing maka diperlukan pendidikan yang baik dan berkualitas. Capaian Kinerja Kepemudaan dan Keolahragaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.62 Capaian Kinerja Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Berprestasi	53,7	53,7	0,97	92,31	87.69
Persentase Pembinaan Atlet Muda (atlet pelajar)	-	-	21.63	51,67	53.09
Indeks Pembangunan Pemuda	-	52,50	52,50	56,83	56,33

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara, 2025

10. Statistik

Sektor Statistik mempunyai peranan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mendukung kebijakan pelaksanaan satu data yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data. Kebijakan satu data ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data



Indonesia. Selanjutnya untuk pelaksanaan urusan statistik dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diberikan kewenangan dalam hal pelaksanaan Statistik Sektoral yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dengan tujuan untuk mengetahui kecenderungan (tren) yang akan terjadi pada masa datang, menentukan prioritas, sebagai acuan dalam evaluasi dan pengendalian kegiatan, serta untuk memperkirakan antisipasi terhadap risiko dan hambatan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan. Untuk capaian pelaksanaan statistik sektoral di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.63 Data Statistik Sektoral Yang Terintegrasi Provinsi Sumatera Utara

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Data Statistik Sektoral	69	69	92	100	-

Sumber : Diskominfo Provinsi Sumatera Utara, 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian pelaksanaan Data Statistik Sektoral pada tahun 2023 sebesar 100% telah mencapai target yang ditetapkan, namun data capaian pada tahun 2024 masih belum rilis. Kinerja Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral hingga triwulan IV Tahun 2024 tercatat sebesar 99%, menunjukkan konsistensi yang tinggi dalam menjaga kualitas dan keberlanjutan program. Sementara itu, realisasi keuangan untuk mendukung program tersebut mencapai 98,43% dari target pagunya, menandakan bahwa pengelolaan anggaran dalam urusan statistik telah dilakukan secara lebih efektif.

Pencapaian ini mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam memperkuat sistem statistik sektoral sebagai basis perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan. Hal ini menegaskan bahwa semangat penyelenggaraan statistik sektoral tidak hanya untuk memenuhi target secara kuantitatif, tetapi juga diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas data yang lebih akurat, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, urusan statistik semakin berperan strategis dalam menyediakan data dan informasi yang menjadi dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis bukti (*evidence-based policy*).

11. Persandian

Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi menangani sub urusan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan kewenangan yaitu :

1. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah provinsi melalui: (a) Pembelajaran dan Peningkatan Kapabilitas mengenai Sandi dan Sistem Keamanan Informasi dan; (b) Pengumpulan, Pemutakhiran dan Peningkatan Keamanan Informasi di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota;
2. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah provinsi, melalui Pengumpulan, Pemutakhiran dan Penyelarasan Sandi antara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Capaian Indikator Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Pengamanan Informasi dan Persandian adalah sebagai berikut:

Tabel 2.64 Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Pengamanan Informasi dan Persandian Provinsi Sumatera Utara

No	Indikator	2020	2021	2022	2023
1	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	10	10	61	100

Sumber : Diskominfo Provinsi Sumatera Utara, 2025

Capaian ini berasal dari jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang telah memahami dan menggunakan keamanan informasi sebanyak 5 (lima) Organisasi Perangkat Daerah antara lain Dinas Kominfo Provsu, BPKAD, Bappeda, BKD dan Inspektorat. Indikator ini juga merupakan bagian yang penting dalam mendukung penerapan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

12. Kebudayaan

Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu warisan yang kaya dan beragam, yang tercermin dalam tradisi, seni, bahasa, serta nilai-nilai kehidupan masyarakatnya. Sebagai salah satu provinsi dengan keragaman etnis yang sangat tinggi, Sumatera Utara menjadi tempat pertemuan berbagai budaya yang berkembang seiring waktu. Di sini, berbagai suku bangsa, seperti Batak, Melayu, Minangkabau, Nias, dan Tionghoa, hidup berdampingan dengan damai, masing-masing mempertahankan identitas budaya mereka yang unik sambil beradaptasi dengan perubahan zaman. Capaian Indikator kebudayaan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.65 Capaian Indikator Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Peningkatan Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan	-	-	-	12,42	14,90
2	Persentase Cagar Budaya dan warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	-	-	-	48,54	64,45

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara, 2025

Dilihat dari tabel diatas, angka realisasi pada IKU Kebudayaan cendereung mengalami kenaikan, seperti Persentase Peningkatan Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan pada tahun 2023 memiliki realisasi 12,42% dan mengalami kenaikan menjadi 14,90% dan IKU Persentase Cagar Budaya dan warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan pada Tahun 2023 dengan realisasi 48,54% dengan kenaikan pada tahun 2024 sebesar 64,45%. Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara adalah cermin dari keberagaman etnis



dan sejarah panjang masyarakatnya. Dari seni, bahasa, kuliner, hingga adat istiadat, kebudayaan Sumatera Utara menunjukkan identitas yang kuat dan kaya akan nilai-nilai luhur. Melalui pelestarian dan pengembangan kebudayaan, Sumatera Utara dapat mempertahankan keunikannya, sembari membangun masa depan yang lebih inklusif dan berbasis pada kekayaan tradisi dan nilai lokal.

13. Perpustakaan

Pada tahun 2020, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI telah melakukan kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) yang dimaksudkan untuk mengetahui kondisi semua jenis perpustakaan, mulai dari aspek sebaran perpustakaan, koleksi perpustakaan, tenaga perpustakaan, pustaka, dan anggota perpustakaan yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Yang menjadi instrumen kajian IPLM adalah pemerataan layanan perpustakaan, perpustakaan ber-Standar Nasional Perpustakaan (SNP), ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat/hari, anggota perpustakaan, dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi. Capaian Indikator perpustakaan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.66 Capaian Indikator Perpustakaan Provinsi Sumatera Utara

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	9.75	0.40	20.7	16.5	13.10

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara, 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat tahun 2024 masih menggunakan perhitungan provinsi dikarenakan belum dirilisnya perhitungan dari Kementerian Perpustakaan Nasional untuk tahun 2024.

Jumlah perpustakaan terakreditasi di Indonesia, termasuk di tingkat provinsi, menunjukkan perkembangan yang menggembirakan dalam beberapa tahun terakhir. Akreditasi perpustakaan merupakan pengakuan formal yang diberikan terhadap pemenuhan standar nasional, mencakup aspek koleksi, layanan, sumber daya manusia, sarana prasarana, serta pengelolaan perpustakaan. Secara umum, semakin banyaknya perpustakaan yang terakreditasi menandakan peningkatan kualitas layanan informasi, literasi, dan budaya baca di masyarakat. Di berbagai provinsi, termasuk Sumatera Utara, program akreditasi terus digencarkan untuk memastikan bahwa perpustakaan, baik di sekolah, perguruan tinggi, komunitas, maupun instansi pemerintah, mampu menyediakan layanan yang layak dan berstandar tinggi.

Meskipun jumlah perpustakaan terakreditasi terus bertambah, tantangan masih ada, terutama terkait pemerataan akreditasi di wilayah-wilayah perdesaan dan terpencil. Pemerintah melalui Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) bersama dinas perpustakaan daerah aktif mendorong peningkatan akreditasi ini dengan memberikan bimbingan teknis, asistensi, dan pelatihan pengelolaan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP). Upaya ini bertujuan memperkuat peran perpustakaan

sebagai pusat pembelajaran sepanjang hayat, memperluas akses informasi, serta mendukung pengembangan sumber daya manusia berkualitas di seluruh Indonesia.

Tabel 2.67 Jumlah Perpustakaan Terakreditasi di Provinsi Sumatera Utara

Jenis	Peringkat Tahun 2024			Total
	A	B	C	
Perpustakaan Khusus	4	2	2	8
Perpustakaan Sekolah	10	43	76	129
Perpustakaan Perguruan Tinggi	11	4	4	19
Perpustakaan Umum	3	11	28	42
Jumlah	28	60	110	198

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 198 perpustakaan di Provinsi Sumatera Utara telah memperoleh akreditasi. Dari jumlah tersebut, perpustakaan sekolah mendominasi dengan 129 unit, terdiri atas 10 perpustakaan berperingkat A, 43 berperingkat B, dan 76 berperingkat C. Perpustakaan umum tercatat sebanyak 42 unit dengan rincian 3 berperingkat A, 11 berperingkat B, dan 28 berperingkat C. Sementara itu, perpustakaan perguruan tinggi berjumlah 19 unit dan perpustakaan khusus sebanyak 8 unit, masing-masing dengan distribusi peringkat yang bervariasi. Data ini mencerminkan komitmen peningkatan kualitas layanan perpustakaan di berbagai jenis lembaga di Sumatera Utara melalui upaya akreditasi formal.

14. Kearsipan

Kearsipan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pengelolaan informasi di sebuah daerah. Di Provinsi Sumatera Utara, kearsipan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyimpan dan mengelola dokumen-dokumen penting, tetapi juga sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pemerintahan. Pengelolaan arsip yang baik juga sangat vital untuk kepentingan sejarah dan perkembangan daerah, serta mempermudah akses informasi bagi masyarakat dan berbagai pihak yang membutuhkan. Capaian Indikator Kearsipan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.68 Capaian Indikator Kearsipan Provinsi Sumatera Utara

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baik	6.12	47	49	49	52
2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	65	71	86	103	110
3	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	-	-	-	67.01	68.60

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara, 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baik dan peningkatan SDM Pengelola Kearsipan menunjukkan tren peningkatan sejak tahun 2020 hingga tahun 2024, dan pada IKU Nilai Tingkat Kegemaran Membaca mengalami peningkatan sebesar 1,59%.

2.1.4.3 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pilihan

1. Pariwisata

Perkembangan Pariwisata di Sumatera Utara menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sumatera Utara tidak hanya dikenal karena kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, tetapi juga karena potensi besar yang dimilikinya dalam sektor pariwisata, baik untuk wisatawan domestik maupun internasional. Sebagai salah satu daerah tujuan wisata utama di Indonesia, Sumatera Utara terus berupaya untuk mengembangkan sektor ini sebagai pilar penting dalam perekonomian daerah. Diantaranya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB, dengan capaian berikut:

Tabel 2.69 Capaian Indikator Pariwisata Provinsi Sumatera Utara

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Pariwisata	7,46	6,66	6,22	3,8	3,8
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Pariwisata	-	-	-	51,60	81,50
Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	-	-	-	-	635,3

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara, 2025

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dijelaskan bahwa kontribusi sektor pariwisata di Sumatera Utara masih belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang paling terdampak dengan adanya Pandemi Covid-19. Sektor-sektor ekonomi yang berhubungan dengan pariwisata yang terdampak antara lain adalah industri pengolahan, transportasi dan penyediaan akomodasi, makan-minum serta perdagangan skala besar dan juga eceran. Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa, pada tahun 2024 IKU Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Pariwisata mengalami kenaikan sebesar 81,50 persen dari sebelumnya 51,60 persen pada tahun 2023.

2. Perkebunan

Dari luas areal perkebunan adalah 2.167.639,02 Ha sebesar 1.189.207,48 Ha merupakan perkebunan rakyat dengan komoditi utamanya adalah kelapa sawit, karet, kopi, kakao dan kelapa. Sementara itu capaian perkebunan dapat dilihat dari keberhasilan indikator sebagai berikut:

Tabel 2.70 Capaian Indikator Perkebunan Provinsi Sumatera Utara

Indikator (Ton)	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase peningkatan produksi komoditas perkebunan rakyat (PR) (%/tahun)	2,60%	3,33%	5,20%	4,65%	5,48%
Persentase Peningkatan Produktivitas komoditas perkebunan rakyat (%)	-	-	1,89%	1,06%	2,83%
NTP sub sektor Tanaman Perkebunan	-	145,04 (poin)	152,28 (poin)	159,89 (poin)	182,87 (poin)
Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB (ADHB)	49,98%	53,85%	57,28%	59,01%	61,99%

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat pada tahun 2024 seluruh Indikator Perkebunan Provinsi Sumatera Utara telah mencapai target dan terus meningkat baik peningkatan produksi komoditas perkebunan rakyat, produktivitas komoditas perkebunan rakyat, Nilai Tukar Petani Sub sektor perkebunan dan Kontribusi Sub sektor perkebunan terhadap PDRB, hal ini membuktikan bahwa Provinsi Sumatera Utara terus berupaya dalam meningkatkan sektor perkebunan di Provinsi Sumatera Utara.

3. Kehutanan

Berdasarkan penetapan lahan kritis Provinsi Sumatera Utara seluas 1.338.810 Ha (sesuai SK MENLHK No. 306/2018) dan program perhutanan sosial seluas 592.438 Ha (sesuai SK MENLHK No. 3511/2018). pada tahun 2018 hutan di Sumatera Utara yang harus direhabilitasi untuk lahan kritis seluas 825.754,60 Ha, namun pada tahun 2019 Sumatera Utara dapat melakukan rehabilitasi sebanyak 275.711 Ha, pada tahun 2020 rehabilitasi hutan sebanyak 275.233, keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan kritis terus menurun dan pada tahun 2023 capaian rehabilitasi hutan dan lahan kritis hanya mencapai 271.056 Ha. Sedangkan untuk penanganan kerusakan kawasan hutan pada tahun 2019 kerusakan kawasan hutan di Sumatera Utara seluas 60.500 Ha turun pada tahun 2023 penanganan kerusakan hutan sudah mencapai seluas 54.350 Ha. Hal ini merupakan upaya untuk menurunkan tingkat kerusakan kawasan hutan dan lahan kritis melalui rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan dan pengamanan kawasan hutan serta pemantapan kawasan hutan dan pengusahaan hutan yang akan berdampak pada perbaikan iklim yang terkendali. Adapun capaian Indikator Kehutanan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.71 Capaian Indikator Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

Indiokator	2020	2021	2022	2023	2024
Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Kritis (Ha)	275.233	275.251	271.666	271.056	270,278
Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)	59.895	57.455	55.976	54.350	52,983



Indiokator	2020	2021	2022	2023	2024
Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB (%)	4,04	3,67	3,38	3,36	3,13

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, 2025

Berdasarkan tabel di atas, seluruh Indikator kehutanan Provinsi Sumatera Utara telah mencapai target, dari IKU tersebut, realisasi terhadap IKU Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Kritis (Ha) pada tahun 2024 mencapai 270,278 (Ha) dari sebelumnya 271.056 (Ha) ditahun 2023.

4. Energi Dan Sumber Daya Mineral

Provinsi Sumatera Utara berada di jalur pegunungan Bukit Barisan, yang memiliki wilayah Cekungan air tanah, pegunungan dan wilayah pesisir. Hal ini mengindikasikan bahwa Sumatera Utara memiliki banyak potensi energi terbarukan seperti potensi panas bumi, potensi hydro, Potensi biomassa baik dari limbah pabrik kelapa sawit maupun limbah pabrik tapioka dan potensi limbah ternak, semua potensi tersebut dapat menghasilkan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan energi. Capaian indikator Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 2.72 Kondisi Kelistrikan di Provinsi Sumatera Utara

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Elektrifikasi (%)	100	99.99	99.99	99.99	99.99
Persentase Desa yang teraliri Listrik (%)	98,66	98,50	99.52	98.89	99,09
Persentase Usaha tambang sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda (%)	72,95	75,82	80,16	64,12	96,30

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi & Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara, 2025

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rasio Elektrifikasi Provinsi Sumatera Utara terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2023 Rasio Elektrifikasi Provinsi Sumatera Utara sebesar 99,99% memiliki realisasi dengan angka yang sama dengan tahun 2024. Begitu juga untuk Desa berlistrik juga mengalami peningkatan, Pada tahun 2023 persentase Desa yang teraliri listrik sebesar 98,89 persen, dan terjadi peningkatan pada tahun 2024 99,09%. dan IKU Persentase Usaha tambang sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda (%) mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024. hal tersebut menunjukkan keseriusan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan kegiatan terkait dengan energi dan sumber daya mineral.

5. Kelautan Dan Perikanan

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi di sub sektor perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Capaian indikator kelautan dan perikanan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.73 Capaian Indikator Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi Perikanan Tangkap	486,955.13	439.657,63	449.571,71	482.343,25	274.442,94
Produksi Perikanan Budidaya	227,235.2	214,135.6	217.945,5	218,944	135,770
Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Thn)	45.5	47,84	49.15	51,32	51,24
Nilai Tukar Nelayan	100	104,28	106,39	108,36	101,48
Produksi Perikanan (Ton/Tahun)	-	-	-	701.341,21	410.212,94
Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTP)	-	-	-	97,30	101,41
Rehabilitasi Ekosistem pesisir laut, dan pulau-pulau kecil	-	-	-	-	33

Sumber : Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, 2025

Produksi perikanan tangkap Sumatera Utara dari tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan, hanya pada tahun 2021 produksi perikanan tangkap mengalami penurunan yang sebesar 439.657,63 Ton menurun dibandingkan capaian produksi pada tahun 2020 yang mencapai 486,955.13 Ton, namun pada tahun 2022 produksi perikanan tangkap kembali meningkat menjadi sebesar 449.571,71 Ton dan pada tahun 2023 produksi perikanan tangkap meningkat 7 persen menjadi sebesar 482.343,25 Ton lalu mengalami penurunan kembali pada tahun 2024 menjadi 274.442,94. serta pada tahun 2024 produksi perikanan budidaya pun mengalami penurunan dari tahun 2023 dan beberapa IKU lainnya juga mengalami penurunan. Hal ini merupakan faktor alam yang tidak dapat diprediksi karena produksi ikan merupakan hasil tangkapan, namun tetap akan menjadi perhatian Provinsi Sumatera Utara kedepan dalam meningkatkan indikator-indikator tersebut.

2.1.4.4 Urusan Pemerintahan Penunjang

Urusan penunjang berfokus pada berbagai sektor yang secara langsung tidak terkait dengan pelayanan dasar atau sektor-sektor utama pembangunan, namun tetap memiliki peran vital dalam mendukung efektivitas dan efisiensi pembangunan tersebut. Selain itu, urusan penunjang juga mencakup pengembangan Pembangunan yang tidak langsung terkait dengan sektor-sektor prioritas, namun tetap esensial, seperti peningkatan sistem transportasi pendukung, penyediaan energi yang memadai, serta pembangunan sistem komunikasi yang efektif. Semua upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan di sektor-sektor utama, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan hidup. Upaya penguatan di bidang administrasi, kelembagaan, dan infrastruktur penunjang akan memastikan

bahwa pencapaian target pembangunan dapat berlangsung secara optimal dan efisien.



1. Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan merupakan proses sistematis yang dilakukan oleh pemerintah untuk merencanakan, merancang, dan mengelola program-program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan suatu daerah atau negara. Perencanaan pembangunan yang baik dan efektif sangat penting untuk memastikan penggunaan sumber daya secara efisien, mendukung pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Tabel 2.74 Capaian Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai SAKIP	-	-	-	68,85 (B)	68,93 (B)

Sumber : Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, 2025

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa, Nilai SAKIP di tingkat provinsi mengalami kenaikan yang tidak begitu signifikan, namun tetap menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah. Upaya terus-menerus diperlukan untuk meningkatkan nilai SAKIP, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan efektivitas program pembangunan di Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian Dan Pengembangan

Penelitian (*Research*) adalah Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah (sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016).

Sedangkan Pengembangan (*Development*) adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.

Capaian Kinerja Penelitian dan Pengembangan adalah hasil yang dicapai dari kegiatan riset dan inovasi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, Institusi, Perguruan Tinggi, Lembaga, Komunitas dan stakeholders lainnya dalam rangka menghasilkan pengetahuan baru, solusi inovatif, perbaikan terhadap kebijakan atau teknologi yang telah ada untuk meningkatkan kualitas, daya saing serta kemajuan IPTEK. Capaian Indikator Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.75 Capaian Bidang Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Inovasi Daerah	15,78	39,41	54,36	53,76	59,93
Persentase Kajian/Penelitian berbasis bukti yang dimanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah	75	75	75	100	100

Sumber : Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, 2025

Indeks Inovasi Daerah merupakan instrumen pengukuran kuantitatif yang dirancang untuk menilai tingkat pencapaian inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017, inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Berdasarkan hasil penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2024, Provinsi Sumatera Utara memperoleh skor 59,93 (predikat Inovatif). Penilaian predikat “sangat inovatif” masih belum tercapai pada tahun 2024, karena masih belum optimalnya pemenuhan kuantitas dan kualitas indikator tingkat kematangan inovasi dari Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara serta stakeholders terkait (kewenangan provinsi) yang merujuk pada pedoman umum penilaian dan pemberian penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018. Pada tahun 2024, dari 42 (empat puluh dua) Perangkat Daerah, hanya 34 (tiga puluh empat) Perangkat Daerah yang melaporkan inovasi dan hanya 40 (empat puluh) inovasi yang memenuhi indikator kematangan inovasi.

2. Keuangan

Provinsi Sumatera Utara memantapkan komitmennya untuk mencapai *good government* dalam pengelolaan pemerintahan. Kerja keras ini membuahkan hasil dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Berdasarkan hasil opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera hingga 2021, kinerja laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Capaian Indikator Keuangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 2.76 Capaian Indikator Pengelolaan Keuangan Provinsi Sumatera Utara

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
Persentase laporan Aset daerah yang disusun	100	100	75	100	100
Persentase SK Gubsu atas evaluasi APBD, P. APBD dan Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota	-	100	70	100	100

Sumber : BKAD Provinsi Sumatera Utara, 2025

Berdasarkan tabel di atas seluruh IKU pada Indikator Pengelolaan Keuangan telah terealisasi sesuai dengan target dan mencapai realisasi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan Provinsi Sumatera Utara memiliki komitmen dalam menyusun pertanggungjawaban keuangan provinsi Sumatera Utara.

3. Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah mencakup kegiatan mengadministrasikan pajak dan retribusi serta mendistribusikannya untuk kepentingan umum. Optimalisasi pengelolaan Pajak dan Retribusi diharapkan dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah terhadap pusat. Peningkatan kontribusi PAD, diharapkan mengoptimalkan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan daerah. Capaian Indikator Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.77 Capaian Indikator Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase PAD terhadap Pendapatan	42,82	45,62	57,60	56,82	61,52
Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari Tahun Sebelumnya	-4,72	-4,72	-12,60	-0,015	10,44
Persentase kenaikan Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dari Tahun sebelumnya	-8,67	32,10	16,15	0,126	7,44
Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Air Permukaan dari tahun sebelumnya	9,89	-31,32	297,46	-0,278	4,04
Persentase Kenaikan Pajak Rokok dari tahun sebelumnya	33,40	-33,40	14,74	-0,021	48,04



Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Kenaikan Penerimaan Retribusi Daerah dari tahun sebelumnya	-	-	-	-	5,48
Indeks Pelayanan Publik	-	-	-	3,51	92,17

Sumber : BKAD Provinsi Sumatera Utara, 2025

4. Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia) merupakan salah satu upaya dalam membentuk ASN yang berkualitas dengan memiliki keterampilan, kemampuan kerja serta loyalitas kerja. Capaian Indikator Pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.78 Indikator Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Sumber Daya Manusia Aparatur yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) dengan Kriteria Memuaskan	-	-	-	9.041	31,55% (7.888 orang)

Sumber : BPSDM Provinsi Sumatera Utara, 2025

Dari data di atas dapat dilihat bahwa IKU Persentase Sumber Daya Manusia Aparatur yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) dengan Kriteria Memuaskan memiliki peningkatan dari tahun 2023 sampai dengan 2024.

Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara mengukur tingkat keberhasilan kinerja melalui Indikator Nilai Sistem Merit. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Penilaian Mandiri Sistem Merit adalah penilaian yang dilakukan secara mandiri guna mengetahui capaian penerapan Sistem Merit pada instansi pemerintah. Capaian Indikator Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.79 Capaian Indikator Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Sistem Merit (Poin)	97.5	263.5	333.5	333.5	343.5

Sumber : BKD Provinsi Sumatera Utara, 2025

Indeks Sistem Merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Indeks ini memiliki tren peningkatan dari

tahun ke tahun. Pada tahun 2024 Nilai Indeks Sistem Merit mengalami kenaikan 10 poin yakni 343.5 dibandingkan tahun 2023 yakni sebesar 333.5 poin.

5. Badan Penghubung

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Utara (BP Sumut) adalah lembaga yang bertugas untuk menjadi perantara antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan pihak-pihak terkait, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, maupun sektor swasta dan masyarakat. Fungsi utama badan penghubung ini adalah untuk menjalin komunikasi, koordinasi, dan kerja sama dalam berbagai bidang yang mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara. Capaian indikator Badan Penghubung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.80 Capaian Indikator Badan Penghubung Provinsi Sumatera Utara

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Kepuasan Pelayanan	-	-	-	90,97	90,98

Sumber : Badan Penghubung Provinsi Sumatera Utara, 2025

Dari tabel di atas, capaian indikator nilai kepuasan pelayanan pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun 2023.

6. Pengawasan

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan dalam arti pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Perkembangan capaian Indikator Pengawasan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.81 Capaian Indikator Pengawasan Provinsi Sumatera Utara

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	83,64	82	79,76	80,74
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	100	100	100	100	100
Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3



Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Level kapabilitas APIP Inspektorat	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3
Penanganan Pengaduan Masyarakat	74,5	55	79	83	83,47
Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikasi Keahlian Khusus Bidang Audit	20	25	64,90	54,55	72,89

Sumber : Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Indikator Pengawasan ini memiliki tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024 Nilai Indikator Pengawasan secara keseluruhan telah tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa Indikator ini sangat penting dan terus menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

2.1.4.2 **Urusan Pemerintahan Penunjang**

Secara umum, urusan penunjang melibatkan penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah, peningkatan sistem administrasi, serta penyediaan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung jalannya program pembangunan utama. Salah satu fokus utama dalam urusan penunjang adalah peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, yang mencakup penguatan sistem administrasi pemerintahan dan manajemen data, digitalisasi layanan publik, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya. Urusan penunjang juga mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia di sektor publik. Melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi aparatur pemerintah, diharapkan kualitas pelayanan publik dapat meningkat, yang pada gilirannya akan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah. Selain itu, pengembangan sistem dan kebijakan yang mendukung koordinasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta juga menjadi bagian dari urusan penunjang ini. Secara keseluruhan, urusan penunjang dalam RPJMD memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung implementasi program pembangunan, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan efektif. Tanpa adanya penguatan di sektor-sektor penunjang ini, pencapaian tujuan pembangunan daerah akan terhambat, sehingga keberhasilan pembangunan di berbagai bidang akan lebih sulit terwujud.

a. **Sekretariat Dewan**

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat Dewan berperan sebagai lembaga yang menyokong secara administratif dan teknis agar DPRD dapat menjalankan tugasnya dengan lancar, transparan, dan akuntabel. Keberhasilan Sekretariat Dewan dalam menjalankan tupoksinya berkontribusi langsung terhadap kualitas kinerja Dewan dan efektivitas pemerintahan daerah secara keseluruhan. Capaian Indikator Sekretariat Dewan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 2.82 Capaian Indikator Sekretariat Dewan Provinsi Sumatera Utara

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase fasilitasi Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	-	-	-	90,25	90,11
Persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti oleh DPRD	-	-	-	45	34,36
Persentase Penetapan Ranperda yang difasilitasi	-	-	-	45	45,45

Sumber : Setwan Provinsi Sumatera Utara, 2025

b. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah (Setda) adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda). Sekretaris daerah bertugas membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, sekretaris daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Capaian Indikator Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.83 Capaian Indikator Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Biro
Persentase penyelesaian batas daerah	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	2.792	2	2,7	2,93	2,93*	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Persentase Kerja sama yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Ditindaklanjuti	-	-	-	75	73	Biro Kesejahteraan Rakyat
Proposal Permohonan Belanja Hibah yang Ditindaklanjuti	-	-	-	75	85	Biro Kesejahteraan Rakyat
Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara yang dieksaminasi	-	-	-	65	43	Biro Hukum
Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan	-	-	-	850	528	Biro Hukum



Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Biro
Kepala Daerah Kab/Kota yang dievaluasi						
Jumlah Rancangan Keputusan Gubernur, Instruksi Gubernur, Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama dan Naskah Hukum Lainnya yang di eksaminasi	-	-	-	1148	909	Biro Hukum
Jumlah Produk hukum daerah Provinsi Sumatera Utara yang dipublikasikan dan diinformasikan kepada masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Setdaprovsu.	-	-	-	65	43	Biro Hukum
Jumlah Penanganan Perkara Hukum di Pengadilan	-	-	-	44	38	Biro Hukum
Jumlah Penanganan Perlindungan HAM	-	-	-	25	23	Biro Hukum
Persentase perumusan kebijakan lingkup perekonomian yang diimplementasikan	-	-	-	100	100	Biro Perekonomian
Persentase BUMD yang memiliki kinerja keuangan yang sehat	-	-	-	71.46	50	Biro Perekonomian
Persentase BLUD yang memiliki kinerja pelayanan yang tinggi	-	-	-		100	Biro Perekonomian
Persentase Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	-	100	100	100	100	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Pemenuhan 17 standarisasi LPSE Kabupaten/Kota	-	-	-	4	7	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah Kebijakan yang ditetapkan untuk pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah	-	-	-	20	20	Biro Administrasi Pemerintahan
Persentase Realisasi Fisik dan non fisik pada	-	-	-	98	95.55	Biro Administrasi Pemerintahan



Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Biro
perangkat daerah diganti dengan Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Melalui Aplikasi.						
Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	-	-	-	100	100	Biro Organisasi
Nilai capaian pelaporan kinerja	-	-	-	11.45	11.45	Biro Organisasi
Persentase Fasilitasi Pelayanan Kerumahtanggaan Pimpinan	-	100	100	100	100	Biro Umum
Persentase Kontribusi PAD dari Pemanfaatan Pelayanan Gedung dan Mess Pemprov	-	100	100	100	100	Biro Umum
Persentase Fasilitasi materi pimpinan	-	100	100	100	100	Biro Administrasi Pimpinan
Persentase pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah	-	100	100	100	100	Biro Administrasi Pimpinan

Sumber: Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Indikator Sekretariat Daerah memiliki tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024 Nilai Indikator Indikator Sekretariat Daerah secara keseluruhan telah tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa Indikator ini dilaksanakan oleh Biro Sekretariat Daerah.

2.1.5 Standar Pelayanan Minimum

Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) merupakan acuan bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan dasar yang berkualitas kepada masyarakat. SPM bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali, dapat mengakses layanan yang layak di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Penetapan SPM ini menjadi sangat penting untuk mengurangi kesenjangan antar daerah dan menciptakan pemerataan pelayanan di seluruh wilayah Sumut, baik di kota-kota besar maupun di daerah pedesaan.

Di sektor **pendidikan**, SPM mengatur berbagai aspek penting seperti jumlah dan kualitas tenaga pendidik, fasilitas pendidikan, serta rasio murid per kelas. Untuk Sumut, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus memastikan bahwa setiap anak dapat mengakses pendidikan dasar yang layak dan berkualitas, dengan memperhatikan keterjangkauan, distribusi tenaga pengajar, serta fasilitas pendidikan yang memadai. Meskipun



beberapa kota besar di Sumut sudah memiliki sekolah dengan kualitas yang baik, daerah-daerah terpencil masih menghadapi tantangan dalam menyediakan fasilitas dan tenaga pendidik yang memadai. Oleh karena itu, pemenuhan SPM pendidikan di daerah-daerah yang lebih sulit dijangkau harus menjadi prioritas, agar anak-anak di seluruh provinsi dapat merasakan pendidikan yang setara.

Di sektor **kesehatan**, SPM mencakup pelayanan kesehatan dasar yang meliputi keberadaan puskesmas, rumah sakit, serta akses terhadap obat-obatan dan layanan kesehatan preventif dan kuratif. Sumut memiliki beberapa fasilitas kesehatan di kota-kota besar, namun untuk daerah-daerah terpencil, akses terhadap layanan medis masih terbatas. SPM di sektor ini menuntut adanya jangkauan layanan yang merata, kualitas tenaga medis yang profesional, serta adanya layanan kesehatan yang dapat dijangkau dengan mudah, seperti posyandu di desa-desa. Pemerintah provinsi juga harus memastikan bahwa program jaminan kesehatan seperti BPJS dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah-daerah terisolasi.

Di bidang **infrastruktur**, SPM terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana dasar, seperti jalan, air bersih, listrik, serta sanitasi. Meskipun sebagian besar kota-kota besar di Sumut telah memiliki akses yang baik terhadap infrastruktur, daerah pedesaan dan wilayah pesisir masih menghadapi kekurangan akses infrastruktur dasar ini. Penyediaan jalan yang layak, pasokan air bersih, penyediaan listrik yang merata, serta sistem sanitasi yang memadai adalah hal-hal yang harus dipenuhi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, SPM di sektor infrastruktur harus mendorong pemerataan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana di daerah yang masih tertinggal. Selain itu, pelayanan publik terkait administrasi juga harus memenuhi standar yang ditetapkan. Hal ini mencakup kemudahan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan administrasi seperti KTP, akta kelahiran, izin usaha, dan layanan lainnya. Pemerintah Sumut perlu memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah birokrasi dan memastikan bahwa layanan administratif dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, baik secara langsung maupun daring (online). Hal ini penting, terutama bagi daerah-daerah yang sulit dijangkau, agar pelayanan publik bisa dirasakan secara merata.

Terakhir, **perlindungan sosial** merupakan salah satu elemen penting dalam SPM. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus memastikan bahwa program perlindungan sosial, seperti bantuan sosial, jaminan hidup, dan program pengentasan kemiskinan, dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini penting untuk mengurangi ketimpangan sosial dan memastikan bahwa masyarakat miskin mendapatkan dukungan yang cukup untuk memperbaiki kualitas hidup mereka. Secara keseluruhan, penerapan Standar Pelayanan Minimum di Provinsi Sumatera Utara sangat penting untuk menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat. Pemerintah provinsi perlu bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota serta sektor swasta dalam memastikan pemenuhan SPM di seluruh sektor yang ada. Dengan pemenuhan SPM yang optimal, diharapkan kualitas hidup masyarakat Sumut akan semakin meningkat dan ketimpangan antar wilayah dapat berkurang, menciptakan kesejahteraan yang lebih adil dan merata di seluruh

provinsi.

2.1.5.1 Pendidikan

Sebagaimana telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam sektor pendidikan adalah tolok ukur yang digunakan untuk memastikan bahwa setiap warga negara, khususnya anak-anak di Indonesia, mendapatkan hak mereka untuk menerima pendidikan yang layak dan berkualitas. Tujuan utama dari SPM pendidikan adalah untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di seluruh wilayah Indonesia, baik di perkotaan maupun daerah terpencil. Lebih lanjut, SPM ini juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendidikan antara daerah maju dan tertinggal. Pemerintah daerah diharapkan dapat menyediakan anggaran yang cukup untuk memenuhi standar ini, sehingga tidak ada anak yang tertinggal hanya karena keterbatasan infrastruktur atau kualitas guru di daerah mereka.

Selain itu, SPM juga mencakup indikator keberhasilan dalam proses pembelajaran, seperti tingkat kelulusan, kualitas ujian, dan tingkat partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Pentingnya standar pelayanan minimum dalam pendidikan juga terletak pada upaya mewujudkan pendidikan inklusif. Setiap anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau berasal dari keluarga kurang mampu, berhak mendapatkan pendidikan yang setara dan berkualitas. Oleh karena itu, standar ini tidak hanya menekankan aspek kuantitatif seperti jumlah sekolah, tetapi juga aspek kualitatif terkait dengan kualitas pengalaman belajar siswa. Capaian indikator pendidikan yang meliputi pemenuhan SPM Pendidikan antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.84 Capaian SPM Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Status				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	97,35	98,10	100	115.43	115.43
Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus	34,9	16,55	100	25.40	25.40

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2025

2.1.5.2 Kesehatan

Standar Pelayanan Minimum (SPM) sektor kesehatan merupakan pedoman yang digunakan untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan akses yang setara terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, tanpa terkecuali. Tujuan utama dari SPM kesehatan adalah untuk menjamin tercapainya derajat kesehatan yang optimal bagi seluruh

masyarakat Indonesia, baik yang berada di daerah perkotaan maupun di daerah terpencil. SPM sektor kesehatan juga menekankan pentingnya pemerataan layanan kesehatan di seluruh wilayah, mengingat ketimpangan akses layanan kesehatan yang masih terjadi antara daerah maju dan daerah tertinggal. Pelayanan kesehatan preventif dan promotif, seperti imunisasi, edukasi kesehatan, serta pemeriksaan rutin, sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Hal ini diharapkan dapat mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah. SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yaitu Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi dan Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi dengan target Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan (100%) dan Jumlah warga negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (100%).

Tabel 2.85 Capaian SPM Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan Kesehatan	100	100	100	100	100
Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan Kesehatan	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, 2025

Dari Tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian tahun 2024 masih berstatus N/A dikarenakan masih belum adanya data rilis yang dikeluarkan oleh Kementerian.

2.1.5.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berfungsi sebagai pedoman yang memastikan setiap warga negara dapat menikmati infrastruktur yang layak dan berkelanjutan, serta ruang yang tertata dengan baik untuk mendukung kesejahteraan dan kualitas hidup. Tujuan utama dari SPM sektor ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan produktif melalui penyediaan fasilitas dan ruang publik yang memadai, serta pengelolaan infrastruktur yang efisien dan efektif. SPM di sektor ini mencakup berbagai aspek penting yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dan pihak terkait. Salah satunya adalah penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, sanitasi,

drainase, dan fasilitas lainnya yang mendukung kehidupan sehari-hari masyarakat. SPM ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap daerah, baik perkotaan maupun pedesaan, memiliki akses terhadap infrastruktur yang memadai dan dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah dalam hal kualitas pelayanan publik.

Selain itu, penataan ruang menjadi bagian integral dari SPM sektor ini. Penataan ruang yang baik tidak hanya bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang rapi dan terstruktur, tetapi juga untuk mengatur pemanfaatan lahan yang sesuai dengan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat. SPM di sektor ini mencakup perencanaan dan pengawasan tata ruang yang mengutamakan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup. Dengan adanya penataan ruang yang tepat, daerah bisa berkembang secara terencana dan terorganisir, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan lahan, kerusakan lingkungan, atau masalah lainnya. SPM sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga mencakup penyediaan ruang publik yang aman dan nyaman, seperti taman, area rekreasi, serta ruang terbuka hijau. Ruang publik yang baik tidak hanya menjadi tempat berkumpul masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai ruang untuk kegiatan sosial dan rekreasi, yang dapat meningkatkan kualitas hidup serta kesehatan mental masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan sektor ini juga sangat penting. Pemerintah daerah harus mendengarkan aspirasi masyarakat dalam proses pembangunan dan penataan ruang untuk memastikan bahwa hasilnya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur dan tata ruang akan lebih efektif dan berkelanjutan capaian SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada sebagai berikut:

Tabel 2.86 SPM Bidang Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Utara

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pemenuhan Kebutuhan air minum curah lintas Kab/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kab/kota	100	100	100	63.77	N/A
2	Penyediaan pelayanan Pengelolaan air limbah domestik regional lintas Kab/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik regional lintas kab/kota	100	100	100	100	N/A

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Utara, 2025

Dari Tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian tahun 2024 masih berstatus N/A dikarenakan masih belum adanya data rilis yang dikeluarkan.

2.1.5.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Standar Pelayanan Minimum (SPM) sektor Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap tempat tinggal yang layak, aman, dan sehat, serta lingkungan yang mendukung kehidupan sosial dan ekonomi yang baik. Tujuan utama dari SPM sektor ini adalah untuk menciptakan perumahan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar tempat tinggal, tetapi juga menciptakan kawasan permukiman yang nyaman, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. SPM dalam sektor Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mencakup beberapa aspek penting yang harus dipenuhi oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu aspek utama adalah penyediaan rumah yang layak huni dengan fasilitas dasar yang memadai, seperti air bersih, sanitasi yang baik, serta akses terhadap listrik dan ventilasi yang cukup. Ketersediaan fasilitas-fasilitas ini menjadi penting untuk menciptakan kondisi hunian yang sehat dan nyaman bagi penghuninya. Selain itu, SPM juga mencakup penyediaan rumah dengan kualitas bangunan yang aman, bebas dari ancaman bencana, serta memenuhi standar konstruksi yang ditetapkan. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa rumah yang dibangun tahan terhadap bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, atau longsor, terutama di daerah-daerah yang rawan bencana. Dengan demikian, SPM sektor ini tidak hanya menekankan pada aspek fisik perumahan, tetapi juga pada aspek ketahanan dan keselamatan penghuni.

Dalam konteks ini, pemerintah juga harus memastikan bahwa sektor perumahan dan permukiman dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Penyediaan rumah terjangkau dan pembangunan kawasan permukiman yang inklusif sangat penting agar tidak ada kelompok masyarakat yang terpinggirkan atau kesulitan untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Oleh karena itu, kebijakan subsidi perumahan dan program pembangunan rumah bersubsidi menjadi bagian integral dari SPM sektor ini. Selain itu, SPM sektor Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman juga mencakup aspek lingkungan hidup. Pembangunan perumahan dan permukiman harus mengutamakan prinsip keberlanjutan dengan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Pengelolaan sampah yang baik, pengelolaan air hujan, serta penggunaan energi yang efisien menjadi bagian dari upaya menciptakan permukiman yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Capaian SPM ini juga menjadi prioritas provinsi Sumatera Utara, dimana capaiannya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.87 SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sumatera Utara

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana provinsi	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	100	100	100



Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah provinsi	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, 2025

Dari Tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian tahun 2024 telah tercapai dengan angka realisasi capaian 100%.

2.1.5.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Standar Pelayanan Minimum (SPM) sektor Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan terlindungi bagi setiap warga negara. Sektor ini sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial, mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tujuan utama dari SPM sektor ini adalah memastikan bahwa setiap individu dan komunitas dapat hidup tanpa rasa takut, dengan akses yang adil terhadap perlindungan hukum dan ketertiban yang memadai. SPM sektor Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat mencakup berbagai komponen yang mendukung terciptanya rasa aman dan ketertiban di masyarakat. Salah satunya adalah penyediaan pelayanan kepolisian yang responsif dan profesional dalam menangani tindak kriminal, kerusuhan, serta pelanggaran hukum lainnya. Polisi sebagai lembaga penegak hukum memiliki peran utama dalam menciptakan situasi yang aman, baik di wilayah perkotaan maupun di daerah pedesaan, dengan melakukan patroli rutin, pengawasan, serta penegakan hukum secara adil dan transparan.

Tabel 2.88 Realisasi SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum Provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi	100	100	100	100%	100

Sumber : Satpol PP Provinsi Sumatera Utara, 2025

Di samping itu, SPM sektor ini juga mencakup pengelolaan dan pencegahan bencana. Perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, atau kebakaran, merupakan bagian dari upaya untuk menjaga keselamatan jiwa dan harta benda. Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu memiliki sistem kesiapsiagaan dan tanggap



darurat yang efektif, serta memberikan pelatihan dan informasi kepada masyarakat mengenai cara-cara menghadapi bencana. Infrastruktur perlindungan seperti posko pengungsian, sistem peringatan dini, serta penyediaan kebutuhan dasar saat bencana terjadi harus dipastikan tersedia dan berfungsi dengan baik. Melalui penerapan SPM sektor Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang tepat, diharapkan tercipta suatu lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari ancaman. Berdasarkan Indikator SPM, yakni jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 sebanyak 5.350 jiwa. Berdasarkan target yang ditetapkan, maka realisasi capaian dengan indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 sebanyak 5.351 jiwa atau 100%.

2.1.5.6 Sosial

Standar Pelayanan Minimum (SPM) sektor sosial memiliki urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 12 ayat 1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar salah satunya adalah bidang Sosial serta Permendagri 86 Tahun 2017 SPM menjadi salah satu acuan dalam penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan daerah. Permensos RI No. 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi (Pasal 7 ayat 1). Tujuan utama dari SPM sektor sosial adalah memastikan bahwa setiap warga negara, terutama mereka yang rentan dan marginal, mendapatkan akses yang adil terhadap layanan sosial yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Sektor ini mencakup berbagai pelayanan yang berkaitan dengan perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pemenuhan hak-hak dasar sosial, seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi.

SPM sektor sosial mencakup berbagai komponen layanan yang bertujuan untuk membantu individu atau kelompok yang mengalami kesulitan, seperti fakir miskin, penyandang disabilitas, lanjut usia, anak-anak, serta kelompok rentan lainnya. Salah satu fokus utama adalah penyediaan bantuan sosial bagi mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang kurang mampu. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara berupaya secara maksimal untuk mengejar pencapaian target SPM. Saat ini realisasi pencapaian SPM sudah memasuki tahun kedua, namun demikian tetap diperlukan kerja keras untuk dapat mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian target SPM bidang sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara didukung oleh Unit Kerja yang terdiri dari Sekretariat, Bidang, dan Unit Pelaksana Teknis. Melalui tabel di bawah ini akan tergambar proses realisasi pencapaian SPM dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, dalam tabel di bawah ini tergambar persentase target pencapaian SPM tahun 2020 2021 dan realisasi pencapaiannya pada tabel berikut:

Tabel 2.89 Capaian SPM Sosial Provinsi Sumatera Utara

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Jumlah warga negara	persen	100%	100%	100%	100%	100%



No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	penyandang disabilitas terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar didalam panti						
2	Persentase Jumlah anak terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar anak terlantar didalam panti	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar lanjut usia didalam panti	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial dasar tuna sosial didalam panti	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Jumlah warga negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Persen	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, 2025

2.1.6 Emisi Gas Rumah Kaca

Emisi gas rumah kaca (GRK) merujuk pada pelepasan gas-gas tertentu ke atmosfer yang dapat menyerap dan memerangkap panas dari permukaan bumi, menyebabkan pemanasan global. Gas-gas ini, yang dikenal sebagai gas rumah kaca, menciptakan efek rumah kaca, yaitu fenomena di mana atmosfer bumi menahan panas yang seharusnya dipantulkan kembali ke luar angkasa, sehingga menyebabkan peningkatan suhu bumi secara keseluruhan. Perubahan iklim dan kenaikan temperatur secara global akibat Gas Rumah Kaca (GRK) juga merupakan suatu fenomena terkait pencemaran udara yang menjadi isu internasional dan dapat berpengaruh secara langsung terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. GRK dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia.

Beberapa gas rumah kaca yang paling umum, dan peranannya, antara lain:

1. Karbon Dioksida (CO₂): Gas rumah kaca yang paling banyak dihasilkan oleh aktivitas manusia, terutama dari pembakaran bahan bakar fosil (seperti batu bara, minyak, dan gas alam) untuk energi, transportasi, dan industri. Deforestasi juga berkontribusi pada peningkatan CO₂, karena pohon yang menyerap karbon dioksida dihilangkan.
2. Metana (CH₄): Gas ini dihasilkan oleh sektor pertanian, khususnya dari aktivitas peternakan (terutama dari pencernaan hewan herbivora seperti sapi) dan dekomposisi sampah organik di tempat pembuangan sampah. Metana juga dilepaskan dalam proses ekstraksi minyak dan gas alam.
3. Dinitrogen Oksida (N₂O): Gas ini dihasilkan oleh pertanian, terutama dari penggunaan pupuk berbasis nitrogen, serta dari aktivitas industri dan pembakaran bahan bakar fosil. N₂O memiliki potensi pemanasan



global yang sangat tinggi.

4. Gas Fluorinasi (HFCs, PFCs, SF₆): Gas-gas ini digunakan dalam berbagai produk industri seperti pendingin, pelarut, dan dalam proses manufaktur. Meskipun konsentrasi gas-gas ini lebih rendah dibandingkan CO₂ atau metana, mereka memiliki potensi pemanasan global yang sangat besar.

Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer menyebabkan pemanasan global, yang memicu berbagai perubahan iklim yang drastis. Beberapa dampak yang muncul akibat emisi gas rumah kaca meliputi Peningkatan suhu global yaitu Suhu rata-rata bumi meningkat, yang mengarah pada cuaca ekstrem seperti gelombang panas yang lebih sering dan intens, Pencairan es dan naiknya permukaan air laut seperti Pemanasan global menyebabkan mencairnya gletser dan es di kutub, yang berkontribusi pada kenaikan permukaan laut dan mengancam kawasan pesisir, Perubahan pola cuaca seperti Hujan yang lebih deras, kekeringan yang lebih lama, dan perubahan musim dapat mengganggu pertanian, pasokan air, dan ekosistem alami, serta Kerusakan ekosistem yang mengakibatkan Pemanasan global menyebabkan pergeseran habitat bagi berbagai spesies, berpotensi menyebabkan kepunahan bagi beberapa spesies yang tidak dapat beradaptasi.

Upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sangat penting untuk memitigasi dampak perubahan iklim. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengurangi emisi ini meliputi:

1. Transisi ke energi terbarukan: Menggantikan penggunaan bahan bakar fosil dengan sumber energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, dan hidro, yang tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca.
2. Efisiensi energi: Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi di sektor rumah tangga, transportasi, dan industri, misalnya melalui penggunaan kendaraan listrik, bangunan hemat energi, dan teknologi efisien lainnya.
3. Pengelolaan pertanian yang berkelanjutan: Mengurangi emisi metana dari sektor pertanian, misalnya dengan mengelola pakan ternak lebih baik dan mengurangi limbah organik yang menghasilkan metana di tempat pembuangan sampah.
4. Reboisasi dan penghijauan: Menanam pohon untuk meningkatkan penyerapan karbon dioksida dari atmosfer, serta melindungi hutan yang ada dari kerusakan.
5. Pengurangan limbah: Mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir, serta meningkatkan daur ulang dan pengomposan untuk mengurangi emisi metana dari sampah organik.

Emisi GRK di Sumatera Utara pada periode tahun 2000-2018 cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2000-2018, emisi GRK agregat mencapai 7.352,55 Gg CO₂eq. Jumlah ini terus mengalami kenaikan hingga akhirnya pada tahun 2018 emisi agregat GRK Sumatera Utara mencapai 77.230,87 Gg CO₂eq. Hal ini menunjukkan dalam kurun waktu 18 tahun, kenaikan emisi GRK di Sumatera Utara mencapai 69.877,99 Gg CO₂eq. Kesehatan.



2.2. Evaluasi Hasil Program RKPD Tahun 2024 dan Realisasi terhadap Target Akhir RKPD Tahun 2024

1. Capaian Indikator Kinerja Utama Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Hasil rata-rata capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah Provinsi Sumatera Utara triwulan IV tahun 2024 adalah 99,34% dengan predikat sangat tinggi. Tujuan sasaran terdiri dari 25 (dua puluh lima) indikator, adapun 22 (dua puluh dua) indikator sudah tercapai dengan predikat sangat tinggi, hanya 2 indikator yang belum tercapai 100% namun pada predikat tinggi. Data tersebut sudah menggunakan data tahun 2024, hanya 4 indikator yang masih menggunakan tanda bintang karena data tahun 2023 disebabkan baru liris pada pertengahan tahun 2025.

Adapun tingkat ketercapaian Indikator Kinerja Tujuan Daerah Provinsi Sumatera Utara pada triwulan IV tahun 2024 dari 7 (tujuh) Indikator Tujuan yang ditetapkan, terdapat 4 (Empat) Indikator Kinerja Tujuan dengan yang tercapai 100% dan 3 indikator predikat tinggi yaitu: Inflasi (84,27), Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (86,49) dan Indeks Reformasi Birokrasi (83,48), namun ada 1 (Satu) indikator masih menggunakan data tahun 2023 karena data tersebut baru liris pada pertengahan tahun 2025.

Untuk Indikator Sasaran Daerah Provinsi Sumatera Utara dari 18 Indikator Sasaran Daerah sudah tercapai 100%, namun ada 3 indikator masih menggunakan data tahun 2023 karena data tersebut baru liris pada pertengahan tahun 2025.



Tabel 2.90 Capaian Indikator Kinerja Utama Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 s.d Triwulan IV

Tujuan Dan Sasaran		INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	BASE LINE 2023	2024			Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target P RKPD	Realisasi s/d Tw. IV	Capaian Terhadap Target P- RKPD (%)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		IPM	Poin	75,13	75,5	75,76	100,34	Bappelitbang, Disdik, Dinkes
	1.01	Meningkatnya Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	70,18	70,7	70,57	99,82	Disdik
	1.02	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Indeks Kesehatan	Tahun	82,57	82,85	82,92	100,08	Dinkes
	1.03	Meningkatnya Pembangunan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender	Poin	91,31	91,4	91,31	99,90	Dinas P3AKB
2	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif		LPE	Persen	5,01	5,00-5,20	5,10	100,00	Bappelitbang
			Inflasi	Persen	2,25	3±1	1,78	84,27	Biro Perek, Disperindag
			Gini Rasio	Poin	0,297	0,297-0,295	0,306	96,73	Bappelitbang
	2.01	Menurunnya tingkat kemiskinan masyarakat	Persentase Kemiskinan	Persen	8,15	7,98-7,46	7,19	114,05	Bappelitbang, Dinsos
	2.02	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,89	5,09-5,00	5,60	90,18	Disnaker
	2.03	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	NTP	Poin	129,04	134	138,56	110,49	Disbunnak, Dinas TPH, Dinas KP



Tujuan Dan Sasaran			INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	BASE LINE 2023	2024				Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Target P RKPD	Realisasi s/d Tw. IV	Capaian Terhadap Target P- RKPD (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	
1			2	3	4	5	6	7	8	9
	2.04	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata	Kontribusi Sub Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Persen	2,11	2,20-2,30	2,22	110,49	Sangat Tinggi	Disbudparekraf
3	Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan		Indeks Infrastruktur	Poin	0,79	0,756	0,79	104,50	Sangat Tinggi	Bappelitbang, Dinas PUPR, Dinas Perkim
			Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Juta Ton CO2eq	29,05	29,45	25,47	86,49	Tinggi	DLHK
	3.01	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Persentase Jalan Mantap	Persen	76,5	78,37	75,50	96,34	Sangat Tinggi	Dinas PUPR
	3.02	Meningkatnya akses hunian yang layak	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak	Persen	70,95	72,1	72,1*	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perkim
	3.03	Meningkatnya Kinerja Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Poin	-	60	60*	100,00	Sangat Tinggi	Dinas PUPR
	3.04	Penurunan Ketimpangan Pembangunan Wilayah	Indeks Wiliamson	Poin	0,56	0,54	0,54*	100,00	Sangat Tinggi	Bappelitbang
	3.05	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	72,8	74,17	73,96	99,72	Sangat Tinggi	DLHK



Tujuan Dan Sasaran			INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	BASE LINE 2023	2024				Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Target P RKPD	Realisasi s/d Tw. IV	Capaian Terhadap Target P- RKPD (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	
1			2	3	4	5	6	7	8	9
	3.06	Meningkatnya Ketangguhan Bencana	Indeks Risiko Bencana	Poin	140,73	140,5	140,70	99,86	Sangat Tinggi	BPBD
4	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif		Indeks Reformasi Birokrasi	Poin Predikat	75,18(BB)	80,10/A	66,87 / B*	83,48	Tinggi	Biro Organisasi
	4.01	Meningkatnya Keberlanjutan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	100,00	Sangat Tinggi	BKAD
	4.02	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Poin Predikat	68,85	70,20(BB)	68,93 (B)	98,19	Sangat Tinggi	Biro Organisasi
	4.03	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Indeks Pelayanan Publik	Poin Predikat	3,51	4,10 (A-)	3,90	95,12	Sangat Tinggi	Biro Organisasi
	4.04	Meningkatnya inovasi daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks Inovasi Daerah	Poin Predikat	53,76 (inovatif)	55,00-57,50 (inovatif)	59,93	104,23	Sangat Tinggi	Bappelitbang
	4.05	Meningkatnya Penilaian Kualitas Pembangunan	Peringkat PPD	Peringkat	12	12	12,00	100,00	Sangat Tinggi	Bappelitbang

Sumber: Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, data diolah



2. Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Capaian indikator kinerja perangkat daerah merupakan ukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai kinerja perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Indikator kinerja perangkat daerah meliputi berbagai aspek seperti aspek kesejahteraan rakyat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing, indikator sistem pelayanan minimal dan indikator-indikator lainnya yang relevan dengan fungsi dan tugas masing-masing perangkat daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu dilihat capaian indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian Pemerintah Daerah. Indikator kinerja utama Perangkat Daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Indikator ini berada pada level *intermediate outcome*, yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan target tersebut bersumber dari RKPD Tahun 2024.

Capaian realisasi Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian Kinerja Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 sampai dengan Triwulan IV mengingat tidak semua data indikator kinerja Perangkat Daerah dirilis setiap triwulanan. Berikut capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang dikutip berdasarkan dokumen Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah yang telah diterima, yaitu sebagai berikut:



Tabel 2.91 Capaian Indikator IKM dan IKU, IKU dan IKK Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 sampai dengan Triwulan IV

No.	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	2023 BASELINE	2024		CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET RKPD 2024	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA TERHADAP RKPD 2024
				TARGET	REALISASI		
				P RKPD	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,02	5,00-5,20	5,10	100,00	Sangat Tinggi
2	Laju Inflasi	Persen	2,25	3±1%	1,78	84,27	Tinggi
3	Indeks Gini	Poin	0,309	0,324	0,306	96,73	Sangat Tinggi
4	Indeks Williamson	Poin	-	0,392	0,54*	100,00	Sangat Tinggi
5	Persentase Kemiskinan	Persen	8,15	8,25-8,15	7,19	114,05	Sangat Tinggi
6	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	1.239.071	1.256.000	1.110.920	113,06	Sangat Tinggi
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	75,130	72,85-73,15	75,76	100,34	Sangat Tinggi
8	Indeks Pendidikan	Poin	69,34	70,00	70,57	99,82	Sangat Tinggi
9	Indeks Kesehatan	Poin	82,57	76,54	82,92	100,08	Sangat Tinggi
10	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	91,060	91,290	91,06	99,75	Sangat Tinggi
11	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	69,330	71,120	69,18	97,27	Sangat Tinggi
12	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,82	9,910	9,93	100,20	Sangat Tinggi
13	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,48	13,56	13,49	99,48	Sangat Tinggi
14	APK SM Sederajat	Persen	105,00	97,440	97,43	99,99	Sangat Tinggi
15	APM SM Sederajat	Persen	71,720	71,490	97,68	136,63	Sangat Tinggi
16	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,670	73,84	73,90	100,08	Sangat Tinggi
17	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	71,060	73,01	71,36	97,74	Sangat Tinggi
18	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,89	5,09-5,00	5,60	90,18	Sangat Tinggi



No.	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	2023 BASELINE	2024		CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET RKPD 2024	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA TERHADAP RKPD 2024
				TARGET	REALISASI		
				P RKPD	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Jumlah Penganggur	Jiwa	472.000	430.000- 400.000	458.000	90,61	Sangat Tinggi
II	ASPEK PELAYANAN UMUM						
	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar						
1	Pendidikan						
1.1	Persentase Guru SMA/LB bersertifikasi	Persen	54,3	56,100	61,3	109,27	Sangat Tinggi
1.2	Persentase Guru SMK bersertifikasi	Persen	49,77	42,700	49,80	116,63	Sangat Tinggi
2	Kesehatan						
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup	/1.000 KH	3,61	2,05	2,77	74,01	Sedang
2.2	Angka Kesakitan (Morbidity)	Persen	10,10	10,00	10,08	99,21	Sangat Tinggi
2.3	Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup	/100.000 KH	72,46	52,33	52,56	99,56	Sangat Tinggi
2.4	Prevalensi Stunting	Persen	18,9	14	18,9*	100,00	Sangat Tinggi
2,5	Capaian Average Length of Stay (ALOS) Rumah Sakit Jiwa	Hari	60	40	63	63,49	Rendah
2,6	Capaian Persentase BOR (Bed Occupancy Rate) Rumah Sakit Jiwa	Persen	89	70	49,05	70,07	Sedang
2,7	Indeks Kepuasan Masyarakat Rumah Sakit Jiwa	Persen	N/A	80	86,28	107,85	Sangat Tinggi
2,8	Persentase Bed Occupancy Rate BOR) Rumah Sakit Haji	Persen	79	70	77,08	110,11	Sangat Tinggi
2,9	Length Of Stay (LOS) Rumah Sakit Haji	Hari	5	4	4	100,00	Sangat Tinggi



No.	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	2023 BASELINE	2024		CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET RKPD 2024	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA TERHADAP RKPD 2024
				TARGET	REALISASI		
				P RKPD	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8
2,10	Indeks Kepuasan Masyarakat Rumah Sakit Haji	Persen	85,2	86	87,6	101,86	Sangat Tinggi
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
3.1	Indeks Infrastruktur	Poin	0,76	0,793	0,79	104,50	Sangat Tinggi
3.2	Persentase panjang jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Persen	76,5	86,19	72,75	84,41	Tinggi
3.3	Persentase panjang jembatan Provinsi dalam Kondisi Baik	Persen	83,45	88,15	82,97	94,12	Sangat Tinggi
3.4	Nilai Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Pemprov	Persen	59,77	55,49	54,28	97,82	Sangat Tinggi
3.5	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Persen	N/A	61,05	59,92	98,15	Sangat Tinggi
3.6	Nilai kinerja penyelenggaraan penataan ruang Provinsi	Persen	N/A	80,61	62,69	77,77	Tinggi
3.7	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Klasifikasi Ahli	Persen	N/A	18,22	15,66	85,95	Tinggi
3.8	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM Regional terhadap seluruh rumah tangga dalam cakupan wilayah pelayanan SPAM Regional	Persen	N/A	6,43	6,343	98,65	Sangat Tinggi
3.9	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses Pengelolaan air limbah domestik melalui	Persen	N/A	11,6	50,13	432,16	Sangat Tinggi



No.	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	2023 BASELINE	2024		CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET RKPD 2024	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA TERHADAP RKPD 2024
				TARGET	REALISASI		
				P RKPD	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8
	SPALD Regional terhadap seluruh rumah tangga dalam cakupan wilayah pelayanan SPALD Regional						
4	Perumahan, Permukiman dan Pertanahan						
4.1	Akses Rumah Tangga terhadap hunian yang layak	Persen	70,95	71	73,47	103,48	Sangat Tinggi
5	Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
5.1	Satpol PP						
5.1.1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	97	100	100,49	100,49	Sangat Tinggi
5.1.2	Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan	Persen	75	100	100	100	Sangat Tinggi
5.2	Bakesbangpol						
5.2.1	Jumlah Masyarakat yang menerima Pendidikan Politik	Orang	800	700	800	114,28	Sangat Tinggi
5.2.2	Jumlah Ormas yang terbina dan Aktif	Jumlah Ormas	112	50	112	224,00	Sangat Tinggi
5.2.3	Jumlah Kawasan Bahaya Narkoba menjadi Kawasan Waspada	desa	272	270	271	99,63	Sangat Tinggi
5.2.4	Laporan Rencana Aksi Penanganan Konflik	Peringkat Provinsi	8	8	8*	100	Sangat Tinggi
5.2.5	Jumlah Masyarakat yang menerima Pendidikan Wawasan	Orang	2.160	1.600	1.800	112,50	Sangat Tinggi



No.	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	2023 BASELINE	2024		CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET RKPD 2024	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA TERHADAP RKPD 2024
				TARGET	REALISASI		
				P RKPD	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kebangsaan dan Revolusi Mental						
5.3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
5.3.1	Indeks Resiko Bencana	Poin	140,73	142,00	139,84	101,54	Sangat Tinggi
6	Sosial						
6.1	Persentase PSKS yang dikelola oleh Penyelenggara Sosial	Persen	5759	1928	1233,00	63,95	Rendah
6.2	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis dan PMKS lainnya yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dalam Panti.	Persen	2025/100	1,62 % (3.640 org)	3640	100,00	Sangat Tinggi
6.3	Persentase Keluarga Miskin yang menerima Perlindungan dan Jaminan Sosial (keluarga miskin 1.344.860 orang)	Persen	1.344.869 Orang	1443	1327,00	92,00	Sangat Tinggi
6.4	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial tingkat provinsi yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar.	Persen	0	1356	1356	100,00	Sangat Tinggi
1	Tenaga Kerja						
1.1	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	0,03	0,90	0,004	0,44	Sangat Rendah
1.2	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar	Persen	60,25	60,50	61,98	102,45	Sangat Tinggi



No.	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	2023 BASELINE	2024		CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET RKPD 2024	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA TERHADAP RKPD 2024
				TARGET	REALISASI		
				P RKPD	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8
	negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi						
1.3	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	Persen	11,55	11,75	12,27	104,43	Sangat Tinggi
1.4	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	Persen	67,54	68,00	12,27	18,04	Sangat Rendah
1.5	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	Persen	36,36	90,02	39,39	43,76	Sangat Rendah
1.6	Persentase satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	Tahun 2023 pakai Satuan Pemukiman/ Lokasi Tahun 2024-2026 Persentase	79	18,99	27,12	70,02	Sedang
2	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana						



No.	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	2023 BASELINE	2024		CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET RKPD 2024	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA TERHADAP RKPD 2024
				TARGET	REALISASI		
				P RKPD	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1	Persentase implementasi PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender) di tingkat Provinsi	Persen	19	88	54,7	62,16	Rendah
2.2	Rasio kekerasan terhadap Perempuan	/100.000	12	9	10,76	83,64	Tinggi
2.3	Rasio kekerasan terhadap Anak	/10.000	29	1,6	2,5	64,00	Rendah
2.4	Persentase Implementasi Pemenuhan Hak Anak di tingkat Provinsi	Persen	38	50	67	134,00	Sangat Tinggi
2.5	TFR/ Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)	Persen	2,39	2,30	2,39	103,91	Sangat Tinggi
3	Ketahanan Pangan						
3.1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	N/A	88,22	89,16	101,07	Sangat Tinggi
4	Lingkungan Hidup						
4.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	72,8	74,17	73,96	99,72	Sangat Tinggi
4.2	Indeks Kualitas Udara	poin	90,9	89,74	92,26	102,81	Sangat Tinggi
4.3	Indeks Kualitas Air	poin	60,27	61,3	61,09	99,66	Sangat Tinggi
4.4	Indeks Kualitas Lahan	poin	49,77	48,74	50,26	103,12	Sangat Tinggi
4.5	Indeks Kualitas air laut	poin	68,56	68,61	70,82	103,22	Sangat Tinggi
4.6	Penurunan emisi gas rumah kaca	Juta Ton CO2eq	29,05	29,45	25,47	86,49	Tinggi
5	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil						



No.	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	2023 BASELINE	2024		CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET RKPD 2024	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA TERHADAP RKPD 2024
				TARGET	REALISASI		
				P RKPD	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8
5.1	Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	persen	86,18	97,50	89,87	92,17	Sangat Tinggi
5.2	Persentase Penerbitan KIA dalam pelayanan Adminduk	Persen	38,5	50	50,90	101,80	Sangat Tinggi
5.3	Persentase Jumlah OPD Provsu dan Lembaga Pengguna yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi Untuk Pelayanan Publik Dalam Rangka Pembangunan Desa dan Penataan Kota Berbasis NIK	Persen	100	91	91	100,00	Sangat Tinggi
5.4	Jumlah Desa Tertinggal	Jumlah	1071	1060	873	82,36	Tinggi
5.5	Jumlah Desa Berkembang	Jumlah	3132	3146	2904	92,31	Sangat Tinggi
5.6	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah	72	40	168	420,00	Sangat Tinggi
5.7	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Maju	Jumlah	28	35	9	25,71	Sangat Rendah
5.8	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Berkembang	Jumlah	253	247	74	29,96	Sangat Rendah
5.9	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) yang Aktif	Persen	58	17,54 % (3800 LKD)	17,49	99,71	Sangat Tinggi
6	Perhubungan						
6.1	Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Jalan	Persen	70,24	71,00	71,00	100,00	Sangat Tinggi
6.2	Rasio Konektivitas Provinsi	Rasio	N/A	0,604	0,604	100,00	Sangat Tinggi



No.	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	2023 BASELINE	2024		CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET RKPD 2024	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA TERHADAP RKPD 2024
				TARGET	REALISASI		
				P RKPD	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8
6.3	Persentase Konektivitas Simpul Angkutan jalan	Persen	30,77	38,46	38,46	100,00	Sangat Tinggi
6.4	On Time Performance Layanan Transportasi	Persen	N/A	83,52	83,52	100,00	Sangat Tinggi
7	Komunikasi, Informatika, dan Persandian						
7.1	Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional	Persen	N/A	80	80	100,00	Sangat Tinggi
7.2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar	Persen	N/A 91	91	92	101,10	Sangat Tinggi
7.3	Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	Persen	N/A	2	2	100,00	Sangat Tinggi
7.4	Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber	Orang	N/A 5	5	10	200,00	Sangat Tinggi
8	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						



No.	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	2023 BASELINE	2024		CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET RKPD 2024	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA TERHADAP RKPD 2024
				TARGET	REALISASI		
				P RKPD	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8
8.1	Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persen	8,34	15,95	33,07	207,34	Sangat Tinggi
8.2	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persen	4,92	5	5,74	114,80	Sangat Tinggi
8.3	Persentase Koperasi Berkualitas	Persen	-	7,5	0,64	8,53	Sangat Rendah
8.4	Persentase Jumlah UMKM yang didukung Pemasarannya	Persen	0,04	11,19	21,82	195,00	Sangat Tinggi
8.5	Pertumbuhan Wirausaha	%	0,01	0,02	0,06	275,00	Sangat Tinggi
8.6	Jumlah Usaha Kecil yang Menyelesaikan Sertifikasi (HaKI, Halal, Ijin Edar Produk dan lain – lain)	Jumlah Usaha Kecil	328	50	0	0,00	Sangat Rendah
9	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						
9.1	Jumlah Investor PMDN	Investor	9.175	14.470	26.962	186,33	Sangat Tinggi
9.2	Jumlah Investor PMA	Investor	1.650	2.532	4.183	165,21	Sangat Tinggi
9.3	Nilai Investasi PMDN	Rp. Triliun	22,85	21,6	22,45	103,89	Sangat Tinggi
9.4	Nilai Investasi PMA	Rp. Triliun	19	19	21,26	113,45	Sangat Tinggi
9.5	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia PMDN	Orang	30,000	37.249	34.375	92,28	Sangat Tinggi
9.6	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia PMA	Orang	67,50	8.130	12.001	147,61	Sangat Tinggi
9.7	Jumlah izin yang terbit	Dokumen	1.484	1.736	2.468	142,17	Sangat Tinggi
10	Kepemudaan dan Keolahragaan						
10.1	Persentase Pembinaan Cabang Olahraga berprestasi	Persen	92,31	98,46	87,69	89,06	Tinggi



No.	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	2023 BASELINE	2024		CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET RKPD 2024	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA TERHADAP RKPD 2024
				TARGET	REALISASI		
				P RKPD	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8
10.2	Persentase Pembinaan Atlit Muda (atlit pelajar)	Persen	51,67	53,09	53,09	100	Sangat Tinggi
10.3	Indeks Pembangunan Pemuda	Persen	56,83	54,08	56,33	100,00	Sangat Tinggi
11	Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif						
11.1	Persentase Peningkatan Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan	Persen	12,42	14,9	14,9	100,00	Sangat Tinggi
11.2	Persentase Cagar Budaya dan warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	Persen	48,54	50,13	64,45	128,57	Sangat Tinggi
11,4	Indeks Pembangunan Pariwisata	Poin	3,8**	3,9	3,8**	97,44	Sangat Tinggi
11,5	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Pariwisata	Persen	51,6	65	81,50	125,38	Sangat Tinggi
11,6	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rupiah	N/A	31.461.864.000	635.329.110	2,02	Sangat Rendah
12	Perpustakaan dan Arsip						
12.1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	16,5	23	13,10	56,96	Rendah
12.2	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baik	Persen	49	52	52	100,00	Sangat Tinggi
12.3	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Orang	103	110	110	100,00	Sangat Tinggi
12.4	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Persen	67,01	67	68,60	102,39	Sangat Tinggi
13	Pertanian						



No.	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	2023 BASELINE	2024		CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET RKPD 2024	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA TERHADAP RKPD 2024
				TARGET	REALISASI		
				P RKPD	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8
13.1	Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura						
13.1.1	Jumlah Produksi Tanaman Pangan						
	1. Padi (ton GKG)	Ton GKG	4.049.438,00	4.050.000,00	3.595.081,00	88,77	Tinggi
	2. Jagung (ton pipilan kering)	Ton pipilan kering	1898955	1.900.000,00	1.763.646,00	92,82	Sangat Tinggi
	3. Kedele (ton)	Ton	15693	15.700	9.070	57,77	Rendah
13.1.2	Jumlah Produktivitas Tanaman Pangan						
	1. Padi (ton/Ha)	Ton/Ha	5.32	5,36	5,33	99,44	Sangat Tinggi
	2. Jagung (ton/Ha)	Ton/Ha	6.23	6,50	6,24	96,00	Sangat Tinggi
	3. Kedele (ton/ha)	Ton/Ha	1.59	1,60	1,38	86,25	Tinggi
13.1.3	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura						
	1. Bawang Merah (ton)	Ton Umbi Basah	65526	65.550	35.062,00	53,49	Rendah
	2. Cabe (ton)	Ton	205.960	206.000	179.190,00	86,99	Tinggi
	3. Sayur-sayuran (ton)	Ton	1.232.583	1.300.000	1.114.354,00	85,72	Tinggi
	4. Buah - buahan (ton)	Ton	1.547.654	1.550.000	77.377,00	4,99	Sangat Rendah
13.1.4	Produktivitas Tanaman Hortikultura						
	1. Bawang Merah (ton)	Ton/Ha	8.28	14,75	9,84	66,71	Sedang
	2. Cabe (ton)	Ton/Ha	10.36	12,50	13,71	109,68	Sangat Tinggi
13.2	Perkebunan dan Peternakan						



No.	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	2023 BASELINE	2024		CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET RKPD 2024	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA TERHADAP RKPD 2024
				TARGET	REALISASI		
				P RKPD	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8
13.2.1	Persentase peningkatan produksi komoditas perkebunan rakyat (PR) (%/tahun)	Persen	1,06	2,57	2,22	86,38	Tinggi
13.2.2	Persentase Peningkatan Produktivitas komoditas perkebunan rakyat (%)	Persen	1,06	2,32	2,83	121,98	Sangat Tinggi
13.2.3	NTP Sub sektor Tanaman Perkebunan	Poin	166,53	156,11	200,95	128,72	Sangat Tinggi
13.2.4	Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB (ADHB)	Persen	10,78	13,33	13,27	99,55	Sangat Tinggi
13.2.5	NTP Sub sektor Peternakan	Poin	94,66	101,51	95,69	94,27	Sangat Tinggi
13.2.6	Persentase Peningkatan Produksi Daging	Persen	11,41	1,28	5,32	415,63	Sangat Tinggi
13.2.7	Persentase Peningkatan Produksi Telur	Persen	9,28	2,16	0,09	4,17	Sangat Rendah
13.2.8	Persentase Peningkatan Produksi susu	Persen	2,47	2,9	8,8	303,45	Sangat Tinggi
13.3	Kehutanan						
13.3.1	Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)	Ha	54.349,96	55.054	52.983,66	103,91	Sangat Tinggi
13.3.2.	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Ha	271.056,14	274.850	270.278	101,69	Sangat Tinggi
13.3.3	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB (%)	Persen	0,79	0,8	0,78	97,50	Sangat Tinggi
13.4	Kelautan dan Perikanan						
13.4.1	Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg/Kap/Thn)	Kg/kap/ Th	51,32	51,55	51,24	99,40	Sangat Tinggi



No.	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	2023 BASELINE	2024		CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET RKPD 2024	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA TERHADAP RKPD 2024
				TARGET	REALISASI		
				P RKPD	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8
13.4.2	Produksi Perikanan (Ton/Tahun)	Ton	701.341,21	701.500	410.212,94	58,48	Rendah
13.4.3	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Ton	482.343.21	482.500	274.442,94	56,88	Rendah
13.4.4	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Ton	218.998	219.944	135.770,00	61,73	Rendah
13.4.5	Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/kap/ Th	51,32	52	51,24	99,50	Sangat Tinggi
13.4.6	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Persen	108,36	109	101,48	93,53	Sangat Tinggi
13.4.7	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTP)	Persen	97,30	101	101,41	100,41	Sangat Tinggi
13.4.8	Rehabilitasi Ekosistem pesisir laut, dan pulau-pulau kecil	Persen	0	25	33	132,00	Sangat Tinggi
14	Perindustrian, Perdagangan dan ESDM						
14.1	Rasio Elektrifikasi	Persen	99,99	100	99,99	99,99	Sangat Tinggi
14.2	Persentase Desa yang teraliri Listrik	Persen	98,89	99	99,09	100,09	Sangat Tinggi
14.3	Persentase Usaha tambang sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Peraturan	Persen	64,12	86,96	96,30	110,74	Sangat Tinggi
14.4	Persentase Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHK	Persen	05:42	5,5	5,32	96,73	Sangat Tinggi
14.5	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap PDRB ADHK	Persen	3,54	3,75	4,47	119,2	Sangat Tinggi
1	Perencanaan Pembangunan dan Kelitbangan						
1.1	Nilai SAKIP	Nilai (Kategori)	68,85 (B)	70,00 (BB)	68,93 (B)	98,19	Sangat Tinggi



No.	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	2023 BASELINE	2024		CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET RKPD 2024	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA TERHADAP RKPD 2024
				TARGET	REALISASI		
				P RKPD	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2	Indeks Inovasi Daerah	Poin	53,76	55,00-57,50 (inovatif)	59,93	104,23	Sangat Tinggi
1.3	Peringkat Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD)	Peringkat	12	12	12	100	Sangat Tinggi
2	Keuangan dan Aset Daerah						
2.1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	100,00	Sangat Tinggi
2.2	Penetapan APBD	Dokumen	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100,00	Sangat Tinggi
2.3	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban	Dokumen	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100,00	Sangat Tinggi
2.4	Persentase laporan Aset daerah yang disusun	Persen	100 25	100	100	100,00	Sangat Tinggi
2.5	Persentase SK Gubsu atas evaluasi APBD, P. APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota	Persen	Tepat waktu 25	100	100	100,00	Sangat Tinggi
3	Pendapatan Daerah						
3.1	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	Persen	56,82	60,98	61,52	100,89	Sangat Tinggi
3.2	Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari tahun sebelumnya	Persen	-0,01	11,73	10,44	89,00	Tinggi
3.3	Persentase kenaikan Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dari tahun sebelumnya	Persen	0,1264	10,31	7,44	72,16	Sedang



No.	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	2023 BASELINE	2024		CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET RKPD 2024	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA TERHADAP RKPD 2024
				TARGET	REALISASI		
				P RKPD	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.4	Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Air Permukaan dari tahun sebelumnya	Persen	-0,278	2	4,04	202,00	Sangat Tinggi
3.5	Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Rokok dari tahun sebelumnya	Persen	-0,0214	15,82	48,04	303,67	Sangat Tinggi
3.6	Persentase Kenaikan Penerimaan Retribusi Daerah dari tahun sebelumnya	Persen	N/A	1,29	5,48	424,81	Sangat Tinggi
3.7	Indeks Pelayanan Publik	Predikat	3,51	A-	92,17	100,00	Sangat Tinggi
4	Pengembangan Sumber Daya Manusia						
4.1	Persentase Sumber Daya Manusia Aparatur yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) dengan Kriteria Memuaskan	Persen	9,041	25% (6.250 orang)	31,55% (7.888 orang)	126,20	Sangat Tinggi
5	Kepegawaian						
5.1	Nilai Sistem Merit	Point	333,5	340 (Sangat Baik)	343,5	98,98	Sangat Tinggi
6	Pengawasan						
6.1	Opini BPK terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Opini	WTP	WTP	N/A	100	Sangat Tinggi
6.2	Nilai SAKIP	Nilai (Kategori)	97,62	71,4	94,74 (BB)	132,69	Sangat Tinggi



No.	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	2023 BASELINE	2024		CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET RKPD 2024	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA TERHADAP RKPD 2024
				TARGET	REALISASI		
				P RKPD	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8
6.3	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Persen	79,76	80	80,74	100,93	Sangat Tinggi
6.4	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Persen	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi
6.5	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	Skor/ Level	Level 3	3,3	3	90,91	Sangat Tinggi
6.6	Level kapabilitas APIP Inspektorat	Skor/ Level	Level 3	3,2	3	93,75	Sangat Tinggi
6.7	Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persen	83	81	83,47	103,05	Sangat Tinggi
6.8	Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikasi Keahlian Khusus Bidang Audit	Persen	54,55	65	72,89	112,14	Sangat Tinggi
7	Penghubung						
7.1	Nilai Kepuasan Pelayanan	Poin	90,97	90	90,98	101,09	Sangat Tinggi
8	Sekretariat DPRD						
8.1	Persentase fasilitasi Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persen	90,25	100	90,11	90,11	Sangat Tinggi
8.2	Persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti oleh DPRD	Persen	45	50	34,36	68,72	Sedang
8.3	Persentase Penetapan Ranperda yang difasilitasi	Persen	45	50	45,45	90,90	Sangat Tinggi



No.	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	2023 BASELINE	2024		CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET RKPD 2024	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA TERHADAP RKPD 2024
				TARGET	REALISASI		
				P RKPD	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Sekretariat Daerah						
9.1	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Predikat	2,93	2.7	2,93*	108,52	Sangat Tinggi
9.2	Persentase Kerjasama yang difasilitasi	Persen	N/A	100	100,00	100	Sangat Tinggi
9.3	Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Ditindaklanjuti	Persen	75	75	73	97,33	Sangat Tinggi
9.4	Proposal Permohonan Belanja Hibah yang Ditindaklanjuti	Persen	75	75	85	113,33	Sangat Tinggi
9.5	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara yang dieksaminasi	Produk Hukum	65	30	43	143,33	Sangat Tinggi
9.6	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota yang dievaluasi	Produk Hukum	850	700	528	75,43	Tinggi
9.7	Jumlah Rancangan Keputusan Gubernur, Instruksi Gubernur, Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama dan Naskah Hukum Lainnya yang di eksaminasi	Produk Hukum	1148	850	909	106,94	Sangat Tinggi
9.9	Jumlah Produk hukum daerah Provinsi Sumatera Utara yang dipublikasikan dan diinformasikan kepada	Produk Hukum	65	30	43	143,33	Sangat Tinggi



No.	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	2023 BASELINE	2024		CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET RKPD 2024	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA TERHADAP RKPD 2024
				TARGET	REALISASI		
				P RKPD	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8
	masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Setdaprovsu.						
9.10	Jumlah Penanganan Perkara Hukum di Pengadilan	Perkara	44	25	38	152,00	Sangat Tinggi
9.11	Jumlah Penanganan Perlindungan HAM	Kasus	25	15	23	153,33	Sangat Tinggi
9.12	Persentase perumusan kebijakan lingkup perekonomian yang diimplementasikan	Persen	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi
9.13	Persentase BUMD yang memiliki kinerja keuangan yang sehat	Persen	71,46	100	50	50,00	Sangat Rendah
9.13	Persentase BLUD yang memiliki kinerja pelayanan yang tinggi	Persen	N/A	100	100	100	Sangat Tinggi
9.14	Persentase Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	99,30	100	100	100	Sangat Tinggi
9.15	Pemenuhan 17 standarisasi LPSE Kabupaten/Kota	Kab/Kota	4 Kab/Kota	7	6	85,71	Tinggi
9.16	Jumlah Kebijakan yang ditetapkan untuk pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah	Dokumen	20	18	20	111,11	Sangat Tinggi
9.17	Persentase Realisasi Fisik dan non fisik pada perangkat daerah diganti dengan Persentase Perangkat Daerah yang	Persen	98	100	95,55	95,55	Sangat Tinggi



No.	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	2023 BASELINE	2024		CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET RKPD 2024	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA TERHADAP RKPD 2024
				TARGET	REALISASI		
				P RKPD	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Menyampaikan Laporan Melalui Aplikasi.						
9.18	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Nilai SAKIP	68,85	70,00 (BB)	68,93	98,47	Sangat Tinggi
9.19	Indeks Pelayanan Publik	Predikat	3,51 (B)	4,35 (A-)	3,9 (B)	89,66	Tinggi
9.20	Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Persen	100	100	100	100	Sangat Tinggi
9.21	Nilai capaian pelaporan kinerja	Predikat	11,45	15	11,45	76,33	Tinggi
9.22	Persentase Layanan Kerumahtanggaan Pimpinan	Persen	100	100	100	100	Sangat Tinggi
9.23	Persentase Kontribusi PAD dari Pemanfaatan Pelayanan Gedung dan Mess Pemprov	Persen	100	100	80,29	80,29	Tinggi
9.24	Persentase Fasilitasi materi pimpinan	Persen	100	100	100	100	Sangat Tinggi
9.25	Persentase Pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	Sangat Tinggi
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH						
1.	NTP	Poin	110,35	123,7	145,03	117,243	Sangat Tinggi
a.	NTP Tanaman Pangan	Persen	100,68	100,62	100,27	99,652	Sangat Tinggi
b.	NTP sub sektor Tanaman Perkebunan	Poin		156,11	195,9	125,488	Sangat Tinggi
c.	NTP Hortikultura	Persen	101,6	100	93,48	93,480	Sangat Tinggi
d.	NTP Perikanan/Kelautan	Persen	106	104,64	101,41	96,913	Sangat Tinggi



No.	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	2023 BASELINE	2024		CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET RKPD 2024	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA TERHADAP RKPD 2024
				TARGET	REALISASI		
				P RKPD	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8
e.	NTP sub sektor Peternakan	Poin	94,66	101,51	96,30	95,290	Sangat Tinggi
2.	Indeks Infrastruktur	Persen	0,75	0,793	0,79	104,50	Sangat Tinggi
3.	Rasio Elektrifikasi	Persen	99,99	100	99,99	99,99	Sangat Tinggi
4.	Jumlah Izin yang terbit	Jumlah izin	2086	1736	2468	142,17	Sangat Tinggi
5.	Persentase Guru SMA/SLB bersertifikasi	Persen	54,3	56,1	61,3	109,27	Sangat Tinggi
6.	Persentase Guru SMK bersertifikasi	Persen	49,77	42,7	49,8	116,63	Sangat Tinggi
7.	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin (Predikat)	66,87 / B	70,00 (B)	68,93 (B)	98,47	Sangat Tinggi
8.	Indeks Demokrasi Indonesia Sumatera Utara	poin	80,34	77,75	80,19	103,33	Sangat Tinggi
9.	Aspek Kebebasan	Skor	83,12	88,6	83,12	93,81	Sangat Tinggi
10.	Indeks Risiko Bencana Daerah	Poin	140,73	142,25	139,84	101,72	Sangat Tinggi
IV	Standar Pelayanan Minimal (SPM)						
1	Pendidikan						
1.1	Persentase Jumlah Warga Negara Usia 16- 18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	Persen	115,43	100	115,43	115,43	Sangat Tinggi
1.2	Persentase Jumlah Warga Negara Usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus	Persen	25,40	100	25,40	25,40	Sangat Rendah
2	Kesehatan						



No.	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	2023 BASELINE	2024		CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET RKPD 2024	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA TERHADAP RKPD 2024
				TARGET	REALISASI		
				P RKPD	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1	Persentase Jumlah penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi
2.2	Persentase Jumlah penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
3.1	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	Persen	63,77	100	63,77*	63,77	Rendah
3.2	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	Persen	N/A	100	N/A		Sangat Rendah
4	Perumahan Rakyat						
4.1	Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persen	1	100	100	100	Sangat Tinggi



No.	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	2023 BASELINE	2024		CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET RKPD 2024	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA TERHADAP RKPD 2024
				TARGET	REALISASI		
				P RKPD	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8
4.2	Persentase Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	Persen	1	100	100	100	Sangat Tinggi
5	Trantibumlinmas						
5.1	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi	persen	7200	100	100	100	Sangat Tinggi
6	Sosial						
6.1	Persentase Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar didalam panti	Persen	400 (orang)	803 (100%)	803	100	Sangat Tinggi
6.2	Persentase Jumlah anak terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar anak terlantar didalam panti	Persen	2034 (orang)	345 (100%)	345	100	Sangat Tinggi
6.3	Persentase Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar lanjut usia didalam panti	Persen	339 (orang)	339 (100%)	339	100	Sangat Tinggi
6.4	Persentase Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang	Persen	250 (orang)	230 (100%)	230	100	Sangat Tinggi



No.	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	2023 BASELINE	2024		CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET RKPD 2024	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA TERHADAP RKPD 2024
				TARGET	REALISASI		
				P RKPD	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8
	mendapat rehabilitasi sosial dasar tuna sosial didalam panti						
6.5	Persentase Jumlah warga negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Persen	29.880 (orang)	1.356	1.200	88,50	Tinggi

Sumber . Bappelitbang Provsu, hasil verifikasi dan validasi Laporan Evaluasi Renja PD Triwulan III Tahun 2024



Tabel 2.92 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah Tahun 2024 Triwulan IV dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sedang, Rendah dan Sangat Rendah

No.	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	2023 BASELINE	2024		CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET RKPD 2024	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA TERHADAP RKPD 2024	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI			
				P RKPD	TW IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II	Aspek Pelayanan Umum							
2	Kesehatan							
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup	/1.000 KH	3,61	2,05	2,77	74,01	Sedang	Dinas Kesehatan
2.1	Capaian <i>Average Length of Stay</i> (ALOS) Rumah Sakit Jiwa	Hari	60	40	63	63,49	Rendah	RS. Jiwa M.Ildrem
2.3	Capaian Persentase BOR (<i>Bed Occupancy Rate</i>) Rumah Sakit Jiwa	Persen	89	70	49,05	70,07	Sedang	RS. Jiwa M. Ildrem
4	Sosial							
4.1	Persentase PSKS yang dikelola oleh Penyelenggara Sosial	Persen	5759	1928	1233,00	63,95	Rendah	Dinas Sosial
5	Tenaga Kerja							
5.1	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	0,03	0,90	0,004	0,44	Sangat Rendah	Dinas Ketenagakerjaan
5.2	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang- undangan bidang ketenagakerjaan	Persen	67,54	68,00	12,27	18,04	Sangat Rendah	Dinas Ketenagakerjaan
5.3	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	Persen	36,36	90,02	39,39	43,76	Sangat Rendah	Dinas Ketenagakerjaan
5.4	Persentase satuan pemukiman transmigrasi	Tahun 2023 pakai Satuan	79	18,99	27,12	70,02	Sedang	Dinas Ketenagakerjaan



No.	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	2023 BASELINE	2024		CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET RKPD 2024	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA TERHADAP RKPD 2024	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI			
				P RKPD	TW IV			
		Pemukiman/ Lokasi Tahun 2024 Persentase						
6	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana							
6.1	Persentase implementasi PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender) di tingkat Provinsi	Persen	19	88	54,7	62,16	Rendah	Dinas P3AKB
6.2	Rasio kekerasan terhadap Anak	/ 10.000	29	1,6	2,5	64,00	Rendah	Dinas P3AKB
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
7.2	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Maju	Jumlah	28	35	9	25,71	Sangat Rendah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7.3	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Berkembang	Jumlah	253	247	74	29,96	Sangat Rendah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
8.1	Persentase Koperasi Berkualitas	Persen	-	7,5	0,64	8,53	Sangat Rendah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
8.2	Jumlah Usaha Kecil yang Menyelesaikan Sertifikasi (HaKI, Halal, Ijin Edar Produk dan lain – lain)	Jumlah Usaha Kecil	328	50	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



No.	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	2023 BASELINE	2024		CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET RKPD 2024	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA TERHADAP RKPD 2024	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI			
				P RKPD	TW IV			
9	Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif							
9.1	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rupiah	N/A	31.461.864.000	635.329.110	2,02	Sangat Rendah	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
10	Perpustakaan dan Arsip							
10.1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	16,5	23	13,10	56,96	Rendah	Dinas Perpustakaan dan Arsip
11	Pertanian							
11	Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura							
11.1	Jumlah Produksi Tanaman Pangan							
	3. Kedele (ton)	Ton	15693	15.700	9.070	57,77	Rendah	Dinas Ketahanan Pangan, TPH
11.2	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura							Dinas Ketahanan Pangan, TPH
	1. Bawang Merah (ton)	Ton Umbi Basah	65526	65.550	35.062,00	53,49	Rendah	Dinas Ketahanan Pangan, TPH
	4. Buah - buahan (ton)	Ton	1.547.654	1.550.000	77.377,00	4,99	Sangat Rendah	Dinas Ketahanan Pangan, TPH
12	Perkebunan dan Peternakan							
13.2.7	Persentase Peningkatan Produksi Telur	Persen	9,28	2,16	0,09	4,17	Sangat Rendah	
13	Kelautan dan Perikanan							
12.1	Produksi Perikanan (Ton/Tahun)	Ton	701.341,21	701.500	410.212,94	58,48	Rendah	Dinas Kelautan dan Perikanan
12.2	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Ton	482.343.21	482.500	274.442,94	56,88	Rendah	Dinas Kelautan dan Perikanan



No.	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	2023 BASELINE	2024		CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET RKPD 2024	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA TERHADAP RKPD 2024	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI			
				P RKPD	TW IV			
12.3	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Ton	218.998	219.944	135.770,00	61,73	Rendah	Dinas Kelautan dan Perikanan
14	Pendapatan Daerah							
13.1	Persentase kenaikan Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dari tahun sebelumnya	Persen	0,1264	10,31	7,44	72,16	Sedang	Bapenda
14	Sekretariat DPRD							
14.1	Persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti oleh DPRD	Persen	45	50	34,36	68,72	Sedang	Sekretariat DPRD
15	Sekretariat Daerah							
15.5	Persentase BUMD yang memiliki kinerja keuangan yang sehat	Persen	71,46	100	50	50,00	Sangat Rendah	Setda / Perekonomian
IV	Standar Pelayanan Minimal (SPM)							
1	Pendidikan							
1.1	Persentase Jumlah Warga Negara Usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus	Persen	25,40	100	25,40*	25,40	Sangat Rendah	Dinas Pendidikan
2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
2.1	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	Persen	63,77	100	63,77*	63,77	Rendah	Dinas PUPR
2.2	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air	Persen	N/A	100	N/A		Sangat Rendah	Dinas PUPR



No.	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	2023 BASELINE	2024		CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET RKPD 2024	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA TERHADAP RKPD 2024	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI			
				P RKPD	TW IV			
	limbah domestik regional lintas kabupaten/kota							



Pada tabel 2.89 dapat dilihat rincian Indikator Kinerja Utama (IKU) kriteria penilaian realisasi kinerja sedang, rendah dan sangat rendah ada 28 indikator terdiri dari aspek pelayanan umum 25 indikator berada 14 OPD dan 3 indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) berada pada 2 OPD.

Capaian Kinerja Program dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah

Evaluasi capaian kinerja program dan realisasi keuangan pada perangkat daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran terhadap kinerja perangkat daerah dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan, sehingga akan didapatkan perangkat daerah yang memiliki kinerja dan realisasi keuangan yang tertinggi serta perangkat daerah yang memiliki kinerja dan realisasi keuangan yang paling rendah.

Dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan, evaluasi terhadap capaian dan realisasi keuangan merupakan langkah krusial yang tidak bisa diabaikan. Evaluasi ini bukan hanya sekedar formalitas, tetapi sebuah proses penting yang membawa banyak manfaat bagi pembangunan daerah. Sejalan dengan hal dimaksud, evaluasi terhadap kinerja program dan realisasi keuangan dilaksanakan untuk memastikan program kegiatan dilaksanakan sesuai dengan target dan indikator yang telah ditetapkan sehingga dapat menilai seberapa efektif dan efisien program telah dijalankan.

Selain hal di atas, evaluasi terhadap kinerja program dan realisasi keuangan juga dilakukan untuk membantu mengidentifikasi kendala permasalahan serta tantangan yang bisa saja muncul selama dalam pelaksanaannya. Untuk itu, berikut disajikan kondisi capaian kinerja program dan realisasi keuangan sampai dengan triwulan IV tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 2.93 Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2024

NO	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	CAPAIAN KINERJA TW IV	REALISASI KEUANGAN TW IV
1	2	3	4
1	Sekretariat Daerah		
	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	65,07	98,08
2	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	95,22	91,46
	<i>Rata Rata Capaian Kinerja</i>	82,55	94,75
	Biro Kesejahteraan Rakyat		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	84,57	84,57
2	Program Kesejahteraan Rakyat	73,05	73,05
	<i>Rata Rata Capaian Kinerja</i>	78,81	78,81
	Biro Hukum		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	97,89
2	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	100	99,41
	<i>Rata Rata Capaian Kinerja</i>	100	98,65
	Biro Perekonomian		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87,62	98,40
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	100	98,17
	<i>Rata Rata Capaian Kinerja</i>	93,81	98,29



NO	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	CAPAIAN KINERJA TW IV	REALISASI KEUANGAN TW IV
1	2	3	4
	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	99,14
2	Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	100	99,05
	<i>Rata Rata Capaian Kinerja</i>	<i>100</i>	<i>99,10</i>
	Biro Administrasi Pembangunan		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	84,09	97,73
2	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	87,34	99,75
	<i>Rata Rata Capaian Kinerja</i>	<i>85,72</i>	<i>98,74</i>
	Biro Organisasi		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	99,52
2	Program Penataan Organisasi	100	99,00
	<i>Rata Rata Capaian Kinerja</i>	<i>100</i>	<i>99,26</i>
	Biro Umum		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	78,44
2	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	100	71,39
	<i>Rata Rata Capaian Kinerja</i>	<i>100</i>	<i>99,26</i>
	Biro Administrasi Pimpinan		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	93,91
	<i>Rata Rata Capaian Kinerja</i>	<i>100</i>	<i>93,91</i>
	Rata Rata Capaian Kinerja Sekretariat	93,43	95,64
2	Sekretariat DPRD		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	90,78
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	80,34	89,00
	<i>Rata Rata Capaian Kinerja</i>	<i>90,17</i>	<i>89,72</i>
3	Inspektorat		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93,25	95,45
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	100	83,53
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	98,88	71,58
	<i>Rata Rata Capaian Kinerja</i>	<i>97,38</i>	<i>93,10</i>
4	Badan Kepegawaian		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,42	97,64
2	Program Kepegawaian Daerah	98,80	90,50
	<i>Rata Rata Capaian Kinerja</i>	<i>99,40</i>	<i>96,30</i>
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	93,02
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	100	96,64
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100	99,99
4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100	76,37
5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	90,41	97,38
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	90,00	97,63
	<i>Rata Rata Capaian Kinerja</i>	<i>96,74</i>	<i>99,39</i>
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	98,03
2	Program Penanggulangan Bencana	97,00	97,09
	<i>Rata Rata Capaian Kinerja</i>	<i>98,58</i>	<i>97,97</i>
7	Badan Keuangan dan Aset Daerah		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	87,30



NO	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	CAPAIAN KINERJA TW IV	REALISASI KEUANGAN TW IV
1	2	3	4
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	100	78,28
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	80,59
	Rata Rata Capaian Kinerja	100	82,06
8	Badan Pendapatan Daerah		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	94,41
2	Program Pengelolaan keuangan Daerah	100	100
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	100	90,62
	Rata Rata Capaian Kinerja	100	94,25
9	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	96,77	97,04
2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	100	96,92
	Rata Rata Capaian Kinerja	98,81	97,02
10	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	96,97
2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100	92,97
3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100	99,37
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	100	99,20
	Rata Rata Capaian Kinerja	100	96,76
11	Badan Penghubung Daerah Provinsi		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	84,57	40,52
2	Program Pelayanan Penghubung	77,66	40,45
2	Program Pelayanan Penghubung	77,66	40,45
	Rata Rata Capaian Kinerja	81,11	80,97
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	99,80	95,40
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	89,40	65,91
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	99,98	95,32
4	Program Pembangunan Pengelolaan Persampahan Persampahan Regional		4,45
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	50,13	53,84
6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase		
7	Program Pengembangan Permukiman	17,19	17,19
8	Program Penataan Bangunan Gedung	100	99,00
9	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	100	76,68
10	Program Penyelenggaraan Jalan	86,40	80,58
11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	90	77,38
12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	72,70	71,27
	Rata Rata Capaian Kinerja	73,24	79,81
13	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral		
1	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	100	97,53
2	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	100	99,37
3	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	99,99	99,89
4	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-
5	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	157,12	99,60
6	Program Pengembangan Ekspor	33,79	91,05
7	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	104,29	93,96
8	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	100	99,20
9	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	96,04	99,52
10	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	100	98,42
11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	96,73
	Rata Rata Capaian Kinerja	99,12	97,53
14	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		



NO	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	CAPAIAN KINERJA TW IV	REALISASI KEUANGAN TW IV
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91,67	94,40
2	Program Pengembangan Kebudayaan	93,32	98,69
3	Program Pembinaan Sejarah	92,35	98,97
4	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	74,24	59,22
5	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	65,50	89,02
6	Program Pemasaran Pariwisata	83,29	99,61
7	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	100	84,25
8	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	76,66	89,02
9	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	92,30	97,72
10	Program Pengelolaan Permuseuman	86,50	95,65
	Rata-rata Capaian Kinerja	85,58	90,65
15	Dinas Kelautan dan Perikanan		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98,00	98,35
2	Program Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	100	98,88
3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	100	98,67
4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	90,00	93,21
5	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	100	99,02
6	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	100	98,79
	Rata-rata Capaian Kinerja	98,08	97,46
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	96,00	96,00
2	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	100	84,28
3	Program Perlindungan Perempuan	100	87,62
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	100	68,00
5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	-	-
6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	100	98,45
7	Program Perlindungan Khusus Anak	100	73,34
8	Program Pengendalian Penduduk	100	99,61
9	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	100	100
10	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	100	97,88
	Rata Rata Capaian Kinerja	99,60	94,97
17	Dinas Kesehatan		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	98,90
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	97,07	92,66
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	93,17	94,54
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	100	96,98
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	99,57	99,29
	Rata Rata Capaian Kinerja	97,96	95,39
18	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	98,55
2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	99,75	99,99
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	100	100
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	95,00	99,87
5	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	100	98,99
6	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100	98,57
7	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	99,95	96,75
8	Program Penyuluhan Pertanian	94,20	99,86



NO	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	CAPAIAN KINERJA TW IV	REALISASI KEUANGAN TW IV
1	2	3	4
	Rata Rata Capaian Kinerja	98,61	97,85
19	Dinas Komunikasi dan Informatika		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93,00	93,86
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	97,00	97,20
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	98,00	98,26
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	99,00	98,43
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Keamanan Informasi	96,00	96,03
	Rata Rata Capaian Kinerja	96,60	95,47
20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	96,75
2	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)	100	96,28
3	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	100	98,70
	Rata Rata Capaian Kinerja	100	97,24
21	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92,35	96,12
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	92,50	97,33
3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	90,91	95,51
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	-	-
5	Program Pengendalian B3 dan Limbah B3	91,67	98,87
6	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPPLH)	93,94	94,67
8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	-	-
9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	92,50	99,84
10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	93,34	95,93
11	Program Pengelolaan Persampahan	94,11	95,22
12	Program Pengelolaan Hutan	91,79	84,11
13	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	89,75	76,48
14	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	90,72	94,94
15	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	-	-
	Rata Rata Capaian Kinerja	92,14	93,62
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	96,02	96,02
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	97,87	97,87
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	98,53	97,55
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	98,87	96,60
5	Program Pendaftaran Penduduk	96,36	95,90
6	Program Pencatatan Sipil	99,81	97,85
7	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	97,44	96,44
8	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	99,53	96,20
	Rata Rata Capaian Kinerja	98,05	96,80
23	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	91,65
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	100	79,60



NO	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	CAPAIAN KINERJA TW IV	REALISASI KEUANGAN TW IV
1	2	3	4
3	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	100	97,07
4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100	100
	Rata Rata Capaian Kinerja	100	92,08
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	95,90
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	75,00	94,05
3	Program Promosi Penanaman Modal	100	97,91
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	100	99,52
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100	99,08
6	Program Pengelolaan Data & Sistem Informasi Penanaman Modal	-	-
	Rata Rata Capaian Kinerja	95,00	96,14
25	Dinas Pendidikan		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94,31	92,82
2	Program Pengelolaan Pendidikan	74,35	65,63
3	Program Pendidik dan Tenaga Pendidik	86,25	85,90
	Rata Rata Capaian Kinerja	84,97	88,80
26	Dinas Perhubungan		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98,50	92,36
2	Program Pengelolaan Pelayaran	99,90	78,51
3	Program Pengelolaan Perkertaapian	99,90	98,65
4	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	94,50	87,91
	Rata Rata Capaian Kinerja	98,20	89,46
27	Dinas Perkebunan dan Peternakan		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	97,36
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	100	98,11
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100	98,32
4	Program Perizinan usaha pertanian	100	99,87
5	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	100	99,72
6	Program Penyuluhan Pertanian	100	61,82
7	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100	90,71
	Rata Rata Capaian Kinerja	100	96,18
28	Dinas Perpustakaan dan Arsip		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	95,60
2	Program Pembinaan Perpustakaan	72,12	98,29
3	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	100	95,59
4	Program Pengelolaan Arsip	100	98,12
5	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	100	97,77
	Rata Rata Capaian Kinerja	94,42	96,14
29	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	92,80
2	Program Pengembangan Perumahan	100	99,60



NO	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	CAPAIAN KINERJA TW IV	REALISASI KEUANGAN TW IV
1	2	3	4
3	Program Kawasan Permukiman	100	97,75
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	100	99,74
5	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100	96,02
6	Program Penatagunaan Tanah	-	-
	Rata Rata Capaian Kinerja	100	96,68
30	Dinas Sosial		
1	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	94,00	94,91
2	Program Penanganan Warga negara migran korban tindak kekerasan	82,00	80,76
3	Program Pemberdayaan sosial	63,00	62,90
4	Program Rehabilitasi Sosial	100	95,73
5	Program Perlindungan dan jaminan sosial	95,00	91,02
6	Program Penanganan Bencana	98,00	97,94
7	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	83,00	81,34
	Rata Rata Capaian Kinerja	95,00	94,95
31	Dinas Ketenagakerjaan		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95,17	95,17
2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	39,39	42,72
3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	93,42	99,22
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	61,98	69,63
5	Program Hubungan Industrial	98,29	98,34
6	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	98,29	76,10
7	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	27,12	88,94
	Rata Rata Capaian Kinerja	73,38	95,40
32	Satuan Polisi Pamong Praja		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99,00	91,60
2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	93,40
3	Program Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100	79,26
	Rata Rata Capaian Kinerja	99,67	88,09
33	UPTD. Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan		
1	Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah Pemerintah daerah	96,00	95,62
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	98,00	97,99
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	97,00	96,92
	Rata Rata Capaian Kinerja	97,00	96,84
34	UPTD. Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	98,22
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	95,74
	Rata Rata Capaian Kinerja	100	96,98



NO	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	CAPAIAN KINERJA TW IV	REALISASI KEUANGAN TW IV
1	2	3	4
	Total Rata-rata Kinerja Program & Realisasi Keuangan	95,07	88,83

Sumber . Bappelitbang Provsu, data diolah

Dari data persentase rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah tahun 2024 triwulan sebagaimana tersaji di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum terjadi peningkatan capaian kinerja sebesar 29,71 persen poin dari triwulan III yang tercatat sebesar 65,63 persen terhadap capaian kinerja pada triwulan IV yang tercatat sebesar 95,07 persen. Hal yang sama terjadi pada realisasi keuangan yang juga meningkat sebesar 24,17 persen dari triwulan III yang tercatat mencapai 64,66 persen menjadi 88,83 persen pada triwulan IV.

Sejalan dengan kondisi di atas, berikut disajikan peringkat persentase rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah tahun 2024 sampai dengan triwulan IV berdasarkan capaian kinerja tertinggi hingga terendah, sebagai berikut

Tabel 2.94 Peringkat Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah Tahun 2024 Triwulan IV

NO.	PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM TW.IV
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	100
2	Badan Pendapatan Daerah	100
3	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	100
4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	100
5	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	100
6	Dinas Perkebunan dan Peternakan	100
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100
8	UPTD. Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	100
9	Satuan Polisi Pamong Praja	99,67
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	99,60
11	Badan Kepegawaian	99,40
12	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	99,12
13	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	98,81
14	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	98,61
15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	98,58
16	Dinas Perhubungan	98,20
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	98,08



NO.	PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM TW.IV
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	98,05
19	Dinas Kesehatan	97,96
20	Inspektorat	97,38
21	UPTD. Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan	97,00
22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	96,74
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	96,60
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	95,00
25	Dinas Sosial	95,00
26	Dinas Perpustakaan dan Arsip	94,42
27	Sekretariat Daerah	93,43
28	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	92,14
29	Sekretariat DPRD	90,17
30	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	85,58
31	Dinas Pendidikan	84,97
32	Badan Penghubung Daerah Provinsi	81,11
33	Dinas Ketenagakerjaan	73,38
34	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	73,24
Total Rata-Rata		95,07

Sumber . Bappelitbang Provsu, data diolah

Berdasarkan tabel di atas, persentase rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar 95,07 persen dari 100 persen target pada masing-masing rencana kerja. Ada 10 perangkat daerah dengan capaian kinerja program sangat tinggi antara lain : Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, UPTD. Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem.

Kemudian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjadi perangkat daerah dengan realisasi kinerja program paling rendah sebesar 73,24 persen, diikuti oleh Dinas Ketenagakerjaan dengan realisasi sebesar 73,38 persen dan yang ketiga terendah realisasi kinerja program adalah Badan Penghubung Daerah Provinsi dengan realisasi sebesar 81,11 persen. Sedangkan untuk peringkat persentase rata-rata capaian realisasi keuangan perangkat daerah tahun 2024 triwulan IV berdasarkan capaian realisasi keuangan tertinggi hingga terendah, sebagai berikut:



Tabel 2.95 Peringkat Persentase Rata-rata Capaian Realisasi Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2024 Triwulan IV

NO.	PERANGKAT DAERAH	REALISASI KEUANGAN TW.IV
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	99,39
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	97,97
3	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	97,85
4	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	97,53
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	97,46
6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	97,24
7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	97,02
8	UPTD. Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	96,98
9	UPTD. Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan	96,84
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	96,80
11	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	96,76
12	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	96,68
13	Badan Kepegawaian	96,30
14	Dinas Perkebunan dan Peternakan	96,18
15	Dinas Perpustakaan dan Arsip	96,14
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	96,14
17	Sekretariat Daerah	95,64
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	95,47
19	Dinas Ketenagakerjaan	95,40
20	Dinas Kesehatan	95,39
21	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	94,97
22	Dinas Sosial	94,95
23	Badan Pendapatan Daerah	94,25
24	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	93,62
25	Inspektorat	93,10
26	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	92,08
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	90,65
28	Sekretariat DPRD	89,72
29	Dinas Perhubungan	89,46
30	Dinas Pendidikan	88,80
31	Satuan Polisi Pamong Praja	88,09



NO.	PERANGKAT DAERAH	REALISASI KEUANGAN TW.IV
32	Badan Keuangan dan Aset Daerah	82,06
33	Badan Penghubung Daerah Provinsi	80,97
34	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	79,81
Total Rata-Rata		88,83

Sumber : Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, data diolah

Persentase rata-rata capaian realisasi keuangan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar 88,83 persen dari 100 persen target pada masing-masing rencana kerja. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan realisasi keuangan mencapai 99,39 persen, diikuti oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan capaian persentase realisasi keuangan sebesar 97,97persen kemudian diikuti oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan realisasi keuangan tercatat sebesar 97,85 persen.

Selanjutnya, peringkat persentase rata-rata capaian realisasi keuangan perangkat daerah Tahun 2024 sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar 88,83 persen dari 100 persen target pada masing-masing rencana kerja. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan realisasi keuangan mencapai 79,81 persen, diikuti oleh Badan Penghubung Daerah Provinsi dengan capaian persentase realisasi keuangan sebesar 80,97 persen kemudian diikuti oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan realisasi keuangan tercatat sebesar 82,06 persen.

3. Capaian Kegiatan Strategis Daerah

Kegiatan Strategis Daerah (KSD) merupakan kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan berdasarkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024, dengan uraian capaian kinerja Program dan Keuangan yang dirangkum dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 2.96 Capaian Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 sampai dengan triwulan IV

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN & URAIAN KSD	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)	CAPAIAN OUTPUT (%)	KETERANGAN	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Prioritas Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	1.149.065.316.851	1.112.823.609.444			76,96	74,63		
1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah, Vokasi dan Khusus	26.205.908.000	9.971.252.000			39,85	22,00		
a	Pembangunan Ruang Kelas Baru	10.546.432.000	5.178.216.000	75	12	49,10	16,00		Dinas Pendidikan
b	Rehabilitasi Ruang Kelas	15.659.476.000	4.793.036.000	32	15	30,61	28,00		Dinas Pendidikan
2	Implementasi Teaching Factory Link and Match Vokasi dan Penguatan Pendidikan Universal berbasis kerja sama	999.999.025	320.400.025			32,04	100		
a	Menghadirkan mentor dari DUDI yang desuai dengan kebutuhan pasar untuk mengajar di SMK	999.999.025	320.400.025	1.000	7.000	32,04	100		Dinas Pendidikan
b	Guru yang dilatih untuk meningkatkan kemampuan mengajar								Dinas Pendidikan



NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN & URAIAN KSD	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)	CAPAIAN OUTPUT (%)	KETERANGAN	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	yang berorientasi bisnis di DUDI								
3	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak “EMAK” (Edukasi Perempuan dan Anak)	164.391.750	156.682.250			95,31	67,94		
a	Kelas Lembaga Perempuan mandiri berbudaya (KELAPA MUDA) yang terbentuk	44.381.000	39.431.000	3	3	88,85	100	Terlaksana	P3AKB
b	Pembekalan fasilitator Kelas Pemberdayaan Perempuan Mandiri Berbudaya (KELAPA MUDA)	13.500.000	13.500.000	5	4	100	80,00	Kabupaten Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah, dan Kota Padangsidimpua n	P3AKB
c							23,81		
	Pengembangan aplikasi Toko Online Perempuan (TOP) SUMUT	106.510.750	103.751.250	1	0	97,41	-	Tidak Terlaksana	P3AKB
	Sosialisasi Toko Online Perempuan (TOP) SUMUT			350	250		71,43		
	kebijakan daerah terkait Penyerapan pangsa pasar toko			1	0		-	Terlaksana	P3AKB



NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN & URAIAN KSD	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)	CAPAIAN OUTPUT (%)	KETERANGAN	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	online perempuan yang ditetapkan								
4	Pembangunan TITIK BACA	1.945.348.988	1.944.488.000			99,96	60,23		
a	Jumlah izin Pemakaian lokasi Titik baca diKabupaten/Kota	1.945.348.988	1.944.488.000	11	10	99,96	90,91	Medan 5, Deli Serdang 2, Nias 1, Tanjung Balai 1, P Siantar 1, Tebing Tinggi 1 dan Binjai 1, Padangsidimpua n 1, Karo 1, Nias Selatan 1	Perpustakaan dan Arsip
	Jumlah buku digital (E-Book)			20000	15000		75,00		
	Jumah Tugu QR titik baca			20	15		75,00		
b	Pengadaan banner (2024 tidak dianggarkan karena sudah teralisasi tahun 2023 sebanyak 52 banner)			120	52			tidak dilaksanakan	Perpustakaan dan Arsip
5	Pengembangan Sarana dan Prasarana serta pelayanan RS Haji Medan	44.777.974.122	37.851.788.775			84,53	75,00		
a	Jumlah Dokumen Masterplan, DED, Feasibility Study, Amdal untuk mendukung Gedung Tower 2	6.140.000.000		4	0		-	Tidak Terlaksana	Rumkit Haji
b	Renovasi Rumah Sakit/Poliklinik	37.690.396.352	36.933.398.645	1	1	97,99	100	Terlaksana	Rumkit Haji



NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN & URAIAN KSD	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)	CAPAIAN OUTPUT (%)	KETERANGAN	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
c	Tersedianya peralatan kesehatan penunjang pada gedung tower 1			1	1		100	Terlaksana	Rumkit Haji
d	Pelatihan Petugas kesehatan dan non kesehatan	947.577.770	918.390.130	50	50	96,92	100	Terlaksana	Rumkit Haji
6	Penyediaan makanan pendamping ASI (MP ASI) dengan kandungan pangan lokal melalui Penyediaan Makanan Pendamping ASI Balita (PELITA SUMUT) dengan catatan tanpa kandungan pangan lokal	7.813.695.848	5.136.448.950	12.500	22.236	65,74	177,89	Terlaksana	Dinas Kesehatan
7	Dukungan capaian Universal Health Coverage pada Kabupaten/Kota melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Batubara, Humbang Hasundutan dan Binjai	213.394.207.464	210.847.535.280	3	3	98,81	100	Terlaksana	Dinas Kesehatan
8	Peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	5.919.836.750	5.568.678.388	33	33	94,07	100	Terlaksana	Dinas Kesehatan



NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN & URAIAN KSD	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)	CAPAIAN OUTPUT (%)	KETERANGAN	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Paket informasi dan edukasi								
9	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Bergerak	5.723.218.388	5.568.678.388			97,30	15,15		
a	Pelayanan Kesehatan Mental Jiwa dan Mental Bergerak “Dr. Muhammad Ildrem Menyapa”, berupa Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan dengan MoU dengan Kab./Kota berdasarkan kajian rekam medis RSJ	154.540.000		1	0		-	Tidak Terlaksana	Rumkit Jiwa
b	ODGJ/ODMK yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis			80	0		-	Tidak Terlaksana	Rumkit Jiwa
c	Deteksi dini kesehatan jiwa dan mental			11	0		-	Tidak Terlaksana	Rumkit Jiwa
d	Bus Kesehatan Bergerak, melalui Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak)	5.568.678.388	5.568.678.388	33	20		60,61		Dinas Kesehatan
10	Sukses Penyelenggaraan PON	122.249.586.040	115.819.304.327			94,74	93,75		



NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN & URAIAN KSD	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)	CAPAIAN OUTPUT (%)	KETERANGAN	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	XXI Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Utara dan Peningkatan Prestasi Sumut Juara								
a	Pemberian hibah kepada Panitia Besar PON XXI	BKAD	BKAD	618,29 Milyar	618,29 Milyar	100	100	Terlaksana	Dispora
b	Pemberian hibah kepada KONI			90 Milyar	90 Milyar	100	100	Terlaksana	Dispora
c	Target Peringkat 3 PON XXI tahun 2024	14.620.025.123	11.888.023.200	3	4	81,31	75,00	Tidak Tercapai	Dispora
	Meningkatkan Atlet Berprestasi Provinsi	107.629.560.917	103.931.281.127	1181	1181	96,56	100	Terlaksana	Dispora
				120	120			Terlaksana	Dispora
1 1	Sukses Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada yang damai berdasarkan demokrasi Pancasila dengan meminimalisir konflik sosial di masyarakat terkait PEMILU dan PEMILUKADA	713.993.868.426	713.871.769.045			99,98	92		
a	Penyelenggaraan PEMILU dan PEMILUKADA yang berdasarkan demokrasi Pancasila	1.279.188.847	1.264.099.680	1	1	98,82	100	Keputusan Gubernur Nomor 188.44/488/KPT S/2023 tanggal 26 Juni 2023	Bakesbangpol



NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN & URAIAN KSD	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)	CAPAIAN OUTPUT (%)	KETERANGAN	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dengan indikator 1 dokumen keputusan gubernur tentang tim pemantauan perkembangan politik di Provinsi Sumatera Utara dengan terbitnya							tentang Tim Pemantauan Perkembangan Politik Provsu	
b	Penguatan koordinasi dan sinergitas antara Forkopimda tokoh masyarakat, partai politik, DPD untuk suksesnya PEMILU dan PEMILUKADA	1.279.188.847	1.264.099.680	300	500	98,82	100	Terlaksana	Bakesbangpol
c	Penyelenggaraan PEMILU dan PEMILUKADA yang damai dengan meminimalisir konflik sosial di masyarakat	710.666.996.332	710.617.870.432	5000	2300	99,99	46,00	Hibah yang diberikan kepada KPU, BAWASLU, TNI dan POLRI dengan total hibah sebesar Rp.676.342.429.532,-	Bakesbangpol
d	Lembaga yang menerima dana hibah untuk penyelenggaraan PEMILU dan PEMILUKADA			2	4		100	Terlaksana	Bakesbangpol
e	Edukasi Pemahaman Wawasan			1000	1000		100	Terlaksana	Bakesbangpol



NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN & URAIAN KSD	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)	CAPAIAN OUTPUT (%)	KETERANGAN	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kebangsaan, Revolusi Mental dan Nilai-nilai Demokrasi								
f	Sosialisasi terkait nilai Pancasila dan UUD 1945	524.396.000	493.326.965	1000	1000	94,08	100	Terlaksana	Bakesbangpol
g	Gotong royong berdasarkan Pancasila	244.098.400	232.372.288	400	800	95,20	100	Terlaksana	Bakesbangpol
1 2	Optimalisasi dan Pengembangan Kampung Bersinar (Bersih Narkoba)	5.877.282.050	5.766.584.016			98,12	65,94		
a	Kelurahan/ desa kawasan rawan narkoba katagori Bahaya yang diturunkan			245	271		100	Terlaksana	Bakesbangpol
b	Relawan anti narkoba melalui aplikasi SIAP BERSINAR			4500	4230		94,00	Terlaksana	Bakesbangpol
c	Lembaga yang menerima hibah dalam rangka pencegahan dan pemberantasan narkoba			2	1		50,00	Lembaga yang menerima hibah dalam rangka pencegahan dan pemberantasan narkoba dengan realisasi 1 lembaga yaitu BNNP Sumut	Bakesbangpol



NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN & URAIAN KSD	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)	CAPAIAN OUTPUT (%)	KETERANGAN	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
d	Orang mendapatkan dana rehabilitasi narkoba bagi masyarakat yang tidak mampu			481	95		19,75		
II	Prioritas Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	43.866.182.342	23.889.518.874			63,55	50,84		
1	Pemberdayaan dan Peningkatan Produktivitas Masyarakat Miskin (MAPRO)	1.513.818.312	1.386.055.500			91,42	67,65		
a	Pemberdayaan MAPRO pada 6 kabupaten/kota yaitu Kab. Samosir, Taput, Padanglawas, Batubara, Tanjungbalai dan Labuhanbatu Selatan	714.268.562	634.887.000	428 (85 KUBE)	150 (30 KUBE)	88,89	35,29	Terlaksana	Dinas Sosial
b	Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	799.549.750	751.168.500	200 KK	200 KK	93,95	100	Terlaksana	Dinas Sosial
2	Pembangunan North Sumatra Skill Development Center (NS-SDC)	0	0			-	-		
a	Dokumen Penlok dan 1 studi kelayakan			1	0		-	Tidak Terlaksana	Dinas Ketenagakerjaan



NO.		PRIORITAS PEMBANGUNAN & URAIAN KSD	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)	CAPAIAN OUTPUT (%)	KETERANGAN	OPD PELAKSANA
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	b	Dokumen Studi kelayakan			1	0		-	Tidak Terlaksana	Dinas Ketenagakerjaan
	3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja dan penguatan fasilitasi Kerjasama dengan DUDI pelatihan tematik tenaga kerja serta pemagangan tenaga kerja ke luar negeri	4.571.082.641	3.132.620.176			69	48,27		
	a	Pemeliharaan rutin/berkala gedung UPTD BLK			1	0		-	Tidak Terlaksana	Dinas Ketenagakerjaan
	b	Fasilitasi Kerjasama DUDI dengan tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	2.559.739.761	2.549.621.504	660	304	99,60	46,06	Terlaksana	Dinas Ketenagakerjaan
		Pemagangan dalam negeri	0	0	502	289	0,00	57,57	Terlaksana	Dinas Ketenagakerjaan
		Pemagangan luar negeri	384.999.868,00	378.154.543	403	408	98,22	100	Terlaksana	Dinas Ketenagakerjaan
		Tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	0	0	625	0	0,00	-	Tidak Terlaksana	Dinas Ketenagakerjaan



NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN & URAIAN KSD	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)	CAPAIAN OUTPUT (%)	KETERANGAN	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
c	Pengembangan SISFO ketenagakerjaan terintegrasi dengan pencari pekerja yang terdaftar dalam Karirhub	7.834.000	5.732.629	20.000	12.417	73,18	62,09	Terlaksana	Dinas Ketenagakerjaan
d	Pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui JobFair	229.825.000	199.111.500	3.500	2.527	86,64	72,20	Terlaksana	Dinas Ketenagakerjaan
4	Fasilitasi standarisasi dan Peningkatan pendapatan 1000 (seribu) UMKM dan IKM melalui digitalisasi pemasaran	992.173.684	704.721.751			71,03	44,64		
a	Standarisasi produk yang memiliki standar melalui sertifikasi			700	0		-	Tidak Terlaksana	Dinas Kop & UKM
b	UMKM yang meningkat Pendapatannya (Inkubator)	411.625.900	300.160.601	200	25	72,92	12,50	Terlaksana	Dinas Kop & UKM
c	Peningkatan pendapatan IKM melalui fasilitasi standarisasi,	580.547.784	404.561.150	50	50	69,69	100	Terlaksana	Disperindag & ESDM
d	Sertifikasi merek IKM			50	50		100	Terlaksana	Disperindag & ESDM



NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN & URAIAN KSD	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)	CAPAIAN OUTPUT (%)	KETERANGAN	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
e	IKM izin edar BPOM			5	0		-	Tidak Terlaksana	Disperindag & ESDM
f	Bimtek literasi digital IKM			50	0		-	Tidak Terlaksana	Disperindag & ESDM
g	Pemantauan Monev IKM			110	110		100	Terlaksana	Disperindag & ESDM
5	Pengembangan Sistem Pertanian Terintegrasi dalam rangka peningkatan produktifitas hasil pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani	20.738.565.000	10.012.307.500			53,14	76,40		
a	Bantuan Benih Padi	2.550.925.000	2.550.925.000	13.000	9.832	100	75,63	Terlaksana	Dinas TPH
	Bantuan Benih Jagung	5.194.800.000	3.898.200.000	13.000	6.536	75	50,28	Terlaksana	Dinas TPH
b	Bantuan Saprodi Bawang Merah	9.501.820.000	3.563.182.500	120	279	38	233	Terlaksana	Dinas TPH
	Bantuan Saprodi Cabe Merah	3.491.020.000		150	213	-	100	Terlaksana	Dinas TPH
c	Kelompok ternak kabupaten/ kota yang diintegrasikan dengan tanaman pangan dan hortikultura			2	0		-	Tidak Terlaksana	Dinas Bunak
f	Kelompok ternak kabupaten/ kota yang diintegrasikan dengan tanaman perkebunan			2	0		-	Tidak Terlaksana	Dinas Bunak



NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN & URAIAN KSD	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)	CAPAIAN OUTPUT (%)	KETERANGAN	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Pembentukan Petani Muda Milenial (PMM), Cetak sawah baru dan Peningkatan mekanisme pertanian	9.064.388.050	2.403.844.850			43,18	62		
a	Pembentukan/penge- mbangan petani muda dengan umur 19-39 tahun Sektor TPH	300.000.000	75.000.000	300	250	25	83,33	Terlaksana	Dinas TPH
	Pembentukan PMM Sektor Perkebunan dan peternakan	189.388.050	185.094.850	45	45	97,73	100	Terlaksana	Dinas Bunak
b	Bantuan Benih Padi bagi lahan sawah yang tidak optimal	3.575.000.000	893.750.000	250	1.700	25	100	Terlaksana	Dinas TPH
c	Peningkatan penggunaan peralatan dan mesin pertanian	5.000.000.000	1.250.000.000	675	611	25	90,52	Terlaksana	Dinas TPH
d	Alat mesin pertanian sektor perkebunan			372	-		-	Tidak Terlaksana	Dinas Bunak
e	Alat mesin pertanian sektor peternakan			18	-		-	Tidak Terlaksana	Dinas TPH
7	Travel Fair Dalam dan Luar Negeri serta peningkatan kualitas dan jangkauan Digitalisasi Promosi Pariwisata melalui Penguatan Promosi Melalui Media Cetak,	2.437.233.555	2.417.226.220			99,18	75		



NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN & URAIAN KSD	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)	CAPAIAN OUTPUT (%)	KETERANGAN	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri								
a	Pelaksanaan Event (Travel Fair dalam dan Luar Negeri)	917.100.000	905.827.500	4	2	98,77	50,00	Terlaksana	Dinas Parwis & Ekraf
b	Digitalisasi Promosi Pariwisata	1.520.133.555	1.511.398.720	1	3	99,43	100	Terlaksana	Dinas Parwis & Ekraf
8	Pelaksanaan Event Internasional Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif dan peningkatan Calender of Event	2.298.059.100	2.014.637.696	2	2	87,67	100		Dinas Parwis & Ekraf
	Pelaksanaan Event Internasional melalui Pesta Danau Toba, Triathlon, Traditional Music Festival, Arung Jeram, Festival Paralayang serta Nias Pro	145.623.000	141.656.600	1	1	97,28	100	Terlaksana	Dinas Parwis & Ekraf
	Pengembangan Pola Kunjungan Wisata Terintegrasi (Bukit Lawang-Tangkahan, Danau Toba, Kepulauan Nias dan Tabagsel) dan	90.000.000	89.577.000	1	1	99,53	100	Terlaksana	Dinas Parwis & Ekraf



NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN & URAIAN KSD	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)	CAPAIAN OUTPUT (%)	KETERANGAN	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan Kualitas Calender of Event								
	Dukungan Event F1H20 dan Event Internasional Lainnya serta Event Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada 33 Kab/Kota	2.062.436.100	1.783.404.096	5	5	86,47	100	Terlaksana	Dinas Parwis & Ekraf
9	Dukungan Pengembangan UNESCO Global Geopark Caldera Toba	1.926.848.500	1.724.800.141			89,51	60,00		
a	Pengembangan Desa Wisata melalui Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengeolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1.926.848.500	1.724.800.141	10	2	89,51	20,00	Terlaksana	Dinas Parwis & Ekraf
b	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi			4	4		100	Terlaksana	Dinas Parwis & Ekraf
1 0	Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah & Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif	226.223.500	0			0	-		



NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN & URAIAN KSD	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)	CAPAIAN OUTPUT (%)	KETERANGAN	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a	Pembuatan Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah			1			-		Dinas Parwis & Ekraf
b	Pembuatan Dokumen Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif	226.223.500		1	1		-	Tidak Terealisasi (proses)	Dinas Parwis & Ekraf
1 1	Penyelenggaraan North Sumatera Utara Business Forum & Business Matching dan Pameran Agro Industri Nasional dengan target Pembuatan Letter of Intent (LoI) dengan PT. KINRA (BUP KEK SEI MANGKEI)	97.790.000	93.305.040	4	1	95,41	25,00	Terlaksana	DPMPTSP
III	Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	963.749.678.226	733.196.419.021			71,17	62,29		
1	Penanganan Ruas Jalan dan Jembatan di Kawasan Strategis Provinsi	742.538.103.481	598.337.203.785	86,19	72,75	80,58	84,41	Terlaksana	Dinas PUPR
2	Peningkatan Kualitas Sistem Jaringan Irigasi melalui peningkatan luas	118.080.353.381	81.099.450.207	55	54,28	68,68	97,82	Terlaksana	Dinas PUPR



NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN & URAIAN KSD	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)	CAPAIAN OUTPUT (%)	KETERANGAN	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	layanan fungsional daerah irigasi yang terlayani dan optimalnya fungsi kelembagaan pengelolaan irigasi								
3	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh dan Banjir Permukiman	29.877.968.125	29.360.062.864			98,27	68,11	Terlaksana	
a	Pengurangan Luas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di bawah 15 Ha	1.599.305.325	1.167.102.177			72,70	60,00		
1)	Pengurangan Luas Permukiman Kumuh	468.008.000	239.690.818	23	33	51,22	100	Terlaksana	Dinas PKP
2)	Rumah tangga yang terfasilitasi peningkatan kesadaran dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni			500	0		-	Tidak Terlaksana	Dinas PKP
3)	Kelompok masyarakat di permukiman kumuh yang dibina			9	0		-	Tidak Terlaksana	Dinas PKP
4)	Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Kawasan permukiman	882.097.325	712.911.359	23	23	80,82	100	Terlaksana	Dinas PKP
5)	Ssistem informasi bidang PKP yang	249.200.000	214.500.000	18	18	86,08	100	Terlaksana	Dinas PKP



NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN & URAIAN KSD	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)	CAPAIAN OUTPUT (%)	KETERANGAN	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	terbangun/yang terpelihara								
b	Pengurangan banjir permukiman melalui Penataan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di bawah 15	28.278.662.800	28.192.960.687			99,24	76,22		
1)	Laporan Pengurangan banjir permukiman melalui Penataan Permukiman Kumuh	2.156.462.800	2.096.381.302	14	14	97,21	100	Terlaksana	Dinas PKP
2)	Pengurangan banjir permukiman melalui Penataan Permukiman Kumuh: Laporan Pemugaran Permukiman			5	0		-	Tidak Terlaksana	Dinas PKP
3)	Peremajaan Pemukiman	1.394.400.000	1.394.020.140	12	12	99,97	100	Terlaksana	Dinas PKP
4)	Pembangunan Pemugaran Permukiman Kumuh	11.437.800.000	11.412.559.245	147	136	99,78	92,52	Terlaksana	Dinas PKP
5)	Perbaikan RTLH	13.290.000.000	13.290.000.000	500	443	100	88,60	Terlaksana	Dinas PKP
4	Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Persampahan Regional Medan - Deli Serdang	16.826.704.250	748.082.139			4,45	-		



NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN & URAIAN KSD	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)	CAPAIAN OUTPUT (%)	KETERANGAN	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a	Dokumen Nota Kesepakatan antara Kabupaten Deli Serdang dengan Kota Medan dengan realisasi terbitnya MoU Antara Kabupaten Deli Serdang dengan Kota Medan	751.597.300	733.123.139	1		97,54	30,00		Dinas PUPR
b	Keputusan Gubernur untuk Tim Pembebasan Lahan Pembangunan TPA dengan realisasi terbitnya SK Gubsu			1			-		Dinas PUPR
c	Luas Lahan Pembangunan TPA	16.075.106.950	14.959.000	50		0,09	-		
5	Pembangunan Waduk/Embung Idano Mola di Kepulauan Nias dengan target 1 dokumen Rencana Teknis Konstruksi Bendungan, Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	3.100.000.000	940.869.300			30,35	100		Dinas PUPR
	Penyusunan Detail Desain	3.100.000.000	940.869.300	1		30,35	100		



NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN & URAIAN KSD	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)	CAPAIAN OUTPUT (%)	KETERANGAN	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Pengembangan SPAM Mebidang (Medan-Binjai-Deli Serdang) dan Pembangunan SPAM Seriti (Serdang Bedagai dan Tebing Tinggi)	13.563.053.000	2.330.872.236			17,19	95,72		
a	Konstruksi fisik SPAM Mebidang untuk distribusi air 584 L/detik	60.953.801.400	58.604.435.956	584	534	96,15	91,44	Tahap Penyelesaian	Dinas PUPR
b	Pengadaan Lahan SPAM Seriti dan Pengadaan Lahan Pengembangan SPAM Seriti						-		Dinas PUPR
	Pengadaan Lahan SPAM Seriti	2.600.000.000	2.330.872.236	1	1	89,65	100		Dinas PUPR
	Pengadaan Lahan Pengembangan SPAM Seriti	10.963.053.000		2,3					Dinas PUPR
7	Penataan Sungai Perkotaan yang Bersih dan Indah	4.405.902.700	2.637.137.771			59,85	16,67		
a	Penyusunan Dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Proivnsi	4.405.902.700	2.637.137.771	1	6	59,85	-		Dinas PUPR
b	Penyusunan Dokumen jumlah			2			-		Dinas PUPR



NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN & URAIAN KSD	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)	CAPAIAN OUTPUT (%)	KETERANGAN	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rencana Teknis Penataan Sungai Perkotaan yang bersih dan indah								
	Desain Rencana Teknis Penataan Sungai Perkotaan	1.000.000.000	935.066.288	2	1		50,00		
8	Penyediaan Sambungan Listrik bagi Keluarga Kurang Mampu	6.092.000.000	6.091.750.000	3.625	2.500	100	68,97	Terlaksana	Disperindag & ESDM
9	Pembangunan PLTS Terpusat dalam rangka Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Pariwisata	5.417.933.300	5.334.857.463	3	2	98,47	66,67	Terlaksana	Disperindag & ESDM
1 0	Pembangunan Satu Data Digital Daerah	225.416.700	167.429.900			74,28	80,73		
a	Pengumpulan data	166.043.350	108.705.450	1.000	627	65,47	62,70	Terlaksana	Dinas Kominfo
b	Sosialisasi/diklat Penyelenggaraan statistik sektoral dan pembangunan Satu Data Sumatera Utara			43	42		97,67	Terlaksana	Dinas Kominfo
		46.624.450	46.624.450	86	84	100	100		
c	Penyusunan metadata dan standar data	12.748.900	12.100.000	1.000	433	94,91	43,30	Terlaksana	Dinas Kominfo
d	Pengembangan portal satu data (SADA INA)			1	1		100	Terlaksana	Dinas Kominfo



NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN & URAIAN KSD	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)	CAPAIAN OUTPUT (%)	KETERANGAN	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SUMUT TANGGUH BENCANA	1.416.653.150	1.357.720.825			95,84	23,94		
a	Pelaksanaan Sosialisasi Kebencanaan			1.000	200		20,00	Terlaksana	BPBD
b	Fasilitasi Desa Tangguh Bencana Melalui Penyediaan Tenaga Fasilitator/ Penyuluh Kebencanaan			54	0		-	Tidak Terlaksana	BPBD
c	Pengadaan Mobil Edukasi Tangguh Bencana			1	0		-	Tidak Terlaksana	BPBD
d	Dukungan peralatan dan logistik ke kab/kota	1.416.653.150	1.357.720.825	33	25	95,84	75,76	Terlaksana	BPBD
1	Penurunan Emisi Gas	22.205.590.139	4.790.982.531	28,61	25,5	21,58	89,13	Terlaksana	Bappelitbang
2	Rumah Kaca, Gagasan “SUMUT HIJAU”								
IV	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang Berkualitas dan Inovatif	13.487.683.914	12.656.579.687			78,47	72,31		
1	Mempertahankan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	11.213.093.114	10.385.070.997	WTP	WTP	92,62	100	Berdasarkan hasil Audit BPK pada Juni 2024	Inspektorat



NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN & URAIAN KSD	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)	CAPAIAN OUTPUT (%)	KETERANGAN	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	598.334.000	763.853.639	100	180	127,66	100	tidak ada di buku KSD tapi ada di DPA OPD	Inspektorat
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	19.104.000	19.104.000	150	50	100	33,33		Inspektorat
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemda)	921.026.000	880.193.850	50	70	95,57	100		Inspektorat
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.818.698.550	1.680.050.547					tidak ada di buku KSD tapi ada di DPA OPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	4.109.407.350	3.955.225.067						
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.271.327.598	1.137.092.131					tidak ada di buku KSD tapi ada di DPA OPD	
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	1.605.940.300	1.457.308.864						
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	689.555.316	400.392.899					tidak ada di buku KSD tapi ada di DPA OPD	



NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN & URAIAN KSD	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)	CAPAIAN OUTPUT (%)	KETERANGAN	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	179.700.000	91.850.000						
2	Peningkatan Reformasi Birokrasi Provinsi Sumatera Utara melalui klinik RB	221.759.800	221.759.800	70	68,93	100	98,47		Biro Organisasi
a	Tersusunnya kerangka logis RB Tematik yaitu : penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, peningkatan penanganan produk dalam negeri, dan pengendalian inflasi	74.480.700	74.480.700	5				Terlaksana	Biro Organisasi
b	Tersusunnya Renaksi 20 kegiatan utama RB General dan RB Tematik	147.279.100	147.279.100	1				Terlaksana	Biro Organisasi
c	Tersusunnya Road Map RB Pemprovsu Tahun 2026-2030			1				Tidak Terlaksana	Biro Organisasi



NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN & URAIAN KSD	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)	CAPAIAN OUTPUT (%)	KETERANGAN	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Peningkatan Kualifikasi Pendidikan SDM Aparatur Negara/ASN	964.802.000	963.436.800			99,87	63,10		
a	Pemberian beasiswa S3 ASN (BEASISWA ASN PINTAR)	514.802.000	513.436.800	15	15	99,73	100	Terlaksana	BAPEG
b	Pelatihan ASN didalam negeri kepada ASN	450.000.000	450.000.000	280	250	100	89,29	Terlaksana	BPSDM
c	MoU dengan negara tujuan untuk pelaksanaan pelatihan ASN di luar negeri			2			-	Tidak dilaksanakan	BAPEG
4	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah melalui Planning and Innovation Corner (PIC), Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah	1.088.029.000	1.086.312.090			100	100		
a	Planning and Innovation Corner (PIC), dengan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	295.968.000	295.578.152	34	34	99,87	100	Terlaksana	Bappelitbang



NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN & URAIAN KSD	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)	CAPAIAN OUTPUT (%)	KETERANGAN	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	295.968.000	295.578.152	33	33	99,87	100	Terlaksana	Bappelitbang
b	Pelaksanaan Event “North Sumatera Innovation and Achievement Summit” melalui pelaksanaan rapat Forum CSR, Coaching Clinic Indeks Inovasi Daerah dan Lomba Inovasi Daerah	496.093.000	495.155.786	33	33	99,81	100	Terlaksana	Bappelitbang
5	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui Sistem pelayanan perkantoran terpadu melalui dukungan pembangunan/ perluasan kantor Gubernur Sumatera Utara			1		0	-	Tidak Terlaksana	Dinas PUPR
	TOTAL CAPAIAN KSD PADA 4 PRIORITAS PEMBANGUNAN	2.170.168.861.333	1.882.566.127.026	-	-	73	65		



Pemerintah Daerah Sumatera Utara menetapkan empat prioritas pembangunan yang diterjemahkan ke dalam 40 Kegiatan Strategis Daerah (KSD) untuk mencapai sasaran pembangunan yang terukur dan efektif. Keempat prioritas pembangunan ini mencakup bidang-bidang penting yang menjadi fokus utama pemerintah, seperti peningkatan infrastruktur, penguatan ekonomi lokal, kualitas pelayanan publik, dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. KSD ini kemudian dirancang dalam rencana kerja tahunan yang terstruktur, meliputi program, kegiatan, dan sub-kegiatan prioritas. Dengan pendekatan ini, pemerintah memastikan bahwa setiap langkah strategis diarahkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan memenuhi target pembangunan yang telah ditetapkan.

Selain itu, perangkat daerah memiliki peran penting dalam melaksanakan program dan kegiatan strategis ini, disesuaikan dengan tugas, fungsi, dan kinerja masing-masing instansi. Setiap perangkat daerah bertanggung jawab untuk menerjemahkan prioritas pembangunan ke dalam aksi nyata yang relevan dengan bidang tugasnya, sehingga tercipta sinergi antar sektor dalam mewujudkan visi pembangunan Provinsi Sumatera Utara. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas dan fokus pada program prioritas, pemerintah daerah mampu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai hasil pembangunan yang maksimal dan berkelanjutan.

Anggaran Kegiatan Strategis Daerah (KSD) pada APBD Perubahan 2024 sebesar Rp.2.170.168.861.333,- Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp.1.882.566.127.026,- dengan capaian keuangan sebesar 73% sedangkan capaian program sebesar 65%. Berikut rincian KSD berdasarkan prioritas sebagai berikut :

1. Prioritas Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan 12 kegiatan/subkegiatan, capaian program sebesar 74,63% dan capaian keuangan 76,96%
2. Prioritas Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dengan 11 kegiatan/Subkegiatan, capaian program sebesar 50,84% dan capaian keuangan 63,55%
3. Prioritas Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan dengan 12 kegiatan/Subkegiatan, capaian program sebesar 62,29% dan capaian keuangan 71,17%
4. Prioritas Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang Berkualitas dan Inovatif dengan 5 kegiatan/Subkegiatan, capaian program sebesar 72,31% dan capaian keuangan 78,47%.



2.3. Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis Daerah

2.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan meliputi permasalahan pembangunan daerah makro yang akan diintervensi melalui *cross cutting strategy* dengan mendasarkan pada hasil analisis gambaran aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek daya saing, serta permasalahan urusan penyelenggaraan pemerintahan Sumatera Utara dan mendasarkan gambaran aspek pelayanan umum. Berdasarkan hasil Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2024 maka permasalahan yang perlu untuk diselesaikan pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan Kondisi Geografi

a. Kondisi topografi

Wilayah Sumatera Utara khususnya di kawasan Pantai Barat dan Kepulauan Nias sangat berbukit dan bergelombang dengan kondisi struktur tanah yang tidak stabil mengakibatkan tingginya biaya pembangunan infrastruktur;

b. Kawasan rawan bencana alam

Sebagian besar wilayah termasuk ke dalam kawasan rawan bencana alam (banjir, tsunami, abrasi, longsor, kebakaran hutan, angin puting beliung, letusan gunung berapi, gempa tektonik dan vulkanik dan lain-lain), sehingga menimbulkan limitasi pengembangan wilayah dan mitigasi bencana;

c. Konflik pemanfaatan ruang

Adanya konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang antara fungsi lindung dan budidaya (pertambangan, energi, infrastruktur, dan lain-lain) yang berpotensi menimbulkan terjadinya konflik sosial, ekonomi, lingkungan hidup, pertanahan dan pemerintahan.

2. Permasalahan Kondisi Demografi

a. Pertumbuhan penduduk yang pesat

Masih cukup tingginya angka pertumbuhan penduduk dan adanya kecenderungan peningkatan pertumbuhan selama periode 2025-2029 terutama di wilayah pantai timur dan kota besar seperti Kota Medan;

b. Ketimpangan distribusi penduduk

Ketimpangan distribusi penduduk yang mengakibatkan kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, budaya, ekonomi, infrastruktur dan birokrasi yang cenderung lebih berkembang di daerah yang padat/perkotaan;

c. Tingginya migrasi penduduk



Migrasi penduduk mengakibatkan banyak migrasi keluar yang besar dilakukan oleh usia produktif. Sementara Angka Ketergantungan Sumatera Utara masih sebesar 45.6 persen (2022) artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 45-46 jiwa penduduk usia tidak produktif;

d. Keterbatasan dalam memanfaatkan potensi bonus demografi

Angka usia produktif terus bertambah. Sementara penyediaan lapangan kerja bagi mereka yang memasuki masa produktif tidak *balance* (seimbang). Kalau ini terus terjadi, kesenjangan ekonomi, kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan akan semakin sulit.

3. Permasalahan Kesejahteraan Ekonomi

a. Belum Optimalnya Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat pengangguran Provinsi Sumatera Utara menunjukkan penurunan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yang dapat dilihat dari persentase tingkat pengangguran terbuka Tahun 2020 sebesar 6,91% dan menurun menjadi 5,60% pada Tahun 2024, namun kondisi ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan nasional yang tercatat sebesar 4,91% pada Tahun 2024. Tingginya tingkat pengangguran sangat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja menunjukkan besaran kontribusi tenaga kerja dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan ekonomi. Tingkat Produktivitas tenaga kerja Sumatera Utara pada Tahun 2023 sebesar Rp 79,77 juta/tenaga kerja, kondisi ini lebih rendah dibandingkan dengan nasional yang tercatat sebesar Rp 87,96 juta/tenaga kerja. Tingkat pengangguran yang tinggi dan produktivitas tenaga kerja yang rendah didorong oleh beberapa permasalahan antara lain rendahnya *human Capital* (pendidikan dan kesehatan), penguasaan teknologi yang kurang, inovasi yang terbatas, kondisi budaya dan etos kerja yang masih minim, dan infrastruktur yang tidak merata.

b. Belum Optimalnya Daya Saing Perekonomian Sumatera Utara

Daya Saing Perekonomian Sumatera Utara yang belum optimal dapat dilihat dari:

- 1) Sektor industri pengolahan berbasis produk unggulan daerah yang belum berkembang secara maksimal, hal ini dapat dilihat dari stagnannya kontribusi industri pengolahan di Sumatera Utara meskipun kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta perdagangan terus meningkat. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya hilirisasi industri sektor riil (pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan), serta tingginya biaya produksi antara lain bahan baku, bahan bakar, tenaga listrik dan gas, barang



lainnya (di luar bahan baku/penolong) serta sewa gedung, mesin dan alat-alat

- 2) Daya saing ekonomi kreatif yang masih rendah. Perkembangan ekonomi kreatif di Sumatera Utara belum mencapai tingkat kemajuan yang ideal, sektor ini juga memiliki potensi untuk meningkatkan ekonomi lokal. Kualitas sumber daya manusia yang belum optimal, kurangnya promosi dan pemasaran produk ekonomi kreatif, kelembagaan dan jaringan ekonomi kreatif yang belum maksimal, sistem pembiayaan yang belum memadai, dan kekurangan infrastruktur fisik dan nonfisik yang cukup. Selain itu, peraturan ekonomi kreatif, penghargaan masyarakat terhadap kreativitas, perlindungan hak kekayaan intelektual, jejaring kreatif, pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam dan warisan budaya lokal, dan standarisasi produk juga perlu ditingkatkan. Salah satu faktornya disebabkan oleh rendahnya pertumbuhan UMKM dan IKM baru, dan kualitas produk IKM dan UMKM juga masih tertinggal khususnya dalam hal pemenuhan standarisasi dan sertifikasi yang bersifat wajib seperti Izin Edar BPOM, PIRT, Halal, Batas Maksimal Residu Pestisida dan Batas Kontaminasi (melalui Sertifikasi Analisis atau COA) maupun standarisasi dan sertifikasi yang bersifat umum seperti *Good Agricultural Practices* (GAP), *Good Manufacturing Practices* (GMP), *Hazard Analysis and Critical Control Points* (HACCP), Standar Nasional Indonesia (SNI), ISO tertentu, serta terkait HKI (Hak Kekayaan Intelektual) seperti Merek dan Paten. Selain itu juga dalam pemenuhan standarisasi dan sertifikasi yang bersifat khusus seperti Organik, *Eco-friendly*, *Fair Trade*, atau *Vegan* masih sangat terbatas.
- 3) Daya saing sektor pariwisata yang rendah. Sektor pariwisata di Sumatera Utara menjadi salah satu penyokong perekonomian daerah dan berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah serta menyediakan lapangan pekerjaan dan pemberdayaan masyarakat melalui usaha kecil dan menengah. Namun, kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah dan PDRB belum optimal. Meskipun memiliki Kawasan Danau Toba yang telah ditetapkan sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas sekaligus bagian dari *UNESCO Global Geopark*. Rendahnya daya saing sektor Pariwisata ditunjukkan melalui kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir dan masih berada pada nilai yang cukup rendah, yaitu di bawah 2,3%. Hal ini disebabkan antara lain: (i) masih terbatasnya aksesibilitas, amenitas, atraksi, aktivitas, *ancillary* dan *available packages* di destinasi wisata; (ii) masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM pariwisata serta kemitraan dalam pengembangan destinasi wisata, desa wisata dan usaha wisata; dan (iii) belum optimalnya penerapan pariwisata berkelanjutan di destinasi wisata, desa wisata dan usaha wisata. Selain itu, disrupsi dan perubahan



preferensi pasar disebabkan oleh digitalisasi, teknologi, dan bencana. Karena transformasi digital yang tidak merata dan kurangnya dukungan dan kebijakan yang memadai, potensi ekonomi kreatif belum dimanfaatkan dengan baik. Serta, belum ada ekosistem yang mendukung komersialisasinya, kurangnya inovasi dan pengembangan produk, *marketing digital*, serta kurangnya *branding* dan investasi infrastruktur pariwisata sehingga terbatasnya akses ke pasar global.

- 4) Rendahnya investasi pada sektor riil seperti industri pengolahan (agroindustri), industri kemaritiman, industri makanan, dan industri manufaktur. Kondisi ini dapat dilihat dari lambatnya perkembangan investasi pada KEK Sei Mangkei, Kawasan Industri Kuala Tanjung, KIM Medan dan DPSP Danau Toba serta Kawasan Strategis Ekonomi lainnya.
 - 5) Efisiensi produksi sektor pertanian di Sumatera Utara masih rendah karena praktik budidaya konvensional tetap dominan. Banyak petani mengandalkan pemantauan lahan dan penyemprotan tanaman secara manual, sehingga produktivitas belum mencapai tingkat optimal. Kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan akses, literasi, dan adopsi terhadap teknologi pertanian modern; peralatan tradisional masih menjadi pilihan utama di tingkat usaha tani. Dari sisi kelembagaan, komposisi kelompok tani memperlihatkan bahwa sebagian besar masih berada pada tahap pemula, sementara hanya sebagian kecil yang telah mencapai kategori utama. Gambaran tersebut menegaskan rendahnya kapasitas manajerial, literasi teknologi, dan kemandirian petani dalam mengelola lahan secara lebih maju, presisi, dan efisien.
- c. Disparitas Penduduk Miskin Perkotaan dan Perdesaan Masih Sangat Tinggi.

Walaupun tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera utara menunjukkan tren penurunan dan lebih bagus dari capaian nasional, namun jika dilihat berdasarkan tempat tinggal maka jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan lebih banyak jika dibandingkan daerah perkotaan. Beberapa faktor penyebabnya antara lain masih tingginya tingkat pengangguran, masih terbatasnya akses dan infrastruktur serta sektor-sektor ekonomi pedesaan yang masih didominasi oleh sektor primer dengan nilai tambah yang rendah. Selain itu tingginya beban pengeluaran mempengaruhi kesejahteraan masyarakat termasuk masyarakat miskin yang disebabkan masih tingginya harga kebutuhan pokok, biaya kesehatan, biaya pendidikan dan biaya perumahan.

4. Permasalahan Kesejahteraan Sosial dan Budaya



- a. Pembangunan kesehatan di Sumatera Utara masih menghadapi tantangan serius terkait pemerataan dan kualitas layanan. Cakupan layanan kesehatan dan gizi bagi berbagai kelompok usia mulai dari ibu dan anak, usia sekolah, usia produktif hingga lansia masih rendah. Kondisi ini diperparah dengan layanan kesehatan mental yang belum memadai serta kapasitas ketahanan kesehatan yang belum optimal. Tingginya kasus penyakit menular, meningkatnya penyakit tidak menular, belum tereliminasi penyakit tropis terabaikan, hingga ancaman penyakit berpotensi wabah menegaskan lemahnya sistem kesehatan. Selain itu, perilaku hidup sehat yang belum membudaya serta disparitas layanan antarwilayah menyebabkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat semakin timpang.

Permasalahan lain yang krusial adalah belum meratanya perlindungan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk. Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk tahun 2025, masih terdapat lebih dari 1,1 juta jiwa di Sumatera Utara yang belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kondisi ini menimbulkan GAP Non-JKN yang cukup besar, di mana sekitar 845 ribu jiwa masih harus dijangkau untuk mencapai target Universal Health Coverage (UHC) sebesar 98%. Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai manfaat jaminan kesehatan, ditambah kendala pembiayaan dan pengelolaan dari pemerintah daerah, membuat sebagian besar kelompok miskin dan rentan semakin sulit mengakses layanan kesehatan

Kesenjangan perlindungan jaminan kesehatan ini menimbulkan dampak langsung terhadap perilaku masyarakat dalam memanfaatkan layanan medis. Banyak masyarakat yang akhirnya tidak berobat karena tingginya biaya pengobatan dan keterbatasan akses jaminan kesehatan. Kondisi ini membuat penyakit yang diderita semakin memburuk dan menurunkan produktivitas masyarakat. Jika permasalahan ini tidak segera diatasi, maka pencapaian target pembangunan kesehatan, termasuk UHC dan peningkatan kualitas SDM, akan semakin terhambat, serta memperlebar kesenjangan kesehatan antarwilayah di Sumatera Utara.

- b. Permasalahan pendidikan di Sumatera Utara masih ditandai dengan ketidakmerataan akses serta kualitas layanan yang rendah. Ketimpangan partisipasi pendidikan masih terlihat jelas antarwilayah maupun kelompok sosial-ekonomi. Sarana dan prasarana pendidikan belum memadai, sementara kuantitas, kualitas, serta distribusi guru juga masih terbatas. Kondisi ini semakin kompleks dengan masih adanya sekolah menengah negeri yang belum teraliri listrik dan belum memiliki akses internet. Data menunjukkan terdapat 8 SMA dan 9 SMK tanpa listrik, serta 29 SMA, 34 SMK, dan 3 SLB tanpa akses internet. Keterbatasan infrastruktur dasar ini sangat menghambat proses pembelajaran, terutama di era digital yang menuntut pemanfaatan teknologi informasi.



Selain itu, masih banyak sekolah yang mengalami kekurangan sarana fisik berupa ruang kelas. Berdasarkan data, tercatat 30 SMA dan 67 SMK di Sumatera Utara masih membutuhkan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB). Kekurangan ini berpotensi mengganggu kelancaran kegiatan belajar mengajar, terlebih dengan terus bertambahnya jumlah siswa. Situasi tersebut sering kali menyebabkan sekolah menerapkan sistem belajar bergilir atau memanfaatkan ruang darurat yang tidak layak. Akibatnya, kualitas pembelajaran dan kenyamanan siswa dalam mengikuti proses belajar menjadi jauh dari optimal, sehingga berdampak pada rendahnya mutu pendidikan secara keseluruhan.

Di sisi lain, faktor biaya pendidikan juga masih menjadi kendala. Walaupun sekolah negeri telah menerapkan program pendidikan gratis, orang tua masih harus menanggung biaya tambahan untuk seragam, buku, dan transportasi. Hal ini menjadi beban tersendiri, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan juga memperburuk keadaan, karena masih ada keluarga di daerah tertentu yang lebih memprioritaskan anak untuk bekerja dibandingkan bersekolah. Kondisi ini memperlebar kesenjangan akses dan kualitas pendidikan di Sumatera Utara, serta menghambat pencapaian tujuan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Angka Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Sumatera Utara hingga tahun 2024 berada di 9,93 tahun, atau setara dengan kelas 3 SMP. Tantangan di tahun 2026 untuk meningkatkan RLS menuju 13 tahun (termasuk PAUD).

- c. Kemiskinan dan perlindungan sosial belum tertangani secara inklusif. Penurunan kemiskinan masih belum signifikan karena integrasi bantuan sosial dan layanan bagi kelompok rentan belum optimal, termasuk penyandang disabilitas, lansia, dan pekerja informal. Kepesertaan jaminan sosial juga masih rendah dengan literasi masyarakat yang terbatas, sementara akses terhadap hunian layak masih belum merata, terutama di kawasan afirmasi. Untuk jaminan kesehatan, baru 11 kabupaten/kota di Sumatera Utara yang telah mencapai UHC di atas 98%, yaitu Medan (98,91%), Tebing Tinggi (89,17%), Pematangsiantar (99,55%), Sibolga (100%), Gunungsitoli (98,78%), Toba (98,27%), Pakpak Bharat (100%), Nias Barat (98,78%), Nias Utara (100%), Humbang Hasundutan (98,76%), dan Langkat (98%), sedangkan 22 kabupaten/kota lainnya belum UHC.
- d. Belum terjaminnya kebebasan dan kesetaraan sipil, belum meratanya informasi dan komunikasi publik, serta Pancasila dan Konstitusi yang belum terinternalisasi. Kelembagaan demokrasi masih bersifat prosedural akibat politik uang dan politisasi SARA dalam pemilu, serta belum optimalnya fungsi lembaga perwakilan.



- e. Belum maksimalnya kemampuan literasi keagamaan yang inklusif, moderat, dan berorientasi kemaslahatan serta belum optimalnya penguatan dan penanaman nilai-nilai agama di masyarakat.
- f. Belum optimalnya peran dan fungsi keluarga menyebabkan ancaman krisis moral dan karakter di kalangan generasi muda, selain itu Pemenuhan hak dan perlindungan anak, pemuda, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia juga belum optimal.
- g. Ketimpangan gender masih menjadi persoalan serius di Sumatera Utara. Nilai Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dalam lima tahun terakhir (2020–2024) berada pada kisaran 0,39 hingga 0,47, yang mencerminkan ketimpangan cukup tinggi dibandingkan sejumlah provinsi lain di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya menciptakan kesetaraan gender masih menghadapi tantangan besar, baik dalam aspek kesehatan reproduksi, partisipasi ekonomi perempuan, maupun keterwakilan dalam pengambilan keputusan. Ketimpangan yang tinggi ini berimplikasi pada sulitnya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan di daerah. Tingginya IKG di Sumatera Utara tidak terlepas dari berbagai faktor struktural dan kultural. Hambatan dalam akses perempuan terhadap pendidikan tinggi dan pekerjaan layak memperlebar kesenjangan partisipasi ekonomi. Selain itu, budaya patriarkal yang masih kuat membatasi keterlibatan perempuan dalam ranah publik dan politik, sementara akses layanan kesehatan reproduksi serta informasi kesehatan seksual yang belum merata turut menghambat peningkatan kualitas hidup perempuan.
- h. Degradasi karakter dan jati diri serta belum optimalnya implementasi kearifan lokal dan nilai budaya sebagai modal dasar pembangunan masyarakat. Ancaman negatif budaya asing berdampak kepada hilangnya karakter dan jati diri asli masyarakat Sumatera Utara. Selain itu belum optimalnya pemanfaatan nilai budaya dan kearifan lokal dalam mendukung pembangunan.
- i. Akses keadilan dan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah. Tingginya angka kriminalitas ringan yang masih bisa diselesaikan tanpa melalui kalur pengadilan disertai dengan minimnya pemahaman masyarakat terkait *restoratif justice* serta masih sedikitnya lembaga atau mekanisme yang memfasilitasi penyelesaian konflik berbasis komunitas.

5. Permasalahan Infrastruktur dan Lingkungan

- a. Pembangunan wilayah dan pembangunan sarana dan prasarana yang belum merata

Disparitas ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur merupakan salah satu penyebab ketimpangan antar daerah di Provinsi Sumatera Utara. Konektivitas wilayah yang masih belum terhubung dan kondisi jaringan jalan yang rusak, merupakan salah



satu penyebab belum meratanya pembangunan di Sumatera Utara. Perawatan dan perbaikan jalan provinsi di Sumatera Utara masih terkendala keterbatasan anggaran, sehingga banyak ruas jalan rusak berat tidak dapat ditangani secara bersamaan. Kerusakan semakin cepat akibat faktor cuaca, kondisi alam di daerah rawan longsor dan banjir, serta tingginya volume kendaraan berat tanpa pengawasan yang memadai. Situasi ini memperlambat mobilitas masyarakat, meningkatkan risiko kecelakaan, dan menambah biaya transportasi lintas sektor.

Pembangunan jembatan di Sumatera Utara masih terkendala oleh banyaknya jembatan yang rusak atau tidak layak pakai akibat usia maupun bencana alam, sehingga menghambat konektivitas antarwilayah. Ketimpangan infrastruktur ini membuat sejumlah daerah berisiko terisolasi, menurunkan mobilitas masyarakat, serta memperlambat distribusi barang dan pertumbuhan ekonomi lokal.

Waduk dan jaringan irigasi di Sumatera Utara banyak yang rusak akibat saluran pecah, tersumbat, atau sedimentasi, sehingga distribusi air ke lahan pertanian tidak optimal. Kondisi ini menurunkan produktivitas pertanian, meningkatkan risiko gagal panen, serta memperburuk dampak kekeringan dan perubahan iklim terhadap ketahanan pangan daerah.

Berdasarkan perhitungan kebutuhan fasilitas pendidikan, diperkirakan pada tahun 2025 hingga 2035 fasilitas sekolah dasar (SD/MI dan SMP/MTs) masih mencukupi jumlah penduduk yang diproyeksikan. Dibutuhkan penambahan menjadi 11.653 unit SD/MI dan 4.360 unit SMP/MTs di tahun 2045. Sementara itu, jumlah SMA/SMK/MA diperkirakan yang tersedia saat ini masih mencukupi hingga tahun 2025 dan dibutuhkan penambahan menjadi 3.454 unit di tahun 2045. Untuk fasilitas kesehatan, diproyeksikan dibutuhkan sekitar 152 puskesmas dan 607 puskesmas pembantu/balai pengobatan lingkungan di seluruh Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2045.

Penyediaan infrastruktur dasar lainnya seperti penyediaan air minum, ditandai dengan cakupan layanan akses air minum layak tahun 2024 sebesar 92,94 persen di mana berada diatas capaian nasional sebesar 92,64. Sanitasi, ditandai dengan cakupan layanan air limbah perkotaan dan perdesaan tahun 2022 sebesar 77,69 persen di mana masih berada di bawah capaian nasional sebesar 86,03 persen. rumah layak huni, persampahan juga masih cukup rendah di beberapa wilayah di Sumatera Utara terutama di daerah afirmasi 3T. Masalah banjir juga belum dapat dituntaskan secara komprehensif dan infrastruktur yang belum tangguh bencana, rasio luas kawasan permukiman rawan banjir terlindungi oleh infrastruktur pengendali



banjir pada tahun 2024 sebesar 52,92 persen dan diharapkan menjadi 64,51 persen pada tahun 2026.

Layanan ketenagalistrikan Sumatera masih kekurangan pasokan daya atau beberapa sistem, atau cadangan di pembangkit eksisting yang tidak efisien serta kekurangan pasokan daya untuk daerah perbatasan serta pulau terluar. Hal ini ditandai dengan konsumsi listrik Provinsi Sumatera tahun 2022 sebesar 850-1.050 kWh di mana konsumsi tersebut berada dibawah rata-rata konsumsi listrik nasional pada tahun yang sama sebesar 1.173 kWh. Penyediaan tenaga listrik di Wilayah Sumatera masih belum menjangkau seluruh penduduk secara berkualitas.

Pembangunan infrastruktur transportasi terutama di daerah Metropolitan Medan juga sangat dibutuhkan keberadaannya untuk menunjang mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Infrastruktur digital juga sangat dibutuhkan sebagai sarana komunikasi dan informasi bagi masyarakat mengingat masih ditemukannya daerah yang masih belum terjangkau jaringan komunikasi. Keterbatasan sarana dan prasarana konektivitas antar daerah di wilayah daratan dan kepulauan. Pelabuhan yang menjadi simpul utama sebagai hub domestik memiliki kendala seperti keterbatasan kedalaman alur dan kolam pelabuhan. Bandara perairan belum dikembangkan secara optimal untuk mendukung pariwisata dan aksesibilitas di provinsi/kabupaten perairan. Kapasitas dan kualitas jaringan jalan lintas utama dan daerah belum memadai. Moda angkutan kereta api, belum memadai untuk angkutan barang seperti batu bara dan belum terhubung dengan simpul transportasi pelabuhan serta perkotaan di Sumatera. Transportasi sungai dan danau belum dikembangkan serta belum dimanfaatkan sebagai angkutan pendukung pariwisata. Rasio konektivitas Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2024 mempunyai nilai 0,604 dan diharapkan akan meningkat menjadi 0,683 pada tahun 2026.

Perawatan dan perbaikan infrastruktur jalan provinsi, jembatan dan waduk serta saluran irigasi yang terkendala anggaran disebabkan faktor geografis dan rawan bencana sehingga membutuhkan pembiayaan yang relatif.

Rendahnya daya saing ekonomi perdesaan, keterbatasan akses fisik dan digital, serta lemahnya kapasitas aparatur dan masyarakat desa membuat tata kelola pembangunan belum optimal. Layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan juga tertinggal, ditandai dengan minimnya sarana-prasarana, kekurangan tenaga pengajar dan tenaga medis, serta sulitnya akses ke sekolah maupun rumah sakit. Bahkan, daerah afirmasi menghadapi paradoks, misalnya rentan terhadap ancaman binatang berbisa tetapi tidak tersedia serum sebagai



penanganan darurat. Tantangan lain mencakup krisis iklim, degradasi lingkungan, tumpang tindih regulasi, hingga kebijakan pembangunan yang seragam tanpa memperhatikan keragaman karakteristik desa.

Selain itu, keterbatasan infrastruktur dasar memperparah kesenjangan layanan publik. Meski memiliki curah hujan tinggi, banyak desa di daerah afirmasi masih kekurangan pasokan air bersih akibat terbatasnya pompa, bak penampung, dan jaringan perpipaan. Persoalan sampah juga belum tertangani dengan baik, sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan dan menurunkan kualitas kesehatan masyarakat. Praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) masih dilakukan, sementara instalasi pengolahan air limbah belum tersedia memadai. Permukiman yang tidak layak huni semakin memperkuat kerentanan sosial, meskipun ketersediaan lahan sebenarnya cukup luas untuk membangun hunian layak dengan biaya relatif lebih rendah. Di Kepulauan Nias, masalah konektivitas dan kelistrikan menjadi salah satu isu penting yang perlu segera diatasi.

b. Belum Optimalnya Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup

Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya alam masih rendah, ditandai dengan masih tingginya Indeks Risiko Bencana di Provinsi Sumatera Utara di tahun 2024 mencapai 139,84 dibandingkan dengan Indeks Risiko Bencana nasional sebesar 131,85. Dalam hal pengelolaan lingkungan hidup, Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 memiliki nilai indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 73,96 poin (Baik). Pengelolaan lingkungan hidup yang perlu diperhatikan adalah kualitas lahan dan air mengingat indeks kualitas lahan Provinsi Sumatera Utara berada pada nilai 48,69% (Kurang), dan indeks kualitas air dengan nilai 61,09 poin (Sedang). Namun untuk kualitas lingkungan lain seperti indeks kualitas udara (92,26 poin), Indeks kualitas air laut (70,82 poin) memiliki nilai yang baik. Lebih lanjut, permasalahan pembangunan yang dirasakan terkait pengelolaan SDA dan lingkungan hidup ialah menurunnya ketersediaan air, keanekaragaman hayati seperti flora dan fauna, masalah limbah dan persampahan, Iklim dan cuaca ekstrim saat ini harus menjadi perhatian di sektor Pertanian, selain dari aktivitas manusia di darat, kerusakan juga muncul di daerah pesisir sebagai akibat pemanasan global seperti tingkat kerentanan wilayah pesisir Sumatera.

6. Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang belum optimal dan berkualitas. Berdasarkan capaian indeks reformasi birokrasi, Provinsi



Sumatera Utara masih membutuhkan optimalisasi capaian dimana pada tahun 2024 kategori predikat kinerja indeks reformasi birokrasi adalah A dengan nilai 80,87 poin. Tata kelola pemerintahan Sumatera Utara belum optimal dilihat dari birokrasi yang ada belum kolaboratif, transformasi digital yang masih belum optimal, penyederhanaan struktur dan mekanisme kerja baru yang belum tuntas, integritas penyelenggaraan negara yang masih menghadapi kendala serta budaya birokrasi belum terimplementasi dengan baik, kualitas akuntabilitas kinerja dan profesionalisme ASN masih perlu ditingkatkan. Di samping itu, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik belum optimal dalam menciptakan sistem pelayanan publik yang berkualitas dan Riset/inovasi belum cukup mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyusunan kebijakan yang efektif. Meskipun Indeks SPBE tahun 2024 mencapai 3,90 (kategori Sangat Baik), capaian ini masih di bawah Lampung (4,09) dan Bangka Belitung (4,11), ditambah rendahnya literasi digital masyarakat dan aparatur yang membuat pemanfaatan layanan digital belum optimal.

Keterbatasan kapasitas dan kualitas SDM desa masih menjadi hambatan dalam pemanfaatan data seperti Indeks Desa Membangun (IDM) yang akan diintegrasikan menjadi Indeks Desa sebagai instrumen perencanaan berbasis data. Banyaknya aplikasi dari kementerian/lembaga tanpa integrasi menambah beban administratif aparatur desa, diperparah dengan lemahnya manajemen pemerintahan, penataan aset desa yang belum optimal, serta minimnya pembinaan aparatur dan kelembagaan desa. Selain itu, ketidakjelasan batas wilayah desa masih memicu konflik dan menimbulkan ketidakpastian administrasi serta perencanaan wilayah.

2.3.2 Isu Strategis

Isu strategis di Sumatera Utara merupakan isu yang muncul dari permasalahan, lingkungan strategis (global, nasional, maupun daerah) dan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Utara. Perumusan isu strategis dilakukan dengan berbagai metodologi antara lain analisis isu dari berbagai kebijakan yang ada, *focus group discussion* bersama *stakeholder* pentahelix, dan analisis pembobotan. Berbagai isu yang diperhatikan dalam perumusan isu strategis daerah yang diharapkan dapat teratasi dalam pembangunan tahun 2026 diuraikan sebagai berikut:

a. Kualitas dan Daya Saing SDM

Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Sumatera Utara masih menghadapi tantangan besar dalam pembangunan dan pembentukan modal manusia. Modal manusia yang sehat, terdidik, dan terlindungi hanya dapat terwujud melalui transformasi sosial yang menitikberatkan pada pemenuhan layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Transformasi ini diharapkan mampu meningkatkan



kualitas hidup masyarakat sepanjang siklus hidup, sehingga lahir manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdayasaing.

Di bidang kesehatan, tantangan yang dihadapi meliputi peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan serta gizi masyarakat, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, penguatan kapasitas ketahanan kesehatan, dan pemerataan kualitas layanan di seluruh wilayah. Sementara itu, sektor pendidikan dihadapkan pada kebutuhan mengoptimalkan bonus demografi dan menyiapkan sumber daya manusia berkualitas untuk mendukung percepatan pembangunan. Dukungan terhadap Program Sekolah Rakyat sebagai program prioritas RPJMN menjadi bentuk nyata komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Perlindungan sosial yang adaptif juga menjadi agenda penting untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan memperluas perlindungan menyeluruh bagi penduduk, khususnya kelompok rentan, dengan prinsip berkeadilan dan inklusif.

Dari sisi demokrasi, permasalahan yang muncul adalah sistem yang masih prosedural dengan kapasitas dan kemandirian masyarakat sipil yang lemah, keterbatasan kebebasan dan kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik, serta belum meratanya akses informasi publik. Tantangan lain mencakup praktik politik uang, politisasi isu SARA, lemahnya internalisasi nilai Pancasila dan Konstitusi, serta sistem kaderisasi partai politik yang belum optimal.

Nilai agama, kearifan lokal, dan konservasi lingkungan seharusnya menjadi fondasi spiritual, etika, dan moral dalam memperkuat ketahanan sosial budaya. Namun, pemanfaatannya masih terbatas, sementara kebijakan pembangunan yang ramah gender dan inklusif bagi kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas dan lansia, perlu terus diperkuat. Selain itu, isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih mencakup tiga aspek utama, yaitu rendahnya pemahaman keluarga berencana, masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD maupun posisi manajerial. Hal ini menegaskan pentingnya penguatan kebijakan kesetaraan gender dan perlindungan anak sebagai bagian integral dari pembangunan sumber daya manusia yang inklusif.

b. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas ke destinasi wisata unggulan seperti Danau Toba, Nias, dan Bukit Lawang. Untuk meningkatkan daya tarik wisata, diperlukan pembangunan dan perbaikan jalan, bandara, serta transportasi publik yang lebih terintegrasi. Selain itu, penyediaan fasilitas pendukung seperti hotel, restoran, dan pusat informasi wisata



yang berkualitas juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kenyamanan wisatawan dan memperpanjang durasi kunjungan mereka.

Selain infrastruktur, penguatan ekonomi kreatif juga menjadi kunci dalam mendukung sektor pariwisata. Pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang bergerak di bidang kerajinan tangan, kuliner khas, serta seni pertunjukan perlu mendapatkan pembinaan dan akses permodalan yang lebih baik. Digitalisasi usaha ekonomi kreatif, seperti pemasaran berbasis *e-commerce* dan promosi melalui platform media sosial, juga harus diperkuat agar produk-produk lokal dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan demikian, ekonomi kreatif tidak hanya mendukung industri pariwisata tetapi juga memberikan peluang kerja yang lebih besar bagi masyarakat lokal.

Keberlanjutan lingkungan dan pelestarian budaya harus menjadi fokus dalam pengembangan sektor ini. Pariwisata berbasis alam dan budaya perlu dikembangkan dengan tetap menjaga ekosistem dan kearifan lokal agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Edukasi kepada masyarakat dan pelaku wisata mengenai pentingnya ekowisata serta pengelolaan sampah di kawasan wisata harus ditingkatkan.

c. Pembangunan sarana dan prasarana yang merata dan berkeadilan

Pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar di Provinsi Sumatera Utara ke depan perlu diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana yang lebih memadai, merata, dan berkeadilan, terutama bagi daerah perbatasan, kepulauan, dan kawasan 3T. Upaya strategis difokuskan pada peningkatan kualitas perumahan dan permukiman layak yang terintegrasi dengan akses air minum, sanitasi, dan persampahan, disertai dengan pengendalian perkembangan perkotaan yang lebih terstruktur. Di bidang energi, diperlukan penguatan sistem ketenagalistrikan melalui peningkatan pasokan daya, efisiensi pembangkit, serta perluasan jaringan transmisi agar kebutuhan rumah tangga dan industri dapat terpenuhi secara andal.

Selain itu, pengelolaan sumber daya air dan sanitasi menjadi prioritas melalui pembangunan prasarana air baku, rehabilitasi daerah tangkapan air, serta pengendalian degradasi lingkungan akibat deforestasi dan alih fungsi lahan. Peningkatan jangkauan dan pemanfaatan telekomunikasi diarahkan tidak hanya untuk komunikasi, tetapi juga sebagai penopang kegiatan produktif dan ekonomi digital masyarakat. Penguatan ketahanan lingkungan menjadi bagian penting, dengan memperbaiki pengelolaan sampah, limbah, serta mendorong perusahaan menerapkan manajemen lingkungan berstandar internasional. Seluruh strategi ini harus diintegrasikan dalam satu kerangka pembangunan infrastruktur dan lingkungan yang berkelanjutan untuk mendukung daya saing daerah serta kualitas hidup masyarakat Sumatera Utara.



d. Pembangunan antar daerah serta desa-kota

Keterkaitan antarwilayah serta desa-kota di Provinsi Sumatera Utara masih menghadapi tantangan karena rantai pasok dan rantai nilai belum terintegrasi dengan baik, sehingga pertumbuhan ekonomi cenderung berpusat pada kawasan inti sementara wilayah lain tertinggal. Kawasan Mebidangro (Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo) misalnya, masih berhadapan dengan persoalan permukiman kumuh, keterbatasan air bersih dan sanitasi, penurunan kualitas lingkungan hidup, serta belum optimalnya infrastruktur transportasi massal akibat urbanisasi yang tidak terkendali. Untuk menjawab persoalan ini, strategi pembangunan ke depan diarahkan pada penguatan konektivitas antarwilayah sekaligus mendorong keseimbangan pembangunan antara desa dan kota.

Salah satu upaya penting adalah pengembangan kelembagaan ekonomi desa melalui penyelarasan peran Koperasi Desa dan BUM Desa agar tidak tumpang tindih, melainkan saling melengkapi dengan *core business* yang jelas dalam mendukung aktivitas ekonomi lokal. Hal ini perlu diiringi dengan peningkatan kapasitas pendamping desa, terutama di kawasan perdesaan prioritas nasional seperti Ajibata di Kabupaten Toba dan Pasir Putih Parbaba di Kabupaten Samosir. Optimalisasi peran pendamping desa diharapkan mampu memperkuat integrasi pembangunan desa-kota, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi regional yang lebih inklusif dan berkelanjutan di tahun 2026.

Selain itu, isu pengentasan kemiskinan dan penguatan ketahanan pangan juga menjadi agenda strategis yang erat kaitannya dengan ketersediaan air dan pangan. Meskipun secara total ketersediaan air di Sumatera Utara masih surplus, ketidaksesuaian antara lokasi ketersediaan dan kebutuhan menimbulkan defisit di sejumlah wilayah seperti Tanjungbalai, Medan, dan sekitarnya, yang pada gilirannya berpengaruh pada ketahanan pangan. Sumatera Utara sejatinya juga surplus pangan berkat keanekaragaman hayati yang tinggi, namun terdapat wilayah dengan kategori jasa lingkungan rendah yang berisiko menghadapi kekurangan pangan, terutama di wilayah barat provinsi. Kerentanan terhadap perubahan iklim semakin memperbesar risiko penurunan produksi pangan, sehingga strategi pembangunan perlu memastikan pengelolaan sumber daya air, diversifikasi pangan, dan adaptasi iklim berjalan selaras untuk menjaga ketahanan pangan daerah.

e. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Berkelanjutan

Sumatera Utara memiliki potensi besar dalam pengembangan bioindustri yang berbasis pada kekayaan sumber daya alam hayati, seperti kelapa sawit, karet, kopi, kakao, dan hasil perikanan. Pemanfaatan bioindustri tidak hanya mendorong hilirisasi produk pertanian dan perikanan, tetapi juga memperkuat ekonomi hijau melalui penciptaan nilai tambah,



penyediaan energi terbarukan, serta penciptaan lapangan kerja yang lebih ramah lingkungan. Dengan arah pembangunan yang berkelanjutan, penguatan bioindustri diharapkan mampu menjadi pilar baru pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keseimbangan ekologi di Sumatera Utara.

Meski memiliki potensi yang besar, pengelolaan SDA di Sumatera Utara masih menghadapi tantangan karena investasi berbasis lahan belum sepenuhnya mengedepankan prinsip keberlanjutan. Optimalisasi pengelolaan SDA ke depan harus memperhatikan adaptasi perubahan iklim, pengendalian deforestasi dan kebakaran hutan/lahan, harmonisasi manusia-satwa, serta keterlibatan masyarakat termasuk perempuan dan kelompok marginal. Akses energi berkeadilan dan peningkatan porsi energi terbarukan juga penting, terlebih capaian bauran energi baru dan terbarukan (EBT) meningkat dari 14,34% tahun 2020 menjadi 42,04% tahun 2024.

Di sisi lain, isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih menonjol, baik terkait pemahaman keluarga berencana, penanganan kekerasan fisik maupun nonfisik, hingga kesetaraan gender dalam representasi politik dan posisi strategis. Pemberdayaan ini berhubungan erat dengan agenda pengentasan kemiskinan dan penguatan ketahanan pangan, mengingat defisit air di sejumlah wilayah dapat memengaruhi produksi dan distribusi pangan, meskipun secara keseluruhan Sumatera Utara masih surplus berkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Kerentanan perubahan iklim, terutama di wilayah barat, meningkatkan risiko kekurangan pangan akibat turunnya jasa lingkungan penyediaan pangan.

Kualitas lingkungan hidup juga menjadi isu utama, ditandai dengan menurunnya kualitas air permukaan, penanganan sampah dan limbah yang belum optimal, serta minimnya perusahaan yang menerapkan standar manajemen lingkungan. Aspek keanekaragaman hayati masih menghadapi kendala pada pengelolaan kawasan konservasi dan regulasi pemanfaatan kehati, yang berdampak pada kelestarian ekosistem.

Dampak perubahan iklim semakin terasa, dengan 73% wilayah Sumatera Utara masuk kategori rentan, terutama kawasan pesisir timur dan kepulauan Nias. Emisi gas rumah kaca masih tinggi, ruang terbuka hijau belum memadai, dan mitigasi risiko bencana belum optimal. Padahal, provinsi ini memiliki potensi bencana tinggi seperti banjir, kekeringan, dan bencana hidrometeorologi lainnya. Oleh karena itu, arah pembangunan strategis perlu difokuskan pada penurunan emisi, peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim maupun bencana alam.



f. Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Infrastruktur

Konektivitas dan sistem logistik di Sumatera Utara masih menjadi tantangan karena biaya distribusi komoditas dari wilayah produksi ke pusat pengolahan dan pemasaran relatif tinggi. Untuk itu diperlukan penguatan infrastruktur transportasi yang mampu memperlancar arus barang, jasa, dan informasi, menurunkan biaya logistik, serta mengurangi ekonomi biaya tinggi agar aksesibilitas lebih merata di seluruh wilayah. Pengembangan konektivitas juga harus mendorong sinergi antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi melalui perhubungan darat, laut, dan udara yang terintegrasi. Pada aspek perhubungan darat, jaringan angkutan jalan raya, jalur kereta api, angkutan sungai dan danau, serta penyeberangan perlu diperluas dan ditingkatkan kualitasnya untuk mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang secara lebih efisien.

g. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang dinamis, akuntabel, transparan dan kolaboratif

Provinsi Sumatera Utara masih menghadapi dua persoalan utama, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang berfokus pada kapabilitas dan integritas, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang belum sepenuhnya optimal. Arah perbaikan tata pemerintahan diarahkan pada transisi reformasi birokrasi menuju birokrasi tematik, penyederhanaan proses bisnis yang adaptif dengan dukungan teknologi informasi, serta peningkatan profesionalisme ASN berbasis meritokrasi dan *core values* yang kuat. Pemanfaatan teknologi informasi juga perlu diperluas dalam deregulasi kebijakan, penataan kelembagaan, pengawasan, dan akuntabilitas untuk menghadirkan pelayanan publik yang efektif.

Selain itu, penguatan sistem pemerintahan desa menjadi isu strategis dengan langkah peningkatan kapasitas aparatur, penyederhanaan aplikasi layanan, penataan batas wilayah yang jelas, serta penyediaan basis data desa yang valid dan akuntabel. Upaya ini memerlukan sinkronisasi kebijakan lintas sektor agar tata kelola menjadi lebih efisien, partisipatif, dan mampu memperkuat peran desa sebagai pilar pembangunan daerah sekaligus memperkecil kesenjangan antarwilayah di tahun 2026.





BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah (KEKD) merupakan komponen fundamental dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026, yang berfungsi sebagai pijakan analitis dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah. Penyusunan KEKD bertujuan untuk menyediakan gambaran menyeluruh mengenai kondisi makroekonomi regional serta kapasitas fiskal daerah, guna mendukung formulasi rencana pembangunan yang terukur, efisien, dan konsisten dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Penyusunan Kerangka Ekonomi Dan Keuangan Daerah dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan integrasi yang sinergis antara indikator ekonomi makro dan instrumen fiskal daerah. Dengan mengkaji kinerja indikator-indikator utama seperti laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran terbuka, distribusi sektor ekonomi, serta perkembangan investasi, pemerintah daerah dapat melakukan penyelarasan antara potensi ekonomi yang tersedia dan kebijakan penganggaran yang bersifat proaktif dan berbasis data.

Dari sisi fiskal, Kerangka Ekonomi Dan Keuangan Daerah menyajikan analisis komprehensif terhadap struktur pendapatan daerah, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer (DBH, DAU, DAK), dan sumber penerimaan lainnya. Analisis ini dikombinasikan dengan evaluasi terhadap komposisi belanja daerah (belanja operasional, belanja modal, dan belanja transfer), serta kebijakan pembiayaan defisit atau surplus anggaran. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kapasitas fiskal dan ruang fiskal (*fiscal space*) yang tersedia guna mendukung program prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

Kerangka Ekonomi Dan Keuangan Daerah juga disusun dengan memperhatikan dinamika eksternal, antara lain perubahan arah kebijakan nasional, fluktuasi perekonomian global, dan isu-isu strategis lintas sektoral dan lintas wilayah. Dengan pendekatan tersebut, Kerangka Ekonomi Dan Keuangan Daerah berfungsi sebagai mekanisme untuk menjamin konsistensi vertikal antara RKPD dengan dokumen perencanaan nasional, serta konsistensi horizontal antar sektor di tingkat daerah.

Dengan demikian, Kerangka Ekonomi Dan Keuangan Daerah tidak hanya menjadi referensi teknis dalam proses perencanaan tahunan, tetapi juga merupakan instrumen strategis dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based planning*), meningkatkan efektivitas alokasi sumber daya, serta memperkuat akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan daerah menuju peningkatan kualitas hidup masyarakat Sumatera Utara secara inklusif dan berkelanjutan.



3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Kerangka Ekonomi Daerah merupakan komponen esensial dalam sistem perencanaan pembangunan yang berfungsi sebagai perangkat analitis untuk menggambarkan kondisi perekonomian di tingkat regional secara utuh. Penyusunan kerangka ini bertujuan untuk menyediakan basis informasi yang akurat dan relevan dalam mendukung perumusan kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang adaptif terhadap dinamika ekonomi di level regional, nasional, maupun global.

Secara substansial, Kerangka Ekonomi Daerah menitikberatkan pada pengkajian indikator-indikator utama makroekonomi, antara lain laju pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, dan indeks ketimpangan (Gini ratio). Indikator-indikator ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja ekonomi daerah, memetakan permasalahan struktural, serta mengidentifikasi peluang strategis guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kerangka ini juga mencakup analisis terhadap struktur perekonomian, melalui identifikasi kontribusi sektoral terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Evaluasi struktur ekonomi memberikan wawasan mengenai sektor-sektor basis dan potensial, sekaligus sektor-sektor yang memerlukan intervensi kebijakan untuk penguatan daya saing dan peningkatan nilai tambah ekonomi lokal.

Selanjutnya, dimensi ketenagakerjaan merupakan bagian integral dari analisis ekonomi daerah. Pemerintah daerah perlu mengevaluasi indikator-indikator ketenagakerjaan, termasuk tingkat partisipasi angkatan kerja, komposisi dan kualitas tenaga kerja, serta ketersediaan dan penyebaran lapangan kerja. Pemahaman ini menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, sebagai bagian dari upaya pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan.

Selain aspek makro, kerangka ini juga memperhatikan dimensi mikroekonomi daerah, yang meliputi analisis terhadap pelaku usaha (UMKM dan sektor informal), iklim investasi, perdagangan regional, serta dinamika aktivitas ekonomi lokal lainnya. Analisis mikro ini penting untuk mengidentifikasi hambatan dan potensi penguatan basis ekonomi domestik melalui pengembangan ekosistem usaha yang kondusif dan inklusif.

Melalui pendekatan analitis yang menyeluruh dan berbasis data, Kerangka Ekonomi Daerah diharapkan dapat menjadi referensi strategis dalam proses perencanaan pembangunan. Kerangka ini tidak hanya memberikan gambaran diagnostik atas kondisi ekonomi aktual, tetapi juga membentuk pedoman rasional bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang terarah, terukur, dan berorientasi pada akselerasi pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.



3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah

3.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara Tahun 2024

Perekonomian Sumatera Utara pada tahun 2024 menunjukkan arah pemulihan yang positif dan semakin terkelola secara sistematis, mencerminkan penguatan kapasitas institusional pemerintah dalam menghadapi kompleksitas tantangan pembangunan. Capaian ini tidak dapat dilepaskan dari sinergi kebijakan antara pemerintah nasional dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang saling melengkapi dalam mendukung stabilitas dan akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. Di tingkat nasional, peran pemerintah tercermin melalui keberlanjutan kebijakan fiskal yang ekspansif dan inklusif, antara lain melalui peningkatan belanja infrastruktur, dukungan program pemulihan ekonomi nasional (PEN), serta penguatan kapasitas fiskal daerah melalui transfer keuangan pusat-daerah. Kebijakan ini tidak hanya memberikan stimulus terhadap sisi permintaan, tetapi juga memperkuat fondasi penawaran agregat melalui peningkatan kapasitas produksi nasional dan subnasional.

Pada saat yang sama, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara secara aktif mengarusutamakan pendekatan pembangunan yang berbasis pada potensi wilayah dan penguatan sektor-sektor strategis daerah. Melalui perencanaan yang berbasis data dan analisis sektoral, pemerintah daerah mendorong transformasi ekonomi dari sektor primer menuju sektor sekunder dan tersier dengan tetap memperhatikan karakteristik struktural daerah. Peningkatan daya saing sektor pertanian dan industri pengolahan, pengembangan kawasan ekonomi, serta penataan infrastruktur konektivitas antarwilayah menjadi prioritas dalam mendukung distribusi manfaat pembangunan secara lebih merata. Selain itu, sektor jasa seperti perdagangan, transportasi, serta akomodasi dan pariwisata juga terus dikembangkan sebagai respons terhadap peningkatan mobilitas masyarakat dan pemulihan aktivitas konsumsi domestik.

Kombinasi antara intervensi makro yang bersifat top-down dari pemerintah pusat dan pengelolaan pembangunan daerah yang kontekstual serta partisipatif dari pemerintah provinsi menciptakan sinergi kebijakan yang memungkinkan terjadinya penguatan struktur ekonomi yang lebih resilien. Upaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, melalui penyederhanaan regulasi, digitalisasi layanan perizinan, dan pemberdayaan pelaku UMKM, semakin menegaskan arah pembangunan ekonomi yang inklusif dan berorientasi pada peningkatan produktivitas. Dengan pendekatan yang integratif dan berbasis bukti (*evidence-based policy*), Sumatera Utara berhasil memanfaatkan momentum pemulihan nasional untuk mempercepat konsolidasi ekonomi daerah menuju pertumbuhan yang berkelanjutan, berdaya saing, dan berkeadilan sosial.

Sebagai provinsi dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB Pulau Sumatera, Sumatera Utara memegang peran strategis dalam menentukan arah dan stabilitas pertumbuhan ekonomi kawasan. Dengan struktur ekonomi yang relatif beragam dan basis produksi yang kuat di sektor pertanian, industri pengolahan, serta perdagangan dan jasa, Sumatera Utara



berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi yang menopang dinamika kawasan barat Indonesia. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara menunjukkan capaian yang cukup tinggi, didorong oleh peningkatan permintaan domestik, investasi infrastruktur, serta dampak positif dari penyelenggaraan kegiatan berskala nasional seperti PON XXI. Aktivitas di sektor jasa, transportasi, dan pariwisata mengalami percepatan seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan perputaran ekonomi lokal. Kinerja ini tidak hanya memperkuat struktur ekonomi internal provinsi, tetapi juga memberikan efek pengganda terhadap provinsi-provinsi lain di Sumatera melalui hubungan perdagangan antarwilayah, rantai pasok agribisnis, serta distribusi logistik dan jasa keuangan. Dengan peran yang demikian signifikan, keberlanjutan pertumbuhan Sumatera Utara menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas dan akselerasi ekonomi Sumatera secara menyeluruh.

Pertumbuhan ekonomi kawasan Pulau Sumatera pada tahun 2024 menunjukkan kinerja yang cukup tinggi, dengan laju pertumbuhan tahunan mencapai 4,45% (Tabel 3.1). Capaian ini merefleksikan dinamika ekonomi yang tumbuh positif di tengah tekanan global dan tantangan sektoral domestik. Variasi kinerja antarprovinsi menggambarkan perbedaan struktur ekonomi, potensi unggulan, serta respons kebijakan yang diambil di masing-masing daerah. Dalam konteks kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera, Provinsi Sumatera Utara dan Riau tetap menjadi dua pusat kekuatan utama, menyumbang masing-masing sebesar 23,55% dan 22,84%, menjadikan keduanya sebagai motor penggerak utama aktivitas ekonomi kawasan.

Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Provinsi di Pulau Sumatera (Persen)

Komponen		Triw IV-2024 Terhadap Triw III-2024 (q-to-q)	Triw IV-2024 Terhadap Triw IV-2023 (y-on-y)	Laju Pertumbuhan 2024	Kontribusi 2024
1	Aceh	6,11	4,15	4,66	4,99
2	Sumatera Utara	0,44	5,10	5,03	23,55
3	Sumatera Barat	2,03	4,04	4,36	6,84
4	Riau	0,16	3,52	3,52	22,84
5	Jambi	0,89	6,00	4,51	6,63
6	Sumatera Selatan	-1,85	5,07	5,03	13,63
7	Bengkulu	3,11	4,55	4,62	2,14
8	Lampung	-3,52	5,32	4,57	9,94
9	Kep. Bangka Belitung	3,48	0,94	0,77	2,21
10	Kepulauan Riau	6,94	5,14	5,02	7,24
Sumatera		0,70	4,60	4,45	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025



Dari sisi pertumbuhan, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan menempati posisi teratas dengan capaian sebesar 5,03%. Meskipun kedua provinsi ini mencapai angka yang sama, sumber penggerak pertumbuhan mereka berbeda secara struktural. Sumatera Utara menunjukkan pertumbuhan yang dipacu oleh sektor pertanian, industri pengolahan, serta sektor jasa yang meningkat signifikan pasca perhelatan PON XXI. Di sisi lain, Sumatera Selatan mengalami lonjakan pertumbuhan akibat ekspansi sektor pertambangan, perdagangan, dan industri manufaktur. Dalam hal kontribusi, Sumatera Selatan menyumbang 13,63% terhadap PDRB Sumatera, menempatkannya di posisi ketiga. Kepulauan Riau menyusul dengan pertumbuhan 5,02% dan kontribusi 7,24%, didukung kuat oleh aktivitas industri di wilayah Batam yang terus menarik investasi asing dan menjadi simpul perdagangan kawasan.

Sementara itu, Aceh mengalami pertumbuhan 4,66%, dipengaruhi oleh penguatan sektor jasa dan transportasi. Bengkulu dan Lampung masing-masing tumbuh 4,62% dan 4,57%, dengan dukungan utama dari sektor pertanian dan industri pengolahan berbasis hasil bumi. Meski kontribusi PDRB Bengkulu hanya 2,14%, dan Lampung sebesar 9,94%, keduanya mencerminkan potensi pertumbuhan yang menjanjikan apabila didukung kebijakan penguatan rantai pasok dan produktivitas sektor primer. Jambi mencatat pertumbuhan 4,51% dengan kontribusi 6,63%, terutama melalui penguatan komoditas unggulan seperti kelapa sawit dan karet. Sumatera Barat dengan kontribusi 6,84% mencatat pertumbuhan 4,36%, yang ditopang sektor perdagangan, pertanian, dan pariwisata.

Sebaliknya, provinsi dengan kontribusi besar belum tentu menunjukkan kinerja optimal. Riau, meskipun menjadi penyumbang PDRB terbesar kedua, hanya mencatat pertumbuhan 3,52%. Kinerja yang melambat ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh fluktuasi harga migas dan penurunan aktivitas sektor perkebunan. Sementara itu, Kepulauan Bangka Belitung menjadi provinsi dengan pertumbuhan terendah, yaitu hanya 0,77%, disebabkan oleh melemahnya sektor tambang timah dan stagnasi sektor jasa yang sangat bergantung pada aktivitas industri berbasis komoditas. Dengan kontribusi hanya 2,21%, posisi provinsi ini mengindikasikan perlunya langkah diversifikasi ekonomi yang lebih progresif dan transformatif.

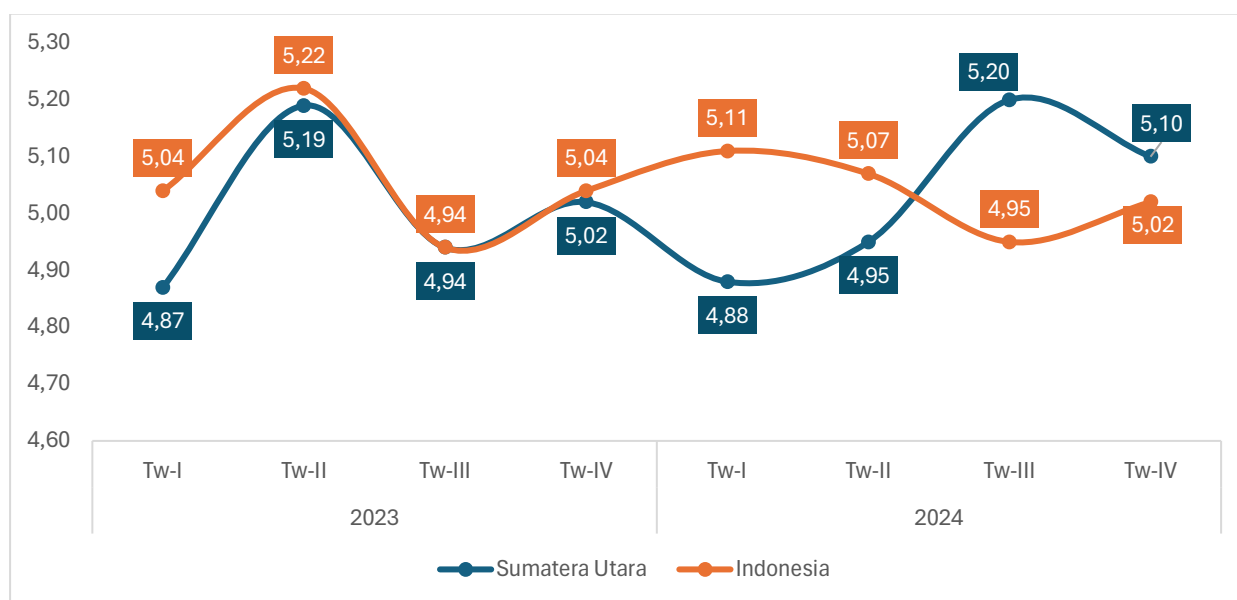
Melihat pola pertumbuhan dan kontribusi yang beragam di setiap provinsi, terlihat bahwa kekuatan ekonomi Sumatera dibentuk oleh kombinasi ketahanan sektoral, peran kebijakan, dan daya dukung sumber daya lokal. Variasi ini mencerminkan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi regional tidak semata bergantung pada besarnya kontribusi, melainkan juga pada kualitas pertumbuhan yang inklusif, keberlanjutan sektor produktif, dan ketangguhan dalam merespons dinamika pasar. Hal ini memberikan dasar kuat bagi perumusan strategi pembangunan Sumatera ke depan agar lebih adaptif, kontekstual, dan berbasis potensi unggulan tiap wilayah.

Grafik 3.1 menyajikan perkembangan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dan nasional selama periode 2023 hingga 2024. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara menunjukkan karakteristik yang lebih fluktuatif



dibandingkan pertumbuhan nasional yang relatif stabil. Beberapa triwulan mencatatkan angka pertumbuhan Sumatera Utara yang lebih tinggi dari nasional, namun pola naik-turun yang terjadi mencerminkan sensitivitas struktur ekonomi daerah terhadap dinamika sektoral, musiman, dan stimulus kebijakan domestik.

Gambar 3. 1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2023-2024 (y-on-y) (persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dimulai dengan capaian 4,87% pada Triwulan I, meningkat ke 5,19% di Triwulan II, lalu menurun menjadi 4,94% di Triwulan III, dan kembali naik ke 5,02% di Triwulan IV. Pergerakan ini dipengaruhi oleh fluktuasi musiman di sektor pertanian serta pergerakan harga komoditas utama seperti kelapa sawit dan karet. Struktur ekonomi Sumatera Utara yang didominasi oleh sektor primer dan industri pengolahan membuatnya sangat rentan terhadap perubahan permintaan global dan cuaca.

Pada tahun 2024, tren fluktuatif tetap terlihat. Pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I tercatat sebesar 4,88%, naik menjadi 4,95% pada Triwulan II, dan mencapai puncak 5,20% di Triwulan III. Peningkatan signifikan ini berkaitan erat dengan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI, yang mendorong kenaikan aktivitas ekonomi di sektor jasa, khususnya akomodasi, transportasi, dan kuliner. Triwulan IV mengalami sedikit penurunan ke 5,10%, yang merupakan efek dari moderasi konsumsi dan aktivitas produksi menjelang akhir tahun fiskal, serta penyesuaian belanja pemerintah.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2024 turut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Aktivitas kampanye, distribusi logistik pemilu, dan pengeluaran dari lembaga non-profit meningkatkan konsumsi



domestik dan menciptakan permintaan tambahan di sektor percetakan, transportasi, serta jasa konsumsi lokal. Belanja partai politik dan pemerintah pada masa pemilu meningkatkan perputaran uang, memacu permintaan terhadap barang dan jasa, serta membuka lapangan kerja sementara yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat.

Kontribusi belanja pemerintah dalam konteks pemilu juga terlihat dari peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah dan konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga. Komponen ini memperkuat sektor konstruksi, logistik, dan komunikasi selama masa kampanye dan pelaksanaan tahapan pemilihan. Efek berganda dari kegiatan politik tersebut memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya pada sektor-sektor padat karya dan sektor jasa non-tradisional.

Pertumbuhan nasional selama periode yang sama menunjukkan kestabilan dalam kisaran 4,95% hingga 5,11%, didukung oleh sektor jasa modern, teknologi, dan manufaktur berskala besar. Struktur ekonomi nasional yang lebih terdiversifikasi memungkinkan pengendalian terhadap volatilitas sektor-sektor tertentu dan mempertahankan pertumbuhan yang konsisten dari triwulan ke triwulan.

PDRB Sumatera Utara sepanjang tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03% (c-to-c), sedikit meningkat dari capaian tahun sebelumnya yang sebesar 5,01%. Pertumbuhan ini ditopang oleh kombinasi ekspansi sektor pertanian, peningkatan konsumsi rumah tangga, dorongan belanja pemerintah, serta peningkatan ekspor barang dan jasa. Permintaan terhadap komoditas ekspor unggulan tetap tinggi, sementara proyek-proyek infrastruktur strategis dan kegiatan politik meningkatkan aktivitas domestik secara temporer.

1) PDRB Menurut Lapangan Usaha

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Utara menunjukkan arah pertumbuhan yang positif pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya, baik berdasarkan harga berlaku (ADHB) maupun harga konstan 2010 (ADHK). Pada Tabel 3.2 menunjukkan bahwa PDRB atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp1.050.995,4 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp1.146.919,8 miliar pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan aktivitas ekonomi lintas sektor yang terus menguat, seiring dengan pemulihan ekonomi dan dorongan dari konsumsi domestik serta investasi sektor riil.

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tetap menjadi penopang utama perekonomian daerah, dengan nilai PDRB naik dari Rp247.947,5 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp280.263,3 miliar pada tahun 2024 (ADHB). Di sisi harga konstan, sektor ini juga mengalami peningkatan dari Rp153.237,6 miliar menjadi Rp158.952,6 miliar. Kenaikan ini menunjukkan ketahanan sektor primer di tengah tantangan global seperti ketidakpastian iklim dan fluktuasi harga komoditas. Permintaan yang tetap tinggi terhadap komoditas unggulan seperti kelapa sawit dan karet mendorong peran vital sektor ini dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara.



Industri Pengolahan mencatatkan kinerja yang juga mengesankan, tumbuh dari Rp193.742,6 miliar menjadi Rp210.615,5 miliar secara nominal, dan dari Rp103.289,4 miliar menjadi Rp108.089,2 miliar secara riil. Perkembangan ini menandakan adanya peningkatan produktivitas sektor manufaktur, khususnya industri berbasis agro, serta adanya peningkatan kapasitas dan investasi di bidang pengolahan hasil pertanian dan perkebunan.

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan sektor dengan kontribusi terbesar secara nominal, tumbuh dari Rp200.530,1 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp215.493,9 miliar pada 2024. Pertumbuhan yang terjadi juga tercermin dalam harga konstan, dari Rp111.128,8 miliar menjadi Rp116.065,4 miliar. Hal ini mengindikasikan kembalinya kekuatan konsumsi masyarakat sebagai penggerak utama ekonomi pascapandemi, serta penguatan aktivitas perdagangan seiring dengan meningkatnya daya beli dan mobilitas.

Tabel 3.2 PDRB Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Tahun 2023-2024 Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)

Lapangan Usaha		Harga Berlaku		Harga Konstan 2010	
		2023	2024	2023	2024
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	247.947,5	280.263,3	153.237,6	158.952,6
B.	Pertambangan dan Penggalan	12.280,2	13.308,4	7.509,7	7.812,5
C.	Industri Pengolahan	193.742,6	210.615,5	103.289,4	108.089,2
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	1.097,8	1.125,2	844,8	867,3
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	935,1	1.001,6	583,5	598,5
F.	Konstruksi	138.780,7	148.961,0	74.874,6	79.752,8
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	200.530,1	215.493,9	111.128,8	116.065,4
H.	Transportasi dan Pergudangan	53.105,1	57.512,4	27.698,6	29.453,1
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	22.159,8	25.330,3	14.056,6	15.741,2
J.	Informasi dan Komunikasi	24.164,9	26.125,0	20.168,2	21.661,7
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	30.279,7	31.626,4	17.543,5	18.222,7
L.	Real Estate	48.951,8	52.204,5	25.593,7	26.977,2
M,N.	Jasa Perusahaan	11.129,1	11.970,1	5.467,4	5.747,5



Lapangan Usaha		Harga Berlaku		Harga Konstan 2010	
		2023	2024	2023	2024
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	31.525,7	34.433,7	18.388,1	19.506,7
P.	Jasa Pendidikan	18.414,7	19.784,2	12.903,7	13.634,2
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.871,9	10.658,6	5.681,8	5.972,6
R,S,T,U	Jasa Lainnya	6.078,6	6.505,7	3.265,8	3.479,4
PDRB		1.050.995,4	1.146.919,8	602.236,0	632.534,7

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga mengalami peningkatan yang signifikan, dari Rp22.159,8 miliar menjadi Rp25.330,3 miliar (ADHB), dan dari Rp14.056,6 miliar menjadi Rp15.741,2 miliar (ADHK). Pertumbuhan ini sangat dipengaruhi oleh tingginya aktivitas pariwisata dan konsumsi domestik yang didorong oleh penyelenggaraan event nasional seperti Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI. Kegiatan berskala besar ini memberikan dampak ekonomi yang nyata di sektor jasa, perhotelan, dan kuliner. Sementara itu, sektor dengan laju pertumbuhan paling lambat adalah Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang. Nilai sektor ini hanya meningkat tipis dari Rp935,1 miliar menjadi Rp1.001,6 miliar secara nominal dan dari Rp583,5 miliar menjadi Rp598,5 miliar secara riil. Keterbatasan ini mencerminkan tantangan dalam pengembangan infrastruktur pengelolaan lingkungan dan rendahnya pertumbuhan konsumsi air bersih skala komersial. Peningkatan peran sektor ini diperlukan dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada sisi harga konstan 2010, yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil setelah disesuaikan dengan inflasi, PDRB Sumatera Utara tumbuh dari Rp602.236,0 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp632.534,7 miliar pada 2024. Peningkatan ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara tidak hanya terjadi karena kenaikan harga semata, tetapi juga didukung oleh pertumbuhan volume produksi dan efisiensi sektor-sektor utama.

Perkembangan perekonomian Sumatera Utara pada tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan yang semakin mengarah pada penguatan sektor-sektor strategis seperti pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan. Perkembangan ini menciptakan peluang baru bagi penciptaan lapangan kerja, memperkuat fondasi konsumsi masyarakat, serta memberikan ruang bagi investasi yang inklusif. Dukungan pemerintah dalam bentuk belanja modal, pembangunan infrastruktur, dan agenda nasional seperti pemilu juga mempercepat pemulihan dan ekspansi ekonomi daerah. Pertumbuhan yang tercermin dalam data ini diharapkan menjadi basis bagi pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di masa mendatang.



Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Utara tahun 2023–2024 sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 3.3 menunjukkan dinamika perubahan kontribusi antar sektor ekonomi, baik dalam perhitungan atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun harga konstan 2010 (ADHK). Struktur ekonomi provinsi ini masih sangat dipengaruhi oleh sektor-sektor utama seperti Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran; serta Industri Pengolahan.

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mencatat peningkatan peran dalam PDRB dari 23,59% pada tahun 2023 menjadi 24,44% pada 2024 dalam harga berlaku. Namun, dalam harga konstan, kontribusinya justru mengalami penurunan dari 25,44% menjadi 25,13%. Kenaikan pangsa dalam ADHB mengindikasikan adanya peningkatan nilai nominal output sektor ini, yang kemungkinan disebabkan oleh kenaikan harga komoditas unggulan atau meningkatnya nilai tukar petani, sementara penurunan pangsa dalam ADHK menunjukkan pertumbuhan volume produksi yang relatif melambat dibanding sektor lain.

Tabel 3.3 Distribusi PDRB Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Tahun 2023-2024 Menurut Lapangan Usaha (persen)

Lapangan Usaha	Harga Berlaku		Harga Konstan 2010		Perubahan	
	2023	2024	2023	2024	Harga Berlaku (persen poin)	Harga Konstan (persen poin)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	23,59	24,44	25,44	25,13	0,84	-0,32
B. Pertambangan dan Penggalian	1,17	1,16	1,25	1,24	-0,01	- 0,01
C. Industri Pengolahan	18,43	18,36	17,15	17,09	-0,07	-0,06
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,10	0,14	0,14	-0,01	- 0,00
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,09	0,10	0,09	-0,00	-0,00
F. Konstruksi	13,20	12,99	12,43	12,61	-0,22	0,18
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19,08	18,79	18,45	18,35	-0,29	-0,10
H. Transportasi dan Pergudangan	5,05	5,01	4,60	4,66	-0,04	0,06
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,11	2,21	2,33	2,49	0,10	0,15
J. Informasi dan Komunikasi	2,30	2,28	3,35	3,42	-0,02	0,08
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,88	2,76	2,91	2,88	-0,12	- 0,03
L. Real Estate	4,66	4,55	4,25	4,26	-0,11	0,02
M,N. Jasa Perusahaan	1,06	1,04	0,91	0,91	-0,02	0,00



Lapangan Usaha	Harga Berlaku		Harga Konstan 2010		Perubahan	
	2023	2024	2023	2024	Harga Berlaku (persen poin)	Harga Konstan (persen poin)
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,00	3,00	3,05	3,08	0,00	0,03
P. Jasa Pendidikan	1,75	1,72	2,14	2,16	-0,03	0,01
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,94	0,93	0,94	0,94	-0,01	0,00
R,S,T,U Jasa Lainnya	0,58	0,57	0,54	0,55	-0,01	0,01
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00		

Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah), 2025

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan sektor dominan berikutnya. Meski tetap berkontribusi besar terhadap PDRB, sektor ini mengalami sedikit penurunan peran, dari 19,08% menjadi 18,79% dalam harga berlaku, dan dari 18,45% menjadi 18,35% dalam harga konstan. Penurunan ini bisa dikaitkan dengan efek pemulihan pascapandemi yang mulai merata, serta melambatnya laju konsumsi masyarakat menjelang akhir tahun. Walaupun demikian, posisi sektor ini masih sangat kuat dalam menopang aktivitas ekonomi berbasis konsumsi dan distribusi barang.

Sektor Industri Pengolahan juga mengalami penurunan proporsi dalam struktur PDRB. Dalam harga berlaku, kontribusinya menurun dari 18,43% menjadi 18,36%, dan dalam harga konstan dari 17,15% menjadi 17,09%. Meskipun nilainya terus tumbuh, pangsa terhadap total PDRB sedikit tergerus oleh percepatan pertumbuhan sektor lain. Situasi ini menandakan bahwa pertumbuhan industri di Sumatera Utara bersifat moderat dan memerlukan dorongan lebih besar agar dapat berkembang lebih kompetitif, khususnya dalam menghadapi tekanan global dan ketatnya persaingan domestik.

Sektor Transportasi dan Pergudangan mempertahankan kontribusi yang relatif stabil, dari 5,05% menjadi 5,01% dalam harga berlaku, dan meningkat dari 4,60% menjadi 4,66% dalam harga konstan. Perubahan ini menunjukkan bahwa aktivitas logistik mengalami perbaikan dalam volume dan efisiensi, meskipun nilai nominal sektornya belum tumbuh sepesat sektor lain. Pengaruh dari perbaikan infrastruktur dan meningkatnya mobilitas selama PON XXI dan masa Pemilu dapat menjadi penjelas atas kinerja sektor ini dalam konteks riil.

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami peningkatan kontribusi cukup mencolok. Pangsa ADHB sektor ini naik dari 2,11% menjadi 2,21%, dan dari 2,33% menjadi 2,49% dalam ADHB. Pertumbuhan ini menunjukkan efek positif dari geliat pariwisata dan aktivitas konsumsi masyarakat, terutama sebagai dampak dari penyelenggaraan event-event besar di daerah. Lonjakan kontribusi ini juga



memperkuat posisi sektor jasa sebagai penggerak pertumbuhan baru, khususnya dalam perekonomian pascapandemi.

Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib menunjukkan kestabilan kontribusi, tetap di kisaran 3,00% dalam harga berlaku dan mengalami sedikit kenaikan dari 3,05% menjadi 3,08% dalam harga konstan. Hal ini mencerminkan pola belanja pemerintah daerah yang konsisten, sekaligus menandakan peran anggaran negara dalam menjaga keberlanjutan layanan publik selama tahun politik.

Beberapa sektor lainnya seperti Real Estate, Jasa Keuangan dan Asuransi, serta Jasa Perusahaan mengalami sedikit penurunan pangsa dalam ADHB, namun tetap tumbuh positif secara nilai. Penurunan kontribusi relatif ini umumnya disebabkan oleh lebih tingginya laju pertumbuhan sektor-sektor lain dibanding sektor tersebut. Sektor Real Estate, misalnya, mengalami penurunan dari 4,66% menjadi 4,55% (ADHB), meskipun kontribusinya dalam ADHK justru naik tipis.

Struktur ekonomi Sumatera Utara dalam dua tahun terakhir mencerminkan dinamika pergeseran yang masih ditopang oleh kekuatan sektor primer, dengan pertumbuhan nominal sektor pertanian yang cukup tinggi. Meningkatnya kontribusi sektor jasa, khususnya pariwisata dan logistik, menandakan pergeseran ke arah ekonomi berbasis pelayanan, seiring meningkatnya mobilitas, konsumsi masyarakat, dan investasi infrastruktur. Di sisi lain, sektor industri pengolahan menunjukkan kestabilan namun menghadapi tantangan dalam hal akselerasi. Kebutuhan terhadap kebijakan yang mampu mendorong peningkatan nilai tambah, efisiensi produksi, serta inovasi sektor manufaktur menjadi semakin penting dalam menjaga daya saing regional. Kinerja sektor perdagangan yang masih kuat memberikan sinyal positif tentang daya beli masyarakat, sementara stagnasi di beberapa sektor seperti pengelolaan air dan pengadaan gas menunjukkan ruang untuk perbaikan dan inovasi lebih lanjut.

Laju dan sumber pertumbuhan PDRB Sumatera Utara tahun 2024 sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.4 memperlihatkan dinamika sektoral yang beragam. Pertumbuhan ekonomi tahunan (y-on-y) pada Triwulan IV-2024 tercatat sebesar 5,10%, sedangkan pertumbuhan antar triwulan (q-to-q) dari Triwulan III ke Triwulan IV melambat ke 0,44%. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun secara tahunan ekonomi tetap tumbuh solid, kinerja pada akhir tahun mengalami moderasi karena efek musiman dan normalisasi pascapuncak aktivitas triwulan sebelumnya.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencatatkan pertumbuhan tahunan sebesar 3,73% dengan kontribusi sebesar 0,95 poin persentase terhadap total PDRB. Namun, terjadi kontraksi secara kuartalan sebesar -0,60%, menunjukkan perlambatan aktivitas setelah periode panen atau musim produksi puncak di triwulan sebelumnya. Hal ini mencerminkan karakter musiman yang masih kuat dalam struktur produksi sektor ini.

Sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan tahunan sebesar 4,65% dengan kontribusi 0,80 poin, menempatkannya sebagai salah satu penggerak utama ekonomi daerah. Meski demikian, terdapat kontraksi



pertumbuhan q-to-q sebesar -1,86% pada Triwulan IV, yang kemungkinan disebabkan oleh penyesuaian produksi atau turunnya permintaan pascapeningkatan output pada triwulan sebelumnya. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan kesinambungan produksi dan diversifikasi pasar.

Perdagangan besar dan eceran menjadi sektor dengan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan tahunan (0,82 poin), dengan laju pertumbuhan tahunan mencapai 4,44%. Sektor ini mencerminkan ketahanan daya beli masyarakat dan tingginya aktivitas konsumsi, meskipun tercatat mengalami penurunan -1,68% secara kuartalan yang dapat dikaitkan dengan pelemahan konsumsi akhir tahun dan efek kalender pascaperiode liburan.

Sektor konstruksi mengalami pertumbuhan tahunan sebesar 6,52% dan memberikan kontribusi sebesar 0,81 poin terhadap pertumbuhan PDRB. Peningkatan ini menunjukkan akselerasi pembangunan infrastruktur dan realisasi proyek-proyek publik, terutama yang terkait dengan kegiatan strategis nasional dan penyelenggaraan event seperti PON XXI. Kinerja kuartalan sektor ini juga konsisten, tumbuh 3,95% di Triwulan III dan 4,14% di Triwulan IV tahun 2024.

Tabel 3.4 Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Sumatera Utara Tahun 2023-2024 Menurut Lapangan Usaha (persen)

Lapangan Usaha	Triw III- 2024 Terhadap Triw II- 2024 (q-to-q)	Triw IV- 2024 Terhadap Triw III- 2024 (q-to-q)	Triw IV- 2024 Terhadap Triw IV- 2023 (y-on-y)	Laju Pertumbuhan 2024	Sumber Pertumbuhan 2024
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,11	-0,60	4,32	3,73	0,95
B. Pertambangan dan Penggalian	1,27	0,16	2,96	4,03	0,05
C. Industri Pengolahan	2,81	-1,86	4,84	4,65	0,80
D. Pengadaan Listrik dan Gas	1,36	-2,05	1,44	2,66	0,00
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,35	-0,02	2,15	2,57	0,00
F. Konstruksi	3,95	4,14	6,71	6,52	0,81
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,54	-1,68	2,37	4,44	0,82
H. Transportasi dan Pergudangan	2,54	4,86	6,60	6,33	0,29
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,02	4,87	13,74	11,98	0,28
J. Informasi dan Komunikasi	3,29	2,67	7,54	7,41	0,25
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	-0,25	-0,51	3,29	3,87	0,11
L. Real Estate	2,96	-1,03	7,42	5,41	0,23



Lapangan Usaha	Triw III- 2024 Terhadap Triw II- 2024 (q-to-q)	Triw IV- 2024 Terhadap Triw III- 2024 (q-to-q)	Triw IV- 2024 Terhadap Triw IV- 2023 (y-on-y)	Laju Pertumbuhan 2024	Sumber Pertumbuhan 2024
M,N. Jasa Perusahaan	2,01	-0,51	5,31	5,12	0,05
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-14,78	10,41	10,10	6,08	0,19
P. Jasa Pendidikan	0,96	0,13	4,82	5,66	0,12
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,11	1,93	5,61	5,12	0,05
R,S,T,U Jasa Lainnya	5,60	1,83	8,53	6,54	0,04
PDRB	2,25	0,44	5,10	5,03	5,03

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mencatat lonjakan tahunan sebesar 11,98%, tertinggi di antara semua sektor, dengan kontribusi 0,28 poin. Pertumbuhan tinggi ini didorong oleh meningkatnya arus wisatawan, konsumsi domestik, dan penyelenggaraan event besar. Pertumbuhan q-to-q juga cukup impresif, masing-masing 6,02% di Triwulan III dan 4,87% di Triwulan IV, menunjukkan sektor ini masih dalam fase ekspansi kuat.

Transportasi dan pergudangan mencatatkan pertumbuhan tahunan 6,33% dengan kontribusi sebesar 0,29 poin. Peningkatan ini didukung oleh pertumbuhan logistik dan pergerakan barang/jasa yang lebih baik seiring dengan membaiknya infrastruktur dan distribusi pasca pandemi. Pertumbuhan q-to-q juga menunjukkan tren positif (2,54% dan 4,86%), memperlihatkan sektor ini bergerak konsisten.

Sektor informasi dan komunikasi tumbuh 7,41% secara tahunan dengan kontribusi 0,25 poin, menegaskan peran digitalisasi dan teknologi dalam mendorong efisiensi ekonomi. Pertumbuhan kuartalan yang positif sebesar 3,29% dan 2,67% memperlihatkan bahwa permintaan terhadap layanan digital dan komunikasi masih terus meningkat, baik dari sisi bisnis maupun konsumsi rumah tangga.

Sektor jasa keuangan dan asuransi hanya tumbuh 3,87% secara tahunan dan menunjukkan kontraksi q-to-q dua triwulan berturut-turut (-0,25% dan -0,51%). Hal ini mengindikasikan adanya tekanan pada sektor keuangan yang mungkin berasal dari penyesuaian suku bunga, penguatan nilai tukar, atau konsolidasi dalam industri keuangan.

Real estate mencatat pertumbuhan tahunan sebesar 5,41% dengan kontribusi 0,23 poin, meskipun mengalami kontraksi q-to-q sebesar -1,03% pada Triwulan IV. Kinerja ini mencerminkan pemulihan bertahap pasar properti, namun belum menunjukkan pertumbuhan yang sangat agresif, kemungkinan akibat preferensi masyarakat yang masih berhati-hati dalam investasi jangka panjang seperti properti.



Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib tumbuh sebesar 6,08% secara tahunan, namun mencatat pola yang tidak stabil secara triwulanan, yaitu kontraksi -14,78% pada Triwulan III dan lonjakan 10,41% pada Triwulan IV. Fluktuasi ini sangat mungkin berkaitan dengan pola pencairan anggaran pemerintah, termasuk belanja program Pemilu dan Pilkada yang dominan pada akhir tahun.

Beberapa sektor jasa lainnya juga mencatat pertumbuhan yang solid, seperti jasa pendidikan (5,66%), jasa kesehatan dan kegiatan sosial (5,12%), serta jasa lainnya (6,54%). Kontribusi mereka terhadap pertumbuhan memang tidak besar secara individu, namun tetap berperan dalam memperluas basis ekonomi berbasis layanan sosial dan publik.

Komposisi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 menunjukkan bahwa sektor-sektor yang tumbuh paling tinggi berasal dari kelompok jasa dan infrastruktur, sementara sektor-sektor tradisional seperti industri pengolahan dan pertanian mengalami tekanan kuartalan meskipun tumbuh secara tahunan. Pertumbuhan tinggi di sektor digital, pariwisata, perdagangan, dan konstruksi menunjukkan pergeseran dinamika ekonomi ke arah sektor jasa modern dan kegiatan berbasis permintaan domestik. Ketahanan sektor pertanian tetap krusial namun membutuhkan inovasi agar dapat memberikan pertumbuhan yang lebih stabil sepanjang tahun. Tantangan pada sektor industri dan properti perlu mendapat perhatian melalui intervensi kebijakan yang mendukung hilirisasi, efisiensi produksi, serta perbaikan iklim investasi.

2) PDRB Menurut Pengeluaran

PDRB Sumatera Utara menurut pendekatan pengeluaran tahun 2024 mencerminkan pertumbuhan yang cukup berarti dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan Tabel 3.5, nilai PDRB atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp1.050.995,41 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp1.146.919,75 miliar pada tahun 2024. Dalam ukuran harga konstan 2010, pertumbuhan terjadi dari Rp602.235,95 miliar menjadi Rp632.534,73 miliar. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan nyata dalam volume aktivitas ekonomi dan permintaan domestik.

Tabel 3.5 PDRB Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (miliar rupiah)

No.	Komponen	Harga Berlaku		Harga Konstan 2010	
		2023	2024	2023	2024
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	533.048,38	583.173,30	301.525,67	317.890,13
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	9.246,77	10.524,20	6.381,83	7.134,31
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	61.332,46	64.752,35	35.718,98	37.151,38
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	310.220,67	328.629,53	181.084,18	190.051,10
5	Perubahan Inventori	20.027,98	15.774,69	12.218,20	9.313,07



No.	Komponen	Harga Berlaku		Harga Konstan 2010	
		2023	2024	2023	2024
6	Ekspor Barang dan Jasa	395.408,96	450.239,70	248.624,75	276.532,14
7	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	278.289,81	306.174,02	183.317,66	205.537,39
	PDRB	1.050.995,41	1.146.919,75	602.235,95	632.534,73

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Komponen terbesar dalam struktur pengeluaran adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, yang mengalami kenaikan dari Rp533.048,38 miliar menjadi Rp583.173,30 miliar (ADHB), dan dari Rp301.525,67 miliar menjadi Rp317.890,13 miliar (ADHK). Pertumbuhan ini mencerminkan meningkatnya daya beli masyarakat dan aktivitas konsumsi, serta stabilitas permintaan domestik yang tetap kuat sepanjang tahun 2024. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi fondasi utama pendorong ekonomi regional.

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah juga mengalami peningkatan, dari Rp61.332,46 miliar menjadi Rp64.752,35 miliar (harga berlaku), dan dari Rp35.718,98 miliar menjadi Rp37.151,38 miliar (harga konstan). Kenaikan ini mencerminkan peran belanja pemerintah, termasuk dalam rangka pelaksanaan agenda nasional seperti Pemilu dan Pilkada, pembangunan infrastruktur publik, serta pembiayaan pelayanan sosial yang terus diperluas.

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), yang merefleksikan aktivitas investasi di sektor riil, turut mengalami peningkatan dari Rp310.220,67 miliar menjadi Rp328.629,53 miliar secara nominal dan dari Rp181.084,18 miliar menjadi Rp190.051,10 miliar dalam nilai riil. Pertumbuhan ini menunjukkan adanya ekspansi investasi pada sektor-sektor produktif, termasuk pembangunan properti, fasilitas publik, serta pengadaan alat produksi dan infrastruktur yang menjadi penopang pertumbuhan jangka menengah dan panjang.

Dari sisi eksternal, kinerja ekspor menunjukkan peningkatan yang cukup besar. Ekspor barang dan jasa naik dari Rp395.408,96 miliar menjadi Rp450.239,70 miliar dalam harga berlaku, serta dari Rp248.624,75 miliar menjadi Rp276.532,14 miliar dalam harga konstan. Peningkatan ini mencerminkan penguatan sektor ekspor Sumatera Utara, terutama dari sektor pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan, yang memperoleh permintaan lebih tinggi di pasar internasional.

Impor barang dan jasa juga meningkat, dari Rp278.289,81 miliar menjadi Rp306.174,02 miliar dalam harga berlaku, dan dari Rp183.317,66 miliar menjadi Rp205.537,39 miliar dalam harga konstan. Meningkatnya impor di Sumatera Utara dikaitkan dengan permintaan bahan baku dan barang modal yang lebih besar, yang menjadi penanda tumbuhnya aktivitas produksi dalam negeri.

Salah satu komponen yang mengalami penurunan adalah Perubahan Inventori, dari Rp20.027,98 miliar menjadi Rp15.774,69 miliar secara nominal, dan dari Rp12.218,20 miliar menjadi Rp9.313,07 miliar secara riil.



Penurunan ini menunjukkan bahwa pelaku usaha cenderung mengoptimalkan persediaan dan lebih selektif dalam melakukan akumulasi stok, kemungkinan sebagai respons terhadap efisiensi rantai pasok dan strategi produksi berbasis permintaan.

Peningkatan pengeluaran konsumsi, investasi, dan ekspor menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara tahun 2024. Permintaan domestik tetap tinggi, aktivitas investasi terus berjalan, dan kinerja perdagangan luar negeri mengalami penguatan. Meskipun impor juga mengalami peningkatan, hal ini sejalan dengan tumbuhnya permintaan bahan baku dan peralatan produksi yang mendukung kegiatan industri lokal. Peran belanja pemerintah turut memberikan kontribusi penting, khususnya dalam menjaga momentum pertumbuhan selama tahun berjalan. Struktur ekonomi yang berkembang ini menunjukkan keberlanjutan penguatan pada berbagai komponen pengeluaran.

Analisis terhadap laju pertumbuhan dan sumber pertumbuhan PDRB Sumatera Utara menurut pengeluaran tahun 2024, sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 3.6, menunjukkan bahwa perekonomian Sumatera Utara mengalami pertumbuhan sebesar 5,03%. Capaian ini didukung oleh kontribusi kuat dari beberapa komponen utama pengeluaran, terutama konsumsi rumah tangga dan ekspor barang dan jasa.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga tetap menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi, dengan laju pertumbuhan tahunan (y-on-y) sebesar 5,26% dan laju pertumbuhan tahunan kumulatif sebesar 5,43%. Komponen ini memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan PDRB, yakni sebesar 2,72 poin persentase. Meningkatnya konsumsi rumah tangga mencerminkan daya beli masyarakat yang tetap terjaga, serta tingginya aktivitas konsumsi domestik sepanjang tahun.

Tabel 3.6 Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Sumatera Utara Menurut Pengeluaran (persen)

No.	Komponen	Triw III- 2024 Terhadap Triw II- 2024 (q-to-q)	Triw IV- 2024 Terhadap Triw III- 2024 (q-to-q)	Triw IV- 2024 Terhadap Triw IV- 2023 (y-on-y)	Laju Pertumbuhan 2024	Sumber Pertumbuhan 2024
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	-0,01	1,73	5,26	5,43	2,72
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	5,06	5,07	10,37	11,79	0,12
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-8,13	13,02	7,53	4,01	0,24
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,01	3,23	5,73	4,95	1,49
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6	Ekspor Barang dan Jasa	6,8	0,35	12,62	11,22	4,63
7	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	5,2	0,83	9,65	12,12	3,69
	PDRB	2,25	0,44	5,1	5,03	5,03



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) mencatatkan pertumbuhan tertinggi secara tahunan sebesar 11,79%, dengan kontribusi 0,12 poin terhadap total pertumbuhan. Meski secara struktur ekonomi kontribusinya kecil, pertumbuhan ini menandakan meningkatnya aktivitas sosial dan kemasyarakatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan besar seperti Pemilu dan PON XXI, serta meningkatnya partisipasi lembaga swadaya masyarakat dan organisasi keagamaan dalam kegiatan ekonomi lokal.

Sektor eksternal memberikan dorongan signifikan terhadap pertumbuhan PDRB. Ekspor barang dan jasa tumbuh sebesar 11,22% dan menjadi penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan, yaitu sebesar 4,63 poin. Pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan daya saing produk ekspor Sumatera Utara, termasuk produk pertanian, perkebunan, dan manufaktur berbasis agro. Di sisi lain, impor barang dan jasa juga tumbuh sebesar 12,12%, memberikan kontribusi 3,69 poin. Peningkatan impor ini menunjukkan tingginya permintaan akan bahan baku, barang modal, serta produk konsumsi untuk menunjang kebutuhan domestik dan aktivitas industri.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencatat pertumbuhan sebesar 4,95%, dengan sumber pertumbuhan sebesar 1,49 poin. Kinerja ini menunjukkan bahwa aktivitas investasi masih berlangsung cukup stabil, khususnya pada sektor properti, infrastruktur, dan pengadaan peralatan produksi. Meskipun tidak sebesar kontribusi konsumsi atau ekspor, PMTB tetap menjadi komponen penting dalam menopang pertumbuhan jangka menengah.

Pengeluaran konsumsi pemerintah tumbuh sebesar 4,01% dan memberikan kontribusi 0,24 poin terhadap pertumbuhan PDRB. Kinerja ini dipengaruhi oleh pengeluaran terkait pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah dan kegiatan pemilu. Meskipun kontribusinya relatif kecil dibandingkan komponen lainnya, belanja pemerintah tetap memainkan peran sebagai stimulus fiskal, terutama di sektor layanan publik dan infrastruktur dasar.

Dinamika pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara tahun 2024 mencerminkan kekuatan konsumsi rumah tangga dan ekspor sebagai dua pilar utama penggerak pertumbuhan. Aktivitas investasi tetap menunjukkan keberlanjutan, meskipun ruang peningkatan masih terbuka. Kinerja belanja pemerintah yang belum maksimal dan kontribusi LNPRT yang masih kecil memberikan peluang perbaikan dari sisi kebijakan fiskal dan penguatan ekonomi sosial. Kombinasi antara permintaan domestik yang stabil dan sektor eksternal yang ekspansif memberikan landasan yang kokoh untuk pertumbuhan lanjutan pada tahun-tahun berikutnya.



3.1.1.1.1. Kinerja Perdagangan Internasional

Perkembangan ekspor dan impor memiliki peran strategis dalam arah kebijakan ekonomi daerah, sebagai bagian dari indikator utama pertumbuhan ekonomi, dinamika perdagangan luar negeri mencerminkan daya saing daerah dalam menghasilkan produk bernilai tambah serta keterhubungan dengan pasar global. Dengan semakin terbukanya akses perdagangan, daerah perlu merumuskan kebijakan yang mendukung peningkatan ekspor komoditas unggulan dan pengelolaan impor yang seimbang untuk menjaga stabilitas ekonomi serta ketahanan sektor industri dan perdagangan. Pemerintah daerah perlu mendorong pelaku usaha, terutama UMKM dan sektor industri kreatif, agar mampu bersaing di pasar internasional melalui peningkatan kapasitas, insentif kebijakan, serta kemudahan akses pembiayaan dan infrastruktur logistik. Selain itu, optimalisasi kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan nilai ekspor daerah.

Kondisi Neraca Perdagangan Luar Negeri Sumatera Utara periode Januari-November 2023 dan Januari-November 2024 sebagaimana tersaji pada Tabel 3.6, terdapat beberapa perubahan signifikan yang mencerminkan dinamika perdagangan luar negeri di Sumatera Utara, dimana pada periode Januari-November 2023, total ekspor Sumatera Utara mencapai 10,63 juta ton dengan nilai 10,45 miliar USD. Namun, pada periode yang sama di tahun 2024, terjadi penurunan volume ekspor menjadi 9,50 juta ton atau turun sekitar 10,6%. Meskipun volume ekspor menurun, nilai ekspor justru meningkat menjadi 10,76 miliar USD, atau naik sekitar 3% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan adanya kenaikan harga rata-rata komoditas ekspor, yang bisa disebabkan oleh peningkatan harga pasar global, perubahan komoditas ekspor dengan nilai lebih tinggi, atau pergeseran strategi ekspor ke produk bernilai tambah lebih tinggi.

Tabel 3.7 Kinerja Neraca Perdagangan Luar Negeri Sumatera Utara Tahun 2023-2024 (000 US\$)

Periode	Ekspor		Impor		Neraca
	Berat Bersih (Ton)	Nilai FOB (000 US\$)	Berat Bersih (Ton)	Nilai CIF (000 US\$)	Nilai Ex-Im (000 US\$)
Jan-Des 2023	10.627.054	10.449.597	7.109.146	5.820.821	4.628.775
Jan-Des 2024	9.504.813	10.762.864	7.381.060	5.788.600	4.974.264

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Dari sisi impor, terjadi peningkatan baik dalam volume maupun nilai, dimana pada Januari-November 2023, volume impor tercatat sebesar 7,11 juta ton dengan nilai 5,82 miliar USD. Sementara itu, pada periode yang sama tahun 2024, volume impor naik menjadi 7,38 juta ton atau meningkat sekitar 3,8%, dengan nilai 5,79 miliar USD yang relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan volume impor tanpa peningkatan nilai yang



signifikan dapat mengindikasikan adanya penurunan harga barang impor atau pergeseran ke produk impor dengan harga lebih rendah.

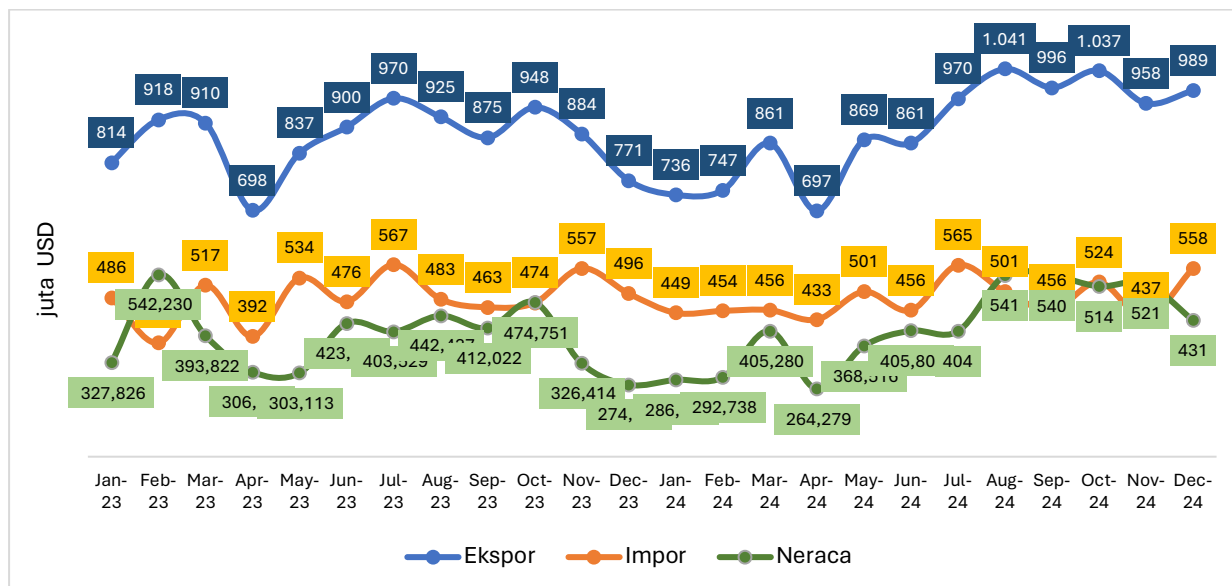
Neraca perdagangan tetap dalam kondisi surplus, namun terjadi penurunan yang cukup signifikan. Pada Januari-November 2023, surplus perdagangan (nilai ekspor dikurangi nilai impor) mencapai 4,63 miliar USD, sedangkan pada periode yang sama tahun 2024, surplus menurun menjadi 4,97 miliar USD, atau turun sekitar -14%. Dari sisi volume bersih (ekspor dikurangi impor), terjadi penurunan dari 3,52 juta ton pada 2023 menjadi 2,12 juta ton pada 2024, atau turun sekitar 39,6%.

Penurunan ini menunjukkan bahwa meskipun nilai ekspor meningkat, kenaikan impor dan penurunan volume ekspor mengurangi keunggulan surplus perdagangan. Jika tren ini berlanjut, ada kemungkinan bahwa ketahanan neraca perdagangan Sumatera Utara dapat melemah di masa depan. Dari kondisi tersebut, Neraca Perdagangan Sumatera Utara tetap positif, namun ada tren yang perlu dicermati antara lain penurunan volume ekspor tetapi dengan peningkatan nilai menunjukkan pergeseran ke komoditas yang lebih bernilai atau peningkatan harga ekspor. Peningkatan volume impor tanpa kenaikan nilai yang signifikan dapat mengindikasikan perubahan struktur impor ke barang yang lebih murah. Surplus perdagangan mengalami penurunan baik dari sisi nilai maupun volume bersih, yang menunjukkan bahwa keunggulan ekspor atas impor semakin mengecil. Untuk menjaga ketahanan neraca perdagangan, Sumatera Utara perlu memperkuat strategi ekspor, meningkatkan nilai tambah produk ekspor, serta mengendalikan ketergantungan terhadap impor, terutama pada barang yang bisa diproduksi secara lokal.

Dari sisi kinerja Nilai Neraca Perdagangan Luar Negeri Sumatera Utara sepanjang tahun 2024 sebagaimana tersaji pada Grafik 3.2, ekspor nonmigas mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2024. Pada Desember 2023, ekspor nonmigas tercatat sebesar 769,48 juta USD, kemudian mengalami sedikit penurunan pada Januari 2024 menjadi 735,68 juta USD. Meskipun sempat naik kembali pada Maret 2024 hingga mencapai 861,14 juta USD, ekspor kembali mengalami penurunan pada April 2024 sebesar 697,13 juta USD. Namun, setelahnya terjadi tren peningkatan yang cukup signifikan, mencapai puncaknya pada Oktober 2024 dengan nilai ekspor sebesar 1.037,39 juta USD sebelum kembali turun ke 988,90 juta USD pada Desember 2024.



Gambar 3. 2 Kinerja Nilai Neraca Perdagangan Luar Negeri Sumatera Utara Untuk Tahun 2024 (000.000 US\$)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Sementara itu, nilai impor nonmigas juga menunjukkan pola fluktuatif. Pada Desember 2023, impor tercatat sebesar 496,17 juta USD, lalu mengalami penurunan pada Januari 2024 menjadi 449,20 juta USD. Namun, tren naik kembali terjadi di beberapa bulan berikutnya, dengan kenaikan signifikan pada Juli 2024 sebesar 565,31 juta USD dan kembali mencapai puncaknya pada Oktober 2024 sebesar 523,78 juta USD dan terus mengalami kenaikan hingga Desember 2024, impor kembali meningkat menjadi 557,63 juta USD.

Dari segi neraca perdagangan (surplus/defisit), Sumatera Utara secara keseluruhan mengalami surplus dalam setiap bulan sepanjang tahun 2024. Surplus neraca perdagangan tertinggi terjadi pada Agustus dan September 2024, masing-masing sebesar 540,62 juta USD. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja ekspor masih lebih unggul dibandingkan impor, yang menandakan daya saing produk ekspor Sumatera Utara tetap kuat di pasar internasional.

Secara keseluruhan, neraca perdagangan Sumatera Utara menunjukkan kondisi yang relatif sehat dengan surplus yang konsisten. Namun, fluktuasi ekspor dan impor perlu mendapat perhatian lebih lanjut, terutama pada bulan-bulan di mana terjadi penurunan nilai ekspor, yang dapat mengindikasikan tantangan di sektor perdagangan luar negeri.

Selanjutnya, jika dilihat dari kinerja ekspor Sumatera Utara menurut sektor pada bulan Desember 2024 serta perbandingan periode Januari-Desember 2023 dan 2024 sebagaimana tersaji pada Tabel 3.8, terdapat beberapa tren yang menarik untuk dicermati diantaranya dari sisi Kinerja



Ekspor Bulan Desember 2024 dimana pada bulan Desember 2024, total ekspor Sumatera Utara mencapai 988,901 juta USD, mengalami peningkatan sebesar 31,039 juta USD atau 3,24% dibandingkan bulan November 2024. Sektor Pertanian menunjukkan kenaikan sebesar 2,844 juta USD atau 4,67%, dengan nilai ekspor mencapai 63,700 juta USD. Namun, Sektor Industri tetap menjadi penyumbang terbesar dalam ekspor, dengan nilai 925,201 juta USD, meningkat 28,195 juta USD atau 3,14% dibandingkan bulan sebelumnya. Kontribusi Sektor Industri terhadap total ekspor mencapai 93,56%, sementara Sektor Pertanian menyumbang 6,44%.

Tabel 3.8 Kinerja Nilai FoB (ribu US\$) Ekspor Sumatera Utara Menurut Sektor dan Perubahan (Δ) Bulan Desember 2024, serta Periode Januari – Desember 2023 dan 2024

Sektor	Jan-Des		Δ	$\Delta\%$	Peran (%) Jan-Des 2024
	2023	2024			
Pertanian	585.984	762.129	176.145	30,06	7,08
Industri	9.810.917	9.979.604	168.687	1,72	92,72
Pertambangan dan Penggalian	51.824	21.131,00	-30.693	-59,23	0,20
Minyak dan Gas	108	-	-108	-100,00	-
Lainnya	-	-	-	-	-
Jumlah	10.448.833	10.762.864	314.031	3,01	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Perbandingan Ekspor Januari-Desember 2023 dan 2024 secara tahunan, ekspor Sumatera Utara mengalami peningkatan yang positif. Total ekspor sepanjang Januari-Desember 2024 mencapai 10,762,864 juta USD, meningkat 314,031 juta USD atau 3,01% dibandingkan periode yang sama pada 2023. Sektor Pertanian mencatat lonjakan signifikan dengan kenaikan 176,145 juta USD atau 30,06%, dari 585,984 juta USD pada 2023 menjadi 762,129 juta USD pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa Sektor Pertanian mulai berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.

Sementara itu, Sektor Industri juga mengalami peningkatan ekspor sebesar 168,687 juta USD atau 1,72%, dengan total ekspor sepanjang 2024 mencapai 9,979,604 juta USD dibandingkan 9,810,917 juta USD pada 2023. Meskipun peningkatan ini relatif kecil dibanding Sektor Pertanian, Industri tetap menjadi tulang punggung utama ekspor Sumatera Utara dengan kontribusi 92,72% terhadap total ekspor pada Desember 2024.

Performa Sektor Tambang dan Minyak-Gas, dimana sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami penurunan tajam sebesar 30,693 juta USD atau 59,23%, dari 51,824 juta USD pada 2023 menjadi 21,131 juta USD pada 2024. Penurunan ini menunjukkan berkurangnya aktivitas ekspor di sektor ini, yang bisa disebabkan oleh kebijakan pembatasan ekspor bahan mentah atau penurunan permintaan global. Sektor Minyak dan Gas tidak lagi tercatat dalam ekspor tahun 2024 setelah sebelumnya mencatat ekspor



sebesar 108 ribu USD pada 2023, menandakan kemungkinan penghentian ekspor produk terkait.

Secara keseluruhan, ekspor Sumatera Utara mengalami pertumbuhan yang positif pada tahun 2024, dengan peningkatan ekspor yang signifikan dari sektor pertanian. Peningkatan ekspor industri yang moderat tetap memastikan dominasi sektor ini dalam perdagangan luar negeri daerah. Namun, sektor pertambangan dan minyak-gas mengalami kemunduran, yang perlu diperhatikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab dan dampaknya terhadap perekonomian Sumatera Utara. Ke depan, strategi penguatan ekspor terutama di sektor pertanian dan industri bernilai tambah tinggi perlu terus dikembangkan untuk menjaga tren positif dalam neraca perdagangan daerah.

Selanjutnya dari sisi Impor Sumatera Utara menurut golongan penggunaan barang untuk bulan Desember 2024 serta perbandingan Januari-Desember 2023 dan 2024 sebagaimana tersaji pada Tabel 3.9 berikutnya, terlihat adanya dinamika dalam struktur impor Sumatera Utara diantaranya dari sisi kinerja Impor bulan Desember 2024 dimana total impor Sumatera Utara mencapai 557,626 juta USD, mengalami kenaikan sebesar 120,737 juta USD atau 27,64% dibandingkan November 2024. Peningkatan ini terutama didorong oleh kenaikan impor pada semua kategori barang. Bahan baku penolong merupakan kategori terbesar dalam impor dengan nilai 436,435 juta USD, mengalami lonjakan 85,883 juta USD atau 24,5% dibandingkan bulan sebelumnya, dan menyumbang 78,27% dari total impor bulan Desember.

Tabel 3.9 Kinerja Nilai CIF (ribu US\$) Impor Menurut Golongan Penggunaan Barang dan Perubahan (Δ) Bulan Desember 2024 serta Periode Januari-Desember 2023 dan 2024

Sektor	Jan-Des		Δ	$\Delta\%$	Peran (%) Jan-Des 2024
	2023	2024			
Barang Modal	524.377	526.184	1.807	0,34	9,09
Bahan Baku Penolong	4.606.969	4.570.160	-36.809	-0,8	78,95
Barang Konsumsi	689.478	692.256	2.779	0,4	11,96
Total	5.820.823	5.788.600	-32.223	-0,55	100

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Selain itu, barang konsumsi juga mencatat peningkatan signifikan sebesar 17,301 juta USD atau 31,83%, dengan total nilai 71,648 juta USD, yang menyumbang 12,85% dari total impor. Sementara itu, barang modal mengalami kenaikan tertinggi secara persentase, meningkat 54,87% atau 17,552 juta USD, dengan nilai 49,543 juta USD, yang mencerminkan peningkatan investasi dalam peralatan dan mesin di daerah ini.



Perbandingan Impor Januari-Desember 2023 dan 2024, jika melihat kinerja tahunan, total impor Sumatera Utara pada Januari-Desember 2024 mencapai 5,788,600 juta USD, mengalami sedikit penurunan sebesar 32,223 juta USD atau 0,55% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya impor bahan baku penolong, yang turun 36,809 juta USD atau 0,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Meski kecil, tren ini menunjukkan kemungkinan adanya efisiensi dalam penggunaan bahan baku industri atau penyesuaian dalam rantai pasokan.

Di sisi lain, impor barang konsumsi meningkat sebesar 2,779 juta USD atau 0,4%, mencapai 692,256 juta USD, menunjukkan adanya peningkatan permintaan konsumsi domestik. Sementara itu, barang modal juga mengalami sedikit kenaikan sebesar 1,807 juta USD atau 0,34%, mencapai 526,184 juta USD, yang menandakan stabilnya kebutuhan investasi industri di Sumatera Utara.

Secara keseluruhan, impor Sumatera Utara mengalami lonjakan signifikan pada Desember 2024, terutama pada kategori barang modal dan bahan baku penolong, yang mencerminkan peningkatan aktivitas industri dan investasi. Namun, secara tahunan, total impor mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2023, terutama disebabkan oleh berkurangnya impor bahan baku. Hal ini bisa menunjukkan upaya efisiensi dalam industri lokal atau pergeseran strategi bisnis terhadap sumber daya domestik. Dengan tren ini, neraca perdagangan Sumatera Utara masih perlu dicermati lebih lanjut, terutama untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekspor dan impor. Jika impor bahan baku terus menurun sementara ekspor meningkat, ini bisa menjadi indikasi positif bahwa industri lokal semakin mandiri. Namun, jika penurunan impor bahan baku disertai dengan stagnasi atau penurunan ekspor di masa depan, hal ini bisa menjadi sinyal perlambatan industri yang perlu diwaspadai.

Untuk kondisi perdagangan luar negeri Sumatera Utara dengan negara mitra utama pada Desember 2024 dan periode Januari-Desember 2024 sebagaimana tersaji pada Tabel 3.10, terlihat dinamika yang signifikan dalam hubungan perdagangan internasional. Kinerja Perdagangan Bulan Desember 2024 pada bulan Desember 2024, total ekspor Sumatera Utara mencapai 988,901 juta USD, sementara impor tercatat sebesar 557,626 juta USD, menghasilkan surplus perdagangan sebesar 431,275 juta USD. Amerika Serikat menjadi mitra dagang terbesar dengan nilai ekspor 148,009 juta USD dan impor hanya 26,622 juta USD, mencatat surplus sebesar 121,386 juta USD. Jepang juga menjadi pasar ekspor penting dengan nilai ekspor 40,261 juta USD dan surplus 35,225 juta USD.



Tabel 3.10 Kondisi Perdagangan Luar Negeri Sumatera Utara dengan Negara Mitra Utama Tahun 2024 (ribu US\$)

No	Negara Tujuan	Nov-24	Des-24	$\Delta\%$ (mtm)	Jan-Des (ctc)		
					2023	2024	$\Delta\%$ (ctc)
1	Tiongkok	157.887	139.186	-11,84	1.921.971	1.798.399	-6,43
2	India	54.301	54.668	0,68	872.587	703.607	-19,37
3	Jepang	45.429	40.261	-11,38	478.563	542.163	13,29
4	Korea Selatan	15.463	21.821	41,12	251.067	245.330	-2,28
5	Malaysia	57.907	51.512	-11,04	329.544	466.826	41,66
6	Kamboja	20.129	19.506	-3,09	242.655	239.731	-1,20
7	Amerika Serikat	119.756	148.009	23,59	1.289.895	1.375.354	6,63
8	Rusia	49.012	16.347	-66,65	277.957	388.772	39,87
9	Belanda	20.242	22.572	11,51	276.962	314.143	13,42
10	Bangladesh	31.592	31.826	0,74	220.967	222.147	0,53
Total 10 Negara Tujuan		571.716	545.707	-4,55	6.162.167	6.296.472	2,18
Lainnya		386.146	443.194	14,77	4.286.666	4.466.392	4,19
Total Ekspor		957.862	988.901	3,24	10.448.833	10.762.864	3,01

Sumber : BRS BPS Provsu No. 10/02/12/Th. XXVIII, 3 Februari 2025

Sebaliknya, hubungan perdagangan dengan Malaysia mencatat defisit terbesar sebesar 39,846 juta USD, dengan impor mencapai 91,358 juta USD sementara ekspor hanya 51,512 juta USD. Demikian pula, Singapura menunjukkan defisit signifikan sebesar 32,802 juta USD. Sementara itu, Argentina juga menjadi negara yang mencatat defisit perdagangan sebesar 11,914 juta USD, yang mungkin mengindikasikan impor komoditas tertentu seperti produk pertanian atau bahan baku.

Performa Perdagangan Januari-Desember 2024, Sumatera Utara berhasil mencapai total ekspor sebesar 10,762,864 juta USD dengan total impor 5,788,600 juta USD, menghasilkan surplus 4,974,264 juta USD. Amerika Serikat tetap menjadi mitra dagang terbesar dengan nilai ekspor mencapai 1,375,354 juta USD dan surplus 959,664 juta USD, menunjukkan kuatnya permintaan produk dari Sumatera Utara di pasar AS. Namun, ada beberapa negara dengan defisit perdagangan yang signifikan, seperti Singapura yang mencatat defisit -653,443 juta USD, dan Malaysia dengan defisit 208,035 juta USD. Kedua negara ini berperan sebagai pusat distribusi dan transit, sehingga tingginya angka impor bisa mencerminkan tingginya impor barang modal atau bahan baku yang diperlukan industri lokal.

Di sisi lain, hubungan perdagangan dengan Tiongkok menunjukkan surplus besar sebesar 1,495,307 juta USD sepanjang tahun 2024, dengan nilai ekspor 1,783,899 juta USD dan impor 288,592 juta USD. Ini menunjukkan bahwa Tiongkok merupakan pasar yang sangat potensial bagi



produk ekspor Sumatera Utara, mungkin dalam bentuk komoditas pertanian atau hasil olahan industri.

Secara keseluruhan, Sumatera Utara berhasil menjaga surplus perdagangan yang sehat baik bulanan maupun tahunan. Meskipun ada beberapa negara dengan defisit perdagangan yang cukup besar, seperti Malaysia dan Singapura, hal ini dapat diinterpretasikan sebagai bagian dari strategi pembangunan industri yang masih memerlukan impor bahan baku atau barang modal. Amerika Serikat dan Tiongkok menjadi mitra dagang utama dengan surplus yang sangat signifikan, mencerminkan tingginya permintaan produk dari Sumatera Utara. Sebaliknya, defisit besar dengan Singapura dan Malaysia perlu menjadi perhatian, mungkin melalui optimalisasi rantai pasokan dan peningkatan efisiensi produksi untuk mengurangi ketergantungan impor.

3.1.1.1.2. Kinerja Investasi

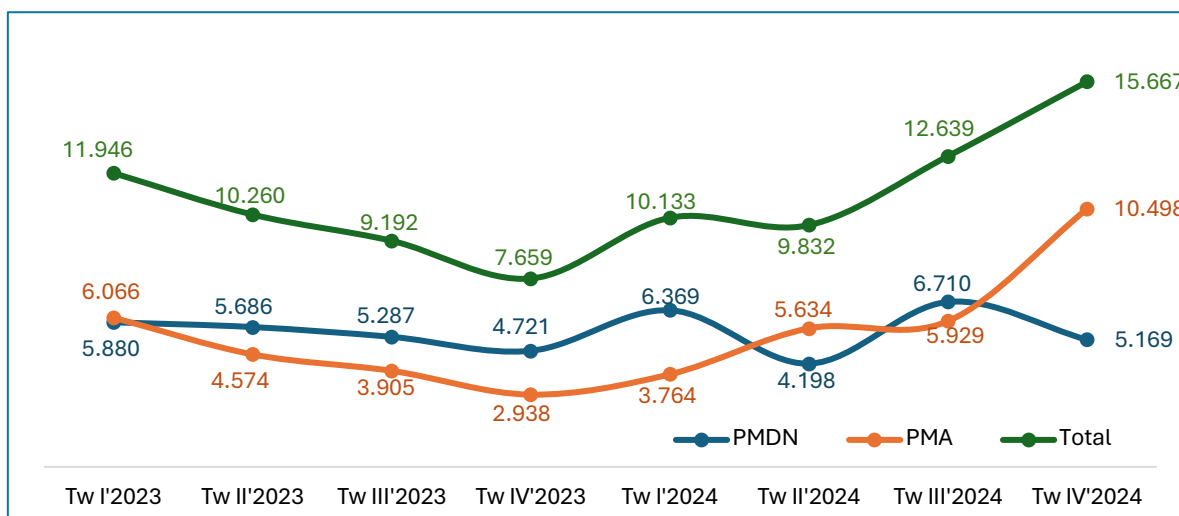
Kinerja investasi memiliki peran strategis dalam kerangka ekonomi daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing daerah. Investasi, baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas produksi di berbagai sektor, seperti industri manufaktur, agribisnis, dan infrastruktur. Selain sebagai motor penggerak ekonomi, investasi juga berperan dalam mempercepat transformasi struktural di Sumatera Utara, terutama dalam meningkatkan nilai tambah produk dan memperkuat konektivitas antarwilayah.

Kinerja investasi diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memastikan pemerataan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan investasi tidak hanya difokuskan pada sektor unggulan seperti perkebunan dan industri pengolahan, tetapi juga sektor strategis lainnya seperti pariwisata, energi terbarukan, dan ekonomi digital. Dengan langkah-langkah konkret, seperti penguatan perizinan berbasis digital, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan percepatan pembangunan kawasan industri, pemerintah Provinsi Sumatera Utara optimis dapat menciptakan ekosistem investasi yang lebih kompetitif dan berkontribusi langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Kinerja investasi Sumatera Utara Tahun 2023-2024 sebagaimana tersaji pada tabel sebagaimana tersaji pada grafik 3.3 dibawah (di luar investasi sektor Hulu Migas, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha, Industri Rumah Tangga, Usaha Mikro dan Usaha Kecil, dengan nilai Kurs US\$1 = Rp.15.000 sesuai APBN 2024) menunjukkan dinamika pertumbuhan investasi yang cukup signifikan. Jika melihat total realisasi investasi, terjadi peningkatan yang cukup besar dari tahun 2023 sebesar Rp.39,057 triliun menjadi Rp.48,271 triliun pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan investor terhadap potensi ekonomi Sumatera Utara terus meningkat, baik dari sisi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA).



Gambar 3. 3 Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Tahun 2023 s/d Tahun 2024 (Milyar Rupiah)



Sumber : Rilis Investasi Tw IV 2024, DPMPSTSP Provsu

Pada tahun 2023, realisasi investasi mengalami fluktuasi setiap triwulannya. PMDN mengalami penurunan dari Rp.5,880 triliun di Triwulan I menjadi Rp.4,721 triliun di Triwulan IV, yang bisa jadi mencerminkan adanya faktor ekonomi domestik yang kurang mendukung, seperti ketidakpastian kebijakan atau tantangan dalam dunia usaha. Sementara itu, PMA juga mengalami penurunan dari Rp.6,066 triliun di Triwulan I menjadi hanya Rp.2,938 triliun di Triwulan IV. Penurunan ini bisa dikaitkan dengan faktor eksternal, seperti ketidakpastian global atau perubahan strategi investasi dari investor asing.

Memasuki tahun 2024, tren investasi tampak lebih positif. PMDN kembali meningkat di Triwulan I menjadi Rp.6,369 triliun, meskipun sedikit menurun di Triwulan II menjadi Rp.4,198 triliun. Hal yang menarik adalah peningkatan signifikan pada PMA, di mana realisasi investasi melonjak dari Rp.3,764 triliun di Triwulan I menjadi Rp.10,498 triliun di Triwulan IV. Peningkatan ini menunjukkan bahwa daya tarik Sumatera Utara sebagai destinasi investasi semakin kuat, terutama bagi investor asing yang melihat potensi pertumbuhan di sektor-sektor unggulan seperti industri manufaktur, infrastruktur, dan pariwisata.

Secara keseluruhan, kondisi ini mencerminkan adanya optimisme terhadap iklim investasi di Sumatera Utara. Peningkatan total investasi dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah daerah dalam menarik investor mulai membuahkan hasil. Namun, untuk memastikan pertumbuhan investasi yang berkelanjutan, perlu adanya kebijakan yang lebih proaktif dalam meningkatkan daya saing daerah, memperbaiki infrastruktur, serta memberikan kemudahan perizinan bagi para investor. Dengan langkah-langkah yang tepat, Sumatera Utara dapat terus memperkuat posisinya sebagai salah satu pusat investasi utama di Indonesia.



3.1.1.1.3. Kinerja Ketenagakerjaan

Kinerja ketenagakerjaan memegang peran krusial dalam kerangka ekonomi daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai indikator utama kesejahteraan masyarakat dan daya saing ekonomi. Tingkat penyerapan tenaga kerja yang optimal mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, di mana peningkatan investasi dan ekspansi sektor usaha berbanding lurus dengan tersedianya lapangan kerja. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026, ketenagakerjaan menjadi hal yang strategis guna mengurangi angka pengangguran, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, serta menciptakan sistem ketenagakerjaan yang adaptif terhadap perkembangan industri dan teknologi.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga berfokus pada peningkatan kesejahteraan pekerja dengan mendorong sistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Upaya ini mencakup peningkatan upah yang layak, perlindungan tenaga kerja, serta perluasan akses terhadap jaminan sosial dan kesehatan bagi pekerja formal maupun informal. Dengan kebijakan yang terarah dan berbasis data ketenagakerjaan yang akurat, diharapkan produktivitas tenaga kerja meningkat, daya beli masyarakat membaik, dan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara semakin berkelanjutan serta merata di seluruh wilayah.

Indikator yang menggambarkan kondisi ketenagakerjaan di Sumatera Utara mencakup berbagai aspek yang mencerminkan dinamika pasar tenaga kerja, tingkat kesejahteraan pekerja, serta tantangan dan peluang dalam sektor ketenagakerjaan. Berikut adalah beberapa indikator utama yang dapat digunakan untuk menganalisis kondisi ketenagakerjaan di Sumatera Utara:

1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK menunjukkan persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif dalam kegiatan ekonomi, baik bekerja maupun mencari pekerjaan. Indikator ini mencerminkan sejauh mana penduduk Sumatera Utara terlibat dalam pasar tenaga kerja dan potensi sumber daya manusia yang tersedia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator penting dalam mengukur keterlibatan penduduk usia kerja dalam perekonomian suatu daerah.

Pada Tabel 3.11, peningkatan TPAK Sumatera Utara dari 71,06% pada Agustus 2023 menjadi 71,36% pada Agustus 2024 menunjukkan adanya peningkatan keterlibatan tenaga kerja dalam aktivitas ekonomi. Kenaikan ini sebesar 0,3 persen poin mencerminkan bertambahnya jumlah penduduk yang memasuki pasar kerja, baik dalam bentuk bekerja maupun mencari pekerjaan. Hal ini bisa menjadi sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah, karena semakin banyaknya tenaga kerja yang produktif berkontribusi terhadap sektor-sektor industri, pertanian, dan jasa.



**Tabel 3.11 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Sumatera Utara
Agustus 2023–Agustus 2024**

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2023	Agustus 2024	Perubahan Ags'2023–Ags'2024 (persen)	
	ribu orang	ribu orang	ribu orang	persen
Penduduk Usia Kerja (PUK)	11.289	11.464	175	1,55
Angkatan Kerja	8.022	8.181	159	1,98
- Bekerja	7.550	7.723	173	2,30
- Pengangguran	472	458	-14	-3,01
Bukan Angkatan Kerja	3.267,00	3.283,00	16,00	0,50
	persen	persen	persen poin	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	71,06	71,36	0,3	
- Laki-Laki	84,40	84,25	-0,15	
- Perempuan	57,81	58,54	0,73	

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Dari sisi jumlah, penduduk usia kerja meningkat dari 11,28 juta orang pada 2023 menjadi 11,46 juta orang pada 2024, atau naik sebesar 175 ribu orang (1,55%). Sejalan dengan itu, angkatan kerja juga mengalami peningkatan yang lebih besar, yaitu dari 8,02 juta menjadi 8,18 juta orang, naik sebesar 159 ribu orang (1,98%). Peningkatan jumlah angkatan kerja ini menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk yang aktif secara ekonomi, baik karena faktor peluang kerja yang lebih baik maupun meningkatnya kebutuhan ekonomi yang mendorong lebih banyak orang untuk bekerja.

Dari segi status pekerjaan, jumlah penduduk yang bekerja mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari 7,55 juta orang menjadi 7,72 juta orang, atau naik 173 ribu orang (2,30%). Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam penciptaan lapangan kerja di Sumatera Utara, yang bisa jadi merupakan hasil dari pertumbuhan investasi dan perkembangan sektor-sektor ekonomi utama. Namun, yang menarik adalah penurunan jumlah pengangguran dari 472 ribu orang menjadi 458 ribu orang, atau turun sebesar 14 ribu orang (3,01%).

Namun, di sisi lain, jumlah penduduk yang tidak termasuk dalam angkatan kerja juga meningkat dari 3,26 juta menjadi 3,28 juta orang, naik sebesar 16 ribu orang (0,50%). Hal ini bisa menjadi indikasi bahwa masih ada sebagian penduduk usia kerja yang belum atau tidak ingin memasuki pasar tenaga kerja, baik karena alasan pendidikan, mengurus rumah tangga, atau keterbatasan akses terhadap peluang kerja yang sesuai.

Dari perspektif gender, TPAK laki-laki mengalami sedikit penurunan dari 84,40% menjadi 84,25%, sementara TPAK perempuan justru meningkat dari 57,81% menjadi 58,54%, atau naik sebesar 0,73 persen poin. Peningkatan partisipasi perempuan ini mencerminkan perbaikan dalam akses dan keterlibatan perempuan dalam dunia kerja, meskipun masih jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Faktor seperti kebijakan ketenagakerjaan yang lebih inklusif, peningkatan keterampilan perempuan, serta



pertumbuhan sektor-sektor yang lebih ramah bagi pekerja perempuan dapat menjadi alasan utama di balik tren ini.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja di Sumatera Utara mengalami perbaikan dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terserap dan menurunnya tingkat pengangguran. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam memastikan bahwa peningkatan jumlah angkatan kerja dapat diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan berkelanjutan. Pemerintah dan pelaku usaha perlu terus mendorong investasi dan inovasi di berbagai sektor ekonomi agar momentum positif ini dapat terus berlanjut, serta memastikan bahwa kelompok-kelompok tertentu, seperti perempuan dan pekerja dengan keterampilan rendah, tetap mendapatkan akses yang lebih luas terhadap pekerjaan yang layak.

2) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT mengukur persentase angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat mengindikasikan ketidakseimbangan antara penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan angkatan kerja, serta mencerminkan tantangan dalam dunia kerja di Sumatera Utara.

Data karakteristik pengangguran di Sumatera Utara periode Agustus 2023 hingga Agustus 2024 sebagaimana tersaji pada **Tabel 3.12** menunjukkan tren penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 5,89% menjadi 5,60%, mengalami penurunan sebesar 0,29 persen poin. Penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam serapan tenaga kerja di berbagai sektor, yang dapat dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi daerah serta kebijakan pemerintah yang lebih mendukung penciptaan lapangan kerja. Namun, meskipun terjadi perbaikan, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu dicermati lebih lanjut dalam aspek demografi, lokasi geografis, dan tingkat pendidikan.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, TPT laki-laki mengalami penurunan dari 5,58% menjadi 5,42%, sedangkan perempuan mengalami penurunan yang lebih signifikan dari 6,33% menjadi 5,85%. Meskipun kedua kelompok mengalami perbaikan, angka pengangguran perempuan masih lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi lebih banyak hambatan dalam memperoleh pekerjaan, seperti keterbatasan akses ke sektor formal, norma sosial, dan kurangnya fleksibilitas dalam dunia kerja.

Dilihat dari daerah tempat tinggal, pengangguran di wilayah perkotaan turun cukup signifikan dari 7,62% menjadi 7,04%, sedangkan di pedesaan hanya mengalami sedikit perubahan dari 3,72% menjadi 3,67%. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pengangguran di perkotaan masih jauh lebih tinggi dibandingkan di pedesaan. Hal ini dapat dikaitkan dengan persaingan kerja yang lebih ketat di kota-kota besar, sementara di pedesaan, penduduk cenderung lebih mengandalkan sektor pertanian dan usaha informal sebagai sumber penghidupan.



Tabel 3.12 Karakteristik Pengangguran di Sumatera Utara Agustus 2023 - Agustus 2024

Karakteristik Pengangguran	Agustus 2023 (persen)	Agustus 2024 (persen)	Perubahan Ags'2023 - Ags'2024 (persen poin)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,89	5,60	-0,29
TPT Menurut Jenis Kelamin :			
- Laki-Laki	5,58	5,42	-0,16
- Perempuan	6,33	5,85	-0,48
TPT Menurut Daerah Tempat Tinggal :			
- Perkotaan	7,62	7,04	-0,58
- Perdesaan	3,72	3,67	-0,05
TPT Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan :			
- SD ke Bawah	3,18	3,68	0,5
- SMP	4,13	3,88	-0,25
- SMA	8,21	6,98	-1,22
- SMK	7,65	8,14	0,48
- Diploma I/II/III	5,14	4,22	-0,92
- Diploma IV, S1, S2, S3	6,25	5,52	-0,73

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Tingkat pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan dinamika yang menarik. Pengangguran dengan tingkat pendidikan SD ke bawah justru meningkat dari 3,18% menjadi 3,68%, yang bisa mengindikasikan bahwa pekerja dengan pendidikan rendah semakin sulit bersaing di pasar tenaga kerja yang semakin terdigitalisasi dan membutuhkan keterampilan lebih tinggi. Sementara itu, lulusan SMP dan SMA mengalami penurunan pengangguran masing-masing sebesar 0,25 persen poin dan 0,38 persen poin, yang menandakan bahwa peluang kerja untuk lulusan menengah semakin terbuka.

Kondisi yang cukup signifikan adalah penurunan pada pengangguran lulusan Diploma dan Sarjana. Pengangguran lulusan Diploma I/II/III turun dari 5,14% menjadi 4,22%, sedangkan lulusan Diploma IV/S1/S2/S3 mengalami penurunan terbesar dari 6,25% menjadi 5,52%. Ini menunjukkan adanya peningkatan serapan tenaga kerja dari lulusan perguruan tinggi, yang bisa jadi merupakan hasil dari pertumbuhan sektor industri dan jasa yang lebih banyak membutuhkan tenaga kerja terampil.

Secara umum, tren penurunan pengangguran di Sumatera Utara menunjukkan perkembangan positif dalam dunia kerja. Namun, tantangan masih tetap ada, terutama dalam mengatasi pengangguran di perkotaan, meningkatkan kesempatan kerja bagi perempuan, dan memperbaiki akses pekerjaan bagi tenaga kerja berpendidikan rendah. Oleh karena itu, kebijakan yang lebih berorientasi pada peningkatan keterampilan tenaga kerja, pemberdayaan ekonomi berbasis gender, dan penguatan sektor informal dapat menjadi langkah strategis untuk terus menekan angka pengangguran di tahun-tahun mendatang.

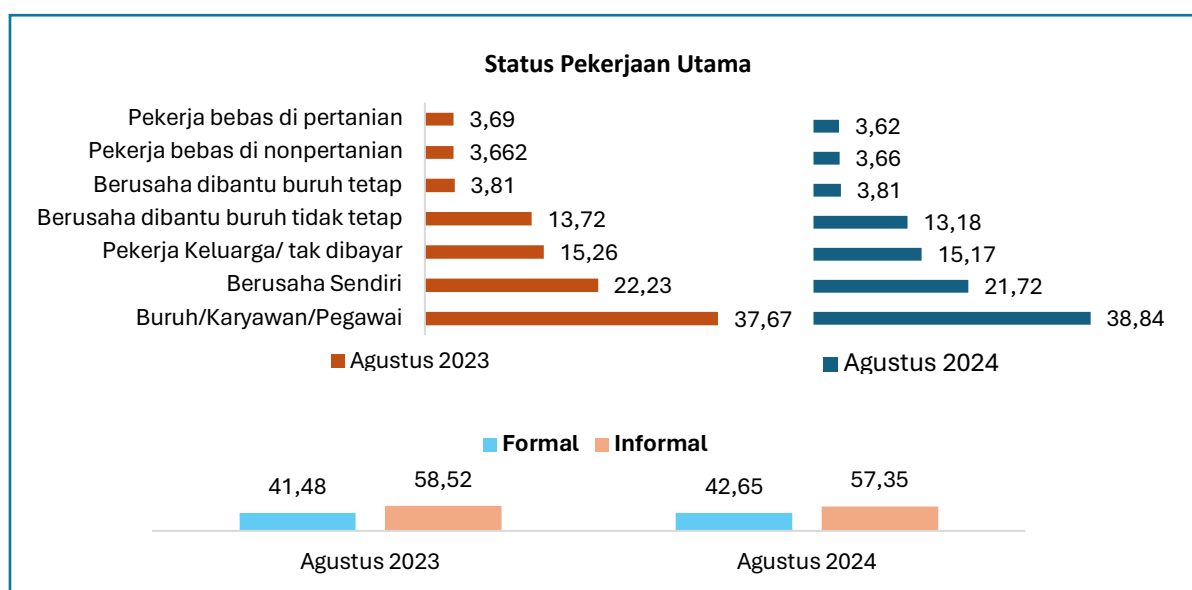


3) Persentase Pekerja Menurut Status Pekerjaan dan Kegiatan Formal/ Informal

Salah satu perubahan signifikan terlihat pada terkait persentase pekerja menurut status pekerjaan dan kegiatan formal/ informal sebagaimana tersaji pada grafik 3.4, peningkatan proporsi buruh/karyawan/pegawai dari 37,67% pada Agustus 2023 menjadi 38,84% pada Agustus 2024. Kenaikan ini mengindikasikan bertambahnya lapangan pekerjaan di sektor formal, baik di pemerintahan maupun di perusahaan swasta. Faktor-faktor seperti peningkatan investasi, pertumbuhan sektor industri dan jasa, serta kebijakan ketenagakerjaan yang mendukung penciptaan pekerjaan dengan status pegawai tetap dapat menjadi pendorong utama peningkatan ini.

Sebaliknya, persentase pekerja yang berusaha sendiri mengalami sedikit penurunan dari 22,23% menjadi 21,72%. Hal ini dapat mencerminkan pergeseran dari usaha mandiri ke pekerjaan yang lebih stabil di sektor formal. Di satu sisi, penurunan ini dapat mengindikasikan berkurangnya kewirausahaan, tetapi di sisi lain, ini juga bisa menunjukkan bahwa lebih banyak pekerja mandiri yang beralih ke pekerjaan dengan penghasilan lebih pasti di sektor formal.

Gambar 3. 4 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Kegiatan Formal/ Informal, Agustus 2023–Agustus 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Pekerja keluarga atau pekerja yang tidak dibayar tetap berada dalam proporsi yang relatif stabil, dengan sedikit penurunan dari 15,26% menjadi 15,17%. Sementara itu, pekerja yang berusaha dibantu buruh tidak tetap juga mengalami sedikit penurunan dari 13,72% menjadi 13,18%, yang menunjukkan adanya tantangan bagi usaha kecil dalam mempertahankan atau memperluas skala usahanya.

Di sektor pekerja bebas, baik di nonpertanian maupun pertanian, tidak terjadi perubahan yang signifikan. Pekerja bebas di nonpertanian hanya



turun sedikit dari 3,662% menjadi 3,66%, sementara pekerja bebas di pertanian turun dari 3,69% menjadi 3,62%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor informal, terutama di bidang pertanian dan pekerjaan lepas, masih cukup stabil meskipun terdapat peningkatan dalam pekerjaan formal.

4) Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK)

Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) merupakan indikator komposit yang menggambarkan keberhasilan kemanfaatan program pembangunan ketenagakerjaan yang diukur secara komposit berdasarkan 9 (sembilan) dimensi, yaitu Perencanaan Tenaga Kerja, Penduduk dan Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja, Pelatihan dan Kompetensi Kerja, Produktivitas Tenaga Kerja, Hubungan Industrial, Kondisi Lingkungan Kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Sumatera Utara 2022-2023 sebagaimana tersaji pada Grafik 3.5, menunjukkan dinamika pembangunan ketenagakerjaan di wilayah tersebut dalam berbagai aspek. Secara umum, terdapat peningkatan pada beberapa komponen, namun juga terdapat penurunan pada aspek-aspek tertentu yang mencerminkan tantangan yang masih dihadapi dalam sektor ketenagakerjaan dan ekonomi daerah.

Salah satu aspek yang mengalami peningkatan adalah Perencanaan Tenaga Kerja, yang naik dari 7,05 poin pada 2022 menjadi 7,89 poin pada 2023. Hal ini menunjukkan adanya upaya perbaikan dalam strategi perencanaan tenaga kerja, yang bisa mencakup peningkatan kualitas kebijakan ketenagakerjaan dan efektivitas program pelatihan. Namun, peningkatan ini harus diiringi dengan implementasi yang tepat agar menghasilkan dampak positif pada sektor tenaga kerja secara keseluruhan.

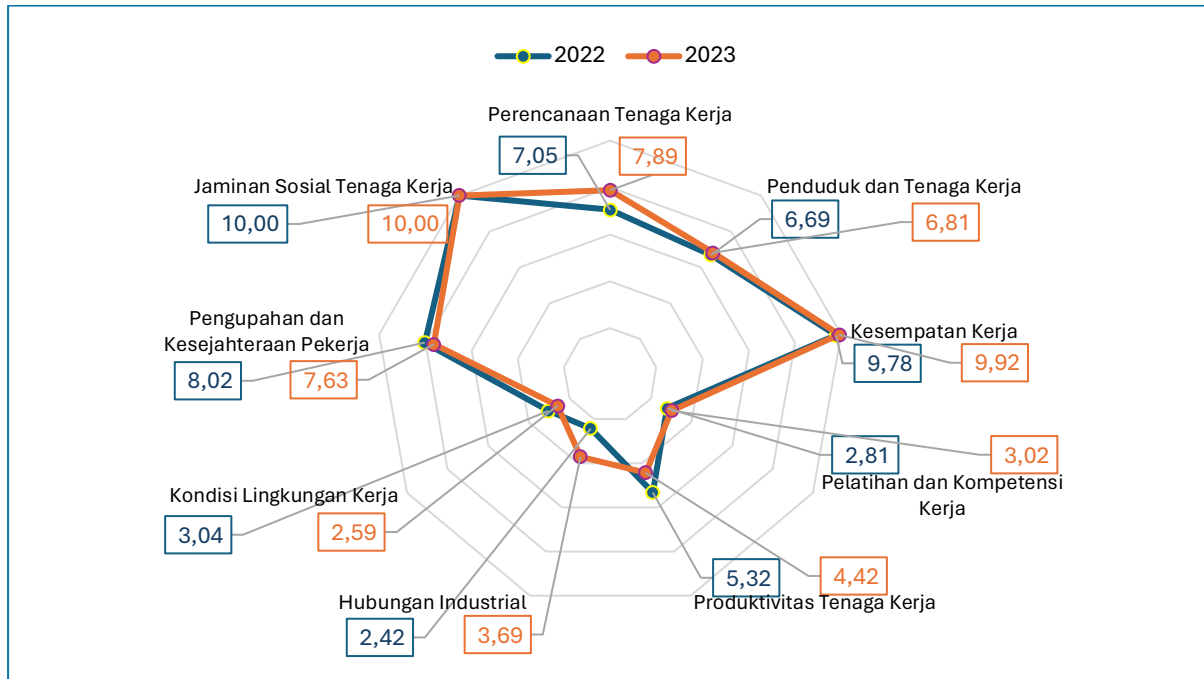
Di sisi lain, Kesempatan Kerja mengalami sedikit peningkatan dari 9,78 poin menjadi 9,92 poin. Meski peningkatannya kecil, angka ini menunjukkan bahwa peluang kerja di Sumatera Utara tetap tinggi. Namun, sektor industri dan pertanian yang mendominasi perekonomian Sumatera Utara harus mampu menyerap tenaga kerja dengan lebih baik, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti digitalisasi dan perubahan iklim yang berdampak pada sektor agraris.

Namun, ada beberapa indikator yang mengalami penurunan, salah satunya adalah Produktivitas Tenaga Kerja, yang turun dari 5,32 poin menjadi 4,42 poin. Ini bisa menjadi indikasi bahwa meskipun kesempatan kerja meningkat, efisiensi dan daya saing tenaga kerja masih menjadi masalah. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan kurangnya inovasi dalam sektor industri atau minimnya adopsi teknologi di berbagai sektor. Jika produktivitas tenaga kerja terus menurun, daya saing Sumatera Utara dalam perekonomian nasional maupun internasional bisa terhambat.

Hal yang perlu diperhatikan adalah Kondisi Lingkungan Kerja, yang mengalami sedikit penurunan dari 3,04 poin menjadi 2,59 poin. Lingkungan kerja yang kurang kondusif dapat berdampak pada kesejahteraan pekerja dan efektivitas kerja. Penurunan ini bisa mencerminkan masih adanya

masalah dalam aspek perlindungan tenaga kerja, kesehatan dan keselamatan kerja, atau kepatuhan perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan.

Gambar 3. 5 Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara 2022-2023



Sumber: IPK TAHUN 2023, Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan Badan Perencanaan Dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI

Salah satu aspek yang tetap stabil adalah Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang bertahan di angka 10,00 poin untuk dua tahun berturut-turut. Ini menunjukkan bahwa sistem jaminan sosial bagi pekerja di Sumatera Utara cukup baik dan stabil. Dengan adanya perlindungan sosial yang kuat, para pekerja memiliki jaminan dalam menghadapi risiko seperti kecelakaan kerja atau pemutusan hubungan kerja.

Secara keseluruhan, kondisi IPK Sumatera Utara Tahun 2022-2023 mencerminkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam beberapa aspek pembangunan ketenagakerjaan di Sumatera Utara, masih ada tantangan besar dalam meningkatkan produktivitas dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik. Pemerintah daerah dan pelaku usaha perlu bekerja sama untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja, memperbaiki regulasi ketenagakerjaan, dan mendorong investasi di sektor-sektor strategis agar pembangunan ketenagakerjaan bisa lebih optimal dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

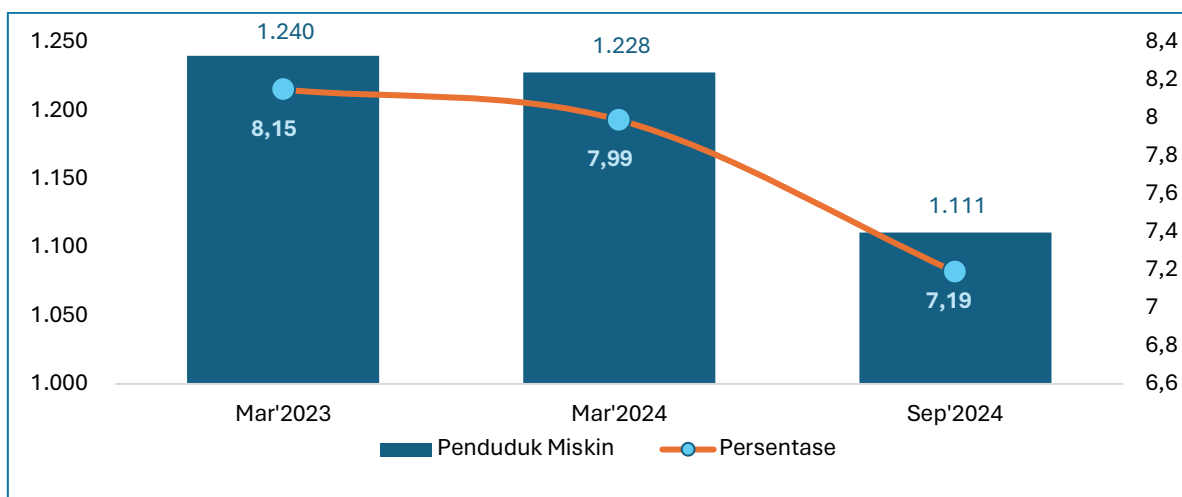
3.1.1.2. Tingkat Kemiskinan

Perkembangan kemiskinan di Sumatera Utara sebagaimana terlihat pada grafik 3.6 menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan antara



Maret 2023 hingga September 2024. Jumlah penduduk miskin yang pada Maret 2023 masih berada di angka 1,240 juta jiwa (8,15%) mengalami penurunan bertahap menjadi 1,228 juta jiwa (7,99%) pada Maret 2024, dan kemudian turun lebih jauh menjadi 1,111 juta jiwa (7,19%) pada September 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam kondisi ekonomi masyarakat serta efektivitas kebijakan yang diterapkan untuk mengurangi kemiskinan di daerah tersebut.

Gambar 3. 6 Perkembangan Kemiskinan Sumatera Utara Maret 2023-September 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Salah satu faktor utama yang dapat menjelaskan penurunan kemiskinan ini adalah meningkatnya aktivitas ekonomi dan peluang kerja yang lebih luas. Berdasarkan data tenaga kerja sebelumnya, terjadi peningkatan jumlah pekerja di sektor formal, yang berkontribusi pada stabilitas pendapatan rumah tangga. Selain itu, peningkatan investasi baik dari dalam negeri (PMDN) maupun asing (PMA) di Sumatera Utara juga dapat menjadi faktor pendorong utama, karena menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Di sisi lain, program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah daerah dan pusat kemungkinan turut memberikan dampak positif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Program seperti bantuan langsung tunai, subsidi kebutuhan pokok, serta program pemberdayaan UMKM bisa berperan dalam meningkatkan daya beli masyarakat dan membantu mereka keluar dari garis kemiskinan.

Namun, meskipun tren ini menunjukkan arah yang positif, masih terdapat tantangan yang perlu diperhatikan. Penurunan persentase penduduk miskin tidak hanya harus dipertahankan tetapi juga harus dipastikan bahwa mereka yang keluar dari kategori miskin tidak kembali ke dalamnya akibat ketidakstabilan ekonomi. Selain itu, ketimpangan ekonomi serta kesenjangan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan masih



menjadi faktor yang dapat memperlambat laju penurunan kemiskinan di masa depan.

Disisi lain, data kemiskinan di Sumatera Utara sepanjang tahun 2024 berdasarkan daerah perkotaan dan perdesaan sebagaimana tersaji pada Tabel 3.12, menunjukkan tren penurunan baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Pada Maret 2024, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 1,228 juta jiwa atau 7,99% dari total populasi. Namun, pada September 2024, angka ini menurun menjadi 1,110 juta jiwa atau 7,19%. Penurunan ini menunjukkan perbaikan kondisi ekonomi yang cukup signifikan dalam kurun waktu enam bulan.

Tabel 3.13 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Sumatera Utara Menurut Daerah, Maret 2024-September 2024

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)
Perkotaan		
Mar'2024	697,46	7,93
Sep'2024	623,78	7,01
Perdesaan		
Mar'2024	530,55	8,08
Sep'2024	487,14	7,44
Total		
Mar'2024	1.228,01	7,99
Sep'2024	1.110,92	7,19

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Jika ditinjau berdasarkan wilayah, kemiskinan di daerah perkotaan mengalami penurunan yang cukup besar. Pada Maret 2024, jumlah penduduk miskin di perkotaan tercatat sebanyak 697,46 ribu jiwa dengan persentase kemiskinan 7,93%. Angka ini menurun menjadi 623,78 ribu jiwa atau 7,01% pada September 2024. Hal ini dapat dikaitkan dengan peningkatan aktivitas ekonomi di sektor industri, perdagangan, dan jasa yang lebih berkembang di kawasan perkotaan. Selain itu, kebijakan investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja di sektor formal turut berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan di daerah ini.

Sementara itu, di wilayah perdesaan, jumlah penduduk miskin juga mengalami penurunan dari 530,55 ribu jiwa (8,08%) pada Maret 2024 menjadi 487,14 ribu jiwa (7,44%) pada September 2024. Meskipun masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan, tren penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam sektor pertanian dan kegiatan ekonomi berbasis pedesaan. Program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, peningkatan infrastruktur, serta akses yang lebih baik terhadap pasar dan



teknologi kemungkinan besar berkontribusi terhadap pengurangan angka kemiskinan di wilayah ini.

Penurunan kemiskinan di Sumatera Utara pada tahun 2024 juga dapat dikaitkan dengan berbagai kebijakan pemerintah, seperti bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, peningkatan kesempatan kerja, serta upaya mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inklusif. Meskipun demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam memastikan bahwa kelompok masyarakat yang telah keluar dari kategori miskin tidak kembali jatuh ke dalam kemiskinan akibat ketidakstabilan ekonomi atau kurangnya akses terhadap pekerjaan yang berkelanjutan. Tren positif ini perlu dipertahankan dengan mendorong lebih banyak investasi di sektor produktif, memperkuat program pelatihan keterampilan kerja, serta meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas.

3.1.1.3. Rasio Gini

Rasio Gini merupakan indikator yang mencerminkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di suatu wilayah. Data perkembangan Gini Ratio di Sumatera Utara sepanjang tahun 2024 sebagaimana tersaji pada Gambar 3.7. dibawah menunjukkan adanya fluktuasi dalam tingkat ketimpangan ekonomi, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Pada Maret 2024, rasio Gini di Sumatera Utara berada di angka 0,297, menurun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 0,309. Namun, pada September 2024, angka ini kembali mengalami sedikit peningkatan menjadi 0,306, menunjukkan bahwa meskipun ketimpangan sempat berkurang, namun tantangan dalam distribusi pendapatan masih tetap ada.

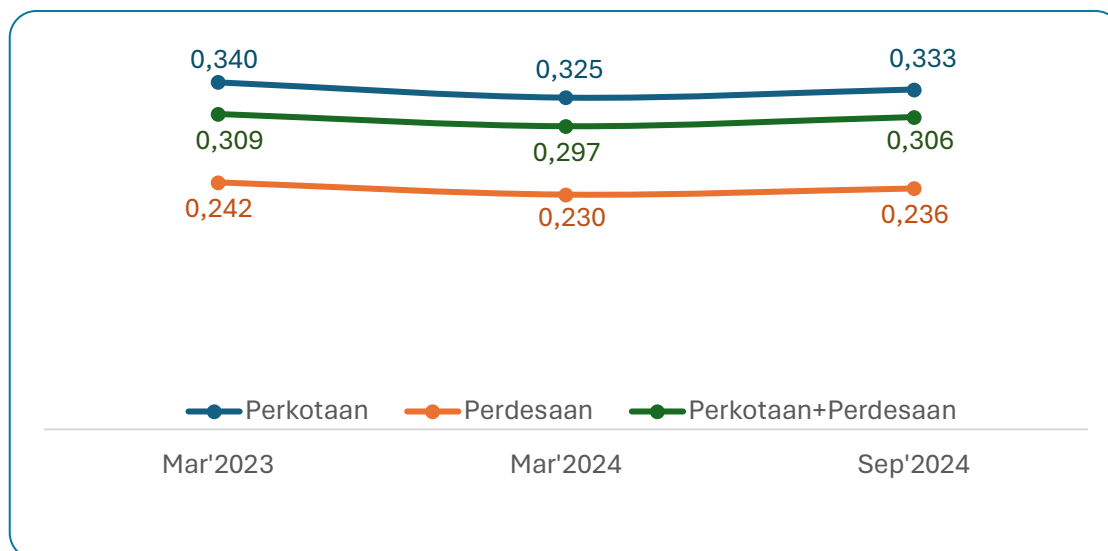
Di wilayah perkotaan, Gini Ratio menunjukkan tren penurunan dari 0,340 pada Maret 2023 menjadi 0,325 pada Maret 2024, menandakan adanya perbaikan dalam distribusi pendapatan. Hal ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh pertumbuhan sektor formal yang lebih inklusif, di mana semakin banyak penduduk yang memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang lebih stabil. Namun, pada September 2024, angka ini kembali naik menjadi 0,333, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya kesenjangan pendapatan antara kelompok pekerja yang memiliki akses terhadap pekerjaan berkualitas tinggi dan mereka yang masih berada di sektor informal dengan pendapatan yang fluktuatif.

Sementara itu, di daerah perdesaan, rasio Gini mengalami tren yang relatif lebih stabil. Dari 0,242 pada Maret 2023, turun menjadi 0,230 pada Maret 2024, lalu sedikit meningkat menjadi 0,236 pada September 2024. Ketimpangan yang lebih rendah di wilayah perdesaan dibandingkan perkotaan menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di desa cenderung lebih merata, kemungkinan karena mayoritas masyarakat di sana masih bergantung pada sektor pertanian dan usaha mikro yang tidak memiliki perbedaan pendapatan yang terlalu mencolok. Namun, peningkatan ketimpangan pada September 2024 dapat mencerminkan adanya disparitas akses terhadap sumber daya ekonomi, seperti modal usaha, lahan pertanian



produktif, serta teknologi pertanian yang hanya bisa dinikmati oleh sebagian kecil kelompok masyarakat.

Gambar 3. 7 Perkembangan Gini Ratio Sumatera Utara Maret 2024 – September 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Secara keseluruhan, meskipun Sumatera Utara mengalami penurunan ketimpangan ekonomi pada awal 2024, peningkatan kembali rasio Gini pada September 2024 mengindikasikan bahwa upaya pemerataan ekonomi masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Pemerintah dan pelaku ekonomi perlu mendorong kebijakan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan tersebut bersifat inklusif dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Penguatan sektor UMKM, peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta kebijakan investasi yang merata antara kota dan desa dapat menjadi langkah strategis dalam menekan ketimpangan pendapatan di Sumatera Utara.

Dengan langkah yang tepat, Sumatera Utara dapat memperkuat daya saing ekonominya sekaligus menjaga keseimbangan distribusi pendapatan. Stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat pun dapat lebih terjamin apabila ketimpangan ekonomi dapat dikendalikan secara berkelanjutan.

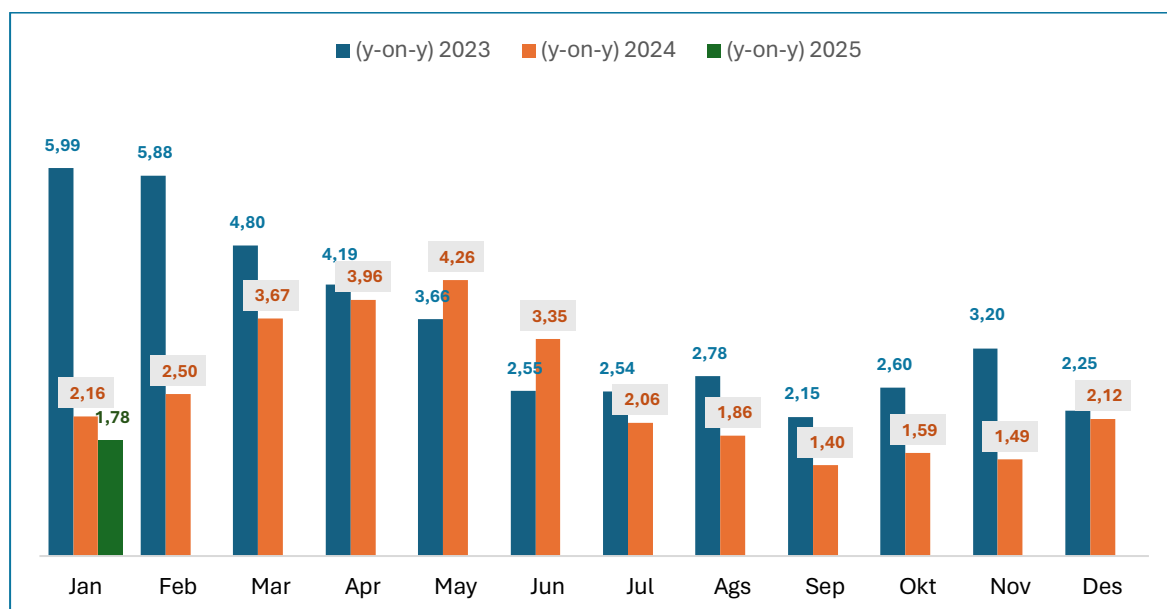
3.1.1.4. Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai stabilitas ekonomi suatu daerah, termasuk di Sumatera Utara. Berdasarkan data perkembangan inflasi year-on-year (Y-on-Y) dari tahun 2023 hingga 2025 sebagaimana tersaji pada Gambar 3.8. dibawah, terlihat adanya tren penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2023, inflasi masih berada di kisaran tinggi, mencapai puncaknya pada Januari sebesar 5,99%. Namun, memasuki tahun 2024, angka inflasi mengalami perlambatan dengan



penurunan yang cukup konsisten setiap bulannya, meskipun sempat meningkat pada Mei dan Juni. Pada awal tahun 2025, inflasi semakin terkendali dengan angka yang lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya, menunjukkan perbaikan kondisi ekonomi daerah.

Gambar 3. 8 Tingkat Inflasi Year-on-Year (Y-on-Y) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023-2025 (dalam persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Penurunan inflasi ini mengindikasikan keberhasilan kebijakan moneter dan fiskal dalam mengendalikan tekanan harga, terutama di sektor pangan dan energi yang biasanya menjadi penyumbang utama inflasi. Stabilitas harga ini juga mencerminkan keseimbangan antara permintaan dan penawaran barang serta jasa, yang dapat mendukung daya beli masyarakat. Jika tren ini terus berlanjut, maka ekonomi Sumatera Utara dapat bergerak menuju kondisi yang lebih stabil, di mana konsumsi rumah tangga tetap terjaga tanpa tekanan harga yang tinggi.

Namun, meskipun inflasi yang lebih rendah dapat mengurangi beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, hal ini juga harus diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Jika inflasi turun terlalu cepat tanpa diiringi peningkatan investasi dan pertumbuhan sektor riil, dikhawatirkan akan terjadi perlambatan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pengendalian inflasi tetap mendukung daya beli masyarakat serta mendorong pertumbuhan sektor produktif, seperti industri manufaktur, pertanian, dan perdagangan.

Selain itu, penurunan inflasi yang cukup tajam pada tahun 2025 dapat menunjukkan adanya potensi deflasi atau stagnasi ekonomi jika tidak dikelola dengan baik. Untuk itu, kebijakan yang berfokus pada peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan daya saing UMKM menjadi sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, Sumatera



Utara dapat terus berkembang sebagai daerah dengan ekonomi yang kuat, stabil, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

3.1.1.5. Kontribusi Kabupaten/Kota Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara

Kontribusi kabupaten/kota terhadap perekonomian Sumatera Utara menunjukkan struktur spasial yang beragam, tergantung pada karakteristik geografis, kekuatan sektor unggulan, dan ketersediaan infrastruktur di masing-masing wilayah. Tabel 3.14 memperlihatkan perbedaan capaian indikator ekonomi antar wilayah yang dikelompokkan dalam empat zona: Pantai Timur, Pantai Barat, Dataran Tinggi, dan Kepulauan Nias, yang menggambarkan sebaran pertumbuhan dan tingkat kesejahteraan ekonomi secara lebih rinci.

Zona Pantai Timur merupakan episentrum aktivitas ekonomi di Sumatera Utara, dengan Kota Medan dan Deli Serdang sebagai motor utama penggerakannya. Medan mencatat kontribusi terbesar terhadap total PDRB (28,74%), didukung oleh keberadaannya sebagai pusat administrasi, perdagangan, dan jasa keuangan. Kota ini juga memiliki infrastruktur transportasi paling lengkap, termasuk pelabuhan Belawan dan Bandara Internasional Kualanamu, yang memperkuat konektivitas regional dan internasional.

Deli Serdang, dengan kontribusi 13,2% dan LPE sebesar 5,36%, menunjukkan peran pentingnya dalam mendukung rantai pasok logistik dan kawasan industri yang mengelilingi Medan. Infrastruktur kawasan industri seperti Kawasan Industri Medan (KIM) dan lokasi strategis di jalur logistik menjadikan daerah ini sebagai pusat manufaktur dan distribusi. Kabupaten seperti Labuhanbatu Selatan (124,52 juta rupiah per kapita) dan Batu Bara (108,19 juta) memiliki PDRB per kapita tinggi, menunjukkan efek positif dari investasi di sektor pertambangan dan energi, termasuk pembangunan pelabuhan industri Kuala Tanjung dan PLTU besar di wilayah ini. Namun, ketimpangan dalam zona ini tetap terlihat pada kota/kabupaten seperti Tebing Tinggi (Rp43,51 juta) dan Binjai (Rp50,75 juta), yang belum menikmati efek pengganda ekonomi secara merata. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun infrastruktur fisik dan sektor industri berkembang pesat di beberapa titik, perluasan manfaatnya ke daerah yang lebih kecil belum optimal. Strategi pengembangan ekonomi perlu diarahkan pada peningkatan konektivitas intra-zona dan pembangunan kawasan ekonomi terpadu untuk mendorong pemerataan.

Wilayah Pantai Barat memiliki kontribusi PDRB yang relatif kecil, namun menyimpan potensi besar pada sektor agrikultur dan sumber daya alam. Tapanuli Selatan (1,86%) dan Padang Lawas (1,60%) menampilkan laju pertumbuhan ekonomi masing-masing sebesar 5,12% dan 5,02%. Kedua wilayah ini memiliki cadangan lahan pertanian dan perkebunan yang luas, termasuk kelapa sawit dan karet, serta potensi panas bumi yang mulai dikembangkan. Namun, rendahnya kontribusi terhadap PDRB provinsi



menunjukkan bahwa nilai tambah dari produksi pertanian dan SDA belum teroptimalkan karena masih terbatasnya akses terhadap hilirisasi industri.

Tabel 3.14 Perbandingan Capaian Indikator Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

Kabupaten/ Kota	LPE ADHK (y-to-y, persen)	Distribusi PDRB ADHB (persen)	PDRB per Kapita ADHB (juta rupiah)
Zona Wilayah Pantai Timur			
Deli Serdang	5,36	13,2	73,93
Langkat	4,98	5,44	57,86
Serdang Bedagai	5,01	3,66	60,74
Batu Bara	4,12	4,13	108,19
Asahan	4,68	5,01	70,61
Labuhanbatu Utara	4,24	3,19	89,50
Labuhanbatu	5,06	4,43	97,59
Labuhanbatu Selatan	4,89	3,65	124,52
Tanjung Balai	4,91	1,06	65,76
Tebing Tinggi	3,37	0,69	43,51
Binjai	4,66	1,36	50,75
Medan	5,07	28,74	132,57
Zona Wilayah Pantai Barat			
Mandailing Natal	4,83	1,77	40,13
Tapanuli Selatan	5,12	1,86	67,23
Tapanuli Tengah	4,15	1,19	34,62
Padang Lawas Utara	4,99	1,55	63,55
Padang Lawas	5,02	1,60	65,29
Sibolga	3,92	0,63	78,49
Padangsidempuan	5,01	0,75	35,73
Zona Wilayah Dataran Tinggi			
Simalungun	4,89	5,14	56,00
Dairi	4,97	1,11	38,40
Karo	4,22	2,52	67,69
Tapanuli Utara	4,77	0,98	34,49
Toba	4,84	0,90	47,45
Humbang Hasundutan	4,79	0,72	39,95
Pakpak Bharat	5,02	0,15	30,58
Samosir	5,02	0,53	42,64
Pematangsiantar	4,61	1,51	62,63
Zona Wilayah Kepulauan Nias			
Nias	3,89	0,46	34,09
Nias Selatan	3,82	0,80	23,41
Nias Utara	3,64	0,42	30,19
Nias Barat	3,89	0,22	26,03



Kabupaten/ Kota	LPE ADHK (y-to-y, persen)	Distribusi PDRB ADHB (persen)	PDRB per Kapita ADHB (juta rupiah)
Gunungsitoli	3,84	0,64	50,41
Sumatera Utara	5,03	100,00	73,57

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Padang Lawas Utara (PDRB per kapita Rp63,55 juta) menunjukkan kinerja ekonomi yang baik untuk wilayah non-industri, meskipun sebagian besar kabupaten lain seperti Padangsidempuan dan Tapanuli Tengah masih memiliki nilai PDRB per kapita jauh di bawah rerata provinsi. Keterbatasan infrastruktur jalan dan akses ke pasar menjadi penghambat utama. Untuk itu, diperlukan pengembangan sentra agroindustri, penguatan koperasi pertanian, serta pembangunan jalan penghubung antarwilayah untuk menstimulasi pertumbuhan.

Daerah dataran tinggi seperti Simalungun (5,14%) dan Karo (2,52%) menjadi kontributor utama dalam zona ini. Simalungun mencatat LPE sebesar 4,89% dengan PDRB per kapita Rp56 juta, menandakan bahwa sektor pertanian (khususnya perkebunan teh, sawit, dan hortikultura) masih menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Kabupaten Karo, yang dikenal sebagai lumbung hortikultura Sumatera Utara, mencatat PDRB per kapita cukup tinggi (Rp67,69 juta), didukung oleh kegiatan agroindustri dan sektor pariwisata seperti kawasan Tongging dan Berastagi. Namun demikian, wilayah seperti Pakpak Bharat dan Tapanuli Utara menunjukkan kontribusi ekonomi yang sangat rendah. Pakpak Bharat bahkan hanya menyumbang 0,15% dari total PDRB, dengan PDRB per kapita Rp30,58 juta, yang menandakan keterisolasian wilayah dan terbatasnya skala ekonomi. Keterbatasan akses jalan dan pasar menyebabkan hasil pertanian tidak dapat memberikan nilai ekonomi yang optimal. Pengembangan kawasan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata super prioritas diharapkan menjadi katalis pertumbuhan, tetapi dibutuhkan sinergi antara pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal agar manfaatnya terasa luas.

Wilayah Kepulauan Nias tetap menjadi zona dengan kontribusi ekonomi terendah dan pertumbuhan paling lambat. Kabupaten seperti Nias Selatan (0,80%) dan Nias Utara (0,42%) menunjukkan angka PDRB per kapita yang sangat rendah (Rp23,41 juta dan Rp30,19 juta). LPE di seluruh kabupaten zona ini berkisar antara 3,64% hingga 3,89%, jauh di bawah rata-rata provinsi. Tingginya ketergantungan terhadap sektor pertanian tradisional dan minimnya aktivitas industri serta perdagangan menjadi penghambat utama.

Akses logistik yang terbatas, infrastruktur pelabuhan dan jalan yang belum memadai, serta keterbatasan layanan dasar seperti listrik dan internet memperparah keterisolasian ekonomi wilayah ini. Padahal, Kepulauan Nias memiliki kekayaan budaya dan potensi wisata bahari yang luar biasa. Untuk mempercepat pertumbuhan, dibutuhkan strategi pembangunan berbasis



maritim dan pariwisata, seperti pembangunan pelabuhan perintis, penguatan UMKM lokal, dan insentif investasi di sektor wisata.

Dengan melihat variasi capaian antarwilayah ini, semakin jelas bahwa Sumatera Utara membutuhkan pendekatan pembangunan berbasis keunggulan lokal (place-based development). Pantai Timur perlu mendorong inklusi wilayah pinggiran; Pantai Barat dan Dataran Tinggi memerlukan konektivitas dan hilirisasi produk unggulan; sementara Kepulauan Nias membutuhkan transformasi struktural ekonomi dengan dukungan infrastruktur dasar dan strategi kawasan tertinggal. Pendekatan terarah ini akan menjadi landasan untuk membangun pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Sumatera Utara.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Sumatera Utara 2026

Pembahasan mengenai tantangan dan prospek perekonomian daerah dalam dokumen perencanaan tahunan memiliki peran krusial dalam memastikan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Dengan memahami berbagai tantangan seperti ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi harga komoditas, ketimpangan antarwilayah, serta dampak perubahan iklim, pemerintah daerah dapat merumuskan strategi mitigasi yang lebih efektif. Di sisi lain, identifikasi prospek ekonomi membantu dalam menggali peluang pertumbuhan di sektor-sektor unggulan, seperti industri pengolahan, pertanian berbasis teknologi, pariwisata, dan ekonomi digital. Analisis ini memastikan bahwa kebijakan yang disusun tidak hanya reaktif terhadap permasalahan jangka pendek, tetapi juga proaktif dalam mendorong daya saing daerah di tingkat nasional dan global.

Selain itu, tantangan dan prospek perekonomian daerah menjadi dasar dalam pengalokasian sumber daya dan perencanaan program pembangunan yang lebih efisien. Dengan mempertimbangkan tantangan dan prospek secara komprehensif, pemerintah daerah dapat mengarahkan investasi pada sektor-sektor prioritas yang memiliki dampak ekonomi luas dan berkelanjutan. Selain itu, pemahaman terhadap dinamika ekonomi daerah juga membantu dalam menciptakan kebijakan yang lebih inklusif, melibatkan peran sektor swasta, masyarakat, dan akademisi dalam membangun ekosistem ekonomi yang kuat dan adaptif. Dengan demikian, dokumen perencanaan tahunan dapat menjadi instrumen strategis yang tidak hanya merespons kondisi saat ini, tetapi juga menyiapkan fondasi ekonomi daerah yang tangguh dan berdaya saing di masa depan.

Salah satu tantangan terbesar adalah ketidakpastian ekonomi global yang dapat berdampak pada ekspor komoditas utama Sumatera Utara, seperti kelapa sawit, karet, dan kopi. Fluktuasi harga komoditas dunia serta kebijakan proteksionisme dari negara mitra dagang bisa berdampak pada kinerja perdagangan luar negeri. Oleh karena itu, strategi diversifikasi produk dan hilirisasi industri menjadi sangat penting agar Sumatera Utara tidak terlalu bergantung pada ekspor bahan mentah.

Tantangan lainnya adalah pengendalian inflasi dan stabilitas harga bahan pokok. Meskipun inflasi di Sumatera Utara menunjukkan tren



penurunan dalam beberapa tahun terakhir, tekanan harga akibat gangguan rantai pasok, kenaikan harga energi global, serta faktor cuaca ekstrem masih berpotensi mengganggu daya beli masyarakat. Pemerintah perlu meningkatkan ketahanan pangan dengan memperkuat produksi domestik, memperbaiki infrastruktur logistik, serta memastikan distribusi bahan pokok berjalan lancar di seluruh wilayah.

Dari sisi ketenagakerjaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia masih menjadi agenda utama. Meskipun tingkat pengangguran mengalami penurunan, masih terdapat kesenjangan antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Jika tidak diatasi, hal ini bisa menghambat pertumbuhan industri manufaktur dan jasa yang semakin berkembang di Sumatera Utara. Oleh karena itu, program pendidikan vokasi, pelatihan keterampilan berbasis teknologi, serta kemitraan antara dunia usaha dan pendidikan harus diperkuat agar tenaga kerja lokal lebih siap menghadapi persaingan global.

Selain itu, kesenjangan ekonomi antara perkotaan dan perdesaan masih menjadi isu krusial. Data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan, meskipun ada tren penurunan. Ketimpangan ini perlu ditangani dengan kebijakan yang lebih inklusif, termasuk mendorong investasi di sektor agribisnis, memberikan akses keuangan bagi UMKM, serta mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di wilayah-wilayah tertinggal.

Memasuki tahun 2025, kondisi makroekonomi Sumatera Utara diperkirakan mengalami perbaikan yang cukup signifikan, didukung oleh tren positif dalam pengendalian inflasi, peningkatan investasi, dan penguatan daya beli masyarakat. Data historis menunjukkan bahwa inflasi di Sumatera Utara telah mengalami penurunan yang konsisten dari tahun 2023 hingga 2025, mencerminkan stabilitas harga yang lebih baik. Namun, tantangan global seperti ketidakpastian ekonomi dunia, perubahan kebijakan suku bunga di negara maju, serta dinamika geopolitik dapat menjadi faktor eksternal yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, strategi pembangunan tahun 2026 harus diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makroekonomi guna menghadapi berbagai tantangan tersebut.

3.1.2.1. Tantangan Ekonomi Global dan Dampaknya terhadap Sumatera Utara

Perekonomian Sumatera Utara mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,03% pada tahun 2024, suatu capaian yang stabil dan mencerminkan pemulihan ekonomi pascapandemi serta meningkatnya aktivitas konsumsi, perdagangan, dan investasi di tingkat regional. Namun, menghadapi tahun 2025 dan 2026, Sumatera Utara akan berhadapan dengan tantangan baru yang bersumber dari perlambatan ekonomi global dan nasional.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia menunjukkan tren penurunan dari 3,3% di 2024, menjadi 2,8% pada 2025, dan hanya sedikit membaik ke 3,0% di 2026. Perlambatan ini sebagian besar dipicu oleh melemahnya



permintaan dari negara-negara maju, termasuk Amerika Serikat (1,83% di 2025) dan Jerman (-0,05% di 2025), serta tekanan geopolitik dan kebijakan moneter ketat yang membatasi ekspansi fiskal. Dalam konteks tersebut, daya beli global melemah, dan akan berdampak langsung pada kinerja ekspor Sumatera Utara, terutama produk andalan seperti kelapa sawit, karet, kopi, dan komoditas perkebunan lainnya.

Tabel 3.15 Pertumbuhan Ekonomi Negara-negara Dunia dan Proyeksinya Tahun 2025-2026

Negara / Kelompok	2024	2025 (proyeksi)	2026 (proyeksi)
Perekonomian Dunia (World Output)	3.30	2.80	3.00
Negara Maju (Advanced Economies)	1.80	1.40	1.50
Amerika Serikat	2.80	1.83	1.74
Jerman	-0.23	-0.05	0.92
Perancis	1.07	0.64	1.02
Jepang	0.08	0.55	0.58
Inggris	1.10	1.08	1.41
Negara Emerging Market dan Berkembang	4.30	3.70	3.90
Tiongkok	5.00	3.95	3.96
India	6.46	6.20	6.27
Indonesia	5.03	4.65	4.67
Singapura	2.20	2.40	2.60
Malaysia	5.11	4.10	3.80
Thailand	2.53	1.80	1.60
Philipina	5.69	5.48	5.76

Sumber : IMF, *World Economic Outlook April 2025*

Di dalam negeri, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan melambat menjadi 4,65% pada 2025 dan hanya sedikit meningkat menjadi 4,67% pada 2026, menandakan bahwa perekonomian nasional pun berada dalam tekanan eksternal. Meskipun konsumsi domestik masih menjadi penopang utama, ketidakpastian global dapat menurunkan aliran investasi dan ekspor bersih. Dengan pertumbuhan nasional yang melambat, pertumbuhan daerah seperti Sumatera Utara akan sangat ditentukan oleh kekuatan struktural ekonomi lokal dan efektivitas kebijakan regional.

Jika pertumbuhan Sumatera Utara ingin dipertahankan di atas 5% seperti tahun 2024, maka diperlukan strategi diversifikasi yang lebih agresif, terutama dalam menghadapi kemungkinan penurunan permintaan ekspor dan perlambatan pertumbuhan di pusat-pusat ekonomi nasional. Ketergantungan terhadap sektor primer akan menjadi kelemahan jika tidak dibarengi dengan industrialisasi berbasis agro dan ekspansi sektor jasa bernilai tambah.

Dengan capaian PDRB Sumatera Utara tahun 2024 yang mencapai Rp1.146,9 triliun (harga berlaku), daerah ini memegang peran penting sebagai kontributor terbesar PDRB di Pulau Sumatera. Namun,



mempertahankan pertumbuhan di tengah pelemahan global menuntut penguatan sektor-sektor yang tangguh terhadap tekanan eksternal. Sektor perdagangan, akomodasi, dan industri pengolahan perlu dioptimalkan melalui pengembangan hilirisasi, efisiensi logistik, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Proyek-proyek strategis seperti KEK Sei Mangkei dan Pelabuhan Kuala Tanjung harus didorong agar mampu menarik investasi sektor manufaktur, yang dapat menggantikan potensi penurunan ekspor bahan mentah. Begitu pula, pengembangan kawasan pariwisata seperti Danau Toba yang sudah berstatus destinasi super prioritas harus dijadikan motor pertumbuhan baru, khususnya pada saat ekspor sedang melambat.

Risiko lainnya adalah volatilitas harga komoditas ekspor utama, seperti CPO dan karet, yang sangat sensitif terhadap perlambatan di Tiongkok (3,95% di 2025) dan negara Eropa. Selain itu, kenaikan suku bunga global akan memperketat aliran modal ke negara berkembang, mengurangi ruang fiskal dan memperlambat pembangunan infrastruktur.

Untuk menghadapinya, Sumatera Utara perlu mengembangkan mekanisme adaptif, termasuk penguatan pasar domestik, peningkatan produktivitas UMKM, serta pembangunan ekonomi hijau. Sektor pertanian yang masih menjadi basis utama harus mulai diarahkan ke sistem pertanian berkelanjutan dan terintegrasi dengan rantai pasok industri makanan dan minuman modern.

Perlambatan ekonomi dunia dan nasional pada tahun 2025 dan 2026 berpotensi menekan kinerja perekonomian Sumatera Utara jika tidak diantisipasi dengan langkah-langkah strategis. Meski tahun 2024 menunjukkan capaian pertumbuhan yang cukup baik, keberlanjutan pertumbuhan pada 2026 akan sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam mengelola dampak eksternal, mendorong investasi produktif, mempercepat diversifikasi sektor ekonomi, dan membangun fondasi ekonomi lokal yang lebih resilien. Kombinasi kebijakan yang responsif dan koordinasi multipihak akan menjadi penentu utama apakah Sumatera Utara dapat menjaga momentum atau harus menghadapi perlambatan yang lebih tajam dalam beberapa tahun ke depan.

3.1.2.2. Tantangan Ekonomi Nasional dan Dampaknya terhadap Sumatera Utara

Pada tahun 2024, perekonomian Sumatera Utara mencatat pertumbuhan sebesar 5,03% (c-to-c), sedikit meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 5,01% . Pertumbuhan ini mencerminkan ketahanan ekonomi daerah di tengah dinamika global dan nasional yang kompleks. Namun, prospek ekonomi Sumatera Utara pada tahun 2025 dan 2026 menghadapi tantangan yang signifikan akibat perlambatan ekonomi nasional. Perekonomian nasional Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi sebesar 5,03%. Namun, proyeksi dari International Monetary Fund (IMF) dalam World



Economic Outlook (WEO) April 2025 mengindikasikan perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,65% pada tahun 2025 dan 4,67% pada tahun 2026. Perlambatan ini dipengaruhi oleh ketidakpastian global, termasuk meningkatnya tarif perdagangan dan ketegangan geopolitik, yang berdampak pada permintaan ekspor dan arus investasi.

Sebagai provinsi dengan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pulau Sumatera sebesar 23,54%, Sumatera Utara memiliki ketergantungan ekonomi yang erat dengan provinsi lain di kawasan tersebut. Interkoneksi ini terlihat dari rantai pasok industri, perdagangan antarwilayah, dan mobilitas tenaga kerja. Oleh karena itu, perlambatan ekonomi nasional dapat berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi di Sumatera Utara, terutama dalam hal investasi, konsumsi, dan ekspor. Selain itu, ketergantungan Sumatera Utara pada sektor pertanian, perkebunan, dan ekspor komoditas seperti kelapa sawit dan karet menjadikan provinsi ini rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Jika harga komoditas global mengalami penurunan akibat perlambatan permintaan dari mitra dagang utama seperti Tiongkok dan Uni Eropa, maka pendapatan petani dan daya beli masyarakat dapat tertekan. Diversifikasi ekonomi melalui pengembangan sektor manufaktur, industri pengolahan, dan pariwisata menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap komoditas tertentu dan meningkatkan ketahanan ekonomi daerah.

Potensi Sumatera Utara dalam sektor industri dan perdagangan perlu dioptimalkan melalui kebijakan hilirisasi sumber daya alam yang mendorong peningkatan nilai tambah produk ekspor. Namun, tantangan dalam kesiapan infrastruktur, ketersediaan energi, serta sumber daya manusia yang kompetitif harus segera diatasi agar daerah ini dapat berperan lebih besar dalam rantai pasok industri nasional. Proyek strategis seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei dan pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi jika didukung oleh kebijakan yang tepat dan investasi yang memadai. Selain itu, sektor pariwisata memiliki potensi besar untuk dikembangkan, terutama dengan keunggulan destinasi seperti Danau Toba yang telah ditetapkan sebagai destinasi super prioritas. Penguatan ekosistem pariwisata melalui pengembangan infrastruktur, digitalisasi promosi, dan peningkatan layanan dapat menjadi sumber pertumbuhan baru yang berkelanjutan.

Untuk mengatasi tantangan ini, Sumatera Utara perlu memperkuat diversifikasi ekonomi, meningkatkan nilai tambah produk melalui hilirisasi industri, dan mendorong investasi di sektor-sektor yang tahan terhadap guncangan eksternal. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kualitas infrastruktur dan sumber daya manusia untuk menarik investasi dan meningkatkan daya saing ekonomi provinsi.



3.1.2.3. Tantangan dan Proyeksi Ekonomi Sumatera Utara Tahun 2026

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada tahun 2024 menunjukkan capaian yang positif, dengan laju pertumbuhan sebesar 5,03%. Capaian ini mencerminkan ketahanan ekonomi daerah di tengah dinamika global dan nasional yang penuh tantangan. Namun, proyeksi pertumbuhan untuk tahun 2025 menunjukkan adanya potensi perlambatan, dengan estimasi pertumbuhan berada pada kisaran 4,99%. Perlambatan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik eksternal maupun domestik, yang memerlukan perhatian serius dari para pemangku kepentingan di daerah.

Dari sisi eksternal, perlambatan ekonomi global menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi proyeksi pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Ketegangan geopolitik di berbagai belahan dunia, seperti konflik dagang antara negara-negara besar, serta kebijakan moneter yang ketat di negara-negara maju, berpotensi menekan permintaan ekspor dari Sumatera Utara. Sebagai provinsi yang memiliki ketergantungan tinggi pada ekspor komoditas seperti kelapa sawit dan karet, penurunan permintaan global dapat berdampak signifikan terhadap pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.16 Target Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2025-2026

Lapangan Usaha	LPE 2024 ¹⁾	Proyeksi LPE 2025 ²⁾	Proyeksi LPE 2026 ²⁾	Target LPE 2025 ³⁾	Target LPE 2026 ³⁾
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,73	3,93	3,57	4,50- 5,06	5,24- 5,51
B. Pertambangan dan Penggalan	4,03	3,39	3,65	3,46- 3,48	0,07- 2,67
C. Industri Pengolahan	4,65	3,35	3,81	5,47- 6,39	7,28- 7,57
D. Pengadaan Listrik dan Gas	2,66	3,21	2,68	2,23- 2,25	2,73- 2,88
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,57	2,54	2,66	2,64- 2,66	2,55- 3,36
F. Konstruksi	6,52	5,32	6,08	5,79- 5,81	5,95- 6,08
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,44	5,60	5,28	5,33- 5,80	5,52- 5,94
H. Transportasi dan Pergudangan	6,33	10,81	10,09	5,24- 5,26	6,45- 7,26
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,98	9,82	10,68	11,17- 11,81	11,43- 12,50
J. Informasi dan Komunikasi	7,41	7,60	7,61	6,78- 6,80	6,55- 8,07
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,87	4,40	4,59	3,71- 3,73	3,59- 3,61
L. Real Estate	5,41	4,37	4,32	3,65- 3,67	3,69- 3,71
M,N. Jasa Perusahaan	5,12	6,86	6,23	4,38- 4,40	3,32- 3,34



Lapangan Usaha	LPE 2024 ¹⁾	Proyeksi LPE 2025 ²⁾	Proyeksi LPE 2026 ²⁾	Target LPE 2025 ³⁾	Target LPE 2026 ³⁾
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,08	2,42	3,48	3,09- 3,11	4,42- 5,42
P. Jasa Pendidikan	5,66	6,06	6,37	6,11- 6,13	6,43- 6,45
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,12	5,46	5,67	5,45- 5,47	6,36- 6,38
R,S,T,U Jasa Lainnya	6,54	8,25	8,09	7,45- 7,47	4,31- 4,48
PDRB	5,03	4,99	5,08	5,20- 5,60	5,80- 6,20

Keterangan :

1) BRS BPS Provsu No.13/02/12/Th. XXVIII, 5 Februari 2025

2) Proyeksi berdasarkan rata-rata pertumbuhan tahun berjalan

3) Target PDRB dari penyelarasan terhadap RPJMD, target per sektor disusun melalui pembobotan berdasarkan pertimbangan arah kebijakan, data diolah

Di tingkat nasional, kebijakan fiskal dan moneter yang diambil oleh pemerintah pusat juga berpengaruh terhadap perekonomian daerah. Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengubah skema pendapatan daerah, yang dapat memengaruhi alokasi dana transfer ke daerah dan struktur fiskal Sumatera Utara dalam jangka menengah. Selain itu, kebijakan efisiensi anggaran dapat menekan kapasitas fiskal, yang berfungsi sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dinamika politik yang terjadi di pertengahan tahun 2025 dikhawatirkan turut menyumbang perlambatan putaran ekonomi secara agregat.

Ketergantungan ekonomi Sumatera Utara terhadap sektor pertanian, perkebunan, dan ekspor komoditas juga menjadi tantangan tersendiri. Fluktuasi harga komoditas global dapat berdampak langsung pada pendapatan petani dan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, diversifikasi ekonomi menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap komoditas tertentu dan memperkuat sektor manufaktur, perdagangan, serta industri kreatif.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Sumatera Utara memiliki potensi yang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pengembangan sektor industri pengolahan, khususnya melalui hilirisasi produk pertanian dan perkebunan, dapat meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja baru. Proyek-proyek strategis seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei dan pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung juga dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, sektor pariwisata juga memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Destinasi wisata unggulan seperti Danau Toba, Bukit Lawang, dan Berastagi dapat menjadi penggerak ekonomi lokal jika dikelola dengan baik. Peningkatan infrastruktur pariwisata, promosi yang lebih agresif, serta pengembangan ekonomi kreatif



berbasis budaya akan membantu meningkatkan jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara.

Dari sisi pembangunan sosial, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan ekonomi yang inklusif harus terus dilakukan. Pemerintah perlu memperkuat program perlindungan sosial bagi kelompok rentan, mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, serta memastikan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak hanya bersifat numerik, tetapi juga berdampak nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Target laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada tahun 2026 menunjukkan optimisme yang lebih tinggi, dengan estimasi pertumbuhan PDRB mencapai 5,80% hingga 6,20%. Peningkatan ini mencerminkan dinamika sektor-sektor unggulan yang tetap tumbuh secara positif meskipun terdapat tantangan dalam beberapa sektor tertentu. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan ditargetkan mengalami pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan tahun 2024, dengan laju pertumbuhan sebesar 4,50-5,06% di tahun 2025, lalu meningkat kembali menjadi 5,24-5,51% di tahun 2026. Hal ini menunjukkan peran strategis sektor ini dalam menjaga ketahanan pangan dan perekonomian daerah, terutama dengan adanya inovasi dalam teknologi pertanian dan peningkatan produksi hasil perikanan.

Sektor industri pengolahan, sebagai salah satu motor utama perekonomian, ditargetkan tumbuh dalam rentang 7,28% hingga 7,57%, yang mencerminkan proses penguatan pondasi bioindustri. Sektor perdagangan besar dan eceran, serta reparasi mobil dan sepeda motor diharapkan mendapatkan limpahan aktivitas dari proses penguatan sektor pertanian kehutanan dan perikanan, informasi dan komunikasi, industri lokal, serta beberapa sektor lainnya dengan kemampuan tumbuh sebesar 5,52% hingga 5,94%. Pertumbuhan yang stabil dan terjaga dari sektor perdagangan juga sebagai refleksi menguatnya daya beli masyarakat Sumatera Utara.

Pada sektor infrastruktur, konstruksi diprediksi tumbuh 5,95-6,08%, yang menunjukkan prospek pembangunan yang tetap positif, terutama didukung oleh proyek infrastruktur strategis di Sumatera Utara. Sementara itu, sektor transportasi dan pergudangan juga diperkirakan mengalami pertumbuhan yang stabil sekitar 6,45% hingga 7,26%, yang mengindikasikan peran penting sektor ini dalam mendukung konektivitas dan logistik daerah.

Sektor jasa masih menunjukkan tren pertumbuhan yang kuat, dengan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang diproyeksikan tumbuh tinggi di 11,43% hingga 12,50%, sejalan dengan komitmen dalam mewujudkan Sumatera Utara sebagai salah satu destinasi pariwisata global. Informasi dan komunikasi juga terus mengalami pertumbuhan pesat di sekitar 6,55% hingga 8,07%, yang menggambarkan perilaku para pelaku ekonomi yang semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi digital melalui pemanfaatannya dalam aktivitas bisnis.



Dari sisi layanan publik, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib mengalami pertumbuhan yang relatif moderat di 4,42% hingga 5,42%, sementara sektor pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial semakin tumbuh meningkat di kisaran 6,36% hingga 6,45%. Hal ini menunjukkan adanya kesinambungan dalam investasi infrastruktur layanan dan sumber daya manusia dalam rangka menciptakan pelayanan yang prima.

Target laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada tahun 2026 menunjukkan posisi yang optimis, melalui beberapa sektor penggerak seperti industri pengolahan, sektor pertanian kehutanan dan perikanan, sektor perdagangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta transportasi dan pergudangan, yang diharapkan mampu berakselerasi melalui serangkaian intervensi. Tentunya, untuk mewujudkan target tersebut, memerlukan dukungan multipihak yang saling berkolaborasi membangun kerjasama yang saling menguntungkan untuk Sumatera Utara yang unggul.

Di tengah berbagai tantangan, Sumatera Utara tetap memiliki prospek ekonomi yang cerah. Meskipun angka proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2026 sebesar 5,08%, namun sejumlah upaya intervensi melalui ragam proyek strategis daerah diharapkan dapat mengungkit nilai tambah ekonomi di sekitar 5,80% hingga 6,20%. Ikhtiar dalam mewujudkan target yang telah ditetapkan menjadi hal yang penting, melalui komitmen dalam mengoptimalkan pelaksanaan program-program prioritas agar mampu menyasar outcome dan dampak yang diharapkan. Pemenuhan target ini juga sebagai bentuk dukungan terhadap pencapaian target nasional. Pertumbuhan ekonomi didorong oleh peningkatan investasi, penguatan sektor industri, serta konsumsi masyarakat yang lebih stabil. Seiring dengan perbaikan infrastruktur, termasuk pengembangan kawasan industri dan proyek strategis nasional seperti KEK Sei Mangkei dan Pelabuhan Kuala Tanjung diharapkan dapat merangsang daya saing ekonomi daerah.

Sektor industri manufaktur dan hilirisasi diproyeksikan menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi. Peningkatan investasi di industri pengolahan kelapa sawit, karet, dan hasil pertanian lainnya akan menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan nilai tambah ekspor Sumatera Utara. Pemerintah daerah perlu terus menarik investasi dengan memberikan insentif kepada pelaku usaha yang berorientasi pada hilirisasi dan teknologi ramah lingkungan. Selain itu, sektor pariwisata juga memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Destinasi wisata unggulan seperti Danau Toba, Bukit Lawang, dan Berastagi dapat menjadi penggerak ekonomi lokal jika dikelola dengan baik. Peningkatan infrastruktur pariwisata, promosi yang lebih agresif, serta pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya akan membantu meningkatkan jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara.

Dari sisi pembangunan sosial, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan ekonomi yang inklusif harus terus dilakukan. Pemerintah perlu memperkuat program perlindungan sosial bagi kelompok rentan, mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat desa,



serta memastikan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak hanya bersifat numerik, tetapi juga berdampak nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada tahun 2025 dan 2026 sedikit optimis, yang dihitung dari rata-rata pertumbuhan di tahun berjalan. Pertumbuhannya diproyeksikan sebesar 4,99% (2025) dan 5,08% (2026). Sementara itu, target laju pertumbuhan ekonomi (LPE) ditetapkan lebih optimis yaitu sebesar 5,20–5,60% pada 2025 dan meningkat menjadi 5,80–6,20% pada 2026 (Tabel 3.17). Capaian ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menjaga momentum pertumbuhan yang telah dicapai pada tahun 2024, di mana LPE tercatat sebesar 5,03%. Namun, untuk mencapai target tersebut, diperlukan perhatian terhadap berbagai indikator ekonomi dan sosial yang mempengaruhi kinerja perekonomian daerah.

Salah satu indikator penting adalah PDRB per kapita, yang pada tahun 2024 mencapai Rp73,57 juta, dengan target peningkatan menjadi Rp78,40 juta pada 2025 dan Rp87,60 juta pada 2026. Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif, perlu diimbangi dengan penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Tingkat kemiskinan di Sumatera Utara pada tahun 2024 tercatat sebesar 7,19%, dengan target penurunan menjadi 6,96–7,46% pada 2025 dan 5,93–6,55% pada 2026. Sementara itu, rasio Gini yang mengukur ketimpangan pendapatan berada pada angka 0,306 pada 2024, dengan target penurunan menjadi 0,303–0,305 pada 2025 dan 0,301–0,303 pada 2026.

Inflasi merupakan indikator lain yang perlu diperhatikan, karena stabilitas harga sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat. Inflasi di Sumatera Utara pada tahun 2024 tercatat sebesar 2,12%, dengan target inflasi berada dalam rentang 2,5±1% pada 2025 yang terjaga hingga tahun 2026. Pengendalian inflasi yang efektif akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Tabel 3.17 Realisasi Indikator Ekonomi Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Dan Targetnya Tahun 2025-2026

Indikator	Satuan	Realisasi 2024 ¹⁾	Target 2025 ²⁾	Target 2026 ²⁾
Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	5,03	5,20-5,60	5,80-6,20
PDRB Per Kapita	Nilai (Rp juta)	73,57	78,40	87,60
Inflasi	persen	2,12	2,5±1	2,5±1
Indeks Modal Manusia	angka/poin	-	0,54	0,54
Persentase Kemiskinan	persen	7,19	6,96-7,46	5.93-6.55
Rasio Gini	angka/poin	0,306	0,303-0,305	0.301-0.303



Indikator	Satuan	Realisasi 2024 ¹⁾	Target 2025 ²⁾	Target 2026 ²⁾
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,60	5,27-5,56	5,14-5,47
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup daerah	Persen	73,96	77,20	77,37
Penurunan Intensitas Emisi GRK	persen	-	1,00	4,97

1) Realisasi Tahun 2024

2) RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang ditargetkan meningkat ke angka 77,37 memperlihatkan bahwa orientasi pembangunan tidak hanya terpusat pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Hal ini sejalan dengan penurunan intensitas emisi GRK yang dirancang mencapai 4,97% pada 2026. Bagi Sumatera Utara yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap sektor perkebunan dan kehutanan, pengendalian emisi menjadi faktor krusial untuk menjaga keberlanjutan produksi jangka panjang serta mempertahankan nilai ekspor dari komoditas berbasis agro.

Kesiapan sumber daya manusia turut menjadi fokus penguatan jangka menengah. Target Indeks Modal Manusia (IMH) sebesar 0,54 poin mengisyaratkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan tenaga kerja mulai mendapat porsi yang signifikan dalam agenda pembangunan. Nilai ini penting untuk mendukung pertumbuhan sektor industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta perdagangan, yang dalam target tahun 2026 diharapkan tumbuh masing-masing di kisaran 7,28–7,57%, 11,42–12,50%, dan 5,52–5,94%.

Kinerja tenaga kerja juga menjadi elemen kunci dalam menjawab tantangan struktural. Target penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 5,14–5,47% pada 2026 menandakan adanya dorongan penciptaan lapangan kerja, baik dari sektor formal maupun informal. Hal ini menjadi tantangan besar, terutama di tengah tren otomasi dan digitalisasi yang dapat menggeser kebutuhan tenaga kerja berkemampuan rendah. Maka, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan menjadi penting dalam menyiapkan tenaga kerja adaptif terhadap perubahan teknologi.

Dalam konteks proyeksi sektor-sektor ekonomi, dorongan terhadap pertumbuhan sektor perdagangan dan transportasi mencerminkan dinamika permintaan domestik yang terus menguat, sementara sektor informasi dan komunikasi menjadi representasi pertumbuhan ekonomi digital. Pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum yang ditargetkan tetap tinggi pada 11,42–12,50% juga memperlihatkan potensi pariwisata sebagai sumber pertumbuhan baru, terutama setelah perbaikan konektivitas dan promosi destinasi prioritas seperti Danau Toba.

Namun, proyeksi ini harus dibaca dalam konteks risiko ekonomi nasional dan global. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, termasuk



negara-negara mitra dagang seperti Tiongkok dan Uni Eropa, dapat mempengaruhi ekspor Sumatera Utara, terutama pada komoditas unggulan seperti CPO dan karet. Di sisi lain, kebijakan fiskal dan moneter nasional, seperti alokasi transfer ke daerah dan suku bunga, akan sangat menentukan kapasitas fiskal daerah serta iklim investasi. Implementasi UU HKPD juga membawa implikasi pada postur APBD yang bisa memengaruhi pembiayaan pembangunan di sektor prioritas.

Dengan mempertimbangkan semua aspek tersebut, Sumatera Utara tidak hanya dituntut menjaga momentum pertumbuhan, tetapi juga perlu memastikan bahwa transformasi ekonomi yang terjadi berorientasi pada keberlanjutan dan keadilan. Langkah konkret dalam mempercepat hilirisasi industri, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, memperluas infrastruktur dasar dan konektivitas, serta memperkuat kelembagaan daerah akan menjadi penentu dalam pencapaian target-target pembangunan jangka menengah tersebut. Jika strategi ini dijalankan secara konsisten, maka proyeksi pertumbuhan yang optimis pada tahun 2026 dapat dicapai secara lebih merata dan inklusif.

3.1.3. Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi makro daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan Sumatera Utara yang bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. Sebagai bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), arah kebijakan ini disusun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini serta tantangan dan peluang yang dihadapi daerah, baik dalam skala nasional maupun global.

Pentingnya kebijakan ekonomi makro daerah didasarkan pada kebutuhan untuk mengintegrasikan potensi ekonomi lokal dengan kebijakan nasional serta dinamika ekonomi global dengan mempertimbangkan tantangan seperti ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi harga komoditas, dan dampak perubahan iklim, Sumatera Utara perlu menerapkan strategi diversifikasi ekonomi serta penguatan struktur industri dan jasa berbasis inovasi dan keberlanjutan.

Lebih lanjut, arah kebijakan ekonomi makro ini juga menekankan sinergi antara berbagai faktor pendorong pertumbuhan, seperti investasi, kualitas sumber daya manusia, stabilitas makroekonomi, tata kelola pemerintahan, serta infrastruktur berkualitas. Selain itu, pengembangan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata, termasuk pemanfaatan potensi Danau Toba dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, menjadi kunci dalam mempercepat transformasi ekonomi Sumatera Utara. Selanjutnya, kebijakan ekonomi makro Sumatera Utara Tahun 2026 diarahkan untuk mempercepat transformasi struktural ekonomi daerah, memperkuat stabilitas ekonomi, meningkatkan daya saing sektor unggulan, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan dengan mengadopsi prinsip Blue Economy dan Green Economy. Selain itu, arah kebijakan ini juga harus selaras dengan strategi



pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya untuk membangun masyarakat Sumatera Utara yang tangguh.

Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara Tahun 2024, perekonomian daerah ini menunjukkan tren yang positif dengan kontribusi utama dari sektor Pertanian, Industri Pengolahan, dan Perdagangan Besar dan Eceran. Namun, tantangan seperti fluktuasi harga komoditas, ketimpangan infrastruktur, serta ketergantungan pada sektor primer masih menjadi faktor yang perlu diatasi. Sektor unggulan seperti Industri Pengolahan dan Perdagangan memiliki kontribusi besar terhadap PDRB, namun pertumbuhan sektor-sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk peningkatan nilai tambah dan efisiensi rantai pasok. Sektor Pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata tetap menjadi pilar utama ekonomi daerah. Khususnya, industri berbasis agribisnis dan produk olahan pertanian akan diperkuat melalui kemitraan dengan sektor swasta dan peningkatan akses pasar internasional.

Disisi lain, sektor dengan pertumbuhan paling rendah, seperti pengadaan air dan pengelolaan sampah, menunjukkan perlunya penguatan kebijakan untuk meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian daerah. Sektor jasa keuangan, transportasi, dan teknologi informasi masih memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Investasi dalam infrastruktur digital dan konektivitas logistik akan menjadi penting untuk mempercepat pertumbuhan sektor-sektor ini.

Transformasi ekonomi Sumatera Utara memperhitungkan perkembangan teknologi, perubahan iklim, serta dinamika perdagangan global agar tetap kompetitif. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi daerah harus berorientasi pada peningkatan produktivitas, daya saing, dan keberlanjutan. Sejalan dengan pembahasan tersebut, berikut arah kebijakan ekonomi makro Sumatera Utara Tahun 2026, sebagai berikut:

- 1) Transformasi Ekonomi dan Integrasi dengan Kebijakan Nasional. Sejalan dengan kebijakan nasional yang berfokus pada transformasi ekonomi berbasis hilirisasi, digitalisasi, dan keberlanjutan, Sumatera Utara akan memperkuat sektor industri pengolahan berbasis komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, dan kopi. Upaya hilirisasi di KEK Sei Mangkei akan terus didorong guna meningkatkan nilai tambah ekspor dan menciptakan lapangan kerja berkualitas.
- 2) Penguatan Blue dan Green Economy. Implementasi ekonomi biru dan hijau akan menjadi prioritas untuk memastikan pembangunan yang ramah lingkungan. Sektor perikanan, kehutanan, dan pariwisata berbasis ekowisata, khususnya di kawasan Danau Toba, akan dikembangkan melalui kebijakan konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan serta mendorong investasi pada energi terbarukan serta meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam guna mengurangi jejak karbon industri.
- 3) Peningkatan Kualitas SDM dan Ketenagakerjaan Untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal, kebijakan pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis industri akan diperluas. Kolaborasi antara pemerintah, dunia



usaha, dan lembaga pendidikan akan diperkuat guna menyesuaikan keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri yang terus berkembang.

- 4) Stabilitas Makroekonomi dan Tata Kelola Pemerintahan. Stabilitas harga dan inflasi yang terkendali akan tetap menjadi fokus utama dalam menjaga daya beli masyarakat. Reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan, termasuk digitalisasi layanan publik, akan diperkuat guna menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah.
- 5) Pengembangan Infrastruktur dan Konektivitas Infrastruktur berkualitas menjadi faktor kunci dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pembangunan dan peningkatan jalan, pelabuhan, serta transportasi publik akan terus dilakukan untuk mendukung aktivitas perdagangan dan industri. KEK Sei Mangkei dan beberapa Kawasan Industri akan dikembangkan lebih lanjut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis industri berorientasi ekspor.
- 6) Penataan Sosial Budaya dan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan. Dalam mendukung sektor pariwisata sebagai motor pertumbuhan ekonomi, kebijakan yang menyeimbangkan pelestarian budaya dan ekologi dengan peningkatan daya tarik wisata akan diterapkan. Danau Toba sebagai destinasi wisata super prioritas akan terus dikembangkan dengan pendekatan berkelanjutan agar tetap menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Arah kebijakan ekonomi makro Sumatera Utara tahun 2026 diarahkan pada penguatan sektor unggulan, peningkatan daya saing daerah, serta pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan potensi daerah serta beradaptasi terhadap tantangan global, Sumatera Utara terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakatnya.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kebijakan keuangan daerah menjadi pilar utama dalam mendukung kebijakan keuangan daerah memegang peranan strategis dalam mendukung efektivitas pelaksanaan pembangunan, terutama dalam kerangka pengelolaan fiskal yang sehat, akuntabel, dan adaptif terhadap kebutuhan daerah. Dalam proses perencanaan pembangunan, penetapan arah kebijakan keuangan menjadi bagian yang krusial karena menentukan sejauh mana pemerintah daerah dapat mengimplementasikan program dan kegiatan pembangunan secara optimal. Ketersediaan ruang fiskal yang memadai akan menentukan kapasitas daerah dalam merespons prioritas pembangunan dan tantangan perekonomian yang dinamis.

Penguatan kebijakan keuangan diarahkan untuk mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan efisiensi belanja, dan penjaminan kesinambungan fiskal jangka panjang. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kualitas tata kelola pendapatan, penyempurnaan regulasi dan sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta optimalisasi aset daerah yang berpotensi ekonomi. Di sisi lain, belanja daerah



harus difokuskan pada kegiatan produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dengan menekankan prinsip *value for money* dan alokasi yang berbasis hasil (*performance-based budgeting*).

Dalam konteks pembangunan Sumatera Utara, arah kebijakan keuangan perlu disinergikan dengan potensi dan tantangan struktural yang dihadapi provinsi ini. Sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, Sumatera Utara memiliki keunggulan geografis, ketersediaan sumber daya alam, dan posisi strategis sebagai pintu gerbang perdagangan regional. Potensi sektor pertanian, perkebunan, industri pengolahan, logistik, dan pariwisata menjadi tulang punggung pengembangan ekonomi daerah. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei dan Pelabuhan Kuala Tanjung merupakan contoh infrastruktur strategis yang membutuhkan dukungan pembiayaan berkelanjutan melalui alokasi fiskal yang tepat sasaran. Namun demikian, sejumlah tantangan juga perlu diperhatikan dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah. Ketimpangan antarwilayah, kualitas infrastruktur dasar yang belum merata dan masih tingginya ketergantungan pada sektor primer menjadi hambatan bagi peningkatan produktivitas dan daya saing daerah. Selain itu, tekanan eksternal seperti fluktuasi harga komoditas, ketidakpastian ekonomi global, serta penyesuaian kebijakan fiskal nasional melalui implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) membawa konsekuensi terhadap kapasitas fiskal daerah. Oleh karena itu, penyesuaian struktur belanja, inovasi dalam pembiayaan pembangunan, dan penguatan kemitraan publik-swasta perlu dijadikan bagian dari strategi keuangan yang progresif.

Dengan landasan kebijakan keuangan yang kokoh, Sumatera Utara dapat memanfaatkan peluang dari proyeksi pertumbuhan ekonomi yang positif untuk tahun-tahun mendatang. Penguatan sinergi antara perencanaan pembangunan dan kebijakan fiskal akan menjadi kunci dalam mencapai pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis keunggulan lokal.

3.2.1. Kondisi dan Proyeksi Keuangan Daerah

Dalam kerangka pencapaian pembangunan daerah yang efektif dan berkelanjutan, penguatan kebijakan pendapatan daerah menjadi fondasi penting untuk menjamin ketersediaan ruang fiskal yang memadai. Perumusan kebijakan pendapatan yang akurat, berbasis perhitungan yang terukur serta didukung oleh kerangka hukum yang jelas, diperlukan untuk mencapai target setiap pos penerimaan. Fokus utama kebijakan diarahkan pada penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya. Optimalisasi pemanfaatan dana transfer, terutama dari dana perimbangan, juga menjadi prioritas agar pembangunan daerah dapat terus berjalan melalui penguatan pengelolaan aset dan penerimaan daerah.

Berdasarkan data struktur keuangan daerah Provinsi Sumatera Utara, total pendapatan daerah tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp13,57



triliun, tumbuh sebesar 3,55% dibandingkan tahun 2025 yang ditargetkan sebesar Rp13,10 triliun. Proyeksi kenaikan pendapatan ini seiring dengan meningkatnya pendapatan transfer dan penguatan daya beli masyarakat yang berdampak terhadap penerimaan PAD. Komponen utama penyumbang pertumbuhan adalah Pendapatan transfer yang diprediksi meningkat sebesar 3,54% dibanding penerimaan transfer di tahun 2025. Komponen berikutnya yaitu PAD yang diharapkan mampu tumbuh sebesar 4%. Pertumbuhan ini disumbang oleh Pajak Daerah yang tumbuh sebesar 3,57%. Retribusi Daerah dengan pertumbuhan 10%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan laju tumbuh sebesar 10%, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang diprediksi meningkat hingga 3%.

Pada tahun 2026, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara diproyeksikan meningkat dari Rp7,25 triliun pada tahun sebelumnya menjadi Rp7,54 triliun. Kenaikan ini menunjukkan adanya upaya berkelanjutan Pemerintah Provinsi dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah, khususnya pajak daerah yang selama ini menjadi tulang punggung PAD. Berbagai kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, perbaikan sistem layanan berbasis digital, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak telah berkontribusi terhadap capaian tersebut.

Namun demikian, ke depan penerimaan pajak daerah menghadapi tantangan baru seiring dengan perubahan mekanisme bagi hasil melalui skema opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Skema opsen ini berimplikasi pada terbaginya penerimaan PKB dan BBNKB antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, sehingga berpotensi menekan kapasitas fiskal provinsi jika tidak dikelola secara tepat.

Menghadapi tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyiapkan sejumlah strategi. Pertama, melakukan optimalisasi basis pajak eksisting, terutama melalui peningkatan kualitas pelayanan pajak kendaraan bermotor dengan pemanfaatan teknologi informasi. Kedua, memperkuat ekstensifikasi sumber penerimaan baru, baik dari pajak maupun retribusi daerah yang selama ini belum tergarap optimal, termasuk sektor jasa, perdagangan, dan pariwisata. Ketiga, mendorong pemanfaatan aset daerah secara produktif, melalui kerja sama dengan pihak swasta maupun BUMD sehingga memberikan nilai tambah bagi PAD.

Dengan strategi tersebut, Pemerintah Provinsi berupaya agar meskipun terdapat penyesuaian skema opsen PKB dan BBNKB, penerimaan PAD tetap mampu tumbuh secara positif. Pertumbuhan ini diharapkan tidak hanya memperkuat kemandirian fiskal daerah, tetapi juga menyediakan ruang fiskal yang lebih luas untuk mendukung pembiayaan pembangunan prioritas di Sumatera Utara, terutama pada bidang infrastruktur, pelayanan dasar, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Tabel 3.18 Realisasi Kinerja Dan Proyeksi Pendapatan Daerah pada Struktur Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023-2026

NO.	URAIAN	2023 ¹⁾	2024 ²⁾	2025 ³⁾	2026 ⁴⁾	Perubahan 2024 terhadap 2023	Perubahan 2025 terhadap 2024	Perubahan 2026 terhadap 2025
						Selisih (+/-) (persen)		
01.01	Pendapatan Asli Daerah	7.225.688.105.702,51	7.368.763.728.579,35	7.249.501.329.775,00	7.539.481.382.966,00	1,98	-1,62	4,00
01.01.01	Pajak daerah	6.667.891.089.707,94	6.616.600.024.725,35	6.366.179.295.640,00	6.593.515.467.441,76	-0,77	-3,78	3,57
01.01.02	Retribusi daerah	33.234.330.583,00	35.045.193.630,00	173.331.559.568,00	190.664.715.524,80	5,45	394,59	10,00
01.01.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	299.801.727.761,00	321.058.451.369,00	343.014.445.649,00	377.315.890.213,90	7,09	6,84	10,00
01.01.04	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	224.760.957.650,57	396.060.058.855,00	366.976.028.918,00	377.985.309.785,54	76,21	-7,34	3,00
01.02	Pendapatan Transfer	5.443.196.241.831,00	5.774.784.762.671,00	5.788.199.396.000,00	5.993.306.930.920,00	6,09	0,23	3,54
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil	581.910.953.859,00	589.735.564.932,00	627.857.417.000,00	646.693.139.510,00	1,34	6,46	3,00
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	2.682.814.024.612,00	3.004.383.591.053,00	3.146.155.304.000,00	3.272.001.516.160,00	11,99	4,72	4,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	2.148.915.361.360,00	2.177.759.970.186,00	2.014.186.675.000,00	2.074.612.275.250,00	1,34	-7,51	3,00
	Dana Insentif Daerah (DID)/ insentif fiskal	29.555.902.000,00	2.905.636.500,00	-	-	-90,17		
01.03	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	88.948.851.959,00	93.351.415.575,00	66.300.000.000,00	36.615.000.000,00	4,95	-28,98	-44,77
01.03.01	Pendapatan Hibah	80.249.646.343,00	6.311.676.000,00	6.300.000.000,00	6.615.000.000,00	-92,13	-0,18	5,00
01.03.06	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.699.205.616,00	87.039.739.575,00	60.000.000.000,00	30.000.000.000,00	900,55	-31,07	-50,00
	TOTAL JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	12.757.833.199.492,50	13.236.899.906.825,30	13.104.000.725.775,00	13.569.403.313.886,00	3,76	-1,00	3,55

Sumber :

- 1) LRA Audited TA 2023
- 2) LRA Audited TA 2024
- 3) Pergubsu No. 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD TA 2025
- 4) Proyeksi TA 2026, data diolah



Sementara itu, pendapatan transfer tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp. 5,99 triliun, naik 3,54% dari tahun sebelumnya. Dana Alokasi Umum (DAU) tetap menjadi komponen terbesar dengan proyeksi sebesar Rp. 3,27 triliun, meningkat 4% dari tahun sebelumnya. Dana Alokasi Khusus (DAK) juga mengalami peningkatan sebesar 3,00%, dengan fokus pada belanja sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dana Bagi Hasil juga diharapkan mengalami kenaikan, dari Rp. 627,86 miliar menjadi Rp. 646,69 miliar (naik 3%), yang menunjukkan potensi kontribusi dari sumber daya yang masih stabil.

Transfer Dana Insentif Daerah (DID) yang sebelumnya menjadi salah satu sumber tambahan penerimaan, belum dicantumkan datanya untuk tahun 2025. Hal ini disebabkan belum diperolehnya informasi terkait Dana Insentif Daerah (DID). Sementara itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penyusutan tajam dari Rp. 93,35 miliar pada 2024 menjadi Rp. 36,62 miliar pada 2026. Penurunan ini sebagian besar berasal dari berkurangnya pendapatan hibah yang sebelumnya signifikan, serta tidaknya ada lagi bantuan keuangan dari provinsi lain, yang pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp87,04 miliar.

Jika dilihat secara struktural, PAD tetap menjadi sumber utama pendapatan daerah Sumatera Utara dengan proporsi sekitar 55,56% dari total pendapatan pada 2026, menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang cukup kuat. Pendapatan transfer menyumbang 44,17%, sedangkan kontribusi dari lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar 0,27%. Komposisi ini mencerminkan perlunya diversifikasi sumber penerimaan dan peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui inovasi pendapatan dan penguatan regulasi.

Meskipun proyeksi pendapatan daerah mengalami kenaikan yang moderat, Sumatera Utara masih memiliki peluang untuk memperkuat potensi penerimaannya melalui reformasi kebijakan fiskal daerah, pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kepatuhan pajak, serta penguatan kerja sama dengan sektor swasta. Upaya peningkatan PAD tidak semata dilakukan melalui tarif dan ekstensifikasi, tetapi juga melalui peningkatan pelayanan publik, tata kelola aset daerah, serta optimalisasi potensi ekonomi lokal yang belum tergarap maksimal.

Dengan memperhatikan dinamika fiskal nasional dan arah kebijakan transfer ke daerah, Provinsi Sumatera Utara perlu menyusun strategi pendapatan yang lebih adaptif, berbasis data dan responsif terhadap dinamika sektoral dan regional. Kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, pengembangan sektor unggulan, serta integrasi antara perencanaan pembangunan dan kebijakan keuangan daerah akan menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan fiskal serta efektivitas pembangunan ke depan.



3.2.1.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan elemen esensial dalam menjamin kesinambungan pembangunan daerah, terutama dalam mengakomodasi kebutuhan pembiayaan terhadap program-program prioritas pemerintah daerah. Dalam konteks penyusunan RKPD Sumatera Utara tahun 2026, arah kebijakan pendapatan dirancang untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui strategi optimalisasi sumber-sumber penerimaan, peningkatan efisiensi pengelolaan fiskal, serta penciptaan sistem pendapatan yang responsif terhadap dinamika ekonomi. Tujuannya adalah memperluas ruang fiskal daerah guna menopang agenda pembangunan sektoral dan wilayah yang inklusif serta berkelanjutan.

Seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi, termasuk pertambahan jumlah kendaraan bermotor, peluang untuk mendorong peningkatan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor dan opsen pajak kendaraan menjadi semakin terbuka. Kondisi ini diperkuat dengan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang memberikan fleksibilitas dan insentif kinerja fiskal kepada daerah. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mengelola kewenangan fiskal secara lebih adaptif. Namun demikian, beberapa isu strategis memerlukan perhatian serius, termasuk penyelesaian kewajiban pembayaran utang bagi hasil kepada kabupaten/kota. Langkah-langkah penguatan perencanaan dan transparansi dalam mekanisme pembayaran ini dibutuhkan agar tercipta keadilan fiskal vertikal dan horizontal antardaerah. Selain itu, penguatan dalam pengelolaan dana transfer juga diarahkan agar selaras dengan prioritas pembangunan, baik melalui optimalisasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Insentif Daerah (DID).

Untuk mencapai target optimal dalam peningkatan Pendapatan Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu melaksanakan berbagai langkah strategis secara simultan. Upaya-upaya tersebut meliputi penguatan kelembagaan pengelola pendapatan daerah, ekspansi basis objek pajak dan retribusi, peningkatan kualitas pengelolaan aset daerah, digitalisasi layanan pajak dan retribusi, serta optimalisasi aset dan kerja sama produktif dengan sektor swasta.

Untuk mengoptimalkan peningkatan Pendapatan Daerah, pemerintah provinsi perlu melakukan beberapa langkah strategis, mencakup seluruh komponen sumber pendapatan daerah, termasuk:

- 1) Penguatan kelembagaan melalui peningkatan peran dan fungsi UPTD/samsat untuk pajak dan Dinas/Balai Penghasil retribusi;
- 2) Peningkatan basis pajak dan retribusi melalui inovasi kebijakan perpajakan yang lebih adil dan progresif.
- 3) Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional.



- 4) Meningkatkan layanan melalui digitalisasi dan otomatisasi sistem pembayaran pajak serta retribusi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- 5) Optimalisasi aset daerah melalui pemanfaatan yang lebih produktif, termasuk kerja sama dengan sektor swasta.
- 6) Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi
- 7) Penerapan insentif dan sanksi yang lebih efektif untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.
- 8) Evaluasi dan penyesuaian tarif retribusi daerah agar lebih mencerminkan nilai ekonomi layanan yang diberikan.
- 9) Penyederhanaan proses perizinan yang terkait dengan retribusi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi lokal.
- 10) Optimalisasi pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan perencanaan program yang lebih efektif.
- 11) Memastikan efektivitas pemanfaatan Dana Insentif Daerah (DID) untuk mendorong inovasi kebijakan fiskal daerah.
- 12) Menggali potensi pendapatan lain yang sah melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang belum dioptimalkan.
- 13) Meningkatkan deviden BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendapatan daerah.
- 14) Mengoptimalkan koordinasi dengan kementerian teknis dan lembaga non pemerintah, baik dalam maupun luar negeri untuk pencapaian Lain-lain Pendapatan yang Sah.
- 15) Memperkuat kerja sama dengan sektor swasta dalam bentuk kemitraan strategis guna meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah melalui pengelolaan dana kemitraan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.
- 16) Penerapan *green budgeting* dan instrumen fiskal berwawasan lingkungan seperti pajak emisi, retribusi pemanfaatan sumber daya air, atau denda atas pelanggaran lingkungan untuk menciptakan insentif ekonomi yang ramah lingkungan.
- 17) Kolaborasi dengan pemerintah pusat dan lembaga donor internasional untuk mendapatkan dana hibah dan pendanaan berbasis kinerja (*results-based financing*), termasuk dalam pengembangan proyek hijau, ekonomi biru, dan digitalisasi pelayanan publik.
- 18) Pemanfaatan instrumen obligasi daerah atau sukuk daerah sebagai alternatif pendanaan fiskal jangka menengah yang dapat dikaitkan dengan proyek-proyek prioritas, seperti pembangunan kawasan industri dan infrastruktur konektivitas.

Dengan penguatan pada sisi kebijakan, kelembagaan, sistem digital, serta diversifikasi basis penerimaan, diharapkan strategi peningkatan pendapatan daerah Sumatera Utara tidak hanya bersifat adaptif terhadap regulasi nasional, tetapi juga mampu mendorong kemandirian fiskal secara progresif. Kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, masyarakat, dan pelaku usaha menjadi kunci untuk menciptakan sistem

keuangan daerah yang sehat dan mendukung transformasi ekonomi Sumatera Utara ke arah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.



3.2.1.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah tetap menjadi komponen penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Sumatera Utara. Penentuan arah belanja daerah tahun 2026 menitikberatkan pada efisiensi penggunaan anggaran, peningkatan efektivitas layanan publik, dan penyesuaian terhadap dinamika ekonomi. Berdasarkan data yang tersedia, total belanja daerah pada tahun tersebut ditargetkan sebesar Rp13,57 triliun, mengalami kenaikan sebesar 3,13% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp13,16 triliun. Penyesuaian ini menunjukkan arah kebijakan fiskal yang tetap ekspansif dan antisipatif, di tengah ketidakpastian ekonomi dan kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan melalui belanja produktif.

Komponen belanja operasi masih mendominasi struktur pengeluaran dengan nilai Rp7,32 triliun. Dibanding tahun 2025, belanja operasi mencatat kenaikan sebesar 3,86%. Di dalamnya, belanja pegawai mengalami kenaikan menjadi Rp3,69 triliun atau naik 2,50%, memperhitungkan kebutuhan pembayaran untuk tenaga P3K dan penyesuaian penghasilan aparatur. Sementara itu, belanja barang dan jasa juga mengalami peningkatan signifikan sebesar 13,25%, dari Rp2,92 triliun menjadi Rp3,31 triliun, mencerminkan kebutuhan pelayanan yang lebih luas dan dukungan operasional perangkat daerah. Namun, belanja hibah justru mengalami kontraksi signifikan, dari Rp513,23 miliar menjadi Rp300 miliar, atau turun sebesar -41,55%. Kondisi ini menunjukkan adanya rasionalisasi program pemberian hibah dan fokus pada belanja yang memiliki dampak ekonomi lebih langsung. Untuk belanja bantuan sosial, terjadi kenaikan cukup tinggi, dari Rp12 miliar menjadi Rp20 miliar, mencerminkan kepedulian terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial lebih besar.

Belanja modal direncanakan naik dari Rp2,28 triliun menjadi Rp2,8 triliun, mencerminkan peningkatan sebesar 23% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini menjadi sinyal kuat bahwa penguatan infrastruktur dan pengadaan barang modal tetap menjadi fokus dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Di sisi lain, alokasi belanja tidak terduga sebesar Rp201 miliar mengalami kenaikan 31,35% dari tahun 2025 yang sebesar Rp153,02 miliar. Hal ini mengindikasikan langkah antisipatif pemerintah terhadap kemungkinan risiko kejadian luar biasa seperti bencana atau tekanan eksternal yang dapat mengganggu perencanaan.

Pada bagian belanja transfer, terjadi penurunan sebesar -11,73%, dari Rp3,68 triliun di tahun 2025 menjadi Rp3,25 triliun di tahun 2026. Komponen belanja bagi hasil pajak kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa juga menurun dari Rp3,55 triliun menjadi Rp2,75 triliun, atau turun -22,60%. Penurunan ini sangat terkait dengan perubahan sistem opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang tidak lagi didistribusikan oleh provinsi. Sebaliknya, belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota justru mengalami lonjakan drastis, dari Rp128,52



miliar menjadi Rp500 miliar, atau naik 289,03%. Kenaikan ini menegaskan komitmen provinsi untuk memperkuat kerja sama dan dukungan pembangunan lintas wilayah.

Struktur belanja yang disusun menunjukkan kecenderungan pemusatan pada belanja yang produktif, seperti belanja modal dan belanja barang/jasa yang memiliki korelasi langsung dengan peningkatan pelayanan publik dan kapasitas produksi daerah. Pada saat yang sama, belanja hibah dan sebagian belanja transfer dikendalikan secara lebih selektif. Arah ini dapat dibaca sebagai strategi penguatan kapasitas fiskal dan optimalisasi penggunaan anggaran yang lebih akuntabel.

Dengan proyeksi tersebut, Sumatera Utara berupaya menjaga kesinambungan pembangunan meskipun dalam tekanan ruang fiskal yang terbatas. Kebijakan belanja diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi daerah, penguatan pelayanan dasar, serta mempercepat pertumbuhan sektoral melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Efektivitas pengelolaan belanja ini juga akan menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan visi pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan adaptif. Secara rinci, kondisi dan proyeksi Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2026 dapat dilihat pada tabel berikut,



Tabel 3.19 Realisasi Dan Proyeksi Belanja Daerah pada Struktur Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023-2026

NO.	URAIAN	2023 ¹⁾	2024 ²⁾	2025 ³⁾	2026 ⁴⁾	Perubahan 2023 terhadap 2024	Perubahan 2024 terhadap 2025	Perubahan 2025 terhadap 2026
						(+/-) (persen)		
02.01	Belanja Operasi	8.029.171.006.323,08	8.797.706.793.418,06	7.045.265.423.341,50	7.317.439.052.840,50	9,57	-19,92	3,86
02.01.01	Belanja pegawai	3.291.794.526.059,50	3.649.797.790.530,00	3.596.395.374.295,00	3.686.305.258.652,37	10,88	-1,46	2,50
02.01.02	Belanja barang dan jasa	2.919.824.583.503,46	2.845.689.672.648,06	2.923.636.346.046,50	3.311.133.794.188,13	-2,54	2,74	13,25
02.01.03	Belanja Hibah	1.801.731.896.760,12	2.288.925.330.240,00	513.233.703.000,00	300.000.000.000,00	27,04	-77,58	-41,55
02.01.04	Belanja Bantuan Sosial	15.820.000.000,00	13.294.000.000,00	12.000.000.000,00	20.000.000.000,00	-15,97	-9,73	66,67
02.03	Belanja Modal	2.629.552.763.164,36	2.010.844.855.277,04	2.276.380.045.133,50	2.800.000.000.000,00	-23,53	13,21	23,00
02.04	Belanja tidak terduga	57.501.409.671,00	38.044.824.602,00	153.024.755.997,00	201.000.000.000,00	-33,84	302,22	31,35
02.05	Belanja Transfer	3.032.087.837.486,55	2.460.293.697.000,00	3.682.780.501.303,00	3.250.964.261.045,50	-18,86	49,69	-11,73
02.05.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	2.704.480.636.573,00	2.276.980.578.692,00	3.554.256.970.681,00	2.750.964.261.045,50	-15,81	56,1	-22,60
02.05.02	Belanja Bantuan Kegiatan		-					
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota	327.607.200.913,55	183.313.118.308,00	128.523.530.622,00	500.000.000.000,00	-44,04	-29,89	289,03
	TOTAL JUMLAH BELANJA DAERAH	13.748.313.016.645,00	13.306.890.170.297,10	13.157.450.725.775,00	13.569.403.313.886,00	-3,21	-1,12	3,13

Sumber :

- 1) LRA Audited TA 2023
- 2) LRA Audited TA 2024
- 3) Pergubsu No. 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD TA 2025
- 4) Proyeksi TA 2026, data diolah



Peningkatan kebutuhan pada pos belanja pegawai, pembiayaan operasional perkantoran (*fixed cost*), alokasi dana bagi hasil, serta bantuan keuangan kepada kabupaten/kota belum sepenuhnya sejalan dengan proyeksi pertumbuhan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Meskipun belanja pegawai meningkat sebesar 2,5% dan bantuan keuangan melonjak hingga 289,03%, namun hal ini tidak diimbangi dengan pertumbuhan pendapatan yang cukup signifikan, mengingat total pendapatan daerah hanya tumbuh sebesar 3,55% dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan indikator ruang fiskal, kapasitas belanja yang dapat dialokasikan secara fleksibel mengalami tekanan, yang tercermin dalam rasio kemandirian fiskal daerah yang mengalami sedikit kenaikan dari 55,32% pada tahun 2025 menjadi sekitar 55,56% pada tahun 2026. Penurunan ini menunjukkan semakin sempitnya ruang fiskal yang tersedia untuk belanja-belanja strategis di luar belanja wajib dan mengikat.

Situasi ini menuntut penerapan kebijakan belanja daerah yang semakin cermat, akuntabel, proporsional, efisien, dan terfokus pada pos-pos belanja yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan akselerasi pembangunan ekonomi daerah. Optimalisasi penggunaan anggaran harus mengutamakan efisiensi belanja operasional serta mendorong peningkatan belanja produktif seperti belanja modal, agar tetap selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kebijakan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2026 diarahkan pada prioritas-prioritas berikut:

- 1) Alokasi belanja wajib dan mengikat, seperti pembayaran gaji dan tunjangan ASN, termasuk PPPK dan ASN BLUD, serta pengeluaran rutin kantor seperti listrik, air, layanan internet, premi asuransi, sewa aset, dan beasiswa pendidikan PNS.
- 2) Penyelarasan belanja dengan arah capaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah, serta pemenuhan layanan dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada kewenangan provinsi.
- 3) Pemenuhan kewajiban anggaran pendidikan minimal 20% dari total APBD guna mendukung pelayanan pendidikan yang inklusif dan berkualitas.
- 4) Dukungan terhadap fungsi kesehatan melalui alokasi belanja yang tidak hanya mencakup urusan kesehatan sempit, tetapi juga kegiatan non-urusan kesehatan yang menunjang kesehatan masyarakat seperti asuransi sosial (Askrida), pengembangan sarana olahraga, dan penguatan sumber daya insani.
- 5) Investasi pada belanja infrastruktur publik, dengan fokus pada pembangunan dan pemeliharaan fasilitas layanan dasar serta infrastruktur ekonomi yang dapat mendorong penciptaan lapangan



- kerja, pengurangan kemiskinan, dan penurunan ketimpangan antar wilayah.
- 6) Dukungan pembiayaan terhadap program-program perangkat daerah dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi, termasuk pendanaan kegiatan perkantoran.
 - 7) Alokasi belanja wajib tertentu yang telah diatur dalam regulasi, seperti peningkatan kapasitas SDM aparatur dan penguatan fungsi pengawasan internal (APIP).
 - 8) Mendorong pelaksanaan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam seluruh proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, guna memperkuat struktur ekonomi lokal.
 - 9) Rehabilitasi dan revitalisasi gedung kantor perangkat daerah, cabang dinas, balai, UPTD, serta unit pelayanan yang sudah tidak layak guna mendukung layanan publik yang berkualitas.
 - 10) Optimalisasi pemanfaatan aset daerah secara produktif agar dapat memberikan kontribusi terhadap efisiensi belanja dan peningkatan penerimaan daerah.
 - 11) Digitalisasi sistem layanan publik dan birokrasi pemerintahan, termasuk pengembangan *e-governance* dan *smart budgeting* guna meningkatkan transparansi, efisiensi layanan, serta pengawasan anggaran berbasis kinerja.
 - 12) Penguatan program ketahanan pangan daerah, melalui dukungan belanja untuk sarana produksi pertanian, pembangunan irigasi mikro, dan infrastruktur pascapanen guna menjaga stabilitas harga dan memperkuat ekonomi perdesaan.
 - 13) Belanja penguatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, seperti pembangunan infrastruktur hijau, penyediaan fasilitas pengelolaan sampah terpadu, dan program konservasi lingkungan berbasis masyarakat.
 - 14) Dukungan terhadap inovasi daerah dan riset terapan, melalui pendanaan untuk kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan komunitas inovasi yang berfokus pada pemecahan masalah daerah dan pemanfaatan teknologi lokal.
 - 15) Perluasan akses dan kualitas pendidikan vokasional dan pelatihan kerja, terutama dalam mendukung bonus demografi dan penyiapan tenaga kerja yang adaptif terhadap kebutuhan industri di Sumatera Utara.
 - 16) Peningkatan kapasitas tata kelola keuangan dan perencanaan pembangunan, dengan penguatan sistem pelaporan, monitoring dan evaluasi kinerja belanja agar selaras dengan target *output* dan *outcome* pembangunan.
 - 17) Dukungan terhadap pemberdayaan ekonomi UMKM dan koperasi, termasuk bantuan permodalan, pelatihan, digitalisasi, dan fasilitasi akses pasar sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas.
 - 18) Perluasan program jaring pengaman sosial berbasis data terpadu, agar belanja sosial lebih tepat sasaran dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem dan ketimpangan sosial.



- 19) Belanja penguatan kapasitas penanggulangan bencana dan manajemen risiko daerah, dalam bentuk pembangunan infrastruktur tangguh bencana, pelatihan mitigasi, serta penyediaan dana darurat daerah yang memadai.
- 20) Penyesuaian alokasi belanja berdasarkan pendekatan potensi wilayah, dengan mempertimbangkan indeks kemiskinan, aksesibilitas, dan ketertinggalan kawasan agar belanja daerah lebih berkeadilan dan berdampak luas.

Rangkaian kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara pembiayaan kebutuhan dasar, keberlanjutan pembangunan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara dalam jangka menengah dan panjang.

3.2.1.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah berperan penting dalam menjaga keseimbangan anggaran ketika terdapat selisih antara pendapatan dan belanja. Dalam konteks fiskal, pembiayaan digunakan saat belanja melebihi pendapatan, sementara pada kondisi surplus dimanfaatkan untuk mendukung prioritas pembangunan melalui investasi strategis. Struktur pembiayaan terdiri dari penerimaan dan pengeluaran, yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan pemerintah terkait pengelolaan keuangan daerah.

Mengacu pada perkembangan dalam beberapa tahun terakhir, penerimaan pembiayaan Sumatera Utara menunjukkan dinamika yang cukup tajam. Tahun 2023 mencatat nilai tinggi sebesar Rp1,07 triliun dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), namun turun drastis menjadi Rp80,98 miliar pada 2024. Tahun 2025 diproyeksikan mengalami kenaikan menjadi Rp103,45 miliar, tetapi kembali menurun signifikan menjadi Rp50 miliar pada 2026, mengalami penurunan sebesar (51,67%) dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini mencerminkan penyesuaian terhadap kemampuan pembiayaan internal dan efisiensi realisasi belanja daerah. Pengeluaran pembiayaan juga mengalami perubahan. Setelah tidak dialokasikan pada 2024, nilai sebesar Rp50 miliar kembali dianggarkan untuk tahun 2025 dan 2026, yang sepenuhnya difokuskan pada penyertaan modal daerah (investasi) kepada BUMD. Dukungan ini ditujukan kepada perusahaan daerah yang memiliki prospek pengembalian modal yang baik serta potensi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini sekaligus diposisikan sebagai strategi penguatan kelembagaan ekonomi daerah melalui peningkatan kinerja, produktivitas, dan efisiensi BUMD.

Pembiayaan netto mengalami perubahan signifikan dalam empat tahun terakhir. Dari nilai positif Rp1,07 triliun pada 2023, turun drastis menjadi Rp80,98 miliar pada 2024, kemudian menurun lagi menjadi Rp53,45 miliar pada 2025, dan akhirnya nol rupiah pada 2026 (turun 100% dari tahun sebelumnya). Perubahan ini mengindikasikan arah pengelolaan fiskal yang semakin disiplin dan realistis, dengan fokus pada efisiensi anggaran dan kesinambungan pembiayaan jangka menengah sesuai kebutuhan dan



kapasitas riil pendapatan. Sementara itu, SiLPA pada akhir tahun juga menunjukkan pola yang fluktuatif. Dari Rp80,98 miliar pada 2023, turun tajam menjadi Rp10,99 miliar pada 2024, dan nol rupiah pada 2025 dan 2026. Penurunan drastis ini menandakan tekanan terhadap ruang fiskal dan kemungkinan realisasi belanja yang melebihi estimasi pendapatan dan penerimaan pembiayaan di tahun tersebut.

Arah pembiayaan tahun 2026 difokuskan pada penguatan fiskal, dengan pendekatan lebih konservatif melalui pengelolaan saldo anggaran yang ketat dan penempatan investasi pada sektor strategis. Hal ini memberi sinyal bahwa pembiayaan tidak hanya berfungsi sebagai penutup defisit anggaran, tetapi juga sebagai instrumen penguatan kapasitas fiskal jangka panjang melalui mekanisme yang produktif, terarah, dan terukur. Sebagai gambaran, alokasi pembiayaan daerah dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut ini.



Tabel 3.20 Realisasi Dan Proyeksi Pembiayaan Daerah pada Struktur Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023-2026

NO.	URAIAN	2023 ¹⁾	2024 ²⁾	2025 ³⁾	2026 ⁴⁾	Perubahan 2023 terhadap 2024	Perubahan 2024 terhadap 2025	Perubahan 2025 terhadap 2026
						(+/-) (persen)		
03.01	Penerimaan Pembiayaan							
03.01.01	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	1.076.160.606.520,79	80.982.789.368,31	103.450.000.000,00	50.000.000.000,00	-92,47	27,74	-51,67
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.076.160.606.520,79	80.982.789.368,31	103.450.000.000,00	50.000.000.000,00	-92,47	27,74	-51,67
03.02	Pengeluaran pembiayaan			50.000.000.000,00	50.000.000.000,00			0,00
03.02.01	Pembentukan dana cadangan							
03.02.02	Penyertaan modal (Investasi) daerah	4.698.000.000,00		50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-100,00		0,00
03.02.03	Pembayaran pokok utang							
03.02.04	Pemberian pinjaman daerah							
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.698.000.000,00		50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-100,00		0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	1.071.462.606.520,79	80.982.789.368,31	53.450.000.000,00	0,00	-92,44	-34,00	-100,00
	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	80.982.789.368,31	10.992.525.896,56	0,00	0,00	-86,43	-100,00	0,00

Sumber :

1) LRA Audited TA 2023

2) LRA Audited TA 2024

3) Pergubsu No. 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD TA 2025

4) Proyeksi TA 2026, data diolah





BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan

4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Tahun 2026 menandai fase krusial dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, sebagai tahapan awal meletakkan fondasi transformasi struktural menuju Indonesia Emas 2045. Dalam konteks tersebut, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 disusun untuk mengimplementasikan agenda pembangunan nasional secara konkret, menyelaraskan berbagai kebijakan sektoral, kewilayahan, dan fiskal. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2025–2029 yang memegang peran penting dalam mengakselerasi agenda transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Dengan mengusung tema “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”, RKP 2026 diarahkan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan melalui penguatan ketahanan nasional di sektor pangan dan energi serta pengembangan struktur ekonomi yang lebih produktif, kompetitif, dan merata.

RKP Tahun 2026 merupakan pelaksanaan tahun ke dua dari RPJMN Tahun 2025-2029 dengan visi besar yang ingin dicapai yaitu “Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. RPJMN menekankan pada Pertumbuhan Berkelanjutan, Penurunan kemiskinan dan Sumber daya manusia Berkualitas dengan Pencapaian visi yang diwujudkan dengan Asta Cita atau 8 (delapan) Prioritas Nasional yaitu :

- Prioritas Nasional 1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);
- Prioritas Nasional 2 Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- Prioritas Nasional 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
- Prioritas Nasional 4 Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
- Prioritas Nasional 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- Prioritas Nasional 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
- Prioritas Nasional 7 Memperkuat reformasi politik, hukum. dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
- Prioritas Nasional 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta

peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 disusun dalam kerangka yang konsisten dengan visi pembangunan jangka panjang dan menengah Indonesia. Pada tingkat makro, dokumen ini mengacu pada dua visi strategis utama. Pertama, Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 yang mengusung cita-cita “NKRI yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.” Kedua, RKP ini juga merupakan perwujudan dari Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045.” Kedua visi ini membentuk kerangka berpikir yang memandu arah kebijakan RKP 2026, yang mengusung tema sentral “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.”

Tema tersebut dibangun di atas dua pilar utama. Pilar pertama berfokus pada penguatan ketahanan dan kemandirian di sektor pangan dan energi, sedangkan pilar kedua bertujuan mendorong transformasi ekonomi menuju struktur yang lebih produktif dan inklusif. Keduanya menjadi landasan dalam menyusun prioritas nasional dan merancang program-program strategis lintas kementerian dan wilayah.

Gambar 4.1 Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2026



Sumber: RKP 2026

Pilar I: Pangan dan Energi

Pilar pertama, yang sesuai dengan Prioritas Nasional (PN) 2 dalam RPJMN, bertujuan memperkuat kemandirian nasional dalam sektor-sektor strategis, terutama pangan, energi, dan air. Upaya ini diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan inisiatif konkret seperti optimalisasi peran Perum BULOG dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan, serta perluasan kawasan *food estate* guna menjamin ketahanan produksi nasional. Di bidang energi, pemerintah menekankan pemanfaatan sumber energi terbarukan dan pengembangan bioenergi, termasuk produksi etanol dan biodiesel, sebagai bagian dari transisi menuju bauran energi yang bersih dan berkelanjutan. Selain itu, penyediaan air minum yang merata dan berkualitas menjadi prioritas melalui pembangunan dan penguatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dari hulu hingga hilir. Aspek lingkungan juga diperhatikan melalui kebijakan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular sebagai bagian dari strategi pengurangan limbah dan pemanfaatan sumber daya secara efisien.



Pemerintah berkomitmen untuk mencapai swasembada pangan, energi, dan air. Dalam bidang pangan, swasembada didorong melalui pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) guna membangun lumbung pangan nasional, termasuk pangan akuatik (blue food). Strategi ini mencakup peningkatan produktivitas perikanan, nilai tambah dan daya saing produk, pelestarian ekosistem perairan, serta peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan. Penguatan sistem pangan juga dilakukan melalui transformasi kelembagaan Perum BULOG menjadi badan di bawah Presiden agar lebih terintegrasi dan efisien dalam mengelola cadangan pangan nasional.

Swasembada energi ditargetkan melalui peningkatan bauran energi, terutama etanol, biodiesel, dan sumber terbarukan lainnya. Fokus utamanya adalah memperluas produksi biofuel, mendorong penggunaan biodiesel di sektor transportasi, serta menggeser konsumsi dari energi fosil ke energi bersih.

Di sektor air, swasembada diwujudkan melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dari hulu ke hilir untuk memperluas akses rumah tangga terhadap air bersih. Upaya ini mencakup peningkatan kualitas layanan air melalui penguatan aspek teknis, kelembagaan, regulasi, pendanaan, serta partisipasi masyarakat.

Sementara itu, pengelolaan sampah nasional menjadi prioritas mengingat proyeksi timbunan sampah yang diperkirakan mencapai 82,2 juta ton per tahun pada 2045, melebihi kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang ada. Oleh karena itu, reformasi pengelolaan sampah dilakukan secara menyeluruh melalui pendekatan teknis, perubahan perilaku, dan kolaborasi multipihak. Pengelolaan Sampah Terpadu diarahkan untuk membangun infrastruktur ramah lingkungan, menciptakan nilai ekonomi, mendukung ketahanan pangan dan energi, serta mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK). Salah satu pilar utamanya adalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan pendanaan, perizinan, dan regulasi. Program ini juga terintegrasi dengan agenda nasional seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengembangan ekonomi sirkular, dan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan sektor informal.

Pilar II: Ekonomi yang Produktif dan Inklusif

Pilar kedua mencakup sebagian besar Prioritas Nasional (PN 1, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8), dan menjadi instrumen utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pilar ini diorganisasikan dalam tujuh klaster tematik yang saling terintegrasi.

Klaster pertama adalah Pendidikan dan Kesehatan, yang menekankan pembangunan ekosistem Makan Bergizi Gratis sebagai intervensi awal dalam membentuk generasi sehat dan cerdas. RKP Tahun 2026 menekankan pembangunan ekonomi yang produktif dan inklusif, dengan dukungan utama dari sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu langkah kuncinya adalah penguatan dan perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mendukung tumbuh kembang generasi sehat dan cerdas. Program ini mencakup pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta siswa dari jenjang PAUD hingga SMA/MA/SMK. Diharapkan program ini dapat meningkatkan prestasi belajar, membuka lapangan kerja, memperbaiki kesejahteraan petani, dan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin.



Di sektor pendidikan, pemerintah mendorong akses yang lebih merata melalui percepatan renovasi sekolah dan pembangunan Sekolah Rakyat—sebuah inisiatif pendidikan inklusif bagi anak-anak dari keluarga miskin dan kelompok rentan. Sekolah ini mencakup jenjang SD hingga SMA, dan dirancang untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Selain itu, pembangunan sekolah unggul juga dilakukan sebagai wadah pengembangan talenta nasional, dengan menyediakan lingkungan belajar yang kondusif untuk mendukung potensi peserta didik secara optimal. Di sektor kesehatan, fokus diarahkan pada penguatan layanan primer melalui pembangunan dan revitalisasi puskesmas serta rumah sakit daerah, yang akan menjamin akses kesehatan yang merata dan berkualitas di seluruh wilayah.

Klaster kedua adalah Deregulasi dan Kepastian Hukum, yang menjadi kunci dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Birokrasi dan tata kelola yang baik menjadi kunci penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang produktif dan inklusif. Tujuannya adalah menciptakan pemerintahan yang adaptif, cepat melayani, dan mudah diakses masyarakat. Pemerintahan yang efektif diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, integritas, dan kepercayaan publik. Reformasi birokrasi dilakukan melalui transformasi digital, yang mencakup pengembangan arsitektur pemerintah digital, integrasi layanan publik prioritas dalam satu portal tematik, serta implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) untuk mendukung pelayanan publik berbasis digital.

Di sisi lain, investasi berperan penting dalam mendorong pertumbuhan dan produktivitas. Pemerintah tidak hanya menargetkan peningkatan nilai investasi, tetapi juga kualitasnya, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Investasi berkualitas diharapkan dapat membuka lapangan kerja, memperkuat daya saing, dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Pemerintah berkomitmen melanjutkan agenda reformasi birokrasi, menyederhanakan proses perizinan, dan menjamin kepastian hukum untuk menarik investasi, baik dalam negeri maupun asing.

Klaster ketiga adalah Adopsi Teknologi dan Inovasi, yang mencerminkan dorongan kuat terhadap transformasi digital nasional. Penguatan riset dan inovasi diarahkan untuk meningkatkan produktivitas sektor riil dan mendukung penciptaan ekonomi berbasis pengetahuan. Transformasi digital menjadi strategi utama untuk meningkatkan daya saing nasional dan membangun ekosistem sosial yang kondusif melalui pemanfaatan data, informasi, dan teknologi. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan peningkatan produktivitas.

Riset dan inovasi juga memainkan peran penting dalam mendukung adopsi teknologi. Pengembangannya diarahkan melalui ekosistem iptek dan inovasi (Iptekin) yang terstruktur, adaptif, dan mudah dipahami. Untuk itu, kapasitas iptekin diperkuat melalui optimalisasi peran lembaga intermediasi di perguruan tinggi dan lembaga riset, seperti LPPM, *Science Techno Park* (STP), pusat diseminasi, *Transfer Technology Office* (TTO), dan inkubator, agar hasil riset lebih terarah dan berkelanjutan.

Klaster keempat mencakup pembangunan Pertahanan Semesta, yaitu sistem pertahanan berbasis rakyat yang didukung oleh peningkatan kapasitas komponen cadangan dan penguatan industri pertahanan nasional. Pemerintah juga menekankan pentingnya penguatan wilayah-wilayah terluar sebagai bentuk perlindungan kedaulatan negara.

Klaster kelima berfokus pada Fiskal Adaptif dan Stabilitas Makroekonomi, sebagai prasyarat untuk memastikan keberlanjutan



pembangunan. Peningkatan produktivitas nasional didukung oleh kebijakan fiskal yang adaptif. Kebijakan ini dilakukan dengan mendorong peningkatan pendapatan dan belanja negara untuk pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*), sekaligus menjaga keseimbangan primer, defisit anggaran, dan rasio utang agar tetap sehat demi stabilitas dan keberlanjutan fiskal (*pro-stability* dan *fiscal sustainability*). Melalui pendekatan ini, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan, sambil memastikan stabilitas makroekonomi melalui pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar, dan ketahanan sektor eksternal.

Klaster keenam adalah Percepatan Pertumbuhan Ekonomi, yang diarahkan melalui hilirisasi sumber daya alam oleh entitas milik Indonesia sendiri. Percepatan pertumbuhan ekonomi didorong melalui hilirisasi sejumlah komoditas unggulan, seperti nikel, tembaga, bauksit, timah, kelapa sawit, kelapa, dan rumput laut. Fokus utamanya adalah pembangunan dan pengoperasian smelter untuk meningkatkan kapasitas industri pengolahan, khususnya pada komoditas nikel. Dalam hal ini, BUMN dan koperasi berperan penting. Pemerintah juga mengoptimalkan pemanfaatan dana pembangunan seperti Dana Abadi untuk mendukung investasi dan penguatan sektor produktif nasional.

Klaster terakhir, yang juga menjadi prioritas mendesak, adalah Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Dalam rangka mendukung percepatan pengentasan kemiskinan, pemerintah juga berkomitmen untuk melaksanakan penerapan data tunggal kemiskinan, digitalisasi bantuan, program tiga juta rumah yang menyasar segmen Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), termasuk masyarakat miskin dan rentan. Pemerintah akan menerapkan pendekatan intervensi berbasis data fungsional dan spasial untuk meningkatkan akurasi program-program perlindungan sosial. Target utama mencakup pembangunan 3 juta unit rumah layak huni, pemberdayaan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, serta penguatan program berbasis komunitas, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan secara langsung di tingkat akar rumput.

Melalui pelaksanaan prioritas pembangunan RKP Tahun 2026 diharapkan akan mendorong pencapaian sasaran pembangunan nasional untuk mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan, menurunkan tingkat kemiskinan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pencapaian tiga sasaran pembangunan nasional tersebut dijabarkan oleh indikator sasaran pembangunan pada Gambar 4.2 berikut

Gambar 4.2 Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2026



Sumber: RKP 2026



Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 menetapkan tiga sasaran utama pembangunan nasional, yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memperkecil ketimpangan sosial, dan memperkuat kualitas sumber daya manusia.

Sasaran pertama adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional pada kisaran 5,80 hingga 6,30 persen, dengan *Gross National Income* (GNI) per kapita mencapai USD 5.870. Pertumbuhan tersebut diharapkan tidak hanya berorientasi pada kuantitas, tetapi juga kualitas, dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan. Hal ini tercermin dari target penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 37,14 persen, serta peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi 76,67. Pendekatan ini menunjukkan integrasi antara pertumbuhan ekonomi dan agenda pembangunan hijau sebagai respons terhadap tantangan perubahan iklim dan degradasi lingkungan.

Sasaran kedua difokuskan pada penurunan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan berada di kisaran 6,5 hingga 7,5 persen, serta penurunan kemiskinan ekstrem hingga mendekati nol, yaitu antara 0,0 hingga 0,5 persen. Untuk mendukung hal tersebut, tingkat pengangguran terbuka diupayakan turun ke level 4,44 hingga 4,96 persen. Selain itu, Rasio Gini—sebagai indikator kesenjangan distribusi pendapatan—ditargetkan membaik ke angka 0,377–0,380. Sasaran ini menunjukkan bahwa inklusivitas sosial menjadi bagian integral dari kebijakan ekonomi nasional.

Sasaran ketiga adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi transformasi jangka panjang. Indikator kunci dalam hal ini adalah peningkatan Indeks Modal Manusia (*Human Capital Index*) yang ditargetkan mencapai nilai 0,57. Nilai ini mencerminkan gabungan aspek pendidikan, kesehatan, dan potensi produktivitas generasi muda Indonesia. Peningkatan indeks ini diharapkan mampu menciptakan SDM unggul yang adaptif terhadap tantangan global dan berdaya saing tinggi di masa depan.

4.1.2 Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Daerah

RKPD disusun melalui sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya, salah satunya melalui penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 melalui penyelarasan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan Daerah, serta mendukung pada pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs), dan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional. Penetapan target kinerja visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 merupakan bagian dalam upaya pencapaian kinerja pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara yang sesuai dengan RPJMD.

Pendekatan perencanaan yang digunakan dalam penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 adalah pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Pendekatan ini menekankan pada keterpaduan perencanaan pembangunan, bukan semata-mata berdasarkan sektor atau tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, tetapi berorientasi pada

kolaborasi lintas sektor untuk mencapai tujuan pembangunan yang menyeluruh.



Dalam pendekatan THIS, tema pembangunan menjadi titik awal atau dasar penyusunan rencana pembangunan daerah. Tema tersebut ditetapkan berdasarkan isu-isu strategis dan prioritas pembangunan daerah yang diarahkan oleh kepala daerah. Tema inilah yang menjadi inti dari keseluruhan proses perencanaan pembangunan.

Selanjutnya, pendekatan integratif berarti melibatkan berbagai perangkat daerah yang memiliki keterkaitan dan peran dalam mendukung pencapaian tema pembangunan tersebut. Sementara itu, pendekatan holistik menggambarkan keterpaduan program dan kegiatan yang dirancang oleh masing-masing perangkat daerah untuk mendukung tema pembangunan secara menyeluruh.

Adapun pendekatan spasial berfungsi untuk memastikan bahwa setiap intervensi pembangunan dilakukan secara tepat sasaran sesuai dengan karakteristik wilayah. Dengan demikian, pembangunan tematik dapat dilaksanakan secara efektif melalui sinergi antarperangkat daerah (integratif), dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang saling melengkapi (holistik), serta diarahkan berdasarkan potensi dan permasalahan kewilayahan (spasial).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 adalah RKPD tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029 yang menjadi pedoman dalam menyusun rencana pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara dan mengacu pada RKP Tahun 2026. Dengan mengacu kepada RKP Tahun 2026 maka tema RKPD Tahun 2026 yaitu **“Merajut Kolaborasi untuk Mewujudkan Sumut Berkah dan Indonesia Maju mendukung Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”**.

Merujuk pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sumatera Utara tahun 2026 dapat diuraikan sebagai berikut:

Visi yang ingin dicapai yaitu **“Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan”**.

Pencapaian visi ini diuraikan melalui 5 (lima) Misi (Pilar) Pembangunan yaitu:

- Misi 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
- Misi 2 Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah
- Misi 3 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
- Misi 4 Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan
- Misi 5 Memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh

Pencapaian Visi Misi Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2025-2029 dilaksanakan dalam rangka mendukung Trisula Program Pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029, yaitu: Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan, Penurunan Kemiskinan dan Sumber Daya Manusia Berkualitas yang akan dilakukan dengan strategi pengembangan wilayah, pertumbuhan dan pemerataan, serta kolaborasi pembangunan daerah.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2026 berdasarkan Visi Misi Gubernur Sumatera Utara 2025-2029, tersaji dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 4.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara
“KOLABORASI SUMUT BERKAH MENUJU SUMATERA UTARA UNGGUL, MAJU DAN BERKELANJUTAN”

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET		Keterangan
						2025	2026	
Misi 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Modal Manusia	Poin	N/A	0,54	0,54	Seluruh OPD
		1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,9	74,01	74,18	Dinas Kesehatan
		2. Meratanya Pendidikan Berkualitas	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,93	10,3 - 10,33	10,43- 10,46	Dinas Pendidikan
			Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,49	13,61 - 13,63	13,67- 13,69	Dinas Pendidikan
	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat		Tingkat Kemiskinan	Persen	7,19	6,96-7,46	5,93-6,55	Seluruh OPD
		3. Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	Poin	56,09	56,09	56,59	Dinas Sosial
			Indeks Zakat Nasional	Poin	0,44	0,46	0,48	Biro Kesra
Misi 2. Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah	3. Ekonomi yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan		Kontribusi PDRB Provinsi	Persen	5,2	5,2	5,2	Seluruh OPD
			PDRB per Kapita	Rp. Juta	73,57	78,4	87,6	Seluruh OPD
			Indeks Ekonomi Hijau	Poin/Skor	N/A	51,12	51,14	Seluruh OPD
		4. Meningkatnya Hilirisasi Produk Unggulan Daerah	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	18,36	18,66	18,96	Disperindag ESDM
			Rasio Volume Usaha koperasi terhadap PDRB	Persen	N/A	0,79	0,79	Dinas Koperasi dan UKM
			Indeks Inovasi Daerah	Poin/Skor	59,93	57,50- 60,01	58,69- 60,76	Bappelitbang
		5. Meningkatnya Aktivitas Ekonomi	Porsi EBT dalam Bauran Energi	Persen	42,04	43	44	Dinas Perindustrian, Perdagangan



MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET		Keterangan
						2025	2026	
		yang Berwawasan Lingkungan						dan Energi Sumber Daya Mineral
			Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Poin/Skor	N/A	0,562	0,567	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, dan Makan Minum	Persen	N/A	2,42	2,5	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	4. Ekonomi yang Stabil dan inklusif		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,6	5,27-5,56	5,14-5,47	Seluruh OPD
			Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,03	5,20- 5,60	5,80-6,20	Seluruh OPD
			Gini Rasio	Poin	0,306	0,303-0,305	0,301-0,303	Seluruh OPD
		6. Terciptanya Stabilitas Harga	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	Poin/Skor	N/A	10,1	9,95	Disperindag ESDM
			Tingkat Inflasi	Persen	2,12	2,5±1	2,5±1	Disperindag ESDM, Biro Perekonomian, TPH, Dishub, Disbunak, Kanla
		7. Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	28,65	29,7	29,75	DPMPSTP
			NTP Tanaman Pangan	Poin	100,25	100,26	100,27	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
			Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Poin	101,32	101,35	102,54	Dinas Kelautan dan Perikanan



MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET		Keterangan
						2025	2026	
			NTP Tanaman Hortikultura	Poin	92,81	92,82	92,83	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
			Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTPR)	Poin	182,87	183,05	183,24	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT)	Poin	95,4	95,5	95,59	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Indeks Desa	Poin	0,6437	0,6671	0,6799	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
			Inklusi Keuangan	Persen	N/A	97,52	97,61	Biro Perekonomian
Misi 3. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	5. Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Adaptif dan Berintegritas		Indeks Reformasi Birokrasi	Poin/Skor	80,87 (A)	81,12 (A)	81,14 (A)	Seluruh OPD
		8. Menguatnya Birokrasi yang Profesional, Adaptif dan Berintegritas	Indeks Pelayanan Publik	Poin/Skor	3,90	3,92	3,93	Biro Organisasi
			Indeks Reformasi Hukum	Poin/Skor	85,9	86	86	Biro Hukum
			Indeks integritas Nasional	Poin/Skor	N/A	66,78	67,46	Inspektorat
			Nilai Capaian Pelaporan Kinerja (SAKIP)	Poin/Skor	N/A	72,00(BB)	72,5	Biro Organisasi
			Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	Poin	N/A	50	51	Dinas Komunikasi dan Informatika



MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET		Keterangan
						2025	2026	
			Indeks Profesionalitas ASN	Poin	79,44	79,94	80,15	Badan Kepegawaian
		9. Meningkatnya Kapasitas Keuangan Daerah	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	BKAD
	6. Peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan yang mendukung pelaksanaan kebijakan dan pembangunan		Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	Persen	N/A	58,5	59,38	Seluruh OPD
		10. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Persen	N/A	100	100	Satpol PP
Misi 4. Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan	7. Peningkatan Akses terhadap Infrastruktur yang Berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan guna Mendukung Kemandirian Ekonomi Masyarakat		Persentase Penurunan Emisi GRK					
			a. Kumulatif	Persen	N/A	10,06	10,78	Seluruh OPD
			b. tahunan	Persen	N/A	19,04	20,63	
		11. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Ramah Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	73,96	77,2	77,37	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		12. Meningkatnya Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Pravelence of Undermourishment)	Persen	7,54	7,2	6,87	Dinas Ketahanan Pangan TPH
			Skor Pola Pangan Harapan	Poin	89,16	90,05	90,95	Dinas Ketahanan Pangan, TPH
			Intensitas energi primer	SBM/Rp. Milyar	81	79,4	77,64	Dinas Peridustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral



MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET		Keterangan
						2025	2026	
			Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	ha	0	50000	50000	Dinas Perindag dan ESDM
Misi 5. Memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh	8. Terwujudnya Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keluarga		Indeks Demokrasi Indonesia	Poin/Skor	80,19	80,5 - 82,46	83,08 - 84,08	Seluruh OPD
		13. Menguatnya Peran Keluarga, Kesenjangan Gender, Toleransi dan Kerukunan Antarumat Beragama dalam Kehidupan Sosial	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Poin/skor	0,399	0,395	0,39	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
			Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga/IPKK	Poin	69,79	69,79	71,04	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
			Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	80,88	81,2	81,5	Badan Kesbangpol
		14. Menguatnya Pelestarian dan Pemanfaatan Nilai-nilai Budaya Lokal sebagai Identitas Daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin/Skor	N/A	55,44 - 55,48	55,98- 56,05	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Ekonomi Kreatif



Sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 disusun sebagai turunan langsung dari arah kebijakan nasional yang tertuang dalam RKP 2026, sekaligus merupakan wujud respons strategis atas berbagai tantangan pembangunan daerah. Dengan memperhatikan karakteristik wilayah Sumatera Utara yang terdiri dari dataran rendah, pegunungan, kawasan pesisir, dan kepulauan, RKPD 2026 berupaya mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan ekologi dalam satu kerangka pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis potensi lokal. Pendekatan ini tidak hanya ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk memastikan distribusi manfaat pembangunan yang adil di seluruh kabupaten/kota di provinsi ini.

Salah satu indikator utama yang menjadi perhatian dalam RKPD 2026 adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), yang ditargetkan berada pada kisaran 5,80 hingga 6,20 persen. Target ini mencerminkan optimisme terhadap pemulihan dan penguatan struktur ekonomi pasca pandemi melalui strategi transformasi ekonomi berbasis sektor unggulan daerah. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, penguatan pelabuhan Kuala Tanjung, serta konektivitas jalan tol dan jalur kereta api menjadi prioritas utama dalam mendorong investasi dan memperluas pasar produk lokal. Namun, keberhasilan LPE juga sangat ditentukan oleh efektivitas koordinasi lintas sektor dan kemampuan birokrasi daerah dalam merealisasikan belanja modal secara tepat sasaran dan efisien.

Target berikutnya adalah Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang diharapkan mencapai Rp.87,6 juta. Peningkatan ini diharapkan tidak hanya mencerminkan pertumbuhan ekonomi secara nominal, tetapi juga menunjukkan meningkatnya produktivitas dan daya beli masyarakat. Dalam konteks RKPD, peningkatan PDRB per kapita diarahkan pada penguatan sektor pertanian, industri pengolahan hasil perkebunan, ekonomi kreatif, dan pariwisata berbasis budaya dan ekowisata. Pemberdayaan masyarakat desa, pendampingan koperasi, serta digitalisasi ekonomi lokal menjadi instrumen penting dalam mendistribusikan pertumbuhan ini secara merata ke seluruh wilayah provinsi.

Melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita, diharapkan kontribusi PDRB Provinsi Sumatera Utara terhadap Nasional tetap terjaga di angka 5,2 persen. Angka ini mengasumsikan adanya upaya yang sama dilakukan oleh provinsi lain dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi wilayahnya, yang tentu akan berdampak terhadap dinamika kekuatan distribusi masing-masing wilayah, khususnya Sumatera Utara.

RKPD 2026 juga menempatkan perhatian besar pada keberlanjutan lingkungan hidup, yang ditunjukkan melalui dua indikator utama, yakni target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 4,97 persen dan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi 77,37 poin. Sumatera Utara memiliki kawasan strategis nasional seperti Danau Toba dan Taman Nasional Gunung Leuser yang memiliki fungsi ekologis penting bagi Sumatera dan Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, RKPD mengusulkan berbagai intervensi seperti rehabilitasi daerah aliran sungai, pengembangan energi baru terbarukan (khususnya panas bumi), serta penguatan pengelolaan sampah dan limbah domestik melalui pendekatan *circular economy*. Pelibatan komunitas lokal dan lembaga adat juga menjadi elemen penting dalam memastikan keberlanjutan jangka panjang dari program-program ini.



Dalam aspek ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ditargetkan turun ke level 5,14 hingga 5,47 persen. Untuk mencapai sasaran ini, RKPD 2026 mengarahkan kebijakan pada penciptaan lapangan kerja melalui perluasan sektor padat karya seperti pertanian modern, jasa pariwisata, serta industri rumah tangga berbasis digital. Program pelatihan vokasi, sertifikasi keterampilan, dan inkubasi wirausaha muda turut diperluas untuk menjawab kesenjangan antara kebutuhan industri dengan kompetensi tenaga kerja lokal. Kawasan seperti Danau Toba, Medan, dan kawasan pesisir timur menjadi fokus pengembangan ekonomi kreatif dan digital yang diproyeksikan menyerap tenaga kerja usia muda secara signifikan.

Masalah ketimpangan dan pemerataan hasil pembangunan juga dijawab melalui target Rasio Gini yang dijaga dalam kisaran 0,301-0,303 poin. RKPD 2026 merumuskan strategi pengurangan ketimpangan wilayah melalui intervensi infrastruktur dasar di kawasan tertinggal seperti Kepulauan Nias, Pakpak Bharat, dan Mandailing Natal. Pendekatan berbasis wilayah dengan penekanan pada konektivitas jalan, ketersediaan layanan air minum, listrik, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan di daerah perdesaan menjadi strategi utama dalam menciptakan keadilan spasial. Selain itu, penguatan program perlindungan sosial adaptif berbasis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) menjadi dasar dalam pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran dan mencegah eksklusi kelompok rentan.

Upaya pengentasan kemiskinan juga menjadi pilar RKPD 2026, dengan target penurunan jumlah penduduk miskin hingga 5,93 – 6,55 persen. Dalam kerangka ini, kebijakan diarahkan pada pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal, program pertanian berkelanjutan, dukungan asuransi tani, serta bantuan akses modal dan pelatihan usaha mikro. Implementasi program Kartu Usaha Afirmatif dan Kartu Kesejahteraan yang terintegrasi dengan layanan kesehatan dan pendidikan dasar merupakan inovasi untuk mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem dan memperluas mobilitas sosial vertikal. Di samping itu, RKPD menempatkan agenda penyediaan makanan bergizi gratis bagi anak sekolah, santri, dan kelompok ibu hamil sebagai bagian dari pendekatan holistik dalam meningkatkan kualitas hidup generasi mendatang.

Terakhir, dari sisi penguatan sumber daya manusia digambarkan melalui terjaganya capaian nilai Indeks Modal Manusia sebesar 0,54 poin. RKPD 2026 memperkuat dimensi pendidikan dan kesehatan melalui program digitalisasi pembelajaran, penguatan sekolah rakyat untuk anak miskin ekstrem, dan peningkatan kualitas layanan RSUD di seluruh kabupaten/kota. Selain itu, kolaborasi dengan dunia usaha dalam penyediaan magang industri dan penguatan jalur vokasi juga ditargetkan dapat menghubungkan lulusan pendidikan dengan pasar kerja yang relevan.

RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 memuat sasaran-sasaran pembangunan yang tidak hanya bersifat makro dan kuantitatif, tetapi juga memuat elemen strategis yang menjembatani kebijakan nasional dengan dinamika lokal. Keberhasilan pelaksanaan RKPD ini sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan daerah, integrasi lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. RKPD ini dirancang bukan sekadar sebagai dokumen teknokratik, tetapi sebagai instrumen politik pembangunan daerah yang mengedepankan nilai keadilan sosial, keberlanjutan ekologis, dan kemandirian ekonomi lokal.

Tabel 4.2 Target Sasaran Indikator Makro Nasional dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026

NO.	INDIKATOR	TARGET NASIONAL RKP TAHUN 2026	TARGET RKPD PROVINSI TAHUN 2026
(1)	(2)	(3)	(5)
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,8 – 6,3	5,80 – 6,20
2	PDRB per Kapita (Rp juta)	5.870 (GNI per Kapita, US\$)	87,6
3	Kontribusi PRDB Provinsi (%)	-	5,2
4	Tingkat Kemiskinan (%)	6,50 – 7,50	5,93 – 6,55
5	Rasio Gini (poin)	0,377 – 0,380	0,301 – 0,303
6	Indeks Modal Manusia (poin)	0,57	0,54
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,44 – 4,96	5,14 – 5,47
8	Penurunan intensitas emisi GRK (%)	37,14	1-2,77
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)	76,67	77,37

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 merupakan langkah awal dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 yang diarahkan untuk memperkuat fondasi transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola, yang diimbangi dengan penguatan keamanan daerah, demokrasi substansial, stabilitas ekonomi makro, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Seluruh aspek ini menjadi landasan krusial bagi Sumatera Utara dalam menjalankan peran strategisnya sebagai pusat pengembangan bioindustri dan destinasi pariwisata kelas dunia. Kebijakan yang diambil pada fase ini bertujuan untuk memastikan bahwa Sumatera Utara memiliki pondasi yang kokoh dalam memulai proses transformasi tersebut. Fokus pembangunan diarahkan pada pemenuhan layanan dasar masyarakat, penguatan sektor industri lokal, serta pembentukan tata kelola yang adaptif dan progresif. Melalui pengembangan hilirisasi potensi sumber daya alam dan peningkatan kapasitas riset.

Tujuan dan sasaran serta target indikator kinerja RKPD Tahun 2026 telah selaras dengan tujuan, sasaran dan target indikator kinerja yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Provinsi. Konsistensi antara keduanya dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 4.3 Konsistensi Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun Pelaksanaan 2026 dan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026

NO	RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2026				RKPD TAHUN 2026				Keterangan
	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Modal Manusia	Poin	0,54	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Modal Manusia	Poin	0,54	Seluruh OPD
	1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,18	1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,18	Dinas Kesehatan
	2. Meratanya Pendidikan Berkualitas	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,43-10,46	2. Meratanya Pendidikan Berkualitas	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,43-10,46	Dinas Pendidikan
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,67-13,69		Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,67-13,69	Dinas Pendidikan
2	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,93-6,55	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,93-6,55	Seluruh OPD
	3. Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	Poin	56,59	3. Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	Poin	56,59	Dinas Sosial
		Indeks Zakat Nasional	Poin	0,48		Indeks Zakat Nasional	Poin	0,48	Biro Kesra
3	Ekonomi yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	Kontribusi PDRB Provinsi	Persen	5,2	Ekonomi yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	Kontribusi PDRB Provinsi	Persen	5,2	Seluruh OPD
		PDRB per Kapita	Rp. Juta	87,6		PDRB per Kapita	Rp. Juta	87,6	Seluruh OPD
		Indeks Ekonomi Hijau	Poin/Skor	51,14		Indeks Ekonomi Hijau	Poin/Skor	51,14	Seluruh OPD
	4. Meningkatnya Hilirisasi Produk Unggulan Daerah	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	18,96	4. Meningkatnya Hilirisasi Produk Unggulan Daerah	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	18,96	Disperindag ESDM
		Rasio Volume Usaha koperasi terhadap PDRB	Persen	0,79		Rasio Volume Usaha koperasi terhadap PDRB	Persen	0,79	Dinas Koperasi dan UKM
		Indeks Inovasi Daerah	Poin/Skor	58,69-60,76		Indeks Inovasi Daerah	Poin/Skor	58,69-60,76	Bappelitbang
	5. Meningkatnya Aktivitas Ekonomi yang Berwawasan Lingkungan	Porsi EBT dalam Bauran Energi	Persen	44	5. Meningkatnya Aktivitas Ekonomi yang Berwawasan Lingkungan	Porsi EBT dalam Bauran Energi	Persen	44	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral
		Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Poin/Skor	0,567		Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Poin/Skor	0,567	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, dan Makan Minum	Persen	2,5		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, dan Makan Minum	Persen	2,5	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



NO	RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2026				RKPD TAHUN 2026				Keterangan
	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	
4	Ekonomi yang Stabil dan inklusif	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,14-5,47	Ekonomi yang Stabil dan inklusif	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,14-5,47	Seluruh OPD
		Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,80-6,20		Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,80-6,20	Seluruh OPD
		Gini Rasio	Poin	0,301-0,303		Gini Rasio	Poin	0,301-0,303	Seluruh OPD
	6. Terciptanya Stabilitas Harga	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	Poin/Skor	9,95	6. Terciptanya Stabilitas Harga	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	Poin/Skor	9,95	Disperindag ESDM
		Tingkat Inflasi	Persen	2,5±1		Tingkat Inflasi	Persen	2,5±1	Disperindag ESDM, Biro Perekonomian, TPH, Dishub, Disbunak, Kanla
	7. Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	29,75	7. Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	29,75	DPMPSTP
		NTP Tanaman Pangan	Poin	100,27		NTP Tanaman Pangan	Poin	100,27	Dinas Ketahanan Pangan TPH
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Poin	102,54		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Poin	102,54	Dinas Kelautan dan Perikanan
		NTP Tanaman Hortikultura	Poin	92,83		NTP Tanaman Hortikultura	Poin	92,83	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
		Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTPR)	Poin	183,24		Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTPR)	Poin	183,24	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT)	Poin	95,59		Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT)	Poin	95,59	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Indeks Desa	Poin	0,6799		Indeks Desa	Poin	0,6799	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
		Inklusi Keuangan	Persen	97,61		Inklusi Keuangan	Persen	97,61	Biro Perekonomian
5	Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Adaptif dan Berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin/Skor	81,14 (A)	Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Adaptif dan Berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin/Skor	81,14 (A)	Seluruh OPD
	8. Menguatnya Birokrasi yang Profesional, Adaptif dan Berintegritas	Indeks Pelayanan Publik	Poin/Skor	3,93	8. Menguatnya Birokrasi yang Profesional, Adaptif dan Berintegritas	Indeks Pelayanan Publik	Poin/Skor	3,93	Biro Organisasi
		Indeks Reformasi Hukum	Poin/Skor	86		Indeks Reformasi Hukum	Poin/Skor	86	Biro Hukum



NO	RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2026				RKPD TAHUN 2026				Keterangan
	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	
		Indeks integritas Nasional	Poin/Skor	67,46		Indeks integritas Nasional	Poin/Skor	67,46	Inspektorat
		Nilai Capaian Pelaporan Kinerja (SAKIP)	Poin/Skor	72,5		Nilai Capaian Pelaporan Kinerja (SAKIP)	Poin/Skor	72,5	Biro Organisasi
		Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	Poin	51		Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	Poin	51	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Indeks Profesionalitas ASN	Poin	80,15		Indeks Profesionalitas ASN	Poin	80,15	Badan Kepegawaian
	9. Meningkatnya Kapasitas Keuangan Daerah	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	9. Meningkatnya Kapasitas Keuangan Daerah	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	BKAD
6	Peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan yang mendukung pelaksanaan kebijakan dan pembangunan	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	Persen	59,38	Peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan yang mendukung pelaksanaan kebijakan dan pembangunan	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	Persen	59,38	Satpol PP
	10. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Persen	100	10. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Persen	100	Satpol PP dan BPBD
7	Peningkatan Akses terhadap Infrastruktur yang Berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan guna Mendukung Kemandirian Ekonomi Masyarakat	Persentase Penurunan Emisi GRK			Peningkatan Akses terhadap Infrastruktur yang Berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan guna Mendukung Kemandirian Ekonomi Masyarakat	Persentase Penurunan Emisi GRK			Seluruh OPD
		a. Kumulatif	Persen	10,78		a. Kumulatif	Persen	10,78	
		b. tahunan	Persen	20,63		b. tahunan	Persen	20,63	
	11. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Ramah Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	77,37		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	77,37	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	12. Meningkatnya Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Pravelence of Undermourishment)	Persen	6,87	12. Meningkatnya Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Pravelence of Undermourishment)	Persen	6,87	Dinas Ketahanan Pangan TPH
		Skor Pola Pangan Harapan	Poin	90,95		Skor Pola Pangan Harapan	Poin	90,95	Dinas Ketahanan Pangan, TPH
		Intensitas energi primer	SBM/Rp.Milyar	77,64		Intensitas energi primer	SBM/Rp.Milyar	77,64	Dinas Peridustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral



NO	RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2026				RKPD TAHUN 2026				Keterangan
	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	
		Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	Poin	76		Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	76	Dinas LH dan Kehutanan
8	Terwujudnya Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keluarga	Indeks Demokrasi Indonesia	Poin/Skor	83,08 - 84,08	Terwujudnya Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keluarga	Indeks Demokrasi Indonesia	Poin/Skor	83,08 - 84,08	Seluruh OPD
	13. Menguatnya Peran Keluarga, Kesenjangan Gender, Toleransi dan Kerukunan Antarumat Beragama dalam Kehidupan Sosial	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Poin/skor	0,39	13. Menguatnya Peran Keluarga, Kesenjangan Gender, Toleransi dan Kerukunan Antarumat Beragama dalam Kehidupan Sosial	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Poin/skor	0,39	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga/IPKK	Poin	71,04		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga/IPKK	Poin	71,04	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
		Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	81,5		Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	81,5	Badan Kesbangpol
	14. Menguatnya Pelestarian dan Pemanfaatan Nilai-nilai Budaya Lokal sebagai Identitas Daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin/Skor	55,98-56,05	14. Menguatnya Pelestarian dan Pemanfaatan Nilai-nilai Budaya Lokal sebagai Identitas Daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin/Skor	55,98-56,05	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Ekonomi Kreatif



Tabel berikut menyajikan pemetaan cascading antara visi, misi, tujuan, indikator tujuan RKPD, sasaran, indikator sasaran RKPD, indikator tujuan OPD, indikator sasaran OPD, hingga OPD pengampu indikator. Penyusunan tabel ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran keterkaitan antarlevel perencanaan, sekaligus menunjukkan kerangka pikir pencapaian visi pembangunan Provinsi Sumatera Utara secara bertahap dan terukur.

Pendekatan leveling indikator ini menegaskan bahwa pencapaian indikator tujuan RKPD sangat bergantung pada keberhasilan indikator sasaran, sedangkan pencapaian sasaran RKPD ditentukan oleh kinerja tujuan dan sasaran OPD sebagaimana dirumuskan dalam Renja masing-masing OPD. Pada level operasional, capaian tujuan dan sasaran OPD ditentukan oleh keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang dijalankan pada tahun 2026.

Pemetaan ini juga menunjukkan bahwa beberapa indikator tujuan maupun sasaran OPD dapat berkontribusi pada pencapaian lebih dari satu tujuan atau sasaran RKPD. Hal ini menandakan bahwa hubungan antarindikator bersifat saling terkait (*interconnected*) dan tidak linear tunggal. Oleh karena itu, koordinasi lintas-OPD serta sinergi antarprogram menjadi faktor kunci dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara utuh melalui RKPD Tahun 2026.



Tabel 4.4 Pencapaian Visi melalui Pencapaian Kinerja Indikator

Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RENSTRA OPD		Perangkat Daerah
				TUJUAN	SASARAN	
Misi 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Modal Manusia			Seluruh OPD
		1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup			Dinas Kesehatan
				Usia Harapan Hidup		Dinas Kesehatan
					Angka Kematian Ibu	Dinas Kesehatan
					Angka Kematian Bayi	Dinas Kesehatan
					Prevalensi Stunting	Dinas Kesehatan
					Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Dinas Kesehatan
					Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis	Dinas Kesehatan
				Bed Occupancy Rate (BOR)		UPT RS Haji
					Length Of Stay (LOS)	UPT RS Haji
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	UPT RS Haji



Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RENSTRA OPD		Perangkat Daerah
				TUJUAN	SASARAN	
				<i>Bed Occupancy Rate (BOR)</i>		UPT RSJ Ildrem
					<i>Average Length Of Stay (ALOS)</i>	UPT RSJ Ildrem
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	UPT RSJ Ildrem
				Indeks Partisipasi Olahraga		Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
		2, Meratanya Pendidikan Berkualitas	Rata-Rata Lama Sekolah			Dinas Pendidikan
			Harapan Lama Sekolah			Dinas Pendidikan
				Rata-Rata Lama Sekolah		Dinas Pendidikan
				Harapan Lama Sekolah		Dinas Pendidikan
				Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional		Dinas Pendidikan
				a. Literasi Membaca		
				b. Numerasi		
				Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar		Dinas Pendidikan



Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RENSTRA OPD		Perangkat Daerah
				TUJUAN	SASARAN	
				Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional		
				a. Literasi Membaca		
				b. Numerasi		
					Persentase anak usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)	Dinas Pendidikan
					Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	Dinas Pendidikan
					Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	Dinas Pendidikan
					Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	Dinas Pendidikan



Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RENSTRA OPD		Perangkat Daerah
				TUJUAN	SASARAN	
				Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat		Tingkat Kemiskinan			Seluruh OPD
		3. Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial			Dinas Sosial
			Indeks Zakat Nasional			Setdaprovsu (Biro Kesra)
				Indeks Kesejahteraan Sosial		Dinas Sosial
					Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Dinas Sosial
					Persentase Korban Bencana alam, sosial dan/	Dinas Sosial



Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RENSTRA OPD		Perangkat Daerah
				TUJUAN	SASARAN	
					atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	
					Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial	Dinas Sosial
					Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	Setdaprovsu (Biro Kesra)
				Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM		Setdaprovsu (Biro Hukum)
					Jumlah Penanganan Perkara Hukum di Pengadilan	Setdaprovsu (Biro Hukum)
					Jumlah Penanganan Sengketa di Luar	Setdaprovsu (Biro Hukum)



Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RENSTRA OPD		Perangkat Daerah
				TUJUAN	SASARAN	
					Pengadilan dan Perlindungan HAM	
				Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		Dinas Ketenagakerjaan
					Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Dinas Ketenagakerjaan
					Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di Tingkat Kabupaten/ Kota/Provinsi	Dinas Ketenagakerjaan
Misi 2. Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah	3. Ekonomi yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan		Kontribusi PDRB Provinsi			Seluruh OPD
			PDRB per Kapita			Seluruh OPD
			Indeks Ekonomi Hijau			Seluruh OPD
		4. Meningkatnya Hilirisasi Produk Unggulan Daerah	Rasio PDRB Industri Pengolahan			Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral
			Rasio Volume Usaha koperasi terhadap PDRB			Dinas Koperasi dan UKM



Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RENSTRA OPD		Perangkat Daerah
				TUJUAN	SASARAN	
			Indeks Inovasi Daerah			Bappelitbang
				Rasio PDRB Industri Pengolahan		Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral
				Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Provinsi		Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral
				Rasio Volume Usaha koperasi terhadap PDRB		Dinas Koperasi dan UKM
				Kontribusi UMKM terhadap PDRB		Dinas Koperasi dan UKM
					Proporsi Jumlah UKM terhadap UMKM	Dinas Koperasi dan UKM
					Jumlah Produk Tersertifikasi Halal	Dinas Koperasi dan UKM
					Rasio Kewirausahaan Daerah	Dinas Koperasi dan UKM
				Indeks Inovasi Daerah		Bappelitbang
				Indeks Perencanaan		Bappelitbang



Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RENSTRA OPD		Perangkat Daerah
				TUJUAN	SASARAN	
				Pembangunan Daerah		
				Indeks Daya Saing Daerah		Bappelitbang
					Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	Bappelitbang
				Aset Perbankan Syariah/PDRB		Setdaprovsu (Biro Perekonomian)
				Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		Dinas Ketenagakerjaan
					Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah tinggi	Dinas Ketenagakerjaan
					Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	Dinas Ketenagakerjaan
		1. Meningkatnya Aktivitas Ekonomi yang	Porsi EBT dalam Bauran Energi			Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral



Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RENSTRA OPD		Perangkat Daerah
				TUJUAN	SASARAN	
		Berwawasan Lingkungan	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum			Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
				Porsi EBT dalam Bauran Energi		Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral
				Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum		Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
					Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	4. Ekonomi yang Stabil dan inklusif		Tingkat Pengangguran Terbuka			Seluruh OPD
			Pertumbuhan Ekonomi			Seluruh OPD
			Gini Rasio			Seluruh OPD
		6. Terciptanya Stabilitas Harga	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi			Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral



Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RENSTRA OPD		Perangkat Daerah
				TUJUAN	SASARAN	
			Tingkat Inflasi			Setdaprovsu (Biro Perekonomian)
				Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB		Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral
				Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi		Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral
				Ekspor Barang dan Jasa		Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral
				Tingkat Inflasi		Setdaprovsu (Biro Perekonomian)
				Indeks Ketahanan Pangan		Dinas Ketahanan Pangan TPH
		7. Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi	Pembentukan Modal Tetap Bruto			DPMPSTP
			Nilai Tukar Nelayan (NTN)			Dinas Kelautan dan Perikanan
			NTP Tanaman Pangan			Dinas Ketahanan Pangan TPH
			NTP Tanaman Hortikultura			Dinas Ketahanan Pangan TPH
			Nilai Tukar Petani			Dinas Perkebunan dan Peternakan



Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RENSTRA OPD		Perangkat Daerah
				TUJUAN	SASARAN	
			Perkebunan Rakyat (NTPR)			
			Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT)			Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Inklusi Keuangan			Setdaprovsu (Biro Perekonomian)
			Indeks Desa			Dinas Pemdes Dukcapil
				Nilai Tukar Nelayan (NTN)		Dinas Perikanan dan Kelautan
				NTP Tanaman Pangan		Dinas Ketahanan Pangan TPH
					Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Dinas Ketahanan Pangan TPH
				NTP Tanaman Hortikultura		Dinas Ketahanan Pangan TPH
					Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	Dinas Ketahanan Pangan TPH
				Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTPR)		Dinas Perkebunan dan Peternakan
					Persentase Peningkatan	Dinas Perkebunan dan Peternakan



Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RENSTRA OPD		Perangkat Daerah
				TUJUAN	SASARAN	
					Produksi Perkebunan Rakyat	
				Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT)		Dinas Perkebunan dan Peternakan
					Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	Dinas Perkebunan dan Peternakan
				Pembentukan Modal Tetap Bruto		DPMPTSP
					Persentase Peningkatan Investasi	DPMPTSP
				Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)		Dinas Perikanan dan Kelautan
				Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB		Dinas Perikanan dan Kelautan
				Inklusi Keuangan		Setdaprovsu (Biro Perekonomian)
					Aset Dana Pensiun/PDRB	Setdaprovsu (Biro Perekonomian)
				Return on Asset (ROA) BUMD		Setdaprovsu (Biro Perekonomian)
				Aset Dana Pensiun/PDRB		Setdaprovsu (Biro Perekonomian)



Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RENSTRA OPD		Perangkat Daerah
				TUJUAN	SASARAN	
Misi 3. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan				Nilai Transaksi Saham per Kapita per Provinsi		Setdaprovsu (Biro Perekonomian)
				Indeks Desa		Dinas Pemdes Dukcapil
					Persentase Desa Mandiri	Dinas Pemdes Dukcapil
	5. Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Adaptif dan Berintegritas		Indeks Reformasi Birokrasi			Seluruh OPD
		8. Menguatnya Birokrasi yang Profesional, Adaptif dan Berintegritas	Indeks Pelayanan Publik			Biro Organisasi
			Indeks Reformasi Hukum			Setdaprovsu (Biro Hukum)
			Indeks integritas Nasional			Inspektorat
			Nilai Capaian Pelaporan Kinerja (SAKIP)			Setdaprovsu (Biro Organisasi)
			Indeks Profesionalitas ASN			Badan Kepegawaian
			Nilai indeks transformasi			Dinas Komunikasi dan Informatika



Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RENSTRA OPD		Perangkat Daerah
				TUJUAN	SASARAN	
			digital pilar pemerintah			
				Indeks Reformasi Birokrasi		Sekretariat Daerah
				Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah		Sekretariat Daerah (Biro Organisasi)
				Nilai Capaian Pelaporan Kinerja (SAKIP)		Sekretariat Daerah (Biro Organisasi)
				Indeks Pelayanan Publik		Setdaprovsu (Biro Organisasi)
					Persentase Kerjasama Daerah	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
				Indeks Reformasi Hukum		Setdaprovsu (Biro Hukum)
				Indeks Tata Kelola Pengadaan		Setdaprovsu (Biro Pengadaan Barang dan Jasa)
				Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD		Sekretariat DPRD
				Indeks Integritas Nasional		Inspektorat
					Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian	Inspektorat



Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RENSTRA OPD		Perangkat Daerah
				TUJUAN	SASARAN	
					Intern Pemerintah (SPIP)	
				Indeks Profesionalitas ASN		Badan Kepegawaian
					Indeks Sistem Merit	Badan Kepegawaian
				Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi		BPSDM
					Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	BPSDM
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
					Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil



Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RENSTRA OPD		Perangkat Daerah
				TUJUAN	SASARAN	
					Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Tingkat ketersediaan arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah		Dinas Komunikasi dan Informatika
					Indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (IP-TIK)	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Indeks SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Efektifitas Kebijakan Administrasi Pembangunan		Setdaprovsu (Biro Administrasi Pembangunan)



Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RENSTRA OPD		Perangkat Daerah
				TUJUAN	SASARAN	
					Persentase Fasilitasi materi pimpinan	Setdaprovsu (Biro Administrasi Pimpinan)
					Persentase kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa	Setdaprovsu (Biro Umum)
		9. Meningkatnya Kapasitas Keuangan Daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan			BKAD
				Opini BPK atas Laporan Keuangan		BKAD
					Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	BKAD
					Persentase Belanja pegawai Diluar Tunjangan Guru yang Dialokasikan Melalui TKD (Tranfer Keuangan Daerah)	BKAD
					Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	BKAD
					Persentase Realisasi	BKAD



Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RENSTRA OPD		Perangkat Daerah
				TUJUAN	SASARAN	
					Anggaran Belanja Urusan wajib Pelayanan Dasar	
					Persentase Penurunan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	BKAD
					Persentase tanah Milik Pemprov yang Disertifikasi	BKAD
					Persentase Keputusan Gubernur Tentang evaluasi APBD / Perubahan APBD / Pertanggungjawab kan Jawaban APBD Kabupaten/Kota	BKAD
					Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Bappelitbang
					Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Bapenda
					Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Bapenda



Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RENSTRA OPD		Perangkat Daerah
				TUJUAN	SASARAN	
	6. Peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan yang mendukung pelaksanaan kebijakan dan pembangunan		Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya			Seluruh OPD
		10. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas			Satpol PP
				Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas		Satpol PP
				Indeks Risiko Bencana		BPBD
					Persentase penanganan pra bencana	BPBD
					Persentase penanganan tanggap darurat bencana	BPBD
					Persentase penanganan pasca bencana	BPBD



Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RENSTRA OPD		Perangkat Daerah
				TUJUAN	SASARAN	
					Persentase penegakan hukum peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Satpol PP
Misi 4. Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan	7. Peningkatan Akses terhadap Infrastruktur yang Berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan guna Mendukung Kemandirian Ekonomi Masyarakat		Persentase Penurunan Emisi GRK			Seluruh OPD
			a. Kumulatif			
			b. tahunan			
		11. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Ramah Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
				Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
					Persentase Tutupan Lahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RENSTRA OPD		Perangkat Daerah
				TUJUAN	SASARAN	
					Indeks Kualitas Air (IKA)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
					Indeks kualitas Udara (IKU)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
					Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Dinas PUPR
					Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Dinas PUPR
					Tingkat Kemantapan Jalan	Dinas PUPR
				Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Rasio konektivitas		Dinas Perhubungan



Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RENSTRA OPD		Perangkat Daerah
				TUJUAN	SASARAN	
					Konektivitas darat	Dinas Perhubungan
					Konektivitas laut	Dinas Perhubungan
		12. Meningkatnya Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Pravelence of Undermourishment</i>)			Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
			Skor Pola Pangan Harapan			Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
			Intensitas energi primer			Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral
			Luas zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah di wilayah sungai lintas kabupaten/kota			Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral
				Intensitas energi primer		Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral



Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RENSTRA OPD		Perangkat Daerah
				TUJUAN	SASARAN	
					Konsumsi listrik per kapita	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral
Misi 5. Memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh	8. Terwujudnya Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keluarga		Indeks Demokrasi Indonesia			Seluruh OPD
		13. Menguatnya Peran Keluarga, Kesetaraan Gender, Toleransi dan Kerukunan Antarumat Beragama dalam Kehidupan Sosial	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)			Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
			Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga/IPKK			Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
			Indeks Kerukunan Umat Beragama			Badan Kesbangpol
				Indeks Demokrasi Indonesia		Badan Kesbangpol
					Indeks Harmoni Indonesia	Badan Kesbangpol
					Indeks Kerukunan Umat Beragama	Badan Kesbangpol
				Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB



Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RENSTRA OPD		Perangkat Daerah
				TUJUAN	SASARAN	
				Indeks pembangunan gender (IPG)		Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
				Indeks perlindungan anak (IPA)		Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
				Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)		Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
				Indeks pembangunan keluarga (iBangga)		Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
					Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
					Persentase perencanaan penganggaran responsif gender	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
					Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB



Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RENSTRA OPD		Perangkat Daerah
				TUJUAN	SASARAN	
					penduduk perempuan	
					Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
					Indeks pemenuhan hak anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
					Indeks pembangunan berwawasan kependudukan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
					Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility rate/TFR</i>)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
				Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)		Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
		14. Menguatnya Pelestarian dan Pemanfaatan Nilai-nilai Budaya Lokal sebagai Identitas Daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Ekonomi Kreatif
				Indeks Pembangunan Kebudayaan		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Ekonomi Kreatif



Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RENSTRA OPD		Perangkat Daerah
				TUJUAN	SASARAN	
					Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Ekonomi Kreatif
					Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Dalam rangka mendukung pencapaian visi pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan bahwa seluruh urusan pemerintahan daerah terintegrasi dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan. Asta Cita menjadi acuan strategis dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan daerah, sehingga setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dirumuskan dalam RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 dapat sejalan dengan prioritas nasional tersebut. Oleh karena itu, penyusunan RKPD Tahun 2026 menjadi upaya bersama untuk memperkuat peran Sumatera Utara dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, maju, dan berkeadilan. Adapun arah kebijakan pada masing-masing bidang urusan untuk mendukung pencapaian Asta Cita adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5 Arah Kebijakan Bidang Urusan Pemerintahan Provinsi			
NO	URUSAN	ARAH KEBIJAKAN	ASTA CITA
1.	Pendidikan	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2.	Kesehatan	Pemenuhan Kesehatan Untuk Semua	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penguatan ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
		Pemenuhan pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
4.	Perumahan	Pemenuhan rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi,

NO	URUSAN	ARAH KEBIJAKAN	ASTA CITA
			pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
5.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pemenuhan manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
6.	Sosial	Percepatan penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
7.	Tenaga Kerja	Peningkatan kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peningkatan Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran

NO	URUSAN	ARAH KEBIJAKAN	ASTA CITA
			perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
9.	Pangan	Penguatan ketahanan pangan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
10.	Pertanahan	Pemenuhan pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
11.	Lingkungan Hidup	Pemenuhan Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peningkatan kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

NO	URUSAN	ARAH KEBIJAKAN	ASTA CITA
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penguatan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
15.	Perhubungan	Pemenuhan Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Provinsi	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
16.	Komunikasi dan Informatika	Percepatan akselerasi transformasi pemerintah digital di daerah	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

NO	URUSAN	ARAH KEBIJAKAN	ASTA CITA
17.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
18.	Penanaman Modal	Pemenuhan pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
19.	Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
20.	Statistik	Penguatan kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
21.	Persandian	Penguatan keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan

NO	URUSAN	ARAH KEBIJAKAN	ASTA CITA
22.	Kebudayaan	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur
23.	Perpustakaan	Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur
24.	Kearsipan	Penguatan Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
25.	Perikanan	Penguatan Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

NO	URUSAN	ARAH KEBIJAKAN	ASTA CITA
26.	Pariwisata	Peningkatan Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
27.	Pertanian	Peningkatan Produksi Pertanian	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
28.	Kehutanan	Peningkatan pengelolaan hutan lestari sebagai sumber pertumbuhan baru, pengentasan kemiskinan, serta ketahanan pangan, air dan energi	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
29.	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penguatan pencapaian Ketahanan Energi	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
30.	Perdagangan	Peningkatan Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
31.	Perindustrian	Percepatan pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
32.	Transmigrasi	Pemenuhan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
33.	Kesatuan Bangsa dan Politik	Penguatan Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)

NO	URUSAN	ARAH KEBIJAKAN	ASTA CITA
		Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Dalam rangka memastikan sinergisitas pembangunan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, maka penyusunan RKPD Tahun 2026 didasarkan pada keterkaitan antara outcome, program, dan subkegiatan daerah dengan prioritas nasional (Asta Cita) sesuai bidang urusan pemerintahan daerah, sebagaimana diarahkan melalui hasil kesepakatan Rakortekbang. Hasil Kesepakatan Rakortekbang Nasional Tahun 2025 tersebut menjadi rujukan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam merumuskan RKPD Tahun 2026. Adapun ringkasan kesepakatan dimaksud disajikan sebagai berikut:



Tabel 4.6 Outcome Prioritas, Program, dan Subkegiatan dalam mendukung Asta Cita Tahun 2026

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas
							1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
							1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
							1.01.02.1.03.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
							1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus
							1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru
2	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit
							1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
							1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
	penguatan peran perempuan, pemuda (generasi						1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular



NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	milennial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.						1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
					1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
3	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
							1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
					1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
							1.03.03.1.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru			Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.1.01.0006	Penetapan RTRW Provinsi
							1.03.12.1.04.0014	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK
4	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha



NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.						1.04.03.1.02.0011	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15
					1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.1.01.0008	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
							1.04.05.1.01.0009	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman
5	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02.0024	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.				1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01.0021	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
							1.05.02.1.02.0012	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
					1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.1.01.0018	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)
							1.05.04.1.02.0007	Pembinaan dan Pengawasan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi



NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.						1.06.02.1.02.0008	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi
	1.06.05				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
						1.06.05.1.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
7	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
							2.07.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
					2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.1.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial



NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.			perlindungan pekerja			2.07.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
8	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.01.0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
							2.08.02.1.02.0009	peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi
					2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi



NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	penyandang disabilitas.						2.08.07.1.02.0008	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
9	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Meningkatnya ketahanan pangan	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.01.0006	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
							2.09.03.1.01.0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi
					2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
							2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi
10	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	2.10.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota
							2.10.06.1.01.0005	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria



NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0004	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan
							2.11.03.1.01.0009	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.				2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0011	Pengelolaan sampah Regional
							2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota
12	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk



NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.			kependudukan berbasis digital			2.12.02.3.01.0006	Koordinasi Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi
					2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.1.01.0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota
							2.12.03.3.02.0006	Koordinasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi
13	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.1.01.0004	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa
	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.				2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa



NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
14	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.1.01.0007	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal
							2.14.03.1.02.0004	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana
					2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.1.02.0007	Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
							2.14.04.1.02.0011	Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
15	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Provinsi	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
							2.15.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)
	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja				2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.10.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi



NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.						2.15.03.1.10.0009	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
16	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01.0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
							2.16.02.1.01.0022	Pelayanan Informasi Publik
							2.16.02.1.01.0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
							2.16.02.1.01.0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
	2.16.03				PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02.0021	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	
						2.16.03.1.02.0031	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	
						2.16.03.1.02.0032	Penyediaan Akses Internet	
Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.								



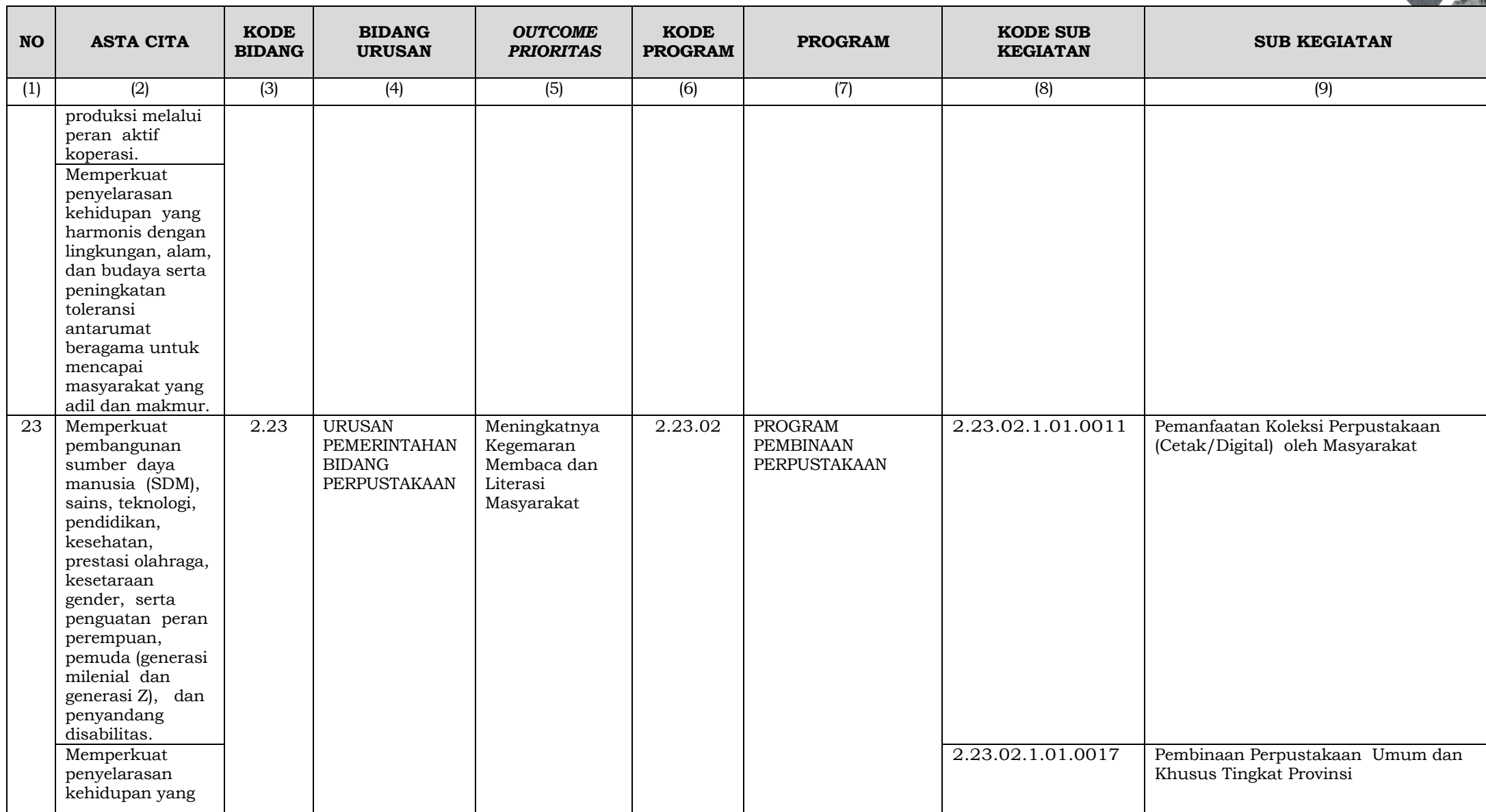
NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							2.16.03.1.02.0036	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan
17	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.1.01.0004	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi
							2.17.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
					2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
							2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan
18	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal
							2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya



NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
19	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi
							2.19.02.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda
					2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.03.0001	Seleksi Atlet Daerah
							2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi
20	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.1.01.0016	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia
							2.20.02.1.01.0019	Peningkatan kualitas statistik sektoral



NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
21	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.1.01.0006	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.						2.21.02.1.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
22	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
							2.22.02.1.01.0013	Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
					2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya
							2.22.05.1.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya
							2.22.05.1.02.0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya





NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.				2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
							2.23.03.1.03.0003	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
24	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.1.01.0012	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi
							2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN
25	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
							3.25.02.1.01.0006	Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir
							3.25.02.1.01.0011	Pelibatan masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam



NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru				3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi
							3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi
							3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi
							3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi
							3.25.05.1.02.0005	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi
							3.25.05.1.02.0006	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi
26	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.01.0001	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi



NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.			Pertumbuhan Ekonomi Nasional			3.26.02.1.01.0006	Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi
							3.26.02.1.03.0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi
							3.26.02.1.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi
							3.26.02.1.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
							3.26.02.1.03.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi
					3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar
							3.26.04.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula
							3.26.04.1.02.0012	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah
							3.26.04.1.02.0013	Fasilitasi Kekayaan Intelektual
							3.26.04.1.02.0015	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah
							3.26.04.1.02.0017	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah
27	Memantapkan sistem pertahanan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN	Meningkatnya Produksi Pertanian	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian



NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru		BIDANG PERTANIAN			PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
							3.27.02.1.02.0013	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
					3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
							3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
							3.27.03.1.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
28	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Meningkatkan pengelolaan hutan lestari sebagai sumber pertumbuhan baru, pengentasan kemiskinan, serta ketahanan pangan, air dan energi	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
							3.28.03.1.06.0006	Fasilitasi PBPHH skala Kecil dan Menengah untuk akses sumber bahan baku (kayu dan/atau HHBK) dan Pasar
					3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
							3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutan Sosial



NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
29	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Pencapaian Ketahanan Energi	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT
							3.29.05.1.09.0002	Pelaksanaan kegiatan konservasi energi
					3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	3.29.06.1.06.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
							3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
30	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.30.03.1.01.0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
							3.30.03.1.01.0003	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas
					3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional
							3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor
31	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi
							3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat



NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	nilai tambah di dalam negeri.				3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi
							3.31.03.1.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)
32	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.03.1.01.0009	Penyuluhan dan Sosialisasi Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal Dan OPD Tingkat Kabupaten/ Kota
							3.32.03.1.01.0018	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi
					3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.04.1.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman



NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
33	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.				8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Sebagai upaya konkret dalam mendukung pencapaian 17 Prioritas Presiden dan 8 Program Hasil Terbaik, Pemerintah Pusat menetapkan sejumlah Kegiatan Prioritas Utama (KPU) yang menjadi fokus pelaksanaan pembangunan tahun 2026. KPU dirancang sebagai kebijakan terpadu yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap sasaran pembangunan nasional sekaligus memperkuat pencapaian target pembangunan daerah. Dalam konteks penyusunan RKPD 2026, KPU menjadi acuan strategis bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memastikan bahwa arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan alokasi sumber daya daerah berjalan selaras dengan agenda pembangunan nasional serta menjawab tantangan daerah secara lebih efektif.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan pemetaan program, kegiatan, dan subkegiatan pada seluruh perangkat daerah guna mengidentifikasi kontribusi nyata terhadap pencapaian KPU. Pemetaan ini diharapkan memperkuat keterpaduan pusat-daerah, memastikan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan, serta meningkatkan fokus pembangunan pada sektor-sektor yang memberikan dampak signifikan bagi masyarakat. Selanjutnya, dukungan terhadap Kegiatan Prioritas Utama melalui serangkaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan OPD disajikan pada tabel berikut:



Tabel 4.7 Daftar Keselarasan Kegiatan Prioritas Utama Nasional

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026
1	Prioritas Nasional 1	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
			Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
			Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
			Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
			Pelayanan Informasi Publik
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik
			Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik
			Penyusunan Konten
			Relasi Media
2	Prioritas Nasional 2	Transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema spend to invest	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
			Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
			Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas
			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
			Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
			Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri



NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
6		Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan lainnya	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Penataan Prasarana Pertanian Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi Pembangunan Bendung Irigasi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan



NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Rehabilitasi Bendung Irigasi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
7		Pembangunan pangan akuatik (blue food)	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap



NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026
			Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
			Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
			Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
			Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing
			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
			Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
			Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
			Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
8		Pembangunan pangan hewani	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
			Kesejahteraan Hewan
			Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
			Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan



NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026
			Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
			Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
			Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan
			Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan
			Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
			Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor
			Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan
			Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi
			Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
			Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan
			Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
			Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan



NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026
9		Pembangunan pangan lokal dan nabati	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
			Penataan Prasarana Pertanian
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
			Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya
			Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi
			Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
			Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
			Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
			Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota



NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026
10			Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
			Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
			Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
			Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura
			Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang
			Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi
		Fortifikasi dan biofortifikasi pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi
			Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
			Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
			Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi
			Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
			Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
			Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi



NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026
			Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi
			Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi
			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura
			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan
			Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
			Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang
			Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi
			Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
			Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
			Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
11		Peningkatan penyediaan energi	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN
			Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi
			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT
			Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah



NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026
12			Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT
			Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi
			Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)
			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN
			Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
		Perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
			Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN
			Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
			Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN
			Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi
			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT
			Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah
			Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT



NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026
			Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)
13		Penguatan implementasi transisi energi berkeadilan	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)
14		Konservasi sumberdaya air	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi



NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	
				Normalisasi/Restorasi Sungai Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai Pembangunan Tanggul Sungai Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai Rehabilitasi Tanggul Sungai
15		Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota



NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026
			Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
16		Penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi
18		Penguatan faktor pendukung ekonomi digital	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM



NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026
			Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan
19		Penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor strategis lainnya	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Pameran Dagang Internasional/Nasional Peningkatan Citra Produk Ekspor PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan



NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026
			Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Penelitian, Pengembangan, dan perekayasaan dibidang teknologi dan inovasi
20		Pengelolaan susut dan sisa pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi



NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026
			Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura
			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan
			Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
			Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang
			Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi
			Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
			Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek
			Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
21		Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
			Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
			Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi
			Perencanaan Pengelolaan TAHURA
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
			Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan



NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026
22		Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH
			Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan
			Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
			Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi
			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi
			Normalisasi/Restorasi Sungai
			Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
			Pembangunan Tanggul Sungai
			Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi
			Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi
			Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai
			Rehabilitasi Tanggul Sungai



NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026
23		Peningkatan kualitas ekosistem gambut	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
			Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
			Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi
			Perencanaan Pengelolaan TAHURA
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
			Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan
			Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan
			Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal
			Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi
			Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH
			Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan
			Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan
			Perbenihan Tanaman Hutan
			Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan
			Pengelolaan Sumber Benih
			Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
			Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan



NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026
24			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi
			Pengelolaan Kebun Raya
			Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
		Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
			Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
			Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
			Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
			Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
			Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT



NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026
			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
25		Peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi
26		Pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat



NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
			Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
			Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
			Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
			Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
			Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
			Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing
			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
27	Prioritas Nasional 3	Pembangunan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan digitalisasinya	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
			Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN
			Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi



NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026
			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
28		Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan



NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026
31		Percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas Danau Toba	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
			Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri
			Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
			Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
			Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI
			Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
			Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
			Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
			Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)
			Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko
			Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi
			Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
			Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi



NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026
			Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
33		Penguatan ekosistem aplikasi dan Gim	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Fasilitasi Kekayaan Intelektual Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas
34		Pengembangan koperasi sektor produksi	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi



NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026
35	Prioritas Nasional 4	Perluasan layanan pendidikan anak usia dini	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi
			Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
			Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
			Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
			Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak
			Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
			Penyediaan Bantuan Fasilitas dan Pembiayaan bagi Pendidikan
			Penyediaan bantuan fasilitas bagi pendidikan



NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026
36		Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah madrasah yang berkualitas	Penyediaan bantuan pembiayaan bagi pendidikan
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
			Penyediaan Bantuan Fasilitas dan Pembiayaan bagi Pendidikan
			Penyediaan bantuan fasilitas bagi pendidikan
37		Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah	Penyediaan bantuan pembiayaan bagi pendidikan
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
			Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
			Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
			Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak
			Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
38		Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul	Penyediaan Bantuan Fasilitas dan Pembiayaan bagi Pendidikan
			Penyediaan bantuan fasilitas bagi pendidikan
			Penyediaan bantuan pembiayaan bagi pendidikan
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN



NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026
			Pengelolaan Pendidikan Khusus
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
			Pembangunan Ruang Kelas Baru
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
			Pengadaan Mebel Sekolah
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus
			Penyediaan infrastruktur TIK
			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
39		Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
			Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi
			Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
40		Peningkatan relevansi dan perluasan akses pendidikan tinggi	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
			Penyediaan Bantuan Fasilitas dan Pembiayaan bagi Pendidikan



NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	
41		Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi		Penyediaan bantuan fasilitas bagi pendidikan
				Penyediaan bantuan pembiayaan bagi pendidikan
			PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
			Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	
				Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
			Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	
				Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil
				Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	
				Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
				Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
				Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
				Pelayanan Informasi Publik
				Pengelolaan Media Komunikasi Publik
				Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik
				Penyusunan Konten
				Relasi Media



NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026
42		Penurunan kematian ibu dan anak	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
			Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota
			Operasional Pelayanan Rumah Sakit
			Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
43		Pencegahan dan penurunan stunting	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
			Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota



NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota
			Operasional Pelayanan Rumah Sakit
			Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
			Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota
			Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
44		Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT



NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026
45		Penuntasan TBC	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
46		Pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
			Operasional Pelayanan Rumah Sakit
			Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
			Pengelolaan Pendidikan Khusus
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi, dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
			Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi
			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi



NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
47		Penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Khusus Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi, dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
48		Eliminasi penyakit kusta dan Schistosomiasis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Operasional Pelayanan Rumah Sakit Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
49		Investasi pelayanan kesehatan primer	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN



NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026
			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
			Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
			Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
			Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan



NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026
			Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
50		Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya



NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026
			Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) Pengembangan Rumah Sakit Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
51		Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
52		Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) seni budaya	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya



NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026
			Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
			Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat
			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
			Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan
			Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
			Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
			Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
			Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
			Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
			Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
53		Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) riset dan inovasi	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH Invensi dan Inovasi Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi



NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026
			Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah
54		Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi



NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026
			Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi
59	Prioritas Nasional 5	Pengembangan hilirisasi Kelapa Sawit	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi



NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026
			Pameran Dagang Internasional/Nasional
			Peningkatan Citra Produk Ekspor
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi
			Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan
			Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani
			Pendampingan dan pengawalan korporasi petani
			Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
			Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
			PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH



NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026
60		Pengembangan hilirisasi Kelapa	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan
			Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
			Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
			Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas
			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
			Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
			Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
			Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi
			Pameran Dagang Internasional/Nasional
			Peningkatan Citra Produk Ekspor
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi



NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026
61			Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
			Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan
			Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani
			Pendampingan dan pengawalan korporasi petani
			Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
			Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
			Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
			PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH
			Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan
			Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah
61		Pengembangan hilirisasi Rumput Laut	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL



NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026
			Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
			Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas
			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
			Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
			Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
			Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi
			Pameran Dagang Internasional/Nasional
			Peningkatan Citra Produk Ekspor
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi
			Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)



NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026
62			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi
			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
			Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
			Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
			Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
			PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH
			Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan
			Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah
		Pengembangan hilirisasi Kimia	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
			Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
			Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas
			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
			Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
			Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat



NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
			Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi
			Pameran Dagang Internasional/Nasional
			Peningkatan Citra Produk Ekspor
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi
			Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
			Penelitian, Pengembangan, dan perekayasaan dibidang teknologi dan inovasi
			PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH
			Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan
			Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah
63		Pengembangan industri semikonduktor	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)



NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026
			Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas
			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
			Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
			Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
			Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi
			Pameran Dagang Internasional/Nasional
			Peningkatan Citra Produk Ekspor
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi
			Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH



NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026
64			Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
			Penelitian, Pengembangan, dan perekayasaan dibidang teknologi dan inovasi
			PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH
			Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan
		Pengembangan industri tekstil dan produk tekstil	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
			Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
			Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas
			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
			Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
			Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
			Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi
			Pameran Dagang Internasional/Nasional
			Peningkatan Citra Produk Ekspor



NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi
			Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
			Penelitian, Pengembangan, dan perekayasaan dibidang teknologi dan inovasi
			PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH
			Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan
			Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah
65		Penguatan industri logam dasar, besi dan baja	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
			Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat
			Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat
			Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah



NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026
			Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR



NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026
			Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi
			Pameran Dagang Internasional/Nasional
			Peningkatan Citra Produk Ekspor
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi
			Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
			Penelitian, Pengembangan, dan perekayasaan dibidang teknologi dan inovasi
			PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH
			Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan
			Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah
66		Pengembangan industri dirgantara	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)



NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026
			Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas
			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
			Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
			Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi
			Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
			Penelitian, Pengembangan, dan perekayasaan dibidang teknologi dan inovasi
			PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH
			Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan



NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026
67		Pengembangan KEK Sei Mangkei	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
			Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
			Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas
			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
			Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
			Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
			Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi
			Pameran Dagang Internasional/Nasional
			Peningkatan Citra Produk Ekspor
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi



NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026
			Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Penelitian, Pengembangan, dan perekayasaan dibidang teknologi dan inovasi PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di Kawasan Strategis Provinsi Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi



NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026
70	Prioritas Nasional 6	Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
71		Peningkatan daya saing melalui kartu usaha produktif	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
			PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
			Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
			Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha
			Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
			Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
			Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil
			Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI



NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026
			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
			Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
72		Peningkatan kemandirian melalui kartu usaha afirmatif	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
			PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
			Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
			Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha
			Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan
74		Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
			Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman
75		Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur desa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA



NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
76	Prioritas Nasional 7	Pencegahan tindak pidana korupsi	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Pendampingan dan Asistensi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
77			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Pengembangan Kompetensi ASN Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional



NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026
			Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Pengelolaan Assessment Center Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN
78		Transformasi digital layanan publik prioritas	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi Penataan Analisis Jabatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan
79		Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah



NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026
80		Intensifikasi penerimaan negara bukan pajak	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
			Pengelolaan Barang Milik Daerah
			Penatausahaan Barang Milik Daerah
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah
81	Prioritas Nasional 8	Penguatan karakter dan jati diri bangsa	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi
			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
82			Pembentukan Paskibraka
			Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi



NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026
		Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
			Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat
			Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan
			Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
			Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
			Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota
83		Peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan



NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026
			Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
			Pengintegrasian Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
			Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

4.2 Prioritas Pembangunan

4.2.1. Proyek Strategis Nasional

Pada tahun 2026, pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Sumatera Utara ditetapkan sebagai bagian dari program prioritas pemerintah guna mempercepat transformasi ekonomi regional dan memperkuat peran strategis provinsi ini dalam pembangunan nasional. PSN di Sumatera Utara diarahkan untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor unggulan, meningkatkan konektivitas wilayah, serta memperluas akses layanan dasar yang berkualitas, dengan tujuan akhir menciptakan pusat pertumbuhan baru yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan di kawasan barat Indonesia.

Tabel 4.8 Proyek Strategis Nasional RKP 2026 di Provinsi Sumatera Utara

No	Program	Proyek	Pelaksana	Sumber Dana
1	Swasembada Air	Bendungan Lausimeme	Kementerian PU	APBN
2	Swasembada Energi	Ruas Semarang - Batang dan Tahap II Ruas Batang - Indramayu) serta Ruas Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei - Dumai	Dikoordinasikan Kementerian Energi, Sumber Daya Mineral	Non APBN
3	Konektivitas dan Kawasan	Kereta Api Tebing Tinggi - Kuala Tanjung (mendukung KEK Sei Mangkei, bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera)	Kementerian Perhubungan	APBN
		Kereta Api Rantau Prapat - Kota Pinang	Kementerian Perhubungan	APBN
		Pengembangan Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung	BUMN	Non APBN
		Jalan Tol Kisaran - Tebing Tinggi - bagian dari Trans Sumatera	Kementerian Pekerjaan Umum	Non APBN
		Jalan Tol Binjai - Langsa - bagian dari Trans Sumatera	Kementerian Pekerjaan Umum	Non APBN
		Jalan Tol Tebing Tinggi- Pematang Siantar - Prapat - Tarutung - Sibolga - bagian dari Trans Sumatera	Kementerian Pekerjaan Umum	Non APBN
4	Hilirisasi, Industrialisasi dan Transformasi Digital	Pengembangan KEK Sei Mangkei	BUPP KEK Sei Mangkei	Non APBN
		Kawasan Industri Kuala Tanjung	Swasta	Non APBN
		Pembangunan Smelter	Swasta	Non APBN

Sumber: RKP 2026

Proyek Strategis Nasional (koPSN) di Sumatera Utara Tahun 2026 yang merupakan bagian dari program prioritas pemerintah sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 diarahkan untuk memperkuat ketahanan air dan energi, mendorong konektivitas antarwilayah, serta mempercepat hilirisasi industri dan transformasi digital. Adapun PSN yang dilaksanakan berdasarkan RKP 2026 adalah sebagai berikut:

1. Program Swasembada Air

Dalam rangka memperkuat ketahanan sumber daya air di Sumatera Utara, pemerintah menetapkan pembangunan Bendungan Lausimeme sebagai proyek strategis nasional. Proyek ini dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bendungan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan irigasi, air baku, dan pengendalian banjir, serta menjadi salah satu solusi jangka panjang dalam menghadapi perubahan iklim dan krisis air di wilayah Sumatera Utara.

2. Program Swasembada Energi

Untuk mendorong ketahanan energi nasional dan mengembangkan infrastruktur energi strategis, pemerintah mengoordinasikan pembangunan jaringan energi melalui proyek Ruas Semarang–Batang dan Tahap II Ruas Batang–Indramayu, serta Ruas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei–Dumai. Proyek ini dikoordinasikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan sumber pembiayaan Non-APBN, menandakan peran penting investasi swasta dan kemitraan publik-swasta (PPP) dalam pengembangan infrastruktur energi. Proyek ini mendukung penguatan suplai energi ke kawasan industri strategis dan mendukung transisi menuju bauran energi nasional yang lebih berkelanjutan.

3. Program Konektivitas dan Pengembangan Kawasan

Untuk mempercepat konektivitas dan membuka akses kawasan pertumbuhan baru, berbagai proyek transportasi dan infrastruktur strategis ditetapkan di Sumatera Utara:

- Kereta Api Tebing Tinggi–Kuala Tanjung, yang mendukung KEK Sei Mangkei dan merupakan bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera, dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan dengan dana APBN.
- Kereta Api Rantau Prapat–Kota Pinang juga dibangun oleh Kementerian Perhubungan dan dibiayai melalui APBN sebagai bagian dari peningkatan konektivitas antarwilayah.

Pengembangan Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung, dilaksanakan oleh BUMN dan dibiayai dari Non-APBN, menjadi proyek strategis yang bertujuan menjadikan pelabuhan tersebut sebagai simpul logistik nasional dan internasional.

Pembangunan jalan tol, sebagai bagian dari Jaringan Jalan Tol Trans Sumatera, meliputi beberapa ruas:

- Tol Kisaran–Tebing Tinggi
- Tol Binjai–Langsa
- Tol Tebing Tinggi–Pematang Siantar–Parapat–Tarutung–Sibolga

Proyek-proyek ini dikoordinasikan oleh Kementerian PUPR dan sebagian besar dibiayai melalui sumber Non-APBN, menandakan partisipasi aktif swasta dalam mempercepat pembangunan infrastruktur strategis.

4. Program Hilirisasi, Industrialisasi, dan Transformasi Digital

Untuk memperkuat daya saing industri daerah dan mendorong transformasi ekonomi, beberapa proyek ditetapkan sebagai bagian dari strategi hilirisasi dan industrialisasi nasional:

- Pengembangan KEK Sei Mangkei, yang difokuskan pada industri berbasis kelapa sawit, kimia, dan logistik, dilaksanakan oleh Badan Usaha Pengelola dan Pengembangan KEK Sei Mangkei (BUPP) dengan pendanaan Non-APBN.
- Pengembangan Kawasan Industri Kuala Tanjung, dilakukan oleh pihak swasta, menjadi pendorong hilirisasi sektor manufaktur dan energi, serta mendukung perdagangan internasional.
- Pembangunan Smelter, sebagai bagian dari agenda hilirisasi mineral strategis, juga menjadi proyek prioritas yang dilaksanakan oleh investor swasta dengan pembiayaan dari Non-APBN. Proyek ini mendukung peningkatan nilai tambah komoditas tambang nasional seperti nikel dan bauksit, serta menciptakan lapangan kerja di tingkat lokal.

4.2.2 Program Prioritas Sumatera Utara

Dalam rangka mempercepat capaian pembangunan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merumuskan enam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) sebagai quick wins yang secara langsung menjawab kebutuhan mendesak masyarakat sekaligus menjadi wujud nyata implementasi lima misi pembangunan. Di samping itu, ditetapkan pula 17 program prioritas yang diarahkan untuk memberikan dampak pembangunan jangka menengah. Seluruh program disusun dengan orientasi hasil yang terukur, baik dalam jangka pendek maupun menengah, sehingga dapat menjadi fondasi kuat bagi pencapaian transformasi jangka panjang. Dengan demikian, PHTC berfungsi sebagai pengungkit awal yang mempercepat terwujudnya kondisi ideal sesuai visi dan misi RPJMD Sumatera Utara. Adapun enam PHTC Provinsi Sumatera Utara dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) Kepulauan Nias (2026), Kepulauan Nias dan Pantai Barat (2027), Kepulauan Nias, Pantai Barat dan Dataran Tinggi (2028), Kepulauan Nias, Pantai Barat, Dataran Tinggi dan Pantai Timur (2029)

Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) merupakan kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang ditujukan untuk memastikan seluruh anak usia sekolah dapat melanjutkan pendidikan menengah di SMA, SMK, maupun SLB Negeri tanpa terbebani pungutan biaya. Program ini menjadi wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan, sekaligus mendorong keadilan sosial bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Melalui PUBG, diharapkan hambatan ekonomi yang selama ini menjadi penyebab rendahnya angka partisipasi sekolah dan masih tingginya angka putus sekolah dapat diatasi, sehingga lebih banyak generasi muda Sumatera Utara memperoleh kesempatan menempuh pendidikan menengah yang bermutu.

Pelaksanaan PUBG dilakukan secara bertahap sesuai dengan wilayah prioritas, dimulai pada tahun 2026 di Kepulauan Nias. Kebijakan ini tidak hanya menysasar aspek pembebasan biaya sekolah, tetapi juga dirancang untuk memperkuat kualitas pendidikan melalui kemitraan dengan dunia usaha dan industri. Terutama bagi siswa SMK, program ini diarahkan agar mereka memperoleh keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri,

baik melalui magang, pelatihan, maupun program sertifikasi, sehingga lebih siap memasuki dunia kerja.

Dari sisi pembiayaan, implementasi PUBG akan ditopang oleh APBD Provinsi sebagai sumber utama untuk menanggung biaya pendidikan di sekolah negeri tingkat menengah, serta didukung oleh Dana BOS (APBN) untuk SMA/SMK dan Dana BOP (APBN) untuk SLB. Selain itu, dukungan kemitraan dengan sektor swasta dan industri melalui program tanggung jawab sosial (CSR) akan memperkuat keberlanjutan program ini, terutama dalam pengembangan kompetensi siswa. Dengan pelaksanaan yang konsisten, PUBG diharapkan dapat meningkatkan rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS), menekan angka putus sekolah, mengurangi beban ekonomi keluarga, serta mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara.

2. Program Berobat Gratis (Probis) melalui Program Universal Health Coverage (UHC) (mulai Oktober tahun 2025, UHC+ tahun 2026 - 2030)

Program Berobat Gratis (PROBIS) merupakan langkah strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan layanan kesehatan gratis dan menyeluruh bagi seluruh penduduk ber-KTP Sumatera Utara. Program ini hadir untuk menghapus hambatan ekonomi dalam mengakses layanan kesehatan, sekaligus memperkuat sistem kesehatan yang berbasis digital, terintegrasi, dan responsif. Melalui PROBIS, masyarakat dijamin dapat memperoleh layanan kesehatan berkualitas tanpa biaya, termasuk kemudahan dalam menjangkau layanan spesialis dengan dukungan sistem digital yang modern dan informatif.

Pelaksanaan PROBIS diarahkan untuk mendukung tercapainya Universal Health Coverage (UHC) dengan memastikan seluruh penduduk terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pada tahun 2026, ditargetkan 98,6% penduduk Sumatera Utara tercatat sebagai peserta JKN. Untuk itu, pemerintah daerah berkomitmen menyediakan sistem informasi kesehatan digital yang terintegrasi, meliputi pendaftaran online, rujukan elektronik, rekam medis digital, serta dashboard informasi dokter spesialis yang memuat jadwal praktik dan lokasi fasilitas kesehatan mitra BPJS. Inovasi digital ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi layanan, mengurangi antrean, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih cepat dan berkualitas.

Dari sisi pembiayaan, PROBIS dirancang dengan skema kolaboratif antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melalui pembagian kontribusi iuran BPJS. Pada tahap awal, porsi kontribusi provinsi ditetapkan sebesar 20% dan secara bertahap akan ditingkatkan 2,5% setiap tahun hingga mencapai 30% pada tahun 2030, sementara kontribusi kabupaten/kota menyesuaikan menjadi 70%. Skema ini tidak hanya menjamin keberlanjutan pembiayaan, tetapi juga memperkuat integrasi data kesehatan antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan, sehingga layanan yang diberikan semakin efisien, akurat, dan mampu menurunkan angka kesakitan, kematian, serta angka kemiskinan melalui perbaikan kualitas hidup masyarakat Sumatera Utara.

3. Program Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pangan (JASKOP)

Program Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pangan (JASKOP) merupakan strategi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menjaga

keseimbangan antara produktivitas pertanian, kestabilan harga, dan kesejahteraan petani. Program ini dirancang untuk melindungi pendapatan petani dari fluktuasi harga sekaligus memastikan ketersediaan komoditas strategis, terutama cabai, dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Melalui intervensi pasar, penyimpanan berbasis teknologi Dome Dryer System, serta penguatan hilirisasi pertanian, JASKOP hadir sebagai solusi untuk mengatasi anjloknya harga pada saat panen raya maupun lonjakan harga ketika pasokan terbatas.

Program JASKOP akan memulai langkah strategis melalui pemetaan lokasi gudang dan identifikasi kebutuhan digitalisasi pencatatan pasokan, yang kemudian dilanjutkan dengan pengadaan serta renovasi gudang berikut pelatihan penggunaan sistem pencatatan digital bagi pengelola. Program ini juga mencakup uji coba pencatatan digital hasil panen di wilayah percontohan sebagai tahap awal integrasi data pasokan. Untuk meningkatkan nilai tambah komoditas, petani akan diberikan pelatihan pengolahan dan pengemasan produk turunan cabai merah, didukung pembangunan 30 unit *Solar Dryer Dome*, masing-masing 12 unit di Kabupaten Batu Bara, 3 unit di Kabupaten Simalungun, dan 3 unit di Kabupaten Deli Serdang. Di sisi kemitraan, dilakukan identifikasi peluang kontrak *farming* dengan kelompok tani serta fasilitasi penyusunan MoU antara BUMD dan kelompok petani untuk memperkuat kepastian penyerapan produksi. Selanjutnya, BUMD berperan memastikan penyerapan hasil panen secara berkelanjutan dan mendukung tahapan pengolahan serta distribusi komoditas, sementara peningkatan kapasitas petani dalam penggunaan SDD menjadi bagian penting untuk menjamin kualitas dan kontinuitas pasokan cabai merah di seluruh rantai usaha. Selain itu, pemerintah mulai mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani menggunakan skema harga patokan minimal untuk cabai, yang kemudian diolah menjadi cabai kering melalui *Solar Dryer Dome* agar mutu tetap terjaga dan daya simpan lebih panjang.

Upaya ini diharapkan mampu memberikan perlindungan yang nyata bagi petani dari kerugian akibat surplus produksi sekaligus menjamin ketersediaan cabai sepanjang tahun dengan harga yang stabil. Dengan pelaksanaan JASKOP di tahun 2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk mengendalikan inflasi pangan, meningkatkan pendapatan petani, serta memperkuat fondasi ketahanan pangan daerah yang berkelanjutan.

4. Digitalisasi Pelayanan Publik “Cepat, Responsif, Handal, dan Solutif” (CERDAS)

Program Digitalisasi Pelayanan Publik CERDAS merupakan wujud transformasi birokrasi di Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih cepat, responsif, handal, dan solutif. Melalui penerapan sistem pelayanan berbasis digital, pemerintah daerah berupaya menghadirkan layanan yang lebih mudah dijangkau, transparan, dan ramah pengguna, sehingga masyarakat tidak lagi harus bergantung pada prosedur manual yang lambat dan berbelit. Program ini sekaligus menjadi langkah nyata dalam membangun birokrasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi serta tanggap terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis.

Pada tahun 2026, fokus program diarahkan pada pengembangan dan implementasi aplikasi terpadu yang didukung integrasi berbagai sistem layanan, disertai pelatihan penggunaan bagi aparatur dan sosialisasi kepada masyarakat agar pemanfaatannya optimal. Selanjutnya, pembangunan dan

implementasi jaringan internet mencakup pengadaan perangkat jaringan serta akses internet, pemasangan titik-titik WiFi, sosialisasi penggunaan kepada pengguna, serta evaluasi dan pengembangan sistem monitoring, yang akan dilaksanakan di delapan kota yaitu Medan, Binjai, Tebing Tinggi, Tanjungbalai, Pematang Siantar, Padangsidimpuan, Sibolga, dan Gunungsitoli.

Dari sisi pembiayaan, pelaksanaan program ini ditopang oleh alokasi dana APBD Provinsi untuk pembangunan infrastruktur digital, serta diperkuat melalui kolaborasi dengan operator telekomunikasi dalam penyediaan jaringan internet gratis di titik-titik strategis. Dengan implementasi yang konsisten, Program CERDAS diharapkan mampu mempercepat transformasi pelayanan publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi, menekan biaya administrasi, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah secara lebih luas.

5. A. Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi (INSTANSI)

Program Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi (INSTANSI) merupakan langkah strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, terhubung, dan tangguh terhadap risiko perubahan iklim maupun bencana. Program ini menitikberatkan pada peningkatan kualitas serta konektivitas jalan dan jembatan yang berbasis pada kebutuhan wilayah prioritas, dengan tujuan memperkuat daya saing daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Pada tahun 2026, program diarahkan untuk memperkuat konektivitas dan mendorong pusat-pusat pertumbuhan melalui penyusunan desain perencanaan (DED), penyusunan leger jalan, serta pelaksanaan penanganan jalan dan jembatan di berbagai kawasan strategis. Penanganan jalan akan difokuskan pada kawasan pertumbuhan yang meliputi Kabupaten Karo, Simalungun, Batu Bara, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Pakpak Bharat, Kota Binjai, dan Kota Padangsidimpuan; kawasan komoditas unggulan seperti Kabupaten Karo, Labuhanbatu, Asahan, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, dan Tapanuli Selatan; serta kawasan swasembada pangan, air, dan energi yang mencakup Kabupaten Mandailing Natal, Serdang Bedagai, Simalungun, Labuhanbatu, Humbang Hasundutan, Dairi, Pakpak Bharat, Toba, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Selatan, juga kawasan afirmasi di Kabupaten Nias Selatan dan Nias Barat. Sementara itu, penanganan jembatan diarahkan pada kawasan pertumbuhan di Kabupaten Simalungun dan Samosir, kawasan komoditas unggulan di Kabupaten Asahan, kawasan swasembada pangan, air, dan energi di Kabupaten Mandailing Natal, serta kawasan konservasi/rawan bencana di Kabupaten Langkat. Secara keseluruhan, program ini menargetkan penanganan jalan sepanjang 202,84 km dan jembatan sepanjang 202,90 meter sebagai upaya memperkuat jaringan infrastruktur yang terhubung dan berfungsi mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Pembiayaan program ini ditopang oleh APBD Provinsi Sumatera Utara, yang diperkuat melalui dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur dari APBN serta kemitraan strategis dengan sektor swasta melalui skema CSR maupun Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Selain itu, optimalisasi Dana Desa dan partisipasi masyarakat dalam bentuk swadaya juga didorong sebagai wujud kolaborasi pembangunan berbasis komunitas. Melalui langkah ini, diharapkan kualitas infrastruktur wilayah dapat meningkat, konektivitas antar kawasan semakin kuat, serta memberikan

dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Sumatera Utara secara berkelanjutan.

5. B. Penguatan Infrastruktur Irigasi dan Sumber Air Pertanian untuk Mendukung Swasembada Pangan Berkelanjutan

Program Penguatan Infrastruktur Irigasi dan Sumber Air Pertanian merupakan upaya strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memperkuat fondasi swasembada pangan berkelanjutan melalui pembangunan dan rehabilitasi daerah irigasi kewenangan provinsi. Program ini menargetkan perluasan layanan irigasi teknis seluas 27.654,68 hektar sepanjang 2025–2029, dengan prioritas pada daerah irigasi yang telah memiliki kesiapan teknis (SID/DED) dan nilai IKSI memadai agar pelaksanaan cepat dan tepat sasaran. Selain itu, pendekatan program juga menekankan integrasi dengan pengelolaan sumber air, pemanfaatan teknologi “*smart irrigation*”, serta pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

Pada tahun 2026, diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan dan keandalan air bagi lahan pertanian melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi di berbagai daerah strategis. Upaya ini mencakup peningkatan jaringan irigasi sekunder di Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Kabupaten Simalungun dengan target layanan seluas 6.776 hektare, sekaligus memperkuat fungsi sejumlah daerah irigasi seperti DI Cinta Maju/Cinta Damai, DI Purwodadi, DI Simodong, dan DI Tanjung Muda di Kabupaten Batu Bara; DI Rambung Merah yang melintasi Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun; DI Padang Garugur di Kabupaten Padang Lawas Utara; DI Parit Lompaten di Kabupaten Karo; DI Roburan Maga di Kabupaten Mandailing Natal; serta DI Pekan Kemis di Kabupaten Serdang Bedagai. Melalui penguatan infrastruktur air ini, program menargetkan peningkatan produktivitas lahan serta memastikan keberlanjutan swasembada pangan di tingkat regional.

Strategi pembiayaan mengandalkan APBD Provinsi sebagai instrumen utama dengan prinsip *spending better* untuk sektor prioritas, diperkuat oleh dukungan transfer pusat (DAK, DAU, DBH) serta optimalisasi hibah, CSR, dan skema kemitraan dengan badan usaha maupun lembaga keuangan. Sementara itu, APBD kabupaten/kota diarahkan pada pembangunan jaringan tersier, operasi dan pemeliharaan berbasis komunitas, serta digitalisasi “*smart irrigation*” yang dikelola bersama P3A/BUMDes. Dengan langkah ini, diharapkan produktivitas pertanian meningkat, pasokan air lebih stabil, risiko gagal panen menurun, serta ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di Sumatera Utara semakin kuat.

5. C. Peningkatan Kualitas Permukiman Layak, Terjangkau, dan Inklusif melalui Penyediaan Hunian Murah serta Dukungan Terhadap Pelaksanaan Program 3 Juta Rumah

Program ini mendukung target nasional 3 Juta Rumah dengan menyediakan hunian yang layak huni, terjangkau, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya MBR dan ASN Pemda. Pelaksanaan dilakukan bertahap 2025–2030 di seluruh kabupaten/kota Sumatera Utara melalui tiga instrumen utama: pembangunan rumah subsidi FLPP, penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), serta penguatan tata kelola kawasan kumuh melalui verifikasi teknis SK Kumuh. Target output program

adalah ±60.000 unit per tahun sepanjang 2026–2029, disertai penanganan RTLH sebanyak 400–800 unit per tahun.

Pada tahun 2026, program difokuskan melalui serangkaian langkah terintegrasi, dimulai dari pembentukan tim pelaksana beserta penganggarannya, dilanjutkan dengan survei lokasi di setiap kabupaten/kota sasaran. Pemerintah daerah kemudian menyusun nota kesepahaman atau kerja sama dengan berbagai mitra strategis seperti REI dan Bank Sumut, sekaligus menyiapkan data dan informasi statistika mengenai MBR dan ASN sebagai dasar perencanaan hunian. Upaya ini diperkuat melalui perluasan pemasaran dan peningkatan kepemilikan rumah bagi MBR dan ASN, serta pembangunan fisik yang dilakukan secara bertahap setiap tahun. Seluruh rangkaian kegiatan ini diakhiri dengan evaluasi dampak program dan penataan lingkungan untuk memastikan kualitas permukiman yang berkelanjutan. Program ini dilaksanakan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Toba, Langkat, Nias Selatan, Pakpak Bharat, Serdang Bedagai, Padang Lawas, dan Padang Lawas Utara sebagai wilayah prioritas pengembangan hunian terjangkau.

Strategi pembiayaan program mengoptimalkan skema pusat (FLPP/Tapera) untuk pembiayaan KPR subsidi, diperkuat oleh APBD Provinsi sebagai dana pendamping untuk pendataan BNBA, verifikasi teknis SK Kumuh, serta fasilitasi kemitraan. APBD kabupaten/kota diarahkan untuk mendukung penanganan RTLH, validasi penerima manfaat, pembentukan Pokja, dan sosialisasi kepada MBR/ASN. Kemitraan dengan developer-perbankan dipercepat agar suplai rumah lebih lancar, sementara penjadwalan multiyears 2025–2030 memastikan arus kas pembiayaan tetap terkendali. Dengan demikian, program ini tidak hanya meningkatkan akses hunian layak bagi MBR dan ASN, tetapi juga berdampak pada kesehatan, kohesi sosial, penyerapan tenaga kerja lokal, serta penataan kawasan permukiman agar lebih tertib, bersih, dan fungsional.

6. Program Bantuan Hukum dan Perlindungan Rakyat Melalui Restorative Justice (PRESTICE)

Program PRESTICE merupakan inisiatif strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan sistem keadilan yang lebih inklusif, humanis, dan berorientasi pemulihan. Dengan mengedepankan prinsip restorative justice, program ini diarahkan untuk menyelesaikan persoalan hukum dan konflik sosial secara damai, partisipatif, dan berkeadilan, sekaligus melindungi kelompok rentan dari praktik kriminalisasi berlebihan. PRESTICE juga menjadi wadah penyediaan pendampingan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu, serta peningkatan peran komunitas lokal dalam mediasi dan penyelesaian masalah.

Mulai 2026, program dilaksanakan melalui pembentukan kelembagaan Prestice di tingkat daerah, disertai bimbingan teknis bagi paralegal desa serta edukasi dan sosialisasi di 25 kabupaten, yaitu Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Toba. Program ini juga menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum, kecuali kasus KDRT dan narkoba, serta memberikan pendampingan bagi warga yang terlibat dalam perkara tindak pidana ringan agar penyelesaiannya lebih adil dan tidak berlarut. Selain itu, dilakukan pelatihan mediator tingkat kabupaten/kota

yang dipusatkan di Kota Medan untuk memperkuat kapasitas penyelesaian sengketa melalui pendekatan restoratif.

Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya perlindungan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, terbentuknya jaringan Pos Bantuan Hukum yang merata, meningkatnya kapasitas OBH lokal, serta terciptanya budaya penyelesaian konflik yang damai dan efisien. Dalam jangka panjang, PRESTICE diharapkan mampu mengurangi kriminalisasi masyarakat kecil, dan memperkuat kohesi sosial di tingkat lokal.

Strategi pembiayaan dilakukan melalui APBD Provinsi Sumatera Utara untuk operasional Tim Restorative Justice, layanan pengaduan, dan klinik hukum gratis. Pemerintah provinsi juga akan menggandeng Lembaga Bantuan Hukum (LBH), organisasi advokasi, dan perguruan tinggi hukum untuk memperluas jangkauan pendampingan. Pendanaan multiyears 2025–2030 memastikan penguatan kelembagaan dan keberlanjutan layanan hukum berbasis masyarakat.

Untuk memperkuat arah pembangunan daerah agar lebih fokus dan memberikan dampak yang nyata, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menetapkan 17 Program Prioritas dalam RPJMD. Program-program ini dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi, penguatan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan daya saing daerah. Setiap program prioritas diharapkan dapat bersinergi dengan PHTC, sehingga arah pembangunan Sumatera Utara menjadi lebih terukur, berkeadilan, dan benar-benar berorientasi pada peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Berikut adalah 17 Program Prioritas Provinsi Sumatera Utara:

1. Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal

Program ini menempatkan sektor pendidikan sebagai fondasi utama peningkatan kualitas sumber daya manusia yang adaptif, berdaya saing, serta mampu menjawab tantangan pembangunan daerah. Pada tahun 2026, sejumlah proyek strategis mulai dilaksanakan sebagai tahap awal pencapaian program ini, seperti pemenuhan 100% fasilitasi listrik dan layanan internet di seluruh SMA/SMK/SLB di Sumatera Utara, yang memastikan akses pendidikan modern berbasis teknologi informasi dapat dirasakan secara merata, termasuk di daerah terpencil. Termasuk pembangunan SMA Unggulan di Kabupaten Nias sebagai sekolah percontohan inovatif yang berorientasi pada pengembangan keterampilan unggulan lokal sekaligus menjadi pusat pembelajaran berkualitas.

Program Prioritas 1 ini secara langsung mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perluasan akses pendidikan berkualitas. Implementasi awal pada 2026 diharapkan menjadi fondasi bagi pembangunan sekolah unggulan lainnya pada tahun-tahun berikutnya, sekaligus memperkuat keterhubungan antara dunia pendidikan dan kebutuhan pasar kerja.

Adapun rincian Proyek Strategis Daerah yang merupakan turunan dari Program Prioritas 1, serta OPD pengampu, disajikan sebagai berikut:

PROGRAM PRIORITAS	PROYEK STRATEGIS DAERAH	OPD PENGAMPU
1. PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM SEKOLAH UNGGULAN BERBASIS PENINGKATAN SKILL YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEBUTUHAN INDUSTRI DAN POTENSI WILAYAH DI TINGKAT LOKAL	1. Pemenuhan 100% Fasilitas Listrik dan Layanan Internet pada Seluruh SMA/SMK/SLB di Sumatera Utara	Dinas Pendidikan
	2. Pembangunan 4 SMA/SMK/SLB Unggulan (Nias/SMA - 2026, Asahan/SMK - 2027, Samosir/SMK - 2028, Karo/SLB - 2029)	Dinas Pendidikan
	3. Rehabilitasi Ruang Sekolah SMA/SMK/SLB sebanyak 490 Sekolah	Dinas Pendidikan
	4. Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Unit Sekolah Baru	Dinas Pendidikan
	5. Optimalisasi Sarana dan Prasarana BLK Provsu menuju BLK Tematik Bioindustri dan Pariwisata	Disnaker

2. Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas Dalam Berkarya dan Berprestasi

Pemberdayaan kelompok perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas merupakan salah satu pilar utama pembangunan Sumatera Utara menuju masyarakat yang inklusif, produktif, dan berkeadilan. Melalui Program Prioritas 2, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen memperkuat partisipasi aktif kelompok-kelompok ini dalam dunia kerja, kewirausahaan, seni, olahraga, serta sektor strategis pembangunan daerah. Program ini disusun untuk mengatasi keterbatasan akses, ketimpangan kesempatan, dan rendahnya tingkat partisipasi produktif, dengan pendekatan holistik berbasis pengembangan kapasitas, kreativitas, dan kemandirian.

Pada tahun 2026, program ini diwujudkan melalui sejumlah proyek strategis, di antaranya penyelenggaraan Liga Olahraga Pelajar Sumatera Utara Piala Gubernur untuk cabang sepak bola dan voli. Ajang ini menjadi wadah pembinaan bakat sekaligus sarana membangun karakter generasi muda yang sehat, disiplin, dan berdaya saing. Selain itu, akan dilaksanakan Pekan Olahraga Paralimpik Pelajar Sumatera Utara untuk cabang atletik, yang menjadi momentum penting dalam mendorong kesetaraan, inklusivitas, serta memberikan ruang yang adil bagi pelajar penyandang disabilitas untuk berprestasi.

Program Prioritas 2 ini memiliki keterkaitan erat dengan Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025–2029, khususnya pada agenda penguatan pembangunan sumber daya manusia, kesetaraan gender, serta pemberdayaan kelompok rentan. Dengan dukungan penuh pemerintah daerah, kegiatan ini diharapkan tidak hanya melahirkan generasi muda yang berprestasi, tetapi juga membangun ekosistem sosial yang lebih adil, setara, dan berkelanjutan.

Rincian Proyek Strategis Daerah yang menjadi bagian dari Program Prioritas 2, serta OPD pengampu, disajikan sebagai berikut:

PROGRAM PRIORITAS	PROYEK STRATEGIS DAERAH	OPD PENGAMPU
PP 2. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMUDA, DAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM BERKARYA DAN BERPRESTASI	6. Liga Olahraga Pelajar Sumut Piala Gubernur Sumatera Utara Cabang Olahraga Sepak Bola dan Voli tahun 2026 - 2030	Dispora
	7. Pekan Olahraga Paralimpik Pelajar Sumatera Utara pada Cabang Olahraga Atletik Tahun 2026 - 2030	Dispora

3. Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menetapkan penguatan sistem layanan kesehatan yang terintegrasi sebagai salah satu prioritas utama pembangunan daerah. Program ini ditujukan untuk memastikan seluruh masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil, kawasan industri, wisata, maupun perkotaan strategis, memperoleh akses layanan kesehatan yang layak, berkualitas, dan berkelanjutan. Pendekatan holistik ditempuh melalui penguatan layanan, infrastruktur, teknologi informasi kesehatan, serta intervensi terhadap masalah kesehatan prioritas seperti stunting dan penyakit menular.

Program Prioritas 3 tidak hanya berfokus pada layanan kuratif, tetapi juga mengedepankan aspek promotif dan preventif untuk menekan beban penyakit dan memperkuat ketahanan kesehatan masyarakat. Dengan model integratif, sistem layanan diharapkan lebih efektif, efisien, dan inklusif, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Sejumlah Proyek Strategis Daerah menjadi turunan dari program ini. Salah satunya adalah *Sumut e-Health Integration System*, yang dikembangkan untuk digitalisasi sistem kesehatan melalui rekam medis elektronik dan integrasi layanan antar fasilitas kesehatan. Selain itu, pemerintah juga meluncurkan Program Beasiswa Ikatan Dinas bagi Dokter Spesialis dan Dokter Spesialis Residen di wilayah kurang

terlayani, guna mengatasi kesenjangan distribusi tenaga medis. Kedua proyek ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat akses layanan kesehatan modern, adil, dan berkelanjutan di Sumatera Utara.

Program ini memiliki keterkaitan erat dengan arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2025–2029, khususnya mendukung Prioritas Nasional 4 (penguatan SDM melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat) dan Prioritas Nasional 7 (pemerataan layanan kesehatan hingga kawasan strategis). Selain itu, program ini juga memperkuat kontribusi daerah terhadap agenda nasional penurunan stunting melalui pendekatan multisektor berbasis gizi, sanitasi, dan edukasi kesehatan.

Peningkatan layanan kesehatan masyarakat menjadi fokus penting dalam pembangunan Sumatera Utara. Berikut dirangkum Proyek Strategis Daerah (PSD) dari Program Prioritas 3, beserta perangkat daerah penanggung jawab utama yang mendukung penguatan layanan kesehatan yang lebih merata, responsif, dan berdaya saing:

PROGRAM PRIORITAS	PROYEK STRATEGIS DAERAH	OPD PENGAMPU
PP 3 KESEHATAN YANG TERINTEGRASI DI BEBERAPA TITIK KAWASAN YANG MENJADI SENTRA LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT TERPADU	8. Digitalisasi sistem kesehatan terintegrasi (Sumut <i>e-Health Integration system</i>)	Dinas Kesehatan
	9. Beasiswa Ikatan Dinas bagi Dokter Spesialis dan Dokter Spesialis Residen di Wilayah Kurang Terlayani (2025 – 2030)	Dinas Kesehatan
	10. Dukungan Pengembangan Rumah Sakit Unggulan (Pengembangan Rumah Sakit Unggulan dan Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan)	Dinas Kesehatan

4. **Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran**

Program ini diarahkan untuk memastikan masyarakat rentan memperoleh perlindungan sosial yang adaptif sekaligus akses pemberdayaan ekonomi secara lebih terukur dan tepat sasaran. Dengan pendekatan ini, kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga mendorong kemandirian dan peningkatan produktivitas masyarakat.

Pada tahun 2026, implementasi program difokuskan melalui dua langkah strategis. Pertama, *Program Pasar Murah Bergerak (PMB)* untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta melindungi daya beli

masyarakat miskin. Kedua, *Perlindungan Sosial bagi Tenaga Kerja Rentan* melalui subsidi iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal dan kelompok rawan, sehingga mereka tetap terlindungi dari risiko sosial-ekonomi.

Kehadiran Program Prioritas 4 ini mendukung pencapaian Tujuan 2: Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, khususnya Sasaran 3: Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Inklusif. Selain itu, keterkaitannya dengan Tujuan 4: Ekonomi yang Stabil dan Inklusif tercermin dalam Sasaran 6: Terciptanya Stabilitas Harga, yang diwujudkan melalui pelaksanaan Pasar Murah Bergerak. Dengan demikian, program ini berperan ganda sebagai instrumen perlindungan sosial sekaligus penguatan daya tahan ekonomi masyarakat Sumatera Utara.

Upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem juga diperkuat dengan pengintegrasian ke dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), sehingga langkah-langkah yang ditempuh menjadi lebih terarah, terukur, dan selaras dengan target penurunan kemiskinan nasional. Adapun rincian Proyek Strategis Daerah dari Program Prioritas 4 beserta perangkat daerah penanggung jawab utama disajikan sebagai berikut:

PROGRAM PRIORITAS	PROYEK STRATEGIS DAERAH	OPD PENGAMPU
PP 4: PEMBERANTASAN KEMISKINAN MELALUI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RENTAN SECARA MENYELURUH DAN TEPAT SASARAN	11. Bantuan Sosial Produktif melalui Program Masyarakat Produktif (MAPRO).	Dinas Sosial
	12. Pelaksanaan Program Pasar Murah Bergerak (PMB)	Disperindag ESDM
	13. Perlindungan Sosial bagi Tenaga Kerja Rentan (Subsidi BPJS Ketenagakerjaan)	Disnaker
	14. Revitalisasi, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Panti Sosial Provinsi	Dinas Sosial

5. Penguatan Stabilitas Makro Ekonomi dan Kestinambungan Fiskal Daerah

Program Prioritas 5 diarahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi Sumatera Utara melalui pengelolaan sumber daya, optimalisasi aset daerah, serta peningkatan daya saing perekonomian. Fokus utamanya adalah menciptakan perekonomian yang tangguh, adaptif, dan

berkelanjutan dengan melibatkan sektor pertanian, pariwisata, industri, BUMD, hingga tata kelola aset daerah.

Pada tahun 2026, sejumlah Proyek Strategis Daerah akan menjadi instrumen kunci implementasi, yaitu:

- Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Pertanian dan Pariwisata, untuk memperkuat basis ekonomi berbasis sektor unggulan serta mendorong investasi dan lapangan kerja.
- Penguatan Hilirisasi Komoditas Unggulan di Kawasan Industri Sumatera Utara, guna meningkatkan nilai tambah, memperluas pasar ekspor, serta mengurangi ketergantungan pada bahan mentah.
- BUMD Reform Program, yang diarahkan untuk memperkuat peran BUMD agar lebih profesional, transparan, dan berkontribusi optimal terhadap PAD.
- Pemanfaatan Aset Barang Milik Daerah melalui Kerja Sama Ekonomi, agar aset daerah dapat digunakan secara produktif, transparan, dan mendukung kapasitas fiskal provinsi.

Secara keseluruhan, Program Prioritas 5 mendukung Tujuan 3: Ekonomi yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan, khususnya pada Sasaran 4 (Meningkatnya Hilirisasi Produk Unggulan Daerah) dan Sasaran 5 (Meningkatnya Aktivitas Ekonomi yang Berwawasan Lingkungan). Selain itu, program ini juga sejalan dengan Tujuan 5: Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Adaptif, dan Berintegritas, melalui Sasaran 8 dan 9 yang menekankan profesionalisme birokrasi serta peningkatan kapasitas keuangan daerah.

Stabilitas makro ekonomi dan keberlanjutan fiskal merupakan fondasi penting bagi pembangunan daerah yang inklusif dan berdaya tahan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menetapkan sejumlah Proyek Strategis Daerah dari Program Prioritas 5 beserta perangkat daerah pengampunya sebagaimana dirangkum berikut:

PROGRAM PRIORITAS	PROYEK STRATEGIS DAERAH	OPD PENGAMPU
PP 5: PENGUATAN STABILITAS MAKRO EKONOMI DAN KESINAMBUNGAN FISKAL DAERAH	15. Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Pertanian dan pariwisata	Disbudparekraf dan Dinas Ketapang TPH
	16. Penguatan Hilirisasi Komoditas Unggulan di Kawasan Industri Sumatera Utara	Disperindag ESDM
	17. BUMD Reform Program (Penguatan Peran BUMD sebagai Motor Ekonomi)	Biro Perekonomian
	18. Pemanfaatan Aset barang milik daerah	BKAD

PROGRAM PRIORITAS	PROYEK STRATEGIS DAERAH	OPD PENGAMPU
	melalui kerja sama ekonomi	

6. Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru

Program Prioritas 6 diarahkan untuk mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam perekonomian Sumatera Utara melalui pendekatan ekonomi hijau (berbasis kelestarian ekosistem daratan) dan ekonomi biru (berbasis optimalisasi potensi pesisir dan kelautan). Fokus utama program ini adalah membangun keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan hidup, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2026, sejumlah Proyek Strategis Daerah ditetapkan untuk memperkuat implementasi program ini. Di sektor perkebunan, dikembangkan kawasan unggulan kelapa, kopi, dan aren sebagai komoditas strategis bernilai tambah tinggi. Pada saat yang sama, sektor kelautan diarahkan pada penguatan kawasan perikanan tangkap dan budidaya, yang disertai program inovatif Konservasi Laut SEMESTA sebagai model pemberdayaan nelayan sekaligus menjaga ekosistem pesisir.

Di sisi lingkungan, dilaksanakan rehabilitasi mangrove berbasis masyarakat untuk memperkuat ketahanan ekosistem pesisir serta peran aktif warga dalam menjaga lingkungan hidup. Sementara itu, di sektor energi, dikembangkan pembangkit listrik energi baru terbarukan seperti PLTS pompa air pertanian dan PLTA mikrohidro untuk mendukung produktivitas masyarakat dengan cara yang ramah lingkungan.

Implementasi Program Prioritas 6 mendukung Tujuan 3: Ekonomi yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan, khususnya Sasaran 4 (hilirisasi produk unggulan daerah) dan Sasaran 5 (aktivitas ekonomi berwawasan lingkungan). Selain itu, program ini selaras dengan Tujuan 4: Ekonomi yang Stabil dan Inklusif, melalui Sasaran 7 (pemerataan pembangunan ekonomi).

Dengan strategi ini, Sumatera Utara diharapkan mampu menjadi model pembangunan berkelanjutan di kawasan barat Indonesia, yang tidak hanya mengejar pertumbuhan PDRB, tetapi juga menjaga daya dukung lingkungan serta memperkuat kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menetapkan sejumlah Proyek Strategis Daerah dari Program Prioritas 6, beserta perangkat daerah pengampu yang berperan sebagai pelaksana utama:

PROGRAM PRIORITAS	PROYEK STRATEGIS DAERAH	OPD PENGAMPU
PP 6: PENGEMBANGAN EKONOMI HIJAU DAN BIRU	19. Pengembangan Kawasan Perkebunan (Kelapa, Kopi, Aren)	DISBUNAK
	20. Pengembangan Kawasan Unggulan Perikanan Tangkap dan Budidaya	DISKANLA
	21. Pengawasan Konservasi Laut SEMESTA (Pemberdayaan Nelayan Sebagai Pasukan Penjaga Laut)	DISKANLA
	22. Rehabilitasi Mangrove dan Pesisir berbasis Masyarakat	DLHK
	23. Pengembangan Energi Baru Terbarukan (PLTS Pompa Air Untuk Irigasi Pertanian/PLTA Mikrohidro dan lainnya)	Disperindag ESDM

7. Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal

Program Prioritas 7 diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan daerah tidak hanya melalui pendekatan teknis dan modernisasi pertanian, tetapi juga dengan merevitalisasi nilai-nilai budaya serta kearifan lokal masyarakat agraris. Dengan menempatkan petani sebagai pelaku utama, program ini berfokus pada diversifikasi komoditas, peningkatan kapasitas produksi, serta hilirisasi produk pertanian agar memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2026, sejumlah Proyek Strategis Daerah ditetapkan dengan pengampu utama Dinas Ketahanan Pangan dan Tanaman Pangan Hortikultura (TPH) serta Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak). Intervensi diarahkan pada pembentukan kawasan unggulan pangan (padi, jagung, cabai merah, bawang merah), pengembangan kawasan peternakan unggulan, serta peningkatan ketersediaan bibit unggul yang didukung oleh fasilitasi permodalan kelompok tani. Upaya ini diharapkan dapat menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus meningkatkan daya saing sektor pertanian daerah.

Pelaksanaan Program Prioritas 7 mendukung Tujuan 3: Ekonomi yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan, khususnya Sasaran 4 (hilirisasi

produk unggulan daerah). Selain itu, program ini juga memperkuat Tujuan 4: Ekonomi yang Stabil dan Inklusif, melalui Sasaran 6 (stabilitas harga) dan Sasaran 7 (pemerataan pembangunan ekonomi).

Program ini juga memiliki keterkaitan erat dengan Prioritas Nasional Nomor 1 dalam RPJMN 2025–2029, yakni *Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air*. Dengan mengedepankan kemandirian pangan berbasis sumber daya lokal, Sumatera Utara menegaskan komitmennya untuk memperkuat ekonomi kerakyatan yang tangguh, mandiri, dan berkelanjutan.

Berikut adalah Proyek Strategis Daerah yang diturunkan dari Program Prioritas 7, beserta perangkat daerah pengampunya:

PROGRAM PRIORITAS	PROYEK STRATEGIS DAERAH	OPD PENGAMPU
PP 7: KETAHANAN PANGAN MELALUI PENGUATAN NILAI BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL AGAR DIVERSIFIKASI HASIL PERTANIAN MENJADI LEBIH PRODUKTIF DAN BERDAMPAK PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LOKAL	24. Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Unggulan Padi, Jagung, Cabai Merah, dan bawang merah	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH
	25. Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Peternakan unggulan	DISBUNAK
	26. Program pengembangan bibit unggul pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH
	27. Fasilitasi Akses Permodalan Terhadap Kelompok Tani	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH

8. Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal)

Program Prioritas 8 diarahkan untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru sekaligus instrumen pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah *community-based tourism* (pariwisata berbasis komunitas), yang memastikan masyarakat lokal, baik di kawasan pedesaan maupun perkotaan menjadi pelaku utama sekaligus penerima manfaat utama dari pengembangan pariwisata.

Fokus utama program ini adalah mengoptimalkan potensi wisata alam, budaya, dan kearifan lokal di tingkat desa dan kota, dengan melibatkan kolaborasi masyarakat, komunitas, pemerintah desa/kelurahan, serta

pelaku UMKM dalam seluruh rantai nilai pariwisata, mulai dari perencanaan, pengelolaan destinasi, hingga promosi dan pemasaran.

Sebagai pengampu utama, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf) memimpin berbagai Proyek Strategis Daerah, antara lain:

- Pengembangan destinasi pariwisata prioritas Danau Toba,
- Penataan Kawasan Toba Caldera UGGp dan geopark lainnya,
- Pembentukan dan pengembangan kawasan strategis budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif (TATABUSE, SIBANDAN, SIPUAN, KARDAPAK, BAHLIKE),
- Peningkatan pengelolaan situs cagar budaya, serta
- Digitalisasi promosi pariwisata melalui event internasional dan paket wisata inovatif.

Selain itu, penguatan kualitas SDM dan kelembagaan pariwisata menjadi agenda penting, antara lain melalui tourism linkage networking antar kabupaten/kota, pelatihan SDM pariwisata, fasilitasi pembukaan destinasi wisata bahari, serta pengembangan industri jasa pariwisata yang kompetitif.

Implementasi Program Prioritas 8 ini mendukung Tujuan 3: Ekonomi yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan, khususnya Sasaran 5 (meningkatnya aktivitas ekonomi yang berwawasan lingkungan). Lebih jauh, program ini juga berkontribusi pada pencapaian sasaran RPJMN 2025–2029, yaitu peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional, penciptaan devisa, serta penyediaan lapangan kerja baru.

Dengan mengedepankan pengembangan berbasis komunitas, konservasi budaya, adaptasi teknologi digital, serta keberpihakan pada pelaku usaha lokal, Sumatera Utara menegaskan komitmennya untuk menjadikan pariwisata sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi baru sekaligus penguat identitas budaya dan ekologi di tingkat nasional maupun global.

Rincian Proyek Strategis Daerah yang diturunkan dari Program Prioritas 8, beserta perangkat daerah pengampunya, adalah sebagai berikut:

PROGRAM PRIORITAS	PROYEK STRATEGIS DAERAH	OPD PENGAMPU
PP 8: PARIWISATA YANG MENGGERAKKAN POTENSI ALAM LOKAL DI PEDESAAN DAN PERKOTAAN DENGAN MELIBATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT SECARA LANGSUNG (KOMUNITAS, PEMERINTAH	28. Dukungan terhadap Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba	Disbudparekraf
	29. Pengelolaan dan Penataan Kawasan Toba Caldera UGGp dan Kawasan Geopark lainnya	Disbudparekraf

PROGRAM PRIORITAS	PROYEK STRATEGIS DAERAH	OPD PENGAMPU
DAERAH/DESA/KELURAHAN DAN PENGUSAHA LOKAL)	30. Pembentukan & Pengembangan Kawasan Strategis Budaya, Parawisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi yang Terintegrasi (TATABUSE, SIBANDAN, SIPUAN, KARDAPAK dan BAHLIKE)	Disbudparekraf
	31. Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Situs Cagar Budaya Sumatera Utara	Disbudparekraf
	32. Pelaksanaan Event Internasional, pengembangan paket wisata dan digitalisasi promosi pariwisata global	Disbudparekraf

9. Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi

Program Prioritas 9 diarahkan untuk memperkuat transformasi ekonomi Sumatera Utara melalui pengembangan ekonomi kreatif dan industri berbasis teknologi. Sektor ini dipandang sebagai motor baru pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja, mendorong lahirnya wirausaha muda, serta memperkuat daya saing daerah di tingkat nasional maupun global. Fokus utama program ini adalah mendorong inovasi dan kreativitas sebagai basis pertumbuhan ekonomi daerah, mempercepat adaptasi UMKM terhadap digitalisasi pasar, serta membangun ekosistem kreatif yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis teknologi modern.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah provinsi menggulirkan sejumlah proyek strategis, seperti pengembangan Sentra Industri Kreatif di Kawasan Sport Center Sumut yang dipimpin oleh Disbudparekraf sebagai ruang kolaborasi seni, budaya, pariwisata, dan teknologi. Selain itu, Dinas Koperasi dan UMKM juga menginisiasi pembangunan Sumut Digital Market dan galeri virtual produk UMKM kreatif sebagai sarana branding, promosi, dan ekspansi pasar digital. Program ini turut diperkuat melalui revitalisasi koperasi digital dan penguatan kemitraan bisnis kreatif, yang bertujuan memperluas jejaring usaha sekaligus memperkuat permodalan pelaku kreatif di daerah.

Dengan sinergi lintas perangkat daerah, Program Prioritas 9 mendukung pencapaian tujuan pembangunan, khususnya terwujudnya ekonomi yang stabil dan inklusif melalui pemerataan pembangunan ekonomi,

penciptaan nilai tambah baru melalui digitalisasi UMKM dan inovasi kreatif, serta perluasan kesempatan kerja produktif berbasis ekonomi kreatif dan teknologi. Di tingkat nasional, program ini juga sejalan dengan arah kebijakan RPJMN 2025–2029, antara lain mendukung pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif dan kewirausahaan (Prioritas Nasional 3), peningkatan kualitas SDM berbasis pendidikan dan teknologi (Prioritas Nasional 4), serta penguatan pembangunan dari desa dan daerah untuk pemerataan ekonomi (Prioritas Nasional 6).

Melalui langkah-langkah strategis tersebut, Sumatera Utara semakin mempertegas posisinya sebagai pusat pertumbuhan baru di kawasan barat Indonesia, dengan struktur ekonomi yang inovatif, inklusif, dan berdaya saing global. Rangkaian Proyek Strategis Daerah dari Program Prioritas 9, beserta perangkat daerah pengampu, disajikan dalam tabel berikut.

PROGRAM PRIORITAS	PROYEK STRATEGIS DAERAH	OPD PENGAMPU
PP 9: EKONOMI KREATIF DAN INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI	33. Sentra industri kreatif di Kawasan Sport Center Sumatera Utara	Disbudparekraf
	34. Sumut digital market dan galeri virtual produk UMKM kreatif	Diskop UMKM

10. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan merupakan fondasi utama bagi Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan daerah yang unggul, maju, dan berkelanjutan. Pemerintah provinsi berkomitmen membangun birokrasi yang adaptif, profesional, bersih, serta berorientasi pada pelayanan publik, dengan menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pemanfaatan teknologi digital. Reformasi ini dipandang sebagai strategi kunci untuk mempercepat efektivitas pembangunan, memperbaiki kualitas layanan, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dalam RPJMD 2025–2029, Program Prioritas 10 diarahkan untuk membangun birokrasi yang efektif, transparan, serta berorientasi hasil. Salah satu langkah strategis yang dijalankan adalah integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Melalui Bappelitbang, pemerintah provinsi memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan selaras dengan agenda pembangunan global, sehingga keberlanjutan, inklusivitas, dan prinsip “no one left behind” benar-benar tercermin dalam pelaksanaan pembangunan di Sumatera Utara.

Upaya penguatan tata kelola juga diwujudkan melalui kolaborasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum

(APH) dalam pendampingan proyek strategis dan kegiatan unggulan daerah. Dengan Inspektorat sebagai pengampu utama, pendampingan dilakukan sejak tahap perencanaan hingga serah terima, guna meminimalisasi potensi penyimpangan sekaligus memperkuat akuntabilitas. Langkah ini bukan hanya memperkuat integritas birokrasi, tetapi juga menumbuhkan kembali kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Sinergi antara Bappelitbang dan Inspektorat menjadi modal penting untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, dan berintegritas, sejalan dengan Tujuan 5 dan Sasaran 8 dalam RPJMD. Reformasi birokrasi berbasis akuntabilitas dan transparansi ini diproyeksikan sebagai landasan kokoh bagi pembangunan yang lebih efisien, responsif, dan berdaya saing tinggi.

Secara nasional, program ini memiliki keterkaitan erat dengan RPJMN 2025–2029, khususnya Prioritas Nasional 3 mengenai Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi. Melalui penguatan sistem berbasis teknologi, profesionalisasi aparatur, serta kolaborasi pengawasan, Sumatera Utara berkontribusi langsung pada pembentukan birokrasi yang tangguh, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dukungan juga diberikan terhadap pengembangan keamanan siber di tingkat daerah melalui kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), termasuk pengukuran tingkat kematangan keamanan siber, peningkatan kapasitas SDM bersama BKPSDM, serta pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS).

Dengan pelaksanaan program ini, Sumatera Utara diharapkan dapat mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berintegritas. Dampaknya tidak hanya memperkuat daya saing daerah dan memperbaiki iklim investasi, tetapi juga mempercepat pencapaian target pembangunan berkelanjutan baik di tingkat daerah maupun nasional. Pada akhirnya, reformasi birokrasi yang terus diperkuat akan menciptakan birokrasi yang profesional, bersih, akuntabel, dan mampu beradaptasi dengan dinamika zaman. Rincian Proyek Strategis Daerah yang menjadi bagian dari Program Prioritas 10, beserta perangkat daerah pengampu, disajikan pada tabel berikut.

PROGRAM PRIORITAS	PROYEK STRATEGIS DAERAH	OPD PENGAMPU
PP 10: REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN	35. Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Bappelitbang
	36. Kerjasama APIP dan APH dalam Pendampingan Proyek Strategis dan Kegiatan Unggulan Daerah melalui pendampingan sejak tahapan perencanaan, pelaksanaan dan serah	Inspektorat

PROGRAM PRIORITAS	PROYEK STRATEGIS DAERAH	OPD PENGAMPU
	terima kegiatan proyek strategis	

11. Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat

Transformasi digital telah menjadi salah satu pilar utama pembangunan Sumatera Utara di tengah pesatnya disrupsi teknologi global dan percepatan digitalisasi pada berbagai sektor kehidupan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memandang bahwa digitalisasi bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan daya saing daerah, mempercepat pelayanan publik, sekaligus memperluas partisipasi masyarakat dalam ekonomi berbasis teknologi. Melalui kerangka kebijakan yang komprehensif, intervensi digital dirancang secara sistemik untuk menjangkau berbagai dimensi pembangunan, mulai dari tata kelola pemerintahan, pelayanan sosial, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Program Prioritas 11 RPJMD berfokus pada transformasi digital dan inovasi teknologi, dengan penekanan pada modernisasi pelayanan publik dan penguatan perekonomian masyarakat. Salah satu tonggak penting dalam program ini adalah pengembangan Satu Data Sumut yang dikelola oleh Dinas Kominfo. Kehadiran Satu Data Sumut bukan hanya menjadi pusat data dan informasi pembangunan yang terintegrasi, tetapi juga berperan sebagai instrumen pengambilan keputusan berbasis data yang akurat, valid, dan terkini. Melalui pengelolaan data yang terstandar, pemerintah provinsi dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Inisiatif digital ini secara langsung mendukung terwujudnya birokrasi yang profesional, adaptif, dan berintegritas (tujuan 5), khususnya melalui sasaran menguatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif (sasaran 8). Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pemerintahan tidak hanya memperkuat prinsip transparansi, tetapi juga menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pada level nasional, program ini selaras dengan RPJMN 2025–2029, terutama dalam pilar Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi. Kebijakan tersebut menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur digital, peningkatan literasi teknologi, percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta penguatan ekosistem ekonomi digital. Dengan demikian, Sumatera Utara ikut berkontribusi dalam membangun birokrasi yang adaptif, pelayanan publik yang transparan, dan inklusi ekonomi digital yang merata di seluruh lapisan masyarakat.

Lebih jauh lagi, transformasi digital yang dijalankan Sumatera Utara diproyeksikan mampu mempercepat kontribusi ekonomi digital terhadap PDB, mendorong adopsi teknologi di sektor pertanian, pendidikan, dan industri kreatif, serta memperkuat daya saing daerah dalam persaingan ekonomi digital global. Dengan strategi yang holistik dan progresif ini, Sumatera Utara berpotensi menjadi salah satu provinsi pionir dalam implementasi digitalisasi di Indonesia, sekaligus mempercepat tercapainya visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Transformasi digital dan inovasi teknologi ini pada akhirnya diarahkan untuk mempercepat modernisasi layanan publik sekaligus menciptakan perekonomian masyarakat yang lebih efisien, inklusif, dan berbasis teknologi. Rincian Proyek Strategis Daerah yang diturunkan dari Program Prioritas 11, beserta perangkat daerah pengampunya, disajikan dalam tabel berikut:

PROGRAM PRIORITAS	PROYEK STRATEGIS DAERAH	OPD PENGAMPU
PP 11: TRANSFORMASI DIGITAL DAN INOVASI TEKNOLOGI PADA PELAYANAN PUBLIK DAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT	37. Pemanfaatan Satu Data SUMUT pusat data dan informasi pembangunan	Dinas Kominfo

12. Infrastruktur dengan Prioritas Jalan dan Jembatan pada Kawasan Terisolir dan Penyediaan Layanan Dasar pada Kawasan Afirmasi, Terluar, dan Terpencil

Pembangunan infrastruktur dasar menjadi salah satu pilar utama strategi percepatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Infrastruktur tidak hanya dipandang sebagai sarana fisik, tetapi juga instrumen strategis untuk membuka keterisolasian wilayah, mengurangi ketimpangan antarwilayah, serta meningkatkan konektivitas ekonomi, sosial, dan pelayanan dasar masyarakat. Karena itu, kebijakan pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memberikan dampak langsung bagi masyarakat, dengan fokus utama pada pembangunan jalan dan jembatan di kawasan terisolir serta penyediaan layanan dasar di kawasan afirmasi, terluar, dan terpencil.

Pada sektor jalan dan jembatan, program prioritas diarahkan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas masyarakat dan barang, serta menghubungkan pusat-pusat produksi dengan kawasan pertanian, industri, dan destinasi pariwisata. Peningkatan dan rekonstruksi jalan provinsi dilakukan secara bertahap untuk memastikan kemantapan jaringan utama maupun jalan penghubung. Selain itu, perbaikan jaringan jalan turut dilengkapi dengan pembangunan trotoar, drainase, dan fasilitas keselamatan transportasi, sehingga jaringan jalan yang dibangun bukan hanya andal secara teknis, tetapi juga aman, ramah pejalan kaki, dan berkelanjutan.

Pembangunan dan rehabilitasi jembatan diprioritaskan di wilayah-wilayah terpencil, kawasan pertanian produktif, serta sentra industri yang membutuhkan akses transportasi memadai. Keberadaan jembatan menjadi simpul vital yang menjamin kelancaran distribusi hasil produksi, logistik, dan mobilitas masyarakat, terutama di daerah yang dipisahkan oleh sungai, lembah, dan bentang alam lainnya.

Di sisi lain, sektor sumber daya air juga mendapat perhatian khusus melalui penataan jaringan irigasi yang tersebar di berbagai daerah irigasi kewenangan provinsi. Rehabilitasi dan revitalisasi jaringan irigasi dilakukan untuk memperkuat ketahanan sektor pertanian, meningkatkan intensitas tanam, serta mendorong produktivitas lahan, sehingga mendukung strategi ketahanan pangan daerah. Upaya ini diperkuat dengan penyediaan infrastruktur air bersih di kawasan strategis seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), guna menjamin keberlangsungan aktivitas produksi dan investasi industri pengolahan maupun manufaktur.

Kawasan afirmasi, seperti wilayah kepulauan dan pesisir, juga menjadi prioritas melalui pembangunan prasarana utilitas umum (PSU), penyediaan air minum, dan sistem sanitasi. Langkah ini bertujuan memastikan kesetaraan akses pembangunan bagi seluruh masyarakat, memperkecil kesenjangan layanan infrastruktur antara wilayah daratan utama dan daerah terluar, sekaligus mendorong integrasi kawasan perdesaan ke dalam sistem ekonomi regional.

Program Prioritas 12 RPJMD Provinsi Sumatera Utara menempatkan pembangunan jalan, jembatan, irigasi, air bersih, dan layanan dasar sebagai instrumen utama untuk memperkuat konektivitas wilayah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran infrastruktur ini diharapkan tidak hanya memperlancar aktivitas ekonomi lokal, tetapi juga menjadi katalis pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru di kawasan pedesaan dan hinterland.

Program ini secara langsung mendukung terwujudnya ekonomi yang stabil dan inklusif (tujuan 4) melalui sasaran meningkatnya pemerataan pembangunan ekonomi (sasaran 7), serta sejalan dengan tujuan peningkatan akses terhadap infrastruktur berkualitas, estetik, dan ramah lingkungan untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat (tujuan 7, sasaran 11). Selaras dengan RPJMN 2025–2029, pembangunan infrastruktur Sumatera Utara juga ditujukan untuk memperkuat konektivitas nasional, menurunkan biaya logistik, meningkatkan efisiensi rantai pasok, memperkuat ketahanan pangan, serta memperbesar daya saing daerah dalam kerangka transformasi ekonomi nasional.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas PUPR sebagai penanggung jawab utama dalam pembangunan jalan dan jembatan strategis, sekaligus bersinergi dengan perangkat daerah lain

untuk penyediaan layanan dasar, air bersih, dan pengembangan kawasan produktif. Informasi lebih rinci mengenai Proyek Strategis Daerah dalam Program Prioritas 12 beserta perangkat daerah pengampu disajikan dalam tabel berikut.

PROGRAM PRIORITAS	PROYEK STRATEGIS DAERAH	OPD PENGAMPU
PP 12. INFRASTRUKTUR DENGAN PRIORITAS JALAN DAN JEMBATAN PADA KAWASAN TERISOLIR DAN PENYEDIAAN LAYANAN DASAR PADA KAWASAN AFIRMASI, TERLUAR, DAN TERPENCIL	38. Pembangunan Ruas Jalan Baru Penghubung Wilayah Terisolir atau Strategis yang Merupakan kewenangan Provinsi	Dinas PUPR
	39. Pemerataan Infrastruktur Layanan Dasar bagi Kawasan Afirmasi, Terluar, dan Terpencil untuk Mewujudkan Keadilan Pembangunan	Dinas PUPR

13. Pengembangan Sistem Logistik dan Transportasi yang Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Daya Saing

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menempatkan penguatan sistem logistik dan transportasi sebagai salah satu pilar strategis pembangunan ekonomi yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan. Di tengah arus globalisasi dan transformasi ekonomi, sistem logistik dan transportasi yang terintegrasi dipandang sebagai prasyarat untuk menekan biaya distribusi, mempercepat mobilitas barang dan jasa, membuka konektivitas antarwilayah, serta memperkuat daya saing daerah. Karena itu, program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga pada pengembangan sistem distribusi dan pelayanan transportasi berbasis kawasan yang adaptif terhadap kebutuhan jangka panjang.

Melalui Program Prioritas 13 RPJMD Sumatera Utara, pemerintah daerah mengarahkan kebijakan untuk memperkuat logistik dan transportasi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Salah satu proyek strategis yang dijalankan adalah pengembangan transportasi massal perkotaan, seperti Bus Rapid Transit (BRT) dan peningkatan layanan kereta commuter. Kehadiran moda transportasi publik modern ini tidak hanya berfungsi mengurangi kemacetan dan emisi kendaraan pribadi, tetapi juga meningkatkan konektivitas antarwilayah perkotaan sehingga produktivitas masyarakat dapat tumbuh lebih optimal.

Di sisi lain, subsidi transportasi bus perintis bagi wilayah terpencil menjadi instrumen penting untuk memastikan pemerataan akses transportasi. Kebijakan ini memberi manfaat nyata bagi masyarakat pedesaan atau daerah terisolasi, dengan membuka jalur distribusi barang dan jasa serta memperkecil kesenjangan antarwilayah. Kedua

proyek ini, yang dikelola langsung oleh Dinas Perhubungan, menjadi bagian penting dalam memperkuat jaringan logistik dan transportasi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dengan implementasi tersebut, Program Prioritas 13 berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan pembangunan daerah, yakni terwujudnya ekonomi yang stabil dan inklusif (tujuan 4) melalui pemerataan pembangunan ekonomi (sasaran 7), sekaligus mendukung peningkatan akses terhadap infrastruktur berkualitas, ramah lingkungan, dan berorientasi pada kemandirian masyarakat (tujuan 7, sasaran 11).

Program ini juga memiliki keterkaitan erat dengan arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2025–2029, khususnya dalam hal peningkatan kualitas dan konektivitas infrastruktur logistik, baik jalan, pelabuhan, bandara, maupun pusat distribusi. Secara nasional, penguatan logistik dipandang sebagai kunci untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, menurunkan biaya logistik nasional yang masih relatif tinggi, memperluas akses pasar bagi sektor pertanian, perikanan, industri kecil, dan pariwisata, serta mendukung agenda hilirisasi industri dan swasembada pangan.

Melalui strategi ini, Sumatera Utara diharapkan mampu membangun sistem logistik dan transportasi yang adaptif dan berkelanjutan, sekaligus menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi berbasis kawasan yang lebih inklusif dan berdaya saing tinggi, baik di tingkat nasional maupun regional. Informasi lebih lanjut mengenai Proyek Strategis Daerah serta perangkat daerah pengampu dapat dilihat dalam tabel berikut:

PROGRAM PRIORITAS	PROYEK STRATEGIS DAERAH	OPD PENGAMPU
PP 13: PENGEMBANGAN SISTEM LOGISTIK DAN TRANSPORTASI YANG MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN DAYA SAING	40. Dukungan pengembangan sistem angkutan umum masal perkotaan melalui pembangunan BRT dan peningkatan kereta commuter	Dinas Perhubungan
	41. Subsidi Transportasi Bus Perintis untuk daerah-daerah terpencil	Dinas Perhubungan

14. Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana

Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan menjadi fondasi penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara. Prinsip keberlanjutan menuntut agar pemanfaatan sumber daya alam tidak hanya berorientasi pada kebutuhan generasi saat ini, tetapi juga memastikan daya dukung lingkungan tetap terjaga bagi generasi mendatang. Dalam kerangka ini, Pemerintah Provinsi

Sumatera Utara melaksanakan program dan Proyek Strategis Daerah yang mengintegrasikan konservasi lingkungan, mitigasi perubahan iklim, serta peningkatan ketangguhan daerah terhadap risiko bencana.

Program ini dijalankan melalui dua jalur utama, yakni konservasi sumber daya alam dan pengurangan emisi karbon. Pada aspek konservasi, fokus diarahkan pada pengelolaan lingkungan yang holistik serta perlindungan ekosistem dari kerusakan akibat tekanan pembangunan maupun perubahan iklim. Salah satu kegiatan prioritas adalah pembangunan dan pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), baik di tingkat regional maupun kabupaten/kota, sebagai solusi jangka panjang dalam pengelolaan sampah berbasis prinsip ekonomi sirkular.

Program Prioritas 14 RPJMD Sumatera Utara juga menekankan pentingnya infrastruktur ramah lingkungan yang berfungsi ganda: melindungi masyarakat dari risiko bencana sekaligus memperkuat daya dukung pembangunan. Proyek strategis seperti pembangunan infrastruktur pengendali banjir serta pengembangan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) regional, yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR, diarahkan untuk melindungi permukiman dan pusat aktivitas ekonomi dari kerusakan akibat banjir maupun pencemaran, sekaligus mewujudkan tata ruang yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Selain itu, pembangunan TPST regional dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) menjadi tonggak penting dalam inovasi pengelolaan sampah. Kedua proyek ini, yang masing-masing dipimpin oleh Dinas PUPR serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM), tidak hanya mengurangi timbunan sampah, tetapi juga menghasilkan energi alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Di sisi lain, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) mengambil peran dalam membangun Taman Keanekaragaman Hayati sebagai ruang konservasi sekaligus sarana edukasi, yang memperkuat komitmen pelestarian ekosistem lokal serta membuka potensi wisata berbasis alam.

Dengan sinergi lintas perangkat daerah, Program Prioritas 14 berkontribusi langsung pada tujuan pembangunan daerah, yakni peningkatan akses terhadap infrastruktur berkualitas, estetik, dan ramah lingkungan guna mendukung kemandirian ekonomi masyarakat (tujuan 7). Implementasi berbagai proyek strategis ini juga mendorong tercapainya sasaran meningkatnya kualitas sarana dan prasarana ramah lingkungan (sasaran 11), sehingga pembangunan di Sumatera Utara tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keberlanjutan serta ketahanan lingkungan.

Program ini selaras dengan arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2025–2029. Secara khusus, pengelolaan lingkungan hidup mendukung Prioritas Nasional 11 mengenai Pelestarian Lingkungan Hidup, melalui rehabilitasi hutan dan lahan kritis, konservasi keanekaragaman hayati, restorasi kawasan pesisir, serta pengembangan infrastruktur

pengolahan limbah. Selain itu, penguatan ketangguhan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim juga berkontribusi pada Prioritas Nasional 2 tentang Ketahanan Nasional. Intervensi seperti pembangunan sabuk hijau pesisir, sistem peringatan dini, desa siaga bencana, hingga edukasi tanggap darurat berbasis komunitas menunjukkan kesiapan Sumatera Utara dalam menghadapi risiko bencana secara adaptif dan terintegrasi.

Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkelanjutan serta berketahanan terhadap bencana menjadi pilar penting bagi masa depan pembangunan Sumatera Utara. Rincian Proyek Strategis Daerah beserta perangkat daerah penanggung jawab utama disajikan sebagai berikut.

PROGRAM PRIORITAS	PROYEK STRATEGIS DAERAH	OPD PENGAMPU
PP 14. PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN DAN BERKETAHANAN TERHADAP BENCANA	42. Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir	Dinas PUPR
	43. Pembangunan TPST Regional	Dinas PUPR
	44. Pembangunan PLTSa	Disperindag ESDM
	45 Pengembangan SPAL Regional	Dinas PUPR
	46. Pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati	DLHK

15. Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa

Penguatan ekonomi perdesaan melalui pengembangan desa produktif menjadi salah satu prioritas strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui Program Membangun Desa Produktif Terpadu, pemerintah berupaya mewujudkan desa yang mandiri, produktif, serta berdaya saing, dengan mengoptimalkan potensi lokal dan mengintegrasikan inovasi teknologi. Program ini tidak hanya ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi desa, tetapi juga mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara menyeluruh.

Program Prioritas 15 RPJMD Sumatera Utara menempatkan pembangunan berbasis desa sebagai strategi utama dalam memperkuat fondasi ekonomi daerah dari tingkat akar rumput. Salah satu langkah penting adalah penyusunan masterplan desa produktif dan mandiri yang menjadi acuan dalam mengembangkan potensi unggulan lokal serta membangun kemandirian desa. Dengan adanya masterplan ini, desa tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pusat kota, melainkan mampu tumbuh sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

baru yang kompetitif. Peran Dinas PMD Dukcapil sebagai OPD pengampu sangat strategis dalam memastikan kebijakan ini terimplementasi secara efektif dan tepat sasaran.

Di samping itu, penguatan kapasitas dan pendampingan bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga menjadi bagian integral dari program ini. BUMDes diposisikan sebagai motor penggerak ekonomi desa yang mampu mengelola sumber daya lokal, membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Melalui penguatan kelembagaan dan tata kelola yang lebih profesional, BUMDes diharapkan tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga pusat pemberdayaan masyarakat desa yang berkelanjutan.

Program Prioritas 15 berkontribusi langsung terhadap terwujudnya ekonomi yang stabil dan inklusif (tujuan 4) serta mendukung sasaran meningkatnya pemerataan pembangunan ekonomi (sasaran 7). Pendekatan berbasis desa memastikan hasil pembangunan tidak terpusat di perkotaan, melainkan merata hingga ke pelosok, sehingga kesenjangan ekonomi dapat ditekan dan kesejahteraan masyarakat desa meningkat secara signifikan.

Secara keseluruhan, Program Membangun Desa Produktif Terpadu menegaskan pendekatan holistik dalam pembangunan desa, yang meliputi penguatan kelembagaan, pengembangan kapasitas manusia, pemanfaatan teknologi, serta penyediaan dukungan regulasi dan infrastruktur usaha. Dengan menempatkan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, program ini mendorong lahirnya kemandirian komunitas yang berdaya dan resilien.

Dalam konteks kebijakan nasional, program ini mendukung pencapaian Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025–2029, khususnya terkait penguatan desa dan daerah, pengembangan ekonomi lokal, serta pengurangan ketimpangan antarwilayah. Dengan pelaksanaan yang konsisten dan terukur, Sumatera Utara diharapkan mampu mempercepat pencapaian target desa mandiri, memperkuat ketahanan ekonomi lokal, serta meningkatkan kontribusi desa terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebagai wujud komitmen melanjutkan pembangunan berbasis desa, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah merumuskan sejumlah Proyek Strategis Daerah yang menjadi instrumen utama pelaksanaan Program Prioritas 15, dengan OPD penanggung jawab yang ditugaskan sesuai bidang kewenangannya. Rincian proyek tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

PROGRAM PRIORITAS	PROYEK STRATEGIS DAERAH	OPD PENGAMPU
PP 15: MELANJUTKAN PEMBANGUNAN BERBASIS DESA	47. Penguatan ekonomi desa untuk mengurangi ketergantungan pada pusat kota dengan penguatan ekonomi lokal melalui pembuatan masterplan desa produktif dan mandiri.	Dinas PMD Dukcapil
	48. Peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi pengelola BUMDes.	Dinas PMD Dukcapil

16. Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana Harmonis, Toleran, dan Rukun

Ketahanan sosial dan budaya merupakan fondasi penting bagi terwujudnya masyarakat yang harmonis, toleran, dan rukun, khususnya dalam menghadapi dinamika globalisasi dan percepatan perubahan sosial. Ketahanan sosial yang kuat tidak hanya memperkuat kohesi masyarakat, tetapi juga menjadi prasyarat bagi stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan sosial. Dalam konteks Sumatera Utara, yang dikenal dengan keragaman etnis, agama, dan budaya, menjaga harmoni sosial serta menumbuhkan nilai-nilai toleransi menjadi semakin strategis. Melalui promosi nilai kebersamaan, saling menghargai, dan inklusivitas, potensi konflik sosial dapat ditekan sekaligus memperkuat solidaritas sebagai modal utama pembangunan daerah.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menginisiasi Program BERHATI (Berbudaya, Rukun, Harmonis, Toleran, dan Empati) sebagai salah satu prioritas strategis dalam RPJMD 2025–2029. Program ini dirancang untuk memperkuat jaringan sosial budaya, membangun ketahanan sosial berbasis komunitas, serta menciptakan tatanan masyarakat yang damai, inklusif, dan berkeadilan sosial.

Program Prioritas 16 diwujudkan melalui serangkaian Proyek Strategis Daerah yang menyentuh langsung kehidupan sosial budaya masyarakat. Salah satunya adalah pemberian hibah rumah ibadah di 33 kabupaten/kota yang dikelola oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Kebijakan ini bukan hanya dukungan terhadap fasilitas keagamaan, tetapi juga menjadi sarana memperkuat toleransi antarumat beragama serta memperkuat harmoni sosial di tengah keragaman Sumatera Utara.

Selain itu, pelaksanaan Festival Seni dan Budaya Daerah oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf) menjadi wadah penting untuk menghidupkan kembali nilai budaya lokal

sekaligus mempererat persatuan melalui apresiasi seni dan tradisi yang beragam. Program ini juga diperkaya dengan kegiatan edukasi solidaritas, ketahanan sosial, dan wawasan kebangsaan yang digerakkan oleh Bakesbangpol. Melalui kegiatan ini, masyarakat diperkuat kohesi sosialnya, diperdalam rasa kebangsaannya, serta ditumbuhkan kesadaran kolektif dalam menjaga persatuan di tengah dinamika kehidupan modern.

Dengan sinergi antar-OPD pengampu, Program Prioritas 16 mendukung langsung tujuan pembangunan daerah, yaitu terwujudnya ketahanan sosial, budaya, dan keluarga (tujuan 8).

Secara nasional, Program BERHATI sejalan dengan Prioritas Nasional 8 dalam RPJMN 2025–2029, yaitu memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama. Implementasi program ini berkontribusi dalam membangun tatanan sosial yang inklusif, mengurangi kesenjangan sosial budaya, serta memperkuat indeks kerukunan umat beragama.

Lebih jauh, pendekatan berbasis komunitas yang digunakan Program BERHATI selaras dengan prinsip pembangunan sosial berkelanjutan (*social sustainability*), yang menekankan pemberdayaan masyarakat, partisipasi publik, dan penguatan kapasitas lokal dalam menjaga harmoni sosial. Dengan pelaksanaan yang konsisten dan adaptif terhadap dinamika masyarakat, Sumatera Utara diharapkan mampu menjadi teladan nasional dalam merawat keberagaman budaya, memperkuat toleransi, serta menjaga persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai bentuk nyata, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah merancang sejumlah Proyek Strategis Daerah yang berfokus pada peningkatan ketahanan sosial dan budaya dengan melibatkan OPD terkait. Rincian proyek dan OPD penanggung jawab utama dapat dilihat pada tabel berikut:

PROGRAM PRIORITAS	PROYEK STRATEGIS DAERAH	OPD PENGAMPU
PP 16: MENINGKATKAN KETAHANAN SOSIAL DAN BUDAYA YANG MENDUKUNG SUASANA YANG HARMONIS, TOLERAN DAN RUKUN	49. Bantuan Hibah Rumah Ibadah di 33 Kabupaten/Kota	Biro Kesra
	50. Festival Seni dan Budaya Daerah	Disbudparekraf
	51. Edukasi dan Pembekalan Solidaritas, Ketahanan Sosial Dan Wawasan Kebangsaan bagi Organisasi Masyarakat Dan Kelompok Masyarakat	Bakesbangpol

17. Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib

Memperkuat sistem keamanan dan ketertiban merupakan langkah fundamental untuk memastikan stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Sistem keamanan yang efektif tidak hanya menekankan pada penegakan hukum, tetapi juga pada penguatan koordinasi antar lembaga, pemanfaatan teknologi pengawasan, serta partisipasi aktif masyarakat. Dengan sistem yang terintegrasi, potensi ancaman dapat diidentifikasi dan ditangani secara cepat, sehingga tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi aktivitas sosial maupun ekonomi.

Program Prioritas 17 RPJMD Provinsi Sumatera Utara menitikberatkan pada terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih aman dan tertib melalui intervensi strategis yang menyasar akar persoalan keamanan. Sejumlah Proyek Strategis Daerah telah dirancang untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan ketertiban umum, serta mencegah berbagai bentuk gangguan sosial. Salah satunya adalah patroli gabungan pemberantasan narkoba di pintu masuk peredaran maupun kawasan rawan kenakalan remaja, termasuk geng motor, yang dilaksanakan oleh Satpol PP bersama aparat terkait. Langkah ini bertujuan menekan angka kriminalitas sekaligus meningkatkan rasa aman masyarakat.

Selain itu, komitmen serius ditunjukkan melalui kebijakan pemindahan gembong narkoba dari Lapas di Sumatera Utara ke Nusakambangan yang dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan Bakesbangpol. Upaya ini menjadi langkah strategis untuk memutus mata rantai peredaran narkoba sekaligus melindungi generasi muda dari dampak buruk narkoba.

Pendekatan program tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif. Dari sisi preventif, keluarga ditempatkan sebagai benteng pertama. Gerakan Ayah Teladan menjadi inisiatif penting untuk memperkuat peran ayah dalam menanamkan nilai disiplin, komunikasi yang sehat, serta keteladanan bagi anak-anak agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Dukungan dari sekolah, komunitas, dan lingkungan sosial juga dioptimalkan melalui pendidikan karakter, kegiatan positif, serta budaya peduli dan berani melapor.

Bagi korban penyalahgunaan narkoba, aspek pemulihan dan rehabilitasi difokuskan melalui rumah rehabilitasi yang dikelola secara profesional, dengan pendekatan medis, psikologis, spiritual, dan sosial. Rehabilitasi dipandang sebagai pintu pemulihan, memberi kesempatan kedua bagi korban untuk kembali berdaya dan diterima di masyarakat.

Sementara dari sisi represif, Pemerintah Provinsi memperkuat kolaborasi dengan kepolisian, TNI, BNN, Ditjen Bea Cukai, serta pemerintah kabupaten/kota untuk memberantas jaringan narkoba dan tindak kriminal lainnya. Kolaborasi ini dipayungi legalitas yang jelas, dengan roadmap yang terukur mulai dari deteksi dini di pintu masuk peredaran hingga tindakan hukum yang konsisten guna menciptakan efek jera.

Secara keseluruhan, Program Prioritas 17 tidak hanya menghadirkan rasa aman melalui penindakan hukum, tetapi juga membangun ketahanan sosial berbasis keluarga dan komunitas. Kehadirannya memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, sekaligus menciptakan ruang hidup yang kondusif agar pembangunan di berbagai bidang dapat berjalan optimal.

Secara substansial, Program SUMUT BERSATU sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2025–2029, khususnya agenda Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara yang adaptif terhadap tantangan zaman. Melalui pendekatan teknologi, kolaborasi lintas sektor, dan penguatan partisipasi masyarakat, Sumatera Utara berkomitmen mewujudkan kehidupan yang lebih aman, tertib, dan berkeadilan sosial.

Untuk mendukung pencapaian tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah merumuskan sejumlah Proyek Strategis Daerah yang berfokus pada penguatan keamanan, pencegahan peredaran narkoba, dan peningkatan ketertiban umum. Rincian proyek dan OPD penanggung jawab utama dapat dilihat pada tabel berikut:

PROGRAM PRIORITAS	PROYEK STRATEGIS DAERAH	OPD PENGAMPU
PP 17: TERCIPTANYA KEHIDUPAN YANG LEBIH AMAN DAN TERTIB	52. Patroli Gabungan untuk Narkoba di Pintu Masuk Narkoba dan Kawasan-Kawasan Kenakalan Remaja (genk motor).	Satpol PP
	53. Pemberantasan Pengguna dan Bandar Narkoba melalui Pemindahan Gembong Narkoba dari Lapas ke Nusakambangan	Biro Hukum / Bakesbangpol

4.2.3. Penelaahan Pokok Pikiran DPRD Provinsi Sumatera Utara

Pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu masukan penting dalam penyusunan rencana pembangunan daerah tahun 2026 yang dibahas melalui forum Musrenbang. Masukan tersebut pada dasarnya mencerminkan kebutuhan akan kelengkapan data, identifikasi permasalahan pembangunan yang belum sepenuhnya terakomodir, serta penajaman arah kebijakan keuangan daerah. Penelaahan terhadap pokok-pokok pikiran DPRD dilakukan melalui risalah rapat dengar pendapat maupun hasil penyerapan aspirasi masyarakat pada masa reses. Selanjutnya, usulan-usulan tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan tahun 2026 yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah serta kemampuan riil kapasitas anggaran.



Tabel 4.9 Rekapitulasi Progress Verifikasi Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

No.	Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara	Jumlah Usulan	Dibatalkan	Usulan yang masih dalam tahap Verifikasi			Dikembalikan	Ditolak	Disetujui
				Bappelitbang	Perangkat Daerah	TAPD			
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	49	1			37		11	
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1						1	
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16				3		13	
4	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2						2	
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	1			1				
6	Biro Hukum	3						3	
7	Biro Kesejahteraan Rakyat	680	4			673	2	1	
8	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	3				1		2	
9	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	51			51				
10	Dinas Kelautan dan Perikanan	54				6		48	
11	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	86			86				
12	Dinas Kesehatan	181				138		43	
13	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	584	1			554	29		
14	Dinas Ketenagakerjaan	24				24			
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	8						8	
16	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	202	2			193		7	
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	33				9	1	23	
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1243	13		225			1005	
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	18			18				
20	Dinas Pendidikan	212	1		139			72	



No.	Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara	Jumlah Usulan	Dibatalkan	Usulan yang masih dalam tahap Verifikasi			Dikembalikan	Ditolak	Disetujui
				Bappelitbang	Perangkat Daerah	TAPD			
21	Dinas Perhubungan	93			48			45	
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	86	3			7		37	39
23	Dinas Perkebunan dan Peternakan	243	1			218	4	20	
24	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	91				77		14	
25	Dinas Sosial	293	2			15	3	273	
26	Satuan Polisi Pamong Praja	13				13			
27	-	359	13	346					
Total		4629	41	346	568	1968	39	1628	39



4.2.4. Program Prioritas dan Program Utama OPD

Untuk memastikan implementasi PHTC dan Program Prioritas Provinsi dapat berjalan efektif dalam RKPD, maka program-program tersebut perlu diselaraskan dengan nomenklatur program yang relevan di setiap urusan perangkat daerah. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Outcome, Indikator, Program Prioritas, dan Program Utama OPD sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029, selanjutnya diturunkan ke dalam pelaksanaan tahunan dan disajikan pada tabel berikut:



Tabel 4.10 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Outcome, Indikator dan Program Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Utara

Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Utama OPD
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			Indeks Modal Manusia		
		1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Usia Harapan Hidup		
				1. Persentase ibu hamil ANC (antenatal care) 6 kali sesuai standar	PP 3: KESEHATAN YANG TERINTEGRASI DI BEBERAPA TITIK KAWASAN YANG MENJADI SENTRA LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT TERPADU	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (termasuk PHTC 2) <i>(Dinas Kesehatan)</i>
				2. Persentase Wasting		
				3. Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi		
				4. Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana		
				5. Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin		



Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Utama OPD
				imunisasi rutin lengkap		
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan		Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan <i>(Dinas Kesehatan)</i>
			Meningkatnya akreditasi pelayanan kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi		Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan <i>(Dinas Kesehatan)</i>
		2, Meratanya Pendidikan Berkualitas		Rata-Rata Lama Sekolah		
				Harapan Lama Sekolah		
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	1. Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	PP 1: PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM SEKOLAH UNGGULAN BERBASIS PENINGKATAN SKILL YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEBUTUHAN INDUSTRI DAN POTENSI WILAYAH DI TINGKAT LOKAL	Program Pengelolaan Pendidikan (termasuk PHTC 1) <i>(Dinas Pendidikan)</i>
				2. Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)		



Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Utama OPD
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik		Program Penataan Bangunan Gedung <i>(Dinas PUPR)</i>
			Meningkatnya kebudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	PP 2 : PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMUDA, DAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM BERKARYA DAN BERPRESTASI	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan <i>(Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan)</i>
	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	3. Meningkatkan Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Inklusif		Tingkat Kemiskinan		
				Indeks Kesejahteraan Sosial		
				Indeks Zakat Nasional		
			Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	PP 4: PEMBERANTASAN KEMISKINAN MELALUI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RENTAN SECARA MENYELURUH DAN TEPAT SASARAN	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum (PHTC 6) <i>(Biro Hukum)</i>
			Meningkatnya rehabilitasi sosial	1. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		Program Rehabilitasi Sosial <i>(Dinas Sosial)</i>
				2. Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		



Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Utama OPD
				3. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya		
				4. Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya		
				5. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhannya		
				6. Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas		
				7. Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia		
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhannya		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dinas Sosial)



Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Utama OPD
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting <i>(Dinas Perindag ESDM)</i>
			Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial		Program Hubungan Industrial <i>(Dinas Ketenagakerjaan)</i>
			Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial		Program Pemberdayaan Sosial <i>(Dinas Sosial)</i>
2. Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah	3. Ekonomi yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan			Kontribusi PRDB Provinsi		
				PDRB per Kapita		
				Indeks Ekonomi Hijau		
		4. Meningkatkan Hilirisasi Produk Unggulan Daerah		Rasio PDRB Industri Pengolahan		
				Rasio Volume Usaha koperasi terhadap PDRB		



Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Utama OPD
				Indeks Inovasi Daerah		
				Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan komunikasi		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	PP 1: PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM SEKOLAH UNGGULAN BERBASIS PENINGKATAN SKILL YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEBUTUHAN INDUSTRI DAN POTENSI WILAYAH DI TINGKAT LOKAL	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja <i>(Dinas Ketenagakerjaan)</i>
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	PP 5: PENGUATAN STABILITAS MAKRO EKONOMI DAN KESINAMBUNGAN FISKAL DAERAH	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri <i>(Dinas Perindag ESDM)</i>
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	PP 6: PENGEMBANGAN EKONOMI HIJAU DAN BIRU	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap <i>(Dinas Kelautan dan Perikanan)</i>
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya <i>(Dinas Kelautan dan Perikanan)</i>



Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Utama OPD
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Hortikultura	PP 7 : KETAHANAN PANGAN MELALUI PENGUATAN NILAI BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL AGAR DIVERSIFIKASI HASIL PERTANIAN MENJADI LEBIH PRODUKTIF DAN BERDAMPAK PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LOKAL	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian <i>(Dinas Ketapang TPH)</i>
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	1. Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan		Program Penyuluhan Pertanian <i>(Dinas Ketapang TPH)</i>
				2. Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi		
			Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi <i>(Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah)</i>
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat <i>(Dinas Ketapang TPH)</i>



Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Utama OPD
		5. Meningkatnya Aktivitas Ekonomi yang Berwawasan Lingkungan		Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer		
				Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		
				Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum		
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	PP 5 : PENGUATAN STABILITAS MAKRO EKONOMI DAN KESINAMBUNGAN FISKAL DAERAH	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata <i>(Disbudparekraf)</i>
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pelaku pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif <i>(Disbudparekraf)</i>
			Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual <i>(Disbudparekraf)</i>



Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Utama OPD
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian <i>(Dinas Ketapang TPH)</i>
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian <i>(Dinas Ketapang TPH)</i>
				2. Peningkatan Produksi Hortikultura		
				3. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan		
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH	PP.6 : PENGEMBANGAN EKONOMI HIJAU DAN BIRU	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) <i>(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan)</i>
			Meningkatnya kelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Indeks Keanekaragaman Hayati		Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya <i>(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan)</i>



Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Utama OPD
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap <i>(Dinas Kelautan dan perikanan)</i>
			Meningkatnya kelestarian Mut dan keanekaragaman hayati	Luasan Kawasan Konservasi		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan <i>(Dinas Kelautan dan perikanan)</i>
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	PP 8 : PARIWISATA YANG MENGERAKKAN POTENSI ALAM LOKAL DI PEDESAAN DAN PERKOTAAN DENGAN MELIBATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT SECARA LANGSUNG (KOMUNITAS, PEMERINTAH DAERAH/DESA/KELURAHAN DAN PENGUSAHA LOKAL)	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata <i>(Disbudparekraf)</i>
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pelaku pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif <i>(Disbudparekraf)</i>
			Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan



Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Utama OPD
						Hak Kekayaan Intelektual <i>(Disbudparekraf)</i>
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata		Program Pemasaran Pariwisata <i>(Disbudparekraf)</i>
	4. Ekonomi yang Stabil dan inklusif			Tingkat Pengangguran Terbuka		
				Pertumbuhan Ekonomi		
				Gini Rasio		
	6. Terciptanya Stabilitas Harga			Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi		
				Tingkat Inflasi		
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	PP 4: PEMBERANTASAN KEMISKINAN MELALUI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RENTAN SECARA MENYELURUH DAN TEPAT SASARAN	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting <i>(Dinas Perindag ESDM)</i>
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga	Persentase Stabilisasi Harga Barang	PP 7 : KETAHANAN PANGAN MELALUI PENGUATAN NILAI	Program Stabilisasi Harga Barang



Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Utama OPD
			barang kebutuhan pokok dan barang penting	Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL AGAR DIVERSIFIKASI HASIL PERTANIAN MENJADI LEBIH PRODUKTIF DAN BERDAMPAK PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LOKAL	Kebutuhan Pokok dan Barang Penting <i>(Dinas Perindag ESDM)</i>
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan (PHTC 3) <i>(Dinas Ketapang TPH)</i>
			Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi (PHTC 3) <i>(Dinas Perindag ESDM)</i>
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan		Program Program Penyelenggaraan Jalan (PHTC 3) <i>(Dinas PUPR)</i>
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan		Program Perekonomian dan Pembangunan (PHTC 3) <i>(Biro Perekonomian)</i>



Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Utama OPD
			Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	1. Efektivitas Kerja Sama Daerah		Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah (PHTC 3) <i>(Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah)</i>
				2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan		
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (termasuk PHTC 3) <i>(Dinas Ketapang TPH)</i>
				2. Peningkatan Produksi Hortikultura		
				3. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan		
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian <i>(Dinas Ketapang TPH)</i>
		7. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Ekonomi		Pembentukan Modal Tetap Bruto		
				Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional		
				Pertumbuhan PDRB Pertanian,		



Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Utama OPD
				Kehutanan, dan Perikanan		
				NTP Tanaman Pangan		
				Nilai Tukar Nelayan		
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	PP 6: PENGEMBANGAN EKONOMI HIJAU DAN BIRU	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian <i>(Dinas Ketapang TPH)</i>
			Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa		Program Peningkatan Kerjasama Desa <i>(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dukcapil)</i>
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap <i>(Dinas Kelautan dan Perikanan)</i>
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya <i>(Dinas Kelautan dan Perikanan)</i>
			Meningkatnya distribusi dan	1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	PP 7 : KETAHANAN PANGAN MELALUI PENGUATAN NILAI	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian



Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Utama OPD
			kualitas sarana pertanian	2. Peningkatan Produksi Hortikultura	BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL AGAR DIVERSIFIKASI HASIL PERTANIAN MENJADI LEBIH PRODUKTIF DAN BERDAMPAK PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LOKAL	(Dinas Ketapang TPH)
				3. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan		
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (Dinas Ketapang TPH)
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	1. Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan		Program Penyuluhan Pertanian (Dinas Ketapang TPH)
				2. Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi		
			Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	PP 9: EKONOMI KREATIF DAN INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Disbudparekraf)
			Meningkatnya kapasitas SDM	Persentase pelaku pariwisata dan		Program Pengembangan Sumber



Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Utama OPD
			pariwisata dan ekonomi kreatif	Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi		DayaPariwisata dan Ekonomi kreatif <i>(Dinas Ketapang TPH)</i>
			Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor		Program Pengembangan UMKM <i>(Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)</i>
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan	PP 12: INFRASTRUKTUR DENGAN PRIORITAS JALAN DAN JEMBATAN PADA KAWASAN TERISOLIR DAN PENYEDIAAN LAYANAN DASAR PADA KAWASAN AFIRMASI, TERLUAR, DAN TERPENCIL	Program Penyelenggaraan Jalan <i>(Dinas PUPR)</i>
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	1. Konektivitas Darat	PP 13 : PENGEMBANGAN SISTEM LOGISTIK DAN TRANSPORTASI YANG MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN DAYA SAING	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) <i>(Dinas Perhubungan)</i>
				2. Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal		
			Meningkatnya kualitas pembinaan	1. Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang	PP 15 : MELANJUTKAN	



Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Utama OPD
			dan pengawasan pemerintahan desa	Ditingkatkan Kapasitasnya	PEMBANGUNAN BERBASIS DESA	Program Administrasi Pemerintahan Desa (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dukcapil)
				2. Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa		
			Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa		Program Peningkatan Kerjasama Desa (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dukcapil)
3. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	5. Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Adaptif dan Berintegritas	8. Menguatnya Birokrasi yang Profesional, Adaptif dan Berintegritas		Indeks Reformasi Birokrasi		
				Indeks Pelayanan Publik		
				Indeks Reformasi Hukum		
				Indeks integritas Nasional		
				Nilai Capaian Pelaporan Kinerja (SAKIP)		
				Indeks Profesionalitas ASN		



Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Utama OPD
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	PP 5 : PENGUATAN STABILITAS MAKRO EKONOMI DAN KESINAMBUNGAN FISKAL DAERAH	Program Perekonomian dan Pembangunan (PHTC 4) <i>(Biro Perekonomian)</i>
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	1. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	PP 10 : REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN	Program Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah <i>(Bappelitbang)</i>
				2. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD		
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah <i>(Bappelitbang)</i>
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang		



Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Utama OPD
			perekonomian dan SDA	Perekonomian dan SDA		
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	1. Maturitas Penyelenggaraan Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)		Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi <i>(Inspektorat)</i>
				2. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1		Program Penyelenggaraan Pengawasan <i>(Inspektorat)</i>
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PHTC 4) <i>(Dinas Kominfo)</i>
			Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal (PHTC 4)



Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Utama OPD
						(DPMPTSP)
			Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (PHTC 4) (Bapenda)
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (PHTC 4) (Dinas Perindag ESDM)
			Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri secara Lengkap, Akurat, dan Terkini		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (PHTC 4) (Dinas Perindag ESDM)
			Meningkatnya cakupan pelayanan kelistrikan	Rasio Elektrifikasi		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan (PHTC 4) (Dinas Ketenagakerjaan)
			Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan		Program Kebijakan Administrasi Pembangunan (PHTC 4)



Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Utama OPD
						(Biro Administrasi Pembangunan)
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE	PP 11. : TRANSFORMASI DIGITAL DAN INOVASI TEKNOLOGI PADA PELAYANAN PUBLIK DAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika (Dinas Kominfo)
		9. Meningkatkan Kapasitas Keuangan Daerah		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah		
				Persentase PAD terhadap pendapatan daerah		
				Return on Asset (ROA) BUMD		
			Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	PP 5 : PENGUATAN STABILITAS MAKRO EKONOMI DAN KESINAMBUNGAN FISKAL DAERAH	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (BKAD)
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda)
	6. Peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan yang mendukung			Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya		



Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Utama OPD
	pelaksanaan kebijakan dan pembangunan	10. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Lingkungan		Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	PP 17 : TERCIPTANYA KEHIDUPAN YANG LEBIH AMAN DAN TERTIB	
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan		Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum <i>(Satpol PP)</i>
			Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas		
			Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat		
			Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya		
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di		Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya <i>(Badan Kesbangpol)</i>



Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Utama OPD
				Daerah yang Dilaksanakan		
4. Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan	7. Peningkatan Akses terhadap Infrastruktur yang Berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan guna Mendukung Kemandirian Ekonomi Masyarakat			Persentase Penurunan Emisi GRK		
				a. Kumulatif		
				b. tahunan		
		11. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Ramah Lingkungan		Indeks Resiko Bencana		
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan	PP 12. INFRASTRUKTUR DENGAN PRIORITAS JALAN DAN JEMBATAN PADA KAWASAN TERISOLIR DAN PENYEDIAAN LAYANAN DASAR PADA KAWASAN AFIRMASI, TERLUAR, DAN TERPENCIL	Program Penyelenggaraan Jalan (termasuk PHTC 5.a) (Dinas PUPR)
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (termasuk PHTC 5.b) (Dinas PUPR)
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi	1.Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni		Program Pengembangan Perumahan (PHTC 5.c)



Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Utama OPD
			akibat program pemerintah	2. Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni		(Dinas Perkim)
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kurnuh 10-15 Ha yang Ditangani		Program Kawasan Permukiman (Dinas Perkim)
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) (Dinas Perkim)
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Dinas PUPR)
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah (Dinas PUPR)



Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Utama OPD
				Domestik Layak dan Aman)		
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	1. Konektivitas Darat	PP 13: PENGEMBANGAN SISTEM LOGISTIK DAN TRANSPORTASI YANG Mendukung PENGEMBANGAN EKONOMI DAN DAYA SAING	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) <i>(Dinas Perhubungan)</i>
				2. Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal		
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	1. Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	PP 14 : PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN DAN BERKETAHANAN TERHADAP BENCANA	Program Pengelolaan Sumber Daya Air <i>(Dinas PUPR)</i>
				2. Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan danri Abrasi dan an Banjir Rob		
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah		Program Pengelolaan Persampahan <i>(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan)</i>
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian		Program Pengelolaan dan Pengembangan



Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Utama OPD
			sistem pengelolaan air limbah	dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)		Sistem Air Limbah (Dinas PUPR)
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
			Meningkatnya kelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Indeks Keanekaragaman Hayati		Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH	PP 6: PENGEMBANGAN EKONOMI HIJAU DAN BIRU	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
			Meningkatnya kelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Indeks Keanekaragaman Hayati		Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya



Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Utama OPD
						(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
			Laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai sumber nilai tambah ekonomi kelautan dan perikanan	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB		Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil (Dinas Kelautan dan Perikanan)
		12. Meningkatnya Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan		Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Pravelence of Undermourishment)		
				Intensitas energi primer		
				Indeks Kualitas Air (IKA)		
			Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	1. Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT	PP 6: PENGEMBANGAN EKONOMI HIJAU DAN BIRU	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan (Dinas Perindag ESDM)
				2. Porsi EBT dalam Bauran Energi		
			Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	1. Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT	PP 14 : PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan



Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Utama OPD
				2. Porsi EBT dalam Bauran Energi	DAN BERKETAHANAN TERHADAP BENCANA	(Dinas Perindag ESDM)
			Meningkatnya cakupan pelayanan kelistrikan	Rasio Elektrifikasi		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan (Dinas Perindag ESDM)
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	PP 7 : KETAHANAN PANGAN MELALUI PENGUATAN NILAI BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL AGAR DIVERSIFIKASI HASIL PERTANIAN MENJADI LEBIH PRODUKTIF DAN BERDAMPAK PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LOKAL	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (Dinas Ketapang TPH)
				2. Peningkatan Produksi Hortikultura		
				3. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan		
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (Dinas Ketapang TPH)
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan (Dinas Ketapang TPH)



Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Utama OPD
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	1. Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan 2. Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi		Program Penyuluhan Pertanian (Dinas Ketapang TPH)
5. Memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh	8. Terwujudnya Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keluarga			Indeks Demokrasi Indonesia		
		13. Menguatnya Peran Keluarga, Kestaraan Gender, Toleransi dan Kerukunan Antarumat Beragama dalam Kehidupan Sosial		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga		
				Indeks Ketimpangan Gender		
				Indeks Kerukunan Umat Beragama		
			Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	PP 16 : MENINGKATKAN KETAHANAN SOSIAL DAN BUDAYA YANG MENDUKUNG SUASANA YANG HARMONIS, TOLERAN DAN RUKUN	Program Kesejahteraan Rakyat (Biro Kesejahteraan Rakyat)
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif		Program Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Badan Kesbangpol)



Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Utama OPD
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	PP 17 : TERCIPTANYA KEHIDUPAN YANG LEBIH AMAN DAN TERTIB	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan <i>(Badan Kesbangpol)</i>
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan		Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum <i>(Satpol PP)</i>
			Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas		
			Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat		
			Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya		
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat		Program pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya <i>(Badan Kesbangpol)</i>



Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Utama OPD
		14. Menguatnya Pelestarian dan Pemanfaatan Nilai-nilai Budaya Lokal Sebagai Identitas Daerah		Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan		
				Indeks Pembangunan Kebudayaan		
			Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	PP 8 : PARIWISATA YANG MENGERAKKAN POTENSI ALAM LOKAL DI PEDESAAN DAN PERKOTAAN DENGAN MELIBATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT SECARA LANGSUNG (KOMUNITAS, PEMERINTAH DAERAH/DESA/KELURAHAN DAN PENGUSAHA LOKAL)	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual <i>(Disbudparekraf)</i>
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	1. Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya <i>(Disbudparekraf)</i>
				2. Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan		
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	PP 16 : MENINGKATKAN KETAHANAN SOSIAL DAN BUDAYA YANG MENDUKUNG SUASANA YANG HARMONIS, TOLERAN DAN RUKUN	Program Pengembangan Kebudayaan <i>(Disbudparekraf)</i>
			Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan



Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Utama OPD
						Hak Kekayaan Intelektual <i>(Disbudparekraf)</i>
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pelaku pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif <i>(Disbudparekraf)</i>



4.2.5. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) adalah agenda pembangunan global dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya, melalui pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan sampai tahun 2030. Komitmen Indonesia untuk melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGS) secara inklusif, sistematis dan transparan telah diwujudkan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan isian matriks indikator metadata 1 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan isian matriks metadata 2.

Menindaklanjuti amanat dari Perpres tersebut dan sebagai bentuk nyata dari komitmen Indonesia dalam melaksanakan TPB ditingkat Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas selaku Koordinator Pelaksana TPB/SDGS Indonesia telah menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGS yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang juga mengarahkan agar pemerintah daerah juga menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGS. Untuk mengetahui pelaksanaan pencapaian sasaran TPB/SDGS, maka akan dilakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan secara berkala.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen menjalankan pembangunan berkelanjutan dan telah menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGS) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 22 Tahun 2020 dan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (RAD TPB/SDGs) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 20 Tahun 2025, yang diselaraskan dengan tujuan nasional dan tujuan pembangunan jangka menengah daerah.

Beberapa hal yang telah dilaksanakan untuk percepatan pencapaian target SDGs adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB/SDGs Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024. Berdasarkan Monev Tahun 2024, dari 17 Tujuan dan 155 indikator yang ada pada dokumen RAD TPB/SDGS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 yang sejalan dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara terdapat 72,90 persen target indikator yang tercapai, 6,45 persen target indikator yang tidak tercapai dan 20,65 persen target yang belum ada data capaiannya.
2. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan Universitas dan akademisi untuk mengoptimalkan Pusat SDGs (SDGs Center) Universitas Sumatera Utara sebagai wadah dan media *mainstreaming* TPB/SDGs di berbagai bidang keilmuan, media *transfer of knowledge and*



insights, inovasi serta pendalaman kajian/analisis untuk implementasi TPB/SDGs dalam pembangunan daerah.

3. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan peningkatan kapasitas kepada seluruh Stakeholder untuk melaksanakan TPB/SDGs di daerah melalui sosialisasi/diseminasi, *coaching clinic*, komunikasi & advokasi, serta persiapan data & informasi SDGs.

Indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.11 Dukungan PD Provinsi Sumatera Utara dalam Pencapaian Target TPB (Berdasarkan RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026)



Goals/Tujuan	Target TPB	Indikator	Sumber Data
PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL			
TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN	Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.	Tingkat Kemiskinan Ekstrim	BPS
	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Dinas Sosial
	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/ melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.	Dinas Sosial BPS
		Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Dinas Kesehatan
		Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Dinas Ketenaga- kerjaan
		Tertanganinya Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis dan PMKS lainnya memperoleh Rehabilitasi Sosial dalam Panti.	Dinas Sosial
		Tertanganinya korban bencana alam dan bencana sosial tingkat provinsi dan mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar	Dinas Sosial BPBD
		Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses	Dinas PUPR
	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya		



Goals/Tujuan	Target TPB	Indikator	Sumber Data
	masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	terhadap pelayanan dasar.	
		Akses pada layanan air minum	
		Akses pada layanan sanitasi dasar	
		Akses pada fasilitas kebersihan dasar	
	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD
		Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP.	BPBD
		Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030	BPBD
		Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana	BPBD
TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara International untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula	Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat Pendek) pada Anak di bawah lima Tahun/Balita	Dinas Kesehatan
		Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Dinas Kesehatan
		Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).	Dinas Kesehatan
		Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun.	Dinas Kesehatan
	Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas	Nilai tambah pertanian per tenaga	Dinas Ketahanan



Goals/Tujuan	Target TPB	Indikator	Sumber Data
	pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.	kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/perikanan/ kehutanan	Pangan, TPH
		Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil menurut subsektor.	Dinas Ketahanan Pangan, TPH
	Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.	Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan.	Dinas Ketahanan Pangan, TPH
		Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	Dinas Ketahanan Pangan, TPH
TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Dinas Kesehatan
		Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.	Dinas Kesehatan
		Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	Dinas Kesehatan
	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan
	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit	Angka infeksi baru HIV per 1.000 populasi tidak terinfeksi HIV / Prevalensi HIV AIDS	Dinas Kesehatan



Goals/Tujuan	Target TPB	Indikator	Sumber Data
	bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Dinas Kesehatan
		Kejadian Malaria Per 1.000 Penduduk	Dinas Kesehatan
		Jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai Eliminasi Malaria	Dinas Kesehatan
		Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.	Dinas Kesehatan
		Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Dinas Kesehatan
		Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Dinas Kesehatan
		Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta	Dinas Kesehatan
		Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi.	Dinas Kesehatan
	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan	Persentase merokok pada penduduk umur 10 -18 tahun.	Dinas Kesehatan
		Prevalensi tekanan darah tinggi.	Dinas Kesehatan
		Prevalensi Obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	Dinas Kesehatan
	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan	Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat.	BNN/Kes-bangpol
		Jumlah penyalahgunaan napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis	BNN/Kes-bangpol
	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan	Dinas P3AKB



Goals/Tujuan	Target TPB	Indikator	Sumber Data
	keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.	
		Total Fertility Rate (TFR).	Dinas P3AKB
	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	Unmet Need Pelayanan Kesehatan.	Dinas P3AKB
		Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Dinas Kesehatan
	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar terjangkau, sesuai The Doha Declaration tentang The TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam kesepakatan atas Aspek-aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional.	Dinas Kesehatan
		Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.	Dinas Kesehatan
	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Dinas Kesehatan
TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMA/ sederajat.	Dinas Pendidikan
		Angka anak tidak sekolah jenjang SMA/ sederajat.	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Dinas Pendidikan



Goals/Tujuan	Target TPB	Indikator	Sumber Data
	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.	Dinas Pendidikan
	Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	K/L
	Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Dskominfo
		Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Diskominfo
		Proporsi dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Diskominfo
	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMA/SMK/ sederajat untuk perempuan/laki-laki	Dinas Pendidikan
		APK Tingkat SMA/SMK/ Sederajat Perempuan/laki-laki	Dinas Pendidikan
	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Dinas Pendidikan
	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e)	Dinas Pendidikan BPS



Goals/Tujuan	Target TPB	Indikator	Sumber Data
		fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).	
TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.	Dinas P3AKB
		Rasio kekerasan terhadap Anak (/10,000)	Dinas P3AKB
	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15 - 64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Dinas P3AKB
		Jumlah perempuan dewasa dan anak yang mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) dalam 12 bulan terakhir.	Dinas P3AKB
	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah.	Dinas P3AKB
		Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	Dinas P3AKB
	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam.	Dinas P3AKB
PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI			
TUJUAN 7 : ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern	Rasio Elektrifikasi	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi & SDM



Goals/Tujuan	Target TPB	Indikator	Sumber Data
		Konsumsi listrik per kapita	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi & SDM
		Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi & SDM
		Rasio penggunaan gas rumah tangga.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi & SDM
	Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global	Bauran Energi Terbarukan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi & SDM
	Pada tahun 2030, memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan bagi semua negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil dan negara berkembang	Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik dari Energi Terbarukan di dalam watt per kapita).	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi & SDM
TUJUAN 8 : PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang	Laju pertumbuhan PDB per kapita	BPS
		PDB Per Kapita	BPS
	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Dinas Ketenagakerjaan
	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin	Dinas Ketenagakerjaan



Goals/Tujuan	Target TPB	Indikator	Sumber Data
	usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan		
	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	Upah rata-rata per jam pekerja.	Dinas Ketenaga kerjaan
		Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Dinas Ketenaga kerjaan
	Melindungi hak - hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3	Dinas Ketenaga kerjaan
	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDB	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Jumlah wisatawan mancanegara	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	
	TUJUAN 9 : INDUSTRI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	Kondisi mantap jalan Provinsi	Dinas PUPR
		Jumlah bandara	Dinas Perhubungan
		Jumlah pelabuhan penyeberangan	Dinas Perhubungan



Goals/Tujuan	Target TPB	Indikator	Sumber Data
	dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	Jumlah pelabuhan strategis	Dinas Perhubungan
	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Dinas Perindustrian Perdagangan &ESDM
		Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Dinas Perindustrian Perdagangan &ESDM
		Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Dinas Perindustrian Perdagangan &ESDM
	Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri	Dinas LH dan Kehutanan
	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2030.	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	Dinas Kominfo
TUJUAN 10 BERKURANG KESENJANGAN	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional	Rasio Gini	K/L
		Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	K/L
		Jumlah Desa Tertinggal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Capil
		Jumlah Desa Mandiri.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan



Goals/Tujuan	Target TPB	Indikator	Sumber Data
			kan dan Capil
		Jumlah Daerah Tertinggal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Capil
		Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	K/L
		Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	K/L
	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	Indeks Kebebasan	K/L
	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Dinas Sosial
TUJUAN 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB	BKAD/BPS
		Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	
		Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	
	Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	Proporsi individu yang menggunakan internet	Diskominfo
	Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat	Pertumbuhan ekspor produk non migas	Dinas Perindag, Energi dan SDM



Goals/Tujuan	Target TPB	Indikator	Sumber Data
	proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2030.		
PILAR PEMBANGUNAN LINGKUNGAN			
TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	Dinas PUPR
	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	Dinas PUPR
	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global	Kualitas air permukaan sebagai air baku.	Dinas PUPR
TUJUAN 11 KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELAN- JUTAN	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Pada tahun 2030, memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan bagi semua negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil dan negara berkembang	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BPBD
		Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan	BPBD



Goals/Tujuan	Target TPB	Indikator	Sumber Data
		terhadap pelayanan dasar	
		Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB	BPBD
	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya.	Dinas LH dan Kehutanan & PUPR
		Indeks Kualitas Udara	Dinas LH dan Kehutanan
	Pada tahun 2030, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan <i>The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030</i> .	BPBD
		Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana.	BPBD
TUJUAN 12 POLA KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB	Melaksanakan the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan.	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH
	Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makana sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen	(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya/pengolahannya.	Dinas LH dan Kehutanan



Goals/Tujuan	Target TPB	Indikator	Sumber Data
	Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka	Persentase sisa makanan	Dinas LH dan Kehutanan
	Mendukung negara-negara berkembang untuk memperkuat kapasitas ilmiah dan teknologi mereka untuk bergerak ke arah pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan.	Kapasitas pembangkit energi terbarukan yang terpasang (dalam watt per kapita).	Dinas Perindag, Energi dan SDM
TUJUAN 13 : MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA	Memperkuat Kapasitas Ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam disemua negara	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena langsung dampak bencana per 100.000 Orang	BPBD
		Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan <i>the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030</i>	BPBD
		Persentase Pemerintah Daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana /strategi nasional penanggulangan bencana	BPBD
	Mengintegrasikan antisipasi perubahan iklim kedalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional	Terwujudnya Penyelenggaraan inventarisasi penurunan gas emisi rumah kaca (GRK) serta monitoring, pelaporan dan verivikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Binneal Update Report (BUR) dan National ommunication	Dinas LH dan Kehutanan
		Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pertahun	Dinas LH dan Kehutanan
		Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Dinas LH dan Kehutanan



Goals/Tujuan	Target TPB	Indikator	Sumber Data
TUJUAN 14 : EKOSISTIM LAUTAN	Pada tahun 2030, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif	Penerapan Pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan.	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Pada tahun 2030, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia	Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut.	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar	Tingkat penerapan kerangka hukum/regulasi/kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah nelayan yang terlindungi.	Dinas Kelautan dan Perikanan
TUJUAN 15 : EKOSISTEM DARATAN	Pada Tahun 2030 Menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan dan lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban perjanjian nasional	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan.	Dinas LH dan Kehutanan
		Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam Kawasan konservasi, berdasarkan jenis ekosistemnya	Dinas LH dan Kehutanan
	Pada Tahun 2030, Meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara Global.	Kemajuan menuju pengelolaan hutan lestari	Dinas LH dan Kehutanan/ Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam
	Pada Tahun 2030, menghentikan pengurungan, memulihkan tanah dan lahan kritis, termasuk lahan yang terkena pengurungan kekeringan dan banjir dan berusaha mencapai dunia	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	Dinas LH dan Kehutanan



Goals/Tujuan	Target TPB	Indikator	Sumber Data
	yang bebas dari lahan terdegradasi		
PILAR EMBANGUNAN HUKUM DAN TATA KELOLA			
TUJUAN 16 : PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	K/L
	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Inspektorat
	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat	Persentase opini instansi pemerintah yang mendapat opini WTP.	BKAD
		Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP ≥ B	Biro Organisasi
		Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB ≥ B	Biro Organisasi
		Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.	Biro Organisasi
		Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik.	Biro Organisasi
	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipasi dan representatif di setiap tingkatan	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Sekwan
		Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Badan Kepegawaian
		Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	Kesbangpol - K/L
		Indeks Aspek Kebebasan	Kesbangpol - K/L
		Indeks Kesetaraan	Kesbangpol - K/L
	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kependudu



Goals/Tujuan	Target TPB	Indikator	Sumber Data
			kan dan Capil
		Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Capil
	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional	Jumlah Badan Publik yang Terkualifikasi Informatif	Diskominfo
		Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi	Diskominfo





BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Arah kebijakan pembangunan daerah merupakan kerangka kerja operasional yang dirumuskan untuk merespons permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu-isu strategis yang berkembang, serta menjadi pengejawantahan strategi pembangunan daerah. Arah kebijakan ini diarahkan pada prioritas-prioritas pembangunan yang secara bertahap bertujuan untuk mewujudkan pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah.

Penyelenggaraan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, sehingga penyusunan rencana pembangunan daerah harus diselaraskan dan mendukung capaian target pembangunan nasional. Dalam kerangka tersebut, rencana pembangunan daerah disusun sesuai dengan kewenangan masing-masing pemerintahan daerah sebagai satu kesatuan sistem dalam perencanaan pembangunan nasional.

Pelaksanaan pembangunan di tingkat provinsi mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menugaskan Gubernur untuk menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Gubernur juga menjalankan fungsi pengendalian dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah.

Dalam konteks tersebut, arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota perlu diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan provinsi dan nasional. Harmonisasi ini tercermin dalam RPJMD masing-masing kabupaten/kota yang disusun sebagai bentuk dukungan terhadap pencapaian target dan sasaran pembangunan daerah secara makro. Dengan demikian, proses perencanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan secara kolaboratif, partisipatif, dan terpadu lintas wilayah serta mendukung pencapaian pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi masyarakat.

5.1. Arah Pembangunan Kewilayahan Sumatera Utara

Dalam kerangka pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, pengembangan wilayah menjadi salah satu aspek strategis yang dirancang secara terarah dan terintegrasi. Pemerintah menetapkan lima strategi utama pengembangan wilayah guna mendorong pertumbuhan yang merata, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal.

Gambar 5.1 Kawasan Pengembangan Wilayah Sumatera Utara



Strategi pertama adalah pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang mencakup kawasan perkotaan, kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, serta pusat-pusat pertumbuhan pariwisata dan ekonomi biru. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat peran wilayah sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi nasional dan daerah.

Strategi kedua adalah pembangunan afirmasi yang difokuskan pada wilayah-wilayah tertinggal, perbatasan, transmigrasi, serta pulau-pulau kecil, terluar, dan terdalam. Tujuan utama dari strategi ini adalah menjamin pemerataan pembangunan dan mengurangi ketimpangan antarwilayah.

Strategi ketiga menekankan pada konservasi dan ketahanan lingkungan, melalui perlindungan kawasan hutan lindung, taman nasional, lahan kritis, dan keanekaragaman hayati, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana alam di wilayah rawan.



Strategi keempat adalah penguatan konektivitas dan infrastruktur wilayah, yang mencakup integrasi transportasi, logistik, dan jaringan digital guna mendukung mobilitas barang, jasa, dan manusia secara lebih efisien.

Sementara itu, strategi kelima berfokus pada pengembangan kawasan swasembada pangan, energi, dan air, terutama di daerah yang memiliki potensi produksi tinggi maupun yang tergolong rawan dalam ketiga sektor tersebut.

Dalam implementasinya, lokasi-lokasi prioritas wilayah dibagi menjadi lima kelompok utama, yaitu kawasan pertumbuhan, kawasan komoditas unggulan, kawasan swasembada pangan, air, dan energi, kawasan afirmasi, serta kawasan konservasi dan rawan bencana. Kawasan pertumbuhan mencakup wilayah perkotaan, kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, pariwisata, dan ekonomi biru (Kawasan A). Sementara itu, kawasan komoditas unggulan meliputi wilayah dengan potensi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, serta sentra pemerataan ekonomi berbasis sumber daya lokal (Kawasan B). Kawasan swasembada diarahkan pada wilayah dengan kapasitas produksi energi dan pangan strategis, termasuk pembangkit listrik dan kilang energi (Kawasan C). Kawasan afirmasi mencakup wilayah 3T (tertinggal, terluar, dan terdalam) dan perdesaan yang membutuhkan pendekatan khusus (Kawasan D). Terakhir, kawasan konservasi dan rawan bencana difokuskan pada pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana (Kawasan E).

Seluruh skenario pengembangan wilayah ini dirancang untuk mendukung pencapaian lima Misi Provinsi Sumatera Utara dalam RPJMD 2025–2029, mulai dari Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (Misi 1), Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah (Misi 2), Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan (Misi 3), Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan (Misi 4) dan Memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh (Misi 5). Melalui pendekatan ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa pembangunan wilayah berjalan secara berkeadilan dan inklusif, sekaligus menjadi fondasi utama bagi terwujudnya visi Sumatera Utara Kolaborasi Sumut Berkah Menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan.

5.1.1. Program Direktif Presiden

Dalam upaya mempercepat pencapaian target pembangunan nasional dan menjawab tantangan strategis yang dihadapi bangsa, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan sejumlah program direktif sebagai agenda prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Program-program ini berfungsi sebagai instrumen percepatan transformasi sosial-ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat daya saing bangsa di tengah dinamika global. Dirancang secara lintas sektor dan lintas tingkatan pemerintahan, program direktif Presiden menjadi panduan utama bagi kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan anggaran pembangunan.

1. Program Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program direktif Presiden yang menjadi prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah



(RKPD) tahun 2026, termasuk untuk Provinsi Sumatera Utara. Program ini tidak sekadar menjadi intervensi sosial dalam bentuk distribusi makanan, melainkan dirancang sebagai pendekatan sistemik untuk mengatasi persoalan malnutrisi kronis, stunting, serta kerentanan gizi di berbagai kelompok rentan, siswa, santri, ibu hamil dan menyusui, serta balita. Tujuan utamanya adalah mendorong percepatan pemenuhan gizi seimbang, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat kemandirian ekonomi lokal berbasis pangan bergizi.

Berikut ini direktif Presiden untuk program makan bergizi Gratis di Sumatera Utara.

a. Pemberian Makanan Bergizi bagi Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita

Komponen utama dari program ini adalah distribusi langsung makanan bergizi secara rutin kepada kelompok sasaran prioritas. Intervensi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi harian dan memperbaiki kondisi nutrisi pada masa-masa penting dalam siklus kehidupan, khususnya usia emas (0–5 tahun) dan remaja. Di tingkat pelaksanaan, pemberian makanan akan dilakukan di sekolah dasar dan menengah, pondok pesantren, posyandu, serta fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah bersalin. Di daerah seperti Sumatera Utara, kebijakan ini sangat relevan mengingat masih tingginya prevalensi stunting di beberapa kabupaten/kota seperti Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, dan Nias. Intervensi ini juga berpotensi menurunkan angka putus sekolah, meningkatkan konsentrasi belajar, serta mendukung perkembangan janin dan bayi secara optimal.

b. Sertifikasi Halal untuk Program Makan Bergizi Gratis

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, keberadaan sertifikasi halal merupakan prasyarat penting dalam memastikan kepercayaan masyarakat terhadap makanan yang disediakan. Sertifikasi ini juga menjadi jaminan kualitas, keamanan, dan standar higienitas produk pangan. Pemerintah mendorong agar seluruh rantai pasok, mulai dari pengadaan bahan makanan, proses pengolahan, hingga distribusi, mengikuti standar halal yang dikeluarkan oleh otoritas seperti BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) dan MUI. Di Sumatera Utara, yang memiliki basis komunitas Muslim besar di Medan, Deli Serdang, dan Langkat, keberadaan sertifikasi ini akan menjadi faktor penerimaan sosial yang tinggi, sekaligus mendorong pelaku UMKM makanan untuk meningkatkan kualitas produknya melalui proses sertifikasi.

c. Pemenuhan Standar Sistem Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengembangan Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional

Komponen ini mencakup penguatan kelembagaan, Prosedur Operasional Standar (SOP), serta mitigasi risiko dalam pelaksanaan program di seluruh tingkatan pemerintahan. Dalam praktiknya, tata kelola ini akan mencakup sistem registrasi penerima manfaat, protokol distribusi makanan, mekanisme pemantauan dan evaluasi (monev), serta transparansi anggaran dan logistik. Sistem informasi pemenuhan gizi nasional juga akan dibangun dan diintegrasikan ke dalam sistem milik Kemendikbud, Kemenkes, dan Kemensos, sehingga data gizi, kesehatan, dan pendidikan anak dapat dikelola secara terpadu. Di tingkat daerah, termasuk Sumatera Utara, hal ini akan memerlukan pelatihan bagi operator data, dukungan TIK (Teknologi



Informasi dan Komunikasi) di sekolah dan fasilitas kesehatan, serta integrasi lintas sistem informasi daerah.

d. Pemenuhan Sarana dan Prasarana atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)

Untuk menjamin kualitas dan kesinambungan layanan, pemerintah akan membentuk dan memperkuat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai lokasi pelaksanaan program. Fasilitas ini berfungsi sebagai pusat produksi, penyimpanan, dan distribusi makanan bergizi, serta tempat edukasi gizi masyarakat. Di daerah seperti Sumatera Utara, SPPG akan diintegrasikan dengan infrastruktur sekolah, pesantren, puskesmas, dan posyandu. Pembangunan atau renovasi dapur sekolah, penyediaan alat masak standar kesehatan, cold storage, dan tempat cuci tangan yang layak akan menjadi bagian dari upaya memastikan kebersihan dan efisiensi proses pemberian makanan. SPPG juga dapat dikembangkan sebagai titik tumbuh ekonomi lokal, karena memungkinkan kolaborasi dengan kelompok tani, koperasi, dan pelaku UMKM makanan sehat.

e. Pemberdayaan Komunitas Masyarakat dan Pelaku Usaha

Program ini dirancang agar tidak hanya menjadi intervensi gizi, tetapi juga sebagai pengungkit kegiatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar pelaksanaan makanan bergizi gratis melibatkan komunitas perempuan, koperasi sekolah, pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), dan kelompok tani lokal. Di Sumatera Utara, ini menjadi peluang besar bagi peningkatan kapasitas produksi pangan desa, koperasi wanita, dan industri olahan rumahan. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam bentuk dapur komunitas, program gotong royong, serta pendampingan gizi berbasis lokal akan memperkuat rasa kepemilikan dan keberlanjutan program. Pemerintah daerah didorong untuk menyusun skema kerja sama dan insentif bagi pelaku usaha pangan lokal yang mendukung penyediaan bahan baku bergizi dan berkualitas.

f. Penguatan Koordinasi Dukungan Lintas Sektor

Pelaksanaan program ini sangat bergantung pada sinergi antar kementerian, lembaga, dan organisasi di tingkat pusat dan daerah. Pemerintah daerah diharapkan membentuk gugus tugas lintas dinas (kesehatan, pendidikan, sosial, koperasi, pertanian, dan Bappeda) untuk mengatur pembagian peran, anggaran, dan jadwal pelaksanaan program. Dukungan dari instansi vertikal seperti TNI, Polri, serta partisipasi ormas dan lembaga keagamaan juga menjadi bagian dari koordinasi ini. Di daerah yang memiliki kompleksitas geografis seperti Sumatera Utara, penguatan koordinasi sangat krusial agar distribusi makanan dapat menjangkau daerah-daerah terpencil, seperti desa-desa di Nias, daerah pegunungan di Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, atau perbatasan di Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas, Labuhanbatu Selatan, serta daerah Kepulauan.

2. Pembangunan Sekolah Rakyat

Sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia berkualitas, Pemerintah berkomitmen untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari layanan pendidikan, khususnya mereka yang berasal dari keluarga miskin, terpencil, dan rentan. Presiden mengamanatkan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai satuan pendidikan alternatif yang



menyediakan fasilitas pendidikan berasrama secara gratis. Tujuan utama program ini adalah untuk menjawab persoalan ketimpangan akses pendidikan akibat faktor geografis, sosial-ekonomi, dan keterbatasan infrastruktur di daerah-daerah tertinggal dan 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

Sekolah Rakyat dirancang sebagai institusi yang bukan hanya menyediakan pendidikan formal, tetapi juga pembinaan karakter, layanan makan bergizi, asrama yang layak, dan pembelajaran kontekstual berbasis kearifan lokal. Layanan berasrama akan memungkinkan anak-anak dari keluarga miskin di daerah terpencil mendapatkan kesempatan pendidikan yang setara dengan anak-anak di wilayah maju. Dengan pola asrama, anak-anak dapat tinggal dan belajar dalam lingkungan yang mendukung, aman, dan terstruktur, serta mendapatkan bimbingan langsung dari tenaga pendidik dan kependidikan yang disiapkan secara khusus.

Program ini juga diharapkan menjadi titik masuk kolaborasi multipihak antara pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat sipil, dan lembaga keagamaan, untuk memperkuat peran pendidikan dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Di samping itu, pembangunan Sekolah Rakyat diintegrasikan dengan program perlindungan sosial dan ketahanan keluarga, sehingga setiap anak tidak hanya mendapat akses pendidikan, tetapi juga tumbuh dalam lingkungan yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.

3. Digitalisasi Pendidikan

Sebagai bagian dari agenda nasional untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan, Presiden mengarahkan pemanfaatan platform digital pembelajaran sebagai instrumen utama peningkatan kompetensi peserta didik dan pendidik. Platform ini dirancang untuk menjadi ruang belajar terintegrasi yang mendukung proses pembelajaran daring dan luring secara hibrida (*blended learning*), dengan konten yang adaptif terhadap kebutuhan kurikulum nasional dan perkembangan teknologi informasi.

Platform digital pendidikan juga berfungsi sebagai media evaluasi, pelatihan guru, serta integrasi data pembelajaran yang relevan dengan ekosistem pendidikan nasional. Dengan dukungan kecerdasan buatan (AI), analitik pembelajaran, serta basis data nasional yang terkonsolidasi, kebijakan ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan akses dan kualitas antarwilayah, serta memfasilitasi pengembangan pembelajaran berbasis kompetensi dan keterampilan abad ke-21.

Sebagai bagian dari output konkret kebijakan ini, pemerintah berkomitmen untuk menyediakan peralatan digitalisasi pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan. Penyediaan sarana ini tidak hanya ditujukan untuk mendukung penggunaan platform digital pendidikan, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif, modern, dan setara di seluruh pelosok Indonesia.

Output penyediaan ini mencakup:

- Satuan PAUD yang mendapatkan peralatan digitalisasi, seperti perangkat edukatif interaktif dan sarana audiovisual yang ramah anak.
- Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang menerima perangkat pendukung seperti komputer, proyektor, koneksi internet, dan perangkat lunak edukatif.



- Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang difasilitasi dengan peralatan digital untuk mendukung mata pelajaran umum dan kejuruan berbasis teknologi.
- Sekolah Luar Biasa (SLB) yang diberikan peralatan digitalisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus, seperti perangkat bantu visual, audio, dan aksesibilitas digital lainnya.

Kebijakan ini juga disertai dengan pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan untuk memastikan pemanfaatan teknologi dilakukan secara optimal dan tepat sasaran. Dengan pendekatan tersebut, transformasi digital dalam pendidikan tidak hanya menjadi proses modernisasi infrastruktur, tetapi juga proses peningkatan mutu dan keadilan dalam layanan pendidikan nasional.

4. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Program Koperasi Merah Putih merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah untuk memperkuat struktur ekonomi rakyat berbasis komunitas lokal, terutama di desa dan kelurahan. Presiden mengarahkan agar koperasi tidak hanya menjadi sarana simpan-pinjam, tetapi juga menjadi pilar utama dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Koperasi diposisikan sebagai aktor penggerak ekonomi lokal yang mampu meningkatkan pendapatan warga, memperluas lapangan kerja, serta mendukung rantai pasok sektor riil, termasuk pangan, energi, dan UMKM.

Implementasi program ini diarahkan melalui dua output utama, yakni peningkatan kapasitas usaha koperasi dan penguatan kapasitas kelembagaan serta Sumber Daya Manusia (SDM) koperasi. Pertama, peningkatan kapasitas usaha koperasi mencakup dukungan dalam bentuk penguatan model bisnis, akses pembiayaan, integrasi koperasi ke dalam rantai pasok lokal dan nasional, serta adopsi teknologi dalam kegiatan usaha koperasi. Koperasi Merah Putih didorong untuk mengelola unit usaha produktif seperti pengolahan hasil pertanian, penyediaan makanan bergizi untuk program MBG (Makan Bergizi Gratis), penyediaan logistik sekolah, dan unit usaha berbasis kebutuhan lokal lainnya.

Kedua, penguatan kelembagaan dan SDM koperasi dilakukan melalui pelatihan manajemen koperasi, digitalisasi tata kelola, penguatan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel, serta pendampingan legalitas dan sertifikasi koperasi. Pemerintah juga mendorong pembentukan ekosistem kelembagaan koperasi yang terhubung dengan lembaga pembiayaan mikro, inkubator UMKM, serta lembaga pelatihan vokasi di tingkat daerah. Program ini juga dirancang untuk memiliki keterkaitan langsung dengan agenda prioritas lain dalam RKPD 2026, seperti pengentasan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, ketahanan pangan, serta transformasi ekonomi desa. Dalam implementasinya di lapangan, koperasi desa dan kelurahan diharapkan menjadi simpul ekonomi rakyat yang tumbuh secara kolektif dan berkelanjutan.

5. Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan sebagai prioritas nasional yang menuntut pendekatan lebih terarah, terintegrasi, dan berbasis pemberdayaan. Salah satu strategi kunci yang diarahkan melalui direktif Presiden adalah pelaksanaan dua program utama: Kartu Usaha Afirmatif dan Kartu Kesejahteraan, yang masing-masing memiliki serangkaian output untuk



mengakselerasi peningkatan kapasitas ekonomi, ketahanan sosial, dan kemandirian masyarakat miskin dan rentan.

a. Pengentasan Kemiskinan melalui Kartu Usaha Afirmatif

Program Kartu Usaha Afirmatif dirancang sebagai instrumen afirmasi bagi masyarakat miskin dan rentan untuk memperoleh akses terhadap pelatihan, pendampingan usaha, peralatan produksi, serta pendanaan yang memungkinkan mereka mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya bertumpu pada bantuan, tetapi juga menekankan aspek produktivitas dan kemandirian.

Output utama dari program ini mencakup:

- Pelatihan pertanian bagi non-aparatur dan masyarakat pengelola kawasan hutan, yang bertujuan membangun kapasitas teknis dan manajerial masyarakat desa hutan serta penerima akses kelola lahan dalam skema Perhutanan Sosial.
- Penguatan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dan Kelompok Tani Hutan (KTH) melalui peningkatan kapasitas usaha, akses pasar, dan kelembagaan, agar mampu menjadi penggerak ekonomi berbasis kehutanan berkelanjutan.
- Pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat kelautan dan perikanan, termasuk nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha perikanan yang didampingi penyuluh, untuk meningkatkan produktivitas dan diversifikasi usaha.
- Kartu Prakerja sebagai alat bantu peningkatan keterampilan kerja dan wirausaha produktif, khususnya bagi angkatan kerja muda dan pengangguran terbuka.
- Pendampingan usaha bagi keluarga penerima manfaat (KPM) program kewirausahaan sosial, agar dapat keluar dari siklus ketergantungan bantuan dan bertransformasi menjadi pelaku usaha mikro.
- Penyediaan alat dan mesin pertanian pra-panen, serta sarana ternak seperti ruminasia potong, unggas, dan ternak lainnya, sebagai bagian dari peningkatan produktivitas peternak skala kecil.
- Skema asuransi pertanian dan peternakan, termasuk untuk komoditas pangan, hortikultura, dan perkebunan, guna memitigasi risiko usaha tani.
- Dukungan perikanan berupa sarana penangkapan, benih, dan budi daya, serta fasilitasi pendanaan usaha nelayan.
- Fasilitasi kader kewirausahaan muda untuk membentuk generasi wirausaha lokal yang adaptif.
- Pembiayaan usaha mikro melalui UMi (Ultra Mikro), sebagai pembuka akses modal yang inklusif bagi pelaku usaha kecil tanpa jaminan formal.

b. Pengentasan Kemiskinan melalui Kartu Kesejahteraan

Program Kartu Kesejahteraan berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat miskin dan rentan, termasuk kesehatan, pendidikan, pangan, energi, dan perlindungan bencana. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kelompok rentan memiliki dasar yang kokoh untuk bertahan dan berkembang.

Output dari program ini antara lain:

- Bantuan Penerima Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin.



- Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah.
- Bantuan Sosial Bersyarat (PKH) dan Bantuan Sosial Sembako, sebagai intervensi terpadu untuk meningkatkan gizi dan pendapatan rumah tangga miskin.
- Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan, terutama di wilayah rawan dan rentan terhadap fluktuasi harga pangan.
- Subsidi Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi rumah tangga miskin, nelayan kecil, petani, dan UMKM, serta subsidi listrik dan kebijakan tarif yang melindungi kelompok rentan dari tekanan biaya energi.
- Fasilitasi kampung siaga bencana dan lumbung sosial di desa/kelurahan rawan bencana, untuk memperkuat ketahanan komunitas dalam menghadapi risiko bencana.
- Asistensi rehabilitasi sosial bagi lanjut usia, penyandang disabilitas, korban bencana, dan kelompok rentan lainnya, dalam bentuk pendampingan psikososial, pemulihan akses layanan dasar, dan pemberdayaan sosial.

5.1.2. Arah Pengembangan Kewilayahan Berdasarkan Highlight Intervensi

5.1.2.1. Kawasan Pertumbuhan

Pemerintah menitikberatkan pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi guna mendorong akselerasi transformasi ekonomi nasional dan daerah. Pendekatan ini mencakup penguatan kawasan perkotaan, kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, serta destinasi pertumbuhan berbasis pariwisata dan ekonomi biru. Melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan tersebut, wilayah-wilayah strategis didorong untuk memainkan peran sentral sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan, sehingga memperkuat keterkaitan antara pembangunan sektoral dan pemerataan antarwilayah.

Highlight intervensi pemerintah untuk kawasan pertumbuhan di Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Arah Pengembangan Kawasan Pertumbuhan

Kode	Wilayah	Highlight Intervensi
A1	Wilayah Metropolitan Medan dan Kawasan Pengembangan Industri Medan-Binjai-Deli Serdang Kota Medan Kota Binjai Kab. Deli Serdang Kab. Karo	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di WM Medan
		Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diberikan Penyadaran terhadap Penanggulangan Dampak Pencemaran
		Penataan Kota Lama Kesawan
		Pembangunan SPAM Regional Medan- Binjai-Deli Serdang
		Medan <i>Urban Traffic Improvement Project</i>
		Pengendalian banjir Sungai Badera dan Selayang
		Preservasi Jalan Akses Simpul Transportasi di Jalan SISINGAMANGARAJA (MEDAN)
		Pekerjaan Peningkatan Jalur KA Lintas Medan - Belawan Tahap II (Labuhan - Belawan)
		Pembangunan SPAM di Kab. Karo



Kode	Wilayah	Highlight Intervensi
		Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional di Kota Medan
		Pembangunan Jalur KA Lintas Medan Binjai Tahap II
A2	Kawasan Pengembangan Industri Kualatanjung-Sei Mangkei Kab. Batubara Kab. Simalungun Kota Tebing Tinggi Kota Pematangsiantar	Pembangunan/revitalisasi sentra IKM
		Pembangunan Flyover/Underpass/Terowongan (Simpang KA) - Provinsi Sumatera Utara
		Pendampingan penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Kemurgi, Oleokimia, Pakan
		Restrukturisasi mesin dan peralatan industri pakan dan oleokimia
		Fasilitasi prototyping produk betacarotene dan tocopherol alami berbasis minyak sawit
		Fasilitasi pendampingan teknis pemenuhan standar industri hijau dan transformasi industri hijau untuk sektor prioritas hilirisasi
		Surat tanda daftar budidaya (STDB) tanaman kelapa sawit dan aneka palma
A3	Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Danau Toba dan Kawasan Perkotaan Toba (Balige) (Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba) Kab. Toba Kab. Samosir Kab. Humbang Hasundutan Kab. Tapanuli Utara Kab. Dairi Kab. Karo Kab. Simalungun	Peningkatan 6A Pariwisata dan <i>Urban Renewal</i> di Parapat-Ajibata, Balige, Baktiraja, Pangururan, Silalahi-Paropo, Merek, dan Ambarita-Tomok
		Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan
		Pembangunan TPST Kec. Girsang Simpangan Bolon
		Pembangunan Jalan Tol Inderapura – Kuala Tanjung dan Sinaksak Parapat
		Pendampingan, Kemitraan dan Insentif Industri Pariwisata Berkelanjutan - Provinsi Sumatera Utara
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat - Provinsi Sumatera Utara
		Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata - Provinsi Sumatera Utara
		Pelaksanaan Kegiatan (<i>Events</i>) Internasional - Kota Medan
		Preservasi jalan Siborong Borong - Taruntung
		Preservasi Jalan Dairi Dolok Sanggul
		Perluasan SPAM
		Indonesia <i>Game Academy</i>
		<i>Masterclass for Game Developers</i>
		<i>Women for Indonesian Game</i>
		Inkubasi startup gim
		Fasilitasi Akses Pendanaan dan Pembiayaan Industri Gim
		Fasilitasi dan Promosi Industri Gim Nasional
A4	Kawasa Perkotaan Sibolga-Pandan-Padangsidimpuan Kota Sibolga Kab. Tapanuli Tengah	Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan
		Pelabuhan perikanan PPN Sibolga



Kode	Wilayah	Highlight Intervensi
	Kota Padangsidempuan	
A5	Kawasan Perkotaan Rantauprapat Kab. Labuhanbatu	Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan
		Penyiapan Jalan Tol Rantauprapat- Kisaran
A6	Kawasan Perkotaan Kabanjahe Kab. Karo	Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan
		Preservasi jalan ruas Kabanjahe– Berastagi–Medan, Kabanjahe– Sidikalang–Subulussalam, Kabanjahe– Kutacane
		Preservasi jalan ruas Lawe Pakam (BTS. Prov. Aceh)- Kuta Buluh-BTS. Kota Sidikalang-BTS. Kota Kabanjahe
A7	Kota Gunung Sitoli	Pembangunan SPAM
		Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan
		RS Berkualitas di Kab/Kota (Pemenuhan PHTC bidang Kesehatan)
		Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif

5.1.2.2. Kawasan Komoditi Unggulan

Di samping pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga menetapkan kawasan komoditas unggulan sebagai fokus strategis dalam pembangunan kewilayahan. Kawasan ini mencakup wilayah-wilayah yang memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, serta berfungsi sebagai sentra pemerataan ekonomi yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal. Pendekatan ini bertujuan untuk mendorong produktivitas sektor-sektor unggulan di daerah, memperkuat ketahanan ekonomi domestik, serta meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk lokal di pasar nasional dan global.

Tabel 5.2 Arah Pengembangan Kawasan Komoditi Unggulan

Kode	Wilayah	Highlight Intervensi
B1	Kawasan Komoditas Unggulan Sawit, Karet, dan Kelapa Asahan- Labuhanbatu- Padanglawas Kab. Asahan Kab. Labuhanbatu Kab. Labuhanbatu Utara Kab. Labuhanbatu	Kawasan perkebunan dengan peningkatan produksi dan produktivitas mendukung hilirisasi komoditas perkebunan



Kode	Wilayah	Highlight Intervensi
	Selatan Kab. Padanglawas Kab. Padanglawas Utara	Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri
B2	Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Asahan- Tanjungbalai Kota Tanjungbalai Kab. Asahan	Pelabuhan perikanan PPI Tanjungbalai
		Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap
B3	Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Nias Utara Kab. Nias Utara	Pelabuhan perikanan modern yang terintegrasi dengan industrialisasi/hilirisasi perikanan di Lahewa

5.1.2.3. Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi

Kawasan swasembada merupakan wilayah yang diarahkan untuk mendukung ketahanan nasional melalui optimalisasi kapasitas produksi energi dan pangan strategis. Fokus pengembangannya mencakup daerah-daerah yang memiliki potensi besar dalam penyediaan sumber daya vital, seperti pembangkit listrik, kilang energi, serta lahan produktif untuk pertanian dan perikanan. Pendekatan ini bertujuan memastikan ketersediaan dan distribusi energi serta pangan yang merata dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi lokal sebagai bagian dari sistem ketahanan nasional jangka panjang.

Tabel 5.3 Arah Pengembangan Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi

Kode	Wilayah	Highlight Intervensi
C1	Kawasan Swasembada Pangan Sumatera Timur Kab. Langkat Kab. Deli Serdang Kab. Serdang Bedagai Kab. Simalungun Kab. Asahan Kab. Labuhanbatu	Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi pada D. I. Bandar Sidoras, D.I Perkotaan, dan D.I Sei Ular
		Pembangunan jarinan Irigasi pada D.I. Wampu, D.I. Silau Bunut
		Pemasangan Sambungan Baru Listrik bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik yang Tidak Mampu atau Berada di Daerah dan Operasional dan Pemeliharaan Akses Internet pada Kecamatan Perbatasan Prioritas, yaitu di Kab. Langkat (Pematang Jaya, Pangkalan Susu, Berandan Barat, Gebang, Tanjung Pura), Kab. Serdang Bedagai (Tanjung Beringin, Bandar Khalipah), Kab. Batu Bara (Sei Suka) dan Kab. Asahan: (Silau Laut, Sei Kepyang Timur)
		Menyiapkan calon lokasi dan calon petani penerima



Kode	Wilayah	Highlight Intervensi
		Membangun infrastruktur pertanian
		Melaksanakan pelatihan petani dan penguatan kelembagaan petani
		Menyediakan input dan alat mesin produksi pertanian
		Melaksanakan pengawalan produksi dan pengendalian OPT/DPI
		Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi
C2	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Bukit Barisan Utara Kab. Toba Kab. Samosir Kab.Humbang Hasundutan Kab. Tapanuli Utara Kab. Dairi Kab. Karo Kab. Pakpak Bharat Kab. Tapanuli Tengah	Kawasan hortikultura guna mendukung KSPP Sumatera Utara
		Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah
		Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada Danau Toba dan Sub-DAS Asahan
		Revitalisasi Danau Toba
		Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 275 kV Sarulla-PLTA Batangtoru
C3	Kawasan Swasembada Pangan dan Air Batang Angkola-Batang Gadis Kab. Tapanuli Selatan Kab. Mandailing Natal	Rehabilitasi dan peningkatan jaringan pada D. I. Batang Angkola
		Pembangunan TPST Kab. Mandailing Natal
		Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada DAS Batang Gadis dan Danau Siai

5.1.2.4. Kawasan Afirmasi

Kawasan afirmasi merupakan wilayah-wilayah yang memerlukan perhatian dan penanganan khusus dalam kerangka pembangunan nasional, terutama mencakup daerah tertinggal, terluar, dan terdalam (3T) serta kawasan perdesaan. Wilayah-wilayah ini umumnya menghadapi keterbatasan infrastruktur, akses layanan dasar, serta peluang ekonomi yang minim. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan di kawasan afirmasi difokuskan pada percepatan pemerataan, pengurangan kesenjangan, serta pemberdayaan masyarakat lokal agar dapat mengejar ketertinggalan dan berkontribusi dalam pertumbuhan nasional secara inklusif dan berkelanjutan.



Tabel 5.4 Arah Pengembangan Kawasan Afirmasi

Kode	Wilayah	Highlight Intervensi
D1 A7	Kawasan Afirmasi Kepulauan Nias (Daerah Terdepan dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan) (D1) dan Kawasan Perkotaan Gunungsitoli (A7) Kab. Nias Kab. Nias Utara* Kab. Nias Barat Kab. Nias Selatan Kota Gunungsitoli	Pembangunan SPAM
		Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan
		Peningkatan tipe RS dari tipe D menjadi C di RSUD Kab. Nias Utara, Kab. Nias Barat
		RS Berkualitas di Kab/Kota (Pemenuhan PHTC bidang Kesehatan)
		Peningkatan 6A Pariwisata di Telukdalam, Kep. Hinako, Lahewa- Tureloto, Kep. Batu
		Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif
	Keterangan: *) Daerah Tertinggal	

5.1.2.5. Kawasan Konservasi/Rawan Bencana

Kawasan konservasi dan rawan bencana merupakan wilayah yang mendapat perhatian khusus dalam upaya pelestarian lingkungan hidup sekaligus pengurangan risiko bencana. Fokus pembangunan di kawasan ini diarahkan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem, melindungi keanekaragaman hayati, serta mengelola sumber daya alam secara lestari. Selain itu, intervensi kebijakan juga mencakup peningkatan kapasitas mitigasi dan adaptasi terhadap bencana alam melalui penguatan sistem peringatan dini, tata ruang berbasis risiko, serta pembangunan infrastruktur yang tangguh. Pendekatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekologis dan melindungi keselamatan serta kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah rentan.

Tabel 5.5 Arah Pengembangan Kawasan Konservasi/Rawan Bencana

Kode	Wilayah	Highlight Intervensi
E1 E2	Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana TN Batang Gadis (E1) dan TN Gunung Leuser (E2) TN Batang Gadis: Kab. Mandailing Natal TN Gunung Leuser: Kab. Langkat	Penguatan pengelolaan hutan lestari
		Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana

5.1.2.6. Provinsi Sumatera Utara

Sebagai salah satu provinsi strategis di wilayah barat Indonesia, Sumatera Utara menjadi sasaran utama berbagai intervensi pemerintah dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, dengan tujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, menurunkan tingkat kemiskinan dan stunting, serta mengoptimalkan potensi ekonomi lokal secara

berkelanjutan. Melalui pelaksanaan program-program prioritas nasional, pemerintah berupaya memperkuat ketahanan pangan dan energi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mempercepat transformasi ekonomi daerah guna mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berdaya saing, sekaligus memperkuat kontribusi Sumatera Utara dalam pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Tabel 5.6 Arah Pengembangan Provinsi Sumatera Utara Melalui Highligh Intervensi Pemerintah

Kode	Wilayah	Highlight Intervensi
	Provinsi Sumatera Utara	K/L/D yang terbangun kapabilitas pencegahan korupsi pengadaan
		Siswa Penerima Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM)
		BMHP untuk Skrining Kesehatan
		Pengadaan peralatan Kesehatan dan pendukungnya untuk Rumah Sakit (SIHREN)
		Pembangunan irigasi perpompaan pertanian
		Ternak Ruminansia Perah
		Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang tersalurkan
		Kampung Perikanan Budi Daya yang dikembangkan
		Bantuan PSU Bidang Perumahan
		Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya MBR
		Optimasi Lahan
		Penyediaan Peta Dasar Skala Besar 1:5.000 Wilayah Darat
		Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria
		Fasilitasi Pemberian Bantuan Pemberdayaan Tanah Masyarakat Penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria
		Menyusun rekomendasi hasil survei indeks kemerdekaan pers
		Memfasilitasi uji kompetensi wartawan
		Menyelesaikan pengaduan masyarakat atas kasus pers
		Menyusun rekomendasi hasil pemeringkatan Indeks Penyiaran Indonesia
		Menyusun rekomendasi pengembangan kebijakan dan sistem penyiaran



Kode	Wilayah	Highlight Intervensi
		Mengawasi lembaga penyiaran tv dan radio
		Menyiarkan informasi publik dalam memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia
		Melaksanakan pelatihan bidang jurnalistik
		Melaksanakan pelatihan SDM bidang penyiaran
		Pemajuan kerangka regulasi dan kolaborasi untuk mendorong Peran dan Kepemimpinan Perempuan dalam menjaga keberagaman dan pemenuhan HAM perempuan
		Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi K/L melalui penilaian HAM
		Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pemerintah daerah melalui penilaian HAM
		Pendidikan HAM bagi K/L/D
		Pelaksanaan ToT Diklat perancang PUU yang berspektif HAM
		Merevitalisasi bangunan Satuan PAUD yang sudah mengalami kerusakan
		Membangun unit sekolah baru satuan PAUD
		Merevitalisasi bangunan SD yang sudah mengalami kerusakan
		Membangun unit sekolah baru SD
		Merevitalisasi bangunan SMP yang sudah mengalami kerusakan
		Membangun unit sekolah baru SMP
		Merevitalisasi bangunan SMA yang sudah mengalami kerusakan
		Membangun unit sekolah baru SMA
		Menyediakan bahan dan alat pencegahan dan pengendalian TBC (TPT)
		Mendampingi lembaga dalam uji klinis vaksin TBC
		Melatih tenaga kesehatan dalam penemuan dan penanggulangan penyakit TBC
		Menyediakan obat dan perbekalan kesehatan program pencegahan dan pengendalian TBC bagi masyarakat
		Melakukan pemeriksaan dan tes konfirmasi sampel skrining bayi baru lahir
		Melakukan tes konfirmasi sampel skrining kanker leher rahim dengan HPV DNA



Kode	Wilayah	Highlight Intervensi
		Melakukan peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis
		Membina puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis
		Meningkatkan kapasitas sarana, prasarana dan alat kesehatan serta ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar di RS Daerah
		Mengembangkan layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu anak
		Meningkatkan kapasitas RS setara tipe C di kab/kota yang hanya memiliki RS tipe D
		Memberikan pembinaan BLU RS Pemerintah yang mandiri
		Sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha
		Penguatan literasi produk halal pada lembaga dan SDM jaminan produk halal, serta pelaku UMKM
		Pengawasan jaminan produk halal kepada lembaga dan SDM halal
		Sertifikasi halal untuk program makan bergizi gratis
		Pendidikan dan pelatihan teknis penanggulangan bencana
		Simulasi penanggulangan bencana
		Penilaian indeks risiko dan ketahanan daerah terhadap bencana
		Vegetasi pantai yang ditanam untuk mitigasi bencana

5.2. Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan PHTC serta Program Prioritas Provinsi Sumatera Utara

Arah pembangunan Provinsi Sumatera Utara periode 2025–2030 ditopang oleh 6 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang menjadi fokus percepatan pencapaian target pembangunan daerah. PHTC dirancang sebagai program unggulan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat dalam jangka pendek, sekaligus menjadi landasan bagi transformasi pembangunan jangka menengah dan panjang.

Untuk mendukung pencapaian visi pembangunan tersebut, Pemerintah Provinsi juga telah menetapkan 17 Program Prioritas yang berfungsi sebagai kerangka strategis pembangunan lintas sektor. Dari 17 program prioritas ini kemudian diturunkan menjadi 53 Proyek Strategis Daerah yang berperan sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup. Proyek strategis ini mencakup



penguatan infrastruktur, peningkatan layanan dasar, pengembangan sektor produktif, serta program yang mendorong daya saing daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi wilayah.

Dalam konteks RKPD Tahun 2026, seluruh program dan proyek strategis tersebut diterjemahkan ke dalam rencana aksi tahunan yang terukur, dengan menetapkan lokus pelaksanaan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Rencana aksi ini menguraikan tahapan kerja yang lebih fokus, menjadi pedoman dalam mengawal keberlanjutan program 2025 sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan tahun kedua RPJMD 2025–2029.

Peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan proyek, sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Namun, pencapaian sasaran tidak dapat berdiri sendiri, sehingga dibutuhkan dukungan aktif dari pemerintah kabupaten/kota, baik dalam sinkronisasi program, penyediaan sumber daya, maupun kolaborasi lintas wilayah. Dengan sinergi ini, percepatan pembangunan akan semakin terarah, memperkuat daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara secara menyeluruh.

Tabel berikut menyajikan rencana aksi 6 PHTC dan 17 Program Prioritas Provinsi Sumatera Utara yang diturunkan ke dalam 53 Proyek Strategis Daerah, lengkap dengan rencana aksi, lokus pelaksanaan tahun 2026, OPD pengampu, serta dukungan pemerintah kabupaten/kota.



Tabel 5.7 Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan PHTC Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
1. Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) Kepulauan Nias (2026), Kepulauan Nias dan Pantai Barat (2027), Kepulauan Nias, Pantai Barat dan Dataran Tinggi (2028), Kepulauan Nias, Pantai Barat, Dataran Tinggi dan Pantai Timur (2029) 33 Kabupaten/Kota	2026	Implementasi Program Bersekolah Gratis • Zona Kepulauan Nias	Dinas Pendidikan	Diskominfo (Publikasi Kegiatan)	- Menyediakan basis data siswa SMP/SLTP kelas IX yang akan melanjutkan SLTA - Melakukan edukasi kepada siswa SLTP agar seluruhnya melanjutkan kepada jenjang SLTA
2. Program Berobat Gratis (Probis) melalui Program Universal Health Coverage (UHC) (mulai Oktober tahun 2025, UHC+ tahun 2026 - 2030).	2026	- Pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara • 33 Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	1. Dinas Sosial (Pembinaan kepada 2. Dinsos Kabupaten/Kota untuk melakukan penginputan, pemutakhiran dan verifikasi data DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) pada Pusdatin Kemensos setiap bulannya), 3. Dinas PMD Dukcapil (Penyediaan data kependudukan Provsu) 3. Diskominfo (Publikasi Kegiatan),	- Dukungan penganggaran APBD Kabupaten/Kota untuk UHC/PBPU yaitu pada tahun 2026 sebesar 77,5%. - Melakukan penginputan, pemutakhiran dan verifikasi data DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) pada Pusdatin Kemensos setiap bulannya - Dinas PMD Dukcapil (Penyediaan data kependudukan Kabupaten/Kota)
3. Program Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pangan (JASKOP)	2026	1. Pemetaan lokasi gudang dan kebutuhan digitalisasi pencatatan pasokan. 2. Pengadaan dan renovasi gudang serta pelatihan pencatatan digital. 3. Uji coba pencatatan digital hasil panen di wilayah percontohan. 4. Pelatihan pengolahan dan pengemasan produk turunan cabai merah. 5. Pembangunan 30 unit Solar Dryer Dome (Kabupaten Batu Bara 12 unit, Kabupaten Simalungun 3 unit dan Kabupaten Deli	Dinas TPH	- Disperindag ESDM (Memfasilitasi kemitraan antara petani dan pelaku usaha) - Diskop UMKM (Mendorong koperasi tani dan mengkoordinasikan ke koperasi merah putih) - PUPR (Perbaikan akses jalan ke sentra produksi dan koordinasi dengan PUPR Kabupaten/Kota terkait akses jalan)	Disperindag Kabupaten/Kota : Melakukan fasilitasi dan pameran produk cabai kering di tingkat lokal Dinas Pertanian Kabupaten/Kota : Menyiapkan lahan dan kelompok tani (CPCL) serta pendampingan kelompok tani Dinas Koperasi Kabupaten/Kota : Mendorong



PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
		Serdang 3 unit) 6. Identifikasi Kontrak farming dengan kelompok tani 7. MOU antara BUMD dengan kelompok petani 8. Penyerapan produksi oleh BUMD 9. Tahapan pengolahan dan distribusi 10. Peningkatan kapasitas petani terhadap pengguna SDD		- BUMD Dirga Surya (Skema pembelian hasil pertanian cabai merah ketika harga turun) - Biro Pemotda (fasilitasi kerja sama antar pemerintah daerah) - Diskominfo (Publikasi Kegiatan)	pembentukan koperasi atau kelompok usaha bersama yang mengelola SDD Total Solar Dry Dome: 70
4. Digitalisasi Pelayanan Publik “Cepat, Responsif, Handal, dan Solutif” (CERDAS)	2026	Pembangunan integrasi portal aplikasi 1. Pengembangan dan Implementasi Aplikasi . 2. Integrasi Sistem (Layanan). 3. Pelatihan penggunaan Aplikasi. 4. Sosialisasi penggunaan aplikasi kepada masyarakat. Lokasi Kegiatan: • Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.	Dinas Kominfo	DPMPTSP Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Bapenda Disperindag ESDM BPSDM Biro Adpem BUMD: PDAM, Bank Sumut	1.Penyiapan dan penguatan infrastruktur digital. 2. Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di kabupaten/kota. 3.Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan Kabupaten/Kota 4. Penentuan lokasi
		Pembangunan dan implementasi serta titik pemasangan jaringan internet 1. Pengadaan Perangkat Jaringan dan akses internet.. 2. Pemasangan Titik akses Wifi. 3. Sosialisasi Penggunaan. 4. Evaluasi dan Pengembangan Sistem Mointoring. Lokasi: - 8 Kota (Medan, Binjai, Tebing Tinggi, Tanjungbalai, P. Siantar, Padangsidempuan, Sibolga, Gunungsitoli)			1. Kesiapan Infrastruktur Internet, dan Kesiapan SDM di Kabupaten/Kota. 2. Melakukan Pemeliharaan dan Pengawasan
5 a. Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi (INSTANSI)	2026	1.Penyediaan penyusunan desain Perencanaan (DED) 2.Penyusunan Leger jalan 3.Pelaksanaan penanganan Jalan Kawasan Pertumbuhan: Kabupaten Karo, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli	Dinas PUPR	OPD Dinas LHK terkait penyiapan dokumen lingkungan/ AMDAL, Dinas Kominfo untuk publikasi Media, Dinas Perhubungan terkait Fasilitas Keselamatan Jalan, Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi	1. Dukungan penanganan akses jalan dalam koridor pembangunan jalan provinsi yang mendukung kawasan prioritas. 2.Dukungan penyediaan lahan pada rencana pelebaran yang



PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
		Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Pakpak Bharat, Kota Binjai, Kota Padangsidimpuan Kawasan Komoditas Unggulan: Kabupaten Karo, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Asahan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Tapanuli Selatan Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi : Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Toba, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan Kawasan Afirmasi: Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat 4. Pelaksanaan penanganan Jembatan Kawasan Pertumbuhan: Kabupaten Simalungun, Kabupaten Samosir Kawasan Komoditas Unggulan: Kabupaten Asahan Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi : Kabupaten Mandailing Natal Kawasan Konservasi/ Rawan Bencana: Kabupaten Langkat target: jalan 202,84 km jembatan 202,90 m.			tidak sesuai dengan Ruang Milik Jalan (RUMIJA).
b. Penguatan Infrastruktur Irigasi dan Sumber Air Pertanian untuk Mendukung Swasembada Pangan Berkelanjutan	2026	Peningkatan jaringan irigasi sekunder di Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Kabupaten Simalungun; target 6.776 Ha. Kabupaten Batu Bara - DI.Cinta Maju/Cinta Damai, Kabupaten Batu Bara - DI. Purwodadi, Kota Pematangsiantar/Kabupaten Simalungun - DI. Rambung Merah, Kabupaten Batu Bara - DI.Simodong, Kabupaten Batu Bara - DI.Tanjung Muda, Kabupaten Padang Lawas	Dinas PUPR	OPD Dinas LHK terkait penyiapan dokumen lingkungan/AMDAL, Dinas TPH melakukan pemetaan terhadap kawasan swasembada dan dukungan terhadap irigasi tersier dan kuartir, benih, pupuk, alsintan, penyuluh pertanian. Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Dinas Kominfo untuk publikasi Media	- Dukungan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan jaringan irigasi tersier - Sinergi antara pemerintah daerah, kelompok tani, dan BUMDes untuk pemeliharaan jaringan irigasi - Pembangunan embung, sumur bor, dan pompanisasi untuk sumber air cadangan. - Digitalisasi sistem irigasi



PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
		Utara - DI.Padang Garugur, Kabupaten Karo - DI.Parit Lompaten, Kabupaten Mandailing Natal - DI Roburan Maga, Kabupaten Serdang Bedagai - DI. Pekan Kemis			(<i>smart irrigation</i>) berbasis sensor dan aplikasi. - Pemberdayaan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) untuk pengelolaan irigasi. - Integrasi dengan program ketahanan pangan daerah.
c. Peningkatan Kualitas Permukiman Layak, Terjangkau, dan Inklusif melalui Penyediaan Hunian Murah serta dukungan terhadap pelaksanaan program 3 juta rumah	2026	- Membentuk Tim Pelaksana, Anggaran Biaya - Survei Lokasi di setiap kabupaten/kota - Membuat Nota Kesepahaman/Nota kerja sama dengan mitra terkait (REI, Bank Sumut dan lain lain) - Penyediaan data dan/atau informasi statistika MBR dan ASN Pemerintah Daerah - Perluasan pemasaran dan kepemilikan rumah bagi MBR dan ASN - Pembangunan Fisik setiap Tahun - Mengevaluasi dampak program dan penataan lingkungan •Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Toba, Kabupaten Langkat, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara	Dinas PKP	Dinas PUPR terkait dukungan terkait Tata Ruang,Jalan, dan Keciaptakaryaan (sanitasi dan air minum), BPBD koordinasi terhadap Rehab rumah akibat bencana Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi Biro Pematda (memfasilitasi kerja sama antar Pemerintah Daerah) Badan Kepegawaian dan BP Tapera untuk penyediaan data ASN yang belum memilik rumah Dinas Kominfo untuk publikasi Media	Bupati/Wali Kota: 1. Pendataan dan Validasi Calon Penerima (BNBA = <i>by name by address</i>) 2. SK Kumuh yang dikeluarkan Bupati atau Wali Kota terkait wewenang Provinsi untuk luasan 10 – 15 Ha 3. SK Pokja Penanganan Kawasan Kumuh pada kabupaten/Kota 4. Melakukan sosialisasi kepada MBR dan ASN Dinas yang Membidangi Perumahan Rakyat (di Kabupaten/Kota): Pelaksana teknis utama di lapangan. Bertanggung jawab atas pendataan, verifikasi, penyaluran bantuan, pendampingan, monitoring, dan pelaporan langsung dari lokasi perbaikan. Dinas PUPR Kabupaten/Kota: Memberikan bantuan teknis konstruksi, menyusun RAB, dan memberikan supervisi teknis kepada pelaksana di lapangan. Dinas Sosial Kabupaten/Kota: Membantu dalam pembaruan dan verifikasi data kemiskinan di tingkat lokal.



PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
					Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan: Ujung tombak identifikasi awal calon penerima, sosialisasi langsung kepada masyarakat, memfasilitasi gotong royong, dan membantu monitoring di lapangan. Badan Kepegawaian dan BP Tapera: Penyediaan data ASN yang belum memiliki rumah
6. Bantuan Hukum dan perlindungan rakyat melalui Restorative Justice (PRESTICE).	2026	- Pembentukan kelembagaan <i>Prestice</i>, Bimbingan Teknis Paralegal Desa dan Edukasi dan Sosialisasi <i>Prestice</i> di 25 kabupaten (Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba) - Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum selain kasus KDRT dan Narkoba - Pendampingan bagi masyarakat yang berhadapan dengan kasus tindak pidana ringan - Pelatihan mediator tingkat kabupaten/kota (2 orang per kabupaten/kota, dilaksanakan di Kota Medan)	Biro Hukum	Dinas PMD Capil (memberikan data/pemetaan desa prioritas kegiatan PRESTICE yaitu desa dengan karakteristik konflik yang tinggi) Diskominfo (Publikasi),	1. Replikasi Kegiatan <i>PRESTICE</i> pada tingkat Kabupaten/Kota 2. Edukasi dan Sosialisasi <i>PRESTICE</i> di tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan ke level Kecamatan dan Desa. 3. Pendampingan dari bagian hukum kabupaten/kota dari kasus tidak pidana ringan yang ditangani oleh <i>PRESTICE</i>



Tabel 5.8 Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan Program Prioritas Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
PP1. PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM SEKOLAH UNGGULAN BERBASIS PENINGKATAN SKILL YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEBUTUHAN INDUSTRI DAN POTENSI WILAYAH DI TINGKAT LOKAL					
1. Pemenuhan 100% Fasilitasi Listrik dan Layanan Internet pada Seluruh SMA/SMK/SLB di Sumatera Utara	2026	1.Pembiayaan tagihan listrik dan Perangkat Internet 2.Pemeliharaan & <i>Maintenance</i>	Dinas Pendidikan	Disperindag ESDM (pendampingan terhadap akses listrik), Dinas Kominfo (pendampingan terhadap akses internet dan publikasi kegiatan).	Pembangunan akses jalan yang baik ke sekolah yang akan dibangun akses listrik dan layanan internet.
2. Pembangunan 4 SMA/SMK/SLB Unggulan (Nias/SMA - 2026, Asahan/SMK - 2027, Samosir/SMK – 2028, Karo/SLB - 2029)	2026	Pembangunan fisik sekolah Unggulan SMA Negeri Sukma Nias, Kajian Akademis dan Perencanaan Pembangunan Sekolah Unggulan SMK Negeri 1 Tinggi Raja Asahan Kabupaten Asahan	Dinas Pendidikan	PUPR (Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi) Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan)	- Penyediaan lahan/hibah lahan yang diperlukan - Pembangunan akses jalan yang baik dari dan ke sekolah - Menyediakan basis data siswa SMP/SLTP kelas IX yang berprestasi dan direkomendasikan masuk ke dalam sekolah unggulan
3. Rehabilitasi Ruang Kelas SMA/SMK/SLB sebanyak 490 Sekolah	2026	Pelaksanaan Fisik Tahap I – 150 Ruang Kelas (2026) di 21 Kabupaten/Kota •Medan, Binjai, Langkat, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Asahan, Tanjungbalai, Labuhanbatu, Pematangsiantar, Samosir, Toba, Sibolga, Padangsidimpuan, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padangsidimpuan, Padang Lawas Utara, Nias, Nias Selatan, Gunungsitoli, Nias Utara, Nias Barat	Dinas Pendidikan	PUPR (Appraisal/Penilaian Kerusakan, Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi) Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan)	Pembangunan infrastruktur akses jalan yang baik dari dan menuju sekolah yang akan dilakukan kegiatan rehabilitasi ruangan kelas rusak.



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
4. Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Unit Sekolah Baru	2026	Pembangunan Ruang Kelas Baru (mendesak) Tahap II (2026) sebanyak 80 Ruang Kelas Baru di 19 Kabupaten/Kota •Langkat, Binjai, Medan, Dairi, Serdang Bedagai, Batu Bara, Asahan, Simalungun, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Padangsidempuan, Nias, Nias Selatan, Nias Barat, Nias Utara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 4 Unit Sekolah Baru	Dinas Pendidikan	PUPR (Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi) Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan)	Penyediaan atau hibah Lahan dari kabupaten/kota untuk lokasi Pembangunan Ruang Kelas Baru sesuai kebutuhan. Pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan akses jalan yang baik dari dan menuju sekolah.
5. Optimalisasi Sarana dan Prasarana BLK Provsu menuju BLK Tematik Bioindustri dan Pariwisata	2026	1. Optimalisasi sarana prasarana dan pengadaan peralatan BLK 2. Revitalisasi BLK 3. Peningkatan Kompetensi SDM Instruktur dan Pengelola 4. <i>Launching</i> New BLK tematik 5. Perluasan jaringan kerja sama rekrutmen tenaga kerja, magang. Dilokasi UPTD BLK Dinas Ketenagakerjaan di Kabupaten Simalungun	DISNAKER	Dinas Perindustrian Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral: Disperindag ESDM bersifat mendukung dan lintas sektor, bukan pelaksana utama pelatihan. Maka Disperindag ESDM mendukung proyek strategis BLK, sebagai berikut: • Menjadi penghubung antara pelaku industri/perusahaan dengan Disnaker dan BLK. • Memfasilitasi program magang industri dan penempatan lulus BKL ke industri lokal. • Disperindag ESDM dapat menjadi mitra dalam pengembangan program pelatihan vokasi di BLK melalui fasilitasi pelatihan berbasis proyek industri, penyediaan instruktur ahli dari sektor industri dan akses terhadap bantuan alat pelatihan. Dinas Pendidikan: Dinas Pendidikan memiliki peran dalam	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Ketenagakerjaan, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: 1. Dukungan sarana dan prasaran pendukung sesuai kewenangan kabupaten. 2. Memfasilitasi kerja sama antara BLK dan perusahaan lokal untuk program magang, pelatihan kerja, atau penyerapan tenaga kerja berbasis potensi daerah.



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
				proyek strategis ini dalam hal pelatihan kerja, sebagai berikut: • Mendorong sinkronisasi kurikulum SMK/vokasi dengan skema pelatihan BLK agar lulusan SMK lebih siap kerja. • Memastikan kompetensi lulusan SMK sejalan dengan kebutuhan industri dan program pelatihan BLK. • Mengintegrasikan teaching factory di SMK dengan fasilitas pelatihan BLK untuk menciptakan ekosistem pelatihan <i>dual system</i>. • Mendorong peserta didik SMK mengikuti sertifikasi kompetensi melalui LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) yang terhubung dengan BLK. • Bersama Disnaker, mendata dan menyiapkan guru produktif/tenaga pelatih yang memenuhi standar pelatihan. Dinas Koperasi dan UMKM: • Mengintegrasikan hasil pelatihan BLK dengan program inkubasi usaha UMKM • Membina lulusan BLK agar mampu mengembangkan usaha mandiri berbasis keahlian yang telah diperoleh • Menyediakan pendampingan usaha lanjutan bagi peserta pelatihan BLK yang ingin berwirausaha • Menyediakan ruang inkubasi bisnis di sentra-sentra UMKM daerah yang terhubung dengan BLK	



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
				• Membantu lulusan BLK yang berwirausaha dalam promosi dan digitalisasi produk melalui <i>E-commerce</i> dan platform digital UMKM. Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: • Menyediakan ruang promosi bagi hasil karya lulusan BLK di sektor kriya, kuliner, dan <i>fashion</i> etnik melalui festival budaya, event pariwisata, serta <i>platform</i> pemasaran digital. • Menjalin kolaborasi dengan Disnaker untuk mendukung pengembangan ekosistem pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat dan budaya lokal melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan. • Memberikan dukungan fasilitasi uji kompetensi dan sertifikasi bagi peserta pelatihan BLK untuk meningkatkan daya saing dan kesiapan kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. • Bekerja sama dengan Disnaker dalam menyusun kurikulum pelatihan di BLK yang relevan dengan kebutuhan industri pariwisata dan subsektor ekonomi kreatif. Dinas Sosial: • Menjangkau dan Memberdayakan Kelompok Rentan Sosial. • Integrasi Program Rehabilitasi Sosial dan Pelatihan Kerja.	



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
				• Bersinergi dengan Disnaker dalam memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan program pelatihan BLK tepat sasaran, terutama bagi warga miskin dan rentan sosial. • Melalui tenaga pekerja sosial, Dinas Sosial dapat melakukan pendampingan bagi peserta pelatihan selama dan setelah masa pelatihan, untuk memastikan mereka mampu menerapkan keterampilan yang diperoleh, baik untuk bekerja maupun memulai usaha secara mandiri. Badan Kepegawaiaan Daerah: • BKD berperan dalam mendukung ketersediaan ASN dengan kompetensi teknis dan manajerial yang relevan, untuk memperkuat kapasitas kelembagaan BLK, baik sebagai instruktur, tenaga administrasi, maupun pengelola program pelatihan. • Melakukan pemetaan dan perencanaan kebutuhan SDM aparatur di bidang pelatihan vokasional agar sejalan dengan arah pengembangan BLK, termasuk dalam pengadaan, rotasi, dan pengembangan karier ASN yang ditempatkan di unit-unit pelatihan. • BKD dapat mengintegrasikan program pelatihan teknis fungsional dan manajerial bagi	



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
				ASN yang bertugas di lingkungan BLK ke dalam rencana pengembangan kompetensi tahunan, guna meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan pelatihan. • Berperan dalam membangun sistem penilaian kinerja yang berbasis output dan dampak, termasuk mengawasi efektivitas kinerja ASN di BLK dalam menyelenggarakan pelatihan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja. Kominfo: Dukungan Publikasi Kegiatan.	
PP2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMUDA, DAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM BERKARYA DAN BERPRESTASI					
6. Liga Olahraga Pelajar Sumut Piala Gubernur Sumatera Utara Cabang Olahraga Sepak Bola dan Voli tahun 2026 - 2030	2026	Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2026 Penguatan Pembinaan & Kemitraan Tahun 2026 • Provinsi Sumatera Utara	Dispora	Dinas Pendidikan/Cabang Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan (pembinaan, edukasi dan sosialisasi kepada pelajar untuk dapat menjadi atlet pelajar) Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan)	-Melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan liga olahraga pelajar sumut untuk cabang olahraga sepak bola dan voli. - Melaksanakan <i>side event</i> pada saat pelaksanaan liga olahraga (pameran UMKM) dan sejenisnya.
7. Pekan Olahraga Paralimpik Pelajar Sumatera Utara pada Cabang Olahraga Atletik Tahun 2026 - 2030	2026	1. Pelaksanaan Pekan paralimpik pelajar daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Cabang Olahraga para atletik tahun 2026 2. Perluasan Partisipasi & Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2026-2027	Dispora	Dinas pendidikan / Cabang Dinas Pendidikan (Edukasi dan Sosialisasi bagi Pelajar Difabel untuk dapat mendata dan membina atlet sesuai potensi dan minat siswa)	NPC Kabupaten/Kota dan Dispora Kabupaten/Kota memperkuat perekrutan dan pembinaan para atlet disabilitas pelajar di Kabupaten/Kota.



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
		•Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang		Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan)	
PP 3 KESEHATAN YANG TERINTEGRASI DI BEBERAPA TITIK KAWASAN YANG MENJADI SENTRA LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT TERPADU					
8. Digitalisasi sistem kesehatan terintegrasi (Sumut e-Health Integration system)	2026	Edukasi penggunaan Aplikasi ke Masyarakat Tahun 2026 Pengembangan Aplikasi <i>Sumut e-Health Integration System</i> Tahun 2026-2029 33 Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kominfo (Penyediaan Web,Server dan Publikasi Kegiatan)	-Penyediaan data kepesertaan JKN Kabupaten/Kota. -Sosialisasi dan edukasi <i>platform</i> kepada faskes tingkat Kabupaten/Kota.
9. Beasiswa Ikatan Dinas bagi Dokter Spesialis dan dokter spesialis residen di Wilayah Kurang Terlayani (2025 – 2030)	2026	- Pemenuhan Dokter Spesialis melalui pemberian beasiswa bekerja sama dengan Perguruan Tinggi yakni USU dan UGM - Distribusi dokter spesialis sebagai upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Primer dan Rujukan melalui dokter residen (Layanan Medis Merata) Tahun 2025-2030 •Sisa Pemenuhan 4 Dokter Spesialis Dasar + 3 Penunjang (4 RSUD di 4 Kabupaten) DTPK Kepulauan Nias RSUD Pratama Lologolu Soguna Bazato (3 Orang) Nias Barat, Pemenuhan 4 Dokter Spesialis Dasar + 3 Penunjang (4 RSUD di 4 Kabupaten), RSUD Lausimomo UPT Dinkes Kabupaten Mandailing Natal, RSUD Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas, RSUD Pintu Padang Kabupaten Tapanuli Selatan, RSUD Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, RSUD Padangsidempuan Kota Padangsidempuan. Lanjutan Sasaran 2025 : 21 Peserta	Dinas Kesehatan	Badan Kepegawaian (Pelaksanaan assesmen kompetensi dokter spesialis sesuai kebutuhan, Pembinaan Monitoring kepada Badan Kepegawaian Kabupaten/Kota agar Dokter Spesialis yang sudah dididik tidak berpindah tempat kerja) Biro Pemoatda (Fasilitasi Penyusunan Dokumen kerja sama dengan USU dan UGM) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	-Menyediakan data dokter umum yang memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh beasiswa dokter spesialis dan Mengidentifikasi jenis dan jumlah spesialis yang dibutuhkan di RSUD atau faskes daerah. - Menyiapkan surat komitmen bersama dengan para Bupati/Wali Kota yang menyatakan bahwa peserta dokter spesialis akan kembali ke daerah asal dan RSUD setempat. - Menentukan jenis spesialis yang paling dibutuhkan. - Kesiapan Sarana dan Prasarana RSUD. - Surat Penugasan & Dukungan Legal Formal.



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
					- penyediaan Akomodasi dokter residen.
10. Dukungan Pengembangan Rumah Sakit Unggulan (Pengembangan Rumah Sakit Unggulan dan Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan)	2026	Penyusunan Kajian dan Dokumen Perencanaan Peningkatan Sarana Prasarana RSUD Lau Simomo Kabupaten Karo, RSUD Mata, RSUD Paru Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan serta Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit 2026	Dinas Kesehatan	PUPR (Manajemen Konstruksi, Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	- Penyediaan Lahan dan Dokumen Legalitas. - Menyediakan tenaga non-medis, mendukung rekrutmen tenaga kesehatan, dan pemeliharaan fasilitas. - Koordinasi Lintas Pemerintahan
PP4 PEMBERANTASAN KEMISKINAN MELALUI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RENTAN SECARA MENYELURUH DAN TEPAT SASARAN					
11. Bantuan Sosial Produktif melalui Program Masyarakat Produktif (MAPRO).	2026	-Pendataan dan penetapan penerima manfaat (KK/KUBE) -Pembuatan Bank Data pensasaran masyarakat miskin sebanyak 200 KK (40 KUBE) di 4 Kabupaten/Kota: Mandailing Natal, Humbang Hasundutan, Toba, Padang Lawas Utara, Dairi serta 200 KK (UEP) di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Nias	Dinas Sosial	Disperindag dan Dinas Koperasi UMKM (Dukungan Pelatihan dan Pendampingan bagi sasaran kegiatan Mapro yaitu KUBE dan UEP, fasilitasi keikutsertaan Kelompok Usaha Bersama/Usaha Ekonomi Produktif Mapro dalam pameran/expo yang dilaksanakan oleh Dinas) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	-Dukungan penajakan calon penerima bantuan agar tepat sasaran. -Dukungan koordinasi penyiapan kegiatan pelatihan bagi calon penerima bantuan di Kabupaten/Kota. -Replikasi kegiatan serupa di Kabupaten/Kota masing-masing.
12. Pelaksanaan Program Pasar Murah Bergerak (PMB)	2026	Konsolidasi kelembagaan, integrasi sistem informasi daerah; Pelaksanaan Pasar Murah Bergerak (PMB) Lokasi: Mandailing Natal (kemiskinan struktural), Tapanuli Utara (akses terbatas), Nias Barat (isolasi logistik), Humbang Hasundutan (wilayah dataran tinggi),	DISPERINDAG ESDM	• Dinas TPH: Data pangan strategis dan penyediaan stok • Dinas Perhubungan: Transportasi logistik • Dinas Sosial: Data P3KE <i>by name by address</i> (untuk	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, sementara



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
		Pakpak Bharat (akses sangat terbatas), Dairi (wilayah perbatasan), Kabupaten Batu Bara (wilayah pesisir), Toba (hinterland), Samosir (wilayah tertutup), Labuhanbatu Selatan (kemiskinan tinggi), Nias Selatan (akses sulit), Padang Lawas (rawan logistik), Padang Lawas Utara (wilayah sulit distribusi), Tapanuli Tengah (akses dan harga tinggi), Langkat (distribusi padat dan IHK)		menentukan titik titik PMB dilakukan) • Dinas Koperasi & UMKM: Pelibatan UMKM dan Koperasi dalam penyediaan stok • Biro Perekonomian: pelibatan TPID untuk menghitung dampak terhadap pengendalian inflasi • Dinas Kominfo: Publikasi Pelaksanaan • Bappelitbang: Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan • Inspektorat: Pengawasan Pelaksanaan	kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan (Tahun 2025-2030): 1. Pendataan kecamatan dan jumlah penduduk miskin dan rawan miskin; 2. Pendataan jumlah KUMKM penyedia Bahan Kebutuhan Pokok; 3. Pengawasan distribusi dan harga bahan kebutuhan pokok; 4. kerja sama antar kabupaten dalam penyediaan Bahan Kebutuhan Pokok 5. Penyediaan lokasi untuk pelaksanaan; 6. Monitoring dan evaluasi
13. Perlindungan Sosial bagi Tenaga Kerja Rentan (Subsidi BPJS Ketenagakerjaan)	2026	Perluasan kepesertaan pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.645 dengan skema penganggaran 20% Provinsi dan 80% Kabupaten/Kota -33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2	DISNAKER	Dinas Sosial : • Dinas Sosial berperan dalam memberikan data dukung DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) untuk memastikan penerima termasuk dalam kategori penerima bantuan. • Pendataan dan Validasi Calon Penerima, Mengelola dan memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar penetapan penerima bantuan iuran BPJS. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil : • Penyediaan dan Verifikasi Data Identitas • Menyediakan data kependudukan yang valid (NIK,	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Ketenagakerjaan, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: 1. Mendukung pelaksanaan agar bisa mencapai target Universal Coverage Jamsostek (UCJ) sebesar 60% sesuai RPJMD 2025-2029. 2. Memberikan sosialisasi untuk masyarakat, khususnya untuk tenaga kerja rentan dan masyarakat yang berada di garis kemiskinan. 3. Pengalokasian DBH sawit dan APBD dengan persentase pembagian 80 persen Kabupaten/Kota dan 20



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
				KK, KTP) sebagai prasyarat utama pendaftaran peserta BPJS Ketenagakerjaan. • Melakukan verifikasi dan sinkronisasi data dengan sistem BPJS, DTKS (Dinas Sosial), dan lembaga lain untuk memastikan data pekerja rentan terverifikasi secara administratif. • Dukungan Pemutakhiran Data DTKS, Bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk memastikan kesesuaian dan kelengkapan data identitas dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), yang digunakan untuk menetapkan penerima bantuan iuran BPJS. • Membantu mempercepat proses registrasi atau koreksi data calon penerima manfaat yang belum memiliki dokumen kependudukan lengkap. BPJS Ketenagakerjaan : BPJS Ketenagakerjaan berperan menyelenggarakan perlindungan sosial bagi pekerja melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK): Perlindungan atas risiko kecelakaan selama bekerja. • Jaminan Kematian (JKm): Santunan kepada ahli waris pekerja yang meninggal. • Jaminan Hari Tua (JHT): Tabungan jangka panjang bagi pekerja saat pensiun. • Jaminan Pensiun (JP): Penghasilan berkala untuk pekerja setelah pensiun.	persen provinsi untuk perlindungan pekerja rentan miskin ekstrim desil 1 dan 2.



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
				Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP): Bantuan uang tunai, akses informasi kerja, dan pelatihan bagi pekerja yang terkena PHK. Kominfo: Publikasi Kegiatan	
14. Revitalisasi, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Panti Sosial Provinsi	2026	Penyusunan dokumen <i>appraisal</i>/penilaian kerusakan bekerja sama dengan Dinas PUPR Penyusunan dokumen perencanaan (jasa konsultan perencanaan) untuk 13 panti sosial Bimbingan keterampilan dasar bagi PPKS/penghuni panti Pemberian bantuan sosial bagi PPKS/penghuni panti sosial yang akan memasuki masa terminasi		PUPR (Dokumen <i>appraisal</i>, pendampingan, monitoring dan evaluasi untuk revitalisasi panti sosial) Disperindag, Dinas Koperasi UMKM, Disnaker (Dukungan Pelatihan dan Keterampilan Kerja bagi sasaran Penghuni Panti) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	- Kabupaten/Kota mendukung pelaksanaan pelatihan bimbingan mental, dan pendidikan paket A/B/C bagi penerima manfaat yang dirujuk dari panti sosial provinsi khususnya panti anak dan remaja. - Kabupaten/Kota bersama Provinsi melakukan pemantauan, evaluasi atas keberlanjutan penerima manfaat.
PP 5 PENGUATAN STABILITAS MAKRO EKONOMI DAN KESINAMBUNGAN FISKAL DAERAH					
15. Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Pertanian dan pariwisata	2026	KEK Pertanian - Penentuan lokasi pengusulan KEK pertanian - Pengusulan KEK Pariwisata melalui proses kelengkapan dokumen: - Tata lokasi - Rencana tata ruang KEK - Rencana sumber pembiayaan - Studi kelayakan ekonomi penguasaan lahan 50% - Persetujuan Pemerintah Kabupaten - Pembentukan kelembagaan badan usaha pengelolaan KEK.	DISBUDPAREKRAF DAN DINAS KETAPANG TPH	- Bappelitbang: Menyelaraskan rencana pengajuan KEK Pariwisata dan Pertanian dengan RPJMD, RTRW, RPJPD, dan RIPPARNAS/RIPPARDA, Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan - Dinas Lingkungan Hidup: Kajian AMDAL dan pengelolaan lingkungan - Dinas Ketenagakerjaan: Peningkatan Capacity Building	2026: • Persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kawasan Danau Toba dan Penetapan Lokasi. • Penetapan Pebup RTRW; Kesesuaian Dokumen RTRW dan RDTR.



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
		KEK Pariwisata: Penyusunan Kajian Peningkatan Status KSPN Danau Toba menjadi KEK Pariwisata dan Penyusunan <i>Masterplan</i> 1. Penentuan lokasi pengusulan KEK Pariwisata 2. Pengusulan KEK Pariwisata melalui proses kelengkapan dokumen: a. Tata lokasi b. Rencana tata ruang KEK c. Rencana sumber pembiayaan d. Studi kelayakan ekonomi penguasaan lahan 50% e. Persetujuan Pemerintah Kabupaten 3. Pembentukan kelembagaan badan usaha pengelolaan KEK		Pariwisata dan Pertanian • Dinas Pendidikan: Penguatan Vokasi SMK Pariwisata dan Pertanian • Dinas PUPR: Percepatan Perda RTRW Perubahan, sinkronisasi lokasi KEK pada RTRW • Dinas Kominfo: Dukungan Publikasi Kegiatan • Biro Hukum: Penetapan Regulasi Perda/Pergub • DPMPSTP: Fasilitasi perizinan	
16. Penguatan Hilirisasi Komoditas Unggulan di Kawasan Industri Sumatera Utara	2026	1. Hilirisasi komoditas Unggulan Sumatera Utara Peningkatan Kapasitas Produksi IKM dengan Produk Hilirisasi, Riset inovasi produk dan teknologi tepat guna • Kelapa: VCO, Santan Kemasan, Minyak kelapa kopra (<i>cooking oil</i>); Gula Kelapa/gula semut, Kelapa kering, arang aktif dari batok kelapa, Produk berbasis serat sabut (keset, geotekstil, jok mobil) • Cabe: Cabe Kering, Cabe Bubuk, Saos (cabe bawang tomat), saos pasta; Produk Turunan untuk Industri Non-Pangan (Ekstrak capsaicin → bahan baku industri farmasi, kosmetik (krim pereda nyeri, pelangsing), pestisida organik; Oleoresin cabai → pewarna dan pemberi rasa pedas alami untuk industri makanan & minuman; <i>Spray</i> pengusir hama berbahan <i>capsaicin</i> • Kopi : Minuman kopi kemasan siap minum (<i>RTD Coffee</i>) — botol/ <i>sachet/cup</i> ; Kopi instan (<i>pure instant coffee, 3-in-1</i> ,	DISPERINDAG ESDM	• Dinas TPH: Peningkatan Produksi Cabe melalui Sarprodi; Pemberian Bibit Cabai varietas tahan hama & cocok untuk pengeringan, <i>capacity building</i> bagi petani • Dinas Perkebunan dan Peternakan: Peningkatan Produksi Kelapa, Aren dan Kopi melalui Sarprodi; Pemberian Bibit Kelapa genjah, Kopi Unggu, Aren, <i>capacity building</i> bagi petani • Dinas PUPR: Penguatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan • Dinas Kominfo: Dukungan publikasi kegiatan	Peningkatan <i>capacity building</i> pada IKM (kelapa, cabe, kopi, aren); menyusun regulasi pengembangan hilirisasi.



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
		<i>cappuccino sachet</i> ; <i>Drip bag coffee</i> — kopi bubuk dalam kantong celup; <i>Cold brew</i> • Aren: Gula Aren, Sirup Aren, Tuak, manisan kolang kaling, Sapu ijuk, sikat, keset, anyaman kerajinan dari lidi atau serat kayu/daun aren • Kelapa: Kabupaten Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara dan Asahan • Kopi: Kabupaten Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, dan Simalungun • Aren: Kabupaten Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal • Cabe: Kabupaten Karo dan Kabupaten Batu Bara			
17. BUMD Reform Program (Penguatan Peran BUMD sebagai Motor Ekonomi)	2026	Melakukan audit menyeluruh, penilaian kesehatan BUMD pada tahun 2025, dan peningkatan kesehatan; Menyusun roadmap reformasi dan melakukan penyesuaian bentuk hukum perusahaan sesuai dengan perundangan dan bisnis kerja serta SDM; Menerapkan GCG dengan praktik terbaik, menumbuhkan ekosistem BUMD, kerja sama BUMD antar daerah dan sistem pengukuran kinerja berbasis digital • 1 BUMD sehat (PT. Perkebunan Sumatera Utara (Perseroda))	Biro Perekonomian	Bappelitbang: Penyusunan konsep dan perencanaan kesehatan BUMD, GCG Biro Hukum: Percepatan fasilitasi regulasi Biro PemOtda: Fasilitasi Kerja sama Diskominfo: Publikasi Kegiatan Inspektorat: Audit BUMD	-
18. Pemanfaatan Aset barang milik daerah melalui kerja sama ekonomi	2026	• Pemanfaatan aset Barang Milik Daerah yang berdasarkan hasil inventarisasi (target 2 Barang Milik Daerah yang termanfaatkan) • Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi • Penyusunan Regulasi penggunaan web aplikasi pemanfaatan Barang Milik Daerah • Peningkatan kapasitas dan kuantitas SDM penilai barang	BKAD	Bapenda Provsu: Dukungan dalam proses bisnis pendapatan melalui pemafaatan aset BMD dengan kerja sama ekonomi Bappelitbang Provsu: Dukungan dalam penyusunan konsep dan perencanaan Diskominfo: Dukungan dalam	Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota pada pelaksanaan pengamanan BMD dalam penerbitan SKT lahan (Surat Keterangan Kepemilikan Lahan) dari Pemerintah Setempat (Kelurahan atau Kepala Desa).



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
				penyediaan web aplikasi dan promosi OPD Pengguna BMD: Dukungan dalam inventarisir dan pengamanan aset serta pemeliharaan BMD	
PP.6 PENGEMBANGAN EKONOMI HIJAU DAN BIRU					
19. Pengembangan Kawasan Perkebunan (Kelapa, Kopi, Aren)	2026	- Verifikasi CPCL dan sosialisasi awal kepada kelompok pekebun di lokasi intervensi pengembangan kawasan yang dilaksanakan mulai bulan Maret - Pemberian benih pada komoditas kelapa sebanyak 40.000 batang benih, 80 ton pupuk organik dan 10 paket alat pasca panen pembuatan kopra dan VCO kepada 10 kelompok pekebun di Kabupaten Nias Barat. pemberian benih pada komoditas kopi sebanyak 200.000 batang benih, 400 ton pupuk organik dan 40 kotak pestisida nabati dan 4 paket mesin pasca panen pembuatan bubuk kopi kepada 10 kelompok pekebun di Kabupaten Humbang Hasundutan, Pemberian benih pada komoditas aren sebanyak 40.000 batang benih, 80 ton pupuk organik dan 10 paket alat pengolahan pembuatan gula semut kepada 10 kelompok pekebun di Kabupaten Tapanuli Selatan dilaksanakan pada bulan Oktober	DISBUNAK	1. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Provinsi Sumatera Utara: Memberikan pelatihan pengemasan izin edar hasil produk, pelatihan pengemasan produk dan sertifikasi halal serta pemberian alat untuk mengolah hasil produksi dalam rangka hilirisasi hasil Perkebunan kelapa seperti alat untuk menjadikan air kelapa menjadi minyak kelapa/VCO, dan <i>coconut milk</i>, kemudian biji kopi menjadi kopi bubuk dan kopi ekstrak, kemudian aren menjadi gula aren dan bioetanol 2. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara: Pembentukan dan pelatihan UMKM bagi kelompok pekebun dan alat pengolah hasil produksi kelapa, kopi dan aren; 3. Dinas PMD Dukcapil: Untuk pembentukan dan pemberdayaan BUMDes di lokasi intervensi pengembangan kawasan perkebunan 4. Diskominfo: Untuk publikasi media	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: 1. Dukungan data CPCL di lokasi intervensi. 2. Melakukan pembinaan dan pelatihan peningkatan produksi atau peningkatan pasca produksi di lokasi intervensi pengembangan kawasan perkebunan.



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
20. Pengembangan Kawasan Unggulan Perikanan Tangkap dan Budidaya	2026	1. Pembuatan master plan 2. Pembangunan sarana prasana produksi a. Perikanan tangkap: sampan, jala dan dermaga b. Perikanan budidaya: revitalisasi kolam, benih, pakan, kincir, saluran air, automatic feeder • Perikanan tangkap: kawasan Tapanuli Tengah-Sibolga, kawasan Asahan-Tanjungbalai, Nias Utara; • Perikanan budidaya: Kabupaten Simalungun, Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai.	DISKANLA	• Dinas Perindustrian dan Perdagangan – Pengolahan, pemasaran, dan ekspor produk perikanan. • Dinas Koperasi dan UKM – Penguatan kelembagaan usaha nelayan/pembudidaya. • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang – Pembangunan infrastruktur pendukung (jalan dan pelabuhan). • Dinas Kominfo: Publikasi, sosialisasi, dan edukasi masyarakat	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: - Pendataan kelompok nelayan dan pembudidaya Kabupaten/Kota; - Klasterisasi; - Sosialisasi dan Edukasi; - Replikasi di daerah yang sama.
21. Pengawasan Konservasi Laut SEMESTA (Pemberdayaan Nelayan Sebagai Pasukan Penjaga Laut)	2026	Laporan Patroli dan Peralatan + Aplikasi e-Mawas • Kabupaten/kota dan perairan Pantai Timur dan Barat Sumatera Utara.	DISKANLA	• BAPPELITBANG: Integrasi program SEMESTA dalam perencanaan daerah. • Dinas Lingkungan Hidup Provsu: Kebijakan dan pemantauan kualitas lingkungan laut. • Dinas Perhubungan Provsu: Dukungan transportasi laut dan keselamatan pelayaran patroli. • Satpol PP Provsu: Penegakan perda terkait konservasi laut. • Dinas Pariwisata Provsu: Sinergi dengan wisata bahari berkelanjutan. • Dinas Kominfo Provsu: Publikasi, sosialisasi, dan edukasi masyarakat. • Dinas Koperasi & UKM Provsu: Penguatan kelembagaan nelayan pengawas. • Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provsu:	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: - Pendataan Nelayan Kabupaten/Kota; - Klasterisasi; - Sosialisasi dan Edukasi.



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
				Kesiapsiagaan dan tanggap darurat di laut. • Inspektorat: Pengawasan dan pendampingan jalannya program	
22. Rehabilitasi Mangrove dan Pesisir berbasis Masyarakat	2026	1. Pembentukan kelompok tani hutan 2. Melakukan penanaman mangrove seluas 18 Ha di kabupaten Langkat 3. kegiatan <i>Mangrove Fest</i> berkolaborasi dengan NGO/Pemerhati Lingkungan 4. Kolaborasi penanaman mangrove bersama NGO/Pemerhati Lingkungan	DLHK	1. Dinas Kominfo - Media massa - Publikasi kegiatan 2. Kementerian Kehutanan - Penyediaan Regulasi - Koordinasi program-program	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui DLHK dengan dukungan <i>Stakeholder</i> terkait diantaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kementerian Kehutanan, Kelompok Masyarakat Pesisir dan LSM/NGO/pemerhati Lingkungan. adapun dukungan kabupaten/kota pada kegiatan ini diantaranya: 1. Kolaborasi <i>Multistakeholder</i> dalam kegiatan; 2. Pemberdayaan Masyarakat: Program rehabilitasi yang sukses tidak hanya tentang menanam pohon, tapi juga tentang memberdayakan Masyarakat; 3. Membantu dalam proses pengadaan lahan dan memastikan status hukum lahan tersebut jelas; 4. Pemerintah kabupaten melakukan pemantauan dan pemeliharaan secara berkala untuk memastikan pertumbuhan mangrove berjalan baik dan program mencapai tujuannya.



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
23. Pengembangan Energi Baru Terbarukan (PLTS Pompa Air Untuk Irigasi Pertanian/PLTA Mikrohidro dan lainnya)	2026	Evaluasi lokasi baru berdasarkan hasil proyek sebelumnya, perencanaan dan perizinan, desain teknis dan RAB, pengadaan peralatan dan pekerjaan sipil, instalasi dan uji coba sistem, pelatihan petani, monitoring awal, serta evaluasi dan serah terima akhir proyek - Kawasan pertanian yang memiliki keterbatasan irigasi di Sumatera Utara	DISPERINDAG ESDM	TPH : Pembinaan Kelompok Petani dalam penggunaan PLTS . • Bappelitbang: Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan • Inspektorat: Pengawasan Pelaksanaan • Dinas Kominfo: Dukungan Publikasi Kegiatan	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan untuk Tahun 2025-2030: 1. Data Kelompok Tani (CPCL); 2. Data penentuan Lokasi; 3. Pengadaan lahan; 4. Data produksi pertanian, kondisi air; 5. Data <i>readiness criteria</i> .
PP 7 KETAHANAN PANGAN MELALUI PENGUATAN NILAI BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL AGAR DIVERSIFIKASI HASIL PERTANIAN MENJADI LEBIH PRODUKTIF DAN BERDAMPAK PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LOKAL					
24. Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Unggulan Padi, Jagung, Cabai Merah, dan bawang merah	2026	1. Pengembangan kawasan unggulan padi, jagung, cabai merah dan bawang merah 2. Pembangunan sarana dan prasarana produksi pertanian Kawasan Padi: Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan dan Kabupaten Serdang Bedagai. Kawasan Jagung: Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Tapanuli utara dan Kabupaten Karo Kawasan Cabai Merah: Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kabupaten	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan dan TPH	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memiliki peran krusial dalam pembangunan infrastruktur dasar pendukung pertanian. Ini mencakup pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, jalan usaha tani, serta infrastruktur penunjang lainnya yang memperlancar distribusi hasil panen dan aksesibilitas kawasan pertanian. Penataan ruang juga menjadi fokus penting untuk	• Memfasilitasi penyediaan benih unggul, pupuk, dan alat pertanian dasar. • Mendorong sinergi antar pemangku kepentingan lokal (petani, penyuluh, BUMDes). • Memfasilitasi pembangunan/peningkatan akses jalan produksi di kawasan unggulan. • Mendukung pembangunan fasilitas pascapanen:



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
		Batu Bara, dan Kabupaten Deli Serdang Kawasan Bawang Merah: Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir dan Kabupaten Simalungun		memastikan kawasan pertanian unggulan tidak terganggu oleh alih fungsi lahan. 2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) turut berperan dalam mendorong hilirisasi produk pertanian melalui pengembangan industri pengolahan hasil tani, seperti pengeringan, pengemasan, dan pengolahan lanjutan produk padi, jagung, cabai, dan bawang merah. Di sisi perdagangan, dinas ini memastikan akses pasar yang lebih luas dan stabil melalui promosi, fasilitasi perdagangan, dan penguatan sistem rantai pasok. Adanya kegiatan Gerakan pangan Murah membuat Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dapat berkolaborasi dengan Dinas ketahanan Pangan dan TPH dalam menjalankan kegiatan ini 3) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) memegang peranan sebagai koordinator perencanaan strategis lintas sektor. Bappelitbang merumuskan arah kebijakan, menyusun rencana aksi, serta memastikan sinergi antar-dinas dalam pengembangan kawasan unggulan. 4) Diskominfo (Publikasi)	gudang, alat pengering, rumah sortasi. • Mengkoordinasikan petani/UMKM untuk mengikuti pelatihan sertifikasi ekspor dan standar internasional. • Memberikan laporan lengkap atas capaian program, kendala, dan peluang lanjutan. • Replikasi di daerah yang sama



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
25. Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Peternakan unggulan	2026	- Verifikasi CPCL dan sosialisasi awal kepada kelompok peternak di lokasi intervensi pengembangan kawasan yang dilaksanakan mulai bulan april - Pemberian 100 ekor sapi potong kepada 10 kelompok tani/ peternak di Kabupaten Serdang Bedagai, 30 ekor sapi perah beserta pembangunan kandang dan alat pengolah susu kepada 3 kelompok tani/ peternak di Kabupaten Karo, 200 ekor kambing kepada 10 kelompok tani/ peternak, dan 100 ekor babi kepada 10 kelompok tani/ peternak di Kabupaten Nias dilaksanakan pada bulan September	DISBUNAK	1. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Provinsi Sumatera Utara: Memberikan pelatihan pengemasan izin edar hasil produk, pelatihan pengemasan produk dan sertifikasi halal serta pemberian alat untuk mengolah hasil produksi 2. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara: Koordinasi pembentukan dan pelatihan UMKM bagi kelompok peternak 3. Dinas PMD Dukcapil: Untuk pembentukan dan pemberdayaan BUMDes di lokasi intervensi pengembangan kawasan peternakan 4. Diskominfo: Untuk publikasi media	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: 1. Dukungan data CPCL di lokasi intervensi. 2. Melakukan Pembinaan dan pelatihan peningkatan produksi atau peningkatan pasca produksi di lokasi intervensi pengembangan kawasan peternakan. 3. Pemberian izin usaha untuk koperasi, UMKM, BUMDes yang mengolah hasil produksi berada di Kawasan peternakan. 4. Replikasi di daerah yang sama.
26. Program Pengembangan Bibit Unggul Pertanian	2026	Tahap Uji Multilokasi, MT (Musim Tanam): Penanaman di 5 Kabupaten • Deli Serdang, Langkat, Simalungun, Serdang Bedagai, Asahan dan Balai Besar Perakitan Dan Balai Besar Modernisasi Pertanian Tanaman Padi - Subang Provinsi Jawa Barat	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH Provinsi berperan sebagai inisiator utama program. Mereka bertanggung jawab atas perumusan kebijakan, penyediaan alokasi anggaran, serta koordinasi lintas sektor di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dalam implementasinya,	PT. Dirga Surya : memasarkan produksi bibit unggul padi	Dinas Pertanian Kabupaten mempromosikan dan menggunakan bibit unggul padi varietas baru.



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
			mereka juga menetapkan lokasi uji multilokasi dan mendukung pelepasan varietas secara resmi		
27. Fasilitas Akses Permodalan Terhadap Kelompok Tani	2026	Mulai pelaksanaan Temu Pembiayaan tahap I dan II, pendampingan realisasi kredit, pelatihan manajemen keuangan bagi kelompok tani penerima pembiayaan, serta monitoring awal terhadap usaha penerima kredit. • 33 Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH bertindak sebagai penghubung antara kelompok tani dengan lembaga keuangan formal seperti bank, koperasi, serta lembaga penjaminan kredit. Melalui penyediaan data kelompok tani, pelatihan manajemen usaha tani, serta pembentukan kelembagaan petani yang kuat, dinas membantu petani memenuhi persyaratan administratif dan teknis agar layak mengakses program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan skema pembiayaan pertanian lainnya.	a) Dinas Koperasi dan UKM memiliki peran sentral dalam penguatan kelembagaan kelompok tani melalui pembinaan koperasi tani dan UMKM berbasis pertanian. Dinas ini dapat memfasilitasi akses permodalan bagi kelompok tani melalui penguatan koperasi simpan pinjam, pelatihan manajemen usaha tani, hingga menjembatani kerja sama antara koperasi dan lembaga keuangan. b) Disperindag ESDM berkontribusi dalam mendorong hilirisasi produk pertanian dan menjaga stabilitas harga hasil tani. Melalui penguatan rantai nilai dan pasar hasil tani, dinas ini dapat membuka peluang tambahan pendapatan bagi petani yang dapat digunakan sebagai modal atau premi asuransi. c) Dinas Kominfo memainkan peran dalam penyebarluasan informasi terkait program bantuan iuran premi asuransi dan akses permodalan. Melalui berbagai saluran komunikasi digital dan non-digital, Kominfo dapat menjamin transparansi program, meningkatkan literasi digital kelompok tani, dan	Memetakan kelompok tani yang layak dan potensial untuk memperoleh akses permodalan, berdasarkan data luas lahan, komoditas yang diusahakan, serta rekam jejak kelembagaan kelompok.



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
				mendorong penggunaan teknologi informasi dalam pengajuan permodalan dan asuransi pertanian. e) Dinas Pemdesdukcapil memiliki peran strategis dalam verifikasi dan validasi data kependudukan serta kelembagaan desa sebagai basis penyaluran bantuan. Melalui data kependudukan dan basis kelompok tani di desa, Pemdesdukcapil memastikan agar bantuan permodalan maupun iuran premi asuransi diberikan secara tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil kelompok tani. f) Diskominfo (Publikasi)	
PP 8 PARIWISATA YANG MENGGERAKKAN POTENSI ALAM LOKAL DI PEDESAAN DAN PERKOTAAN DENGAN MELIBATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT SECARA LANGSUNG (KOMUNITAS, PEMERINTAH DAERAH/DESA/KELURAHAN DAN PENGUSAHA LOKAL)					
28. Dukungan terhadap Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba	2026	Pemetaan Kegiatan Strategis yang akan dilaksanakan melalui Rencana Aksi Tahap II RIDPN & Konsolidasi dengan Pemerintah Pusat; Pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Tahap II RIDPN: 1. Pelaksanaan pilar Tata kelola dan	DISBUDPAREKRAF	DISKOMINFO: Publikasi Media DISBUDPAREKRAF: Penguatan Atraksi Budaya dan Pariwisata; Pengembangan SDM dan Ekonomi Kreatif; Promosi dan Pemasaran Destinasi;	1. Memastikan keselarasan Program/Kegiatan dalam Rencana Aksi Tahap II telah sesuai dengan Dokumen Perencanaan di daerah (RPJMD Kabupaten & RKPD Kabupaten) dan



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
		Kelembagaan antara lain: • 8 Kabupaten se- Kawasan Danau Toba		Pengembangan Infrastruktur dan Amenitas Pariwisata; Kolaborasi dan Sinkronisasi Program; Penguatan Tata Kelola Destinasi; BPODT (Badan Pelaksana Otorita Danau Toba): Koordinasi Pengelolaan Kawasan Pariwisata Strategis; Pengembangan infrastruktur dan Investasi; Promosi dan Branding Kawasan; Pengembangan SDM dan Ekosistem Wisata BAPPELITBANG (Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah): Integrasi Perencanaan Pengembangan DPP Danau Toba; Sinkronisasi Program Daerah dengan Nasional; Litbang & Evaluasi Program Pengembangan Pariwisata; Dukungan Kebijakan Inovatif & Kolaboratif Sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumut Nomor 188.44/159/KTPS/2019 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja P3TB Provinsi Sumatera Utara, seluruh Opd Pemprov yg termasuk dalam SK Gubsu tersebut berperan dalam mendukung Pengembangan DPSP Danau Toba sesuai dengan Rencan Aksi yang disusun	Integrasi RIPDN kedalam renja OPD; 2. Menyusun rencana aksi tahunan; 3. Memastikan ketersediaan anggaran dalam mendukung Pengembangan DPSP Danau Toba; 4. Penyediaan Lahan yang <i>Clean & Clear</i> (jika terdapat pembangunan fisik); 5. Pembentukan Desa Wisata sesuai dengan potensi; 6. Pembentukan Tata Kelola / Kelembagaan untuk Desa Wisata; 7. Pendampingan Desa Wisata; 8. Pendataan Potensi Unggulan Daerah di bidang Kebudayaan, Pariwisata & Ekonomi Kreatif; 9. Pendataan jumlah Pelaku Usaha Industri Pariwisata (Usaha Penyediaan Makan-Minum, Penyediaan Akomodasi (<i>Homestay/Hotel</i>), Penyedia Jasa Transportasi, Penyedia Jasa <i>Travel Agent</i>); 10. Pendampingan Pelaku Usaha Pariwisata; 11. Pelaksanaan <i>Event</i> Budaya, Pariwisata dan Ekonomi Keratif berskala Nasional.
29. Pengelolaan dan Penataan Kawasan Toba	2026	1. Pembangunan Visibilitas (<i>Gate</i> , Panel Informasi, <i>Letter Plank</i>) di 8 Geosite (Pusuk Buhit; Tele; Hutatinggi-Sidihoni;	DISBUDPAREKRAF	1. DISBUDPAREKRAF: Penyaluran Belanja Operasional BP TCUGGp; Pembangunan	1. Memastikan ketersediaan dukungan anggaran dalam pengelolaan <i>Geosite</i> di masing-



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
Caldera UGGp dan Kawasan Geopark lainnya		Ambarita-TukTuk; Batu Hoda, (Sipiso-piso; Silalahi-Sabungan; Muara-Sibandang) 2. Tindak lanjut pengusulan 2 geosite baru rekomendasi revalidasi UNESCO: a. Kajian b. Pengusulan 3. Penyusunan Bahan Promosi (<i>Leaflet</i> dan Video Promosi) khusus untuk Geosite, Pelatihan dan edukasi terkait Geopark bagi <i>Tour Guide</i> dan pemenuhan Rekomendasi UNESCO Pusuk Buhit; Tele; Hutatinggi-Sidihoni; Ambarita-TukTuk; Batu Hoda, (Sipiso-piso; Silalahi-Sabungan; Muara-Sibandang)		<i>Visibilities di Geosite</i>; Pelatihan dan Pembinaan Pelaku Pariwisata dan Pengelola Desa Wisata; Identifikasi dan Penetapan Cultural Heritage di Kawasan Geopark; Melaksanakan <i>Event Geofest</i>. 2. DINAS Koperasi &UMK: Melakukan Pelatihan & Pembinaan UMKM terutama di Kawasan <i>Geosite</i>; 3. Dinas Pendidikan: Melaksanakan kegiatan <i>Geopark to School</i> dan edukasi terkait Geopark kepada pelajar; 4. Dinas PUPR: Peningkatan kualitas jalan/jembatan di ruas jalan Provinsi yang menghubungkan antar geosite; 5. Bappeltbang: Melaksanakan penelitian terkait <i>Geological Heritage/Natural/Biological Heritage/Cultural Heritage</i> di Kawasan Toba Caldera UGGp maupun di Kawasan Geopark yang baru; 6. BPBD: Mitigasi Bencana & Sosialisasi; 7. Dinas LHK: Pelestarian Hutan dan ekosisten di Kawasan Danau Toba 8. Dinas Kominfo: Publikasi kegiatan;	masing Kabupaten; 2. Penyusunan muatan Lokal; 3. Bekerja sama dengan BP dalam melaksanakan sosialisasi & edukasi kepada Masyarakat, Pelaku Wisata, Pelajar dan ASN tentang <i>Geopark</i>; 4. Melaksanakan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM terutama dalam pengembangan Geoproduk; 5. Mengidentifikasi dan menginventarisasi serta melakukan penelitian terkait potensi <i>Geological Heritage, Biological/Natural Heritage</i> dan <i>Cultural Heritage</i>; 6. Rutin melaksanakan <i>Event GeoFest</i>; 7. Menyusun kajian awal terkait Kawasan Geopark baru; 8. Pembentukan Desa Wisata sesuai dengan potensi; 9. Pembentukan Tata Kelola / Kelembagaan untuk Desa Wisata; 10. Pendampingan Desa Wisata; 11. Pendataan jumlah Pelaku Usaha Industri Pariwisata (Usaha Penyediaan Makan-Minum, Penyediaan Akomodasi (<i>Homestay/Hotel</i>), Penyedia Jasa Transportasi, Penyedia Jasa <i>Travel Agent</i>);



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
					12. Pendampingan Pelaku Usaha Pariwisata.
30. Pembentukan & Pengembangan Kawasan Strategis Budaya, Parawisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi yang Terintegrasi (TATABUSE, SIBANDAN, SIPUAN, KARDAPAK dan BAHLIKE)	2026	Penataan Kawasan, Pembinaan, Pelatihan & Pendampingan bagi BUMDes/Pokdarwis/Pengelola Desa Wisata/UMKM dan Peningkatan Aksesibilitas Kawasan Strategis SIBANDAN	DISBUDPAREKRAF	1. Dinas Koperasi & UMKM: Pelatihan dan Pembinaan kepada UMKM di Kawasan. 2. Dinas PUPR: Pembangunan Kawasan (jika ada pembangunan fisik); Peningkatan Akses Ruas Jalan Provinsi menuju Kawasan. 3. Dinas PMD : Pelatihan dan Pembinaan pengelola BUMDES Wisata 4. Dinas Kominfo : Penyediaan Fasilitas Digital di Kawasan; Publikasi Kegiatan	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, sementara kabupaten/kota berperan dalam: - Memastikan ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan Proyek Strategis; - Penyediaan Lahan yang <i>Clean & Clear</i> (jika terdapat pembangunan fisik); - Pembentukan Desa Wisata sesuai dengan potensi; - Pembentukan Tata Kelola / Kelembagaan untuk Desa Wisata; - Pendampingan Desa Wisata; - Pendataan Potensi Unggulan Daerah di bidang Kebudayaan, Pariwisata & Ekonomi Kreatif; - Pendataan jumlah Pelaku Usaha Industri Pariwisata (Usaha Penyediaan Makan-Minum, Penyediaan Akomodasi (<i>Homestay</i>/Hotel), Penyedia Jasa Transportasi, Penyedia Jasa <i>Travel Agent</i>); - Pendampingan Pelaku Usaha Pariwisata; - Pendataan dan inventarisasi pelaku UMKM; - Pendampingan kepada



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
					pelaku UMKM; 11. Pelaksanaan <i>Event</i> Budaya, Pariwisata dan Ekonomi Keratif berskala Nasional.
31. Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Situs Cagar Budaya Sumatera Utara	2026	Penyusunan dokumen perencanaan pelestarian (<i>masterplan, DED, roadmap</i>); Pelaksanaan konservasi/pemugaran bangunan bersejarah; Pelatihan konservasi dasar & manajemen situs budaya; Pelaksanaan Program Edukasi di Sekolah & Masyarakat Nias Selatan, Kawasan Danau Toba, Tapanuli Tengah, Langkat & Padang Lawas Utara	DISBUDPAREKRAF	1. Dinas Koperasi & UMKM: Pelatihan dan Pembinaan kepada UMKM di Kawasan. 2. Dinas PUPR: Peningkatan Akses Ruas Jalan Provinsi menuju Kawasan. 3. Dinas PMD: Pelatihan dan Pembinaan pengelola BUMDes Wisata 4. Dinas Kominfo: Penyediaan Fasilitas Digital di Kawasan; Publikasi Kegiatan 5. Dinas Pendidikan: Edukasi kepada pelajar tentang Situs Cagar Budaya	1. Memastikan ketersediaan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Provinsi; 2. Penyediaan Lahan yang <i>Clean & Clear</i> (jika terdapat pembangunan fisik); 3. Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Tingkat Kabupaten/Kota; 4. Pembentukan Pengelola Kawasan Situs Cagar Budaya; 5. Melaksanakan Program edukasi kepada masyarakat dan pelajar tentang Kawasan Situs Cagar Budaya; 6. Pendataan, Inventarisasi, Pendaftaran dan Penetapan Cagar Budaya di Kabupaten/Kota 7. Pembentukan Desa Wisata sesuai dengan potensi; 8. Pembentukan Tata Kelola / Kelembagaan untuk Desa Wisata; 9. Pendampingan Desa Wisata; 10. Pendataan jumlah Pelaku Usaha Industri Pariwisata (Usaha Penyediaan Makan-Minum, Penyediaan Akomodasi (<i>Homestay/Hotel</i>), Penyedia Jasa Transportasi,



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
					Penyedia Jasa <i>Travel Agent</i>); 11. Pendampingan Pelaku Usaha Pariwisata; 12. Pendataan dan Pendampingan UMKM; 13. Pelaksanaan <i>Event</i> Budaya, Pariwisata dan Ekonomi Keratif berskala Nasional.
32. Pelaksanaan Event Internasional, pengembangan paket wisata dan digitalisasi promosi pariwisata global	2026	Uji coba & promosi paket wisata, Pengembangan website & media sosial destinasi, dan Kampanye digital internasional (video, influencer, konten kreatif); Penyusunan <i>Calender of Event</i> dan Penyelenggaraan <i>Event</i> Internasional • Kawasan Pariwisata Provinsi Sibolga-Pandan, Sipirok-Padangsidempuan, Bawomatoluo-Hilisimaetano-Sorake, Tanjung Pura-Tangkahan-Bukit Lawang-Sei Bingai, Karo-Dairi-Pakpak (Event Internasional), Luar Negeri (Digitalisasi Promosi)	DISBUDPAREKRAF	1. Dinas Perhubungan: Memastikan ketersediaan transportasi dan lalu lintas saat event internasional dilaksanakan 2. Dinas Kesehatan: Dukungan Tenaga Kesehatan dan Ambulans 3. Dinas Koperasi &UMKM: Pelatihan dan pendampingan UMKM untuk mendukung pelaksanaan event internasional 4. Dinas Kominfo: Memastikan ketersediaan jaringan digital saat pra event-event-pasca event internasional; publikasi kegiatan 5. Satpol PP: Keamanan Pelaksanaan Event dan ketertiban penyelenggaraan acara 6. Dinas Pemuda dan Olahraga; Pembinaan Pemuda untuk partisipasi dalam penyelenggaraan event (sport, e-sport, dsb)	1. Pelaksanaan <i>Side Event</i> saat pelaksanaan <i>Event</i> Internasional; 2. Pelaksanaan Promosi melalui media digital dan cetak; 3. Sosialisasi & Edukasi kepada Pelaku Usaha Pariwisata (Penyedia Jasa Akomodasi (Hotel & <i>Homestay</i>),Penyedia Jasa makan-minum, Penyedia Jasa Transportasi, dan <i>Travel Agent</i>); 4. Pendataan & pendampingan terhadap UMKM; 5. Memastikan kelancaran aksesibilitas terutama saat pelaksanaan Event internasional (Pengaturan lalu lintas; Peningkatan kualitas jalan).
PP 9 EKONOMI KREATIF DAN INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI					
33. Sentra industri kreatif di Kawasan Sport Center Sumatera Utara	2026	Penyusunan Masterplan Skema untuk menjadikan BLUD dan Pembinaan, Pelatihan & Pendampingan Pelaku Ekonomi Kreatif;	DISBUDPAREKRAF	1. Dinas PUPR: Pembangunan Sentra Industri Kreatif 2. Biro Perekonomian : Menyusun Kajian pembentukan BLUD;	1. Pendataan Pelaku Industri Kreatif & Data UMKM Potensial; 2. Kurasi Pelaku Ekonomi



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
		Lokus di Kawasan <i>Sport Center</i>, Deli Serdang		Pembentukan BLUD pengelola Sentra Industri Kreatif. 3. Dinas PerindagESDM: Pendataan, Pelatihan & Pembinaan IKM Kreatif. 4. Dinas Koperasi UMK: Pendataan, Pelatihan & Pembinaan UMKM 5. Dinas Kominfo: Penyediaan Fasilitas Digital (Internet, dll) di Kawasan Sentra Industri Kreatif; Publikasi Kegiatan	Kreatif; 3. Fasilitasi HAKI bagi Pelaku Ekonomi Kreatif; 4. Pelaksanaan Event Ekonomi Kreatif secara rutin di Sentra Industri Kreatif; 5. Promosi terkait Sentra Industri Kreatif melalui media digital dan cetak.
34. Sumut digital market dan galeri virtual produk UMKM kreatif	2026	Desain dan pengembangan platform e-commerce; Kurasi awal 100 produk UMKM; Kemitraan dengan <i>platform</i> logistik & <i>payment gateway</i> . Manajemen Operasional <i>platform e-commerce</i> ; Promosi dan sosialisasi <i>platform e-commerce</i> ; PLUT	DISKOP UMKM	KOMINFO: Publikasi Media DISKOP UKM: Pendataan dan Kurasi Produk UMKM; Pelatihan dan Literasi Digital UMKM; Pembangunan dan Pengelolaan Platform; Promosi dan Akses Pasar; Pendampingan dan Skema Dukungan Lanjutan DISKOP UKM: Pendataan dan Kurasi Produk UMKM; Pelatihan dan Literasi Digital UMKM; Pembangunan dan Pengelolaan Platform; Promosi dan Akses Pasar; Pendampingan dan Skema Dukungan Lanjutan	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Koperasi dan UKM, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: - Pendataan UMKM binaan Kabupaten/Kota; - Kurasi Produk UMKM; - Klasterisasi UMKM yang dapat dimasukkan ke dalam Galeri; - <i>Capacity Building</i> .
PP 10 REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN					
35. Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	2026	1. Inovasi <i>Business Registration System Policy TPB/SDGs</i> 2. Diseminasi Skema BRS TPB/SDGs (Kolaborasi dengan Dinas Koperasi dan	Bappelitbang	Seluruh Perangkat Daerah	1. Penyusunan dokumen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs Kabupaten/Kota se-Sumut



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
		UMKM pada acara FYP, BRS SDGs dijadikan kurikulum) 3. Menyusun Laporan Monev TPB/SGDs Tahun 2025 4. Finalisasi Draf RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026-2030 melalui desk per pilas TPB/SDGs 5. <i>Launching</i> Aplikasi e-Monev 6. Pelaksanaan skema <i>Declaration and Registration System BRS TPB/SDGs</i> 7. Diseminasi RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026-2030 8. Penyusunan Rancang Bangun aplikasi e-Monev SDGs (INOVASI) 9. <i>Workshop</i> Penyusunan <i>Voluntary Local Review (VLR)</i> Kabupaten/Kota 10. Menyusun draf Monev capaian SDGs tahun 2026 11. Sosialisasi <i>North Sumatra SDGs Action Award 2027</i> (Indikator RAD TPB/SDGs, VLR dan Laporan Monev)			tahun 2025-2030. 2. Dukungan pelaksanaan skema BRS Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs : identifikasi UMKM/IMK serta pelaku usaha. 3. Dukungan pelaksanaan North Sumatera SDGs Action Awards. 4. Dukungan proses penginputan E- Monev Kabupaten/Kota. 5. Peningkatan Kapasitas untuk implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs.
36 kerja sama APIP dan APH dalam Pendampingan Proyek Strategis dan Kegiatan Unggulan Daerah melalui pendampingan sejak tahapan perencanaan, pelaksanaan dan serah terima kegiatan proyek strategis	2026	- Reviu Perencanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara - Pendampingan Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara - Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara	Inspektorat	Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) Perangkat Daerah yang memiliki Proyek Strategis	Inspektorat Kabupaten/Kota : Koordinasi Pengawasan dengan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara terkait pelaksanaan Proyek Strategis yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota
PP 11. TRANSFORMASI DIGITAL DAN INOVASI TEKNOLOGI PADA PELAYANAN PUBLIK DAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT					



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
37. Pemanfaatan Satu Data SUMUT pusat data dan informasi pembangunan	2026	- Pemanfaatan SADAINA Reborn - Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD - Forum Satu Data tingkat Daerah - Proses integrasi Satu Data dengan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Provsu - Penyusunan Proses Bisnis integrasi SADAINA dan Data Geospasial - Penyusunan Proses Bisnis integrasi SADAINA dan Data SDGs	Dinas Kominfo	Seluruh OPD menginput data statistik sektoral	Replikasi aplikasi, menyediakan SDM, menyiapkan regulasi terkait.
PP 12. INFRASTRUKTUR DENGAN PRIORITAS JALAN, JEMBATAN, DAN IRIGASI YANG LANGSUNG BERDAMPAK PADA PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT LOKAL					
38. Pembangunan Ruas Jalan Baru Penghubung Wilayah Terisolir atau Strategis yang Merupakan kewenangan Provinsi	2026	Pelaksanaan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2025 hingga 2030, dengan prioritas pada ruas-ruas yang menghubungkan desa-desa terpencil dengan pusat layanan, serta memperkuat jalur distribusi antar kabupaten/kota • Penanganan sepanjang total 51,96 km pada 9 ruas jalan provinsi belum tembus yang masih dalam kondisi tanah dan belum layak dilalui. Ruas-ruas tersebut menghubungkan wilayah Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Samosir	Dinas PUPR	Dinas Kominfo, untuk publikasi kegiatan Dinas LHK mendukung proses penyusunan dokumen lingkungan, AMDAL dan izin pinjam pakai Hutan Dinas Perhubungan untuk penyediaan Fasilitas Keselamatan Jalan Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi Inspektorat melaksanakan pengawasan	1. Memberikan dukungan administratif atas pembangunan jalan yang berada di wilayah kewenangannya, mendukung penyediaan lahan pada trase jalan serta perizinan. 2. Menyelaraskan program jalan dengan perencanaan pembangunan daerah dan usulan prioritas lokal. 3. Melaksanakan koordinasi teknis lapangan dan penyedia data kondisi eksisting jalan serta kebutuhan daerah.



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
39. Pemerataan Infrastruktur Layanan Dasar bagi Kawasan Afirmasi, Terluar, dan Terpencil untuk Mewujudkan Keadilan Pembangunan	2026	Penyusunan RISPAM Regional Kota Gunungsitoli Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan TPSR Kota Gunungsitoli Penyusunan DED Sumur Bor Kepulauan Hinako Desa Bawa Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat Penyusunan Dokumen Lingkungan Sumur Bor Kepulauan Hinako Desa Bawa Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat	Dinas PUPR	Dinas LHK untuk penyediaan dokumen lingkungan, AMDAL Dinas Kominfo untuk publikasi kegiatan Biro Adpem melaksanakan moneyv terhadap pelaksanaan dan evaluasi Inspektorat melaksanakan pengawasan	1. Pemerintah Kabupaten/Kota: Menyediakan lahan, mengarahkan program RTLH (Air Minum dan Sanitasi), menetapkan penerima bantuan, dan mengalokasikan anggaran daerah. 2. Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten/Kota: Pelaksana utama di lapangan yang mengurus pendataan, verifikasi, penyaluran bantuan, pendampingan, monitoring, dan pelaporan. 3. Dinas PUPR Kabupaten/Kota: Memberikan dukungan teknis konstruksi, membuat RAB, dan mengawasi pelaksanaan di lapangan. 4. Dinas Sosial Kabupaten/Kota: Membantu memperbarui dan memverifikasi data kemiskinan lokal. 5. Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan pada Kabupaten/Kota: Melakukan identifikasi penerima bantuan, sosialisasi, memfasilitasi gotong royong, serta membantu pemantauan di lapangan.
PP13. PENGEMBANGAN SISTEM LOGISTIK DAN TRANSPORTASI YANG MENDUKUNG PENGEMBANGAN					



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
EKONOMI DAN DAYA SAING					
40. Dukungan Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Melalui Pembangunan BRT dan Peningkatan Kereta Commuter	2026	Pengadaan lahan di Jl Makalona Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur Kota Binjai seluas 12.000 M2 dan Pengadaan lahan di Desa Tanjung Garbus I Kec. Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang seluas 4.970 M2 • Pembentukan BLUD/UPT Pengelola Sistem Angkutan Umum Massal BRT • Penyediaan Bus Koridor Terminal Binjai – Medan Mall sejumlah 16 unit • Penyediaan biaya operational dan maintenance, biaya pengelolaan dan manajemen serta biaya sistem <i>ticketing</i> untuk koridor Terminal Ikan Paus Binjai – Medan Mall • Pembangunan 61 Halte terdiri dari 44 Bus Pole, 16 Halte kecil dan 1 Halte besar Medan, Deli Serdang dan Binjai	Dinas Perhubungan	Dinas Kominfo untuk publikasi Media Dinas PUPR terkait penyelenggaraan Jalan Provinsi (jika trayek melalui jalan provinsi) Dinas LHK untuk penyediaan dokumen lingkungan dan AMDAL Biro Organisasi membentuk kelembagaan (BLUD) BRT Mebidang Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi Inspektorat melaksanakan pengawasan	Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota Pelaksana operasional harian, koordinator lapangan. Kota Binjai: Dukungan penetapan lokasi lahan depo BRT. Kabupaten Deli Serdang: Dukungan penetapan lokasi lahan depo BRT.
41. Subsidi Transportasi Bus Perintis untuk Daerah- Daerah Terpencil	2026	Pengadaan di 2 Kabupaten/Kota, sosialisasi : Dokumen teknis rute, 8 unit beroperasi di Kabupaten Pakpak Bharat (4 bus) dan Kabupaten Nias Selatan (4 bus) Biaya Operasional 28 unit bus perintis di Kabupaten Deli Serdang (4 bus), Kabupaten Mandailing Natal (4 bus), Kabupaten Nias Barat (20 bus).	Dinas Perhubungan	Dinas Kominfo untuk publikasi Media Dinas PUPR terkait penyelenggaraan Jalan Provinsi (jika trayek melalui jalan provinsi) Dinas LHK untuk penyediaan dokumen lingkungan dan AMDAL Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi Inspektorat melaksanakan pengawasan	1. Koordinasi dan Penyediaan Data: Pemerintah kabupaten/kota berperan menyediakan data dan kebutuhan daerah terkait angkutan perintis serta berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi agar subsidi dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi wilayah terpencil yang membutuhkan akses transportasi. 2. Fasilitasi Pelaksanaan Program: Kabupaten/kota membantu pelaksanaan program subsidi dengan



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
					memastikan armada bus perintis dapat beroperasi di wilayahnya, menyediakan dukungan administratif, dan memantau pelaksanaan layanan agar berjalan lancar dan memenuhi kebutuhan masyarakat yaitu penyediaan fasilitas pendukung untuk kelancaran operasional, berupa lahan untuk titik keberangkatan. 3. Penentuan Rute dan Kebijakan Lokal: Pemerintah daerah menetapkan rute bus perintis yang strategis sesuai kebutuhan wilayah dan sinkron dengan program nasional, serta mengeluarkan kebijakan pendukung agar subsidi bisa dimanfaatkan optimal untuk membuka keterisolasian daerah, yaitu pengusulan dan penetapan trayek dan sosialisasi program kepada masyarakat serta kesiapan infrastruktur jalan di kabupaten dalam kondisi layak dan aman, yang akan dilalui oleh trayek. 4. Pengawasan dan <i>Monitoring</i>: Kabupaten/kota melakukan pemantauan operasional bus perintis di lapangan untuk memastikan layanan tetap berjalan dengan baik, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat di daerah terpencil.



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
PP 14. PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN DAN BERKETAHANAN TERHADAP BENCANA					
42. Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir	2026	- Pengerjaan fisik - Penyusunan DED (<i>Detail Engineering Design</i>) dan pemenuhan <i>readiness</i> Kriteria •Kabupaten Labuhanbatu Utara pada Sungai Kualuh, Sungai Aek Natas, Sungai Aek Kanopan sepanjang 1.196 meter	Dinas PUPR	Dinas LHK untuk dokumen lingkungan dan AMDAL BPBD menyusun kajian resiko bencana, rencana mitigasi, dan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat pada wilayah bencana Diskominfo untuk publikasi kegiatan	1. Penyediaan Data dan Koordinasi: Kabupaten/kota berperan menyediakan data wilayah yang terdampak banjir serta kebutuhan teknis di lapangan dan melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi agar pembangunan bisa tepat sasaran dan efektif (BPBD). 2. Fasilitasi Pelaksanaan dan Administrasi: Kabupaten/kota membantu kelancaran pelaksanaan pembangunan dengan menyediakan dukungan administratif, perizinan, penyediaan lahan, dan tenaga lokal di wilayahnya (PUPR). 3. Pemeliharaan dan Pengawasan: Setelah pembangunan infrastruktur pengendali banjir dilakukan, pemerintah kabupaten/kota turut bertanggung jawab melakukan pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian agar fasilitas yang dibangun tetap berfungsi sesuai perencanaan dan umur yang diharapkan (PUPR).



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
					4. Pemberdayaan Masyarakat dan Kolaborasi: Pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk pemerintah provinsi dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan pengendalian banjir melalui manajemen drainase, normalisasi sungai, dan pengelolaan ruang terbuka hijau (LHK, Dinas PKP Kabupaten/Kota). 5. Penyesuaian Kebijakan Lokal: Kabupaten/kota juga menetapkan kebijakan lokal yang mendukung implementasi program pengendalian banjir provinsi, termasuk pengelolaan tata ruang dan penggunaan teknologi mitigasi banjir (LHK, Dinas PKP Kabupaten/Kota, BPBD).
43. Pembangunan TPST Regional	2026	- Penyusunan Studi kelayakan TPST Regional Mebidang dan FGD dengan Kabupaten/Kota - Pengadaan lahan dan persiapan lokasi (<i>clean and clear</i>) - Dokumen peta jalan pengelolaan persampahan TPST Regional	Dinas PUPR : pelaksana	PUPR: -Penyiapan dokumen Lingkungan, -Dalam pembuatan FS dan DED, dan pembangunan infrastruktur serta pendukungnya, Dinas LHK : - Dukungan dalam proses penyusunan dokumen lingkungan hidup -Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan	1. Penyusunan peraturan atau SK terkait pengelolaan sampah terpilah. 2. Penyediaan dan penentuan Lokasi. 3. Dukungan pengumpulan sampah terpilah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota. 4. Dukungan pengangkutan sampah terpilah ke tempat pengolahan.



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
				evaluasi, -Dinas Kominfo untuk publikasi media	5. Dukungan pemilahan sampah terpilah dan pra pengolahan. 6. Dukungan SDM.
44. Pembangunan PLTSa	2026	Kajian Potensi PLTSa '-Kawasan Perkotaan (STM Hilir) atau dekat dengan TPST dari tahun 2025-2030	DISPERINDAG ESDM	• PUPR : Pembangunan TPST • LHK: Pengelolaan Sampah • Dinas Kominfo : Dukungan Publikasi Kegiatan	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: Lahan dan wilayah untuk pembangunan PLTSa, Penerapan Sistem Persampahan Terpilah Perizinan 1. Penyusunan peraturan atau SK terkait pengelolaan sampah terpilah. 2. Penyediaan dan penentuan Lokasi. 3. Dukungan pengumpulan sampah terpilah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota. 4. Dukungan pengangkutan sampah terpilah ke tempat pengolahan. 5. Dukungan pemilahan sampah terpilah dan pra pengolahan. 6. Dukungan SDM.
45 Pengembangan SPAL Regional	2026	Optimalisasi IPLT Regional Cemara serta Supervisi Peningkatan Kapasitas IPLT Regional Cemara	Dinas PUPR	Dinas LHK untuk penyediaan dokumen lingkungan dan AMDAL	1. Perencanaan tata ruang (PKP Tata Ruang). 2. Membuat regulasi dan menerbitkan perizinan (LHK,



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
		•Wilayah padat penduduk seperti Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang		PDAM dalam peningkatan layanan Biro Adpem melaksanakan moneyv terhadap pelaksanaan dan evaluasi Dinas kominfo untuk publikasi media	DPMPTSP). 3. Sosialisasi kepada masyarakat (Dinas Kesehatan). 4. Dukungan penyediaan lahan (PKP Tata Ruang). 5. Menyediakan alokasi anggaran (BKAD). 6. Pembentukan kelembagaan untuk mengelola operasional IPLT (Biro Organisasi).
46. Pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati	2026	Penyusunan dokumen DPPT dan pembebasan lahan	DLHK	1. Biro Pem Otda - SK Penlok 2. BPN - Sertifikat Lahan 3. Diskominfo - Publikasi Media	1. Dukungan terhadap pengadaan lahan. 2. Penetapan Taman Kehati pada RTRW Kabupaten/Kota.
PP 15. MELANJUTKAN PEMBANGUNAN BERBASIS DESA					
47. Penguatan Ekonomi Desa untuk Mengurangi Ketergantungan pada Pusat Kota dengan Penguatan Ekonomi Lokal melalui Pembuatan Master Plan Desa Produktif dan Mandiri.	2026	-Penyusunan SK Gubernur terkait Hibah Desa dan Naskah Perjanjian Hibah Desa (NPHD) -Pelaksanaan Bantuan Pengembangan Produk Unggulan Desa (kepada BUMDes/BUMDesma) -Pendampingan bagi desa yang mendapatkan Hibah Desa -Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 3 kawasan pedesaan (Kabupaten Tapanuli Selatan: Gula Aren, Kabupaten Mandailing Natal: Kopi dan Kepulauan Nias : Kelapa)		Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) Dinas Perkebunan (Pemberian bantuan/pelatihan pengembangan komoditas gula aren, kopi, dan kelapa kepada kelompok yang terdapat pada desa yang menjadi sasaran intervensi kegiatan ini)	-Menyediakan data potensi desa yang akurat termasuk peta sebaran komoditi unggulan. -Memperbaiki jalan produksi, pasar desa, gudang, sentra dan pengolahan. -Memfasilitasi kerja sama antar desa atau antar BUMDes untuk memperkuat rantai pasok. -Memfasilitasi sertifikasi produk (halal, organik, SNI) untuk meningkatkan daya saing. -Pembinaan penggunaan dana desa untuk ekonomi desa pada Lokus yang di intervensi.



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
48. Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan bagi Pengelola BUMDES	2026	- Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi pengelola BUMDES/BUMDesma - Monitoring dan Evaluasi kegiatan •Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Nias, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kota Gunungsitoli, Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Karo, Kabupaten Toba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Labuhanbatu (20 Kabupaten/Kota)	Biro Perekonomian	Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) Disperindag, Dinas Koperasi UMKM, (Dukungan Pelatihan dan Keterampilan bagi pengelola BUMDES/Masyarakat Desa).	- Menugaskan tenaga pendamping desa atau penyuluh ekonomi untuk mendampingi operasional BUMDES. - Memfasilitasi akses internet dan teknologi informasi untuk mendukung pemasaran digital. - Memfasilitasi sertifikasi kompetensi pengelola BUMDES melalui lembaga pelatihan resmi.
PP 16. MENINGKATKAN KETAHANAN SOSIAL DAN BUDAYA YANG MENDUKUNG SUASANA YANG HARMONIS, TOLERAN DAN RUKUN					
49. Bantuan Hibah Rumah Ibadah di 33 Kabupaten/Kota	2026	-Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 -Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara	Biro KESRA	Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) Inspektorat (pendampingan menyeluruh dan tinjauan terhadap tata kelola pemberian bantuan hibah rumah ibadah)	-
50. Festival Seni dan Budaya Daerah	2026	Penyelenggaraan Event Budaya yang telah dilaksanakan 3 Tahun berturut untuk dinaikkan ke KhariSMA Event Nasional	DISBUDPAREKRAF	1. Dinas Perhubungan : Memastikan ketersediaan transportasi dan lalu lintas saat	1. Memastikan ketersediaan anggaran dalam mendukung Proyek Strategis Provinsi;



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
		(KEN), Sinkronisasi <i>travel pattern</i> dan <i>travel package</i> dengan CoE Provinsi dan Nasional (KEN), Koordinasi dengan Ashita, Travel, penguatan sektor promosi , medsos, online, influencer. Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan kabupaten/kota terkait penyelenggaraan event. Rekomendasi Tema 2026 "Festival Bahari Pesisir Barat" → parade perahu hias, lomba layar tradisional, kuliner laut, tari dan musik pesisir . Waktu pelaksanaan pada musim libur anak sekolah, libur musim panas dan libur musim dingin • Kawasan Pariwisata Provinsi Sibolga - Pandan dan Sipirok - Padangsidimpuan		event internasional dilaksanakan 2. Dinas Kesehatan : Dukungan Tenaga Kesehatan dan Ambulans 3. Dinas Koperasi &UMKM : Pelatihan dan pendampingan UMKM untuk mendukung pelaksanaan <i>event</i> internasional 4. Dinas Kominfo : Memastikan ketersediaan jaringan digital saat pra <i>event-event-pasca event</i> internasional; publikasi kegiatan 5. Satpol PP : Keamanan Pelaksanaan <i>Event</i> dan ketertiban penyelenggaraan acara	2. Pelatihan dan pembinaan Sanggar Kesenian Daerah; 3. Pendataan/Inventarisasi potensi Festival Seni Budaya di masing-masing daerah; 4. Memastikan kontinuitas pelaksanaan Festival Seni Budaya di masing-masing daerah 5. Promosi pelaksanaan Festival Seni Budaya; 6. Penyusunan Kalender Budaya.
51. Edukasi dan Pembekalan Solidaritas, Ketahanan Sosial Dan Wawasan Kebangsaan bagi Organisasi Masyarakat Dan Kelompok Masyarakat	2026	-Pendataan Sasaran Ormas dan Kelompok masyarakat pada daerah rawan konflik di Sumatera Utara di Tahun 2026 -Pelaksanaan Kegiatan edukasi wawasan kebangsaan dan Solidaritas bagi Ormas Tahun 2026 -Monitoring dan Evaluasi Tahun 2026 •Kota Medan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Toba, Kota Tanjungbalai, Kabupaten Serdang Bedagai	Kesbangpol	Dinas Pendidikan (Koordinasi rekomendasi satuan pendidikan yang membutuhkan pembekalan terhadap edukasi wawasan kebangsaan) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	Replikasi pelaksanaan kegiatan Edukasi dan pembekalan solidaritas, ketahanan sosial dan wawasan kebangsaan bagi organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat di Kabupaten/Kota.
PP 17. TERCIPTANYA KEHIDUPAN YANG LEBIH AMAN DAN TERTIB					
52. Patroli Gabungan untuk Narkoba di Pintu Masuk Narkoba dan Kawasan-Kawasan Kenakalan Remaja (Genk Motor).	2026	- Pelaksanaan Patroli Gabungan Genk Motordan Pencegahan Pengedaran Narkoba di Pintu Masuk Narkoba Tahun 2026 - Pembinaan hasil Patroli Gabungan Tahun 2026 •Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, Kota Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, dan Kabupaten Langkat	Satpol PP	Kesbangpol (Penyediaan data dan peta daerah rawan narkoba) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	Melakukan koordinasi dengan Satpol PP Kabupaten/Kota terkait dukungan personel dalam pelaksanaan kegiatan. Kesbangpol (Penyediaan data dan peta daerah rawan Narkoba di Kabupaten/Kota).



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
53. Pemberantasan Pengguna dan Bandar Narkoba melalui Pemindahan Gembong Narkoba dari Lapas ke Nusakambangan	2026	- MoU pemindahan warga binaan dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kanwil Sumut, Poldasu, BNNP Sumut, Lanud Soewondo Tahun 2026 - Perencanaan dan pendataan Pemindahan Warga Binaan (<i>High Risk</i>) dari Lapas di Sumatera Utara yang akan dipindahkan ke Lapas Nusakambangan Tahun 2026 - Pelaksanaan pemindahan narapidana <i>high risk</i> ke Lapas Nusakambangan Tahun 2026 Lapas I Tanjung Gusta Kota Medan	Kesbangpol	Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) Dinas Perhubungan (pengaturan lalu lintas untuk pemindahan gembong narkoba) Satpol PP (pendampingan saat pemindahan gerbong narkoba)	Penguatan pencegahan narkoba di pemerintahan daerah.

5.3. Keselarasan Pengembangan Wilayah melalui Intervensi Nasional dan provinsi

Pembangunan kewilayahan di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat keterpaduan antara kebijakan nasional dan prioritas pembangunan daerah. Pemerintah Pusat telah menetapkan lima Kawasan Pengembangan Wilayah di Sumatera Utara, yaitu Kawasan Pertumbuhan, Kawasan Komoditas Unggulan, Kawasan Swasembada Pangan–Air–Energi, Kawasan Afirmasi, serta Kawasan Konservasi/Rawan Bencana. Masing-masing kawasan memiliki karakteristik, potensi, dan tantangan yang berbeda, sehingga memerlukan intervensi pembangunan yang lebih terfokus, kolaboratif, dan berbasis kebutuhan kewilayahan. Penetapan kawasan strategis ini menjadi fondasi untuk mengarahkan pembangunan secara lebih merata dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kontribusi Sumatera Utara terhadap target pembangunan nasional.

Intervensi pembangunan pada kawasan-kawasan tersebut dilakukan secara spesifik, sesuai dengan kebutuhan dan peluang yang ada di setiap wilayah. Misalnya, pada Wilayah Metropolitan Medan serta Kawasan Pengembangan Industri Medan–Binjai–Deli Serdang–Karo, intervensi diarahkan pada pembangunan sistem angkutan umum massal, penataan kota, peningkatan layanan transportasi regional, serta revitalisasi kawasan bersejarah seperti Kesawan. Di sisi lain, pada Kawasan Pengembangan Industri Kualatanjung–Sei Mangkei, fokus intervensi mencakup pengembangan sentra IKM, pendampingan penerapan industri 4.0, serta pembangunan infrastruktur strategis seperti flyover dan terowongan simpang kereta. Sementara itu, pada kawasan komoditas unggulan seperti sawit, karet, dan kelapa di wilayah Asahan–Labuhanbatu–Padanglawas, intervensi diarahkan pada peningkatan produktivitas, dukungan hilirisasi perkebunan, dan pengembangan bioekonomi berbasis hutan melalui agroforestri.

Seluruh intervensi tersebut selaras dengan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang telah diturunkan ke dalam 53 Program Strategis Daerah (PSD). Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan efektif, Pemerintah Provinsi menyelaraskan intervensi pusat dengan Nomenklatur Program, Kegiatan, dan Subkegiatan perangkat daerah. Melalui keselarasan ini, pembangunan kewilayahan dapat dijalankan secara terintegrasi, menghindari tumpang tindih program, serta memastikan bahwa dukungan pemerintah daerah benar-benar berkontribusi terhadap keberhasilan intervensi nasional. Keselarasan dukungan tersebut ditampilkan dalam Tabel 5.9 berikut:



Tabel 5.9 Keselarasan Intervensi Pembangunan Kewilayahan

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A1	Wilayah Metropolitan Medan dan Kawasan Pengembangan Industri Medan-Binjai-Deli Serdang Kota Medan Kota Binjai Kab. Deli Serdang Kab. Karo	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di WM Medan	Kota Medan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Perhubungan
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	
				Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	
				Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
				Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	
				Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B	



KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	
				PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	
				Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan	
		Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diberikan Penyadaran terhadap Penanggulangan Dampak Pencemaran	Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang		Dinas Perhubungan



KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	
				Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	
		Penataan Kota Lama Kesawan	Kota Medan	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan kepada pemerintah Kabupaten/Kota	
				Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Penyusunan Rencana dan Teknis Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
				Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	
				Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	
				Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	
				Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
		Pembangunan SPAM Regional Medan– Binjai–Deli Serdang	Kota Medan, Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang		Dinas Pekerjaan



KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Umum dan Tata Ruang
				Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
				Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
				Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
		Medan Urban Traffic Improvement Project	Kota Medan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Perhubungan
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	
				Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	
				Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas	



KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
				Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	
				Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B	
				Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	



KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pengendalian banjir Sungai Badera dan Selayang	Kota Medan, Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	
				Normalisasi/Restorasi Sungai	
				Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	
				Pembangunan Tanggul Sungai	
				Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	
				Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	
				Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	



KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	
				Rehabilitasi Tanggul Sungai	
		Preservasi Jalan Akses Simpul Transportasi di Jalan SISINGAMANGARAJA (MEDAN)	Kota Medan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Perhubungan
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	
				Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	
				Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	



KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	



KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	
		Pekerjaan Peningkatan Jalur KA Lintas Medan - Belawan Tahap II (Labuhan - Belawan)	Kota Medan	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Dinas Perhubungan
				Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	
				Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	
		Pembangunan SPAM di Kab. Karo	Kabupaten Karo	Penyediaan Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
				Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
				Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
				Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	



KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional di Kota Medan	Kota Medan	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	
				Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	
				Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	
				Pembangunan TPA/TPST/SPA	
				Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	
		Pembangunan Jalur KA Lintas Medan Binjai Tahap II	Kota Medan dan Kota Binjai	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Dinas Perhubungan
				Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	
				Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	
A2	Kawasan Pengembangan Industri Kualatanjung-Sei Mangkei	Pembangunan/revitalisasi sentra IKM	Provinsi Sumatera Utara	Penyediaan Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
				Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	



KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kab. Batubara Kab. Simalungun Kota Tebing Tinggi Kota Pematangsiantar			Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	
				Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	
				Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	
	Pembangunan Flyover/Underpass/Terowongan (Simpang KA) - Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi	
				Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi	
				Pembangunan Jalan	
				Pembangunan Jembatan	
				Pemeliharaan Berkala Jalan	
				Pemeliharaan Rutin Jalan	
				Pemeliharaan Rutin Jembatan	
				Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	
				Pengelolaan Leger Jalan	
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
				Survey Kondisi Jalan/Jembatan	



KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pendampingan penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Kemurgi, Oleokimia, Pakan	Provinsi Sumatera Utara	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
				Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	
				Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
		Restrukturisasi mesin dan peralatan industri pakan dan oleokimia	Provinsi Sumatera Utara	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
				Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
				Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	
		Fasilitasi prototyping produk betacarotene dan tocopherol alami berbasis minyak sawit	Provinsi Sumatera Utara	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
				Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
		Fasilitasi pendampingan teknis pemenuhan standar industri hijau dan transformasi industri hijau untuk sektor prioritas hilirisasi	Provinsi Sumatera Utara	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
				Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	
		Fasilitasi pendampingan teknis pemenuhan standar industri hijau dan transformasi industri hijau untuk sektor prioritas hilirisasi	Provinsi Sumatera Utara	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
				Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin	



KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	
				Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	
		Surat tanda daftar budidaya (STDB) tanaman kelapa sawit dan aneka palma	Provinsi Sumatera Utara	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
				Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	
				Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	



KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	
A3	Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Danau Toba dan Kawasan Perkotaan Toba (Balige) (Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba) Kab. Toba Kab. Samosir Kab. Humbang Hasundutan Kab. Tapanuli Utara Kab. Dairi Kab. Karo Kab. Simalungun	Peningkatan 6A Pariwisata dan Urban Renewal di Parapat-Ajibata, Balige, Baktiraja, Pangururan, Silalahi-Paropo, Merek, dan Ambarita-Tomok	Kabupaten Simalungun, Kabupaten Toba, Kabupaten Humbanghasudutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
				Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
				Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	
				Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko	
				Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	
				Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	
				Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi	
				Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	
				Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	
				Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi	



KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	
				Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	
				Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	
				Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	
				Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	
		Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan	Provinsi Sumatera Utara	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
				Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
				Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	



KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
				Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
				Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
	Pembangunan TPST Kec. Girsang Simpangan Bolon		Kabupaten Simalungun	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	
				Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	
				Pembangunan TPA/TPST/SPA	
				Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	



KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pembangunan Jalan Tol Inderapura – Kuala Tanjung dan Sinaksak Parapat	Kabupaten Batubara dan Kabupaten Simalungun	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	
		Pendampingan, Kemitraan dan Insentif Industri Pariwisata Berkelanjutan - Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	
				Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	
				Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	
				Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	
				Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat - Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	



KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	
				Pembangunan TPA/TPST/SPA	
				Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	
		Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata - Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	
				Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	
				Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	
		Pelaksanaan Kegiatan (Events) Internasional - Kota Medan	Kota Medan	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	



KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kreatif
				Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	
		Preservasi jalan Siborong Borong - Taruntung	Kabupaten Tapanuli Utara	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi	
				Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi	
				Pembangunan Jalan	
				Pembangunan Jembatan	
				Pemeliharaan Berkala Jalan	
				Pemeliharaan Rutin Jalan	
				Pemeliharaan Rutin Jembatan	
				Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	
				Pengelolaan Leger Jalan	
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
				Survey Kondisi Jalan/Jembatan	



KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Preservasi Jalan Dairi Dolok Sanggul	Kabupaten Dairi	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi	
				Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi	
				Pembangunan Jalan	
				Pembangunan Jembatan	
				Pemeliharaan Berkala Jalan	
				Pemeliharaan Rutin Jalan	
				Pemeliharaan Rutin Jembatan	
				Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	
				Pengelolaan Leger Jalan	
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
				Survey Kondisi Jalan/Jembatan	
		Perluasan SPAM	Provinsi Sumatera Utara	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
				Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	



KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
				Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
				Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
		Indonesia Game Academy	Provinsi Sumatera Utara	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Dinas Pekerjaan Umum dn Tata Ruang
		<i>Masterclass for Game Developers</i>		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	
		<i>Women for Indonesian Game</i>		Fasilitasi Kekayaan Intelektual	
		Inkubasi startup gim		Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	
		Fasilitasi Akses Pendanaan dan Pembiayaan Industri Gim		Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	
		Fasilitasi dan Promosi Industri Gim Nasional		Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	



KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	
A4	Kawasa Perkotaan Sibolga-Pandan-Padangsidimpuan Kota Sibolga Kab. Tapanuli Tengah Kota Padangsidimpuan	Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan	Kota Sibolga	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
				Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
				Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
				Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
				Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	



KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pelabuhan perikanan PPN Sibolga	Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	
				Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	
A5	Kawasan Perkotaan Rantauprapat Kab. Labuhanbatu	Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan	Kabupaten Labuhanbatu	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
				Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
				Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP	
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	



KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
				Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
				Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
				Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
		Penyiapan Jalan Tol Rantauprapat-Kisaran	Kabupaten Asahan dan Kabupaten Labuhanbatu	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
A6			Kabupaten Karo	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	



KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kawasan Perkotaan Kabanjahe Kab. Karo	Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP	
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
				Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
				Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
				Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
				Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	



KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Preservasi jalan ruas Kabanjahe–Berastagi–Medan, Kabanjahe–Sidikalang–Subulussalam, Kabanjahe–Kutacane	Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo dan Kabupaten Dairi	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi	
				Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi	
				Pembangunan Jalan	
				Pembangunan Jembatan	
				Pemeliharaan Berkala Jalan	
				Pemeliharaan Rutin Jalan	
				Pemeliharaan Rutin Jembatan	
				Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	
				Pengelolaan Leger Jalan	
		Preservasi jalan ruas Lawe Pakam (BTS. Prov. Aceh)-Kuta Buluh-BTS. Kota Sidikalang-BTS. Kota Kabanjahe	Kabupaten Karo dan Kabupaten Dairi	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				Survey Kondisi Jalan/Jembatan	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi	
				Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi	
				Pembangunan Jalan	
				Pembangunan Jembatan	
				Pemeliharaan Berkala Jalan	
				Pemeliharaan Rutin Jalan	
				Pemeliharaan Rutin Jembatan	



KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	
				Pengelolaan Leger Jalan	
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
				Survey Kondisi Jalan/Jembatan	
A7	Kota Gunung Sitoli	Pembangunan SPAM	Kota Gunung Sitoli	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
				Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
				Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
				Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	



KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan	Kota Gunung Sitoli	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
				Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
				Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
				Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
				Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
				Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	



KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
		RS Berkualitas di Kab/Kota (Pemenuhan PHTC bidang Kesehatan)	Kota Gunung Sitoli	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
				Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	
				Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	
				Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	
				Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	



KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
				Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
				Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	
				Pengembangan Rumah Sakit	
				Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	
		Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif	Kota Gunung Sitoli	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	
				Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
B1	Kawasan Komoditas	Kawasan perkebunan dengan peningkatan produksi dan	Kabupaten Asahan, Kabupaten	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dinas Perkebunan
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	



KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Unggulan Sawit, Karet, dan Kelapa Asahan-Labuhanbatu-Padanglawas Kab. Asahan Kab. Labuhanbatu Kab. Labuhanbatu Utara Kab. Labuhanbatu Selatan Kab. Padanglawas Kab. Padanglawas Utara	produktivitas mendukung hilirisasi komoditas perkebunan	Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	dan Peternakan
				Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	
				Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	
		Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri	Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
				Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	
				Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi	
				Perencanaan Pengelolaan TAHURA	
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	
				Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	
				Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	
				PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	



KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	
				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	
				Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	
				Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	
				Pembangunan Dam Penahan	
				Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	
				Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	
				Pembangunan Sumur resapan	
				Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	
				Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	



KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi Pelayanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Perbenihan Tanaman Hutan	



KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B2	Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Asahan-Tanjungbalai Kota Tanjungbalai Kab. Asahan	Pelabuhan perikanan PPI Tanjungbalai	Kota Tanjungbalai	Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Pengelolaan Sumber Benih	
				Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	
				Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	
				Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	
		Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap	Kota Tanjungbalai	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	
				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
				Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	



KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	
				Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	
				Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
				Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
				Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
B3	Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi	Pelabuhan perikanan modern yang terintegrasi dengan industrialisasi/hilirisasi perikanan di Lahewa	Kabupaten Nias Utara	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Dinas Kelautan dan Perikanan



KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Biru Nias Utara Kab. Nias Utara			Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	



KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
				Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	
				Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	
				Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	
				Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	
				Pengintegrasian Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	
				Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	
				Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	
				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	



KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	
C1	Kawasan Swasembada Pangan Sumatera Timur Kab. Langkat Kab. Deli Serdang Kab. Serdang Bedagai Kab. Simalungun Kab. Asahan Kab. Labuhanbatu	Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi pada D. I. Bandar Sidoras, D.I Perkotaan, dan D.I Sei Ular	Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Kabupaten Simalungun Kawasan pertanian yang memiliki keterbatasan irigasi di Sumatera Utara	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi Pembangunan Bendung Irigasi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Rehabilitasi Bendung Irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang



KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	
		Pembangunan jaringan Irigasi pada D.I. Wampu, D.I. Silau Bunut	Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Kabupaten Simalungun Kawasan pertanian yang memiliki keterbatasan irigasi di Sumatera Utara	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi Pembangunan Bendung Irigasi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Rehabilitasi Bendung Irigasi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang



KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	
		Pemasangan Sambungan Baru Listrik bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik yang Tidak Mampu atau Berada di Daerah dan Operasional dan Pemeliharaan Akses Internet pada Kecamatan Perbatasan Prioritas, yaitu di Kab. Langkat (Pematang Jaya, Pangkalan Susu, Berandan Barat, Gebang, Tanjung Pura), Kab. Serdang Bedagai (Tanjung Beringin, Bandar Khalipah), Kab. Batu Bara (Sei Suka) dan Kab. Asahan: (Silau Laut, Sei Kepayang Timur)	8 SMA: SMA NEGERI 1 PULAU SIMUK KAB NIAS SELATAN (PLTS), SMA NEGERI 2 ALASA KAB NIAS UTARA (PLTS), SMA NEGERI 2 HILIMIGIA KAB NIAS SELATAN (PLTS), SMA NEGERI 2 MUARA BATANG GADIS, KAB. MANDAILING NATAL (PLTS), SMA NEGERI 1 TANAH MASA, KAB. NIAS SELATAN, SMA NEGERI 1 HIBALA KAB. NIAS SELATAN, SMA NEGERI 2 HIBALA KAB. NIAS SELATAN, SMA NEGERI 9 PADANGSIDIMPUAN 27 SMK: SMK NEGERI 1 AEK BILAH KAB TAPANULI SELATAN, SMK NEGERI 2 GUNUNGSITOLI KOTA GUNUNG SITOLI, SMK NEGERI 1 BAWOLATO KAB. NIAS, SMK NEGERI 1 BOTOMUZOI KAB. NIAS, SMK NEGERI 1 GIDO KAB. NIAS, SMK	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM



KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			NEGERI 1 HILIDUHO KAB. NIAS, SMK NEGERI 1 IDANOGAWO KAB. NIAS, SMK NEGERI 1 ULUGAWO KAB. NIAS, SMK NEGERI 2 BOTOMUZOI KAB. NIAS, SMK NEGERI 2 IDANOGAWO KAB. NIAS, SMK NEGERI 2 SOMOLOMOLO KAB. NIAS, SMK NEGERI 3 HILISERANGKAI KAB. NIAS, SMK NEGERI 1 ALASA KAB. NIAS UTARA, SMK NEGERI 1 LAHEWA KAB. NIAS UTARA, SMK NEGERI 1 LOTU KAB. NIAS UTARA, SMK NEGERI 1 NAMOHALU ESIWA KAB. NIAS UTARA, SMK NEGERI 1 SAWO KAB. NIAS UTARA, SMK NEGERI 1 SITOLU ORI KAB. NIAS UTARA, SMK NEGERI 1 TUGALA OYO KAB. NIAS UTARA, SMK NEGERI 2 AFULU KAB. NIAS UTARA, SMK NEGERI 2 LOTU KAB. NIAS UTARA, SMK NEGERI 2 NAMOHALU		



KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Menyiapkan calon lokasi dan calon petani penerima	ESIWA KAB. NIAS UTARA, SMK NEGERI 2 TUGALA OYO KAB. NIAS UTARA, SMK NEGERI 1 SUSUA KAB. NIAS SELATAN, SMK NEGERI 1 ULUNOYO KAB. NIAS SELATAN, SMK NEGERI 1 UMBUNASI KAB. NIAS SELATAN, SMK NEGERI 2 SUSUA KAB. NIAS SELATAN		
			Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Simalungun, dan Kabupaten Deli Serdang	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
			Kawasan Padi: Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan dan Kabupaten Serdang Bedagai. Kawasan Jagung: Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Tapanuli utara dan Kabupaten Karo Kawasan Cabai Merah: Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kabupaten Batu Bara,	Penataan Prasarana Pertanian	
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	



KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			dan Kabupaten Deli Serdang Kawasan Bawang Merah: Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir dan Kabupaten Simalungun	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan	
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	
				Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	
				Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	
		Membangun infrastruktur pertanian	Kab. Langkat Kab. Deli Serdang Kab. Serdang Bedagai Kab. Simalungun Kab. Asahan Kab. Labuhanbatu	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
				Penataan Prasarana Pertanian	
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
				Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	



KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	
				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	
				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	
				Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura	
				Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan	
				Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	
				Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	
				Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	
				Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	
				Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek	
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	
				Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	



KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Melaksanakan pelatihan petani dan penguatan kelembagaan petani	Kab. Langkat Kab. Deli Serdang Kab. Serdang Bedagai Kab. Simalungun Kab. Asahan Kab. Labuhanbatu	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	
				Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	
				Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	
				Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	
				Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	
				Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	
				Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	
				Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	
				Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	
		Menyediakan input dan alat mesin produksi pertanian	Kab. Langkat Kab. Deli Serdang Kab. Serdang Bedagai Kab. Simalungun Kab. Asahan Kab. Labuhanbatu	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Penataan Prasarana Pertanian	
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	



KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
				Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	
				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	
				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	
		Melaksanakan pengawalan produksi dan pengendalian OPT/DPI	Kab. Langkat Kab. Deli Serdang Kab. Serdang Bedagai Kab. Simalungun Kab. Asahan Kab. Labuhanbatu	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Perkebunan dan Peternakan
				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	
				Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	
				Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	
				Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	
				Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	
				Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	



KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	
				Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	
				Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	
				Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	
		Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi	Kab. Langkat Kab. Deli Serdang Kab. Serdang Bedagai Kab. Simalungun Kab. Asahan Kab. Labuhanbatu	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	
				Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	
				Pembangunan Bendung Irigasi	



KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Rehabilitasi Bendung Irigasi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	
C2	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Bukit Barisan Utara Kab. Toba Kab. Samosir Kab.Humbang Hasundutan Kab. Tapanuli Utara Kab. Dairi Kab. Karo Kab. Pakpak Bharat	Kawasan hortikultura guna mendukung KSPP Sumatera Utara	Kab. Toba Kab. Samosir Kab.Humbang Hasundutan Kab. Tapanuli Utara Kab. Dairi Kab. Karo Kab. Pakpak Bharat Kab. Tapanuli Tengah	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN	
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	Kab. Tapanuli Tengah			Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah	Kab. Toba Kab. Samosir Kab.Humbang Hasundutan Kab. Tapanuli Utara Kab. Dairi Kab. Karo Kab. Pakpak Bharat Kab. Tapanuli Tengah	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
				Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi		
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa		
				Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi		
				Pembangunan Bendung Irigasi		
				Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi		
				Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan		
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa		
				Rehabilitasi Bendung Irigasi		



KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada Danau Toba dan Sub-DAS Asahan	Kab. Toba Kab. Samosir Kab.Humbang Hasundutan Kab. Tapanuli Utara Kab. Dairi Kab. Karo Kab. Pakpak Bharat Kab. Tapanuli Tengah	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	
				PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	
				Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	
				Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
				Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
				Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	
				Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko	
		Revitalisasi Danau Toba	Kab. Toba Kab. Samosir Kab.Humbang Hasundutan Kab. Tapanuli Utara Kab. Dairi Kab. Karo Kab. Pakpak Bharat Kab. Tapanuli Tengah	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
				Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	
				Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi	



KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	
				Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	
				Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi	
				Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	
				Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	
				Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	
				Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	
				Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	
				PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	
		Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 275 kV Sarulla-PLTA Batangtoru	Kab. Toba Kab. Samosir Kab.Humbang Hasundutan Kab. Tapanuli Utara Kab. Dairi Kab. Karo	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	



KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Kab. Pakpak Bharat Kab. Tapanuli Tengah	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	
C3	Kawasan Swasembada Pangan dan Air Batang Angkola-Batang Gadis Kab. Tapanuli Selatan Kab. Mandailing Natal	Rehabilitasi dan peningkatan jaringan pada D. I. Batang Angkola	Kab. Tapanuli Selatan	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
				PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
				PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	
		Pembangunan TPST Kab. Mandailing Natal	Kab. Mandailing Natal		Dinas Pekerjaan



KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Umum dan Tata Ruang
				Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	
				Pembangunan TPA/TPST/SPA	
				Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	
		Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada DAS Batang Gadis dan Danau Siai	Kab. Tapanuli Selatan dan Kab. Mandailing Natal	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
				Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	
				Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	
D1 A7	Kawasan Afirmasi Kepulauan Nias (Daerah Terdepan dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan) (D1)	Pembangunan SPAM	Kota Gunungsitoli, Kab. Nias, Kab. Nias Utara, Kab. Nias Selatan, Kab. Nias Barat	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	



KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	dan Kawasan Perkotaan Gunungsitoli (A7) Kab. Nias Kab. Nias Utara* Kab. Nias Barat Kab. Nias Selatan Kota Gunungsitoli Keterangan: *) Daerah Tertinggal			Fasilitas Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
				Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
				Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
	Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan		Kota Gunungsitoli, Kab. Nias, Kab. Nias Utara, Kab. Nias Selatan, Kab. Nias Barat	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
				Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP	
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
				Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	



KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
				Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
				Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
		Peningkatan tipe RS dari tipe D menjadi C di RSUD Kab. Nias Utara, Kab. Nias Barat	Kab. Nias Utara, Kab. Nias Barat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan



KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	
				Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	
				Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	
				Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
				Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
				Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	
				Pengembangan Rumah Sakit	
				Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	



KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		RS Berkualitas di Kab/Kota (Pemenuhan PHTC bidang Kesehatan)	Kota Gunungsitoli, Kab. Nias, Kab. Nias Utara, Kab. Nias Selatan, Kab. Nias Barat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
				Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	
				Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	
		Peningkatan 6A Pariwisata di Telukdalam, Kep. Hinako, Lahewa-Tureloto, Kep. Batu	Kab. Nias Selatan, Kab. Nias Barat, Kab. Nias Utara	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
				Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
				Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	
				Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko	
				Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	
				Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	
				Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi	
				Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	



KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	
				Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi	
				Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	
				Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	
				Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	
				Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	
				Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	
				Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	
		Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif	Kota Gunungsitoli, Kab. Nias, Kab. Nias Utara, Kab. Nias Selatan, Kab. Nias Barat		



KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
E1 E2	Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana TN Batang Gadis (E1) dan TN Gunung Leuser (E2) TN Batang Gadis: Kab. Mandailing Natal TN Gunung Leuser: Kab. Langkat	Penguatan pengelolaan hutan lestari	Kab. Mandailing Natal, Kab. Langkat	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
				Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	
				Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi	
				Perencanaan Pengelolaan TAHURA	
		Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana	Kab. Mandailing Natal, Kab. Langkat	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	BPBD
				Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	
				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	
				Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)	
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
				Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
				Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	
				Pengelolaan Risiko Bencana	



KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
				Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	
				Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
				Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	
				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
				Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	
				Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	
				Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	
				Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	

Sebagai tindak lanjut komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan memastikan kesinambungan pencapaian prioritas pembangunan daerah, Rencana Pembangunan Kegiatan Daerah (RPKD) Tahun 2026 disusun dengan menitikberatkan pada sinergi yang erat antara prioritas nasional dan prioritas daerah. Penyusunan ini dilakukan melalui pemetaan menyeluruh terhadap enam PHTC, 17 Program Prioritas, dan 53 Proyek Strategis Daerah (PSD), dan sejumlah Kegiatan Utama Perangkat Daerah (KUPD) atas keterkaitannya dengan PSN.

Pendekatan ini memastikan bahwa arah kebijakan pembangunan Sumatera Utara tidak hanya sejalan dengan agenda nasional seperti pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan untuk semua, dan perluasan akses pendidikan, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan strategis wilayah, termasuk pengembangan KEK Sei Mangkei, bioethanol berbasis tebu, serta hilirisasi kelapa sawit, kelapa, dan rumput laut. Dengan demikian, pelaksanaan RPKD 2026 tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian integral dari kerangka pembangunan jangka menengah daerah yang berkontribusi langsung pada target-target PSN.

Melalui integrasi lintas sektor, penetapan OPD pengampu yang jelas, serta penjadwalan rencana aksi yang terukur, RPKD 2026 diharapkan memperkuat efektivitas pelaksanaan program dan proyek prioritas. Hal ini sekaligus memastikan bahwa dampak pembangunan dapat dirasakan secara merata di berbagai wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Rangkaian dukungan strategis tersebut dirinci lebih lanjut dalam tabel berikut:



Tabel 5.10 Dukungan Provinsi Sumatera Utara terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) RPJMN 2025-2029

NO	PSN	DUKUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA			PD PENANGUNGJAWAB
		DUKUNGAN YG DIKAITKAN DGN PHTC, PSD, KUPD	TAHUN	RENCANA AKSI	
1	Pengentasan Kemiskinan				
a	Penanggulangan Kemiskinan	PHTC 6: Bantuan Hukum dan perlindungan rakyat melalui Restorative Justice (PRESTICE).	2026	- Pembentukan kelembagaan Prestice, Bimbingan Teknis Paralegal Desa dan Edukasi dan Sosialisasi PRESTICE di 25 kabupaten/kota (Asahan, Batubara, Dairi, Deliserdang, Humbahas, Karo, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Langkat, Madina, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Palas. Paluta, Pakpak Bharat, Samosir, Serdangbedagai, Simalungun, Tapsel, Tapteng, Taput, Toba - Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum selain kasus KDRT dan Narkoba - Pendampingan bagi masyarakat yang berhadapan dengan kasus tindak pidana ringan. - Pelatihan mediator tingkat kabupaten/kota (2 orang per kab/kota, dilaksanakan di Kota Medan)	Biro Hukum
		PSD 11. Bantuan Sosial Produktif melalui Program Masyarakat Produktif (MAPRO)	2026	- Pendataan dan penetapan penerima manfaat (KK/KUBE) - Pembuatan Bank Data pensasaran masyarakat miskin - sebanyak 200 KK (40 KUBE) di 4 Kab/Kota: Madina, Humbahas, Toba, Paluta, Dairi serta 200 KK (UEP) di Labusel, Batubara, Nias Selatan, Pakpak Barat, Nias	Dinas Sosial
		PSD 13. Perlindungan Sosial bagi Tenaga Kerja Rentan (Subsidi BPJS Ketenagakerjaan)	2026	- Perluasan kepesertaan pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.645 dengan skema penganggaran 20% Provinsi dan 80% Kab/Kota 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2	Dinas Ketenagakerjaan
		PSD 14. Revitalisasi, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Panti Sosial Provinsi	2026	- Penyusunan dokumen appraisal/penilaian kerusakan bekerjasama dengan Dinas PUPR - Penyusunan dokumen perencanaan (jasa konsultan perencanaan) untuk 13 panti sosial	Dinas Sosial



NO	PSN	DUKUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA			PD PENANGUNGJAWAB
		DUKUNGAN YG DIKAITKAN DGN PHTC, PSD, KUPD	TAHUN	RENCANA AKSI	
				- Bimbingan keterampilan dasar bagi PPKS/penghuni panti - Pemberian bantuan sosial bagi PPKS/penghuni panti sosial yang akan memasuki masa terminasi	
		KUPD 1 Dinsos. Pengadaan Mesin Jahit dan Becak Dagang Bagi Penyandang Disabilitas (PPM)	2026	50 paket (Deli Serdang, Asahan) - Output: 50 penyandang disabilitas yang mendapat bantuan usaha	Dinas Sosial
		KUPD 2 Dinsos. Penyediaan database masyarakat miskin berupa data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) berbasis digital	2026	1 Aplikasi Database PPKS dan PSKS	Dinas Sosial
		KUPD 1 Disnaker. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja dan penempatan tenaga kerja	2026	150 perusahaan, 2.500 lowongan kerja, dan 10.000 pelamar Lokasi: Provinsi Sumatera Utara Output: 1. Data Lowongan pekerjaan 2. Data Pelatihan tenaga kerja 3. Data Pelatihan Vokasi dan Produktivitas 4. Data Pencari kerja terdaftar 5. Data penempatan tenaga kerja 6. Data tenaga kerja tersertifikasi kompetensi	Dinas Ketenagakerjaan
		KUPD 1 DP3AKB. Pemberian Pelatihan Keterampilan Kerja bagi perempuan	2026	240 Peserta (Binjai, Langkat, Sergai, Tebing, Pd. Sidempuan, Dairi, Pakpak Bharat, Humbahas)	DP3AKB



NO	PSN	DUKUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA			PD PENANGUNGJAWAB
		DUKUNGAN YG DIKAITKAN DGN PHTC, PSD, KUPD	TAHUN	RENCANA AKSI	
		KUPD 1 Diskanla. Asuransi nelayan	2026	12.500 orang Output: Meningkatnya perlindungan sosial ketenagakerjaan terhadap nelayan sebesar 45,19 persen (83.157orang) dari 184.000 nelayan	Dinas Perikanan dan Kelautan
		KUPD 2 Diskanla. Bantuan Sarana Prasarana perikanan tangkap	2026	• 410.213 ton • Jumlah Produksi Perikanan Tangkap a. Perikanan tangkap : sampan, jala dan dermaga Asahan: Rp. 750.000.000 1. @sampan Rp. 45.000.000 10 unit : Rp. 450.000.000 2. @alat tangkap jaring insang mata 100 Rp. 1.500.000 ; 40 unit x 5 kelompok; Rp. 300.000.00 - Nias Utara: Rp. 738.200.000 1. @mesin kapal Rp. 70.000.000 5 unit : Rp. 350.000.000 2. @alat tangkap jaring insang mata 100 Rp. 1.500.000 ; 50 unit (Rp. 75.000.000) 3. cool box kap 200 liter Rp. 1.500.000 ; 100 unit (Rp. 150.000.000) 4. GPS Rp. 9.600.000; 17 unit (Rp. 163.200.000) - Tapanuli Tengah : Rp. 600.000.000 1.@ Jaring Insang Hanyut Rp.1.500.000 ; 200 pcs (Rp.300.000.000) 2. @ Jaring Kepiting Rp. 1.500.000 ; 200 pcs (Rp.300.000.000) - Langkat : Rp. 911.500.000 1. @ Jaring Kembung Rp.1.500.000 ; 200 pcs (Rp.300.000.000) 2. @ Sampan Rp. 20.000.000 : 20 unit (Rp. 400.000.000) 3. @ Jaring Gillnet Rp.1.500.000 ; 141 pcs (Rp.211.500.000)	Dinas Perikanan dan Kelautan
		KUPD 3. Bantuan sarana prasaranan perikanan budidaya	2026	342.279 ton berupa benih dan pakan ikan	Dinas Perikanan dan Kelautan
b		PHTC 6: Bantuan Hukum dan perlindungan rakyat	2026	• Pembentukan kelembagaan Prestice, Bimbingan Teknis Paralegal Desa dan Edukasi dan Sosialisasi PRESTICE di 25	Biro Hukum



NO	PSN	DUKUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA			PD PENANGUNGJAWAB
		DUKUNGAN YG DIKAITKAN DGN PHTC, PSD, KUPD	TAHUN	RENCANA AKSI	
	Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	melalui Restorative Justice (PRESTICE).		kabupaten/kota (Asahan, Batubara, Dairi, Deliserdang, Humbahas, Karo, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Langkat, Madina, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Palas. Paluta, Pakpak Bharat, Samosir, Serdangbedagai, Simalungun, Tapsel, Tapteng, Taput, Toba • Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum selain kasus KDRT dan Narkoba • Pendampingan bagi masyarakat yang berhadapan dengan kasus tindak pidana ringan. • Pelatihan mediator tingkat kabupaten/kota (2 orang per kab/kota, dilaksanakan di Kota Medan)	
		PSD 11. Bantuan Sosial Produktif melalui Program Masyarakat Produktif (MAPRO)	2026	• Pendataan dan penetapan penerima manfaat (KK/KUBE) • Pembuatan Bank Data pensasaran masyarakat miskin sebanyak 200 KK (40 KUBE) di 4 Kab/Kota: Madina, Humbahas, Toba, Paluta, Dairi serta 200 KK (UEP) di Labusel, Batubara, Nias Selatan, Pakpak Barat, Nias	Dinas Sosial
		PSD 12. Pelaksanaan Program Pasar Murah Bergerak (PMB)	2026	Konsolidasi kelembagaan, integrasi sistem informasi daerah; Pelaksanaan Pasar Murah Bergerak (PMB) Lokasi: Mandailing Natal (kemiskinan struktural), Tapanuli Utara (akses terbatas), Nias Barat (isolasi logistik), Humbahas (wilayah dataran tinggi), Pakpak Bharat (akses sangat terbatas), Dairi (wilayah perbatasan), Batubara (wilayah pesisir), Toba (hinterland), Samosir (wilayah tertutup), Labuhanbatu Selatan (kemiskinan tinggi), Nias Selatan (akses sulit), Padang Lawas (rawan logistik), Padang Lawas Utara (wilayah sulit distribusi), Tapanuli Tengah (akses dan harga tinggi), Langkat (distribusi padat dan IHK)	DISPERINDAG ESDM
		PSD 13. Perlindungan Sosial bagi Tenaga Kerja Rentan (Subsidi BPJS Ketenagakerjaan)	2026	Perluasan kepesertaan pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.645 dengan skema penganggaran 20% Provinsi dan 80% Kab/Kota	Disnaker



NO	PSN	DUKUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA			PD PENANGUNGJAWAB
		DUKUNGAN YG DIKAITKAN DGN PHTC, PSD, KUPD	TAHUN	RENCANA AKSI	
				33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2	
		PSD 14. Revitalisasi, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Panti Sosial Provinsi	2026	• Penyusunan dokumen appraisal/penilaian kerusakan bekerjasama dengan Dinas PUPR • Penyusunan dokumen perencanaan (jasa konsultan perencanaan) untuk 13 panti sosial • Bimbingan keterampilan dasar bagi PPKS/penghuni pantiPemberian bantuan sosial bagi PPKS/penghuni panti sosial yang akan memasuki masa terminasi	Dinas Sosial
		KUPD 1 Dinsos. Pengadaan Mesin Jahit dan Becak Dagang Bagi Penyandang Disabilitas (PPM)	2026	50 paket (Deli Serdang, Asahan) Output: 50 penyandang disabilitas yang mendapat bantuan usaha	Dinas Sosial
		KUPD 2 Dinsos. Penyediaan database masyarakat miskin berupa data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) berbasis digital	2026	1 Aplikasi Database PPKS dan PSKS	Dinas Sosial
		KUPD 1 Disnaker. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja dan penempatan tenaga kerja	2026	150 perusahaan, 2.500 lowongan kerja, dan 10.000 pelamar Lokasi: Provinsi Sumatera Utara Output: 1. Data Lowongan pekerjaan 2. Data Pelatihan tenaga kerja 3. Data Pelatihan Vokasi dan Produktivitas 4. Data Pencari kerja terdaftar 5. Data penempatan tenaga kerja	Dinas Ketenagakerjaan



NO	PSN	DUKUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA			PD PENANGUNGJAWAB
		DUKUNGAN YG DIKAITKAN DGN PHTC, PSD, KUPD	TAHUN	RENCANA AKSI	
				6. Data tenaga kerja tersertifikasi kompetensi	
		KUPD 1 DP3AKB. Pemberian Pelatihan Keterampilan Kerja bagi perempuan	2026	240 Peserta (Binjai, Langkat, Sergai, Tebing, Pd. Sidempuan, Dairi, Pakpak Bharat, Humbahas)	DP3AKB
		KUPD 1 Diskanla. Asuransi nelayan	2026	12.500 orang Output: Meningkatnya perlindungan sosial ketenagakerjaan terhadap nelayan sebesar 45,19 persen (83.157orang) dari 184.000 nelayan	Dinas Perikanan dan Kelautan
		KUPD 2 Diskanla. Bantuan Sarana Prasarana perikanan tangkap	2026	410.213 ton Jumlah Produksi Perikanan Tangkap a. Perikanan tangkap : sampan, jala dan dermaga Asahan: Rp. 750.000.000 1. @sampan Rp. 45.000.000 10 unit : Rp. 450.000.000 2. @alat tangkap jaring insang mata 100 Rp. 1.500.000 ; 40 unit x 5 kelompok; Rp. 300.000.00 Nias Utara: Rp. 738.200.000 1. @mesin kapal Rp. 70.000.000 5 unit : Rp. 350.000.000 2. @alat tangkap jaring insang mata 100 Rp. 1.500.000 ; 50 unit (Rp. 75.000.000) 3. cool box kap 200 liter Rp. 1.500.000 ; 100 unit (Rp. 150.000.000) 4. GPS Rp. 9.600.000; 17 unit (Rp. 163.200.000) Tapanuli Tengah : Rp. 600.000.000 1.@ Jaring Insang Hanyut Rp.1.500.000 ; 200 pcs (Rp.300.000.000) 2. @ Jaring Kepiting Rp. 1.500.000 ; 200 pcs (Rp.300.000.000) Langkat : Rp. 911.500.000 1. @ Jaring Kembung Rp.1.500.000 ; 200 pcs (Rp.300.000.000) 2. @ Sampan Rp. 20.000.000 : 20 unit (Rp. 400.000.000) 3. @ Jaring Gillnet Rp.1.500.000 ; 141 pcs (Rp.211.500.000)	Dinas Perikanan dan Kelautan



NO	PSN	DUKUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA			PD PENANGUNGJAWAB
		DUKUNGAN YG DIKAITKAN DGN PHTC, PSD, KUPD	TAHUN	RENCANA AKSI	
		KUPD 3. Bantuan sarana prasaranan perikanan budidaya	2026	342.279 ton berupa benih dan pakan ikan	Dinas Perikanan dan Kelautan
c	Sekolah Rakyat	PHTC 1: Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) Kepulauan Nias (2026), Kepulauan Nias dan Pantai Barat (2027), Kepulauan Nias , Pantai Barat dan Dataran Tinggi (2028), Kepulauan Nias, Pantai Barat, Dataran Tinggi dan Pantai Timur (2029) 33 Kabupaten/Kota	2026	Implementasi Program Bersekolah Gratis • Zona Kepulauan Nias	Dinas Pendidikan
		PSD 1. Pemenuhan 100% Fasilitas Listrik dan Layanan Internet pada Seluruh SMA/SMK/SLB di Sumatera Utara		Instalasi dan aktivasi pada titik lokasi bekerjasama dengan provider (Tahun 2025) Listrik : 35 sekolah (8 SMA dan 27 SMK) a. LISTRIK GRATIS 8 SMA: SMA NEGERI 1 PULAU SIMUK KAB NIAS SELATAN (PLTS), SMA NEGERI 2 ALASA KAB NIAS UTARA (PLTS), SMA NEGERI 2 HILIMIGIA KAB NIAS SELATAN (PLTS), SMA NEGERI 2 MUARA BATANG GADIS, KAB. MANDAILING NATAL (PLTS), SMA NEGERI 1 TANAH MASA, KAB. NIAS SELATAN, SMA NEGERI 1 HIBALA KAB. NIAS SELATAN, SMA NEGERI 2 HIBALA KAB. NIAS SELATAN, SMA NEGERI 9 PADANGSIDIMPUAN 27 SMK: SMK NEGERI 1 AEK BILAH KAB TAPANULI SELATAN, SMK NEGERI 2 GUNUNGSITOLI KOTA GUNUNG SITOLI, SMK NEGERI 1 BAWOLATO KAB. NIAS, SMK NEGERI 1 BOTOMUZOI KAB. NIAS, SMK NEGERI 1 GIDO KAB. NIAS, SMK NEGERI 1	Dinas Pendidikan



NO	PSN	DUKUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA			PD PENANGUNGJAWAB
		DUKUNGAN YG DIKAITKAN DGN PHTC, PSD, KUPD	TAHUN	RENCANA AKSI	
				HILIDUHO KAB. NIAS, SMK NEGERI 1 IDANOGAWO KAB. NIAS, SMK NEGERI 1 ULUGAWO KAB. NIAS, SMK NEGERI 2 BOTOMUZOI KAB. NIAS, SMK NEGERI 2 IDANOGAWO KAB. NIAS, SMK NEGERI 2 SOMOLOMOLO KAB. NIAS, SMK NEGERI 3 HILISERANGKAI KAB. NIAS, SMK NEGERI 1 ALASA KAB. NIAS UTARA, SMK NEGERI 1 LAHEWA KAB. NIAS UTARA, SMK NEGERI 1 LOTU KAB. NIAS UTARA, SMK NEGERI 1 NAMOHALU ESIWA KAB. NIAS UTARA, SMK NEGERI 1 SAWO KAB. NIAS UTARA, SMK NEGERI 1 SITOLU ORI KAB. NIAS UTARA, SMK NEGERI 1 TUGALA OYO KAB. NIAS UTARA, SMK NEGERI 2 AFULU KAB. NIAS UTARA, SMK NEGERI 2 LOTU KAB. NIAS UTARA, SMK NEGERI 2 NAMOHALU ESIWA KAB. NIAS UTARA, SMK NEGERI 2 TUGALA OYO KAB. NIAS UTARA, SMK NEGERI 1 SUSUA KAB. NIAS SELATAN, SMK NEGERI 1 ULUNOYO KAB. NIAS SELATAN, SMK NEGERI 1 UMBUNASI KAB. NIAS SELATAN, SMK NEGERI 2 SUSUA KAB. NIAS SELATAN	
			2026	1.Pembiayaan tagihan listrik dan Perangkat Internet 2.Pemeliharaan & maintenance	
		PSD 2. Pembangunan 4 SMA/SMK/SLB Unggulan (Nias/SMA - 2026, Asahan/SMK - 2027, Samosir/SMK - 2028, Karo/SLB - 2029)	2026	Pembangunan fisik sekolah Unggulan SMAN Sukma Nias, Kajian Akademis dan Perencanaan Pembangunan Sekolah Unggulan SMKN 1 Tinggi Raja Asahan	Dinas Pendidikan
		PSD 3. Rehabilitasi Ruang Kelas SMA/SMK/SLB sebanyak 490 Sekolah	2026	Pelaksanaan Fisik Tahap I – 150 Ruang Kelas (2026) di 21 Kab/Kota Medan, Binjai, Langkat, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Asahan, Tanjung Balai, Labuhan Batu, Pematang Siantar, Samosir, Toba, Sibolga, Padang Sidempuan, Madina, Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan, Padang Lawas Utara, Nias, Nias Selatan, Gunung Sitoli, Nias Utara, Nias Barat	Dinas Pendidikan



NO	PSN	DUKUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA			PD PENANGUNGJAWAB
		DUKUNGAN YG DIKAITKAN DGN PHTC, PSD, KUPD	TAHUN	RENCANA AKSI	
		PSD 4. Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Unit Sekolah Baru	2026	Pembangunan RKB (mendesak) Tahap II (2026) sebanyak 80 RKB di 19 Kab/Kota Langkat, Binjai, Medan, Dairi, Serdang Bedagai, Batubara, Asahan, Simalungun, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Padang Sidempuan, Nias, Nias Selatan, Nias Barat, Nias Utara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 4 unit USB	Dinas Pendidikan
		KUPD 4 Disdik. Penyusunan Buku Kurikulum muatan Lokal “MARSIPATURE HUTANABE” yang akan diterapkan di SMA/SMK di Provinsi Sumatera Utara	2026	Cetak Penggadaan Buku Kurikulum muatan Lokal “MARSIPATURE HUTANABE” yang akan diterapkan di SMA/SMK di Provinsi Sumatera Utara (SMA dan SMK (Negeri dan Swasta): 40 eksemplar x 2.000 Sekolah)	Dinas Pendidikan
		KUPD 7 Disdik. Pembentukan SMA Terbuka dengan sistem Pembelajaran Jarak Jauh	2026	56 Rombel untuk Kelas X dan XI di SMA Terbuka 14 Kab/Kota (Serdang Bedagai, Padanglawas, Batubara, Tapteng, Labusel, Simalungun, Medan, Deli Serdang, Langkat, Asahan, Tanjungbalai, Madina, Tapsel)	Dinas Pendidikan
		KUPD 2 Dinas Perpustakaan dan Arsip. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka melalui Bahan Bacaan Digital Sumut (Baca Di Sumut) Pengadaan Titik Baca Digital untuk peningkatan Literasi Masyarakat	2026	Penyediaan Bahan Bacaan Digital berupa E-Book sebanyak 1000 Judul masing-masing Kab/Kota Lokus : Tapanuli Utara , Serdang Badagai, Samosir, Mandailing Natal, Asahan	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		KUPD 3 Dinas Perpustakaan dan Arsip. Peningkatan Literasi	2026	Penyediaan Fasilitas Perpustakaan berupa Buku Perpustakaan 500 Eks, Komputer/PC, Printer dan Rak Buku 2 Buah.	Dinas Perpustakaan dan Arsip



NO	PSN	DUKUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA			PD PENANGUNGJAWAB
		DUKUNGAN YG DIKAITKAN DGN PHTC, PSD, KUPD	TAHUN	RENCANA AKSI	
		Berbasis Inklusi Sosial untuk Peningkatan Minat baca dan Literasi Masyarakat di Pedesaan		Lokus Kegiatan : Perpustakaan Desa Wisata Kolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu	
d	Pembangunan 3 Juta Rumah	PHTC 5.c: Peningkatan Kualitas Permukiman Layak, Terjangkau, dan Inklusif melalui Penyediaan Hunian Murah serta dukungan terhadap pelaksanaan program 3 juta rumah	2026	– Menentuk Tim Pelaksana, Anggaran Biaya – Survey Lokasi di setiap Kab/Kota – Membuat Nota Kesepahaman/Nota kerjasama dengan mitra terkait (REI dan Bank Sumut, dll) – Penyediaan data dan/atau informasi statistika MBR dan ASN Pemerintah Daerah – Perluasan pemasaran dan kepemilikan rumah bagi MBR dan ASN – Pembangunan Fisik setiap Tahun – Mengevaluasi dampak program dan penataan lingkungan Kab. Labuhanbatu Selatan, Kab. Toba, Kab. Langkat, Kab. Nias Selatan, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Padang Lawas dan Kab. Padang Lawas Utara	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Ketahanan Pangan				
a	Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan)	PHTC 5.b. Penguatan Infrastruktur Irigasi dan Sumber Air Pertanian untuk Mendukung Swasembada Pangan Berkelanjutan	2026	Peningkatan jaringan irigasi sekunder di Batubara, Padanglawas Utara, dan Simalungun; target 6.776 Ha. Kab.Batubara - DI.Cinta Maju/Cinta Damai, Batubara- DI. Purwodadi, K.P.Siantar/Simalungun-. DI. Rambung Merah, Batubara- DI.Simodong, Batubara- DI.Tanjung Muda, Padang Lawas Utara- DI.Padang Garugur, Kab.Karo- DI.Parit Lompaten, Kab.Mandailing Natal- DI Roburan Maga, Kab. Serdang Bedagai- DI. Pekan Kemis	Dinas PUPR
		KUPD 2 Dinas Ketapang TPH. Digitalisasi Produk Pertanian Lokal	2025-2030	– Menyediakan informasi harga komoditas dan ketersediaan hasil pertanian secara <i>real-time</i> – Memudahkan monitoring dan analisis perkembangan komoditas.	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH
b		PHTC 3: Program Jaminan Kestabilan Harga	2026	1. Pemetaan lokasi gudang dan kebutuhan digitalisasi pencatatan pasokan.	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH



NO	PSN	DUKUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA			PD PENANGUNGJAWAB
		DUKUNGAN YG DIKAITKAN DGN PHTC, PSD, KUPD	TAHUN	RENCANA AKSI	
	Pendayagunaan Penyuluh Pertanian	Komoditi Pangan (JASKOP)		2. Pengadaan dan renovasi gudang serta pelatihan pencatatan digital. 3. Uji coba pencatatan digital hasil panen di wilayah percontohan. 4. Pelatihan pengolahan dan pengemasan produk turunan cabai merah. 5. Pembangunan 51 unit Solar Dryer Dome (Simalungun 25 unit, Dairi 14 unit, Taput 12). 6. Identifikasi Kontrak farming dengan kelompok tani 7. MOU antara BUMD dengan kelompok petani 8. Penyerapan produksi oleh BUMD 9. Tahapan pengolahan dan distribusi 10. Penignkatan kapasitas petani terhadap pengguna SDD	
		PSD 24. Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Unggulan Padi, Jagung, Cabai Merah, dan bawang merah	2026	Pembuatan masterplan dan Pembangunan sarana dan prasarana produksi Kawasan Padi: Deli Serdang, Simalungun. Kawasan Jagung: Humbahas, Langkat. Kawasan Cabai Merah: Simalungun, Dairi. Kawasan Bawang Merah: Humbang, Samosir.	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH
		PSD 25. Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Peternakan unggulan	2026	– verifikasi CPCL dan sosialisasi awal kepada kelompok peternak di lokasi intervensi pengembangan kawasan yang dilaksanakan mulai bulan april – pemberian 100 ekor sapi potong kepada 10 kelompok tani/ peternak di Kab. Serdang Bedagai, 30 ekor sapi perah beserta pembangunan kandang dan alat pengolah susu kepada 3 kelompok tani/ peternak di Kab. Karo, 200 ekor kambing kepada 10 kelompok tani/ peternak, dan 100 ekor babi kepada 10 kelompok tani/ peternak di Kab. Nias dilaksanakan pada bulan September.	DISBUNAK
		PSD 26. Program pengembangan bibit unggul pertanian	2026	Tahap Uji Multilokasi, MT (Musim Tanam): Penanaman di 5 kabupaten	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH



NO	PSN	DUKUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA			PD PENANGUNGJAWAB
		DUKUNGAN YG DIKAITKAN DGN PHTC, PSD, KUPD	TAHUN	RENCANA AKSI	
				Deli Serdang, Langkat, Simalungun, Serdang Bedagai, Asahan dan Balai Besar Perakitan Dan Balai Besar Modernisasi Pertanian Tanaman Padi - Subang Provinsi Jawa Barat	
		PSD 27. Fasilitasi Akses Permodalan Terhadap Kelompok Tani	2026	Mulai pelaksanaan Temu Pembiayaan tahap I dan II, pendampingan realisasi kredit, pelatihan manajemen keuangan bagi kelompok tani penerima pembiayaan, serta monitoring awal terhadap usaha penerima kredit. 33 Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH
		KUPD 5. Dinas Ketapang TPH. Pemberdayaan penyuluh pertanian serta Pelatihan dan Edukasi Pertanian Berbasis Teknologi	2026	Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian, Edukasi teknologi irigasi, penggunaan Teknologi untuk pemetaan lahan dan Pelatihan tentang pemasaran daring dan pemanfaatan platform e-commerce untuk penjualan produk pertanian Output: Jumlah penyuluh aktif yang mendapatkan pemberdayaan serta Pelatihan dan Edukasi Pertanian Berbasis Teknologi sebanyak 576 orang	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH
c	Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah	PHTC 3: Program Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pangan (JASKOP)	2026	- Pemetaan lokasi gudang dan kebutuhan digitalisasi pencatatan pasokan. - Pengadaan dan renovasi gudang serta pelatihan pencatatan digital. - Uji coba pencatatan digital hasil panen di wilayah percontohan. - Pelatihan pengolahan dan pengemasan produk turunan cabai merah. - Pembangunan 51 unit Solar Dryer Dome (Simalungun 25 unit, Dairi 14 unit, Taput 12) - Identifikasi Kontrak farming dengan kelompok tani - MOU antara BUMD dengan kelompok petani - Penyerapan produksi oleh BUMD - Tahapan pengolahan dan distribusi - Penignkatan kapasitas petani terhadap pengguna SDD	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH



NO	PSN	DUKUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA			PD PENANGUNGJAWAB
		DUKUNGAN YG DIKAITKAN DGN PHTC, PSD, KUPD	TAHUN	RENCANA AKSI	
		KUPD 4 Dinas Ketapang TPH. Gerakan Pangan Murah	2026	Gerakan Pangan Murah (GPM) dilaksanakan untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan tingkat produsen dan konsumen di Provinsi Sumatera Utara Dilaksanakan sebanyak 20 kali (5 kali di Halaman Dinas Ketapang TPH dan dilaksanakan masing - masing 1 kali di Kab. Deli Serdang, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Batubara, Kab. Asahan, Kab. Labuhanbatu, Kab. Labuhanbatu Utara, Kab. Simalungun, Kab. Karo, Kab. Toba, Kab. Samosir, Kab. Dairi, Padang Sidempuan, Sibolga, Tj. Balai dan Binjai) Rincain belanja kegiatan ini meliputi ; Sewa Tenda Dome 5x5x7,5 m seharga Rp 38.206.214, Sewa Kurasi Rp 1.836.837, Sewa Meja Stan Rp 979.647 , Konsumsi Petugas Rp. 3.820.621 dan Alat/media promosi Rp. 6.202.424 Total anggaran yang dibutuhkan dalam 20 kali pelaksanaan kegiatan adalah Rp 1.020.914.864	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH
d	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate)	PHTC 3: Program Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pangan (JASKOP)	2026	1. Pemetaan lokasi gudang dan kebutuhan digitalisasi pencatatan pasokan. 2. Pengadaan dan renovasi gudang serta pelatihan pencatatan digital. 3. Uji coba pencatatan digital hasil panen di wilayah percontohan. 4. Pelatihan pengolahan dan pengemasan produk turunan cabai merah. 5. Pembangunan 51 unit Solar Dryer Dome (Simalungun 25 unit, Dairi 14 unit, Taput 12) 6. Identifikasi Kontrak farming dengan kelompok tani 7. MOU antara BUMD dengan kelompok petani 8. Penyerapan produksi oleh BUMD 9. Tahapan pengolahan dan distribusi 10. Peningkatan kapasitas petani terhadap pengguna SDD	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH
		PSD 24. Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Unggulan Padi, Jagung,	2026	Pembuatan masterplan dan Pembangunan sarana dan prasarana produksi Kawasan Padi: Deli Serdang, Simalungun. Kawasan Jagung: Humbahas, Langkat	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH



NO	PSN	DUKUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA			PD PENANGUNGJAWAB
		DUKUNGAN YG DIKAITKAN DGN PHTC, PSD, KUPD	TAHUN	RENCANA AKSI	
		Cabai Merah, dan bawang merah		Kawasan Cabai Merah: Simalungun, Dairi Kawasan Bawang Merah: Humbang, Samosir	
		PSD 26. Program pengembangan bibit unggul pertanian	2026	Tahap Uji Multilokasi, MT (Musim Tanam): Penanaman di 5 kabupaten Deli Serdang, Langkat, Simalungun, Serdang Bedagai, Asahan dan Balai Besar Perakitan Dan Balai Besar Modernisasi Pertanian Tanaman Padi - Subang Provinsi Jawa Barat	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH
		PSD 27. Fasilitasi Akses Permodalan Terhadap Kelompok Tani	2026	Mulai pelaksanaan Temu Pembiayaan tahap I dan II, pendampingan realisasi kredit, pelatihan manajemen keuangan bagi kelompok tani penerima pembiayaan, serta monitoring awal terhadap usaha penerima kredit. 33 Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH
		KUPD 1 Dinas Ketapang TPH. Pelatihan petani muda milenial dan Brigade Pangan	2026	300 orang petani milenial yang mendapatkan pelatihan dan menjadi brigade pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH
		KUPD 3 Dinas Ketapang TPH. Program pengembangan bibit unggul pertanian (Benih Padi)	2026	Uji multilokasi varietas padi hibrida Sumatera Utara di 5 kabupaten (Deli Serdang, Langkat, Simalungun, Serdang Bedagai, Asahan) serta di Subang – Jawa Barat.	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH
		KUPD 5. Dinas Ketapang TPH. Pemberdayaan penyuluh pertanian serta Pelatihan dan Edukasi Pertanian Berbasis Teknologi	2026	Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian, Edukasi teknologi irigasi, penggunaan Teknologi untuk pemetaan lahan dan Pelatihan tentang pemasaran daring dan pemanfaatan <i>platform e-commerce</i> untuk penjualan produk pertanian Output: Jumlah penyuluh aktif yang mendapatkan pemberdayaan serta Pelatihan dan Edukasi Pertanian Berbasis Teknologi sebanyak 576 orang	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH
		KUPD 6 Dinas Ketapang TPH. Pengembangan	2026	Rapat Pendataan kepemilikan lahan pertanian dan Pengawasan kepemilikan lahan yang Terintegrasi dengan Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH



NO	PSN	DUKUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA			PD PENANGUNGJAWAB
		DUKUNGAN YG DIKAITKAN DGN PHTC, PSD, KUPD	TAHUN	RENCANA AKSI	
		Sistem Pendataan kepemilikan lahan pertanian dan pengawasan kepemilikan lahan yang terintegrasi dengan kabupaten/kota		melalui Pendataan Kepemilikan Lahan dengan Aplikasi ARCGis Jumlah kabupaten/kota yang terhubung dalam sistem pendataan sebanyak 7 Kabupaten (Serdang Bedagai, Simalungun, Batu Bara, Asahan, Labuhan Batu, Toba, Samosir)	
3	Kesehatan untuk semua				
a	Stunting	PHTC 2: Program Berobat Gratis (Probis) melalui Program Universal Health Coverage (UHC) (mulai Oktober tahun 2025, UHC+ tahun 2026 - 2030).	2026	Pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara • 33 Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
		PSD 9. Beasiswa Ikatan Dinas bagi Dokter Spesialis dan dokter spesialis residen di Wilayah Kurang Terlayani (2025 – 2030)	2026	– Pemenuhan Dokter Spesialis melalui pemberian beasiswa bekerjasama dengan Perguruan Tinggi yakni USU dan UGM – Distribusi Dokter Spesialis sebagai upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Primer dan Rujukan melalui dokter residence (Layanan MedisMerata) Tahun 2025 - 2030 Sisa Pemenuhan 4 Dokter Spesialis Dasar + 3 Penunjang (4 RSUD di 4 Kabupaten) DTPK Kepulauan Nias RSUD Pratama Lologolu Soguna Bazato (3 Orang) Nias Barat, Pemenuhan 4 Dokter Spesialis Dasar + 3 Penunjang (4 RSUD di 4 Kabupaten), RSUD Lausimomo UPT Dinkes Kab. Madina, RSUD Sibuhuan Kab. Palas, RSUD Pintu Padang kab. Tapsel, RSUD Bangun Purba Kab. Deliserdang, RSUD Padang Sidempuan Kota Padang Sidempuan. Lanjutan Sasaran 2025 : 21 Peserta	Dinas Kesehatan
		PSD 10. Dukungan Pengembangan Rumah Sakit Unggulan (Pengembangan Rumah Sakit Unggulan dan Pemenuhan Sarana	2026	Penyusunan Kajian dan Dokumen Perencanaan Peningkatan Sarana Prasarana RSUD Lau Simomo, RSUD Mata, RSUD Paru Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan serta Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit 2026	Dinas Kesehatan



NO	PSN	DUKUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA			PD PENANGUNGJAWAB
		DUKUNGAN YG DIKAITKAN DGN PHTC, PSD, KUPD	TAHUN	RENCANA AKSI	
		Prasarana dan Alat Kesehatan)			
		KUPD 3 Dinkes. Pencegahan dan Penurunan Stunting	2026	Pemberian makanan pendamping ASI di 10 Kab/Kota Output: Jumlah Pemberian makanan pendamping ASI sebanyak 1.570 balita	Dinas Kesehatan
		KUPD 1 UPT RS Haji. Peningkatan layanan unggulan KJSU-KIA (Kanker, Jantung, Stroke, Urologi-Nefrologi, dan Kesehatan Ibu Anak) melalui (Pelatihan Tenaga Kesehatan dalam Pemanfaatan Alat Kesehatan KJSU-KIA serta Penyediaan alat kesehatan penunjang lainnya (Kedokteran Umum, Laboratorium, dll)	2026	50 Orang terlatih dan 15 jenis alat Kesehatan Layanan KJSU-KIA dan penunjang lainnya	UPT RS Haji
b	Pemeriksaan Kesehatan Gratis	PHTC 2: Program Berobat Gratis (Probis) melalui Program Universal Health Coverage (UHC) (mulai Oktober tahun 2025, UHC+ tahun 2026 - 2030).	2026	Pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara 33 Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
		PSD 8. Digitalisasi sistem kesehatan terintegrasi (Sumut e-Health Integration system)	2026	Edukasi penggunaan Aplikasi ke Masyarakat Tahun 2026 Pengembangan Aplikasi Sumut e-Health Integration System Tahun 2026-2029 33 Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan



NO	PSN	DUKUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA			PD PENANGUNGJAWAB
		DUKUNGAN YG DIKAITKAN DGN PHTC, PSD, KUPD	TAHUN	RENCANA AKSI	
		KUPD 1 Dinkes. Dukungan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis-KESUMA SEHAT	2026	9 Kab/Kota (Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Gunung Sitoli, Taput, Samosir, Simalungun, dan Palas)	Dinas Kesehatan
c	Jaminan Kesehatan Nasional	PHTC 2: Program Berobat Gratis (Probis) melalui Program Universal Health Coverage (UHC) (mulai Oktober tahun 2025, UHC+ tahun 2026 - 2030).	2026	Pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara 33 Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
		PSD 8. Digitalisasi sistem kesehatan terintegrasi (Sumut e-Health Integration system)	2026	Edukasi penggunaan Aplikasi ke Masyarakat Tahun 2026 Pengembangan Aplikasi Sumut e-Health Integration System Tahun 2026-2029 33 Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
		KUPD 1 Dinkes. Dukungan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis-KESUMA SEHAT	2026	9 Kab/Kota (Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Gunung Sitoli, Taput, Samosir, Simalungun, dan Palas)	Dinas Kesehatan
d	Penuntasan TBC	PHTC 2: Program Berobat Gratis (Probis) melalui Program Universal Health Coverage (UHC) (mulai Oktober tahun 2025, UHC+ tahun 2026 - 2030).	2026	Pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara 33 Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
		PSD 9. Beasiswa Ikatan Dinas bagi Dokter Spesialis dan dokter spesialis residen di Wilayah Kurang Terlayani (2025 - 2030)	2026	- Pemenuhan Dokter Spesialis melalui pemberian beasiswa bekerjasama dengan Perguruan Tinggi yakni USU dan UGM - Distribusi Dokter Spesialis sebagai upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Primer dan Rujukan melalui dokter residence (Layanan MedisMerata) Tahun 2025 - 2030 Sisa Pemenuhan 4 Dokter Spesialis Dasar + 3 Penunjang (4 RSUD di 4 Kabupaten) DTPK Kepulauan Nias RSUD Pratama	Dinas Kesehatan



NO	PSN	DUKUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA			PD PENANGUNGJAWAB
		DUKUNGAN YG DIKAITKAN DGN PHTC, PSD, KUPD	TAHUN	RENCANA AKSI	
				Lologolu Soguna Bazato (3 Orang) Nias Barat, Pemenuhan 4 Dokter Spesialis Dasar + 3 Penunjang (4 RSUD di 4 Kabupaten), RSUD Lausimomo UPT Dinkes Kab. Madina, RSUD Sibuhuan Kab. Palas, RSUD Pintu Padang kab. Tapsel, RSUD Bangun Purba Kab. Deliserdang, RSUD Padang Sidempuan Kota Padang Sidempuan. Lanjutan Sasaran 2025 : 21 Peserta	
		PSD 10. Dukungan Pengembangan Rumah Sakit Unggulan (Pengembangan Rumah Sakit Unggulan dan Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan)	2026	Penyusunan Kajian dan Dokumen Perencanaan Peningkatan Sarana Prasarana RSUD Lau Simomo, RSUD Mata, RSUD Paru Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan serta Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit 2026	Dinas Kesehatan
		KUPD 2 Dinkes. Penuntasan Kasus TBC	2026	Penemuan Kasus TB di 12 Kab/kota Output: Jumlah Kasus TB yang ditemukan di 12 Kab/Kota sebanyak 63.939 kasus	Dinas Kesehatan
e	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota	PSD 10. Dukungan Pengembangan Rumah Sakit Unggulan (Pengembangan Rumah Sakit Unggulan dan Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan)	2026	Penyusunan Kajian dan Dokumen Perencanaan Peningkatan Sarana Prasarana RSUD Lau Simomo, RSUD Mata, RSUD Paru Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan serta Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit 2026	Dinas Kesehatan
		KUPD 1 UPT RS Haji. Peningkatan layanan unggulan KJSU-KIA (Kanker, Jantung, Stroke, Urologi-Nefrologi, dan Kesehatan Ibu Anak) melalui (Pelatihan Tenaga	2026	50 Orang terlatih dan 15 jenis alat Kesehatan Layanan KJSU-KIA dan penunjang lainnya	UPT RS Haji



NO	PSN	DUKUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA			PD PENANGUNGJAWAB
		DUKUNGAN YG DIKAITKAN DGN PHTC, PSD, KUPD	TAHUN	RENCANA AKSI	
		Kesehatan dalam Pemanfaatan Alat Kesehatan KJSU-KIA serta Penyediaan alat kesehatan penunjang lainnya (Kedokteran Umum, Laboratorium, dll)			
		KUPD 1 UPT RSJ Ildrem. Pengembangan Kapasitas Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa Paripurna	2026	150 org Jumlah tenaga kesehatan (perawat dan dokter) yang terlatih	UPT RSJ Ildrem
4	Perluasan Akses Pendidikan				
a	Pembangunan dan Revitalisasi PAUD	PSD 1. Pemenuhan 100% Fasilitas Listrik dan Layanan Internet pada Seluruh SMA/SMK/SLB di Sumatera Utara		Instalasi dan aktivasi pada titik lokasi bekerjasama dengan provider (Tahun 2025) Listrik : 35 sekolah (8 SMA dan 27 SMK) a. LISTRIK GRATIS 8 SMA: SMA NEGERI 1 PULAU SIMUK KAB NIAS SELATAN (PLTS), SMA NEGERI 2 ALASA KAB NIAS UTARA (PLTS), SMA NEGERI 2 HILIMIGIA KAB NIAS SELATAN (PLTS), SMA NEGERI 2 MUARA BATANG GADIS, KAB. MANDAILING NATAL (PLTS), SMA NEGERI 1 TANAH MASA, KAB. NIAS SELATAN, SMA NEGERI 1 HIBALA KAB. NIAS SELATAN, SMA NEGERI 2 HIBALA KAB. NIAS SELATAN, SMA NEGERI 9 PADANGSIDIMPUAN 27 SMK: SMK NEGERI 1 AEK BILAH KAB TAPANULI SELATAN, SMK NEGERI 2 GUNUNGSITOLI KOTA GUNUNG SITOLI, SMK NEGERI 1 BAWOLATO KAB. NIAS, SMK NEGERI 1 BOTOMUZOI KAB. NIAS, SMK NEGERI 1 GIDO KAB. NIAS, SMK NEGERI 1 HILIDUHO KAB. NIAS, SMK NEGERI 1 IDANOGAWO KAB. NIAS, SMK NEGERI 1 ULUGAWO KAB. NIAS, SMK NEGERI 2	Dinas Pendidikan



NO	PSN	DUKUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA			PD PENANGUNGJAWAB
		DUKUNGAN YG DIKAITKAN DGN PHTC, PSD, KUPD	TAHUN	RENCANA AKSI	
				BOTOMUZOI KAB. NIAS, SMK NEGERI 2 IDANOGAWO KAB. NIAS, SMK NEGERI 2 SOMOLOMOLO KAB. NIAS, SMK NEGERI 3 HILISERANGKAI KAB. NIAS, SMK NEGERI 1 ALASA KAB. NIAS UTARA, SMK NEGERI 1 LAHEWA KAB. NIAS UTARA, SMK NEGERI 1 LOTU KAB. NIAS UTARA, SMK NEGERI 1 NAMOHALU ESIWA KAB. NIAS UTARA, SMK NEGERI 1 SAWO KAB. NIAS UTARA, SMK NEGERI 1 SITOLU ORI KAB. NIAS UTARA, SMK NEGERI 1 TUGALA OYO KAB. NIAS UTARA, SMK NEGERI 2 AFULU KAB. NIAS UTARA, SMK NEGERI 2 LOTU KAB. NIAS UTARA, SMK NEGERI 2 NAMOHALU ESIWA KAB. NIAS UTARA, SMK NEGERI 2 TUGALA OYO KAB. NIAS UTARA, SMK NEGERI 1 SUSUA KAB. NIAS SELATAN, SMK NEGERI 1 ULUNOYO KAB. NIAS SELATAN, SMK NEGERI 1 UMBUNASI KAB. NIAS SELATAN, SMK NEGERI 2 SUSUA KAB. NIAS SELATAN	
			2026	1.Pembiayaan tagihan listrik dan Perangkat Internet 2.Pemeliharaan & <i>maintenance</i>	
		PSD 2. Pembangunan 4 SMA/SMK/SLB Unggulan (Nias/SMA - 2026, Asahan/SMK - 2027, Samosir/SMK – 2028, Karo/SLB - 2029)	2026	Pembangunan fisik sekolah Unggulan SMAN Sukma Nias, Kajian Akademis dan Perencanaan Pembangunan Sekolah Unggulan SMKN 1 Tinggi Raja Asahan	Dinas Pendidikan
		PSD 3. Rehabilitasi Ruang Kelas SMA/SMK/SLB sebanyak 490 Sekolah	2026	Pelaksanaan Fisik Tahap I – 150 Ruang Kelas (2026) di 21 Kab/Kota Medan, Binjai, Langkat, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Asahan, Tanjung Balai, Labuhan Batu, Pematang Siantar, Samosir, Toba, Sibolga, Padang Sidempuan, Madina, Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan, Padang Lawas Utara, Nias, Nias Selatan, Gunung Sitoli, Nias Utara, Nias Barat	Dinas Pendidikan
		PSD 4. Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Unit Sekolah Baru	2026	Pembangunan RKB (mendesak) Tahap II (2026) sebanyak 80 RKB di 19 Kab/Kota Langkat, Binjai, Medan, Dairi, Serdang Bedagai, Batubara,	Dinas Pendidikan



NO	PSN	DUKUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA			PD PENANGUNGJAWAB
		DUKUNGAN YG DIKAITKAN DGN PHTC, PSD, KUPD	TAHUN	RENCANA AKSI	
				Asahan, Simalungun, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Padang Sidempuan, Nias, Nias Selatan, Nias Barat, Nias Utara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 4 unit USB	
		KUPD 1. Disdik. Peningkatan kompetensi Guru Pendamping Khusus SMA/SMK Inklusi Tunarungu melalui pelatihan Guru Inklusi dari SLB Kab/Kota kepada SMA/SMK di kab/kota	2026	22 guru pendamping (Guru SLB didatangkan Melatih 2 Org Guru selama 3 bulan di lokasi masing-masing Sekolah yang dipilih sebagai sekolah Inklusi pada 11 sekolah yaitu di SMKN 10 Medan, SMAN 16 Medan, SMAN 1 Percut Sei Tuan, SMKN 1 Percut Sei Tuan, SMAN 4 Pematangsiantar, SMKN 1 Pematangsiantar, SMAN 2 Kisaran, SMKN 1 Kisaran, SMAN 6 Padang Sidempuan, SMKN 1 Padang Sidempuan, dan SMAN 2 Kabanjahe)	Dinas Pendidikan
		KUPD 2 Disdik. Peningkatan kompetensi Guru Pendamping Khusus SMA/SMK Inklusi Tunanetra melalui pelatihan Guru Inklusi dari SLB Kab/Kota kepada SMA/SMK di kab/kota	2026	8 guru pendamping (Guru SLB didatangkan Melatih 2 Org Guru selama 3 bulan di lokasi masing-masing Sekolah yang dipilih sebagai sekolah Inklusi pada 4 sekolah yaitu di SMKN 7 Medan, SMAN 13 Medan, SMAN 2 Siantar, SMAN 2 Binjai)	Dinas Pendidikan
		KUPD 3 Disdik. Pemberian alat bantu disabilitas bagi sekolah SMA/SMK melalui penyediaan infrastruktur Ramah Disabilitas	2026	15 Sekolah Inklusi SMKN 7 Medan, SMAN 13 Medan, SMAN 2 Siantar, SMAN 2 Binjai, SMKN 10 Medan, SMAN 16 Medan, SMAN 1 Percut Sei Tuan, SMKN 1 Percut Sei Tuan, SMAN 4 Pematangsiantar, SMKN 1 Pematangsiantar, SMAN 2 Kisaran, SMKN 1 Kisaran, SMAN 6 Padang Sidempuan, SMKN 1 Padang Sidempuan, dan SMAN 2 Kabanjahe	Dinas Pendidikan
		KUPD 4 Disdik. Penyusunan Buku Kurikulum muatan Lokal “MARSIPATURE HUTANABE” yang akan	2026	Cetak Pengadaan Buku Kurikulum muatan Lokal “MARSIPATURE HUTANABE” yang akan diterapkan di SMA/SMK di Provinsi Sumatera Utara (SMA dan SMK (Negeri dan Swasta): 40 eksemplar x 2.000 Sekolah)	Dinas Pendidikan



NO	PSN	DUKUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA			PD PENANGUNGJAWAB
		DUKUNGAN YG DIKAITKAN DGN PHTC, PSD, KUPD	TAHUN	RENCANA AKSI	
		diterapkan di SMA/SMK di Provinsi Sumatera Utara			
		KUPD 5 Disdik. Pelatihan Upskilling dan Reskilling Bagi Guru SMK secara Luring Berbasis Zonasi bagi 2.100 Guru SMK (Teknik Mesin, Otomotif, Design, Tata Boga, Agribisnis, Pariwisata, Seni dan industri kreatif)	2026	Pelatihan 525 Guru SMK (Cabdis I: wilayah Medan-Deli Serdang, Cabdis II: Langkat-Binjai, Cabdis III: Serdang Bedagai-Tebing Tinggi)	Dinas Pendidikan
		KUPD 6 Disdik. Link and Match SMK dan DUDI terutama dengan KEK Sei Mangke, KIM dan DUDI lainnya berbasis kearifan lokal	2026	101 SMK Negeri/Swasta	Dinas Pendidikan
		KUPD 7 Disdik. Pembentukan SMA Terbuka dengan sistem Pembelajaran Jarak Jauh	2026	56 Rombel untuk Kelas X dan XI di SMA Terbuka 14 Kab/Kota (Serdang Bedagai, Padanglawas, Batubara, Tapteng, Labusel, Simalungun, Medan, Deli Serdang, Langkat, Asahan, Tanjungbalai, Madina, Tapsel)	Dinas Pendidikan
		KUPD 8 Disdik. Revitalisasi Bangunan Sekolah	2026	2 Sekolah (SMAN 20 Medan dan SMAN 1 Salak Kab. Pakpak Bharat)	Dinas Pendidikan
		KUPD 1 Dinas Perpustakaan dan Arsip. Penyediaan Fasilitas Perpustakaan Sekolah Menengah untuk peningkatan Akreditasi Sekolah, minat baca dan literasi siswa	2026	Penyediaan Fasilitas Perpustakaan berupa Buku Perpustakaan 500 Eks, Komputer/PC, Printer dan Rak Buku 2 Buah. Lokus Kegiatan : SMA/K Unggulan Pemprovsum berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Provsum	Dinas Perpustakaan dan Arsip



NO	PSN	DUKUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA			PD PENANGUNGJAWAB
		DUKUNGAN YG DIKAITKAN DGN PHTC, PSD, KUPD	TAHUN	RENCANA AKSI	
b	Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah	PSD 1. Pemenuhan 100% Fasilitas Listrik dan Layanan Internet pada Seluruh SMA/SMK/SLB di Sumatera Utara		Listrik : 35 sekolah (8 SMA dan 27 SMK) a. LISTRIK GRATIS 8 SMA: SMA NEGERI 1 PULAU SIMUK KAB NIAS SELATAN (PLTS), SMA NEGERI 2 ALASA KAB NIAS UTARA (PLTS), SMA NEGERI 2 HILIMIGIA KAB NIAS SELATAN (PLTS), SMA NEGERI 2 MUARA BATANG GADIS, KAB. MANDAILING NATAL (PLTS), SMA NEGERI 1 TANAH MASA, KAB. NIAS SELATAN, SMA NEGERI 1 HIBALA KAB. NIAS SELATAN, SMA NEGERI 2 HIBALA KAB. NIAS SELATAN, SMA NEGERI 9 PADANGSIDIMPUAN 27 SMK: SMK NEGERI 1 AEK BILAH KAB TAPANULI SELATAN, SMK NEGERI 2 GUNUNGSITOLI KOTA GUNUNG SITOLI, SMK NEGERI 1 BAWOLATO KAB. NIAS, SMK NEGERI 1 BOTOMUZOI KAB. NIAS, SMK NEGERI 1 GIDO KAB. NIAS, SMK NEGERI 1 HILIDUHO KAB. NIAS, SMK NEGERI 1 IDANOGAWO KAB. NIAS, SMK NEGERI 1 ULUGAWO KAB. NIAS, SMK NEGERI 2 BOTOMUZOI KAB. NIAS, SMK NEGERI 2 IDANOGAWO KAB. NIAS, SMK NEGERI 2 SOMOLOMOLO KAB. NIAS, SMK NEGERI 3 HILISERANGKAI KAB. NIAS, SMK NEGERI 1 ALASA KAB. NIAS UTARA, SMK NEGERI 1 LAHEWA KAB. NIAS UTARA, SMK NEGERI 1 LOTU KAB. NIAS UTARA, SMK NEGERI 1 NAMOHALU ESIWA KAB. NIAS UTARA, SMK NEGERI 1 SAWO KAB. NIAS UTARA, SMK NEGERI 1 SITOLU ORI KAB. NIAS UTARA, SMK NEGERI 1 TUGALA OYO KAB. NIAS UTARA, SMK NEGERI 2 AFULU KAB. NIAS UTARA, SMK NEGERI 2 LOTU KAB. NIAS UTARA, SMK NEGERI 2 NAMOHALU ESIWA KAB. NIAS UTARA, SMK NEGERI 2 TUGALA OYO KAB. NIAS UTARA, SMK NEGERI 1 SUSUA KAB. NIAS SELATAN, SMK NEGERI 1 ULUNOYO KAB. NIAS SELATAN, SMK NEGERI 1 UMBUNASI KAB. NIAS SELATAN, SMK NEGERI 2 SUSUA KAB. NIAS SELATAN	Dinas Pendidikan
			2026	1. Pembiayaan tagihan listrik dan Perangkat Internet 2. Pemeliharaan & <i>maintenance</i>	



NO	PSN	DUKUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA			PD PENANGUNGJAWAB
		DUKUNGAN YG DIKAITKAN DGN PHTC, PSD, KUPD	TAHUN	RENCANA AKSI	
		PSD 2. Pembangunan 4 SMA/SMK/SLB Unggulan (Nias/SMA - 2026, Asahan/SMK - 2027, Samosir/SMK - 2028, Karo/SLB - 2029)	2026	Pembangunan fisik sekolah Unggulan SMAN Sukma Nias, Kajian Akademis dan Perencanaan Pembangunan Sekolah Unggulan SMKN 1 Tinggi Raja Asahan	Dinas Pendidikan
		PSD 3. Rehabilitasi Ruang Kelas SMA/SMK/SLB sebanyak 490 Sekolah	2026	Pelaksanaan Fisik Tahap I – 150 Ruang Kelas (2026) di 21 Kab/Kota Medan, Binjai, Langkat, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Asahan, Tanjung Balai, Labuhan Batu, Pematang Siantar, Samosir, Toba, Sibolga, Padang Sidempuan, Madina, Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan, Padang Lawas Utara, Nias, Nias Selatan, Gunung Sitoli, Nias Utara, Nias Barat	Dinas Pendidikan
		PSD 4. Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Unit Sekolah Baru	2026	Pembangunan RKB (mendesak) Tahap II (2026) sebanyak 80 RKB di 19 Kab/Kota Langkat, Binjai, Medan, Dairi, Serdang Bedagai, Batubara, Asahan, Simalungun, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Padang Sidempuan, Nias, Nias Selatan, Nias Barat, Nias Utara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 4 unit USB	Dinas Pendidikan
		KUPD 1. Disdik. Peningkatan kompetensi Guru Pendamping Khusus SMA/SMK Inklusi Tunarungu melalui pelatihan Guru Inklusi dari SLB Kab/Kota kepada SMA/SMK di kab/kota	2026	22 guru pendamping (Guru SLB didatangkan Melatih 2 Org Guru selama 3 bulan di lokasi masing-masing Sekolah yang dipilih sebagai sekolah Inklusi pada 11 sekolah yaitu di SMKN 10 Medan, SMAN 16 Medan, SMAN 1 Percut Sei Tuan, SMKN 1 Percut Sei Tuan, SMAN 4 Pematangsiantar, SMKN 1 Pematangsiantar, SMAN 2 Kisaran, SMKN 1 Kisaran, SMAN 6 Padang Sidimpunan, SMKN 1 Padang Sidimpunan, dan SMAN 2 Kabanjahe)	Dinas Pendidikan
		KUPD 2 Disdik. Peningkatan kompetensi	2026	8 guru pendamping (Guru SLB didatangkan Melatih 2 Org Guru selama 3 bulan di lokasi masing-masing Sekolah yang dipilih	Dinas Pendidikan



NO	PSN	DUKUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA			PD PENANGUNGJAWAB
		DUKUNGAN YG DIKAITKAN DGN PHTC, PSD, KUPD	TAHUN	RENCANA AKSI	
		Guru Pendamping Khusus SMA/SMK Inklusi Tunanetra melalui pelatihan Guru Inklusi dari SLB Kab/Kota kepada SMA/SMK di kab/kota		sebagai sekolah Inklusi pada 4 sekolah yaitu di SMKN 7 Medan, SMAN 13 Medan, SMAN 2 Siantar, SMAN 2 Binjai)	
		KUPD 3 Disdik. Pemberian alat bantu disabilitas bagi sekolah SMA/SMK melalui penyediaan infrastruktur Ramah Disabilitas	2026	15 Sekolah Inklusi SMKN 7 Medan, SMAN 13 Medan, SMAN 2 Siantar, SMAN 2 Binjai, SMKN 10 Medan, SMAN 16 Medan, SMAN 1 Percut Sei Tuan, SMKN 1 Percut Sei Tuan, SMAN 4 Pematangsiantar, SMKN 1 Pematangsiantar, SMAN 2 Kisaran, SMKN 1 Kisaran, SMAN 6 Padang Sidempuan, SMKN 1 Padang Sidempuan, dan SMAN 2 Kabanjahe	Dinas Pendidikan
		KUPD 4 Disdik. Penyusunan Buku Kurikulum muatan Lokal “MARSIPATURE HUTANABE” yang akan diterapkan di SMA/SMK di Provinsi Sumatera Utara	2026	Cetak Penggadaan Buku Kurikulum muatan Lokal “MARSIPATURE HUTANABE” yang akan diterapkan di SMA/SMK di Provinsi Sumatera Utara (SMA dan SMK (Negeri dan Swasta): 40 eksemplar x 2.000 Sekolah)	Dinas Pendidikan
		KUPD 5 Disdik. Pelatihan Upskilling dan Reskilling Bagi Guru SMK secara Luring Berbasis Zonasi bagi 2.100 Guru SMK (Teknik Mesin, Otomotif, Design, Tata Boga, Agribisnis, Pariwisata, Seni dan industri kreatif)	2026	Pelatihan 525 Guru SMK (Cabdis I: wilayah Medan-Deli Serdang, Cabdis II: Langkat-Binjai, Cabdis III: Serdang Bedagai-Tebing Tinggi)	Dinas Pendidikan
		KUPD 6 Disdik. Link and Match SMK dan DUDI terutama dengan KEK Sei Mangke, KIM dan DUDI lainnya berbasis kearifan lokal	2026	101 SMK Negeri/Swasta	Dinas Pendidikan



NO	PSN	DUKUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA			PD PENANGUNGJAWAB
		DUKUNGAN YG DIKAITKAN DGN PHTC, PSD, KUPD	TAHUN	RENCANA AKSI	
		KUPD 7 Disdik. Pembentukan SMA Terbuka dengan sistem Pembelajaran Jarak Jauh	2026	56 Rombel untuk Kelas X dan XI di SMA Terbuka 14 Kab/Kota (Serdang Bedagai, Padanglawas, Batubara, Tapteng, Labusel, Simalungun, Medan, Deli Serdang, Langkat, Asahan, Tanjungbalai, Madina, Tapsel)	Dinas Pendidikan
		KUPD 8 Disdik. Revitalisasi Bangunan Sekolah	2026	2 Sekolah (SMAN 20 Medan dan SMAN 1 Salak Kab. Pakpak Bharat)	Dinas Pendidikan
		KUPD 1 Dinas Perpustakaan dan Arsip. Penyediaan Fasilitas Perpustakaan Sekolah Menengah untuk pengingkatan Akreditasi Sekolah, minat baca dan literasi siswa	2026	Penyediaan Fasilitas Perpustakaan berupa Buku Perpustakaan 500 Eks, Komputer/PC, Printer dan Rak Buku 2 Buah. Lokus Kegiatan : SMA/K Unggulan Pemprovsum berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Provsum	Dinas Perpustakaan dan Arsip
c	Pembangunan dan Revitalisasi SMA Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran	PSD 1. Pemenuhan 100% Fasilitas Listrik dan Layanan Internet pada Seluruh SMA/SMK/SLB di Sumatera Utara		Listrik : 35 sekolah (8 SMA dan 27 SMK) a. LISTRIK GRATIS 8 SMA: SMA NEGERI 1 PULAU SIMUK KAB NIAS SELATAN (PLTS), SMA NEGERI 2 ALASA KAB NIAS UTARA (PLTS), SMA NEGERI 2 HILIMIGIA KAB NIAS SELATAN (PLTS), SMA NEGERI 2 MUARA BATANG GADIS, KAB. MANDAILING NATAL (PLTS), SMA NEGERI 1 TANAH MASA, KAB. NIAS SELATAN, SMA NEGERI 1 HIBALA KAB. NIAS SELATAN, SMA NEGERI 2 HIBALA KAB. NIAS SELATAN, SMA NEGERI 9 PADANGSIDIMPUAN 27 SMK: SMK NEGERI 1 AEK BILAH KAB TAPANULI SELATAN, SMK NEGERI 2 GUNUNGSITOLI KOTA GUNUNG SITOLI, SMK NEGERI 1 BAWOLATO KAB. NIAS, SMK NEGERI 1 BOTOMUZOI KAB. NIAS, SMK NEGERI 1 GIDO KAB. NIAS, SMK NEGERI 1 HILIDUHO KAB. NIAS, SMK NEGERI 1 IDANOGAWO KAB. NIAS, SMK NEGERI 1 ULUGAWO KAB. NIAS, SMK NEGERI 2 BOTOMUZOI KAB. NIAS, SMK NEGERI 2 IDANOGAWO KAB.	Dinas Pendidikan



NO	PSN	DUKUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA			PD PENANGUNGJAWAB
		DUKUNGAN YG DIKAITKAN DGN PHTC, PSD, KUPD	TAHUN	RENCANA AKSI	
				NIAS, SMK NEGERI 2 SOMOLOMOLO KAB. NIAS, SMK NEGERI 3 HILISERANGKAI KAB. NIAS, SMK NEGERI 1 ALASA KAB. NIAS UTARA, SMK NEGERI 1 LAHEWA KAB. NIAS UTARA, SMK NEGERI 1 LOTU KAB. NIAS UTARA, SMK NEGERI 1 NAMOHALU ESIWA KAB. NIAS UTARA, SMK NEGERI 1 SAWO KAB. NIAS UTARA, SMK NEGERI 1 SITOLU ORI KAB. NIAS UTARA, SMK NEGERI 1 TUGALA OYO KAB. NIAS UTARA, SMK NEGERI 2 AFULU KAB. NIAS UTARA, SMK NEGERI 2 LOTU KAB. NIAS UTARA, SMK NEGERI 2 NAMOHALU ESIWA KAB. NIAS UTARA, SMK NEGERI 2 TUGALA OYO KAB. NIAS UTARA, SMK NEGERI 1 SUSUA KAB. NIAS SELATAN, SMK NEGERI 1 ULUNOYO KAB. NIAS SELATAN, SMK NEGERI 1 UMBUNASI KAB. NIAS SELATAN, SMK NEGERI 2 SUSUA KAB. NIAS SELATAN	
			2026	1.Pembiayaan tagihan listrik dan Perangkat Internet 2.Pemeliharaan & maintenance	
		PSD 2. Pembangunan 4 SMA/SMK/SLB Unggulan (Nias/SMA - 2026, Asahan/SMK - 2027, Samosir/SMK – 2028, Karo/SLB - 2029)	2026	Pembangunan fisik sekolah Unggulan SMAN Sukma Nias, Kajian Akademis dan Perencanaan Pembangunan Sekolah Unggulan SMKN 1 Tinggi Raja Asahan	Dinas Pendidikan
		PSD 4. Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Unit Sekolah Baru	2026	Pembangunan RKB (mendesak) Tahap II (2026) sebanyak 80 RKB di 19 Kab/Kota Langkat, Binjai, Medan, Dairi, Serdang Bedagai, Batubara, Asahan, Simalungun, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Padang Sidempuan, Nias, Nias Selatan, Nias Barat, Nias Utara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 4 unit USB	Dinas Pendidikan
		KUPD 7 Disdik. Pembentukan SMA Terbuka dengan sistem Pembelajaran Jarak Jauh	2025-2030	Terlaksananya sekolah terbuka untuk memperluas akses pendidikan menengah bagi daerah terpencil dan kelompok kurang mampu, mengurangi disparitas layanan pendidikan	Dinas Pendidikan



NO	PSN	DUKUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA			PD PENANGUNGJAWAB
		DUKUNGAN YG DIKAITKAN DGN PHTC, PSD, KUPD	TAHUN	RENCANA AKSI	
		KUPD 8 Disdik. Revitalisasi Bangunan Sekolah	2025- 2030	Peningkatan kualitas pembelajaran dengan fasilitas sekolah yang lebih baik, sarana prasarana lengkap, serta lingkungan belajar yang nyaman akan meningkatkan mutu proses belajar-mengajar	Dinas Pendidikan
d	Makan Bergizi Gratis	PHTC 1: Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) Kepulauan Nias (2026), Kepulauan Nias dan Pantai Barat (2027), Kepulauan Nias , Pantai Barat dan Dataran Tinggi (2028), Kepulauan Nias, Pantai Barat, Dataran Tinggi dan Pantai Timur (2029) 33 Kabupaten/Kota	2026	Implementasi Program Bersekolah Gratis • Zona Kepulauan Nias	Dinas Pendidikan
		PHTC 2: Program Berobat Gratis (Probis) melalui Program Universal Health Coverage (UHC) (mulai Oktober tahun 2025, UHC+ tahun 2026 - 2030).	2026	Pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara • 33 Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
		KUPD 1 Dinkes. Dukungan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis- KESUMA SEHAT	2026	9 Kab/Kota (Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Gunung Sitoli, Taput, Samosir, Simalungun, dan Palas)	Dinas Kesehatan
		KUPD 3 Dinkes. Pencegahan dan Penurunan Stunting	2026	– Pemberian makanan pendamping ASI di 10 Kab/Kota, Jumlah Pemberian makanan pendamping ASI sebanyak 1.570 balita, – Penyediaan susu balita > 3 Tahun di 10 Kab/Kota, Jumlah Penyediaan susu balita > 3 Tahun sebanyak 4.570 balita – Penyediaan Susu Balita Pangan Olahan Keperluan Medis Kusus sebanyak 1.650 balita – Penyediaan Susu Ibu Hamil di 11 Kab/Kota, Penyediaan Susu Ibu Hamil sebanyak 4.420 org	Dinas Kesehatan



NO	PSN	DUKUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA			PD PENANGUNGJAWAB
		DUKUNGAN YG DIKAITKAN DGN PHTC, PSD, KUPD	TAHUN	RENCANA AKSI	
5	Pertumbuhan Ekonomi				
a	Pengendalian Inflasi	PHTC 3: Program Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pangan (JASKOP)	2026	1. Pemetaan lokasi gudang dan kebutuhan digitalisasi pencatatan pasokan. 2. Pengadaan dan renovasi gudang serta pelatihan pencatatan digital. 3. Uji coba pencatatan digital hasil panen di wilayah percontohan. 4. Pelatihan pengolahan dan pengemasan produk turunan cabai merah. 5. Pembangunan 51 unit Solar Dryer Dome (Simalungun 25 unit, Dairi 14 unit, Taput 12) 6. Identifikasi Kontrak farming dengan kelompok tani 7. MOU antara BUMD dengan kelompok petani 8. Penyerapan produksi oleh BUMD 9. Tahapan pengolahan dan distribusi 10. Penignkatan kapasitas petani terhadap pengguna SDD	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH
		PSD 12. Pelaksanaan Program Pasar Murah Bergerak (PMB)	2026	Konsolidasi kelembagaan, integrasi sistem informasi daerah; Pelaksanaan Pasar Murah Bergerak (PMB)	Disperindag ESDM
				Lokasi: Mandailing Natal (kemiskinan struktural), Tapanuli Utara (akses terbatas), Nias Barat (isolasi logistik), Humbahas (wilayah dataran tinggi), Pakpak Bharat (akses sangat terbatas), Dairi (wilayah perbatasan), Batubara (wilayah pesisir), Toba (hinterland), Samosir (wilayah tertutup), Labuhanbatu Selatan (kemiskinan tinggi), Nias Selatan (akses sulit), Padang Lawas (rawan logistik), Padang Lawas Utara (wilayah sulit distribusi), Tapanuli Tengah (akses dan harga tinggi), Langkat (distribusi padat dan IHK)	
		PSD 24. Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Unggulan Padi, Jagung, Cabai Merah, dan bawang merah	2026	Pembuatan masterplan dan Pembangunan sarana dan prasarana produksi Kawasan Padi: Deli Serdang, Simalungun. Kawasan Jagung: Humbahas, Langkat Kawasan Cabai Merah: Simalungun, Dairi Kawasan Bawang Merah: Humbang, Samosir	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH



NO	PSN	DUKUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA			PD PENANGUNGJAWAB
		DUKUNGAN YG DIKAITKAN DGN PHTC, PSD, KUPD	TAHUN	RENCANA AKSI	
		PSD 25. Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Peternakan unggulan	2026	– verifikasi CPCL dan sosialisasi awal kepada kelompok peternak di lokasi intervensi pengembangan kawasan yang dilaksanakan mulai bulan April – pemberian 100 ekor sapi potong kepada 10 kelompok tani/ peternak di Kab. Serdang Bedagai, 30 ekor sapi perah beserta pembangunan kandang dan alat pengolah susu kepada 3 kelompok tani/ peternak di Kab. Karo, 200 ekor kambing kepada 10 kelompok tani/ peternak, dan 100 ekor babi kepada 10 kelompok tani/ peternak di Kab. Nias dilaksanakan pada bulan September	DISBUNAK
		PSD 26. Program pengembangan bibit unggul pertanian	2026	Tahap Uji Multilokasi, MT (Musim Tanam): Penanaman di 5 kabupaten Deli Serdang, Langkat, Simalungun, Serdang Bedagai, Asahan dan Balai Besar Perakitan Dan Balai Besar Modernisasi Pertanian Tanaman Padi - Subang Provinsi Jawa Barat	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH
		PSD 27. Fasilitas Akses Permodalan Terhadap Kelompok Tani	2026	Mulai pelaksanaan Temu Pembiayaan tahap I dan II, pendampingan realisasi kredit, pelatihan manajemen keuangan bagi kelompok tani penerima pembiayaan, serta monitoring awal terhadap usaha penerima kredit. 33 Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH
		KUPD 4 Dinas Ketapang TPH. Gerakan Pangan Murah	2026	Gerakan Pangan Murah (GPM) dilaksanakan untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan tingkat produsen dan konsumen di Provinsi Sumatera Utara Dilaksanakan sebanyak 20 kali (5 kali di Halaman Dinas Ketapang TPH dan dilaksanakan masing - masing 1 kali di Kab. Deli Serdang, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Batubara, Kab. Asahan, Kab. Labuhanbatu, Kab. Labuhanbatu Utara, Kab. Simalungun, Kab. Karo, Kab. Toba, Kab. Samosir, Kab. Dairi, Padang Sidempuan, Sibolga, Tj. Balai dan Binjai) Rincain belanja kegiatan ini meliputi ; Sewa Tenda Dome 5x5x7,5 m seharga Rp 38.206.214, Sewa Kurasi Rp 1.836.837, Sewa Meja	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH



NO	PSN	DUKUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA			PD PENANGUNGJAWAB
		DUKUNGAN YG DIKAITKAN DGN PHTC, PSD, KUPD	TAHUN	RENCANA AKSI	
				Stan Rp 979.647 , Konsumsi Petugas Rp. 3.820.621 dan Alat/media promosi Rp. 6.202.424 Total anggaran yang dibutuhkan dalam 20 kali pelaksanaan kegiatan adalah Rp 1.020.914.864	
		KUPD 1 Biro Perekonomian. Fasilitasi dan Koordinasi TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah)	2026	Target: 2,5±1 Output: – Pelaksanaan Rapat Koordinasi/High Level Meeting TPID sebanyak 2 x dalam setahun menjelang HBKN Idul Fitri dan Nataru – Fasilitasi Rapat Pengendalian Inflasi mingguan via zoom meeting bersama Mendagri – Keikutsertaan GPM, Program Pasar Murah dan Capacity Building TPID	Biro Perekonomian
b	Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	PSD 27. Fasilitasi Akses Permodalan Terhadap Kelompok Tani	2026	Mulai pelaksanaan Temu Pembiayaan tahap I dan II, pendampingan realisasi kredit, pelatihan manajemen keuangan bagi kelompok tani penerima pembiayaan, serta monitoring awal terhadap usaha penerima kredit. • 33 Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH
		PSD 48. Peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi pengelola BUMDes	2026	– pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi pengelola BUMDes/BUMDesma – Monitoring dan Evaluasi kegiatan Tapteng, Taput, Nias, Simalungun, Asahan, Dairi, Mandailing Natal, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Samosir, Paluta, Palas, Labura, Gunungsitoli, Padangsidempuan, Karo, Toba, Labusel, Tapsel, Labuhanbatu (20 Kabupaten/kota)	Dinas Koperasi UMKM
		KUPD 1 Diskop UMKM. Pengoperasian, Pengembangan dan Optimasi KDKMP (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih)	2026	Peningkatan pendapatan Masyarakat Desa, Peningkatan literasi keuangan masyarakat, dan Penguatan jejaring antar koperasi	Dinas Koperasi UMKM



NO	PSN	DUKUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA			PD PENANGUNGJAWAB
		DUKUNGAN YG DIKAITKAN DGN PHTC, PSD, KUPD	TAHUN	RENCANA AKSI	
c	Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	PSD 17. BUMD Reform Program (Penguatan Peran BUMD sebagai Motor Ekonomi)	2026	Melakukan audit menyeluruh, penilaian kesehatan BUMD pada tahun 2025, dan peningkatan kesehatan; Menyusun roadmap reformasi dan melakukan penyesuaian bentuk hukum perusahaan sesuai dengan perundangan dan bisnis kerja serta SDM;Menerapkan GCG dengan praktik terbaik, menumbuhkan ekosistem BUMD, kerjasama BUMD antar daerah dan sistem pengukuran kinerja berbasis digital • 1 BUMD sehat (PT. Perkebunan Sumatera Utara (Perseroda))	Biro Perekonomian
		PSD 18. Pemanfaatan Aset barang milik daerah melalui kerja sama ekonomi	2026	• Pemanfaatan aset Barang Milik Daerah yang berdasarkan hasil inventarisasi (target 2 BMD yang termanfaatkan) • Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi • Penyusunan Regulasi penggunaan web aplikasi pemanfaatan Barang Milik Daerah • Peningkatan kapasitas dan kuantitas SDM penilai barang	BKAD
		PSD 35. Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	2026	1. INOVASI Business Registration System Policy TPB/SDGs 2. Diseminasi Skema BRS TPB/SDGs (Kolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM pada acara FYP, BRS SDGs dijadikan kurikulum) 3. Menyusun Laporan Monev TPB/SGDs Tahun 2025 4. Finalisasi Draf RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026-2030 melalui desk per pilas TPB/SDGs 5. Launching Aplikasi e-Monev 6. Pelaksanaan skema Declaration and Registration System BRS TPB/SDGs 7. Diseminasi RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026-2030 8. Penyusunan Rancang Bangun aplikasi e-Monev SDGs (INOVASI) 9. Workshop Penyusunan Voluntary Local Review (VLR) Kabupaten/Kota 10. Menyusun draf Monev capaian SDGs tahun 2026	Bappelitbang



NO	PSN	DUKUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA			PD PENANGUNGJAWAB
		DUKUNGAN YG DIKAITKAN DGN PHTC, PSD, KUPD	TAHUN	RENCANA AKSI	
				11. Sosialisasi North Sumatra SDGs Action Award 2027 (Indikator RAD TPB/SDGs, VLR dan Laporan Monev)	
		PSD 36. Kerjasama APIP dan APH dalam Pendampingan Proyek Strategis dan Kegiatan Unggulan Daerah melalui pendampingan sejak tahapan perencanaan, pelaksanaan dan serah terima kegiatan proyek strategis	2026	– Review Perencanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara – Pendampingan Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara – Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara	Inspektorat
		PSD 37. Pemanfaatan Satu Data SUMUT pusat data dan informasi pembangunan	2026	– Pemanfaatan SADAINA Reborn – Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD – Forum Satu Data tingkat Daerah – Proses integrasi Satu Data dengan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Provsu – Penyusunan Proses Bisnis integrasi SADAINA dan Data Geospasial – Penyusunan Proses Bisnis integrasi SADAINA dan Data SDGs	Dinas Kominfo
		KUPD 1 Bapenda. Pengelolaan Pendapatan Daerah	2026	33 UPTD Penda Ouput: Meningkatkan pelayanan dan kepatuhan wajib pajak guna transparansi dan efisiensi pengelolaan pajak daerah melalui implementasi aplikasi E-Samsat, kemudahan proses pembayaran, akses informasi yang lebih baik, dan layanan yang lebih responsif	Bapenda
d	Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan,)	PSD 15. Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Pertanian dan pariwisata	2026	KEK Pertanian 1. Penentuan lokasi pengusulan KEK pertanian 2. Pengusulan KEK Pariwisata melalui proses kelengkapan dokumen: a. tata lokasi	DISBUDPAREKRAF DAN DINAS KETAPANG TPH



NO	PSN	DUKUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA			PD PENANGUNGJAWAB
		DUKUNGAN YG DIKAITKAN DGN PHTC, PSD, KUPD	TAHUN	RENCANA AKSI	
				b. rencana tata ruang KEK c. Rencana sumber pembiayaan d. Studi kelayakan ekonomi penguasaan lahan 50% e. persetujuan Pemkab 3. Pembentukan kelembagaan badan usaha pengelolaan KEK. KEK Pariwisata: Penyusunan Kajian Peningkatan Status KSPN Danau Toba menjadi KEK Pariwisata dan Penyusunan Masterplan 1. Penentuan lokasi pengusulan KEK Pariwisata 2. Pengusulan KEK Pariwisata melalui proses kelengkapan dokumen: a. tata lokasi b. rencana tata ruang KEK c. Rencana sumber pembiayaan d. Studi kelayakan ekonomi penguasaan lahan 50% e. persetujuan Pemkab 3. pembentukan kelembagaan badan usaha pengelolaan KEK	
		PSD 16. Penguatan Hilirisasi Komoditas Unggulan di Kawasan Industri Sumatera Utara	2026	Hilirisasi komoditas Unggulan Sumatera Utara Peningkatan Kapasitas Produksi IKM dengan Produk Hilirisasi , Riset inovasi produk dan teknologi tepat guna • Kelapa: VCO, Santan Kemasan, Minyak kelapa kopra (cooking oil); Gula Kelapa/gula semut, Kelapa kering, arang aktif dari batok kelapa, Produk berbasis serat sabut (keset, geotekstil, jok mobil) • Cabe : Cabe Kering, Cabe Bubuk, Saos (cabe bawang tomat), saos pasta ; Produk Turunan untuk Industri Non-Pangan (Ekstrak capsaicin → bahan baku industri farmasi, kosmetik (krim pereda nyeri, pelangsing), pestisida organik; Oleoresin cabai → pewarna dan pemberi rasa pedas alami untuk industri makanan & minuman; Spray pengusir hama berbahan capsaicin • Kopi : Minuman kopi kemasan siap minum (RTD Coffee) — botol/sachet/cup; Kopi instan (pure instant coffee, 3-in-1,	DISPERINDAG ESDM



NO	PSN	DUKUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA			PD PENANGUNGJAWAB
		DUKUNGAN YG DIKAITKAN DGN PHTC, PSD, KUPD	TAHUN	RENCANA AKSI	
				cappuccino sachet); Drip bag coffee — kopi bubuk dalam kantong celup; Cold brew • Aren : Gula Aren, Sirup Aren, Tuak, manisan kolang kaling, Sapu ijuk, sikat, keset, anyaman kerajinan dari lidi atau serat kayu/daun aren	
		PSD 19. Pengembangan Kawasan Perkebunan (Kelapa, Kopi, Aren)	2026	– Verifikasi CPCL dan sosialisasi awal kepada kelompok pekebun di lokasi intervensi pengembangan kawasan yang dilaksanakan mulai bulan Maret – Pemberian benih pada komoditas kelapa sebanyak 40.000 batang benih, 80 ton pupuk organik dan 10 paket alat pasca panen pembuatan kopra dan VCO kepada 10 kelompok pekebun di Kab. Nias Barat. pemberian benih pada komoditas kopi sebanyak 200.000 batang benih, 400 ton pupuk organik dan 40 kotak pestisida nabati dan 4 paket mesin pasca panen pembuatan bubuk kopi kepada 10 kelompok pekebun di Kab. Humbahas. pemberian benih pada komoditas aren sebanyak 40.000 batang benih, 80 ton pupuk organik dan 10 paket alat pengolahan pembuatan gula semut kepada 10 kelompok pekebun di Kab. Tapanuli Selatan dilaksanakan pada bulan oktober	DISBUNAK
		PSD 20. Pengembangan Kawasan Unggulan Perikanan Tangkap dan Budidaya	2026	1. Pembuatan master plan 2. Pembangunan sarana prasana produksi a. Perikanan tangkap : sampan, jala dan dermaga b. Perikanan budidaya : revitalisasi kolam, benih, pakan, kincir, saluran air, automatic feeder • Perikanan tangkap : kawasan Tapteng-Sibolga, kawasan Asahan-Tanjung Balai, Nias Utara ; • Perikanan budidaya : Simalungun, Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai.	DISKANLA
		KUPD 6 Disdik. Link and Match SMK dan DUDI terutama dengan KEK Sei Mangke, KIM dan DUDI	2026	101 SMK Negeri/Swasta	Dinas Pendidikan



NO	PSN	DUKUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA			PD PENANGUNGJAWAB
		DUKUNGAN YG DIKAITKAN DGN PHTC, PSD, KUPD	TAHUN	RENCANA AKSI	
		lainnya berbasis kearifan lokal			
		KUPD 1 Disnaker. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja dan penempatan tenaga kerja	2026	150 perusahaan, 2.500 lowongan kerja, dan 10.000 pelamar Lokasi: Provinsi Sumatera Utara Output: 1. Data Lowongan pekerjaan 2. Data Pelatihan tenaga kerja 3. Data Pelatihan Vokasi dan Produktivitas 4. Data Pencari kerja terdaftar 5. Data penempat	Dinas Ketenagakerjaan
e	Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah	PSD 21. Pengawasan Konservasi Laut SEMESTA (Pemberdayaan Nelayan Sebagai Pasukan Penjaga Laut)	2026	Laporan Patroli dan Peralatan + Aplikasi e-Mawas Kabupaten/kota dan perairan Pantai timur dan barat Sumatera Utara.	DISKANLA
		PSD 22. Rehabilitasi Mangrove dan Pesisir berbasis Masyarakat	2026	1. Pembentukan kelompok tani hutan 2. Melakukan penanaman mangrove seluas 18 Ha di kabupaten Langkat 3. kegiatan Mangrove Fest berkolaborasi dengan NGO/Pemerhati Lingkungan 4. Kolaborasi penanaman mangrove bersama NGO/Pemerhati Lingkungan	DLHK
		PSD 42. Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir	2026	• Pengerjaan fisik • Penyusunan DED (Detail Engineering Design) dan pemenuhan readiness Kriteria Kab. Labuhanbatu Utara pada Sungai Kualuh, Sungai Aek Natas, Sungai Aek Kanopan sepanjang 1.196 meter	Dinas PUPR
		PSD 43. Pembangunan TPST Regional	2026	– Penyusunan Studi kelayakan TPST Regional Mebidang dan FGD dengan kabupaten/kota – Pengadaan lahan dan persiapan lokasi (clean and clear)	Dinas PUPR



NO	PSN	DUKUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA			PD PENANGUNGJAWAB
		DUKUNGAN YG DIKAITKAN DGN PHTC, PSD, KUPD	TAHUN	RENCANA AKSI	
				– Dokumen peta jalan pengelolaan persampahan TPST Regional	
		PSD 44. Pembangunan PLTSa	2026	Kajian Potensi PLTSa Kawasan Perkotaan (STM Hilir) atau dekat dengan TPST dari tahun 2025-2030	DISPERINDAG ESDM
		PSD 45. Pengembangan SPAL Regional	2026	Optimalisasi IPLT Regional Cemara serta Supervisi Peningkatan Kapasitas IPLT Regional Cemara	Dinas PUPR
		PSD 46. Pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati	2026	•Wilayah padat penduduk seperti Medan, Deli Serdang Penyusunan dokumen DPPT dan pembebasan lahan	DLHK
		KUPD 1 DLHK. Program Komunitas untuk Iklim dan Adiwiyata	2026	Terselenggaranya kegiatan apesiasi proklam kategori utama Tahun 2026 Lokus : 33 Kabupaten /kota Bentuk Kegiatan : 1. Penyerahan Tropy/Sertifikat proklam 2. Penyerahan BAntuan Alat Ekonomi Produktif 3. Penyerahan Sertifikat Proper dan Adiwiyata 4. Aksi Bersih 5. Penanaman Pohon 6. Pameran Hasil Daur Ulang Sampah/Pengelolaan Sampah 7. Rembuk Proklam 8. Sarasehan Bank Sampah 9. Sosialisasi Pelaksanaan Program Kampung Iklim/ Komunitas Untuk Iklim 10. Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan Proklam 11. SOsialisasi Kegiatan Adiwiyata 12. Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan Adiwiyata, Proper 13. Bimbingan Teknis Kegiatan Proper Daerah	DLHK
		KUPD 2 DLHK. Kesiapsiagaan Karhutla Provinsi Sumatera Utara	2026	Terselenggaranya kegiatan Kesiapsiagaan Karhutla Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 Lokus : Bentuk kegiatan :	DLHK



NO	PSN	DUKUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA			PD PENANGUNGJAWAB
		DUKUNGAN YG DIKAITKAN DGN PHTC, PSD, KUPD	TAHUN	RENCANA AKSI	
				1. Apel gabungan kesiapsiagaan karhutla Provinsi Sumatera Utara 2. Penyelenggaraan sosialisasi/bimtek pencegahan karhutla 3. Pembentukan Sekolah Peduli Api 4. Fasilitasi Masyarakat Peduli Api 5. Patroli Karhutla	
		KUPD 3 DLHK. Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	2026	Terselenggaranya kegiatan pengembangan perhutanan sosial Lokus : Kab. Langkat, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Asahan, Kab. Labuhanbatu Utara, Kab. Mandailing Natal, Kota Medan Bentuk kegiatan : 1. Pemberian bantuan bibit Kelapa genjah dan Kelapa Pandan 2. Pemberian bantuan stup madu 3. Penyelenggaraan Pameran PRSU (promosi produk hasil hutan bukan kayu) 4. Lokakarya Perhutanan Sosial dan Temu Usaha KTH Provinsi Sumatera Utara	DLHK
		KUPD 2 BPBD. Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB)	2026	Tersusunnya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) 2027 - 2031 melalui penyediaan jasa konsultansi pihak ketiga	BPBD
PSN KHUSUS UNTUK SUMATERA UTARA					
1	Pengembangan KEK Sei Mangkei	PSD 16. Penguatan Hilirisasi Komoditas Unggulan di Kawasan Industri Sumatera Utara	2026	Hilirisasi komoditas Unggulan Sumatera Utara Peningkatan Kapasitas Produksi IKM dengan Produk Hilirisasi , Riset inovasi produk dan teknologi tepat guna - Kelapa: VCO, Santan Kemasan, Minyak kelapa kopra (cooking oil); Gula Kelapa/gula semut, Kelapa kering, arang aktif dari batok kelapa, Produk berbasis serat sabut (keset, geotekstil, jok mobil) - Cabe : Cabe Kering, Cabe Bubuk, Saos (cabe bawang tomat), saos pasta ; Produk Turunan untuk Industri Non-Pangan (Ekstrak capsaicin → bahan baku industri farmasi, kosmetik (krim pereda nyeri, pelangsing), pestisida organik; Oleoresin	DISPERINDAG ESDM



NO	PSN	DUKUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA			PD PENANGUNGJAWAB
		DUKUNGAN YG DIKAITKAN DGN PHTC, PSD, KUPD	TAHUN	RENCANA AKSI	
				cabai → pewarna dan pemberi rasa pedas alami untuk industri makanan & minuman; Spray pengusir hama berbahan capsaicin • Kopi : Minuman kopi kemasan siap minum (RTD Coffee) — botol/sachet/cup; Kopi instan (pure instant coffee, 3-in-1, cappuccino sachet); Drip bag coffee — kopi bubuk dalam kantong celup; Cold brew • Aren : Gula Aren, Sirup Aren, Tuak, manisan kolang kaling, Sapu ijuk, sikat, keset, anyaman kerajinan dari lidi atau serat kayu/daun aren	
				• Kelapa: Kabupaten Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara dan Asahan • Kopi: Kabupaten Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, dan Simalungun • Aren: Kabupaten Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal • Cabe : Karo dan Batubara	
		KUPD 6 Disdik. Link and Match SMK dan DUDI terutama dengan KEK Sei Mangke, KIM dan DUDI lainnya berbasis kearifan lokal	2026	101 SMK Negeri/Swasta	Dinas Pendidikan
2	Bioethanol (Berbasis Tebu)	PSD 16. Penguatan Hilirisasi Komoditas Unggulan di Kawasan Industri Sumatera Utara	2026	Hilirisasi komoditas Unggulan Sumatera Utara Peningkatan Kapasitas Produksi IKM dengan Produk Hilirisasi , Riset inovasi produk dan teknologi tepat guna • Kelapa: VCO, Santan Kemasan, Minyak kelapa kopra (cooking oil); Gula Kelapa/gula semut, Kelapa kering, arang aktif dari batok kelapa, Produk berbasis serat sabut (keset, geotekstil, jok mobil) • Cabe : Cabe Kering, Cabe Bubuk, Saos (cabe bawang tomat), saos pasta ; Produk Turunan untuk Industri Non-Pangan (Ekstrak capsaicin → bahan baku industri farmasi, kosmetik	DISPERINDAG ESDM



NO	PSN	DUKUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA			PD PENANGUNGJAWAB
		DUKUNGAN YG DIKAITKAN DGN PHTC, PSD, KUPD	TAHUN	RENCANA AKSI	
				(krim pereda nyeri, pelangsing), pestisida organik; Oleoresin cabai → pewarna dan pemberi rasa pedas alami untuk industri makanan & minuman; Spray pengusir hama berbahan capsaicin - Kopi : Minuman kopi kemasan siap minum (RTD Coffee) — botol/sachet/cup; Kopi instan (pure instant coffee, 3-in-1, cappuccino sachet); Drip bag coffee — kopi bubuk dalam kantong celup; Cold brew - Aren : Gula Aren, Sirup Aren, Tuak, manisan kolang kaling, Sapu ijuk, sikat, keset, anyaman kerajinan dari lidi atau serat kayu/daun aren	
		PSD 23. Pengembangan Energi Baru Terbarukan (PLTS Pompa Air Untuk Irigasi Pertanian/PLTA Mikrohidro dan lainnya)	2026	Evaluasi lokasi baru berdasarkan hasil proyek sebelumnya, perencanaan dan perizinan, desain teknis dan RAB, pengadaan peralatan dan pekerjaan sipil, instalasi dan uji coba sistem, pelatihan petani, monitoring awal, serta evaluasi dan serah terima akhir proyek Kawasan pertanian yang memiliki keterbatasan irigasi di Sumatera Utara	DISPERINDAG ESDM
		PSD 44. Pembangunan PLTSa	2026	Kajian Potensi PLTSa Kawasan Perkotaan (STM Hilir) atau dekat dengan TPST dari tahun 2025-2030	DISPERINDAG ESDM
3	Hilirisaai Kelapa Sawit, Kelapa, dan Rumput Laut	PSD 16. Penguatan Hilirisasi Komoditas Unggulan di Kawasan Industri Sumatera Utara	2026	Hilirisasi komoditas Unggulan Sumatera Utara Peningkatan Kapasitas Produksi IKM dengan Produk Hilirisasi , Riset inovasi produk dan teknologi tepat guna - Kelapa: VCO, Santan Kemasan, Minyak kelapa kopra (cooking oil); Gula Kelapa/gula semut, Kelapa kering, arang aktif dari batok kelapa, Produk berbasis serat sabut (keset, geotekstil, jok mobil) - Cabe : Cabe Kering, Cabe Bubuk, Saos (cabe bawang tomat), saos pasta ; Produk Turunan untuk Industri Non-Pangan (Ekstrak capsaicin → bahan baku industri farmasi, kosmetik	DISPERINDAG ESDM



NO	PSN	DUKUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA			PD PENANGUNGJAWAB
		DUKUNGAN YG DIKAITKAN DGN PHTC, PSD, KUPD	TAHUN	RENCANA AKSI	
				(krim pereda nyeri, pelangsing), pestisida organik; Oleoresin cabai → pewarna dan pemberi rasa pedas alami untuk industri makanan & minuman; Spray pengusir hama berbahan capsaicin • Kopi : Minuman kopi kemasan siap minum (RTD Coffee) — botol/sachet/cup; Kopi instan (pure instant coffee, 3-in-1, cappuccino sachet); Drip bag coffee — kopi bubuk dalam kantong celup; Cold brew • Aren : Gula Aren, Sirup Aren, Tuak, manisan kolang kaling, Sapu ijuk, sikat, keset, anyaman kerajinan dari lidi atau serat kayu/daun aren	
		PSD 19. Pengembangan Kawasan Perkebunan (Kelapa, Kopi, Aren)	2026	– Verifikasi CPCL dan sosialisasi awal kepada kelompok pekebun di lokasi intervensi pengembangan kawasan yang dilaksanakan mulai bulan Maret – Pemberian benih pada komoditas kelapa sebanyak 40.000 batang benih, 80 ton pupuk organik dan 10 paket alat pasca panen pembuatan kopra dan VCO kepada 10 kelompok pekebun di Kab. Nias Barat. pemberian benih pada komoditas kopi sebanyak 200.000 batang benih, 400 ton pupuk organik dan 40 kotak pestisida nabati dan 4 paket mesin pasca panen pembuatan bubuk kopi kepada 10 kelompok pekebun di Kab. Humbahas. pemberian benih pada komoditas aren sebanyak 40.000 batang benih, 80 ton pupuk organik dan 10 paket alat pengolahan pembuatan gula semut kepada 10 kelompok pekebun di Kab. Tapanuli Selatan dilaksanakan pada bulan oktober	DISBUNAK
		KUPD 6 Disdik. Link and Match SMK dan DUDI terutama dengan KEK Sei Mangke, KIM dan DUDI lainnya berbasis kearifan lokal	2026	101 SMK Negeri/Swasta	Dinas Pendidikan



5.3 Proyeksi Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Provinsi Sumatera Utara dalam Rencana Pembangunan Tahun 2026 menegaskan komitmennya untuk mendukung implementasi visi pembangunan nasional periode 2025–2029, khususnya pencapaian di tahun 2026. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan intervensi kebijakan daerah dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat, termasuk kontribusi dalam pencapaian target-target sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Target nasional tersebut kemudian diturunkan ke dalam konteks daerah dengan memperhatikan dinamika eksisting di 33 kabupaten/kota serta proyeksi kinerja pembangunan selama tahun 2026.

Sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara diklasifikasikan ke dalam empat aspek kinerja utama sebagai berikut:

1. **Peningkatan Pendapatan**
 - a. *Laju Pertumbuhan Ekonomi*
 - b. *PDRB per Kapita*
 - c. *Kontribusi PDRB Provinsi terhadap Nasional*
2. **Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan**
 - a. *Tingkat Kemiskinan*
 - b. *Rasio Gini*
3. **Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)**
 - a. *Tingkat Pengangguran Terbuka*
 - b. *Indeks Modal Manusia*
4. **Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup**
 - a. *Penurunan Intensitas Emisi GRK*
 - b. *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup*

Dengan pembagian aspek tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berupaya menjaga fokus pembangunan agar lebih terarah, komprehensif, dan selaras dengan agenda pembangunan nasional. Indikator-indikator kinerja yang ditetapkan tidak hanya menjadi alat ukur capaian pembangunan daerah, tetapi juga mencerminkan keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, penguatan SDM, serta keberlanjutan lingkungan hidup yang menjadi prioritas pembangunan Sumatera Utara di tahun 2026.

I. Peningkatan pendapatan, dengan indikator yang ingin dicapai yaitu :

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang digunakan untuk mendeteksi adanya peningkatan nilai tambah atau nilai akhir dari output perekonomian secara menyeluruh di Provinsi Sumatera Utara. Pencapaian kinerja pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara tidak bisa dilepaskan dari kinerja pertumbuhan di 33 kabupaten kota. Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara sebagai agregasi nilai tambah output yang dihasilkan dari seluruh wilayah administratif tersebut. Target pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara ditetapkan dengan mempertimbangkan struktur ekonomi yang masih terkonsentrasi di Kota Medan, yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB provinsi. Medan cenderung memiliki LPE yang lebih tinggi karena skala ekonomi dan dominasi sektor perdagangan serta jasa. Namun,



dalam perencanaan 2026, kontribusi PDRB Medan terhadap provinsi diharapkan relatif stagnan, sehingga pertumbuhan di wilayah lain dapat lebih dipacu. Kabupaten/kota dengan basis pertanian, industri pengolahan, dan pariwisata didorong untuk meningkatkan peranannya melalui akselerasi investasi, pengembangan hilirisasi, dan penguatan konektivitas wilayah. Dengan demikian, target pertumbuhan ekonomi provinsi tidak hanya bergantung pada Medan, tetapi ditopang pula oleh percepatan gerak ekonomi daerah lainnya.

b. PDRB per kapita (Rp Juta).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan indikator penting yang menunjukkan rata-rata nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh setiap individu di suatu wilayah dalam periode tertentu. PDRB per kapita dihitung dengan membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Indikator ini sering digunakan sebagai ukuran kesejahteraan ekonomi rata-rata masyarakat, serta sebagai salah satu parameter dalam menilai tingkat kemajuan pembangunan ekonomi suatu daerah dan kekuatan daya beli masyarakatnya.

Pembangunan melalui proyek strategis daerah, penguatan standar pelayanan minimal, regulasi yang adaptif, serta dukungan keamanan diharapkan dapat memberikan kepastian berusaha, meningkatkan investasi, yang merangsang munculnya titik-titik pertumbuhan baru. Daya sebar aktivitas ekonomi ini diharapkan dapat memperluas jangkauan transaksi antar pelaku yang dapat memberikan manfaat kepada lebih banyak pihak yang terlibat. Menghubungkan lebih banyak orang ke dalam aktivitas pembangunan urgen untuk dilakukan, untuk meningkatkan pendapatan per kapita sembari memperkecil gap ketimpangan pendapatan antar individu.

Dengan demikian, peningkatan PDRB per kapita tidak hanya mencerminkan kenaikan rata-rata pendapatan masyarakat, tetapi juga harus dimaknai sebagai hasil dari pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Target pendapatan per kapita pada masing-masing kabupaten/kota di Sumatera Utara menjadi pedoman penting dalam mengukur capaian pembangunan daerah, sekaligus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

c. Kontribusi PDRB Kabupaten Kota terhadap Provinsi (%);

Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten/kota terhadap PDRB provinsi mencerminkan peranan ekonomi suatu daerah dalam struktur perekonomian Sumatera Utara secara keseluruhan. Indikator ini penting untuk melihat sejauh mana kekuatan ekonomi daerah mampu menopang pertumbuhan ekonomi provinsi, baik melalui sektor-sektor unggulan yang dikembangkan maupun melalui basis produksi yang mendorong nilai tambah. Besarnya kontribusi juga mencerminkan tingkat kapasitas daerah dalam menarik investasi, mengembangkan lapangan kerja, serta memperkuat rantai nilai antarwilayah. Dengan demikian, kontribusi PDRB bukan hanya angka statistik, tetapi juga cerminan daya saing dan posisi strategis suatu kabupaten/kota dalam pembangunan regional.

Pemetaan kontribusi antar kabupaten/kota diperlukan untuk mengidentifikasi disparitas peran wilayah dalam membangun perekonomian provinsi. Daerah dengan kontribusi besar perlu diperkuat agar mampu menjaga stabilitas dan pertumbuhan, sementara daerah dengan kontribusi relatif kecil perlu didorong dengan strategi pengembangan sektor potensial dan peningkatan infrastruktur ekonomi. Arah kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan yang lebih merata dan inklusif, sehingga setiap kabupaten/kota memiliki peluang yang sama dalam meningkatkan kontribusinya terhadap PDRB provinsi. Dengan begitu, pembangunan ekonomi Sumatera Utara tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, melainkan tersebar secara seimbang di seluruh kabupaten/kota.

Aspek peningkatan pendapatan merupakan salah satu aspek penting menuju Sumatera Utara yang unggul dan maju. Meningkatnya pendapatan ditandai dengan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, diikuti pergeseran kontribusi PDRB antar kabupaten kota terhadap PDRB provinsi, sebagai alat ukur untuk mendeteksi pergerakan aktivitas ekonomi yang diharapkan menuju titik konvergensi. Adapun target dari ketiganya untuk tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.11 Target Makro Peningkatan Pendapatan

No	Kabupaten Kota	Peningkatan Pendapatan		
		LPE 2026 (%)	Pendapatan per Kapita (Rp. Juta)	Kontribusi PDRB Kabupaten Kota terhadap Provinsi (%)
1	Kab. Labuhanbatu Utara	5,35 - 5,71	103,99 - 104,72	3,18
2	Kota Medan	5,80 - 6,20	156,51 - 157,70	28,45
3	Kab. Padangsidimpuan	5,91 - 6,32	43,85 - 44,19	0,79
4	Kota Tanjungbalai	5,95 - 6,36	76,54 - 77,14	1,06
5	Kab. Dairi	5,91 - 6,32	48,17 - 48,54	1,19
6	Kab. Langkat	6,03 - 6,44	68,60 - 69,14	5,47
7	Kab. Serdang Bedagai	5,80 - 6,20	69,65 - 70,18	3,57
8	Kab. Tapanuli Tengah	5,35 - 5,71	42,07 - 42,37	1,25
9	Kab. Tapanuli Selatan	6,03 - 6,44	77,61 - 78,22	1,82
10	Kab. Padang Lawas Utara	5,91 - 6,32	73,24 - 73,81	1,54
11	Kab. Padang Lawas	5,91 - 6,32	71,83 - 72,39	1,51
12	Kab. Nias	4,66 - 4,99	39,29 - 39,53	0,45
13	Kab. Nias Utara	4,55 - 4,86	34,39 - 34,60	0,41
14	Kota Sibolga	5,40 - 5,78	93,56 - 94,22	0,63
4,8	Kota Binjai	5,35 - 5,71	63,36 - 63,81	1,44
16	Kab. Simalungun	6,26 - 6,69	66,34 - 66,88	5,21
17	Kota Tebing Tinggi	4,95 - 5,29	51,66 - 52,00	0,69



No	Kabupaten Kota	Peningkatan Pendapatan			
		LPE 2026 (%)	Pendapatan per Kapita (Rp. Juta)		Kontribusi PDRB Kabupaten Kota terhadap Provinsi (%)
18	Nias Selatan	4,66 - 4,99	25,10	- 25,26	0,73
19	Kota Pematang Siantar	5,40 - 5,78	81,96	- 82,54	1,67
5,6	Kab. Deli Serdang	6,26 - 6,69	86,52	- 87,22	13,20
21	Kab. Labuhanbatu	6,03 - 6,44	113,33	- 114,22	4,38
22	Kab. Asahan	5,91 - 6,32	81,06	- 81,69	4,90
23	Kab. Karo	5,46 - 5,84	81,48	- 82,07	2,58
24	Kab. Labuhanbatu Selatan	5,80 - 6,20	140,21	- 141,28	3,53
25	Kab. Mandailing Natal	5,57 - 5,96	45,29	- 45,62	1,71
26	Kab. Batu Bara	4,95 - 5,29	130,14	- 130,99	4,25
27	Kab. Gunungsitoli	4,66 - 4,99	55,10	- 55,44	0,60
28	Kab. Nias Barat	4,66 - 4,99	29,85	- 30,04	0,22
29	Kab. Pakpak Bharat	5,91 - 6,32	37,22	- 37,51	0,16
30	Kab. Humbang Hasundutan	5,57 - 5,96	48,73	- 49,08	0,75
31	Kab. Tapanuli Utara	5,57 - 5,96	44,46	- 44,78	1,08
32	Kab. Samosir	5,91 - 6,32	53,72	- 54,13	0,57
33	Kabupaten Toba	5,69 - 6,08	62,66	- 63,12	1,01
	Sumatera Utara	5,80 - 6,20	87,6		5,20

Sumber: Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

II. Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan dengan indikator yang ingin dicapai yaitu:

a. Tingkat Kemiskinan (%);

Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar minimum, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan, yang diukur berdasarkan pendekatan pengeluaran. Seorang penduduk dikategorikan sebagai miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).

Upaya pengentasan kemiskinan merupakan agenda prioritas pembangunan Sumatera Utara yang selaras dengan sasaran pembangunan nasional dalam menurunkan jumlah penduduk miskin secara berkelanjutan. Tingkat kemiskinan menjadi indikator kunci untuk mengukur sejauh mana masyarakat memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar, seperti pangan, perumahan layak, kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja.



Penurunan tingkat kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kualitas distribusi pendapatan, keberpihakan kebijakan sosial, serta pemerataan pembangunan antardaerah. Oleh karena itu, target penurunan kemiskinan di 33 kabupaten/kota diarahkan agar terjadi percepatan pengurangan angka kemiskinan secara lebih merata, khususnya di daerah yang selama ini tingkat kemiskinannya relatif tinggi dibandingkan rata-rata provinsi.

Dinamika penetapan target tingkat kemiskinan juga mempertimbangkan karakteristik masing-masing daerah. Kabupaten di wilayah pedesaan atau pesisir, seperti wilayah di Kepulauan Nias, Tanjungbalai, Sibolga, hingga Batubara menghadapi tantangan kemiskinan yang lebih tinggi karena keterbatasan infrastruktur, aksesibilitas, serta ketergantungan pada sektor primer. Dengan demikian, arah kebijakan penurunan kemiskinan tidak hanya menekankan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga penguatan program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan peningkatan akses layanan dasar agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara nyata.

b. Rasio Gini

Rasio Gini merupakan indikator yang menggambarkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat. Semakin mendekati angka 0, berarti distribusi pendapatan semakin merata, sedangkan semakin mendekati angka 1 menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Oleh karena itu, menjaga agar Rasio Gini tetap terkendali menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi Sumatera Utara yang inklusif. Target penurunan Rasio Gini di tingkat kabupaten/kota tidak hanya dimaknai sebagai capaian angka statistik, tetapi juga sebagai cerminan keberhasilan dalam memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta memperbaiki akses masyarakat terhadap pelayanan dasar.

Dinamika penentuan target Rasio Gini di 33 kabupaten/kota tentu berbeda, tergantung pada struktur perekonomian dan karakteristik sosial masing-masing daerah. Kota-kota besar seperti Medan, Tebing Tinggi, dan Pematangsiantar memiliki potensi ketimpangan yang relatif lebih tinggi karena perbedaan tingkat pendapatan antar kelompok masyarakat di perkotaan yang lebih tajam. Sebaliknya, kabupaten dengan basis pertanian seperti Mandailing Natal, Samosir, Humbang Hasundutan, bahkan wilayah di Kepulauan Nias cenderung memiliki tingkat ketimpangan yang lebih rendah, tetapi menghadapi tantangan peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh. Oleh karena itu, strategi pengendalian ketimpangan perlu menekankan pada pemerataan pembangunan antarwilayah, pemberdayaan masyarakat miskin, serta penguatan sektor-sektor produktif lokal yang dapat mendorong terciptanya kesempatan ekonomi yang lebih luas dan merata.



Tabel 5.12 Target Makro Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Kabupaten/Kota Tahun 2026

No	Kabupaten Kota	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	
		Tingkat Kemiskinan (%)	Gini Rasio
1	Kab. Labuhanbatu Utara	7,51 - 7,56	0,231 - 0,236
2	Kota Medan	6,78 - 7,29	0,348 - 0,353
3	Kab. Padangsidempuan	4,70 - 5,20	0,287 - 0,292
4	Kota Tanjungbalai	10,34 - 10,88	0,227 - 0,232
5	Kab. Dairi	5,64 - 6,15	0,206 - 0,211
6	Kab. Langkat	7,52 - 8,04	0,251 - 0,256
7	Kab. Serdang Bedagai	5,64 - 6,15	0,234 - 0,239
8	Kab. Tapanuli Tengah	10,15 - 10,88	0,225 - 0,231
9	Kab. Tapanuli Selatan	5,64 - 6,15	0,197 - 0,202
10	Kab. Padang Lawas Utara	7,52 - 8,04	0,214 - 0,219
11	Kab. Padang Lawas	6,58 - 7,10	0,215 - 0,22
12	Kab. Nias	12,69 - 13,24	0,238 - 0,243
13	Kab. Nias Utara	19,27 - 19,77	0,225 - 0,231
14	Kota Sibolga	9,87 - 10,31	0,304 - 0,309
4,8	Kota Binjai	6,39 - 6,72	0,303 - 0,308
16	Kab. Simalungun	6,11 - 6,62	0,249 - 0,254
17	Kota Tebing Tinggi	7,52 - 8,04	0,326 - 0,331
18	Nias Selatan	14,57 - 15,04	0,238 - 0,243
19	Kota Pematang Siantar	5,64 - 6,15	0,288 - 0,293
5,6	Kab. Deli Serdang	2,35 - 2,74	0,253 - 0,258
21	Kab. Labuhanbatu	6,58 - 7,10	0,243 - 0,248
22	Kab. Asahan	6,58 - 7,10	0,239 - 0,244
23	Kab. Karo	6,20 - 6,53	0,205 - 0,211
24	Kab. Labuhanbatu Selatan	6,11 - 6,72	0,203 - 0,208
25	Kab. Mandailing Natal	7,05 - 7,76	0,241 - 0,246
26	Kab. Batu Bara	9,40 - 9,93	0,249 - 0,254
27	Kab. Gunungsitoli	12,69 - 13,24	0,268 - 0,273
28	Kab. Nias Barat	20,21 - 20,91	0,21 - 0,215
29	Kab. Pakpak Bharat	5,64 - 6,15	0,253 - 0,258
30	Kab. Humbang Hasundutan	7,05 - 7,47	0,293 - 0,298
31	Kab. Tapanuli Utara	6,58 - 7,10	0,233 - 0,238
32	Kab. Samosir	9,87 - 10,31	0,229 - 0,234
33	Kabupaten Toba	6,58 - 7,10	0,339 - 0,344



No	Kabupaten Kota	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan			
		Tingkat Kemiskinan (%)		Gini Rasio	
	Sumatera Utara	5,93	- 6,55	0,3	- 0,3

Sumber: Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

III. Peningkatan Daya Saing SDM, dengan indikator yang ingin dicapai yaitu:

a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia menjadi ukuran penting dalam menilai kualitas sumber daya manusia, yang mencakup dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Peningkatan IPM di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara tidak hanya menggambarkan perbaikan akses dan mutu layanan dasar, tetapi juga menjadi fondasi dalam meningkatkan daya saing daerah di tengah kompetisi global. Meskipun Kota Medan dan beberapa kota besar seperti Pematangsiantar, Binjai, dan Tebing Tinggi telah mencatat capaian IPM relatif tinggi, ketimpangan antarwilayah masih cukup terlihat, khususnya di kabupaten dengan basis ekonomi agraris atau wilayah yang jauh dari pusat layanan. Oleh karena itu, target IPM ke depan dirancang tidak hanya untuk menaikkan rata-rata provinsi, tetapi juga mempersempit kesenjangan antarwilayah.

Pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota akan mendorong peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan yang lebih merata, serta peluang ekonomi yang lebih inklusif. Dengan cara ini, peningkatan IPM tidak hanya menjadi simbol statistik, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dinamika penetapan target IPM juga mempertimbangkan potensi masing-masing daerah, di mana kota-kota besar lebih diarahkan pada peningkatan kualitas, sementara daerah lain ditekankan pada percepatan pemenuhan standar layanan dasar.

b. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka menggambarkan proporsi angkatan kerja yang belum terserap dalam pasar kerja. Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk besar dan struktur ekonomi yang beragam, Sumatera Utara menghadapi tantangan dalam menekan angka pengangguran, terutama di daerah perkotaan yang memiliki tingkat urbanisasi tinggi. Kota Medan misalnya, meskipun menjadi pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan, masih memiliki TPT yang relatif tinggi akibat ketidakseimbangan antara pertumbuhan tenaga kerja baru dengan ketersediaan lapangan kerja formal. Sementara itu, kabupaten dengan basis pertanian cenderung memiliki TPT lebih rendah, namun menghadapi masalah produktivitas tenaga kerja, serta adanya pengangguran tersembunyi yang berada di balik status berusaha sendiri, dan pekerja keluarga / tidak dibayar, yang perlu mendapat perhatian.

Penentuan target TPT di kabupaten/kota mempertimbangkan struktur ekonomi daerah, tingkat industrialisasi, serta ketersediaan peluang kerja yang sesuai dengan kompetensi masyarakat. Upaya peningkatan keterampilan melalui pelatihan vokasi, penguatan sektor UMKM, serta penciptaan lapangan kerja berbasis potensi lokal akan menjadi kunci untuk

menekan pengangguran. Dengan strategi tersebut, diharapkan distribusi kesempatan kerja menjadi lebih merata dan mampu mendorong daya saing SDM di seluruh Sumatera Utara.



Tabel 5.13 Target Makro Peningkatan Daya Saing SDM Kabupaten/Kota Tahun 2026

No	Kabupaten Kota	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	
		TPT (%)	Indeks Pembangunan Manusia
1	Kab. Labuhanbatu Utara	3,90 - 4,17	76,52
2	Kota Medan	7,90 - 7,95	84,33
3	Kab. Padangsidimpuan	7,03 - 7,09	78,40
4	Kota Tanjungbalai	3,59 - 4,00	72,32
5	Kab. Dairi	1,01 - 1,38	75,27
6	Kab. Langkat	5,61 - 6,00	73,62
7	Kab. Serdang Bedagai	4,45 - 4,81	73,75
8	Kab. Tapanuli Tengah	7,02 - 7,37	72,73
9	Kab. Tapanuli Selatan	2,88 - 3,25	73,36
10	Kab. Padang Lawas Utara	3,54 - 3,91	73,71
11	Kab. Padang Lawas	4,07 - 5,40	72,98
12	Kab. Nias	1,67 - 2,05	67,42
13	Kab. Nias Utara	2,39 - 2,76	67,50
14	Kota Sibolga	6,09 - 6,44	76,58
4,8	Kota Binjai	4,97 - 5,37	79,23
16	Kab. Simalungun	4,72 - 5,08	76,19
17	Kota Tebing Tinggi	5,73 - 6,08	78,69
18	Nias Selatan	2,60 - 2,97	66,86
19	Kota Pematang Siantar	7,53 - 7,91	82,63
5,6	Kab. Deli Serdang	7,55 - 7,93	77,66
21	Kab. Labuhanbatu	5,47 - 5,82	75,41
22	Kab. Asahan	5,59 - 5,86	73,06
23	Kab. Karo	2,00 - 2,35	77,73
24	Kab. Labuhanbatu Selatan	2,80 - 3,18	75,20
25	Kab. Mandailing Natal	6,82 - 7,14	70,64
26	Kab. Batu Bara	5,38 - 5,71	72,12
27	Kab. Gunungsitoli	2,90 - 3,24	72,62
28	Kab. Nias Barat	0,89 - 0,95	66,43
29	Kab. Pakpak Bharat	0,86 - 0,92	71,88
30	Kab. Humbang Hasundutan	0,79 - 0,85	72,91



No	Kabupaten Kota	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	
		TPT (%)	Indeks Pembangunan Manusia
31	Kab. Tapanuli Utara	0,81 - 1,16	76,33
32	Kab. Samosir	0,78 - 0,84	74,13
33	Kabupaten Toba	0,67 - 1,02	77,87
	Sumatera Utara (Indeks Modal Manusia)	5,14 - 5,47	0,54

Sumber: Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

IV. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator yang ingin dicapai yaitu:

a. Pemurunan Emisi GRK (ton CO₂eq)

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (ton CO₂eq) adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai jumlah pengurangan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia, seperti industri, transportasi, dan penggunaan lahan. Satuan ton CO₂ ekuivalen (CO₂eq) digunakan untuk menyetarakan dampak berbagai jenis gas rumah kaca, termasuk karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), dan dinitrogen oksida (N₂O), berdasarkan potensi pemanasan globalnya. Indikator ini menjadi acuan penting dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan dan tindakan mitigasi perubahan iklim yang dilakukan oleh pemerintah, sektor industri, dan masyarakat.

Upaya penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menjadi salah satu langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di Sumatera Utara. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi, transportasi, dan industri, tekanan terhadap lingkungan juga kian besar, sehingga diperlukan langkah mitigasi yang terukur untuk memastikan pertumbuhan tetap sejalan dengan komitmen penurunan emisi. Melalui kebijakan yang terintegrasi, seperti pengelolaan energi terbarukan, efisiensi penggunaan energi, serta pengendalian aktivitas yang berpotensi meningkatkan emisi, pemerintah daerah berupaya menekan laju emisi yang ditimbulkan dari berbagai sektor.

Selain itu, penguatan kolaborasi dengan kabupaten/kota menjadi penting agar capaian penurunan emisi dapat lebih merata. Masing-masing daerah memiliki tantangan yang berbeda, mulai dari emisi akibat transportasi di perkotaan, hingga deforestasi dan konversi lahan di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, target penurunan emisi GRK untuk 33 kabupaten/kota disusun secara proporsional, dengan memperhatikan kondisi spesifik daerah, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target nasional.

b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai kondisi dan keberlanjutan lingkungan hidup di suatu wilayah berdasarkan beberapa indikator utama, seperti kualitas udara, kualitas air, tutupan lahan, dan kualitas air laut. Indeks ini

dikembangkan sebagai alat evaluasi untuk mengukur dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan serta efektivitas kebijakan lingkungan yang diterapkan oleh pemerintah daerah maupun nasional. Nilai IKLH menunjukkan sejauh mana suatu wilayah mampu menjaga keseimbangan ekosistemnya dan memberikan lingkungan yang sehat bagi masyarakatnya.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator penting yang mencerminkan kesehatan ekosistem, kualitas udara, air, dan tutupan lahan di suatu daerah. Peningkatan nilai IKLH menjadi cerminan keberhasilan dalam menjaga kelestarian lingkungan di tengah dinamika pembangunan yang terus berlangsung. Dengan meningkatnya tekanan terhadap lingkungan akibat urbanisasi, industrialisasi, dan aktivitas ekonomi lainnya, menjaga kualitas lingkungan hidup bukan hanya menjadi kewajiban, tetapi juga kebutuhan untuk menjamin keberlangsungan hidup masyarakat di masa depan.

Dalam konteks Sumatera Utara, pencapaian IKLH tidak dapat dilepaskan dari kontribusi masing-masing kabupaten/kota. Daerah perkotaan dituntut memperbaiki kualitas udara dan pengelolaan limbah, sementara daerah pedesaan lebih fokus pada kelestarian hutan, pengendalian alih fungsi lahan, dan konservasi air. Oleh karena itu, penyusunan target IKLH pada 33 kabupaten/kota diarahkan agar sesuai dengan karakteristik lingkungan setempat, sekaligus memastikan adanya peningkatan yang merata dalam kualitas lingkungan hidup di seluruh wilayah provinsi.

Tabel 5.14 Target Makro Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Tahun 2026

Kabupaten Kota	Penurunan Emisi GRK (ton C02Eq)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Nias	114.932,91	77,73
Mandailing Natal	284.095,13	81,32
Tapanuli Selatan	256.851,13	84,3
Tapanuli Tengah	162.597,13	81,98
Tapanuli Utara	243.496,23	79,68
Toba	155.908,00	76,78
Labuhan Batu	143.323,32	74,36
Asahan	165.201,60	75,41
Simalungun	196.427,81	74,64
Dairi	152.265,50	77,07
Karo	149.351,20	79,4
Deli Serdang	211.201,73	72,71
Langkat	204.627,25	82,19
Nias Selatan	194.526,40	79,58
Humbang Hasundutan	174.000,18	78,49
Pakpak Bharat	145.040,08	83,35
Samosir	141.512,34	77,54
Serdang Bedagai	172.748,47	74,09
Batu Bara	115.814,74	71,34
Padang Lawas Utara	208.859,87	75,38



Kabupaten Kota	Penurunan Emisi GRK (ton C02Eq)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Padang Lawas	200.351,49	76
Labuhanbatu Selatan	118.626,41	76,38
Labuhanbatu Utara	188.366,21	76,67
Nias Utara	124.277,89	75,28
Nias Barat	100.490,30	75,21
Sibolga	91.444,95	73,65
Tanjungbalai	91.611,82	70,34
Pematangsiantar	100.327,06	71,8
Tebing Tinggi	94.061,61	67,84
Medan	174.567,13	68,09
Binjai	97.943,63	74,36
Padangsidempuan	96.674,95	76,29
Gunungsitoli	96.370,00	78,87
Sumatera Utara	4,97 %	77,37

Sumber: Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025





BAB VI

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pembangunan daerah tahun 2026 merupakan penjabaran pada tahun pertama RPJMD Tahun 2025-2029 dengan kebijakan pembangunan tahun 2026 yang diarahkan dalam rangka mewujudkan visi “Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan” dengan misi yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah
3. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah
4. Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang Berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan
5. Memperkuat ketahanan sosial, dan budaya untuk membangun masyarakat Sumut yang tangguh.

Dengan misi tersebut, pembangunan di Sumatera Utara Tahun 2026 diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan. Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah yang akan dilaksanakan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 pada tahun berkenaan dan memperhatikan keterkaitannya dengan prioritas pembangunan nasional tahun 2026.

Pendanaan program dan kegiatan prioritas selanjutnya dilaksanakan dengan kolaborasi potensi pendanaan lainnya selain anggaran yang bersumber dari pemerintah (APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan APBN) juga yang memanfaatkan pendanaan yang bersumber dari KPBU, CSR, obligasi daerah, dana umat, serta hibah. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, isu strategis yang berkembang, aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD.

6.1 Rencana Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana APBN/APBD/ KPBU/CSR/Hibah/Pinjaman

Pendanaan program dan kegiatan prioritas selanjutnya dilaksanakan dengan kolaborasi potensi pendanaan lainnya selain anggaran yang bersumber dari pemerintah (APBD dan APBN) juga yang memanfaatkan pendanaan yang bersumber dari KPBU, CSR, serta sumber pendanaan lainnya.

Selain Intervensi Prioritas Nasional, percepatan pembangunan Sumatera Utara tahun 2025 juga didukung melalui rencana program dan kegiatan perangkat daerah yang telah diinput dalam Aplikasi Krisna Selaras. Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga mengusulkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2026 untuk mendukung Prioritas Nasional pada bidang:

Jenis Dak Non Fisik Tahun 2026:

1. Jenis Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya (UPT Museum dan UPT Taman Budaya Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)



2. Jenis Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah (Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah)
3. Jenis Bantuan Operasional Kesehatan (Dinas Kesehatan)
Jenis Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinas P3AKB)

6.2 Rencana Program Prioritas Daerah

Program Prioritas Provinsi Sumatera Utara telah memedomani RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan telah dikelompokkan berdasarkan Bidang urusan Pemerintah Daerah, Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan serta Unsur Pemerintahan Umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Alokasi Pagu Indikatif seluruh Perangkat Daerah pada Tahun 2026 disusun dengan mempertimbangkan proyeksi kemampuan anggaran tahun 2026, kebutuhan belanja pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, dan kegiatan strategis daerah.

Pada tahun 2026 ini terdapat 6 (enam) Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Win*) yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) Kepulauan Nias (2026), Kepulauan Nias dan Pantai Barat (2027), Kepulauan Nias, Pantai Barat dan Dataran Tinggi (2028), Kepulauan Nias, Pantai Barat, Dataran Tinggi dan Pantai Timur (2029)
2. Program Berobat Gratis (Probis) melalui Program Universal Health Coverage (UHC) (mulai Oktober tahun 2025, UHC+ tahun 2026 - 2030)
3. Program Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pangan (JASKOP)
4. Digitalisasi Pelayanan Publik “Cepat, Responsif, Handal, dan Solutif” (CERDAS)
5. A. Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi (INSTANSI)
B. Penguatan Infrastruktur Irigasi dan Sumber Air Pertanian untuk Mendukung Swasembada Pangan Berkelanjutan
C. Peningkatan Kualitas Permukiman Layak, Terjangkau, dan Inklusif melalui Penyediaan Hunian Murah serta Dukungan Terhadap Pelaksanaan Program 3 Juta Rumah
6. Program Bantuan Hukum dan Perlindungan Rakyat Melalui Restorative Justice (PRESTICE)

Dan 17 (tujuh belas) Program Prioritas yang akan didukung oleh Perangkat Daerah Provinsi untuk pencapaiannya yaitu :

1. Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal
2. Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas Dalam Berkarya dan Berprestasi
3. Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu
4. Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran
5. Penguatan Stabilitas Makro Ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah
6. Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru.



7. Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal
8. Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal)
9. Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi.
10. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan.
11. Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat.
12. Infrastruktur dengan Prioritas Jalan dan Jembatan pada Kawasan Terisolir dan Penyediaan Layanan Dasar pada Kawasan Afirmasi, Terluar, dan Terpencil
13. Pengembangan Sistem Logistik dan Transportasi yang Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Daya Saing
14. Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana
15. Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa.
16. Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Susarana yang Harmonis, Toleran dan Rukun.
17. Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib.

Adapun rencana program Perangkat daerah yang tertuang di dalam RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 dapat dilihat berikut ini:

A. Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

Urusan Pendidikan

1. Dinas Pendidikan

- a. Program Pengelolaan Pendidikan
- b. Program Pengembangan Kurikulum
- c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
- e. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra

Urusan Kesehatan

2. Dinas Kesehatan

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- e. Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan

3. UPTDK. RSU Haji Medan

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

4. UPTDK. RSJ. Prof. DR.M. ILDREM

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

B. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)



- b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- c. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
- d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
- f. Program Pengembangan Permukiman
- g. Program Penataan Bangunan Gedung
- h. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
- i. Program Penyelenggaraan Jalan
- j. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- k. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

6. Perumahan dan Kawasan Permukiman

6.1 Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman

- a. Program Pengembangan Perumahan
- b. Program Kawasan Permukiman
- c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
- d. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

6.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

- a. Program Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum
- b. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
- c. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
- d. Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee
- e. Program Penetapan Tanah Ulayat
- f. Program Pengelolaan Tanah Kosong
- g. Program Penatagunaan Tanah
- h. Program Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah
- i. Program Survei, Pengukuran, dan Pemetaan
- j. Program Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanahan
- k. Program Pengaturan Pertanahan di Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau
- l. Program Pembangunan Sistem Informasi Pertanahan
- m. Program Penanganan Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan

C. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

7. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

- a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- c. Program Penanggulangan Bencana

8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- a. Program Penanggulangan Bencana
- b. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

9. Dinas Sosial

Urusan Sosial



- a. Program Pemberdayaan Sosial
- b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
- c. Program Rehabilitasi Sosial
- d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- e. Program Penanganan Bencana
- f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

D. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

10. Dinas Ketenagakerjaan

10.1 Urusan Tenaga Kerja

- a. Program Perencanaan Tenaga Kerja
- b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
- c. Program Penempatan Tenaga Kerja
- d. Program Hubungan Industrial
- e. Program Pengawasan Ketenagakerjaan

10.2 Urusan Transmigrasi

- a. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
- b. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
- c. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

11. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana

11.1 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- b. Program Perlindungan Perempuan
- c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
- e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- f. Program Perlindungan Khusus Anak

11.2 Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

- a. Program Pengendalian Penduduk
- b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- c. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

12. Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura

12.1 Urusan Pangan

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
- b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- c. Program Penanganan Kerawanan Pangan
- d. Program Pengawasan Keamanan Pangan

12.2 Urusan Pertanian

- a. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
- b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- d. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- e. Program Perizinan Usaha Pertanian
- f. Program Penyuluhan Pertanian

13. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan



13.1 Urusan Lingkungan Hidup

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
- d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
- e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- f. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH
- g. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- h. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- i. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- j. Program Pengelolaan Persampahan

13.2 Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

- a. Program Perencanaan Hutan
- b. Program Pengelolaan Hutan
- c. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
- d. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan
- e. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
- f. Program Pengelolaan Hutan Adat

14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil

14.1 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Program Pendaftaran Penduduk
- b. Program Pencatatan Sipil
- c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

14.2 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

- a. Program Penataan Desa
- b. Program Peningkatan Kerja Sama Desa
- c. Program Administrasi Pemerintahan Desa
- d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

15. Dinas Perhubungan

Urusan Perhubungan

- a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- b. Program Pengelolaan Pelayaran
- c. Program Pengelolaan Penerbangan
- d. Program Pengelolaan Perkeretaapian

16. Dinas Komunikasi dan Informatika

16.1 Urusan Komunikasi dan Informatika

- a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

16.2 Urusan Statistik

- a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral



16.3 Urusan Persandian

- a. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
- b. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
- d. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
- e. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
- f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
- g. Program Pengembangan UMKM
- h. Program Penguatan Badan Hukum Koperasi

18. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Urusan Penanaman Modal

- a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- b. Program Promosi Penanaman Modal
- c. Program Pelayanan Penanaman Modal
- d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- e. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
- f. Program Kerja Sama Penanaman Modal

19. Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan

- a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- b. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
- c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

20. Dinas Kebudayaan, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

20.1 Urusan Kebudayaan

- a. Program Pengembangan Kebudayaan
- b. Program Pembinaan Sejarah
- c. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
- d. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
- e. Program Pengelolaan Permuseuman
- f. Program Perfilman Nasional

20.2 Urusan Pariwisata

- a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- b. Program Pemasaran Pariwisata
- c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

21. Dinas Perpustakaan Dan Arsip

21.1 Urusan Perpustakaan

- a. Program Pembinaan Perpustakaan
- b. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
- c. Program Akreditasi Perpustakaan dan Sertifikasi Perpustakaan

21.2 Urusan Kearsipan

- a. Program Pengelolaan Arsip



- b. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
- c. Program Perizinan Penggunaan Arsip
- d. Program Akreditasi dan Sertifikasi

E. Urusan Pilihan

22. Dinas Kelautan dan Perikanan

- a. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- d. Program Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan
- e. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

23. Dinas Perkebunan Dan Peternakan

Urusan Pertanian

- a. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
- b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- d. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- e. Program Perizinan Usaha Pertanian
- f. Program Penyuluhan Pertanian

24. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi Dan Sumber Daya Mineral

24.1 Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

- a. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
- b. Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara
- c. Program Minyak dan Gas Bumi
- d. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
- e. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

24.2 Urusan Bidang Perdagangan

- a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
- b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- d. Program Pengembangan Ekspor
- e. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
- f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

24.3 Urusan Bidang Perindustrian

- a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
- b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
- c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

F. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

25. Sekretariat Daerah

25.1 Biro Umum

- a. Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa

25.2 Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah

- a. Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah

25.3 Biro Perekonomian

- a. Program Perekonomian Dan Pembangunan



- 25.4 Biro Kesejahteraan Rakyat
 - a. Program Kesejahteraan Rakyat

- 25.5 Biro Organisasi
 - a. Program Penataan Organisasi

- 25.6 Biro Administrasi Pembangunan
 - a. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan

- 25.7 Biro Hukum
 - a. Program Fasilitas Dan Koordinasi Hukum

26. Sekretariat DPRD

- a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

G. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

27. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan

- a. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- b. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- c. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
- d. Program Riset dan Inovasi Daerah

28. Badan Keuangan Dan Aset Daerah

- a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

29. Badan Pendapatan Daerah

- a. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
- b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

30. Badan Kepegawaian

- a. Program Kepegawaian Daerah,

31. Badan Pendidikan dan Pelatihan

- a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

32. Badan Penghubung

- a. Program Pelayanan Penghubung

33. Inspektorat Daerah Provinsi

- a. Program Penyelenggaraan Pengawasan
- b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

H. Unsur Pemerintahan Umum

34. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
- b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
- c. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi



- Kemasyarakatan
- d. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
 - e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Di samping program-program yang menjadi tupoksi Perangkat Daerah, terdapat Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang merupakan pendukung operasional Perangkat Daerah.

Alokasi Pagu Indikatif seluruh program Perangkat Daerah pada Tahun 2026 disusun dengan mempertimbangkan proyeksi kemampuan anggaran tahun 2026, kebutuhan belanja pembangunan daerah, dan prioritas pembangunan daerah. Untuk menempuh proses penguatan fondasi transformasi, Seluruh OPD telah menetapkan sebanyak 207 program, 958 kegiatan, 4.108 sub kegiatan, yang didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 13.569.403.313.886,-

Berikut ini adalah rekapitulasi pagu indikatif pada setiap program-program prioritas pembangunan daerah tahun 2026 (Jumlah Program, kegiatan, sub kegiatan pada tabel dengan menyertakan Program Urusan Penunjang Pemerintah daerah Provinsi). Alokasi Pagu Indikatif Pagu Indikatif seluruh program Perangkat Daerah pada Tahun 2026 disusun dengan mempertimbangkan proyeksi kemampuan anggaran tahun 2026, kebutuhan belanja pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah. Berikut ini disajikan tabel rencana pagu Perangkat Daerah beserta jumlah program, kegiatan, sub kegiatan:

Tabel 6.1 Rencana Pagu Perangkat Daerah Tahun 2026

No	Perangkat Daerah	RENJA 2026			
		Jumlah			PAGU (Rp)
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
1	DINAS PENDIDIKAN	5	26	370	3.790.039.168.907
2	DINAS KESEHATAN	5	33	152	1.088.947.219.727
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	11	36	298	2.131.898.350.505
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	17	55	170	43.623.331.591
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3	11	124	50.390.798.857
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	3	11	124	28.646.754.077
7	DINAS SOSIAL	6	35	146	119.222.112.376
8	DINAS KETENAGAKERJAAN	8	20	70	60.504.166.506
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN	9	24	132	19.560.460.273



No	Perangkat Daerah	RENJA 2026			
		Jumlah			PAGU (Rp)
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
	ANAK DAN KELUARGA BERENCANA				
10	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	10	29	140	265.536.639.567
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	16	65	233	138.417.024.414
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	8	52	172	33.724.422.685
13	DINAS PERHUBUNGAN	4	64	172	121.017.497.826
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4	8	43	70.502.478.891
15	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENEGAH	8	19	42	44.570.868.728
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6	23	39	29.445.732.893
17	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN	3	9	33	194.704.052.067
18	DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	10	53	222	80.771.020.622
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	7	29	83	24.228.489.389
20	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	5	65	161	42.891.594.102
21	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	6	21	105	82.612.997.335
22	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	14	156	412	76.171.517.363
23	SETDA PROVSU	7	33	144	714.656.998.404



No	Perangkat Daerah	RENJA 2026			
		Jumlah			PAGU (Rp)
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
23.a.	BIRO UMUM	1	5	21	343.089.028.301
23.b.	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1	5	21	3.325.207.160
23.c.	BIRO PEREKONOMIAN	1	5	21	2.210.075.898
23.d.	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	1	5	21	330.665.364.927
23.e	BIRO ORGANISASI	1	5	20	2.418.603.565
23.f.	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1	4	20	1.872.879.485
23.g.	BIRO HUKUM	1	4	20	5.997.340.622
23.h.	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	1	3	9	2.271.214.236
23.i.	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN				22.807.284.210
26	SEKRETARIAT DPRD	1	10	47	553.035.514.770
27	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	4	14	120	67.329.028.824
28	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3	8	88	3.088.391.706.919
29	BADAN PENDAPATAN DAERAH	3	8	88	344.280.142.399
30	BADAN KEPEGAWAIAN	1	4	40	35.802.262.465
31	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	3	17	45.792.183.206
32	BADAN PENGHUBUNG	1	1	5	36.242.316.333
33	INSPEKTORAT	2	4	15	80.204.667.808
34	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5	5	33	66.241.794.057
TOTAL		207	958	4.108	13.569.403.313.886

Pembangunan nasional dan daerah memerlukan keterpaduan arah dan strategi agar tujuan pembangunan jangka menengah dapat tercapai secara efektif. Salah satu prioritas nasional adalah mewujudkan ketahanan pangan, energi, dan air yang diterjemahkan oleh pemerintah provinsi ke dalam pengembangan ekonomi hijau dan biru. Hal ini diwujudkan melalui



program penanganan kerawanan pangan yang mengukur keberhasilannya dengan indikator penurunan daerah rawan pangan. Sinkronisasi ini berlanjut pada prioritas nasional penyempurnaan sistem penerimaan negara, yang dipadukan oleh provinsi dalam penguatan stabilitas fiskal melalui program pengelolaan keuangan daerah, di mana kinerjanya diukur melalui kualitas akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.

Di bidang reformasi birokrasi dan hukum, provinsi mendukung agenda reformasi nasional melalui penataan organisasi dan peningkatan kapasitas ASN, dengan indikator fasilitasi kelembagaan dan analisis jabatan. Sementara itu, dalam upaya pemberantasan kemiskinan, daerah menyelaraskan kebijakan nasional melalui pemberdayaan masyarakat rentan dalam bentuk layanan rehabilitasi sosial, yang dinilai dari jumlah dan jenis layanan yang diberikan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial. Upaya pelestarian lingkungan juga menjadi prioritas bersama yang diimplementasikan melalui program konservasi keanekaragaman hayati dan pengendalian pencemaran lingkungan, yang kinerjanya dinilai dari indeks biodiversitas dan tingkat pengaduan yang berhasil ditangani.

Dalam bidang kesehatan, prioritas nasional menjamin pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini dijabarkan provinsi melalui penguatan layanan kesehatan di kawasan terpadu, dengan indikator cakupan layanan UKP dan UKM serta fasilitas yang tersedia. Pendidikan dan teknologi juga menjadi fokus pembangunan, dengan prioritas nasional pada penguatan pendidikan vokasi, yang diterapkan daerah melalui pengelolaan SMK berbasis industri lokal dengan indikator relevansi lulusan terhadap pasar kerja.

Untuk menjamin keamanan nasional dan ketertiban umum, provinsi melaksanakan program peningkatan ketenteraman melalui peningkatan kapasitas Satpol PP dan PPNS. Indikatornya mencakup efektivitas penanganan gangguan ketertiban dan pelatihan aparaturnya. Dalam ranah kesetaraan gender dan perlindungan kelompok rentan, daerah menjalankan program perlindungan khusus anak dan pemberdayaan perempuan, dengan indikator cakupan layanan rehabilitasi dan pencegahan kekerasan. Digitalisasi dan inovasi juga menjadi perhatian, yang didorong melalui program e-government yang mengukur kinerja dari jumlah layanan publik berbasis digital yang terintegrasi.

Seluruh program prioritas ini menunjukkan bagaimana sinkronisasi vertikal antara pusat dan daerah memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya selaras dari segi tujuan, tetapi juga efektif dalam pelaksanaannya melalui indikator kinerja yang terukur dan dapat dipantau. Pendekatan ini memperkuat integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis hasil di tingkat nasional dan daerah. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel di berikut:



Tabel 6.2 Daftar Tindak Lanjut Dukungan Pemerintah Daerah atas Kebijakan Prioritas Nasional Tahun 2026

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru (PP 5)	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	2.500.360.250	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi		2.300.066.250	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	299.987.750	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.000.078.500	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi		200.294.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	200.294.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	2.050.000.729	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		2.050.000.729	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	300.002.091	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	449.999.700	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	699.999.042	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	599.999.896	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1. Persentase Penanganan Bencana Pertanian	12.033.659.690	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
				2. Persentase Penanganan Dampak Perubahan iklim Terhadap Pertanian		
			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		12.033.659.690	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	299.999.792	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	2.183.760.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	699.900.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	8.849.999.898	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan	9.550.790.850	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi		1.100.094.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	100.002.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1.000.092.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		6.850.746.600	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	125.460.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	250.120.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	1.000.054.600	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	2.000.057.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	2.000.002.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi	100.053.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	1.375.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi		1.599.950.250	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	100.000.250	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1.499.950.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	40.452.291.010	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
				2. Peningkatan Produksi Hortikultura		
				3. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan		
			Penataan Prasarana Pertanian		40.452.291.010	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	3.999.997.708	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	7.999.980.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	18.387.060.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	199.992.489	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	3.135.932.813	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	5.739.620.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	989.708.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	71.275.991.607	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		70.775.994.607	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	29.134.383.270	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	34.501.624.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	960.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	2.599.997.746	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak	1.349.999.627	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	1.979.999.204	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	249.990.760	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		499.997.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	499.997.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1. Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	14.675.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
				2. Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi		
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		3.000.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Pangan dan Hortikultura
			Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	2.000.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	1.000.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian		7.475.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	1.000.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	6.475.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		4.200.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	2.000.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	2.200.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Indeks Keanekaragaman Hayati	829.530.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pengelolaan Taman Hutan Raya		680.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			(TAHURA) Provinsi			
			Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	630.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan	50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Perlindungan Tumbuhan dan		149.530.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi			
			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	149.530.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	224.999.750	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pembinaan dan Pengawasan Izin		224.999.750	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	154.999.750	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	70.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PROGRAM PENANGANAN	Persentase penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana Lingkungan hidup	139.999.650	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Penyelesaian Pengaduan		139.999.650	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi			
			Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	29.999.900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola ditindaklanjuti/ditangani	109.999.750	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1. Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH)	5.611.750.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
				2. Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)		
			Pelaksanaan Penyuluhan		5.611.750.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			
			Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	3.146.715.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2.465.035.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pelaksanaan Pengelolaan DAS		150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
			Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	70.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	10.676.636.629	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pelaksanaan Pengolahan Hasil		65.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun			
			Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	65.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		3.510.244.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	2.017.872.525	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	202.371.475	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	735.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (illegal logging dan TSL)	555.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		4.806.727.650	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pembangunan Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	865.030.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	280.126.250	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	2.897.266.400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pembangunan Sumur resapan	Jumlah Sumur Resapan yang terbangun	96.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	668.305.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		280.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pelayanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani	Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)	50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	65.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	55.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	60.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		1.349.999.979	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH	Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH	599.999.979	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	600.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Perbenihan Tanaman Hutan		370.665.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan	Jumlah penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko (perorangan dan badan usaha non Perhutani) kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, pengadaan dan pengedaran bibit, serta pengadaan dan pengedaran benih dan bibit dalam provinsi	180.665.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pengelolaan Sumber Benih	Luas sumber benih yang dikelola	190.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Rencana Pengelolaan Kesatuan		294.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)			
			Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	294.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase RTH	200.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
			Pengelolaan Keanekaragaman		212.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Hayati Provinsi			



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola lingkup Kewenangan Provinsi	200.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	12.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PROGRAM PENGELOLAAN	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	2.499.999.420	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PERSAMPAHAN			
			Penanganan Sampah di TPA/TPST		2.499.999.420	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Regional			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	300.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional	399.999.990	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia	1.499.999.330	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan	300.000.100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	649.999.800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			
			Pengumpulan Limbah B3 Lintas		649.999.800	



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha	Jumlah fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis Pengumpulan Limbah B3 skala Provinsi yang terintegrasi dengan persetujuan lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha	250.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	399.999.800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PROGRAM PENGENDALIAN	1. Indeks Kualitas Air	2.859.997.807	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2. Indeks Kualitas Udara		
			Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		75.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar lintas kabupaten/kota	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak lintas kabupaten/kota	75.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		2.784.997.807	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	629.998.666	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	65.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	194.999.850	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	149.999.750	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	199.999.800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	319.999.914	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1.199.999.827	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi yang dilakukan pemeliharaan	25.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PROGRAM PENGHARGAAN	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	272.783.450	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
			Pemberian Penghargaan		272.783.450	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi			



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	272.783.450	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PROGRAM PENINGKATAN	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	67.716.250	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
			Penyelenggaraan Pendidikan,		67.716.250	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi			
			Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah pembinaan dan pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	11.999.800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	55.716.450	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PROGRAM Perencanaan	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	699.999.462	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			LINGKUNGAN HIDUP			
			Penyelenggaraan Kajian		99.999.700	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi			
			Pembinaan, Penilaian, Evaluasi Terhadap KLHS Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota	99.999.700	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Rencana Perlindungan dan		599.999.762	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi			
			Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH	Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG, RPPKarst yang ditetapkan	499.999.762	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN	1. Persentase Penanganan Bencana Pertanian	310.153.800	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	2. Persentase Penanganan Dampak Perubahan iklim Terhadap Pertanian		
			Pengendalian dan Penanggulangan		310.153.800	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Bencana Pertanian Provinsi			
			Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	77.995.000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	28.420.000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	203.738.800	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			PROGRAM PENGENDALIAN	1. Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	3.014.352.254	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	2. Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)		
			Kesejahteraan Hewan		158.286.277	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	158.286.277	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Penerapan Persyaratan Teknis		839.211.944	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan			



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	839.211.944	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Penjaminan Kesehatan Hewan,		2.016.854.033	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
			Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	64.501.488	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	1.044.278.095	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	908.074.450	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	1.958.215.948	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		9.424.798.677	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan			
			Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor		47.468.782	Dinas Perkebunan dan Peternakan



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	47.468.782	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		2.394.319.880	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	2.394.319.880	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Pengendalian dan Pengawasan		10.396.940.323	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi			
			Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	9.998.256.055	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar	398.684.268	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Peningkatan Ketersediaan dan		5.523.114.679	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi			
			Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	5.523.114.679	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1. Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	1.577.811.431	Dinas Perkebunan dan Peternakan
				2. Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi		
			Pengembangan Kapasitas		1.208.405.000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan			



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	62.103.000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	1.146.302.000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Pengembangan Penerapan		369.406.431	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Penyuluhan Pertanian			
			Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	369.406.431	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	56.219.000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
			Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	56.219.000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	23.151.706.922	Bappelitbang
				2.Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		
				3.Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA		
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		1.317.158.000	Bappelitbang



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	395.326.000	Bappelitbang
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	400.692.000	Bappelitbang
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	272.460.000	Bappelitbang
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	248.680.000	Bappelitbang
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		1.285.349.370	Bappelitbang
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	581.455.370	Bappelitbang
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	110.578.000	Bappelitbang
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	262.734.000	Bappelitbang
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	130.592.000	Bappelitbang



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	99.980.000	Bappelitbang
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	100.010.000	Bappelitbang
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		1.780.187.500	Bappelitbang
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	315.246.000	Bappelitbang
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	310.386.500	Bappelitbang
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	392.644.500	Bappelitbang
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	294.043.000	Bappelitbang
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	205.766.500	Bappelitbang
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	262.101.000	Bappelitbang
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	13.547.712.050	Bappelitbang



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				2.Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah		
				3.Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah		
				4.Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah		
			Penelitian dan Pengembangan		748.439.600	Bappelitbang
			Bidang Ekonomi dan Pembangunan			
			Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum		249.999.850	Bappelitbang
			Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan		249.999.950	Bappelitbang
			Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		248.439.800	Bappelitbang
			Penelitian dan Pengembangan		249.999.850	Bappelitbang
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi		249.999.850	Bappelitbang
			Penelitian dan Pengembangan		919.520.200	Bappelitbang
			Bidang Sosial dan Kependudukan			
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		174.898.000	Bappelitbang
			Penelitian dan Pengembangan Kesehatan		171.328.000	Bappelitbang
			Penelitian dan Pengembangan Pariwisata		189.766.000	Bappelitbang



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan		187.238.000	Bappelitbang
			Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja		196.290.200	Bappelitbang
			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	14.725.773.967	Bappelitbang
				2. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD		
			Pengendalian, Evaluasi dan		847.406.000	Bappelitbang
			Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			
			Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	139.320.000	Bappelitbang
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	708.086.000	Bappelitbang
			Penyusunan Perencanaan dan		6.182.622.000	Bappelitbang
			Pendanaan			
			Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	125.518.000	Bappelitbang
			Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	122.636.000	Bappelitbang
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	780.052.000	Bappelitbang
			Pelaksanaan Konsultasi Publik		157.216.000	Bappelitbang
			Pelaksanaan Musrenbang Provinsi		4.997.200.000	Bappelitbang
			PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	1.Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	11.780.619.174	Bappelitbang



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				2.Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah		
				3.Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah		
				4.Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah		
			Invensi dan Inovasi		1.151.654.407	Bappelitbang
			Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	470.187.707	Bappelitbang
			Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	396.988.000	Bappelitbang
			Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	159.979.700	Bappelitbang
			Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	124.499.000	Bappelitbang
			Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan		449.999.950	Bappelitbang
			Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	449.999.950	Bappelitbang
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Luasan Kawasan Konservasi	750.077.650	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil		600.077.300	Dinas Kelautan dan Perikanan



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	78.488.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	399.997.300	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	121.592.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		150.000.350	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	100.000.250	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	50.000.100	Dinas Kelautan dan Perikanan
			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	699.746.210	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		99.982.700	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	99.982.700	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		50.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	50.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		549.763.510	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Jumlah Pembudidaya Ikan yang memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	199.998.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Pengintegrasian Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	Dokumen Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K yang terintegrasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	100.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	249.765.510	Dinas Kelautan dan Perikanan
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	4.519.972.277	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		4.419.872.277	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya Ikan yang memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	3.999.999.988	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	235.272.289	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	184.600.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat		100.100.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100.100.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	7.762.765.943	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		764.185.943	Dinas Kelautan dan Perikanan



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	350.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	414.185.943	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		6.998.580.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	4.695.080.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	2.303.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	823.486.236	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		373.559.648	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	222.393.290	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	151.166.358	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		449.926.588	Dinas Kelautan dan Perikanan



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitas	299.985.488	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	149.941.100	Dinas Kelautan dan Perikanan
			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	1. Jumlah Volume Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	430.401.200	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
				2. Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota		
			Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		206.017.200	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	120.092.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	60.018.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	25.907.200	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		224.384.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	154.514.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	69.870.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	1. Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT	3.027.404.283	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
				2. Porsi EBT dalam Bauran Energi		
			Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi		2.977.404.283	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	2.707.953.203	Dinas Perindustrian,Perdagangan dan ESDM
			Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah	Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah	142.571.080	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah rencana kegiatan pemanfaatan aneka EBT	126.880.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi		50.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	50.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi	3.670.277.500	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi		563.568.500	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	563.568.500	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		3.106.709.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	3.106.709.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	1. Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah	711.291.100	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
				2. Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR		
			Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat		241.960.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	241.960.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		354.711.100	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	73.740.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	280.971.100	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan		14.908.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah	14.908.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		99.712.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Tersedianya Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil laut	99.712.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	300.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		300.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	300.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Barang	1.450.512.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi		1.450.512.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	1.203.430.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	247.082.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	700.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi		700.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.	350.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	350.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	100.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		100.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah laporan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer	100.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	100.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas		100.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	100.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	11.000.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		11.000.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	425.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	8.075.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2.500.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	49.487.750	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)		49.487.750	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	49.487.750	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	778.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya		80.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	80.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		698.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	618.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	80.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	1.936.380.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		178.390.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	178.390.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		400.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pemantauan Mutu Produk	Jumlah produk potensial yang dipantau	40.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	160.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	160.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan	40.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		1.357.990.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani		Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif		Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
		Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal (PP 6)	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	2.500.360.250	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi		2.300.066.250	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	299.987.750	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.000.078.500	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi		200.294.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	200.294.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	2.050.000.729	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		2.050.000.729	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	300.002.091	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	449.999.700	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	699.999.042	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	599.999.896	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1. Persentase Penanganan Bencana Pertanian	12.033.659.690	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
				2. Persentase Penanganan Dampak Perubahan iklim Terhadap Pertanian		
			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		12.033.659.690	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	299.999.792	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	2.183.760.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	699.900.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	8.849.999.898	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan	9.550.790.850	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi		1.100.094.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	100.002.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1.000.092.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		6.850.746.600	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	125.460.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	250.120.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	1.000.054.600	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	2.000.057.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	2.000.002.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi	100.053.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	1.375.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi		1.599.950.250	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	100.000.250	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1.499.950.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	40.452.291.010	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
				2. Peningkatan Produksi Hortikultura		
				3. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan		
			Penataan Prasarana Pertanian		40.452.291.010	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	3.999.997.708	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	7.999.980.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	18.387.060.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	199.992.489	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	3.135.932.813	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	5.739.620.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	989.708.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	71.275.991.607	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		70.775.994.607	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	29.134.383.270	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	34.501.624.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	960.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	2.599.997.746	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak	1.349.999.627	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	1.979.999.204	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	249.990.760	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		499.997.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	499.997.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1. Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	14.675.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
				2. Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi		
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		3.000.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	2.000.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	1.000.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian		7.475.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	1.000.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	6.475.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		4.200.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	2.000.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	2.200.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN	1. Persentase Penanganan Bencana Pertanian	12.033.659.690	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	2. Persentase Penanganan Dampak Perubahan iklim Terhadap Pertanian		
			Pengendalian dan Penanggulangan		310.153.800	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Bencana Pertanian Provinsi			



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	299.999.792	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	699.900.000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	8.849.999.898	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			PROGRAM PENGENDALIAN	1. Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	3.014.352.254	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	2. Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)		
			Kesejahteraan Hewan		158.286.277	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	158.286.277	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Penerapan Persyaratan Teknis		839.211.944	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan			
			Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	839.211.944	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Penjaminan Kesehatan Hewan,		2.016.854.033	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
			Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	64.501.488	Dinas Perkebunan dan Peternakan



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	1.044.278.095	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	908.074.450	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Luas Lahan yang Difasilitasi Ketersediaan Prasarana Perkebunan	27.786.642.341	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		9.424.798.677	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	9.424.798.677	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor		47.468.782	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	47.468.782	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		2.394.319.880	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	2.394.319.880	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi		10.396.940.323	Dinas Perkebunan dan Peternakan



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	9.998.256.055	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar	398.684.268	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		5.523.114.679	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	5.523.114.679	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Tani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	1.577.811.431	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		1.208.405.000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	62.103.000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Terlaksananya pendampingan dan pengawalan korporasi petani	1.146.302.000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		369.406.431	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	369.406.431	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	56.219.000	Dinas Perkebunan dan Peternakan



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Penerbitan Izin Usaha Pertanian		56.219.000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
			Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	56.219.000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
2	Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara	Penguatan Stabilitas Makro Ekonomi dan Kestinambungan Fiskal Daerah (PP 4)	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	2.809.293.000	DPMPTSP
			MODAL			
			Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan		435.173.000	DPMPTSP
			Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi	435.173.000	DPMPTSP
			Penanaman Modal yang Ruang		2.374.120.000	DPMPTSP
			Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
			Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	332.708.000	DPMPTSP
			Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2.041.412.000	DPMPTSP
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	49.637.286	DPMPTSP
			SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			
			Urusan Pengelolaan Data dan Informasi		49.637.286	DPMPTSP
Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi						



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	49.637.286	DPMPTSP
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM	Realisasi Total terhadap Target Investasi	4.071.210.084	DPMPPTSP
			PENANAMAN MODAL			
			Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi		4.071.210.084	DPMPPTSP
			Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	142.184.000	DPMPTSP
			Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	597.806.084	DPMPTSP
			Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	3.029.343.000	DPMPTSP
			Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	301.877.000	DPMPTSP
			PROGRAM PENGENDALIAN	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	799.167.000	DPMPPTSP
			PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		799.167.000	DPMPPTSP
			Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha			
				Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	189.140.000	DPMPTSP



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	417.580.000	DPMPTSP
			Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	192.447.000	DPMPTSP
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	2.990.978.000	DPMPTSP
			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		2.990.978.000	DPMPTSP
			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	2.500.400.000	DPMPTSP
			Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	490.578.000	DPMPTSP
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	4.520.490.817	BKAD
			Pengelolaan Barang Milik Daerah		4.186.783.152	BKAD
			Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	313.894.000	BKAD
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	436.192.000	BKAD
			Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	93.986.000	BKAD
			Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1.253.908.352	BKAD



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	622.766.000	BKAD
			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	81.490.000	BKAD
			Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	541.374.064	BKAD
			Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	27.662.000	BKAD
			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	156.078.000	BKAD
			Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	144.224.000	BKAD
			Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	30.560.000	BKAD
			Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	350.378.736	BKAD
			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	134.270.000	BKAD
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	3.022.969.387.040	BKAD
				2. Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik		
				3. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar		
				4. Persentase Penurunan SILPA		
				5. Persentase laporan keuangan tepat waktu		
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		3.645.603.128	BKAD
			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD		381.006.000	BKAD



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi		
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	785.596.000	BKAD
			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	812.604.064	BKAD
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	189.952.000	BKAD
			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	430.785.000	BKAD
			Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	480.318.000	BKAD
			Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	565.342.064	BKAD
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		3.224.160.236	BKAD
			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	308.999.260	BKAD



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	564.569.608	BKAD
			Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	30.000.000	BKAD
			Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	435.306.108	BKAD
			Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	40.000.000	BKAD
			Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	548.403.804	BKAD
			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1.296.881.456	BKAD
			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		8.003.032.500	BKAD
			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	420.650.000	BKAD



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2.219.652.250	BKAD
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	3.625.116.250	BKAD
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	425.050.000	BKAD
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	479.873.000	BKAD
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	112.503.000	BKAD
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	99.988.000	BKAD
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	147.850.000	BKAD
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	156.600.000	BKAD
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	171.250.000	BKAD
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	144.500.000	BKAD
			Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota		1.389.883.332	BKAD
			Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	88.287.900	BKAD
			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	716.204.732	BKAD



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	229.082.800	BKAD
			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	64.817.900	BKAD
			Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	99.690.000	BKAD
			Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	191.800.000	BKAD
			Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		1.179.478.742	BKAD
			Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1.179.478.742	BKAD
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		3.005.527.229.102	BKAD
			Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	263.516.000	BKAD
			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	125.357.925.000	BKAD
			Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	2.579.718.798.811	BKAD



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	300.186.989.291	BKAD
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	4.520.490.817	Bapenda
			Pengelolaan Barang Milik Daerah		229.400.000	Bapenda
			Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	229.400.000	Bapenda
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	6.115.236.850	Bapenda
				2.Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan		
				3.Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital		
			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		6.115.236.850	Bapenda
			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	871.216.000	Bapenda
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	1.734.779.400	Bapenda
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	3.164.241.450	Bapenda
			Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	345.000.000	Bapenda
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	1.374.000.000	Biro Perekonomian
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD		578.493.000	Biro Perekonomian
			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	135.994.000	Biro Perekonomian



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	225.305.000	Biro Perekonomian
			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	225.305.000	Biro Perekonomian
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian		492.535.000	Biro Perekonomian
			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	284.676.000	Biro Perekonomian
			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	207.859.000	Biro Perekonomian
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam		303.934.000	Biro Perekonomian
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	129.568.000	Biro Perekonomian
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	174.366.000	Biro Perekonomian
			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Indeks Kematangan Organisasi	1.189.442.042	Biro Organisasi
			Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan		380.186.042	Biro Organisasi
			Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	80.140.000	Biro Organisasi
			Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	160.000.000	Biro Organisasi



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	140.046.042	Biro Organisasi
			Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja		809.256.000	Biro Organisasi
			Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	112.042.000	Biro Organisasi
			Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	230.866.000	Biro Organisasi
			Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	169.915.000	Biro Organisasi
			Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	148.355.000	Biro Organisasi
			Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	148.078.000	Biro Organisasi
3	Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan (PP 10)	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Indeks Kematangan Organisasi	2.225.115.280	Biro Organisasi
			Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan		380.186.042	Biro Organisasi
			Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	80.140.000	Biro Organisasi
			Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	160.000.000	Biro Organisasi
			Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	140.046.042	Biro Organisasi
			Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja		2.225.115.280	Biro Organisasi
			Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja		Biro Organisasi
			Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik		Biro Organisasi
			Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		Biro Organisasi



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		Biro Organisasi
			Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan		Biro Organisasi
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	13.208.398.000	Inspektorat
			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		5.305.393.000	Inspektorat
			Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	141.600.000	Inspektorat
			Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	5.163.793.000	Inspektorat
			Penyelenggaraan Pengawasan Internal		7.903.005.000	Inspektorat
			Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1.067.372.000	Inspektorat
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1.747.140.000	Inspektorat
			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1.107.168.000	Inspektorat
			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.804.616.000	Inspektorat
			Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	1.230.052.000,00	Inspektorat
			Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	110.030.000	Inspektorat
			Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	836.657.000	Inspektorat



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1. Maturitas Penyelenggaraan Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)	1.553.152.000	Inspektorat
				2. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		
			Pendampingan dan Asistensi		1.341.460.000	Inspektorat
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	499.690.000	Inspektorat
			Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	451.260.000	Inspektorat
			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	40.000.000	Inspektorat
			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	350.510.000	Inspektorat
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		211.692.000	Inspektorat
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	9.000.000	Inspektorat
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	202.692.000	Inspektorat
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	2.755.171.959	BPSDM
				2.Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan		
				3.Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi		



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				4. Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis		
			Pengembangan Kompetensi Teknis		1.313.766.648	BPSDM
			Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	668.048.232,00	BPSDM
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	645.718.416	BPSDM
			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		1.441.405.311	BPSDM
			Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi		BPSDM
			Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar		BPSDM
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	511.006.182	BPSDM
			Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	71.292.213	BPSDM



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	8.663.366.639	Bappelitbang
				2.Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		
				3.Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA		
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		1.817.155.000	Bappelitbang
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	296.863.000	Bappelitbang
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	805.206.000	Bappelitbang
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	416.880.000	Bappelitbang
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	248.680.000	Bappelitbang
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		1.994.721.370	Bappelitbang
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	746.212.370	Bappelitbang



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	211.950.000	Bappelitbang
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	462.957.000	Bappelitbang
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	180.593.000	Bappelitbang
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	200.608.000	Bappelitbang
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	192.401.000	Bappelitbang
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		4.851.490.269	Bappelitbang
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	3.464.445.269	Bappelitbang
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	262.024.500	Bappelitbang
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	315.300.000	Bappelitbang
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	293.883.000	Bappelitbang



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	310.332.500	Bappelitbang
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	205.505.000	Bappelitbang
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	1.870.701.500,00	Bappelitbang
				2.Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah		
				3.Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah		
				4.Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah		
			Penelitian dan Pengembangan		666.105.600	Bappelitbang
			Bidang Ekonomi dan Pembangunan			
			Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	224.407.850	Bappelitbang
			Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	229.189.950	Bappelitbang
			Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	212.507.800	Bappelitbang



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Penelitian dan Pengembangan		235.222.000	Bappelitbang
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	235.222.000	Bappelitbang
			Penelitian dan Pengembangan		969.373.900	Bappelitbang
			Bidang Sosial dan Kependudukan			
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	202.410.000	Bappelitbang
			Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	197.230.000	Bappelitbang
			Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	186.348.000	Bappelitbang
			Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	187.096.000	Bappelitbang
			Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	196.289.900	Bappelitbang
			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	6.028.635.000	Bappelitbang
				2. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD		
			Pengendalian, Evaluasi dan		1.173.103.000	Bappelitbang
			Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			
			Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	147.424.000	Bappelitbang



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1.025.679.000	Bappelitbang
			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		4.855.532.000	Bappelitbang
			Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	94.800.000	Bappelitbang
			Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	237.348.000	Bappelitbang
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	1.070.368.000	Bappelitbang
			Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	157.216.000	Bappelitbang
			Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	3.295.800.000	Bappelitbang
			PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	1.Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	2.614.920.407	Bappelitbang
				2.Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah		
				3.Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah		
				4.Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah		
			Invensi dan Inovasi		2.164.920.457	Bappelitbang
			Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	897.517.707	Bappelitbang



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	982.924.050	Bappelitbang
			Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	159.979.700	Bappelitbang
			Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	124.499.000	Bappelitbang
			Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan		449.999.950	Bappelitbang
			Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	449.999.950	Bappelitbang
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	4.520.490.817	BKAD
			Pengelolaan Barang Milik Daerah		4.186.783.152	BKAD
			Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	313.894.000	BKAD
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	436.192.000	BKAD
			Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	93.986.000	BKAD
			Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1.253.908.352	BKAD
			Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	622.766.000	BKAD
			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	81.490.000	BKAD



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	541.374.064	BKAD
			Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	27.662.000	BKAD
			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	156.078.000	BKAD
			Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	144.224.000	BKAD
			Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	30.560.000	BKAD
			Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	350.378.736	BKAD
			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	134.270.000	BKAD
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	3.022.969.387.040	BKAD
				2. Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik		
				3. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar		
				4. Persentase Penurunan SILPA		
				5. Persentase laporan keuangan tepat waktu		
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		3.645.603.128	BKAD
			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	381.006.000	BKAD



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	785.596.000	BKAD
			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	812.604.064	BKAD
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	189.952.000	BKAD
			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	430.785.000	BKAD
			Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	480.318.000	BKAD
			Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	565.342.064	BKAD
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		3.224.160.236	BKAD
			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	308.999.260	BKAD



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	564.569.608	BKAD
			Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	30.000.000	BKAD
			Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	435.306.108	BKAD
			Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	40.000.000	BKAD
			Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	548.403.804	BKAD
			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1.296.881.456	BKAD
			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		8.003.032.500	BKAD
			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	420.650.000	BKAD



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2.219.652.250	BKAD
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	3.625.116.250	BKAD
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	425.050.000	BKAD
			dan Perubahan PPAS			
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	479.873.000	BKAD
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	112.503.000	BKAD
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	99.988.000	BKAD
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	147.850.000	BKAD
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	156.600.000	BKAD
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	171.250.000	BKAD
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	144.500.000	BKAD
			Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota		1.389.883.332	BKAD
			Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	88.287.900	BKAD
			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	716.204.732	BKAD



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	229.082.800	BKAD
			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	64.817.900	BKAD
			Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	99.690.000	BKAD
			Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	191.800.000	BKAD
			Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		1.179.478.742	BKAD
			Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1.179.478.742	BKAD
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		3.005.527.229.102	BKAD
			Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	263.516.000	BKAD
			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	125.357.925.000	BKAD
			Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	2.579.718.798.811	BKAD



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2.579.718.798.811	BKAD
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	229.400.000	Bapenda
			Pengelolaan Barang Milik Daerah		229.400.000	Bapenda
			Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	229.400.000	Bapenda
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	6.115.236.850	Bapenda
				2.Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan		
				3.Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital		
			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		6.115.236.850	Bapenda
			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	871.216.000	Bapenda
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	1.734.779.400	Bapenda
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	3.164.241.450	Bapenda
			Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	345.000.000	Bapenda
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	33.412.485.497	Badan Kepegawaian
				2.Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya		
				3.Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan kompetensinya		



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				4.Persentase Pegawai dengan SKP bernilai Baik		
			Mutasi dan Promosi ASN		871.180.000	Badan Kepegawaian
			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	34.980.000	Badan Kepegawaian
			Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	22.300.000	Badan Kepegawaian
			Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	813.900.000	Badan Kepegawaian
			Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		387.390.080	Badan Kepegawaian
			Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	299.290.000	Badan Kepegawaian
			Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	10.000.000	Badan Kepegawaian
			Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	54.100.000	Badan Kepegawaian
			Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	24.000.080	Badan Kepegawaian
			Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian		Badan Kepegawaian
			Pengembangan Kompetensi ASN		848.616.000	Badan Kepegawaian
			Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	27.500.000	Badan Kepegawaian
			Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	33.900.000	Badan Kepegawaian



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	84.956.000	Badan Kepegawaian
			Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center		Badan Kepegawaian
			Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	611.800.000	Badan Kepegawaian
			Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	40.060.000	Badan Kepegawaian
			Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	24.000.000	Badan Kepegawaian
			Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	26.400.000	Badan Kepegawaian
			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		312.362.372	Badan Kepegawaian
			Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	98.022.000	Badan Kepegawaian
			Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	15.360.000	Badan Kepegawaian
			Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	53.470.000	Badan Kepegawaian
			Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan		Badan Kepegawaian
4	Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan (PP 10)	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	33.412.485.497	Badan Kepegawaian
				2.Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya		
				3.Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan kompetensinya		



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				4.Persentase Pegawai dengan SKP bernilai Baik		
			Mutasi dan Promosi ASN		871.180.000	Badan Kepegawaian
			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Badan Kepegawaian
			Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah		Badan Kepegawaian
			Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN		Badan Kepegawaian
			Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		387.390.080	Badan Kepegawaian
			Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN		Badan Kepegawaian
			Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi		Badan Kepegawaian
			Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		Badan Kepegawaian
			Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Badan Kepegawaian
			Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian		Badan Kepegawaian
			Pengembangan Kompetensi ASN		848.616.000	Badan Kepegawaian
			Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat		Badan Kepegawaian
			Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional		Badan Kepegawaian
			Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina		Badan Kepegawaian



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center		Badan Kepegawaian
			Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola		Badan Kepegawaian
			Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya		Badan Kepegawaian
			Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional		Badan Kepegawaian
			Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN		Badan Kepegawaian
			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		312.362.372	Badan Kepegawaian
			Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Badan Kepegawaian
			Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani		Badan Kepegawaian
			Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan		Badan Kepegawaian
			Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan		Badan Kepegawaian
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	38.551.198.390	Inspektorat
			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		3.628.843.000	Inspektorat
			Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	180.900.000,00	Inspektorat
			Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Inspektorat
			Penyelenggaraan Pengawasan Internal		7.556.527.000	Inspektorat



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk		Inspektorat
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		Inspektorat
			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Inspektorat
			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Inspektorat
			Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	1.230.052.000,00	Inspektorat
			Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan		Inspektorat
			Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja		Inspektorat
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1. Maturitas Penyelenggaraan Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)	36.046.271.612	Inspektorat
				2. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		
			Pendampingan dan Asistensi		1.341.460.000	Inspektorat
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Inspektorat
			Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	451.260.000,00	Inspektorat
			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	40.000.000,00	Inspektorat
			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	350.510.000,00	Inspektorat



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang		211.692.000	Inspektorat
			Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	9.000.000,00	Inspektorat
			Fasilitasi Pengawasan			
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	202.692.000,00	Inspektorat
			Pengawasan			
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	42.586.730.382	BPSDM
				2.Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan		
				3.Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi		
				4. Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis		
			Pengembangan Kompetensi Teknis		1.313.766.648	BPSDM
			Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	668.048.232	BPSDM
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	645.718.416	BPSDM
			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		1.441.405.311	BPSDM
			Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	132.624.000	BPSDM
			Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	726.482.916	BPSDM



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	511.006.182	BPSDM
			Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	71.292.213	BPSDM
5	Pemberantasan Kemiskinan	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran (PP 9)	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	430.401.200	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		206.017.200	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	120.092.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	60.018.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	25.907.200	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		224.384.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	154.514.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	69.870.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	1. Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT	3.027.404.283	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
				2. Porsi EBT dalam Bauran Energi		
			Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi		2.977.404.283	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	2.707.953.203	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah	Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah	142.571.080	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah rencana kegiatan pemanfaatan aneka EBT	126.880.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi		50.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	50.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi	3.670.277.500	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi		563.568.500	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	563.568.500	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		3.106.709.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	3.106.709.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	1. Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah	711.291.100	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
				2. Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR		
			Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat		241.960.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	241.960.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		354.711.100	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			
			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	73.740.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	280.971.100	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan		14.908.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah	14.908.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		99.712.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah	99.712.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	300.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		300.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	300.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Barang	1.450.512.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi		1.450.512.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	1.203.430.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	247.082.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	700.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi		700.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.	350.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	350.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	100.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		100.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah laporan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer		Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	100.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas		100.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi		Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	11.000.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		11.000.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	425.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	8.075.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2.500.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	49.487.750	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)		49.487.750	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	49.487.750	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	778.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya		80.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida		Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		698.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	618.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	80.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	1.936.380.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		178.390.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	178.390.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		400.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pemantauan Mutu Produk	Jumlah produk potensial yang dipantau	40.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	160.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	160.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan	40.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		1.357.990.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	49.992.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	1.307.998.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1. Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial	183.013.840	Dinas Sosial
				2. Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA		
				3. Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/ atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar		
				4.Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial		
				5.Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial		
			Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi		173.733.840	Dinas Sosial



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	121.933.840	Dinas Sosial
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	51.800.000	Dinas Sosial
			Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		9.280.000	Dinas Sosial
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	9.280.000	Dinas Sosial
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1. Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	1.248.376.849	Dinas Sosial
				2. Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya		
				3. Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan		
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi		1.248.376.849	Dinas Sosial
			Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	-	Dinas Sosial
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	-	Dinas Sosial
			Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	524.177.640	Dinas Sosial



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	723.695.500	Dinas Sosial
			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	503.709	Dinas Sosial
			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	1. Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan	192.254.830	Dinas Sosial
				2. Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani		
			Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal		192.254.830	Dinas Sosial
			Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	192.254.830	Dinas Sosial
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	147.945.493	Dinas Sosial
			Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		147.945.493	Dinas Sosial
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaanannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	147.945.493	Dinas Sosial
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1. Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	10.842.191.963,7 1	Dinas Sosial
				2. Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi		



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				3. Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelotaan dan Pendataan Data Fakir Miskin		
				4. Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar		
				5. Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi		
				6. Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan		
			Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal		33.872.388	Dinas Sosial
			Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	33.872.388	Dinas Sosial
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi		10.808.319.575,71	Dinas Sosial
			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	5.421.879.669,50	Dinas Sosial
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	5.353.102.906,21	Dinas Sosial
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin	33.337.000	Dinas Sosial
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	30.721.856.104	Dinas Sosial
				2. Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		
				3. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				4. Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		
				5. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		
				6. Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas		
				7. Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia		
				8. Indeks Peranan Sosial		
			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti		3.433.753.036	Dinas Sosial
			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	6.000.000	Dinas Sosial
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	31.191.455	Dinas Sosial
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	294.113.880	Dinas Sosial
			Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	406.244.128	Dinas Sosial
			Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	20.000.000	Dinas Sosial



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	5.815.613	Dinas Sosial
			Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	877.873.622	Dinas Sosial
			Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	43.400.000	Dinas Sosial
			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti		5.842.786.421,50	Dinas Sosial
			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	-	Dinas Sosial
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	404.400.500	Dinas Sosial
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	5.000.000	Dinas Sosial
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	7.615.440	Dinas Sosial
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	-	Dinas Sosial
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	-	Dinas Sosial
			Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	157.718.980	Dinas Sosial



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	9.966.697	Dinas Sosial
			Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	394.181.715	Dinas Sosial
			Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	30.000.000	Dinas Sosial
			Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		3.856.262.103	Dinas Sosial
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	275.114.200	Dinas Sosial
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	254.518.980	Dinas Sosial
			Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	150.999.191	Dinas Sosial
			Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	-	Dinas Sosial
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	84.305.274	Dinas Sosial
			Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	1.518.495.55	Dinas Sosial



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	34.500.000	Dinas Sosial
			Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		5.826.298.137	Dinas Sosial
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	3.850.000	Dinas Sosial
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	674.518.980	Dinas Sosial
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	-	Dinas Sosial
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	-	Dinas Sosial
			Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	37.500.000	Dinas Sosial
			Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	4.205.696	Dinas Sosial
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	19.077.608	Dinas Sosial
			Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	1.029.091.952	Dinas Sosial
			Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	23.700.000	Dinas Sosial
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti		11.762.756.406,50	Dinas Sosial



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	3.633.840	Dinas Sosial
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	142.416.000	Dinas Sosial
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	94.059.300	Dinas Sosial
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	185.037.960	Dinas Sosial
			Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	9.979.344	Dinas Sosial
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	86.851.472	Dinas Sosial
			Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	1.291.533.853	Dinas Sosial
			Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	30.090.000	Dinas Sosial
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1. Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1.248.367.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				2. Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa		



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		1.248.367.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	460.057.100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	70.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	37.422.900	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	509.957.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	738.410.000,	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1. Persentase Fasilitas Pemberdayaa n Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	10.334.144.307	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				2. Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat		
			Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota		10.334.144.307,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	54.522.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	153.836.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	6.742.434.307	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	3.383.352.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	9.487.834.397	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat		121.260.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1. Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	43.102.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan
				2. Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan		



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				3. Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan		dan Pencatatan Sipil
				4. Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan		
			Pelayanan Pencatatan Sipil		0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi		43.102.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	39.552.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				2. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak		



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pelayanan Pendaftaran Kependudukan		-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan		39.552.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait Pendaftaran Penduduk	39.552.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	57.041.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		50.102.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	396.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	49.706.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		6.939.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	6.939.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	12.118.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Penyediaan Profil Kependudukan		12.118.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia	4.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun	7.618.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						dan Pencatatan Sipil
			Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi		-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	5.353.258.800	Dinas Ketenagakerjaan
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi		615.840.000,	Dinas Ketenagakerjaan
			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	334.280.000	Dinas Ketenagakerjaan
			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	250.000.000	Dinas Ketenagakerjaan



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	31.560.000	Dinas Ketenagakerjaan
			Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)		4.679.260.000	Dinas Ketenagakerjaan
			Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Jumlah penetapan UMK	20.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
			Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	365.180.000	Dinas Ketenagakerjaan
			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	4.294.080.000	Dinas Ketenagakerjaan
			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota		58.158.800	Dinas Ketenagakerjaan
			Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	28.670.000	Dinas Ketenagakerjaan
			Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	29.488.800	Dinas Ketenagakerjaan
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	572.251.480,	Dinas Ketenagakerjaan
			Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah		100.000.000,	Dinas Ketenagakerjaan



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	100.000.000,	Dinas Ketenagakerjaan
			Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja		50.000.800	Dinas Ketenagakerjaan
			Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	50.000.800	Dinas Ketenagakerjaan
			Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi		326.769.750	Dinas Ketenagakerjaan
			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	442.785.302	Dinas Ketenagakerjaan
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	276.806.750	Dinas Ketenagakerjaan
			Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi		95.480.930	Dinas Ketenagakerjaan
			Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	95.480.930	Dinas Ketenagakerjaan
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	29.080.900	Dinas Ketenagakerjaan
			Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		29.080.900	Dinas Ketenagakerjaan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	29.080.900	Dinas Ketenagakerjaan
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	456.882.900	Dinas Ketenagakerjaan



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota		70.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
			Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	50.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
			Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	20.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
			Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi		49.848.000	Dinas Ketenagakerjaan
			Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA	49.848.000	Dinas Ketenagakerjaan
			Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		20.405.000	Dinas Ketenagakerjaan
			Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	20.405.000	Dinas Ketenagakerjaan
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		278.569.900	Dinas Ketenagakerjaan
			Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	200.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
			Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	78.569.900	Dinas Ketenagakerjaan
			Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		38.060.000	Dinas Ketenagakerjaan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	38.060.000	Dinas Ketenagakerjaan



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindung Hak-Hak Dasarnya	676.063.300	Dinas Ketenagakerjaan
			Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan		676.063.300	Dinas Ketenagakerjaan
			Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	223.287.800	Dinas Ketenagakerjaan
			Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	61.128.000	Dinas Ketenagakerjaan
			Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	63.580.000	Dinas Ketenagakerjaan
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	99.967.000	Dinas Ketenagakerjaan
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		99.967.000	Dinas Ketenagakerjaan
			Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro	40.231.000	Dinas Ketenagakerjaan
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	59.736.000	Dinas Ketenagakerjaan
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	1.374.962.000	Biro Perekonomian
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD		578.493.000	Biro Perekonomian



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	225.305.000	Biro Perekonomian
			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	217.194.000	Biro Perekonomian
			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	315.994.000	Biro Perekonomian
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian		492.535.000	Biro Perekonomian
			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	284.676.000	Biro Perekonomian
			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	207.859.000	Biro Perekonomian
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam		303.934.000	Biro Perekonomian
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	129.568.000	Biro Perekonomian
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	174.366.000	Biro Perekonomian
6	Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib (PP 17)	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	249.155.000	Satpol PP
				2.Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		
			Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran		249.155.000	Satpol PP



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)		Satpol PP
			Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	249.155.000	Satpol PP
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait		Satpol PP
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	5.283.674.682	Satpol PP
				2.Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas		
				3.Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat		
				4.Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya		
			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi		192.188.000	Satpol PP
			Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	192.188.000	Satpol PP
			Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		3.869.739.000	Satpol PP



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi		Satpol PP
			Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	316.849.000	Satpol PP
			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	2.702.910.000	Satpol PP
			Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	849.980.000	Satpol PP
			Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur		1.221.747.682	Satpol PP
			Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	622.894.000	Satpol PP
			Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	462.642.000	Satpol PP
			Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah	136.211.682	Satpol PP



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	5.402.912.850	Bakesbangpol
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		5.402.912.850	Bakesbangpol
			Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4.925.000	Bakesbangpol
			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	47.987.850	Bakesbangpol
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	5.350.000.000	Bakesbangpol
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kemkunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	1.732.398.250	Bakesbangpol
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		1.732.398.250,00	Bakesbangpol
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	769.392.250	Bakesbangpol



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	263.006.000	Bakesbangpol
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	700.000.000	Bakesbangpol
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.277.897.455	Bakesbangpol
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		2.277.897.455	Bakesbangpol
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	303.267.650	Bakesbangpol
			Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	1.741.759.923	Bakesbangpol
			Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	82.869.882	Bakesbangpol
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	150.000.000	Bakesbangpol



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	7.936.892.300	Bakesbangpol
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		7.936.892.300	Bakesbangpol
			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	58.204.000	Bakesbangpol
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	186.859.000	Bakesbangpol
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	117.423.000	Bakesbangpol
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	469.365.300	Bakesbangpol



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	7.000.000.000	Bakesbangpol
			Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	105.041.000	Bakesbangpol
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	35.889.762.000	Bakesbangpol
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		35.889.762.000	Bakesbangpol
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	35.256.793.000	Bakesbangpol



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	62.011.000	Bakesbangpol
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	570.958.000	Bakesbangpol
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	2.419.548.452	Badan Kepegawaian
				2.Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya		
				3.Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan kompetensinya		
				4.Persentase Pegawai dengan SKP bernilai Baik		
			Mutasi dan Promosi ASN		871.180.000	Badan Kepegawaian
			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	34.980.000	Badan Kepegawaian
			Pengelolaan Mutasi ASN	Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	22.300.000	Badan Kepegawaian



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	813.900.000	Badan Kepegawaian
			Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		387.390.080	Badan Kepegawaian
			Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	299.290.000	Badan Kepegawaian
			Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	10.000.000	Badan Kepegawaian
			Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	54.100.000	Badan Kepegawaian
			Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	24.000.080	Badan Kepegawaian
			Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian		Badan Kepegawaian
			Pengembangan Kompetensi ASN		848.616.000	Badan Kepegawaian
			Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	27.500.000	Badan Kepegawaian
			Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	33.900.000	Badan Kepegawaian
			Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	84.956.000	Badan Kepegawaian
			Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center		Badan Kepegawaian
			Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	611.800.000	Badan Kepegawaian
			Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	40.060.000	Badan Kepegawaian



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	24.000.000	Badan Kepegawaian
			Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	26.400.000	Badan Kepegawaian
			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		312.362.372	Badan Kepegawaian
			Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	98.022.000	Badan Kepegawaian
			Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	15.360.000	Badan Kepegawaian
			Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	53.470.000	Badan Kepegawaian
			Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	145.510.372	Badan Kepegawaian
			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	5.577.526.778	Biro Hukum
			Fasilitasi Bantuan Hukum		4.013.289.000	Biro Hukum
			Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	399.989.000	Biro Hukum
			Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	3.613.300.000	Biro Hukum
			Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan		688.783.200	Biro Hukum
			Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	233.543.000	Biro Hukum
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	3.000.000	Biro Hukum
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum		349.611.000	Biro Hukum



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun		
			Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	102.629.200	Biro Hukum
7	Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu (PP 3)	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	2.631.532.950	Dinas Kesehatan
			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		2.631.532.950	Dinas Kesehatan
			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	2.631.532.950	Dinas Kesehatan
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Persentase ibu hamil ANC (antenatal care) 6 kali sesuai standar	513.774.259.551	Dinas Kesehatan
				2. Persentase Wasting		
				3. Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi		
				4. Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana		
				5. Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin imunisasi rutin lengkap		
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		1.003.703.380	Dinas Kesehatan
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	112.244.000	Dinas Kesehatan
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	214.930.000	Dinas Kesehatan
			Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	676.529.380	Dinas Kesehatan



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		100.798.100.357	Dinas Kesehatan
			Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	50.000.000	Dinas Kesehatan
			Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1.678.989.782	Dinas Kesehatan
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	22.626.691.426	Dinas Kesehatan
			Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	5.466.102.160	Dinas Kesehatan
			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Disediakan dan Dipelihara	1.235.859.200	Dinas Kesehatan
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	31.245.982.893	Dinas Kesehatan
			Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	11.895.144.949	Dinas Kesehatan
			Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	1.395.601.566	Dinas Kesehatan



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	4.300.600.000	Dinas Kesehatan
			Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	1.400.000	Dinas Kesehatan
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	5.829.094.000	Dinas Kesehatan
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	15.072.634.381	Dinas Kesehatan
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		483.918.967.438	Dinas Kesehatan
			Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	55.329.000	Dinas Kesehatan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	346.158.000	Dinas Kesehatan
			Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	16.676.181.659	Dinas Kesehatan
			Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	516.691.000	Dinas Kesehatan



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	144.500.000	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	439.221.193.680	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	630.345.861	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	761.739.773	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5.384.565.248	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	27.475.000	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	813.465.811	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	145.467.600	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2.746.015.707	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis	625.628.178	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2.625.960.761	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4.184.613.225	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional,	161.307.400	Dinas Kesehatan



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	631.319.400	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	314.112.900	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4.175.405.291	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	971.799.000	Dinas Kesehatan
			Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	2.725.891.944	Dinas Kesehatan
			Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	33.801.000	Dinas Kesehatan
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		1.283.911.337	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Dinas Kesehatan
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		12.874.506.820	Dinas Kesehatan
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		4.040.544.260	Dinas Kesehatan
			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	4.040.544.260	Dinas Kesehatan
			Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		8.833.962.560	Dinas Kesehatan
			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	8.833.962.560	Dinas Kesehatan
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		47.450.000	Dinas Kesehatan



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)		47.450.000	Dinas Kesehatan
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan		Dinas Kesehatan
8	Penguatan Pendidikan, Sains dan Teknologi, serta Digitalisasi	Pendidikan Unggul dan Vokasi Berbasis Industri dan Potensi Lokal (PP 1)	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1. Indeks Pemerataan Guru	153.971.365.402	Dinas Pendidikan
				2. Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik		
			Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi		153.971.365.402	Dinas Pendidikan
			Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	150.405.569.134	Dinas Pendidikan
			Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	3.565.796.268	Dinas Pendidikan
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	1.534.621.601.330	Dinas Pendidikan
				2. Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)		
			Pengelolaan Pendidikan Khusus		48.411.272.104	Dinas Pendidikan
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	4.397.820.000	Dinas Pendidikan
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2.951.880.000	Dinas Pendidikan



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1.000.466.704	Dinas Pendidikan
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1.007.018.828	Dinas Pendidikan
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1.129.652.400	Dinas Pendidikan
			Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1.533.176.025	Dinas Pendidikan
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	21.884.250.000	Dinas Pendidikan
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	269.672.480	Dinas Pendidikan
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.007.976.667	Dinas Pendidikan
			Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	145.600.000	Dinas Pendidikan
			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	12.457.575.000	Dinas Pendidikan
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	626.184.000	Dinas Pendidikan
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		827.388.391.066	Dinas Pendidikan
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	72.398.636.000	Dinas Pendidikan
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	3.880.000.000	Dinas Pendidikan
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	999.999.963	Dinas Pendidikan



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1.664.000.000	Dinas Pendidikan
			Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10.290.730.805	Dinas Pendidikan
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	594.683.536.000	Dinas Pendidikan
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	47.974.208.298	Dinas Pendidikan
			Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	624.000.000	Dinas Pendidikan
			Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	55.120.000	Dinas Pendidikan
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	65.000.000.000	Dinas Pendidikan
			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	29.818.160.000	Dinas Pendidikan
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		658.821.938.160	Dinas Pendidikan
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	51.997.022.000	Dinas Pendidikan
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	749.999.799	Dinas Pendidikan
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	999.999.822	Dinas Pendidikan
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	32.983.910.000	Dinas Pendidikan
			Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	9.944.777.365	Dinas Pendidikan
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	498.735.980.000	Dinas Pendidikan
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	37.004.208.298	Dinas Pendidikan
			Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	1.011.528.000	Dinas Pendidikan



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	8.446.597.876	Dinas Pendidikan
			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	16.947.915.000	Dinas Pendidikan
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	833.462.500	Dinas Pendidikan
			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah		833.462.500	Dinas Pendidikan
			Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah yang tersusun	233.462.500	Dinas Pendidikan
			Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	600.000.000	Dinas Pendidikan
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	2.740.558.110	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		2.740.558.110	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan kepada pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	317.756.925	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	322.801.185	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyusunan Rencana dan Teknis Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	5.161.495.850	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi			Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah Rumah Negara yang Dikelola	326.064.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	4.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara	835.431.850	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	2.650.047.125	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional		2.650.047.125	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	146.300.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang memperoleh pembinaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	415.907.125	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	2.087.840.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	125.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi		125.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	125.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	61.886.522.566	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota			Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	153.600.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	59.154.546.441	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	415.907.125	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun	2.162.469.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1. Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	235.571.688.645	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				2. Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob		



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				3. Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas		
			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		125.403.698.439	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	750.226.320	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	3.162.101.920	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	7.080.888.676	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	22.148.474.770	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	55.289.353.083	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	985.945.930	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	1.322.212.640	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	3.300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	60.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	881.520.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	3.918.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	26.504.975.100	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		110.167.990.206	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara	618.320.890	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	15.919.490.442	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	1.056.917.922	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	515.490.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	25.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi yang Diperkuat Kapasitasnya	310.780.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	11.010.866.846	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk	3.037.461.920	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun		
			Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	21.002.097.559	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	29.606.722.102	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	2.089.842.525	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	4.935.063.920	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi		345.659.900	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi		3.675.606.220	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	514.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	324.038.900	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	2.837.067.320	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi		913.797.800	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	521.322.800	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	392.475.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	8.279.879.370	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi		8.279.879.370	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di Kawasan Strategis Provinsi yang dioptimalisasi	5.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	2.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	1.279.879.370	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	47.188.274.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional		47.188.274.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembangunan TPA/TPST/SPA	Kapasitas TPA/TPST/SPA yang dibangun	45.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	2.188.274.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan	1.558.296.896.042	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyelenggaraan Jalan Provinsi		1.558.296.896.042	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	5.915.116.045	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	1.305.782.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	58.928.108.077	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Berkala	38.975.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	94.554.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	12.690.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi	30.304.938.960	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	8.147.232.960	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Survey Kondisi Jalan/Jembatan		2.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi	3.527.285.900	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		1.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	700.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		795.749.900	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	595.749.900	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pemberian insentif dan/atau disinsentif nonfiskal	Jumlah Berita Acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang		580.336.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota	Tersedianya Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi Ranperda RTRW Kab/Kota sesuai dengan ketentuan waktu yaitu 15 hari		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi		951.200.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	551.200.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	5.353.258.800	Dinas Ketenagakerjaan
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi		615.840.000	Dinas Ketenagakerjaan
			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	334.280.000	Dinas Ketenagakerjaan
			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	250.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	31.560.000	Dinas Ketenagakerjaan
			Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)		4.679.260.000	Dinas Ketenagakerjaan
			Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Jumlah penetapan UMK	20.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
			Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)		365.180.000	Dinas Ketenagakerjaan
			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	4.294.080.000	Dinas Ketenagakerjaan
			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota		58.158.800	Dinas Ketenagakerjaan



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	28.670.000	Dinas Ketenagakerjaan
			Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	29.488.800	Dinas Ketenagakerjaan
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	572.251.480	Dinas Ketenagakerjaan
			Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah		100.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
			Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	100.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
			Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja		50.000.800	Dinas Ketenagakerjaan
			Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	50.000.800	Dinas Ketenagakerjaan
			Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi		326.769.750	Dinas Ketenagakerjaan
			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	442.785.302	Dinas Ketenagakerjaan
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	276.806.750	Dinas Ketenagakerjaan
			Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi		95.480.930	Dinas Ketenagakerjaan
			Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	95.480.930	Dinas Ketenagakerjaan
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	29.080.900	Dinas Ketenagakerjaan



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		29.080.900	Dinas Ketenagakerjaan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	29.080.900	Dinas Ketenagakerjaan
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	456.882.900	Dinas Ketenagakerjaan
			Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota		70.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
			Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	50.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
			Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	20.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
			Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi		49.848.000	Dinas Ketenagakerjaan
			Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA	49.848.000	Dinas Ketenagakerjaan
			Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		20.405.000	Dinas Ketenagakerjaan
			Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	20.405.000	Dinas Ketenagakerjaan
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		278.569.900	Dinas Ketenagakerjaan
			Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	200.000.000	Dinas Ketenagakerjaan



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	78.569.900	Dinas Ketenagakerjaan
			Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		38.060.000	Dinas Ketenagakerjaan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	38.060.000	Dinas Ketenagakerjaan
			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindung Hak-Hak Dasarnya	676.063.300	Dinas Ketenagakerjaan
			Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan		676.063.300	Dinas Ketenagakerjaan
			Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	223.287.800	Dinas Ketenagakerjaan
			Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	61.128.000	Dinas Ketenagakerjaan
			Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	63.580.000	Dinas Ketenagakerjaan
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	99.967.000	Dinas Ketenagakerjaan
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		99.967.000	Dinas Ketenagakerjaan
			Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang mampu menyusun RTK Makro	40.231.000	Dinas Ketenagakerjaan
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	59.736.000	Dinas Ketenagakerjaan
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	141.058.951.970	Dinas Kepemudaan



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						dan Keolahragaan
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		44.105.405.692	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
			Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia	43.113.606.242	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	991.799.450	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional		47.748.937.083	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
			Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	15.553.486.855	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
			Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	32.045.345.728	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
			Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	150.104.500	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		31.196.408.645	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
			Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	3.506.444.128	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
			Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	27.689.964.517	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga		18.008.200.550	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
			Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	1.830.973.096	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
			Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	14.525.692.454	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
			Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	1.651.535.000	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rasio Wirausaha Pemuda	7.650.000.000	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi		3.032.000.000	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
			Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	3.032.000.000	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
			Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi		4.618.000.000	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	350.000.000	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	1.118.000.000	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	600.000.000	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
			Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi	Jumlah pemuda di tingkat provinsi yang haknya terpenuhi	2.100.000.000	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
			Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	450.000.000	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	3.350.000.000	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		3.350.000.000	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
			Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	3.350.000.000	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1. Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	2,567,702,973	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
				2. Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan		
			Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi		268.417.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	268.417.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi		2.187.032.035	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	1.681.013.785	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	113.727.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	392.291.250	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	29,620,528,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		29,620,528,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	27.747.579.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1.952.421.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	3,247,716,526	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pengelolaan Museum Provinsi		3.248.255.526	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	605.843.400	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	599.651.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1.250.880.600	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia		Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	648.604.526	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	995.762.900	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		995.762.900	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual	409.586.450	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah lembaga/asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	86.176.450	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	200.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	200.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	100.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	2.455.402.571	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi		1.207.758.900	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1.000.700.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	92.284.450	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	615.949.971	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		615.949.971	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	615.949.971	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		631.693.700	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi	172.339.450	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Lembaga dan Pranata Kebudayaan yang Dibina	61.728.900	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	114.484.900	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Aktivitas/Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan	213.924.450	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota	Jumlah PPKD Provinsi yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan	69.216.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		3.559.466.800	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		3.559.466.800	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3.466.594.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	92.872.800	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	802.598.700	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan		717.557.250	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	512.194.350	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	205.362.900	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		85.041.450	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	5.977.129.896	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	5.977.129.896	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		576.912.900	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	425.292.900	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Usaha Pariwisata yang telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan	151.620.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi		806.300.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	306.300.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi yang sah dan legal ditetapkan Kepala Daerah	500.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		2.141.686.996	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	145.658.900	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Ditetapkan	306.300.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	694.489.196	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	195.238.900	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	800.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		2.452.230.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	2.452.230.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	42.586.730.382	BPSDM
				2.Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan		
				3.Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi		
				4. Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis		



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pengembangan Kompetensi Teknis		1.313.766.648	BPSDM
			Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	668.048.232	BPSDM
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	668.048.232	BPSDM
			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		1.441.405.311	BPSDM
			Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	132.624.000	BPSDM
			Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	726.482.916	BPSDM
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	511.006.182	BPSDM
			Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	71.292.213	BPSDM
			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN	1. Jumlah Volume Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	430.401.200	Dinas Perindustrian,



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				2. Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota		Perdagangan dan ESDM
			Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		206.017.200	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	120.092.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	60.018.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	25.907.200	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		224.384.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	154.514.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	69.870.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	1. Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT	3.027.404.283	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
				2. Porsi EBT dalam Bauran Energi		
			Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi		2.977.404.283	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	2.707.953.203	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah	Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah	142.571.080	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah rencana kegiatan pemanfaatan aneka EBT	126.880.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi		50.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	50.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi	3.670.277.500	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi		563.568.500	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi		Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		3.106.709.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	1. Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah	711.291.100	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
				2. Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR		
			Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat		241.960.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat		Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		354.711.100	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	73.740.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	280.971.100	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan		14.908.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah		Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		99.712.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah		Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	300.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		300.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas		Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Barang	1.450.512.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi		1.450.512.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	1.203.430.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	247.082.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	700.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi		700.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.		Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat		Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	100.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		100.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah laporan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer		Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	100.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas		100.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi		Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	11.000.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		11.000.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	425.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	8.075.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2.500.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	49.487.750	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)		49.487.750	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal		Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	778.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya		80.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida		Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		698.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	618.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	80.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	1.936.380.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		178.390.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah		Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		400.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pemantauan Mutu Produk	Jumlah produk potensial yang dipantau	40.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	160.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	160.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan	40.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		1.357.990.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	49.992.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	1.307.998.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
		Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat (PP 11)	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Indeks Kematangan Organisasi	2.225.115.280	Biro Organisasi
			Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan		380.186.042	Biro Organisasi
			Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	80.140.000	Biro Organisasi
			Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	160.000.000	Biro Organisasi
			Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	140.046.042	Biro Organisasi
			Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja		809.256.000	Biro Organisasi
			Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	112.042.000	Biro Organisasi
			Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	230.866.000	Biro Organisasi
			Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	169.915.000	Biro Organisasi
			Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	148.355.000	Biro Organisasi
			Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	148.078.000	Biro Organisasi
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks SPBE	18.490.001.127	Dinas Komunikasi dan Informatika



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi		18.490.001.127	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	9.012.800.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	50.221.127	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	411.622.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	240.058.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	7.327.600.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	1.432.500.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	15.200.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	17.275.453.485	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		17.275.453.485	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	2.902.821.985	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	6.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	1.141.100.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	537.500.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	11.172.882.500	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	9.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	750.640.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	755.509.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	7.731.115.662	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi		33.500.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.		Dinas Komunikasi dan Informatika
			Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi		7.697.615.662	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	7.109.265.662	Dinas Komunikasi dan Informatika



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian.	188.600.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	309.750.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	90.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	1.828.470.040	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi		1.828.470.040	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	247.640.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	289.890.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	736.020.040	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	307.280.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Peningkatan kualitas statistik sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	247.640.000	Dinas Komunikasi dan Informatika



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1. Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1.248.367.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				2. Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa		
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		1.248.367.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	509.957.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	284.593.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1. Persentase Fasilitas Pemberdayaa n Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	10.334.144.307	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				2. Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat		
			Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota		10.334.144.307	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	54.522.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	153.836.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	6.742.434.307	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	3.383.352.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat		-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1. Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	43.102.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				2. Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan		
				3. Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan		
				4. Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan		
			Pelayanan Pencatatan Sipil		-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi		43.102.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	43.102.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	39.552.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				2. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak		
			Pelayanan Pendaftaran Kependudukan		-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan		39.552.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait Pendaftaran Penduduk	39.552.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	57.041.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		50.102.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	396.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	49.706.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		6.939.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	6.939.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	12.118.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Penyediaan Profil Kependudukan		12.118.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia	4.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun	7.618.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Fasilitas Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi		-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9	Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara serta Pemeliharaan	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib (PP 17)	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	249.155.000	Satpol PP



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Hubungan Internasional yang Kondusif			2.Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		
			Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran		249.155.000	Satpol PP
			Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)		Satpol PP
			Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	249.155.000	Satpol PP
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait		Satpol PP
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	5.283.674.682,	Satpol PP
				2.Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas		
				3.Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat		
				4.Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya		
			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi		192.188.000	Satpol PP
			Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	192.188.000	Satpol PP
			Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		3.869.739.000	Satpol PP



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi		Satpol PP
			Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat	Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	316.849.000	Satpol PP
			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	2.702.910.000	Satpol PP
			Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	849.980.000	Satpol PP
			Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur		1.221.747.682,	Satpol PP
			Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	622.894.000	Satpol PP
			Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	462.642.000	Satpol PP
			Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah	136.211.682	Satpol PP
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	5.402.912.850	Bakesbangpol



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		5.402.912.850	Bakesbangpol
			Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4.925.000	Bakesbangpol
			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	47.987.850	Bakesbangpol
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	5.350.000.000	Bakesbangpol
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kemkunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	1.732.398.250	Bakesbangpol
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		1.732.398.250,0	Bakesbangpol
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	769.392.250	Bakesbangpol
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi	263.006.000	Bakesbangpol



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	700.000.000	Bakesbangpol
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.277.897.455	Bakesbangpol
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		2.326.393.711	Bakesbangpol
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	303.267.650	Bakesbangpol
			Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	1.741.759.923	Bakesbangpol
			Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	82.869.882,00	Bakesbangpol
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	150.000.000	Bakesbangpol
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	7.936.892.300	Bakesbangpol
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		7.936.892.300	Bakesbangpol



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	58.204.000	Bakesbangpol
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	186.859.000	Bakesbangpol
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	117.423.000	Bakesbangpol
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	469.365.300	Bakesbangpol
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	7.000.000.000	Bakesbangpol



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	105.041.000	Bakesbangpol
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	35.889.762.000	Bakesbangpol
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		35.889.762.000	Bakesbangpol
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	35.256.793.000	Bakesbangpol
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	62.011.000	Bakesbangpol



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	570.958.000	Bakesbangpol
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi 2.Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya 3.Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan kompetensinya 4.Persentase Pegawai dengan SKP bernilai Baik	2.419.548.452	Badan Kepegawaian
			Mutasi dan Promosi ASN		871.180.000	Badan Kepegawaian
			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	34.980.000	Badan Kepegawaian
			Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	22.300.000	Badan Kepegawaian
			Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	813.900.000	Badan Kepegawaian
			Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		387.390.080	Badan Kepegawaian
			Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	299.290.000	Badan Kepegawaian
			Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	10.000.000	Badan Kepegawaian
			Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	54.100.000	Badan Kepegawaian
			Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	24.000.080	Badan Kepegawaian
			Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian		Badan Kepegawaian



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pengembangan Kompetensi ASN		848.616.000	Badan Kepegawaian
			Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	27.500.000	Badan Kepegawaian
			Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	33.900.000	Badan Kepegawaian
			Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	84.956.000	Badan Kepegawaian
			Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center		Badan Kepegawaian
			Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	611.800.000	Badan Kepegawaian
			Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	40.060.000	Badan Kepegawaian
			Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	24.000.000	Badan Kepegawaian
			Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	26.400.000	Badan Kepegawaian
			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		312.362.372	Badan Kepegawaian
			Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	98.022.000	Badan Kepegawaian
			Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	15.360.000	Badan Kepegawaian
			Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	53.470.000	Badan Kepegawaian
			Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	145.510.372	Badan Kepegawaian
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1. Efektivitas Kerja Sama Daerah	3.325.207.160	Biro Pemerintahan dan Otda
				2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan		



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Fasilitasi Kerja Sama Daerah		850.000.000	Biro Pemerintahan dan Otda
			Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	100.000.000	Biro Pemerintahan dan Otda
			Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	650.000.000	Biro Pemerintahan dan Otda
			Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	100.000.000	Biro Pemerintahan dan Otda
			Pelaksanaan Otonomi Daerah		840.000.000	Biro Pemerintahan dan Otda
			Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	190.000.000	Biro Pemerintahan dan Otda
			Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	550.000.000	Biro Pemerintahan dan Otda
			Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	100.000.000	Biro Pemerintahan dan Otda
			Pelaksanaan Tugas Pemerintahan		389.948.000	Biro Pemerintahan dan Otda
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	75.252.000	Biro Pemerintahan dan Otda
			Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	314.696.000	Biro Pemerintahan dan Otda
			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	4.702.072.200	Biro Hukum
			Fasilitasi Bantuan Hukum		4.013.289.000	Biro Hukum
			Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	4.013.289.000	Biro Hukum
			Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	399.989.000	Biro Hukum



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan		688.783.200	Biro Hukum
			Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	233.543.000	Biro Hukum
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	3.000.000	Biro Hukum
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	349.611.000	Biro Hukum
			Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasinya	102.629.200	Biro Hukum
10	Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas Dalam Berkarya dan Berprestasi (PP 2)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	139.877.614	Dinas PP, PA dan KB
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		117.509.823	Dinas PP, PA dan KB
			Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota		Dinas PP, PA dan KB
			Pembinaan Ketahanan Keluarga Rentan melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Ketahanan Keluarga Rentan melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	62.509.873	Dinas PP, PA dan KB
			Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Mitra dan Organisasi Masyarakat yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	54.999.950	Dinas PP, PA dan KB



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		164.521.750	Dinas PP, PA dan KB
			Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota		Dinas PP, PA dan KB
			Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	46.626.700	Dinas PP, PA dan KB
			Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	32.895.700	Dinas PP, PA dan KB
			Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Jumlah kelompok Genre yang mendapat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	84.999.350	Dinas PP, PA dan KB
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) 2. Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	233.107.434	Dinas PP, PA dan KB
			Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal		218.859.888	Dinas PP, PA dan KB
			Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	199.999.992	Dinas PP, PA dan KB
			Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	18.859.896	Dinas PP, PA dan KB
			Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal		Dinas PP, PA dan KB
			Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk	Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media		Dinas PP, PA dan KB



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal		
			Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan			Dinas PP, PA dan KB
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	463.225.414	Dinas PP, PA dan KB
			Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi		42.039.800	Dinas PP, PA dan KB
			Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	42.039.800	Dinas PP, PA dan KB
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi		390.999.600	Dinas PP, PA dan KB
			Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	275.115.000	Dinas PP, PA dan KB
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	26.233.850	Dinas PP, PA dan KB
			Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang mendapatkan bimtek	89.650.750	Dinas PP, PA dan KB
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	511.128.396	Dinas PP, PA dan KB
				2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan		
			Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi		72.446.000	Dinas PP, PA dan KB
			Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	23.032.000	Dinas PP, PA dan KB



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan	49.414.000	Dinas PP, PA dan KB
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi		35.428.000	Dinas PP, PA dan KB
			Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	35.428.000	Dinas PP, PA dan KB
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi		450.509.286	Dinas PP, PA dan KB
			Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	450.509.286	Dinas PP, PA dan KB
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	39.841.972	Dinas PP, PA dan KB
			Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi		34.808.000	Dinas PP, PA dan KB
			Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	34.808.000	Dinas PP, PA dan KB
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	241.395.075	Dinas PP, PA dan KB
				2. Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)		
			Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		314.401.000	Dinas PP, PA dan KB
			Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan,	123.341.000	Dinas PP, PA dan KB



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain		
			Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain	Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain	56.060.000	Dinas PP, PA dan KB
			Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	135.000.000	Dinas PP, PA dan KB
			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi		65.000.000	Dinas PP, PA dan KB
			Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil program Bangga Kencana tingkat provinsi, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga		Dinas PP, PA dan KB
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	1.123.219.088	Dinas PP, PA dan KB
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi		1.042.128.000	Dinas PP, PA dan KB
			Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan provinsi	1.042.128.000	Dinas PP, PA dan KB
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1. Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layan Komprehensif 2. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	370.253.186	Dinas PP, PA dan KB
			Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		50.625.400	Dinas PP, PA dan KB
			Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi		Dinas PP, PA dan KB



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				pencegahan KtA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota		
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		339.908.231	Dinas PP, PA dan KB
			penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	291.363.231	Dinas PP, PA dan KB
			Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	48.545.000	Dinas PP, PA dan KB
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi		153.139.842	Dinas PP, PA dan KB
			Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	112.413.768	Dinas PP, PA dan KB
			layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	40.726.074	Dinas PP, PA dan KB
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	846.661.826	Dinas PP, PA dan KB
			Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		50.845.000	Dinas PP, PA dan KB
			Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	50.845.000	Dinas PP, PA dan KB



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		90.470.014	Dinas PP, PA dan KB
			penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	69.997.514	Dinas PP, PA dan KB
			Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	20.472.500	Dinas PP, PA dan KB
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		608.776.768	608.776.768
			Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	328.035.553	Dinas PP, PA dan KB
			Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	117.607.800	Dinas PP, PA dan KB
			layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	163.133.415	Dinas PP, PA dan KB
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1. Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial 2. Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	183.013.840	Dinas Sosial



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				3. Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/ atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar		
				4.Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial		
				5.Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial		
			Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi		173.733.840	Dinas Sosial
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	121.933.840	Dinas Sosial
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	51.800.000	Dinas Sosial
			Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		9.280.000	Dinas Sosial
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	9.280.000	Dinas Sosial
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1. Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	1.248.376.849	Dinas Sosial
				2. Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya		
				3. Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan		
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi		1.248.376.849	Dinas Sosial



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	-	Dinas Sosial
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	-	Dinas Sosial
			Penyediaan Permakanan	Penyediaan Permakanan	524.177.640	Dinas Sosial
			Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	723.695.500	Dinas Sosial
			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	503.709	Dinas Sosial
			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	1. Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan	192.254.830	Dinas Sosial
				2. Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani		
			Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal		192.254.830	Dinas Sosial
			Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	192.254.830	Dinas Sosial
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	147.945.493	488.227.694
			Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		147.945.493	230.182.663
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	147.945.493	Dinas Sosial
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	I. Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	10.842.191.963,71	Dinas Sosial



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				2. Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi		
				3. Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelotaan dan Pendataan Data Fakir Miskin		
				4. Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar		
				5. Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi		
				6. Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan		
			Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal		33.872.388	Dinas Sosial
			Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	33.872.388	Dinas Sosial
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi		10.808.319.575,71	Dinas Sosial
			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	5.421.879.669,50	Dinas Sosial
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	5.353.102.906,21	Dinas Sosial
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin	33.337.000	Dinas Sosial
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	30.721.856.104	Dinas Sosial
				2. Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		
				3. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		
				4. Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				5. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		
				6. Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas		
				7. Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia		
				8. Indeks Peranan Sosial		
			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti		3.433.753.036	Dinas Sosial
			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	6.000.000	Dinas Sosial
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	1.204.330	Dinas Sosial
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	674.518.980	Dinas Sosial
			Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	406.244.128	Dinas Sosial
			Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	20.000.000	Dinas Sosial
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	5.815.613	Dinas Sosial
			Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	877.873.622	Dinas Sosial
			Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	43.400.000	Dinas Sosial



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti		5.842.786.421,50	Dinas Sosial
			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	3.633.840	Dinas Sosial
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	404.400.500	Dinas Sosial
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	5.000.000	Dinas Sosial
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	201.600.000	Dinas Sosial
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	-	Dinas Sosial
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	-	Dinas Sosial
			Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	157.718.980	Dinas Sosial
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	9.966.697	Dinas Sosial
			Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	1.045.676.446	Dinas Sosial
			Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	30.000.000	Dinas Sosial
			Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		3.856.262.103	Dinas Sosial



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	275.114.200	Dinas Sosial
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	674.518.980	Dinas Sosial
			Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	406.244.128	Dinas Sosial
			Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	20.000.000	Dinas Sosial
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	5.815.613	Dinas Sosial
			Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	1.518.495.554	Dinas Sosial
			Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	34.500.000	Dinas Sosial
			Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		5.826.298.137	Dinas Sosial
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	3.850.000	Dinas Sosial
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	674.518.980	Dinas Sosial
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	-	Dinas Sosial
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	-	Dinas Sosial
			Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	37.500.000	Dinas Sosial



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	9.979.344	Dinas Sosial
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	9.966.697	Dinas Sosial
			Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	1.045.676.446	Dinas Sosial
			Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	97.075.788	Dinas Sosial
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti		30.721.856.104	Dinas Sosial
			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	15.633.840	Dinas Sosial
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	142.416.000	Dinas Sosial
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	94.059.300	Dinas Sosial
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	375.911.000	Dinas Sosial
			Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	4.205.696	Dinas Sosial
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	86.851.472	Dinas Sosial
			Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	1.123.595.828	Dinas Sosial



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	57.000.000	Dinas Sosial
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	5.353.258.800	Dinas Ketenagakerjaan
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi		615.840.000	Dinas Ketenagakerjaan
			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	334.280.000	Dinas Ketenagakerjaan
			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	250.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	31.560.000	Dinas Ketenagakerjaan
			Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)		4.679.260.000	Dinas Ketenagakerjaan
			Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Jumlah penetapan UMK	20.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
			Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	365.180.000	Dinas Ketenagakerjaan
			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	4.294.080.000	Dinas Ketenagakerjaan
			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk		58.158.800	Dinas Ketenagakerjaan



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota			
			Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	28.670.000	Dinas Ketenagakerjaan
			Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	29.488.800	Dinas Ketenagakerjaan
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	572.251.480	Dinas Ketenagakerjaan
			Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah		100.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
			Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	100.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
			Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja		50.000.800	399.999.569
			Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	50.000.800	Dinas Ketenagakerjaan
			Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi		326.769.750	4.574.694.221
			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	442.785.302	Dinas Ketenagakerjaan
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	276.806.750	Dinas Ketenagakerjaan
			Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi		95.480.930	102.679.000
			Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	95.480.930	Dinas Ketenagakerjaan
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	29.080.900	Dinas Ketenagakerjaan
			Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		29.080.900	Dinas Ketenagakerjaan



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	29.080.900	Dinas Ketenagakerjaan
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	456.882.900,	Dinas Ketenagakerjaan
			Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota		199.805.500	Dinas Ketenagakerjaan
			Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	70.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
			Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	20.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
			Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi		49.848.000	Dinas Ketenagakerjaan
			Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA	49.848.000	Dinas Ketenagakerjaan
			Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		20.405.000	20.405.000
			Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	20.405.000	Dinas Ketenagakerjaan
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		278.569.900	Dinas Ketenagakerjaan
			Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	200.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
			Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	78.569.900	Dinas Ketenagakerjaan



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		38.060.000	Dinas Ketenagakerjaan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	38.060.000,	Dinas Ketenagakerjaan
			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindung Hak-Hak Dasarnya	676.063.300	Dinas Ketenagakerjaan
			Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan		676.063.300	Dinas Ketenagakerjaan
			Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	223.287.800	Dinas Ketenagakerjaan
			Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	61.128.000	Dinas Ketenagakerjaan
			Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	63.580.000,	Dinas Ketenagakerjaan
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	99.967.000	Dinas Ketenagakerjaan
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		99.967.000	Dinas Ketenagakerjaan
			Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro	40.231.000	Dinas Ketenagakerjaan
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	59.736.000	Dinas Ketenagakerjaan
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	141.058.951.970	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		44.105.405.692	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
			Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia	43.113.606.242	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	991.799.450	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional		47.748.937.083	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
			Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	15.553.486.855	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
			Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	32.045.345.728	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
			Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	150.104.500	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		31.196.408.645	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
			Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	3.506.444.128	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
			Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	27.689.964.517	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga		18.008.200.550	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
			Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	1.830.973.096	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
			Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	14.525.692.454	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
			Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	1.651.535.000	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rasio Wirausaha Pemuda	7.650.000.000	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi		3.032.000.000	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
			Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	3.032.000.000	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
			Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi		4.618.000.000	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	350.000.000	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	1.118.000.000	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	600.000.000	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
			Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi	Jumlah pemuda di tingkat provinsi yang haknya terpenuhi	2.100.000.000	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
			Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	450.000.000	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	3.350.000.000	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		3.350.000.000	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
			Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	3.350.000.000	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	1.393.453.600	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	1.393.453.600	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	1.049.066.600	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	192.966.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	151.421.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1. Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	15.855.535.020	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				2. Pertumbuhan Wirausaha		
			Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		15.855.535.020	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	512.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	15.147.393.020	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	196.142.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Diberikan dukungan fasilitas pelatihan	414.040.000	414.040.000
			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		414.040.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	414.040.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	199.884.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		199.884.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	199.884.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	5.000.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		1.787.950.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	208.312.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1.579.638.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1. Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	2,567,702,973	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
				2. Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan		
			Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi		268.417.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	268.417.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi		2.187.032.035	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	1.681.013.785	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	113.727.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	392.291.250	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	29.700.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		29.700.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	27.747.579.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1.952.421.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	3.248.255.526	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pengelolaan Museum Provinsi		3.248.255.526	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	605.843.400	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	599.651.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1.250.880.600	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	143.276.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	648.604.526	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	995.762.900	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		995.762.900	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual	86.176.450	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah lembaga/asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	200.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	200.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	100.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	100.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	2.455.402.571	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi		1.207.758.900	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1.000.700.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	92.284.450	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	114.774.450	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		615.949.971	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	615.949.971	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		631.693.700	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi	172.339.450	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Lembaga dan Pranata Kebudayaan yang Dibina	61.728.900	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	114.484.900	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Aktivitas/Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan	213.924.450	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota yang Tersedia	69.216.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		3.559.466.800	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		3.559.466.800	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3.466.594.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	92.872.800	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	801,670,700	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan		717.557.250	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	717.557.250	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	512.194.350	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		85.041.450	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	85.041.450	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	5.977.129.896	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		576.912.900	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	425.292.900	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Usaha Pariwisata yang telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan	151.620.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi		806.300.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	306.300.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi yang sah dan legal ditetapkan Kepala Daerah	500.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		2.141.686.996	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	145.658.900	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Ditetapkan	306.300.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	694.489.196	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	195.238.900	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	800.000.000	Dinas Kebudayaan,



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		2.452.230.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	2.452.230.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
11	Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana (PP 14)	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Indeks Keanekaragaman Hayati	829.530.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi		680.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	630.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan	50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi		149.530.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	149.530.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	224.999.750	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pembinaan dan Pengawasan Izin		224.999.750	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			
			Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	154.999.750	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	70.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PROGRAM PENANGANAN	Persentase penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana Lingkungan hidup	139.999.650	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Penyelesaian Pengaduan		139.999.650	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi			
			Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	29.999.900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola ditindaklanjuti/ditangani	109.999.750	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1. Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH)	5.611.750.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
				2. Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)		
			Pelaksanaan Penyuluhan		5.611.750.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	3.146.715.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2.465.035.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pelaksanaan Pengelolaan DAS		150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
			Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	70.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	10.676.636.629	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pelaksanaan Pengolahan Hasil		65.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun			
			Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	65.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		3.510.244.000	Dinas Lingkungan



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Hidup dan Kehutanan
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli / Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	2.017.872.525	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	202.371.475	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	735.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (illegal logging dan TSL)	555.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		4.806.727.650	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pembangunan Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	865.030.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	280.126.250	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	2.897.266.400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pembangunan Sumur resapan	Jumlah Sumur Resapan yang terbangun	96.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)		Dinas Lingkungan



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Hidup dan Kehutanan
			Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		280.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pelayanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani	Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)	50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	65.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	55.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	60.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		1.349.999.979	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH	Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH	599.999.979	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	600.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Perbenihan Tanaman Hutan		370.665.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan	Jumlah penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko (perorangan dan badan usaha non Perhutani) kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, pengadaan dan pengedaran bibit, serta pengadaan dan pengedaran benih dan bibit dalam provinsi	180.665.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pengelolaan Sumber Benih	Luas sumber benih yang dikelola	190.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Rencana Pengelolaan Kesatuan		294.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)			
			Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	294.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase RTH	200.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
			Pengelolaan Keanekaragaman		200.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Hayati Provinsi			
			Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola lingkup Kewenangan Provinsi	200.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	12.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PROGRAM PENGELOLAAN	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	2.499.999.420	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PERSAMPAHAN			
			Penanganan Sampah di TPA/TPST		2.499.999.420	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Regional			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	300.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional	399.999.990	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia	1.499.999.330	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan	300.000.100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	649.999.800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			
			Pengumpulan Limbah B3 Lintas		649.999.800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
			Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi yang terintegrasi dengan Persetujuan	Jumlah fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis Pengumpulan Limbah B3 skala Provinsi yang terintegrasi dengan persetujuan	250.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha	Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	399.999.800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PROGRAM PENGENDALIAN	1. Indeks Kualitas Air	2.859.997.807	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2. Indeks Kualitas Udara		
			Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		75.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar lintas kabupaten/kota	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak lintas kabupaten/kota	75.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		2.784.997.807	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	629.998.666	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	65.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	194.999.850	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	149.999.750	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	199.999.800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	319.999.914	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1.199.999.827	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi yang dilakukan pemeliharaan	25.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	272.783.450	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi		272.783.450	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	272.783.450	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	67.716.250	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Penyelenggaraan Pendidikan,		67.716.250	



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah pembinaan dan pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	11.999.800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	55.716.450	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PROGRAM Perencanaan	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	699.999.462	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			LINGKUNGAN HIDUP			
			Penyelenggaraan Kajian		99.999.700	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi			
			Pembinaan, Penilaian, Evaluasi Terhadap KLHS Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota	99.999.700	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Rencana Perlindungan dan		599.999.762	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi			
			Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH	Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG,RPPKarst yang ditetapkan	499.999.762	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	2.766.262.281	BPBD
				2.Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana		
				3,Persentase Penanganan Pasca Bencana		



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi		139.790.730	BPBD
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota	139.790.730	BPBD
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		462.235.600	BPBD
			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara dan aparaturnya di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat dalam latihan kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	150.000.000	BPBD
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkatkan kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	161.511.600	BPBD
			Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah akar masalah risiko bencana lintas Kabupaten/Kota yang tertangani	34.168.000	BPBD
			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	116.556.000	BPBD
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		1.777.565.821	BPBD
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	988.399.966	BPBD
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	536.285.055	BPBD



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	252.880.800	BPBD
			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		386.670.130	BPBD
			Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	81.794.310	BPBD
			Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	153.434.000	BPBD
			Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	23.385.200	BPBD
			Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen yang dilegalkan	128.056.620	BPBD
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	2.740.558.110	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		2.740.558.110	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan kepada pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	317.756.925	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	322.801.185	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Penyusunan Rencana dan Teknis Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	5.161.495.850	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		5.161.495.850	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah Rumah Negara yang Dikelola	326.064.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	4.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara	835.431.850	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	2.650.047.125	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional		2.650.047.125	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	146.300.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang memperoleh pembinaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	415.907.125	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	2.087.840.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi		1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	125.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	61.886.522.566	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		61.886.522.566	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	153.600.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	59.154.546.441	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	415.907.125	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun	2.162.469.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1. Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	235.571.688.645	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				2. Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob		
				3. Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas		
			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		125.403.698.439	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	750.226.320	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	3.162.101.920	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	7.080.888.676	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	22.148.474.770	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	55.289.353.083	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	985.945.930	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	1.322.212.640	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	3.300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	60.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan	881.520.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun		
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	3.918.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	26.504.975.100	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		110.167.990.206	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara	618.320.890	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	15.919.490.442	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	1.056.917.922	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	515.490.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	25.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi yang Diperkuat Kapasitasnya	310.780.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	11.010.866.846	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	3.037.461.920	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	25.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	29.606.722.102	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	2.089.842.525	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	3,190,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi		345.659.900	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	345.659.900	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi		3.675.606.220	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	514.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	324.038.900	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	2.837.067.320	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi		913.797.800	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	521.322.800	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	392.475.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	8.279.879.370	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi		8.279.879.370	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di Kawasan Strategis Provinsi yang dioptimalisasi	5.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	2.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	1.279.879.370	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	47.188.274.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional		47.188.274.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembangunan TPA/TPST/SPA	Kapasitas TPA/TPST/SPA yang dibangun	45.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	2.188.274.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	1.558.296.896.042	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan	1.162.016.350.505	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyelenggaraan Jalan Provinsi		1.558.296.896.042	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	5.915.116.045	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	1.305.782.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	58.928.108.077	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Berkala	38.975.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	94.554.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	12.690.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi	30.304.938.960	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	8.147.232.960	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	2.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi	3.527.285.900	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		1.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	700.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		795.749.900	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	595.749.900	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pemberian insentif dan/atau disinsentif nonfiskal	Jumlah Berita Acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang		580.336.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota	Tersedianya Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi Ranperda RTRW Kab/Kota sesuai dengan ketentuan waktu yaitu 15 hari	580.336.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi		951.200.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	551.200.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	1. Jumlah Volume Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota 2. Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	430.401.200	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		206.017.200	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	120.092.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	60.018.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	25.907.200	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		224.384.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	154.514.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	69.870.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	1. Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT	3.027.404.283	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
				2. Porsi EBT dalam Bauran Energi		
			Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi		2.977.404.283	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	2.707.953.203	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah	Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah	142.571.080	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah rencana kegiatan pemanfaatan aneka EBT	126.880.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi		50.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	50.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi	3.670.277.500	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi		563.568.500	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	563.568.500	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		3.106.709.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	3.106.709.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	1. Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah	711.291.100	Dinas Perindustrian,



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				2. Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR		Perdagangan dan ESDM
			Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat		241.960.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	241.960.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		354.711.100	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	73.740.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	280.971.100	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan		14.908.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah	14.908.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		99.712.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah	99.712.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	300.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		300.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	300.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Barang	1.450.512.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi		1.450.512.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	1.203.430.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	247.082.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	700.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi		700.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.	350.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	350.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	100.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		100.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah laporan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer	100.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	100.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas		100.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	100.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	11.000.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		11.000.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	425.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	8.075.000.000	Dinas Perindustrian,



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Perdagangan dan ESDM
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2.500.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	49.487.750	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)		49.487.750	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	49.487.750	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	778.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya		80.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	80.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		698.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	618.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	80.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	1.936.380.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		178.390.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	178.390.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		400.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pemantauan Mutu Produk	Jumlah produk potensial yang dipantau	40.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pengembangan Layanan Kalibrasi	Pengembangan Layanan Kalibrasi	160.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	160.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan	40.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		1.357.990.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	49.992.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	1.307.998.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	20.738.792.280	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		60.800.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	60.800.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		20.677.992.280	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar	976.700.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dimukimkan Kembali	918.572.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan	955.076.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	4.166.581.480	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	13.661.062.800	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah	146.476.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hambarannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		146.476.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	146.476.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	200.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				2. Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni		
			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		200.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	200.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	1.854.680.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman		1.854.680.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	1.854.680.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan melalui Mediasi	172.852.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		172.852.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Konektivitas Laut	97.180.000	Dinas Perhubungan
			Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		-	Dinas Perhubungan



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	Dinas Perhubungan
			Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional		97.180.000	Dinas Perhubungan
			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan	97.180.000	Dinas Perhubungan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	97.180.000	Dinas Perhubungan
			Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		-	Dinas Perhubungan
			Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	-	Dinas Perhubungan
			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani	160.240.000	Dinas Perhubungan
			Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian		160.240.000	Dinas Perhubungan



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	88.240.000	Dinas Perhubungan
			Penyediaan Peralatan Keselamatan Perlindungan Sebidang di Jalan Provinsi	Jumlah Peralatan Keselamatan Perlindungan Sebidang di Jalan Provinsi	-	Dinas Perhubungan
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1. Konektivitas Darat	56.674.785.963	Dinas Perhubungan
				2. Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal		
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi		274.895.000	Dinas Perhubungan
			Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	91.095.000	Dinas Perhubungan
			Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	183.800.000	Dinas Perhubungan
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		3.215.913.000	Dinas Perhubungan
			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	3.215.913.000	Dinas Perhubungan
			Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		47.844.588.467	Dinas Perhubungan
			Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	47.844.588.467	Dinas Perhubungan
			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B		271.864.496	Dinas Perhubungan
			Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi	49.473.624	Dinas Perhubungan



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	104.625.000	Dinas Perhubungan
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		5.067.525.000	Dinas Perhubungan
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	438.800.000	Dinas Perhubungan
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		-	Dinas Perhubungan
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	-	Dinas Perhubungan
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	-	Dinas Perhubungan
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	-	Dinas Perhubungan
12	Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal (PP 6)	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	2.500.360.250	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi		2.300.066.250	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	299.987.750	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.000.078.500	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi		200.294.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan		Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	2.050.000.729	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		2.050.000.729	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	300.002.091	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	449.999.700	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	699.999.042	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	599.999.896	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1. Persentase Penanganan Bencana Pertanian	12.033.659.690	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
				2. Persentase Penanganan Dampak Perubahan iklim Terhadap Pertanian		
			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		12.033.659.690	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	299.999.792	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	2.183.760.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	699.900.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	8.849.999.898	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan	9.550.790.850	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi		1.100.094.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	100.002.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1.000.092.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		6.850.746.600	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	125.460.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	250.120.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	1.000.054.600	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	2.000.057.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	2.000.002.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi	100.053.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins	1.375.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi		1.599.950.250	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	100.000.250	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1.499.950.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	40.452.291.010	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
				2. Peningkatan Produksi Hortikultura		
				3. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan		
			Penataan Prasarana Pertanian		40.452.291.010	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	3.999.997.708	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	7.999.980.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	18.387.060.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	199.992.489	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	3.135.932.813	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	5.739.620.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	989.708.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	71.275.991.607	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		70.775.994.607	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	29.134.383.270	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	34.501.624.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	960.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	2.599.997.746	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak	1.349.999.627	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	1.979.999.204	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk Setek yang diperbanyak	249.990.760	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		499.997.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	499.997.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1. Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan 2. Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	14.675.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		3.000.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	2.000.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	1.000.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian		7.475.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	1.000.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	6.475.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		4.200.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	2.000.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	2.200.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
13	Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau dengan Sanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal (PP 12)	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	20.738.792.280	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		60.800.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	60.800.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		20.677.992.280	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar	976.700.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dimukimkan Kembali	918.572.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan	955.076.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	4.166.581.480	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	13.661.062.800	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah	146.476.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hambarannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		146.476.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	146.476.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni 2. Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	200.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		200.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	200.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	1.854.680.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman		1.854.680.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	1.854.680.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan melalui Mediasi	172.852.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		172.852.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	172.852.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	2.740.558.110	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		2.740.558.110	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan kepada pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	317.756.925	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	322.801.185	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyusunan Rencana dan Teknis Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan	Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di	2.100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	5.161.495.850	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		5.161.495.850	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah Rumah Negara yang Dikelola	326.064.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	4.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara	4.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	2.650.047.125	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional		2.650.047.125	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	146.300.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang memperoleh pembinaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	415.907.125	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	125.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	125.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi		125.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	125.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	61.886.522.566	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		61.886.522.566	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	153.600.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	59.154.546.441	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	415.907.125	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun	415.907.125	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1. Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	235.571.688.645	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				2. Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob		



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				3. Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas		
			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		125.403.698.439	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	750.226.320	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	3.162.101.920	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	7.080.888.676	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	22.148.474.770	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	55.289.353.083	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	985.945.930	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	1.322.212.640	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	3.300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	60.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	881.520.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	3.918.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	26.504.975.100	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		110.167.990.206	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara	618.320.890	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	15.919.490.442	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	1.056.917.922	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	1.056.917.922	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	25.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi yang Diperkuat Kapasitasnya	310.780.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	11.010.866.846	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	3.037.461.920	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	21.002.097.559	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	29.606.722.102	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	2.089.842.525	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	4.935.063.920	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi		345.659.900	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	345.659.900	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi		3.675.606.220	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	514.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	324.038.900	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	2.837.067.320	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi		913.797.800	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	521.322.800	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	392.475.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	8.279.879.370	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi		8.279.879.370	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di Kawasan Strategis Provinsi yang dioptimalisasi	5.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	5.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	2.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	47.188.274.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional		47.188.274.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembangunan TPA/TPST/SPA	Kapasitas TPA/TPST/SPA yang dibangun	45.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	2.188.274.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan	1.558.296.896.042	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Penyelenggaraan Jalan Provinsi		1.558.296.896.042	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	5.915.116.045	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	1.305.782.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	58.928.108.077	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Berkala	38.975.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	94.554.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	12.690.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi	30.304.938.960	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	30.304.938.960	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	30.304.938.960	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	8.147.232.960	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi	3.527.285.900	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		1.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	700.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		795.749.900	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	595.749.900	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pemberian insentif dan/atau disinsentif nonfiskal	Jumlah Berita Acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	595.749.900	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang		580.336.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota	Tersedianya Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi Ranperda RTRW Kab/Kota sesuai dengan ketentuan waktu yaitu 15 hari	580.336.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi		951.200.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	551.200.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
14	Pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM serta pembangunan kota inovatif	Pengembangan Sistem Logistik dan Transportasi yang Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Daya Saing (PP 13)	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Konektivitas Laut	97.180.000	Dinas Perhubungan
			Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		-	Dinas Perhubungan



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	Dinas Perhubungan
			Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional		97.180.000	Dinas Perhubungan
			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan	-	Dinas Perhubungan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	97.180.000	Dinas Perhubungan
			Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		-	Dinas Perhubungan
			Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	-	Dinas Perhubungan
			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani	160.240.000	Dinas Perhubungan
			Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian		160.240.000	Dinas Perhubungan
			Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian		88.240.000	Dinas Perhubungan



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Penyediaan Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Provinsi		72.000.000	Dinas Perhubungan
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1. Konektivitas Darat	56.674.785.963	Dinas Perhubungan
				2. Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal		
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi		274.895.000	Dinas Perhubungan
			Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	91.095.000	Dinas Perhubungan
			Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	183.800.000	Dinas Perhubungan
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		3.215.913.000	Dinas Perhubungan
			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	3.215.913.000	Dinas Perhubungan
			Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		47.844.588.467	Dinas Perhubungan
			Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	47.844.588.467	Dinas Perhubungan
			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B		271.864.496	Dinas Perhubungan
			Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi	49.473.624	Dinas Perhubungan
			Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	104.625.000	Dinas Perhubungan
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		5.067.525.000	Dinas Perhubungan



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	438.800.000	Dinas Perhubungan
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		-	Dinas Perhubungan
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	-	Dinas Perhubungan
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	-	Dinas Perhubungan
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	-	Dinas Perhubungan
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	2.740.558.110	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		2.740.558.110	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan kepada pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	317.756.925	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	322.801.185	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyusunan Rencana dan Teknis Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	5.161.495.850	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		5.161.495.850	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah Rumah Negara yang Dikelola	326.064.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	4.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara	835.431.850	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	2.650.047.125	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional		2.650.047.125	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	146.300.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang memperoleh pembinaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	415.907.125	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	2.087.840.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	125.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi		125.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	125.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	61.886.522.566	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		61.886.522.566	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	153.600.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	59.154.546.441	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	415.907.125	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun	2.162.469.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1. Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	235.571.688.645	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				2. Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob		
				3. Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas		
			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		125.403.698.439	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	750.226.320	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	3.162.101.920	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	7.080.888.676	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	22.148.474.770	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	55.289.353.083	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	985.945.930	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	1.322.212.640	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	3.300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	60.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	881.520.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	3.918.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	26.504.975.100	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		110.167.990.206	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara	618.320.890	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	15.919.490.442	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	1.056.917.922	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	515.490.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	25.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi yang Diperkuat Kapasitasnya	310.780.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	11.010.866.846	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	3.037.461.920	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	21.002.097.559	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	29.606.722.102	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	2.089.842.525	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	4.935.063.920	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi		345.659.900	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	345.659.900	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi		3.675.606.220	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	514.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	324.038.900	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	2.837.067.320	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi		913.797.800	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	521.322.800	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	392.475.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	8.279.879.370	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi		8.279.879.370	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di Kawasan Strategis Provinsi yang dioptimalisasi	5.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	2.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	1.279.879.370	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	47.188.274.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional		47.188.274.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembangunan TPA/TPST/SPA	Kapasitas TPA/TPST/SPA yang dibangun	45.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	2.188.274.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan	1.558.296.896.042	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyelenggaraan Jalan Provinsi		1.558.296.896.042	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	5.915.116.045	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	1.305.782.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	58.928.108.077	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Berkala	38.975.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	94.554.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	12.690.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi	30.304.938.960	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	8.147.232.960	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Survey Kondisi Jalan/Jembatan		2.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi	3.527.285.900	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		1.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	700.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		795.749.900	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	595.749.900	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pemberian insentif dan/atau disinsentif nonfiskal	Jumlah Berita Acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang		580.336.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota	Tersedianya Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi Ranperda RTRW Kab/Kota sesuai dengan ketentuan waktu yaitu 15 hari	580.336.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi		951.200.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	551.200.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Pariwisata yang menggerakkan potensi alam local di pedesaan dan perkotaan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal(PP8)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	1.393.453.600	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		1.393.453.600	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	1.049.066.600	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	192.966.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	151.421.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1. Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	15.855.535.020	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				2. Pertumbuhan Wirausaha		
			Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		15.855.535.020	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	512.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	15.147.393.020	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	196.142.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Diberikan dukungan fasilitas pelatihan	414.040.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		414.040.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	414.040.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	199.884.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		199.884.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	199.884.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	1.787.950.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		1.787.950.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	208.312.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1.579.638.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Melanjutkan pembangunan berbasis desa (PP15)	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1. Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1.248.367.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				2. Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa		
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		1.248.367.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	509.957.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	284.593.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1. Persentase Fasilitasi Pemberdayaa n Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	10.334.144.307	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				2. Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat		Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota		10.334.144.307	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	54.522.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	153.836.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	6.742.434.307	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	3.383.352.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Fasilitas Penataan Desa	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat		-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1. Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	43.102.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				2. Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan		
				3. Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan		
				4. Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan		



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pelayanan Pencatatan Sipil		-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi		43.102.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	43.102.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	39.552.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				2. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak		
			Pelayanan Pendaftaran Kependudukan		-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan		39.552.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait Pendaftaran Penduduk	39.552.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	57.041.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		50.102.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	396.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	49.706.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		6.939.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	6.939.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	12.118.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Penyediaan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia	12.118.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Penyediaan Data Kependudukan Provinsi		4.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun	7.618.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi		-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	282.031.573	Dinas PP, PA dan KB
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		117.509.823	Dinas PP, PA dan KB
			Pembinaan Ketahanan Keluarga Rentan melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Ketahanan Keluarga Rentan melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	62.509.873	Dinas PP, PA dan KB
			Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	54.999.950	Dinas PP, PA dan KB
			Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		164.521.750	Dinas PP, PA dan KB
			Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	46.626.700	Dinas PP, PA dan KB
			Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	32.895.700	Dinas PP, PA dan KB
			Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Jumlah kelompok Genre yang mendapat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	84.999.350	Dinas PP, PA dan KB



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	218.859.888	Dinas PP, PA dan KB
				2. Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)		
			Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal		218.859.888	Dinas PP, PA dan KB
			Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	199.999.992	Dinas PP, PA dan KB
			Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	18.859.896	Dinas PP, PA dan KB
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	433.039.400	Dinas PP, PA dan KB
			Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi		42.039.800	Dinas PP, PA dan KB
			Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	42.039.800	Dinas PP, PA dan KB
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi		390.999.600	Dinas PP, PA dan KB
			Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	275.115.000	Dinas PP, PA dan KB
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	26.233.850	Dinas PP, PA dan KB
			Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	89.650.750	Dinas PP, PA dan KB



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Kewenangan Provinsi yang mendapatkan bimtek		
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	558.383.286	Dinas PP, PA dan KB
				2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan		
			Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi		72.446.000	Dinas PP, PA dan KB
			Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	23.032.000	Dinas PP, PA dan KB
			Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan	23.032.000	Dinas PP, PA dan KB
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi		35.428.000	Dinas PP, PA dan KB
			Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	35.428.000	Dinas PP, PA dan KB
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi		450.509.286	Dinas PP, PA dan KB
			Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	450.509.286	Dinas PP, PA dan KB
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	34.808.000	Dinas PP, PA dan KB
			Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi		34.808.000	Dinas PP, PA dan KB
			Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	34.808.000	Dinas PP, PA dan KB
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	379.401.000	Dinas PP, PA dan KB



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				2. Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)		
			Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		314.401.000	Dinas PP, PA dan KB
			Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	123.341.000	Dinas PP, PA dan KB
			Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana dan Sektor Lain	Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain	123.341.000	Dinas PP, PA dan KB
			Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	135.000.000	Dinas PP, PA dan KB
			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi		65.000.000	Dinas PP, PA dan KB
			Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil program Bangsa Kencana tingkat provinsi, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	65.000.000	Dinas PP, PA dan KB
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	1.042.128.000	Dinas PP, PA dan KB
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi		1.042.128.000	Dinas PP, PA dan KB
			Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan provinsi	1.042.128.000	Dinas PP, PA dan KB



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1. Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layan Komprehensif	543.673.473	Dinas PP, PA dan KB
				2. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)		
			Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		50.625.400	Dinas PP, PA dan KB
			Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	50.625.400	Dinas PP, PA dan KB
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		339.908.231	Dinas PP, PA dan KB
			penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	291.363.231	Dinas PP, PA dan KB
			Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	48.545.000	Dinas PP, PA dan KB
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi		153.139.842	Dinas PP, PA dan KB
			Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	112.413.768	Dinas PP, PA dan KB
			layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	40.726.074	Dinas PP, PA dan KB



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	750.091.782	Dinas PP, PA dan KB
			Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		50.845.000	Dinas PP, PA dan KB
			Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	50.845.000	Dinas PP, PA dan KB
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		90.470.014	Dinas PP, PA dan KB
			penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan		Dinas PP, PA dan KB
			Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek		Dinas PP, PA dan KB
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		608.776.768	Dinas PP, PA dan KB
			Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	328.035.553	Dinas PP, PA dan KB
			Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	117.607.800	Dinas PP, PA dan KB
			layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	163.133.415	Dinas PP, PA dan KB



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15	Hilirisasi dan industrialisasi SDA, termasuk maritim, untuk keadilan ekonomi	Penguatan Stabilitas Makro Ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah (PP 4)	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN	1. Jumlah Volume Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	430.401.200	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
				2. Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota		
			Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		206.017.200	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	120.092.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	60.018.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	25.907.200	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		224.384.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	154.514.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	69.870.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	1. Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT	3.027.404.283	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
				2. Porsi EBT dalam Bauran Energi		



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi		2.977.404.283	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	2.707.953.203	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah	Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah	142.571.080	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah rencana kegiatan pemanfaatan aneka EBT	126.880.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi		50.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	50.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi	3.670.277.500	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi		563.568.500	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	563.568.500	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana		3.106.709.000	Dinas Perindustrian,



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan			Perdagangan dan ESDM
			Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	3.106.709.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	1. Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah	711.291.100	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
				2. Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR		
			Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat		241.960.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	241.960.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		354.711.100	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	73.740.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	280.971.100	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan		14.908.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah	14.908.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		99.712.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah	99.712.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	300.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		300.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	300.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Barang	1.450.512.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi		1.450.512.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	1.203.430.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	247.082.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	700.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi		700.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri	350.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	350.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	100.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		100.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah laporan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer	100.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	100.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas		100.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	100.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	11.000.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		11.000.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	425.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	8.075.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2.500.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	49.487.750	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)		49.487.750	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	49.487.750	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	778.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya		80.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	80.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		698.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	618.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	80.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	1.936.380.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		178.390.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	178.390.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		400.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pemantauan Mutu Produk	Jumlah produk potensial yang dipantau	40.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	160.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	160.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan	40.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		1.357.990.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	49.992.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
			Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	1.307.998.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru (PP 5)	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	2.500.360.250	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi		2.300.066.250	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	299.987.750	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.000.078.500	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi		200.294.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	200.294.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	2.050.000.729	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		2.050.000.729	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	300.002.091	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	449.999.700	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	699.999.042	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	599.999.896	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1. Persentase Penanganan Bencana Pertanian	12.033.659.690	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
				2. Persentase Penanganan Dampak Perubahan iklim Terhadap Pertanian		
			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		12.033.659.690	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	299.999.792	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	2.183.760.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	699.900.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	8.849.999.898	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan	9.550.790.850	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi		1.100.094.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	100.002.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1.000.092.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		6.850.746.600	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	125.460.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	250.120.000	Dinas Ketahanan Pangan,



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	1.000.054.600	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	2.000.057.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	2.000.002.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi	100.053.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	1.375.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi		1.599.950.250	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	100.000.250	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1.499.950.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 2. Peningkatan Produksi Hortikultura	40.452.291.010	Dinas Ketahanan Pangan,



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				3. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan		Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Penataan Prasarana Pertanian		40.452.291.010	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	3.999.997.708	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	7.999.980.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	18.387.060.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	199.992.489	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	3.135.932.813	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	5.739.620.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	989.708.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	71.275.991.607	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		70.775.994.607	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	29.134.383.270	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	34.501.624.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	960.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	2.599.997.746	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak	1.349.999.627	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	1.979.999.204	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	249.990.760	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		499.997.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	499.997.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1. Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	14.675.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
				2. Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi		
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		3.000.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	2.000.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	1.000.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian		7.475.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	1.000.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	6.475.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		4.200.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	2.000.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	2.200.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Luasan Kawasan Konservasi	750.077.650	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil		600.077.300	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	78.488.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	399.997.300	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	121.592.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		150.000.350	Dinas Kelautan dan Perikanan



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	100.000.250	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	50.000.100	Dinas Kelautan dan Perikanan
			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	699.746.210	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		99.982.700	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	99.982.700	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		50.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	50.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		549.763.510	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	199.998.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Pengintegrasian Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	Dokumen Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K yang terintegrasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	100.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	249.765.510	Dinas Kelautan dan Perikanan
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	4.519.972.277	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		4.419.872.277	Dinas Kelautan dan Perikanan



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya Ikan yang memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	3.999.999.988	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	235.272.289	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	184.600.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat		100.100.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100.100.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	7.762.765.943	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		764.185.943	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	350.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	414.185.943	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		6.998.580.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	4.695.080.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	2.303.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	823.486.236	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		373.559.648	Dinas Kelautan dan Perikanan



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	222.393.290	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	151.166.358	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		449.926.588	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi	299.985.488	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	149.941.100	Dinas Kelautan dan Perikanan
16	Memastikan kerukunan antarumat beragama dan perawatan rumah ibadah	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Susarana yang Harmonis, Toleran dan Rukun (PP 16)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	5.402.912.850	Bakesbangpol
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		5.402.912.850	Bakesbangpol
			Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan	4.925.000	Bakesbangpol



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		
			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	47.987.850	Bakesbangpol
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	5.350.000.000	Bakesbangpol
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kemkunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	1.732.398.250	Bakesbangpol
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		1.732.398.250	Bakesbangpol
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	769.392.250	Bakesbangpol
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	263.006.000	Bakesbangpol



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	700.000.000	Bakesbangpol
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.277.897.455	Bakesbangpol
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		2.277.897.455	Bakesbangpol
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	303.267.650	Bakesbangpol
			Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	1.741.759.923	Bakesbangpol
			Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	82.869.882	Bakesbangpol
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	150.000.000	Bakesbangpol
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	7.936.892.300	Bakesbangpol
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		7.936.892.300	Bakesbangpol
			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	58.204.000	Bakesbangpol



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	186.859.000	Bakesbangpol
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	117.423.000	Bakesbangpol
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	469.365.300	Bakesbangpol
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	7.000.000.000	Bakesbangpol
			Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	105.041.000	Bakesbangpol



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	35.889.762.000	Bakesbangpol
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		35.889.762.000	Bakesbangpol
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	570.958.000	Bakesbangpol
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	62.011.000	Bakesbangpol
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	570.958.000	Bakesbangpol
17	Pelestarian seni budaya, ekonomi kreatif, dan	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi (PP 8)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	1.393.453.600	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	peningkatan prestasi olahraga		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		1.393.453.600	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	1.049.066.600	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	192.966.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	151.421.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1. Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal 2. Pertumbuhan Wirausaha	15.855.535.020	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		15.855.535.020	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	512.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	15.147.393.020	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	196.142.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Diberikan dukungan fasilitas pelatihan	414.040.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		414.040.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	414.040.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	199.884.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		199.884.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	199.884.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	1.787.950.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		1.787.950.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	208.312.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1.579.638.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1. Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	2.455.449.035	Dinas Kebudayaan,



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				2. Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan		Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi		268.417.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	268.417.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi		2.187.032.035	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	1.681.013.785	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	113.727.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	392.291.250	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	29.700.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		29.700.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	27.747.579.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1.952.421.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	3.248.255.526	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pengelolaan Museum Provinsi		3.248.255.526	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	605.843.400	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	599.651.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1.250.880.600	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	143.276.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	648.604.526	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	995.762.900	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		995.762.900	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual	409.586.450	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah lembaga/asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	86.176.450	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	200.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	200.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	100.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	2.455.402.571	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi		1.207.758.900	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1.000.700.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	92.284.450	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	114.774.450	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		615.949.971	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	615.949.971	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		631.693.700	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi	172.339.450	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Lembaga dan Pranata Kebudayaan yang Dibina	61.728.900	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	114.484.900	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Aktivitas/Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan	213.924.450	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota	Jumlah PPKD Provinsi yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan	69.216.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		3.559.466.800	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		3.559.466.800	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3.466.594.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	92.872.800	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	802.598.700	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan		717.557.250	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	512.194.350	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	205.362.900	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		85.041.450	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	85.041.450	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	5.977.129.896	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		576.912.900	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	425.292.900	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Usaha Pariwisata yang telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan	151.620.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi		806.300.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	306.300.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi yang sah dan legal ditetapkan Kepala Daerah	500.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		2.141.686.996	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	145.658.900	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Ditetapkan	306.300.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	694.489.196	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	195.238.900	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	800.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		2.452.230.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	2.452.230.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal)(PP 7)	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1. Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	2.455.449.035	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
				2. Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan		
			Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi		268.417.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	268.417.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi		2.187.032.035	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	1.681.013.785	Dinas Kebudayaan,



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	113.727.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	392.291.250	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	29.700.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		29.700.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	27.747.579.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1.952.421.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	3.248.255.526	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pengelolaan Museum Provinsi		3.248.255.526	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	605.843.400	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	599.651.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1.250.880.600	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	143.276.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	648.604.526	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	995.762.900	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		995.762.900	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual	409.586.450	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah lembaga/asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	86.176.450	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	200.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	200.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	100.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	2.455.402.571	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi		1.207.758.900	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1.000.700.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	92.284.450	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	114.774.450	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		615.949.971	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	615.949.971	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		631.693.700	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi	172.339.450	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Lembaga dan Pranata Kebudayaan yang Dibina	61.728.900	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	114.484.900	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Aktivitas/Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan	213.924.450	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota	Jumlah PPKD Provinsi yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan	69.216.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		3.559.466.800	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		3.559.466.800	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3.466.594.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	92.872.800	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	802.598.700	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan		717.557.250	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	512.194.350	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	205.362.900	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		85.041.450	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	85.041.450	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	5.977.129.896	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		576.912.900	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	425.292.900	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Usaha Pariwisata yang telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan	151.620.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi		806.300.000	806.300.000
			Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	306.300.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi yang sah dan legal ditetapkan Kepala Daerah	500.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		2.141.686.996	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	145.658.900	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Ditetapkan	306.300.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	694.489.196	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	195.238.900	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	800.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		2.452.230.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	2.452.230.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1. Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2. Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	1.248.367.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						dan Pencatatan Sipil
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		1.248.367.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	509.957.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	738.410.000,	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1. Persentase Fasilitas Pemberdayaa n Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	10.334.144.307	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				2. Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat		
			Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota		10.334.144.307	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	54.522.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	153.836.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	6.742.434.307	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	3.383.352.00 0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat		-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1. Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	43.102.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan
				2. Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan		



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				3. Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan 4. Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan		dan Pencatatan Sipil
			Pelayanan Pencatatan Sipil		-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi		43.102.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	43.102.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital 2. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	39.552.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pelayanan Pendaftaran Kependudukan		-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan		39.552.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait Pendaftaran Penduduk	39.552.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	57.041.500,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		50.102.500,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	396.500,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	49.706.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		6.939.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	60.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	12.118.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Penyediaan Profil Kependudukan		12.118.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia	4.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun	7.618.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi		-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	2.740.558.110	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		2.740.558.110	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan kepada pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	317.756.925	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	322.801.185	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyusunan Rencana dan Teknis Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	5.161.495.850	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		5.161.495.850	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah Rumah Negara yang Dikelola	326.064.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	4.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara	835.431.850	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	2.650.047.125	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional		2.650.047.125	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	146.300.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang memperoleh pembinaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	415.907.125	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan/atau diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	2.087.840.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	125.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi		125.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	125.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	61.886.522.566	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		61.886.522.566	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	153.600.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	59.154.546.441	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	415.907.125	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun	2.162.469.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1. Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	235.571.688.645	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				2. Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob		
				3. Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas		
			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		125.403.698.439	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	750.226.320	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang	3.162.101.920	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi		
			Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	7.080.888.676	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	22.148.474.770	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	55.289.353.083	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	985.945.930	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	1.322.212.640	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	3.300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	60.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	881.520.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	3.918.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	26.504.975.100	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		110.167.990.206	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara	618.320.890	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	15.919.490.442	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	1.056.917.922	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	515.490.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	25.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi yang Diperkuat Kapasitasnya	310.780.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	11.010.866.846	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	3.037.461.920	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	21.002.097.559	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	29.606.722.102	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	2.089.842.525	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	4.935.063.920	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi		345.659.900	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	345.659.900	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi		3.675.606.220	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	514.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	324.038.900	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	2.837.067.320	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi		913.797.800	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	521.322.800	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	392.475.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	8.279.879.370	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi		8.279.879.370	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di Kawasan Strategis Provinsi yang dioptimalisasi	5.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	2.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	1.279.879.370	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	47.188.274.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional		47.188.274.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembangunan TPA/TPST/SPA	Kapasitas TPA/TPST/SPA yang dibangun	45.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	2.188.274.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan	1.558.296.896.042	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyelenggaraan Jalan Provinsi		1.558.296.896.042	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	5.915.116.045	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	1.305.782.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	58.928.108.077	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Berkala	38.975.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	94.554.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	12.690.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi	30.304.938.960	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	8.147.232.960	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	2.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi	3.527.285.900	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		1.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	700.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
					ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		795.749.900	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	595.749.900	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pemberian insentif dan/atau disinsentif nonfiskal	Jumlah Berita Acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang		580.336.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota	Tersedianya Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi Ranperda RTRW Kab/Kota sesuai dengan ketentuan waktu yaitu 15 hari	580.336.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi		951.200.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	551.200.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang





BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

7.1 Sasaran Indikator Makro Provinsi Sumatera Utara

Indikator makro merupakan sekumpulan indikator yang mencerminkan kinerja pembangunan dari berbagai aspek utama secara menyeluruh. Indikator ini berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi sejauh mana tujuan-tujuan pembangunan telah tercapai. Capaian indikator makro sangat bergantung pada keberhasilan pencapaian sasaran dan *outcome* dari seluruh program dan kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, indikator makro dikategorikan sebagai indikator dampak atau *ultimate outcome*, yang merefleksikan hasil akhir dari proses pembangunan secara agregat.

Sasaran indikator makro RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 selaras dengan sasaran indikator makro yang dituangkan ke dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yang juga mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Kerangka ekonomi makro Provinsi Sumatera Utara dibagi ke dalam 4 aspek kinerja pembangunan, antara lain (1) Peningkatan pendapatan, (2) Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan, (3) Peningkatan daya saing SDM, dan (4) Penurunan emisi GRK dan perbaikan kualitas lingkungan hidup. Keempat aspek ini diterjemahkan ke dalam 9 indikator, yaitu (1) Laju Pertumbuhan Ekonomi, (2) PDRB per Kapita, (3) Kontribusi PDRB Provinsi, (4) Tingkat Kemiskinan, (5) Rasio Gini, (6) Tingkat Pengangguran Terbuka, (7) Indeks Modal Manusia, (8) Penurunan Intensitas Emisi GRK, dan (9) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Berikut target untuk tahun 2026 dari kesembilan indikator yang dimaksud:

Tabel 7.1 Target Sasaran Indikator Makro Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026

INDIKATOR	Realisasi	Target
	2024	2026
Peningkatan Pendapatan		
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,03	5,80 – 6,20
PDRB per Kapita (Rp. Juta)	73,47	87,6
Kontribusi PDRB Provinsi (%)	5,2	5,2
Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan		
Tingkat Kemiskinan (%)	7,19	5,93 – 6,55
Rasio Gini (Indeks)	0.306	0,301 – 0,303
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,6	5,14 – 5,47
Peningkatan Daya Saing SDM		
Indeks Modal Manusia (poin)	NA	0,54
Penurunan emisi GRK dan Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup		
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	25,47(ton CO2eq)	1-2,77
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)	73,96	77,37

Penetapan target atas kerangka ekonomi makro diatas selaras dengan target yang ditetapkan di dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029, dan memperitmbangkan target yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2026. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.2 Keselarasan Target Sasaran Indikator Makro Nasional dengan Provinsi Sumatera Utara

NO.	INDIKATOR	TARGET NASIONAL RKP TAHUN 2026	TARGET PROVINSI SESUAI RKP TAHUN 2026	TARGET RKPD PROVINSI TAHUN 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,8 – 6,3	5,6-6,2	5,80 – 6,20
2	PDRB per Kapita (Rp juta)	5.870 (GNI per Kapita, US\$)	83,2 – 85,7	87,6
3	Kontribusi PRDB Provinsi (%)	-	5,2	5,2
4	Tingkat Kemiskinan (%)	6,50 – 7,50	4,60 – 5,60	5,93 – 6,55
5	Rasio Gini (poin)	0,377 – 0,380	0,284-0,290	0,301 – 0,303
6	Indeks Modal Manusia (poin)	0,57	0,55	0,54
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,44 – 4,96	5,06-5,59	5,14 – 5,47
8	Penurunan intensitas emisi GRK (%)	37,14	1,0-2,77	1-2,77
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)	76,67	77,37	77,37

Sumber : Bappelitbang Provsu, 2025

Keselarasan indikator utama pembangunan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan langkah strategis untuk memastikan perencanaan pembangunan berjalan terpadu, terukur, dan saling mendukung. Harmonisasi indikator ini penting untuk menyamakan arah pencapaian target pembangunan, memperkuat koordinasi lintas wilayah, serta meningkatkan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Dengan keselarasan indikator, setiap capaian di Provinsi Sumatera Utara dapat berkontribusi langsung terhadap indikator utama pembangunan nasional, sehingga efektivitas pembangunan dapat lebih optimal dan sinergi pusat-daerah dapat diwujudkan secara nyata. Daftar keselarasan indikator tersebut disajikan pada Tabel 7.3 berikut:

Tabel 7.3 Keselarasan Indikator Utama Pembangunan RKP dengan RKPD Provinsi Sumatera Utara

NO	RKP 2026		RKPD 2026 PROVINSI SUMATERA UTARA	
	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,68	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,18
2	Kesehatan Ibu dan Anak:		Kesehatan Ibu dan Anak:	
	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	109	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	58,9
	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	17,50	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	18,5
3	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	252	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	



NO	RKP 2026		RKPD 2026 PROVINSI SUMATERA UTARA	
	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	90	Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	90
	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	90	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	90
4	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	98,70	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	80
5	Hasil Pembelajaran:		Hasil Pembelajaran:	
	e) Rata-rata Nilai PISA		e) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:	
	a-i Membaca	396	- Literasi membaca	12,01-16,01
	a-ii Matematika	404	- Numerasi	1,5-4,57
	a-iii Sains	416		
	f) Rata-rata nilai asesmen nasional		f) Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:	
	- Literasi membaca	65,89	- Literasi membaca	37,37-39,88
	- Numerasi	58,86	- Numerasi	34,70-39,20
	g) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,45	g) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	10,43-10,46
	h) Harapan Lama Sekolah	13,36	h) Harapan Lama Sekolah	13,67-13,69
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)	34,92	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	11,12-11,30
7	Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	68,50	Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	72,47
8	Tingkat kemiskinan (%)	6,5-7,5	Tingkat kemiskinan (%)	5,93 – 6,55
9	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	34,99	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	53,25
10	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	10,40	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%), diusulkan untuk menggunakan proksi:	
			c) Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan	
			d) Proxy: Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kab/kota/provinsi	19
11	Produktivitas Industri dan Pertanian		Produktivitas Industri dan Pertanian	
	c) Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	21,20	c) Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	18,96
	d) Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	3,33	d) Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	



NO	RKP 2026		RKPD 2026 PROVINSI SUMATERA UTARA	
	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			NTP Tanaman Pangan	100,27
			NTP Tanaman Hortikultura	92,83
			Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTPR)	183,24
			Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT)	95,59
12	Pengembangan Pariwisata		Pengembangan Pariwisata	
	c) Rasio PDB Pariwisata (%)	4,60-4,70	c) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,5
	d) Devisa Pariwisata (miliar USD)	22,00-24,70	d) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribuan Orang)	365
13	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	7,40-8,00	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekraf Nasional (%)	5,5
14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN		Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD	
	e) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	3,15	e) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (UKM)	0,55
			a-i) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi (%)	10,67-10,82
			a-ii) Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi	
	f) Rasio kewirausahaan (%)	3,18	f) Rasio kewirausahaan daerah (%)	3,28
	g) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%)	1,12	g) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%)	0,79
	h) Return on Asset (ROA) BUMN (%)	3,26	h) Return on Asset (ROA) BUMN (%)	14.225
15	Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik		Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik	
	c) Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,44-4,96	c) Tingkat pengangguran terbuka (%)	5,14 – 5,47
	d) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	37,95	d) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	44,85
16	Tingkat partisipasi Angkatan kerja Perempuan (%)	56,40-59,31	Tingkat partisipasi Angkatan kerja Perempuan (%)	65,57
17	Tingkat penguasaan IPTEK		Tingkat penguasaan IPTEK	
	c) Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)	0,31	Indeks Inovasi Daerah	58,69-60,76
	d) Peringkat Indeks Inovasi Global (peringkat)	52		
18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau	
	e) Indeks Ekonomi Hijau	71,01	f) Indeks Ekonomi Hijau	51,14
	g) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	20,00	h) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	44
19	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)	41	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6,23
20	Biaya Logistik (% PDB)	13,30	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	9,95



NO	RKP 2026		RKPD 2026 PROVINSI SUMATERA UTARA	
	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	29,44	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,75
22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	22, 7	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	16,62-16,76
23	Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan		Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan	
	g) Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	44,58	h) Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	2,28
	i) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	68,66	j) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	75,05
	k) Persentase Desa Mandiri (%)	23,91	l) Persentase Desa Mandiri (%)	8,56
24	Indeks Materi Hukum / Indeks Pembangunan Hukum	0,70	Indeks Materi Hukum Proksi di Daerah: Indeks Reformasi Hukum (IRH)	86
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1,70	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,92
26	Indeks Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik	3,92(B)
27	Anti Korupsi		Anti Korupsi	
	ii. Indeks Integritas Nasional	89,17	Indeks Integritas Nasional	67,46
	iii. Indeks Persepsi Korupsi	40		
28	Indeks Pembangunan Hukum	0,70	Disesuaikan dengan karakteristik daerah Usulan Proksi:	
			c) Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah dan Kepala Daerah	100
			d) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	86,8
29	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	68,00	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	59,38
30	Indeks Demokrasi Indonesia	82,12 – 85,66	Indeks Demokrasi Indonesia	83,08 - 84,08
31	Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%)	10,45- 11,40	Rasio Pajak Daerah erhadap PDRB (%)	1,42
32	Tingkat Inflasi (%)	2,50 ± 1,00	Tingkat Inflasi (%)	2,5±1
33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan		Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan	
	f) Aset Perbankan/PDB (%)	64,51	e) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	30,06
	g) Aset Dana Pensiun/PDB (%)	7,63	f) Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,13
	h) Aset Asuransi/PDB (%)	9,30		
	i) Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)	59,90	g) Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah)	8.677.816,12
	j) Total Kredit/PDB (%)	38,46	h) Total Kredit/PDRB (%)	27,15
34	Inklusi Keuangan (%)	91,50	Inklusi Keuangan (%)	97,61



NO	RKP 2026		RKPD 2026 PROVINSI SUMATERA UTARA	
	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
35	Asia Power Index (Diplomatic Influence)	17,0	Disesuaikan dengan karakteristik daerah Usulan Proksi:	
			Jumlah kerja sama provinsi/kabupaten/kota kembar/bersaudara (Sister Province/ Sister City)	20
36	Asia Power Index (Diplomatic Influence)	17,0	Disesuaikan dengan karakteristik daerah (Asia Power Indeks – Military Capability)	
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	58,99	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,98-56,05
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama	77,14	Indeks Kerukunan Umat Beragama	81,5
39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	73,83	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	71,96
40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	421	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,39
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,47	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	567
42	Kualitas Lingkungan Hidup	76,67	Kualitas Lingkungan Hidup	
	a.i. Indeks Kualitas Udara (IKU)		a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,37
	a.ii. Indeks Kualitas Air (IKA)		a.i. Indeks Kualitas Udara (IKU)	82,4
	a.iii. Indeks Kualitas Lahan (IKL)		a.ii. Indeks Kualitas Air (IKA)	76
	a.iv. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)			
	b) Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	17,00	e) Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	11,25
	c)Timbulan Sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	28 (17 terdaur ulang)	f) Pengelolaan Sampah	
			- Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	19
			- Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)	49,75
43	Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian menuju kedaulatan pangan		Ketahanan Energi, Air, dan Pangan	
	iv. Ketahanan Energi		d) Ketahanan Energi	
	- Indeks Ketahanan Energi	6,82	- Konsumsi Listrik per kapita (kWh)	1.213,4
	v. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (%)	6,55	- Intensitas energi primer (SBM/ RP milyar)	77,64
			e) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	6,87
	vi. Ketahanan Air		f) Ketahanan Air	
	- Kapasitas Tampung Air (m3/kapita)	60,16	- Kapasitas Tampung Air (m3/kapita)	

NO	RKP 2026		RKPD 2026 PROVINSI SUMATERA UTARA	
	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	- Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	42,24	- Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	43,96
44	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung akibat Bencana Relatif terhadap PDB	136	Indeks Risiko bencana (IRB) (untuk level provinsi)	155,05
45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)		Persentase Penurunan Emisi GRK (%)	
	e) Kumulatif	19,07	f) Kumulatif	10,78
	g) Tahunan	27,35	h) Tahunan	20,63

7.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) dirumuskan dan ditetapkan dari pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 - 2029 dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis serta program unggulan daerah. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis, yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi, sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

IKU pemerintah daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU pemerintah daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah lainnya dalam pencapaian indikator kinerja sasaran.

Untuk menilai capaian pembangunan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2026, telah ditetapkan 12 Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan. IKU ini berfungsi sebagai instrumen penting untuk melihat sejauh mana berbagai aspek pembangunan dapat diwujudkan, sekaligus memastikan arah pembangunan tetap selaras dengan visi hingga tahun 2029. Dari jumlah tersebut, sembilan indikator merupakan bagian dari sasaran utama pembangunan nasional, sehingga penetapan targetnya secara langsung terhubung dengan target pada tingkat nasional. Dengan demikian, pencapaian IKU di Sumatera Utara bukan hanya mencerminkan keberhasilan pembangunan daerah, tetapi juga memberi kontribusi signifikan terhadap capaian pembangunan nasional. Secara keseluruhan, tingkat keberhasilan pembangunan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2026 akan tergambar dari capaian 12 Indikator Kinerja Utama berikut ini:

Tabel 7.4 Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET		Keterangan
				2025	2026	
1	Indeks Modal Manusia	Poin	N/A	0,54	0,54	Seluruh OPD
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,19	6,96-7,46	5,93-6,55	Seluruh OPD
3	Kontribusi PDRB Provinsi	Persen	5,2	5,2	5,2	Seluruh OPD
4	PDRB per Kapita	Rp. Juta	73,57	78,4	87,6	Seluruh OPD
5	Indeks Ekonomi Hijau	Poin/Skor	N/A	51,12	51,14	Seluruh OPD
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,6	5,27-5,56	5,14-5,47	Seluruh OPD
7	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,03	5,20- 5,60	5,80-6,20	Seluruh OPD



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET		Keterangan
				2025	2026	
8	Gini Rasio	Poin	0,306	0,303-0,305	0,301-0,303	Seluruh OPD
9	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin/Skor	80,87 (A)	81,12 (A)	81,14 (A)	Seluruh OPD
10	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	Persen	N/A	58,5	59,38	Seluruh OPD
11	Persentase Penurunan Emisi GRK					Seluruh OPD
	a. Kumulatif	Persen	N/A	10,06	10,78	
	b. tahunan	Persen	N/A	19,04	20,63	
12	Indeks Demokrasi Indonesia	Poin/Skor	80,19	80,5 - 82,46	83,08 - 84,08	Seluruh OPD

Sumber: Bappelitbang Provsu Tahun 2025, data diolah

7.3 Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah merupakan indikator yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026.

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Indikator Kinerja Daerah merupakan Indikator Kinerja Utama dari seluruh OPD, dimana sebagiannya merupakan indikator kinerja dari sasaran RPJMD tahun 2025-2029, serta indikator utama pembangunan pada RPJPD 2025-2045.



Tabel 7.5 Target Indikator Kinerja Daerah (IKD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET		KET
				2025	2026	
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI					
1	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Pravelence of Undermourishment)	Persen	7,54	7,2	6,87	Dinas Ketahanan Pangan TPH
2	Konsumsi listrik per kapita	kwh/kapita	1158,97	1184,21	1213,4	Dinas Perindag dan ESDM
3	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	N/A	1	1,00-2,77	DLHK
4	Persentase Penurunan Emisi GRK					
	a. Kumulatif	Persen	N/A	10,06	10,78	Seluruh OPD
	b. tahunan	Persen	N/A	19,04	20,63	Seluruh OPD
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	73,96	77,2	77,37	DLHK
6	Indeks Risiko Bencana	Poin	139,84	157,53	155,05	BPBD
7	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	7,14	10	11,25	Dinas PUPR
8	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	N/A	40,95	43,96	Dinas PUPR
9	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Poin	N/A	0,562	0,567	Dinas LH dan Kehutanan
10	Persentase Tutupan Lahan	Persen	N/A	20	20	Dinas LH dan Kehutanan
11	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	61,09	75,8	76	Dinas LH dan Kehutanan
12	Indeks kualitas Udara (IKU)	Poin	92,26	82,2	82,4	Dinas LH dan Kehutanan
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1	Indeks Modal Manusia	Poin	N/A	0,54	0,54	Seluruh OPD
2	Angka Kematian Ibu	100.000/KL	68.19.00	65,78	58,9	Dinas Kesehatan
3	Prevalensi Stunting	Persen	22	20	18,5	Dinas Kesehatan
4	Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis	Persen	71,8	90	90	Dinas Kesehatan
5	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis	Persen	85	90	90	Dinas Kesehatan
6	Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persen	74,40%	80%	80%	Dinas Kesehatan
7	Usia arapan Hidup	Tahun	73,9	74,01	74,18	Dinas Kesehatan
	Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional					
8	a. Literasi Membaca	Poin	N/A	6,06-12,12	12,01-16,01	Dinas Pendidikan
9	b. Numerasi	Poin	N/A	0,00-3,03	1,5-4,57	Dinas Pendidikan
	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional					
10	a. Literasi Membaca	Poin	N/A	35,99-38,49	37,37-39,88	Dinas Pendidikan



11	b. Numerasi	Poin	N/A	33,70-36,20	34,70-39,20	Dinas Pendidikan
12	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan tinggi	Persen	N/A	11,12	11,12-11,30	Dinas Pendidikan
13	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah tinggi	Persen	N/A	71,1	72,47	Dinas Pendidikan
14	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,93	10,3 - 10,33	10,43-10,46	Dinas Pendidikan
15	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,49	13,61 - 13,63	13,67-13,69	Dinas Pendidikan
16	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	62.39.00	69,02	69,5	Dinas Perpustakaan dan Arsip
17	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,19	6,96-7,16	5,93-6,55	Seluruh OPD
18	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen	49,59	51	53,25	Dinas Ketenagakerjaan
19	Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kab/kota/provinsi	Unit	9	14	19	Dinas Ketenagakerjaan
20	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	N/A	55,44 - 55,48	55,98-56,05	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
21	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	80,88	77,89	78,15	Kesbangpol
22	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Poin	60,2	61,32	62,49	Dinas P3AKB
23	Indeks Ketimpangan Gender	Persen	0,399	0,395	0,39	Dinas P3AKB
24	Indeks pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Poin	69,79	71,04	71,96	Dinas P3AKB
25	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	91,5	91,59	91,71	Dinas P3AKB
26	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Poin	62,5	63,7	64,9	Dinas P3AKB
27	Indeks Kesejahteraan Sosial	Poin	56,09	56,09	56,59	Dinas Sosial
28	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	56,33	58,5	60,7	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
29	Indeks Partisipasi Olahraga	Persen	N/A	0,275	0,288	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
30	Indeks Zakat Nasional	Poin	0,44	0,46	0,48	Biro Kesra
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH					
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	18,36	18,66	18,96	Dinas Perindag dan ESDM
2	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	2,21	2,42	2,5	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	Indeks Ekonomi Hijau	Poin/Skor	N/A	51,12	51,14	Seluruh OPD
4	PDRB per Kapita	Rp. Juta	73,57	78,4	87,6	Seluruh OPD
5	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	Persen	N/A	5,45	5,5	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
6	Rasio Volume Usaha koperasi terhadap PDRB	Persen	N/A	0,79	0,79	Dinas Koperasi, UKM



7	Indeks Inovasi Daerah	Poin	59,93	57,50-60,01	58,69-60,76	Bappelitbang
8	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan komunikasi	Poin	6,04	6	6,23	Dinas Kominfo
9	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	Persen	42,04	43	44	Dinas Perindag dan ESDM
10	Intensitas energi primer (SBM/Rp Miliar)	SBM/Rp Miliar	81	79,4	77,64	Dinas Perindag dan ESDM
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,6	5,27-5,56	5,14-5,47	Seluruh OPD
12	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,03	5,20- 5,60	5,80-6,20	Seluruh OPD
13	Kontribusi PRDB Provinsi	Persen	5,2	5,2	5,2	Seluruh OPD
14	Gini Rasio	Poin	0,306	0,303-0,305	0,301-0,303	Seluruh OPD
15	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	Poin	N/A	10,1	9,95	Dinas Perindag dan ESDM
16	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	28,65	29,7	29,75	Dinas PMPTSP
17	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional	Persen	N/A	2,26	2,28	Biro Perekonomian
18	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	72,75	75.84	79.17.00	Dinas PUPR
19	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen	73,47	74.36.00	75.05.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
20	Persentase Desa Mandiri	Persen	3,1	8,44	8,56	Dinas PMD, Kependudukan dan Pencatatan sipil
21	Tingkat Inflasi	Persen	2,12	2,5±1	2,5±1	Sekretariat Daerah
22	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	Persen	41,93	43	44,85	Dinas Ketenagakerjaan
23	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	Persen	N/A	28,77	30,06	Biro Perekonomian
24	Aset Dana Pensiun/PDRB	Persen	N/A	0,13	0,13	Biro Perekonomian
25	Nilai Transaksi Saham per Kapita per Provinsi (Rp)	Rp. Miliar	N/A	8.103.064,03	8.677.816,12	Biro Perekonomian
26	Total Kredit/PDRB	Persen	N/A	25,7	27,15	Sekretariat Daerah
27	<i>Return on Asset</i> (ROA) BUMD	Persen	N/A	1,24	1,42	Biro Perekonomian
28	Inklusi Keuangan	Persen	N/A	97,52	97,61	Biro Perekonomian
29	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	81.898.862,98	84.331.740,97	86.836.889,75	Dinas Ketenagakerjaan
30	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	77,49	77,88	78,26	Dinas Ketahanan Pangan, TPH
31	Indeks Desa	Poin	0,6437	0,6671	0,6799	Dinas PMD, Kependudukan dan Pencatatan sipil
32	Rasio konektivitas Provinsi	Poin	76,59	79,28	81,3	Dinas Perhubungan
33	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	Persen	N/A	46,51	48	Dinas Koperasi, UKM
34	Persentase Peningkatan Investasi	Persen	23,61	25	50	Dinas PMPTSP



35	NTP Tanaman Pangan	Poin	100,25	100,26	100,27	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
36	NTP Tanaman Hortikultura	Poin	92,81	92,82	92,83	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
37	Nilai Tukar Nelayan	Persen	101,32	101,35	102,54	Dinas Kelautan dan Perikanan
38	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan	Persen	97	98	98	Dinas Kelautan dan Perikanan
39	Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTPR)	Poin	182,87	183,05	183,24	Dinas Perkebunan dan Peternakan
40	Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT)	Poin	95,4	95,5	95,59	Dinas Perkebunan dan Peternakan
41	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	18,79	19,03	19,2	Dinas Perindag dan ESDM
42	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Persen	60,43	60,93	61,93	Bapenda
43	Aset Perbankan Syariah/PDRB	Persen	0,143055556	0,149305556	03,06	Biro Perekonomian
44	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. /pekerja /tahun	81.898.862,98	84.331.740,97	86.836.889,75	Dinas Ketenagakerjaan
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM					
1	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	Poin/Skor	N/A	82	84	Biro Organisasi
2	Indeks Demokrasi Indonesia	Poin/Skor	80,19	80,5 - 82,46	83,08 - 84,08	Seluruh OPD
3	Indeks Pelayanan Publik	Poin/Skor	3,19	3,92	3,93	Biro Organisasi
4	Reformasi Birokrasi	Poin/Skor	N/A	81,12 (A)	81,14 (A)	Seluruh OPD
5	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Poin/Skor	3,86	3,89	3,92	Dinas Kominfo
6	Indeks Reformasi Hukum	Poin/Skor	85,9	86	86	Biro Hukum
7	Indeks integritas Nasional	Poin/Skor	N/A	66,78	67,46	Inspektorat
8	Jumlah Kerja Sama Provinsi	Jumlah Kerja sama	N/A	20	20	Biro Ogranisasi
9	Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persen	N/A	95 - 100	96 - 100	Satpol PP
10	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	Persen	N/A	60	62,5	Biro Hukum
11	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	Persen	N/A	58,5	59,38	Seluruh OPD
12	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	N/A	3,4	3,49	Bappelitbang
13	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Poin	100	100	100	Satpol PP dan BPBD



14	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Poin	N/A	0,76	0,8	Dinas PMD, Kependudukan dan Pencatatan sipil
15	Indeks Pembangunan Statistik	Poin	1,8	2	2,2	Dinas Kominfo
16	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Poin	72,97	73,5	74	Dinas Perputakaan dan Arsip
17	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Persen	N/A	90	90	Sekretariat DPRD
18	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Poin	N/A	90,50 – 92,00	92,55 – 93,00	Bappelitbang
19	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	BKAD
20	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Poin	N/A	29,8	30,05	BPSDM
21	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	79,44	79,94	80,15	Badan Kepegawaian Bappelitbang
22	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	Persen	N/A	100	100	Bappelitbang
23	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Kategori	Level 3 Terdefinisi (3,0 ≤ skor < 4,0)	Level 3 Terdefinisi (3,0 ≤ skor < 4,0)	Level 3 Terdefinisi (3,0 ≤ skor < 4,0)	Inspektorat
24	Nilai Capaian Pelaporan Kinerja (SAKIP)	Poin	N/A	72,00(BB)	72,5	Sekretariat Daerah
25	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	70,6	70,80	71,00	Bappelitbang

INDIKATOR KINERJA KUNCI

I	Pendidikan					
1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,93	10,3 - 10,33	10,43-10,46	Dinas Pendidikan
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,49	13,61 - 13,63	13,67-13,69	Dinas Pendidikan
	Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional					Dinas Pendidikan
3	a. Literasi Membaca	Poin/Skor	N/A	6,06-12,12	12,01-16,01	Dinas Pendidikan
4	b. Numerasi	Poin/Skor	N/A	0,00-3,03	1,5-4,57	Dinas Pendidikan
	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional					
5	a. Literasi Membaca	Poin/Skor	N/A	35,99-38,49	37,37-39,88	Dinas Pendidikan
6	b. Numerasi	Poin/Skor	N/A	33,70-36,20	34,70-39,20	Dinas Pendidikan
7	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan tinggi	Persen	N/A	11,12	11,12-11,30	Dinas Pendidikan
8	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	Persen	78,59	78,59	79,4	Dinas Pendidikan



9	Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan khusus (APS)	Persen	65,84	65,84	74,38	Dinas Pendidikan
10	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Persen	80	100	100	Dinas Pendidikan
11	Indeks Pemerataan Guru	Persen	100	100	100	Dinas Pendidikan
12	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Persen	44,67	50,4	51,4	Dinas Pendidikan
II	Kesehatan					
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,9	74,01	74,18	Dinas Kesehatan
2	Angka Kematian Ibu	100.000/KL	68.19.00	65,78	58,9	Dinas Kesehatan
3	Prevalensi Stunting	Persen	22	20	18,5	Dinas Kesehatan
4	Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis	Persen	71,8	90	90	Dinas Kesehatan
5	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis	Persen	85	90	90	Dinas Kesehatan
6	Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persen	74,40%	80%	80%	Dinas Kesehatan
7	Angka Kematian Balita	1.000/KL	NA	03.04	03.05	Dinas Kesehatan
8	Angka Kematian Bayi	1.000/KL	NA	03.28	0,148611111	Dinas Kesehatan
9	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Pesen	N/A	36%	46%	Dinas Kesehatan
10	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	Persen	70%	70%	72%	Dinas Kesehatan
11	Persentase Hipertensi dalam Pengendalian	Persen	6,65%	7%	10%	Dinas Kesehatan
12	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup	Persen	N/A	65%	66%	Dinas Kesehatan
13	Persentase ibu hamil ANC (antenatal care) 6 kali sesuai standard	persen	N/A	82	84	Dinas Kesehatan
14	Persentase Wasting (Balita Gizi Kurang dan Gizi Buruk)	Persen	9	8	7,5	Dinas Kesehatan
15	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	Persen	100	100	100	Dinas Kesehatan
16	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Persen	100	100	100	Dinas Kesehatan
17	Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial dan Vaksin Imunisasi Rutin Lengkap (IRL)	Persen	N/A	65	70	Dinas Kesehatan
18	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	Persen	N/A	3,88	3,92	Dinas Kesehatan



19	Persentase Fasilitas Produksi dan Distribusi Obat dan Alat Kesehatan serta PKRT yang memenuhi standar mutu	Persen	N/A	87	89	Dinas Kesehatan
20	Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	Persen	N/A	17	19	Dinas Kesehatan
	UPTD Khusus Rumah Sakit Haji Medan					
1	Bed Occupancy Rate (BOR)	Persen	71.08.00	72	73	RS Haji
2	Length Of Stay (LOS)	Tempat Tidur	4 Hr	4 Hr	4 Hr	RS Haji
3	Indek Kepuasan Masyarakat	Persen	87.06.00	88.01.00	88.06.00	RS Haji
	UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa Medan					
1	Bed Occupancy Rate (BOR)	Persen	71.08.00	72	73	RS Jiwa
2	Rata-rata lamanya pasien dirawat/ Average Length of stay (ALOS)	Hari	40	35	30	RS Jiwa
3	Indek Kepuasan Masyarakat	Persen	75	80	85	RS Jiwa
III	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	N/A	40,95	43,96	Dinas PUPR
2	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	7,14	10	11,25	Dinas PUPR
3	Persentase Peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	Persen	N/A	60,38	62,34	Dinas PUPR
4	Persentase Peningkatan perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob	Persen	N/A	13,5	13,56	Dinas PUPR
5	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	Persen	N/A	55,5	58,56	Dinas PUPR
6	Persentase Peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas Kabupaten/Kota	Persen	N/A	40.95	43.95	Dinas PUPR
7	Terbangunnya Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional/TPST	Unit	0	0	1	Dinas PUPR
8	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman	Persen	N/A	23.00	23.08	Dinas PUPR
9	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Persen	N/A	0	0	Dinas PUPR
10	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	Persen	N/A	0	0	Dinas PUPR



11	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	Persen	N/A	50	100	Dinas PUPR
12	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persen	N/A	10.06	13.06	Dinas PUPR
13	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	72,75	75.84	79.17.00	Dinas PUPR
14	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Persen	N/A	15,88	16,22	Dinas PUPR
15	Nilai Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Provinsi	Poin	62.69	68	70	Dinas PUPR
IV	Perumahan Rakyat					
1	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen	73,47	74.36.00	75.05.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persen	6	9	12	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	Persen	6	9	12	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4	Persentase luas kawasan kumuh 10-15 ha yang ditangani	Ha	57,6	19	19	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (IP)	Lokasi	8	8	8	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
V	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					
1	Indeks Penyelenggaran Trantibumlinmas	Persen	100	100	100	Satpol PP
2	Persentase penegakan hukum peraturan daerah dan kepala daerah	Persen	100	100	100	Satpol PP
3	Indeks Risiko Bencana	Poin	139,84	157,53	155,05	BPBD
4	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	100	100	Satpol PP
5	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas	Persen	100	100	100	Satpol PP
6	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Persen	N/A	N/A	100	Satpol PP
7	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persen	N/A	N/A	100	Satpol PP
9	Persentase Penanganan Pra bencana	Persen	6,1	9,1	15,1	BPBD
10	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Persen	70	75	82	BPBD



11	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persen	6,1	9,1	27,3	BPBD
12	Persentase kabupaten/kota dengan RPB (Rencana Penanggulangan Bencana) aktif	Persen	6,1	15,1	45,4	BPBD
13	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Laporan	N/A	N/A	4	Satpol PP
14	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Laporan	N/A	N/A	4	Satpol PP
VI	Sosial					
1	Indeks Kesejahteraan Sosial	Point	56,09	56,09	56,59	Dinas Sosial
2	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial	Persen	100	100	100	Dinas Sosial
3	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	Persen	100	100	100	Dinas Sosial
4	Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	Persen	91	92	92,5	Dinas Sosial
5	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	persen	10	12	14	Dinas Sosial
6	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	persen	5	5	5	Dinas Sosial
7	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan	orang	75	80	85	Dinas Sosial
8	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	persen	100	100	100	Dinas Sosial



9	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	persen	100	100	100	Dinas Sosial
10	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	persen	100	100	100	Dinas Sosial
11	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	persen	100	100	100	Dinas Sosial
12	Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	persen	100	100	100	Dinas Sosial
13	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	persen	100	100	100	Dinas Sosial
14	Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas	Poin	37,92	38,42	42,64	Dinas Sosial
15	Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	Poin	59,17	59,67	62,37	Dinas Sosial
16	Indeks Peranan Sosial	Poin	50,5	51	52	
17	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	persen	0,37	0,38	0,39	Dinas Sosial
18	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	persen	0,37	0,38	0,39	Dinas Sosial
19	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	persen	100	100	100	Dinas Sosial
20	Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar	persen	59,5	60	61	Dinas Sosial
21	Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi	persen	42,5	43	44	Dinas Sosial
22	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	persen	2,77	3,27	6,54	Dinas Sosial
23	Persentase Korban Bencana alam, sosial dan/ atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	persen	100	100	100	Dinas Sosial
24	Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	persen	100	100	100	Dinas Sosial
25	Persentase Korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial	persen	100	100	100	Dinas Sosial



26	Persentase tanah makam pahlawan nasional yang terkelola dengan baik	persen	100	100	100	Dinas Sosial
VII	Tenaga Kerja					
1	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta/Orang	81.898.862,98	84.331.740,97	86.836.889,75	Dinas Ketenagakerjaan
2	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah tinggi	Persen	N/A	71,1	72,47	Dinas Ketenagakerjaan
3	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen	49.59.00	51	53,25	Dinas Ketenagakerjaan
4	Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kab/kota/provinsi	Unit	9	14	19	Dinas Ketenagakerjaan
5	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	Persen	41,93	43	44,85	Dinas Ketenagakerjaan
6	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	Persen	39,39	100	100	Dinas Ketenagakerjaan
7	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	Persen	0,025	0,025	0,026	Dinas Ketenagakerjaan
8	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Persen	49,85	51,76	53,53	Dinas Ketenagakerjaan
9	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)	Persen	67,31	67,5	67,75	Dinas Ketenagakerjaan
10	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang menerapkan perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	orang	455.287	503.287	551.287	Dinas Ketenagakerjaan
11	Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	orang	2.100.000	2.200.000	2.300.000	Dinas Ketenagakerjaan
12	Persentase Penduduk Bersertifikat Keahlian	Persen	38,84	39,64	40,44	Dinas Ketenagakerjaan
13	Persentase Pekerja Informal	Persen	57,35	56,95	56,55	Dinas Ketenagakerjaan
14	Persentase Kepemilikan NPWP	Persen	42,65	43,82	44,72	Dinas Ketenagakerjaan
15	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	Persen	59,7	60	62	Dinas Ketenagakerjaan
VIII	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	91,5	91,59	91,71	Dinas P3AKB
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Persen	0,399	0,395	0,39	Dinas P3AKB
3	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Poin	62,5	63,7	64,9	Dinas P3AKB
4	Persentase Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	Persen	1	2	2	Dinas P3AKB



5	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persen	12	17	37	Dinas P3AKB
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Persen	61,72	63,65	65,57	Dinas P3AKB
7	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	82	83	85	Dinas P3AKB
8	rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.00 penduduk perempuan)	per 100.000	68,5	68,75	69,95	Dinas P3AKB
9	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	unit	2.66:2.66	2,66	02.07	Dinas P3AKB
10	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	Persen	1	2	2	Dinas P3AKB
11	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Poin/skor	12	17	37	Dinas P3AKB
12	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	61,72	63,65	65,57	Dinas P3AKB
13	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Poin/skor	82	83	85	Dinas P3AKB
14	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	per 10.000	68,5	68,75	69,95	Dinas P3AKB
XI	Pangan					
1	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Pravelence of Undermourishment)	Persen	7,54	7,2	6,87	Dinas Ketahanan Pangan, TPH
2	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	77,49	77,88	78,26	Dinas Ketahanan Pangan, TPH
3	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Persen	5,24	10	11	Dinas Ketahanan Pangan, TPH
4	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	89,16	90,05	90,95	Dinas Ketahanan Pangan, TPH
5	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Persen	10	9	8	Dinas Ketahanan Pangan, TPH
6	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persen	91,5	92	92,5	Dinas Ketahanan Pangan, TPH
X	Pertanahan					
1	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu	Persen	0	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan melalui Mediasi	Persen	0	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



3	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persen	0	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persen	0	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan	Persen	0	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola	Persen	0	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
7	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah Disesuaikan dengan konteks daerah	Persen	0	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
XI	Lingkungan Hidup					
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	73,96	77,2	77,37	Dinas LH dan Kehutanan
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	61,09	75,8	76	Dinas LH dan Kehutanan
3	Indeks kualitas Udara (IKU)	Poin	92,26	82,2	82,4	Dinas LH dan Kehutanan
4	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	N/A	16	19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	N/A	45	49,75	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Persen	N/A	100	100	Dinas LH dan Kehutanan
7	Persentase RTH	Persen	N/A	0	10	Dinas LH dan Kehutanan
8	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Persen	91,67	76	76	Dinas LH dan Kehutanan
9	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	Persen	67,45	69	71	Dinas LH dan Kehutanan
10	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persen	N/A	100	100	Dinas LH dan Kehutanan
11	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persen	92,5	100	100	Dinas LH dan Kehutanan
12	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persen	66,67	67	68	Dinas LH dan Kehutanan
13	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Poin	31,14	40	47,56	Dinas LH dan Kehutanan
XII	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					



1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Poin	N/A	0,76	0,8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
2	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Persen	7,27	10	15	Dinas PMD, Kependudukan dan Pencatatan sipil
3	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persen	46,86	50	55	Dinas PMD, Kependudukan dan Pencatatan sipil
4	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	100	100	100	Dinas PMD, Kependudukan dan Pencatatan sipil
5	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	95,49	96,2	97	Dinas PMD, Kependudukan dan Pencatatan sipil
6	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	100	100	100	Dinas PMD, Kependudukan dan Pencatatan sipil
7	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	100	100	100	Dinas PMD, Kependudukan dan Pencatatan sipil
8	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Persen	70	75	75	Dinas PMD, Kependudukan dan Pencatatan sipil
9	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persen	100	100	100	Dinas PMD, Kependudukan dan Pencatatan sipil
XIII	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
1	Persentase Desa Mandiri	Persen	3,1	8,44	8,56	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
2	Indeks Desa	Poin	0,6437	0,6671	0,6799	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
3	Persentase Fasilitas Penataan Desa	Persen	100	100	100	Dinas PMD, Kependudukan dan Pencatatan sipil
4	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	Persen	100	100	100	Dinas PMD, Kependudukan dan Pencatatan sipil
5	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persen	N/A	0,0094	0,0094	
6	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa	Persen	N/A	0,0369	0,0369	Dinas PMD, Kependudukan dan Pencatatan sipil
7	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persen	N/A	0,0243	0,0243	Dinas PMD, Kependudukan dan Pencatatan sipil



8	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Persen	N/A	0,0243	0,0243	Dinas PMD, Kependudukan dan Pencatatan sipil
9	Rate Nett Recent Migrasi		-0,49	-0,49	-0,49	Dinas PMD, Kependudukan dan Pencatatan sipil
XIV	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Poin/skor	60,2	61,32	62,49	Dinas P3AKB
2	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Poin	66,12	67,21	68,25	Dinas P3AKB
3	Indeks pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Poin/skor	69,79	71,04	71,96	Dinas P3AKB
4	Angka Kelahiran Total (Total Fertility rate/TFR)	Poin	2,36	2,35	2,34	Dinas P3AKB
5	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility rate (ASFR 15-19)	Angka	17,3	17,31	17,41	Dinas P3AKB
6	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas dan Mandiri	Persen	54,03	54,96	55,86	Dinas P3AKB
7	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	17,65	16,99	16,33	Dinas P3AKB
8	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi menurut Alat/ Cara KB Modern	Persen	73,79	75,3	76,67	Dinas P3AKB
9	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	52,1	54,3	56,9	Dinas P3AKB
10	Persentase kehamilan yang tidak direncanakan (PKTD)	Persen	13,69	13,13	12,61	Dinas P3AKB
11	Presentase Keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	Persen	15	20	25	Dinas P3AKB
12	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Poin	81,32	82,79	84,14	Dinas P3AKB
13	Indeks Lansia Berdaya	Poin	60,73	61,79	62,81	Dinas P3AKB
XV	Perhubungan					
1	Rasio konektivitas	Poin	76,59	79,28	81,3	Dinas Perhubungan
2	Konektivitas Darat	Persen	75,13	77,06	78,99	Dinas Perhubungan
3	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Persen	37,55	38,94	50,92	Dinas Perhubungan
4	Konektivitas Laut	Persen	80	84,44	86,67	Dinas Perhubungan
5	Cakupan perlintasan kereta api yang ditangani	Persen	12,5	25	37,5	Dinas Perhubungan
XVI	Komunikasi dan Informatika					



1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	3,86	3,89	3,92	Dinas Kominfo
2	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persen	75	76	77	Dinas Kominfo
3	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	Poin	N/A	50	51	Dinas Kominfo
4	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	1,8	2	2,2	Dinas Kominfo
5	Indeks SPBE (terkait keamanan)	Angka	455	455	470	Dinas Kominfo
6	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan komunikasi	Poin/Skor	6,04	6	6,23	Dinas Kominfo
7	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	Persen	N/A	77	79	Dinas Kominfo
XVII	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
1	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	Persen	N/A	46,51	48	Dinas Koperasi, UKM
2	Rasio Volume Usaha koperasi terhadap PDRB	Persen	N/A	0,79	0,79	Dinas Koperasi, UKM
3	Proporsi Jumlah UKM terhadap UMKM	Persen	0,35	0,48	0,55	Dinas Koperasi, UKM
4	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	2,86	3	3,28	Dinas Koperasi, UKM
5	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal	Sertifikat	68.342	78.161	78.391	Dinas Koperasi, UKM
6	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persen	4,61	4,82	5,07	Dinas Koperasi, UKM
7	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persen	1,38	1,87	2,54	Dinas Koperasi, UKM
8	Persentase Koperasi Aktif	Persen	40,93	41,87	42,91	Dinas Koperasi, UKM
9	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	Persen	0,33	0,81	1,25	Dinas Koperasi, UKM
10	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persen	6,26	7,43	0,38125	Dinas Koperasi, UKM
11	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persen	15,95	17,37	19,51	Dinas Koperasi, UKM
12	Pertumbuhan Wirausaha	Persen	0,02	0,03	0,04	Dinas Koperasi, UKM
13	Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor	Persen	1,51	1,66	1,8	Dinas Koperasi, UKM
14	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	Persen	25,48	26,61	27,71	Dinas Koperasi, UKM
15	Proporsi jumlah UKM non pertanian pada Level Provinsi (%)	Persen	N/A	10,66-10,81	10,67-10,82	Dinas Koperasi, UKM
XVIII	Penanaman Modal					
1	Persentase Peningkatan Investasi	Persen	23,61	25	50	Dinas PMPTSP
2	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	28,65	29,7	29,75	Dinas PMPTSP



3	Realisasi Total terhadap target Investasi (RPJMD)	Persen	N/A	100	100	Dinas PMPTSP
4	Realisasi Total terhadap target Investasi (BKPM)	Persen	N/A	85	85	Dinas PMPTSP
5	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Persen	N/A	53,5	54	Dinas PMPTSP
6	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persen	N/A	100	100	Dinas PMPTSP
7	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Persen	N/A	100	100	Dinas PMPTSP
8	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persen	N/A	100	100	Dinas PMPTSP
9	Persentase kerjasama penanaman Modal yang ditindaklanjuti	Persen	N/A	100	100	Dinas PMPTSP
XIX	Kepemudaan dan Olahraga					
1	Indeks Partisipasi Olahraga	Poin/skor	N/A	0,275	0,288	Dinas Kepemudaan dan keolahragaan
2	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Poin/skor	56,33	58,5	60,7	Dinas Kepemudaan dan keolahragaan
3	Rasio Wirausaha pemuda	Persen	N/A	0	1,5890478	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
4	Persentase Atlet yang masuk Pelatnas	Persen	N/A	12	15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
5	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam kepramukaan	Persen	N/A	0	0,0024565	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
XX	Urusan Statistik					
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	1,8	2	2,2	Dinas Kominfo
XXI	Urusan Persandian					
1	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	Persen	N/A	40	42	Dinas Kominfo
XXII	Kebudayaan					
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin/Skor	N/A	55,44 - 55,48	55,98-56,05	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Persen	N/A	50	60	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Persen	N/A	10	15	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	Persen	N/A	15	15	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



5	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persen	N/A	5	8	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
6	Persentase kunjungan wisatawan ke museum	Persen	N/A	97,93	97,99	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
7	Persentase pelaku industri perfilman yang tervalidasi	Persen	N/A	5	10	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
XXIII	Perpustakaan					
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	poin	62.39.00	69,02	69,5	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2	Nilai tingkat kegemaran membaca Masyarakat	Nilai/poin	68,57	70	71	Dinas Perpustakaan dan Arsip
3	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dimiliki	persen	N/A	20	25	Dinas Perpustakaan dan Arsip
4	Persentase Pustakawan yang Memperoleh Sertifikasi Profesi dibidang Perpustakaan	persen	N/A	25	30	Dinas Perpustakaan dan Arsip
XXIV	Kearsipan					
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	poin	72,97	73,5	74	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2	Tingkat ketersediaan arsip	persen	82,78	84	85	Dinas Perpustakaan dan Arsip
3	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	persen	N/A	10	15	Dinas Perpustakaan dan Arsip
4	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	persen	N/A	1	2	Dinas Perpustakaan dan Arsip
5	Persentase SDM Bidang Kearsipan yang Ditingkatkan kompetensinya	persen	N/A	10	15	Dinas Perpustakaan dan Arsip
XXV	Kelautan Perikanan					
1	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Persen	101,32	101,35	102,54	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Persen	97	98	98	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	Persen	1,67	01.06	01.07	Dinas Kelautan dan Perikanan
4	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	399.941	395427	410213	Dinas Kelautan dan Perikanan
5	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	332.310,14	340.000	342.279,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
6	Luasan Kawasan Konservasi	Hektar	210.404	27.343,41	7703,41	Dinas Kelautan dan Perikanan
7	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Tahun	51,24	35,01	35,31	Dinas Kelautan dan Perikanan
XXVI	Pariwisata					
1	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan,Minum	Persen	N/A	2,42	2,5	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



2	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	Persen	N/A	5,45	5,5	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	ribu orang	250,41	300-350	365	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan mancanegara	Persen	26,32	31,78	7,58	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
5	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Nusantara	Persen	54,88	23,38	23,5	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
6	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Parawisata	Persen	16,67	14,29	12,5	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
7	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Persen	N/A	14,97	31,97	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
8	Persentase Pelaku Parawisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Persen	N/A	35,9	48,72	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
XXVII	Urusan Pertanian					
1	NTP Tanaman Pangan	Poin	100,25	100,26	100,27	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
2	NTP Tanaman Hortikultura	Poin	92,81	92,82	92,83	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
3	Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTPR)	Poin	182,87	183,05	183,24	Dinas Perkebunan dan Peternakan
4	Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT)	Poin	95,4	95,5	95,59	Dinas Perkebunan dan Peternakan
5	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat	Persen	2,55	2,57	2,62	Dinas Perkebunan dan Peternakan
6	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persen	1,77	2,02	2,05	Dinas Perkebunan dan Peternakan
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan					
7	Padi	Ton GKG	3.923.928	3.974.939	4.026.613	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
8	Jagung	Ton	1.948.641	1.973.973	1.999.635	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
9	Kedelai	Ton	9.082	9.200	9.320	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
	Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan			-	-	



10	Padi	Ton/ Ha	5,32	5,34	5,36	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
11	Jagung	Ton/ Ha	6,25	6,27	6,29	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
12	Kedelai	Ton/ Ha	1,38	1,39	1,4	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
	Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura					
13	Bawang Merah	Ton Umbi Basah	58.070	58.825	59.590	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
14	Cabai	Ton	194.593	197.123	199.685	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
15	Sayur-sayuran	Ton	1.330.765	1.348.065	1.365.590	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
16	Buah-Buahan	Ton	1.531.043	1.550.947	1.571.109	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
	Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura					Dinas Perkebunan dan Peternakan
17	Bawang Merah	Ton/ Ha	15,04	15,06	15,08	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
18	Cabai	Ton/ Ha	11,68	11,7	11,72	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
19	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Persen	-	5	5	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
20	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Persen	100	95	96	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
21	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	Persen	100	95	96	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
22	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	Persen	4,2	4,25	4,3	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
23	Persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi	Persen	2	3	4	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman



						Pangan dan Hortikultura
24	Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat	Ton	220.289,15	226.778,78	237.524,28	Dinas Perkebunan dan Peternakan
25	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Ton	15.071,70	17.464,66	18.100,49	Dinas Perkebunan dan Peternakan
26	Cakupan Luas Lahan yang Difasilitasi Ketersediaan Prasarana Perkebunan	Ha	308	308	308	Dinas Perkebunan dan Peternakan
27	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	Persen	0,55	0,66	0,67	Dinas Perkebunan dan Peternakan
28	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Persen	0,77	0,39	0,41	Dinas Perkebunan dan Peternakan
29	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki sertifikat NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Persen	89	90	90	Dinas Perkebunan dan Peternakan
30	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Persen	0,15	0,23	0,25	Dinas Perkebunan dan Peternakan
31	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	Persen	0,53	0,27	0,34	Dinas Perkebunan dan Peternakan
32	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	Persen	100	100	100	Dinas Perkebunan dan Peternakan
33	Persentase Kelompok Tani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Persen	0,58	0,47	0,56	Dinas Perkebunan dan Peternakan
XXVIII	Urusan Kehutanan					
1	Persentase Tutupan Lahan	Persen	N/A	20	20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	Indeks Keanekaragaman Hayati	Poin	N/A	N/A	0,567	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	Persen	0,76	0,76	0,76	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Persen	N/A	2	2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	Persen	N/A	5	5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	Persen	N/A	20	20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
XXIX	Urusan Energi dan SDM					
1	Porsi EBT dalam Bauran Energi	Persen	42,04	43	44	Dinas Perindag dan ESDM
2	Intensitas energi primer	SBM/Rp.Milyar	81	79,4	77,64	Dinas Perindag dan ESDM



3	Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	ha	0	50000	50000	Dinas Perindag dan ESDM
4	Rasio Elektrifikasi	Persen	99,99	100	100	Dinas Perindag dan ESDM
5	Persentase Usaha Tambang Sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar peraturan	Persen	96,3	66,56	71,35	Dinas Perindag dan ESDM
6	Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT	Rumah Tangga		121	124	Dinas Perindag dan ESDM
7	Konsumsi listrik per kapita	kwh/kapita	1158,97	1184,21	1213,4	Dinas Perindag dan ESDM
XXX	Urusan Perdagangan					
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	18,79	19,03	19,2	Dinas Perindag dan ESDM
2	Ekspor Barang dan Jasa	Persen	12,56	16,45-16,54	16,62-16,76	Dinas Perindag dan ESDM
3	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Persen	0	100	100	Dinas Perindag dan ESDM
4	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Persen	0	45	50	Dinas Perindag dan ESDM
5	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persen	4,17	4,03	4,03	Dinas Perindag dan ESDM
6	Nilai Ekspor Barang	Rp Miliar	153.000	182.790,80	191.207	Dinas Perindag dan ESDM
7	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	Persen	77,78	81,01	84,24	Dinas Perindag dan ESDM
8	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan	Persen	0	100	100	Dinas Perindag dan ESDM
XXXI	Urusan Perindustrian					
1	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Persen	18,36	18,66	18,96	Dinas Perindag dan ESDM
2	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Provinsi	Persen	4,65	4,7	4,75	Dinas Perindag dan ESDM
3	Persentase Realisasi Investasi Persentase Sektor Industri dan Kawasan Industri	Persen	28,43	28,43	32,61	Dinas Perindag dan ESDM
4	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Persen	100	100	100	Dinas Perindag dan ESDM
5	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	Persen	125	125	125	Dinas Perindag dan ESDM
XXXII	Urusan Transmigrasi					
1	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	Persen	18,99	18,99	18,99	Dinas Ketenagakerjaan
2	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	Persen	20,25	20,25	17,72	Dinas Ketenagakerjaan
XXXIII	Unsur Sekretariat Daerah					



1	Indeks Pelayanan Publik	Poin/Skor	N/A	3,91(B)	3,92(B)	Biro Organisasi
2	Total Kredit/PDRB	Persen	N/A	25,7	27,15	Sekretariat Daerah
3	Tingkat Inflasi	Persen	2,12	2,5±1	2,5±1	Sekretariat Daerah
4	Nilai Capaian Pelaporan Kinerja (SAKIP)	Poin	N/A	72,00(BB)	72,5	Sekretariat Daerah
Biro Organisasi						
1	Jumlah Kerja Sama Provinsi	Jumlah Kerja sama	N/A	20	20	Biro Organisasi
2	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	Poin/Skor	N/A	82	84	Biro Organisasi
3	Nilai capaian pelaporan kinerja	Predikat	N/A	11,46	11,47	Biro Organisasi
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	N/A	89,72	89,73	Biro Organisasi
5	Nilai Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Persen	N/A	88,5	88,7	Biro Organisasi
6	Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persen	100	100	100	Biro Organisasi
7	Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persen	100	100	100	Biro Organisasi
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah						
1	Persentase Kerja sama Daerah	Persen	100	100	100	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
2	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Nilai/Skor	2,83	2,9	2,95	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Biro Kesejahteraan Rakyat						
1	Indeks Zakat Nasional	Poin	0,44	0,46	0,48	Biro Kesejahteraan Rakyat
2	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	Persen	75	75	75	Biro Kesejahteraan Rakyat
3	Persentase Proposal Hibah yang ditindaklanjuti	Persen	75	75	75	Biro Kesejahteraan Rakyat
4	Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi	Persen	31,63	31,85	32,02	Biro Kesejahteraan Rakyat
Biro Hukum						
1	Indeks Reformasi Hukum	Poin/Skor	85,9	86	86	Biro Hukum
2	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	Persen	86,2	86,5	86,8	Biro Hukum
3	Jumlah Penyelesaian Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tepat Waktu,	Produk Hukum	N/A	980	1020	Biro Hukum
4	Jumlah Produk Hukum Daerah yang diinformasikan,	Produk Hukum	N/A	30	50	Biro Hukum
5	Jumlah Penanganan Perkara Hukum di Pengadilan,	Perkara	N/A	25	35	Biro Hukum
6	Jumlah Penanganan Sengketa di Luar Pengadilan dan Perlindungan HAM.	Kegiatan	N/A	25	33	Biro Hukum



7	Persentase penyelesaian penyusunan rancangan produk hukum daerah tepat waktu	Persen	N/A	100	100	Biro Hukum
Biro Perekonomian						
1	Return on Asset (ROA) BUMD	Persen	N/A	1,24	1,4225	Biro Perekonomian
2	Aset Perbankan Syariah/PDRB	Persen	0,143055556	0,149305556	03.06	Biro Perekonomian
3	Aset Dana Pensiun/PDRB	Persen	N/A	0,13	0,1325	Biro Perekonomian
4	Nilai Transaksi Saham per Kapita per Provinsi	Rp. Miliar	N/A	8.103.064	8.677.816	Biro Perekonomian
5	Inklusi Keuangan	Persen	N/A	97,52	97,61	Biro Perekonomian
6	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	Persen	N/A	28,77	30,0575	Biro Perekonomian
7	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional	Persen	N/A	2,26	2,28	Biro Perekonomian
8	Efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan Pembangunan	Persen	90	90	92	Biro Perekonomian
9	Persentase kebijakan Lingkup Perekonomian yang di implementasikan	Persen		100	100	Biro Perekonomian
10	Persentase pembinaan tingkat kesehatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Persen		50	57	Biro Perekonomian
11	Persentase usulan dokumen UPTD untuk menjadi BLUD yang ditindaklanjuti	Persen		60	80	Biro Perekonomian
Biro Pengadaan Barang dan Jasa						
1	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Nilai	68,66	85	85	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
2	Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Skor	10,09	25	27	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
3	Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Skor	18,57	21	22	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4	Tingkat Kematangan KPBJ	Skor	40	40	40	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Biro Administrasi Pembangunan						
1	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persen	100	100	100	Biro Administrasi Pembangunan
2	Jumlah kebijakan yang di tetapkan untuk Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	dokumen		20	20	Biro Administrasi Pembangunan
3	Persentase realisasi fisik dan non fisik pada perangkat daerah yang disampaikan melalui aplikasi PRP2 Sumut	Persen		95	95	Biro Administrasi Pembangunan
Biro Umum						
1	Persentase kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa	Persen	100	100	100	Biro Umum



2	Persentase Kontribusi PAD dari Pemanfaatan Pelayanan Gedung dan Mess Pemprov	Persen	80,29	100	100	Biro Umum
3	Persentase pelayanan kerumahtanggaan pimpinan daerah	Persen	100	100	100	Biro Umum
Biro Administrasi Pimpinan						
1	Persentase fasilitasi materi pimpinan	Persen	100	100	100	Biro administrasi Pimpinan
2	Persentase pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	Biro administrasi Pimpinan
XXXIV Unsur Sekretariat DPRD						
1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Persen		90	90	Sekretariat DPRD
2	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Persen	45	100	100	Sekretariat DPRD
3	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Persen	NA	50	50	Sekretariat DPRD
4	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persen	NA	100	100	Sekretariat DPRD
XXXV Unsur Perencanaan						
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Poin	90,4	90,50 – 92,00	92,55 – 93,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
2	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	N/A	3,4	3,49	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
3	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persen	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
4	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persen	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
5	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
6	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
7	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persen	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
XXXVI Unsur Keuangan						
1	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	BKAD



2	Persentase Belanja Pegawai di luar tunjangan Guru yang dialokasi kan melalui TKD (Transfer Keuangan Daerah)	Persen	23	23	23	BKAD
3	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persen	38	38	38	BKAD
4	Persentase Realisasi Anggaran Belanja urusan wajib pelayanan dasar	Persen	92	92	92	BKAD
5	Persentase Penurunan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)	Persen	1	1	0,8	BKAD
6	Persentase Laporan Keuangan tepat Waktu	Persen	100	100	100	BKAD
7	Persentase Keputusan Gubernur tentang Evaluasi APBD/Perubahan APBD/ Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100	BKAD
8	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persen	12	12	12	BKAD
9	Persentase Tanah Milik Pemprovsu yang disertifikasi	Persen	84,42	84,42	84,42	BKAD
10	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Persen	60,43	60,93	61,93	Bapenda
11	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	N/A	1,37	1,42	Bapenda
XXXVII	Unsur Kepegawaian					
1	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	79,44	79,94	80,15	Badan Kepegawaian
2	Indeks Sistem Merit	Poin	343,5	343,5	344	Badan Kepegawaian
3	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	Persen	100	80	80	Badan Kepegawaian
4	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persen	6	7	8	Badan Kepegawaian
5	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	Persen	78	80	81	Badan Kepegawaian
6	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai baik	Persen	89	90	91	Badan Kepegawaian
XXXVIII	Unsur Pendidikan dan Pelatihan					
1	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Poin	NA	29,8	30,05	BPSDM
2	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	Persen	N/A	3,88	11,11	BPSDM
3	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	Persen	N/A	6,01	11,27	BPSDM



4	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	Persen	N/A	4,76	9,52	BPSDM
5	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persen	N/A	5,83	13,88	BPSDM
XXXIX	Unsur Penelitian dan Pengembangan					
1	Indeks Inovasi Daerah	Poin/Skor	59,93	57,50-60,01	58,69-60,76	Bappelitbang
2	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	Persen	N/A	100	100	Bappelitbang
3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	70,6	70,80	71,00	Bappelitbang
4	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan Implementasi Pembangunan	Persen	100	100	100	Bappelitbang
5	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	Persen	100	100	100	Bappelitbang
6	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	Persen	100	100	100	Bappelitbang
7	Persentase Fasilitas, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	Persen	100	100	100	Bappelitbang
XL	Unsur Pengawasan					
1	Indeks integritas Nasional	Poin/Skor	N/A	66,78	67,46	Inspektorat
2	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Level 3 Terdefinisi (3,0 ≤ skor < 4,0)	Level 3 Terdefinisi (3,0 ≤ skor < 4,0)	Level 3 Terdefinisi (3,0 ≤ skor < 4,0)	Inspektorat
3	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persen	80,74	82	83	Inspektorat
4	Level Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Level 3 Terdefinisi (3,0 ≤ skor < 4,0)	Level 3 Terdefinisi (3,0 ≤ skor < 4,0)	Level 3 Terdefinisi (3,0 ≤ skor < 4,0)	Inspektorat
5	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Level 3 (Terintegrasi)	Level 3 (Terintegrasi)	Level 3 (Terintegrasi)	Inspektorat
6	Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Persen	80,74	82	83	Inspektorat



7	Persentase Penyelesaian Tindakanlanjutan Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Persen	100	100	100	Inspektorat
8	Persentase Penyelesaian Tindakanlanjutan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Level	88,46	898	90	Inspektorat
9	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persen	83,47	84	85	Inspektorat
10	Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikat Keahlian Khusus Bidang Audit	Persen	72,69	73	74	Inspektorat
XLI	Unsur Penghubung					
1	Persentase Program Pelayanan Penghubung	Persen	100	100	100	Badan Penghubung
XLII	Unsur Pemerintahan Umum					
1	Indeks Demokrasi Indonesia	Poin/Skor	80,19	80,5 - 82,46	83,08 - 84,08	Badan Kesbangpol
2	Indeks Harmoni Indonesia	Poin/Skor	N/A	-	63	Badan Kesbangpol
3	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin/Skor	80,88	81,2	81,5	Badan Kesbangpol
4	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	N/A	68	72	Badan Kesbangpol
5	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Persen	N/A	100	100	Badan Kesbangpol
6	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	N/A	20	20	Badan Kesbangpol
7	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Persen	N/A	100	100	Badan Kesbangpol
8	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persen	N/A	100	100	Badan Kesbangpol

Sumber : Bappelitbang Provsu, 2025



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang merupakan pelaksanaan tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029. Program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2026 diarahkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029. RKPD Tahun 2026 memuat program dan kegiatan pembangunan yang menjadi pedoman perangkat daerah dalam rangka mewujudkan sasaran dan target pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintah daerah.

RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 memperhatikan kaidah pelaksanaan meliputi:

- Konsistensi perencanaan dan pendanaan, disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan rencananya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
- Sistem Pengendalian yang dilakukan meliputi: pengendalian perencanaan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan, dan pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RKPD.

Program dan kegiatan yang termuat dalam RKPD Tahun 2026 dalam pelaksanaannya mempertimbangkan seluruh potensi dan pembiayaan yang tersedia baik dari pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat.

Pengendalian dalam perencanaan pembangunan daerah melalui pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pengendalian didukung oleh sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Sistem elektronik terpadu juga diintegrasikan dengan tata kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti (*evidence-based planning*). Manajemen risiko merupakan bagian integral dari proses perencanaan pembangunan daerah sehingga dapat teridentifikasi, teranalisis, dan mengelola risiko secara sistematis dan terstruktur yang merujuk kepada Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN). MRPN adalah kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan, mengendalikan dan mengelola risiko pada program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan dan/atau jenis risiko tertentu yang bersifat lintas sektor yang bertujuan untuk meningkatkan pencapaian sasaran pembangunan nasional.

RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 disusun secara transparan, responsif, efisien, efektif, terukur, akuntabel, terpadu lintas sektor, inovatif berbasis pada riset dengan pendekatan *money follow programme priority* dan berprinsip pada pembangunan yang berkelanjutan. Dalam penyusunan rancangan KUA-PPAS, RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan arah kebijakan, prioritas pembangunan daerah serta plafon anggaran sementara yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2026. Selain itu RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 ini menjadi pedoman bagi

penyusunan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2026 dan serta menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan pembangunan lainnya termasuk masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan Provinsi Sumatera Utara sehingga nantinya perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Utara tersusun secara inklusif, berkelanjutan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya kami berharap sinergi berbagai pihak dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan.

GUBERNUR SUMATERA UTARA

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

APRILLA H. SIREGAR
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 19690421 199003 2 003

LAMPIRAN

The background of the page is an abstract composition of flowing, wavy lines in various shades of blue and white. The lines create a sense of movement and depth, with some areas appearing more saturated and others more ethereal. The overall effect is clean, modern, and professional.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SEKRETARIAT DPRD						553.035.514.770,00							547.471.749.131,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						553.035.514.770,00							547.471.749.131,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD						553.035.514.770,00							547.471.749.131,00	
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-				191.466.593.233,00						-	199.508.601.135,0	
	4.02.01.1.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	256.110.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	1.066.069.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	144.770.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		423.286.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				10 Dokumen	71.140.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		246.715.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	40.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		396.067.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	18.011.756.847,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	18.598.821.111,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				101 Orang/ Bulan	17.600.732.747,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		17.600.732.561,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				11 Dokumen	293.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		350.905.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				50 Dokumen	56.122.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		294.179.550,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				100 Dokumen	61.622.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		353.004.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	143.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	143.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	143.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		143.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	12.576.105.441,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	12.330.980.512,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	110.155.857,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		170.020.528,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1.683.874.265,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		1.882.843.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	8.031.085.319,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		8.837.484.784,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	134.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		225.376.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	2.616.690.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		1.215.255.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	919.296.340,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	6.250.681.713,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				8 Paket	819.746.340,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		1.428.128.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	99.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		4.822.552.913,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	28.362.420.230,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	26.309.174.690,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				4 Laporan	29.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		29.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	4.649.691.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		4.649.691.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	23.683.728.630,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		21.630.483.090,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	6.218.999.579,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	12.902.078.329,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				16 Unit	484.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		506.780.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				46 Unit	956.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		960.460.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4.778.249.579,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		11.434.838.329,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-			-	121.238.462.480,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	121.907.795.780,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				100 Orang/ Bulan	119.037.642.480,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		119.037.642.480,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				5 Paket	1.540.820.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.210.153.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				100 Orang	660.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		660.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	-		-		361.568.921.537,00						-	347.963.147.996,00	
	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	-	-			-	6.478.130.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	5.755.114.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda				12 Dokumen	5.978.130.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		5.255.114.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				5 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-			-	5.387.758.800,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	4.877.842.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				10 Dokumen	3.870.124.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		3.360.208.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1.517.634.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		1.517.634.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-			-	76.855.434.210,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	77.817.137.801,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				36 Dokumen	3.285.212.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		3.285.212.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli														
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				38 Orang	3.720.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		3.670.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				9 Orang	810.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		810.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.1.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				900 Dokumen	63.854.726.740,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		64.227.995.795,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD														
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				2 Dokumen	1.492.716.320,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.474.089.006,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				10 Dokumen	3.692.779.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		4.349.841.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-			-	242.969.218.554,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	243.671.434.195,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				60 Laporan	8.116.197.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		8.156.197.950,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses														
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				300 Dokumen	111.547.626.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		111.471.126.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05.0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah				1800 Orang	123.305.394.304,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		124.044.109.845,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-	-			-	1.158.574.050,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.278.548.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD															
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				10 Laporan	1.158.574.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.278.548.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	-	-			-	21.444.874.600,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	14.563.070.800,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD															
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				50 Dokumen	18.161.955.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		11.345.174.450,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah															
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				18 Dokumen	3.282.918.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.217.896.350,00	SEKRETARIAT DPRD	
	JUMLAH							553.035.514.710,00		547.471.749.131,00							

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KEPEGAWAIAN PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN KEPEGAWAIAN														
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
	5.03	KEPEGAWAIAN														
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-		-		33.795.262.464,00					-		34.611.551.003,00	
	5.03.01.1.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	15.500.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	185.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				14 Dokumen	15.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		185.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	21.979.580.810,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	22.109.291.003,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				127 Orang/ Bulan	21.792.140.810,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		21.892.131.003,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1200 Dokumen	187.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		217.160.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	614.400.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	905.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				244 Paket	331.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		355.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				65 Orang	229.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				250 Orang	53.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	3.291.766.041,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	2.795.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	61.455.216,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	817.851.805,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		950.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				45 Paket	594.145.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		850.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				13 Paket	153.910.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		95.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				20 Dokumen	15.444.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				420 Laporan	1.648.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		850.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	29.018.800,00			-	-	-	-	65.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	29.018.800,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		65.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	3.089.094.720,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	3.545.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				300 Laporan	2.130.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	971.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		960.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		65.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				10 Laporan	2.070.264.720,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		2.500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.122.606.224,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	1.210.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				28 Unit	39.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		35.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	422.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		350.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				45 Unit	99.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	561.726.224,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		750.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-			-	2.007.000.000,00						-	6.357.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	-			-	387.390.080,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	3.575.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK														
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1 Dokumen	54.100.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		85.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN				2 Laporan	299.290.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		800.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian														
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1100 Dokumen	24.000.080,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		85.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN														
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		2.500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		105.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	-	-			-	871.180.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	1.585.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah				550 Dokumen	22.300.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		85.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				7000 Laporan	34.980.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				350 Dokumen	813.900.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.350.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	-	-			-	848.616.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.542.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN														
			Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya				25 Orang	40.060.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		152.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				300 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola				15 Dokumen	611.800.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		755.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				45 Dokumen	27.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		105.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.03.0008	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional				30 Orang	24.000.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		45.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.03.0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional				25 Dokumen	33.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		120.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN														
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN				150 Laporan	26.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		95.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN														
			Jumlah Fungsional ASN yang Dibina				3200 Orang	84.956.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		120.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-			-	312.362.372,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	610.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				492 Dokumen	98.022.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		205.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				2650 Orang	145.510.372,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		195.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				200 Orang	53.470.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		125.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai														
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				50 Dokumen	15.360.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		85.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
		UPTD PUSAT ASESMEN KOMPETENSI														
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
	5.03	KEPEGAWAIAN														
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	1.578.155.928,00						-	3.797.260.000,00	
	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	52.560.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	52.260.000,00	UPTD PUSAT ASESMEN KOMPETENSI
	5.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				24 Dokumen	52.560.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		52.260.000,00	UPTD PUSAT ASESMEN KOMPETENSI
	5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	22.600.000,00			-	-	-	-	0,00	UPTD PUSAT ASESMEN KOMPETENSI
	5.03.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				200 Orang	22.600.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	UPTD PUSAT ASESMEN KOMPETENSI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	466.088.866,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	3.209.000.000,00	UPTD PUSAT ASESMEN KOMPETENSI
	5.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	10.774.126,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		14.000.000,00	UPTD PUSAT ASESMEN KOMPETENSI
	5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	304.999.300,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		3.000.000.000,00	UPTD PUSAT ASESMEN KOMPETENSI
	5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	150.315.440,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		195.000.000,00	UPTD PUSAT ASESMEN KOMPETENSI
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	868.480.400,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	250.000.000,00	UPTD PUSAT ASESMEN KOMPETENSI
	5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	198.736.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		250.000.000,00	UPTD PUSAT ASESMEN KOMPETENSI
	5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	669.744.400,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	UPTD PUSAT ASESMEN KOMPETENSI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	168.426.662,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	286.000.000,00	UPTD PUSAT ASESMEN KOMPETENSI
	5.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				4 Unit	49.008.550,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		56.000.000,00	UPTD PUSAT ASESMEN KOMPETENSI
	5.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	119.418.112,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		230.000.000,00	UPTD PUSAT ASESMEN KOMPETENSI
	J U M L A H							35.802.262.464,00							40.968.551.003,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						66.241.794.056,00							72.260.000.000,00	
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						66.241.794.056,00							72.260.000.000,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						66.241.794.056,00							72.260.000.000,00	
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	-			100 %	13.001.931.201,00					-		19.260.000.000,00	
	8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-			2 Dokumen	390.248.500,00			-	-	-	-	700.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	390.248.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		700.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban keuangan	-			1 Laporan	9.643.887.641,00			-	-	-	-	10.100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				47 Orang/ Bulan	8.410.238.009,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		9.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	971.989.632,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		1.100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	261.660.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan Kompetensi Aparatur	-			2 Orang	337.560.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	337.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	-			1 Laporan	2.738.128.134,00			-	-	-	-	3.470.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	94.065.270,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		110.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.242.038.240,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		1.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	399.834.224,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	178.949.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	46.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	776.741.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		1.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 %	2.216.802.976,00			-	-	-	-	2.550.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	19.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	774.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		900.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	1.422.732.976,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		1.600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	-			100 %	814.403.360,00			-	-	-	-	2.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				12 Unit	334.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				40 Unit	259.759.980,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		400.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				3 Unit	220.343.380,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		1.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	<i>Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa</i>	-			72 %	2.277.897.455,00						-	4.400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Masyarakat yang menerima Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-			1500 Sekolah	2.326.393.711,00			-	-	-	-	4.400.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				1 Dokumen	49.999.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				200 Orang	120.000.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun	-		300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka														
			Jumlah Paskibraka				75 Orang	2.006.393.661,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun	-		3.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	<i>Persentase Pendidikan Politik pada kader partai politik</i>	-			100 %	35.889.762.000,00					-		36.800.000.000,00	
	8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	<i>Jumlah Masyarakat yang menerima pendidikan politik</i>	-			400 Orang	35.549.954.300,00			-	-	-	-	36.800.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			<i>Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun</i>				1 Dokumen	22.830.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>				700 Orang	35.378.193.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun	-		36.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>				1 Laporan	148.931.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	<i>Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif</i>	-			20 %	5.402.912.850,00						-	4.600.000.000,00	
	8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	<i>Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang aktif</i>	-			20 Ormas	1.296.972.000,00			-	-	-	-	4.600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			<i>Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun</i>				1 Dokumen	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		4.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>				100 Orang	904.096.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>				1 Laporan	42.876.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	<i>Persentase Kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, Sosial, budaya dan fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika</i>	-			100 %	1.732.398.250,00						-	1.600.000.000,00	
	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	<i>Jumlah Sosialisasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika</i>	-			10 kegiatan	4.549.839.191,00			-	-	-	-	1.600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				2 Dokumen	650.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		1.200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				200 Orang	3.667.089.191,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				100 Orang	232.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		400.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	-			100 %	7.936.892.300,00						-	5.600.000.000,00	
	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Rencana Aksi daerah Penanganan Konflik yang dilaksanakan	-			8 Laporan	1.399.999.970,00			-	-	-	-	5.600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	154.817.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		400.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.06.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		400.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				100 Orang	342.607.970,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				100 Orang	138.790.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				1 Laporan	504.523.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		900.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi				2 Dokumen	59.262.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		3.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	J U M L A H							66.241.794.056,00							72.260.000.000,00		

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						3.061.742.584.401,00							4.299.984.054.140,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						3.061.742.584.401,00							4.299.984.054.140,00	
	5.02	KEUANGAN						3.061.742.584.401,00							4.299.984.054.140,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	50.587.487.422,00						-	25.940.465.352,00	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	168.741.250,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	94.800.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		5.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	9.800.250,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		5.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	9.800.250,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		5.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	9.800.250,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		5.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				4 Dokumen	47.040.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		57.040.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	9.800.250,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		5.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	62.500.250,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		12.760.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	21.909.564.841,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	18.566.390.101,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				106 Orang/ Bulan	21.398.004.841,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		18.446.390.101,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	474.600.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	18.480.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		10.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	18.480.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		10.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	13.080.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	10.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	13.080.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		10.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	512.600.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	394.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	148.500.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		64.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	112.800.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				106 Orang	153.300.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		80.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				300 Orang	98.000.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		50.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	4.830.675.621,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	1.882.438.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	45.621.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		10.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	1.116.661.796,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		50.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	26.160.125,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		20.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	648.537.700,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	460.000.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	29.995.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		30.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	171.500.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	2.049.700.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		972.438.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	282.500.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	1.285.088.280,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	808.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				5 Unit	400.000.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		388.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	78.949.500,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		20.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	806.138.780,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		400.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	4.494.064.717,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	3.886.837.251,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	12.000.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		10.144.914,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1.609.000.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		1.176.692.337,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	55.000.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2.818.064.717,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		2.600.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.372.599.500,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	850.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				10 Unit	321.738.500,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	224.161.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	558.500.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		170.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	268.200.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		230.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	-			-	3.022.969.387.040,00						-	4.269.260.027.552,00	
	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-			-	8.003.032.500,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	8.781.150.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	420.650.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		535.350.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	425.050.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		545.350.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD														
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				42 Dokumen	144.500.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		185.350.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.1.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi</i>				42 Dokumen	171.250.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		215.600.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD														
			<i>Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi</i>				1 Dokumen	147.850.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		175.600.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi</i>				1 Dokumen	156.600.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		210.600.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD</i>				2 Dokumen	2.219.652.250,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		2.495.800.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
			<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD</i>				2 Dokumen	3.625.116.250,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		3.481.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan</i>				1 Dokumen	99.988.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		66.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah</i>				1 Dokumen	479.873.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		435.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				1 Dokumen	112.503.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		435.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.389.883.332,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	2.556.549.632,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota				33 Laporan	716.204.732,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		716.549.632,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota				33 Laporan	64.817.900,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		400.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				33 Laporan	229.082.800,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		420.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi				15 Dokumen	88.287.900,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		270.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan				2 Laporan	191.800.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		450.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.1.02.0008	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota				33 Dokumen	99.690.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-			-	3.224.160.236,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	3.320.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				49 Dokumen	308.999.260,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		560.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				1 Dokumen	40.000.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				12 Dokumen	435.306.108,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		540.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				14 Laporan	564.569.608,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		530.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		40.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				1 Dokumen	1.296.881.456,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		1.100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan														
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				4 Dokumen	548.403.804,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-			-	3.645.603.128,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	3.250.122.920,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				7 Dokumen	565.342.064,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		394.476.960,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				7 Laporan	812.604.064,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		523.011.960,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				1 Laporan	381.006.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		179.754.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi														
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi				4 Dokumen	785.596.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		520.610.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				1 Dokumen	189.952.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		303.805.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	480.318.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		560.040.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi				66 Orang	430.785.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		768.425.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-			-	3.005.527.229.102,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	4.249.692.615.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah				1 Laporan	263.516.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		192.615.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	125.357.925.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		500.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	300.186.989.291,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		349.500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi				1 Laporan	2.579.718.798.811,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.400.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-	-			-	1.179.478.742,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.659.590.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.06.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	1.179.478.742,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.659.590.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-			-	1.842.625.350,00						-	4.231.561.236,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-			-	1.842.625.350,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	4.231.561.236,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga														
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	350.378.736,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		342.449.736,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	30.560.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		13.290.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	144.224.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		57.371.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	27.662.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		8.450.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				42 Laporan	1.253.908.352,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.130.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				42 Laporan	313.894.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		350.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	622.766.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		600.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	541.374.064,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		350.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				42 Laporan	81.490.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	436.192.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		480.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				42 Laporan	134.270.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				42 Laporan	156.078.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				33 Orang	93.986.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	J U M L A H							3.061.742.584.401,00							4.299.984.054.140,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						28.646.754.077,00							28.931.621.270,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						28.646.754.077,00							28.931.621.270,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						28.646.754.077,00							28.931.621.270,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	25.880.491.796,00						-	26.411.621.270,00	
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	315.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		315.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	10.909.128.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	11.411.870.400,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/ Bulan	10.718.448.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		11.254.370.400,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		21.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		21.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	190.680.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		21.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		21.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				0 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		52.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		21.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	345.561.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	157.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	345.561.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		157.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	9.989.247.280,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		10.799.750.870,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.965.834.375,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	1.575.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				9 Unit	715.830.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		262.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		577.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	104.740.560,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		525.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	1.145.263.815,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		210.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-	-			-	2.766.262.281,00						-	2.520.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	-	-			-	139.790.778,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	525.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi														
			Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan				0 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)														
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota				500 Orang	139.790.778,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		525.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-			-	449.572.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	808.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				2 Kawasan	116.882.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		52.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0022	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana														
			Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalkan				0 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana														
			Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana				500 Orang	113.408.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		262.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0024	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi														
			Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan				1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0025	Penyusunan Rencana Kontijensi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas				0 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		210.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0026	Pengelolaan Risiko Bencana														
			Jumlah akar masalah risiko bencana lintas Kabupaten/Kota yang tertangani				0 Kegiatan	34.470.400,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		52.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana														
			Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				0 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		52.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana														
			Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana				0 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		73.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana				100 Orang	184.811.600,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		105.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-			-	1.018.499.675,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	1.207.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0009	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi														
			Jumlah dokumen rencana operasi kedaruratan yang sah/legal				1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		105.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0025	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana				1 Laporan	121.536.800,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		210.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0026	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis				0 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		157.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana														
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				1000 Orang	562.026.875,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		525.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana				1 Laporan	334.936.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		157.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0031	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				0 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		52.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-			-	433.446.378,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	840.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi														
			Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun				1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		105.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0009	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi														
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan				5 Kegiatan	177.210.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		105.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0013	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi														
			Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)				70 Orang	81.794.510,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		262.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0014	Fasilitasi dan koordinasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana dengan memprioritaskan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah penduduk terpilah yang terdapat di daerah rawan bencana berbasis GEDSI				1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		52.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.1.04.0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah															
			Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		52.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.1.04.0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah															
			Jumlah Dokumen yang dilegalkan				4 Dokumen	139.966.868,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		157.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.1.04.0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota															
			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun				33 kabupaten/kota	34.475.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		105.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	J U M L A H							28.646.754.077,00							28.931.621.270,00		

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENDAPATAN DAERAH						303.145.352.748,00							380.429.100.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						303.145.352.748,00							380.429.100.000,00	
	5.02	KEUANGAN						303.145.352.748,00							380.429.100.000,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	298.626.075.898,00						-	372.029.100.000,00	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	649.252.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	1.500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	649.252.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		1.500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	217.256.039.916,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	247.227.100.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				750 Orang/ Bulan	215.851.145.916,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		245.000.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	279.692.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		400.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	677.226.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		850.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	447.976.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		977.100.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	661.191.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	950.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	120.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		350.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	4.328.782.532,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		3.800.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	5.220.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		27.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	1.141.260.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		1.300.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-	-	500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	54.319.103.210,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	54.750.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	1.524.000.298,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		1.750.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	52.795.102.912,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		53.000.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.816.515.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	4.700.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				27 Unit	1.322.140.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		1.200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	403.775.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		2.000.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				30 Unit	1.090.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		1.500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-			-	229.400.000,00						-	300.000.000,00	
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-			-	229.400.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-	-	300.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				2 Laporan	229.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		300.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
3.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-			-	4.289.876.850,00						-	8.100.000.000,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	4.289.876.850,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-	-	8.100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	3.951.722.700,00						-	4.217.000.000,00	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	80.520.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	155.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN UTARA
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	8.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		75.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN UTARA
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	72.360.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		80.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN UTARA
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	803.029.188,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	922.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN UTARA
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	19.329.920,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		70.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	155.288.708,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		550.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN UTARA
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	544.510.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		195.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN UTARA
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	47.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		70.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN UTARA
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		12.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN UTARA
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	36.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		25.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.352.744.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	2.500.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN UTARA
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	1.360.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		1.500.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN UTARA
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	992.344.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		1.000.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN UTARA
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	715.429.512,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	640.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN UTARA
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	264.079.780,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		260.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN UTARA
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	2.532.240.843,00						-	4.252.200.000,00	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	80.520.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	10.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN SELATAN
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	8.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		10.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN SELATAN
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	72.360.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN SELATAN
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	452.355.895,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	792.200.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN SELATAN
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	40.008.545,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	84.015.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		330.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN SELATAN
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	241.911.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		350.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN SELATAN
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	47.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		60.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN SELATAN
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	2.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		7.200.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN SELATAN
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	36.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		45.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.239.967.216,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	2.700.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN SELATAN
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	329.967.216,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		1.500.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN SELATAN
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	910.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		1.200.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN SELATAN
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	759.397.732,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	750.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN SELATAN
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	251.328.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		300.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN SELATAN
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	900.155.130,00						-	1.227.200.000,00	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	116.989.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	70.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGKALAN BRANDAN
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	54.349.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		10.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGKALAN BRANDAN
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	62.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		60.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGKALAN BRANDAN
	5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	5.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGKALAN BRANDAN
	5.02.01.1.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		5.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGKALAN BRANDAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	168.125.130,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	242.200.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGKALAN BRANDAN
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	11.987.590,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		50.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGKALAN BRANDAN
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	40.286.540,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		40.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGKALAN BRANDAN
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	77.801.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGKALAN BRANDAN
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	20.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		25.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGKALAN BRANDAN
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0,00	-	-	-	-	-		7.200.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGKALAN BRANDAN
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	18.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		120.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGKALAN BRANDAN
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	228.404.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	360.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGKALAN BRANDAN
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	222.404.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		250.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGKALAN BRANDAN
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		110.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGKALAN BRANDAN
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	386.637.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	550.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGKALAN BRANDAN
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	774.380.822,00						-	1.228.360.000,00	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	70.800.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	68.160.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH STABAT
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	8.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		8.160.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH STABAT
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	62.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		60.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH STABAT
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	184.407.788,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	502.200.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH STABAT
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.151.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		30.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH STABAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	30.636.972,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		120.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH STABAT
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	95.394.716,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		150.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH STABAT
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	25.225.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		50.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH STABAT
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		7.200.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH STABAT
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	18.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		145.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH STABAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	295.349.484,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	405.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH STABAT
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	249.901.484,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		270.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH STABAT
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	45.448.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		135.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH STABAT
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	223.823.550,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	253.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH STABAT
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	154.998.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		170.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH STABAT
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	1.441.134.579,00						-	1.779.360.000,00	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	70.800.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	73.160.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BINJAI
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	8.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		8.160.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BINJAI
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	62.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		65.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BINJAI
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	273.670.804,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	371.200.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BINJAI
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	18.445.008,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BINJAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	96.403.308,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		110.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BINJAI
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	111.222.488,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		170.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BINJAI
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	29.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		40.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BINJAI
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		7.200.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BINJAI
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	18.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		44.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BINJAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	585.148.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	660.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BINJAI
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	394.252.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		440.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BINJAI
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				2 Laporan	190.896.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		220.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BINJAI
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	511.515.775,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	675.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BINJAI
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				3 Unit	207.276.043,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		275.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BINJAI
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	1.180.054.582,00						-	1.737.200.000,00	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	70.800.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	70.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LUBUK PAKAM
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	8.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		10.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LUBUK PAKAM
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	62.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		60.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LUBUK PAKAM
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	245.246.910,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	442.200.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LUBUK PAKAM
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.903.016,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		45.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LUBUK PAKAM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	61.386.746,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		120.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LUBUK PAKAM
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	115.357.148,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		165.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LUBUK PAKAM
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	29.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		65.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LUBUK PAKAM
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		7.200.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LUBUK PAKAM
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	18.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		40.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LUBUK PAKAM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	441.636.897,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	480.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LUBUK PAKAM
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	296.188.897,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		330.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LUBUK PAKAM
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	145.448.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		150.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LUBUK PAKAM
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	422.370.775,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	745.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LUBUK PAKAM
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	133.636.043,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		165.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LUBUK PAKAM
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	916.139.295,00						-	4.651.660.000,00	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	70.800.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	83.160.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SEI RAMPAH
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	8.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		8.160.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SEI RAMPAH
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	62.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		75.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SEI RAMPAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	183.236.860,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	688.500.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SEI RAMPAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.683.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		77.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SEI RAMPAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	30.636.972,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		385.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SEI RAMPAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	93.691.688,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		120.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SEI RAMPAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	25.225.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		55.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SEI RAMPAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		7.500.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SEI RAMPAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	18.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		44.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SEI RAMPAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	460.478.885,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	3.520.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SEI RAMPAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	275.030.885,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		3.300.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SEI RAMPAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	185.448.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		220.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SEI RAMPAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	201.623.550,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	360.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SEI RAMPAH
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	154.998.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		110.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SEI RAMPAH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	1.146.779.984,00						-	1.821.360.000,00	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	66.760.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	85.160.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TEBING TINGGI
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	8.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		8.160.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TEBING TINGGI
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	58.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		77.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TEBING TINGGI
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	469.770.004,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	711.200.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TEBING TINGGI
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	28.670.860,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		55.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TEBING TINGGI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	270.041.108,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		440.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TEBING TINGGI
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	93.666.036,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		110.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TEBING TINGGI
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	26.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		55.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TEBING TINGGI
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		7.200.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TEBING TINGGI
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	50.212.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		44.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TEBING TINGGI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	369.917.430,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	460.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TEBING TINGGI
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	316.792.430,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		350.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TEBING TINGGI
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	53.125.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		110.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TEBING TINGGI
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	240.332.550,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	565.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TEBING TINGGI
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	171.682.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		165.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TEBING TINGGI
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	1.871.873.022,00						-	1.754.000.000,00	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	70.800.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	87.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LIMA PULUH
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	8.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		10.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LIMA PULUH
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	62.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		77.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LIMA PULUH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	246.993.988,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	987.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LIMA PULUH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.151.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		55.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LIMA PULUH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	29.916.912,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		650.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LIMA PULUH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	95.960.976,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		110.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LIMA PULUH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	25.225.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		50.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LIMA PULUH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		12.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LIMA PULUH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	80.740.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		110.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LIMA PULUH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	960.740.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LIMA PULUH
	5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	960.740.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LIMA PULUH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	391.715.484,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	480.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LIMA PULUH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	226.267.484,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		280.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LIMA PULUH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	165.448.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		200.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LIMA PULUH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	201.623.550,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	200.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LIMA PULUH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	154.998.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		200.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LIMA PULUH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LIMA PULUH
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	46.625.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LIMA PULUH
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-			-	62.320.000,00						-	0,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	62.320.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LIMA PULUH
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LIMA PULUH
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				2 Laporan	62.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LIMA PULUH
		UPTD PENDAPATAN DAERAH SIMALUNGUN						1.673.067.472,00							290.160.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						1.673.067.472,00							290.160.000,00	
	5.02	KEUANGAN						1.673.067.472,00							290.160.000,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	1.573.407.472,00						-	290.160.000,00	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	70.800.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	85.160.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIMALUNGUN
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	8.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		8.160.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIMALUNGUN
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	62.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		77.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIMALUNGUN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	289.920.540,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	205.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIMALUNGUN
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	20.082.662,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIMALUNGUN
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				10 Paket	40.850.712,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIMALUNGUN
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	116.505.166,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIMALUNGUN
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	30.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		55.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIMALUNGUN
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIMALUNGUN
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	81.832.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		150.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIMALUNGUN
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIMALUNGUN
	5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIMALUNGUN
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	519.552.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIMALUNGUN
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	264.104.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIMALUNGUN
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	255.448.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIMALUNGUN
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	693.134.932,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIMALUNGUN
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	170.965.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIMALUNGUN
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	421.819.732,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIMALUNGUN
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	100.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIMALUNGUN	
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-			-	99.660.000,00						-	0,00		
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	99.660.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIMALUNGUN	
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah															
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIMALUNGUN	
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah															
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				2 Laporan	99.660.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIMALUNGUN	
		UPTD PENDAPATAN DAERAH KISARAN							1.404.470.196,00							650.000.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						1.404.470.196,00							650.000.000,00		
	5.02	KEUANGAN						1.404.470.196,00							650.000.000,00		
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	1.304.810.196,00						-	525.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	70.800.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KISARAN
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	8.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KISARAN
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	62.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KISARAN
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	316.226.838,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	175.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KISARAN
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	19.924.590,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KISARAN
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	71.429.192,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KISARAN
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	112.881.056,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KISARAN
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	30.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		55.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KISARAN
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KISARAN
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	81.692.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		120.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KISARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	491.715.226,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	350.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KISARAN
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	326.267.226,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		350.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KISARAN
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	165.448.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KISARAN
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	426.068.132,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KISARAN
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	130.628.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KISARAN
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	757.952.933,00						-	8.160.000,00	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	66.720.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	8.160.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TANJUNG BALAI
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	8.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		8.160.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TANJUNG BALAI
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	58.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TANJUNG BALAI
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	209.990.386,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TANJUNG BALAI
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.124.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TANJUNG BALAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	20.737.026,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TANJUNG BALAI
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	76.659.160,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TANJUNG BALAI
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	20.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TANJUNG BALAI
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TANJUNG BALAI
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	82.420.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TANJUNG BALAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	281.463.497,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TANJUNG BALAI
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	236.015.497,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TANJUNG BALAI
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	45.448.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TANJUNG BALAI
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	199.779.050,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TANJUNG BALAI
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	138.191.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TANJUNG BALAI
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	22.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TANJUNG BALAI
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	39.387.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TANJUNG BALAI
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-			-	28.160.000,00						-	0,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	28.160.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TANJUNG BALAI
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TANJUNG BALAI
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				2 Laporan	28.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TANJUNG BALAI
		UPTD PENDAPATAN DAERAH AEK KANOPAN							1.661.528.002,00						0,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						1.661.528.002,00							0,00	
	5.02	KEUANGAN						1.661.528.002,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	1.624.908.002,00						-	0,00	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	70.800.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH AEK KANOPAN
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	8.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH AEK KANOPAN
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	62.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH AEK KANOPAN
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	248.448.632,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH AEK KANOPAN
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.151.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH AEK KANOPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	30.636.972,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH AEK KANOPAN
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	94.595.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH AEK KANOPAN
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	25.225.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH AEK KANOPAN
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH AEK KANOPAN
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	82.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH AEK KANOPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	601.575.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH AEK KANOPAN
	5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	601.575.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH AEK KANOPAN
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	502.460.820,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH AEK KANOPAN
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	377.012.820,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH AEK KANOPAN
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	125.448.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH AEK KANOPAN
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	201.623.550,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH AEK KANOPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	154.998.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH AEK KANOPAN
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH AEK KANOPAN
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	46.625.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH AEK KANOPAN
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-			-	36.620.000,00						-	0,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	36.620.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH AEK KANOPAN
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH AEK KANOPAN
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				2 Laporan	36.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH AEK KANOPAN
		UPTD PENDAPATAN DAERAH RANTAU PRAPAT						1.757.780.540,00							0,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						1.757.780.540,00							0,00	
	5.02	KEUANGAN						1.757.780.540,00							0,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	1.658.120.540,00						-	0,00	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	66.720.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH RANTAU PRAPAT
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	8.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH RANTAU PRAPAT
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	58.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH RANTAU PRAPAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	674.996.848,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH RANTAU PRAPAT
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	19.234.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH RANTAU PRAPAT
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	282.793.912,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH RANTAU PRAPAT
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	115.722.936,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH RANTAU PRAPAT
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	172.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH RANTAU PRAPAT
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	2.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH RANTAU PRAPAT
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	82.476.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH RANTAU PRAPAT
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	399.045.560,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH RANTAU PRAPAT
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	238.149.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH RANTAU PRAPAT
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				2 Laporan	160.896.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH RANTAU PRAPAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	517.358.132,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH RANTAU PRAPAT
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	167.448.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH RANTAU PRAPAT
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	221.134.732,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH RANTAU PRAPAT
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	128.775.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH RANTAU PRAPAT
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-			-	99.660.000,00						-	0,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	99.660.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH RANTAU PRAPAT
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH RANTAU PRAPAT
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				2 Laporan	99.660.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH RANTAU PRAPAT
		UPTD PENDAPATAN DAERAH KOTA PINANG						2.147.415.109,00							877.160.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						2.147.415.109,00							877.160.000,00	
	5.02	KEUANGAN						2.147.415.109,00							877.160.000,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	2.085.095.109,00						-	877.160.000,00	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	70.800.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-	-	85.160.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KOTA PINANG
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	8.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		8.160.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KOTA PINANG
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	25.225.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		50.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KOTA PINANG
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		12.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KOTA PINANG
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	84.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KOTA PINANG
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	1.099.440.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KOTA PINANG
	5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1.099.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KOTA PINANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	240.446.671,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KOTA PINANG
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	144.998.671,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KOTA PINANG
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				2 Laporan	95.448.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KOTA PINANG
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	423.623.550,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	200.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KOTA PINANG
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				2 Unit	154.998.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		200.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KOTA PINANG
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	596.865.574,00						-	77.000.000,00	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	61.080.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	77.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG TUA
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	8.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG TUA
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	52.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		77.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG TUA
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	173.961.459,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG TUA
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.962.419,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG TUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	17.156.064,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG TUA
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	54.655.476,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG TUA
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	9.987.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG TUA
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG TUA
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	86.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG TUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	192.583.515,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG TUA
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	147.135.515,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG TUA
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	45.448.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG TUA
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	169.240.600,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG TUA
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	129.103.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG TUA
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	22.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG TUA	
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	17.937.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG TUA	
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-			-	36.620.000,00						-	0,00		
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	36.620.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG TUA	
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah															
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				12 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG TUA	
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah															
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Laporan	36.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG TUA	
		UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBUHUAN							1.580.965.074,00							0,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						1.580.965.074,00							0,00		
	5.02	KEUANGAN						1.580.965.074,00							0,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	1.544.345.074,00						-	0,00	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	70.800.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBUHUAN
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	8.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBUHUAN
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	62.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBUHUAN
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	181.693.459,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBUHUAN
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	6.800.609,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBUHUAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	17.156.064,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBUHUAN
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15 Paket	56.386.786,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBUHUAN
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	15.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBUHUAN
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBUHUAN
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	86.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBUHUAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	628.500.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBUHUAN
	5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	628.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBUHUAN
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	262.583.515,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBUHUAN
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	147.135.515,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBUHUAN
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	115.448.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBUHUAN
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	400.768.100,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBUHUAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	165.923.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBUHUAN
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	194.445.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBUHUAN
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	40.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBUHUAN
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-			-	36.620.000,00						-	0,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	36.620.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBUHUAN
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				12 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBUHUAN
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Laporan	36.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBUHUAN
		UPTD PENDAPATAN DAERAH PADANGSIDIMPUAN						1.564.863.879,00							0,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						1.564.863.879,00							0,00	
	5.02	KEUANGAN						1.564.863.879,00							0,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	1.528.243.879,00						-	0,00	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	66.720.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PADANGSIDIMPUAN
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	8.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PADANGSIDIMPUAN
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	58.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PADANGSIDIMPUAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	271.454.529,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PADANGSIDIMPUAN
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12.671.916,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PADANGSIDIMPUAN
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	19.841.023,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PADANGSIDIMPUAN
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15 Paket	75.627.590,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PADANGSIDIMPUAN
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	20.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PADANGSIDIMPUAN
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PADANGSIDIMPUAN
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	143.264.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PADANGSIDIMPUAN
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	612.730.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PADANGSIDIMPUAN
	5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	612.730.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PADANGSIDIMPUAN
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	287.325.350,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PADANGSIDIMPUAN
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	160.077.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PADANGSIDIMPUAN
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	127.248.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PADANGSIDIMPUAN
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	290.014.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PADANGSIDIMPUAN
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	144.074.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PADANGSIDIMPUAN
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PADANGSIDIMPUAN
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	145.940.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PADANGSIDIMPUAN	
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-			-	36.620.000,00						-	0,00		
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	36.620.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PADANGSIDIMPUAN	
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah															
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				12 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PADANGSIDIMPUAN	
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah															
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Laporan	36.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PADANGSIDIMPUAN	
		UPTD PENDAPATAN DAERAH SIPIROK							1.496.990.718,00							0,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						1.496.990.718,00							0,00		
	5.02	KEUANGAN						1.496.990.718,00							0,00		
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	1.468.830.718,00						-	0,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	61.080.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIPIROK
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	8.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIPIROK
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	52.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIPIROK
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	224.320.718,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIPIROK
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	10.671.508,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIPIROK
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	25.551.240,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIPIROK
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	79.173.970,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIPIROK
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	25.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIPIROK
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIPIROK
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	83.624.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIPIROK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	790.328.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIPIROK
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	199.432.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIPIROK
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	590.896.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIPIROK
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	393.102.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIPIROK
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	164.087.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIPIROK
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100.575.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIPIROK
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	128.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIPIROK
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-			-	28.160.000,00						-	0,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	28.160.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIPIROK
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				12 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIPIROK
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Laporan	28.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIPIROK
		UPTD PENDAPATAN DAERAH PANYABUNGAN							868.514.861,00						0,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						868.514.861,00							0,00	
	5.02	KEUANGAN						868.514.861,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	840.354.861,00						-	0,00	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	100.320.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANYABUNGAN
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	47.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANYABUNGAN
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	52.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANYABUNGAN
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	179.205.746,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANYABUNGAN
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	7.426.044,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANYABUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	16.637.844,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANYABUNGAN
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15 Paket	58.299.858,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANYABUNGAN
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	15.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANYABUNGAN
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANYABUNGAN
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	81.692.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANYABUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	252.583.515,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANYABUNGAN
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	137.135.515,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANYABUNGAN
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	115.448.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANYABUNGAN
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	308.245.600,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANYABUNGAN
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	290.308.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANYABUNGAN
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANYABUNGAN
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	17.937.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANYABUNGAN
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-			-	28.160.000,00						-	0,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	28.160.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANYABUNGAN
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				12 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANYABUNGAN
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Laporan	28.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANYABUNGAN
		UPTD PENDAPATAN DAERAH NATAL							554.002.798,00							0,00
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						554.002.798,00							0,00	
	5.02	KEUANGAN						554.002.798,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	517.382.798,00						-	0,00	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	61.080.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH NATAL
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	8.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH NATAL
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	52.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH NATAL
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	175.086.783,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH NATAL
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	5.872.419,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH NATAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	17.156.064,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH NATAL
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	55.870.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH NATAL
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	9.987.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH NATAL
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH NATAL
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	86.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH NATAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	150.631.515,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH NATAL
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	147.135.515,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH NATAL
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	3.496.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH NATAL
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	130.584.500,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH NATAL
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	90.447.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH NATAL
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	22.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH NATAL	
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	17.937.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH NATAL	
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-			-	36.620.000,00						-	0,00		
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	36.620.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH NATAL	
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah															
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				12 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH NATAL	
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah															
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Laporan	36.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH NATAL	
		UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBOLGA							491.274.705,00							0,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						491.274.705,00							0,00		
	5.02	KEUANGAN						491.274.705,00							0,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	454.654.705,00						-	0,00	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	61.080.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBOLGA
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	8.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBOLGA
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	52.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBOLGA
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	196.721.850,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBOLGA
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	7.593.074,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBOLGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	15.235.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBOLGA
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	79.806.276,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBOLGA
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	9.987.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBOLGA
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBOLGA
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	84.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBOLGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	103.088.355,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBOLGA
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	103.088.355,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBOLGA
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBOLGA
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	93.764.500,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBOLGA
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	53.627.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBOLGA
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	22.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBOLGA	
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	17.937.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBOLGA	
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-			-	36.620.000,00						-	0,00		
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	36.620.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBOLGA	
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah															
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				12 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBOLGA	
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah															
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Laporan	36.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBOLGA	
		UPTD PENDAPATAN DAERAH PANDAN							1.025.801.507,00							0,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						1.025.801.507,00							0,00		
	5.02	KEUANGAN						1.025.801.507,00							0,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	997.641.507,00						-	0,00	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	70.800.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANDAN
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	8.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANDAN
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	62.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANDAN
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	209.788.907,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANDAN
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10.277.339,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANDAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	20.096.240,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANDAN
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	75.340.328,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANDAN
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	19.975.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANDAN
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANDAN
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	84.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANDAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	537.062.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANDAN
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	281.614.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANDAN
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	255.448.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANDAN
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	179.990.600,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANDAN
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	129.103.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANDAN
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	22.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANDAN	
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	28.687.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANDAN	
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-			-	28.160.000,00						-	0,00		
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	28.160.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANDAN	
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah															
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				12 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANDAN	
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah															
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Laporan	28.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANDAN	
		UPTD PENDAPATAN DAERAH TARUTUNG							1.031.972.916,00							0,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						1.031.972.916,00							0,00		
	5.02	KEUANGAN						1.031.972.916,00							0,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	995.352.916,00						-	0,00	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	66.720.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TARUTUNG
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	8.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TARUTUNG
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	58.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TARUTUNG
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	368.951.384,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TARUTUNG
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10.504.936,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TARUTUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	20.094.120,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TARUTUNG
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	91.262.328,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TARUTUNG
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	20.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TARUTUNG
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TARUTUNG
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	227.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TARUTUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	119.221.200,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TARUTUNG
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	119.221.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TARUTUNG
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TARUTUNG
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	440.460.332,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TARUTUNG
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	123.905.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TARUTUNG
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	221.134.732,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TARUTUNG
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	95.420.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TARUTUNG
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-			-	36.620.000,00						-	0,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	36.620.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TARUTUNG
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				12 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TARUTUNG
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Laporan	36.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TARUTUNG
		UPTD PENDAPATAN DAERAH BALIGE							612.059.918,00						0,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						612.059.918,00							0,00	
	5.02	KEUANGAN						612.059.918,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	592.359.918,00						-	0,00	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	61.080.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BALIGE
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	8.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BALIGE
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	52.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BALIGE
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	221.383.318,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BALIGE
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10.671.508,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BALIGE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	25.635.840,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BALIGE
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	77.775.970,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BALIGE
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	25.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BALIGE
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BALIGE
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	82.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BALIGE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	107.574.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BALIGE
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	107.574.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BALIGE
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BALIGE
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	202.322.600,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BALIGE
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	103.892.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BALIGE
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	11.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BALIGE
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	87.330.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BALIGE
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-			-	19.700.000,00						-	0,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	19.700.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BALIGE
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				12 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BALIGE
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Laporan	19.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BALIGE
		UPTD PENDAPATAN DAERAH PEMATANGSIANTAR							1.275.576.565,00						0,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						1.275.576.565,00							0,00	
	5.02	KEUANGAN						1.275.576.565,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	1.175.916.565,00						-	0,00	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	70.800.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PEMATANGSIANTAR
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	8.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PEMATANGSIANTAR
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	62.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PEMATANGSIANTAR
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	245.126.910,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PEMATANGSIANTAR
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.903.016,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PEMATANGSIANTAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	61.386.746,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PEMATANGSIANTAR
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	115.237.148,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PEMATANGSIANTAR
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	29.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PEMATANGSIANTAR
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PEMATANGSIANTAR
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	18.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PEMATANGSIANTAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	453.968.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PEMATANGSIANTAR
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	308.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PEMATANGSIANTAR
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	145.448.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PEMATANGSIANTAR
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	406.021.655,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PEMATANGSIANTAR
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	133.636.043,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PEMATANGSIANTAR
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	251.437.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PEMATANGSIANTAR
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	20.948.112,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PEMATANGSIANTAR
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-			-	99.660.000,00						-	0,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	99.660.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PEMATANGSIANTAR
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				12 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PEMATANGSIANTAR
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Laporan	99.660.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PEMATANGSIANTAR
		UPTD PENDAPATAN DAERAH DOLOK SANGGUL							532.854.582,00						0,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						532.854.582,00							0,00	
	5.02	KEUANGAN						532.854.582,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	496.234.582,00						-	0,00	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	61.080.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH DOLOK SANGGUL
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	8.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH DOLOK SANGGUL
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	52.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH DOLOK SANGGUL
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	171.006.567,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH DOLOK SANGGUL
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	5.962.419,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH DOLOK SANGGUL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	17.156.064,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH DOLOK SANGGUL
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	55.060.584,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH DOLOK SANGGUL
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	9.987.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH DOLOK SANGGUL
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH DOLOK SANGGUL
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	82.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH DOLOK SANGGUL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	192.583.515,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH DOLOK SANGGUL
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	147.135.515,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH DOLOK SANGGUL
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	45.448.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH DOLOK SANGGUL
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	71.564.500,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH DOLOK SANGGUL
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				3 Unit	53.627.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH DOLOK SANGGUL
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH DOLOK SANGGUL
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	17.937.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH DOLOK SANGGUL
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-			-	36.620.000,00						-	0,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	36.620.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH DOLOK SANGGUL
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				12 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH DOLOK SANGGUL
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Laporan	36.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH DOLOK SANGGUL
		UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGURURAN							902.077.409,00							0,00
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						902.077.409,00							0,00	
	5.02	KEUANGAN						902.077.409,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	865.457.409,00						-	0,00	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	123.720.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGURURAN
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	70.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGURURAN
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	52.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGURURAN
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	249.848.584,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGURURAN
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	17.332.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGURURAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	45.026.346,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGURURAN
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	55.969.688,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGURURAN
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	14.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGURURAN
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGURURAN
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	116.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGURURAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	72.990.500,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGURURAN
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	72.990.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGURURAN
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGURURAN
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	418.898.325,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGURURAN
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				2 Unit	123.640.825,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGURURAN
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	197.797.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGURURAN
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	97.460.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGURURAN
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-			-	36.620.000,00						-	0,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	36.620.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGURURAN
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				12 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGURURAN
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Laporan	36.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGURURAN
		UPTD PENDAPATAN DAERAH SALAK							592.110.630,00							0,00
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						592.110.630,00							0,00	
	5.02	KEUANGAN						592.110.630,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	563.950.630,00						-	0,00	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	110.640.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SALAK
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	57.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SALAK
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	52.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SALAK
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	226.592.230,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SALAK
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.614.228,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SALAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	31.757.190,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SALAK
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	53.640.812,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SALAK
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	18.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SALAK
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SALAK
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	115.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SALAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	52.114.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SALAK
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	52.114.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SALAK
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SALAK
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	174.604.400,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SALAK
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	65.391.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SALAK
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	91.275.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SALAK	
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	17.937.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SALAK	
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-			-	28.160.000,00						-	0,00		
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	28.160.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SALAK	
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah															
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				12 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SALAK	
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah															
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Laporan	28.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SALAK	
		UPTD PENDAPATAN DAERAH SIDIKALANG							843.181.717,00							0,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						843.181.717,00							0,00		
	5.02	KEUANGAN						843.181.717,00							0,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	810.791.717,00						-	0,00	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	61.080.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIDIKALANG
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	8.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIDIKALANG
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	52.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIDIKALANG
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	288.225.544,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIDIKALANG
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.952.334,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIDIKALANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	23.578.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIDIKALANG
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	77.775.970,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIDIKALANG
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	25.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIDIKALANG
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	10.138.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIDIKALANG
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	140.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIDIKALANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	176.332.423,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIDIKALANG
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	50.884.423,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIDIKALANG
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	125.448.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIDIKALANG
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	285.153.750,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIDIKALANG
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	131.468.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIDIKALANG
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	111.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIDIKALANG
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	42.685.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIDIKALANG
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-			-	32.390.000,00						-	0,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	32.390.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIDIKALANG
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				12 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIDIKALANG
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Laporan	32.390.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIDIKALANG
		UPTD PENDAPATAN DAERAH KABANJAHE							855.005.246,00						0,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						855.005.246,00							0,00	
	5.02	KEUANGAN						855.005.246,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	792.685.246,00						-	0,00	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	70.800.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KABANJAHE
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	8.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KABANJAHE
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	62.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KABANJAHE
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	183.984.696,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KABANJAHE
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15.151.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KABANJAHE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	30.636.972,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KABANJAHE
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	94.971.624,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KABANJAHE
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	25.225.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KABANJAHE
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KABANJAHE
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	18.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KABANJAHE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	314.077.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KABANJAHE
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	168.629.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KABANJAHE
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	145.448.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KABANJAHE
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	223.823.550,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KABANJAHE
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				3 Unit	154.998.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KABANJAHE
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	22.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KABANJAHE
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	46.625.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KABANJAHE
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-			-	62.320.000,00						-	0,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	62.320.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KABANJAHE
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				12 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KABANJAHE
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Laporan	62.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KABANJAHE
		UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG SITOLI							787.565.336,00						0,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						787.565.336,00							0,00	
	5.02	KEUANGAN						787.565.336,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	759.405.336,00						-	0,00	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	61.080.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG SITOLI
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	8.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG SITOLI
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	52.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG SITOLI
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	285.201.458,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG SITOLI
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.671.508,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG SITOLI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	25.669.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG SITOLI
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	82.425.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG SITOLI
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	19.975.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG SITOLI
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG SITOLI
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	146.460.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG SITOLI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	260.714.828,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG SITOLI
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	165.266.828,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG SITOLI
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	95.448.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG SITOLI
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	152.409.050,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG SITOLI
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	101.371.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG SITOLI
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	590.181.007,00						-	12.000.000,00	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	136.193.475,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	12.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TELUK DALAM
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	83.273.475,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		12.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TELUK DALAM
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	52.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TELUK DALAM
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	226.885.032,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TELUK DALAM
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.990.590,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TELUK DALAM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	21.571.942,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TELUK DALAM
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	40.875.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TELUK DALAM
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	9.987.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TELUK DALAM
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TELUK DALAM
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	146.460.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TELUK DALAM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	133.338.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TELUK DALAM
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	87.890.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TELUK DALAM
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	45.448.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TELUK DALAM
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	93.764.500,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TELUK DALAM
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	53.627.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TELUK DALAM
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	22.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TELUK DALAM
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	17.937.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TELUK DALAM
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-			-	36.620.000,00						-	0,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	36.620.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TELUK DALAM
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				12 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TELUK DALAM
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Laporan	36.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TELUK DALAM
	J U M L A H							344.280.142.399,00							405.918.920.000,00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						31.474.051.942,00							205.320.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						31.474.051.942,00							205.320.000,00	
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						31.474.051.942,00							205.320.000,00	
1.	5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	28.790.172.196,00						-	205.320.000,00	
	5.04.01.1.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	58.307.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	39.167.000,00	Kota Medan, Medan Timur, Perintis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				5 Dokumen	9.040.000,00	Kota Medan, Medan Timur, Perintis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	10.100.000,00	Kota Medan, Medan Timur, Perintis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	20.463.382.793,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	205.320.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80 Orang/ Bulan	20.249.163.043,00	Kota Medan, Medan Timur, Perintis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	208.720.000,00	Kota Medan, Medan Timur, Perintis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		205.320.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				4 Laporan	5.499.750,00	Kota Medan, Medan Timur, Perintis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	89.890.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				10 Orang	89.890.000,00	Kota Medan, Medan Timur, Perintis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.720.549.516,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	30.756.444,00	Kota Medan, Medan Timur, Perintis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	152.763.433,00	Kota Medan, Medan Timur, Perintis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	433.220.799,00	Kota Medan, Medan Timur, Perintis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	57.717.200,00	Kota Medan, Medan Timur, Perintis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	20.085.000,00	Kota Medan, Medan Timur, Perintis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	493.762.000,00	Kota Medan, Medan Timur, Perintis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	532.244.640,00	Kota Medan, Medan Timur, Perintis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	1.420.722.162,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	1.420.722.162,00	Kota Medan, Medan Timur, Perintis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	4.041.912.725,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				5 Laporan	15.455.500,00	Kota Medan, Medan Timur, Perintis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	702.051.721,00	Kota Medan, Medan Timur, Perintis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				5 Laporan	54.690.000,00	Kota Medan, Medan Timur, Perintis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				50 Laporan	3.269.715.504,00	Kota Medan, Medan Timur, Perintis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	995.408.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				9 Unit	293.600.000,00	Kota Medan, Medan Timur, Perintis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	667.408.000,00	Kota Medan, Medan Timur, Perintis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	34.400.000,00	Kota Medan, Medan Timur, Perintis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-			-	2.683.879.746,00						-	0,00	
	5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	-	-			-	1.313.766.648,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				280 Orang	645.718.416,00	Kota Medan, Medan Timur, Perintis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi				7 Dokumen	668.048.232,00	Kota Medan, Medan Timur, Perintis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-	-			-	1.370.113.098,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota														
			Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi				100 Orang	132.624.000,00	Kota Medan, Medan Timur, Perintis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar				5 Laporan	726.482.916,00	Kota Medan, Medan Timur, Perintis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan														
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				240 Orang	511.006.182,00	Kota Medan, Medan Timur, Perintis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		UPTD PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA						14.318.131.264,00							42.480.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						14.318.131.264,00							42.480.000,00	
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						14.318.131.264,00							42.480.000,00	
1.	5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	14.246.839.051,00						-	42.480.000,00	
	5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	54.840.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	42.480.000,00	UPTD PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	54.840.000,00	Kota Medan, Medan Timur, Perintis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		42.480.000,00	UPTD PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	167.439.051,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	0,00	UPTD PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	39.974.486,00	Kota Medan, Medan Timur, Perintis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	UPTD PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	17.222.565,00	Kota Medan, Medan Timur, Perintis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	UPTD PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	110.242.000,00	Kota Medan, Medan Timur, Perintis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	UPTD PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	4.400.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	0,00	UPTD PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	4.400.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	UPTD PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	14.020.160.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	0,00	UPTD PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	14.020.160.000,00	Kota Medan, Medan Timur, Perintis	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	UPTD PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
2.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-			-	71.292.213,00						-	0,00	
	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-	-			-	71.292.213,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	0,00	UPTD PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,				2 Dokumen	71.292.213,00	Kota Medan, Medan Timur, Perintis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	UPTD PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
	JUMLAH							45.792.183.206,00							247.800.000,00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026																
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENGHUBUNG						36.242.316.333,00							34.868.712.246,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						36.242.316.333,00							34.868.712.246,00	
	5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG						36.242.316.333,00							34.868.712.246,00	
1.	5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-			100100100 Persen	32.303.830.410,00						-	24.910.048.244,00	
	5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Utara yang disusun	-			100 Persen	9.160.292.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	Badan Penghubung	-	9.160.292.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				56 Orang/ Bulan	9.002.612.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	Badan Penghubung		9.002.612.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	157.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	Badan Penghubung		157.680.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi Badan Milik Daerah Badan Penghubung Provsu yang disusun	-			100 Persen	170.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	Badan Penghubung	-	170.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	170.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	Badan Penghubung		170.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan pendukung administrasi kepegawaian Badan penghubung Provsu	-			100 Persen	915.463.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	Badan Penghubung	-	539.707.945,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	494.357.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	Badan Penghubung		224.800.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	421.106.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	Badan Penghubung		314.907.945,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan penyediaan administrasi umum Badan penghubung Provsu	-			100 Persen	3.516.338.816,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	Badan Penghubung	-	2.531.250.647,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	253.383.670,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	Badan Penghubung		161.297.500,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	Badan Penghubung		101.880.937,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	856.155.335,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	Badan Penghubung		1.139.845.210,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	280.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Badan Penghubung		191.500.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	687.372.811,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Badan Penghubung		115.811.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				500 Laporan	1.338.977.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Badan Penghubung		725.916.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Badan Penghubung		95.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah kegiatan pengadaan barang milik daerah pada Badan penghubung Provsu</i>	-			100 Persen	1.662.519.969,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Badan Penghubung	-	2.285.992.225,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				13 Unit	1.662.519.969,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Badan Penghubung		2.285.992.225,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah kegiatan penyediaan kebutuhan jasa pada Badan penghubung Provsu</i>	-			100 Persen	6.713.612.075,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Badan Penghubung	-	5.277.562.649,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	160.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	Badan Penghubung		196.870.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	1.353.928.756,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	Badan Penghubung		780.988.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				6 Laporan	5.199.683.319,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	Badan Penghubung		4.299.704.649,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah kegiatan pemeliharaan barang milik daerah pada Badan penghubung Provsu yang dirawat</i>	-			100 Persen	10.165.604.550,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	Badan Penghubung	-	4.945.242.778,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				34 Unit	4.391.073.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	Badan Penghubung		3.259.683.365,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				5 Unit	4.838.620.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	Badan Penghubung		1.415.008.913,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				13 Unit	935.910.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	Badan Penghubung		270.550.500,00	BADAN PENGHUBUNG
2.	5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	<i>Persentase Tingkat Program Pelayanan Penghubung</i>	-			100 Persen	3.938.485.923,00						-	9.958.664.002,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	-			100 Persen	3.938.485.923,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Badan Penghubung	-	9.958.664.002,00	BADAN PENGHUBUNG	
	5.07.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat															
			Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Badan Penghubung		6.896.088.695,00	BADAN PENGHUBUNG	
	5.07.02.1.01.0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat															
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat				5 Laporan	1.167.441.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Badan Penghubung		881.335.500,00	BADAN PENGHUBUNG	
	5.07.02.1.01.0003	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya															
			Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan				10 Laporan	982.032.673,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Badan Penghubung		346.925.703,00	BADAN PENGHUBUNG	
	5.07.02.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung															
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				5 Laporan	1.789.012.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Badan Penghubung		1.834.314.104,00	BADAN PENGHUBUNG	
	JUMLAH							36.242.316.333,00							34.868.712.246,00		

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						67.329.028.824,00							0,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						67.329.028.824,00							0,00	
	5.01	PERENCANAAN														
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Adminsitrasi	-			100 %	48.151.405.278,00						-	0,00	
	5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersediannya Dokumen Perencanaan Daerah yang disusun	-			12 Dokumen	240.449.650,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	211.351.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	29.098.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya administrasi keuangan perangkat daerah dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan transparan	-			100 %	28.806.783.458,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				148 Orang/ Bulan	28.563.173.958,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6 Dokumen	221.601.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				6 Laporan	22.007.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	pengelolaan kepegawaian di tingkat perangkat daerah dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel	-			100 %	2.513.665.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				148 Paket	168.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				131 Orang	875.185.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				1000 Orang	1.470.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	pengelolaan administrasi yang mendukung kelancaran operasional perangkat daerah	-			100 %	4.070.011.620,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				100 Paket	1.315.600.120,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				100 Paket	181.395.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	143.424.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	1.157.304.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				10 Dokumen	41.128.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				5 Dokumen	1.231.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang yang diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	-			100 %	165.733.400,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				40 Paket	126.733.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	39.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah jenis dan volume jasa penunjang yang disediakan untuk mendukung urusan pemerintahan daerah</i>	-			65 LAPORAN	6.490.135.864,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				10 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				5 Laporan	1.437.993.504,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				10 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				49 Laporan	5.042.142.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah unit barang milik daerah penunjang yang menjalani pemeliharaan dalam periode tertentu.</i>	-			126 UNIT	1.683.980.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				25 Unit	603.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				100 Unit	570.330.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			<i>Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara</i>				100 Unit	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	435.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Penyelesaian Dokumen Pembangunan Daerah Tepat Waktu	-			100 %	6.028.635.000,00						-	0,00	
	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan strategis dan tahunan yang disusun oleh perangkat daerah.	-			12 Dokumen	6.182.622.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.1.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya														
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah				33 Dokumen	122.636.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				3 Berita Acara	157.216.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	125.518.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi														
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi				33 Berita Acara	4.997.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				6 Dokumen	780.052.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	-			33 LAPORAN	847.406.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				33 Laporan	708.086.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi				33 Dokumen	139.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD	-			100 %	8.663.366.639,00						-	0,00	
	5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-			100 %	1.285.349.370,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				9 Dokumen	130.592.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				42 Laporan	100.010.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				33 Laporan	110.578.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				9 Dokumen	262.734.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				42 Laporan	99.980.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				3 Laporan	581.455.370,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen /Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	-			5 Dokumen	1.780.187.500,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	392.644.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	205.766.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				3 Laporan	315.246.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	294.043.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA</i>				9 Laporan	262.101.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA</i>				1 Laporan	310.386.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	<i>Dokumen Perencanaan pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</i>	-			4 Dokumen	1.317.158.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>				1 Dokumen	272.460.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</i>				1 Laporan	248.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur</i>				1 Laporan	400.692.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan</i>				1 Laporan	395.326.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN														
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	<i>Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan inovasi</i>	-			100 %	1.870.701.500,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-	-			-	249.999.850,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi</i>				1 Laporan	249.999.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-	-			-	919.520.200,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial</i>				1 Dokumen	174.898.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan</i>				1 Dokumen	187.238.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata</i>				1 Dokumen	189.766.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan</i>				1 Dokumen	171.328.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.02.0009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja				1 Dokumen	196.290.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	-			-	748.439.600,00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				1 Dokumen	249.999.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				1 Dokumen	248.439.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				1 Dokumen	249.999.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
2.	5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	-	-			-	2.614.920.407,00						-	0,00	
	5.05.03.1.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	-	-			-	449.999.950,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.03.1.01.0002	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah				1 Dokumen	449.999.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.05.03.1.02	Invensi dan Inovasi	-	-			-	1.151.654.407,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.05.03.1.02.0001	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi															
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi				1 Laporan	470.187.707,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.05.03.1.02.0022	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah															
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah				1 Laporan	396.988.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.05.03.1.02.0025	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual															
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)				1 Laporan	124.499.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.05.03.1.02.0026	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi															
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi				1 Laporan	159.979.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	J U M L A H							67.329.028.824,00							0,00		

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						1.872.879.485,00						3.450.000.000,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						1.872.879.485,00							3.450.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						1.872.879.485,00							3.450.000.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-			100 %	1.108.835.991,00						-	2.000.000.000,00	
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	84.720.000,00			-	-	Biro Administrasi Pembangunan	-	150.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	84.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Biro Administrasi Pembangunan		150.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	131.570.000,00			-	-	-	-	200.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	64.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		100.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	67.570.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		100.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	356.442.459,00			-	-	-	-	950.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	45.732.251,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		150.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	42.826.708,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		150.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	67.391.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		150.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				20 Laporan	200.492.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		500.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Ketersedian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 %	514.053.532,00			-	-	-	-	600.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	514.053.532,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		600.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah Daerah yang berkondisi Baik</i>	-			100 %	22.050.000,00			-	-	-	-	100.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				33 Unit	22.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		100.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
2.	4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	<i>Ketepatan waktu dalam penyusunan dan pelaporan dokumen pelaksanaan kegiatan strategis dan atau sektoral untuk mewujudkan target pembangunan Sumatera Utara yang unggul maju dan berkelanjutan</i>	-			100 %	764.043.494,00						-	1.450.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD di Pemerintah Sumatera Utara Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN di Sumatera Utara Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah di Sumatera Utara	-			1 Laporan 1 Laporan 2 Laporan	373.876.000,00			-	-	Perangkat Daerah dan Kabupaten / Kota	-	750.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD				1 Laporan	149.748.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Perangkat Daerah dan Kabupaten / Kota		250.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN				1 Laporan	97.776.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Perangkat Daerah dan Kabupaten / Kota		250.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah				2 Laporan	126.352.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Perangkat Daerah dan Kabupaten / Kota		250.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Kebijakan Pembangunan Terlaksananya Pelaksanaan Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Terlaksanya Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	-			4 Laporan 4 Dokumen 2 Laporan	390.167.494,00			-	-	Perangkat Daerah dan Kabupaten / Kota	-	700.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.02.0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan				4 Dokumen	163.563.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Perangkat Daerah dan Kabupaten / Kota		350.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah				2 Laporan	182.736.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Perangkat Daerah dan Kabupaten / Kota		200.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.02.0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah				4 Dokumen	43.867.944,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Perangkat Daerah dan Kabupaten / Kota		150.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	J U M L A H							1.872.879.485,00							3.450.000.000,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN						22.807.284.210,00							19.630.818.933,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						22.807.284.210,00							19.630.818.933,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						22.807.284.210,00							19.630.818.933,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	-			100 Persen	22.807.284.210,00						-	19.630.818.933,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 Persen	80.000.000,00			-	-	-	-	88.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		33.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				200 Eksemplar	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		55.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	144.720.000,00			-	-	-	-	159.192.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Bulan	144.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		159.192.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 Persen	809.160.000,00			-	-	-	-	890.076.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				100 Persen	709.444.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		780.388.400,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	99.716.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		109.687.600,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	1.657.502.830,00			-	-	-	-	1.823.253.113,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	143.015.718,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		157.317.290,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Bulan	564.393.080,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		620.832.388,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Bulan	235.970.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		259.567.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Bulan	406.032.032,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		446.635.235,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan	308.092.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		338.901.200,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	6.706.838.200,00			-	-	-	-	7.377.522.020,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1300 Buah	13.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		14.300.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Bulan	6.693.838.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.363.222.020,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 Persen	224.200.000,00			-	-	-	-	246.620.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				12 Bulan	224.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		246.620.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	<i>Persentase Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan</i>	-			100 Persen	3.250.536.000,00			-	-	-	-	3.575.589.600,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.13.0001	Penyiapan Materi Pimpinan														
			<i>Persentase Materi Pimpinan yang Disiapkan</i>				100 Persen	24.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		26.400.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
			<i>Persentase Fasilitasi Komunikasi Pimpinan</i>				100 Persen	3.126.536.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.439.189.600,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan														
			<i>Persentase Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan</i>				100 Persen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		110.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	<i>Persentase Fasilitasi Keprotokolan</i>	-			100 Persen	4.973.242.000,00			-	-	-	-	5.470.566.200,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara														
			<i>Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara</i>				100 Persen	334.130.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		367.543.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				650 Laporan	2.208.192.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.429.011.200,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan														
			Persentase Pengelolaan Hubungan Keprotokolan				100 Persen	2.430.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.674.012.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	J U M L A H							22.807.284.210,00							19.630.818.933,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BIRO HUKUM PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BIRO HUKUM						5.997.340.622,00							7.750.385.222,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						5.665.956.400,00							7.368.997.560,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						5.665.956.400,00							7.368.997.560,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-			15 Dokumen	963.884.200,00						-	1.409.233.000,00	
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-			15 Dokumen	111.240.000,00			-	-	persentase pemenuhan Layanan Administrasi	-	224.200.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				15 Dokumen	111.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	persentase pemenuhan Layanan Administrasi		224.200.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-			100 Laporan	568.208.000,00			-	-	persentase pemenuhan Layanan Administrasi	-	800.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	568.208.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	persentase pemenuhan Layanan Administrasi		800.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-			6 Laporan	276.436.200,00			-	-	-	-	376.033.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	276.436.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		376.033.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-			110 unit	8.000.000,00			-	-	persentase pemenuhan Layanan Administrasi	-	9.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				110 Unit	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	persentase pemenuhan Layanan Administrasi		9.000.000,00	BIRO HUKUM
2.	4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Jumlah Penyelesaian Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tepat Waktu.	-			1010 Dokumen	4.702.072.200,00						-	5.959.764.560,00	
	4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Jumlah Penyelesaian Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tepat Waktu.	-			1010 Dokumen	688.783.200,00			-	-	Meningkatkan Pelayanan Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Penyebarluasan Informasi Produk Hukum Daerah.	-	989.783.200,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan														
			Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun				30 Dokumen	349.611.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Meningkatkan Pelayanan Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Penyebarluasan Informasi Produk Hukum Daerah.		449.611.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan														
			Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun				500 Dokumen	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Meningkatkan Pelayanan Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Penyebarluasan Informasi Produk Hukum Daerah.		4.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya														
			Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya				30 Dokumen	102.629.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Meningkatkan Pelayanan Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Penyebarluasan Informasi Produk Hukum Daerah.		202.629.200,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota														
			Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi				450 Dokumen	233.543.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Meningkatkan Pelayanan Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Penyebarluasan Informasi Produk Hukum Daerah.		333.543.000,00	BIRO HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	undefined	-			50 Kasus	4.013.289.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	-	Meningkatkan Pelayanan Hukum dan Perlindungan HAM dalam Menangani Permasalahan Hukum di Lingkungan Pemprovsu dan Masyarakat.	-	4.969.981.360,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum														
			Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan				25 Kasus	399.989.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	-	Meningkatkan Pelayanan Hukum dan Perlindungan HAM dalam Menangani Permasalahan Hukum di Lingkungan Pemprovsu dan Masyarakat.		500.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM														
			Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan				25 Kasus	3.613.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	-	Meningkatkan Pelayanan Hukum dan Perlindungan HAM dalam Menangani Permasalahan Hukum di Lingkungan Pemprovsu dan Masyarakat.		4.469.981.360,00	BIRO HUKUM
	X	NON URUSAN						331.384.222,00							381.387.662,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						331.384.222,00							381.387.662,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-			55 Orang	331.384.222,00						-	381.387.662,00	
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-			55 Orang	65.600.000,00			-	-	persentase pemenuhan Layanan Administrasi	-	14.000.000,00	BIRO HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				55 Orang	65.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	persentase pemenuhan Layanan Administrasi		14.000.000,00	BIRO HUKUM
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	-			100 Laporan	264.257.722,00			-	-	-	-	364.861.162,00	BIRO HUKUM
	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				48 Paket	198.078.822,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		297.626.462,00	BIRO HUKUM
	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				210000 Paket	66.178.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		67.234.700,00	BIRO HUKUM
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	-			6 Laporan	1.526.500,00			-	-	persentase pemenuhan Layanan Administrasi	-	2.526.500,00	BIRO HUKUM
	X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				550 Laporan	1.526.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	persentase pemenuhan Layanan Administrasi		2.526.500,00	BIRO HUKUM
	J U M L A H							5.997.340.622,00							7.750.385.222,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT						330.665.364.927,00							355.755.000.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						330.665.364.927,00							355.755.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						330.665.364.927,00							355.755.000.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	3.721.925.075,00						-	4.242.000.000,00	
	4.01.01.1.02	Administarsi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	294.720.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	310.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6 Dokumen	294.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		310.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	160.491.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	180.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	160.491.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		180.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.681.943.740,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	1.820.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	978.261.240,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		1.100.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	92.400.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	611.282.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		620.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.584.770.335,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.932.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6 Laporan	10.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		12.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			0				0 0	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		120.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	1.474.270.335,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.800.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
2.	4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-			-	326.943.439.852,00						-	351.513.000.000,00	
	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	-	-			-	132.000.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	144.000.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola				10 Unit	92.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		93.000.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual														
			Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi				10 Lembaga	40.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		51.000.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	-	-			-	191.004.097.852,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	203.410.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan				10 Dokumen	188.804.113.852,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		201.000.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan				2 Dokumen	199.984.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		210.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial				6 Dokumen	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.200.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	-	-			-	3.939.342.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	4.103.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata				2 Dokumen	269.354.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		303.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja															
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				2 Dokumen	3.669.988.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.800.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	J U M L A H							330.665.364.927,00							355.755.000.000,00		

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BIRO ORGANISASI PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BIRO ORGANISASI						2.418.603.565,00							3.501.000.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						2.418.603.565,00							3.501.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						2.418.603.565,00							3.501.000.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	1.229.161.523,00						-	1.601.000.000,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	6.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		6.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	555.924.864,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	770.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	444.804.864,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		650.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	111.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		120.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	83.836.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	120.000.000,00	BIRO ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 Orang	83.836.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		120.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	574.400.659,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	695.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	65.591.659,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	83.246.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		95.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	39.795.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	385.768.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		450.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	3.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	2.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		2.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	12.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	8.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		8.000.000,00	BIRO ORGANISASI
2.	4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	-	-			-	1.189.442.042,00						-	1.900.000.000,00	
	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	-	-			-	380.186.042,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	700.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	160.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		300.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				10 Dokumen	80.140.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		200.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan				2 Dokumen	140.046.042,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		200.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	-	-			-	809.256.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	1.200.000.000,00	BIRO ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				100% Dokumen	148.355.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		200.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				100% Dokumen	169.915.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		250.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja				100% Laporan	112.042.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		200.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan				3 Dokumen	148.078.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		250.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik				3 Dokumen	230.866.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		300.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	J U M L A H							2.418.603.565,00							3.501.000.000,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH						3.325.207.160,00							7.540.000.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						3.325.207.160,00							7.540.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						3.325.207.160,00							7.540.000.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	1.245.259.160,00						-	2.640.000.000,00	
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-			40 Orang	50.491.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Seluruh Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara	-	35.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				40 Orang	50.491.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Seluruh Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara		35.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum	-			4 Paket	451.174.905,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Seluruh Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara	-	1.460.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	Seluruh Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara		60.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	80.533.185,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	Seluruh Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara		300.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	44.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	Seluruh Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara		100.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	326.641.720,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Seluruh Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara		1.000.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-			2 Laporan	654.953.360,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Seluruh Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara	-	1.125.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Seluruh Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara		25.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	649.953.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Seluruh Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara		1.100.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana</i>	-			1 Laporan	21.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Seluruh Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara	-	80.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				35 Unit	21.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Seluruh Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara		80.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
2.	4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	<i>Persentase Terlaksananya Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah</i>	-			100 %	2.079.948.000,00						-	4.900.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	-			2 Dokumen	390.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Seluruh Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara	-	1.050.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum				1 Dokumen	124.281.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Seluruh Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara		550.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah				1 Dokumen	265.718.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Seluruh Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara		500.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	-			3 Dokumen	390.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Seluruh Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara	-	2.350.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Seluruh Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara		1.000.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Seluruh Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara		500.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan				1 Laporan	190.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperku a reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	Seluruh Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara		850.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-			3 Dokumen	400.000.000,00			Memperku a reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	Seluruh Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara	-	1.500.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah														
			Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperku a reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	Seluruh Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara		500.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Seluruh Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara		500.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama														
			Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Seluruh Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara		500.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	J U M L A H							3.325.207.160,00							7.540.000.000,00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA						2.271.214.236,00							2.559.395.300,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						2.271.214.236,00							2.559.395.300,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						2.271.214.236,00							2.559.395.300,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	403.726.531,00						-	715.247.300,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	53.760.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	60.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	53.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		60.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	424.964.880,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	635.247.300,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	129.683.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		135.247.300,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	15.081.436,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		60.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	86.512.344,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		90.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	193.688.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		350.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	7.300.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	20.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	7.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		20.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
2.	4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	-	-			-	1.867.487.705,00						-	1.844.148.000,00	
	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-			-	453.127.360,00			-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-	-	824.148.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa				12 Laporan	366.487.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-		384.148.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>				12 Laporan	86.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-		440.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-	-			-	796.359.760,00			-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-	-	1.170.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik														
			<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik</i>				12 Laporan	43.134.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-		350.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			<i>Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa</i>				12 Laporan	483.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-		520.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.02.0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa</i>				12 Laporan	269.625.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		300.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	-			-	215.008.447,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	200.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa				10 Orang	103.008.447,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		100.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa				12 Dokumen	112.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		100.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	J U M L A H							2.271.214.236,00							2.559.395.300,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BIRO PEREKONOMIAN PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BIRO PEREKONOMIAN						2.210.075.898,00							2.430.000.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						2.210.075.898,00							2.430.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						2.210.075.898,00							2.430.000.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan layanan administrasi	-			100 %	835.113.898,00						-	995.000.000,00	
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan	-			12 Dokumen	400.690.144,00			-	-	Administrasi Keuangan Biro Perekonomian	-	350.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	400.690.144,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Administrasi Keuangan Biro Perekonomian		350.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian	-			6 Dokumen	37.700.000,00			-	-	Administrasi Kepegawaian Biro	-	100.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Administrasi Kepegawaian Biro		50.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	7.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Administrasi Kepegawaian Biro		50.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi perkantoran dan kinerja Biro Perekonomian	-			12 Dokumen	400.593.829,00			-	-	Pelaksanaan administrasi perkantoran Biro	-	530.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	59.694.829,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pelaksanaan administrasi perkantoran Biro		150.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	30.605.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pelaksanaan administrasi perkantoran Biro		50.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	310.294.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pelaksanaan administrasi perkantoran Biro		330.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	-			20 Unit	0,00			-	-	-	-	33.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		33.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pemeliharaan Barang Milik Daerah	-			4 dokumen	11.000.000,00			-	-	Peralatan dan Mesin Biro Perekonomian	-	15.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21 Unit	11.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Peralatan dan Mesin Biro Perekonomian		15.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
2.	4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian Yang Diimplementasikan	-			100 %	1.374.962.000,00						-	1.435.000.000,00	
	4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase implementasi kebijakan ekonomi daerah	-			100 %	422.096.000,00			-	-	Kebijakan Ekonomi Makro dan Mikro	-	520.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				8 Dokumen	229.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kebijakan Ekonomi Makro dan Mikro		300.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				5 Dokumen	192.846.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kebijakan Ekonomi Makro dan Mikro		220.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase implementasi kebijakan dan koordinasi Sumber Daya Alam	-			100 %	303.950.000,00			-	-	Kebijakan Sumber Daya Alam	-	355.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				21 Dokumen	174.380.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kebijakan Sumber Daya Alam		200.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				15 Dokumen	129.570.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kebijakan Sumber Daya Alam		155.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase implementasi kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	-			100 %	463.306.000,00			-	-	Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	-	560.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				20 Dokumen	171.315.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD		200.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.03.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi				21 Dokumen	155.991.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD		200.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.03.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah				14 Dokumen	136.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD		160.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	J U M L A H							2.210.075.898,00						2.430.000.000,00		

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BIRO UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BIRO UMUM						343.089.028.301,00							375.813.482.661,10	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						294.211.179.720,00							337.077.341.832,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						294.211.179.720,00							337.077.341.832,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	222.811.859.720,00						-	258.538.089.832,00	
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	72.823.001.000,00			-	-	-	-	80.105.301.100,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				5400 Orang/ Bulan	72.823.001.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		80.105.301.100,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	18.359.192.891,00			-	-	-	-	16.991.614.651,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20 Paket	7.275.507.010,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		8.003.057.711,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	1.196.310.881,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		880.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	2.161.425.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.517.486.400,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	7.725.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.591.070.540,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	13.086.000.000,00			-	-	-	-	20.563.675.000,00	BIRO UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				5 Unit	8.136.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		9.227.625.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				6 Unit	4.950.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.336.050.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	43.526.308.330,00			-	-	-	-	47.795.594.724,90	BIRO UMUM
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	20.022.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		22.024.200,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	8.439.700.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		9.283.670.880,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Laporan	718.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		731.808.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				100 Laporan	34.348.505.530,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		37.758.091.644,90	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	36.872.745.629,00			-	-	-	-	50.691.630.852,50	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				10 Unit	214.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.894.657.908,00	BIRO UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				175 Unit	3.746.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.633.895.774,50	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	4.065.805.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.472.386.380,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				33 Unit	28.845.659.829,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		31.690.690.790,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-			-	15.697.042.000,00			-	-	-	-	16.580.056.350,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				24 Orang/Bulan	13.766.137.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.142.750.700,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				2 Paket	1.690.905.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.173.305.650,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	240.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		264.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-			-	22.447.569.870,00			-	-	-	-	25.810.217.153,60	BIRO UMUM
	4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				10 Paket	10.183.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.201.300.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				10 Paket	8.013.399.290,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.201.300.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				10 Paket	4.251.170.580,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.407.617.153,60	BIRO UMUM
2.	4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	-	-			-	71.399.320.000,00						-	78.539.252.000,00	
	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-			-	71.399.320.000,00			-	-	-	-	78.539.252.000,00	BIRO UMUM
	4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				6 Laporan	71.399.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		78.539.252.000,00	BIRO UMUM
	X	NON URUSAN						48.877.848.581,00							38.736.140.829,10	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						48.877.848.581,00							38.736.140.829,10	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	48.877.848.581,00						-	38.736.140.829,10	
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	418.434.500,00			-	-	-	-	472.450.550,00	BIRO UMUM
	X.XX.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				100 Dokumen	418.434.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		472.450.550,00	BIRO UMUM
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	800.000.000,00			-	-	-	-	880.000.000,00	BIRO UMUM
	X.XX.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		880.000.000,00	BIRO UMUM
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	228.125.000,00			-	-	-	-	231.137.500,00	BIRO UMUM
	X.XX.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	228.125.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		231.137.500,00	BIRO UMUM
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	47.431.289.081,00			-	-	-	-	37.152.552.779,10	BIRO UMUM
	X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	3.108.122.581,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.802.552.779,10	BIRO UMUM
	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				300 Laporan	44.323.166.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		31.350.000.000,00	BIRO UMUM
	J U M L A H							343.089.028.301,00							375.813.482.661,10	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						70.532.648.731,00						72.395.845.143,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						33.057.157.235,00							33.718.300.380,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						33.057.157.235,00							33.718.300.380,00	
1.	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	-			100 %	28.146.305.629,00						-	28.709.231.742,00	
	2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			13 Dokumen	72.705.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	175.119.100,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	13.125.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		13.387.500,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	6.562.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		6.693.750,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	36.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		36.720.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		13.200.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	3.937.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		4.016.250,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		1.101.600,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	18.505.931.166,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	18.771.049.789,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				125 Orang/ Bulan	18.076.091.166,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		18.332.612.989,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	429.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		428.436.800,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		10.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	5.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		5.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	93.875.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	95.752.500,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				165 Paket	23.875.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		24.352.500,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		71.400.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	3.951.323.383,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	4.029.389.852,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	25.048.886,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		25.549.864,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	145.401.686,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		148.309.720,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	60.444.160,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		61.653.043,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	91.605.931,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		93.438.050,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	60.006.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		61.206.528,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		7.586.001,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				4 Laporan	228.754.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		233.329.590,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	877.392.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		884.393.840,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	9.088.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		9.270.331,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	2.453.581.260,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		2.502.652.885,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	83.199.520,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	84.863.510,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	43.379.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		44.247.110,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	39.820.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		40.616.400,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 %	4.935.618.560,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	5.034.330.931,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	37.787.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		38.542.740,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	873.384.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		890.851.680,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	4.024.447.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		4.104.936.511,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 %	503.653.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	513.726.060,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				8 Unit	214.020.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		218.300.400,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				82 Unit	59.633.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		60.825.660,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	230.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		234.600.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
2.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pengembangan kebudayaan Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Yang Dilestarikan	-			100 % 60 % 68 %	2.455.402.571,00						-	2.504.510.622,00	
	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Objek Kebudayaan yang Dikelola	-			5 Objek	631.693.700,00			Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal)	-	-	644.327.574,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				20 Orang	114.484.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperku a penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pariwisata yang Meng gerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/De sa/Kelurah an dan Pengusaha Lokal)	-		116.774.598,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.02.1.01.0010	Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan														
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi				10 Objek	172.339.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperku a penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pariwisata yang Meng gerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/De sa/Kelurah an dan Pengusaha Lokal)	-		175.786.239,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.02.1.01.0011	Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga dan Pranata Kebudayaan yang Dibina				1 Lembaga	61.728.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperku a penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pariwisata yang Meng gerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/De sa/Kelurah an dan Pengusaha Lokal)	-		62.963.478,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.02.1.01.0012	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota														
			Jumlah PPKD Provinsi yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan				1 Dokumen	69.216.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperku a penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pariwisata yang Meng gerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/De sa/Kelurah an dan Pengusaha Lokal)	-		70.600.320,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.02.1.01.0013	Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aktivitas/Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan				1 Kegiatan	213.924.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal)	-		218.202.939,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.02.1.01.0015	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen PPKD Kabupaten Kota yang Dipantau dan Dievaluasi				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal)	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Objek Kesenian Tradisional yang Dilestarikan	-			3 Objek	1.207.758.900,00			-	Pariwisata yang Meng gerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/De sa/Kelurah an dan Pengusaha Lokal)	-	-	1.231.914.078,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya														
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				2 Objek	1.000.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pariwisata yang Meng gerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/De sa/Kelurah an dan Pengusaha Lokal)	-		1.020.714.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.02.1.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				2 Laporan	114.774.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pariwisata yang Meng gerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/De sa/Kelurah an dan Pengusaha Lokal)	-		117.069.939,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan														
			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				5 Sertifikat	92.284.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pariwisata yang Meng gerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/De sa/Kelurah an dan Pengusaha Lokal)	-		94.130.139,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.02.1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Orang/Lembaga Adat yang Dibina	-			2 Lembaga	615.949.971,00			-	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal)	-	-	628.268.970,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.02.1.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat														
			Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				2 Orang	615.949.971,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal)	-		628.268.970,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	-			15 %	0,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	-	-			-	0,00			-	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/De sa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal)	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.04.1.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi														
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/De sa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal)	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.04.1.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/De sa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal)	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.04.1.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah														
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/De sa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal)	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.04.1.01.0004	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penulisan Sejarah Lokal Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pariwisata yang Meng gerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/De sa/Kelurah an dan Pengusaha Lokal)	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
4.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	-			8 % 9 %	2.455.449.035,00						-	2.504.558.016,00	
	2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Penetapan Objek Diduga Cagar Budaya	-			5 Objek	268.417.000,00			Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pariwisata yang Meng gerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/De sa/Kelurah an dan Pengusaha Lokal)	-	-	273.785.340,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.05.1.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				0 Objek	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pariwisata yang Meng gerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/De sa/Kelurah an dan Pengusaha Lokal)	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				5 Objek	268.417.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pariwisata yang Meng gerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/De sa/Kelurah an dan Pengusaha Lokal)	-		273.785.340,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.05.1.01.0003	Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan				0 Objek	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pariwisata yang Meng gerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/De sa/Kelurah an dan Pengusaha Lokal)	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	-			3 Objek	2.187.032.035,00			Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pariwisata yang Meng gerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/De sa/Kelurah an dan Pengusaha Lokal)	-	-	2.230.772.676,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.05.1.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi				3 Objek	1.681.013.785,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/ Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal)	-		1.714.634.061,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.05.1.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				3 Objek	392.291.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		400.137.075,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.05.1.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan				2 Objek	113.727.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pariwisata yang Meng gerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/De sa/Kelurah an dan Pengusaha Lokal)	-		116.001.540,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.05.1.02.0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya														
			Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pariwisata yang Meng gerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/De sa/Kelurah an dan Pengusaha Lokal)	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.05.1.03	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	-	-			-	0,00			-	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/De sa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal)	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.05.1.03.0001	Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi				0 Objek	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/De sa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal)	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.05.1.03.0002	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/De sa/Kelurah an dan Pengusaha Lokal)	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						37.475.491.496,00							38.677.544.763,00	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						37.475.491.496,00							38.677.544.763,00	
1.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Nusantara Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Mancanegara	-			23.50 % 7.58 %	5.977.129.896,00						-	5.784.093.494,00	
	3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	-			7 Kegiatan	806.300.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pariwisata yang Meng gerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/De sa/Kelurah an dan Pengusaha Lokal)	-	-	824.262.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.1.01.0001	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi				2 Lokasi	306.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pariwisata yang Meng gerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/De sa/Kelurah an dan Pengusaha Lokal)	-		314.262.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.1.01.0006	Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi yang sah dan legal ditetapkan Kepala Daerah				5 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pariwisata yang Meng gerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/De sa/Kelurah an dan Pengusaha Lokal)	-		510.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.1.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengelola Daya Tarik Wisata yang ditingkatkan kapasitasnya				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal)	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang Dikelola	-			5 KSPP	2.452.230.000,00			-	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal)	-	-	2.502.651.600,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.1.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				12 Unit	2.452.230.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/De sa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal)	-		2.502.651.600,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.1.02.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi														
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				0 Lokasi	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/De sa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal)	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.1.02.0008	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/De sa/Kelurah an dan Pengusaha Lokal)	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikelola	-			7 DPP	2.141.686.996,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pariwisata yang Meng gerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/De sa/Kelurah an dan Pengusaha Lokal)	-	-	1.884.334.736,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.1.03.0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Ditetapkan				2 Lokasi	306.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pariwisata yang Meng gerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/De sa/Kelurah an dan Pengusaha Lokal)	-		314.262.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.1.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi				6 Dokumen	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pariwisata yang Meng gerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/De sa/Kelurah an dan Pengusaha Lokal)	-		510.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.1.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara				3 Unit	694.489.196,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal)	-		708.990.980,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.1.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi														
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi				2 Lokasi	145.658.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal)	-		149.949.078,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.1.03.0008	Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Provinsi				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pariwisata yang Meng gerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/De sa/Kelurah an dan Pengusaha Lokal)	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.1.03.0009	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi														
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pariwisata yang Meng gerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/De sa/Kelurah an dan Pengusaha Lokal)	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.1.03.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan				200 Orang	195.238.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pariwisata yang Meng gerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/De sa/Kelurah an dan Pengusaha Lokal)	-		201.132.678,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.1.03.0011	Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi														
			Jumlah Kegiatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata				0 Kegiatan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pariwisata yang Meng gerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/De sa/Kelurah an dan Pengusaha Lokal)	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.1.03.0012	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pariwisata yang Meng gerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/De sa/Kelurah an dan Pengusaha Lokal)	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-			130 Usaha	576.912.900,00			-	Pariwisata yang Meng gerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/De sa/Kelurah an dan Pengusaha Lokal)	-	-	572.845.158,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.1.04.0008	Pembinaan dan Pengawasan Kepatuhan Usaha Pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi				0 Usaha Pariwisata	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pariwisata yang Meng gerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/De sa/Kelurah an dan Pengusaha Lokal)	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.1.04.0009	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)														
			Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)				100 Unit Usaha	425.292.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pariwisata yang Meng gerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/De sa/Kelurah an dan Pengusaha Lokal)	-		440.836.758,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.1.04.0010	Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pariwisata yang Meng gerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/De sa/Kelurah an dan Pengusaha Lokal)	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.1.04.0011	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Provinsi														
			Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Provinsi				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pariwisata yang Meng gerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/De sa/Kelurah an dan Pengusaha Lokal)	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.1.04.0012	Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi				0 Usaha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pariwisata yang Meng gerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/De sa/Kelurah an dan Pengusaha Lokal)	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.1.04.0013	Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata														
			Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pariwisata yang Meng gerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/De sa/Kelurah an dan Pengusaha Lokal)	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.1.04.0015	Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Usaha Pariwisata yang telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan				30 Pelaku Usaha	151.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pariwisata yang Meng gerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/De sa/Kelurah an dan Pengusaha Lokal)	-		132.008.400,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
2.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	-			12.5 %	29.700.000.000,00						-	30.600.000.000,00	
	3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Kegiatan/Event Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	-			30 Kegiatan	29.700.000.000,00			-	Pariwisata yang Meng gerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/De sa/Kelurah an dan Pengusaha Lokal)	-	-	30.600.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				15 Dokumen	1.952.421.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/De sa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal)	-		1.991.469.420,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.03.1.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/De sa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal)	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronissi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-			6 Dokumen	995.762.900,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-	-	1.017.208.158,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.04.1.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.04.1.02.0011	Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.04.1.02.0012	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pariwisata yang Meng gerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/De sa/Kelurah an dan Pengusaha Lokal)	-		204.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.04.1.02.0013	Fasilitasi Kekayaan Intelektual														
			Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual				100 Orang	409.586.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pariwisata yang Meng gerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/De sa/Kelurah an dan Pengusaha Lokal)	-		418.543.179,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.04.1.02.0014	Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif				0 Promosi	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.04.1.02.0015	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah														
			Jumlah lembaga/asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah				100 Lembaga	86.176.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pariwisata yang Meng gerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/De sa/Kelurah an dan Pengusaha Lokal)	-		88.664.979,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.04.1.02.0017	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pariwisata yang Meng gerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/De sa/Kelurah an dan Pengusaha Lokal)	-		102.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.04.1.02.0019	Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif														
			Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif				1 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pariwisata yang Meng gerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/De sa/Kelurah an dan Pengusaha Lokal)	-		204.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
4.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	-			48.72 %	802.598.700,00						-	1.276.243.111,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-			210 Orang	717.557.250,00			-	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/De sa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal)	-	-	1.188.506.332,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.1.01.0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				150 Orang	512.194.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/De sa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal)	-		524.503.737,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.1.01.0007	Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pariwisata yang Meng gerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/De sa/Kelurah an dan Pengusaha Lokal)	-		5.250.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.1.01.0008	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		5.250.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.1.01.0011	Pendampingan penciptaan produk kreatif (inkubasi)														
			Jumlah produk kreatif				0 Produk	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		5.250.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.1.01.0012	Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Asesor (WPA) Bidang Pariwisata														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA)				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/De sa/Kelurah an dan Pengusaha Lokal)	-		5.250.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.1.01.0013	Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Bidang Pariwisata														
			Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC)				5 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/De sa/Kelurah an dan Pengusaha Lokal)	-		5.250.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.1.01.0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata														
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				200 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		421.043.437,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.1.01.0016	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI				60 Orang	205.362.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		211.459.158,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.1.01.0017	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif														
			0				0 0	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		5.250.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	-			100 Orang	85.041.450,00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-	-	87.736.779,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.1.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif														
			Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				100 Orang	85.041.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		87.736.779,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.1.02.0003	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif														
			Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.1.02.0004	Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif														
			Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.1.02.0005	Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.1.02.0006	Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi pendiriannya sampai sah dan legal				0 Lembaga	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.1.02.0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif														
			Jumlah Orang yang di fasilitasi sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
		UPTD TAMAN BUDAYA						5.746.917.105,00							5.861.855.447,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.746.917.105,00							5.861.855.447,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						5.746.917.105,00							5.861.855.447,00	
1.	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	-			100 %	2.187.450.305,00						-	2.231.199.311,00	
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	1.254.409.081,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.279.497.263,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	9.450.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		9.639.969,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	441.280.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		450.106.059,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	30.175.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		30.779.316,00	UPTD TAMAN BUDAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	41.901.231,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		42.739.256,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	6.831.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		6.967.671,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				3 Laporan	61.855.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		63.092.712,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	662.914.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		676.172.280,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	529.275.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	539.860.500,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	14.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		14.280.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	390.475.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-TAMAN BUDAYA	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		398.284.500,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	100.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-TAMAN BUDAYA	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		102.816.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	24.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		24.480.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	403.766.224,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	411.841.548,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	119.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		122.318.400,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	283.846.224,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-TAMAN BUDAYA	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		289.523.148,00	UPTD TAMAN BUDAYA
2.	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	-			15 %	3.559.466.800,00						-	3.630.656.136,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kesenian Tradisional yang Dibina	-			15 %	3.559.466.800,00			-	Pariwisata yang Meng gerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/De sa/Kelurah an dan Pengusaha Lokal)	-	-	3.630.656.136,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				120 Orang	92.872.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pariwisata yang Meng gerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/De sa/Kelurah an dan Pengusaha Lokal)	-		94.730.256,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.03.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga	3.466.594.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-TAMAN BUDAYA	-	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/De sa/Kelurah an dan Pengusaha Lokal)	-		3.535.925.880,00	UPTD TAMAN BUDAYA
		UPTD MUSEUM NEGERI						4.491.454.786,00							4.581.283.882,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.491.454.786,00							4.581.283.882,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						4.491.454.786,00							4.581.283.882,00	
1.	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	-			100 %	1.243.199.260,00						-	1.268.063.245,00	
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	310.402.460,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	316.610.509,00	UPTD MUSEUM NEGERI
	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	UPTD MUSEUM NEGERI
	2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	75.557.947,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		77.069.106,00	UPTD MUSEUM NEGERI
	2.22.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	118.499.357,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		120.869.344,00	UPTD MUSEUM NEGERI
	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	55.787.156,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		56.902.899,00	UPTD MUSEUM NEGERI
	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	31.064.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		31.685.892,00	UPTD MUSEUM NEGERI
	2.22.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				8 Laporan	29.493.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		30.083.268,00	UPTD MUSEUM NEGERI
	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	UPTD MUSEUM NEGERI
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	843.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	859.860.000,00	UPTD MUSEUM NEGERI
	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	UPTD MUSEUM NEGERI
	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	843.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		859.860.000,00	UPTD MUSEUM NEGERI
	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	UPTD MUSEUM NEGERI
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	89.796.800,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	91.592.736,00	UPTD MUSEUM NEGERI
	2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	36.820.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		37.556.400,00	UPTD MUSEUM NEGERI
	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	52.976.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		54.036.336,00	UPTD MUSEUM NEGERI
	2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	UPTD MUSEUM NEGERI
2.	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	-			97.99 %	3.248.255.526,00						-	3.313.220.637,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Pengunjung Museum	-			84428 Orang	3.248.255.526,00			-	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/De sa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal)	-	-	3.313.220.637,00	UPTD MUSEUM NEGERI
	2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu														
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan				7218 Unit	605.843.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	-	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/De sa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal)	-		617.960.268,00	UPTD MUSEUM NEGERI
	2.22.06.1.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya				8 Orang	599.651.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/De sa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal)	-		611.644.020,00	UPTD MUSEUM NEGERI
	2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum														
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum				8 Unit	1.250.880.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	-	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/De sa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal)	-		1.275.898.212,00	UPTD MUSEUM NEGERI
	2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia				3 Unit	143.276.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	-	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/De sa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal)	-		146.141.520,00	UPTD MUSEUM NEGERI
	2.22.06.1.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi				3 Unit	648.604.526,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/De sa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal)	-		661.576.617,00	UPTD MUSEUM NEGERI
	2.22.06.1.01.0008	Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Terlibat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/De sa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal)	-		0,00	UPTD MUSEUM NEGERI
	2.22.06.1.01.0010	Pengelolaan Operasional Museum														
			Jumlah Layanan Operasional Museum				0 Layanan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/De sa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal)	-		0,00	UPTD MUSEUM NEGERI
	2.22.06.1.01.0013	Pengelolaan Koleksi Museum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Koleksi Museum yang Dikelola				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pariwisata yang Meng gerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/De sa/Kelurah an dan Pengusaha Lokal)	-		0,00	UPTD MUSEUM NEGERI	
	J U M L A H							80.771.020.622,00							82.838.984.472,00		

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						40.691.461.222,00							0,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						40.425.495.551,56							0,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						40.425.495.551,56							0,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	27.477.185.115,56						-	0,00	
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	22.700.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	22.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	20.099.658.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				107 Orang/ Bulan	20.034.738.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	64.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	288.255.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				10 Unit	36.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	251.855.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	795.331.261,56			-	-	-	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	46.560.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	127.099.689,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	63.883.772,56	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				2 Laporan	120.787.300,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	437.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	5.831.010.554,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	31.225.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	472.300.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	5.327.485.554,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	440.230.300,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				10 Unit	320.830.300,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	119.400.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	-	-			-	699.746.210,00						-	0,00	
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	-	-			-	549.763.510,00			-	Pengemba ngan Ekonomi Hijau dan Biru	-	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat														
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola				210403.53 Ha	199.998.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengemba ngan Ekonomi Hijau dan Biru	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														
			Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi				50 Ha	249.765.510,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengemba ngan Ekonomi Hijau dan Biru	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0013	Pengintegrasian Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi														
			Dokumen Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K yang terintegrasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi				1 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengemba ngan Ekonomi Hijau dan Biru	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	-	-			-	50.000.000,00			-	Pengemba ngan Ekonomi Hijau dan Biru	-	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.02.0007	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan														
			Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan				1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengemba ngan Ekonomi Hijau dan Biru	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-	-			-	99.982.700,00			-	Pengemba ngan Ekonomi Hijau dan Biru	-	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0003	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														
			Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				100 Orang	99.982.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengemba ngan Ekonomi Hijau dan Biru	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	-			-	6.998.580.000,00						-	0,00	
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	-	-			-	6.998.580.000,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				15 Unit	4.695.080.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap														
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				10 Unit	2.303.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-			-	0,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.02.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap														
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat				15 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	-			-	3.999.999.988,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-			-	0,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.01.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan														
			Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan				0 Rekomend asi	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.01.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan				0 Rekomend asi	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	-	-			-	3.999.999.988,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pembudidaya				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0010	Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Pembudidaya Ikan yang memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan				10 Unit	3.999.999.988,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0014	Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan lingkungan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
5.	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-			-	750.077.650,00						-	0,00	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	-			-	600.077.300,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				5 Pelaku Usaha	399.997.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi														
			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				5 Pelaku Usaha	78.488.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan				5 Kelompok Masyarakat	121.592.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-			-	150.000.350,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				5 Pelaku Usaha	100.000.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02.0006	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi														
			Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				6 Pelaku Usaha	50.000.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
6.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-	-			-	499.906.588,00						-	0,00	
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	-	-			-	49.980.000,00			-	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	-	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitas				30 Unit Usaha	299.985.488,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	X	NON URUSAN						265.965.670,44							0,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						265.965.670,44							0,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	265.965.670,44						-	0,00	
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	8.160.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	X.XX.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	8.160.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	257.805.670,44			-	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	-	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	257.805.670,44	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN						499.994.648,00							0,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						499.994.648,00							0,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						499.994.648,00							0,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	176.415.000,00						-	0,00	
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	176.415.000,00			-	-	-	-	0,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	176.415.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
2.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-	-			-	323.579.648,00						-	0,00	
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	-	-			-	323.579.648,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing														
			Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing				2 Kegiatan	101.186.358,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko				2 Kegiatan	222.393.290,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
		UPTD PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PULAU TELLO						400.000.000,00							0,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						400.000.000,00							0,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						400.000.000,00							0,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	50.000.000,00						-	0,00	
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	50.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PULAU TELLO
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PULAU TELLO
2.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	-			-	350.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	-	-			-	350.000.000,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PULAU TELLO
	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan														
			<i>Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana</i>				5 Layanan	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PULAU TELLO
		UPTD PELABUHAN PERIKANAN TANJUNG BALAI - ASAHAN						600.165.943,00							0,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						600.165.943,00							0,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						600.165.943,00							0,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	185.980.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	185.980.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	0,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN TANJUNG BALAI - ASAHAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	185.980.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN TANJUNG BALAI - ASAHAN
2.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	-			-	414.185.943,00						-	0,00	
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	-	-			-	414.185.943,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN TANJUNG BALAI - ASAHAN
	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia				2 Unit	414.185.943,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN TANJUNG BALAI - ASAHAN
		UPTD BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU DAN LAUT						699.972.289,00							0,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						699.972.289,00							0,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						699.972.289,00							0,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	180.000.000,00						-	0,00	
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	180.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	0,00	UPTD BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU DAN LAUT
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	180.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	UPTD BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU DAN LAUT
2.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	-			-	519.972.289,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	-	-			-	419.872.289,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU DAN LAUT
	3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut														
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut				5 Unit	184.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU DAN LAUT
	3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut				3 Unit	235.272.289,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU DAN LAUT
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	-	-			-	100.100.000,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU DAN LAUT
	3.25.04.1.06.0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				5 Unit	100.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU DAN LAUT		
	J U M L A H							42.891.594.102,00								0,00		

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN						133.303.806.436,00							114.862.268.063,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						133.303.806.436,00							114.862.268.063,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						133.303.806.436,00							114.862.268.063,00	
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	42.645.100.097,00						-	66.268.477.118,00	
	2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	343.883.100,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		236.490.100,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				34 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		107.393.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	14.959.900.000,00			-	-	-	-	16.455.890.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/ Bulan	14.959.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		16.455.890.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	62.060.000,00			-	-	-	-	219.560.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				120 Orang	21.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		109.560.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				120 Orang	40.460.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		110.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	5.961.889.234,00			-	-	-	-	20.429.493.192,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	319.103.342,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		294.761.861,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	678.438.508,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		16.922.670.539,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	2.189.185.316,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		284.550.459,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	902.003.068,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		945.137.963,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	388.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		342.539.670,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	132.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		99.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	89.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		99.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	1.262.579.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.300.757.700,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		141.075.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	573.631.192,00			-	-	-	-	421.320.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	573.631.192,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		421.320.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	9.720.375.791,00			-	-	-	-	21.494.142.526,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		19.800.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	2.624.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.034.074.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		978.619.400,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	7.084.375.791,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		16.461.649.126,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	11.367.243.880,00			-	-	-	-	6.904.188.300,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				34 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.683.787.600,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	612.518.880,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		730.550.700,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				103 Unit	1.432.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.189.850.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	9.322.605.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.300.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
2.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	-	-			-	7.650.000.000,00						-	8.050.000.000,00	
	2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	-	-			-	4.618.000.000,00			-	-	-	-	5.700.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi														
			Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				432 Orang	1.118.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.950.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.02.1.01.0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi				1 Dokumen	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		450.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi														
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				80 Orang	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.02.1.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi														
			Jumlah pemuda di tingkat provinsi yang haknya terpenuhi				3600 Orang	2.100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi														
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				200 Orang	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	3.032.000.000,00			-	-	-	-	2.350.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi														
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi				51 Organisasi	3.032.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.350.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
3.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-	-			-	79.658.706.339,00						-	37.193.790.945,00	
	2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-	-			-	14.750.505.789,00			-	-	-	-	8.294.991.507,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus				70 Dokumen	991.799.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		613.054.762,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.1.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi														
			Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia				31 Unit	13.758.706.339,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.681.936.745,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	-	-			-	18.008.200.550,00			-	-	-	-	9.987.012.610,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga														
			Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga				73 Orang	1.830.973.096,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		8.872.578.410,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.03.1.02.0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi														
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi				1800 Kegiatan	1.651.535.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		265.578.500,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi														
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara				12 Kegiatan	14.525.692.454,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		848.855.700,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	-	-			-	15.703.591.355,00			-	-	-	-	2.161.637.500,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.03.1.03.0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga														
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga				65 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		979.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.03.1.03.0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi														
			Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi				1 Dokumen	150.104.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		82.637.500,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi														
			Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				11950 Orang	15.553.486.855,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	-			-	31.196.408.645,00			-	-	-	-	16.750.149.328,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait														
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait				5 Dokumen	27.689.964.517,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		13.243.705.200,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.03.1.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi														
			Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi				16 Dokumen	3.506.444.128,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.506.444.128,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
4.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	-	-			-	3.350.000.000,00						-	3.350.000.000,00	
	2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	-			-	3.350.000.000,00			-	-	-	-	3.350.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.04.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi														
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya				1 Organisasi	3.350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.350.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
		UPTD KEBAKATAN OLAHRAGA						32.045.345.728,00							34.000.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						32.045.345.728,00							34.000.000.000,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						32.045.345.728,00							34.000.000.000,00	
1.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-	-			-	32.045.345.728,00						-	34.000.000.000,00	
	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	-	-			-	32.045.345.728,00			-	-	-	-	34.000.000.000,00	UPTD KEBAKATAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03.0007	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)														
			Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)				1 Pelatda	32.045.345.728,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		34.000.000.000,00	UPTD KEBAKATAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		UPTD PENGELOLAAN KAWASAN PUSAT OLAHRAGA						29.354.899.903,00							28.000.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						29.354.899.903,00							28.000.000.000,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						29.354.899.903,00							28.000.000.000,00	
1.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-	-			-	29.354.899.903,00						-	28.000.000.000,00	
	2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-	-			-	29.354.899.903,00			-	-	-	-	28.000.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN KAWASAN PUSAT OLAHRAGA
	2.19.03.1.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi														
			Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia				19 Unit	29.354.899.903,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		28.000.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN KAWASAN PUSAT OLAHRAGA
	J U M L A H							194.704.052.067,00							176.862.268.063,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KESEHATAN						754.757.140.566,00							677.001.500.871,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						754.757.140.566,00							677.001.500.871,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						754.757.140.566,00							677.001.500.871,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	-			A Indeks	276.135.598.771,00						-	306.179.398.923,00	
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perncaanaan, Anggaran, dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan yang Tersusun	-			1 Dokumen	674.940.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen- yangandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan	-	1.422.369.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	524.056.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		1.220.629.080,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	13.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		20.691.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		39.056.765,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	28.695.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		31.564.720,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	39.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		50.423.835,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	22.599.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		24.858.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	31.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		35.145.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang Tersedia	-			1 Dokumen	248.322.607.211,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan	-	273.522.341.235,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				859 Orang/ Bulan	247.874.767.211,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		272.658.128.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 Dokumen	417.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		537.240.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		119.697.325,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		30.192.360,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		18.513.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		113.355.550,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		45.214.400,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Aset (Inventarisasi Barang) yang Tersusun	-			1 Dokumen	38.882.914,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan	-	42.771.205,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		4.372.225,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan pen yangand disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		6.467.630,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	38.882.914,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan pen yangand disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		13.268.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		18.662.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kepegawaian yang Tersusun	-			1 Dokumen	400.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan	-	794.429.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		12.903.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		15.411.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		202.586.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		509.488.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		54.040.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Umum yang Tersusun	-			1 Dokumen	3.788.663.210,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan	-	3.619.749.283,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	93.990.704,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		101.926.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	349.444.454,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		433.457.783,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	157.070.794,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		144.304.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	310.946.258,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	55.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		61.325.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	356.145.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		391.759.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	2.465.316.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		2.256.617.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		30.360.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	-			1 Paket	754.090.096,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan	-	2.539.246.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		1.107.128.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	321.712.120,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		101.228.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	432.377.976,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		1.330.890.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pelayanan umum yang disusun	-			1 Dokumen	15.118.011.188,00			Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangand disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan	-	16.129.411.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	33.565.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangand disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		32.556.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	2.052.347.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		2.257.582.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	13.032.098.388,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		13.839.272.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang tersusun	-			1 Paket	7.038.403.252,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan	-	8.109.081.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				11 Unit	253.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		231.990.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	1.099.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	534.493.252,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		656.161.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5.151.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		7.220.930.600,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi Proporsi Fasyankes yang Terakreditasi Paripurna Angka Kematian Ibu Persentase Wasting (Balita Gizi Kurang dan Gizi Buruk)	-			100 % 54.2 % 58.9 per 100.000 Kelahira 7.5 %	470.884.007.845,00						-	365.203.981.886,00	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pengembangan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Ditingkatkan	-			5 Paket	8.621.805.145,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan	-	17.938.470.936,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan				1 Layanan	1.395.601.566,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		3.384.006.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		354.530.550,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	7.176.203.579,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		14.199.933.486,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah	-			17 Layanan	460.898.779.933,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan	-	345.150.962.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar				1000 Orang	761.739.773,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		692.686.618,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1000 Orang	630.345.861,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		713.962.217,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				1 Dokumen	813.465.811,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		2.357.632.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif				1 Dokumen	314.112.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		110.640.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut				1 Dokumen	631.319.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		333.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	5.384.565.248,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		6.467.960.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	145.467.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		204.853.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	475.548.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		347.018.144,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	2.591.561.291,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		1.810.605.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	161.307.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		78.716.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	4.184.613.225,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		2.864.584.787,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				1 Dokumen	27.475.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		37.290.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				1 Dokumen	431.251.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		435.857.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA														
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis				2000 Orang	330.643.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		157.184.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	439.221.193.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK ROKOK, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		324.760.163.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	971.799.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		892.820.830,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota				1 Dokumen	346.158.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		508.591.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan				1 Dokumen	516.691.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		986.022.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0020	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas				1 Dokumen	33.801.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota				1 Dokumen	55.329.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		42.506.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	2.725.891.944,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		968.075.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional														
			Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	144.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0026	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		215.092.204,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan	-			33 Kab/Kota	359.719.387,00			Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan	-	740.545.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	359.719.387,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		740.545.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah rumah sakit dan fasyankes yang menerapkan standarisasi dan klasifikasi	-			1 Unit	1.003.703.380,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan	-	1.374.002.650,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				2 Unit	112.244.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		217.562.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit														
			Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				8 Unit	676.529.380,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		66.803.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan				40 Unit	214.930.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		1.089.637.450,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	-			3.92 %	5.058.551.000,00						-	1.896.498.532,00	
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan SDMK	-			1 Dokumen	4.824.644.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan	-	962.733.392,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Orang	4.824.644.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		742.733.392,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.01.0002	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi				5 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		220.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah dokumen peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDMK yang dilaksanakan	-			1 Dokumen	233.906.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan	-	933.765.140,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				0 Orang	233.906.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		713.765.140,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjutan Penerbitan Perizinan				169 Sarana	47.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangangan disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		289.476.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Jumlah Sarana UKOT yang dibina dan diawasi	-			1 Sarana	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangangan disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan	-	76.212.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakanjutan Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional				30 Sarana	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangangan disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		76.212.400,00	DINAS KESEHATAN
5.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	-			19 %	2.631.532.950,00						-	3.355.933.130,00	
	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan advokasi, pemberdayaan, dan kemitraan dalam rangka peningkatan GERMAS	-			33 Kab/Kota	2.631.532.950,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangangan disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan	-	3.170.675.530,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				1 Dokumen	2.631.532.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan pen yangandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		3.170.675.530,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pengembangan UKBM	-			33 Kab/Kota	0,00			Memperku a pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan pen yangandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan	-	185.257.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		185.257.600,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN						212.885.952.446,00							212.885.952.446,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						212.885.952.446,00							212.885.952.446,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						212.885.952.446,00							212.885.952.446,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan layanan administrasi	-			100 %	169.759.238.989,00						-	171.121.507.439,00	
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan RS	-			3 Laporan	64.516.200,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-	-	44.473.062,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	35.329.200,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Medan Estate	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		10.436.690,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	6.736.000,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Medan Estate	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		7.178.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	12.026.000,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Medan Estate	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		10.129.772,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	6.750.000,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Medan Estate	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		9.292.600,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	3.675.000,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Medan Estate	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		7.436.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan yang terlaksana	-			100 %	2.580.000,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-	-	7.837.572,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				200 Orang/ Bulan	0,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Medan Estate	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		0,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1.290.000,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Medan Estate	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		3.490.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				4 Dokumen	1.290.000,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Medan Estate	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		4.347.572,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan BMD yang terpenuhi	-			100 %	1.225.000,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-	-	1.120.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1.225.000,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Medan Estate	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		1.120.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang terlaksana	-			4 Laporan	5.685.000,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-	-	1.420.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				650 Dokumen	5.685.000,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Medan Estate	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		1.420.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	-			4 laporan	2.803.388.989,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-	-	3.244.750.119,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	192.432.510,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Medan Estate	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		192.860.576,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.576.224.304,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Medan Estate	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		2.183.106.543,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	169.032.175,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		0,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	60.000.000,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Medan Estate	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		60.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Medan Estate	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		30.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	775.700.000,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Medan Estate	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		778.783.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan yang terpenuhi	-			100 %	232.500.000,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-	-	260.892.670,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	232.500.000,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Medan Estate	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		235.917.670,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Medan Estate	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		24.975.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan Urusan Pemerintahan yang terlaksana	-			100 %	15.781.053.800,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-	-	16.709.802.016,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Medan Estate	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		20.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	6.760.000.000,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Medan Estate	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		6.722.400.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	199.500.000,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Medan Estate	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		199.700.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	8.801.553.800,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Medan Estate	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		9.767.702.016,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara	-			100 %	868.290.000,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-	-	851.212.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				7 Unit	300.090.000,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Medan Estate	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		302.510.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	368.200.000,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Medan Estate	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		373.220.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	200.000.000,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Medan Estate	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		175.482.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase CRR yang terpenuhi	-			100 %	150.000.000.000,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-	-	150.000.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	14.909.865.328,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Medan Estate	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		14.916.901.661,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi														
			Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara				1 Unit	1.235.859.200,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Medan Estate	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		267.677.100,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				1 Unit	1.024.957.356,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Medan Estate	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		176.469.750,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.02.1.01.0020	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				1 Unit	1.400.000,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Medan Estate	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		1.926.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit														
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	0,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Medan Estate	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		11.000.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	14.222.493.573,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Medan Estate	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		6.919.321.137,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tempat tidur	-			308 Tempat Tidur	6.300.388.000,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-	-	1.204.937.076,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1.965.564.000,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Medan Estate	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		194.196.382,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	20.744.000,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Medan Estate	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		30.400.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit</i>				1 Dokumen	4.314.080.000,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Medan Estate	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		980.340.694,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	<i>terlaksananya pelayanan Informasi Publik Pelayanan Kesehatan</i>	-			1 Laporan	31.630.000,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-	-	75.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan</i>				1 Dokumen	31.630.000,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Medan Estate	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		75.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	<i>Sumber Daya Manuasia yang Profesional, Ramah dan Empati</i>	-			100 %	2.543.230.000,00						-	2.770.538.571,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	<i>Jumlah Pegawai yang menerima Pelatihan dan pendidikan</i>	-			50 orang	2.543.230.000,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-	-	2.770.538.571,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat</i>				50 Orang	2.543.230.000,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Medan Estate	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		2.770.538.571,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
		UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM						53.134.647.590,00							58.448.721.055,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						53.134.647.590,00							58.448.721.055,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						53.134.647.590,00							58.448.721.055,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	19.866.108.086,00						-	21.852.718.893,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran dan Evaluasi Kinerja	-			12 Dokumen	15.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Peningkatan Layanan Administrasi	-	16.500.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	12.000.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Peningkatan Layanan Administrasi		13.200.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	3.000.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Peningkatan Layanan Administrasi		3.300.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	-			12 Bulan	121.121.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Tersedianya layanan administrasi	-	133.233.650,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem
	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	121.121.500,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangand disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Tersedianya layanan administrasi		133.233.650,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	20.500.000,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-	-	22.550.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				4 Dokumen	1.175.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		1.292.500,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	19.325.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		21.257.500,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah peralatan, perlengkapan dan bahan logistik kantor	-			4 Laporan 4 Paket	2.477.074.099,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Peningkatan Layanan Administrasi Umum	-	2.724.781.508,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	133.099.937,00	Kota Medan, Medan Tuntungan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Peningkatan Layanan Administrasi Umum		146.409.930,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	475.534.752,00	Kota Medan, Medan Tuntungan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Peningkatan Layanan Administrasi Umum		523.088.227,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	484.875.000,00	Kota Medan, Medan Tuntungan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangangan disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Peningkatan Layanan Administrasi Umum		533.362.500,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	678.932.910,00	Kota Medan, Medan Tuntungan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangangan disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Peningkatan Layanan Administrasi Umum		746.826.201,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	83.253.500,00	Kota Medan, Medan Tuntungan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Peningkatan Layanan Administrasi Umum		91.578.850,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	621.378.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Peningkatan Layanan Administrasi Umum		683.515.800,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	15.113.717.487,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-	-	16.625.089.235,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				4 Laporan	109.873.170,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		120.860.487,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	1.246.721.701,00	Kota Medan, Medan Tuntungan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		1.371.393.871,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	13.757.122.616,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		15.132.834.877,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT Jiwa Prof. Dr. M. ILDREM
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.118.642.500,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-	-	2.330.506.750,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT Jiwa Prof. Dr. M. ILDREM
	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				4 Unit	263.080.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		289.388.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT Jiwa Prof. Dr. M. ILDREM
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	461.840.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		508.024.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	438.260.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		482.086.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	955.462.500,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		1.051.008.750,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah dokumen pelayanan BLUD	-			4 Dokumen	52.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Peningkatan Layanan BLUD	-	57.750,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	52.500,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Peningkatan Layanan BLUD		57.750,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase layanan kesehatan yang sesuai standar rumah sakit	-			100 %	32.646.939.504,00						-	35.912.242.162,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah obat-obatan dan bahan habis pakai lainnya Jumlah sarana prasarana, alat kesehatan sesuai standar pelayanan rumah sakit	-			4 Paket 4 Paket	27.396.679.708,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Peningkatan Layanan Kesehatan	-	30.136.347.678,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit				4 Unit	11.964.259.381,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Peningkatan Layanan Kesehatan		13.160.685.319,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.02.1.01.0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan				50 Unit	5.466.102.160,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Peningkatan Layanan Kesehatan		6.012.712.376,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				195 Unit	119.032.426,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Peningkatan Layanan Kesehatan		130.935.668,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan</i>				4 Paket	9.847.285.741,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Peningkatan Layanan Kesehatan		10.832.014.315,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan rumah sakit Jumlah tempat tidur Jumlah Tempat Tidur</i>	-			4 Dokumen 400 tempat tidur 400 Tempat Tidur	4.357.697.846,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Peningkatan Layanan Kesehatan	-	4.793.977.339,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				4 Dokumen	304.902.907,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Peningkatan Layanan Kesehatan		335.902.907,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				4 Dokumen	1.563.100.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Peningkatan Layanan Kesehatan		1.719.410.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				4 Dokumen	2.194.709.761,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen- yangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Peningkatan Layanan Kesehatan		2.414.180.737,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.02.1.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA														
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis				50 Orang	294.985.178,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen- yangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Peningkatan Layanan Kesehatan		324.483.695,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan rumah sakit Terlaksananya Pelayanan Informasi Publik Pelayanan Kesehatan	-			12 Dokumen 1 Laporan	892.561.950,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Peningkatan Layanan Kesehatan	-	981.917.145,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				4 Dokumen	892.561.950,00	Kota Medan, Medan Tuntungan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Peningkatan Layanan Kesehatan		981.917.145,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Jumlah Pegawai Yang Menerima Pelatihan dan Pendidikan Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM	-			50 Orang 70 % 8 Kegiatan	621.600.000,00						-	683.760.000,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	-			A Indeks	4.922.103.579,00						-	7.293.323.195,00	
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang Tersedia	-			1 Dokumen	87.720.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan	-	96.492.000,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA
	1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	87.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		96.492.000,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kepegawaian yang Tersusun	-			1 Dokumen	41.500.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan	-	45.650.000,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA
	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	41.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		45.650.000,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Umum yang Tersusun	-			1 Dokumen	489.050.871,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan	-	537.957.276,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	68.476.077,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		75.325.003,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	95.344.640,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangand disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		104.879.104,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA
	1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	87.194.194,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangand disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		95.913.613,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	195.585.960,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		215.144.556,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA
	1.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	9.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		10.725.000,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	32.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		35.970.000,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	-			1 Paket	2.519.503.024,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan	-	2.772.133.368,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA
	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	824.018.731,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		906.971.484,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1.695.484.293,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		1.865.161.884,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pelayanan umum yang disusun	-			1 Dokumen	1.394.285.408,00			Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan	-	3.412.041.847,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA
	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		3.300.000,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	807.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		2.767.017.898,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	583.385.408,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		641.723.949,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	umlah pemeliharaan barang milik daerah yang tersusun	-			1 Paket	390.044.276,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan	-	429.048.704,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA
	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	36.820.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		40.502.000,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	110.460.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		121.506.000,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	242.764.276,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		267.040.704,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan				1 Layanan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		0,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA
	1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit				1 Unit	3.108.375.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		3.421.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	1.253.514.798,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		1.380.408.784,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA
	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				1 Unit	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		88.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	5.014.614.451,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan	-	5.516.075.971,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA
	1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	5.014.614.451,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		5.516.075.971,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	-			3.92 %	710.352.364,00						-	781.387.600,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	-			A Indeks	4.201.822.470,00						-	4.621.356.718,00	
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang Tersedia	-			1 Dokumen	86.880.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan	-	95.568.000,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS PARU
	1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	86.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		95.568.000,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS PARU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kepegawaian yang Tersusun	-			1 Dokumen	133.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan	-	146.300.000,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS PARU
	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	133.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		146.300.000,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS PARU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Umum yang Tersusun	-			1 Dokumen	693.445.638,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan	-	762.142.204,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS PARU
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	120.093.054,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		132.102.360,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS PARU
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	109.227.433,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		120.150.178,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS PARU
	1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	242.874.621,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		267.162.083,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS PARU
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	162.765.530,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		179.042.083,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS PARU
	1.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3.285.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		3.613.500,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS PARU
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	55.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		60.072.000,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS PARU
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	-			1 Paket	1.215.519.952,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan	-	1.337.071.946,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS PARU
	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	383.453.699,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		421.799.068,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS PARU
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	832.066.253,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		915.272.878,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS PARU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pelayanan umum yang disusun	-			1 Dokumen	1.495.056.880,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan	-	1.644.562.568,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS PARU
	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		3.300.000,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS PARU
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	545.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		599.500.000,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS PARU
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	947.056.880,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		1.041.762.568,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS PARU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang tersusun	-			1 Paket	577.920.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan	-	635.712.000,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS PARU
	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	36.820.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		40.502.000,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS PARU
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	184.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		202.510.000,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS PARU
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	357.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		392.700.000,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS PARU

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan				1 Layanan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		0,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS PARU
	1.02.02.1.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan				1 Unit	2.972.204.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		3.269.424.400,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS PARU
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	3.166.748.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		3.483.423.351,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS PARU
	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				1 Unit	280.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		308.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS PARU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah	-			1 Layanan	5.543.524.545,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan	-	6.097.876.999,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS PARU
	1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	5.543.524.545,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		6.097.876.999,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS PARU
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	-			3.92 %	1.285.765.996,00						-	1.414.342.595,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	-			A Indeks	4.651.239.346,00						-	5.129.019.411,00	
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang Tersedia	-			1 Dokumen	81.960.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan	-	90.156.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM KUSTA LAU SIMOMO
	1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	81.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		90.156.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM KUSTA LAU SIMOMO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kepegawaian yang Tersusun	-			1 Dokumen	121.200.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan	-	134.125.750,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM KUSTA LAU SIMOMO
	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				39 Orang	121.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		134.125.750,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM KUSTA LAU SIMOMO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Umum yang Tersusun	-			1 Dokumen	715.251.060,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan	-	786.886.503,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM KUSTA LAU SIMOMO
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	86.363.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		95.030.775,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM KUSTA LAU SIMOMO
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	87.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		95.749.453,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM KUSTA LAU SIMOMO
	1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	206.581.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		227.379.235,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM KUSTA LAU SIMOMO
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	91.176.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangangan disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		100.294.040,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM KUSTA LAU SIMOMO
	1.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	5.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangangan disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		6.490.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM KUSTA LAU SIMOMO
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	238.130.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		261.943.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM KUSTA LAU SIMOMO
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	-			1 Paket	2.061.737.658,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan	-	2.278.364.850,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM KUSTA LAU SIMOMO
	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	196.598.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		216.268.796,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM KUSTA LAU SIMOMO
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1.865.139.258,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		2.062.096.054,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM KUSTA LAU SIMOMO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pelayanan umum yang disusun	-			1 Dokumen	1.397.280.628,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan	-	1.537.580.308,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM KUSTA LAU SIMOMO
	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		2.750.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM KUSTA LAU SIMOMO
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	977.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		1.075.101.500,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM KUSTA LAU SIMOMO
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	417.780.628,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		459.728.808,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM KUSTA LAU SIMOMO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang tersusun	-			1 Paket	273.810.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan	-	301.906.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM KUSTA LAU SIMOMO
	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	73.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		81.004.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM KUSTA LAU SIMOMO
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	36.820.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		40.502.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM KUSTA LAU SIMOMO
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	163.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		180.400.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM KUSTA LAU SIMOMO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Proporsi Fasyankes yang Terakreditasi Paripurna Angka Kematian Ibu Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial dan Vaksin Imunisasi Rutin Lengkap (IRL) Persentase Wasting (Balita Gizi Kurang dan Gizi Buruk)	-			100 % 54.2 % 58.9 per 100000 kelahiran 70 % 7.5 %	9.576.125.463,00						-	10.536.093.582,00	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pengembangan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana,, dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Ditingkatkan	-			1 Paket	7.772.162.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan	-	8.550.952.240,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM KUSTA LAU SIMOMO
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	3.296.562.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		3.626.293.490,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM KUSTA LAU SIMOMO
	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				1 Unit	175.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		192.500.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM KUSTA LAU SIMOMO
	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	4.300.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		4.732.158.750,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM KUSTA LAU SIMOMO
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		0,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM KUSTA LAU SIMOMO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah	-			1 Layanan	1.803.962.663,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan	-	1.985.141.342,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM KUSTA LAU SIMOMO
	1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1.803.962.663,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		1.985.141.342,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM KUSTA LAU SIMOMO
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	-			3.92 %	2.013.200.000,00						-	2.214.531.000,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	-			A Indeks	2.790.886.496,00						-	3.069.997.576,00	
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang Tersedia	-			1 Dokumen	86.880.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan	-	95.568.000,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	86.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		95.568.000,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kepegawaian yang Tersusun	-			1 Dokumen	172.215.625,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan	-	189.437.600,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	172.215.625,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		189.437.600,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Umum yang Tersusun	-			1 Dokumen	358.482.437,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan	-	394.331.663,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	16.806.605,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		18.487.420,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	99.237.484,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		109.161.290,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	130.601.208,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		143.662.099,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	60.037.140,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		66.040.854,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		0,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	51.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		56.980.000,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	-			1 Paket	980.492.776,00			Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan	-	1.078.563.089,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	659.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		725.120.000,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	89.777.076,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		98.755.127,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	6.275.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangand disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		6.902.500,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	721.960.996,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangand disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		794.157.096,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	206.880.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		227.568.660,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang tersusun	-			1 Paket	257.699.062,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan	-	283.468.968,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	38.820.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangand disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		42.702.000,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	36.820.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangand disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		40.502.000,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	182.059.062,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		200.264.968,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi Proporsi Fasyankes yang Terakreditasi Paripurna Angka Kematian Ibu Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial dan Vaksin Imunisasi Rutin Lengkap (IRL) Persentase Wasting (Balita Gizi Kurang dan Gizi Buruk)	-			100 % 54.2 % 58.9 per 100000 kelahiran 70 % 7.5 %	11.895.144.949,00						-	16.653.868.013,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pengembangan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana,, dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Ditingkatkan	-			1 Paket	11.895.144.949,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan	-	16.653.868.013,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	11.895.144.949,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		16.653.868.013,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan				1 Layanan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat atau Tenaga Kesehatan		0,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
		UPTD PELATIHAN KESEHATAN						4.703.857.168,00							5.334.499.746,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.703.857.168,00							5.334.499.746,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						4.703.857.168,00							5.334.499.746,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	-			A Indeks	4.062.049.708,00						-	5.010.008.898,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang Tersedia	-			1 Dokumen	68.160.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan	-	83.028.000,00	UPTD PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	68.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		83.028.000,00	UPTD PELATIHAN KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang Berkualitas	-			1 Dokumen	47.950.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan	-	33.275.000,00	UPTD PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	47.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		33.275.000,00	UPTD PELATIHAN KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Umum yang Tersusun	-			1 Dokumen	446.602.995,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan	-	412.878.816,00	UPTD PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	70.471.180,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		84.868.288,00	UPTD PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	64.004.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		87.780.485,00	UPTD PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	131.244.751,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		130.991.793,00	UPTD PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	45.686.764,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		40.259.450,00	UPTD PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	75.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		5.500.000,00	UPTD PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	59.996.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		63.478.800,00	UPTD PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	-			1 Paket	440.469.852,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan	-	989.567.211,00	UPTD PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	280.107.215,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		636.743.382,00	UPTD PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	146.242.983,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		121.651.559,00	UPTD PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		3.630.000,00	UPTD PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	685.212.932,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		750.028.521,00	UPTD PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	256.296.432,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		293.997.594,00	UPTD PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang yang terlaksana	-			1 Paket	2.114.107.497,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan	-	2.443.603.756,00	UPTD PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	36.820.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangand disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		40.502.000,00	UPTD PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	73.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangand disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		81.004.000,00	UPTD PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	81.532.480,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangand disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		170.068.756,00	UPTD PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1.922.115.017,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangand disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		1.855.029.000,00	UPTD PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		297.000.000,00	UPTD PELATIHAN KESEHATAN
2.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	-			3,92 Persen	641.807.460,00						-	324.490.848,00	
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah dokumen peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM yang dilaksanakan	-			1 Dokumen	641.807.460,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan	-	324.490.848,00	UPTD PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				0 Orang	641.807.460,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangand disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		324.490.848,00	UPTD PELATIHAN KESEHATAN	
	J U M L A H							1.088.947.219.727,00							1.028.948.803.313,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA						233.685.917.836,11							266.444.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						117.849.887.858,11							135.495.000.000,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						117.849.887.858,11							135.495.000.000,00	
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	105.498.734.667,11						-	119.245.000.000,00	
	2.09.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	3.698.858.766,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-	-	7.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	852.505.266,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		1.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	2.120.540.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		3.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	725.813.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		3.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	80.155.445.200,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	91.035.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				580 Orang/ Bulan	78.920.452.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		90.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1.199.998.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		1.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	34.994.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		35.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	246.300.000,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	700.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	246.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		700.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	66.010.000,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	66.010.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	2.495.685.456,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	2.790.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		1.500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	35.685.456,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		130.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		750.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	13.405.200.000,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-	-	13.520.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1.985.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		2.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	11.400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		11.500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	5.431.235.245,11			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-	-	3.700.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	864.133.953,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		700.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	4.517.101.292,11	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		2.500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	-	-			-	9.550.790.850,00						-	10.250.000.000,00	
	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	-			-	6.850.746.600,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	6.850.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.03.1.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				1 Laporan	2.000.002.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		2.200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya														
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				1 Laporan	125.460.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.03.1.01.0006	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				1 Dokumen	2.000.057.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		2.200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.03.1.01.0007	Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal				1 Laporan	1.000.054.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.03.1.01.0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi														
			Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins				1 Laporan	1.375.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		600.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.03.1.01.0011	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan				1 Unit	250.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		450.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.03.1.01.0015	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi														
			Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi				1 Dokumen	100.053.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	-	-			-	1.100.094.000,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-	-	1.500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.03.1.02.0007	Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi														
			Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi				60 Ton	1.000.092.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		1.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.03.1.02.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi				1 Laporan	100.002.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	-	-			-	1.599.950.250,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	1.900.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)				1 Laporan	1.499.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		1.500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.03.1.04.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi				1 Laporan	100.000.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	-	-			-	2.500.360.250,00						-	2.950.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	-	-			-	200.294.000,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota														
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	200.294.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	-	-			-	2.300.066.250,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-	-	2.550.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Dokumen	2.000.078.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		2.200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi				1 Laporan	299.987.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
4.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	-	-			-	300.002.091,00						-	3.050.000.000,00	
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	300.002.091,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	3.050.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				33 Sertifikat	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		750.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.05.1.01.0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		1.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.05.1.01.0011	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														
			Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	300.002.091,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		800.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						115.836.029.978,00							130.949.000.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						115.836.029.978,00							130.949.000.000,00	
1.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-			-	64.136.004.270,00						-	71.100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	-	-			-	499.997.000,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	2.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian														
			Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	499.997.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		2.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-	-			-	63.636.007.270,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	69.100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih														
			Jumlah Sertifikat Benih				0 Sertifikat	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		650.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.02.0007	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak				0 Batang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		700.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.02.0009	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek														
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk Setek yang diperbanyak				0 Setek	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.02.0013	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak				0 Ton	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		750.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.02.0014	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi														
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak				0 Ton	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		1.500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.02.0018	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga				1 Laporan	34.501.624.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		25.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.02.0019	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura														
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga				1 Laporan	29.134.383.270,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		40.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-			-	36.816.365.708,00						-	48.224.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-	-			-	36.816.365.708,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-	-	48.224.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani														
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani				1 Dokumen	3.999.997.708,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		10.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.03.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani				1 Dokumen	7.999.980.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		10.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.03.1.01.0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian														
			Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		2.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	18.087.060.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		20.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya														
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		224.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.03.1.01.0011	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan				4 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		1.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.03.1.01.0014	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura														
			Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan				20 Unit	5.739.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		2.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.03.1.01.0023	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan				4 Unit	989.708.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		2.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.03.1.01.0025	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan														
			Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		1.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-	-			-	2.883.660.000,00						-	4.300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	-	-			-	2.883.660.000,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	4.300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				0 Ha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		1.350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				500 Ha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.05.1.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				10 Ha	699.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		450.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.05.1.01.0005	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan				1 Laporan	2.183.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		2.200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
4.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	-			-	12.000.000.000,00						-	7.325.000.000,00	
	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	-	-			-	7.000.000.000,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-	-	1.225.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.07.1.01.0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya				1 Unit	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		750.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian														
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				150 Orang	6.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		475.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	-	-			-	2.000.000.000,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	3.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian														
			Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				1 Dokumen	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		2.400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan				0 Kelompok	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		600.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	-	-			-	3.000.000.000,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-	-	3.100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawasan korporasi petani														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah korporasi petani yang didampingi				1 Unit	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		1.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
	3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani															
			Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi				5 Unit	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		2.100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
		UPTD BENIH INDUK ANEKA TANAMAN ARSE SIPIROK							1.473.817.653,90							11.798.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						599.826.900,00							650.000.000,00		
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						599.826.900,00							650.000.000,00		
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	599.826.900,00						-	650.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	599.826.900,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	650.000.000,00	UPTD BENIH INDUK ANEKA TANAMAN ARSE SIPIROK
	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	599.826.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		650.000.000,00	UPTD BENIH INDUK ANEKA TANAMAN ARSE SIPIROK
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						873.990.753,90							11.148.000.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						873.990.753,90							11.148.000.000,00	
1.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-			-	649.990.754,00						-	700.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-	-			-	649.990.754,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-	-	700.000.000,00	UPTD BENIH INDUK ANEKA TANAMAN ARSE SIPIROK
	3.27.02.1.02.0007	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang														
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak				10000 Batang	399.999.994,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		450.000.000,00	UPTD BENIH INDUK ANEKA TANAMAN ARSE SIPIROK
	3.27.02.1.02.0009	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk Setek yang diperbanyak				50000 Setek	249.990.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		250.000.000,00	UPTD BENIH INDUK ANEKA TANAMAN ARSE SIPIROK
2.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-			-	223.999.999,90						-	10.448.000.000,00	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-	-			-	223.999.999,90			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	10.448.000.000,00	UPTD BENIH INDUK ANEKA TANAMAN ARSE SIPIROK
	3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		10.000.000.000,00	UPTD BENIH INDUK ANEKA TANAMAN ARSE SIPIROK
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya														
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1 Unit	223.999.999,90	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		448.000.000,00	UPTD BENIH INDUK ANEKA TANAMAN ARSE SIPIROK
		UPTD BENIH INDUK HORTIKULTURA KUTAGADUNG						2.297.989.885,00							2.622.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						599.999.867,00							600.000.000,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						599.999.867,00							600.000.000,00	
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	599.999.867,00						-	600.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	599.999.867,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	600.000.000,00	UPTD BENIH INDUK HORTIKULTURA KUTAGADUNG
	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	599.999.867,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		600.000.000,00	UPTD BENIH INDUK HORTIKULTURA KUTAGADUNG
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						1.697.990.018,00							2.022.000.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						1.697.990.018,00							2.022.000.000,00	
1.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-			-	1.199.997.379,00						-	1.300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-	-			-	1.199.997.379,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-	-	1.300.000.000,00	UPTD BENIH INDUK HORTIKULTURA KUTAGADUNG
	3.27.02.1.02.0007	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang														
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak				10000 Batang	199.997.752,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		450.000.000,00	UPTD BENIH INDUK HORTIKULTURA KUTAGADUNG
	3.27.02.1.02.0014	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak				30 Ton	999.999.627,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		850.000.000,00	UPTD BENIH INDUK HORTIKULTURA KUTAGADUNG
2.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-			-	497.992.639,00						-	722.000.000,00	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-	-			-	497.992.639,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	722.000.000,00	UPTD BENIH INDUK HORTIKULTURA KUTAGADUNG
	3.27.03.1.01.0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara				1 Unit	49.992.639,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		50.000.000,00	UPTD BENIH INDUK HORTIKULTURA KUTAGADUNG
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya														
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				2 Unit	448.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		672.000.000,00	UPTD BENIH INDUK HORTIKULTURA KUTAGADUNG
		UPTD BENIH INDUK HORTIKULTURA GEDUNG JOHOR						3.174.000.000,00							3.498.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						900.000.000,00							950.000.000,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						900.000.000,00							950.000.000,00	
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	900.000.000,00						-	950.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	900.000.000,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	950.000.000,00	UPTD BENIH INDUK HORTIKULTURA GEDUNG JOHOR
	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		950.000.000,00	UPTD BENIH INDUK HORTIKULTURA GEDUNG JOHOR
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						2.274.000.000,00							2.548.000.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						2.274.000.000,00							2.548.000.000,00	
1.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-			-	2.000.000.000,00						-	2.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-	-			-	2.000.000.000,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	2.000.000.000,00	UPTD BENIH INDUK HORTIKULTURA GEDUNG JOHOR
	3.27.02.1.02.0007	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang														
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak				20000 Batang	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		2.000.000.000,00	UPTD BENIH INDUK HORTIKULTURA GEDUNG JOHOR
2.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-			-	274.000.000,00						-	548.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-	-			-	274.000.000,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-	-	548.000.000,00	UPTD BENIH INDUK HORTIKULTURA GEDUNG JOHOR
	3.27.03.1.01.0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian														
			Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara				1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		100.000.000,00	UPTD BENIH INDUK HORTIKULTURA GEDUNG JOHOR
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1 Unit	224.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		448.000.000,00	UPTD BENIH INDUK HORTIKULTURA GEDUNG JOHOR
		UPTD SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA						1.934.000.000,00							1.998.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						700.000.000,00							750.000.000,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						700.000.000,00							750.000.000,00	
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	700.000.000,00						-	750.000.000,00	
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	700.000.000,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-	-	750.000.000,00	UPTD SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		750.000.000,00	UPTD SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						1.234.000.000,00							1.248.000.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						1.234.000.000,00							1.248.000.000,00	
1.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-			-	960.000.000,00						-	700.000.000,00	
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-	-			-	960.000.000,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	700.000.000,00	UPTD SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sertifikat Benih				2 Sertifikat	960.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		700.000.000,00	UPTD SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-			-	274.000.000,00						-	548.000.000,00	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-	-			-	274.000.000,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-	-	548.000.000,00	UPTD SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.03.1.01.0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara				1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		100.000.000,00	UPTD SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya														
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1 Unit	224.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		448.000.000,00	UPTD SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
		UPTD BENIH INDUK ANEKA TANAMAN GABE HUTARAJA						1.474.000.000,00							1.848.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						550.000.000,00							600.000.000,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						550.000.000,00							600.000.000,00	
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	550.000.000,00						-	600.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	550.000.000,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	600.000.000,00	UPTD BENIH INDUK ANEKA TANAMAN GABE HUTARAJA
	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		600.000.000,00	UPTD BENIH INDUK ANEKA TANAMAN GABE HUTARAJA
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						924.000.000,00							1.248.000.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						924.000.000,00							1.248.000.000,00	
1.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-			-	700.000.000,00						-	800.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-	-			-	700.000.000,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-	-	800.000.000,00	UPTD BENIH INDUK ANEKA TANAMAN GABE HUTARAJA
	3.27.02.1.02.0013	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih														
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak				15 Ton	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		400.000.000,00	UPTD BENIH INDUK ANEKA TANAMAN GABE HUTARAJA
	3.27.02.1.02.0014	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak				8 Ton	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		400.000.000,00	UPTD BENIH INDUK ANEKA TANAMAN GABE HUTARAJA
2.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-			-	224.000.000,00						-	448.000.000,00	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-	-			-	224.000.000,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	448.000.000,00	UPTD BENIH INDUK ANEKA TANAMAN GABE HUTARAJA
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1 Unit	224.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		448.000.000,00	UPTD BENIH INDUK ANEKA TANAMAN GABE HUTARAJA
		UPTD BENIH INDUK PADI TANJUNG MORAWA						2.027.916.471,00							1.448.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						599.984.254,00							0,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						599.984.254,00							0,00	
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	599.984.254,00						-	0,00	
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	599.984.254,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD BENIH INDUK PADI TANJUNG MORAWA
	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	599.984.254,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD BENIH INDUK PADI TANJUNG MORAWA
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						1.427.932.217,00							1.448.000.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						1.427.932.217,00							1.448.000.000,00	
1.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-			-	979.999.204,00						-	1.000.000.000,00	
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-	-			-	979.999.204,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	1.000.000.000,00	UPTD BENIH INDUK PADI TANJUNG MORAWA
	3.27.02.1.02.0013	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak				120.45 Ton	979.999.204,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		1.000.000.000,00	UPTD BENIH INDUK PADI TANJUNG MORAWA
2.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-			-	447.933.013,00						-	448.000.000,00	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-	-			-	447.933.013,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	448.000.000,00	UPTD BENIH INDUK PADI TANJUNG MORAWA
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				2 Unit	447.933.013,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		448.000.000,00	UPTD BENIH INDUK PADI TANJUNG MORAWA
		UPTD BENIH INDUK PALAWIJA TANJUNG SELAMAT						1.524.000.000,00							1.218.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						650.000.000,00							700.000.000,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						650.000.000,00							700.000.000,00	
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	650.000.000,00						-	700.000.000,00	
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	650.000.000,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-	-	700.000.000,00	UPTD BENIH INDUK PALAWIJA TANJUNG SELAMAT
	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	650.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		700.000.000,00	UPTD BENIH INDUK PALAWIJA TANJUNG SELAMAT
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						874.000.000,00							518.000.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						874.000.000,00							518.000.000,00	
1.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-			-	650.000.000,00						-	70.000.000,00	
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-	-			-	650.000.000,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	70.000.000,00	UPTD BENIH INDUK PALAWIJA TANJUNG SELAMAT
	3.27.02.1.02.0013	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak				15 Ton	650.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		70.000.000,00	UPTD BENIH INDUK PALAWIJA TANJUNG SELAMAT
2.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-			-	224.000.000,00						-	448.000.000,00	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-	-			-	224.000.000,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	448.000.000,00	UPTD BENIH INDUK PALAWIJA TANJUNG SELAMAT
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1 Unit	224.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		448.000.000,00	UPTD BENIH INDUK PALAWIJA TANJUNG SELAMAT
		UPTD PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PENGAWASAN MUTU KEAMANAN PANGAN						13.073.997.721,00							13.298.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.649.998.381,00							3.900.000.000,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						3.649.998.381,00							3.900.000.000,00	
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	1.899.999.743,00						-	2.000.000.000,00	
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.899.999.743,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-	-	2.000.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PENGAWASAN MUTU KEAMANAN PANGAN
	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.899.999.743,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		2.000.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PENGAWASAN MUTU KEAMANAN PANGAN
2.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	-	-			-	1.749.998.638,00						-	1.900.000.000,00	
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.749.998.638,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	1.900.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PENGAWASAN MUTU KEAMANAN PANGAN
	2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				20 Sertifikat	599.999.896,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		650.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PENGAWASAN MUTU KEAMANAN PANGAN
	2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	449.999.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		500.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PENGAWASAN MUTU KEAMANAN PANGAN
	2.09.05.1.01.0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	699.999.042,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		750.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PENGAWASAN MUTU KEAMANAN PANGAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						9.423.999.340,00							9.398.000.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						9.423.999.340,00							9.398.000.000,00	
1.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-			-	273.999.650,00						-	548.000.000,00	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-	-			-	273.999.650,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	548.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PENGAWASAN MUTU KEAMANAN PANGAN
	3.27.03.1.01.0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara				1 Unit	49.999.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		100.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PENGAWASAN MUTU KEAMANAN PANGAN
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya														
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1 Unit	223.999.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		448.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PENGAWASAN MUTU KEAMANAN PANGAN
2.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-	-			-	9.149.999.690,00						-	8.850.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	-	-			-	9.149.999.690,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-	-	8.850.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PENGAWASAN MUTU KEAMANAN PANGAN
	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				10000 Ha	8.849.999.898,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		8.850.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PENGAWASAN MUTU KEAMANAN PANGAN
	3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				2000 Ha	299.999.792,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PENGAWASAN MUTU KEAMANAN PANGAN
		UPTD PELATIHAN DAN MEKANISASI PERTANIAN						4.870.999.999,99							3.800.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	1.000.000.000,00						-	1.000.000.000,00	
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.000.000.000,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-	-	1.000.000.000,00	UPTD PELATIHAN DAN MEKANISASI PERTANIAN
	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	299.999.999,99	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		350.000.000,00	UPTD PELATIHAN DAN MEKANISASI PERTANIAN
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya														
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				3 Unit	896.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		1.000.000.000,00	UPTD PELATIHAN DAN MEKANISASI PERTANIAN
2.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	-			-	2.675.000.000,00						-	1.450.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	-	-			-	475.000.000,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	500.000.000,00	UPTD PELATIHAN DAN MEKANISASI PERTANIAN
	3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian														
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				90 Orang	475.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		500.000.000,00	UPTD PELATIHAN DAN MEKANISASI PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	-	-			-	2.200.000.000,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	950.000.000,00	UPTD PELATIHAN DAN MEKANISASI PERTANIAN
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani														
			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan				300 Kelompok	2.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		950.000.000,00	UPTD PELATIHAN DAN MEKANISASI PERTANIAN
	J U M L A H							265.536.639.567,00							307.972.000.000,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KETENAGAKERJAAN PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
DINAS KETENAGAKERJAAN																
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA														
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-			100 Persen	53.316.662.126,00						-	40.113.669.470,00	
	2.07.01.1.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan perencanaan, panganggaran dan evaluasi kinerja	-			100 Persen	136.620.150,00			Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangandang disabilitas.	-	Masyarakat	-	487.344.700,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	Masyarakat		392.344.700,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	9.379.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		15.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	9.379.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		15.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				4 Dokumen	9.379.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		15.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				150 Orang/ Bulan	30.797.646.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen- yangandang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		30.797.646.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	180.110.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen- yangandang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		440.720.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi barang milik daerah	-			100 Persen	45.268.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat	-	46.488.500,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	26.488.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		26.488.500,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	18.780.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		20.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian	-			100 Persen	32.080.000,00			Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat	-	36.080.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	11.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		11.080.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	21.000.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		25.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum	-			100 Persen	972.543.731,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat	-	1.126.771.355,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	46.383.746,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		51.396.296,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	153.974.892,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		153.974.892,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	306.090.133,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		366.185.357,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	58.182.700,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		63.680.450,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	31.129.260,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		34.969.260,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	376.783.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		456.565.100,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan	-			100 Persen	206.046.513,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat	-	200.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	206.046.513,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		200.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang urusan	-			100 Persen	4.517.098.433,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat	-	5.270.162.024,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	15.330.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	685.533.860,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		1.220.162.024,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	3.816.234.573,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		4.000.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	-			100 Persen	714.255.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat	-	669.559.800,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				15 Unit	364.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		368.382.300,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	204.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		201.177.500,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	145.275.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	-			70 %	99.967.000,00						-	250.000.000,00	
	2.07.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	-			93.94 %	249.979.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat	-	250.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				33 Dokumen	149.980.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		150.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro														
			Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro				80 Orang	99.999.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
3.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	-			76 Persen	572.251.480,00						-	4.611.982.330,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase penerapan program Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) dengan kualifikasi KKN/okupasi	-			100 %	449.370.550,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat	-	600.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n				400 Orang	449.370.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		600.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.03.1.02	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase LPK yang terakreditasi	-			96,00 %	399.999.569,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat	-	500.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.1.02.0001	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja														
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi				25 LPK	399.999.569,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		500.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.03.1.03	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	<i>Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas</i>	-			30,21 %	150.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat	-	150.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.1.03.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah														
			<i>Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas</i>				20 Perusahaan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		150.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	<i>Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring produktivitas</i>	-			40,65 %	102.679.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat	-	200.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah</i>				20 Dokumen	102.679.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		200.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
4.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	<i>Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi</i>	-			55,17 Persen 67,75 %	456.882.900,000						-	999.953.950,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-				199.805.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat	-	449.953.950,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja				200 Orang	74.867.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		200.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.1.01.0006	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanan ULD				100 Orang	124.938.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		249.953.950,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.1.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Provinsi	-			40 Lembaga	20.405.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat	-	50.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.1.02.0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku				40 Lembaga	20.405.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) online/ Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SISNAKER)	-			3500 orang	526.549.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat	-	400.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.1.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)				10000 Orang	128.569.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		200.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.1.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja														
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				1200 Orang	397.980.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		200.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI) yang diberikan pelatihan	-			3800 Orang	49.848.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat	-	50.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.1.04.0003	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran														
			Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA				1500 Orang	49.848.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.04.1.05	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-			250 RPTKA	28.080.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat	-	50.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.1.05.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA				300 Orang	28.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
5.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang menerapkan perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	-			551287 Orang	5.353.258.800,00						-	6.358.645.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.05.1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB).	-			6,97 % 0,98 %	98.158.800,00			Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat	-	98.948.500,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.1.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial														
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online				100 Perusahaan	49.488.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		49.793.500,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.1.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online				100 Perusahaan	48.670.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		49.155.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase perusahaan yang berselisih Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit	-			0,38 % 7,80 %	676.041.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat	-	694.481.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.1.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				75 Perkara	160.201.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		160.201.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan				80 Perkara	31.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.1.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				22 Lembaga	484.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		484.280.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta PBJs Ketenagakerjaan	-			12,78 % 315,37 %	4.829.260.000,00			Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat	-	5.565.216.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penetapan UMP				1 Surat Keputusan	515.180.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		515.216.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.1.03.0003	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)														
			Jumlah penetapan UMK				30 Surat Keputusan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan				21300 Orang	4.294.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		5.000.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
6.	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	-			2300000 Orang	676.063.300,00						-	1.127.731.216,00	
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Total perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	-			16.422 %	368.445.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat	-	748.157.016,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)				500 Perusahaan	63.580.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		204.819.028,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan														
			Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan				15 Kasus	131.128.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		247.598.780,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Laporan	55.454.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		55.454.950,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA														
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-			undefined undefined	53.316.662.126,00						-	40.113.669.470,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan	-			100 Persen	54.600.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat	-	54.600.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
	2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	54.600.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		54.600.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum	-			100 Persen	62.574.088,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat	-	62.681.188,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.998.900,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		5.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	24.997.188,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangangan disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		24.997.188,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3.900.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangangan disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		3.900.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
	2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3.840.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		3.840.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	24.838.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		24.944.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan	-			100 Persen	2.604.230.880,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-	-	5.000.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
	2.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	2.604.230.880,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		5.000.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang urusan	-			100 Persen	249.386.800,00			Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat	-	249.386.800,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.800.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		2.800.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	246.586.800,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangandang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		246.586.800,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
2.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	-			76 Persen	572.251.480,00						-	4.611.982.330,00	
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase penerapan program Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) dengan kualifikasi KKN/okupasi	-			100 %	4.125.323.671,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangandang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat	-	3.361.982.330,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	53.316.662.126,00						-	40.113.669.470,00	
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	34.290.000,00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-	-	34.290.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I
	2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	34.290.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		34.290.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	9.483.891,00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-	-	9.483.891,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.483.891,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		9.483.891,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	95.510.796,00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-	-	95.510.796,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.400.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		2.400.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	93.110.796,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		93.110.796,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	-			2300000 Orang 55,41 %	676.063.300,00						-	1.127.731.216,00	
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Total perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan Total perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	-			16.422 % 8171 Perusahaan	73.320.200,00			Memperku a pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat	-	73.320.200,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan														
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)				900 Perusahaan	25.397.200,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		25.397.200,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I
	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-			undefined undefined	53.316.662.126,00					-		40.113.669.470,00	
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan	-			100 Persen	35.610.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat	-	35.610.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II
	2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	35.610.000,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		35.610.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum	-			100 Persen	20.138.704,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat	-	20.138.704,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.328.704,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		5.328.704,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	14.810.000,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		14.810.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang urusan</i>	-			100 Persen	37.630.000,00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-	-	37.630.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	2.230.000,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		2.230.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	35.400.000,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		35.400.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II
2.	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan</i>	-			2300000 Orang 55,41 %	676.063.300,00						-	1.127.731.216,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Total perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan Total perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	-			16.422 % 8171 Perusahaan	73.315.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyang- andang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat	-	73.315.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan														
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)				65 Perusahaan	24.805.000,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyang- andang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		24.805.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II
	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-			undefined undefined	53.316.662.126,00					-		40.113.669.470,00	
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan	-			100 Persen	34.290.000,00			Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangandang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat	-	34.290.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH III
	2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	34.290.000,00	Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangandang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		34.290.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH III

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	33.479.000,00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-	-	33.479.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH III
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	4.979.000,00	Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		4.979.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH III
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	28.500.000,00	Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		28.500.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH III
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang urusan</i>	-			100 Persen	45.534.000,00			Memperku a pembangu nan sumber daya sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan pen yangandang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat	-	45.534.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH III
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.400.000,00	Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		2.400.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH III
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	43.134.000,00	Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		43.134.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH III
2.	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	-			2300000 Orang	676.063.300,00						-	1.127.731.216,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Total perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	-			8171 Perusahaan	99.970.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen- yangandang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat	-	99.970.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH III
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan														
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)				120 Perusahaan	40.230.000,00	Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen- yangandang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		40.230.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH III
	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-			100 Persen	53.316.662.126,00						-	40.113.669.470,00	
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan	-			100 Persen	34.290.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat	-	34.290.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH IV
	2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	34.290.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		34.290.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH IV

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum	-			100 Persen	33.734.749,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat	-	33.734.749,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH IV
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.979.749,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		4.979.749,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH IV
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	28.755.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		28.755.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH IV
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang urusan	-			100 Persen	45.529.620,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat	-	45.529.620,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH IV
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.400.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		2.400.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH IV
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	43.129.620,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		43.129.620,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH IV
2.	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	-			2300000 Orang	676.063.300,00						-	1.127.731.216,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Total perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	-			8171 Perusahaan	50.011.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat	-	50.011.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH IV
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan														
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)				100 Perusahaan	20.141.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		20.141.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH IV
	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-			100 Persen	53.316.662.126,00						-	40.113.669.470,00	
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan	-			100 Persen	34.289.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat	-	34.290.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH V
	2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	34.289.300,00	Kota Padangside mpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		34.290.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH V

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum	-			100 Persen	33.533.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat	-	33.523.249,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH V
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.063.500,00	Kota Padangside mpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		4.977.249,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH V
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	28.470.000,00	Kota Padangside mpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		28.546.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH V
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang urusan	-			100 persen	45.533.081,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat	-	45.522.431,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH V
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	2.400.000,00	Kota Padangside mpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		2.389.350,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH V
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	43.133.081,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		43.133.081,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH V
2.	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya</i>	-			2300000 Orang	676.063.300,00						-	1.127.731.216,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Total perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	-			8171 Perusahaan	46.918.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangandang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat	-	46.939.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH V
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan														
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)				100 Perusahaan	18.354.000,00	Kota Padangside mpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangandang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		18.416.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH V
	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-			100 persen	53.316.662.126,00						-	40.113.669.470,00	
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan	-			100 Persen	33.240.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat	-	33.240.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH VI
	2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	33.240.000,00	Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		33.240.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH VI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum	-			100 persen	33.598.796,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat	-	33.598.796,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH VI
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.128.796,00	Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		5.128.796,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH VI
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	28.470.000,00	Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		28.470.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH VI
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang urusan undefined	-			100 persen undefined	27.800.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat	-	32.533.867,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH VI
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.400.000,00	Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		2.400.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH VI
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	25.400.000,00	Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		30.133.867,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH VI
2.	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	-			2300000 Orang	676.063.300,00						-	1.127.731.216,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Total perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	-			8171 Perusahaan	36.019.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangand disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat	-	36.019.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH VI
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan														
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)				100 Perusahaan	12.151.500,00	Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangand disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		12.151.500,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH VI
	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan				3 Kasus	12.202.500,00	Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		12.202.500,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH VI
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan														
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3				100 Perusahaan	11.665.000,00	Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	Masyarakat		11.665.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH VI
	J U M L A H							60.504.166.506,00							53.517.437.416,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						70.502.478.891,00							55.155.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						70.502.478.891,00							55.155.000.000,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						60.942.893.189,00							53.355.000.000,00	
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	25.177.438.577,00						-	31.455.000.000,00	
	2.16.01.1.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	51.250.900,00			-	-	-	-	132.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	22.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	19.655.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	9.395.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	10.738.798.212,00			-	-	-	-	12.056.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				79 Orang/ Bulan	10.683.710.912,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	40.599.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		41.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14.487.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	772.800.000,00			-	-	-	-	500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 Orang	772.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	3.302.113.313,00			-	-	-	-	971.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	14.062.396,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		14.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	78.192.067,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	52.488.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		78.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	23.233.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		18.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				288 Dokumen	45.071.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		46.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1265 Laporan	3.089.066.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		740.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	1.626.453.620,00			-	-	-	-	9.800.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	1.626.453.620,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		9.800.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	7.258.223.800,00			-	-	-	-	7.226.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				200 Laporan	14.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	512.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		520.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	6.731.723.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.700.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.427.798.732,00			-	-	-	-	770.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				50 Unit	1.084.710.642,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		570.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	6.394.268,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	336.693.822,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	-	-			-	17.275.453.485,00						-	13.400.000.000,00	
	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	-	-			-	17.275.453.485,00			-	-	-	-	13.400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0014	Relasi Media														
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				50 Laporan	755.509.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0015	Penyusunan Konten														
			Jumlah Konten Informasi Publik				900 Konten	750.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0016	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik														
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan				12 Orang	9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi				42 perangkat daerah	7.327.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0031	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas														
			Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Provinsi Cerdas				1 Dokumen	9.012.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0034	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah														
			Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah				1 Dokumen	240.058.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0036	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan														
			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				1 Aplikasi	15.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0037	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah														
			Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali				1 Laporan	1.432.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						1.828.470.040,00							600.000.000,00	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	-	-			-	1.828.470.040,00						-	600.000.000,00	
	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	-	-			-	1.828.470.040,00			-	-	-	-	600.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.1.01.0016	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia														
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk				50 %	289.890.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.1.01.0017	Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik				98 %	736.020.040,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.1.01.0018	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar														
			Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral				10 %	247.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.1.01.0019	Peningkatan kualitas statistik sektoral														
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.				50 %	247.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.1.01.0020	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral														
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				50 Orang	307.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						7.731.115.662,00							1.200.000.000,00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	-	-			-	7.731.115.662,00						-	1.200.000.000,00	
	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	-	-			-	7.697.615.662,00			-	-	-	-	1.100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				42 Laporan	7.109.265.662,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.01.0006	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian				4 Perangkat Daerah	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.01.0007	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan				1 Laporan	309.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah														
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian.				1 Dokumen	188.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	-	-			-	33.500.000,00			-	-	-	-	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.02.0002	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah														
			Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.				1 Kegiatan	33.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	J U M L A H							70.502.478.891,00							55.155.000.000,00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH						44.570.868.728,00							46.115.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						44.570.868.728,00							45.665.000.000,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						44.570.868.728,00							45.665.000.000,00	
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	-			100 persen	24.920.006.108,00						-	28.565.000.000,00	
	2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	-			1 Dokumen	31.435.000,00			-	-	Dinas Koperasi dan UKM	-	300.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	31.435.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Dinas Koperasi dan UKM		300.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	-			100 persen	14.854.890.160,00			-	-	Dinas Koperasi dan UKM	-	15.050.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				77 Orang/ Bulan	14.631.562.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-	Dinas Koperasi dan UKM		14.800.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	223.328.160,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Dinas Koperasi dan UKM		250.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang terpenuhi	-			100 persen	0,00			-	-	-	-	500.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	-			100 persen	2.742.594.372,00			-	-	Dinas Koperasi dan UKM	-	5.390.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.061.685,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Dinas Koperasi dan UKM		110.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	614.001.378,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Dinas Koperasi dan UKM		3.600.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	600.469.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Dinas Koperasi dan UKM		350.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	598.656.069,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Dinas Koperasi dan UKM		250.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Dinas Koperasi dan UKM		30.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	822.574.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Dinas Koperasi dan UKM		900.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	61.832.040,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Dinas Koperasi dan UKM		150.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	-			100 persen	5.843.879.070,00			-	-	Dinas Koperasi dan UKM	-	6.775.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	24.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Dinas Koperasi dan UKM		25.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1.020.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Dinas Koperasi dan UKM		1.100.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	173.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Dinas Koperasi dan UKM		300.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				156 Laporan	4.626.279.070,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Dinas Koperasi dan UKM		5.350.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	-			100 persen	1.447.207.506,00			-	-	Dinas Koperasi dan UKM	-	550.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				20 Unit	361.380.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Dinas Koperasi dan UKM		250.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1.085.827.506,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Dinas Koperasi dan UKM		300.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	-			2,54 persen	199.884.000,00						-	550.000.000,00	
	2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa	-			2,54 persen	199.884.000,00			-	-	koperasi	-	550.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				14 Unit Usaha	199.884.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	koperasi		550.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
3.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	-			1,25 Persen	414.040.000,00						-	550.000.000,00	
	2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Peserta yang Mengikuti Pelatihan Perkoperasian	-			1,25 persen	414.040.000,00			-	-	Koperasi	-	550.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				100 Orang	414.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Koperasi		550.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
4.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	-			8,69 persen	1.393.453.600,00						-	4.750.000.000,00	
	2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Koperasi yang diberdayakan	-			8,69 persen	1.393.453.600,00			-	-	koperasi	-	4.750.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha														
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				10 Unit Usaha	151.421.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	koperasi		1.100.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.06.1.01.0004	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi														
			Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan				16 Kelompok Masyarakat	192.966.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	koperasi		650.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.06.1.01.0005	Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Koperasi yang Dipulihkan Usahanya				3 Unit Usaha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	koperasi		400.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan				8 Unit Usaha	1.049.066.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	koperasi		2.600.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
5.	2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pertumbuhan Wirausaha Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	-			0,04 persen 19,51 persen	15.855.535.020,00						-	9.050.000.000,00	
	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Usaha Kecil yang diberdayakan	-			19,55 persen	15.855.535.020,00			-	-	UMKM	-	9.050.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan														
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan				1970 Unit Usaha	15.147.393.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	UMKM		6.400.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.07.1.01.0006	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan														
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan				150 Orang	196.142.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	UMKM		2.100.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.07.1.01.0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha														
			Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi				170 Unit Usaha	512.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	UMKM		550.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	<i>Proporsi UKM Menjalिन Kemitraan dan Ekspor</i>	-			1,8 persen	1.787.950.000,00						-	2.200.000.000,00	
	2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	<i>Jumlah Usaha Kecil yang meningkat menjadi usaha menengah dan Wirausaha Tumbuh</i>	-			150 unit	1.787.950.000,00			-	-	UMKM	-	2.200.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi														
			<i>Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi</i>				100 Unit Usaha	1.579.638.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	UMKM		1.100.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.08.1.01.0006	Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil														
			<i>Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi</i>				50 Unit Usaha	208.312.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	UMKM		1.100.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	X	NON URUSAN						0,00							450.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						0,00							450.000.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi</i>	-			100 persen	0,00						-	450.000.000,00	
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase administrasi kepegawaian yang terpenuhi</i>	-			100 persen	0,00			-	-	-	-	450.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	X.XX.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				158 Paket	0,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		450.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	J U M L A H							44.570.868.728,00							46.115.000.000,00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN						1.199.999.827,00							799.997.496,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.199.999.827,00							799.997.496,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						1.199.999.827,00							799.997.496,00	
1.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-			-	1.199.999.827,00						-	799.997.496,00	
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	-	-			-	1.199.999.827,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	799.997.496,00	UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN
	2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi														
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				1 Dokumen	1.199.999.827,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		799.997.496,00	UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN
		UPT PENGELOLAAN LIMBAH CAIR DOMESTIK						479.998.916,00							399.991.507,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						479.998.916,00							399.991.507,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						479.998.916,00							399.991.507,00	
1.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-			-	479.998.916,00						-	399.991.507,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	-	-			-	479.998.916,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	399.991.507,00	UPT PENGELOLAAN LIMBAH CAIR DOMESTIK
	2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				3 Dokumen	479.998.916,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		399.991.507,00	UPT PENGELOLAAN LIMBAH CAIR DOMESTIK
		UPT PENGELOLAAN KUALITAS AIR DANAU TOBA							175.000.000,00						294.524.983,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						175.000.000,00							294.524.983,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						175.000.000,00							294.524.983,00	
1.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-			-	175.000.000,00						-	294.524.983,00	
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	-	-			-	175.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	294.524.983,00	UPT PENGELOLAAN KUALITAS AIR DANAU TOBA
	2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				4 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		74.538.405,00	UPT PENGELOLAAN KUALITAS AIR DANAU TOBA
	2.11.03.1.01.0008	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut														
			Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun				30 laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		69.987.000,00	UPT PENGELOLAAN KUALITAS AIR DANAU TOBA
	2.11.03.1.01.0009	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
			Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)				25 Lokasi	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		149.999.578,00	UPT PENGELOLAAN KUALITAS AIR DANAU TOBA
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN						114.343.574.892,00							600.342.382.359,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						109.958.088.493,00							584.630.084.330,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						109.958.088.493,00							584.630.084.330,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	104.717.591.637,00						-	575.023.853.238,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	380.499.550,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	502.443.850,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	140.499.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		140.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		84.999.850,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	49.999.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		107.444.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	139.999.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		120.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	92.895.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	95.898.854.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				579 Orang/ Bulan	92.300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		95.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				22 Dokumen	440.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaa n Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				18 Dokumen	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaa n Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		149.864.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaa n Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		68.120.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaa n Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		29.936.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		20.048.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		130.886.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	125.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	445.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				19 Laporan	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		245.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	500.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	885.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		170.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		170.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		170.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.139.899.869,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	2.024.915.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				22 Paket	230.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		163.415.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		220.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				19 Paket	87.899.869,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				38 Paket	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		771.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	22.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				19 Laporan	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	5.445.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		1.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				7 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		145.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		3.600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		700.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	8.797.192.218,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	468.653.140.388,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				19 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		37.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1.442.753.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		1.100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	7.334.438.618,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		467.516.140.388,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	780.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	1.169.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				50 Unit	420.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		420.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		49.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.	2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	-	-			-	699.999.462,00						-	745.000.000,00	
	2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	-	-			-	599.999.762,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	625.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		125.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.02.1.01.0003	Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH														
			Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG,RPPKarst yang ditetapkan				1 Dokumen	499.999.762,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	-	-			-	99.999.700,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	120.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.02.1.02.0009	Pembinaan, Penilaian, Evaluasi Terhadap KLHS Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota				1 Dokumen	99.999.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		120.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-			-	884.999.064,00						-	2.950.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	-	-			-	884.999.064,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	2.950.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				2 Dokumen	99.999.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan				2 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.01.0004	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan														
			Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan				192 Paket	299.999.914,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		700.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.01.0005	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.01.0006	Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan														
			Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim				3 Laporan	199.999.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.01.0007	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat provinsi														
			Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.01.0008	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut														
			Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun				50 laporan	99.999.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.01.0009	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)				40 Lokasi	119.999.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.01.0011	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK														
			Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK				1 Dokumen	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
4.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-	-			-	200.000.000,00						-	200.000.000,00	
	2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	-	-			-	200.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.04.1.01.0003	Pengelolaan Kebun Raya														
			Luas Kebun Raya yang Dikelola lingkup Kewenangan Provinsi				200 Ha	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	-	-			-	649.999.800,00						-	1.428.758.950,00	
	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	649.999.800,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	1.428.758.950,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya				5 Dokumen	399.999.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		993.758.950,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.05.1.01.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha														
			Jumlah fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis Pengumpulan Limbah B3 skala Provinsi yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha				2 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		435.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
6.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	-	-			-	224.999.750,00						-	365.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	-	-			-	224.999.750,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	365.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH														
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan				72 Dokumen	154.999.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		294.999.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.06.1.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				20 Usaha/Kegiatan	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		70.000.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
7.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-			-	67.716.250,00						-	69.748.103,00	
	2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	67.716.250,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	69.748.103,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.08.1.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi														
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat				150 Orang	55.716.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		55.748.103,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.08.1.01.0007	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup														
			Jumlah pembinaan dan pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan				2 Dokumen	11.999.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		14.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
8.	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-			-	272.783.450,00						-	152.954.291,00	
	2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	272.783.450,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	152.954.291,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				4 Entitas	272.783.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		152.954.291,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-			-	139.999.650,00						-	400.000.000,00	
	2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	-	-			-	139.999.650,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.10.1.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi														
			Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi				0 Perkara	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		125.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.10.1.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi														
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola ditindaklanjuti/ditangani				15 Pengaduan	109.999.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		125.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.10.1.01.0010	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi														
			Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi				10 Sanksi	29.999.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-	-			-	2.099.999.430,00						-	3.294.769.748,00	
	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	-	-			-	2.099.999.430,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	3.294.769.748,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.11.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan				3 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		1.194.831.338,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.11.1.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia				225 Unit	1.499.999.330,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		900.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.11.1.01.0009	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi														
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan				6 Dokumen	300.000.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		1.199.938.410,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						4.385.486.399,00							15.712.298.029,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						4.385.486.399,00							15.712.298.029,00	
1.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-			-	3.539.909.000,00						-	13.111.661.029,00	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-			-	398.000.000,00			-	Pengelolaa n Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	3.831.479.856,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok				34 Unit	124.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaa n Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		245.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaa n Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0007	Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH</i>				17 Dokumen	124.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		3.386.479.856,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-			-	100.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	1.025.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun</i>				17 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		1.025.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-			-	280.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	1.080.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				4 Dokumen	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		220.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0010	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi														
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan				8 Dokumen	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0011	Pelayanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani														
			Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)				4 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0012	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung														
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan				4 Dokumen	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		180.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				4 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		270.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-			-	576.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	2.020.550.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)				1 Dokumen	190.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		256.550.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				0 Ha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SAWIT	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				138,5 Ha	290.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan														
			Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan				0 Ha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		570.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0010	Pembangunan Sumur resapan														
			Jumlah Sumur Resapan yang terbangun				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0013	Pembangunan Dam Penahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dam Penahan yang terbangun				14 Unit	96.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		894.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	1.890.244.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	2.481.698.552,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	202.371.475,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		556.698.552,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				18 Laporan	1.162.872.525,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		1.200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				660 Ha	225.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		225.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0009	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal														
			Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Illegal logging dan TSL)				2 Operasi	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	-	-			-	65.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	240.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.07.0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				20 Laporan	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		240.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	-	-			-	230.665.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	2.432.932.621,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.09.0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit														
			Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.09.0006	Pembangunan Sumber Benih														
			Luas Sumber Benih yang Dibangun				0 Ha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.09.0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan														
			Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan				0 Batang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		987.932.621,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.09.0009	Pengelolaan Sumber Benih														
			Luas sumber benih yang dikelola				6 Ha	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.09.0010	Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas kawasan TAHURA yang diinventarisasi dan Diverifikasi dengan nilai Kehati tinggi				0 Ha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.04.1.01.0014	Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi														
			Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem				0 Ha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	-	-			-	99.530.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES														
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				1 Laporan	99.530.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-			-	596.047.399,00						-	2.000.637.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-			-	596.047.399,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	2.000.637.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				10 Kelompok	280.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		315.650.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				0 Hektar	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		1.064.987.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				4 Unit	316.047.399,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		320.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
4.	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	-	-			-	150.000.000,00						-	250.000.000,00	
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	150.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.06.1.01.0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS														
			Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS				2 Lembaga	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		70.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.06.1.01.0007	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah														
			Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.06.1.01.0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						619.719.989,00							879.000.000,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	499.719.989,00						-	509.000.000,00	
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	52.120.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	20.000.000,00	UPTD KUALITAS AIR DANAU TOBA
	2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	52.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		20.000.000,00	UPTD KUALITAS AIR DANAU TOBA
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	5.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	10.000.000,00	UPTD KUALITAS AIR DANAU TOBA
	2.11.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		10.000.000,00	UPTD KUALITAS AIR DANAU TOBA
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	33.500.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	79.000.000,00	UPTD KUALITAS AIR DANAU TOBA
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		2.000.000,00	UPTD KUALITAS AIR DANAU TOBA
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		20.000.000,00	UPTD KUALITAS AIR DANAU TOBA
	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		20.000.000,00	UPTD KUALITAS AIR DANAU TOBA
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		10.000.000,00	UPTD KUALITAS AIR DANAU TOBA
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		2.000.000,00	UPTD KUALITAS AIR DANAU TOBA
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		25.000.000,00	UPTD KUALITAS AIR DANAU TOBA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	344.099.989,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	20.000.000,00	UPTD KUALITAS AIR DANAU TOBA
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KUALITAS AIR DANAU TOBA
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		20.000.000,00	UPTD KUALITAS AIR DANAU TOBA
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	318.099.989,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KUALITAS AIR DANAU TOBA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	65.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	380.000.000,00	UPTD KUALITAS AIR DANAU TOBA
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		20.000.000,00	UPTD KUALITAS AIR DANAU TOBA
	2.11.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		120.000.000,00	UPTD KUALITAS AIR DANAU TOBA
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		120.000.000,00	UPTD KUALITAS AIR DANAU TOBA
	2.11.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		120.000.000,00	UPTD KUALITAS AIR DANAU TOBA
2.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-			-	120.000.000,00						-	370.000.000,00	
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	-	-			-	45.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	200.000.000,00	UPTD KUALITAS AIR DANAU TOBA
	2.11.03.1.01.0004	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan														
			Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan				10 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KUALITAS AIR DANAU TOBA
	2.11.03.1.01.0014	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi														
			Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi yang dilakukan pemeliharaan				1 Unit	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		200.000.000,00	UPTD KUALITAS AIR DANAU TOBA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.03.1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-	-			-	75.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	170.000.000,00	UPTD KUALITAS AIR DANAU TOBA
	2.11.03.1.03.0010	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar lintas kabupaten/kota														
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak lintas kabupaten/kota				1 Kegiatan	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		170.000.000,00	UPTD KUALITAS AIR DANAU TOBA
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I						786.606.183,00							215.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						505.606.204,00							160.000.000,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						505.606.204,00							160.000.000,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	505.606.204,00						-	160.000.000,00	
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	53.958.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	90.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	53.958.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		65.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		15.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	2.11.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		10.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	8.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	15.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	2.11.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		15.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	2.11.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	48.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	55.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		3.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		10.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		2.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		40.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	2.11.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	2.11.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	2.11.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	368.248.204,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	71.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	295.748.204,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	27.400.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	25.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						280.999.979,00							55.000.000,00	
1.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-			-	200.999.979,00						-	55.000.000,00	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-			-	55.999.979,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok				2 Unit	28.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	3.28.03.1.01.0007	Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH														
			Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH				1 Dokumen	27.999.979,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-			-	10.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-			-	65.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	55.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				10 Ha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	3.28.03.1.04.0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan				0 Ha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	3.28.03.1.04.0013	Pembangunan Dam Penahan														
			Jumlah Dam Penahan yang terbangun				1 Unit	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SDA KEHUTANAN-DA NA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		55.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	70.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun</i>				1 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			<i>Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan</i>				120 Ha	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	3.28.03.1.05.0009	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal														
			<i>Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Illegal logging dan TSL)</i>				1 Operasi	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
2.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-			-	80.000.000,00						-	0,00	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-			-	80.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				5 Kelompok	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				2 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II							2.030.154.266,00						0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						543.145.166,00							0,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						543.145.166,00							0,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	543.145.166,00						-	0,00	
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	53.640.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	53.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	2.11.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	8.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	2.11.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	2.11.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	48.500.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	2.11.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	2.11.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	2.11.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	405.605.166,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	349.105.166,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	27.400.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	25.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	2.11.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	2.11.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						1.487.009.100,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						1.487.009.100,00							0,00	
1.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-			-	980.253.900,00						-	0,00	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-			-	84.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok				3 Unit	42.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	3.28.03.1.01.0007	Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH														
			Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH				1 Dokumen	42.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-			-	15.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-			-	776.253.900,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)				1 Dokumen	35.055.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				15 Ha	741.198.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	3.28.03.1.04.0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan				0 Ha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	3.28.03.1.04.0013	Pembangunan Dam Penahan														
			Jumlah Dam Penahan yang terbangun				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	105.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun</i>				1 Laporan	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			<i>Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan</i>				120 Ha	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	3.28.03.1.05.0009	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal														
			<i>Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Illegal logging dan TSL)</i>				1 Operasi	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
2.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-			-	506.755.200,00						-	0,00	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-			-	506.755.200,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan															
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				0 Kelompok	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II	
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan															
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				o Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II	
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial															
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				0 Hektar	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II	
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial															
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				3 Unit	506.755.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II	
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III						1.015.034.670,00							1.015.034.670,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	8.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	8.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	2.11.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	2.11.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		8.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	48.500.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	48.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		3.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		9.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		1.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		35.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	2.11.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	2.11.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	2.11.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	288.134.670,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	288.134.670,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		1.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	38.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		38.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	248.634.670,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		248.634.670,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	27.400.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	27.400.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	25.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		25.400.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		2.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	2.11.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	2.11.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						589.000.000,00							589.000.000,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						589.000.000,00							589.000.000,00	
1.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-			-	239.000.000,00						-	239.000.000,00	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-			-	84.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	84.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok				3 Unit	42.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		42.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	3.28.03.1.01.0007	Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH														
			Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH				1 Dokumen	42.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		42.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-			-	15.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	15.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		15.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-			-	30.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	30.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)				1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		30.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				0 Ha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	3.28.03.1.04.0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan														
			Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan				0 Ha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	3.28.03.1.04.0013	Pembangunan Dam Penahan														
			Jumlah Dam Penahan yang terbangun				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	110.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	110.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun</i>				1 Laporan	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		65.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	3.28.03.1.05.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			<i>Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan</i>				0 Operasi	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			<i>Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan</i>				120 Ha	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		30.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	3.28.03.1.05.0009	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal														
			<i>Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Illegal logging dan TSL)</i>				1 Operasi	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		15.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	-	-			-	0,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	3.28.03.1.09.0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan														
			Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan				0 Batang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
2.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-			-	350.000.000,00						-	350.000.000,00	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-			-	350.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	350.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				4 Kelompok	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		50.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				0 Hektar	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				4 Unit	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		300.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV						832.234.100,00							1.102.234.100,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						489.234.100,00							489.234.100,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						489.234.100,00							489.234.100,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	489.234.100,00						-	489.234.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	54.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	54.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	54.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		54.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	2.11.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	8.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	8.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	2.11.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	2.11.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		8.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	48.500.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	48.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		3.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		9.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		1.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		35.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	2.11.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	2.11.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	2.11.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	346.734.100,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	346.734.100,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		1.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		45.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	300.234.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		300.234.100,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	32.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	32.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		30.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		2.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	2.11.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	2.11.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						343.000.000,00							613.000.000,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						343.000.000,00							613.000.000,00	
1.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-			-	258.000.000,00						-	258.000.000,00	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-			-	56.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	56.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok				2 Unit	28.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		28.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	3.28.03.1.01.0007	Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH				1 Dokumen	28.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		28.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-			-	12.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	12.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		12.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-			-	80.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	80.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)				1 Dokumen	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		40.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				0 Ha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	3.28.03.1.04.0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan														
			Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan				0 Ha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	3.28.03.1.04.0010	Pembangunan Sumur resapan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumur Resapan yang terbangun				4 Unit	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		40.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	3.28.03.1.04.0013	Pembangunan Dam Penahan														
			Jumlah Dam Penahan yang terbangun				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	110.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	110.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun</i>				1 Laporan	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		65.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	3.28.03.1.05.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			<i>Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan</i>				0 Operasi	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			<i>Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan</i>				120 Ha	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		30.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	3.28.03.1.05.0009	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal														
			<i>Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)</i>				1 Operasi	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		15.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-			-	85.000.000,00						-	355.000.000,00	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-			-	85.000.000,00			-	Pengelolaa n Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	355.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				10 Kelompok	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SDA KEHUTANAN-DA NA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaa n Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		55.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaa n Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				0 Hektar	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				2 Unit	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		300.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V							851.403.163,00						1.560.700.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						368.403.163,00							716.700.000,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						368.403.163,00							716.700.000,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	368.403.163,00						-	716.700.000,00	
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	54.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	54.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				1 Dokumen	54.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		54.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	8.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	9.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	2.11.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		9.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	52.999.373,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	88.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.499.373,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		2.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		20.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		10.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		12.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		2.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		42.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	2.11.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	226.003.790,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	237.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		2.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	22.999.998,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		25.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	201.503.792,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		210.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	27.400.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	328.200.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	25.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		26.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		2.200.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		200.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	2.11.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		100.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						483.000.000,00							844.000.000,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						483.000.000,00							844.000.000,00	
1.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-			-	383.000.000,00						-	650.000.000,00	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-			-	84.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	86.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok				3 Unit	42.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		43.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	3.28.03.1.01.0007	Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH				1 Dokumen	42.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		43.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-			-	15.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	20.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		20.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-			-	174.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	352.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)				1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		32.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				0 Ha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		100.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	3.28.03.1.04.0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan														
			Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan				0 Ha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		100.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		20.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	3.28.03.1.04.0010	Pembangunan Sumur resapan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumur Resapan yang terbangun				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		50.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	3.28.03.1.04.0013	Pembangunan Dam Penahan														
			Jumlah Dam Penahan yang terbangun				0 Unit	144.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		50.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	110.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	142.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		25.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		65.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				120 Ha	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		32.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	3.28.03.1.05.0009	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal														
			Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (illegal logging dan TSL)				1 Operasi	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		20.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	-	-			-	0,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	50.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	3.28.03.1.09.0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan				0 Batang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		50.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
2.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-			-	100.000.000,00						-	154.000.000,00	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-			-	100.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	154.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				3 Kelompok	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		72.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		25.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				0 Hektar	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		25.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				2 Unit	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		32.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
3.	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	-	-			-	0,00						-	40.000.000,00	
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	0,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	40.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	3.28.06.1.01.0007	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah														
			Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		20.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.06.1.01.0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS														
			Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		20.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI						1.173.411.250,00							4.389.500.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						447.285.000,00							3.421.500.000,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						447.285.000,00							3.421.500.000,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	447.285.000,00						-	3.421.500.000,00	
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	53.160.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	54.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	53.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		54.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	8.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	10.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	2.11.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		10.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	53.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	2.687.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		2.600.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		20.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		10.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		12.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		2.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		43.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	170.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		20.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	2.11.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		150.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	291.125.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	298.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		2.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		36.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	254.625.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		260.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	42.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	202.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		42.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		2.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		100.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	2.11.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		58.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						726.126.250,00							968.000.000,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						726.126.250,00							968.000.000,00	
1.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-			-	446.126.250,00						-	603.000.000,00	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-			-	28.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	31.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok				1 Unit	14.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		16.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	3.28.03.1.01.0007	Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH				1 Dokumen	14.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		15.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-			-	8.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	10.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		10.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-			-	325.126.250,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	397.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)				1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		27.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				10 Ha	180.126.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR), DBH SAWIT	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		120.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				5 Ha	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		140.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		10.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	3.28.03.1.04.0010	Pembangunan Sumur resapan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumur Resapan yang terbangun				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		50.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	3.28.03.1.04.0013	Pembangunan Dam Penahan														
			Jumlah Dam Penahan yang terbangun				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		50.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	85.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	115.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		15.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		50.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				120 Ha	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		32.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	3.28.03.1.05.0009	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal														
			Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Illegal logging dan TSL)				1 Operasi	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		18.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	-	-			-	0,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	50.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	3.28.03.1.09.0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan				0 Batang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		50.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
2.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-			-	280.000.000,00						-	350.000.000,00	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-			-	280.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	350.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				19 Kelompok	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		90.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		20.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				0 Hektar	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		20.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				2 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		220.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
3.	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	-	-			-	0,00						-	15.000.000,00	
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	0,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	15.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	3.28.06.1.01.0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS														
			Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		15.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII						1.284.321.604,00							1.284.321.604,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						493.321.604,00							493.321.604,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						493.321.604,00							493.321.604,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	493.321.604,00						-	493.321.604,00	
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	52.560.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	52.560.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	52.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		52.560.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	2.11.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	8.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	8.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	2.11.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	2.11.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		8.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	53.500.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	53.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		3.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		9.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		1.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		40.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	2.11.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	2.11.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	2.11.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	337.261.604,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	337.261.604,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		1.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		40.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	295.761.604,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		295.761.604,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	42.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	42.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		40.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		2.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	2.11.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	2.11.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						791.000.000,00							791.000.000,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						791.000.000,00							791.000.000,00	
1.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-			-	618.000.000,00						-	618.000.000,00	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-			-	56.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	56.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok				2 Unit	28.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		28.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	3.28.03.1.01.0007	Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH														
			Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH				1 Dokumen	28.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		28.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-			-	12.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	12.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		12.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-			-	440.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	440.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)				1 Dokumen	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		40.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				20 Ha	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		400.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	3.28.03.1.04.0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan														
			Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan				0 Ha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	3.28.03.1.04.0010	Pembangunan Sumur resapan														
			Jumlah Sumur Resapan yang terbangun				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	3.28.03.1.04.0013	Pembangunan Dam Penahan														
			Jumlah Dam Penahan yang terbangun				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	110.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	110.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		65.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	3.28.03.1.05.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan				0 Operasi	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				120 Ha	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		30.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	3.28.03.1.05.0009	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Illegal logging dan TSL)				1 Operasi	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		15.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
2.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-			-	173.000.000,00						-	173.000.000,00	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-			-	173.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	173.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				5 Kelompok	173.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		173.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				0 Hektar	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaa n Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaa n Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII						2.407.017.027,00							2.407.017.027,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						484.717.234,00							484.717.234,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						484.717.234,00							484.717.234,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	472.717.234,00						-	472.717.234,00	
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	53.560.000,00			-	Pengelolaa n Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	53.560.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	53.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		53.560.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	2.11.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	8.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	8.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	2.11.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	2.11.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		8.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	53.500.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	53.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		3.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		9.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		1.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		40.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	2.11.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	2.11.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	33.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		33.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	295.761.604,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		295.761.604,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	27.395.630,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	27.395.630,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	25.395.630,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		25.395.630,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		2.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	2.11.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	2.11.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
2.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-	-			-	12.000.000,00						-	12.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	-	-			-	12.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	12.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	2.11.04.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati														
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				1 Dokumen	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		12.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						1.922.299.793,00							1.922.299.793,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						1.922.299.793,00							1.922.299.793,00	
1.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-			-	863.597.500,00						-	863.597.500,00	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-			-	28.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	28.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok				1 Unit	14.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaa n Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		14.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	3.28.03.1.01.0007	Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH														
			Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH				1 Dokumen	14.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaa n Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		14.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-			-	760.597.500,00			-	Pengelolaa n Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	760.597.500,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)				1 Dokumen	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaa n Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		40.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				10 Ha	150.567.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SDA KEHUTANAN-DA NA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		150.567.500,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	3.28.03.1.04.0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan														
			Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan				0 Ha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	3.28.03.1.04.0010	Pembangunan Sumur resapan														
			Jumlah Sumur Resapan yang terbangun				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	3.28.03.1.04.0013	Pembangunan Dam Penahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dam Penahan yang terbangun				10 Unit	570.030.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		570.030.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	75.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	75.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		30.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	3.28.03.1.05.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan				0 Operasi	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				120 Ha	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		30.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	3.28.03.1.05.0009	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal														
			Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Illegal logging dan TSL)				1 Operasi	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		15.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
2.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-			-	1.058.702.293,00						-	1.058.702.293,00	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-			-	1.058.702.293,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	1.058.702.293,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				5 Kelompok	305.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		305.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				0 Hektar	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				36 Unit	753.702.293,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		753.702.293,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX						952.896.864,00							951.561.604,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	8.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	8.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	2.11.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	2.11.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		8.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	52.700.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	50.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		9.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		1.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		40.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	2.11.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	2.11.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	2.11.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	326.660.864,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	330.661.604,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		1.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	29.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		33.400.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	295.760.864,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		295.761.604,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	25.400.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	25.400.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	25.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		25.400.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	2.11.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	2.11.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaa n Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						487.000.000,00							487.000.000,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						487.000.000,00							487.000.000,00	
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaa n Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		2.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
1.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-			-	145.000.000,00						-	145.000.000,00	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-			-	28.000.000,00			-	Pengelolaa n Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	28.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok				1 Unit	14.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		14.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	3.28.03.1.01.0007	Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH														
			Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH				1 Dokumen	14.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		14.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-			-	12.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	12.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		12.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-			-	30.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	30.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)				1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		30.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				0 Ha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	3.28.03.1.04.0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan														
			Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan				0 Ha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	3.28.03.1.04.0013	Pembangunan Dam Penahan														
			Jumlah Dam Penahan yang terbangun				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	75.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	75.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun</i>				1 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		30.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	3.28.03.1.05.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			<i>Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan</i>				0 Operasi	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			<i>Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan</i>				120 Ha	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		30.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	3.28.03.1.05.0009	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal														
			<i>Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)</i>				1 Operasi	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		15.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-			-	340.000.000,00						-	340.000.000,00	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-			-	340.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	340.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				4 Kelompok	140.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		140.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				0 Hektar	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				2 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		200.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X						1.054.040.769,00							1.052.940.769,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						469.790.769,00							468.690.769,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						469.790.769,00							468.690.769,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	469.790.769,00						-	468.690.769,00	
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	53.129.165,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	53.129.165,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	53.129.165,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		53.129.165,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	2.11.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	8.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	8.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	2.11.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	2.11.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		8.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	53.500.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	53.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		3.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		9.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		1.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		40.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	2.11.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	2.11.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	2.11.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	327.761.604,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	326.661.604,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		1.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	30.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		29.400.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	295.761.604,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		295.761.604,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	27.400.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	27.400.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	25.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		25.400.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						584.250.000,00							584.250.000,00	
1.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-			-	304.000.000,00						-	304.000.000,00	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-			-	56.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	56.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok				2 Unit	28.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		28.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	3.28.03.1.01.0007	Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH														
			Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH				1 Dokumen	28.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		28.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-			-	12.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	12.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		12.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-			-	146.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	146.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)				1 Dokumen	26.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		26.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				6 Ha	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		120.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	3.28.03.1.04.0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan				0 Ha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	3.28.03.1.04.0013	Pembangunan Dam Penahan														
			Jumlah Dam Penahan yang terbangun				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	90.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	90.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		45.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	3.28.03.1.05.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan				0 Operasi	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				120 Ha	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		30.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	3.28.03.1.05.0009	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Illegal logging dan TSL)				1 Operasi	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		15.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
2.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-			-	280.250.000,00						-	280.250.000,00	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-			-	280.250.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	280.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				4 Kelompok	280.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		280.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				0 Hektar	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaa n Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaa n Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI							1.038.838.500,00						1.432.340.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						555.838.500,00							572.340.000,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						555.838.500,00							572.340.000,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	555.838.500,00						-	572.340.000,00	
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	56.280.000,00			-	Pengelolaa n Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	51.840.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	56.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		51.840.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	2.11.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	8.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	5.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	2.11.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	2.11.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		5.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	53.500.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	97.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		7.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		25.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		7.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		14.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		4.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		40.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	2.11.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	2.11.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	2.11.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	280.694.276,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	186.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		2.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	27.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		34.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	251.694.276,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		150.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	157.364.224,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	232.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		27.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						483.000.000,00							860.000.000,00	
1.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-			-	193.000.000,00						-	570.000.000,00	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-			-	56.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	160.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok				2 Unit	28.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		80.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	3.28.03.1.01.0007	Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH														
			Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH				1 Dokumen	28.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		80.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-			-	12.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	80.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		80.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-			-	30.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	35.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)				1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		35.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				0 Ha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	3.28.03.1.04.0013	Pembangunan Dam Penahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dam Penahan yang terbangun				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	95.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	295.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		125.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				120 Ha	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		110.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	3.28.03.1.05.0009	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal														
			Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Illegal logging dan TSL)				0 Operasi	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		60.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
2.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-			-	290.000.000,00						-	290.000.000,00	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-			-	290.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	290.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				4 Kelompok	290.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		290.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				0 Hektar	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII						877.642.400,00							1.692.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						424.642.400,00							863.500.000,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						424.642.400,00							863.500.000,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	424.642.400,00						-	863.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	53.952.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	54.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	53.952.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		54.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	2.11.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	8.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	5.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	2.11.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	2.11.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		5.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	53.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	95.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		5.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		25.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		7.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		14.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		4.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		40.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	15.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		15.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	2.11.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	2.11.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	2.11.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	282.290.400,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	297.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		2.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		35.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	255.790.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		260.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	27.400.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	397.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	25.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		42.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		5.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	2.11.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		200.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	2.11.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		150.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						453.000.000,00							828.500.000,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						453.000.000,00							828.500.000,00	
1.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-			-	313.000.000,00						-	683.500.000,00	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-			-	56.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	160.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok				2 Unit	28.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		80.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	3.28.03.1.01.0007	Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH				1 Dokumen	28.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		80.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-			-	12.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	80.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		80.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-			-	135.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	148.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)				1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		33.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				7,50 Ha	105.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		115.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	3.28.03.1.04.0013	Pembangunan Dam Penahan														
			Jumlah Dam Penahan yang terbangun				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	110.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	295.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		125.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				120 Ha	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		110.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	3.28.03.1.05.0009	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal														
			Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Illegal logging dan TSL)				0 Operasi	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		60.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-			-	140.000.000,00						-	145.000.000,00	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-			-	140.000.000,00			-	Pengelolaa n Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	145.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				6 Kelompok	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SDA KEHUTANAN-DA NA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaa n Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		60.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaa n Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	53.136.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		54.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	8.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	13.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		5.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		8.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	53.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	70.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		7.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		14.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		4.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		40.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	279.125.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	247.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		2.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		2.400.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
2.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-			-	449.000.000,00						-	1.029.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-			-	84.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	240.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok				3 Unit	42.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		120.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.03.1.01.0007	Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH														
			Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH				1 Dokumen	42.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		120.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-			-	15.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	120.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		120.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-			-	240.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	374.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)				1 Dokumen	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		54.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				10 Ha	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR), DBH SAWIT	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		160.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				10 Ha	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SDA KEHUTANAN-DA NA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		160.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.03.1.04.0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan														
			Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan				0 Ha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.03.1.04.0013	Pembangunan Dam Penahan														
			Jumlah Dam Penahan yang terbangun				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	110.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	295.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		125.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.03.1.05.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan				0 Operasi	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				120 Ha	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		110.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.03.1.05.0009	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal														
			Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Illegal logging dan TSL)				1 Operasi	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		60.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
3.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-			-	160.000.000,00						-	260.000.000,00	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-			-	160.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	260.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				3 Kelompok	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		60.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				0 Hektar	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				2 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		200.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV						851.641.132,00							1.204.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						851.641.132,00							1.204.000.000,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						851.641.132,00							1.204.000.000,00	
1.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	418.641.132,00						-	404.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	54.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	54.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	54.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		54.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	8.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	13.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		5.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		8.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	48.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	60.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		5.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		7.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		9.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		4.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		35.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	281.241.132,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	247.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		2.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	29.480.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		35.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	250.260.732,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		210.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	27.400.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	30.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	25.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		27.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		2.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
2.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-			-	403.000.000,00						-	765.000.000,00	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-			-	56.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	160.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok				2 Unit	28.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		80.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.03.1.01.0007	Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH														
			Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH				1 Dokumen	28.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		80.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-			-	12.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	80.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		80.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-			-	225.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	230.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)				1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		30.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				10 Ha	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SDA KEHUTANAN-DA NA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		200.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.03.1.04.0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan														
			Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan				0 Ha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.03.1.04.0013	Pembangunan Dam Penahan														
			Jumlah Dam Penahan yang terbangun				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	110.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	295.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		125.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.03.1.05.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan				0 Operasi	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				120 Ha	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		110.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.03.1.05.0009	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal														
			Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Illegal logging dan TSL)				1 Operasi	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		60.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
3.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-			-	30.000.000,00						-	35.000.000,00	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-			-	30.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	35.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				4 Kelompok	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		20.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				0 Hektar	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				2 Unit	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		15.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV						1.628.537.364,00							1.508.537.364,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						409.002.364,00							409.002.364,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						409.002.364,00							409.002.364,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	409.002.364,00						-	409.002.364,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	53.916.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	53.916.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	53.916.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		53.916.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	2.11.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	8.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	8.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	2.11.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	2.11.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		8.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	38.500.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	38.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		3.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		9.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		1.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		25.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	2.11.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaa n Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		1.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	29.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaa n Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		29.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	250.686.364,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaa n Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		250.686.364,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	27.400.000,00			-	Pengelolaa n Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	27.400.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	25.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		25.400.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		2.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	2.11.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	2.11.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						1.219.535.000,00							1.099.535.000,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						1.219.535.000,00							1.099.535.000,00	
1.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-			-	577.750.000,00						-	457.750.000,00	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-			-	56.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	56.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok				2 Unit	28.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		28.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	3.28.03.1.01.0007	Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH				1 Dokumen	28.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		28.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-			-	12.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	12.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		12.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-			-	279.750.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	279.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)				1 Dokumen	17.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		17.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				25 Ha	262.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		262.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	3.28.03.1.04.0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan														
			Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan				0 Ha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	3.28.03.1.04.0013	Pembangunan Dam Penahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dam Penahan yang terbangun				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	110.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	110.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		65.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	3.28.03.1.05.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan				0 Operasi	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				120 Ha	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		30.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	3.28.03.1.05.0009	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal														
			Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (illegal logging dan TSL)				1 Operasi	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		15.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	-	-			-	120.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	3.28.03.1.09.0006	Pembangunan Sumber Benih														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Sumber Benih yang Dibangun				0 Ha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	3.28.03.1.09.0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan														
			Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan				0 Batang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	3.28.03.1.09.0009	Pengelolaan Sumber Benih														
			Luas sumber benih yang dikelola				5 Ha	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
2.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-			-	641.785.000,00						-	641.785.000,00	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-			-	641.785.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	641.785.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				18 Kelompok	221.785.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		221.785.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				0 Hektar	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				5 Unit	420.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		420.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI						1.191.400.000,00							1.191.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	10.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	10.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	2.11.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	2.11.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		10.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	73.500.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	73.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		3.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		9.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		1.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		60.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	2.11.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	2.11.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	2.11.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	224.500.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	224.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		2.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	21.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		21.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	201.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		201.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	27.400.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	27.400.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	25.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		25.400.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		2.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	2.11.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	2.11.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						802.000.000,00							802.000.000,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						802.000.000,00							802.000.000,00	
1.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-			-	657.000.000,00						-	657.000.000,00	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-			-	56.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	56.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok				2 Unit	28.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		28.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	3.28.03.1.01.0007	Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH														
			Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH				1 Dokumen	28.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		28.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-			-	12.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	12.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		12.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-			-	494.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	494.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)				1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		30.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				3 Ha	408.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		408.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	3.28.03.1.04.0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan														
			Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan				0 Ha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	3.28.03.1.04.0010	Pembangunan Sumur resapan														
			Jumlah Sumur Resapan yang terbangun				8 Unit	56.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		56.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	3.28.03.1.04.0013	Pembangunan Dam Penahan														
			Jumlah Dam Penahan yang terbangun				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	75.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	75.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		30.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	3.28.03.1.05.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan				0 Operasi	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				120 Ha	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		30.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	3.28.03.1.05.0009	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Illegal logging dan TSL)				1 Operasi	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		15.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	-	-			-	20.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	20.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	3.28.03.1.09.0009	Pengelolaan Sumber Benih														
			Luas sumber benih yang dikelola				1 Ha	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		20.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	3.28.03.1.09.0010	Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan														
			Jumlah penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko (perorangan dan badan usaha non Perhutani) kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, pengadaan dan pengedaran bibit, serta pengadaan dan pengedaran benih dan bibit dalam provinsi				0 Unit Usaha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
2.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-			-	145.000.000,00						-	145.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-			-	145.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	145.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				2 Kelompok	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		70.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				0 Hektar	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				2 Unit	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		75.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
		UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN						2.193.890.508,00							2.315.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.001.180.400,00							69.750.000,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						1.001.180.400,00							69.750.000,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	1.001.180.400,00						-	69.750.000,00	
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	54.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	54.000.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	54.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		54.000.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	2.11.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	8.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	2.000.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	2.11.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	2.11.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		2.000.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	37.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	13.750.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		6.750.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		7.000.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	274.780.400,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	0,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	26.280.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	247.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	627.400.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	0,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	25.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	2.11.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						1.192.710.108,00							2.245.250.000,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						1.192.710.108,00							2.245.250.000,00	
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.500.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	0,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
1.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-			-	106.000.000,00						-	980.000.000,00	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-			-	28.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	20.000.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok				1 Unit	14.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		0,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	3.28.03.1.01.0007	Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH				1 Dokumen	14.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		20.000.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-			-	8.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	20.000.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		20.000.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-			-	0,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	640.000.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				0 Ha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		300.000.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		20.000.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	3.28.03.1.04.0010	Pembangunan Sumur resapan														
			Jumlah Sumur Resapan yang terbangun				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		120.000.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	3.28.03.1.04.0013	Pembangunan Dam Penahan														
			Jumlah Dam Penahan yang terbangun				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		200.000.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	70.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	180.000.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		20.000.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		20.000.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				120 Ha	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		120.000.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	3.28.03.1.05.0009	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Illegal logging dan TSL)				1 Operasi	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		20.000.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	-	-			-	0,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	120.000.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	3.28.03.1.09.0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan														
			Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan				0 Batang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		120.000.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
2.	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	-	-			-	730.000.000,00						-	889.000.000,00	
	3.28.04.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	-	-			-	680.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	835.000.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	3.28.04.1.01.0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif				0 Desa	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		20.000.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	3.28.04.1.01.0011	Perencanaan Pengelolaan TAHURA														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		65.000.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	3.28.04.1.01.0013	Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Provinsi														
			Luas kawasan TAHURA yang diinventarisasi dan Diverifikasi dengan nilai Kehati tinggi				0 Ha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		100.000.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	3.28.04.1.01.0014	Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi														
			Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem				50 Ha	630.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		650.000.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	-	-			-	50.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	54.000.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	3.28.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES														
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		54.000.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
3.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-			-	355.210.108,00						-	376.250.000,00	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-			-	355.210.108,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	376.250.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				2 Kelompok	280.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		280.250.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		20.000.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				1 Unit	75.210.108,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		76.000.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	J U M L A H							138.417.024.414,00							628.342.383.483,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						435.065.806.967,00							901.114.331.126,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						435.065.806.967,00							901.114.331.126,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						435.065.806.967,00							901.114.331.126,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	179.578.803.864,00						-	221.186.570.261,00	
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	471.019.535,00			-	-	-	-	1.702.684.428,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	191.321.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		877.329.376,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	14.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		389.887.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				23 Berita Acara	265.697.775,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		435.467.752,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	167.653.925.007,00			-	-	-	-	186.016.782.776,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1058 Orang/ Bulan	151.453.045.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		170.548.714.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	15.844.520.007,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.171.382.476,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	342.360.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.655.576.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	14.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		641.109.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	14.000.000,00			-	-	-	-	611.182.220,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	14.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		611.182.220,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	120.290.000,00			-	-	-	-	983.756.620,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		380.253.720,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	14.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		230.778.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				100 Orang	104.940.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		372.724.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	9.061.655.680,00			-	-	-	-	10.808.317.478,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	37.733.580,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		213.394.462,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		22.656.315,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	59.496.930,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		118.247.672,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.066.751.890,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.498.692.517,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	208.891.280,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		864.276.832,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	37.042.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		193.821.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	7.565.740.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.598.028.580,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	86.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		299.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	5.683.642,00			-	-	-	-	6.781.444.397,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	2.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		29.700.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				100 Unit	2.983.642,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.751.744.397,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.259.950.000,00			-	-	-	-	5.251.102.054,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1.253.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.517.710.366,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.996.508,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	6.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.722.395.180,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	992.280.000,00			-	-	-	-	9.031.300.288,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	866.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.435.480.634,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			0				40 0	126.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.434.839.870,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				23 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.160.979.784,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	undefined	-			undefined undefined	42.357.843.025,00						-	143.874.224.479,00	
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	36.528.481.580,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	71.815.244.643,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.01.0075	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi				2 Lembaga	3.162.101.920,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		3.520.514.228,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.01.0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				12 Dokumen	750.226.320,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		1.026.267.088,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.01.0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan				2 Lembaga	985.945.930,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		1.084.611.220,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.01.0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara				2 KM	22.148.474.770,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		49.877.180.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.01.0117	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun				12 Dokumen	3.300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		3.639.500.480,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.01.0119	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun				12 Dokumen	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		2.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.01.0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya														
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun				12 Dokumen	881.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		6.885.315.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun				12 Dokumen	3.918.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		1.784.829.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.01.0136	Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				12 Dokumen	1.322.212.640,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		1.797.026.627,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	5.829.361.445,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-	-	72.058.979.836,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				2 KM	1.964.711.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		59.860.912.507,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara				2 KM	918.525,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		3.463.424.181,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi yang Diperkuat Kapasitasnya				1 Lembaga	310.780.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		2.080.232.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				4 Dokumen	3.037.461.920,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		2.623.372.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0045	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi														
			Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi				2 Lembaga	515.490.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		4.031.038.748,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-	-			-	61.885.887.566,00						-	68.664.533.592,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	-	-			-	61.885.887.566,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	68.664.533.592,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.1.01.0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				33 Kabupaten/Kota	415.907.125,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		543.239.207,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun				250 Liter/Detik	59.153.911.441,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		65.069.302.585,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.1.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		209.372.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.1.01.0021	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				33 Kabupaten/Kota	153.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		463.903.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.1.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun				1 Dokumen	2.162.469.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		2.378.715.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-	-			-	47.188.274.000,00						-	52.716.247.237,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	-	-			-	47.188.274.000,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-	-	52.716.247.237,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.1.01.0012	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan				0 Kabupaten/ Kota	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		318.450.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.1.01.0013	Pembangunan TPA/TPST/SPA														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kapasitas TPA/TPST/SPA yang dibangun				1 Ton/hari	45.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		49.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.1.01.0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan														
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		490.695.837,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.1.01.0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun				1 Dokumen	2.188.274.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		2.407.101.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-	-			-	2.650.047.125,00						-	3.042.855.337,00	
	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	-	-			-	2.650.047.125,00			-	-	-	-	3.042.855.337,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				12 Dokumen	2.087.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.296.624.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.1.01.0016	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				33 kabupate n/kota	146.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		162.624.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.1.01.0022	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kabupaten/Kota yang memperoleh pembinaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				33 Kabupate n/Kota	415.907.125,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		583.607.337,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-	-			-	125.000.000,00						-	1.115.570.457,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	-	-			-	125.000.000,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	1.115.570.457,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.1.01.0008	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				17 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		770.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.1.01.0012	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				12 Dokumen	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		176.549.450,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.1.01.0013	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan				12 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktu r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		169.021.007,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	-	-			-	8.279.879.370,00						-	9.307.867.307,00	
	1.03.07.1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	-	-			-	8.279.879.370,00			-	-	-	-	9.307.867.307,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.07.1.01.0026	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi														
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun				1,9 Liter/Detik	1.279.879.370,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.607.867.307,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.07.1.01.0029	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi														
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun				5 Unit	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.07.1.01.0043	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di Kawasan Strategis Provinsi														
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di Kawasan Strategis Provinsi yang dioptimalisasi				1 Unit	5.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-	-			-	5.161.495.850,00						-	6.654.527.797,00	
	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	-	-			-	5.161.495.850,00			-	-	-	-	6.654.527.797,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.1.01.0013	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara														
			Jumlah Rumah Negara yang Dikelola				2 Rumah Negara	326.064.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		367.903.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.1.01.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				12 Dokumen	8.147.232.960,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		22.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan														
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				25 KM	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0044	Pengelolaan Leger Jalan														
			Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola				12 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0053	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi														
			Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi				25 KM	30.304.938.960,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		8.869.989.942,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0054	Pembangunan Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Panjang jembatan yang dibangun</i>				15 Meter	612.108.077,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		110.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan														
			<i>Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Berkala</i>				18 KM	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		66.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0058	Pembangunan Jalan														
			<i>Panjang Jalan yang Dibangun</i>				25 KM	34.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		154.407.618.090,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0059	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				25 KM	121.388.240,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		16.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
11.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-	-			-	4.935.063.920,00						-	6.003.240.936,00	
	1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	-	-			-	3.675.606.220,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	4.044.340.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.01.0009	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan				100 Orang	2.837.067.320,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		3.120.779.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.01.0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi														
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga	324.038.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		356.544.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi				100 Orang	514.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		567.017.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	-	-			-	913.797.800,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-	-	1.578.663.636,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.02.0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Data dan Infomasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan				1 Dokumen	392.475.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		1.005.193.288,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI														
			Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya				33 Orang	521.322.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		573.470.348,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	-	-			-	345.659.900,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	380.237.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.03.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha				33 Badan Usaha	345.659.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		380.237.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
12.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	-	-			-	3.527.285.900,00						-	4.998.120.488,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	-	-			-	951.200.000,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-	-	1.787.877.896,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi				1 Dokumen	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		473.187.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.01.0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi				33 Orang	551.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		1.314.690.896,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	-	-			-	580.336.000,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-	-	1.639.115.540,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.02.0009	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Tersedianya Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi Ranperda RTRW Kab/Kota sesuai dengan ketentuan waktu yaitu 15 hari				12 Dokumen	580.336.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		1.639.115.540,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	-	-			-	1.200.000.000,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	370.772.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				12 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		357.572.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.03.0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang														
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				0 Dokumen	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		13.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	-	-			-	795.749.900,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-	-	1.200.354.452,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang														
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				0 Dokumen	595.749.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		1.187.154.452,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.04.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif nonfiskal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Berita Acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal</i>				0 Berita Acara	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		13.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN						6.209.188.923,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.209.188.923,00							0,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						6.209.188.923,00							0,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	5.707.588.363,00						-	0,00	
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	114.600.000,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	114.600.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	53.270.754,00			-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.739.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	35.066.970,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	13.964.784,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.500.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	4.422.787.500,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
	1.03.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar														
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				1 Unit	4.422.787.500,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	120.137.140,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	120.137.140,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	996.792.969,00			-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	126.286.549,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
	1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				3 Unit	857.756.420,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	12.750.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
2.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	-			-	501.600.560,00						-	0,00	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	-	-			-	501.600.560,00			-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
	1.03.10.1.01.0059	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				20 KM	501.600.560,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
		UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI						4.451.830.217,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.446.950.596,00							0,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						4.446.950.596,00							0,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	1.963.545.176,00						-	0,00	
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	113.520.000,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	113.520.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	253.313.488,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	18.356.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	191.898.928,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	34.670.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	8.388.560,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	539.030.788,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	539.030.788,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	106.940.000,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	106.940.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	950.740.900,00			-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	214.170.900,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	539.890.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	196.680.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
2.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	-			-	2.483.405.420,00						-	0,00	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	-	-			-	2.483.405.420,00			-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.10.1.01.0059	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				100 KM	2.483.405.420,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI	
	X	NON URUSAN						4.879.621,00							0,00		
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						4.879.621,00							0,00		
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	4.879.621,00						-	0,00		
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	4.879.621,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI	
	X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.879.621,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI	
		UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG MEDAN						77.791.161.117,00							315.812.527.214,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						77.791.161.117,00							315.812.527.214,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						77.791.161.117,00							315.812.527.214,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	970.819.848,00						-	869.732.317,00	
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	175.560.000,00			-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	193.116.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG MEDAN
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	175.560.000,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		193.116.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG MEDAN
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	86.312.592,00			-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	285.367.640,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG MEDAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	2.446.000,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukturu dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		193.116.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG MEDAN
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	34.756.092,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukturu dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		38.230.090,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG MEDAN
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	19.110.500,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukturu dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		21.021.550,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG MEDAN
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	30.000.000,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		33.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG MEDAN
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	371.712.256,00			-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	391.248.677,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG MEDAN
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	167.999.736,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		167.199.709,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG MEDAN
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	203.712.520,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukturu dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		224.048.968,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG MEDAN
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	337.235.000,00			-	Infrastrukturu dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG MEDAN
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	113.640.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukturu dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG MEDAN
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	24.680.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG MEDAN
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	198.915.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG MEDAN
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	-			-	2.596.385.949,00						-	1.700.505.114,00	
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.596.385.949,00			-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	1.700.505.114,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG MEDAN
	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi</i>				1 KM	751.000,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG MEDAN
	1.03.02.1.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi														
			<i>Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi</i>				1 Bendung	1.000.000.000,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG MEDAN
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>				1 KM	1.577.034.949,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		1.680.045.114,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG MEDAN
	1.03.02.1.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 KM	18.600.000,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		20.460.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG MEDAN
3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-	-			-	635.000,00						-	64.349.998.927,00	
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	-	-			-	635.000,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	64.349.998.927,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG MEDAN
	1.03.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota														
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun				1100 Liter/Detik	635.000,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		64.349.998.927,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG MEDAN
4.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	-			-	74.223.320.320,00						-	248.892.290.856,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	-	-			-	74.223.320.320,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	248.892.290.856,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG MEDAN
	1.03.10.1.01.0045	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin				122,31 KM	6.115.500.000,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		6.715.500.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG MEDAN
	1.03.10.1.01.0054	Pembangunan Jembatan														
			Panjang jembatan yang dibangun				314 Meter	10.220.000.000,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		107.300.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG MEDAN
	1.03.10.1.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Berkala				10,20 KM	8.100.000.000,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		46.017.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG MEDAN
	1.03.10.1.01.0057	Pemeliharaan Rutin Jembatan														
			Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				400 Meter	400.000.000,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		440.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG MEDAN
	1.03.10.1.01.0058	Pembangunan Jalan														
			Panjang Jalan yang Dibangun				19,50 KM	49.200.000.000,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		88.100.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG MEDAN
	1.03.10.1.01.0059	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				122 KM	187.820.320,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		319.790.856,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG MEDAN
		UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BINJAI						96.020.572.519,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						96.020.572.519,00							0,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						96.020.572.519,00							0,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	695.303.987,00						-	0,00	
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	180.240.000,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BINJAI
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	180.240.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BINJAI
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	223.010.119,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BINJAI
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	35.319.908,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BINJAI
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12.440.211,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BINJAI
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	175.250.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BINJAI
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	73.133.868,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BINJAI
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	73.133.868,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BINJAI
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	218.920.000,00			-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BINJAI
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	18.920.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BINJAI
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BINJAI
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	-			-	40.467.162.212,00						-	0,00	
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	40.000.000.000,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BINJAI
	1.03.02.1.01.0009	Pembangunan Tanggul Sungai														
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				1 KM	40.000.000.000,00	Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BINJAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	467.162.212,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BINJAI
	1.03.02.1.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa														
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara				5 KM	467.162.212,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BINJAI
3.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	-			-	54.858.106.320,00						-	0,00	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	-	-			-	54.858.106.320,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BINJAI
	1.03.10.1.01.0045	Pemeliharaan Rutin Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin				37 KM	6.367.500.000,00	Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BINJAI
	1.03.10.1.01.0054	Pembangunan Jembatan														
			Panjang jembatan yang dibangun				10 Meter	12.000.000.000,00	Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BINJAI
	1.03.10.1.01.0057	Pemeliharaan Rutin Jembatan														
			Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				200 Meter	438.000.000,00	Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BINJAI
	1.03.10.1.01.0058	Pembangunan Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Dibangun				1 KM	36.000.000.000,00	Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BINJAI
	1.03.10.1.01.0059	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi														
			Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				20 KM	52.606.320,00	Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BINJAI
		UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TEBING TINGGI						62.000.699.013,00							58.551.993.156,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						62.000.699.013,00							58.551.993.156,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						62.000.699.013,00							58.551.993.156,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	972.663.585,00						-	984.882.786,00	
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	165.840.000,00			-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	156.420.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TEBING TINGGI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	165.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		156.420.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TEBING TINGGI
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	331.667.144,00			-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	346.292.701,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TEBING TINGGI
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.425.111,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		9.166.898,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TEBING TINGGI
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	23.823.933,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		47.788.953,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TEBING TINGGI
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	18.668.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		19.275.850,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TEBING TINGGI
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	283.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		270.061.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TEBING TINGGI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	148.001.441,00			-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	162.801.585,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TEBING TINGGI
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	148.001.441,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		162.801.585,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TEBING TINGGI
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	327.155.000,00			-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	319.368.500,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TEBING TINGGI
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	110.460.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		81.004.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TEBING TINGGI
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	17.780.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		19.558.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TEBING TINGGI
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	198.915.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		218.806.500,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TEBING TINGGI
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	-			-	22.218.674.888,00						-	25.548.626.466,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	22.218.674.888,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	25.548.626.466,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TEBING TINGGI
	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				5,2 KM	21.477.643.110,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		24.310.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TEBING TINGGI
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				2 KM	708.031.778,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		1.208.036.016,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TEBING TINGGI
	1.03.02.1.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 KM	33.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		30.590.450,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TEBING TINGGI
3.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	-			-	38.809.360.540,00						-	32.018.483.904,00	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	-	-			-	38.809.360.540,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	32.018.483.904,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TEBING TINGGI
	1.03.10.1.01.0045	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin				129,45 KM	6.472.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		7.119.750.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TEBING TINGGI
	1.03.10.1.01.0054	Pembangunan Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang jembatan yang dibangun				15 Meter	1.800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		2.200.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TEBING TINGGI
	1.03.10.1.01.0057	Pemeliharaan Rutin Jembatan														
			Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				440 Meter	440.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		484.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TEBING TINGGI
	1.03.10.1.01.0058	Pembangunan Jalan														
			Panjang Jalan yang Dibangun				3 KM	30.000.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		22.000.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TEBING TINGGI
	1.03.10.1.01.0059	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				2 KM	96.860.540,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		214.733.904,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TEBING TINGGI
		UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMATANG SIANTAR						78.995.291.897,00							23.136.444.617,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						78.995.291.897,00							23.136.444.617,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						78.995.291.897,00							23.136.444.617,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	751.343.547,00						-	654.843.495,00	
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	157.320.000,00			-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMATANG SIANTAR
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	157.320.000,00	Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMATANG SIANTAR
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	221.087.325,00			-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	244.613.651,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMATANG SIANTAR
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	9.477.318,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		10.428.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMATANG SIANTAR
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	58.710.007,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		64.831.851,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMATANG SIANTAR
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	20.468.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		22.514.800,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMATANG SIANTAR
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	132.432.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		146.839.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMATANG SIANTAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	372.936.222,00			-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	410.229.844,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMATANG SIANTAR
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	175.999.742,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		193.599.716,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMATANG SIANTAR
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	196.936.480,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		216.630.128,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMATANG SIANTAR
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	-			-	2.652.652.530,00						-	11.557.933.762,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	999.832.620,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMATANG SIANTAR
	1.03.02.1.01.0009	Pembangunan Tanggul Sungai														
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				0,2 KM	999.832.620,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMATANG SIANTAR
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.652.819.910,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	11.557.933.762,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMATANG SIANTAR
	1.03.02.1.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan</i>				0,707 KM	3.812.600,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		4.100.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMATANG SIANTAR
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>				1 KM	1.649.007.310,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		7.457.933.762,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMATANG SIANTAR
3.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	-			-	75.591.295.820,00						-	10.923.667.360,00	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	-	-			-	75.591.295.820,00			-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	10.923.667.360,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMATANG SIANTAR
	1.03.10.1.01.0045	Pemeliharaan Rutin Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin				180 KM	9.000.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		9.905.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMATANG SIANTAR
	1.03.10.1.01.0057	Pemeliharaan Rutin Jembatan														
			Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				640 Meter	405.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		700.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMATANG SIANTAR
	1.03.10.1.01.0058	Pembangunan Jalan														
			Panjang Jalan yang Dibangun				10 KM	66.000.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMATANG SIANTAR
	1.03.10.1.01.0059	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				180 KM	186.295.820,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		318.667.360,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMATANG SIANTAR
		UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG BALAI						74.484.610.713,00							182.078.808.461,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						74.475.874.713,00							182.069.485.961,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						74.475.874.713,00							182.069.485.961,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	1.131.645.427,00						-	1.162.249.122,00	
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	177.720.000,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	195.492.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG BALAI
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	177.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		195.492.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG BALAI
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	397.166.427,00			-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	435.139.222,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG BALAI
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	103.130.105,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		111.530.167,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG BALAI
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	28.067.322,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		28.953.155,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG BALAI
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	2.988.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		3.286.800,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG BALAI
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	262.981.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		291.369.100,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG BALAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	143.134.000,00			-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	157.447.400,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG BALAI
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	143.134.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		157.447.400,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG BALAI
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	413.625.000,00			-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	374.170.500,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG BALAI
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	147.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		81.004.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG BALAI
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	67.430.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		74.360.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG BALAI
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	198.915.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		218.806.500,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG BALAI
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	-			-	39.272.442.086,00						-	66.296.325.919,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	11.505.393.800,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	17.600.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG BALAI
	1.03.02.1.01.0073	Rehabilitasi Tanggul Sungai														
			Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi				6 KM	11.505.393.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		17.600.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG BALAI
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	27.767.048.286,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	48.696.325.919,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG BALAI
	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi</i>				2 KM	4.053.250.914,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		4.458.576.005,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG BALAI
	1.03.02.1.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi														
			<i>Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi</i>				1 Bendung	20.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		34.525.360.100,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG BALAI
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>				166 KM	3.095.476.482,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		9.035.404.835,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG BALAI
	1.03.02.1.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara				3 Bendung	618.320.890,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		676.984.979,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG BALAI
3.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	-			-	34.071.787.200,00						-	114.610.910.920,00	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	-	-			-	34.071.787.200,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	114.610.910.920,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG BALAI
	1.03.10.1.01.0045	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin				200,44 KM	10.022.000.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		11.024.200.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG BALAI
	1.03.10.1.01.0054	Pembangunan Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang jembatan yang dibangun				1 Meter	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		1.100.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG BALAI
	1.03.10.1.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Berkala				10 KM	7.500.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		55.000.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG BALAI
	1.03.10.1.01.0057	Pemeliharaan Rutin Jembatan														
			Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				1949,50 Meter	1.949.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		2.144.450.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG BALAI
	1.03.10.1.01.0058	Pembangunan Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Dibangun				6,8 KM	13.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SAWIT	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		44.880.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG BALAI
	1.03.10.1.01.0059	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi														
			Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				1 KM	400.287.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		462.260.920,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG BALAI
	X	NON URUSAN						8.736.000,00							9.322.500,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						8.736.000,00							9.322.500,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	8.736.000,00						-	9.322.500,00	
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	8.736.000,00			-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	9.322.500,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG BALAI
	X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.736.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		9.322.500,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG BALAI
		UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DOLOK SANGGUL						211.749.868.697,00							18.700.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						211.749.868.697,00							18.700.000.000,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						211.749.868.697,00							18.700.000.000,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	691.166.230,00						-	0,00	
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	153.720.000,00			-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DOLOK SANGGUL
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	153.720.000,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DOLOK SANGGUL
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	221.175.230,00			-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DOLOK SANGGUL
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.857.600,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DOLOK SANGGUL
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	35.289.630,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DOLOK SANGGUL
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	22.400.000,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DOLOK SANGGUL
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	1.278.000,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DOLOK SANGGUL
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	151.350.000,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DOLOK SANGGUL
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	43.716.000,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DOLOK SANGGUL
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	43.716.000,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DOLOK SANGGUL
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	272.555.000,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DOLOK SANGGUL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	73.640.000,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DOLOK SANGGUL
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	198.915.000,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DOLOK SANGGUL
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	-			-	332.262.467,00						-	0,00	
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.073.870,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DOLOK SANGGUL
	1.03.02.1.01.0009	Pembangunan Tanggul Sungai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				1 KM	2.073.870,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DOLOK SANGGUL
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	330.188.597,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DOLOK SANGGUL
	1.03.02.1.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				1 KM	1.530.837,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DOLOK SANGGUL
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				10 KM	328.657.760,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DOLOK SANGGUL
3.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	-			-	210.726.440.000,00						-	18.700.000.000,00	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	-	-			-	210.726.440.000,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	18.700.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DOLOK SANGGUL
	1.03.10.1.01.0045	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin				48 KM	1.489.000.000,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		7.700.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DOLOK SANGGUL
	1.03.10.1.01.0054	Pembangunan Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Panjang jembatan yang dibangun</i>				10 Meter	4.290.000.000,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		11.000.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DOLOK SANGGUL
	1.03.10.1.01.0057	Pemeliharaan Rutin Jembatan														
			<i>Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin</i>				185 Meter	790.000.000,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DOLOK SANGGUL
	1.03.10.1.01.0058	Pembangunan Jalan														
			<i>Panjang Jalan yang Dibangun</i>				1 KM	204.000.000.000,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DOLOK SANGGUL
	1.03.10.1.01.0059	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				20 KM	157.440.000,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DOLOK SANGGUL
		UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PADANG SIDEMPUAN						171.768.056.215,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						171.768.056.215,00							0,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						171.768.056.215,00							0,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	834.817.825,00						-	0,00	
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	152.280.000,00			-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PADANG SIDEMPUAN
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	152.280.000,00	Kota Padangside mpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PADANG SIDEMPUAN
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	323.455.325,00			-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PADANG SIDEMPUAN
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	18.906.740,00	Kota Padangside mpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PADANG SIDEMPUAN
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	39.398.785,00	Kota Padangside mpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PADANG SIDEMPUAN
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	32.389.800,00	Kota Padangside mpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PADANG SIDEMPUAN
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.260.000,00	Kota Padangside mpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PADANG SIDEMPUAN
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	231.500.000,00	Kota Padangside mpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukturu r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PADANG SIDEMPUAN
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	92.237.500,00			-	Infrastrukturu r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PADANG SIDEMPUAN
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	92.237.500,00	Kota Padangside mpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukturu r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PADANG SIDEMPUAN
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	0,00	Kota Padangside mpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PADANG SIDEMPUAN
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	266.845.000,00			-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PADANG SIDEMPUAN
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	51.880.000,00	Kota Padangside mpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PADANG SIDEMPUAN
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	16.050.000,00	Kota Padangside mpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PADANG SIDEMPUAN
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	198.915.000,00	Kota Padangside mpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PADANG SIDEMPUAN
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	-			-	758.014.550,00						-	0,00	
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	635.000,00			-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PADANG SIDEMPUAN
	1.03.02.1.01.0009	Pembangunan Tanggul Sungai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				1 KM	635.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PADANG SIDEMPUAN
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	757.379.550,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PADANG SIDEMPUAN
	1.03.02.1.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				1 KM	646.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padangsidempuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PADANG SIDEMPUAN
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				20 KM	756.733.550,00	Kota Padangside mpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PADANG SIDEMPUAN
3.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	-			-	170.175.223.840,00						-	0,00	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	-	-			-	170.175.223.840,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PADANG SIDEMPUAN
	1.03.10.1.01.0045	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin				36 KM	4.793.500.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padangside mpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PADANG SIDEMPUAN
	1.03.10.1.01.0054	Pembangunan Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang jembatan yang dibangun				10 Meter	300.000.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padangside mpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PADANG SIDEMPUAN
	1.03.10.1.01.0057	Pemeliharaan Rutin Jembatan														
			Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				172 Meter	590.000.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padangside mpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PADANG SIDEMPUAN
	1.03.10.1.01.0058	Pembangunan Jalan														
			Panjang Jalan yang Dibangun				1 KM	164.400.000.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padangside mpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PADANG SIDEMPUAN
	1.03.10.1.01.0059	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				20 KM	91.723.840,00	Kota Padangside mpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PADANG SIDEMPUAN
		UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTANOPAN						31.272.074.908,00							92.752.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						31.272.074.908,00							92.752.000.000,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						31.272.074.908,00							92.752.000.000,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	926.331.960,00						-	0,00	
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	138.480.000,00			-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTANOPAN
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	138.480.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTANOPAN
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	378.541.960,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTANOPAN
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.241.275,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTANOPAN
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	42.820.685,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTANOPAN
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	12.210.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTANOPAN
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	2.340.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTANOPAN
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	316.930.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTANOPAN
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	128.000.000,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTANOPAN
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	128.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTANOPAN
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	281.310.000,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTANOPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	81.310.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTANOPAN
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTANOPAN
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	-			-	7.342.168.388,00						-	43.670.000.000,00	
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	3.000.239.830,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTANOPAN
	1.03.02.1.01.0009	Pembangunan Tanggul Sungai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				0,2 KM	3.000.239.830,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTANOPAN
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	4.341.928.558,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	43.670.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTANOPAN
	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				9 KM	4.073.459.578,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		43.670.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTANOPAN
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang jembatan yang dibangun				22 Meter	7.700.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		8.470.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTANOPAN
	1.03.10.1.01.0057	Pemeliharaan Rutin Jembatan														
			Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				400 Meter	1.100.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTANOPAN
	1.03.10.1.01.0058	Pembangunan Jalan														
			Panjang Jalan yang Dibangun				9 KM	7.200.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		40.612.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTANOPAN
	1.03.10.1.01.0059	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				20 KM	286.074.560,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTANOPAN
		UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIDIKALANG						167.246.975.809,00							97.099.447.803,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						167.246.975.809,00							97.099.447.803,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						167.246.975.809,00							97.099.447.803,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	816.866.030,00						-	908.661.727,00	
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	119.400.000,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	131.340.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIDIKALANG
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	119.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		131.340.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIDIKALANG
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	300.129.030,00			-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	340.251.027,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIDIKALANG
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	13.613.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		15.134.102,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIDIKALANG
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	68.180.130,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		77.765.425,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIDIKALANG
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4.462.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		4.908.750,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIDIKALANG
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	6.022.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		6.624.750,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIDIKALANG
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	207.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		235.818.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIDIKALANG
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	84.402.000,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	92.842.200,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIDIKALANG
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	84.402.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		92.842.200,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIDIKALANG
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	312.935.000,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	344.228.500,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIDIKALANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				12 Unit	93.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		103.092.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIDIKALANG
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				12 Unit	20.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		22.330.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIDIKALANG
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				12 Unit	198.915.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		218.806.500,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIDIKALANG
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	-			-	8.198.013.459,00						-	4.509.279.060,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	4.001.159.859,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIKALANG
	1.03.02.1.01.0009	Pembangunan Tanggul Sungai														
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				0,2 KM	4.001.159.859,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIKALANG
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	4.196.853.600,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	4.509.279.060,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIKALANG
	1.03.02.1.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				0,3 KM	3.500.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		3.850.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIKALANG
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 KM	696.853.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		659.279.060,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIKALANG
3.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	-			-	158.232.096.320,00						-	91.681.507.016,00	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	-	-			-	158.232.096.320,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	91.681.507.016,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIKALANG
	1.03.10.1.01.0045	Pemeliharaan Rutin Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin				107,77 KM	4.850.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		5.652.350.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIDIKALANG
	1.03.10.1.01.0054	Pembangunan Jembatan														
			Panjang jembatan yang dibangun				50 Meter	20.004.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		16.500.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIDIKALANG
	1.03.10.1.01.0057	Pemeliharaan Rutin Jembatan														
			Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				520 Meter	445.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		572.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIDIKALANG
	1.03.10.1.01.0058	Pembangunan Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Dibangun				3,8 KM	132.750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		68.640.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIDIKALANG
	1.03.10.1.01.0059	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi														
			Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				12 KM	183.096.320,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		317.157.016,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIDIKALANG
		UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABANJAHE						26.768.841.148,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						26.768.841.148,00							0,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						26.768.841.148,00							0,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	956.462.439,00						-	0,00	
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	134.880.000,00			-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABANJAHE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	134.880.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukturu dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABANJAHE
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	261.626.954,00			-	Infrastrukturu dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABANJAHE
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.005.435,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukturu dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABANJAHE
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	44.523.519,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABANJAHE
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	15.478.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABANJAHE
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	6.570.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABANJAHE
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	186.050.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABANJAHE
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	226.776.045,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABANJAHE
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	78.200.785,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABANJAHE
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	148.575.260,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukturu dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABANJAHE
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	333.179.440,00			-	Infrastrukturu dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABANJAHE
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	70.644.440,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukturu dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABANJAHE
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	63.620.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABANJAHE
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	198.915.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABANJAHE
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	-			-	13.192.386.684,00						-	0,00	
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	5.000.000.000,00			-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABANJAHE
	1.03.02.1.01.0009	Pembangunan Tanggul Sungai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				1 KM	5.000.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABANJAHE
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	8.192.386.684,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABANJAHE
	1.03.02.1.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				1 KM	7.500.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABANJAHE
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				20 KM	692.386.684,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABANJAHE
3.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	-			-	12.619.992.025,00						-	0,00	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	-	-			-	12.619.992.025,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABANJAHE
	1.03.10.1.01.0045	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin				24,5 KM	3.485.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABANJAHE
	1.03.10.1.01.0057	Pemeliharaan Rutin Jembatan														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	1.373.329.484,00						-	0,00	
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	149.520.000,00			-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RANTAU PRAPAT
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	149.520.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RANTAU PRAPAT
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	858.048.528,00			-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RANTAU PRAPAT
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	13.992.775,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RANTAU PRAPAT
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	679.270.239,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RANTAU PRAPAT
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	21.104.850,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RANTAU PRAPAT
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.008.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RANTAU PRAPAT
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	142.672.664,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RANTAU PRAPAT
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	277.980.956,00			-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RANTAU PRAPAT
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	75.001.596,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukturu dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RANTAU PRAPAT
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	202.979.360,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RANTAU PRAPAT
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	87.780.000,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RANTAU PRAPAT
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	70.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RANTAU PRAPAT
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	17.780.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RANTAU PRAPAT
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	-			-	24.650.546.686,00						-	2.860.000.000,00	
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	22.023.466.976,00			-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RANTAU PRAPAT
	1.03.02.1.01.0073	Rehabilitasi Tanggul Sungai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi				1 KM	14.999.581.300,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RANTAU PRAPAT
	1.03.02.1.01.0079	Normalisasi/Restorasi Sungai														
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				1 KM	7.023.885.676,00	Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RANTAU PRAPAT
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.627.079.710,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	2.860.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RANTAU PRAPAT
	1.03.02.1.02.0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi				2 KM	2.089.842.525,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		2.860.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RANTAU PRAPAT
	1.03.02.1.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa														
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara				10 KM	537.237.185,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RANTAU PRAPAT
3.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	-			-	92.212.818.960,00						-	76.860.000.000,00	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	-	-			-	92.212.818.960,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	76.860.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RANTAU PRAPAT
	1.03.10.1.01.0045	Pemeliharaan Rutin Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin</i>				30 KM	6.800.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RANTAU PRAPAT
	1.03.10.1.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan														
			<i>Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Berkala</i>				44,9 KM	17.625.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		51.560.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RANTAU PRAPAT
	1.03.10.1.01.0057	Pemeliharaan Rutin Jembatan														
			<i>Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin</i>				140 Meter	400.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RANTAU PRAPAT
	1.03.10.1.01.0058	Pembangunan Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Dibangun				3,6 KM	67.230.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		25.300.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RANTAU PRAPAT
	1.03.10.1.01.0059	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi														
			Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				20 KM	157.818.960,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RANTAU PRAPAT
		UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIBOLGA						10.421.727.000,00							11.000.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						10.421.727.000,00							11.000.000.000,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						10.421.727.000,00							11.000.000.000,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	1.016.827.186,00						-	0,00	
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	134.880.000,00			-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIBOLGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	134.880.000,00	Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIBOLGA
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	366.857.626,00			-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIBOLGA
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.675.000,00	Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIBOLGA
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	36.714.626,00	Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIBOLGA
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	21.718.000,00	Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIBOLGA
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	299.750.000,00	Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIBOLGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	259.534.560,00			-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIBOLGA
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	108.460.000,00	Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIBOLGA
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	151.074.560,00	Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIBOLGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	255.555.000,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIBOLGA
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	36.820.000,00	Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIBOLGA
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	19.820.000,00	Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIBOLGA
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	198.915.000,00	Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIBOLGA
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	-			-	581.293.494,00						-	0,00	
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.420.911,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIBOLGA
	1.03.02.1.01.0009	Pembangunan Tanggul Sungai														
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				0,2 KM	2.420.911,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIBOLGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	578.872.583,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIBOLGA
	1.03.02.1.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				1 KM	1.389.925,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIBOLGA
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				20 KM	577.482.658,00	Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIBOLGA
3.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	-			-	8.823.606.320,00						-	11.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	-	-			-	8.823.606.320,00			-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	11.000.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIBOLGA
	1.03.10.1.01.0045	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			<i>Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin</i>				40 KM	2.683.000.000,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIBOLGA
	1.03.10.1.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan														
			<i>Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Berkala</i>				2 KM	5.500.000.000,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		11.000.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIBOLGA
	1.03.10.1.01.0057	Pemeliharaan Rutin Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				300 Meter	586.000.000,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIBOLGA
	1.03.10.1.01.0058	Pembangunan Jalan														
			Panjang Jalan yang Dibangun				1 KM	2.000.000,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIBOLGA
	1.03.10.1.01.0059	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi														
			Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				20 KM	52.606.320,00	Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIBOLGA
		UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNG TUA						110.466.608.643,00							138.568.467.280,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						110.319.011.927,00							138.419.585.891,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						110.319.011.927,00							138.419.585.891,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	873.586.600,00						-	900.454.500,00	
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	162.120.000,00			-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	156.420.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNG TUA
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	162.120.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		156.420.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNG TUA
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	305.303.600,00			-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	300.158.650,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNG TUA
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4.333.600,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		5.598.450,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNG TUA
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	26.900.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		27.665.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNG TUA
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	1.150.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		1.485.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNG TUA
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				4 Laporan	272.920.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		265.410.200,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNG TUA
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	59.968.000,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	62.423.350,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNG TUA
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				4 Laporan	59.968.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		62.423.350,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNG TUA
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	346.195.000,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	381.452.500,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNG TUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	147.280.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		162.646.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNG TUA
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	198.915.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		218.806.500,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNG TUA
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	-			-	4.009.505.007,00						-	21.632.449.375,00	
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.337.123.000,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	16.500.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNG TUA
	1.03.02.1.01.0009	Pembangunan Tanggul Sungai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				1 KM	2.280.120.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		11.000.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNG TUA
	1.03.02.1.01.0079	Normalisasi/Restorasi Sungai														
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				1 KM	57.003.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		5.500.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNG TUA
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.672.382.007,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	5.132.449.375,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNG TUA
	1.03.02.1.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan</i>				1 KM	2.097.559,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNG TUA
	1.03.02.1.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi														
			<i>Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi</i>				1 Bendung	2.097.559,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNG TUA
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>				3 KM	1.668.186.889,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		5.132.449.375,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNG TUA
3.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	-			-	105.435.920.320,00						-	115.886.682.016,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	-	-			-	105.435.920.320,00			-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	115.886.682.016,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNG TUA
	1.03.10.1.01.0045	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			<i>Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin</i>				206,12 KM	10.306.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		11.306.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNG TUA
	1.03.10.1.01.0057	Pemeliharaan Rutin Jembatan														
			<i>Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin</i>				2000 Meter	2.000.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		2.200.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNG TUA
	1.03.10.1.01.0058	Pembangunan Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Dibangun				30 KM	93.000.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		102.000.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNG TUA
	1.03.10.1.01.0059	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi														
			Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				93 KM	129.920.320,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		380.682.016,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNG TUA
	X	NON URUSAN						147.596.716,00							148.881.389,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						147.596.716,00							148.881.389,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	147.596.716,00						-	148.881.389,00	
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	147.596.716,00			-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	148.881.389,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNG TUA
	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	147.596.716,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		148.881.389,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNG TUA
		UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TARUTUNG						107.036.952.941,00							149.273.515.016,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						107.036.952.941,00							149.273.515.016,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						107.036.952.941,00							149.273.515.016,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	1.101.669.239,00						-	946.160.100,00	
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	184.680.000,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	179.124.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TARUTUNG
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	184.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		179.124.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TARUTUNG
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	3.720.000,00			-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	4.092.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TARUTUNG
	1.03.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				12 Orang	3.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		4.092.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TARUTUNG
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	497.203.066,00			-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	305.267.292,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TARUTUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	11.384.290,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		12.522.719,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TARUTUNG
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	42.244.476,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		45.369.643,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TARUTUNG
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	28.225.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		29.982.700,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TARUTUNG
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	415.349.300,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		217.392.230,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TARUTUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	131.261.173,00			-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	144.391.308,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TARUTUNG
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	121.268.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		133.394.800,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TARUTUNG
	1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	9.993.173,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		10.996.508,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TARUTUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	284.805.000,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	313.285.500,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TARUTUNG
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	73.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		81.004.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TARUTUNG
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		13.475.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TARUTUNG
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	198.915.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		218.806.500,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TARUTUNG
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	-			-	26.499.953.542,00						-	44.305.601.740,00	
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.639.000,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	7.481.636.285,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TARUTUNG
	1.03.02.1.01.0009	Pembangunan Tanggul Sungai														
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				1 KM	1.639.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		7.481.636.285,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TARUTUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	26.498.314.542,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	36.823.965.455,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TARUTUNG
	1.03.02.1.02.0003	Pembangunan Bendung Irigasi														
			<i>Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun</i>				1 Bendung	25.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		27.500.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TARUTUNG
	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi</i>				2,5 KM	1.617.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		5.500.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TARUTUNG
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Panjang jembatan yang dibangun</i>				20 Meter	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		1.100.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TARUTUNG
	1.03.10.1.01.0057	Pemeliharaan Rutin Jembatan														
			<i>Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin</i>				1090 Meter	1.090.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		1.199.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TARUTUNG
	1.03.10.1.01.0058	Pembangunan Jalan														
			<i>Panjang Jalan yang Dibangun</i>				13,70 KM	67.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		90.420.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TARUTUNG
	1.03.10.1.01.0059	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				12 KM	144.330.160,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		301.653.176,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TARUTUNG
		UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNGSITOLI						341.911.388.648,00							1.100.000.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						341.911.388.648,00							1.100.000.000.000,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						341.911.388.648,00							1.100.000.000.000,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	1.011.655.850,00						-	0,00	
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	154.920.000,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNGSITOLI
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	154.920.000,00	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNGSITOLI
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	357.892.810,00			-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNGSITOLI
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.985.960,00	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNGSITOLI
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	50.307.850,00	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNGSITOLI
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	26.718.000,00	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNGSITOLI
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	2.547.000,00	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNGSITOLI
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	262.334.000,00	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNGSITOLI
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	240.068.040,00			-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNGSITOLI
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	141.599.800,00	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNGSITOLI
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	98.468.240,00	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNGSITOLI
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	258.775.000,00			-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNGSITOLI
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	59.860.000,00	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNGSITOLI
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	198.915.000,00	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNGSITOLI
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	-			-	442.383.678,00						-	0,00	
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.231.993,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNGSITOLI
	1.03.02.1.01.0009	Pembangunan Tanggul Sungai														
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				1 KM	1.231.993,00	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNGSITOLI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	441.151.685,00			-	Infrastrukturu dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNGSITOLI
	1.03.02.1.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				1 KM	1.389.925,00	Kab. Nias, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukturu dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNGSITOLI
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				20 KM	439.761.760,00	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukturu dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNGSITOLI
3.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	-			-	340.457.349.120,00						-	1.100.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	-	-			-	340.457.349.120,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	1.100.000.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNGSITOLI
	1.03.10.1.01.0045	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin				40 KM	5.452.000.000,00	Kab. Nias, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nias Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nias Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNGSITOLI
	1.03.10.1.01.0054	Pembangunan Jembatan														
			Panjang jembatan yang dibangun				1 Meter	2.000.000,00	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNGSITOLI
	1.03.10.1.01.0057	Pemeliharaan Rutin Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin</i>				140 Meter	1.656.500.000,00	Kab. Nias, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nias Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nias Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukturu dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNGSITOLI
	1.03.10.1.01.0058	Pembangunan Jalan														
			<i>Panjang Jalan yang Dibangun</i>				133 KM	333.000.000.000,00	Kab. Nias, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nias Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nias Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukturu dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		1.100.000.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNGSITOLI
	1.03.10.1.01.0059	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi														
			<i>Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya</i>				20 KM	346.849.120,00	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastrukturu dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNGSITOLI
	J U M L A H							2.131.898.350.505,00							3.167.807.534.673,00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
DINAS	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL							33.724.422.685,00							30.143.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						33.724.422.685,00							30.143.000.000,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL														
1.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	-			-	39.552.000,00						-	0,00	
	2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	-	-			-	99.825.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan				1 Dokumen	49.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.1.01.0002	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi														
			Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi				1 Dokumen	49.875.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	-	-			-	100.185.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	50.060.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02.0003	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait Pendaftaran Penduduk				1 Dokumen	50.125.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	-			-	43.102.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-			-	50.110.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.1.01.0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota</i>				1 Laporan	50.110.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	-	-			-	54.880.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil</i>				1 Laporan	54.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
3.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	-			-	57.041.500,00						-	0,00	
	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	-	-			-	60.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan</i>				1 Dokumen	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	-	-			-	160.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.04.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>				1 Laporan	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.04.1.03.0002	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				1 Orang	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
4.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-	-			-	12.118.000,00						-	0,00	
	2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.05.1.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi														
			Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia				2 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.05.1.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain														
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA														
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	21.990.097.878,00						-	23.323.000.000,00	
	2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	722.815.000,00			-	-	-	-	810.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	438.875.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		460.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	283.940.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	14.392.180.120,00			-	-	-	-	14.435.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				130 Orang/ Bulan	14.338.168.120,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		14.350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				6 Laporan	54.012.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		85.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	80.700.000,00			-	-	-	-	85.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	80.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		85.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	800.061.000,00			-	-	-	-	810.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				130 Orang	800.061.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		810.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.369.451.847,00			-	-	-	-	1.435.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	352.395.597,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		380.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	90.930.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		95.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	197.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	200.366.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		260.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	528.260.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	4.665.521.980,00			-	-	-	-	4.823.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		205.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	812.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		948.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	312.860.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		320.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	3.340.501.980,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.221.392.000,00			-	-	-	-	925.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				34 Unit	1.032.592.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		715.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	188.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		210.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	-	-			-	121.260.000,00						-	400.000.000,00	
	2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	-	-			-	121.260.000,00			-	-	-	-	400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.02.1.01.0003	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa				1 Dokumen	121.260.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
3.	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	-	-			-	0,00						-	300.000.000,00	
	2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	-	-			-	202.999.800,00			-	-	-	-	300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.03.1.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan														
			jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen	202.999.800,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
4.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	1.248.367.000,00						-	650.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	-	-			-	1.248.367.000,00			-	-	-	-	650.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	460.057.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0009	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa														
			jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina				200 Orang	121.260.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0015	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				1 Dokumen	284.593.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa				1 Dokumen	37.422.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
5.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	-	-			-	10.334.144.307,00						-	5.870.000.000,00	
	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	3.007.364.158,00			-	-	-	-	5.870.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2.13.05.1.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat															
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				1 Dokumen	162.648.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
	2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat															
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya				100 Lembaga	169.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
	2.13.05.1.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat															
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				10 Unit	185.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		270.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
	2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna															
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	55.548.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
	2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga															
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Laporan	2.434.168.158,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
	J U M L A H							33.724.422.685,00							30.143.000.000,00		

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA						19.002.403.152,00							21.859.522.653,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						19.002.403.152,00							21.859.522.653,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						18.122.110.691,00							20.998.633.808,00	
1.	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	15.318.043.871,00						-	19.523.942.618,00	
	2.08.01.1.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	3.700.000,00			-	Pemberday aan Perem puan, Pemuda, dan Penya ndang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-	-	53.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	3.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemberday aan Perem puan, Pemuda, dan Penya ndang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-		53.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	11.590.017.409,00			-	Pemberday aan Perem puan, Pemuda, dan Penya ndang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-	-	14.315.812.270,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 bulan Orang/ Bulan	11.366.697.409,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-		14.065.221.270,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	223.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-		250.591.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	8.250.000,00			-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-	-	210.936.448,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-		80.665.448,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				24 Orang	8.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-		130.271.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.142.093.742,00			-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-	-	1.189.029.900,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	15.357.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-		21.725.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	570.389.208,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-		253.652.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	142.744.344,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-		501.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	22.550.890,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-		35.052.900,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	6.244.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-		6.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	384.808.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-		370.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.981.183.570,00			-	Pemberday aan Perem puan, Pemuda, dan Penya ndang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-	-	2.377.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				2 Laporan	5.485.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemberday aan Perem puan, Pemuda, dan Penya ndang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-		7.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	530.530.436,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemberday aan Perem puan, Pemuda, dan Penya ndang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-		520.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				13 Laporan	1.445.168.134,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemberday aan Perem puan, Pemuda, dan Penya ndang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-		1.850.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	592.799.150,00			-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-	-	1.377.664.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				32 Unit	362.489.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-		501.664.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	199.330.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-		525.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	30.980.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-		351.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-	-			-	558.383.286,00						-	308.283.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.02.1.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	-	-			-	72.446.000,00			-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-	-	127.991.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.01.0009	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi														
			jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi				20 laporan	23.032.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-		43.870.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.01.0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi														
			jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan				25 Lembaga	49.414.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-		84.121.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi	-	-			-	35.428.000,00			-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-	-	101.661.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.02.0009	peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan				30 Orang	35.428.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-		101.661.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	-	-			-	450.509.286,00			-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-	-	78.630.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.03.0008	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi														
			jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek				60 Orang	450.509.286,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-		78.630.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-	-			-	304.448.429,00						-	245.000.000,00	
	2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	50.845.000,00			-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-	-	55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota				5 Kegiatan	50.845.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-		55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	163.133.415,00			-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-	-	165.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.02.0009	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				90 Orang	163.133.415,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-		165.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	-	-			-	90.470.014,00			-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-	-	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek				23 Orang	20.472.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-		25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.03.0006	penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan				0 Dokumen	69.997.514,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	-	-			-	1.042.128.000,00						-	88.119.290,00	
	2.08.04.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	-	-			-	1.042.128.000,00			-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-	-	88.119.290,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.1.02.0006	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan provinsi				7 Lembaga	1.042.128.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-		88.119.290,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
5.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	-	-			-	34.808.000,00						-	38.288.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	34.808.000,00			-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-	-	38.288.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.05.1.01.0005	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi														
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia				1 Dokumen	34.808.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-		38.288.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
6.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	-	-			-	433.039.400,00						-	510.000.000,00	
	2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	-	-			-	42.039.800,00			-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-	-	120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.1.01.0008	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi														
			jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi				2 Laporan	42.039.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-		120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	-	-			-	390.999.600,00			-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-	-	390.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.1.02.0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak														
			Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak				1 Kegiatan	26.233.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-		215.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.1.02.0007	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi														
			jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi				2 Dokumen Dokumen	275.115.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi														
			jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang mendapatkan bimtek				60 Orang	89.650.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-		65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
7.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	-			-	431.259.705,00						-	285.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	50.625.400,00			-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-	-	55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi														
			Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota				20 Lembaga	50.625.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-		55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	40.726.074,00			-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-	-	45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.02.0014	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				131 Orang	40.726.074,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-		45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	339.908.231,00			-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-	-	185.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.03.0009	penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus				0 Dokumen	291.363.231,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-		135.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.03.0011	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi														
			jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus				25 Orang	48.545.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						880.292.461,00							860.888.845,00	
1.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-	-			-	379.401.000,00						-	670.888.845,00	
	2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-	-			-	314.401.000,00			-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-	-	529.994.245,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.1.01.0007	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat				5 Dokumen	123.341.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-		235.748.150,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.1.01.0022	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi														
			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi				2 Dokumen	135.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-		158.496.910,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.1.01.0024	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain														
			Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain				3 Daerah	56.060.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-		135.749.185,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.1.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	-	-			-	65.000.000,00			-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-	-	140.894.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.1.02.0010	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Profil program Bangga Kencana tingkat provinsi, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				1 Dokumen	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemberday aan Perem puan, Pemuda, dan Penya ndang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-		140.894.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	-	-			-	218.859.888,00						-	50.000.000,00	
	2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-			-	218.859.888,00			-	Pemberday aan Perem puan, Pemuda, dan Penya ndang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-	-	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.1.01.0007	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemberday aan Perem puan, Pemuda, dan Penya ndang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.1.01.0009	Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan														
			Jumlah Promosi Kehamilan yang tidak diinginkan				2 Daerah	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.1.01.0010	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				7 Daerah	199.999.992,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.1.01.0011	Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal														
			Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.1.01.0012	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja														
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja				0 Daerah	18.859.896,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-	-			-	282.031.573,00						-	140.000.000,00	
	2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-			-	164.521.750,00			-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.01.0019	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kelompok Genre yang mendapat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana				2 Kelompok	84.999.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.01.0020	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja														
			Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja				0 Daerah	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.01.0022	Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota				1 Daerah	46.626.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.01.0028	Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)														
			Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)				3 Laporan	32.895.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						558.057.121,00							710.000.000,00	
1.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-	-			-	445.643.353,00						-	580.000.000,00	
	2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	445.643.353,00			-	Pemberday aan Perem puan, Pemuda, dan Penya ndang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-	-	580.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.03.1.02.0005	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				70 orang	117.607.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Pemberday aan Perem puan, Pemuda, dan Penya ndang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-		130.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.03.1.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				100 Orang	328.035.553,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemberday aan Perem puan, Pemuda, dan Penya ndang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-		450.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
2.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	-			-	112.413.768,00						-	130.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	112.413.768,00			-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-	-	130.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	
	2.08.07.1.02.0008	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota															
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				150 Orang	112.413.768,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-		130.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	
	J U M L A H							19.560.460.273,00							22.569.522.653,00		

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026																
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU						29.445.732.893,00							26.069.717.266,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						29.445.732.893,00							26.069.717.266,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						29.445.732.893,00							26.069.717.266,00	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-			100 %	18.725.447.523,20						-	19.325.111.266,00	
	2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pada DPMPTSP	-			100 PERSEN	85.032.000,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur DPMPTSP	-	75.380.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	47.110.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur DPMPTSP		35.380.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	37.922.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur DPMPTSP		40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi	-			100 %	14.776.097.848,20			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur DPMPTSP	-	14.793.131.266,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				81 Orang/ Bulan	14.608.531.266,00	Kota Medan, Medan Baru, Merdeka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur DPMPTSP		14.608.491.266,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	149.642.782,20	Kota Medan, Medan Baru, Merdeka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	Aparatur DPMPTSP		149.640.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	17.923.800,00	Kota Medan, Medan Baru, Merdeka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	Aparatur DPMPTSP		35.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>tertata administrasi BMD pada DMPTSP Provsu</i>	-			100 %	0,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	BMD pada Dinas PMPTSP SU	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				0 Laporan	0,00	Kota Medan, Medan Baru, Merdeka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	BMD pada Dinas PMPTSP SU		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase pemenuhan layanan administrasi</i>	-			100 %	11.424.000,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	Aparatur DPMPTSP	-	15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0,00	Kota Medan, Medan Baru, Merdeka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	Aparatur DPMPTSP		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	11.424.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	Aparatur DPMPTSP		15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi	-			100 %	743.775.337,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	Aparatur DPMPTSP	-	1.206.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	99.999.900,00	Kota Medan, Medan Baru, Merdeka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb an infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	Aparatur DPMPSTP		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	174.969.414,00	Kota Medan, Medan Baru, Merdeka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb an infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	Aparatur DPMPSTP		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	62.698.448,00	Kota Medan, Medan Baru, Merdeka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur DPMPTSP		126.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	70.005.175,00	Kota Medan, Medan Baru, Merdeka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur DPMPTSP		80.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	336.102.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	Aparatur DPMPTSP		700.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi	-			100 %	6.459.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	Aparatur DPMPSTP	-	5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	6.459.000,00	Kota Medan, Medan Baru, Merdeka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	Aparatur DPMPTSP		5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi	-			100 %	2.813.119.338,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	Aparatur DPMPTSP	-	2.880.600.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	Aparatur DPMPTSP		600.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	978.487.498,00	Kota Medan, Medan Baru, Merdeka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	Aparatur DPMPTSP		980.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.834.131.840,00	Kota Medan, Medan Baru, Merdeka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	Aparatur DPMPPTSP		1.900.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi	-			100 %	289.540.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	BMD pada Dinas PMPTSP SU	-	350.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				25 Unit	189.540.000,00	Kota Medan, Medan Baru, Merdeka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	BMD pada Dinas PMPTSP SU		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	BMD pada Dinas PMPTSP SU		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	100.000.000,00	Kota Medan, Medan Baru, Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	BMD pada Dinas PMPTSP SU		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peningkatan Jumlah Investor fsf	-			4 Dokumen 7 1	4.071.210.084,00						-	4.994.606.000,00	
	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Daerah yang telah Dilaksanakan Pemutakhiran Data Potensi Investasi Jumlah Dokumen Potensi dan Peluang Investasi Jumlah Kesepakatan Kemitraan Antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan Usaha Kecil / Usaha Menengah	-			6 Kabupaten/ Kota 1 Dokumen 1 Dokumen	4.071.210.084,00			-	-	-	-	4.994.606.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi														
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi				1 Dokumen	301.877.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)														
			Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi				6 Daerah	597.806.084,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		600.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.02.0004	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah</i>				1 Dokumen	142.184.000,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi</i>				1 Dokumen	3.029.343.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.094.606.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	<i>Peningkatan Nilai Investasi</i>	-			58.8 Dokumen dan kegiatan	2.990.978.000,00						-	400.000.000,00	
	2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	<i>Persentase promosi yang dilaksanakan</i>	-			100 %	2.990.978.000,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	Masyarakat Pelaku Usaha	-	400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi</i>				1 Dokumen	2.500.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	Masyarakat Pelaku Usaha		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.03.1.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi</i>				1 Dokumen	490.578.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	Masyarakat Pelaku Usaha		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	<i>Penyelesaian Dokumen Perizinan</i>	-			1836 dokumen dan org	2.809.293.000,00						-	950.000.000,00	
	2.18.04.1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>	-			1836 Pelaku Usaha	2.374.120.000,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Pelaku Usaha dan Masyarakat	-	450.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>				850 Pelaku Usaha	2.041.412.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Pelaku Usaha dan Masyarakat		400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.01.0008	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				10 Pelaku Usaha	332.708.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Pelaku Usaha dan Masyarakat		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-	-			-	435.173.000,00			-	-	-	-	500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				125 Kegiatan usaha	417.580.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya														
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				100 Kegiatan usaha	192.447.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				50 Pelaku Usaha	189.140.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
6.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	-	-			-	49.637.285,80						-	100.000.000,00	
	2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Data dan Informasi Perizinan Berusaha	-			1 Dokumen	49.637.285,80			-	-	-	-	100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	49.637.285,80	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	J U M L A H							29.445.732.893,00							26.069.717.266,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENDIDIKAN						3.617.797.884.320,89							3.420.371.220.272,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.588.229.293.328,89							3.392.654.015.902,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						3.588.229.293.328,89							3.392.654.015.902,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	2.063.540.556.292,00						-	2.065.016.221.640,00	
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	7.117.480.292,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	7.833.145.640,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	3.878.107.802,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		7.700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	229.484.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	229.484.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	229.484.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	229.484.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berkas P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	229.484.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berkas P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	2.091.952.490,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berkas P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.056.423.076.000,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	2.057.183.076.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/ Bulan	2.056.423.076.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA BELANJA LAINNYA, DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, DAK NON FISIK-TUN JANGAN GURU ASN DAERAH-T UNJANGAN PROFESI GURU, DAK NON FISIK-TUN JANGAN GURU ASN DAERAH-T AMBAHAN PENGHASILAN GURU, DAK NON FISIK-TUN JANGAN GURU ASN DAERAH-T UNJANGAN KHUSUS GURU	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		2.056.423.076.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berkas P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berkas P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berkas P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase kualitas dan mutu pendidikan sekolah menengah, kejuruan dan khusus	-			80 %	1.369.883.909.134,89						-	1.175.802.225.128,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-			1 Dokumen	738.880.864.261,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	604.531.913.009,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)														
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0010	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0011	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0012	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula														
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun				1 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0013	Pembangunan Asrama Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0015	Pembangunan Fasilitas Parkir														
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0016	Pembangunan Kantin Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	65.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0027	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0029	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula														
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-REGULER-SMA	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		612.390.010,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0037	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah														
			Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0038	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0040	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SMA	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		612.390.010,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	1.664.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SMA	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		1.224.780.020,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0043	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				250279 Peserta didik	47.974.208.298,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				1 Peserta Didik	999.999.963,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				1 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				1 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				1 Satuan Pendidikan	3.880.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMA	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		825.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS				1022 Satuan Pendidikan	594.683.536.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		594.683.536.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas				1 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		82.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0056	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Atas														
			Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi				1 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				1 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				1 Konten Digital	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				1 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				1 Komunitas	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0064	Penyediaan infrastruktur TIK														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				1 Paket	624.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMA	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0066	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik														
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				1 Buku	55.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMA	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0067	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Unit	24.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0069	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah														
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0070	Pembangunan Ruang Laboratorium														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				1 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0071	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium														
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				6 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.780.977,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0073	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0074	Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah														
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0076	Penataan Ruang/Sudut Baca														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata				1 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0077	Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir														
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-			-	591.932.223.794,89			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	543.935.537.357,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)														
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				0 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun				0 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0005	Pembangunan Ruang Laboratorium														
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				0 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				0 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0007	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				0 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0008	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula														
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun				0 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0009	Pembangunan Asrama Sekolah														
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0011	Pembangunan Fasilitas Parkir														
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0012	Pembangunan Kantin Sekolah														
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi				0 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium														
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi				0 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0019	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi				0 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-PE NUGASAN-SMK	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.391.657.221,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0029	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah														
			Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-PE NUGASAN-SMK	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.391.657.221,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0030	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														
			Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-PE NUGASAN-SMK	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.391.657.221,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.391.657.220,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0032	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-PE NUGASAN-SMK	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.391.657.220,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0033	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	32.983.910.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-PE NUGASAN-SMK	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		10.783.314.440,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0035	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				135734 Peserta didik	37.004.208.298,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				0 Peserta Didik	999.999.822,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				0 Satuan Pendidikan	749.999.799,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		850.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS				942 Satuan Pendidikan	498.735.980.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		498.735.980.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		85.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0048	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				0 Konten Digital	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0056	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK														
			Pendidik SMK yang mendapat sertifikat kompetensi				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				0 Komunitas	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0058	Penyediaan infrastruktur TIK														
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				0 Paket	1.011.528.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				0 Kegiatan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0060	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik														
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				0 Buku	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Unit	12.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0063	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi				0 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0065	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0066	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Serba Guna/Aula														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				0 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0067	Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah														
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0068	Penataan Ruang/Sudut Baca														
			Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata				0 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Ruang	8.446.597.875,89	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0070	Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir														
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0071	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah														
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				0 Satuan Pendidikan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0074	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0075	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				0 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0078	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan														
			Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-			-	39.070.821.079,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	27.334.774.762,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		3.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				0 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				0 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				0 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0006	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula														
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun				0 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0007	Pembangunan Asrama Sekolah														
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0009	Pembangunan Fasilitas Parkir														
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0010	Pembangunan Kantin Sekolah														
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0012	Pembangunan Ruang Laboratorium														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				0 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0013	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas														
			Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Dibangun				0 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0014	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)														
			Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun				0 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0015	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun				0 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0016	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)														
			Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun				0 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0017	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)														
			Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Dibangun				0 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0028	Rehabilitasi Ruang Laboratorium														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi				0 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0029	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus														
			Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi				0 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0030	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas														
			Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Direhabilitasi				0 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0031	Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Direhabilitasi				0 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berkbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0032	Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)														
			Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Direhabilitasi				0 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berkbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0033	Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)														
			Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Direhabilitasi				0 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berkbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0034	Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Direhabilitasi				0 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0035	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REKREASI	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		45.740.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0036	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah														
			Jumlah Alat Rumah Tangga yang Tersedia				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0037	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SLB	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		45.740.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0039	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SLB	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		45.740.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0040	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	1.129.652.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SLB	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		45.740.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus														
			Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				3275 Peserta Didik	1.007.976.667,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				0 Peserta Didik	1.007.018.828,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				0 Satuan Pendidikan	1.000.466.704,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		710.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus														
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS				60 Satuan Pendidikan	21.884.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		21.884.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		85.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0054	Pemeliharaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				0 Konten Digital	269.672.480,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				0 Dokumen	626.184.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0062	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Khusus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik Satuan Pendidikan Khusus yang mendapat sertifikat kompetensi				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0063	Penyediaan infrastruktur TIK														
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				1 Paket	145.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SLB	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0064	Penataan Ruang/Sudut Baca														
			Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata				0 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0065	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				0 Kegiatan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0067	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				0 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0068	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	12.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah				0 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				0 Satuan Pendidikan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0072	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah														
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0074	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0075	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir														
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.126,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0076	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah														
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.126,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0077	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.126,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0078	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula														
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.126,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0079	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat				1 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.126,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0080	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.126,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0082	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Khusus														
			Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		5.208.298,00	DINAS PENDIDIKAN
3.	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	-	-			-	833.462.500,00						-	1.320.000.000,00	
	1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	-	-			-	833.462.500,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	1.320.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.1.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun				1 Dokumen	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		660.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.1.01.0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah														
			Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah yang tersusun				1 Dokumen	233.462.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		660.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
4.	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-	-			-	153.971.365.402,00						-	150.515.569.134,00	
	1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	-	-			-	153.971.365.402,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	150.515.569.134,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				1 Dokumen	3.565.796.268,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				1 Laporan	150.405.569.134,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		150.405.569.134,00	DINAS PENDIDIKAN
	X	NON URUSAN						29.568.590.992,00							27.717.204.370,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						29.568.590.992,00							27.717.204.370,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	29.568.590.992,00						-	27.717.204.370,00	
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	X.XX.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	178.224.000,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	463.145.640,00	DINAS PENDIDIKAN
	X.XX.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	X.XX.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	X.XX.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	X.XX.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	X.XX.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	X.XX.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	178.224.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	X.XX.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	133.145.640,00	DINAS PENDIDIKAN
	X.XX.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	X.XX.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	X.XX.01.1.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	X.XX.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah														
			Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	X.XX.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	X.XX.01.1.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	X.XX.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	274.081.000,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	197.403.896,00	DINAS PENDIDIKAN
	X.XX.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	X.XX.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	X.XX.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	X.XX.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	X.XX.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	X.XX.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	274.081.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		165.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	X.XX.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	76.878.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		90.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	642.195.140,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	X.XX.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	656.416.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		722.058.425,00	DINAS PENDIDIKAN
	X.XX.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	50.280.280,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1.140.072.320,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		1.245.797.632,00	DINAS PENDIDIKAN
	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	718.783.504,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	942.688.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	X.XX.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	X.XX.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	2.916.602.704,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	3.254.554.255,00	DINAS PENDIDIKAN
	X.XX.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	X.XX.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	X.XX.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar														
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	X.XX.01.1.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	X.XX.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	2.916.602.704,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		3.208.262.975,00	DINAS PENDIDIKAN
	X.XX.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	X.XX.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	X.XX.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	X.XX.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	X.XX.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	15.857.270.106,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	16.034.836.174,00	DINAS PENDIDIKAN
	X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	36.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1.785.414.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		1.954.650.940,00	DINAS PENDIDIKAN
	X.XX.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	14.035.556.106,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		14.035.556.106,00	DINAS PENDIDIKAN
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	6.115.098.938,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	2.583.117.068,00	DINAS PENDIDIKAN
	X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	583.140.640,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		643.497.166,00	DINAS PENDIDIKAN
	X.XX.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	X.XX.01.1.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor														
			Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	338.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		387.459.485,00	DINAS PENDIDIKAN
	X.XX.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	X.XX.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	3.798.158.298,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		4.629.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	X.XX.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1.206.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		1.310.868.171,00	DINAS PENDIDIKAN
	X.XX.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	189.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		208.888.350,00	DINAS PENDIDIKAN
	X.XX.01.1.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	591.419.864,00						-	913.000.000,00	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	40.320.000,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN LUBUK PAKAM
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	40.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN LUBUK PAKAM
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	81.844.494,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	363.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN LUBUK PAKAM
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN LUBUK PAKAM
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	31.693.802,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN LUBUK PAKAM
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN LUBUK PAKAM
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN LUBUK PAKAM
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	11.633.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN LUBUK PAKAM
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN LUBUK PAKAM
	1.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1.140.492,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN LUBUK PAKAM
	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	17.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN LUBUK PAKAM
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	28.860.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN LUBUK PAKAM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	132.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN LUBUK PAKAM
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN LUBUK PAKAM
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN LUBUK PAKAM
	1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN LUBUK PAKAM
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	417.565.370,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	176.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN LUBUK PAKAM
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.655.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN LUBUK PAKAM
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	75.014.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN LUBUK PAKAM
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.396.530,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN LUBUK PAKAM
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	335.499.840,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN LUBUK PAKAM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	51.690.000,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	231.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN LUBUK PAKAM
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	36.820.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN LUBUK PAKAM
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN LUBUK PAKAM
	1.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN LUBUK PAKAM
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5.870.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN LUBUK PAKAM
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN LUBUK PAKAM
	1.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN LUBUK PAKAM
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-			-	21.966.263.550,00						-	1.861.000.000,00	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-			-	6.207.743.850,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	812.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN LUBUK PAKAM
	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		120.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN LUBUK PAKAM
	1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	1.041.953.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		100.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN LUBUK PAKAM
	1.01.02.1.01.0064	Penyediaan infrastruktur TIK														
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		22.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN LUBUK PAKAM
	1.01.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		120.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN LUBUK PAKAM
	1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	5.165.790.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		450.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN LUBUK PAKAM
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-			-	15.758.519.700,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	812.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN LUBUK PAKAM
	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		120.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN LUBUK PAKAM
	1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	2.083.907.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		100.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN LUBUK PAKAM
	1.01.02.1.02.0058	Penyediaan infrastruktur TIK														
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		22.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN LUBUK PAKAM
	1.01.02.1.02.0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		120.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN LUBUK PAKAM
	1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	13.674.612.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		450.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN LUBUK PAKAM
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-			-	0,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	237.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN LUBUK PAKAM
	1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN LUBUK PAKAM
	1.01.02.1.03.0035	Pengadaan Mebel Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN LUBUK PAKAM
	1.01.02.1.03.0063	Penyediaan infrastruktur TIK														
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		22.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN LUBUK PAKAM
	1.01.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN LUBUK PAKAM
	1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah				1 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN LUBUK PAKAM
		CABANG DINAS PENDIDIKAN STABAT						5.779.988.760,00							2.774.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.492.526.925,00							1.894.000.000,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						5.492.526.925,00							1.894.000.000,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	130.780.000,00						-	33.000.000,00	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	40.320.000,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN STABAT
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	40.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN STABAT
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	53.640.000,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN STABAT
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	53.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN STABAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	36.820.000,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN STABAT
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	36.820.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN STABAT
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-			-	5.361.746.925,00						-	1.861.000.000,00	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-			-	3.603.941.100,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	812.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN STABAT
	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		120.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN STABAT
	1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	297.701.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		100.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN STABAT
	1.01.02.1.01.0064	Penyediaan infrastruktur TIK														
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		22.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN STABAT
	1.01.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Unit	1.830.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		120.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN STABAT
	1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	1.475.940.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		450.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN STABAT
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-			-	0,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	812.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN STABAT
	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		120.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN STABAT
	1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		100.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN STABAT
	1.01.02.1.02.0058	Penyediaan infrastruktur TIK														
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		22.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN STABAT
	1.01.02.1.02.0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		120.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN STABAT
	1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		450.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN STABAT
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-			-	1.757.805.825,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	237.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN STABAT
	1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN STABAT
	1.01.02.1.03.0035	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	223.275.825,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN STABAT
	1.01.02.1.03.0063	Penyediaan infrastruktur TIK														
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		22.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN STABAT
	1.01.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	457.575.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN STABAT
	1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah				1 Ruang	1.076.955.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN STABAT
	X	NON URUSAN						287.461.835,00							880.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						287.461.835,00							880.000.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	287.461.835,00						-	880.000.000,00	
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	60.579.235,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	352.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN STABAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.758.814,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN STABAT
	X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	29.563.227,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN STABAT
	X.XX.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN STABAT
	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN STABAT
	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	12.081.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN STABAT
	X.XX.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN STABAT
	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	6.075.694,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN STABAT
	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN STABAT
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	132.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN STABAT
	X.XX.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN STABAT
	X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN STABAT
	X.XX.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN STABAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	216.922.600,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	176.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN STABAT
	X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN STABAT
	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	49.418.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN STABAT
	X.XX.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN STABAT
	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	166.303.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN STABAT
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	9.960.000,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	220.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN STABAT
	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	7.725.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN STABAT
	X.XX.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN STABAT
	X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2.235.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN STABAT
	X.XX.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN STABAT
	X.XX.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN STABAT
		CABANG DINAS PENDIDIKAN SEI RAMPAH						816.722.218,00							2.774.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						554.440.000,00							1.894.000.000,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						554.440.000,00							1.894.000.000,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	159.640.000,00						-	33.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	82.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SEI RAMPAH
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	36.820.000,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SEI RAMPAH
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	36.820.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SEI RAMPAH
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-			-	394.800.000,00						-	1.861.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-			-	198.105.000,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	812.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SEI RAMPAH
	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		120.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SEI RAMPAH
	1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		100.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SEI RAMPAH
	1.01.02.1.01.0064	Penyediaan infrastruktur TIK														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia</i>				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		22.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SEI RAMPAH
	1.01.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat</i>				1 Unit	198.105.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		120.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SEI RAMPAH
	1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			<i>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah</i>				1 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		450.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SEI RAMPAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-			-	196.695.000,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	812.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SEI RAMPAH
	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		120.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SEI RAMPAH
	1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		100.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SEI RAMPAH
	1.01.02.1.02.0058	Penyediaan infrastruktur TIK														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia</i>				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berdasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		22.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SEI RAMPAH
	1.01.02.1.02.0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat</i>				1 Unit	196.695.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berdasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		120.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SEI RAMPAH
	1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			<i>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah</i>				1 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berdasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		450.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SEI RAMPAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-			-	0,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	237.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SEI RAMPAH
	1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SEI RAMPAH
	1.01.02.1.03.0035	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SEI RAMPAH
	1.01.02.1.03.0063	Penyediaan infrastruktur TIK														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia</i>				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		22.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SEI RAMPAH
	1.01.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SEI RAMPAH
	1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			<i>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah</i>				1 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SEI RAMPAH
	X	NON URUSAN						262.282.218,00							880.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						262.282.218,00							880.000.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	262.282.218,00						-	880.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SEI RAMPAH
	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.634.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SEI RAMPAH
	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	12.847.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokat	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SEI RAMPAH
	X.XX.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SEI RAMPAH
	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	2.403.890,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SEI RAMPAH
	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SEI RAMPAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	132.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SEI RAMPAH
	X.XX.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SEI RAMPAH
	X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SEI RAMPAH
	X.XX.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SEI RAMPAH
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	190.249.160,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	176.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SEI RAMPAH
	X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SEI RAMPAH
	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	24.837.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SEI RAMPAH
	X.XX.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SEI RAMPAH
	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	163.411.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SEI RAMPAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	8.400.000,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	220.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SEI RAMPAH
	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	8.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SEI RAMPAH
	X.XX.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SEI RAMPAH
	X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						10.465.881.050,00							1.894.000.000,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	191.100.000,00						-	33.000.000,00	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	40.320.000,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PEMATANGSIANTAR
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	40.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PEMATANGSIANTAR
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	113.960.000,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PEMATANGSIANTAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	113.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PEMATANGSIANTAR
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	36.820.000,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PEMATANGSIANTAR
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	36.820.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PEMATANGSIANTAR
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-			-	10.274.781.050,00						-	1.861.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-			-	589.755.000,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	812.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PEMATANGSIANTAR
	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		120.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PEMATANGSIANTAR
	1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		100.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PEMATANGSIANTAR
	1.01.02.1.01.0064	Penyediaan infrastruktur TIK														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berkas P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		22.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PEMATANGSIANTAR
	1.01.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Unit	589.755.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berkas P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		120.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PEMATANGSIANTAR
	1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berkas P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		450.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PEMATANGSIANTAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-			-	6.137.743.850,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	812.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PEMATANGSIANTAR
	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		120.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PEMATANGSIANTAR
	1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	1.041.953.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		100.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PEMATANGSIANTAR
	1.01.02.1.02.0058	Penyediaan infrastruktur TIK														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia</i>				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berkas P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		22.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PEMATANGSIANTAR
	1.01.02.1.02.0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat</i>				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berkas P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		120.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PEMATANGSIANTAR
	1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			<i>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah</i>				1 Ruang	5.095.790.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berkas P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		450.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PEMATANGSIANTAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-			-	3.547.282.200,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	237.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PEMATANGSIANTAR
	1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	2.951.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PEMATANGSIANTAR
	1.01.02.1.03.0035	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	595.402.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PEMATANGSIANTAR
	1.01.02.1.03.0063	Penyediaan infrastruktur TIK														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia</i>				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		22.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PEMATANGSIANTAR
	1.01.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PEMATANGSIANTAR
	1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			<i>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah</i>				1 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PEMATANGSIANTAR
	X	NON URUSAN						297.342.199,00							880.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						297.342.199,00							880.000.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	297.342.199,00						-	880.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	59.904.399,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	352.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PEMATANGSIANTAR
	X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.294.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PEMATANGSIANTAR
	X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	26.905.747,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PEMATANGSIANTAR
	X.XX.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PEMATANGSIANTAR
	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	18.980.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PEMATANGSIANTAR
	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	7.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PEMATANGSIANTAR
	X.XX.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PEMATANGSIANTAR
	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	4.274.052,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PEMATANGSIANTAR
	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PEMATANGSIANTAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	132.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PEMATANGSIANTAR
	X.XX.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PEMATANGSIANTAR
	X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PEMATANGSIANTAR
	X.XX.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PEMATANGSIANTAR
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	237.437.800,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	176.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PEMATANGSIANTAR
	X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PEMATANGSIANTAR
	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	68.134.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PEMATANGSIANTAR
	X.XX.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PEMATANGSIANTAR
	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	166.303.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PEMATANGSIANTAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	0,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	220.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PEMATANGSIANTAR
	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PEMATANGSIANTAR
	X.XX.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PEMATANGSIANTAR
	X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						235.500.000,00							1.894.000.000,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	235.500.000,00						-	33.000.000,00	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	84.720.000,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berkas P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KISARAN
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	84.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berkas P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KISARAN
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	113.960.000,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berkas P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KISARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	113.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KISARAN
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	36.820.000,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KISARAN
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	36.820.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KISARAN
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-			-	0,00						-	1.861.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-			-	0,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	812.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KISARAN
	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		120.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KISARAN
	1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		100.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KISARAN
	1.01.02.1.01.0064	Penyediaan infrastruktur TIK														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia</i>				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		22.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KISARAN
	1.01.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat</i>				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		120.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KISARAN
	1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			<i>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah</i>				1 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		450.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KISARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-			-	0,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	812.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KISARAN
	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		120.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KISARAN
	1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		100.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KISARAN
	1.01.02.1.02.0058	Penyediaan infrastruktur TIK														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		22.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KISARAN
	1.01.02.1.02.0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		120.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KISARAN
	1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		450.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KISARAN
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-			-	0,00			-	-	-	-	237.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KISARAN
	1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KISARAN
	1.01.02.1.03.0035	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KISARAN
	1.01.02.1.03.0063	Penyediaan infrastruktur TIK														
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		22.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KISARAN
	1.01.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KISARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah				1 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KISARAN
	X	NON URUSAN						402.151.433,00							880.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						402.151.433,00							880.000.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	402.151.433,00						-	880.000.000,00	
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	89.609.568,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	352.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KISARAN
	X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.396.492,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KISARAN
	X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	37.014.996,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KISARAN
	X.XX.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KISARAN
	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	18.980.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KISARAN
	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	24.844.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KISARAN
	X.XX.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KISARAN
	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	5.373.280,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KISARAN
	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KISARAN
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	132.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KISARAN
	X.XX.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KISARAN
	X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KISARAN
	X.XX.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KISARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	312.541.865,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	176.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KISARAN
	X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KISARAN
	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	31.332.945,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KISARAN
	X.XX.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KISARAN
	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	276.208.920,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KISARAN
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	0,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	220.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KISARAN
	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KISARAN
	X.XX.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KISARAN
	X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KISARAN
	X.XX.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KISARAN
	X.XX.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KISARAN
		CABANG DINAS PENDIDIKAN HUMBANG HASUNDUTAN						7.962.658.638,00							2.774.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.725.379.400,00							1.894.000.000,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						7.725.379.400,00							1.894.000.000,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	173.240.000,00						-	33.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	96.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN HUMBANG HASUNDUTAN
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	36.820.000,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN HUMBANG HASUNDUTAN
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	36.820.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN HUMBANG HASUNDUTAN
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-			-	7.552.139.400,00						-	1.861.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-			-	6.207.743.850,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	812.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN HUMBANG HASUNDUTAN
	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		120.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN HUMBANG HASUNDUTAN
	1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	1.041.953.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		100.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN HUMBANG HASUNDUTAN
	1.01.02.1.01.0064	Penyediaan infrastruktur TIK														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia</i>				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berkas P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		22.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN HUMBANG HASUNDUTAN
	1.01.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat</i>				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berkas P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		120.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN HUMBANG HASUNDUTAN
	1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			<i>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah</i>				1 Ruang	5.165.790.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berkas P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		450.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN HUMBANG HASUNDUTAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-			-	1.344.395.550,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	812.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN HUMBANG HASUNDUTAN
	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		120.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN HUMBANG HASUNDUTAN
	1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	148.850.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		100.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN HUMBANG HASUNDUTAN
	1.01.02.1.02.0058	Penyediaan infrastruktur TIK														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berkas P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		22.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN HUMBANG HASUNDUTAN
	1.01.02.1.02.0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Unit	457.575.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berkas P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		120.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN HUMBANG HASUNDUTAN
	1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	737.970.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berkas P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		450.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN HUMBANG HASUNDUTAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-			-	0,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	237.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN HUMBANG HASUNDUTAN
	1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN HUMBANG HASUNDUTAN
	1.01.02.1.03.0035	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN HUMBANG HASUNDUTAN
	1.01.02.1.03.0063	Penyediaan infrastruktur TIK														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia</i>				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		22.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN HUMBANG HASUNDUTAN
	1.01.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN HUMBANG HASUNDUTAN
	1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			<i>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah</i>				1 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN HUMBANG HASUNDUTAN
	X	NON URUSAN						237.279.238,00							880.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						237.279.238,00							880.000.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	237.279.238,00						-	880.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	52.690.918,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	352.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN HUMBANG HASUNDUTAN
	X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.566.136,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN HUMBANG HASUNDUTAN
	X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.101.852,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN HUMBANG HASUNDUTAN
	X.XX.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN HUMBANG HASUNDUTAN
	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	4.682.130,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN HUMBANG HASUNDUTAN
	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN HUMBANG HASUNDUTAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	132.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN HUMBANG HASUNDUTAN
	X.XX.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN HUMBANG HASUNDUTAN
	X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN HUMBANG HASUNDUTAN
	X.XX.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN HUMBANG HASUNDUTAN
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	182.353.320,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	176.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN HUMBANG HASUNDUTAN
	X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN HUMBANG HASUNDUTAN
	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	21.134.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berkbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN HUMBANG HASUNDUTAN
	X.XX.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berkbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN HUMBANG HASUNDUTAN
	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	160.519.320,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berkbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN HUMBANG HASUNDUTAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.235.000,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	220.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN HUMBANG HASUNDUTAN
	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN HUMBANG HASUNDUTAN
	X.XX.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN HUMBANG HASUNDUTAN
	X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						5.313.076.650,00							1.894.000.000,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	158.970.000,00						-	33.000.000,00	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	40.320.000,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN BALIGE
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	40.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN BALIGE
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	81.830.000,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN BALIGE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	81.830.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN BALIGE
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	36.820.000,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN BALIGE
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	36.820.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN BALIGE
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-			-	5.154.106.650,00						-	1.861.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-			-	1.330.230.825,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	812.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN BALIGE
	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		120.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN BALIGE
	1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	223.275.825,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		100.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN BALIGE
	1.01.02.1.01.0064	Penyediaan infrastruktur TIK														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia</i>				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		22.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN BALIGE
	1.01.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat</i>				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		120.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN BALIGE
	1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			<i>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah</i>				1 Ruang	1.106.955.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		450.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN BALIGE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-			-	3.823.875.825,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	812.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN BALIGE
	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		120.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN BALIGE
	1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	223.275.825,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		100.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN BALIGE
	1.01.02.1.02.0058	Penyediaan infrastruktur TIK														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia</i>				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		22.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN BALIGE
	1.01.02.1.02.0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat</i>				1 Unit	2.493.645.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		120.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN BALIGE
	1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			<i>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah</i>				1 Ruang	1.106.955.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		450.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN BALIGE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-			-	0,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	237.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN BALIGE
	1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN BALIGE
	1.01.02.1.03.0035	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN BALIGE
	1.01.02.1.03.0063	Penyediaan infrastruktur TIK														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		22.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN BALIGE
	1.01.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN BALIGE
	1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah				1 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN BALIGE
	X	NON URUSAN						260.225.858,00							880.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						260.225.858,00							880.000.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	260.225.858,00						-	880.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	63.605.818,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berkas P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	352.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN BALIGE
	X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berkas P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN BALIGE
	X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	39.897.691,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berkas P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN BALIGE
	X.XX.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN BALIGE
	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	3.900.117,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN BALIGE
	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN BALIGE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	132.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN BALIGE
	X.XX.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN BALIGE
	X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN BALIGE
	X.XX.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN BALIGE
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	196.620.040,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	176.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN BALIGE
	X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	8.290.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN BALIGE
	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	19.134.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN BALIGE
	X.XX.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN BALIGE
	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	169.196.040,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN BALIGE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	0,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	220.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN BALIGE
	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN BALIGE
	X.XX.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN BALIGE
	X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN BALIGE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN BALIGE
	X.XX.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN BALIGE
		CABANG DINAS PENDIDIKAN SIBOLGA						5.294.164.721,00							2.774.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.104.110.000,00							1.894.000.000,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						4.104.110.000,00							1.894.000.000,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	175.275.000,00						-	33.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	40.320.000,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SIBOLGA
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	40.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SIBOLGA
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	98.135.000,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SIBOLGA
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	98.135.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SIBOLGA
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	36.820.000,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SIBOLGA
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	36.820.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SIBOLGA
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-			-	3.928.835.000,00						-	1.861.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-			-	2.572.895.000,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	812.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SIBOLGA
	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		120.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SIBOLGA
	1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		100.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SIBOLGA
	1.01.02.1.01.0064	Penyediaan infrastruktur TIK														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		22.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SIBOLGA
	1.01.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		120.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SIBOLGA
	1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	2.572.895.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		450.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SIBOLGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-			-	1.355.940.000,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	812.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SIBOLGA
	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		120.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SIBOLGA
	1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		100.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SIBOLGA
	1.01.02.1.02.0058	Penyediaan infrastruktur TIK														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia</i>				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		22.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SIBOLGA
	1.01.02.1.02.0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat</i>				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		120.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SIBOLGA
	1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			<i>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah</i>				1 Ruang	1.355.940.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		450.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SIBOLGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-			-	0,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	237.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SIBOLGA
	1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SIBOLGA
	1.01.02.1.03.0035	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SIBOLGA
	1.01.02.1.03.0063	Penyediaan infrastruktur TIK														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		22.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SIBOLGA
	1.01.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SIBOLGA
	1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah				1 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SIBOLGA
	X	NON URUSAN						1.190.054.721,00							880.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						1.190.054.721,00							880.000.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	1.190.054.721,00						-	880.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	52.552.901,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berkas P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	352.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SIBOLGA
	X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.630.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berkas P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SIBOLGA
	X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	18.902.717,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berkas P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SIBOLGA
	X.XX.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SIBOLGA
	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SIBOLGA
	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	6.622.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokat	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SIBOLGA
	X.XX.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SIBOLGA
	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	10.098.084,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SIBOLGA
	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SIBOLGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	16.500.000,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	132.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SIBOLGA
	X.XX.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SIBOLGA
	X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	16.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SIBOLGA
	X.XX.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SIBOLGA
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	192.819.320,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	176.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SIBOLGA
	X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SIBOLGA
	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	27.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SIBOLGA
	X.XX.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SIBOLGA
	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	160.519.320,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SIBOLGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	928.182.500,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	220.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SIBOLGA
	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SIBOLGA
	X.XX.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SIBOLGA
	X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						11.181.465.120,00							1.853.500.000,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	158.330.000,00						-	33.000.000,00	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	40.320.000,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG TUA
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	40.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG TUA
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	81.190.000,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG TUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	81.190.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG TUA
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	36.820.000,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG TUA
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	36.820.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG TUA
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-			-	11.023.135.120,00						-	1.820.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-			-	3.196.592.805,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	792.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG TUA
	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		110.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG TUA
	1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	613.697.805,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		99.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG TUA
	1.01.02.1.01.0064	Penyediaan infrastruktur TIK														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia</i>				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		22.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG TUA
	1.01.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat</i>				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		110.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG TUA
	1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			<i>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah</i>				1 Ruang	2.582.895.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		451.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG TUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-			-	6.451.640.965,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	792.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG TUA
	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		110.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG TUA
	1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	1.285.850.965,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		99.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG TUA
	1.01.02.1.02.0058	Penyediaan infrastruktur TIK														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		22.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG TUA
	1.01.02.1.02.0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		110.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG TUA
	1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	5.165.790.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		451.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG TUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-			-	1.374.901.350,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	236.500.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG TUA
	1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG TUA
	1.01.02.1.03.0035	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	267.946.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		49.500.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG TUA
	1.01.02.1.03.0063	Penyediaan infrastruktur TIK														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		22.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG TUA
	1.01.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG TUA
	1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah				1 Ruang	1.106.955.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG TUA
	X	NON URUSAN						272.770.857,00							880.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						272.770.857,00							880.000.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	272.770.857,00						-	880.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	64.992.217,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berkas P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	352.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG TUA
	X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.786.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berkas P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG TUA
	X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	35.471.477,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berkas P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG TUA
	X.XX.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berkbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG TUA
	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				Rp 44,000,000 Paket	14.334.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berkbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG TUA
	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	11.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berkbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG TUA
	X.XX.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG TUA
	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1.800.740,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG TUA
	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG TUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	132.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG TUA
	X.XX.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG TUA
	X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG TUA
	X.XX.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG TUA
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	199.358.640,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	176.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG TUA
	X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	8.325.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG TUA
	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	21.837.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG TUA
	X.XX.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG TUA
	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	169.196.040,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG TUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	8.420.000,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	220.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG TUA
	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	8.420.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG TUA
	X.XX.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG TUA
	X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						18.527.320.175,00							1.894.000.000,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	123.140.000,00						-	33.000.000,00	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	40.320.000,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berdasarkan P eningkatan Skill yang B erhubungana n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PADANGSIDIMPUAN
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	40.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berdasarkan P eningkatan Skill yang B erhubungana n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PADANGSIDIMPUAN
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	46.000.000,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berdasarkan P eningkatan Skill yang B erhubungana n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PADANGSIDIMPUAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	46.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PADANGSIDIMPUAN
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	36.820.000,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PADANGSIDIMPUAN
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	36.820.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PADANGSIDIMPUAN
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-			-	18.404.180.175,00						-	1.861.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-			-	10.354.426.050,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	812.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PADANGSIDIMPUAN
	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		120.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PADANGSIDIMPUAN
	1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	2.236.756.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		100.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PADANGSIDIMPUAN
	1.01.02.1.01.0064	Penyediaan infrastruktur TIK														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		22.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PADANGSIDIMPUAN
	1.01.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		120.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PADANGSIDIMPUAN
	1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	8.117.670.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		450.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PADANGSIDIMPUAN
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-			-	8.049.754.125,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	812.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PADANGSIDIMPUAN
	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		120.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PADANGSIDIMPUAN
	1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	2.514.979.125,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		100.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PADANGSIDIMPUAN
	1.01.02.1.02.0058	Penyediaan infrastruktur TIK														
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		22.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PADANGSIDIMPUAN
	1.01.02.1.02.0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		120.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PADANGSIDIMPUAN
	1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	5.534.775.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		450.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PADANGSIDIMPUAN
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-			-	0,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	237.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PADANGSIDIMPUAN
	1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PADANGSIDIMPUAN
	1.01.02.1.03.0035	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PADANGSIDIMPUAN
	1.01.02.1.03.0063	Penyediaan infrastruktur TIK														
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		22.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PADANGSIDIMPUAN
	1.01.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PADANGSIDIMPUAN
	1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah				1 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PADANGSIDIMPUAN
	X	NON URUSAN						241.357.146,00							880.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						241.357.146,00							880.000.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	241.357.146,00						-	880.000.000,00	
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	36.029.786,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	352.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PADANGSIDIMPUAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.264.328,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PADANGSIDIMPUAN
	X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	22.462.354,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PADANGSIDIMPUAN
	X.XX.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PADANGSIDIMPUAN
	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PADANGSIDIMPUAN
	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5.050.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PADANGSIDIMPUAN
	X.XX.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PADANGSIDIMPUAN
	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	2.852.424,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PADANGSIDIMPUAN
	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PADANGSIDIMPUAN
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	132.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PADANGSIDIMPUAN
	X.XX.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PADANGSIDIMPUAN
	X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PADANGSIDIMPUAN
	X.XX.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PADANGSIDIMPUAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	205.327.360,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	176.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PADANGSIDIMPUAN
	X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.130.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PADANGSIDIMPUAN
	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	19.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PADANGSIDIMPUAN
	X.XX.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PADANGSIDIMPUAN
	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	112.797.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PADANGSIDIMPUAN
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	0,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	220.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PADANGSIDIMPUAN
	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PADANGSIDIMPUAN
	X.XX.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PADANGSIDIMPUAN
	X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PADANGSIDIMPUAN
	X.XX.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PADANGSIDIMPUAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PADANGSIDIMPUAN
		CABANG DINAS PENDIDIKAN RANTAU PRAPAT						15.983.394.578,00							2.774.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						15.713.186.350,00							1.894.000.000,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						15.713.186.350,00							1.894.000.000,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	159.661.000,00						-	33.000.000,00	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	40.320.000,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN RANTAU PRAPAT
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	40.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN RANTAU PRAPAT
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	82.521.000,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN RANTAU PRAPAT
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	82.521.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN RANTAU PRAPAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	36.820.000,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN RANTAU PRAPAT
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	36.820.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN RANTAU PRAPAT
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-			-	15.553.525.350,00						-	1.861.000.000,00	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-			-	8.015.550.675,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	812.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN RANTAU PRAPAT
	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		120.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN RANTAU PRAPAT
	1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	1.265.229.675,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		100.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN RANTAU PRAPAT
	1.01.02.1.01.0064	Penyediaan infrastruktur TIK														
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		22.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN RANTAU PRAPAT
	1.01.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		120.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN RANTAU PRAPAT
	1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	6.750.321.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		450.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN RANTAU PRAPAT
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-			-	7.537.974.675,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	812.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN RANTAU PRAPAT
	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		120.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN RANTAU PRAPAT
	1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	1.265.229.675,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		100.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN RANTAU PRAPAT
	1.01.02.1.02.0058	Penyediaan infrastruktur TIK														
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		22.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN RANTAU PRAPAT
	1.01.02.1.02.0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		120.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN RANTAU PRAPAT
	1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	6.272.745.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		450.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN RANTAU PRAPAT
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-			-	0,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	237.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN RANTAU PRAPAT
	1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN RANTAU PRAPAT
	1.01.02.1.03.0035	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN RANTAU PRAPAT
	1.01.02.1.03.0063	Penyediaan infrastruktur TIK														
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		22.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN RANTAU PRAPAT
	1.01.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN RANTAU PRAPAT
	1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah				1 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN RANTAU PRAPAT
	X	NON URUSAN						270.208.228,00							880.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						270.208.228,00							880.000.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	270.208.228,00						-	880.000.000,00	
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	56.654.354,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	352.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN RANTAU PRAPAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.506.188,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN RANTAU PRAPAT
	X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	30.228.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN RANTAU PRAPAT
	X.XX.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN RANTAU PRAPAT
	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN RANTAU PRAPAT
	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	8.754.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN RANTAU PRAPAT
	X.XX.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN RANTAU PRAPAT
	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	2.414.706,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN RANTAU PRAPAT
	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN RANTAU PRAPAT
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	132.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN RANTAU PRAPAT
	X.XX.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN RANTAU PRAPAT
	X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN RANTAU PRAPAT
	X.XX.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN RANTAU PRAPAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	206.953.874,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	176.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN RANTAU PRAPAT
	X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN RANTAU PRAPAT
	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	37.400.074,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN RANTAU PRAPAT
	X.XX.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN RANTAU PRAPAT
	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	166.303.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN RANTAU PRAPAT
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	6.600.000,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	220.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN RANTAU PRAPAT
	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	6.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN RANTAU PRAPAT
	X.XX.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN RANTAU PRAPAT
	X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN RANTAU PRAPAT
	X.XX.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN RANTAU PRAPAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN RANTAU PRAPAT
		CABANG DINAS PENDIDIKAN KABANJAHE						23.586.246.028,00							2.774.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						23.347.734.300,00							1.894.000.000,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						23.347.734.300,00							1.894.000.000,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	174.900.000,00						-	33.000.000,00	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	40.320.000,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABANJAHE
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	40.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABANJAHE
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	97.760.000,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABANJAHE
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	97.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABANJAHE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	36.820.000,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABANJAHE
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	36.820.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABANJAHE
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-			-	23.172.834.300,00						-	1.861.000.000,00	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-			-	15.519.359.625,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	812.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABANJAHE
	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		120.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABANJAHE
	1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	2.604.884.625,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		100.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABANJAHE
	1.01.02.1.01.0064	Penyediaan infrastruktur TIK														
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		22.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABANJAHE
	1.01.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		120.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABANJAHE
	1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	12.914.475.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		450.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABANJAHE
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-			-	7.653.474.675,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	812.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABANJAHE
	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		120.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABANJAHE
	1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	1.380.729.675,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		100.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABANJAHE
	1.01.02.1.02.0058	Penyediaan infrastruktur TIK														
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		22.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABANJAHE
	1.01.02.1.02.0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		120.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABANJAHE
	1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	6.272.745.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		450.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABANJAHE
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-			-	0,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	237.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABANJAHE
	1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABANJAHE
	1.01.02.1.03.0035	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABANJAHE
	1.01.02.1.03.0063	Penyediaan infrastruktur TIK														
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		22.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABANJAHE
	1.01.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABANJAHE
	1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah				1 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABANJAHE
	X	NON URUSAN						238.511.728,00							880.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						238.511.728,00							880.000.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	238.511.728,00						-	880.000.000,00	
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	51.031.168,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	352.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABANJAHE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.566.136,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABANJAHE
	X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.101.852,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABANJAHE
	X.XX.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABANJAHE
	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	13.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABANJAHE
	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	11.181.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABANJAHE
	X.XX.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABANJAHE
	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	4.682.130,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABANJAHE
	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABANJAHE
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	132.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABANJAHE
	X.XX.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABANJAHE
	X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABANJAHE
	X.XX.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABANJAHE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	185.245.560,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	176.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABANJAHE
	X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABANJAHE
	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	21.134.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABANJAHE
	X.XX.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABANJAHE
	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	163.411.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABANJAHE
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.235.000,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	220.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABANJAHE
	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABANJAHE
	X.XX.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABANJAHE
	X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2.235.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABANJAHE
	X.XX.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABANJAHE
	X.XX.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		44.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABANJAHE
		CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG SITOLI						9.418.977.211,00							2.953.500.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						9.071.550.000,00							1.853.500.000,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						9.071.550.000,00							1.853.500.000,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	257.940.000,00						-	33.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	175.780.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG SITOLI
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	41.840.000,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG SITOLI
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	41.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG SITOLI
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-			-	8.813.610.000,00						-	1.820.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-			-	4.067.820.000,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	792.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG SITOLI
	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		110.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG SITOLI
	1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		99.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG SITOLI
	1.01.02.1.01.0064	Penyediaan infrastruktur TIK														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		22.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG SITOLI
	1.01.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		110.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG SITOLI
	1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	4.067.820.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		451.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG SITOLI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-			-	4.745.790.000,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	792.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG SITOLI
	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		110.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG SITOLI
	1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		99.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG SITOLI
	1.01.02.1.02.0058	Penyediaan infrastruktur TIK														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia</i>				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		22.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG SITOLI
	1.01.02.1.02.0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat</i>				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		110.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG SITOLI
	1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			<i>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah</i>				1 Ruang	4.745.790.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		451.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG SITOLI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-			-	0,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	236.500.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG SITOLI
	1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG SITOLI
	1.01.02.1.03.0035	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		49.500.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG SITOLI
	1.01.02.1.03.0063	Penyediaan infrastruktur TIK														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia</i>				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		22.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG SITOLI
	1.01.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG SITOLI
	1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			<i>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah</i>				1 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG SITOLI
	X	NON URUSAN						347.427.211,00							1.100.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						347.427.211,00							1.100.000.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	347.427.211,00						-	1.100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	67.423.411,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	440.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG SITOLI
	X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.060.369,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG SITOLI
	X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	33.261.534,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG SITOLI
	X.XX.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG SITOLI
	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.126.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG SITOLI
	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	12.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG SITOLI
	X.XX.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG SITOLI
	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	3.725.508,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG SITOLI
	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG SITOLI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	80.000.000,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	165.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG SITOLI
	X.XX.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG SITOLI
	X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG SITOLI
	X.XX.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG SITOLI
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	195.803.800,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	220.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG SITOLI
	X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	10.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG SITOLI
	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	19.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berkbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG SITOLI
	X.XX.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berkbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG SITOLI
	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	166.303.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berkbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG SITOLI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	4.200.000,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	275.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG SITOLI
	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	4.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG SITOLI
	X.XX.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG SITOLI
	X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						33.380.314.675,11							1.853.500.000,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	242.580.000,00						-	33.000.000,00	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	40.320.000,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN TELUK DALAM
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	40.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN TELUK DALAM
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	165.440.000,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN TELUK DALAM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	165.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN TELUK DALAM
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	36.820.000,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN TELUK DALAM
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	36.820.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		11.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN TELUK DALAM
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-			-	33.137.734.675,11						-	1.820.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-			-	26.643.363.025,07			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	792.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN TELUK DALAM
	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		110.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN TELUK DALAM
	1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	965.278.025,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		99.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN TELUK DALAM
	1.01.02.1.01.0064	Penyediaan infrastruktur TIK														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		22.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN TELUK DALAM
	1.01.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Unit	3.200.000.000,07	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		110.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN TELUK DALAM
	1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	22.478.085.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		451.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN TELUK DALAM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-			-	3.833.910.000,04			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	792.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN TELUK DALAM
	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		110.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN TELUK DALAM
	1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		99.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN TELUK DALAM
	1.01.02.1.02.0058	Penyediaan infrastruktur TIK														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia</i>				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berdasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		22.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN TELUK DALAM
	1.01.02.1.02.0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat</i>				1 Unit	1.800.000.000,04	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berdasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		110.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN TELUK DALAM
	1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			<i>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah</i>				1 Ruang	2.033.910.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berdasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		451.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN TELUK DALAM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-			-	2.660.461.650,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	236.500.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN TELUK DALAM
	1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN TELUK DALAM
	1.01.02.1.03.0035	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	446.551.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		49.500.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN TELUK DALAM
	1.01.02.1.03.0063	Penyediaan infrastruktur TIK														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia</i>				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		22.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN TELUK DALAM
	1.01.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN TELUK DALAM
	1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			<i>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah</i>				1 Ruang	2.213.910.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN TELUK DALAM
	X	NON URUSAN						264.043.855,00							1.100.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						264.043.855,00							1.100.000.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	264.043.855,00						-	1.100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	63.090.055,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berkas P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	440.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN TELUK DALAM
	X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.144.106,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berkas P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN TELUK DALAM
	X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	25.452.947,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berkas P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN TELUK DALAM
	X.XX.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN TELUK DALAM
	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	21.984.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN TELUK DALAM
	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	9.306.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN TELUK DALAM
	X.XX.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN TELUK DALAM
	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	5.202.252,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN TELUK DALAM
	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN TELUK DALAM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	165.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN TELUK DALAM
	X.XX.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN TELUK DALAM
	X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN TELUK DALAM
	X.XX.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN TELUK DALAM
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	190.753.800,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	220.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN TELUK DALAM
	X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN TELUK DALAM
	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	21.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berkbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN TELUK DALAM
	X.XX.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berkbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN TELUK DALAM
	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	166.303.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berkbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN TELUK DALAM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	10.200.000,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	275.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN TELUK DALAM
	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	10.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN TELUK DALAM
	X.XX.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN TELUK DALAM
	X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						0,00							33.000.000,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	0,00						-	33.000.000,00	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	11.000.000,00	UPTD INFORMASI
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		11.000.000,00	UPTD INFORMASI
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	11.000.000,00	UPTD INFORMASI

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	240.000.000,00	UPTD INFORMASI
	X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		30.000.000,00	UPTD INFORMASI
	X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		30.000.000,00	UPTD INFORMASI
	X.XX.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		30.000.000,00	UPTD INFORMASI
	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		30.000.000,00	UPTD INFORMASI
	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		30.000.000,00	UPTD INFORMASI
	X.XX.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		30.000.000,00	UPTD INFORMASI
	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		30.000.000,00	UPTD INFORMASI
	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		30.000.000,00	UPTD INFORMASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	90.000.000,00	UPTD INFORMASI
	X.XX.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		30.000.000,00	UPTD INFORMASI
	X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	UPTD INFORMASI
	X.XX.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		30.000.000,00	UPTD INFORMASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	0,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	120.000.000,00	UPTD INFORMASI
	X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		30.000.000,00	UPTD INFORMASI
	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		30.000.000,00	UPTD INFORMASI
	X.XX.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		30.000.000,00	UPTD INFORMASI
	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		30.000.000,00	UPTD INFORMASI
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	0,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	150.000.000,00	UPTD INFORMASI
	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		30.000.000,00	UPTD INFORMASI
	X.XX.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		30.000.000,00	UPTD INFORMASI
	X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		30.000.000,00	UPTD INFORMASI
	X.XX.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		30.000.000,00	UPTD INFORMASI
	X.XX.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		30.000.000,00	UPTD INFORMASI
	J U M L A H							3.790.039.168.907,00						3.460.158.720.272,00		

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
DINAS PERHUBUNGAN																
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN														
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	40.630.904.048,00						-	0,00	
	2.15.01.1.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	24.600.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				20 Dokumen Dokumen	24.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	26.053.575.462,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				160 Orang/ Bulan	25.818.375.462,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	235.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	575.925.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				160 Orang	575.925.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	2.473.753.810,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	762.968.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				100 Paket	435.388.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				50 Paket	350.397.610,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				500 Laporan	925.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	5.585.800.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				25 Laporan	2.510.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				100 Laporan	3.075.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	526.090.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 Unit	287.705.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	172.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	61.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5.385.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-	-			-	56.674.785.963,00						-	0,00	
	2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	-	-			-	240.090.000,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi														
			Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi				12 Laporan	161.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi														
			Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi				12 Laporan	78.540.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	3.350.000.000,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				100 Unit	3.350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.10	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	702.730.000,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.10.0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi				12 Dokumen	702.730.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	370.000,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan				10 Unit	370.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	-	-			-	97.180.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.03.1.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	-	-			-	95.670.000,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan				5 Unit	370.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi				12 Laporan	95.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.03.1.10	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	454,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.10.0008	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				12 Laporan	454,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
4.	2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	-	-			-	160.240.000,00						-	0,00	
	2.15.05.1.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	-	-			-	98.110.000,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.05.1.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	16.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH I BINJAI
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	17.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH I BINJAI
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				0 Laporan	92.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH I BINJAI
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	552.686.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH I BINJAI
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				36 Laporan	402.536.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH I BINJAI
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	150.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH I BINJAI
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	89.050.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH I BINJAI
	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	86.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH I BINJAI
	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	3.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH I BINJAI
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-	-			-	56.674.785.963,00						-	0,00	
	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	-	-			-	2.000.150.000,00			-	Pengembangan Sistem Logistik dan Transportasi yang Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Daya Saing	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH I BINJAI
	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi														
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia				100 Unit	1.999.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Pengembangan Sistem Logistik dan Transportasi yang Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Daya Saing	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH I BINJAI
	2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara				1000 Unit	350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Pengembangan Sistem Logistik dan Transportasi yang Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Daya Saing	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH I BINJAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	-	-			-	271.864.496,00				Pengembangan Sistem Logistik dan Transportasi yang Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Daya Saing	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH I BINJAI
	2.15.02.1.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B														
			Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi				3 Unit	49.473.624,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Pengembangan Sistem Logistik dan Transportasi yang Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Daya Saing	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH I BINJAI
	2.15.02.1.03.0007	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)														
			Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)				3 Unit	104.625.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Pengembangan Sistem Logistik dan Transportasi yang Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Daya Saing	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH I BINJAI
	2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	1.950.000.000,00			-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH I BINJAI
	2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				4 Unit	1.950.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH I BINJAI
UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH II KABANJAHE																
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN														
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG - URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-			-		40.630.904.048,00					-		0,00	
	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	79.560.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH II KABANJAHE
	2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	79.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH II KABANJAHE
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	141.400.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH II KABANJAHE
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	17.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH II KABANJAHE
	2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	14.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH II KABANJAHE
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	17.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH II KABANJAHE
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	92.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH II KABANJAHE
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	467.268.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH II KABANJAHE
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	376.268.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH II KABANJAHE
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	91.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH II KABANJAHE
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	92.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH II KABANJAHE
	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	86.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH II KABANJAHE
	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH II KABANJAHE
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-	-			-	56.674.785.963,00						-	0,00	
	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	-	-			-	2.000.150.000,00			-	Pengembangan Sistem Logistik dan Transportasi yang Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Daya Saing	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH II KABANJAHE
	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi														
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia				100 Unit	1.999.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Pengembangan Sistem Logistik dan Transportasi yang Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Daya Saing	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH II KABANJAHE
	2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara				1000 Unit	350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Pengembangan Sistem Logistik dan Transportasi yang Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Daya Saing	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH II KABANJAHE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	-	-			-	271.864.496,00			-	Pengemba ngan Sistem Logistik dan Transp ortasi yang Mendukung Pengemba ngan Ekonomi dan Daya Saing	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH II KABANJAHE
	2.15.02.1.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B														
			Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi				1 Unit	13.140.872,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Pengemba ngan Sistem Logistik dan Transp ortasi yang Mendukung Pengemba ngan Ekonomi dan Daya Saing	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH II KABANJAHE
	2.15.02.1.03.0007	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)														
			Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)				1 Unit	104.625.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Pengemba ngan Sistem Logistik dan Transp ortasi yang Mendukung Pengemba ngan Ekonomi dan Daya Saing	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH II KABANJAHE
	2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	5.067.525.000,00			-	Pemberant asan Kemiskinan melalui Perl indungan dan Pembe rdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH II KABANJAHE
	2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				4 Unit	650.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH II KABANJAHE
UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH III KISARAN																
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN														
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-			-		40.630.904.048,00						-		0,00
	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	60.480.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH III KISARAN
	2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	60.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH III KISARAN
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	138.500.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH III KISARAN
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	14.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH III KISARAN
	2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	17.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH III KISARAN
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	14.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH III KISARAN
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	92.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH III KISARAN
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	186.500.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH III KISARAN
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH III KISARAN
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	136.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH III KISARAN
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	89.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH III KISARAN
	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	86.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH III KISARAN
	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH III KISARAN
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-	-			-	56.674.785.963,00						-	0,00	
	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	-	-			-	3.999.950.000,00			-	Pengembangan Sistem Logistik dan Transportasi yang Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Daya Saing	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH III KISARAN
	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi														
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia				10 Unit	3.999.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Pengembangan Sistem Logistik dan Transportasi yang Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Daya Saing	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH III KISARAN
	2.15.02.1.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan														
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara				100 Unit	350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH III KISARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	-	-			-	209.250.000,00			-	Pengembangan Sistem Logistik dan Transportasi yang Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Daya Saing	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH III KISARAN
	2.15.02.1.03.0007	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)														
			Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)				1 Unit	209.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Pengembangan Sistem Logistik dan Transportasi yang Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Daya Saing	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH III KISARAN
	2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	5.067.525.000,00			-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH III KISARAN
	2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				4 Unit	877.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH III KISARAN
3.	2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	-	-			-	160.240.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.05.1.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	-	-			-	160.240.000,00			-	Pengembangan Sistem Logistik dan Transportasi yang Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Daya Saing	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH III KISARAN
	2.15.05.1.01.0004	Penyediaan Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Provinsi														
			Jumlah Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Provinsi				1 Unit	72.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Pengembangan Sistem Logistik dan Transportasi yang Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Daya Saing	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH III KISARAN
UPTD	PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH IV TARUTUNG															
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN														
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	40.630.904.048,00						-	0,00	
	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	53.040.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH IV TARUTUNG
	2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	53.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH IV TARUTUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	127.500.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH IV TARUTUNG
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	14.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH IV TARUTUNG
	2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	14.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH IV TARUTUNG
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	99.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH IV TARUTUNG
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	134.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH IV TARUTUNG
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH IV TARUTUNG
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	84.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH IV TARUTUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	89.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH IV TARUTUNG
	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	86.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH IV TARUTUNG
	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH IV TARUTUNG
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-	-			-	1.100.310.000,00						-	0,00	
	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	-	-			-	400.310.000,00			-	Pengembangan Sistem Logistik dan Transportasi yang Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Daya Saing	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH IV TARUTUNG
	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi														
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia				100 Unit	399.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Pengembangan Sistem Logistik dan Transportasi yang Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Daya Saing	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH IV TARUTUNG
	2.15.02.1.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara				1000 Unit	350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Pengembangan Sistem Logistik dan Transportasi yang Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Daya Saing	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH IV TARUTUNG
	2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	700.000.000,00			-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH IV TARUTUNG
	2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				4 Unit	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH IV TARUTUNG
	X	NON URUSAN						10.500.000,00							0,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						10.500.000,00							0,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	10.500.000,00						-	0,00	
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	10.500.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH IV TARUTUNG
	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	10.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH IV TARUTUNG
UPTD	PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH V PADANGSIDEMPUAN															
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN														
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG - URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-			-		40.630.904.048,00					-		0,00	
	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	68.760.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH V PADANGSIDEMPUAN
	2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	68.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH V PADANGSIDEMPUAN
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	116.450.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH V PADANGSIDEMPUAN
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	14.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH V PADANGSIDEMPUAN
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	9.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH V PADANGSIDEMPUAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	92.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH V PADANGSIDEMPUAN
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	50.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH V PADANGSIDEMPUAN
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH V PADANGSIDEMPUAN
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	3.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH V PADANGSIDEMPUAN
	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH V PADANGSIDEMPUAN
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-	-			-	56.674.785.963,00						-	0,00	
	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	-	-			-	400.310.000,00			-	Pengembangan Sistem Logistik dan Transportasi yang Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Daya Saing	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH V PADANGSIDEMPUAN
	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	191.000.000,00						-	0,00		
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	14.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH V PADANGSIDEMPUAN	
	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	14.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH V PADANGSIDEMPUAN	
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	91.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH V PADANGSIDEMPUAN	
	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	91.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH V PADANGSIDEMPUAN	
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	86.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH V PADANGSIDEMPUAN	
	X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	86.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH V PADANGSIDEMPUAN	
UPTD	PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH VI GUNUNG SITOLI															0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													0,00		
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN													0,00		
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	40.630.904.048,00						-	0,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	38.640.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH VI GUNUNG SITOLI
	2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	38.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH VI GUNUNG SITOLI
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	129.750.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH VI GUNUNG SITOLI
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	14.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH VI GUNUNG SITOLI
	2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	14.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH VI GUNUNG SITOLI
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	8.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH VI GUNUNG SITOLI
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	92.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH VI GUNUNG SITOLI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	64.136.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH VI GUNUNG SITOLI
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	52.536.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH VI GUNUNG SITOLI
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	11.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH VI GUNUNG SITOLI
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	89.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH VI GUNUNG SITOLI
	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	86.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH VI GUNUNG SITOLI
	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH VI GUNUNG SITOLI
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-	-			-	56.674.785.963,00						-	0,00	
	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	-	-			-	400.310.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH VI GUNUNG SITOLI
	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia				20 Unit	399.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH VI GUNUNG SITOLI	
	2.15.02.1.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan															
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara				50 Unit	350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH VI GUNUNG SITOLI	
	2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	5.067.525.000,00			-	Pemberant asan Kemiskinan melalui Perl indungan dan Pembe rdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH VI GUNUNG SITOLI	
	2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi															
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				4 Unit	438.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Pemberant asan Kemiskinan melalui Perl indungan dan Pembe rdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH VI GUNUNG SITOLI	
UPTD	ANGKUTAN DANAU DAN PENYEBERANGAN PARAPAT																
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN															
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	40.630.904.048,00						-	0,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	33.840.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	UPTD ANGKUTAN DANAU DAN PENYEBERANGAN PARAPAT
	2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	33.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	UPTD ANGKUTAN DANAU DAN PENYEBERANGAN PARAPAT
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	110.100.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	UPTD ANGKUTAN DANAU DAN PENYEBERANGAN PARAPAT
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	11.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	UPTD ANGKUTAN DANAU DAN PENYEBERANGAN PARAPAT
	2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	14.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	UPTD ANGKUTAN DANAU DAN PENYEBERANGAN PARAPAT
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	10.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	UPTD ANGKUTAN DANAU DAN PENYEBERANGAN PARAPAT
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	74.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	UPTD ANGKUTAN DANAU DAN PENYEBERANGAN PARAPAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	189.036.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	0,00	UPTD ANGKUTAN DANAU DAN PENYEBERANGAN PARAPAT
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	52.536.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	UPTD ANGKUTAN DANAU DAN PENYEBERANGAN PARAPAT
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	136.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	UPTD ANGKUTAN DANAU DAN PENYEBERANGAN PARAPAT
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	105.600.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	0,00	UPTD ANGKUTAN DANAU DAN PENYEBERANGAN PARAPAT
	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	103.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	UPTD ANGKUTAN DANAU DAN PENYEBERANGAN PARAPAT
	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	2.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	UPTD ANGKUTAN DANAU DAN PENYEBERANGAN PARAPAT
2.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	-	-			-	370.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.03.1.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	370.000,00			-	Pengembangan Sistem Logistik dan Transportasi yang Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Daya Saing	-	-	0,00	UPTD ANGKUTAN DANAU DAN PENYEBERANGAN PARAPAT
	2.15.03.1.05.0003	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi														
			Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi				12 Dokumen	370.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Pengembangan Sistem Logistik dan Transportasi yang Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Daya Saing	-		0,00	UPTD ANGKUTAN DANAU DAN PENYEBERANGAN PARAPAT
	JUMLAH							97.563.110.011,00							0,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						71.872.735.233,00							70.718.978.932,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						71.872.735.233,00							70.718.978.932,00	
	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						7.099.624.283,00							14.254.000.000,00	
1.	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Jumlah Volume Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	-			34569 Juta m3/Tahun 50000 ha	249.980.000,00						-	221.000.000,00	
	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-			4 Dokumen 4 Laporan	69.870.000,00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-	-	150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah														
			Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				4 Dokumen	69.870.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-			4 Dokumen 4 Laporan 4 Laporan	180.110.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	71.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03.0002	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah														
			Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				0 Laporan	60.018.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				4 Laporan	120.092.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		71.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah	-			10 Rekomen dasi 9000 ha	349.916.000,00						-	959.000.000,00	
	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	-			4 Dokumen 4 Laporan	119.956.000,00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-	-	925.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut														
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				4 Dokumen	69.988.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		278.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</i>				4 Laporan	49.968.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		647.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	<i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam ,dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat</i>	-			4 Dokumen	229.960.000,00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-	-	34.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04.0003	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat														
			<i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat</i>				4 Dokumen	229.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		34.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	<i>Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT Porsi EBT dalam Bauran Energi</i>	-			124 Rumah Tangga 44 Persen	3.027.404.283,00						-	8.970.000.000,00	
	3.29.05.1.06	Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi	<i>Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)</i>	-			4 Laporan	50.000.000,00			-	Pengemba ngan Ekonomi Hijau dan Biru	-	-	55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.06.0004	Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)														
			<i>Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)</i>				4 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengemba ngan Ekonomi Hijau dan Biru	-		55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	<i>Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT Jumlah rencana kegiatan pemanfaatan aneka EBT</i>	-			2 Dokumen 3 Unit 3 Dokumen	2.977.404.283,00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-	-	8.915.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0006	Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah rencana kegiatan pemanfaatan aneka EBT</i>				3 Dokumen	126.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		415.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT														
			<i>Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT</i>				3 unit	2.707.953.203,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		8.500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0010	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah														
			<i>Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah</i>				0 Dokumen	142.571.080,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
4.	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi	-			100 Persen	3.472.324.000,00						-	4.104.000.000,00	
	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	<i>Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi</i>	-			4 Laporan	365.615.000,00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-	-	789.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi</i>				4 Laporan	365.615.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		789.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</i>	-			1 Laporan 1000 Unit	3.106.709.000,00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-	-	3.315.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</i>				1000 Unit	3.106.709.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		3.315.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						2.606.499.750,00							2.030.000.000,00	
1.	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	<i>Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi</i>	-			100 Persen	49.487.750,00						-	0,00	
	3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	<i>Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal</i>	-			55000 Dokumen	49.487.750,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA														
			<i>Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal</i>				0 Dokumen	49.487.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	<i>Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan</i>	-			50 Persen	100.000.000,00						-	110.000.000,00	
	3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	<i>Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi</i>	-			40 Orang	100.000.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-	-	110.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.30.03.1.01.0003	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas														
			<i>Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi</i>				40 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		110.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	<i>Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</i>	-			4.03 Persen	778.000.000,00						-	880.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	-			16 Laporan 12 Laporan	698.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	790.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota				12 Laporan	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		90.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				16 Laporan	618.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		700.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	-			4 Laporan	80.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	90.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.30.04.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida				4 Laporan	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		90.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
4.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Barang	-			191207 Rp Miliar	1.450.512.000,00						-	900.000.000,00	
	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	-			6 Pelaku Usaha 8 Produk	1.450.512.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	900.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.30.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang</i>				0 Pelaku Usaha	1.203.430.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor														
			<i>Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi</i>				8 Produk	247.082.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		900.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
5.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	<i>Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen</i>	-			84.24 Persen	128.500.000,00						-	140.000.000,00	
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi</i>	-			12 Laporan	128.500.000,00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-	-	140.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi</i>				12 Laporan	128.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		140.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
6.	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	<i>Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan</i>	-			100 Persen	100.000.000,00						-	0,00	
	3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	<i>Jumlah laporan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer</i>	-			4 Laporan	100.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.30.07.1.03.0005	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi														
			<i>Jumlah laporan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer</i>				0 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						62.166.611.200,00							54.434.978.932,00	
1.	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi</i>	-			100 Persen	50.166.611.200,00						-	45.449.978.932,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			8 Dokumen 6 Laporan	38.100.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	470.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.31.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	27.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		340.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.31.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	10.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		130.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.31.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			4 Dokumen 210 Orang/Bulan	38.176.712.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	23.144.978.932,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.31.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				210 Orang/ Bulan	37.806.082.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		21.894.978.932,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.31.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	370.630.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		1.250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.31.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-			25 Orang	47.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	185.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.31.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	47.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		185.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-			4 Laporan 12 Paket 4 Paket 4 Paket	2.025.508.457,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	7.200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	591.446.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		350.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	669.247.470,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		4.500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	103.814.087,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		350.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.31.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	661.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-			4 Laporan 4 Laporan	9.191.582.843,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	11.750.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	713.235.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		350.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.31.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	8.478.347.843,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		11.400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-			9 Unit 14 Unit	687.707.900,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	2.700.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.31.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				14 Unit	302.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		700.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.31.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9 Unit	385.507.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		2.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	-			32.61 Persen	11.000.000.000,00						-	8.745.000.000,00	
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	-			4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen	11.000.000.000,00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-	-	8.745.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas				4 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		60.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		UPTD PERLINDUNGAN KONSUMEN						1.700.267.000,00							1.832.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						1.700.267.000,00							1.832.000.000,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						1.700.267.000,00							1.832.000.000,00	
1.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	-			100 Persen	292.387.000,00						-	322.000.000,00	
	3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-			4 Dokumen	64.600.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	70.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN KONSUMEN
	3.30.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	64.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		70.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN KONSUMEN
	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-			1 Paket	60.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	70.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN KONSUMEN
	3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		70.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN KONSUMEN
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-			4 Laporan	149.787.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	160.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN KONSUMEN
	3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	149.787.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		160.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN KONSUMEN
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-			1 Unit 1 Unit	18.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	22.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN KONSUMEN
	3.30.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	18.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		22.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN KONSUMEN
	3.30.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	UPTD PERLINDUNGAN KONSUMEN
2.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	-			84.24 Persen	1.407.880.000,00						-	1.510.000.000,00	
	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	-			4 BPSK 30 Pengaduan	1.357.990.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-	-	1.455.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN KONSUMEN
	3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen														
			Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif				4 BPSK	1.307.998.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		1.400.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN KONSUMEN
	3.30.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani</i>				30 Pengaduan	49.992.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah	-		55.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN KONSUMEN
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi</i>	-			12 Laporan	49.890.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	55.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN KONSUMEN
	3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi</i>				4 Laporan	49.890.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		55.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN KONSUMEN
		UPTD PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG						800.000.000,00							440.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						800.000.000,00							440.000.000,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						800.000.000,00							440.000.000,00	
1.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi</i>	-			100 Persen	400.000.000,00						-	0,00	
	3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	-			4 Dokumen	40.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	0,00	UPTD PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				0 Dokumen	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	UPTD PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	-			1 Paket	140.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	0,00	UPTD PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	140.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	UPTD PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-			4 Laporan	170.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	UPTD PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	170.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	UPTD PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-			1 Unit 1 Unit	50.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	UPTD PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				0 Unit	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	UPTD PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	UPTD PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
2.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	-			84.24 Persen	400.000.000,00						-	440.000.000,00	
	3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan Jumlah produk potensial yang dipantau Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan	-			2500 Laporan 10 Produk 2500 Sertifikat 10 Sertifikat undefined	400.000.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-	-	440.000.000,00	UPTD PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.06.1.02.0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi														
			Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan				2500 Sertifikat	160.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		170.000.000,00	UPTD PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian														
			Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan				2500 laporan	160.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		170.000.000,00	UPTD PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.06.1.02.0006	Pemantauan Mutu Produk														
			Jumlah produk potensial yang dipantau				10 Produk	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		50.000.000,00	UPTD PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.06.1.02.0007	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi														
			Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan				10 Sertifikat	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	-		50.000.000,00	UPTD PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
		UPTD LABORATORIUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						499.704.000,00							0,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						499.704.000,00							0,00	
	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						499.704.000,00							0,00	
1.	3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	-			100 Persen	245.478.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-			4 Dokumen	68.040.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	0,00	UPTD LABORATORIUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	68.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	UPTD LABORATORIUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-			4 Laporan 1 Paket	152.438.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	0,00	UPTD LABORATORIUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	UPTD LABORATORIUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	2.438.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	UPTD LABORATORIUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-			1 Unit	25.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	0,00	UPTD LABORATORIUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	UPTD LABORATORIUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Jumlah Volume Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	-			34569 Juta m3/Tahun 50000 ha	154.514.000,00						-	0,00	
	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-			4 Laporan	154.514.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	0,00	UPTD LABORATORIUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				0 Laporan	154.514.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	UPTD LABORATORIUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah	-			10 Rekomen dasi 9000 ha	99.712.000,00						-	0,00	
	3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah	-			4 Dokumen	99.712.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	0,00	UPTD LABORATORIUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil														
			Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah				0 Dokumen	99.712.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	UPTD LABORATORIUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		CABANG DINAS ESDM WILAYAH I						299.981.787,00							0,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						299.981.787,00							0,00	
	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						299.981.787,00							0,00	
1.	3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	-			100 Persen	187.459.787,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-			4 Dokumen	57.720.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	0,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH I
	3.29.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	57.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH I
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-			4 Laporan 1 Paket	100.452.287,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	0,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH I
	3.29.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	57.996.287,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH I
	3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	42.456.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH I
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-			4 Laporan	29.287.500,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	0,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH I
	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	29.287.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH I
2.	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah	-			10 Rekomen dasi 9000 ha	53.974.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	-			4 Dokumen 4 Laporan	53.974.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH I
	3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut														
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				0 Dokumen	50.082.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH I
	3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				0 Laporan	3.892.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH I
3.	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi	-			100 Persen	58.548.000,00						-	0,00	
	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	-			4 Laporan	58.548.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH I

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				0 Laporan	58.548.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH I
		CABANG DINAS ESDM WILAYAH II						249.990.625,00							0,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						249.990.625,00							0,00	
	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						249.990.625,00							0,00	
1.	3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	-			100 Persen	145.862.825,00						-	0,00	
	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-			4 Dokumen	38.949.600,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH II
	3.29.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	38.949.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH II
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-			4 Laporan 1 Paket	56.919.400,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH II
	3.29.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	9.919.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH II
	3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	47.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH II

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	-			4 Laporan	9.998.500,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	0,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH II
	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				0 Laporan	9.998.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH II
	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	-			1 Gedung	39.995.325,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	0,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH II
	3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				0 Unit	39.995.325,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH II
2.	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	<i>Jumlah Volume Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota</i>	-			34569 Juta m3/Tahun 50000 ha	9.999.200,00						-	0,00	
	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	<i>Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul</i>	-			4 Dokumen	9.999.200,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	0,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH II
	3.29.02.1.03.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah														
			<i>Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul</i>				0 Dokumen	9.999.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH II
3.	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	<i>Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah</i>	-			10 Rekomen dasi 9000 ha	49.999.100,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	-			4 Dokumen	49.999.100,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH II
	3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut														
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				0 Dokumen	49.999.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH II
4.	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi	-			100 Persen	44.129.500,00						-	0,00	
	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	-			4 Laporan	44.129.500,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH II
	3.29.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				0 Laporan	44.129.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH II
		CABANG DINAS ESDM WILAYAH III						250.000.000,00							285.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						250.000.000,00							285.000.000,00	
	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						250.000.000,00							285.000.000,00	
1.	3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	-			100 Persen	150.000.000,00						-	170.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-			4 Dokumen	45.600.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	50.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH III
	3.29.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	45.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		50.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH III
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-			4 Laporan 1 Paket	69.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	80.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH III
	3.29.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	19.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		25.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH III
	3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		55.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH III
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-			4 Laporan	35.400.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	40.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH III
	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	35.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		40.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH III

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Jumlah Volume Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	-			34569 Juta m3/Tahun 50000 ha	10.000.000,00						-	15.000.000,00	
	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	-			4 Laporan	10.000.000,00			-	Pengemba ngan Ekonomi Hijau dan Biru	-	-	15.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH III
	3.29.02.1.03.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah														
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul				4 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengemba ngan Ekonomi Hijau dan Biru	-		15.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH III
3.	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah	-			100 Rekome ndasi 9000 ha	45.000.000,00						-	50.000.000,00	
	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	-			4 Dokumen	45.000.000,00			-	Pengemba ngan Ekonomi Hijau dan Biru	-	-	50.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH III
	3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut														
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				4 Dokumen	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengemba ngan Ekonomi Hijau dan Biru	-		50.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH III
4.	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi	-			100 Persen	45.000.000,00						-	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	-	-			-	45.000.000,00			-	Pengemba ngan Ekonomi Hijau dan Biru	-	-	50.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH III
	3.29.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				4 Laporan	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengemba ngan Ekonomi Hijau dan Biru	-		50.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH III
		CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV						248.838.718,00							0,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						248.838.718,00							0,00	
	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						248.838.718,00							0,00	
1.	3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	-			100 Persen	146.964.718,00						-	0,00	
	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-			4 Dokumen	39.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	0,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV
	3.29.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	39.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-			4 Laporan 1 Paket	66.464.718,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	0,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV
	3.29.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	11.499.718,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV
	3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	54.965.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-			4 Laporan	15.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV
	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV
	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-			1 Unit	26.500.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV
	3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	26.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV
2.	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Jumlah Volume Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	-			34569 Juta m3/Tahun 50000 ha	5.908.000,00						-	0,00	
	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	-			4 Dokumen	5.908.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV
	3.29.02.1.03.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah														
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul				0 Dokumen	5.908.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	<i>Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah</i>	-			100 Rekome ndasi 9000 ha	56.690.000,00						-	0,00	
	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	<i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</i>	-			4 Dokumen 4 Laporan	50.782.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	0,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV
	3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut														
			<i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</i>				0 Dokumen	30.902.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV
	3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</i>				0 Laporan	19.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV
	3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	<i>Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah</i>	-			4 Dokumen	5.908.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	0,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.03.1.07.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan														
			<i>Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah</i>				0 Dokumen	5.908.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV
4.	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	<i>Rasio Elektrifikasi</i>	-			100 Persen	39.276.000,00						-	0,00	
	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi</i>	-			4 Laporan	39.276.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV
	3.29.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi</i>				0 Laporan	39.276.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV
		CABANG DINAS ESDM WILAYAH V						250.000.000,00							0,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						250.000.000,00							0,00	
	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						250.000.000,00							0,00	
1.	3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi</i>	-			100 Persen	183.000.000,00						-	0,00	
	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	-			4 Dokumen	51.190.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH V
	3.29.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				0 Dokumen	51.190.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH V
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	-			4 Laporan 1 Paket	83.510.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH V

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	22.010.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH V
	3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	61.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH V
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-			4 Laporan	10.800.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH V
	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	10.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH V
	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-			1 Unit	37.500.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH V
	3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	37.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH V
2.	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah	-			10 Rekomendasi dasi 9000 ha	56.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	-			4 Dokumen	35.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH V
	3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut														
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				0 Dokumen	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH V
	3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	-			4 Dokumen	12.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH V
	3.29.03.1.04.0003	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat														
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat				0 Dokumen	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH V
	3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah	-			4 Dokumen	9.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH V
	3.29.03.1.07.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan														
			Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah				0 Dokumen	9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH V

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3.	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi	-			100 Persen	11.000.000,00						-	0,00		
	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	-			4 Laporan	11.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH V	
	3.29.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi															
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				0 Laporan	11.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH V	
	J U M L A H							76.171.517.363,00							73.275.978.932,00		

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN						71.832.846.908,00							64.241.982.690,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						62.809.497.894,00							54.019.475.132,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						62.809.497.894,00							54.019.475.132,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	-			100 %	40.844.469.495,00						-	41.946.540.538,00	
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelaporan kinerja	-			12 Bulan	65.800.000,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	1.032.297.160,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	42.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		413.434.010,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	23.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		618.863.150,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Keuangan	-			12 Bulan	39.023.986.926,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	39.226.990.091,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				250 Orang/ Bulan	38.481.256.926,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		38.481.255.641,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	529.630.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		638.175.450,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	13.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		107.559.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelaporan Barang Milik Daerah	-			12 Bulan	13.750.000,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	51.461.740,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	13.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		51.461.740,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Pegawai	-			12 Bulan	0,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-	-	110.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		110.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kapasitas dan Efektifitass Layanan Sarana Aparatur	-			12 Bulan	1.379.660.019,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-	-	1.069.938.244,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	16.942.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		25.991.347,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				13 Paket	361.039.519,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		569.984.397,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				7560 Dokumen	46.758.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		49.104.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	954.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		424.858.500,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas dan Efektifitas Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	-			12 Bulan	193.092.550,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	255.455.303,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				46 Unit	193.092.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		255.455.303,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kapasitas dan Efektifitas Prasarana Aparatur	-			12 Bulan	168.180.000,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	200.398.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				80 Unit	67.190.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		90.409.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100.990.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		109.989.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT	-			218.268,44 Ton	19.048.268.230,00						-	8.479.601.198,00	
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah luas lahan perkebunan yang difasilitasi alsintan dan pupuk	-			300 Ha	2.394.319.880,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	2.606.980.618,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	2.394.319.880,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		2.606.980.618,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah luas lahan perkebunan yang difasilitasi bibit tanaman	-			7600 Ha	7.700.806.000,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-	-	2.283.741.900,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.02.0020	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi				1 laporan	8.506.989.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		3.479.077.031,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.05.0005	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan														
			Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar				15 Dokumen	398.684.268,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		48.050.329,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.1.06	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Jumlah Pengawasan peredaran obat Hewan di tingkat distributor	-			5 Unit	47.468.782,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	61.751.320,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.06.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan														
			Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar				1 Laporan	47.468.782,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		61.751.320,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
3.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	TINGKAT PENGENDALIAN PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS	-			70 %	972.575.938,00						-	1.113.281.679,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah hewan yang tertangani	-			60000 Ekor	972.575.938,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	1.113.281.679,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.1.01.0004	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan														
			Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan				1 Wilayah	64.501.488,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		92.337.359,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				1 Laporan	908.074.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		1.020.944.320,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
4.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PERSENTASE PENANGANAN BENCANA PERTANIAN DAN PENANGANAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM TERHADAP PERTANIAN	-			0,75 %	310.153.800,00						-	479.164.730,00	
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Luasan Area Penanganan Gangguan Usaha, OPT dan DPI	-			475 Ha	310.153.800,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	479.164.730,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				200 Ha	203.738.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		303.264.060,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				75 Ha	77.995.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		117.202.360,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.05.1.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi				1 Laporan	56.219.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		61.602.200,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
6.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	PERSENTASE KELEMBAGAAN KOPERASI TANI YANG DIBENTUK DAN BEROPERASI	-			2 %	1.577.811.431,00						-	1.939.284.787,00	
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penerapan teknologi dan inovasi perkebunan dan peternakan	-			3 Kegiatan	369.406.431,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	534.017.889,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				3 Dokumen	369.406.431,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		534.017.889,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	-	-			-	1.208.405.000,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-	-	1.405.266.898,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawasan korporasi petani														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah korporasi petani yang didampingi				12 Unit	1.146.302.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		1.317.043.928,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani														
			Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi				2 Unit	62.103.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		88.222.970,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	X	NON URUSAN						9.023.349.014,00							10.222.507.558,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						9.023.349.014,00							10.222.507.558,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	-			100 %	9.023.349.014,00						-	10.222.507.558,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Pegawai	-			12 Bulan	43.250.000,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	153.543.500,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	X.XX.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				250 Orang	34.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		84.826.500,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	X.XX.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				120 Orang	8.490.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		68.717.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kapasitas dan Efektifitass Layanan Sarana Aparatur	-			12 Bulan	523.208.875,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	681.547.460,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	56.418.210,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		75.159.491,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	X.XX.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	466.790.665,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		606.387.969,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Layanan Penunjang Administrasi Perkantoran	-			12 Bulan	8.017.710.889,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	8.863.979.948,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	700.001.689,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		770.001.858,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	7.317.709.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		8.093.978.090,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kapasitas dan Efektifitass Prasarana Aparatur	-			12 Bulan	439.179.250,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-	-	523.436.650,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				20 Unit	439.179.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesej ahteraan Masyarakat Lokal	-		523.436.650,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
		UPTD PERBENIHAN						1.723.992.677,00							1.000.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						1.723.992.677,00							1.000.000.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						1.723.992.677,00							1.000.000.000,00	
1.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT	-			218.268,44 Ton	1.723.992.677,00						-	1.000.000.000,00	
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Kebun Sumber Benih dan Penangkar Benih yang Diawasi	-			5 Unit	1.723.992.677,00			-	Pengemba ngan Ekonomi Hijau dan Biru	-	-	1.000.000.000,00	UPTD PERBENIHAN
	3.27.02.1.02.0020	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan														
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga				1 Laporan	1.723.992.677,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengemba ngan Ekonomi Hijau dan Biru	-		1.000.000.000,00	UPTD PERBENIHAN
		UPTD INSEMINASI BUATAN						1.491.266.755,00							1.100.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						1.491.266.755,00							1.100.000.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						1.491.266.755,00							1.100.000.000,00	
1.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS PETERNAKAN	-			23603,30 Ton	1.491.266.755,00						-	1.100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Jumlah Kelahiran Ternak yang di Inseminasi Buatan	-			67 %	1.491.266.755,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	1.100.000.000,00	UPTD INSEMINASI BUATAN
	3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak														
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi				1 laporan	1.491.266.755,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		1.100.000.000,00	UPTD INSEMINASI BUATAN
		UPTD KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						997.498.221,00							2.000.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						997.498.221,00							2.000.000.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						997.498.221,00							2.000.000.000,00	
1.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PERSENTASE UNIT USAHA PANGAN ASAL HEWAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT NKV (NOMOR KONTROL VETERINER)	-			70 %	997.498.221,00						-	2.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Pengujian Sampel Produk Hewan	-			200 Sampel	839.211.944,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	1.000.000.000,00	UPTD KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner														
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				1 Dokumen	839.211.944,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		1.000.000.000,00	UPTD KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	<i>Jumlah Unit Usaha yang diawasi</i>	-			2 Usaha	158.286.277,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	1.000.000.000,00	UPTD KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3.27.04.1.05.0003	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)														
			<i>Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)</i>				5 Sertifikat	158.286.277,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		1.000.000.000,00	UPTD KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
		UPTD KLINIK HEWAN						1.044.278.095,00							1.000.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						1.044.278.095,00							1.000.000.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						1.044.278.095,00							1.000.000.000,00	
1.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	<i>TINGKAT PENGENDALIAN PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS</i>	-			70 %	1.044.278.095,00						-	1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah hewan yang tertangani di UPTD Klinik Hewan	-			4500 Ekor	1.044.278.095,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	1.000.000.000,00	UPTD KLINIK HEWAN
	3.27.04.1.01.0005	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan														
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan				1 Laporan	1.044.278.095,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		1.000.000.000,00	UPTD KLINIK HEWAN
		UPTD PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA LOBUSONA						2.086.654.681,00							1.000.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						2.086.654.681,00							1.000.000.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						2.086.654.681,00							1.000.000.000,00	
1.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS PETERNAKAN	-			23.603,30 Ton	2.086.654.681,00						-	1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	<i>Persentase Kelahiran Bibit Unggul di UPTD Pembibitan Ternak Ruminansia Lobusona</i>	-			80 %	2.086.654.681,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	1.000.000.000,00	UPTD PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA LOBUSONA
	3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi</i>				1 laporan	2.086.654.681,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		1.000.000.000,00	UPTD PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA LOBUSONA
		UPTD TERNAK UNGGAS DAN SAPI SIHITANG						3.436.459.998,00							1.000.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						3.436.459.998,00							1.000.000.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						3.436.459.998,00							1.000.000.000,00	
1.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	<i>PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS PETERNAKAN</i>	-			23.603,30 Ton	3.436.459.998,00						-	1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Kelahiran Bibit Unggul di UPTD Ternak Unggas dan Sapi Sihitang	-			80 %	3.436.459.998,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	1.000.000.000,00	UPTD TERNAK UNGGAS DAN SAPI SIHITANG
	3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi														
			Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				1 laporan	3.436.459.998,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikas i Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		1.000.000.000,00	UPTD TERNAK UNGGAS DAN SAPI SIHITANG
	JUMLAH							82.612.997.335,00							71.341.982.690,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP						24.228.489.389,00							40.090.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						24.228.489.389,00							40.090.000.000,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						23.492.630.389,00							38.170.000.000,00	
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	19.497.813.528,00						-	25.270.000.000,00	
	2.23.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	59.730.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	180.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	59.730.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		80.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	15.099.358.163,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	16.500.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				68 Orang/ Bulan	14.253.795.323,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		15.000.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	742.082.840,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transforma si Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonom ian Masyarakat	-		900.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	103.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transforma si Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonom ian Masyarakat	-		600.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	199.450.000,00			-	Transforma si Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonom ian Masyarakat	-	-	570.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				90 Paket	134.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transforma si Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonom ian Masyarakat	-		300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				86 Orang	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transforma si Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonom ian Masyarakat	-		270.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.084.918.224,00			-	Transforma si Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonom ian Masyarakat	-	-	4.200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	28.098.204,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transforma si Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonom ian Masyarakat	-		200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	112.823.810,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transforma si Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonom ian Masyarakat	-		2.200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	237.374.282,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-		200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	38.682.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-		200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	23.281.928,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-		600.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	644.658.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-		800.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	23.448.000,00			-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-	-	500.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	23.448.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-		500.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.160.324.409,00			-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-	-	2.070.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-		70.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	727.466.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transforma si Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonom ian Masyarakat	-		1.000.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.427.858.409,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transforma si Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonom ian Masyarakat	-		1.000.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	870.584.732,00			-	Transforma si Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonom ian Masyarakat	-	-	1.250.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				11 Unit	514.740.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transforma si Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonom ian Masyarakat	-		350.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	143.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transforma si Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonom ian Masyarakat	-		300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	212.194.732,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transforma si Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonom ian Masyarakat	-		600.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	-	-			-	3.790.204.261,00						-	11.390.000.000,00	
	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	2.167.221.697,00			-	Transforma si Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonom ian Masyarakat	-	-	6.260.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.1.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi														
			Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya				1 Perpustaka an	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Transforma si Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonom ian Masyarakat	-		300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				3 Perpustakaan	245.214.610,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		600.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.1.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi														
			Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi				46 Orang	175.664.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		380.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.1.01.0008	Pengembangan Perpustakaan Deposit														
			Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan				1 Perpustakaan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-		300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				6640 Eksemplar	1.060.343.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		3.800.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik														
			Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK				1 Perpustakaan	525.622.065,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		180.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.1.01.0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan														
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-		250.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.1.01.0017	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan				5 Perpustakaan	160.377.172,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		450.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	1.622.982.564,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	5.130.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat														
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus				5 Lokus	428.856.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		1.300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.1.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				5 Perpustaka an	856.912.220,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		3.200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca														
			Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca				6 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Transforma si Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonom ian Masyarakat	-		250.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														
			Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan				8 Perpustaka an	337.214.344,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis P eningkatan Skill yang B erhubunga n dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		380.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
3.	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	-	-			-	204.612.600,00						-	1.510.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.03.1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	-	-			-	147.275.000,00			-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-	-	860.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam														
			Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR				2600 Eksemplar	147.275.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-		860.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.03.1.02	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	-	-			-	0,00			-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-	-	400.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.03.1.02.0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah														
			Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan				576 Entry	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-		200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.03.1.02.0002	Penerbitan Bibliografi Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan</i>				576 Naskah	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transforma si Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonom ian Masyarakat	-		200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.03.1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	-	-			-	57.337.600,00			-	Transforma si Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonom ian Masyarakat	-	-	250.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.03.1.03.0003	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan														
			<i>Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan</i>				20 Eksemplar	57.337.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Transforma si Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonom ian Masyarakat	-		250.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						735.859.000,00							1.920.000.000,00	
1.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	-	-			-	708.447.000,00						-	1.490.000.000,00	
	2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	-	-			-	75.740.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	850.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis														
			<i>Jumlah Daftar Arsip Dinamis</i>				10 Arsip	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.1.01.0010	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis				2 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.1.01.0012	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi														
			Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan				10 Lembaga	75.740.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		400.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	-	-			-	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.1.02.0006	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis														
			jumlah arsip yang di akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis di Provinsi				30 Arsip	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	-	-			-	632.707.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	540.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN														
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN				5 Pengguna	299.412.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		270.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi														
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi				5 Laporan	333.295.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		270.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2.	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	-	-			-	27.412.000,00						-	345.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.03.1.01	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	-	-			-	27.412.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	270.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.03.1.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun														
			Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				5 Arsip	27.412.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		270.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.03.1.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	75.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.03.1.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi														
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi				30 Daftar	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		75.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
3.	2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	-	-			-	0,00						-	85.000.000,00	
	2.24.04.1.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi	-	-			-	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	85.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.04.1.01.0004	Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup														
			Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkanJumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkan				2 SOP	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		85.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	J U M L A H							24.228.489.389,00							40.090.000.000,00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						43.623.331.591,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						43.063.689.086,00							0,00	
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						43.063.689.086,00							0,00	
1.	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	20.270.216.806,00						-	0,00	
	1.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	205.600.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	205.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	14.354.431.883,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 Orang/ Bulan	13.520.277.323,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	834.154.560,00	-	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	10.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	154.250.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	44.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	2.793.060.413,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	24.984.895,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	30.111.310,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	314.669.888,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	5.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	2.075.102.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	30.692.320,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	312.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.036.174.510,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	11.027.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	419.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	66.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.538.897.010,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	716.700.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				10 Unit	317.060.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	399.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	-			-	200.000.000,00						-	0,00	
	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	-	-			-	200.000.000,00			-	Melanjutka n Pembang unan Berbasis Desa	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan														
			Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Melanjutka n Pembang unan Berbasis Desa	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus														
			Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Melanjutka n Pembang unan Berbasis Desa	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.01.0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi														
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Melanjutka n Pembang unan Berbasis Desa	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	-	-			-	0,00			-	Melanjutka n Pembang unan Berbasis Desa	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.04.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Melanjutka n Pembangunan Berbasis Desa	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	-			-	20.738.792.280,00						-	0,00	
	1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	-	-			-	60.800.000,00			-	Melanjutka n Pembangunan Berbasis Desa	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.01.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi				1 Dokumen	60.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Melanjutka n Pembangunan Berbasis Desa	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.01.0011	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman														
			Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara				1 Sistem Informasi	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Melanjutka n Pembangunan Berbasis Desa	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.01.0014	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh														
			Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibina				1 Kelompok Masyarakat	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Melanjutka n Pembangunan Berbasis Desa	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Melanjutka n Pembangunan Berbasis Desa	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.01.0019	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
			Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				1 Rumah Tangga	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Melanjutka n Pembangunan Berbasis Desa	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	-	-			-	20.677.992.280,00			-	Melanjutka n Pembang unan Berbasis Desa	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha														
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki				400 Unit Rumah	13.661.062.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Melanjutka n Pembang unan Berbasis Desa	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugara n/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				7 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Melanjutka n Pembang unan Berbasis Desa	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.02.0010	Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha														
			Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dimukimkan Kembali				7 Hektar	918.572.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Infrastrukturu r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.02.0011	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha														
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				40 Unit Rumah	4.166.581.480,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Infrastrukturu r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.02.0013	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan				6 Hektar	955.076.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.02.0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha														
			Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar				6 Ha	976.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-	-			-	1.854.680.000,00						-	0,00	
	1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	-	-			-	1.854.680.000,00			-	Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman				12 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.1.01.0004	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang														
			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.1.01.0009	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum				12 Lokasi	1.854.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Melanjutka n Pembang unan Berbasis Desa	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						319.328.000,00							0,00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						319.328.000,00							0,00	
1.	2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	-	-			-	0,00						-	0,00	
	2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	-	-			-	0,00			-	Melanjutka n Pembang unan Berbasis Desa	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.10.03.1.01.0003	Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum														
			Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Melanjutka n Pembang unan Berbasis Desa	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	-	-			-	172.852.000,00						-	0,00	
	2.10.04.1.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	172.852.000,00			-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.10.04.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				1 Laporan	172.852.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	-	-			-	146.476.000,00						-	0,00	
	2.10.10.1.01	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	146.476.000,00			-	Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.10.10.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	146.476.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	X	NON URUSAN						240.314.505,00							0,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						240.314.505,00							0,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	240.314.505,00						-	0,00	
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	240.314.505,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	X.XX.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				74 Unit	240.314.505,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	J U M L A H							43.623.331.591,00							0,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS SOSIAL	-	-	-	-	-	119.222.112.376,00	-						124.760.628.928,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL														
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	75.886.473.296,29						-	72.304.288.800,00	
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	96.883.000,00			-	-	-	-	655.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	11.275.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		155.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Berita Acara	85.608.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			12 bulan	43.324.073.952,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran	-	49.415.640.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				372 Orang/ Bulan	42.904.706.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		49.000.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	331.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		335.640.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	4.659.080,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	82.788.872,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		60.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani	-			12 bulan	1.454.852.414,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administراس Perkantoran	-	1.530.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	25.021.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administراس Perkantoran		30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	273.327.514,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administراس Perkantoran		210.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				20 Paket	108.162.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administراس Perkantoran		70.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				20 Paket	444.246.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administarsi Perkantoran		300.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	604.095.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		920.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daera</i>	-			12 bulan	864.420.506,00			-	-	-	-	550.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				50 Unit	864.420.506,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		550.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	4.247.505.045,00			-	-	-	-	3.670.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	1.129.718.405,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		650.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	3.105.786.640,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.000.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 bulan	1.387.687.500,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran	-	2.865.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				15 Unit	584.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		600.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	522.797.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		2.000.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	280.790.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		265.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi</i>				5 Lembaga	180.064.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		1.500.000.000,00	DINAS SOSIAL
3.	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	<i>Persentase warga negara migran/ korban tindak kekerasan yang tertangani</i>	-			100 Persen	192.254.830,00						-	253.000.000,00	
	1.06.03.1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	<i>Jumlah Warga Negara Migran/KTK yang terlayani</i>	-			100 Orang	194.559.830,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Pemulangan Orang Terlantar	-	253.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.03.1.01.0003	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal														
			<i>Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota</i>				150 Orang	194.559.830,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Pemulangan Orang Terlantar		253.000.000,00	DINAS SOSIAL
4.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	<i>Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial</i>	-			100 Persen	30.721.856.104,00						-	43.497.883.688,00	
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	<i>Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang terlayani</i>	-			773 Orang	329.160.000,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Penyandang Disabilitas	-	250.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0021	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar</i>				12 Dokumen	329.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Penyandang Disabilitas		250.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	<i>Jumlah Anak Terlantar yang terlayani</i>	-			345 Orang	735.113.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Anak Terlantar	-	500.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti</i>				12 Dokumen	735.113.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Anak Terlantar		500.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	<i>Jumlah Gelandangan Pengemis yang terlayani.</i>	-			205 Orang	268.354.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Gelandangan dan Pengemis	-	151.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi				250 Orang	1.493.080.140,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Keluarga Miskin		2.870.456.440,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi				250 Orang	1.497.118.360,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nias, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pakpak Bharat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Keluarga Miskin		1.500.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi														
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin				33 Kab/Kota	33.337.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Keluarga Miskin		500.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan Perlayanan Dasar	-			100 Persen	1.248.376.849,00						-	1.825.000.000,00	
	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah korban bencana alam dan Sosial Yang Mendapatkan Layanan Dasar.	-			1200 Orang	1.526.835.249,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Korban Bencana Alam dan Sosial	-	3.635.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi				600 Orang	1.468.380.540,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Korban Bencana Alam dan Sosial		850.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi				100 Orang	7.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Korban Bencana Alam dan Sosial		1.500.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial														
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi				1150 Orang	104.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Korban Bencana Alam dan Sosial		310.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0011	Penyediaan Sandang														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL														
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Layanan Administrasi yang tertangan	-			100 Persen	75.886.473.296,29						-	72.304.288.800,00	
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			12 bulan	71.280.000,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran	-	155.600.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA BINJAI
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	71.280.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		155.600.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA BINJAI
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani	-			12 bulan	26.038.173,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran	-	135.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA BINJAI
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	950.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		20.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA BINJAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	24.368.173,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		60.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA BINJAI
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	350.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		45.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA BINJAI
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	370.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		10.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA BINJAI
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 bulan	380.200.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran	-	501.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA BINJAI
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	200.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		1.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA BINJAI
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	56.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		100.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA BINJAI
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	324.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		400.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA BINJAI
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			12 bulan	37.720.000,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran	-	210.500.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA BINJAI
	1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	36.820.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		100.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA BINJAI
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	300.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		100.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA BINJAI
	1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	600.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		10.500.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA BINJAI
2.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial	-			100 Persen	30.721.856.104,00						-	43.497.883.688,00	
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang terlayani.	-			334 Orang	3.522.226.789,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Lanjut Usia Terlantar	-	9.505.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA BINJAI
	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				200 Orang	2.719.196.587,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Lanjut Usia Terlantar		3.000.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA BINJAI
	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				200 Orang	60.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Lanjut Usia Terlantar		200.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA BINJAI
	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				200 Orang	30.641.222,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Lanjut Usia Terlantar		265.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA BINJAI
	1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				200 Orang	674.518.980,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Lanjut Usia Terlantar		5.880.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA BINJAI
	1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				10 Orang	370.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Lanjut Usia Terlantar		60.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA BINJAI
	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan														
			Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi				15 Orang	37.500.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Lanjut Usia Terlantar		100.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA BINJAI
		UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA KISARAN - RANTAU PRAPAT														
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL														
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Layanan Administrasi yang tertangan	-			100 Persen	75.886.473.296,29						-	72.304.288.800,00	
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			12 bulan	61.800.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran	-	100.560.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA KISARAN - RANTAU PRAPAT
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	4.487.200,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		5.500.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA KISARAN - RANTAU PRAPAT
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	26.280.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		100.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA KISARAN - RANTAU PRAPAT
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daera	-			12 bulan	2.961.250,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran	-	100.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA KISARAN - RANTAU PRAPAT
	1.06.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	2.961.250,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		100.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA KISARAN - RANTAU PRAPAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			12 bulan	655.000.000,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran	-	451.996.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA KISARAN - RANTAU PRAPAT
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Bulan Laporan	200.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		1.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA KISARAN - RANTAU PRAPAT
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	114.800.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		200.400.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA KISARAN - RANTAU PRAPAT
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	540.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		250.596.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA KISARAN - RANTAU PRAPAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			12 bulan	36.940.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran	-	175.020.800,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA KISARAN - RANTAU PRAPAT
	1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	35.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		60.020.800,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA KISARAN - RANTAU PRAPAT
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1.460.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		100.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA KISARAN - RANTAU PRAPAT
	1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				10 Unit	480.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		15.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA KISARAN - RANTAU PRAPAT
2.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	<i>Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial</i>	-			100 Persen	30.721.856.104,00						-	43.497.883.688,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang terlayani.	-			334 Orang	1.158.269.560,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Lanjut Usia Terlantar	-	2.728.354.800,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA KISARAN - RANTAU PRAPAT
	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				79 Orang	1.029.091.952,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Lanjut Usia Terlantar		2.053.354.800,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA KISARAN - RANTAU PRAPAT
	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				79 Orang	23.700.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Lanjut Usia Terlantar		105.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA KISARAN - RANTAU PRAPAT
	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				79 Orang	19.077.608,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Lanjut Usia Terlantar		130.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA KISARAN - RANTAU PRAPAT
	1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				79 Orang	74.400.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Lanjut Usia Terlantar		400.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA KISARAN - RANTAU PRAPAT
	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan														
			Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi				15 Orang	12.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Lanjut Usia Terlantar		40.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA KISARAN - RANTAU PRAPAT
		UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA RUNGU WICARA DAN LANJUT USIA PEMATANGSIANTAR														
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL														
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani	-			100 Persen	75.886.473.296,29						-	72.304.288.800,00	
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			12 bulan	61.800.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran	-	100.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA RUNGU WICARA DAN LANJUT USIA PEMATANGSIANTAR
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	61.800.000,00	Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrtasi Perkantoran		100.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA RUNGU WICARA DAN LANJUT USIA PEMATANGSIANTAR
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrtasi yang tertangani	-			12 bulan	6.077.716,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran	-	262.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA RUNGU WICARA DAN LANJUT USIA PEMATANGSIANTAR
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	4.818.745,00	Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		22.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA RUNGU WICARA DAN LANJUT USIA PEMATANGSIANTAR
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	0,00	Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrtasi Perkantoran		100.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA RUNGU WICARA DAN LANJUT USIA PEMATANGSIANTAR
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				4 Paket	1.258.971,00	Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		40.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA RUNGU WICARA DAN LANJUT USIA PEMATANGSIANTAR
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	0,00	Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		100.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA RUNGU WICARA DAN LANJUT USIA PEMATANGSIANTAR
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	100.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA RUNGU WICARA DAN LANJUT USIA PEMATANGSIANTAR
	1.06.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				20 Unit	0,00	Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA RUNGU WICARA DAN LANJUT USIA PEMATANGSIANTAR
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			12 bulan	298.100.000,00			-	-	Administrasi Perkantoran	-	352.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA RUNGU WICARA DAN LANJUT USIA PEMATANGSIANTAR
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	500.000,00	Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Administrasi Perkantoran		2.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA RUNGU WICARA DAN LANJUT USIA PEMATANGSIANTAR
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	45.600.000,00	Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Administrasi Perkantoran		100.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA RUNGU WICARA DAN LANJUT USIA PEMATANGSIANTAR
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	252.000.000,00	Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Administrtasi Perkantoran		250.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA RUNGU WICARA DAN LANJUT USIA PEMATANGSIANTAR
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			12 bulan	0,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrtasi Perkantoran	-	600.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA RUNGU WICARA DAN LANJUT USIA PEMATANGSIANTAR
	1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	0,00	Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrtasi Perkantoran		100.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA RUNGU WICARA DAN LANJUT USIA PEMATANGSIANTAR
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	0,00	Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrtasi Perkantoran		500.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA RUNGU WICARA DAN LANJUT USIA PEMATANGSIANTAR
2.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	<i>Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial</i>	-			100 Persen	1.184.812.760,00						-	1.976.956.540,00	
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	<i>Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang terlayani</i>	-			25 Orang	642.603.041,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrtasi Perkantoran	-	1.049.956.540,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA RUNGU WICARA DAN LANJUT USIA PEMATANGSIANTAR
	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				25 Orang	329.876.704,00	Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		400.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA RUNGU WICARA DAN LANJUT USIA PEMATANGSIANTAR
	1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				25 Orang	107.798.558,00	Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		195.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA RUNGU WICARA DAN LANJUT USIA PEMATANGSIANTAR
	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				25 Orang	11.168.056,00	Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		30.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA RUNGU WICARA DAN LANJUT USIA PEMATANGSIANTAR
	1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				25 Orang	185.037.960,00	Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		274.956.540,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA RUNGU WICARA DAN LANJUT USIA PEMATANGSIANTAR
	1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				25 Orang	8.721.763,00	Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		150.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA RUNGU WICARA DAN LANJUT USIA PEMATANGSIANTAR
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Pant i	Jumlah Lanjut Usia Terlan tar yang terlayani.	-			30 Orang	542.209.719,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Lanjut Usia Terlanta r	-	927.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA RUNGU WICARA DAN LANJUT USIA PEMATANGSIANTAR
	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				30 Orang	388.513.864,00	Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Lanjut Usia Terlanta r		400.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA RUNGU WICARA DAN LANJUT USIA PEMATANGSIANTAR
	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				30 Orang	2.125.788,00	Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Lanjut Usia Terlanta r		85.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA RUNGU WICARA DAN LANJUT USIA PEMATANGSIANTAR
	1.06.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi				10 Orang	4.205.696,00	Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Lanjut Usia Terlantar		100.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA RUNGU WICARA DAN LANJUT USIA PEMATANGSIANTAR
	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				30 Orang	9.414.371,00	Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Lanjut Usia Terlantar		32.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA RUNGU WICARA DAN LANJUT USIA PEMATANGSIANTAR
	1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				30 Orang	129.600.000,00	Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Lanjut Usia Terlantar		200.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA RUNGU WICARA DAN LANJUT USIA PEMATANGSIANTAR
	1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				30 Orang	3.850.000,00	Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Lanjut Usia Terlantar		100.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA RUNGU WICARA DAN LANJUT USIA PEMATANGSIANTAR
	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi</i>				5 Orang	4.500.000,00	Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Lanjut Usia Terlantar		10.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA RUNGU WICARA DAN LANJUT USIA PEMATANGSIANTAR
	X	NON URUSAN						0,00							100.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						0,00							100.000.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani</i>	-			100 Persen	0,00						-	100.000.000,00	
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			12 bulan	0,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	-	-	100.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA RUNGU WICARA DAN LANJUT USIA PEMATANGSIANTAR
	X.XX.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				5 Unit	0,00	Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	-		100.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA RUNGU WICARA DAN LANJUT USIA PEMATANGSIANTAR
		UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA SIBORONG-BORONG														
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL														
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani</i>	-			100 Persen	75.886.473.296,29						-	72.304.288.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			12 bulan	71.280.000,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran	-	85.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA SIBORONG-BORONG
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	71.280.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		85.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA SIBORONG-BORONG
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani	-			12 bulan	50.771.051,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran	-	190.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA SIBORONG-BORONG
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	8.177.550,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		15.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA SIBORONG-BORONG
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	17.113.501,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		25.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA SIBORONG-BORONG
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	6.020.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		50.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA SIBORONG-BORONG
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	19.460.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		100.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA SIBORONG-BORONG
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			12 bulan	93.749.920,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran	-	15.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA SIBORONG-BORONG
	1.06.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	346.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		500.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA SIBORONG-BORONG
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			12 bulan	36.820.000,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran	-	60.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA SIBORONG-BORONG
	1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	36.820.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		50.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA SIBORONG-BORONG
	1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		10.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA SIBORONG-BORONG
2.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	<i>Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial</i>	-			100 Persen	30.721.856.104,00						-	43.497.883.688,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Anak Terlantar yang terlayani	-			80 Orang	1.243.362.123,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertambahan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Anak Terlantar	-	2.570.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA SIBORONG-BORONG
	1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan														
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi				80 Orang	157.718.980,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertambahan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Anak Terlantar		350.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA SIBORONG-BORONG
	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				80 Orang	30.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertambahan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Anak Terlantar		50.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA SIBORONG-BORONG
	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				80 Orang	9.966.697,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertambahan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Anak Terlantar		140.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA SIBORONG-BORONG
	1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				80 Orang	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan. kemiskinan.	-	Anak Terlantar		10.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA SIBORONG-BORONG
	1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				80 Orang	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Anak Terlantar		10.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA SIBORONG-BORONG
	1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				80 Orang	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan. kemiskinan.	-	Anak Terlantar		10.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA SIBORONG-BORONG
	1.06.04.1.02.0015	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				80 Orang	1.045.676.446,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Anak Terlantar		2.000.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA SIBORONG-BORONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang terlayani.	-			30 Orang	603.592.069,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Lanjut Usia Terlantar	-	1.190.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA SIBORONG-BORONG
	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				30 Orang	394.181.715,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Lanjut Usia Terlantar		500.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA SIBORONG-BORONG
	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				30 Orang	11.250.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Lanjut Usia Terlantar		100.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA SIBORONG-BORONG
	1.06.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi				30 Orang	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Lanjut Usia Terlantar		100.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA SIBORONG-BORONG
	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				30 Orang	14.560.354,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Lanjut Usia Terlantar		55.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA SIBORONG-BORONG
	1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				30 Orang	177.600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Lanjut Usia Terlantar		315.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA SIBORONG-BORONG
	1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				30 Orang	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Lanjut Usia Terlantar		10.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA SIBORONG-BORONG
	1.06.04.1.03.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				30 Orang	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Lanjut Usia Terlantar		10.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA SIBORONG-BORONG
	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi				30 Orang	6.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Lanjut Usia Terlantar		100.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA SIBORONG-BORONG
		UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK REMAJA TANJUNG MORAWA														
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL														
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani	-			100 Persen	75.886.473.296,29						-	72.304.288.800,00	
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			12 bulan	61.800.000,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran	-	62.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK REMAJA TANJUNG MORAWA
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	61.800.000,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		62.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK REMAJA TANJUNG MORAWA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	-			12 bulan	45.302.578,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran	-	66.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK REMAJA TANJUNG MORAWA
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				10 Paket	5.658.873,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		20.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK REMAJA TANJUNG MORAWA
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				10 Paket	19.222.005,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		20.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK REMAJA TANJUNG MORAWA
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	9.321.700,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		11.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK REMAJA TANJUNG MORAWA
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	11.100.000,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		15.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK REMAJA TANJUNG MORAWA
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 bulan	91.841.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran	-	10.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK REMAJA TANJUNG MORAWA
	1.06.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				20 Unit	91.841.500,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		10.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK REMAJA TANJUNG MORAWA
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 bulan	425.894.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran	-	428.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK REMAJA TANJUNG MORAWA
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	494.000,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		1.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK REMAJA TANJUNG MORAWA
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	76.800.000,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		77.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK REMAJA TANJUNG MORAWA
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	348.600.000,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		350.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK REMAJA TANJUNG MORAWA
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	9.975.000,00			-	-	-	-	23.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK REMAJA TANJUNG MORAWA
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK REMAJA TANJUNG MORAWA
	1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	9.975.000,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK REMAJA TANJUNG MORAWA
2.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial	-			100 Persen	30.721.856.104,00						-	43.497.883.688,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				62 Orang	294.113.880,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Anak Putus Sekolah		300.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK REMAJA TANJUNG MORAWA
	1.06.04.1.05.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar														
			Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi				62 Orang	406.244.128,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Anak Putus Sekolah		405.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK REMAJA TANJUNG MORAWA
	1.06.04.1.05.0010	Pemulangan ke Daerah Asal														
			Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal				100 Orang	20.000.000,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Anak Putus Sekolah		37.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK REMAJA TANJUNG MORAWA
		UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS BINJAI														
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL														
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani	-			100 Persen	75.886.473.296,29						-	72.304.288.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	9.219.330,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		25.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS BINJAI
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				125 Laporan	0,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		10.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS BINJAI
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 bulan	7.618.452,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran	-	15.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS BINJAI
	1.06.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	7.618.452,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		15.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS BINJAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			12 bulan	339.803.680,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran	-	471.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS BINJAI
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	600.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		1.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS BINJAI
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	58.400.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		70.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS BINJAI
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	280.803.680,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		400.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS BINJAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 bulan	1.888.020,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran	-	40.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS BINJAI
	1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	0,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		25.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS BINJAI
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1.888.020,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		15.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS BINJAI
2.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial	-			100 Persen	30.721.856.104,00						-	43.497.883.688,00	
	1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah Gelandangan Pengemis yang terlayani.	-			125 Orang	2.042.818.999,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Gelandangan dan Pengemis	-	1.922.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS BINJAI
	1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				125 Orang	1.518.495.554,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Gelandangan dan Pengemis		1.600.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS BINJAI
	1.06.04.1.04.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				125 Orang	34.500.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Gelandangan dan Pengemis		2.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS BINJAI
	1.06.04.1.04.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				125 Orang	84.305.274,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Gelandangan dan Pengemis		50.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS BINJAI
	1.06.04.1.04.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				125 Orang	254.518.980,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Gelandangan dan Pengemis		200.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS BINJAI
	1.06.04.1.04.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi				125 Orang	150.999.191,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Gelandangan dan Pengemis		70.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS BINJAI
		UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA NETRA DAN TUNA DAKSA TEBING TINGGI														
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL														
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani	-			100 Persen	75.886.473.296,29						-	72.304.288.800,00	
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			12 bulan	71.280.000,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran	-	73.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA NETRA DAN TUNA DAKSA TEBING TINGGI
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	71.280.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		73.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA NETRA DAN TUNA DAKSA TEBING TINGGI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-			12 bulan	37.746.011,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran	-	85.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA NETRA DAN TUNA DAKSA TEBING TINGGI
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	5.119.821,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		6.500.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA NETRA DAN TUNA DAKSA TEBING TINGGI
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				8 Paket	10.809.590,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		35.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA NETRA DAN TUNA DAKSA TEBING TINGGI
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				8 Paket	3.316.600,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		8.500.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA NETRA DAN TUNA DAKSA TEBING TINGGI
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	18.500.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		35.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA NETRA DAN TUNA DAKSA TEBING TINGGI
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 bulan	18.500.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran	-	50.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA NETRA DAN TUNA DAKSA TEBING TINGGI
	1.06.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				8 Unit	18.500.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		50.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA NETRA DAN TUNA DAKSA TEBING TINGGI
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 bulan	874.815.040,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran	-	927.950.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA NETRA DAN TUNA DAKSA TEBING TINGGI
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	1.032.500,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		1.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA NETRA DAN TUNA DAKSA TEBING TINGGI
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	116.800.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		115.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA NETRA DAN TUNA DAKSA TEBING TINGGI
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	756.982.540,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		811.950.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA NETRA DAN TUNA DAKSA TEBING TINGGI
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			12 bulan	44.456.040,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran	-	379.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA NETRA DAN TUNA DAKSA TEBING TINGGI
	1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	38.820.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		25.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA NETRA DAN TUNA DAKSA TEBING TINGGI
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		350.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA NETRA DAN TUNA DAKSA TEBING TINGGI
	1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	5.636.040,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		4.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA NETRA DAN TUNA DAKSA TEBING TINGGI
2.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial	-			100 Persen	30.721.856.104,00						-	43.497.883.688,00	
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang terlayani	-			100 Orang	1.907.236.904,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Penyandang Disabilitas	-	2.261.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA NETRA DAN TUNA DAKSA TEBING TINGGI
	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi</i>				100 Orang	453.956.940,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Penyandang Disabilitas		680.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA NETRA DAN TUNA DAKSA TEBING TINGGI
	1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi</i>				100 Orang	31.191.455,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Penyandang Disabilitas		82.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA NETRA DAN TUNA DAKSA TEBING TINGGI
	1.06.04.1.01.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi</i>				50 Orang	3.633.840,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Penyandang Disabilitas		10.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA NETRA DAN TUNA DAKSA TEBING TINGGI
		UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK PADANG SIDEMPUN - PANYABUNGAN						2.270.838.189,50							2.576.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.270.838.189,50							2.576.000.000,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						2.270.838.189,50							2.576.000.000,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani</i>	-			100 Persen	75.886.473.296,29						-	72.304.288.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			12 bulan	61.800.000,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran	-	65.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK PADANG SIDEMPUAN - PANYABUNGAN
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	61.800.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padangside mpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		65.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK PADANG SIDEMPUAN - PANYABUNGAN
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum yang tertangani	-			12 bulan	77.709.677,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran	-	103.500.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK PADANG SIDEMPUAN - PANYABUNGAN
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	5.262.884,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padangside mpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		15.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK PADANG SIDEMPUAN - PANYABUNGAN
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15 Paket	18.367.365,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padangside mpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		25.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK PADANG SIDEMPUAN - PANYABUNGAN
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	2.969.428,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padangside mpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		3.500.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK PADANG SIDEMPUAN - PANYABUNGAN
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	51.110.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padangside mpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		60.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK PADANG SIDEMPUAN - PANYABUNGAN
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 bulan	9.577.410,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran	-	15.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK PADANG SIDEMPUAN - PANYABUNGAN
	1.06.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	9.577.410,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padangside mpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administ rasi Perkantoran		15.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK PADANG SIDEMPUAN - PANYABUNGAN
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 bulan	474.635.665,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran	-	466.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK PADANG SIDEMPUAN - PANYABUNGAN
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	500.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		1.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK PADANG SIDEMPUAN - PANYABUNGAN
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	60.135.665,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padangside mpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		65.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK PADANG SIDEMPUAN - PANYABUNGAN
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	414.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padangside mpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		400.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK PADANG SIDEMPUAN - PANYABUNGAN
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			12 bulan	96.542.000,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran	-	191.500.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK PADANG SIDEMPUAN - PANYABUNGAN
	1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	22.092.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		36.500.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK PADANG SIDEMPUAN - PANYABUNGAN
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	70.500.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padangside mpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		150.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK PADANG SIDEMPUAN - PANYABUNGAN
	1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				85 Orang	375.911.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padangside mpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Anak Terlantar		400.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK PADANG SIDEMPUNAN - PANYABUNGAN
	1.06.04.1.02.0015	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				85 Orang	1.123.595.828,50	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padangside mpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Anak Terlantar		1.200.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK PADANG SIDEMPUNAN - PANYABUNGAN
		UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS PINANG SORI														
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL														
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani	-			100 Persen	75.886.473.296,29						-	72.304.288.800,00	
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			12 bulan	61.800.000,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran	-	65.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS PINANG SORI
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				4 Paket	980.000,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		1.500.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS PINANG SORI
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	42.175.000,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		45.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS PINANG SORI
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			12 bulan	2.961.250,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran	-	3.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS PINANG SORI
	1.06.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				10 Unit	2.961.250,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		3.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS PINANG SORI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			12 bulan	414.684.000,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran	-	461.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS PINANG SORI
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	500.000,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		1.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS PINANG SORI
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	37.000.000,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		60.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS PINANG SORI
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	377.184.000,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		400.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS PINANG SORI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			12 bulan	41.016.700,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran	-	63.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS PINANG SORI
	1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	36.820.000,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		40.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS PINANG SORI
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1.800.000,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		20.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS PINANG SORI
	1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				5 Unit	2.396.700,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		3.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS PINANG SORI
2.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	<i>Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial</i>	-			100 Persen	30.721.856.104,00						-	43.497.883.688,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	<i>Jumlah Gelandangan Pengemis yang terlayani.</i>	-			80 Orang	1.538.328.904,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Gelandangan dan Pengemis	-	1.306.500.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS PINANG SORI
	1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi</i>				80 Orang	1.018.688.840,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Gelandangan dan Pengemis		1.100.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS PINANG SORI
	1.06.04.1.04.0002	Penyediaan Sandang														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi</i>				80 Orang	43.000.000,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Gelandangan dan Pengemis		15.500.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS PINANG SORI
	1.06.04.1.04.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi</i>				80 Orang	27.402.873,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Gelandangan dan Pengemis		30.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS PINANG SORI
	1.06.04.1.04.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi</i>				80 Orang	134.400.000,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Gelandangan dan Pengemis		135.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS PINANG SORI
	1.06.04.1.04.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar														
			<i>Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi</i>				80 Orang	314.837.191,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Gelandangan dan Pengemis		25.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS PINANG SORI
	1.06.04.1.04.0010	Pemulangan ke Daerah Asal														
			<i>Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi</i>				18 Orang	0,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Gelandangan dan Pengemis		1.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS PINANG SORI
		UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK SIDIKALANG - KABANJAHE						2.195.141.137,00							2.962.100.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.195.141.137,00							2.962.100.000,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						2.195.141.137,00							2.962.100.000,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani</i>	-			100 Persen	75.886.473.296,29						-	72.304.288.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			12 bulan	63.840.000,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran	-	65.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK SIDIKALANG - KABANJAHE
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	63.840.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		65.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK SIDIKALANG - KABANJAHE
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum yang tertangani	-			12 bulan	38.938.270,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran	-	107.600.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK SIDIKALANG - KABANJAHE
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	1.025.208,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		1.200.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK SIDIKALANG - KABANJAHE
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	7.448.722,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		5.200.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK SIDIKALANG - KABANJAHE
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	1.124.340,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		1.200.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK SIDIKALANG - KABANJAHE
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	29.340.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		100.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK SIDIKALANG - KABANJAHE
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			12 bulan	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran	-	17.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK SIDIKALANG - KABANJAHE
	1.06.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	390.180.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		500.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK SIDIKALANG - KABANJAHE
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 bulan	21.904.710,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran	-	65.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK SIDIKALANG - KABANJAHE
	1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	21.904.710,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		35.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK SIDIKALANG - KABANJAHE
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		30.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK SIDIKALANG - KABANJAHE
2.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial	-			undefined undefined	30.721.856.104,00						-	43.497.883.688,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				120 Orang	5.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Anak Terlantar		100.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK SIDIKALANG - KABANJAHE
	1.06.04.1.02.0015	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				120 Orang	1.564.724.094,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Anak Terlantar		1.600.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK SIDIKALANG - KABANJAHE
		UPTD PELAYANAN SOSIAL WANITA TUNA SUSILA DAN TUNA LARAS BERASTAGI														
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL														
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani	-			100 Persen	75.886.473.296,29						-	72.304.288.800,00	
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			12 bulan	73.680.000,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran	-	75.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL WANITA TUNA SUSILA DAN TUNA LARAS BERASTAGI
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	2.200.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		3.850.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL WANITA TUNA SUSILA DAN TUNA LARAS BERASTAGI
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	87.966.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		45.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL WANITA TUNA SUSILA DAN TUNA LARAS BERASTAGI
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daera	-			12 bulan	120.025.461,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran	-	500.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL WANITA TUNA SUSILA DAN TUNA LARAS BERASTAGI
	1.06.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				100 Unit	120.025.461,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		500.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL WANITA TUNA SUSILA DAN TUNA LARAS BERASTAGI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			12 bulan	531.651.044,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran	-	471.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL WANITA TUNA SUSILA DAN TUNA LARAS BERASTAGI
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	200.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		1.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL WANITA TUNA SUSILA DAN TUNA LARAS BERASTAGI
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	68.035.044,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		70.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL WANITA TUNA SUSILA DAN TUNA LARAS BERASTAGI
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	463.416.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		400.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL WANITA TUNA SUSILA DAN TUNA LARAS BERASTAGI
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	594.640.000,00			-	-	-	-	281.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL WANITA TUNA SUSILA DAN TUNA LARAS BERASTAGI
	1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	36.820.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		51.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL WANITA TUNA SUSILA DAN TUNA LARAS BERASTAGI
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	556.320.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		210.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL WANITA TUNA SUSILA DAN TUNA LARAS BERASTAGI
	1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	1.500.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL WANITA TUNA SUSILA DAN TUNA LARAS BERASTAGI
2.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial	-			100 Persen	30.721.856.104,00						-	43.497.883.688,00	
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang terlayani	-			150 Orang	2.747.642.265,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Penyandang Disabilitas	-	2.505.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL WANITA TUNA SUSILA DAN TUNA LARAS BERASTAGI
	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				150 Orang	2.010.099.458,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Penyandang Disabilitas		2.100.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL WANITA TUNA SUSILA DAN TUNA LARAS BERASTAGI
	1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				150 Orang	79.851.020,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertubuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Penyandang Disabilitas		55.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL WANITA TUNA SUSILA DAN TUNA LARAS BERASTAGI
	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				150 Orang	233.351.787,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertubuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Penyandang Disabilitas		100.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL WANITA TUNA SUSILA DAN TUNA LARAS BERASTAGI
	1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				150 Orang	424.340.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertubuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Penyandang Disabilitas		250.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL WANITA TUNA SUSILA DAN TUNA LARAS BERASTAGI
	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah PPKS/PMKS lainnya yang terlayani	-			50 Orang	1.032.345.546,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertubuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran	-	980.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL WANITA TUNA SUSILA DAN TUNA LARAS BERASTAGI
	1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				50 Orang	751.324.832,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		800.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL WANITA TUNA SUSILA DAN TUNA LARAS BERASTAGI
	1.06.04.1.05.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				30 Orang	7.269.240,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		10.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL WANITA TUNA SUSILA DAN TUNA LARAS BERASTAGI
	1.06.04.1.05.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				30 Orang	11.469.597,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		20.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL WANITA TUNA SUSILA DAN TUNA LARAS BERASTAGI
	1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				30 Orang	155.109.218,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		110.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL WANITA TUNA SUSILA DAN TUNA LARAS BERASTAGI
	1.06.04.1.05.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi				20 Orang	97.172.659,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		20.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL WANITA TUNA SUSILA DAN TUNA LARAS BERASTAGI
	1.06.04.1.05.0010	Pemulangan ke Daerah Asal														
			Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal				20 Orang	10.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Administrasi Perkantoran		20.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL WANITA TUNA SUSILA DAN TUNA LARAS BERASTAGI
		UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA BELIDAHAN SICANANG						4.588.556.108,50							6.775.880.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.587.495.108,50							6.745.880.000,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						4.587.495.108,50							6.745.880.000,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	75.886.473.296,29						-	72.304.288.800,00	
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	71.280.000,00			-	-	-	-	71.280.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA BELIDAHAN SICANANG
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	71.280.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		71.280.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA BELIDAHAN SICANANG
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	18.418.475,00			-	-	-	-	53.500.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA BELIDAHAN SICANANG
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	8.127.475,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA BELIDAHAN SICANANG
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	2.891.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.500.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA BELIDAHAN SICANANG
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	7.400.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA BELIDAHAN SICANANG
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	15.415.310,00			-	-	-	-	20.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA BELIDAHAN SICANANG
	1.06.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	15.415.310,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA BELIDAHAN SICANANG
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	559.500.000,00			-	-	-	-	656.100.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA BELIDAHAN SICANANG
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	500.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA BELIDAHAN SICANANG
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	307.000.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		255.600.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA BELIDAHAN SICANANG
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	252.000.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		400.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA BELIDAHAN SICANANG
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	31.332.150,00			-	-	-	-	160.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA BELIDAHAN SICANANG
	1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	22.317.840,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA BELIDAHAN SICANANG
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2.764.310,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA BELIDAHAN SICANANG
	1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	6.250.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA BELIDAHAN SICANANG
2.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-			-	30.721.856.104,00						-	43.497.883.688,00	
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	-	-			-	3.891.549.173,50			-	-	-	-	5.785.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA BELIDAHAN SICANANG
	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				301 Orang	3.714.926.107,50	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA BELIDAHAN SICANANG
	1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				301 Orang	13.185.200,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		185.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA BELIDAHAN SICANANG
	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				301 Orang	99.117.866,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		400.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA BELIDAHAN SICANANG
	1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				301 Orang	64.320.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA BELIDAHAN SICANANG
	X	NON URUSAN						1.061.000,00							30.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						1.061.000,00							30.000.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	1.061.000,00						-	30.000.000,00	
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.061.000,00			-	-	-	-	30.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA BELIDAHAN SICANANG
	X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	1.061.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA BELIDAHAN SICANANG
		UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA LAU SIMOMO - HUTA SALEM														
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL														
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	75.886.473.296,29						-	72.304.288.800,00	
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	71.280.000,00			-	-	-	-	80.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA LAU SIMOMO - HUTA SALEM
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	71.280.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		80.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA LAU SIMOMO - HUTA SALEM
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	51.894.632,00			-	-	-	-	146.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA LAU SIMOMO - HUTA SALEM
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	4.538.450,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA LAU SIMOMO - HUTA SALEM
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	33.368.682,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA LAU SIMOMO - HUTA SALEM
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	757.500,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA LAU SIMOMO - HUTA SALEM
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	13.230.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		90.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA LAU SIMOMO - HUTA SALEM
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	86.617.300,00			-	-	-	-	100.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA LAU SIMOMO - HUTA SALEM
	1.06.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				50 Unit	86.617.300,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA LAU SIMOMO - HUTA SALEM
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	527.704.000,00			-	-	-	-	581.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA LAU SIMOMO - HUTA SALEM
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	600.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA LAU SIMOMO - HUTA SALEM
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	111.452.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		130.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA LAU SIMOMO - HUTA SALEM
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	415.652.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		450.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA LAU SIMOMO - HUTA SALEM
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	24.092.000,00			-	-	-	-	65.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA LAU SIMOMO - HUTA SALEM
	1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	20.092.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA LAU SIMOMO - HUTA SALEM
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA LAU SIMOMO - HUTA SALEM
	1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				10 Unit	4.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA LAU SIMOMO - HUTA SALEM
2.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-			-	30.721.856.104,00						-	43.497.883.688,00	
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	-	-			-	2.352.081.148,00			-	-	-	-	2.620.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA LAU SIMOMO - HUTA SALEM
	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				187 Orang	2.217.523.506,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.500.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA LAU SIMOMO - HUTA SALEM
	1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				187 Orang	57.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA LAU SIMOMO - HUTA SALEM
	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				187 Orang	34.357.642,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		45.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA LAU SIMOMO - HUTA SALEM
	1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				187 Orang	31.200.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		45.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA LAU SIMOMO - HUTA SALEM
	1.06.04.1.01.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				187 Orang	12.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA LAU SIMOMO - HUTA SALEM
		UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK GUNUNG SITOLI						1.347.093.161,00							1.745.304.348,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.347.093.161,00							1.745.304.348,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						1.347.093.161,00							1.745.304.348,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	75.886.473.296,29						-	72.304.288.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	61.800.000,00			-	-	-	-	65.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK GUNUNG SITOLI
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				60 Dokumen	61.800.000,00	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		65.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK GUNUNG SITOLI
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	54.468.738,00			-	-	-	-	103.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK GUNUNG SITOLI
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				8 Paket	2.748.065,00	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK GUNUNG SITOLI
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				10 Paket	7.380.673,00	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK GUNUNG SITOLI
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	44.340.000,00	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		78.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK GUNUNG SITOLI
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	2.979.219,00			-	-	-	-	55.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK GUNUNG SITOLI
	1.06.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				8 Unit	2.979.219,00	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		55.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK GUNUNG SITOLI
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	212.873.000,00			-	-	-	-	217.232.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK GUNUNG SITOLI
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.000.000,00	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK GUNUNG SITOLI
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	30.000.000,00	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		44.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK GUNUNG SITOLI
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	181.873.000,00	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		172.232.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK GUNUNG SITOLI
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.000.000,00			-	-	-	-	170.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK GUNUNG SITOLI
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK GUNUNG SITOLI
	1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	1.000.000,00	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK GUNUNG SITOLI
2.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-			-	30.721.856.104,00						-	43.497.883.688,00	
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	-	-			-	1.013.972.204,00			-	-	-	-	1.135.072.348,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK GUNUNG SITOLI
	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				60 Orang	17.875.762,00	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK GUNUNG SITOLI
	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				60 Orang	9.154.754,00	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK GUNUNG SITOLI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				60 Orang	201.600.000,00	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		240.072.348,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK GUNUNG SITOLI
	1.06.04.1.02.0015	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				60 Orang	785.341.688,00	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		800.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK GUNUNG SITOLI
		UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK BALITA MEDAN						1.082.742.729,00							1.190.460.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.082.742.729,00							1.190.460.000,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						1.082.742.729,00							1.190.460.000,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	75.886.473.296,29						-	72.304.288.800,00	
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	63.840.000,00			-	-	-	-	62.160.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK BALITA MEDAN
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	63.840.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		62.160.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK BALITA MEDAN
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	9.669.990,00			-	-	-	-	56.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK BALITA MEDAN
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	1.848.020,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK BALITA MEDAN
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	5.846.970,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK BALITA MEDAN
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	1.975.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK BALITA MEDAN
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	5.401.406,00			-	-	-	-	2.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK BALITA MEDAN
	1.06.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	5.401.406,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK BALITA MEDAN
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	204.651.086,00			-	-	-	-	212.800.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK BALITA MEDAN
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	500.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		800.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK BALITA MEDAN
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	34.799.086,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK BALITA MEDAN
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	169.352.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		172.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK BALITA MEDAN
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	45.220.000,00			-	-	-	-	98.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK BALITA MEDAN
	1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	36.820.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		38.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK BALITA MEDAN
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK BALITA MEDAN
	1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	8.400.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		45.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK BALITA MEDAN
2.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-			-	30.721.856.104,00						-	43.497.883.688,00	
	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pant	-	-			-	753.960.247,00			-	-	-	-	759.500.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK BALITA MEDAN
	1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				60 Orang	512.177.837,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK BALITA MEDAN
	1.06.04.1.05.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				60 Orang	16.886.220,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.500.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK BALITA MEDAN
	1.06.04.1.05.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant Kewenangan Provinsi				60 Orang	10.426.802,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK BALITA MEDAN
	1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				60 Orang	204.865.058,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK BALITA MEDAN
	1.06.04.1.05.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				65 Orang	1.204.330,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		16.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK BALITA MEDAN
	1.06.04.1.05.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				60 Orang	6.000.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK BALITA MEDAN
	1.06.04.1.05.0010	Pemulangan ke Daerah Asal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal				20 Orang	2.400.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK BALITA MEDAN	
	J U M L A H							119.222.112.376,00							124.760.628.928,00		

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI						80.204.667.808,00							87.652.593.500,00	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN														
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH						80.204.667.808,00							87.652.593.500,00	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	65.443.117.808,00						-	69.550.883.500,00	
	6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	339.970.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	493.957.500,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	199.970.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		222.665.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		22.275.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		30.525.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		23.430.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		40.892.500,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		154.170.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	58.453.963.088,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	58.632.828.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				180 Orang/ Bulan	58.031.623.488,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		58.117.570.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	392.400.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		482.328.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	29.939.600,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		32.930.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	26.250.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	28.875.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	26.250.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		28.875.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	999.014.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	1.135.918.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	31.350.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		34.485.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	16.600.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		18.260.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				100 Orang	900.480.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		990.638.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				150 Orang	50.584.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		92.535.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.668.511.769,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	2.269.880.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	16.392.855,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		21.970.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	208.877.832,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		339.800.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	57.309.903,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		84.245.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	505.917.679,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		714.975.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	159.990.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		279.275.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	7.999.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		15.375.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	632.024.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		800.440.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	80.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		13.800.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	632.884.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.256.700.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	630.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		706.350.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	2.884.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		550.350.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	4.506.532.947,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	5.107.550.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		88.090.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	801.769.995,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		881.945.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	3.654.762.952,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		4.137.515.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	737.178.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	1.105.640.924,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				13 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		480.465.924,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	495.220.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		235.510.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	149.958.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		277.785.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	92.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		111.880.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
2.	6.01.02	PROGRAM - PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	-					13.208.398.000,00							- 15.799.427.000,00	
	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	-			-	7.556.527.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	11.807.657.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				72 Laporan	1.764.900.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		2.742.650.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				82 Laporan	1.107.300.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.134.650.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				8 Laporan	836.935.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.332.265.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	110.030.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		121.275.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota				24 Laporan	1.230.052.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.271.082.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.02.1.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal														
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				2 Kesepakatan	607.240.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		823.435.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				95 Dokumen	1.900.070.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.382.300.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-	-			-	3.628.843.000,00			-	-	-	-	3.991.770.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				1 Laporan	180.900.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		198.990.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</i>				50 Laporan	3.447.943.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		3.792.780.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-	-			-	1.553.152.000,00						-	2.302.283.000,00	
	6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-	-			-	211.692.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	430.845.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														
			<i>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun</i>				1 Rekomend asi	202.692.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		417.645.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.03.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan														
			<i>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun</i>				1 Rekomend asi	9.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		13.200.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	-	-			-	1.341.460.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	1.871.438.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah</i>				41 Perangkat Daerah	451.260.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		395.573.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				41 Perangkat Daerah	350.510.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		420.545.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				4 Kegiatan	499.690.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		961.745.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				41 Perangkat Daerah	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		93.575.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	J U M L A H							80.2024.667.808,00							87.652.593.500,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						50.390.798.857,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						50.390.798.857,00							0,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						50.390.798.857,00							0,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	44.857.969.175,00						-	0,00	
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	197.200.000,00			-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	197.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	14.804.122.107,00			-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				163 Orang/ Bulan	14.526.562.107,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	10.678.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	1.127.688.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				4 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	97.642.584,00			-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Paket	49.873.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	47.769.084,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	23.543.893.128,00			-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	786.970.547,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	22.721.922.581,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.719.604.420,00			-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				34 Unit	1.227.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	53.954.420,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	438.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	5.283.674.682,00						-	0,00	
	1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-			-	4.136.851.458,00			-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi				4 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0020	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				120 Laporan	849.980.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.1.01.0021	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan				180 laporan	2.923.062.458,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0022	Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat														
			Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat				4 Laporan	363.809.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	-	-			-	1.011.628.000,00			-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				4 Laporan	242.958.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0010	Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah				4 Laporan	240.434.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0012	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP				4 Laporan	528.236.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK ROKOK, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	-	-			-	199.318.000,00			-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.03.0007	Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				0 Laporan	199.318.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
3.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-	-			-	249.155.000,00						-	0,00		
	1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	-	-			-	284.195.000,00			-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.04.1.01.0009	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota															
			Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)				400 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.04.1.01.0023	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota															
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota				4 Laporan	284.195.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.04.1.01.0027	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri															
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait				4 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	J U M L A H							50.390.798.857,00							0,00		